PT Pembangkitan Jawa-Bali

STRENGTHENING SYNERGY, CREATING GREEN ENERGY

Memperkuat Sinergi,
Menciptakan Energi Hijau

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2021

STRENGTHENING SYNERGY, CREATING GREEN ENERGY

Memperkuat Sinergi, Menciptakan Energi Hijau

Semangat *Let's Jump to the New S-Curve* terus dibangkitkan dalam rangka untuk menggelorakan eksistensi PJB yang melandai di tengah kompetisi industri kelistrikan yang semakin ketat. JUMP merupakan singkatan *Join Forces, Unite, Move Faster*, dan *Perseverance*, dirancang mampu menggerakkan PJB sebagai grup, bersama-sama Anak Perusahaan PJB dan PLN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

'Sinergi' dan 'Energi' menjadi dua kata kunci yang akan membawa PJB dalam sebuah pola bisnis yang baru, dimana PJB terus memperkuat kolaborasi bersama semua pemangku kepentingan guna mendukung pengembangan energi yang lebih bersih. Semua ini menjadi tantangan, sekaligus kesempatan bagi PJB untuk *Go to Market* yaitu berkomitmen memperluas peluang potensi bisnis "*Beyond* KWh" baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

PJB keeps raising the spirit of Let's Jump to the New S-Curve in order to work up PJB existence of PJB which is receding amid the getting tighter competition in the electricity industry. JUMP, which stands for Join Forces, Unite, Move Faster, and Perseverance, is designed to be able to move PJB as a group, together with PJB and PLN Subsidiaries in supporting sustainable development.

'Synergy' and 'Energy' are the two keywords that will bring PJB into new business pattern, where PJB continues to strengthen collaboration with all stakeholders to support cleaner energy development. All of this is challenge as well as opportunity for PJB to Go to Market, namely committed to expanding "Beyond KWh" business potential opportunities both domestically and abroad.

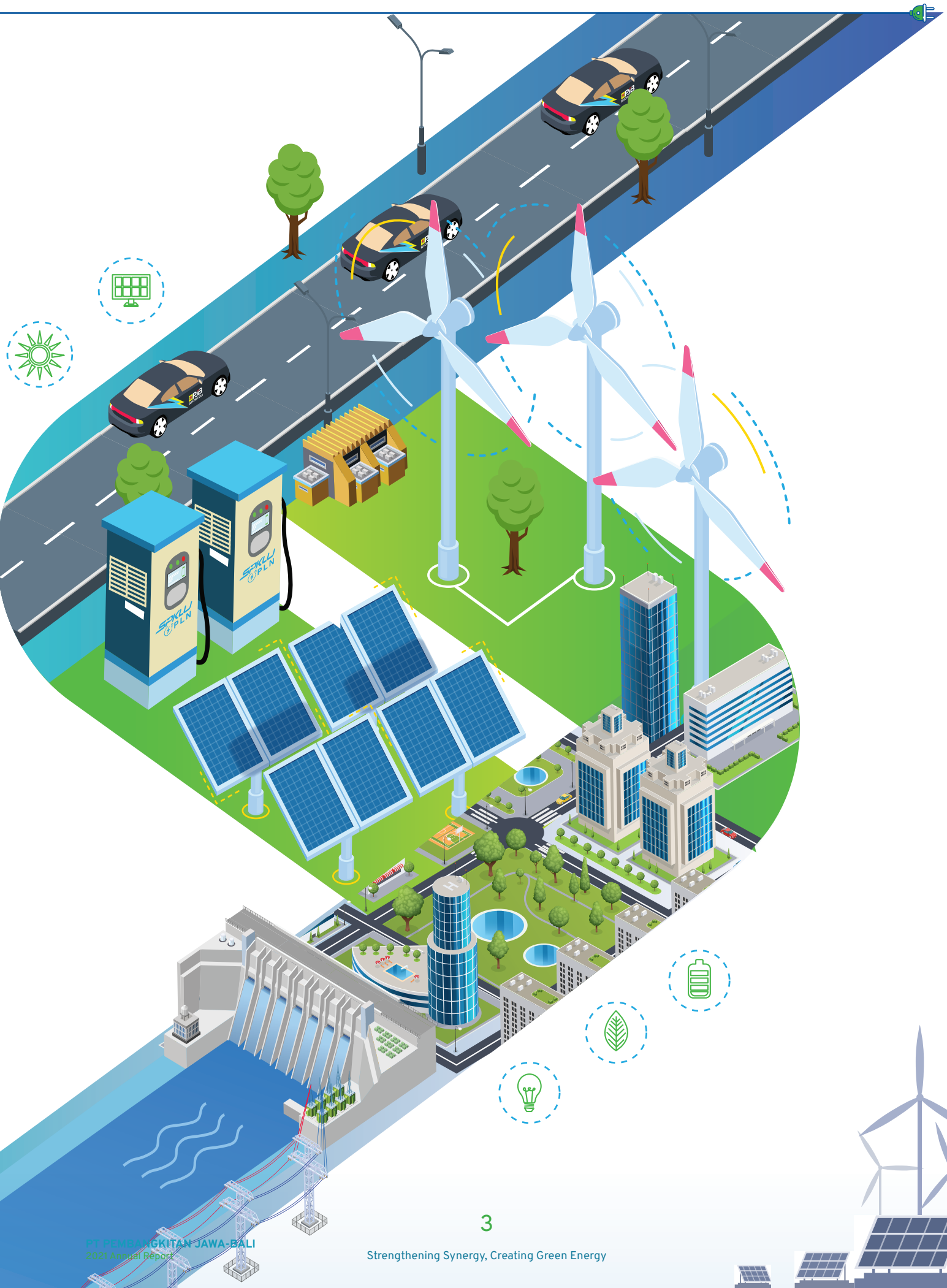

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

STRENGTHENING SYNERGY, CREATING GREEN ENERGY
MEMPERKUAT SINERGI, MENCIPTAKAN ENERGI HIJAU

Daftar Isi Table of Contents	04
Kesinambungan Tema Theme Continuity	08
Ringkasan Kinerja Utama 2021 2021 Key Performance	10
Penghargaan Tahun 2021 2021 Awards	12
Sertifikasi Tahun 2021 2021 Certification	20
Inovasi dan Sinergi Usaha yang *Solid*, untuk Masa Depan Energi Bersih Solid Business Innovation and Synergy, for a Clean Energy Future	28
Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Data Highlight	34
Peristiwa Penting 2021 Important Events in 2021	49

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
REPORT TO THE SHAREHOLDERS AND THE STAKEHOLDERS

Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners	62
Laporan Direksi Report from the Board of Directors	80
Surat Pernyataan Direksi Dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2021 PT Pembangkitan Jawa-Bali Statement Letter by the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding Responsibility for 2021 Annual Report of PT Pembangkitan Jawa-Bali	99
Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal PT Pembangkitan Jawa-Bali Statement Letter by the Board of Directors Regarding Responsibility for Risk Management and Internal Control System of PT Pembangkitan Jawa-Bali	101

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

Identitas Perusahaan Company Identity	106
Riwayat Singkat PJB Brief History of PJB	108
Jejak Langkah Milestone	108
Keterangan Perubahan Nama Perusahaan Information on the Company Name Changes	110
PJB Saat Ini PJB Currently	111
Bidang Usaha Business Field	113
Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on Articles of Association	113
Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini Current Business Activities	113
Uraian Segmen Usaha Business Segment Description	114
Produk dan Jasa Products and Services	115
Skema Penyaluran Energi Listrik Electrical Energy Distribution Scheme	128
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture	132
Struktur Organisasi Organizational Structure	136
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	138
Profil Direksi Profile of the Board of Directors	144
Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Sekretaris Perusahaan, Kepala SPI dan Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Education and Training for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Unit, as well as Head of Risk Management and Compliance Unit	150
Profil dan Pengembangan Kompetensi SDM HR Competency Profile and Development	158
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition of Shareholders	177

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Major and Controlling Shareholders 177

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition 177

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Share Ownership by the Board of Directors and the Board of Commissioners 178

Struktur Grup Perusahaan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Patungan
Company Group Structure, Subsidiaries, Associates and Joint Ventures 179

Sekilas Kinerja Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
Performance Overview on Subsidiaries and Associated Entities 184

Peta Wilayah Operasional
Operational Map 210

Alamat Kantor Perwakilan dan Unit Usaha
Address of Representative Office and Business Unit 212

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Company Supporting Professional Institutions 215

Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Share Listing 216

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities 216

Informasi *Website*
PJB Website 217

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
BUSINESS SUPPORT OVERVIEW

Sumber Daya Manusia
Human Capital 222

Teknologi Informasi
Information Technology 245

PJB *Integrated Management System* (PJB-IMS 2.0) 252

Manajemen Aset
Asset Management 257

Pengembangan Usaha
Business Development 263

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Analisis Industri
Industry Analysis 268

Tinjauan Ekonomi Dunia
World Economic Overview 268

Analisis Perekonomian Indonesia
Indonesian Economy Analysis 269

Kondisi Industri Listrik Indonesia
Condition of Indonesian Electricity Industry 272

Analisis Operasi per Segmen Usaha
Operational Analysis per Business Segment 276

Profitabilitas Per Segmen
Profitability Per Segment 312

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis 318

Analisis Laba Rugi Komprehensif
Comprehensive Profit and Loss Analysis 318

Analisis Posisi Keuangan
Financial Position Analysis 331

Analisis Arus Kas
Cash Flow Analysis 351

Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya
Analysis of Solvency, Receivables Collectibility Rate, and Other Financial Ratios 355

Struktur Modal
Capital Structure 366

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Expenditure Investment 368

Realisasi Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment Realization 379

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022
Comparison between the Company's Target and Realized Performance in 2021 and Projection for 2022 384

Kebijakan Dividen
Dividend Policy 395

Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the State 398

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen Employee and Management Share Ownership Program	400
Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Public Offering Proceeds	400
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest or Transactions with Affiliated/Related Parties	401
Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Hutang/Modal Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition and Debt/Capital Restructuring	410
Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	414
Perubahan Peraturan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan Regulatory Changes and The Impacts on the Company	417
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan Information and Material Facts After the Accountant Reporting Date	434
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events	435
Key Performance Indicators dan Tingkat Kesehatan Perusahaan Key Performance Indicators and Company Soundness Level	436
Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	440
Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan Impact of Price Changes on Company Revenue and Profit	447
Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar Marketing Aspects and Market Share	448
Prospek Usaha *Business Prospect*	451

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan Implementation of Sustainable Governance	462
Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure	484
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	487
Dewan Komisaris Board of Commissioners	495
Direksi Board of Directors	524
Hubungan Afilisasi dan Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi Affiliation and Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors	550
Kebijakan Suksesi Direksi Succession Policy of the Board of Directors	555
Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Policy for Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors	557
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors	563
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners	570
Komite Audit Audit Committee	574
Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee	587
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	600
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	614
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	626

Audit Internal Internal Audit	633
Auditor Eksternal External Auditor	652
Manajemen Risiko Risk Management	656
Standar Etika Perusahaan Code of Conduct	689
Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy	701
Whistleblowing System	719
Perkara Penting Important Cases	729
Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	734
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	743
Keterlibatan pada Kegiatan Politik dan Sosial Involvement on Political and Social Activities	753

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Governance	756
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia Corporate Social Responsibility on Human Rights	769
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Operasi yang Adil Corporate Social Responsibility on Fair Operation	775
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility on the Environment	785
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Praktik Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Corporate Social Responsibility on Employment Practices, Occupational Safety and Health	806
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pelanggan Corporate Social Responsibility on Customers	821
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility on Social and Community Development	827

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN 2021
ANNUAL FINANCIAL STATEMENT 2021

Laporan Keuangan Tahunan 2021 Annual Financial Statement 2021	844

REFERENSI KRITERIA *ANNUAL REPORT AWARD* (ARA)
REFERENCE OF ANNUAL REPORT AWARD (ARA) CRITERIA

Referensi Kriteria *Annual Report Award* (ARA) Reference of Annual Report Award (ARA) Criteria	964

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

2021

STRENGTHENING SYNERGY, CREATING GREEN ENERGY

'Sinergi' dan 'Energi' menjadi kata kunci yang akan membawa PJB memperkuat kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan energi hijau dan bersih. Waktunya bagi PJB untuk *Go to Market* dengan memperluas peluang potensi bisnis "*Beyond* KWh" baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

'Synergy' and 'Energy' are keywords that will bring PJB to strengthen collaboration with all stakeholders in supporting green and clean energy development. It's time for PJB to Go to Market by expanding "Beyond KWh" business potential opportunities both domestically and abroad.

2020

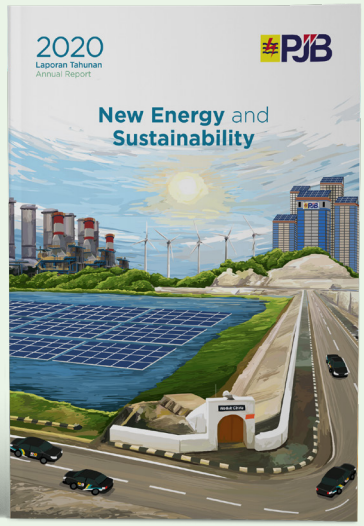

TO BE THE TRUSTED LEADER COMPANY IN SUSTAINABLE ENERGY

Kami telah melakukan transformasi untuk menjaga agility dan semangat adaptasi yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan *core competency* dan inovasi yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola, kepatuhan dan pengelolaan risiko yang baik. Dengan melakukan segala sesuatu dengan baik, lebih baik dan lebih baik lagi untuk menjadi yang terbaik kelak akan dapat mewujudkan aspirasi visi PJB untuk menjadi perusahaan energi terpercaya, terdepan, dan terbaik di Indonesia maupun regional.

We have undertaken transformation to maintain agility and spirit of sustainable adaptation by optimizing core competencies and innovation upholding the principles of good governance, compliance and risk management. By performing everything well, better and even better to be the best in the future, it will be able to realize PJB's vision aspirations to become a trusted, leading, and best energy company in Indonesia and regionally.

2019

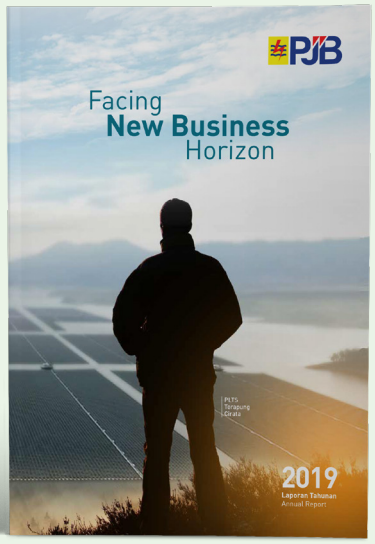

FACING NEW BUSINESS HORIZON

Kami terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong portofolio bisnis yang semakin besar. Selain itu, juga mengembangkan bisnis untuk membangun horizon bisnis baru mewujudkan bisnis pembangkitan terintegrasi dalam mendukung kesinambungan korporasi dalam jangka panjang. Kami berupaya untuk terus meningkatkan nilai Perusahaan, baik bagi pemegang saham maupun segenap pemangku kepentingan lainnya.

We continue to build collaboration with various parties to drive a larger business portfolio. Furthermore, we also develop business to build new business horizon to realize an integrated generation business to support long-term corporate sustainability. We strive to continuously increase the Company values, both for the shareholders and all other stakeholders.

2018

MENGHADIRKAN NILAI TAMBAH DAN HARAPAN BARU, WUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN

PRESENTING ADDED VALUE & NEW HOPE FOR STAKEHOLDERS THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PJB hadir untuk mewujudkan harapan pelanggan, mitra kerja, masyarakat dan pemegang saham dengan kinerja nyata, inovasi, kreatifitas, konsistensi penerapan tata kelola perusahaan serta komitmen atas tanggung jawab sosial untuk senantiasa mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

PJB presents to realize the expectations of customers, partners, communities and shareholders with real performance, innovation, creativity, consistency in the implementation of corporate governance and commitment to social responsibility to always supporting the realization of sustainable development.

RINGKASAN KINERJA UTAMA 2021
2021 KEY PERFORMANCE

GO LIVE KOMERSIALISASI *CO-FIRING*
Go-Live for Co-Firing Commercialization

9 PEMBANGKIT
POWER PLANTS

- PLTU Paiton 9 — Paiton 9 CFPP
- PLTU Tanjung Awar-Awar — Tanjung Awar-Awar CFPP
- PLTU Ropa — Ropa CFPP
- PLTU Bolok — Bolok CFPP
- PLTU Pulang Pisau — Pulang Pisau CFPP
- PLTU Indramayu — Indramayu CFPP
- PLTU Rembang — Rembang CFPP
- PLTU Anggrek — Anggrek CFPP
- PLTU Kendari — Kendari CFPP

Commercial Operation Date

PLTGU MUARA KARANG BLOK 3
Muara Karang CCPP Block 3

Dengan mode operasi *combined cycle* total daya menjadi sebesar 500 MW dari sebelumnya 350 MW dengan *mode open cycle*.
with combined cycle operation mode of 500 MW total power, from previously 350 MW in open cycle mode.

15,86%

20.640,92 GWh

PRODUKSI LISTRIK
Electricity Production

3,04%

Rp30.434.176
juta million

PENDAPATAN USAHA
Revenue

15,96%

19.848,44 GWh

PENJUALAN TENAGA LISTRIK
Electricity Sales

PLTS TERAPUNG CIRATA 145 MWAc
CIRATA FLOATING SPP 145 MWAc

***Financial Close* Sindikasi Pendanaan oleh 3 Bank Internasional**
Financial Close of Syndicated Funding by 3 International Banks

Rp1.280,69
juta million

INVESTASI PEMBANGKIT DAN PENGEMBANGAN USAHA
Investment in Power Generation and Business

20.957 MW

TOTAL KAPASITAS PEMBANGKIT DIKELOLA PJB
Total Managed Power Plant Capacity

19.352 MW
Beroperasi
Operating

1.605 MW
Konstruksi
Under Construction

PRESTASI DAN PENGHARGAAN
Achievements and Awards

- ***Asia Responsible Enterprise Award* (AREA) 2021** kepada UP Gresik dengan program 'Pijar Berdaya - *Social Innovation and Women Entrepeneurship*'
  2021 Asia Responsible Enterprise Award (AREA) to Gresik GU with the program 'Pijar Berdaya - Social Innovation and Women Entrepreneurship'
- ***Asian Power Award* 2021** sebagai '*Power Utility of the Year*'
  2021 Asian Power Award as 'Power Utility of the Year'
- ***ASEAN Risk Awards* 2021 sebagai Juara 1 kategori *Risk Innovation* dan Juara 2 kategori *Risk Technology***
  2021 ASEAN Risk Award as 1st place in the Risk Innovation category and 2nd place in the Risk Technology category
- ***Gold Rating* dalam *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2021**
  Gold Rating in 2021 Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)
- **Penghargaan Emisi Korporasi 2021**
  2021 Corporate Emissions Award
- **Indonesia *Sustainable Development Goals Award* (ISDA) 2021** raih **3 Predikat**: *The Top Leadership for* SDGs, *The Most Committed Corporate for* SDGs *on Social Pillar* dan *The Most Committed Corporate for* SDGs *on Economy Pillar*
  2021 Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) won **3 predicate:** The Top Leadership for SDGs, The Most Committed Corporate for SDGs on Social Pillar and The Most Committed Corporate for SDGs on Economy Pillar

REALISASI DANA CSR
Realization of CSR Fund

Rp42,106
miliar billion

95,67
SKOR GCG
GCG SCORE

Predikat "Sangat Baik" Skor Tertinggi di PLN Grup
"Very Good" Predicate Highest Score in PLN Group

3
PROPER Emas
Gold PROPER

4
PROPER Hijau
Green PROPER

12
PROPER Biru
Blue PROPER

HCR
4,56

Tingkat kesiapan karyawan yang baik dalam menjalankan strategi Perusahaan dilihat dari proses dan hasil.
A good level of employee readiness in carrying out the Company's strategy is seen from the process and results.

OCR
4,56

Kesiapan organisasi yang baik berdasarkan aspek budaya kerja, kepemimpinan, *alignment* dan *team work*.
Good organizational readiness based on aspects of work culture, leadership, alignment, and team work.

PJB Investasi, Anak Perusahaan dengan Aset Terbesar senilai **Rp6.463,41 miliar** dan Profit Tertinggi sebesar **Rp799,99 miliar.**
PJB Investasi, a Subsidiary with the Largest Assets of **Rp6.463,41 billion** and the Highest Profit of **Rp799,99 billion.**

PJB Services, Anak Perusahaan dengan Pendapatan Usaha tertinggi sebesar **Rp1.712,74 miliar**
PJB Services, a Subsidiary with the highest operating revenues of **Rp1,712.74 billion**

PENGHARGAAN TAHUN 2021
2021 AWARDS

Tingkat Internasional
International Level

No.	Tanggal Date	Penghargaan Award	Penyelenggara Organizer
1	16 Agustus 2021 August 16, 2021	***International Business Awards* 2021**, PJB memperoleh penghargaan **4 *Silver Stevie Award*** dan **1 *Bronze Stevie Award.*** ***Silver Stevie Award*:** - Kategori *Human Resources Department of the Year* - Kategori *Best Technical Support Strategy and Implementation* (SOKET) - Kategori *Best Technical Support Strategy and Implementation* (aplikasi I-CARE) - Kategori IT *Team of The Year* ***Bronze Stevie Award:*** - Kategori *Best Technical Support Strategy and Implementation* **International Business Awards 2021, PJB received 4 Silver Stevie Awards and 1 Bronze Stevie Award.** **Silver Stevie Award:** - Category of Human Resources Department of the Year - Category of Best Technical Support Strategy and Implementation (SOKET) - Category of Best Technical Support Strategy and Implementation (I-CARE application) - Category of IT Team of The Year **Bronze Stevie Award:** - Category of Best Technical Support Strategy and Implementation	The Stevie Organization
2	02 September 2021 September 2, 2021	Pengakuan pengelolaan CSR di tingkat internasional di ajang Asia *Responsible Enterprise Awards* (AREA) 2021 kepada UP Gresik dengan program 'Pijar Berdaya - *Social Innovation and Women Entrepeneurship*' Recognition of CSR management at the international level at the 2021 Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) event to Gresik GU with the 'Pijar Berdaya - Social Innovation and Women Entrepreneurship' program	Enterprise Asia
3	22 November 2021 November 22, 2021	PJB meraih penghargaan sebagai '*Power Utility of the Year*' pada *Asian Power Awards* 2021 PJB won the award as 'Power Utility of the Year' at the 2021 Asian Power Awards	Asian Power Magazine

Tingkat Nasional
National Level

No.	Tanggal Date	Penghargaan Award	Penyelenggara Organizer
1	11 Februari 2021 February 11, 2021	Penghargaan Anak BUMN Terpopuler di Media *Digital* tahun 2020 The Most Popular SOE Child Award in Digital Media in 2020	HUMAS Indonesia (bagian dari PR Indonesia Group) PR Indonesia (part of PR Indonesia Group)
2	12 Februari 2021 February 12, 2021	Penghargaan 1 dari 112 Karya Indonesia Paling Prospektif di Tahun 2020 melalui AVATOR Award 1 of 112 Most Prospective Indonesian Works in 2020 through AVATOR	Business Innovation Center (lembaga yang diinisiasikan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI) Business Innovation Center (an institution initiated by the Indonesian Ministry of Research and Technology)
3	6 April 2021 April 6, 2021	Penghargaan SMK3 kategori Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada UP Paiton 1-2 OHSMS Award in the category of Occupational Health and Safety (OHS) Program Implementation to Paiton GU 1 and 2	Gubernur Jawa Timur Governor of East Java
4	22 April 2021 April 22, 2021	TOP CSR *Awards* 2021 raih 3 penghargaan, yaitu: 1. Top CSR Bintang 4 2. Kategori Khusus Pengembangan Destinasi Wisata: Ekowisata Pantai Plentong 3. *Top Leader on* CSR *Commitment* 2020: GM UBJOM Indramayu. TOP CSR Awards 2021 won 3 awards: 1. Top CSR 4-Star 2. Special Category for Tourism Destination Development: Ecotouris Plentong Beach 3. Top Leader on CSR Commitment 2020: GM Indramayu OMSBU.	Majalah Top Business Top Business Magazine
5	20 April 2021 April 20, 2021	Penghargaan Emisi Korporasi 2021 raih 2 penghargaan yaitu: 'Kategori Penurunan Emisi Korporasi Sektor Non Emiten dan Non BUMN '*GREEN*" dan 'Kategori Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Sektor *Non* Emiten dan *Non* BUMN '*SILVER*' . The 2021 Corporate Emissions Award won 2 awards: Category of Reducing Corporate Emissions in the Non-Issuer and Non-SOE Sector 'GREEN" and the 'Category for Transparency in Calculation of Corporate Emissions in the Non Issuer and Non-SOE Sector 'SILVER'.	Beritasatu Media Holdings dan Bumi Global Karbon Beritasatu Media Holdings and Bumi Global Carbon
6	29 Juli 2021 July 29, 2021	Indonesia CSR *Awards* pada kategori 'Bangun Karsa Rupa' raih peringkat dan kategori *Silver* kepada UP Cirata The Indonesia CSR Awards in the category of 'Bangung Karsa Rupa' won Silver rank for Cirata GU	Majalah CSR Indonesia dan Meprindo Communications CSR Indonesia Magazine and Meprindo Communications
7	17 September 2021 September 17, 2021	Indonesia *Human Capital Award* (IHCA) - VII 2021 raih 3 penghargaan: 1. Karyawan Aji: *The Best* Indonesia – HC Director 2021 (*Category : Subsidiary of SOE's Company -Non Finance Company*) 2. 1st *Best of The Best* - IHCA *of The Year* 2021 (PLATINUM A – *Very Excellent*) (*Category: Subsidiary of SOE's Non Finance Company*) 3. PJB: 2nd *Best Company in Performance Management* (*PLATINUM* A – *Very Excellent*) Indonesia Human Capital Award (IHCA) - VII 2021 won 3 awards: 1. Karyawan Aji: The Best Indonesia – HC Director 2021 (Category : Subsidiary of SOE's Company -Non Finance Company) 2. 1st Best of The Best - IHCA of 2021 (PLATINUM A – Very Excellent) (Category: Subsidiary of SOE's Non Finance Company) 3. PJB: 2nd Best Company in Performance Management (PLATINUM A – Very Excellent)	Majalah Economic Review Economic Review Magazine

PENGHARGAAN TAHUN 2021
2021 AWARDS

No.	Tanggal Date	Penghargaan Award	Penyelenggara Organizer
8	17 September 2021 September 17, 2021	Indonesia *Sustainable Development Goals Award* (ISDA) 2021 raih 3 penghargaan: 1. *The Top Leadership for* SDGs 2. *The Most Committed Corporate for* SDGs *on Social Pillar* 3. *The Most Committed Corporate for* SDGs *on Economy Pillar* Selain itu, 11 program CSR PJB juga mendapat penghargaan 1 Platinum, 8 *Gold* dan 2 *Silver* serta 2 Penghargaan Kategori Perorangan Terbaik 2 dan 3 Tingkat *Local Hero.* IIndonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2021 won 3 awards: 1. The Top Leadership for SDGs 2. The Most Committed Corporate for SDGs on Social Pillar 3. The Most Committed Corporate for SDGs on Economy Pillar In addition, PJB's 11 CSR programs also received 1 Platinum, 8 Gold and 2 Silver awards as well as 2 Best Individual Category Awards 2 and 3 at the Local Hero Level.	CFCD (*Corporate Forum for CSR Development*)
9	28 September 2021 September 28, 2021	Delapan (8) Penghargaan Subroto 2021 di bidang Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), yaitu: - PLTU Paiton 1 dan 2 : Kategori PLTU *Grid Code* Kategori Jawa Madura dan Bali Skala Besar - PLTGU Gresik : Kategori PLTG/GU *Grid Code* Kategori Jawa, Madura dan Bali Skala Besar - PLTA Cirata : Kategori PLTA *Grid Code* Jawa, Madura dan Bali Skala Besar - PLTA Sutami : Kategori PLTA *Grid Code* Jawa, Madura dan Bali Skala Menengah - PLTA Tulungagung : Kategori PLTA *Grid Code* Jawa, Madura dan Bali Skala Kecil - PLTU Tenayan : Kategori PLTU *Grid Code* Sumatera Skala Besar - PLTU Belitung : Kategori PLTU *Grid Code* Sumatera Skala Menengah - PLTU Tidore : Kategori PLTU *Grid Code* Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Eight (8) 2021 Subroto Awards in the field of Electrical Safety (K2), namely: - Paiton 1 and 2 CFPP : CFPP Grid Code Category for Java, Madura and Bali Large Scale - Gresik CCPP: Category of GTPP/CCPP Large Scale Grid Code Category for Java, Madura and Bali - Cirata HPP: Category of HPP Large Scale Grid Code for Java, Madura and Bali - Sutami HPP : Category of HPP Medium Scale Grid Code for Java, Madura and Bali - Tulungagung HPP : HPP Small Scale Grid Code Category for Java, Madura and Bali - Tenayan CFPP: CFPP Category of Large Scale Sumatran Grid Code - Belitung CFPP: Category of CFPP Medium Scale Grid Code for Sumatra - Tidore CFPP: Category of CFPP Grid Code for Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku and Papua	Kementerian ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources
10	28 September 2021 September 28, 2021	Lima (5) Penghargaan Subroto di Bidang Efisiensi Energi, Kategori Manajemen Energi di Gedung Industri - Inovasi Khusus, melalui unit: - PJB UP Paiton - PJB UP Muara Tawar - PJB UBJOM Rembang Kategori Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik: - PLTU Paiton Unit 2 - PLTU Tj Awar-awar Unit 2 Five (5) Subroto Awards in Energy Efficiency, Energy Management Category in Industrial Buildings - Special Innovation, through units: - PJB, Paiton GU - PJB, Muara Tawar GU - PJB, Rembang OMSBU Category of Emission Reduction and Trading in the Power Generation Sector : - Paiton Unit 2 CFPP - Tj Awar-awar Unit 2 CFPP	Kementerian ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources

No.	Tanggal Date	Penghargaan Award	Penyelenggara Organizer
11	12 Oktober 2021 October 12, 2021	Indonesia BUMN Awards 2021 raih 2 penghargaan, yaitu: - *Best Company Profile Print In Mining & Energy Group Category* - *Best Company Profile Video In Mining & Energy Group Category* Indonesia's SOE Awards 2021 won 2 awards, namely: - Best Company Profile Print In Mining & Energy Group Category - Best Company Profile Video In Mining & Energy Group Category	Iconomics
12	14 Oktober 2021 October 14, 2021	Top CSV *Award* 2021 untuk Inovasi PJB dalam program *co-firing* Top CSV Award 2021 for PJB Innovation in co-firing program	Infobrand.id bekerjasama dengan Trans Co Indonesia dan Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Airlangga Infobrand.id in collaboration with Trans Co Indonesia and Management Faculty of Economics & Business (FEB) Universitas Airlangga
13	14 Oktober 2021 October 14, 2021	TJSL & CSR *Award* 2021 untuk program Pijar Berdaya UP Gresik: Program Kampung *Stroom* UP Paiton dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam program *co-firing.* CSR Award 2021 for Gresik GU's Powerful Incandescent Program: Paiton GU's Setrum Village Program and empowering Micro and Small Enterprises (MSE) in the co-firing program.	BUMN Track didukung oleh *Indonesia Shared Value Institute* (ISVI) BUMN Track supported by Indonesia Shared Value Institute (ISVI)
14	17 November 2021 November 17, 2021	Asia *Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2021 raih Peringkat *Gold* Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021 achieves Gold Rating	NCSR
15	8 Desember 2021 December 8, 2021	*Energy and Mining Editor Society* (E2S) *Award* 2021 raih 3 Peringkat Terbaik, yakni: - *Best* CEO *Power Company* - *Best Corporate Secretary Power Company* - *Best Press Release Power Company* Energy and Mining Editor Society (E2S) Award 2021 won 3 Best Ranks, namely: - Best CEO Power Company - Best Corporate Secretary Power Company - Best Press Release Power Company	*Energy and Mining Editor Society* (E2S)
16	10 Desember 2021 December 10, 2021	*ASEAN Risk Award* 2021 - Juara 1 kategori *Risk Innovation* - Juara 2 kategori *Risk Technology* ASEAN Risk Award 2021 - 1st place in the Risk Innovation category - 2nd place in the Risk Technology category	*Enterprise Risk Management Academy* (ERMA)
17	15 Desember 2021 December 15, 2021	Penghargaan *Bronze Technology Enhancement* untuk kategori *Marketing* Anak Perusahaan BUMN dalam BUMN *Branding* and *Marketing Award* (BBMA) Tahun 2021 Bronze Technology Enhancement Award for the Marketing category of SOE's Subsidiaries in the BUMN Branding and Marketing Award (BBMA) 2021	BUMN *Track* didukung DMID BUMN Track supported by DMID
18	17 Desember 2021 December 17, 2021	Indonesia *State Owned Enterprises Subsidiaries Leading Brand Awards* 2021 raih *Highly Reputable* SOE *Subsidiary in Energy & Mining Category in* 2021 Indonesia State Owned Enterprises Subsidiaries Leading Brand Awards 2021 won Highly Reputable SOE Subsidiary in Energy & Mining Category in 2021	The Iconomics
19	28 Desember 2021 December 28, 2021	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Tahun 2021 raih 3 PROPER EMAS (UP Paiton, UP Gresik, UBJOM Rembang), 4 PROPER Hijau dan 12 PROPER Biru The Company Performance Rating Program in Environmental Management (PROPER) in 2021 won 3 GOLD PROPER (Paiton GU, Gresik GU, Rembang OMSBU), 4 Green PROPER and 12 Blue PROPER	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ministry of Environment and Forestry (KLHK)

PENGHARGAAN TAHUN 2021
2021 AWARDS

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

PENGHARGAAN TAHUN 2021
2021 AWARDS

Tingkat Regional
Regional Level

No.	Tanggal Date	Penghargaan Award	Penyelenggara Organizer
1	31 Agustus 2021 August 31, 2021	*Culture* Festival PLN Group 2021 raih 2 (dua) gelar juara: - Juara 1 Implementasi Budaya Terbaik Kategori Anak Perusahaan PLN - Juara 3 Tim *Ranger* Budaya Terbaik Kategori Anak Perusahaan PLN Group Culture Festival 2021 won 2 (two) championship titles: - 1st Place for Best Culture Implementation in the PLN Subsidiary Category - 3rd Place for the Best Cultural Ranger Team in the Subsidiary Category	PT PLN (Persero)
2	22 Oktober 2021 October 22, 2021	Juara Karya Inovasi (SPKI) PLN Tahun 2021 - Kategori Proses Bisnis Manajemen : *Co-Firing* - Juara 1 - Kategori Inovasi Strategis : *Co-Firing* Sebagai *Green Solution* - Juara 2 - Kategori Proses Bisnis Manajemen : I-STACKING - Juara 3 - Kategori Pembangkitan : HYDROOPT - Juara 2 - Kategori *Technical Supporting* : DS PREDATOR - Juara 2 - Kategori *Technical Supporting* : HAND LATHE INSITU - Juara 3 Winner of PLN's 2021 Innovation Works (SPKI) - Business Process Management Category : Co-Firing - 1st Place - Strategic Innovation Category : Co-Firing as Green Solution - 2nd Place - Business Process Management Category : I-STACKING - 3rd Place - Power Plant Category : HYDROOPT - 2nd Place - Technical Supporting Category : DS PREDATOR - 2nd Place - Technical Supporting Category : HAND LATHE INSITU - 3rd Place	PT PLN (Persero)
3	16 November 2021 November 16, 2021	Lomba Penerapan K3L Terbaik 2021 Juara untuk Kategori Pemanfaatan FABA, yaitu: 1) UP Paiton 1 & 2 meraih Juara 1 pada Kategori Pemanfaatan FABA Regional Jawa, Madura dan Bali, 2) PLTU Suge meraih Juara 2 pada Kategori Pemanfaatan FABA Regional Sumatera dan Kalimantan 3) UBJOM Pacitan meraih Juara 3 pada Kategori Pemanfaatan FABA Regional Jawa, Madura dan Bali The Best K3L Implementation Competition 2021 Winners for the FABA Utilization Category, namely: 1) Paiton GU 1 & 2 won 1st Place in the Java, Madura and Bali Regional FABA Utilization Category, 2) Suge CFPP won 2nd place in the Sumatra and Kalimantan Regional FABA Utilization Category 3) Pacitan OMSBU won 3rd place in the Java, Madura and Bali Regional FABA Utilization Category	PT PLN (Persero)
4	4 Desember 2021 December 4, 2021	IDEA *Competition* WOW *Diamond* melalui karya "*CUBETECS VISION*" dinobatkan sebagai juara *Best* 1 Diamond pada kategori *Beyond* kWh IDEA Competition WOW Diamond through the work of "CUBETECS VISION" was named the Best 1 Diamond winner in the Beyond kWh category	PT PLN (Persero)

3
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
1
SERTIFIKAT PENGHARGAAN
1st Champion of Beyond kWh Product
4
PIAGAM PENGHARGAAN
2

SERTIFIKASI TAHUN 2021
CERTIFICATION OF 2021

Sertifikasi Korporat
Corporate Certification

No.	Unit	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institutions	Bulan - Tahun Perolehan Achievement Date	Berlaku Hingga Validation Date	Masa Berlaku Sertifikasi Validity Period	Keterangan Description
1	Kantor Pusat Head Office	*Business Continuity Management System* (BCMS) ISO 22301:2019	BSI	16 September 2019 September 16, 2021	15 September 2022 September 15, 2022	3 tahun 3 years	Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) This certificate is a Multi-Site Certificate for: - Head Office - 6 Existing Power Plant Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas)
2	Kantor Pusat Head Office	*Information Security Management System* ISO 27001:2013	BSI	8 Januari 2022 January 8, 2022	7 Januari 2025 January 7, 2025	3 tahun 3 years	-
3	Kantor Pusat Head Office	*Quality Management System* ISO 9001:2015	BSI	8 November 2020 November 8, 2020	7 November 2023 November 7, 2023	3 tahun 3 years	Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan dan Tanjung Awar-Awar) - Unit Pemeliharaan (UPHT & UPHB) - BPWC - 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate for: - Head Office - 6 Existing Power Plant Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - 5 Java OMSBU (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) - Maintenance Unit (UPHT & UPHB) - CRMU - 4 Outside Java OMSBU (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)
4	Kantor Pusat Head Office	*Environmental Management System* ISO 14001:2015	BSI	8 November 2020 November 8, 2020	7 November 2023 November 7, 2023	3 tahun 3 years	Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, pacitan dan Tanjung Awar-Awar) - 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate for: - Head Office - 6 Existing Power Plant Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - 5 Java OMSBU (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) - 4 Outside Java OMSBU (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)

No.	Unit	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institutions	Bulan - Tahun Perolehan Achievement Date	Berlaku Hingga Validation Date	Masa Berlaku Sertifikasi Validity Period	Keterangan Description
5	Kantor Pusat Head Office	*IT Service Management System* ISO 20000-1:2018	BSI	12 November 2020 November 12, 2020	11 November 2023 November 11, 2023	3 tahun 3 years	-
6	Kantor Pusat Head Office	*Occupational Health & Safety Management System* ISO 45001:2018	BSI	21 Oktober 2020 October 21, 2020	20 Oktober 2023 October 20, 2023	3 tahun 3 years	Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - Unit Pemeliharaan (UPHT & UPHB) - BPWC - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, pacitan dan Tanjung Awar-Awar) - 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate for: - Head Office - 6 Existing Power Plant Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - Maintenance Unit (UPHT & UPHB) - CRMU - 5 Java OMSBU (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) - 4 Outside Java OMSBU (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)
7	Kantor Pusat Head Office	*Energy Management System* ISO 50001:2018	BSI	8 November 2020 November 8, 2020	7 November 2023 November 7, 2023	3 tahun 3 years	Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) This certificate is a Multi-Site Certificate for: - Head Office - 6 Existing Power Plant Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas)
8	Kantor Pusat Head Office	*Asset Management System* ISO 55001:2014	BSI	5 Maret 2021 March 5, 2021	4 Maret 2024 March 4, 2024	3 tahun 3 years	Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) This certificate is a Multi-Site Certificate for: - Head Office - 6 Existing Power Plant Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas)

SERTIFIKASI TAHUN 2021
CERTIFICATION OF 2021

No.	Unit	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope	Pemberi Sertifikasi Certification Institutions	Bulan - Tahun Perolehan Achievement Date	Berlaku Hingga Validation Date	Masa Berlaku Sertifikasi Validity Period	Keterangan Description
9	Kantor Pusat Head Office	*Integrated Management System* PAS 99:2012	BSI	8 November 2020 November 8, 2020	7 November 2023 November 7, 2023	3 tahun 3 years	Sertifikat ini adalah *Multi-Site Certificate* yaitu: - Kantor Pusat - 6 Unit Pembangkit Eksisting (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - Unit Pemeliharaan (UPHT & UPHB) - BPWC - 5 UBJOM Jawa (Indramayu, Rembang, Paiton 9, pacitan dan Tanjung Awar-Awar) - 4 UBJOM Luar Jawa (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, dan Pulang Pisau) This certificate is a Multi-Site Certificate for: - Head Office - 6 Existing Power Plant Units (Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata & Brantas) - 5 Java OMSBU (Indramayu, Rembang, Paiton 9, Pacitan and Tanjung Awar-Awar) - 4 Outside Java OMSBU (Kaltim Teluk, Tenayan, Arun, and Pulang Pisau)
10	Kantor Pusat Head Office	*Anti Bribery Management System* ISO 37001:2016	BSI	6 Agustus 2020 August 6, 2020	7 Agustus 2023 August 7, 2023	3 tahun 3 years	-

Sertifikasi Unit Eksisting
Existing Unit Certification

No.	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope	Lembaga/Badan Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Bulan - Tahun Perolehan Achievement Date	Berlaku Hingga Validation Date	Masa Berlaku Sertifikasi Validity Period
UP Gresik Gresik GU					
1	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	17 September 2020 September 17, 2020	16 September 2023 September 16, 2020	3 tahun 3 years
2	Laboratorium Penguji Research Laboratory	KAN (Komite Akreditasi Nasional) NCA (National Committee on Accreditation)	25 Oktober 2021 October 25, 2021	24 Oktober 2026 October 24, 2021	6 tahun 6 years
UP Muara Karang Muara Karang GU					
1	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023	3 tahun 3 years
2	Akreditasi Laboratorium Penguji ISO/IEC 17025:2017 Research Laboratory Accreditation ISO/IEC 17025:2017	KAN (Komite Akreditasi Nasional) NCA (National Committee on Accreditation)	30 April 2018 April 30, 2018	29 April 2022 April 29, 2022	3 tahun 3 years

No.	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope	Lembaga/Badan Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Bulan - Tahun Perolehan Achievement Date	Berlaku Hingga Validation Date	Masa Berlaku Sertifikasi Validity Period
UP Paiton Paiton GU					
1	Akreditasi Laboratorium dari KAN Laboratory Accreditation from NCA	KAN (Komite Akreditasi Nasional) NCA (National Committee on Accreditation)	20 April 2020 April 20, 2020	20 April 2025 April 20, 2025	5 tahun 5 years
2	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	29 Maret 2019 March 29, 2019	29 Maret 2022 March 29, 2022	3 tahun 3 years
3	Sertifikat Laik Higiene - Kantin Hygiene Certificate - Canteen	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ministry of Health of the Republic of Indonesia	16 Desember 2020 December 16, 2020	16 Desember 2023 December 16, 2023	3 tahun 3 years
UP Muara Tawar Muara Tawar GU					
1	Laboratorium Penguji dengan ruang lingkup dengan komposisi gas alam, nilai kalor, *spesific grafity* Research Laboratory with the scope of natural gas composition, calorific value, specific gravity	KAN (Komite Akreditasi Nasional) NCA (National Committee on Accreditation)	28 Juni 2018 June 28, 2018	27 Juni 2022 June 27, 2022	5 tahun 5 years
2	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	30 Juli 2018 July 30, 2018	30 Juli 2021 July 30, 2021	3 tahun 3 years
UP Brantas Brantas GU					
1	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023	3 tahun 3 years
2	Sertifikat *Zero Accident* Zero Accident Certificate	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	22 April 2021 April 22, 2021	22 April 2022 April 22, 2022	1 tahun 1 year
UP Cirata Cirata GU					
1	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	30 Juli 2018 July 30, 2018	30 Juli 2021 July 30, 2021	3 tahun 3 years
2	Sertifikat *Zero Accident* Zero Accident Certificate	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2021 September 17, 2021	1 tahun 1 year
PLTD Suppa Suppa DEPP					
1	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	30 Juli 2018 July 30, 2018	30 Juli 2021 July 30, 2021	3 tahun 3 years
2	Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001-2015 Environmental Management System SNI ISO 14001-2015	LMK - KAN (Komite Akreditasi Nasional) LMK - NCA (National Committee on Accreditation)	03 April 2019 April 3, 2019	02 April 2022 April 2, 2022	3 tahun 3 years

SERTIFIKASI TAHUN 2021
CERTIFICATION OF 2021

Sertifikasi UBJOM
OMSBU Certification

No.	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope	Lembaga/Badan Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Bulan - Tahun Perolehan Achievement Date	Berlaku Hingga Validation Date	Masa Berlaku Sertifikasi Validity Period
UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU					
1	Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025:2008 Research Laboratory SNI ISO/IEC 17025:2008	KAN (Komite Akreditasi Nasional) NCA (National Committee on Accreditation)	25 Oktober 2017 October 25, 2017	25 Oktober 2023 October 25, 2023	6 tahun 6 years
2	Sertifikat *Zero Accident* Zero Accident Certificate	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2021 September 17, 2021	1 tahun 1 year
3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	29 Maret 2019 March 29, 2019	29 Maret 2022 March 29, 2022	3 tahun 3 years
UBJOM Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar OMSBU					
1	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024	3 tahun 3 years
2	Pengoperasian Terminal Khusus Special Terminal Operation	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	12 Oktober 2018 October 12, 2018	12 Oktober 2023 October 12, 2023	5 tahun 5 years
3	Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji Research Laboratory Accreditation Certificate	KAN (Komite Akreditasi Nasional) NCA (National Committee on Accreditation)	05 Desember 2017 December 5, 2017	04 Desember 2021 December 4, 2021	3 tahun 3 years
UBJOM Rembang Rembang OMSBU					
1	Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health Management System Award Certificate	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024 April 21, 2024	3 tahun 3 years
2	Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji Research Laboratory Accreditation Certificate	KAN (Komite Akreditasi Nasional) NCA (National Committee on Accreditation)	16 Juni 2021 June 16, 2021	13 Juni 2026 June 13, 2026	5 tahun 5 years
3	Sertifikat Kalibrasi Meter Statik Energi Unit 10 Energy Static Meter Calibration Certificate of Unit 10	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	2 Oktober 2019 October 2, 2019	2 Oktober 2024 October 2, 2024	5 tahun 5 years
4	Sertifikat Kalibrasi Meter Statik Energi Unit 20 Energy Static Meter Calibration Certificate of Unit 20	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	2 Oktober 2019 October 2, 2019	2 Oktober 2024 October 2, 2024	5 tahun 5 years

No.	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope	Lembaga/Badan Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Bulan - Tahun Perolehan Achievement Date	Berlaku Hingga Validation Date	Masa Berlaku Sertifikasi Validity Period
UBJOM Paiton 9 Paiton 9 OMSBU					
1	Sertifikasi Laik Operasi Commissioning Certificate	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	07 Agustus 2017 August 7, 2017	07 Agustus 2022 August 7, 2022	5 tahun 5 years
2	Sertifikasi ISO 17025 ISO 17025 Certification	KAN (Komite Akreditasi Nasional) NCA (National Committee on Accreditation)	23 Agustus 2017 August 23, 2017	22 Agustus 2021 August 22, 2021	4 tahun 4 years
3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	29 Maret 2019 March 29, 2019	29 Maret 2022 March 29, 2022	3 tahun 3 years
UBJOM Pacitan Pacitan OMSBU					
1	Sertifikat Kompetensi Laboratorium Pengujian & Laboratorium Kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 Research Laboratory & Calibration Laboratory Competency Certificate SNI ISO / IEC 17025:2017	KAN (Komite Akreditasi Nasional) NCA (National Committee on Accreditation)	12 Desember 2018 December 12, 2018	19 Desember 2021 December 19, 2021	3 tahun 3 years
2	Sertifikat *Zero Accident* Zero Accident Certificate	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2021 September 17, 2021	1 tahun 1 year
UBJOM Tenayan Tenayan OMSBU					
1	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	29 Maret 2019 March 29, 2019	29 Maret 2022 March 29, 2022	3 tahun 3 years
UBJOM Kaltim Teluk Kaltim Teluk OMSBU					
1	Sertifkasi Laik Operasi #1 Commissioning Certificate #1	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Directorate General of Electricity (DJK)	29 Desember 2016 December 29, 2016	29 Desember 2021 December 29, 2021	5 tahun 5 years
2	Sertifkasi Laik Operasi #2 Commissioning Certificate #2	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Directorate General of Electricity (DJK)	29 Desember 2016 December 29, 2016	29 Desember 2021 December 29, 2021	5 tahun 5 years
3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2023 September 17, 2023	3 tahun 3 years
4	Sertifikat Akreditasi Laboratorium Penguji Research Laboratory Accreditation Certificate	KAN (Komite Akreditasi Nasional) NCA (National Committee on Accreditation)	3 Februari 2020 February 3, 2020	2 Februari 2025 February 2, 2025	5 tahun 5 years

SERTIFIKASI TAHUN 2021
CERTIFICATION OF 2021

No.	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope	Lembaga/Badan Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Bulan - Tahun Perolehan Achievement Date	Berlaku Hingga Validation Date	Masa Berlaku Sertifikasi Validity Period
UBJOM Pulang Pisau Pulang Pisau OMSBU					
1	Sertifikat *Zero Accident* Zero Accident Certificate	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	17 September 2020 September 17, 2020	17 September 2021 September 17, 2021	1 tahun 1 year
2	Sertifikat Laik Operasi Commissioning Certificate	Lembaga Inspeksi LI-026-IDN Inspection Agency LI-026-IDN	30 Juni 2021 June 30, 2021	30 Juni 2026 June 30, 2026	5 tahun 5 years

Sertifikasi Unit Bisnis Lain
Other Business Unit Certification

No.	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope	Lembaga/Badan Pemberi Sertifikasi Certification Institution	Bulan - Tahun Perolehan Achievement Date	Berlaku Hingga Validation Date	Masa Berlaku Sertifikasi Validity Period
PJB Academy					
1	*Educational Organizations Management System* - ISO 21001:2018	BSI	5 Oktober 2021 October 5, 2021	4 Oktober 2024 October 4, 2024	3 tahun 3 years
2	*Assessment Service Delivery* - ISO 10667-1:2020 & ISO 10667-2:2020	BSI	26 April 2021 April 26, 2021	25 April 2024 April 25, 2021	3 tahun 3 years

bsi.
Verification Statement
Assessment Service Delivery – ISO 10667-1:2020 & ISO 10667-2:2020
bsi.
Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015
bsi.
Certificate of Registration
IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 20000-1:2018
bsi.
Certificate of Registration
OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 45001:2018
bsi.
Certificate of Registration
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 50001:2018
bsi.
Certificate of Registration
ASSET MANAGEMENT SYSTEM - ISO 55001:2014
bsi.
Certificate of Registration
Educational Organizations Management System - ISO 21001: 2018
bsi.
Certificate of Registration
INTEGRATED MANAGEMENT REGISTRATION - PAS 99:2012
bsi.
Certificate of Registration
ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 37001:2016

INOVASI DAN SINERGI USAHA YANG SOLID, UNTUK MASA DEPAN ENERGI BERSIH

SOLID BUSINESS INNOVATION AND SYNERGY FOR A CLEAN ENERGY FUTURE

Tantangan besar bisnis saat ini adalah adaptasi dan tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta mampu mengelola kinerja Perusahaan agar tetap dapat terus tumbuh berkelanjutan. Mengingat saat ini, di hampir semua sistem ketenagalistrikan Indonesia telah terjadi kelebihan pasokan dengan cadangan (*reserve margin*) di atas 40 persen, sehingga penjualan listrik mengalami tren penurunan secara signifikan. Untuk itulah, PJB terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan kinerja PJB dan masa depan energi bersih. Selain memperkuat portofolio bisnis pada industri pembangkitan, PJB juga terus memperluas lini bisnis lainnya di luar aset pembangkitan yakni "*bisnis beyond* KWh".

Currently, a great business challenge is to adapt and withstand the Covid-19 pandemic and manage the Company's performance to grow sustainably. Seeing this condition in almost all Indonesian electricity systems, there has been an oversupply with a reserve margin of more than 40 percent so electricity sales are experiencing a significant downward trend. Therefore, PJB continues to build synergies and collaborations with various parties to encourage the growth of PJB's performance and the future of clean energy. Besides strengthening its business portfolio in the power generation industry, PJB also continues to expand other lines of business of non-generation assets known as "beyond KWh business".

INOVASI DAN SINERGI USAHA YANG SOLID, UNTUK MASA DEPAN ENERGI BERSIH
SOLID BUSINESS INNOVATION AND SYNERGY FOR A CLEAN ENERGY FUTURE

INOVASI & PERFORMASI: Kunci Menuju Kesuksesan PJB Group
INNOVATION & PERFORMANCE: Keys To PJB Group's Success

Inovasi dan performansi adalah dua kata kunci yang menjadi keniscayaan untuk PJB terus tumbuh dan berkembang di masa depan.

Innovation and performance are two keywords needed by PJB to sustainably grow and develop in the future.

Let's JUMP

Tidak hanya bermakna "**melompat**" namun juga mengandung makna akronim dari keempat huruf tersebut:

- ***Join Forces*** **(bergabung)**
  Ajakan kepada seluruh insan PJB Group, baik antar fungsi/ divisi/unit serta antar Anak Perusahaan untuk bergabung dalam satu wadah yaitu PJB.
- ***Unite*** **(bersatu)**
  Mempersatukan PJB Group ke dalam satu tujuan bekerjasama agar setiap lini bisnis PJB menjadi lebih kuat dengan saling menopang.
- ***Move Faster*** **(bergerak lebih cepat)**
  Lebih cepat dan tanggap terhadap perubahan, lebih responsif terhadap pasar, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan.
- ***Perserverance*** **(tekun/gigih)**
  Tidak mudah menyerah, *thinking out of the box* dan terus melakukan berbagai upaya tanpa henti dalam melakukan "lompatan-lompatan baru" dilandasi semangat kompeten dan profesional.

Besides referring to the meaning of the word **"jump"**, it is also an acronym for its four letters:

- **Join Forces**
  An invitation to all PJB Group personnel, both between functions/divisions/units as well as Subsidiaries to join one forum, PJB.
- **Unite**
  Uniting PJB Group into one objective of working together to strengthen PJB business line by supporting each other.
- **Move Faster**
  Faster and more responsive to changes, more responsive to the market, and faster in making decisions.
- **Perseverance**
  Holding out, thinking out of the box, and keeping on making "new leaps" based on a competent and professional spirit.

ICORE = Intelligent Centre of Optimization for Reliabilty & Efficiency

PJB telah melakukan inovasi berbasis teknologi digital 4.0 sebagai terobosan baru bagi dunia pembangkitan melalui ICORE berhasil memantau, menganalisis, dan mendiagnosis kondisi pembangkit secara digital dan *real time*. Dengan teknologi, keandalan dan efisiensi pembangkit dapat semakin dioptimalkan guna mendorong pertumbuhan kinerja yang lebih baik.

PJB has made innovations based on Digital Technology 4.0 as a new breakthrough for the world of power generation through ICORE which has successfully monitored, analyzed, and diagnosed power plant conditions digitally and in real-time. With technology, power plants' reliability and efficiency can be further optimized to encourage better performance growth.

PJB ACCESS

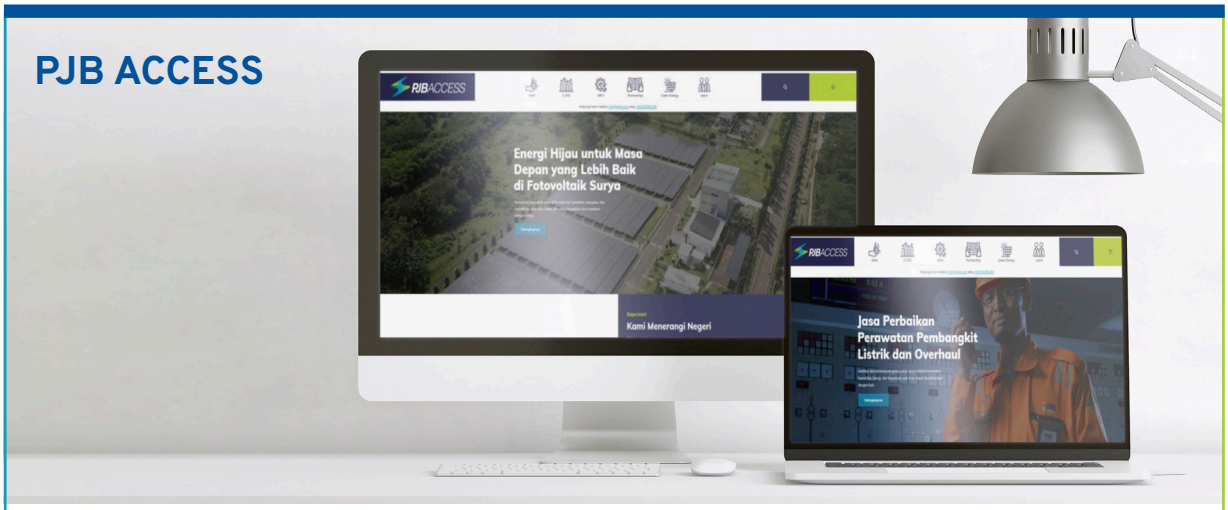

Adalah sebuah *platform digital Business to Business* yang menawarkan layanan terbaik PJB bagi industri kelistrikan, energi, maupun utilitas lainnya. PJB Access dilengkapi dengan fitur *live chat* sebagai bentuk komunikasi langsung yang diperlukan pelanggan yang dapat diakses melalui *gadget* pada *link*: www.ptpjb.com.

Is a Business-to-Business digital platform that offers PJB's best services for electricity, energy, and other utilities. PJB Access is supported with a live chat feature as a form of direct communication needed by customers which can be accessed on smartphones with the link: www.ptpjb.com.

SOKET = Sistem Optimasi Keandalan dan Efisiensi Terintegrasi

SOKET = Integrated Reliability and Efficiency Optimization System

Berbagai terobosan terus dilakukan PJB dalam implementasi *digital power plant*, SOKET salah satunya yang dikembangkan sesuai standar internasional ISO 13374. Setidaknya terdapat tiga keunggulan yang dimiliki oleh SOKET, yakni pertama, menerapkan prinsip *prescriptive analytics* untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan unit pembangkit, kedua, mendukung keputusan yang cepat dan tepat untuk meningkatkan efisiensi unit pembangkit serta ketiga, memberikan peningkatkan fungsi dari sistem yang telah diimplementasikan oleh PJB sebelumnya. PJB telah sukses melakukan aktivasi SOKET pada PLTU Paiton 1, 2 dan PLTU Indramayu, PLTU Tanjung Awar-awar dan PLTU Tenayan.

PJB continues to make various breakthroughs in the implementation of digital power plants, one of which is SOKET which was developed according to the international standard ISO 13374. There are at least three advantages of SOKET; firstly, applying prescriptive analytics principles to increase reliability and availability of generating units; secondly, supporting decisions that are fast and precise to increase the efficiency of the generation unit; and thirdly, to provide an increase in the function of the system that has been implemented by PJB previously. PJB has successfully activated SOKET at Paiton 1 CFPP, Paiton 2 CFPP, Indramayu CFPP, Tanjung Awar-awar CFPP, and Tenayan CFPP.

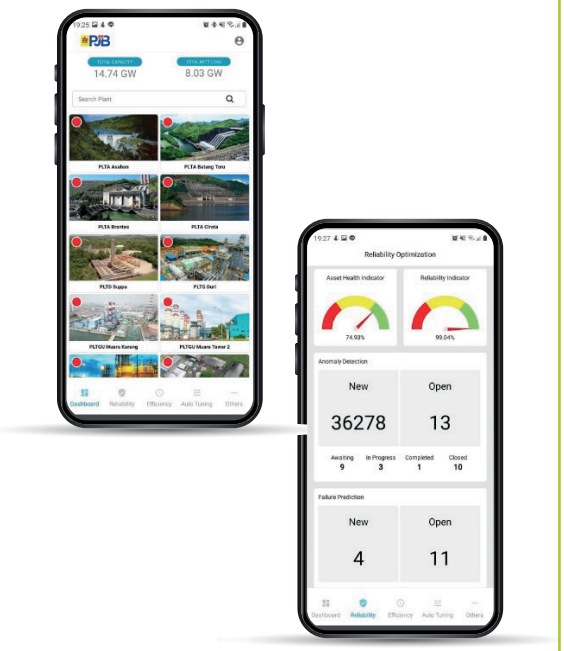

INOVASI DAN SINERGI USAHA YANG SOLID, UNTUK MASA DEPAN ENERGI BERSIH
SOLID BUSINESS INNOVATION AND SYNERGY FOR A CLEAN ENERGY FUTURE

Carbon Offset Pertama di PLN Group: Kontribusi PJB Untuk Bumi
The First Carbon Offset in the PLN Group: PJB's Contribution to the Earth

PLTU Paiton 2x400 MW Paiton CFPP 2x400 MW

Carbon offset adalah strategi terbaru PJB untuk mendukung gerakan Bumi yang lebih bersih dan sehat serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

Carbon Offset is PJB's latest strategy to support a cleaner and healthier Earth and reduce greenhouse gas emissions.

Carbon offset merupakan strategi PJB dalam mendukung gerakan Hijaukan Bumi dan menurunkan emisi gas rumah kaca dengan mengkompensasi emisi karbon yang dihasilkannya dengan kegiatan atau program penurunan emisi pihak lainnya. Melalui *carbon offset* di PLTU Paiton 1-2 PJB mendapatkan *carbon credit* milik PLTA Sipansihaporas yang dihasilkan dari program *verified carbon standard* (VCS), setelah melalui serangkaian kegiatan proses registrasi, validasi, dan verifikasi oleh lembaga independen.

PJB meyakini bahwa semakin banyak perusahaan yang melakukan *carbon offset* maka semakin besar pula dampak positif Perusahaan di dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Carbon Offset is PJB's strategy in supporting the Green Earth movement and reducing greenhouse gas emissions by compensating for the produced carbon emissions with other parties' emission reduction activities or programs. Through carbon offsets at Paiton 1-2 CFPPs, PJB obtained a carbon credit of Sipansihaporas HPP from the Verified Carbon Standard (VCS) program, after going through the process of registration, validation, and verification by independent institutions.

PJB believes that the more companies that apply carbon offsets, the greater the positive impact of the Company in various aspects, both economic, social, and public health.

Kolaborasi dan Sinergi Untuk Menciptakan Kurva Bisnis Baru *Beyond* KWh

Collaboration and Synergy To Create a New Business Profile Beyond KWh

PJB gencar melakukan ekspansi bisnis di luar produksi listrik, antara lain dengan mengincar pasar internasional. Di tahun 2021, PJB mengerjakan proyek *major inspection* pembangkit PLTGU Chandpur 150 MW salah satu pembangkit yang menumpu sistem ketenagalistrikan di Bangladesh.

Diperolehnya kesepakatan *financial close* terhadap pendanaan proyek PLTS Terapung berkapasitas 145 MWac, melalui sindikasi 3 (tiga) bank internasional yakni Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale dan Standard Chartered Bank untuk membangun PLTS terbesar se-Asia Tenggara. Hal tersebut memperkuat eksistensi PJB dalam membangun kerjasama multilateral internasional, tidak hanya dengan Abu Dhabi sebagai konsorsium kerjasamanya, termasuk juga dengan negara-negara asal bank pemberi sindikasi pendanaan proyek tersebut.

Selain itu, kolaborasi dan sinergi juga terus dibangun oleh PJB antara lain melakukan audiensi dengan Kedutaan Besar RI di Nigeria terkait pengembangan usaha segmen *beyond* KWh ke pasar internasional di negara-negara Afrika. Seluruhnya menjadi sumber energi untuk melompat lebih tinggi meraih kinerja di tahun-tahun mendatang.

PJB is aggressively expanding its business outside the electricity production, among others by targeting the international market. In 2021, PJB is working on a major inspection project for the Chandpur 150 MW CCPP, one of the plants that support the electricity system in Bangladesh.

The financial close agreement on funding for the Floating SPP project with a capacity of 145 Mwac was established through syndication of 3 (three) international banks: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale, and Standard Chartered Bank to build the largest SPP in Southeast Asia. This strengthens the existence of PJB in building international multilateral cooperation; not only with Abu Dhabi as a consortium of cooperation but also with the originating countries of the banks that provide funding to the project.

Additionally, PJB continues to build collaborations and synergies, including holding audiences with the Indonesian Embassy in Nigeria regarding the business development of the beyond KWh segment to international markets in African countries. Those become sources of energy to jump higher to achieve better performance in the following years.

Unit Pembangkit Pertama di Indonesia yang Meraih ISO 37001

First Generation Units in Indonesia to Achieve ISO 37001

bsi.

Certificate of Registration

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 37001:2016

This is to certify that:

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
Unit Pembangkitan Cirata
Desa Cadassari, Kecamatan Tegalwaru
Plered
Kabupaten Purwakarta
Jawa Barat
Indonesia 41162

UP Muara Karang, UP Cirata dan UP Paiton memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan cakupan seluruh proses bisnis yang ada di masing-masing unit, merupakan Unit Pembangkitan pertama di Indonesia yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi tersebut.

Muara Karang GU, Cirata GU, and Paiton GU obtained ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (SMAP) certification with a scope of all business processes in each unit as the first Generation Units in Indonesia to successfully receive this certification.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

Posisi Keuangan
Financial Position

(Rp juta) (Rp million)

Uraian Description	2017	2018	2019*	2020	2021
Aset Lancar Current Assets	23.529.438	27.276.991	27.311.267	31.686.542	32.460.225
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	169.791.672	147.113.916	145.912.098	143.874.478	139.703.603
Jumlah Aset Total Assets	**193.321.110**	**174.390.907**	**173.223.365**	**175.561.020**	**172.163.828**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	4.033.059	4.862.490	4.225.099	4.954.830	5.017.427
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	3.438.069	2.519.730	5.225.171	5.291.239	5.977.136
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**7.471.128**	**7.382.220**	**9.450.270**	**10.246.069**	**10.994.563**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**185.849.982**	**167.008.687**	**163.773.095**	**165.314.951**	**161.169.265**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas **Total Liabilities and Equity**	**193.321.110**	**174.390.907**	**173.223.365**	**175.561.020**	**172.163.828**
Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Investment in Associates/Joint Ventures	5.801.036	7.445.759	7.880.576	9.744.556	12.390.846

* reklasifikasi *reclassification

Aset Lancar (Rp juta)
Current Assets (Rp million)

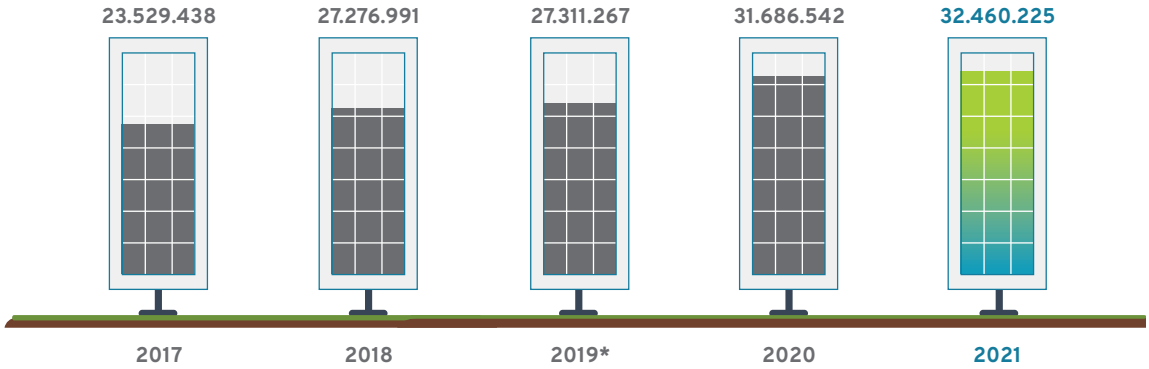

*reklasifikasi *reclassification

Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Non-Current Assets (Rp million

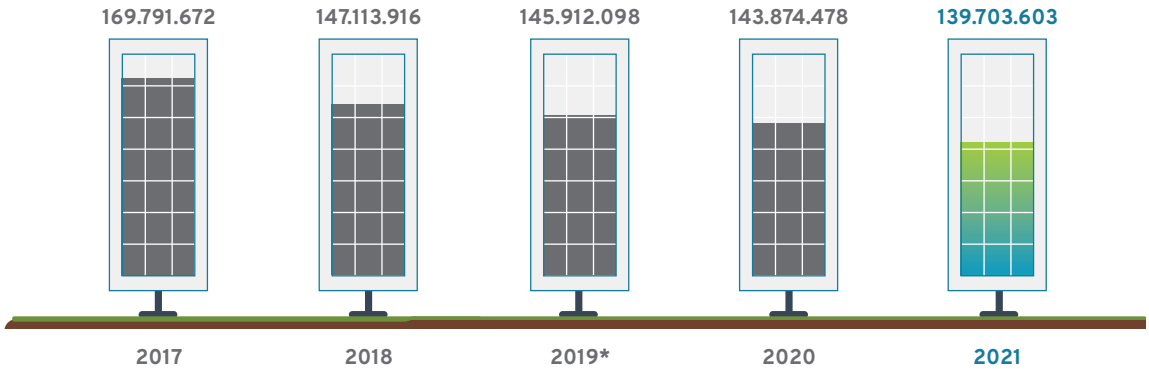

*reklasifikasi *reclassification

Jumlah Aset (Rp juta)
Total Assets (Rp million)

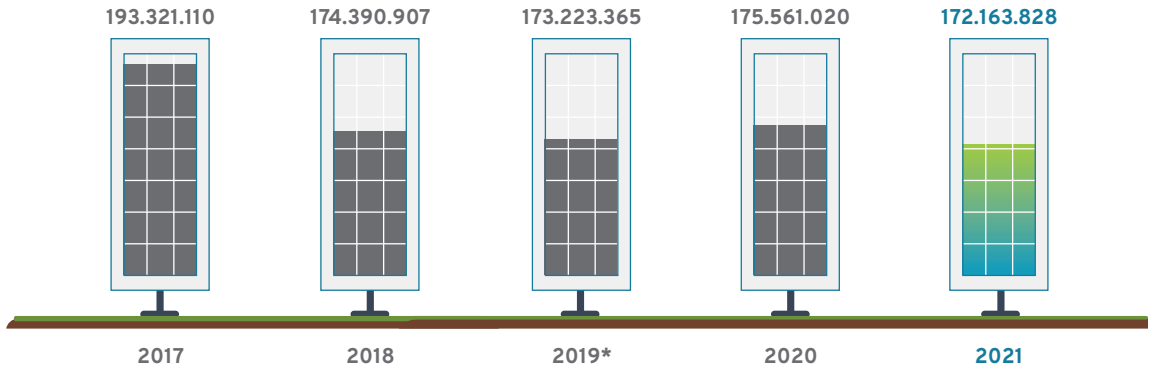

*reklasifikasi *reclassification

Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Current Liabilities (Rp million)

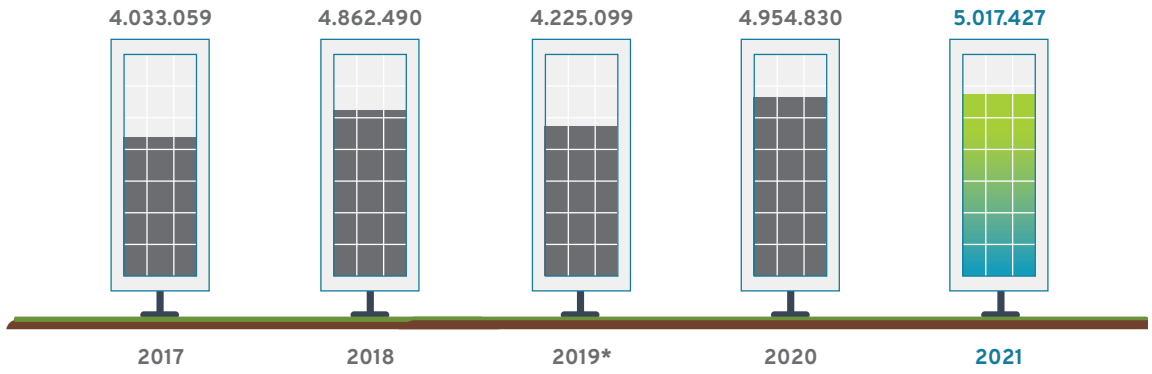

*reklasifikasi *reclassification

Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Non-Current Liabilities (Rp million)

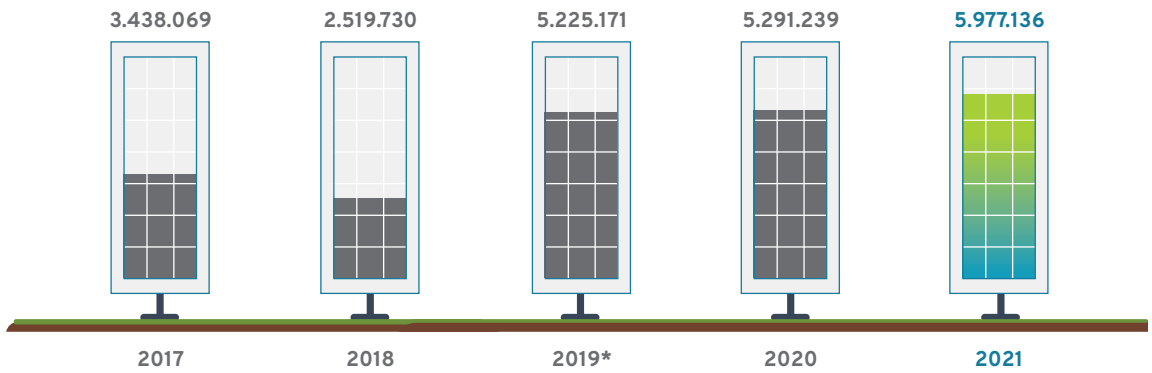

*reklasifikasi *reclassification

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

Jumlah Liabilitas (Rp juta)
Total Liabilities (Rp million)

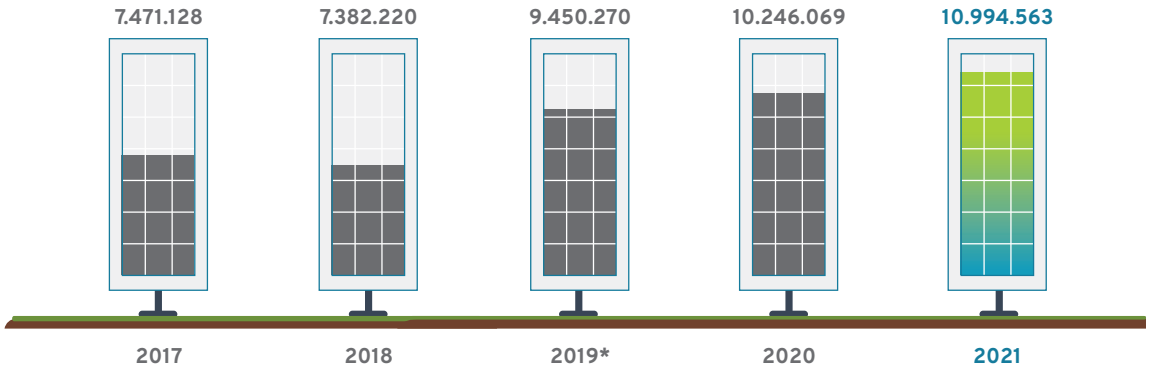

*reklasifikasi *reclassification

Jumlah Ekuitas (Rp juta)
Total Equity (Rp million)

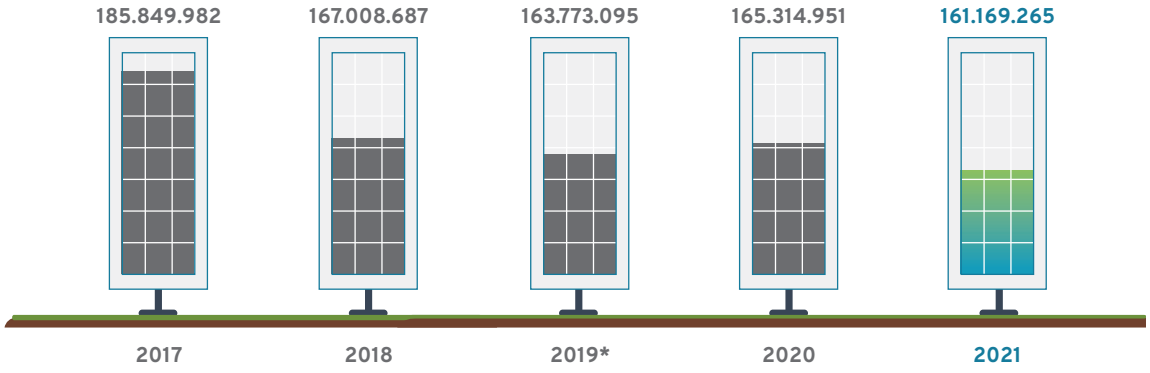

*reklasifikasi *reclassification

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama (Rp juta)
Investment in Associates/Joint Ventures (Rp million)

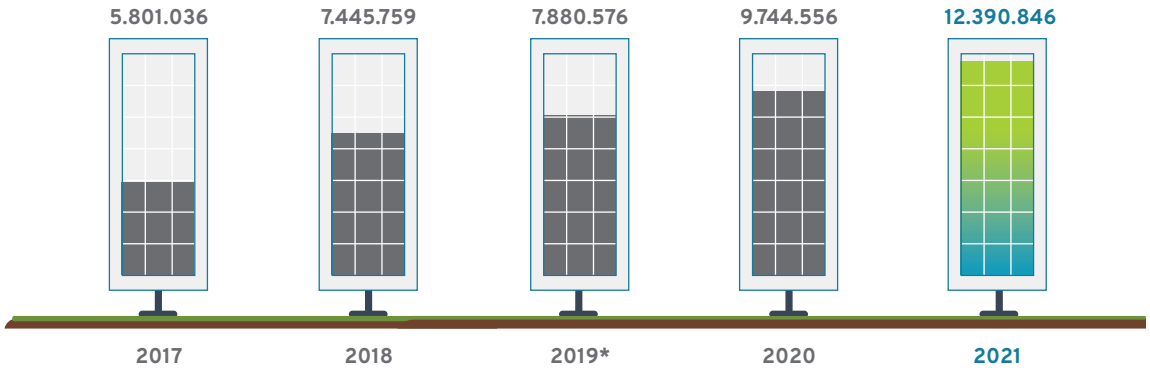

*reklasifikasi *reclassification

Laba Rugi Komprehensif
Comprehensive Profit or Loss

(Rp juta) (Rp million)

Uraian Description	2017	2018	2019*	2020	2021
Pendapatan Usaha Revenues	31.403.787	40.821.026	39.757.950	30.434.176	29.508.134
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	26.378.159	34.757.316	33.681.317	25.476.470	24.541.378
Jasa Operasi & Pemeliharaan Operation & Maintenance Services	3.506.459	4.255.967	4.422.238	4.093.834	4.057.567
Konstruksi Construction	1.102.092	1.492.640	1.396.106	702.929	727.224
Lainnya Others	417.077	315.103	258.289	160.943	181.965
Beban Usaha Operating Expenses	(27.946.839)	(34.334.181)	(31.062.892)	(21.908.552)	(25.101.143)
Laba Usaha Operating Income	3.456.948	6.486.845	8.695.058	8.525.624	4.406.991
Pos Keuangan dan Lain-lain (Bersih) Financial Items and Others (Net)	1.184.930	1.173.839	918.280	1.714.483	2.785.049
Beban Pajak Tax Expense	(960.206)	(1.743.252)	(2.950.016)	(2.536.295)	(1.371.852)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**3.681.672**	**5.917.432**	**6.663.322**	**7.703.812**	**5.820.188**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year after Tax	73.726	(21.088.224)	(490.848)	336.930	(2.301.389)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Comprehensive Income for the Year**	**3.755.398**	**(15.170.792)**	**6.172.474**	**8.040.742**	**3.518.799**
Laba Tahun Berjalan Diatrubusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	3.668.635	5.904.512	6.645.392	7.661.396	5.810.033
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	13.037	12.920	17.930	42.416	10.155
Laba Tahun Berjalan Diatrubusikan kepada: Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	3.742.804	(15.190.703)	6.159.853	7.995.887	3.494.125
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	12.594	19.911	12.621	44.855	24.674
Laba Per Saham Dasar Basic Earnings per Share	611	984	1.108	1.284	970

*reklasifikasi *reclassification

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

Pendapatan Usaha (Rp juta)
Revenues (Rp million)

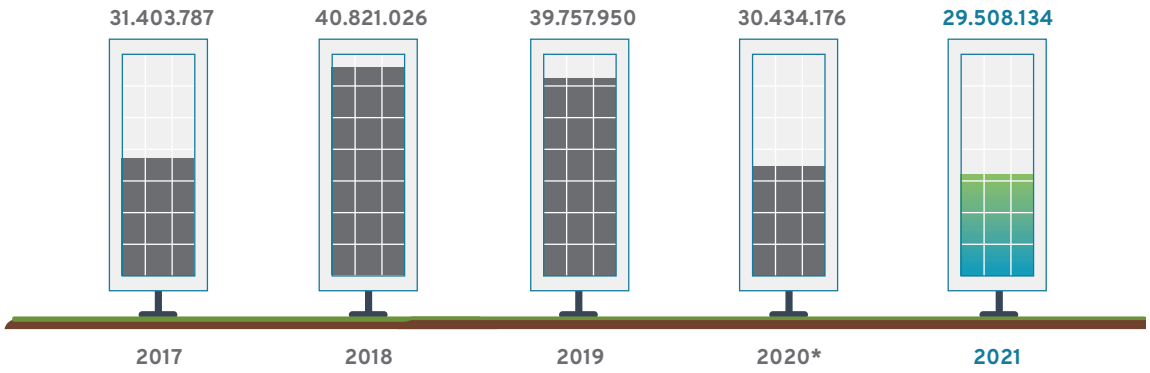

*reklasifikasi *reclassification

Beban Usaha (Rp juta)
Operating Expenses (Rp million)

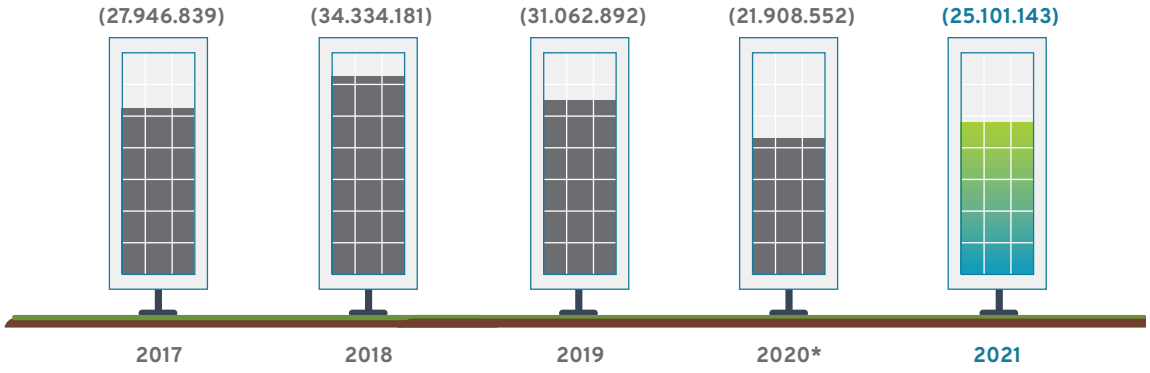

*reklasifikasi *reclassification

Laba Usaha (Rp juta)
Operating Income (Rp million)

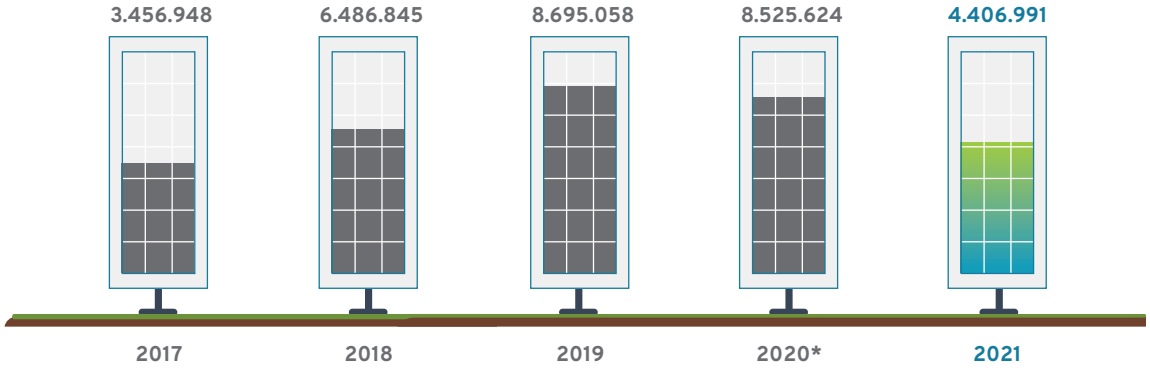

*reklasifikasi *reclassification

Laba Tahun Berjalan (Rp juta)
Profit for the Year (Rp million)

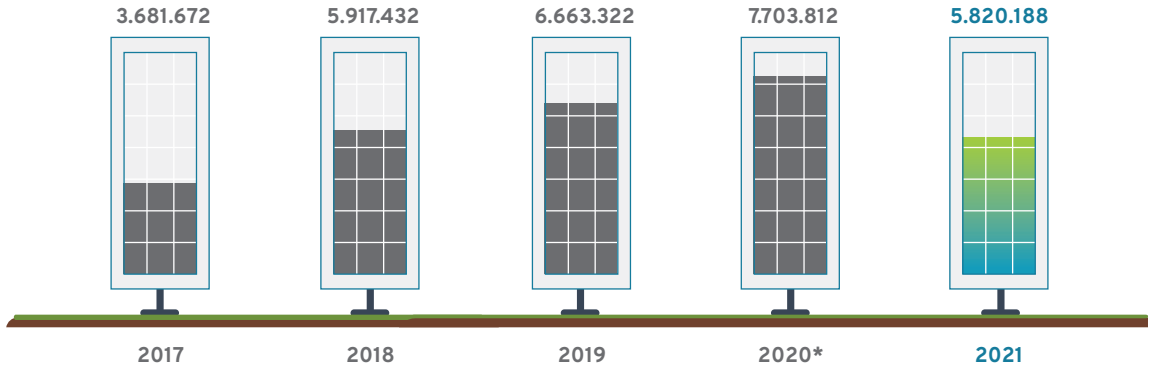

*reklasifikasi *reclassification

Laba Per Saham Dasar (Rp juta)
Basic Earnings per Share (Rp million)

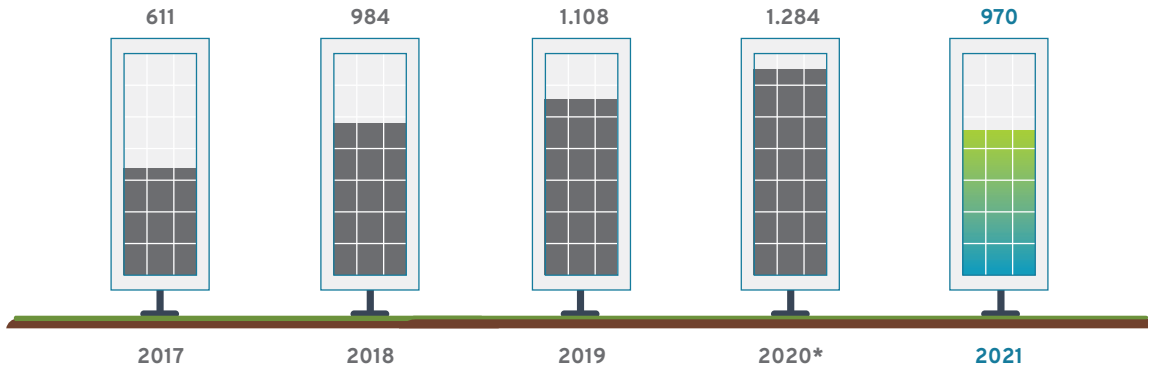

*reklasifikasi *reclassification

Informasi Arus Kas
Cash Flows Information

(Rp juta) (Rp million)

Uraian Description	2017	2018	2019*	2020	2021
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	2.774.372	2.748.822	1.195.765	2.177.126	4.323.208
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(2.038.741)	(4.153.893)	(2.523.516)	(1.371.476)	(334.356)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	(1.279)	209.562	1.480.894	851.017	(167.500)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

Uraian Description	2017	2018	2019*	2020	2021
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	740.352	(1.195.509)	153.143	1.656.667	3.821.352
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	2.135.475	2.879.830	1.688.004	1.838.858	3.511.113
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Changes in Foreign Currency	4.003	3.683	(2.289)	15.588	11.503
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Total Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	2.879.830	1.688.004	1.838.858	3.511.113	7.343.968

Rasio Keuangan
Financial Ratio

Uraian Description	2017	2018	2019*	2020	2021
RASIO PROFITABILITAS PROFITABILITY RATIO					
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (%) Return on Assets (%)	1,90	3,39	3,84	4,36	3,38
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (%)	1,98	3,54	4,06	4,63	3,61
Rasio Laba (Rugi) terhadap Investasi (%) Return on Investment (%)	4,40	6,70	7,83	7,86	6,19
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan (%) Net Profit Margin (%)	11,72	14,50	16,76	25,31	19,72
Rasio Pertumbuhan Penjualan (%) Sales Growth Ratio (%)	(7,69)	31,77	(9,48)	(23,60)	15,96
RASIO LIKUIDITAS LIQUIDITY RATIO					
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	583,41	560,97	565,40	639,51	646,95
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	71,41	34,71	36,37	70,86	152,15
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	549,67	518,21	529,15	608,30	589,71
RASIO SOLVABILITAS SOLVENCY RATIO					
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	4,02	4,42	5,77	6,20	6,82
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (%) Debt to Total Assets Ratio (%)	3,86	4,23	5,46	5,84	6,39
RASIO AKTIVITAS ACTIVITY RATIO					
Collection Period (hari) Collection Period (days)	197	180	203	303	292
Perputaran Total Aset (%) Total Assets Turnover (%)	0,16	0,23	0,23	0,17	0,17

Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (%)
Return on Assets (%)

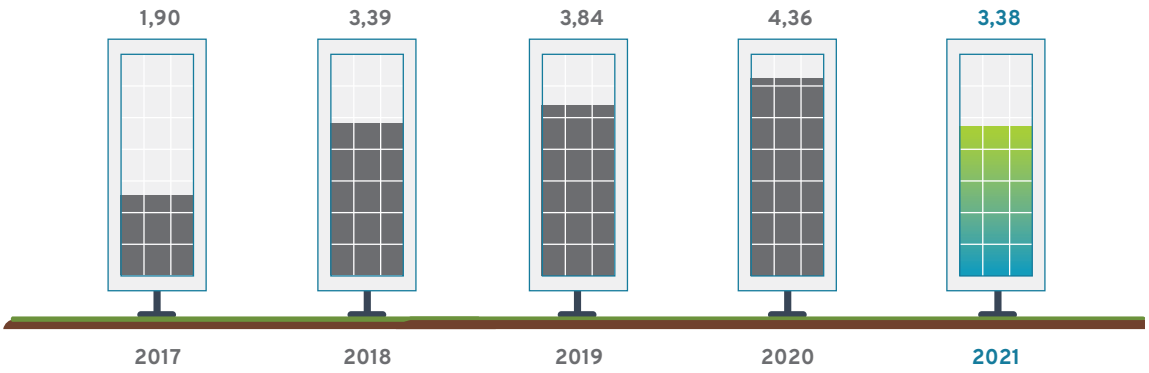

Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%)
Return on Equity (%)

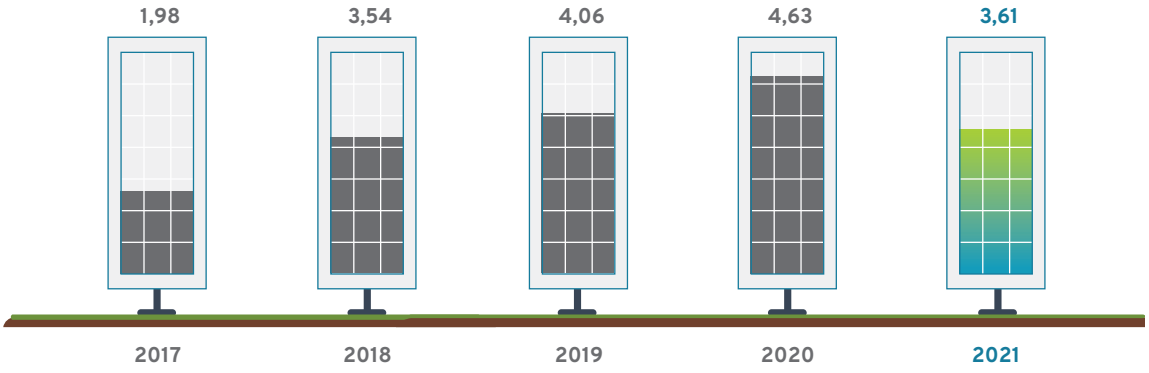

Rasio Lancar (%)
Current Ratio (%)

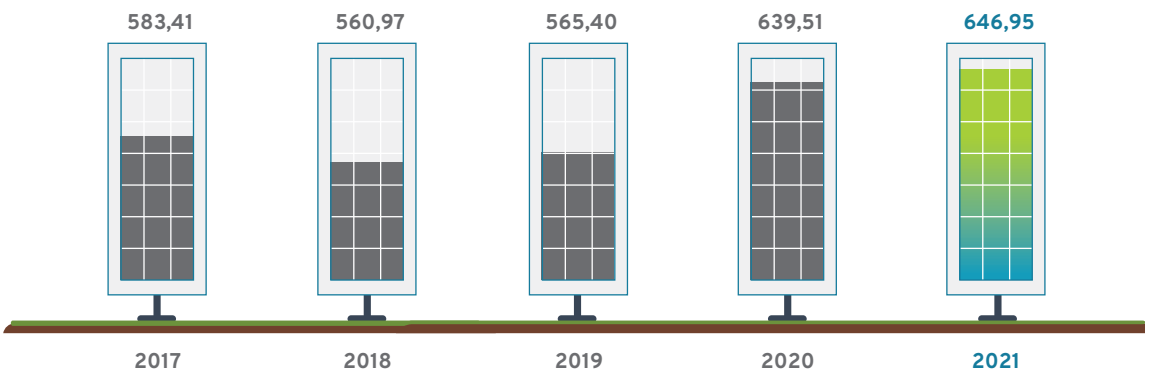

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

Rasio Kas (%)
Cash Ratio (%)

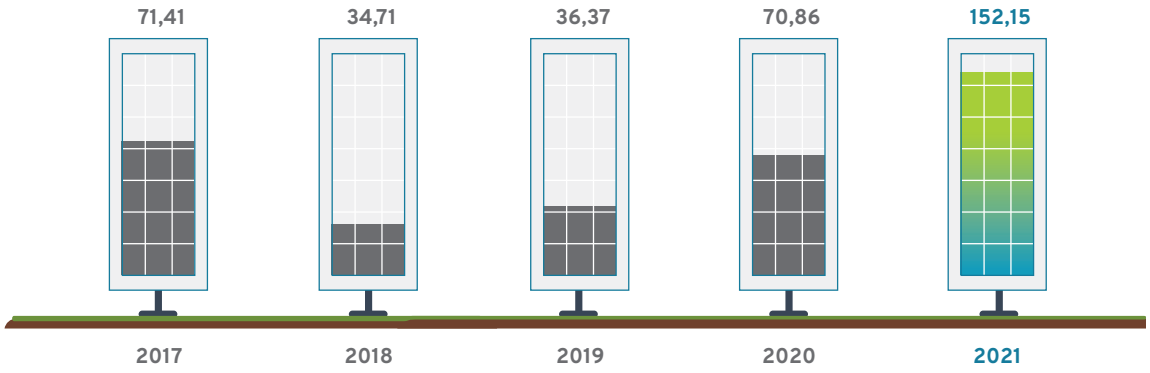

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)
Debt to Equity Ratio (%)

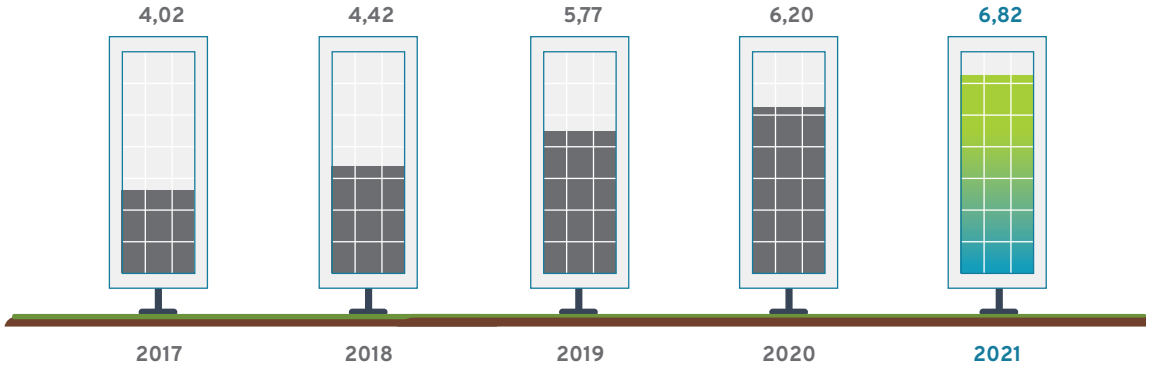

Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (%)
Debt to Total Assets Ratio (%)

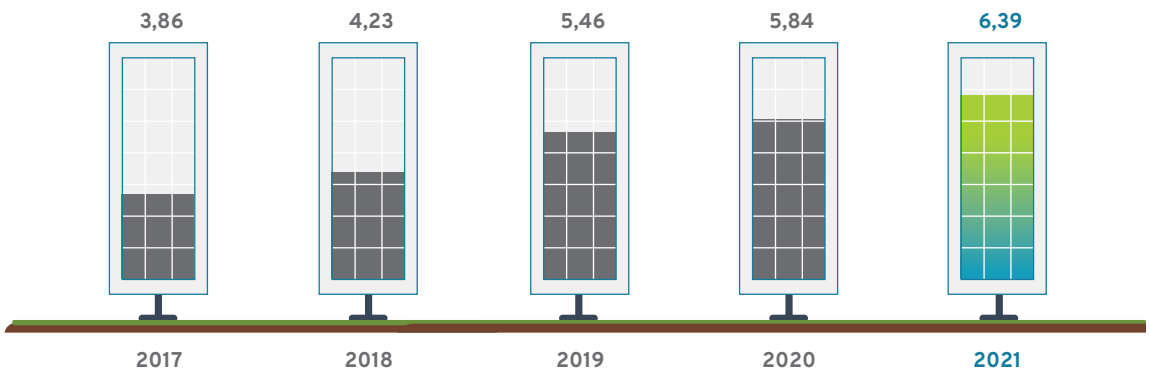

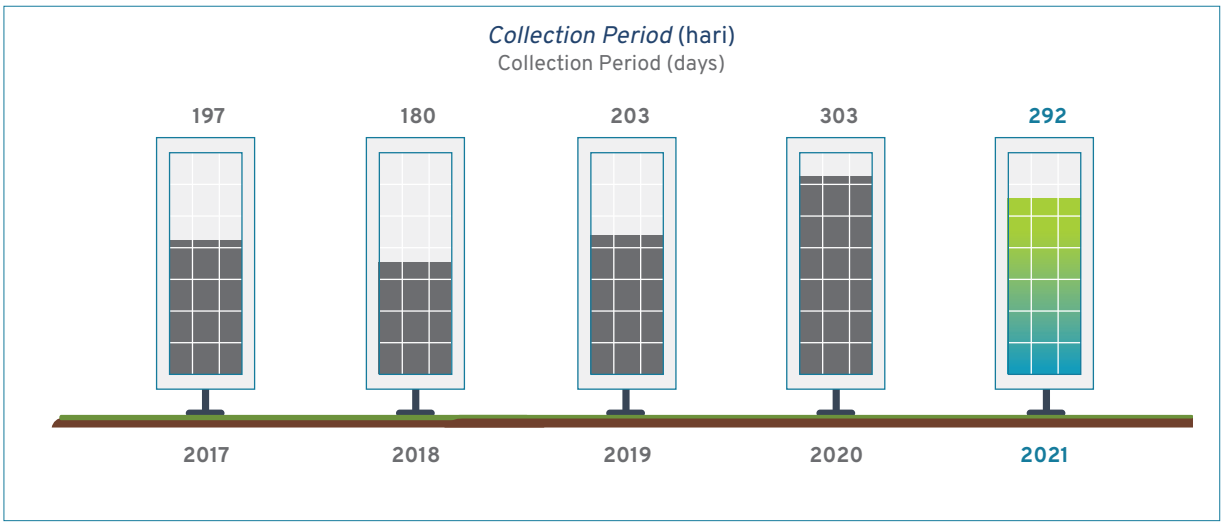

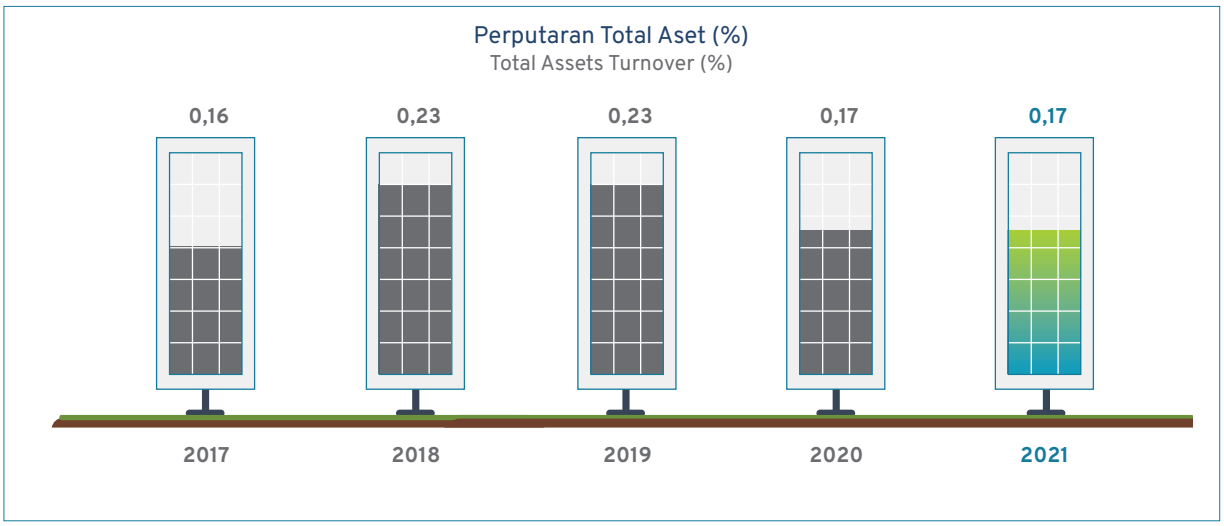

Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Performance Overview

Uraian Description	2017	2018	2019*	2020	2021
Produksi Energi Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	24.507	25.847	23.313	17.816	20.641
Penjualan Energi Listrik (GWh) Electricity Sales (GWh)	23.441	24.752	22.404	17.117	19.848
EAF Eksisting (%) EAF of Existing Units (%)	94,68	94,09	95,06	95,52	95,47
EAF FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%) EAF of FTP-1 or Java Area OMSBU (%)	76,33	77,20	91,06	90,67	83,31
EFOR Eksisting (%) EFOR of Existing Units (%)	1,10	1,01	0,80	0,93	3,70
EFOR FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%) EFOR of FTP-1 or Java Area OMSBU (%)	8,58	10,34	1,94	3,64	4,68

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

Uraian Description	2017	2018	2019*	2020	2021
Tara Kalor Neto Eksisting (kCal/KWh) Net Plant Heat Rate of Existing Units (kCal/KWh)	2.409,06	2.464,36	2.490,62	2.509,04	2.484,66
Tara Kalor Neto FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (kCal/KWh) Net Plant Heat Rate of FTP-1 or Java Area OMSBU (kCal/KWh)	2.692,18	2.676,67	2.530,20	2.749,53	2.787,60
Jumlah Daya Mampu Neto (MW) Net Total Capacity (MW)	10.515	10.815	10.597	10.664	10.866
Jumlah Karyawan (orang) Total Employees (person)	3.172	3.085	3.186	3.123	3.071
Skor *Assessment* GCG (skor) GCG Assessment Score (score)	93,64	94,17	94,45	95,06	95,67
Tingkat Kesehatan Soundness Level	95,79	92,72	93,17	99,78	96,13
	AAA	AA	AA	AAA	AAA

Produksi Energi Listrik (GWh)
Electricity Production (GWh)

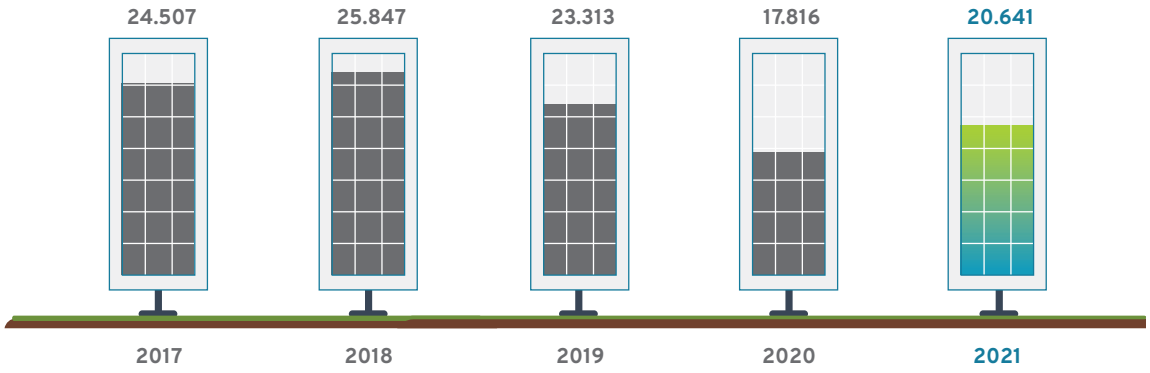

Penjualan Energi Listrik (GWh)
Electricity Sales (GWh)

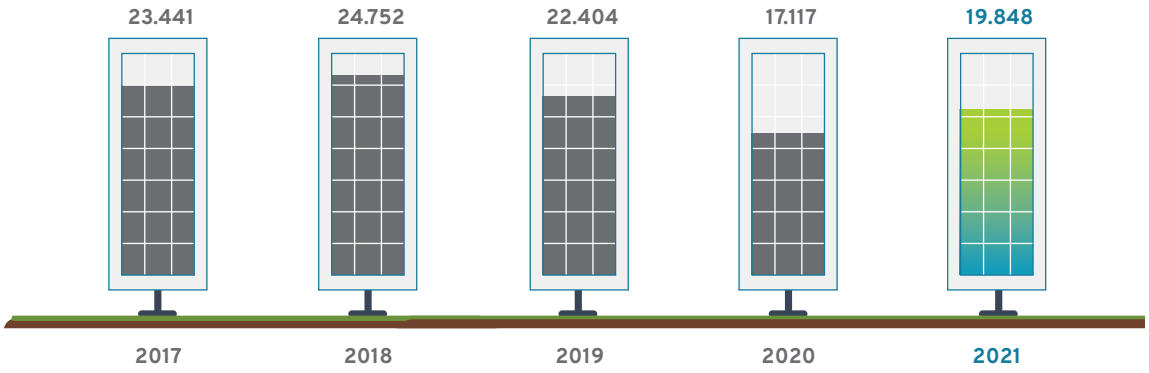

EAF Eksisting (%)
EAF of Existing Units (%)

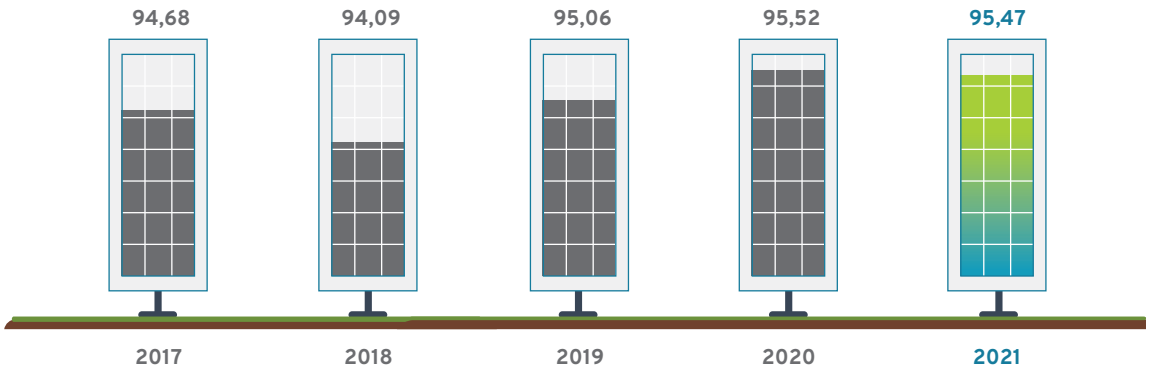

EAF FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%)
EAF of FTP-1 or Java Area OMSBU (%)

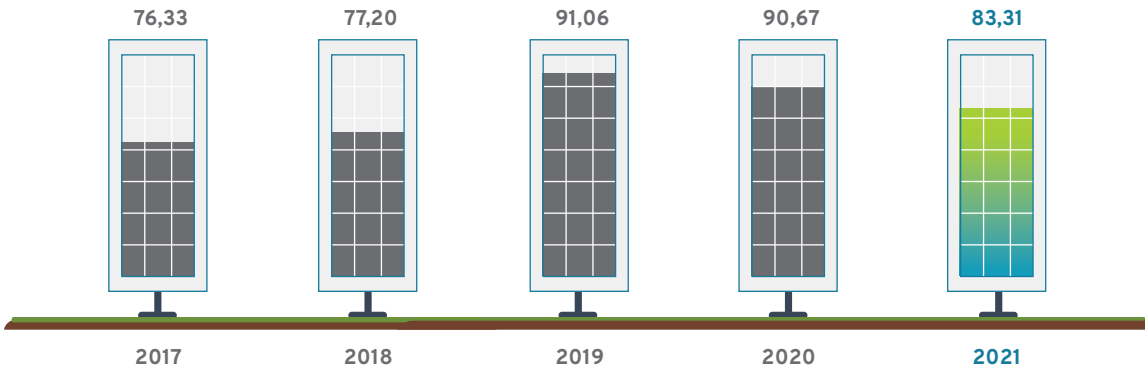

EFOR Eksisting (%)
EFOR of Existing Units (%)

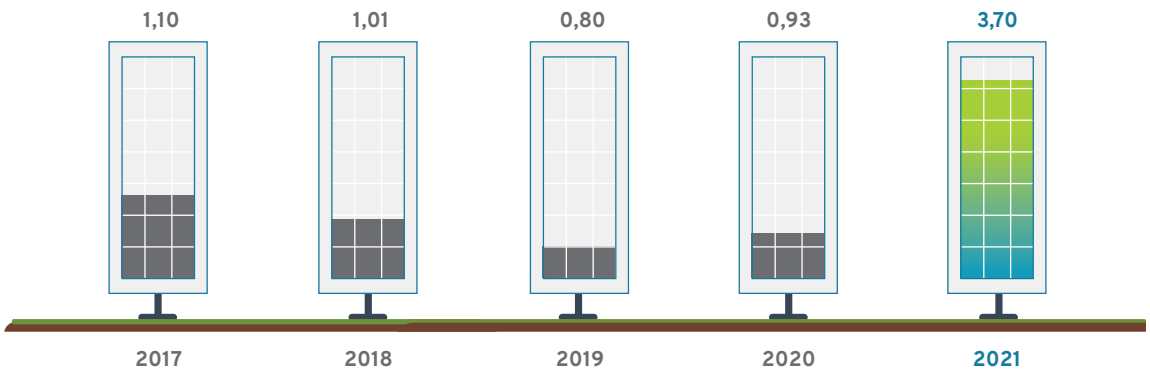

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

EFOR FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (%)
EFOR of FTP-1 or Java Area OMSBU (%)

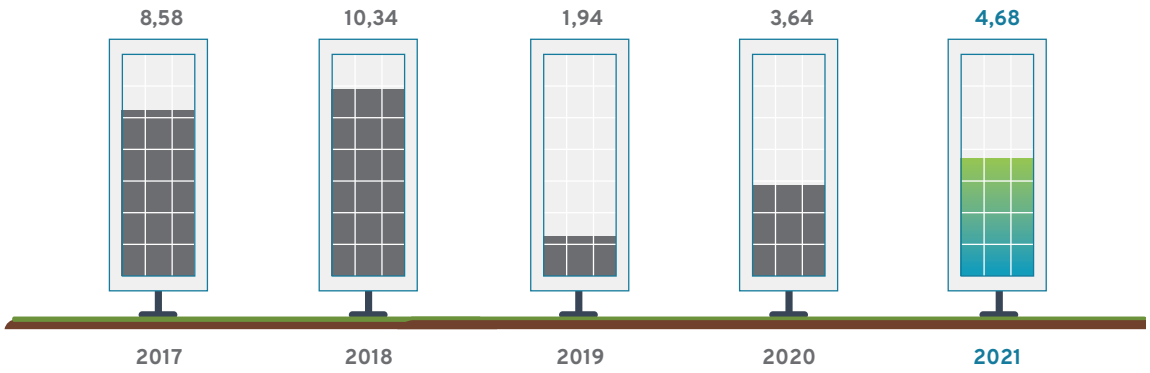

Tara Kalor Neto Eksisting (kCal/KWh)
Net Plant Heat Rate of Existing Units (kCal/KWh)

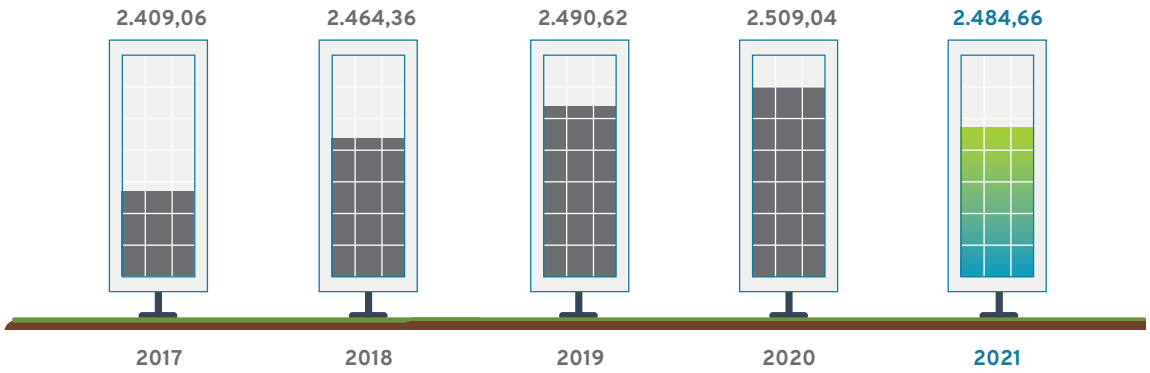

Tara Kalor Neto FTP-1 atau UBJOM Wilayah Jawa (kCal/KWh)
Net Plant Heat Rate of FTP-1 or Java Area OMSBU (kCal/KWh)

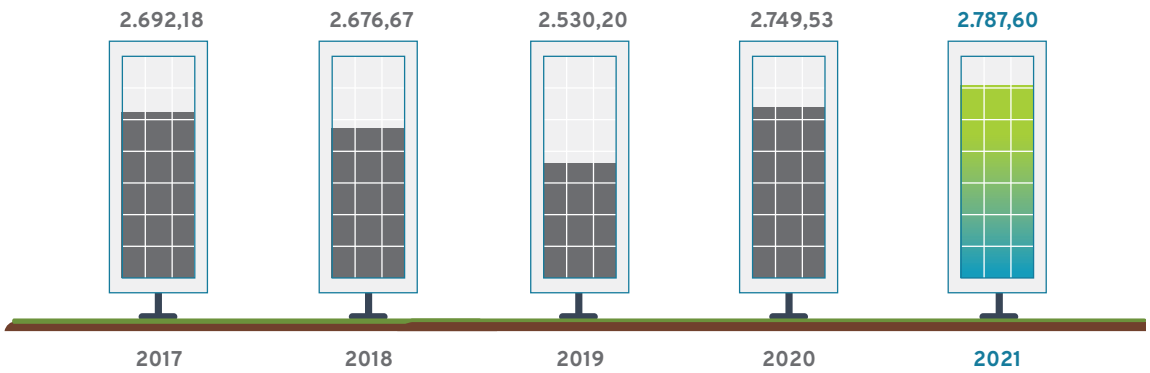

Jumlah Daya Mampu Neto (MW)
Net Total Capacity (MW)

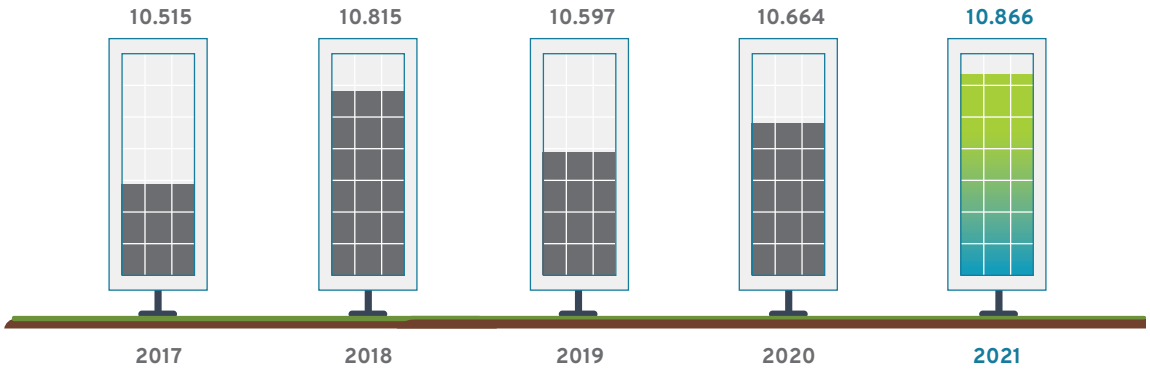

Jumlah Karyawan (orang)
Total Employees (person)

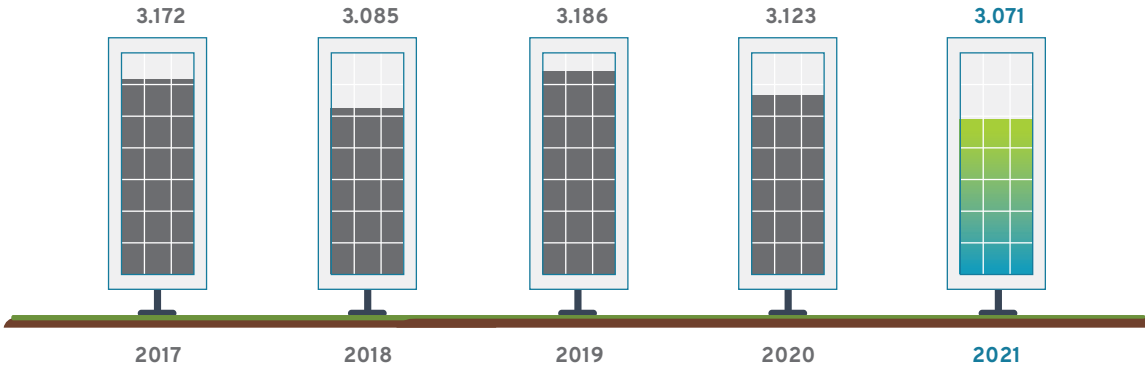

Skor *Assessment* GCG (skor)
GCG Assessment Score (score)

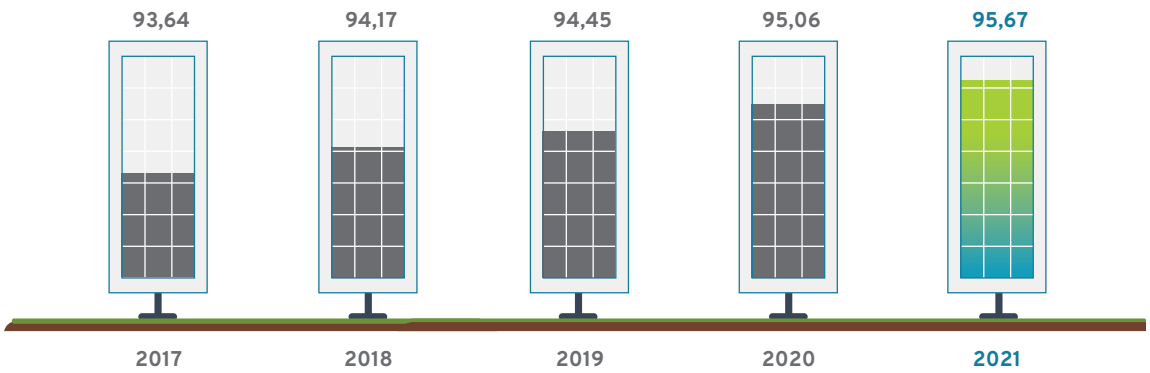

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

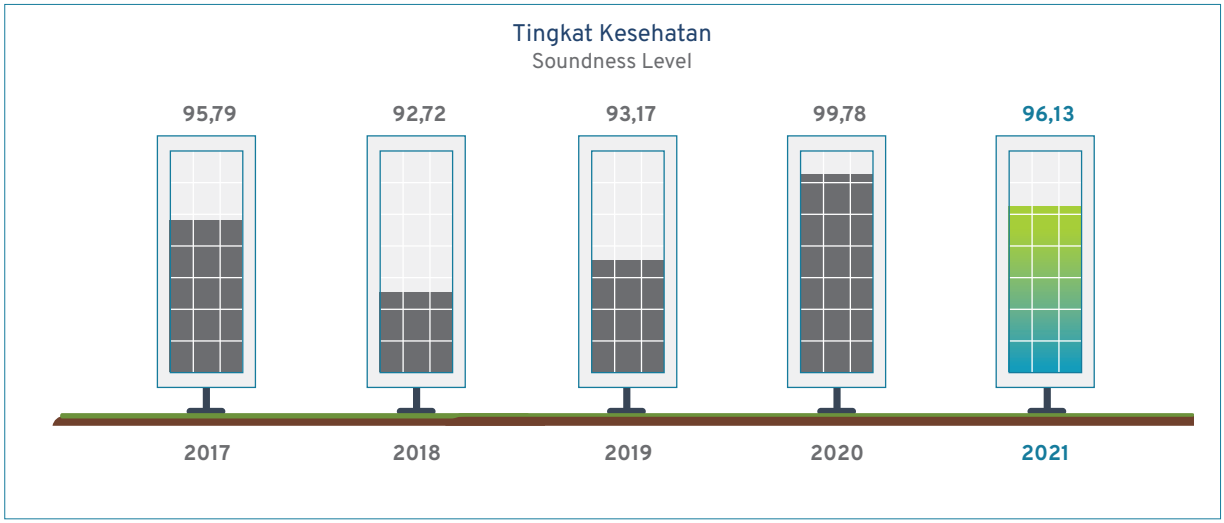

Ikhtisar Saham
Stock Overview

Sampai dengan akhir tahun 2021, PJB tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

As of the end of 2021, PJB did not conduct stock trading; therefore, there is no information on the highest stock price, lowest stock price, and closing stock price as well as the volume of traded shares.

Ikhtisar Obligasi
Bonds Overview

Sampai dengan akhir tahun 2021, PJB tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

As of the end of 2021, PJB did not issue bonds, sukuk, and convertible bonds; therefore, there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/benefits, due dates, and bonds/sukuk ratings.

PERISTIWA PENTING 2021
EVENT HIGHLIGHTS 2021

13 JANUARI
JANUARY

Peluncuran PJB Access
PJB Access Launch

PJB resmi meluncurkan layanan PJB Access, yakni sebuah *platform digital Business to Business* (B2B) yang menawarkan layanan terbaik PJB baik bagi industri ketenagalistrikan, energi, dan utilitas lainnya serta industri skala kecil hingga besar. PJB Access menjadi *platform* terdepan dalam mempersingkat proses agar semua layanan PJB dapat dengan mudah dilihat, dikenali, dan dipesan hanya melalui perangkat seluler pelanggan.

PJB officially launched the PJB Access service, which is a Business to Business (B2B) digital platform that offers PJB's best services for the electricity, energy, and other utility industries as well as small to large scale industries. PJB Access is the leading platform in streamlining the process so that all PJB services can be easily viewed, recognized, and ordered only through the customer's mobile device.

13 JANUARI
JANUARY

Peringatan Bulan K3 Nasional 2021
National OHS Month of 2021

Bulan K3 Tahun 2021 dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 hingga 18 Februari 2021, dengan 6 (enam) kegiatan utama secara daring atau *virtual* yaitu Lomba *Emergency Response Preparedness*; Lomba Tata Graha 5S; Apresiasi Implementasi Izat; Lomba Video Kreatif; Lomba *Safety Creative Paper;* serta Lomba *Safety Quiz.*

OHS Month of 2021 was held from January 13, 2021 to February 18, 2021, with 6 (six) online or virtual activities: the Emergency Response Preparedness Competition; 5S Housekeeping Competition; Izat Implementation Appreciation; Creative Video Contest; Safety Creative Paper Contest; and Safety Quiz Competition.

15 FEBRUARI
FEBRUARY

Peresmian "Omah Bamboe" di Paiton
Inauguration of "Omah Bamboe" in Paiton

PJB meresmikan wisata penginapan baru "Omah Bamboe" yang terletak di area Pareho 2 sebagai bentuk pemanfaatan area yang tidak terpakai serta untuk pemberdayaan terhadap warga sekitar Paiton. Omah Bamboe mengusung konsep minimalis layaknya *glamour camping* dengan rumah-rumah kecil dan ke depannya akan memiliki 25-50 unit kamar dengan harga yang terjangkau.

PJB inaugurated a new tourist inn "Omah Bamboe" located in the Pareho 2 area as a form of utilization of unused areas and for empowerment of residents around Paiton. Omah Bamboe carries a minimalist concept influenced by glamor camping style with small houses which in the future, it is projected to have 25-50 room units at affordable prices.

PERISTIWA PENTING 2021
EVENT HIGHLIGHTS 2021

24 FEBRUARI
FEBRUARY

Sinergi Melalui Rumah dan Koperasi Batik Probolinggo
Synergy through Probolinggo Batik Home Industry and Cooperatives

Bupati Probolinggo, Hj. P. Tantriana Sari, S.E, meresmikan Rumah Batik Kabupaten Probolinggo, merupakan Koperasi Batik pertama di wilayah Jawa Timur yang hadir sebagai sinergi Adikarya Pengrajin Batik, Bordir, dan Asesoris (APBBA), Koperasi Adikarya Probolinggo Sejahtera, Dinas Koperasi dan UKM, serta PJB UP Paiton.

Regent of Probolinggo, Hj. P. Tantriana Sari, S.E, inaugurated the Probolinggo Regency Batik House, which is the first Batik Cooperative in the East Java presented as a synergy of Adikarya Batik, Embroidery, and Accessories (APBBA) craftsmen, Adikarya Probolinggo Sejahter Cooperative, Cooperatives and SMEs Service, and PJB Paiton.GU.

19 MARET
MARCH

PJB Menambah *Co-Firing* PLTU secara Komersil
PJB Commercially Adds Co-Firing CFPP

PJB resmi melaksanakan *Go Live Co-Firing* PLTU Rembang, PLTU ke-4 yang telah berhasil dalam penerapan *Co-Firing* secara komersil, untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan berdampak pada kualitas udara di sekitar pembangkit menjadi lebih baik.

PJB has officially implemented Go Live Co-Firing of Rembang CFPP, the 4th CFPP which has succeeded in implementing Co-Firing commercially, to reduce greenhouse gas emissions and have an impact on the air quality around the plant for the better.

18 MARET
MARCH

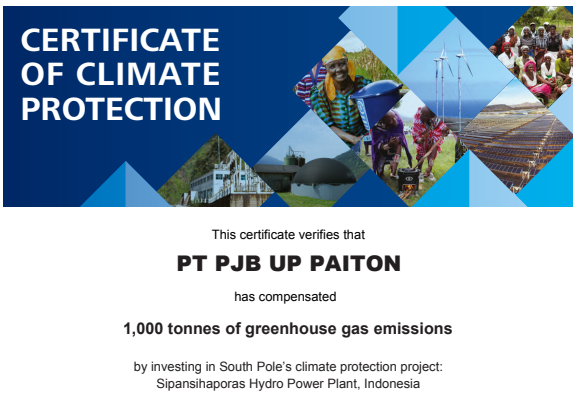

Carbon Offset oleh PJB UP Paiton
Carbon Offset by PJB Paiton GU

PJB UP Paiton menunjukkan komitmennya terhadap aksi perubahan iklim dengan menjadi Unit Bisnis Pembangkitan pertama di PLN Group yang melakukan *carbon offset* dengan membeli *carbon credit* yang dihasilkan dari program *verified carbon standard* (VCS) PLTA Sipansihaporas milik PLN.

PJB UP Paiton demonstrated its commitment to climate change action by becoming the first Generation Business Unit in the PLN Group to conduct carbon offsets by purchasing carbon credits generated from the verified carbon standard (VCS) program of PLN's Sipansihaporas HPP.

7 APRIL
APRIL

Expert PJB Bersinergi Dengan PLN Untuk Pulihkan Kelistrikan di NTT

PJB Experts Synergize With PLN To Restore Electricity in East Nusa Tenggara

Bencana banjir dan longsor yang melanda di sejumlah daerah NTT mengakibatkan banyak fasilitas umum yang rusak, jaringan listrik padam dan 119 orang menjadi korban jiwa. PJB bersinergi dengan berbagai pihak memberikan bantuan dengan mengerahkan 15 personil *expert* yang turun langsung ke lokasi untuk mendukung normalisasi dan *recovery* kelistrikan di NTT pasca bencana.

Floods and landslides that hit a number of areas in NTT resulted in damaged public facilities, blackouts and 119 victims. PJB synergized with various parties to provide assistance by deploying 15 expert personnel who went directly to the location to support the normalization and recovery of electricity in post-disaster NTT.

1 MEI
MAY

Komersialisasi *Co-Firing* di PLTU Paiton 9

Co-Firing Commercialization at Paiton 9 CFPP

PJB berhasil melakukan komersialisasi *co-firing* pada PLTU Paiton 9, yang merupakan PLTU ke-6. Sebelumnya PJB telah berhasil melaksanakan komersial *co-firing* di 5 (lima) unit yakni PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Pacitan, PLTU Rembang, PLTU Ketapang dan PLTU Anggrek. PLTU Paiton 1 dan 2 tercatat sebagai pembangkit pertama yang berhasil melakukan komersialisasi *co-firing* di Indonesia.

PJB has succeeded in co-firing commercialization of Paiton 9 CFPP, which is the 6th CFPP. Previously, PJB had successfully carried out commercial co-firing in 5 (five) units which are Paiton 1 and 2 CFPPs, Pacitan CFPP, Rembang CFPP, Ketapang CFPP, and Anggrek CFPP. Paiton 1 and 2 CFPPs are listed as the first plants to successfully commercialize co-firing in Indonesia.

6 MEI
MAY

Menteri ESDM RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Apresiasi Digitalisasi Pembangkit Terbaik dari PJB

The Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the President Director of PT PLN (Persero) Appreciate the Best Power Generation Digitalization from PJB

PJB mendapatkan kehormatan dengan dikunjunginya ICORE di Kantor Pusat PJB, Surabaya oleh Arifin Tasrif selaku Menteri ESDM RI dan Zulkifli Zaini selaku Direktur Utama PT PLN (Persero). PJB menunjukkan keunggulan dari ICORE yang menggunakan sistem pengelolaan pembangkit berbasis digital 4.0 sejak tahun 2016 yang menjadikan PJB sebagai perusahaan pembangkit pertama di Indonesia yang menerapkan digitalisasi pembangkit.

PJB was honored by the visit of ICORE at PJB Head Office in Surabaya by Arifin Tasrif as the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and Zulkifli Zaini as the President Director of PT PLN (Persero). PJB has demonstrated the advantages of ICORE using a digital 4.0-based power management system since 2016 which has made PJB the first power plant company in Indonesia to implement power generation digitization.

PERISTIWA PENTING 2021
EVENT HIGHLIGHTS 2021

24 MEI
MAY

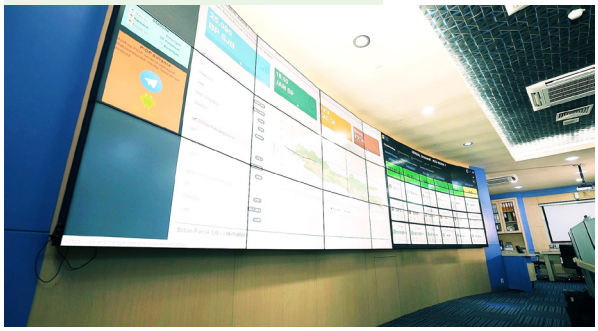

Pengembangan SOKET untuk Optimasi Keandalan dan Efisiensi Pembangkit
SOKET Development for Power Generation Reliability and Efficiency Optimization

PJB terus melakukan terobosan dalam implementasi *digital power plant* dengan mengembangkan sebuah sistem bernama SOKET (Sistem Optimasi Keandalan dan Efisiensi Terintegrasi) secara bertahap pada semua PLTU yang dikelolanya. SOKET memiliki kemampuan hingga level 6, dimana dapat menghasilkan *advisory* untuk pengambilan keputusan. Tahap pengembangannya mengacu pada standar internasional ISO 13374. PJB telah sukses melakukan aktivasi pada PLTU Paiton 1, 2 dan PLTU Indramayu, PLTU Tanjung Awar-awar dan PLTU Tenayan.

PJB continued to make breakthroughs in the implementation of digital power plants by developing a system called SOKET (Integrated Reliability and Efficiency Optimization System) in stages for all CFPPs. SOKET has capabilities up to level 6, which can generate advisory for decision making. The development stage refers to the international standard ISO 13374. PJB has successfully activated Paiton 1, 2, and Indramayu CFPPs, Tanjung Awar-awar CFPP, and Tenayan CFPP.

PJB memberikan komitmen dalam peningkatan keandalan penyediaan tenaga listrik dengan berhasil mengoperasikan PLTGU Muara Karang Blok 3 secara komersil. Pembangkit ini berhasil COD pada tanggal 15 Februari 2020 dengan daya 350 MW mode operasi *Open Cycle* dan dilanjutkan dengan *Commercial Operation Date* (COD) pada tanggal 4 Juni 2021 dengan daya total sebesar 500 MW *mode* operasi *Combined Cycle.*

PJB is committed to increasing the reliability of electricity supply by successfully operating the Muara Karang CCPP Block 3 commercially. This power plant was successfully COD on February 15, 2020, with a power of 350 MW in Open Cycle operating mode and continued with Commercial Operation Date (COD) on June 4, 2021 with a total power of 500 MW in Combined Cycle operation mode.

27-28 MEI
MAY

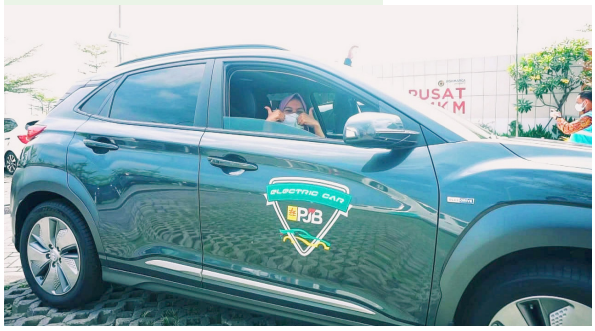

Road Trip EV PLN

PJB turut mendampingi perjalanan Tim *Electric Vehicle* (EV) PLN dalam kegiatan *Road Trip Electric Vehicle* PLN Pusat sebagai kampanye untuk mendorong penggunaan kendaraan berbasis listrik. Kampanye bertema PLN *Welcomes Electric Vehicle Era* ini menempuh perjalanan dari Tangerang – Jakarta – Bandung – Cirebon – Semarang dan berakhir di Surabaya sekaligus melakukan pengecekan kesiapan infrastruktur pengisian daya EV di beberapa titik SPKLU sepanjang perjalanan.

PJB also accompanied the trip of the PLN Electric Vehicle (EV) Team in the Central PLN Electric Vehicle Road Trip activity as a campaign to encourage the use of electricity-based vehicles. The PLN Welcomes Electric Vehicle Era themed campaign travels from Tangerang – Jakarta – Bandung – Cirebon – Semarang and ends in Surabaya as well as checking the readiness of the EV charging infrastructure at several SPKLU points along the way.

4 JUNI
JUNE

COD PLTGU Muara Karang Blok 3
COD of Muara Karang CCPP Block 3

9 JUNI
JUNE

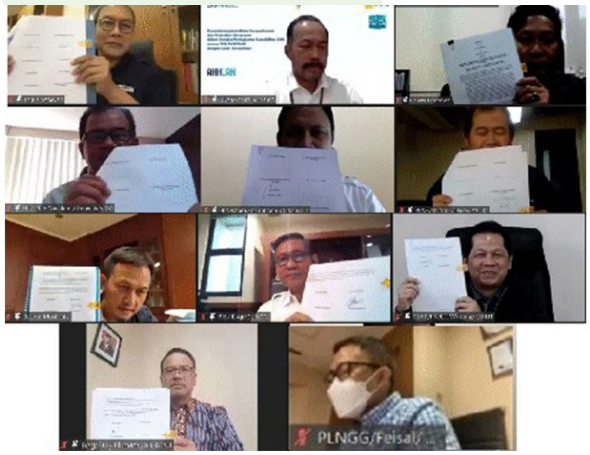

Sinergi Penyelenggaraan Pendidikan PLN Group
Synergy of PLN Group Education Implementation

PJB bersama sembilan anak perusahaan PLN Group lainnya melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerjasama Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pembelajaran guna membangun sinergi antar instansi melalui pemberdayaan fasilitas dan sumber daya manusia.

PJB together with nine other PLN Group's subsidiaries signed a Memorandum of Understanding and Cooperation in the Implementation of Education and Learning Programs to build synergy between agencies through empowering facilities and human resources.

21 JUNI
JUNE

Go Live Komersial *Co-Firing* 3 (Tiga) PLTU PJB
Go Live Commercial Co-Firing at 3 (Three) CFPPs of PJB

PJB melaksanakan *Go Live* Komersial *Co-Firing* pada 3 PLTU antara lain PLTU Paiton 9 (1 x 660 MW), PLTU Tanjung Awar-Awar (2x350 MW) dan PLTU Indramayu (2x330 MW) sehingga total 8 PLTU PJB telah mengimplementasikan *Co-Firing*. *Co-Firing* merupakan salah satu dukungan PJB terhadap Pemerintah dalam mencapai target tercapainya Bauran Energi Terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan selaras dengan salah satu program transformasi PLN yaitu *Green*.

PJB carries out Go Live Commercial Co-Firing at 3 CFPPs, including Paiton 9 CFPP (1 x 660 MW), Tanjung Awar-Awar CFPP (2x350 MW) and Indramayu CFPP (2x330 MW) so that a total of 8 PJB CFPPs have implemented Co-Firing. Co Firing is one of PJB's support for the Government in achieving the target of achieving the Renewable Energy Mix of 23% by 2025 and in line with one of PLN's transformation programs known as Green.

22 JULI
JULY

Luaskan Pasar ke Afrika, PJB Lakukan Audiensi dengan Kedutaan Besar RI di Nigeria
Expanding Market to Africa, PJB Holds Audience with the Indonesian Embassy in Nigeria

Guna menjajaki pasar ke negara-negara Afrika, Direktur Utama PJB beserta jajaran Direksi Anak Perusahaan dan Divisi terkait melakukan audiensi secara daring dengan Kedutaan Besar RI untuk Republik Nigeria serta beberapa pihak terkait sebagai bagian dari rencana strategis PJB dalam mengembangkan bisnis *beyond* kWh.

In an effort to explore the market to African countries, the President Director of PJB along with the Board of Directors of Subsidiaries and related Divisions held an online audience with the Indonesian Embassy to the Republic of Nigeria and several related parties as part of PJB's strategic plan in developing a business beyond kWh.

PERISTIWA PENTING 2021
EVENT HIGHLIGHTS 2021

2 AGUSTUS
AUGUST

Financial Close PLTS Terapung Cirata 145 MWAc
Financial Close of Cirata Floating SPP 145 MWAc

Satu pencapaian besar dalam *milestone* proyek PLTS Terapung diraih melalui kesepakatan *Financial Close,* yaitu Sindikasi 3 (tiga) bank internasional dalam mendukung pendanaan pada proyek PLTS Terapung Cirata antara lain: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale dan Standard Chartered Bank. PLTS Terapung berkapasitas 145 MWAc ini akan beroperasi komersial (*Commercial Operation Date/* COD) pada November 2022 dengan target produksi energi sebesar 245 juta kWh per tahunnya.

One major achievement in the Floating SPP project's milestone was achieved through the Financial Close agreement, namely the Syndication of 3 (three) international banks to support funding for the Cirata Floating SPP project, including: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale and Standard Chartered Bank. The Floating SPP with a capacity of 145 MWAc will operate commercially (Commercial Operation Date/ COD) in November 2022 with an energy production target of 245 million kWh per year.

3 AGUSTUS
AUGUST

PJB Group Berhasil Selesaikan Perbaikan Jalur Transmisi Pasca Badai Seroja NTT
PJB Group Successfully Completed Transmission Line Repair After Hurricane Seroja E ast Nusa Tenggara

PJB Group yang diwakili oleh PT Rekadaya Elektrika ikut membangun 3 (tiga) *tower* saluran udara tegangan tinggi (SUTT) bertegangan 70 kilo Volt (kV) sebagai pengganti *tower* darurat (*tower emergency*) yang sudah dioperasikan sejak tanggal 18 April 2021 pukul 17.41 WITA, lebih cepat dari target awal yaitu 31 Agustus 2021, seusai Badai Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk menyelesaikan pembangunan 3 (tiga) *tower* ini, PLN mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp9,9 miliar.

PJB Group, represented by PT Rekadaya Elektrika, participated in building 3 (three) high-voltage overhead line towers (SUTT) with a voltage of 70 kilo Volts (kV) as a replacement for the emergency tower which has been operated since April 18, 2021, at 17:41 WITA, earlier than the initial target of August 31, 2021, after Hurricane Seroja that hit East Nusa Tenggara (NTT). To complete the construction of these 3 (three) towers, PLN invested in the amount of Rp 9.9 billion.

6 AGUSTUS
AUGUST

bsi.

Certificate of Registration

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 37001:2016

This is to certify that:

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
Unit Pembangkitan Cirata
Desa Cadassari, Kecamatan Tegalwaru
Plered
Kabupaten Purwakarta
Jawa Barat
Indonesia 41162

Unit Pembangkit Pertama di Indonesia yang Meraih ISO 37001
First Power Unit in Indonesia to Achieve ISO 37001

PJB berhasil melakukan sertifikasi SMAP pada 3 (tiga) Unit Pembangkit, antara lain UP Muara Karang, UP Cirata dan UP Paiton, dengan cakupan seluruh proses bisnis yang ada di masing-masing unit. Pencapaian ini menjadi kebanggaan sendiri dikarenakan Unit Pembangkit PJB merupakan unit pembangkit pertama di Indonesia yang berhasil meraih ISO 37001.

PJB successfully carried out SMAP certification in 3 (three) Generation Units, including Muara Karang GU, Cirata GU and Paiton GU, with coverage of all business processes in each unit. This achievement is a pride since PJB's Generation Unit is Indonesia's first generation unit to achieve ISO 37001.

17 AGUSTUS AUGUST

PJB Kerjakan *Major Inspection* Pembangkit di Bangladesh

PJB Conducts Major Inspection of Power Plants in Bangladesh

PJB semakin gencar dalam melakukan ekspansi bisnis di luar produksi listrik, antara lain dengan mengincar pasar internasional melalui layanan-layanan unggulannya. Hal ini ditunjukkan melalui pekerjaan *major inspection* pada PLTGU Chandpur 150 MW milik Bangladesh Power Development Board. Pembangkit ini merupakan salah satu pembangkit yang menumpu sistem ketenagalistrikan di Bangladesh.

PJB is increasingly aggressive in expanding its business outside of electricity production, among others by targeting the international market through its superior services. This is demonstrated through major inspection work on the Chandpur 150 MW CCPP belonging to the Bangladesh Power Development Board. This plant is one of the generators that support the electricity system in Bangladesh.

18 SEPTEMBER SEPTEMBER

Unit SPKLU di Kantor Pusat PJB

SPKLU Unit at PJB Head Office

12 AGUSTUS AUGUST

PJB Muara Karang Produksi 900 Kg Oksigen Medis

PJB Muara Karang Produces 900 Kg of Medical Oxygen

UP Muara Karang berhasil melakukan inovasi dalam memproduksi oksigen medis untuk keperluan penanganan Covid-19 sekaligus dukungan kepada PT PLN (Persero) selaku holding dalam menjalankan perintah Menteri BUMN untuk mendayagunakan seluruh kemungkinan dalam memproduksi oksigen medis. Oksigen medis yang diproduksi UP Muara Karang saat ini mencapai 900 kg/bulan dan telah mendapatkan Sertifikat Inspeksi Gas Medik Oksigen dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta.

Muara Karang GU has succeeded in innovating in producing medical oxygen for the purpose of handling Covid-19 as well as supporting PT PLN (Persero) as the holding company in executing the order of the Ministry of SOEs to utilize all possibilities in producing medical oxygen. Medical oxygen produced by Muara Karang GU currently reaches 900 kg/month and has received a Medical Oxygen Gas Inspection Certificate from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, Directorate General of Health Services, Health Facility Security Center (BPFK) Jakarta.

PJB mendukung penggunaan kendaraan elektrik dengan membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di halaman Kantor Pusat PJB di Ketintang Surabaya. Saat ini, PJB telah memiliki 2 mobil listrik dengan lokasi di Jakarta dan Surabaya. Unit SPKLU PJB telah dilengkapi dengan fasilitas pembayaran melalui RFID atau *E-Money.* SPKLU PJB saat ini dalam proses pengurusan Integrasi Aplikasi *Charge.In*, yaitu pembayaran dengan mode melalui *smartphone* dengan pendebitan Link Aja.

PJB supports the use of electric vehicles by building a Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) in the yard of PJB's Head Office in Ketintang, Surabaya. Currently, PJB has 2 electric cars located in Jakarta and Surabaya. PJB's SPKLU unit has been equipped with payment facilities via RFID or E-Money. PJB's SPKLU is currently in the process of managing the Charge. In Application Integration, the payment could be channelled using mobile phone on Link Aja debit.

PERISTIWA PENTING 2021
EVENT HIGHLIGHTS 2021

21 OKTOBER
OCTOBER

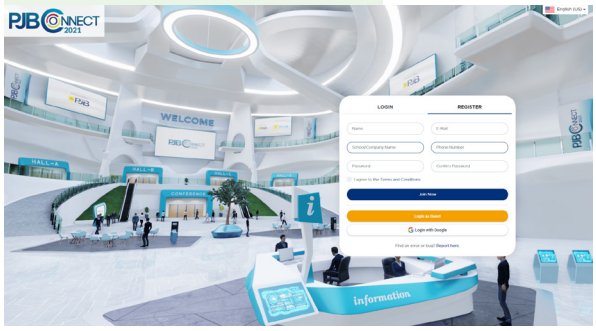

PJB *Connect* 2021

Untuk menyemarakkan perayaan Hari Listrik Nasional ke-76 dan HUT PJB ke-26, PJB menyelenggarakan PJB *Connect* 2021 yang hadir dengan teknologi terkini dan tercanggih sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik dalam menikmati *E-Conference* dan *Virtual Exhibition*.

To celebrate the 76th National Electricity Day and the 26th PJB Anniversary, PJB held PJB Connect 2021 which comes with the latest and most advanced technology so as to provide a better experience in enjoying E-Conference and Virtual Exhibition.

MoU Optimalisasi Aset
Asset Optimization MoU

PJB melakukan kerjasama dengan PLN terkait optimalisasi aset pembangkit milik PLN antaranya adalah PLTGU Muara Karang Blok 2 dan 3 serta PLTGU Muara Tawar Blok 5. Penandatanganan dilakukan oleh Iwan Purwana selaku Direktur Pengembangan dan Niaga PJB dan Dwi Wibihandoko selaku *Executive Vice President Legal*, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PT PLN (Persero) untuk mendukung program strategis PT PLN (Persero) terutama terkait pengamanan dan pendayagunaan aset yang dapat memberikan nilai tambah bagi PLN Group.

PJB cooperated with PLN regarding the optimization of PLN's generating assets including Muara Karang CCPPs Block 2 and 3 and Muara Tawar CCPP Block 5. The signing was carried out by Iwan Purwana as Director of Development and Commerce of PJB and Dwi Wibihandoko as Executive Vice President Legal, Security and Maintenance Property Assets of PT PLN (Persero) to support strategic programs of PT PLN (Persero) especially related to security and utilization of assets that can provide added value for the PLN Group.

2 NOVEMBER
NOVEMBER

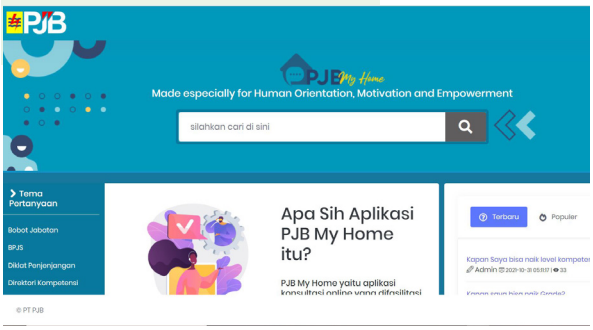

Launching PJB *My Home*

PJB berhasil melakukan *go-live* untuk aplikasi PJB *MY HOME* (*Made especially for Human Orientation, Motivation and Empowerement*). PJB *MY HOME* dapat menjadi wadah untuk karyawan dalam berkonsultasi, terutama terkait regulasi pengelolaan karyawan, transformasi Perusahaan hingga permasalahan yang sedang dihadapi (seperti masalah personal, keluarga, lingkungan kerja untuk meningkatkan *belonginess*, motivasi, kebahagiaan, produktivitas kerja). Aplikasi PJB *MY HOME* selain dapat diakses melalui *desktop* juga bisa diakses melalui *smartphone*.

PJB managed to go-live for the PJB MY HOME application (Made especially for Human Orientation, Motivation and Empowerement). PJB MY HOME can be a forum for employees to consult, especially regarding employee management regulations, Company transformation to problems being faced (such as personal problems, family, work environment to increase belonginess, motivation, happiness, work productivity). The PJB MY HOME application, apart from being accessible on desktop, can also be accessed on any smartphone.

5 NOVEMBER
NOVEMBER

8 NOVEMBER
NOVEMBER

Dinner With CEO PJB

Dinner with CEO adalah sebuah program baru dimana PJBers yang telah mendaftarkan diri dapat menyampaikan ide terkait perkembangan Perusahaan dan kesempatan bertukar pikiran dalam wadah obrolan santai dengan Direktur Utama PJB. Dengan kegiatan *Dinner* with CEO, manajemen PJB ingin menjalin kedekatan dengan generasi milenial yang saat ini mendominasi karyawan PJB. Terdapat 8 milenial terpilih untuk berdiskusi langsung dengan Direktur Utama PJB.

Dinner with CEO is a new program where registered PJBers could express their ideas regarding the development of the Company and the opportunity to discuss the ideas in a casual chat forum with the President Director of PJB. With the Dinner with CEO activity, PJB management wants to establish closeness with the millennial generation who currently dominates PJB employees. There were 8 millennials (young leaders) selected to discuss directly with the President Director of PJB.

29 NOVEMBER
NOVEMBER

Kontrak Jasa O&M PLTU Sambelia (2x50 MW)
O&M Service Contract for Sambelia CFPP (2x50 MW)

PJB mendapatkan kepercayaan untuk mengelola PLTU Sambelia (2x50 MW) melalui penandatanganan kontrak jasa O&M yang dilaksanakan langsung oleh Direktur Utama PJB, Gong Matua Hasibuan, dengan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat, Lasiran yang disaksikan oleh jajaran Direksi PJB, PT PJBS, serta Senior Manager Pembangkitan UIW NTB, Edyson Rajaguguk. PLTU Sambelia merupakan PLTU ke-20 milik PLN (Persero) yang diserahkan kepada PJB untuk dikelola operasi dan pemeliharannya. PLTU Sambelia akan menjadi salah satu unit pembangkit andalan yang memiliki peranan penting untuk memasok listrik di sekitar Pulau Lombok. Beroperasinya PLTU ini diprediksi dapat meningkatkan perekonomian sekitarnya serta mendukung sektor pariwisata, salah satunya memasok listrik untuk keperluan *sport tourism* di NTB.

PJB won the trust to manage the Sambelia CFPP (2x50 MW) through the signing of the O&M service contract which was carried out directly by the President Director of PJB, Gong Matua Hasibuan, with the General Manager of the PLN Main Unit for the West Nusa Tenggara Region, Lasiran which was witnessed by the Board of Directors of PJB, PT PJBS, and Senior Manager of Power Generation UIW NTB, Edyson Rajaguguk. Sambelia CFPP is the 20th CFPP owned by PLN (Persero) which was handed over to PJB to manage its operation and maintenance. Sambelia CFPP is projected to be one of the mainstay generation units that have an important role in supplying electricity around the island of Lombok. The CFPP operation is predicted to improve the surrounding economy and support the tourism sector, one of which is supplying electricity for sport tourism purposes in NTB.

PERISTIWA PENTING 2021
EVENT HIGHLIGHTS 2021

4 DESEMBER
DECEMBER

MoU PJB dan PT Pertamina Power Indonesia Terkait Pengelolaan O&M Pembangkit
MoU of PJB and PT Pertamina Power Indonesia Related to Power Plant O&M Management

PJB melakukan penandatanganan MoU dengan PT Pertamina Power Indonesia pada Kamis, 2 November 2021 yang dilakukan oleh Dannif Danusaputro selaku Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia (PPI) dan Bpk. Gong Matua Hasibuan, Direktur Utama PJB. MoU ini sebagai perwujudan sinergi antar perusahaan BUMN, dimana PJB dan PT Pertamina Power Indonesia berkolaborasi untuk pengelolaan O&M pembangkit untuk menghasil energi yang lebih bersih dan juga lebih efisien. Terlepas dari kedua hal tersebut, kolaborasi ini juga semakin membuka peluang yang lebih besar pada PJB dan PT Pertamina Power Indonesia untuk pengembangan energi bersih masa depan.

PJB signed an MoU with PT Pertamina Power Indonesia on Thursday, November 2, 2021, which was carried out by Dannif Danusaputro as President Director of PT Pertamina Power Indonesia (PPI) and Mr. Gong Matua Hasibuan, President Director of PJB. This MoU is a manifestation of the synergy between state-owned companies, where PJB and PT Pertamina Power Indonesia collaborate for the management of O&M generators to produce cleaner and more efficient energy. Besides these two programs, this collaboration also opens up greater opportunities for PJB and PT Pertamina Power Indonesia for future clean energy development.

15 DESEMBER
DECEMBER

Peresmian PLTS Bawean
Inauguration of Bawean SPP

PJB melakukan peresmian PLTS Bawean sebagai salah satu bentuk komitmen untuk menghadirkan listrik yang andal, ramah lingkungan dan menjangkau hingga wilayah kepulauan. PLTS Bawean merupakan *pilot project* pengembangan Pembangkit *Hybrid* antara PLTS dengan pembangkit fosil di kepulauan seluruh Indonesia yang berkapasitas 408 kWp (PLTS) dan memiliki kapasitas baterai 1.300 kWh. Kehadiran PLTS Bawean tidak hanya akan meningkatkan bauran EBT di Indonesia, namun juga akan menambah pasokan bagi sistem kelistrikan Bawean hingga mencapai 1600 kWh/hari. Beroperasinya PLTS Bawean pun juga akan mengefisiensikan operasional dari PLTD.

PJB inaugurated Bawean SPP as a form of commitment to provide reliable, environmentally friendly electricity that reaches to the islands. has a battery capacity of 1,300 kWh. The presence of Bawean SPP will not only increase the NRE mix in Indonesia, but will also increase the supply for the Bawean electricity system to reach 1600 kWh/day. The operation of Bawean SPP will also streamline the operations of DEPP.

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

REPORT TO SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

Dedeng Hidayat MH
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi perlu terus mempertajam strategi peningkatan efisiensi operasional Perusahaan dengan mengelola tingkat biaya bahan bakar, menjaga *security* dan keandalan pembangkit, serta melakukan optimasi utilisasi pembangkit untuk menjaga level BPP yang ditargetkan oleh Pemegang Saham. Ke depannya, Direksi perlu terus meningkatkan pertumbuhan *revenue mix* dan *strategic partnership* serta pemasaran produk *beyond* kWh yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia terbaik untuk mendorong peningkatan pendapatan pada segmen usaha tersebut.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors needs to sharpen continuously the strategy to improve the Company's operational efficiency by managing the level of fuel costs, maintaining the power plant's security and reliability, as well as optimizing the power plant's utilization to maintain the Cost of Electricity Supply (CES) level targeted by the Shareholders. In the future, the Board of Directors needs to increase revenue mix growth and strategic partnerships as well as product marketing beyond kWh which is supported by the best human capital competencies to encourage increased revenue in this business segment.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah, PJB dapat melalui tahun 2021 yang sangat menantang dengan capaian kinerja yang baik. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan aktivitas bisnis secara global dan berdampak pada perekonomian pada umumnya. Pada kesempatan ini, kami sampaikan pokok-pokok laporan tugas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ini meliputi aspek penilaian atas kinerja Direksi dan dasar penilaiannya, pandangan atas penerapan tata kelola Perusahaan termasuk pengelolaan terhadap *Whistleblowing System* (WBS), tata cara dan frekuensi pemberian nasihat kepada Direksi, pandangan Dewan Komisaris atas prospek usaha yang disusun Direksi, perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya.

Praise and gratitude to the presence of God Almighty for His blessings and grace, PJB was able to pass a very challenging 2021 with good performance achievements. The Covid-19 pandemic has resulted in a decline in business activity globally and has had an impact on the economy in general. On this occasion, we convey the main points of the supervisory task report on the management of the Company and provide advice to the Board of Directors which is the responsibility of the Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year. Corporate governance includes the management of the Whistleblowing System (WBS), the procedures and frequency of providing advice to the Board of Directors, the views of the Board of Commissioners on the business prospects prepared by the Board of Directors, changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for the changes.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Kondisi Makroekonomi 2021
Macroeconomics Condition in 2021

Proses pemulihan perekonomian global maupun domestik telah berjalan dengan cukup baik di tahun 2021. Kehadiran vaksin di awal tahun 2021 menjadi titik terang dan harapan akan pemulihan pandemi Covid-19, terbukti mampu menggerakkan kembali roda perekonomian yang sempat berhenti. Perekonomian global telah kembali tumbuh positif meskipun terjadi tidak merata, termasuk pada negara maju maupun *emerging country.* Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat pertumbuhan ekonomi global mencapai 5,9% jauh lebih tinggi dari kontraksi 3,2% di tahun 2020. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh akselerasi tingkat vaksinasi, stimulus kebijakan ekonomi, dan pemulihan kegiatan ekonomi secara bertahap yang terjadi di Amerika Serikat dan Tiongkok, serta sejumlah negara-negara Eropa dan Asia lainnya.

The process of global and domestic economic recovery has gone quite well in 2021. The presence of a vaccine in early 2021 has become a bright spot and hope for the recovery of the Covid-19 pandemic, which has proven to be able to move the wheels of the economy that had stopped. The global economy has returned to positive growth despite uneven growth, including in developed and emerging countries. Based on data from the International Monetary Fund (IMF), global economic growth reached 5.9%, much higher than the 3.2% contraction in 2020. This was mainly influenced by the acceleration of vaccination rates, economic policy stimulus, and the gradual recovery of economic activity. occurred in the United States and China, as well as other European and Asian countries.

Perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan dengan melemahnya kontraksi pada tahun 2021 dan tumbuh sebesar 3,69% (yoy). Perbaikan terjadi di seluruh sektor dan pertumbuhan positif terjadi pada lima sektor industri, yakni (1) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (2) informasi dan komunikasi, (3) pengadaan listrik dan gas, (4) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta (5) perdagangan besar dan eceran. Pemulihan ekonomi didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat tinggi dan berlanjutnya stimulus fiskal. Membaiknya penanganan pandemi Covid-19 berdampak positif pada perbaikan dan pertumbuhan ekonom yakni adanya kenaikan permintaan listrik 4,97% pada tahun 2021, dibandingkan tahun 2020 dengan minus 12,58% di Sistem Jawa Bali. Kenaikan permintaan listrik tersebut diproyeksikan akan terus berlanjut sejalan dengan target rasio elektrifikasi dari Kementerian ESDM di tahun 2022 sebesar 100%, dimana rasio elektrifikasi hingga Maret 2021 adalah sebesar 99,28%.

The Indonesian economy showed improvement with a weakening contraction in 2021 and grew by 3.69% (YoY). Improvements occurred in all sectors and positive growth occurred in five industrial sectors, namely (1) health services and social activities, (2) information and communication, (3) electricity and gas procurement, (4) water supply, waste management, waste and recycling and (5) wholesale and retail trade. The economic recovery was driven by higher performance in the external sector and continued fiscal stimulus. The improvement in handling the Covid-19 pandemic has had a positive impact on the improvement and growth of economists, namely an increase in electricity demand by 4.97% in 2021, compared to 2020 with minus 12.58% in the Java-Bali System. The increase in electricity demand is projected to continue in line with the electrification ratio target of the Ministry of Energy and Mineral Resources in 2022 of 100%, where the electrification ratio until March 2021 is 99.28%.

Faktor-faktor di atas tentunya mempengaruhi perkembangan industri kelistrikan nasional dan pencapaian kinerja PJB pada umumnya.

The above factors certainly affect the development of the national electricity industry and the achievement of PJB's performance in general.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya
Assessment of the Board of Directors' Performance and Indicators

Tahun 2021 masih menjadi tahun penuh tantangan, namun demikian PJB telah berhasil menutup tahun ini dengan pencapaian kinerja yang baik. Hal tersebut tercermin secara umum dari pencapaian sebagian besar indikator kinerja keuangan maupun operasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 dan target KPI Perusahaan 2021. Dasar penilaian terhadap kinerja Direksi adalah *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan sesuai Kontrak Manajemen tahun 2021 yang ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, mencakup indikator penilaian terhadap (1) fokus pelanggan, (2) efektivitas produk dan proses, (3) fokus tenaga kerja, (4) aspek keuangan dan pasar serta (5) kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan.

2021 was still a challenging year; however, PJB has managed to close the year with good performance achievements. This is generally reflected in the achievement of most of the financial and operational performance indicators in the Company's 2021 Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and the Company's 2021 KPI targets. The basis for assessing the performance of the Board of Directors is the Company's Key Performance Indicators (KPI) following the 2021 Management Contract signed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders, including assessment indicators on (1) customer focus; (2) product and process effectiveness; (3) workforce focus; (4) financial and market aspects; and (5) leadership, governance, and social responsibility.

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi dalam mengelola PJB selama tahun 2021 tercermin dari capaian tingkat kesehatan Perusahaan yang berada pada level **"AAA"** dengan skor 96,13 dan termasuk dalam kategori **"Sehat".** Pelaksanaaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui *review* kinerja keuangan maupun operasional secara berkala sesuai dengan RKAP 2021 dan KPI Perusahaan 2021 serta selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) termasuk isu penting terkait di bidang ekonomi, lingkungan, sosial maupun perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui rapat maupun penyampaian laporan kinerja Perusahaan oleh Direksi. Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja operasional PJB, Dewan Komisaris menyampaikan agar Direksi dapat terus memperkuat landasan kinerja secara *bottom line* dengan optimalisasi potensi yang mendorong meningkatnya sinergi usaha di lingkungan PJB grup sehingga menciptakan pertumbuhan kinerja berkelanjutan.

The Board of Commissioners assesses the performance of the Board of Directors in managing PJB in 2021 as reflected in the achievement of the Company's soundness level which is at the "AAA" level with a score of 96.13 which is categorized as "Sound". The implementation of the supervisory function by the Board of Commissioners is carried out through periodic financial and operational performance reviews based on the 2021 ABOP and Corporate KPI as well as in line with the Company's Long Term Plan (CLP) including important issues related to the economic, environmental, social and economic sectors, as well as changes to the prevailing laws and regulations through meetings and submission of the Company's performance reports by the Board of Directors. Based on the evaluation results of PJB's operational performance, the Board of Commissioners conveys that the Board of Directors can continue to strengthen the bottom line performance base by optimizing potentials that encourage increased business synergies within the PJB group to create sustainable performance growth.

Realisasi produksi energi listrik tahun 2021 mencapai sebesar 20.640,92 GWh atau 106,36% dari target RKAP 2021, meningkat 15,86% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17.815,81 GWh, terutama dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan pembebanan pada operasi Sistem Jamali hampir

The realization of electrical energy production in 2021 reached 20,640.92 GWh or 106.36% of the 2021 ABOP target, an increase of 15.86% compared to the previous year of 17,815.81 GWh which was mainly influenced by the increased demand for loading on the Jamali System operation in almost all types of

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

di semua jenis pembangkit PJB. Pemakaian bahan bakar untuk pembangkit atau bauran energi primer sepanjang tahun 2021 masih didominasi oleh pembangkit berbahan bakar batubara, yang meningkat 13,89% menjadi sebanyak 3.241.528 ton; dilanjutkan dengan pemakaian bahan bakar HSD sebanyak 129.289 kL, gas alam sebanyak 106.500 BBTU; biomass sebanyak 61.408 ton dan MFO sebanyak 59.612 kL. Komposisi bauran energi tersebut lebih baik dibanding tahun lalu, mengingat *biomass* sebagai bahan bakar alternatif dan ramah lingkungan untuk *Co-firing* pembangkit yang mulai dipergunakan sejak tahun lalu, saat ini telah memberikan dampak positif dalam bauran energi PJB. Dewan Komisaris senantiasa mendukung langkah dan strategi Direksi untuk meng-EBT-kan seluruh PLTU batubara yang dimiliki dan dikelola oleh PJB dengan melakukan *Co-firing* pembangkit menggunakan *biomass* sehingga mendorong peningkatan bauran energi primer yang aman dan ramah lingkungan.

PJB's power plants. The use of fuel for power plants or primary energy mix in 2021 was still dominated by coal-fired power plants, which increased by 13.89% to 3,241,528 tons; followed by the use of HSD fuel as much as 129,289 kL, natural gas as much as 106,500 BBTU; biomass as much as 61,408 tons and MFO of 59,612 kL. The composition of the energy mix is better than last year, considering that biomass as an alternative and eco-friendly fuel for Co-firing power plants which was started last year has now had a positive impact on PJB's energy mix. The Board of Commissioners always supports the steps and strategies of the Board of Directors to renew all coal-fired power plants owned and managed by PJB by co-firing plants using biomass to encourage an increase in the primary energy mix which is eco-friendly.

Secara umum, pencapaian kinerja operasi pembangkit PJB tahun 2021 termasuk dalam kategori baik, mengingat terjadi penurunan sejumlah realisasi indikator kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan stabilnya kinerja pembangkit yang dikelola PJB, mencakup faktor keandalan atau *Equivalent Availability Factor* (EAF), faktor gangguan atau *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR), pemakaian bahan bakar, dan ketepatan pelaksanaan serta durasi pemeliharaan. Kinerja keandalan yang ditunjukkan dengan nilai EAF tahun 2021 mencapai sebesar 95,47% atau 102,04% dari target RKAP 2021, lebih rendah sedikit dari tahun 2020 sebesar 95,52% terutama disebabkan oleh adanya gangguan pembangkit di UP Muara Tawar dan UP Cirata. Pencapaian kinerja gangguan pembangkit yang tercermin dari nilai EFOR tahun 2021 mencapai sebesar 3,70% atau 142,59% dari target RKAP 2021, meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,93% terutama dipengaruhi oleh banyaknya durasi jam gangguan di UP Muara Tawar dan UP Cirata. Adapun kinerja pemeliharaan pembangkit yang dilihat dari nilai SOF tahun 2021 mencapai sebesar 2,27% atau lebih baik dari tahun 2020 sebesar 3,72% yang disebabkan oleh adanya optimalisasi durasi pemeliharaan pembangkit PLTU Non Batubara, PLTGU, PLTU Batubara Eksisting, dan PLTA.

In general, the achievement of PJB's power plant operating performance in 2021 is in 'Good' category, considering that there has been a decrease in the realization of the set performance indicators. This is indicated by the stable performance of the power plants managed by PJB, including the reliability factor or Equivalent Availability Factor (EAF), Equivalent Forced Outage Rate (EFOR), fuel consumption, as well as accuracy, and duration of maintenance. The reliability performance shown by the EAF value in 2021 reached 95.47% or 102.04% of the 2021 ABOP target, slightly lower than 2020 at 95.52% which was mainly due to power failure at Muara Tawar and Cirata GUs. The achievement of the power plant's disrupting performance as reflected in the EFOR value in 2021 reached 3.70% or 142.59% of the 2021 ABOP target, an increase from 0.93% in 2020 which was mainly due to the number of hours of disruption at Muara Tawar GU and Cirata GU. The power plant maintenance performance shown by the SOF value in 2021 reached 2.27% or better than in 2020 at 3.72% which was supported by the optimization of the maintenance duration for Non-Coal CFPP, CCPP, Existing Coal CFPP, and HPP.

Adapun realisasi penjualan energi listrik PJB pada tahun 2021 mencapai sebesar 19.848,44 GWh atau 107,06% dari target RKAP 2021, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 17.117,04 GWh. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pengoperasian pembangkit BBM dan gas untuk menggantikan derating PLTU batubara.

The realization of PJB's electricity sales in 2021 reached 19,848.44 GWh or 107.06% of the 2021 ABOP target, an increase compared to 2020 of 17,117.04 GWh. This was mainly due to the operation of fuel and gas power plants to replace the derating of coal-fired power plants.

Pencapaian kinerja keuangan selama tahun 2021, dilihat dari segi perolehan laba tahun berjalan mengalami penurunan 24,45% dibandingkan tahun lalu. Pendapatan usaha tahun 2021 mengalami penurunan 3,04% menjadi Rp29.508.134 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp30.434.176 juta atau mencapai 95,87% dari target RKAP 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian margin Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan belum terealisasinya beberapa kontrak AMC antara lain Belawan, Sambelia, Pulang Pisau dan Kaltim Teluk. Perolehan pendapatan usaha terutama berasal dari kontribusi penjualan tenaga listrik sebesar 83,17%, jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 13,75%, konstruksi sebesar 2,46%, dan pendapatan lainnya sebesar 0,62%. Beban usaha tahun 2021 mengalami kenaikan 14,57% menjadi sebesar Rp25.101.143 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp21.908.553 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya bahan bakar dan pelumas serta biaya kepegawaian. Adanya kenaikan beban usaha dan perolehan pendapatan usaha yang menurun mengakibatkan perolehan laba tahun berjalan 2021 mengalami penurunan sebesar 24,45% menjadi Rp5.820.188 juta dari tahun 2020 sebesar Rp7.703.812 juta, atau mencapai 181,45% dibandingkan dengan target RKAP 2021. Untuk itulah, Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi untuk fokus menerapkan strategi dan kebijakan *cost leadership program* dengan menjaga struktur beban usaha Perusahaan, terutama terkait dengan biaya *energy mix* di tengah kondisi terganggunya rantai pasokan dan meningkatnya harga energi primer.

The achievement of financial performance in 2021, in terms of profit for the year, decreased by 24.45% compared to the previous year. Operating income in 2021 decreased by 3.04% to Rp. 29,508,134 million compared to the previous year of Rp.30,434,176 million or 95.87% of the 2021 ABOP target. This was mainly due to the lower margin adjustment of the Electricity Sales and Purchase Agreement compared to the previous year and the unrealized AMC contracts, including Belawan, Sambelia, Pulang Pisau, and Kaltim Teluk. Operating revenue was mainly earned from the sales contribution of electricity by 83.17%, operation and maintenance services by 13.75%, construction by 2.46%, and other income by 0.62%. Operating expenses in 2021 increased by 14.57% to Rp. 25,101,143 million compared to the previous year of Rp. 21,908,553 million, mainly due to increases in fuel and lubricant costs as well as personnel costs. An increase in operating expenses and a decrease in operating revenue resulted in a decrease in profit for the year 2021 by 24.45% to Rp. 5,820,188 million from Rp. 7,703,812 million in 2020, or 181.45% compared to the 2021 ABOP target. Thus, the Board of Commissioners instructed the Board of Directors to focus on implementing cost leadership program strategies and policies by maintaining the structure of the Company's operating expenses, especially related to the energy mix costs in the middle of supply-chain disrupting conditions and higher primary energy prices.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi beserta jajaran manajemen di bawahnya atas berbagai prestasi yang diperoleh PJB sepanjang tahun 2021. Sejumlah penghargaan dan prestasi yang diperoleh antara lain adalah dalam ajang *Asian Power Awards* 2021 PJB dinobatkan sebagai

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors and their supporting management for the various achievements obtained by PJB in 2021. Some awards and achievements, among others, are during the 2021 Asian Power Awards event, PJB was named the 'Power Utility of the Year',

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

'Power Utility of the Year', International Business Awards 2021 meraih 4 *Silver* Stevie *Award* untuk Kategori *Human Resources Department of the Year*, Kategori *Best Technical Support Strategy and Implementation* (SOKKET), Kategori *Best Technical Support Strategy and Implementation* (aplikasi I-CARE) dan Kategori IT *Team of The Year* serta 1 *Bronze Stevie Award,* Asean Risk Awards 2021 sebagai Juara 1 kategori Risk Innovation dan Juara 2 kategori Risk Technology serta 3 (tiga) PROPER Emas.

Dewan Komisaris senantiasa memonitor Direksi untuk melakukan pengembangan usaha dengan tetap mengedepankan aspek pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk terus mempertajam strategi peningkatan efisiensi operasional dengan menjaga tingkat biaya bahan bakar, menjaga security dan keandalan pembangkit, optimasi utilisasi pembangkit dan menjaga level BPP yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Selain itu, Direksi perlu terus meningkatkan pertumbuhan *revenue mix* untuk mengoptimalkan pendanaan pengembangan usaha, meningkatkan *strategic partnership* dan pemasaran produk serta kesiapan dukungan sumber daya manusia sejalan dengan peningkatan utilisasi pembangkit dan *resources* PJB dalam meraih pendapatan pada segmen usaha *beyond* kWh.

International Business Awards 2021 won 4 Silver Stevie Awards for the Human Resources Department of the Year Category, Best Technical Support Strategy and Implementation (SOKKET) Category, Best Technical Support Strategy and Implementation (I-CARE application) Category and IT Team of The Year Category and 1 Bronze Stevie Award, Asean Risk Award 2021 as 1st place in the Risk Innovation category and 2nd place in the Risk Technology category and also 3 (three) Gold PROPER.

The Board of Commissioners continuously monitors the Board of Directors to carry out business development while prioritizing aspects of risk management, compliance with applicable regulations, and the principles of Good Corporate Governance. The Board of Commissioners requests the Board of Directors to continue to sharpen the strategy to increase operational efficiency by maintaining the level of fuel costs, maintaining the security and reliability of generators, optimizing generator utilization, and maintaining the CES level set by the Shareholders. In addition, the Board of Directors needs to continuously increase revenue mix growth to optimize business development funding and improve strategic partnerships and product marketing as well as the readiness of human resource support in line with increasing PJB power generation and resource utilization in achieving higher revenue in the beyond kWh business segment.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi
Procedure and Frequency of Recommendations to the Board of Directors

Dewan Komisaris senantiasa melakukan monitoring atas jalannya Perusahaan mengacu pada RKAP 2021 maupun *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan 2021 yang menjadi target dari Pemegang Saham. Disamping itu, Dewan Komisaris juga memberikan saran, rekomendasi dan masukan yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi maupun dalam Rapat Pengawasan. Secara berkala, Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pencapaian RKAP 2021 melalui telaah terhadap Laporan Kinerja bulanan dan Laporan Manajemen Triwulanan maupun pembahasan kinerja dalam Rapat Pengawasan bersama Direksi dan jajaran manajemen di bawahnya setiap bulan sekali.

The Board of Commissioners always monitors the Company's business operation referring to the 2021 ABOP and the Company's 2021 Key Performance Indicators (KPI) which are determined by the Shareholders. Additionally, the Board of Commissioners also provides suggestions, recommendations, and inputs submitted in the Board of Commissioners Meeting which is attended by the Board of Directors as well as in the Supervisory Meeting. Periodically, the Board of Commissioners evaluates the achievement of the 2021 ABOP through a review of the monthly Performance Report and Quarterly Management Report as well as a discussion of performance in the Supervisory Meeting with the Board of Directors and their supporting management every month.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi dalam berbagai aspek operasional maupun keuangan serta pengembangan usaha Perusahaan, termasuk pengembangan Anak Perusahaan maupun Perusahaan Afiliasi, realisasi *energy mix* dan *security of supply* energi primer, realisasi pemeliharaan unit pembangkit serta aspek K3L di seluruh unit pembangkit untuk menjaga *zero accident* dan tingkat PROPER. Fungsi pengawasan dan penasihatan Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam rapat, maupun secara informal serta melalui kunjungan kerja ke unit bisnis PJB bersama dengan Komite Dewan Komisaris sebanyak 14 (empat belas) kali di tahun 2021. Dewan komisaris telah mengadakan rapat internal dan Rapat Pengawasan bersama dengan Direksi selama tahun 2021, masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kali. Agenda rapat internal Dewan Komisaris meliputi tindak lanjut tugas Dewan Komisaris, Laporan Manajemen dan Kinerja, progress proyek maupun penugasan. Adapun agenda rapat pengawasan mencakup Laporan Manajemen dan Kinerja, maupun tindak lanjut rapat sebelumnya. Materi yang akan dibahas dalam rapat pengawasan/konsultasi terlebih dahulu dikaji dalam Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Komite berdasarkan laporan-laporan yang dibuat oleh Manajemen.

The Board of Commissioners has provided direction to the Board of Directors in various operational and financial aspects as well as the development of the Company's business, including the development of Subsidiaries and Affiliated Companies, the realization of the mixed energy, and security of primary energy supply, the realization of generation unit maintenance and HSE aspects in all generation units to maintain zero accident and PROPER level. The supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners to the Board of Directors are carried out both formally in meetings, as well as informally as well as through site visits to the PJB business unit together with the Committee of the Board of Commissioners 14 (fourteen) times in 2021. The Board of Commissioners held internal meetings and joint meetings with the Board of Directors 12 (twelve) times in 2021. The agenda for the internal meeting of the Board of Commissioners includes follow-up to the duties of the Board of Commissioners, Management and Performance Reports, project progress, and assignments. The supervisory meeting agenda includes Management and Performance Reports, as well as follow-ups to previous meetings. The material discussed in the supervisory meeting is first reviewed in the Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Committee Meeting based on the reports made by the Management.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Oleh Direksi
Perspective on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Walaupun di tengah kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron, tekanan inflasi yang cukup tinggi, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral. Pemulihan kondisi perekonomian dunia diprakirakan akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 berada di kisaran 4,4% yoy, atau lebih rendah 0,5% dari perkiraan pada Oktober 2021. Inflasi global diperkirakan cenderung meningkat berdasarkan kajian *World Economic Outlook International Monetary Fund,* yang disebabkan adanya gangguan rantai pasokan dan naiknya harga energi hingga awal tahun 2022.

Although in the middle of the increasing cases of COVID-19's Omicron variant, relatively high inflationary pressures, and the acceleration of normalization of monetary policy at several central banks; the recovery in world economic conditions is predicted to be more balanced, not only relying on the United States (US) and China, but also with the economic recovery of Europe, Japan, and India. The projection of global economic growth in 2022 is in the range of 4.4% YoY, or 0.5% lower than the projection in October 2021. Global inflation is estimated to increase based on a study by the World Economic Outlook of the International Monetary Fund due to supply chain disruptions and higher energy prices until early 2022.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Prospek dunia yang membaik dan berbagai perbaikan kondisi domestik mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terus membaik pada tahun 2022. Di tengah risiko kenaikan kasus Covid-19 yang perlu terus diwaspadai, keyakinan dan ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha ke depan juga terindikasi terus menguat. Perbaikan ekspektasi ini sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik dan akselerasi proses pemulihan serta program vaksinasi oleh Pemerintah. Dengan optimisme tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan berada pada kisaran 4,7%-5,5% pada tahun 2022.

Improved world prospects and various improvements in domestic conditions encourage national economic growth to continue to improve in 2022. In the middle of the risk of higher Covid-19 cases that to be concerned, consumer confidence and expectations regarding income, availability of job opportunities, and future business activities are also indicated to continue to strengthen. This improvement in expectations is in line with the prospect of improving economic growth and the acceleration of the recovery process as well as the vaccination program by the Government. With this optimism, Indonesia's economy is predicted to grow in the range of 4.7%-5.5% in 2022.

Berdasarkan RUPTL 2021-2030, rencana penambahan kapasitas pembangkit untuk seluruh Indonesia adalah sebanyak 40,6 GW atau rata-rata mencapai 4 GW per tahun. Penambahan kapasitas baru akan didominasi oleh EBT (51,6%) dengan porsi hidro (25,6%%) sebagai teknologi yang paling tepat untuk memenuhi target 23% EBT pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RUPTL. Porsi batubara sebesar 34% dalam kapasitas tambahan hanya terdiri atas *on-going project*. Guna mengoptimalkan peluang tersebut, Dewan Komisaris berpendapat bahwa PJB perlu terus meningkatkan peran dan kontribusi dalam mencapai bauran energi nasional di tahun 2025.

Based on the 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), the planned addition of generating capacity for all of Indonesia is 40.6 GW, or an average of 4 GW per year. The addition of new capacity will be dominated by NRE (51.6%) with the hydro portion (25.6%%) as the most appropriate technology to meet the target of 23% NRE in 2025 as stated in the Electricity Supply Business Plan. The coal portion of 34% in additional capacity consists only of ongoing projects. To optimize these opportunities, the Board of Commissioners believes that PJB needs to continue to increase its role and contribution to achieving the national energy mix in 2025.

Pemulihan kondisi perekonomian dunia maupun nasional di atas menurut pandangan Dewan Komisaris merupakan momentum bagi PJB untuk meraih kembali pertumbuhan kinerja Perusahaan, melalui terobosan dan beragam inovasi guna memaksimalkan setiap potensi serta peluang yang ada. Dengan kekuatan yang dimiliki sebagai Perusahaan pembangkitan dengan sistem manajemen terintegrasi yang diakui secara Internasional, PJB memiliki kekuatan untuk dapat mengoptimalkan prospek usaha positif untuk terus tumbuh dan berkembang.

This recovery of the global and national economic conditions, based on the Board of Commissioners' view, is momentum for PJB to regain the growth of the Company's performance, through breakthroughs and various innovations to optimize every existing potential and opportunity. Supported by its advantage as a power generation company with an international integrated management system, PJB has the power to optimize positive business prospects to sustainably grow and develop.

Pandangan Atas Implementasi Tata Kelola Perusahaan
Perspective on the Good Corporate Governance Practices

Dewan Komisaris meminta Direksi dan segenap jajaran manajemen di bawahnya dalam melakukan pengelolaan PJB dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Perusahaan. Pembagian tugas yang jelas diantara anggota Dewan Komisaris mengacu pada *Board of Commissioners Manual* (BoC *Manual*) dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 011.K/DK/PJB/2014 tanggal 22 Desember 2014. Salah seorang anggota Dewan Komisaris telah ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pengawasan implementasi GCG agar GCG menjadi salah satu fokus bidang pengawasan.

The Board of Commissioners requests the Board of Directors and their supporting management to manage PJB based on the principles of Good Corporate Governance at all organizational levels. The accountable task division among members of the Board of Commissioners refers to the Board of Commissioners Manual (BoC Manual) in the Decree of the Board of Commissioners Number 011.K/DK/PJB/2014 dated December 22, 2014. One member of the Board of Commissioners has been appointed as the person in charge to supervise the implementation of GCG to ensure that GCG can become one of the focus areas of supervision.

Roadmap Implementasi GCG Tahun 2016-2021 menjadi arah strategi implementasi GCG jangka panjang dalam mewujudkan aspirasi menjadi *Good Corporate Citizen,* yaitu dengan menerapkan standar tata kelola perusahaan sesuai dengan *Asean Corporate Governance Scorecard.* Sebagai tahun terakhir implementasi dalam Roadmap GCG tersebut, PJB terus menyempurnakan implementasi GCG yang dilakukan antara lain dengan menguatkan budaya perusahaan sesuai tata nilai AKHLAK dalam *Code of Conducts,* secara berkala melakukan *review* dan pemutakhiran sistem dan prosedur agar sejalan dengan perkembangan proses bisnis dan regulasi yang berlaku, *monitoring* Program RJPP dan RKAP melalui *Strategic Review Meeting* (SRM), serta menjalankan strategi bisnis yang terintegrasi dengan tanggung jawab sosial Perusahaan sehingga dikenal sebagai perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab.

The 2016-2021 GCG Implementation Roadmap is the direction of the long-term GCG implementation strategy in realizing the goal to become a Good Corporate Citizen, namely by implementing corporate governance standards based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard. Since 2021 is the last year to implement the GCG Roadmap, PJB continues to improve the implementation of GCG, among others by strengthening the corporate culture based on the AKHLAK values in the Code of Conducts, periodically reviewing and updating systems and procedures to be in line with the development of business processes and applicable regulations, monitoring the CLP and ABOP Programs through Strategic Review Meetings (SRM), as well as implementing business strategies that are integrated with Corporate Social Responsibility to achieve ethical and responsible company.

Secara berkala PJB melakukan penilaian terhadap implementasi tata kelola perusahaan dibantu oleh BPKP Provinsi Jawa Timur. Untuk tahun 2021 hasil *assessment* tata kelola PJB memperoleh skor sebesar 95,67 dengan predikat kategori "Sangat Baik", dari skor maksimal 100 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2012 tentang Parameter/ Indikator Pengukuran Penerapan GCG.

PJB periodically assesses the implementation of corporate governance assisted by the East Java Province BPKP. In 2021, PJB scored 95.67 from 100 in the governance assessment with the predicate of the "Very Good" category based on the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No.16/S.MBU/2012 concerning Parameters/Indicators of Measurement of GCG Implementation. Specifically for the Aspect of the Board of

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Khusus untuk Aspek Dewan Komisaris, memperoleh skor sebesar 95,31 dan masuk dalam kategori "Sangat Baik". Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jalannya Perusahaan, serta bekerja sama secara harmonis dengan jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memandang bahwa berbagai upaya penguatan implementasi GCG perlu terus dilakukan, termasuk bekerjasama dan melakukan sinergi dengan berbagai instansi guna mendapatkan masukan tata kelola perusahaan di PJB maupun di lingkungan PJB secara grup.

Commissioners, PJB scored 95.31 and was included in the "Very Good" category. The Board of Commissioners always strives to improve the quality of the implementation of supervisory duties on the running of the Company, as well as cooperate harmoniously with the Board of Directors as regulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners views that various efforts to strengthen GCG implementation need to be carried out, including collaborating and synergizing with various agencies to obtain input on corporate governance both inside and outside PJB as a group.

Pandangan Atas Penerapan Kebijakan *Whistleblowing System*
Perspective on the Implementation of the Whistleblowing System Policy

Kebijakan WBS PJB telah dimutakhirkan di tahun 2020 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 004.K/021/DIR/2020 dan Nomor: 007.K/DK-PJB/2020. Dalam praktiknya, Kebijakan WBS menjadi sumber informasi mengenai indikasi berbagai hal yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan, dimana segenap pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan adanya indikasi pelanggaran baik terhadap kode etik, kebijakan PJB maupun tindakan *fraud* yang kemungkinan melibatkan karyawan maupun jajaran manajemen PJB.

PJB's WBS policy has been updated in 2020 which is stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors Number: 004.K/021/DIR/2020 and Number: 007.K/DK-PJB/2020. In its practice, the WBS Policy is a source of information regarding indications of various matters that are opposite to the corporate governance, where all stakeholders such as employees, customers, partners, and other stakeholders can convey indications of violations of the Code of Conduct, PJB policies, and fraudulent acts which may involve other PJB employees and management.

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran (WBS) PJB yang dibentuk terdiri dari fungsi pengawasan internal, fungsi hukum dan fungsi kepatuhan, bertugas menerima laporan pelanggaran yang masuk, untuk selanjutnya melakukan verifikasi dengan *review* dan menganalisa kecukupan bukti pendukung atas laporan yang disampaikan untuk memastikan ada/tidaknya indikasi kerugian Perusahaan serta memutuskan perlu tidaknya laporan yang masuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Pelaksanaan kebijakan WBS disampaikan setiap semester dalam bentuk laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Untuk selanjutnya, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi pihak yang menindaklanjuti hasil laporan yang masuk tersebut. Selama tahun 2021, terdapat 5 (lima) pengaduan yang masuk melalui jalur WBS dan kelima pengaduan tersebut telah selesai ditindaklanjuti. Adapun kategori pelanggaran yang disampaikan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, perbuatan melanggar hukum serta dugaan perbuatan yang dapat berpotensi merugikan keuangan Perusahaan.

PJB's Whistleblowing System Committee (WBS) which was formed consists of an internal control function, a legal function, and a compliance function, tasked with receiving incoming violation reports, for further verification by reviewing and analyzing the adequacy of supporting evidence for the submitted reports to ensure there are/or not indications the Company's losses and decide whether or not the incoming report is subject to further investigation. The implementation of the WBS policy is submitted every semester in the form of a report to the President Director and the Board of Commissioners. Therefore, the Board of Directors and the Board of Commissioners are the parties to follow up on the results of the incoming report. In 2021, there were 5 (five) complaints that came through the WBS channel and all five complaints have been followed up. The categories of violations submitted are related to the process of procuring goods and services, unlawful acts, and alleged acts that may negatively impact the Company's finances.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris
Performance Assessment of the Board of Commissioners Committee

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris PJB dibantu oleh 3 Komite yaitu (1) Komite Audit, (2) Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, serta (3) Komite Nominasi dan Remunerasi, yang sebelumnya adalah Komite SDM dan Organisasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 012.K/DK/PJB/2021, tanggal 21 September 2021. Ketiga komite tersebut telah menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing komite dengan baik serta memberikan dukungan yang positif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

In performing its supervisory function, PJB's Board of Commissioners is assisted by 3 Committees: (1) the Audit Committee, (2) the Risk Management and Compliance Committee, and (3) the Nomination and Remuneration Committee (which was previously the HC and Organization Committee) based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 012.K/DK/PJB/2021, on September 21, 2021. The three committees have carried out the roles, duties, and responsibilities of each committee properly and provided positive support for the implementation of the supervisory function for the Board of Commissioners.

Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan laporan komite secara triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya mengacu pada Piagam Komite sebagai pedoman kerjanya. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian terhadap kinerja setiap komite berdasarkan laporan komite dan indikator kinerja komite yang ditetapkan. Adapun aspek penilaian kinerja komite di tahun 2021 mencakup (a) Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris, (b) Kualitas pekerjaan, (c) Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris tingkat komunikasi, (d) Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID), (e) Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM) dan (f) Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

The Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee, as well as the Nomination and Remuneration Committee, submit quarterly and annual committee reports to the Board of Commissioners as a form of accountability for the implementation of their duties referring to the Committee Charter as a work guideline. The Board of Commissioners periodically evaluates the performance of each committee based on the committee's report and the established committee performance indicators. The aspects of the committee's performance appraisal in 2021 include (a) Timeliness of the agenda for the activities of the Board of Commissioners, (b) Quality of work, (c) Contribution to the activities of the Board of Commissioners at the communication level, (d) Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID), (e) Meetings (RID, RDD, RKM), and (f) Preparation of Supervisory Reports for the Board of Commissioners.

Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dijalankan oleh audit internal maupun auditor eksternal serta memastikan kebenaran dan keandalan laporan keuangan serta informasi keuangan lainnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selama tahun 2021 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali melebihi rencana kerjanya antara lain membahas (1) telaah laporan keuangan Perusahaan, (2) telaah program kerja audit tahunan, (3) evaluasi kinerja operasi dan investasi, (4) pembahasan *Internal Control Over Financial Report* (ICoFR), (5) kecukupan pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal serta (6) tindak lanjut arahan RUPS dan Dewan Komisaris.

Audit Committee

The Audit Committee is tasked to assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal controls performed by the internal audit and external audit as well as ensuring the accountability and reliability of financial statements and other financial information following applicable accounting standards. In 2021, the Audit Committee held 30 (thirty) meetings exceeding its work plan which discussed (1) a review of the Company's financial statements, (2) a review of the annual audit work program, (3) an evaluation of operating and investment performance, (4) discussion of Internal Control Over Financial Report (ICoFR), (5) the adequacy of inspection by internal and external auditors, and (6) follow-up to the direction of the GMS and the Board of Commissioners.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Komite Audit melakukan evaluasi atas Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern (LKSPI) dan Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada unit, bidang dan divisi di Kantor Pusat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulanan, serta mencermati temuan penting atau temuan berulang beserta monitoring tindak lanjut atas hasil audit tersebut. Seluruh temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, telaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2021 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan auditor eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan tindak lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

The Audit Committee evaluates the Internal Audit Activity Report (LKSPI) and the Audit Result Report (LHA) from the Internal Audit Unit (IAU) at the units, departments and divisions at the Head Office every 3 (three) months or quarterly, as well as observing significant findings or repeated findings and follow-up monitoring of the audit results. All findings, documents, and recommendations from the results, reviews, and analysis of the Audit Committee in 2021 have been informed and discussed with the Management, Internal Audit Unit (IAU), and external auditors, and have been reported to the Board of Commissioners for settlement and follow-up by the relevant parties.

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bertanggungjawab untuk menilai dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan dan strategi PJB dalam pengelolaan risiko berdasarkan kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) maupun kepatuhan termasuk analisa risiko dan kepatuhan pada kegiatan investasi. Selama tahun 2021 Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 40 (empat puluh) kali melebihi rencana kerjanya antara lain membahas telaah (1) *review* implementasi ERM dalam *Risk Profile* 2021 dan *Maturity Level* ERM, (2) evaluasi manajemen portofolio dan Investasi mencakup evaluasi RJPP/RKAP Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, (3) evaluasi pengembangan usaha, (4) *Project Completion Report* (PCR), (5) tinjauan Dewan Pengarah atas kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 370001:2016 serta (6) pengembangan pembangkit EBT berdasarkan RUPTL 2021-2026.

Risk Management and Compliance Committee

The Risk Management and Compliance Committee is responsible for assessing and providing input to the Board of Commissioners on PJB's policies and strategies in risk management based on the Enterprise Risk Management (ERM) framework as well as compliance, including risk analysis and compliance with investment activities. In 2021, the Risk Management and Compliance Committee held 40 (forty) meetings exceeding its work plan, including discussing the following matters: (1) review of the implementation of ERM in the 2021 Risk Profile and ERM Maturity Level, (2) evaluation of portfolio and investment management including evaluation RJPP/RKAP of Subsidiaries and Affiliated Companies, (3) evaluation of business development, (4) Project Completion Report (PCR), (5) review of the Steering Committee on Anti-Bribery Management System policies based on ISO 370001:2016, and (6) development of NRE power plants based on the 2021-2026 Electricity Supply Business Plan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite SDM dan Organisasi berganti nama menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana arahan Kementerian BUMN terkait dengan organ pendukung Dewan Komisaris BUMN, yang bertugas membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam hal program pengembangan organisasi, nominasi pejabat satu

Nomination and Remuneration Committee

The Committee's name which was previously HC and Organization was changed to the Nomination and Remuneration Committee as directed by the Ministry of SOEs related to the supporting organs of the SOE Board of Commissioners whose task is to assist the Board of Commissioners in evaluating, providing input and recommendations to the Board of Commissioners on the recommendations of the Board of

tingkat di bawah Direksi, remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi termasuk kesesuaiannya dengan kebijakan PT PLN (Persero) jika diperlukan. Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kali rapat dengan membahas antara lain (1) evaluasi RJPP dan RKAP bidang SDM dan organisasi, (2) merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan), (3) kinerja, K3L dan penanganan Covid-19, (4) usulan perubahan struktur organisasi PJB, (5) pembahasan *talent* dan (6) pembahasan remunerasi Direksi.

Directors in terms of organizational development programs, nominations officials one level below the Board of Directors, remuneration for the Board of Commissioners and Directors including compliance with PT PLN (Persero) policies if needed. In 2021, the Nomination and Remuneration Committee held 28 (twenty-eight) meetings to discuss (1) evaluation of the CLP and ABOP in the sector of HC and organization; (2) the response to suggestions, expectations, issues, and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors, and employees); (3) performance, HSE and Covid-19 handling; (4) proposed changes to PJB's organizational structure; (5) discussion of talent; and (6) discussion of the remuneration for the Board of Directors.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Composition Changes of the Board of Commissioners

Selama tahun 2021, terjadi perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris PJB sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 14 September 2021, Keputusan RUPS Sirkuler 21 Oktober 2021 dan Keputusan RUPS Sirkuler 30 Desember 2021. Perubahan pertama berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Benny M.M Marbun sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris. Perubahan kedua berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 14 September 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sriyono Dwidjo Siswoyo sebagai Komisaris Utama, Sdr. Defy Indiyanto Budiarto sebagai Komisaris, Sdr. Sunarsip sebagai Komisaris, serta menunjuk Sdr. Komang Parmita merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama. Perubahan ketiga berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler 21 Oktober 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama serta memberhentikan Sdr. Komang Parmita pada rangkap jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama. Terakhir, perubahan keempat berdasarkan RUPS Sirkuler 30 Desember 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris dan Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris.

In 2021, there was a change in the composition and formation of PJB's Board of Commissioners 4 (four) times based on the Circular GMS Resolution on April 23, 2021, the Circular GMS Resolution on September 14, 2021, the Circular GMS Resolution on October 21, 2021, and the Circular GMS Resolution on December 30, 2021. The changes were firstly based on the Circular GMS Resolution on April 23, 2021, which respectfully dismissed Mr. Benny M.M Marbun as Acting Commissioner and appointed Mr. Komang Parmita as Commissioner. The second change was based on the Circular GMS Resolution on September 14, 2021, which respectfully dismissed Mr. Sriyono Dwidjo Siswoyo as President Commissioner, Mr. Defy Indiyanto Budiarto as Commissioner, Mr. Sunarsip as Commissioner by appointing Mr. Komang Parmita concurrently serves as Acting President Commissioner. The third change was based on the Circular GMS Resolution of October 21, 2021, which appointed Mr. Dedeng Hidayat as President Commissioner and dismissed Mr. Komang Parmita in his concurrent position as Acting President Commissioner. Lastly, the fourth change was based on the Circular GMS on December 30, 2021, which appointed Mr. Emir Kresna Wardana as Commissioner and Mr. Bagus Puruhito as Commissioner.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Atas nama PJB, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Benny M.M Marbun, Sdr. Sriyono Dwidjo Siswoyo, Sdr. Defy Indiyanto Budiarto, dan Sdr. Sunarsip atas kontribusi dan dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PJB. Atas nama Dewan Komisaris, Kami menyampaikan selamat bergabung kepada Sdr. Komang Parmita, Sdr. Emir Kresna Wardana dan Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris PJB. Dengan demikian maka jumlah anggota Dewan Komisaris PJB pada 31 Desember 2021 adalah:

1. Komisaris Utama : Dedeng Hidayat MH
2. Komisaris : Komang Parmita
3. Komisaris : Jisman Parada Hutajulu
4. Komisaris : Hendra Iswahyudi
5. Komisaris Independen : Bagus Puruhito
6. Komisaris Independen : Emir Kresna W

Dewan Komisaris terus berkomitmen meningkatkan soliditas internal, melalui peran aktif pengawasan dan penasehatan terhadap pengelolaan Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja PJB yang lebih baik di masa depan.

On behalf of PJB, the Board of Commissioners would like to express the highest gratitude to Mr. Benny M.M Marbun, Mr. Sriyono Dwidjo Siswoyo, Mr. Defy Indiyanto Budiarto, and Mr. Sunarsip for their contributions and dedications during the term as members of PJB's Board of Commissioners. On behalf of the Board of Commissioners, we would like to congratulate Mr. Komang Parmita, Mr. Emir Kresna Wardana, and Mr. Bagus Puruhito as PJB's Commissioners. Thus, the number of members of PJB's Board of Commissioners as of December 31, 2021, is as follows:

1. President Commissioner : Dedeng Hidayat MH
2. Commissioner : Komang Parmita
3. Commissioner : Jisman Parada Hutajulu
4. Commissioner : Hendra Iswahyudi
5. Independent Commissioner : Bagus Puruhito
6. Independent Commissioner : Emir Kresna W

The Board of Commissioners is always committed to improving internal solidity, through an active role in monitoring and advising the Company's management to improve the achievement of PJB's better performance in the future.

Apresiasi
Letter of Appreciation

Atas nama Dewan Komisaris, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Direksi dan seluruh karyawan PJB atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam pencapaian target kinerja PJB dan prestasi yang diperoleh selama tahun 2021. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pemegang saham, pelanggan, mitra kerja dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya kepada PJB selama ini.

On behalf of the Board of Commissioners, we express our highest gratitude and appreciation to the Board of Directors and all PJB employees for their dedication and hard work in achieving PJB's performance targets and achievements in 2021. Appreciation and gratitude are also expressed to shareholders, customers, partners, and all stakeholders for their trust and support for PJB.

Selanjutnya, Dewan Komisaris mengajak segenap jajaran Direksi dan karyawan PJB untuk bersama-sama memajukan PJB, menyatukan langkah, kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki untuk mengoptimalkan peluang positif, guna mewujudkan aspirasi menjadi Perusahaan yang terdepan dan terpercaya sebagai Perusahaan Energi yang tumbuh Berkelanjutan.

Furthermore, the Board of Commissioners invites entire ranks of the Board of Directors and PJB employees to jointly advance PJB and unite the steps, capabilities, and resources to optimize positive opportunities to realize the aspiration to be the leading and trusted Company as a Sustainable Energy Company.

Surabaya, 20 Mei 2022
Surabaya, May, 20 2022

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dedeng Hidayat
Komisaris Utama
President Commissioner

Komang Parmita
Komisaris
Commissioner

Hendra Iswahyudi
Komisaris
Commissioner

Jisman Parada Hutajulu
Komisaris
Commissioner

Bagus Puruhito
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Emir Kresna W
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

1. Dedeng Hidayat
2. Komang Parmita
3. Emir Kresna Wardana
4. Jisman P. Hutajulu
5. Hendra Iswahyudi
6. Bagus Puruhito

4
5
6
1

Gong Matua Hasibuan
Direktur Utama
President Director

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Tahun 2021 PJB berhasil melakukan *go live* komersialisasi *co-firing* sehingga total menjadi 9 (sembilan) PLTU merupakan bentuk dukungan PJB terhadap Pemerintah dalam mencapai bauran energi EBT nasional sebesar 23% di tahun 2025. Adapun proyek PLTS Terapung Cirata berkapasitas 145 MWAc telah mencapai *milestone* penting, yaitu tercapainya kesepakatan sindikasi pendanaan oleh 3 (tiga) bank internasional, ditargetkan akan beroperasi komersial pada tahun 2023 dengan target produksi energi sebesar 245 juta kWh per tahun akan semakin meningkatkan kontribusi PJB dalam bauran energi EBT nasional. Selain itu, Kami juga senantiasa melebarkan sayap pengembangan usaha guna mewujudkan aspirasi menjadi *Trusted and Leading in Sustainable Energy* antara lain dengan menjajaki pasar ke negara-negara Afrika dalam pengembangan bisnis *beyond* KWh.

In 2021, PJB succeeded in holding go-live for co-firing commercialization, bringing the total to 9 (nine) CFPP as support by PJB for the Government in achieving national NRE energy mix of 23% in 2025. Cirata Floating SPP project with a capacity of 145 MWAc has reached an important milestone, which is an achievement of a syndicated funding agreement by 3 (three) international banks, targeted for commercial operations in 2023 with the energy production target of 245 million kWh per year which will further increase PJB contribution to national NRE energy mix. Furthermore, we also continue to expand our business development in order to realize our aspiration to become the Trusted and Leading in Sustainable Energy, including through market exploration to African countries in business development beyond KWh.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nyalah PJB dapat melalui tahun 2021 yang penuh tantangan dengan pencapaian yang baik dan membanggakan. Bersama ini ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2021 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material. Tahun 2021 Direksi dan segenap jajaran manajemen di bawahnya beserta seluruh karyawan PJB telah berhasil menghadapi tahun 2021 yang penuh tantangan dengan berbagai prestasi dan penhargaan serta pencapaian penting lainnya.

Praise and gratitude to Allah SWT, due to the bestowed grace, PJB was able to pass through 2021 which is full of challenges with good and proud achievements. We hereby submit the Board of Directors accountability report for the Company management for 2021 fiscal year along with the audited financial statements by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners and obtained unqualified opinion. In 2021, the Board of Directors and all management levels under them and all PJB employees succeeded in facing a challenging 2021 with various achievements and awards as well as other important achievements.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Laporan Tahunan 2021 ini, PJB mengambil tema ***"Strengthening Synergy, Creating Green Energy".*** Ketatnya kompetisi industri kelistrikan saat ini menuntut PJB untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan. Semangat untuk terus bergerak dan melompat lebih tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Direksi mengajak seluruh anak perusahaan di lingkungan PJB grup maupun PLN grup bersama semua pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan energi hijau dan bersih.

For this 2021 Annual Report, PJB selected the theme **"Strengthening Synergy, Creating Green Energy"**. The current tight competition in the electricity industry requires PJB to strengthen synergy and collaboration with all stakeholders. The spirit to keep moving and jumping higher in support of sustainable development. The Board of Directors invites all subsidiaries within PJB group and PLN group together with all stakeholders to strengthen synergies in supporting the development of green and clean energy.

Tinjauan Makroekonomi 2021
Macroeconomic Review in 2021

Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan utama bagi ekonomi global dan nasional di tahun 2021. Kendati sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, namun Covid-19 tetap menjadi faktor yang sangat berpengaruh karena karakteristik virus yang terus bermutasi, sehingga penanganannya menjadi jauh lebih sulit.

The Covid-19 pandemic is still a major challenge for the global and national economy in 2021. Despite it had been much better than the previous year, the Covid-19 remains a badly influential factor due to the virus characteristics that continue to mutate. Hence, it is much more difficult in handling it.

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global mencapai 5,9% jauh lebih tinggi dari tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 3,2%, terutama dipengaruhi oleh stimulus kebijakan ekonomi, pemulihan kegiatan ekonomi secara bertahap di Amerika Serikat dan Tiongkok, serta sejumlah negara Eropa dan Asia lainnya serta akselerasi tingkat vaksinasi di berbagai negara. Selain itu, tantangan tahun 2021 juga dibayangi oleh kekhawatiran terjadinya krisis energi yang disebabkan terbatasnya persediaan bahan bakar fosil, namun di sisi lainnya geliat ekonomi pasca pandemi mulai menguat. Hal ini mengakibatkan harga bahan bakar dan permintaan masyarakat melonjak, namun sumber energinya terbatas sehingga terjadilah krisis energi.

International Monetary Fund (IMF) predicts global economic growth to reach 5.9%, much higher than 2020, which contracted at 3.2%, mainly influenced by economic policy stimulus, gradual recovery in economic activity in the United States and China, as well as several countries in Europe and other Asia, as well as acceleration of vaccination rates in various countries. Additionally, 2021 challenges were also overshadowed by fears of an energy crisis caused by the limited supplies of fossil fuels, but on the other hand, the post-pandemic economy has begun to strengthen. It resulted in fuel prices and public demand soaring, but limited energy sources resulting in the energy crisis.

Perekonomian Indonesia tumbuh cukup baik di tahun 2021, mengingat sejak awal tahun, Pemerintah sangat gencar menjalankan program vaksinasi di seluruh wilayah di tanah air untuk melindungi masyarakat dari dampak terburuk dari Covid-19. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menambah alokasi anggaran menjadi Rp744,7 triliun dari Rp695,2 triliun di tahun 2020. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,69% di tahun 2021 dan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dimana mengalami kontraksi sebesar 2,07% dan masih belum kembali.

Indonesian economy grew quite well in 2021, considering that since the beginning of the year, the Government had been really aggressive in implementing vaccination programs in all regions in the country to protect people from the worst impacts of Covid-19. The government keeps encouraging the implementation of National Economic Recovery (PEN) program by increasing budget allocation to Rp744.7 trillion from Rp695.2 trillion in 2020. According to data from Indonesian Central Statistics Agency (BPS), Indonesian economy grew by 3.69% in 2021 and got much better than the previous year, where it contracted by 2.07% and still hasn't returned.

Analisis Atas Pencapaian Kinerja 2021
Analysis on 2021 Performance Achievements

PJB terus membangun solusi untuk memastikan *grand strategy* PJB sejalan dengan transformasi PLN dan mendukung ketahanan energi listrik nasional.

PJB continues to build solutions to ensure PJB grand strategy is in line with PLN transformation and supports national electrical energy security.

Kebijakan dan Strategi

Semakin ketatnya kompetisi dan tantangan di industri energi dan kelistrikan nasional, Direksi dan segenap jajaran manajemen PJB telah menyusun 5 (lima) pilar strategi yang diturunkan menjadi 16 inisiatif strategis dalam menjalankan 3 (tiga) peran PJB secara optimal, baik sebagai pemilik, pengelola maupun investor pembangkit. Lima (5) pilar strategi PJB tersebut adalah (1) menjaga dan meningkatkan keamanan serta keandalan pembangkit; (2) optimasi utilisasi pembangkit dan penurunan BPP; (3) pengembangan usaha (*new business horizon*); (4) pengelolaan *human capital & organizational capital* serta (5) pengelolaan K3L dan Covid-19. Tahun 2021 PJB tetap fokus dengan program strategis korporat yang bertujuan mengokohkan pondasi (*strengthen the basic*) dengan mengembangkan pilar strategi kedua dan ketiga, yaitu Optimasi Utilisasi Pembangkit dan Pengembangan Usaha, dengan mengedepankan nilai integritas, tata kelola perusahaan, implementasi budaya pelayanan prima, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan kinerja keuangan yang sehat. Mengingat porsi penjualan listrik PJB dari pembangkit eksisting cenderung menurun maka perlu dikembangkan strategi eksekusi yang mampu meningkatkan peran PJB sebagai pengelola dan investor pembangkit melalui pilar strategi *new business horizon.*

Policy and Strategy

Competition and challenges in the national energy and electricity industry are getting tighter, so the Board of Directors and the entire PJB management levels compiled 5 (five) strategic pillars which had been reduced to 16 strategic initiatives in performing PJB's 3 (three) roles optimally, both as owners, managers and investors of generator. The five (5) pillars of PJB strategy are (1) maintaining and improving the security and reliability of power plant; (2) optimization of power plat utilization and reduction of CES; (3) business development (new business horizon); (4) management of human resources & organizational capital and (5) management of HSE and Covid-19. In 2021, PJB kept focussing on the Company's strategic programs purposed to strengthen the foundation (strengthen the basic) by developing the second and third strategic pillars, namely Optimization of Generation Utilization and Business Development, by prioritizing the values of integrity, corporate governance, implementing a culture of excellent service, working with full responsibility and generating a sound financial performance. Considering that the electricity sales portion of PJB from the existing power plants tends to decrease, it is necessary to develop an execution strategy that is able to increase PJB role as the power plant manager and investor through the pillars of the new business horizon strategy.

Di bidang jasa operasi dan pemeliharaan, PJB terus berupaya menyempurnakan proses bisnis O&M pembangkit, baik milik sendiri maupun mengelola pembangkit pihak lain dengan mengimplementasikan Manajemen Aset Pembangkitan berdasarkan standar ISO 55001 guna menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan nilai biaya pokok produksi yang semakin baik secara berkesinambungan. Di bidang jasa konstruksi (EPC), PJB menerapkan strategi penguatan *project planning and controlling* dengan implementasi PROMIS (*Project Management Integrated System*), mengembangkan standarisasi pengelolaan proyek guna meningkatkan kualitas proyek dengan dukungan kapasitas serta kapabilitas SDM yang memadai. Pengembangan SDM secara berkesinambungan

In the field of operation and maintenance services, PJB continues to improve power plant O&M business process, both owned and managed by other parties power plant by implementing Generation Asset Management based on the ISO 55001 standard in order to produce high productivity with better cost of production on an ongoing basis. In the field of construction services (EPC), PJB implements a strategy of strengthening project planning and controlling by implementing PROMIS (Project Management Integrated System), developing project management standards to improve project quality with the support of adequate capacity and human resources capabilities. Continuous HR development is also continuously improved in order to be able to compete

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

juga terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan SDM dari negara-negara ASEAN, dengan melakukan berbagai program pelatihan, sertifikasi, *benchmark*, penugasan, *coaching, mentoring, counseling* dan pembelajaran.

Keseluruhan strategi tersebut, diharapkan dapat mendorong terciptanya kinerja pembangkit yang ekselen guna mewujudkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

Perbandingan Hasil Kinerja dengan Target 2021

PJB berhasil mencatat kinerja yang positif di tahun 2021, baik dalam aspek keuangan maupun operasional, dimana sebagian besar target RKAP 2021 telah tercapai. KPI Perusahaan 2021 yang menjadi kesepakatan antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham berada pada level **"AAA"** mencapai skor 96,13 dan termasuk dalam kategori **"Sehat".** Adapun kinerja pembangkit eksisting PJB di tahun 2021 adalah tetap membanggakan atau bahkan terbaik dengan pencapaian rata-rata di atas 100% dari yang ditargetkan, kecuali realisasi *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) sebagai salah satu indikator kesiapan dan keandalan pembangkit.

Saat ini proyek PLTS Terapung Cirata berkapasitas 145 MWAc telah mencapai kesepakatan sindikasi pendanaan oleh 3 (tiga) bank internasional, yakni Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale dan Standard Chartered Bank. PLTS Terapung Cirata direncanakan beroperasi komersial (*Commercial Operation Date* atau COD) pada tahun 2023 dengan target produksi energi sebesar 245 juta kWh per tahun. PLTGU Muara Karang Blok 3 berhasil beroperasi secara komersial dengan *mode* operasi *combined cycle* berkapasitas 500 MW, sebelumnya beroperasi dengan *mode open cycle* berkapasitas 350 MW. Untuk itulah, PJB meyakini bahwa dengan terus melakukan pengembangan usaha secara hati-hati melalui inisiasi peningkatan bauran EBT dengan *co-firing,* pengembangan bisnis O&M dan EAM serta MRO dengan menjajaki pasar ke Afrika diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

with HR from ASEAN countries, by holding various training programs, certifications, benchmarks, assignments, coaching, mentoring, counseling and learning.

The overall strategy is expected to encourage the creation of excellent power plant performance in order to realize sustainable revenue growth.

Comparison of Performance Results with 2021 Target

PJB managed to record positive performance in 2021, both in financial and operational aspects, where most of 2021 ABOP targets have been achieved. 2021 Company KPI which is an agreement among the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Shareholders is at "AAA" level reaching a score of 96.13 and is included in the "Healthy" category. Meanwhile, the performance of PJB's existing power plants in 2021 is still proud or even the best with an average achievement of above 100% of the target, unless for the realization of Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) as an indicator of power plant readiness and reliability.

Currently, Cirata Floating SPP project with a capacity of 145 MWAc has reached an agreement for a funding syndication by 3 (three) international banks, namely Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale and Standard Chartered Bank. Cirata Floating SPP is planned to operate commercially (Commercial Operation Date or COD) in 2023 with an energy production target of 245 million kWh per year. Block 3 Muara Karang CCPP has successfully operated commercially with a combined cycle mode of operation with a capacity of 500 MW, previously operating in an open cycle mode with a capacity of 350 MW. For this reason, PJB believes that by continuing to develop business carefully through the initiation of increasing NRE mix with co-firing, developing O&M and EAM and MRO businesses by exploring markets to Africa, it is expected to maintain business continuity of the Company in the long term.

Seluruh indikator kinerja pembangkit eksisting di tahun 2021 yang meliputi indikator kesiapan & keandalan pembangkit (EAF), efisiensi & utilisasi pembangkit (Tara Kalor/NPHR, BPP, dan NCF) serta pengelolaan K3L (*Accident*, dan Proper) telah mencapai target RKAP 2021. Realisasi nilai *Equivalent Availability Factor* (EAF) mencapai sebesar 95,47% atau 102,04% dari RKAP 2021 dan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 95,52%. Nilai NPHR mencapai 2.484,66 kCal/kWh atau 100,13% dari RKAP 2021 dan lebih baik dibanding tahun 2020 sebesar 2.509,04 kCal/kWh. Realisasi BPP pembangkit eksisting maupun pembangkit AMC masing-masing mencapai Rp1.034,75,- atau 101,29% dari RKAP 2021 dan Rp716,37,- atau 110% dari RKAP 2021. Dalam pengelolaan kinerja K3L tercapai *zero accident,* sedangkan prestasi untuk kinerja pengelolan lingkungan PJB berhasil meraih 3 PROPER Emas, meningkat dari tahun lalu yang hanya sebanyak 2 unit, 4 PROPER Hijau dan 12 PROPER Biru.

Kami terus berupaya meningkatkan pengelolaan Pembangkit dengan standar kelas dunia mengacu pada PAS 55 maupun sertifikasi ISO 55001:2014, agar keamanan dan keandalan pembangkit dapat terus dijaga. Tahun 2020 PJB berhasil mengelola kinerja operasi pembangkit dengan capaian terbaik pada indikator keandalan (*Equivalent Availability Factor*/EAF), faktor gangguan (*Equivalent Forced Outage Rate*/EFOR), pemakaian bahan bakar, dan ketepatan pelaksanaan serta durasi pemeliharaan.

Realisasi produksi energi listrik PJB tahun 2021 mencapai sebesar 20.640,92 GWh atau 106,36% dari target RKAP 2021, meningkat 15,86% dibandingkan tahun 2020 sebesar 17.815,81 GWh. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan pembebanan pada operasi Sistem Jamali hampir di semua jenis pembangkit PJB. Kinerja pemakaian bahan bakar atau bauran energi primer di tahun 2021 masih didominasi oleh pembangkit berbahan bakar batubara, yang meningkat 13,89% menjadi sebanyak 3.241.528 ton; dilanjutkan dengan pemakaian bahan bakar HSD sebanyak 129.289 kL, gas alam sebanyak 106.500 BBTU; biomass sebanyak 61.408 ton dan MFO sebanyak 59.612 kL. Direksi berkomitmen untuk meng-EBT-kan seluruh PLTU batubara yang dimiliki dan dikelola PJB guna meningkatkan realisasi *co-firing* PLTU batubara sehingga bauran energi menjadi lebih ramah lingkungan. Hal tersebut dibuktikan, di tahun 2021 PJB berhasil melakukan komersialisi *co-firing* di 9 (sembilan) PLTU, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 3 (tiga) PLTU.

All performance indicators of the existing power plants in 2021 including indicators of power plant readiness & reliability (EAF), power plant efficiency & utilization (Tara Kalor/NPHR, BPP, and NCF) as well as HSE management (Accident, and Proper) have reached 2021 ABOP target. Realization of Equivalent Availability Factor (EAF) Value reached 95.47% or 102.04% of 2021 ABOP and was slightly lower than 2020 which was 95.52%. NPHR value reached 2,484.66 kCal/kWh or 100.13% of 2021 ABOP and better than 2020 of 2,509.04 kCal/kWh. BPP realization for the existing power plant and AMC pweor plant reached Rp1,034.75,- or 101.29% of 2021 ABOP and Rp716.37,- or 110% of 2021 ABOP, respectively. In managing HSE performance, zero accident was achieved, while the achievement for PJB environmental management performance has won 3 Gold PROPER, an increase from previous year of 2 units, namely 4 Green PROPER and 12 Blue PROPER.

We continue to improve power plant management with the world-class standards referring to PAS 55 and ISO 55001:2014 certification, so as to maintain safety and reliability of power plant. In 2020, PJB succeeded in managing operations performance of power plant with the best achievements on indicators of reliability (Equivalent Availability Factor/EAF), disturbance factor (Equivalent Forced Outage Rate/EFOR), fuel consumption, and accuracy of implementation and duration of maintenance.

The realization of PJB electric energy production in 2021 reached 20,640.92 GWh or 106.36% of 2021 ABOP target, increased by 15.86% compared to 2020 of 17,815.81 GWh. The increase was mainly influenced by the increased demand for loading on the Jamali System operation in almost all types of PJB power plants. The fuel use or primary energy mix performance in 2021 is still dominated by coal-fired power plants, which increased by 13.89% to 3,241,528 tons; followed by the use of HSD fuel of 129,289 kL, natural gas of 106,500 BBTU; biomass of 61,408 tons and MFO of 59,612 kL. The Board of Directors is committed to renewing all coal-fired power plants owned and managed by PJB in order to increase the realization of co-firing of coal-fired power plant so that the energy mix turns into more environmentally friendly. Evidenced that PJB succeeded in co-firing commercialization in 9 (nine) CFPP in 2021, an increase from the previous year of 3 (three) CFPP.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Realisasi penjualan listrik PJB tahun 2021 untuk sistem Jawa Bali mencapai sebesar 19.848,44 GWh atau 107,06% dari target RKAP, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 17.117,04 GWh. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pengoperasian pembangkit BBM dan gas untuk menggantikan *derating* PLTU batubara.

The realization of PJB electricity sales in 2021 for Java-Bali system reached 19,848.44 GWh or 107.06% of the ABOP target, an increase compared to 2020 of 17,117.04 GWh. It was mainly caused by operation of fuel and gas power plants to replace the derating of coal-fired power plants.

Adapun realisasi pendapatan usaha pada tahun 2021 mencapai 95,87% dari target RKAP, menurun 3,04% menjadi Rp29.508.134 juta dari tahun 2020 sebesar Rp30.434.176 juta dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen penjualan listrik sebesar 83,17%, selanjutnya di urutan kedua segmen jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 13,75%, konstruksi sebesar 2,46% dan pendapatan lainnya sebesar 0,62%. Apabila dibandingkan dengan profitabilitas segmen usaha tahun lalu, maka seluruh segmen usaha PJB mengalami peningkatan pendapatan usaha, kecuali segmen penjualan tenaga listrik. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan usaha di atas terutama disebabkan oleh penyesuaian margin Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan belum terealisasinya beberapa kontrak AMC antara lain Belawan, Sambelia, Pulang Pisau dan Kaltim Teluk. Diakui bahwa realisasi produksi dan penjualan tenaga listrik mengalami penurunan, dan kinerja secara *bottom line* dalam realisasi perolehan laba tahun berjalan juga mengalami penurunan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban usaha tahun 2021 meningkat sebesar 14,57% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp25.101.143 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp21.908.553 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya bahan bakar dan pelumas serta biaya kepegawaian. Kenaikan beban usaha lebih tinggi dari kenaikan pendapatan usaha berdampak pada penurunan perolehan laba tahun berjalan 2021 sebesar 24,45% menjadi Rp5.820.188 juta dari tahun 2020 sebesar Rp7.703.812 juta, atau mencapai 181,45% dibandingkan dengan target RKAP 2021.

The realization of operating income in 2021 reached 95.87% of the ABOP target, decreased by 3.04% to Rp29,508,134 million from Rp30,434,176 million in 2020 with the largest contribution came from the electricity sales segment of 83.17%, then in second in the operating and maintenance service segment by 13.75%, construction by 2.46% and other income by 0.62%. When compared with the profitability of the previous year business segment, the entier PJB business segments increased in operating income, unless for the electricity sales segment. The factors that caused the decrease in operating income above were mainly due to adjustment in the margin of Electricity Purchase Agreement, which was lower than the previous year and the unrealization of several AMC contracts, including Belawan, Sambelia, Pulang Pisau and Kaltim Teluk. It is recognized that the realization of electricity production and sales has decreased, and bottom line performance in the realization of profit for the year has also decreased. It was mainly due to the increase in operating expenses in 2021, which increased by 14.57% from the previous year to Rp25,101,143 million compared to the previous year of Rp21,908,553 million, mainly due to the increase in fuel and lubricant costs as well as personnel costs. The increase in operating expenses which was higher than the increase in operating income resulted in the decreasing profit for the year 2021 by 24.45% to Rp. 5,820,188 million from 2020 of Rp. 7,703,812 million, or 181.45% compared to 2021 ABOP target.

Adapun posisi keuangan PJB tahun 2021 dari sisi aset mengalami penurunan 1,94% menjadi Rp172.163.828 juta dari tahun lalu sebesar Rp175.561.020 juta atau 99,99% dari target RKAP sebesar Rp172.170.318 juta yang disebabkan oleh revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2021. Rasio keuangan PJB tahun 2021 menunjukkan hasil yang baik,

Meanwhile, PJB financial position in 2021 in terms of assets decreased by 1.94% to Rp172,163,828 million from the previous year amounted to Rp175,561,020 million or 99.99% of the ABOP target amounting to Rp172,170,318 million due to assets revaluation by the Company in 2021. PJB financial ratios in 2021 signified good results, as reflected in the realization of

tercermin dari realisasi rasio solvabilitas yakni kemampuan PJB membayar utang jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) masing-masing mencapai 6,39% dan 6,82%. Walaupun realisasi rasio profitabilitas tahun 2021 yang menunjukkan kinerja PJB menghasilkan laba ke depannya perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

solvency ratio, namely PJB ability to pay short-term and long-term debt. The Debt to Assets Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER) values reached 6.39% and 6.82%, respectively. Despite the realization of the profitability ratio in 2021 signified PJB performance in generating profits in the future, it needs to be maintained and improved.

Direksi dan segenap jajaran manajemen PJB perlu terus mengembangkan kebijakan dan strategi yang mampu mendorong *cost leadership program,* meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mengakselerasi pendapatan usaha dari segmen di luar penjualan tenaga listrik, menguatkan *strategic partnership* yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis yang kompeten di bidangnya, memperkuat integrasi sistem manajemen dan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM), serta terus memperkuat kompetensi SDM dengan mengkinikan pengetahuan dan ketrampilan sesuai perkembangan dinamika bisnis dan arah pengembangan usaha PJB. Pengelolaan kinerja terus dilakukan dengan melakukan *monitoring contractor safety management system* di lapangan, pelibatan seluruh karyawan unit, pemerintah daerah setempat, rekanan dan mitra bisnis untuk mendorong sinergi dan kolaborasi yang semakin solid serta mengokohkan peran dan kontribusi Anak Perusahaan dengan memenuhi kepuasan para pelanggan.

The Board of Directors and the entire PJB management levels need to continue to develop policies and strategies that are able to encourage cost leadership programs, increase customer satisfaction and loyalty, accelerate business revenues from segments outside of electricity sales, strengthen mutually beneficial strategic partnerships with business partners who are competent in their fields, strengthen management system integration and implementation of Enterprise Risk Management (ERM), as well as continue to strengthen HR competencies by updating knowledge and skills according to the development of business dynamics and direction of PJB business development. Performance management continues to be carried out by monitoring the contractor safety management system in the field, involving all unit employees, local government, partners and business partners to encourage more solid synergy and collaboration and strengthen the role and contribution of the Subsidiaries by fulfilling the customers satisfaction.

Inovasi teknologi pembangkitan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi PJB, kini telah mengubah cara PJB menjalankan bisnis. Untuk tahun 2021 ajang penghargaan di bidang inovasi telah berubah dari sebelumnya adalah ajang LIKE (*Learning, Innovation, Knowledge & Exibition*) menjadi Karya Inovasi PLN dan PJB meraih Juara Karya Inovasi PLN 2021 untuk 6 Kategori yakni Proses Bisnis Manajemen, Inovasi Strategis, Proses Bisnis Manajemen, dan *Technical Supporting* mendapatkan 2 Kategori. Transformasi *digital* di bidang pembangkit maupun non pembangkit juga terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, memberikan kemudahan dan *monitoring* secara *online* dan *real time*. PJB Access menjadi *platform digital* PJB bagi industr ketenagalistrikan, energi dan utulitas lainnya yang menawarkan layanan terbaik dalam genggaman pelanggan melalui perangkat seluler. Kami akan terus berupaya mengembangkan berbagai peluang positif dengan memperkuat inovasi di berbagai bidang.

Generation technology innovation is a challenge as well as an opportunity for PJB, currently it has changed the way PJB runs business. For 2021, awards event in the field of innovation has changed from the previously LIKE (Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition) event to PLN Innovation Work and PJB won the 2021 PLN Innovation Work Champion for 6 Categories, namely Business Process Management, Strategic Innovation, Business Process Management , and Technical Supporting obtained 2 Categories. Digital transformation in the generating and non-generating sectors is also continuously carried out to improve efficiency, as well as to provide convenience and monitoring online and in real time. PJB Access is PJB digital platform for the electricity, energy and other utilities industry that offers the best services in the customers hands via mobile devices. We will continue to strive to develop positive opportunities by strengthening innovation in various sectors.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

PJB terus berupaya mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional untuk mengokohkan eksistensi sebagai Perusahaan di bidang energi dengan memberikan yang terbaik bagi segenap pemangku kepentingan. Pencapaian kinerja di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan di tingkat nasional telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan oleh berbagai pihak. PJB melalui UP Muara Karang, UP Cirata dan UP Paiton merupakan 3 (tiga) unit pembangkit pertama di Indonesia yang berhasil meraih ISO 37001. Hal tersebut menjadi komitmen dan konsistensi kami dalam penerapan prinsip berintegritas sehingga implementasinya lebih luas selain ruang lingkup korporasi yang telah diperoleh tahun lalu. Penghargaan CSR di tingkat internasional berhasil diraih PJB dalam ajang *Asia Responsible Enterprise Award* (AREA) 2021 kepada UP Gresik dengan "Program Pijar Berdaya - *Social Innovation and Women Entrepreneurship*".

PJB continues to seek recognition from various parties, both nationally and internationally to strengthen its existence as a company in the energy sector by providing the best for all stakeholders. Performance achievement in the economic, social and environmental fields at the national level has received appreciation and awards by various parties. PJB through Muara Karang GU, Cirata GU and Paiton GU are the first 3 (three) generating units in Indonesia to achieve ISO 37001. This is our commitment and consistency in implementing integrity principle so that its implementation is wider than the corporate scope that was obtained in the previous year. PJB has won CSR awards at international level in the 2021 Asia Responsible Enterprise Award (AREA) event to UP Gresik with the "Empowered Incandescent Program - Social Innovation and Women Entrepreneurship".

Dengan terus menggelorakan semangat optimisme, PJB meyakini dapat senantiasa mencapai pertumbuhan kinerja yang semakin baik lagi di masa depan dengan memenuhi tidak hanya harapan pemegang saham namun juga memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

By continuing to inflame the spirit of optimism, PJB believes to always achieve better performance growth in the future by fulfilling not only the shareholders expectations, but also paying attention to the other stakeholders.

Kendala yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaiannya
Risks and Mitigation

Tantangan yang dihadapi PJB tahun 2021, diantaranya adalah meningkatnya harga energi primer yang belum diimbangi dengan tarif dasar listrik, hadirnya pemain baru di bidang energi listrik, disrupsi teknologi, dan tren di industri kelistrikan global 3DIE (*Decarbonization, Decentralization, Digitalization and Electrification*). Digitalisasi menjadi kebutuhan untuk mendorong pengelolaan bisnis pembangkit listrik dapat dijalankan lebih efisien. Disamping itu, kondisi pembangkit eksisting yang sudah tua menuntut inovasi agar dapat efisien, menurunnya pangsa pasar segmen usaha penjualan tenaga listrik, regulasi lingkungan dan pandemi Covid-19 yang masih terjadi menjadi kendala lain yang dihadapi PJB. Dengan demikian, PJB dituntut untuk beradaptasi menciptakan keunggulan kompetitif dan berinovasi menjalankan ketiga perannya dengan sebaik-baiknya, baik sebagai pemilik sekaligus pengelola pembangkit sendiri (*Own*), pengelola pembangkit milik PLN dan IPP (*Manage*) maupun sebagai investor dalam perusahaan IPP (*Invest*).

The challenges faced by PJB in 2021, including the increase in primary energy rata unbalanced by the basic electricity tariff, the presence of new players in the field of electrical energy, technological disruption, and trends in the 3DIE (Decarbonization, Decentralization, Digitalization and Electrification) global electricity industry. Digitalization is a necessity to encourage the management of power plant business to be run more efficiently. Additionally, the condition of an old existing power plant requires innovation to be efficient, the declining market share of the electricity sales business segment, environmental regulations and the ongoing Covid-19 pandemic are other constraints faced by PJB. Therefore, PJB is required to adapt to create a competitive advantage and innovate to carry out its three roles as well as possible, both as owner and manager of its own power plant (Own), manager of PLN and IPP (Manage) power plants as well as investors in IPP (Invest) companies.

Upaya dan langkah yang dijalankan PJB dalam mengatasi kendala-kendala di atas antara lain adalah pertama, mempertahankan dan meningkatkan bisnis inti dengan berfokus pada optimalisasi kinerja pembangkit, peningkatan fungsi *fast response*, pemanfaatan lahan tak terpakai dan menyelesaikan proyek yang sedang dikembangkan yang akan mempengaruhi keamanan pasokan listrik, BPP listrik, serta keselamatan kerja dan keandalan pembangkit. Kedua, PJB melakukan investasi dan pengembangan usaha, bisnis jasa O&M, produk *beyond* kWh antara lain MRO, *biomass*, *co-firing, rooftop solar* PV dan EAM yang akan menjadi potensi bisnis baru. Ketiga, PJB melakukan inisiasi pengembangan bisnis, berkolaborasi dengan mitra bisnis yang kompeten, seperti *water treatment, digital light house*, efisiensi dan manajemen industri, *virtual power plant* dan sebagainya. Ketiga strategi tersebut akan menjadi siklus yang terus mengalir guna mewujudkan pertumbuhan kinerja PJB secara berkelanjutan.

PJB undertakes efforts and steps in overcoming the above constraints include, firstly, maintaining and improving the core business by focusing on optimizing generator performance, increasing the fast response function, utilizing the unused land and completing projects being developed that will affect electricity supply security, electricity CES, as well as work safety and power plant reliability. Secondly, PJB invests and develops business, O&M service business, beyond kWh products including MRO, biomass, co-firing, rooftop solar PV and EAM which will become new business potentials. Thirdly, PJB initiates business development, collaborates with competent business partners, such as water treatment, digital light house, industrial efficiency and management, virtual power plant and so on. The three strategies will become a continuous cycle in order to realize PJB performance growth in a sustainable manner.

Keamanan pasokan energi primer berperan penting dalam menjaga kelangsungan operasional pembangkit, untuk itulah PJB berupaya memastikan transportasi dan logistik batubara dan gas sebagai energi primer pembangkit dapat terus terjaga pasokannya. PJB bersama dengan pemangku kepentingan terkait melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memperbaiki sistem logistik dan infrastuktur untuk memastikan kebutuhan batu bara terpenuhi dan mencari solusi permanen agar krisis pasokan batubara tidak terjadi lagi. Dalam jangka panjang, PJB berkomitmen untuk menggantikan batu bara dengan energi baru terbarukan, sehingga PJB sejalan dengan *road map* pengembangan pembangkit hijau dan *renewable energy.* Selain itu, PJB juga meminta dukungan PT PLN (Persero) maupun pemerintah untuk memprioritaskan alokasi energi primer bagi sektor ketenagalistrikan. Adapun kendala terkait peralatan kritikal pembangkit yang tidak memiliki cadangan, maka fungsi terkait melakukan analisis dan mitigasi risiko pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit, agar dapat terus dimonitor hasilnya dalam laporan manajemen risiko secara berkala serta tersedianya asuransi yang efektif.

The security of primary energy supply takes the important role in maintaining power plant operations continuity, so that PJB strives to ensure that the supply and transportation of coal and gas as primary energy for power plants can be maintained. PJB together with relevant stakeholders communicate and coordinate to improve logistics and infrastructure systems to ensure coal needs are fulfilled and seek permanent solutions so that the coal supply crisis will not reoccurred. In the long term, PJB is committed to replacing coal with new and renewable energy, so that PJB is in line with the road map for developing green power plants and renewable energy. Furthermore, PJB also requested the support by PT PLN (Persero) and the government to prioritize allocation of primary energy for the electricity sector. As for the constraints related to critical power plant equipment that does not have reserves, the related functions analyze the risks and mitigation during the preparation of Unit Work Plan and Budget (RKA) Unit, so that the results can be continuously monitored in the risk management reports on a regular basis and the availability of effective insurance.

Dalam hal keterbatasan pendanaan, PJB mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis yang kompeten, baik dari dalam maupun luar negeri. PJB juga berupaya memanfaatkan piutang PLN menjadi pembangkit sendiri yakni melalui akuisisi atau pengalihan aset pembangkit PLN ke PJB. Tantangan lain yang dihadapi tidak lain adalah peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan untuk menjadi yang terdepan dan terpercaya sebagai perusahaan dalam bidang energi, serta melakukan kerjasama strategis dengan berbagai perguruan tinggi dalam penyediaan tenaga kerja terampil dengan keahlian teknis pembangkit.

In terms of limited funding, PJB develops synergies and collaborations with various competent strategic partners, both from within and outside the country. PJB also seeks to utilize PLN receivables to become its own power plant through the acquisition or transfer of PLN power plant assets to PJB. Other challenges faced are none other than the continuous improvement of HR competencies to become a leading and trusted company in the energy sector, as well as performing strategic collaborations with various universities in providing the skilled manpower with technical expertise in power plants.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Pengelolaan SDM Secara Berkelanjutan
Sustainable HR Management

Kami terus meningkatkan pengelolaan terhadap SDM untuk mengembangkan kapasitas, integritas, dan kapabilitas SDM sebagai salah satu aset penting Perusahaan. Pengelolaan *human capital* yang tepat, disertai dengan dukungan organisasi yang responsif diyakini menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan PJB mencapai produktivitas dan kinerja positif secara berkelanjutan. Peran strategis SDM dalam mendukung tercapainya kinerja PJB secara keseluruhan perlu difokuskan pada peningkatan kemampuan *leadership*, peningkatan kapabilitas organisasi, membangun strategi kompetensi dan produktivitas untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi menjadi hal yang terus disempurnakan.

We keep improving HR management to develop HR capacity, integrity and capability as one of the Company's important assets. Proper human capital management, accompanied by responsive organizational support is believed to be one of the factors that determine PJB success in achieving productivity and positive performance on an ongoing basis. HR strategic role of HR in supporting achievement of PJB overall performance needs to be focused on improving leadership abilities, increasing organizational capabilities, building competency and productivity strategies to address gaps to be matters that constantly improved.

Dalam rangka mendukung pencegahan penularan Covid-19 lebih luas, PJB terus melakukan upaya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Upaya dan langkah pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 diantaranya dilakukan dengan membentuk satuan gugus tugas Covid-19, kebijakan *Work From Home* (WFH) untuk unit kerja non kritikal maupun kebijakan *split operation* bagi unit kerja yang dipandang kritikal, dan penerapan *business continuity management,* dan lain sebagainya.

In the event to support the prevention of wider Covid-19 transmission, PJB keeps striving to implement strict health protocols. Efforts and steps to prevent and handle the Covid-19 pandemic include the formation of a Covid-19 task force, Work From Home (WFH) policy for non-critical work units and split operation policy for work units that are considered critical, and the implementation of business continuity management, and so on.

Selama tahun 2021, realisasi anggaran pendidikan dan pelatihan karyawan mengalami kenaikan 12,01% menjadi Rp46,83 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp41,81 miliar, yang disebabkan perubahan metode pelaksanaan pembelajaran dari digital menjadi *blended* (*mix*) *learning* dan memerlukan proses adaptasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik internal maupun eksternal. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan cenderung meningkat yakni menjadi sebanyak 7.761 karyawan untuk pelatihan teknik dan 5.861 karyawan untuk pelatihan non teknik. Adapun pengembangan skill dan kompetensi karyawan masih terus ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan bisnis PJB, terkait dengan *intellectual challenge, leadership*, dan entrepreunial challenge. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivas pelatihan, PJB secara berkala melaksanakan *assessment Human Capital Readiness* (HCR) pada tahun 2021 mencapai skor sebesar 4,56, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 4,51 dengan target *Key Performance Indicator* (KPI) sebesar 5,00. Direksi optimis bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan PJB akan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan juga daya saing SDM di era kompetisi regional seperti saat ini.

During 2021, the realization of education and training budget for employees increased by 12.01% to Rp46.83 billion compared to previous year of Rp41.81 billion, due to changes in the method of implementing learning from digital to blended (mix) learning and requiring an adaptation process for learning activities both internal and external. Total participants in education and training tends to increase to 7,761 employees for technical training and 5,861 employees for non-technical training. The development of employee skills and competencies is still being improved in line with PJB business growth, related to intellectual challenges, leadership, and entrepreneurial challenges. To increase training effectiveness, PJB also periodically conducts Human Capital Readiness (HCR) assessment in 2021 was reached 4.56, an increase compared to the previous year realization of 4.51 with the Key Performance Indicator target (KPI) of 5.00. The Board of Directors is optimistic that increasing the knowledge and skills of PJB employees will be able to boost productivity and HR competitiveness in the current regional competition era.

Untuk memastikan bahwa seluruh karyawan berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan Perusahaan, PJB telah mengukur keterikatan karyawan terhadap Perusahaan secara berkala melalui *Employee Engagement Survey* tahun 2021 dengan skor 83,69 menurun dari skor tahun lalu sebesar 84,41, meliputi aspek penilaian dengan hasil nilai tertinggi pada dimensi *Brand Reputation & Culture, Teamwork* dan *Working Environment & Infrastructure*. Sedangkan indeks kepuasan kerja karyawan yang tercermin dalam *Job Satisfaction Survey* mencapai skor sebesar 79,7 dengan kategori Sangat Puas, menurun sedikit dibandingkan tahun 2020 sebesar 80,14 dengan kategori Sangat Puas.

To ensure that all employees contribute optimally to the Company progress, PJB has measured employee engagement with the Company on a regular basis through 2021 Employee Engagement Survey with a score of 83.69, a decrease from the previous year score of 84.41, covering the assessment aspects with the highest score on dimensions of Brand Reputation & Culture, Teamwork and Working Environment & Infrastructure. Meanwhile, the employees work satisfaction index as reflected in the Work Satisfaction Survey reached a score of 79.7 in the Very Satisfied category, a slight decrease compared to 2020 of 80.14 in the Very Satisfied category.

Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Internal Control System and Risk Management

Pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dilakukan melalui *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) pada seluruh proses bisnis di PJB, yaitu memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan telah didukung oleh pengendalian internal yang efektif. Satuan Pengawasan Internal berperan sebagai *third line of defence* dengan melaksanakan evaluasi kepatuhan secara rutin guna meningkatkan pengendalian internal Perusahaan.

The implementation of internal control over financial reporting is carried out through Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) on all business processes at PJB which is ensuring that the financial recording and reporting process is supported by effective internal control. The Internal Control Unit acts as the third line of defense by regularly evaluating the compliance to improve internal control of the Company.

Implementasi manajemen risiko sebagai salah satu pilar GCG dilakukan untuk memastikan dan memberi jaminan yang wajar bahwa dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, PJB telah melakukan identifikasi risiko, mengelola dan melakukan upaya mitigasi risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 (*Risk Management Guidelines*). Hasil *assessment maturity level* Implementasi ERM dilakukan baik di tingkat Unit Pembangkit maupun di tingkat korporat mendapatkan hasil yang semakin baik. Untuk tahun 2021, hasil penilaian *assessment maturity* level risiko di seluruh unit di lingkungan PJB mencapai tingkat kematangan yang lebih baik, dimana *Self Assessment Maturity Level* ERM PJB berdasarkan kriteria PLN di Semester 2 tahun 2021 mendapatkan hasil dengan nilai validasi 3,52 di atas target Semester 2 sebesar 3,2. Selain itu, aplikasi manajemen risiko berbasis *web* pada ERM *Dashboard* menjadi alat setiap karyawan memonitor risiko yang dikelolanya sesuai dengan tingkat otorisasi masing-masing sehingga integrasi proses bisnis pengelolaan risiko dapat dipantau secara *real time.*

The risk management as one of GCG pillars of GCG is implemented to ensure and provide reasonable assurance that in achieving the established targets, PJB has identified, managed and carried out risk mitigation efforts following ISO 31000:2018 (Risk Management Guidelines). The maturity level assessment results of ERM implementation was carried out both at the Generation Unit level and at the corporate level achieved the better results. For 2021, the assessment results of the risk maturity level in all units within PJB reached a better maturity level, where the Self Assessment of PJB's ERM Maturity Level based on PLN criteria in Semester 2 of 2021 obtained results with a validation value of 3.52, above the Semester 2 target of 3.2. Also, the web-based risk management application on the ERM Dashboard is a tool for each employee to monitor the managed risks according to their respective authorization levels so that the integration of risk management business processes can be monitored in real time.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Komitmen Menjaga Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Commitment to Maintaining the Quality of Corporate Governance Implementation

Pentingnya arti kepemimpinan dalam proses tata kelola perusahaan ditunjukkan dengan adanya peran Direksi, Dewan Komisaris dan para *Senior Leaders* dalam memberi keteladanan dan komitmen terhadap praktik tata kelola perusahaan di seluruh tingkatan organisasi masing-masing. Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dibangun atas dasar prinsip saling menghormati serta memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Anggaran Dasar Perusahaan. PJB meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dan tumbuh berkelanjutan hanya dapat dipertahankan dalam jangka panjang, melalui implementasi praktik tata kelola perusahaan (GCG) secara konsisten. Untuk itulah, penerapan GCG menjadi bagian dari rencana strategis PJB untuk mewujudkan kinerja yang transparan, efisien dan bertanggung jawab dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Untuk tahun 2021 PJB telah melakukan penilaian atau *assessment* GCG berdasarkan parameter Kementerian BUMN dengan capaian skor sebesar 95,67 dari skor maksimal 100, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 95,06 dan mendapatkan predikat 'Sangat Baik'. Khusus untuk Aspek Direksi, memperoleh capaian skor sebesar 96,40% dan masuk dalam kategori "Sangat Baik". Peningkatan kualitas implementasi GCG juga terus ditingkatkan di lingkungan PJB grup melalui pelaksanaan *assessment* GCG di Anak Perusahaaan setiap tahun. Hal tersebut diyakini dapat mendorong efisiensi operasi, peningkatan nilai dan reputasi Perusahaan di lingkungan PJB Grup secara keseluruhan.

Terkait dengan implementasi kebijakan WBS, PJB telah mengatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 004.K/021/DIR/2020 dan Nomor: 007.K/DK-PJB/2020, sebagai salah satu sarana bagi karyawan, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan apabila terdapat indikasi pelanggaran terkait dengan kode etik, kebijakan Perusahaan maupun potensi tindakan *fraud*. Komite WBS bertugas menerima laporan yang masuk dan melakukan *review* serta menganalisa kecukupan

The leadership importance in the corporate governance process is demonstrated by the role of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Senior Leaders in setting an example and commitment to corporate governance practices at all organization levels. Working relationship of the Board of Directors and the Board of Commissioners is built on the principle of mutual respect and understanding of each other's duties, responsibilities and authorities based on the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association. PJB believes that the achievement of good performance and sustainable growth can only be maintained in the long term, through the consistent implementation of good corporate governance (GCG) practices. For this reason, GCG implementation is part of PJB strategic plan to realize transparent, efficient and responsible performance by increasing the principles of openness, accountability, responsibility, independence, and fairness.

For 2021, PJB had carried out GCG assessment based on the parameters from the SOE Ministry with a score of 95.67 out of a maximum score of 100, an increase compared to the previous year of 95.06 and obtained 'Very Good' predicate. Specifically for the Board of Directors Aspect, it obtained a score of 96.40% and was included in the "Very Good" category. The quality of GCG implementation is also continuously improved within PJB group through the implementation of GCG assessments in Subsidiaries every year. This is believed to be able to encourage operational efficiency, increase the value and reputation of the Company within PJB Group as a whole.

PJB regulates WBS policy implementation in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 004.K/021/DIR/2020 and No. 007.K/DK-PJB/2020, as facilities for employees, customers, partners and other stakeholders to convey in the event there are indications of violations related to the code of conduct, Company policies or potential fraud. The WBS Committee is in charge of receiving incoming reports and conducting reviews and analyzing the adequacy of supporting evidence for the submitted reports to ensure

bukti pendukung atas laporan yang disampaikan untuk memastikan ada/tidaknya indikasi kerugian Perusahaan. Di tahun 2021, Komite WBS telah menerima 5 (lima) pengaduan yang masuk dan dan kelima pengaduan tersebut telah selesai ditindaklanjuti. Direktur Utama mendapatkan laporan pelaksanaan kebijakan WBS setiap semester dari Komite WBS, untuk selanjutnya, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi pihak yang menindaklanjuti hasil laporan WBS tersebut.

whether there are indications of Company losses. In 2021, the WBS Committee received 5 (five) incoming complaints and these five complaints have been followed up. The President Director received report on the WBS policy implementation every semester from the WBS Committee. Furthermore, the Board of Directors and the Board of Commissioners are the parties to follow up on the WBS report results.

Prospek Usaha Perusahaan
The Company Business Prospect

Di tengah munculnya mutasi varian Covid-19 yang cenderung meningkat dan tekanan inflasi yang cukup tinggi, proses pemulihan kondisi perekonomian dunia masih berjalan dan diperkirakan akan berlangsung lebih seimbang dan tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 berada di level 4,4% yoy. Inflasi global menurut *World Eonomic Outlook International Monetary Fund* diperkirakan cenderung meningkat yang disebabkan adanya gangguan rantai pasokan dan naiknya harga energi hingga awal tahun 2022.

Amid the emergence of the Covid-19 variant mutation which tends to increase and inflationary pressures are quite high, the recovery process for the world economic conditions is still ongoing and is expected to be more balanced and not only relying on the United States (US) and China, but also accompanied by economic recovery on Europe, Japan and India. The projected global economic growth in 2022 is at the level of 4.4% yoy. According to the World Economic Outlook International Monetary Fund, global inflation is expected to increase due to supply chain disruptions and the rising energy prices until early 2022.

Prospek ekonomi dunia yang membaik dan berbagai perbaikan kondisi domestik mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terus membaik pada tahun 2022. Adanya keyakinan dan ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha terindikasi terus menguat. Perbaikan ekspektasi ini sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik dan akselerasi proses pemulihan serta program vaksinasi oleh Pemerintah. Dengan optimisme tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan berada pada kisaran 4,7%-5,5% pada tahun 2022. Untuk itulah, Direksi memandang bahwa faktor yang mempengaruhi prospek usaha tahun 2022 perlu disikapi dengan kewaspadaan yang tinggi dengan merumuskan langkah antisipasi sehingga peran dan kontribusi PJB dalam industri energi dan Isitrik nasional dapat terus meningkat dan bernilai tambah.

The improving world economy prospect and various improvements in domestic conditions will encourage national economic growth to continue to improve in 2022. There are indications that consumers confidence and expectations regarding income, job availability, and business activities will continue to strengthen. This improvement in expectations is in line with the prospect of improving economic growth and the acceleration of the recovery process as well as the vaccination program by the Government. With this optimism, Indonesian economic growth is predicted to be in the range of 4.7%-5.5% in 2022. For this reason, the Board of Directors considers that factors affecting business prospects in 2022 need to be addressed with high vigilance by formulating anticipatory steps so that the role and PJB contribution to the national energy and electricity industry can continue to increase with added values.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Berdasarkan RUPTL 2021-2030, rencana penambahan kapasitas pembangkit untuk seluruh Indonesia sebanyak 40,6 GW atau rata-rata mencapai 4 GW per tahun menjadi bentuk peluang usaha yang perlu dioptimalkan pencapaiannya hingga menjadi prospek usaha yang positif bagi PJB. Penambahan kapasitas baru akan didominasi oleh EBT (51,6%) dengan porsi hidro (25,6%%) sebagai teknologi yang paling tepat untuk memenuhi target 23% EBT pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RUPTL. Porsi batubara sebesar 34% dalam kapasitas tambahan hanya terdiri atas *on-going project.* Untuk itulah pengembangan usaha PJB telah sejalan dan akan lebih difokuskan pada pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

According to 2021-2030 Electricity Supply Business Plan, the plan to increase power plant capacity for all of Indonesia up to 40.6 GW or an average of 4 GW per year is business opportunity actualization that needs to be optimized to achieve positive business prospects for PJB. The addition of new capacity will be dominated by NRE (51.6%) with hydro portion (25.6%%) as the most appropriate technology to meet the target of 23% NRE in 2025 as stated in the Electricity Supply Business Plan. The coal portion of 34% in additional capacity consists only of on-going projects. For this reason, PJB business development has been in line and will be more focused on the development of the new and renewable energy (NRE).

Lima (5) faktor penting yang mempengaruhi prospek usaha PJB perlu terus dikelola dan diantisipasi dengan kebijakan dan strategi yang tepat agar mampu memanfaatkan peluang bisnis tersebut, diantaranya adalah (a) persaingan dalam industri listrik, (b) *supplier*, (c) produk pengganti, (d) pemain baru dalam industri, dan (e) pembeli. Terkait dengan *supplier*, pemasok energi primer tetap menjadi kunci kelangsungan operasi pembangkit. Pada sisi produk pengganti, listrik masih menjadi produk utama untuk memenuhi kebutuhan energi dalam kehidupan. Berbekal kekuatan yang dimiliki sebagai produsen listrik dengan sistem manajemen terintegrasi yang diakui secara Internasional dan dengan portofolio pembangkit yang lengkap dan beragam, PJB memiliki kekuatan yang menjadi bekal dan kombinasi tepat untuk dapat mengoptimalkan prospek usaha yang positif untuk terus tumbuh dan berkembang.

Five (5) important factors that affect PJB business prospects need to be managed and anticipated with the right policies and strategies in order to be able to take advantage of these business opportunities, including (a) competition in the electricity industry, (b) suppliers, (c) substitute products, (d) new players in the industry, and (e) buyers. Regarding suppliers, primary energy suppliers remain the key to the power plant operations continuity. In terms of substitute products, electricity is still the main product to meet the life energy needs. Equipped with the strengths as an electricity producer with an integrated management system that is internationally recognized and with a complete and diverse portfolio of power plants, PJB has strengths that are the right provision and combination to be able to optimize positive business prospects to continue to grow and develop.

PJB meyakini bahwa prospek lingkungan eksternal di atas apabila dapat terkelola dengan baik akan menghasilkan pengaruh dan kinerja yang positif, namun tetap diperlukan peningkatan kualitas sejumlah aspek antara lain (1) dukungan SDM di bidang Operasi dan Pemeliharaan (O&M) berbasis teknologi informasi, (2) penerapan tata kelola pembangkit yang mengadopsi kaidah *best practices* dengan PAS 55 dan ISO 55001:2014, (3) keberadaan pembangkit yang dekat dengan pusat beban dan potensi peningkatan kapasitas melalui program *repowering* maupun *extension*, (4) penguatan *knowledge management* sebagai budaya pembelajaran dan (5) dukungan anak perusahaan di PJB Grup yang bergerak di

PJB believes that the above external environmental prospects will result in positive impact and performance if managed properly, but it still needs to improve the quality of a number of aspects, including (1) HR support in the field of Operation and Maintenance (O&M) based on information technology, (2) implementation of power plant governance that adopts the best practices with PAS 55 and ISO 55001:2014, (3) power plants existence close to the load centers and potential for capacity building through repowering and extension programs, (4) strengthening knowledge management as a learning culture and (5) the subsidiary support in the PJB Group which is engaged in the business of supporting electricity

usaha pendukung jasa kelistrikan, termasuk EPC dan *stockist* pembangkit untuk menjadi perusahaan pembangkitan terintegrasi (*integrated power company*). Analisis prospek usaha di atas per lu didukung oleh detil rumusan strategi tepat agar dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat di industri kelistrikan nasional. PJB berkomitmen untuk terus berupaya melakukan pengembangan pembangkit EBT yang aman dan bersih guna mendorong terciptanya kesinambungan nilai Perusahaan dalam jangka jangka panjang.

services, including EPC and power plant stockists to become an integrated power company. Business prospect analysis above needs to be supported by detailed formulation of the right strategy in order to face challenges and increasingly fierce competition in the national electricity industry. PJB is committed to continuing to strive to develop safe and clean NRE power plants in order to encourage the creation of long-term sustainability values of the Company.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, PJB mulai memberikan perhatian lebih pada aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) yang saat ini menjadi perhatian utama dari pemangku kepentingan, khususnya investor. Adapun uraian terkait dengan tata kelola, telah disampaikan pada sub bab di atas. PJB menyadari bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terutama dalam bidang lingkungan dan sosial merupakan wujud komitmen dan kontribusi PJB untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk itulah, PJB senantiasa mendorong terciptanya sinergi untuk terus tumbuh bersama dengan segenap pemangku kepentingan guna mewujudkan aspirasi visi PJB untuk menjadi "Menjadi Perusahaan Terdepan dan Terpercaya Dalam Bisnis Energi Berkelanjutan di Asia Tenggara".

As a sustainability-oriented company, PJB already started to pay more attention to environmental, social and governance (ESG) aspects which are currently the main concern of the stakeholders, especially the investors. Description related to governance has been presented in the sub-chapter above. PJB realizes that the implementation of corporate social responsibility, especially in the environmental and social fields is actualization of PJB commitment and contribution to supporting the achievement of sustainable development goals. For this reason, PJB always encourages the creation of synergies to continue to grow together with all stakeholders in order to realize the aspirations of PJB's vision of "Becoming a Leading and Trusted Company in the Sustainable Energy Business in Southeast Asia".

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan PJB secara sistematis dan terarah mengacu pada *Roadmap* CSR 2018-2022 dengan pendekatan *Community Involvement & Development* (CID) berbasis ISO 26000 dan Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang diatur dalam Keputusan Direksi No.065.K/010/DIR/2013. Sasaran *Roadmap* CSR 2018-2022 adalah PJB menjadi *Most Trusted and Preferred Company,* yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Strategi CSR PJB yaitu "Energi Pembangkit Negeri". Strategi Energi Pembangkit Negeri memiliki 2 (dua) pilar yaitu (a) mengelola dampak operasi dengan memberikan

Corporate social responsibility is carried out by PJB in a systematic and directed manner referring to 2018-2022 CSR Roadmap with a Community Involvement & Development (CID) approach based on ISO 26000 and Guidelines for the Implementation of Social and Environmental Responsibility (CSR) which are regulated in the Board of Directors Decree No.065. K/010/DIR/2013. The target of 2018-2022 CSR Roadmap is for PJB to become the Most Trusted and Preferred Company, which is further elaborated into PJB CSR Strategy, namely "Energy Generating the Country". National Power Plant Energy Strategy has 2 (two) pillars, namely (a) managing

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

manfaat sesuai kompetensi inti PJB serta fokus pada energi (hijau) berkelanjutan dengan melakukan komunikasi dan (b) pembinaan hubungan yang efektif. Kedua pilar tersebut terdiri dari PJB Inovasi Cerdas, PJB Inovasi Hijau, PJB Unggul dan PJB Peduli.

Realisasi dana CSR tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp42,106 miliar atau 84% dari target RKAP, dibandingkan tahun sebelumnya, yang terbagi menjadi 4 bidang, yaitu (1) pemberdayaan, (2) pengembangan kapasitas, (3) infrastruktur, (4) donasi dan (5) kejadian luar biasa. Realisasi dana CSR 2021 didominasi oleh bidang pemberdayaan sebesar 32,41%; dilanjutkan dengan CSR bidang pengembangan kapasitas sebesar 29,93%, CSR bidang infrastruktur sebesar 14,34%; dan CSR donasi sebesar 13,43% serta kejadian luar biasa akibat pandemi Covid-19 sebesar 9,89%. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program CSR, PJB secara berkala melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang menunjukkan seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap program CSR yang telah dilaksanakan oleh PJB.

Dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial di bidang lingkungan, PJB menyadari sepenuhnya bahwa kontribusi terhadap pelestarian lingkungan merupakan wujud pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional sebagai penyedia tenaga listrik. Kebijakan Sistem Manajemen PJB mengatur bahwa penggunaan sumber daya energi dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit dilakukan secara efisien dengan mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Dalam pengelolaan kinerja lingkungan, PJB berhasil meraih 3 PROPER Emas, yaitu oleh UP Paiton, UP Gresik dan UBJOM Rembang, meningkat dari tahun lalu yang hanya sebanyak 2 unit, dan 4 PROPER Hijau serta 12 PROPER Biru.

Komitmen dan konsistensi PJB dalam penerapan CSR telah diakui secara nasional maupun internasional, diantaranya dengan diperolehnya banyak penghargaan CSR, antara lain *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2021 meraih Predikat *Gold*, Indonesia *Sustainable Development Goal Award* (ISDA) meraih 3 Penghargaan pada Kategori *The Top Leadership for* SDG's, *The Most Committed Corporate for* SDG's *on Social Pillar* dan *The Most Committed Corporate for* SDG's *on Economy Pillar.* Secara berkelanjutan, implementasi CSR PJB akan terus ditingkatkan nilai dan dampaknya baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

the impact of operations by providing benefits according to PJB core competencies and focusing on sustainable (green) energy through communication and (b) fostering effective relationships. The two pillars consist of PJB Smart Innovation, PJB Green Innovation, PJB Superior and PJB Care.

The realization of CSR funds in 2021 increased to Rp42.106 billion or 84% of ABOP target, compared to the previous year, which was divided into 4 areas, namely (1) empowerment, (2) capacity development, (3) infrastructure, (4) donations and (5) extraordinary events. The realization of CSR funds in 2021 is dominated by the empowerment sector by 32.41%; followed by CSR in capacity development at 29.93%, CSR in infrastructure at 14.34%; and CSR donation by 13.43% and extraordinary events due to the Covid-19 pandemic by 9.89%. To determine the CSR program success level, PJB periodically measures the Community Satisfaction Index (IKM), which indicates how much the community is satisfied with the implemented CSR program by PJB.

In implementing social responsibility program in the environmental sector, PJB is fully aware that its contribution to the environmental conservation is manifestation of managing the impacts arising from operational activities as an electricity provider. PJB Management System Policy stipulates that the use of energy resources and natural resources in the operational and maintenance activities of generating units is carried out efficiently by complying with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and ISO 14001 concerning Environmental Management Systems. In terms of environmental performance management, PJB won 3 Gold PROPERs, including by Paiton GU, Gresik GU and Rembang OMSBU, an increase from previous year of 2 units, as well as 4 Green PROPER and 12 Blue PROPER.

PJB commitment and consistency in implementing CSR has been recognized nationally and internationally, including the acquisition of many CSR awards, including winning the 2021 Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) in the Gold Predicate, the Indonesia Sustainable Development Goal Award (ISDA) with 3 awards in the Top Leadership Category for SDG's, The Most Committed Corporate for SDG's on Social Pillar and The Most Committed Corporate for SDG's on Economy Pillar. On an ongoing basis, CSR implementation of PJB will continue to increase its value and impact both in terms of economy, social and environment.

Perubahan Komposisi Direksi
Changes in Board of Directors Composition

Pada tahun 2021, susunan dan komposisi Direksi PJB mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali. Perubahan pertama, berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler tanggal 19 Februari 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama. Perubahan kedua, berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sugiyanto sebagai Direktur Operasi-1 serta mengangkat dan menetapkan Sdr. M. Yossy Noval A. sebagai Direktur Direktur Operasi-1.

In 2021, structure and composition of PJB Board of Directors changed 2 (two) times. The first amendment, based on the decision of the Circular GMS on February 19, 2021, appointed and stipulated Mr. Gong Matua Hasibuan as the President Director. The second amendment, based on the decision of the Circular GMS on April 23, 2021, honorably dismissed Mr. Sugiyanto as Director of Operations-1 and appointed and stipulated Br. M. Yossy Noval A. as Director of Operations-1.

Atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sdr. Sugiyanto atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan selama menjabat selaku Direktur Operasi-1 PJB. Direksi juga mengucapkan selamat bergabung dan berkarya kepada anggota Direksi yang baru, yakni Sdr. M. Yossy Noval A. Dengan demikian maka susunan anggota Direksi PJB pada 31 Desember 2021 adalah:

1. Direktur Utama : Gong Matua Hasibuan
2. Direktur Operasi - 1 : M. Yossy Noval A
3. Direktur Operasi - 2 : Rachmanoe Indarto
4. Direktur Pengembangan dan Niaga : Iwan Purwana
5. Direktur Keuangan : Rawan Insani
6. Direktur SDM dan Administrasi : Karyawan Aji

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our gratitude and highest appreciation to Mr. Sugiyanto for the contribution and dedication given during his tenure as PJB's Director of Operations-1. The Board of Directors also congratulates on joining and working for the new members of the Board of Directors, namely Mr. M. Yossy Noval A. Therefore, the composition of PJB Board of Directors members as of December 31, 2021 is as follows:

1. President Director : Gong Matua Hasibuan
2. Director of Operations - 1 : M. Yossy Noval A
3. Director of Operations - 2: Rachmanoe Indarto
4. Director of Development and Commerce : Iwan Purwana
5. Director of Finance : Rawan Insani
6. Director of Human Resources and Administration : Karyawan Aji

Segenap Jajaran Direksi yang baru diharapkan dapat terus meningkatkan soliditas internal guna meningkatkan pencapaian kinerja PJB yang lebih baik di masa depan. Kami berkomitmen untuk menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi PJB secara independen dan akuntabel serta memberikan yang terbaik kepada para pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan guna mendukung ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

The entire new Board of Directors is expected to continue to improve internal solidity in order to improve the better performance achievement of PJB in the future. We are committed to running roles, duties and responsibilities as PJB Board of Directors in an independent and accountable manner and to provide the best for shareholders and all stakeholders to support national energy security and sovereignty.

Apresiasi
Letter of Appreciation

Dengan segala keberhasilan yang dicapai PJB di tahun 2021, Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris atas arahan yang diberikan dan kemitraan yang telah terjalin selama ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan, mitra bisnis dan segenap pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan, kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Keberhasilan tersebut tak lepas dari dukungan seluruh Insan PJB yang telah bekerja keras dengan dedikasi yang tinggi.

Kami yakin PJB akan dapat mewujudkan aspirasi menjadi "*Trusted and Leading in Sustainable Energy*" dengan meraih berbagai peluang positif untuk pertumbuhan kinerja berkelanjutan di masa depan.

With all PJB success achieved in 2021, the Board of Directors expresses gratitude and respect to the Shareholders and the Board of Commissioners for the direction given and the partnership that has been established so far. We would also like to express our appreciation and gratitude to all employees, business partners and all other stakeholders for the trust, contribution and support that has been given. This success is inseparable from the support of all PJB Personnel who have worked hard with high dedication.

We believe that PJB will be able to realize its aspiration to be the "Trusted and Leading in Sustainable Energy" by seizing positive opportunities for sustainable performance growth in the future.

Surabaya, 20 Mei 2022
Surabaya, May, 20 2022

Direksi
Board of Directors

Gong Matua Hasibuan
Direktur Utama
President Director

M. Yossy Noval A.
Direktur Operasi - 1
Director of Operation -1

Rachmanoe Indarto
Direktur Operasi - 2
Director of Operation -2

Iwan Purwana
Direktur Pengembangan dan Niaga
Director of Development and Commerce

Rawan Insani
Direktur Keuangan
Director of Finance

Karyawan Aji
Direktur SDM dan Administrasi
Director of Human Capital and Administration

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

STATEMENT FROM BOARD OF COMMISSIONERS ON ACCOUNTABILITY OVER ANNUAL REPORT 2021 PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

Laporan Tahunan 2021 PT Pembangkitan Jawa-Bali menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2021 PT Pembangkitan Jawa-Bali.

PT Pembangkitan Jawa-Bali Annual Report 2021 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2021, and other information relevant and significant for the stakeholders.

We, the undersigned, the entire Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali, declare full accountability for the accuracy of the content of PT Pembangkitan Jawa-Bali Annual Report 2021.

Surabaya, 20 Mei 2022
Surabaya, May, 20 2022

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dedeng Hidayat
Komisaris Utama
President Commissioner

Komang Parmita
Komisaris
Commissioner

Hendra Iswahyudi
Komisaris
Commissioner

Jisman Parada Hutajulu
Komisaris
Commissioner

Bagus Puruhito
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Emir Kresna W
Komisaris Independen
Independent Commissioner

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

STATEMENT FROM BOARD OF DIRECTORS ON ACCOUNTABILITY OVER ANNUAL REPORT 2021 PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

Laporan Tahunan 2021 PT Pembangkitan Jawa-Bali menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2021 PT Pembangkitan Jawa-Bali.

PT Pembangkitan Jawa-Bali Annual Report 2021 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2021, and other information relevant and significant for the stakeholders.

We, the undersigned,the entire Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali, declare full accountability for the accuracy of the content of PT Pembangkitan Jawa-Bali Annual Report 2021.

Surabaya, 20 Mei 2022
Surabaya, May, 20 2022

Direksi
Board of Directors

Gong Matua Hasibuan
Direktur Utama
President Director

M. Yossy Noval A.
Direktur Operasi - 1
Director of Operation -1

Rachmanoe Indarto
Direktur Operasi - 2
Director of Operation -2

Iwan Purwana
Direktur Pengembangan dan Niaga
Director of Development and Commerce

Rawan Insani
Direktur Keuangan
Director of Finance

Karyawan Aji
Direktur SDM dan Administrasi
Director of Human Capital and Administration

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

ACCOUNTABILITY STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS OVER RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL SYSTEM PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Gong Matua Hasibuan
   Jabatan : Direktur Utama
   Alamat Kantor : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231
   Alamat Domisili : Dharmahusada Indah Timur 4 Blok M203 Surabaya

2. Nama : Rawan Insani
   Jabatan : Direktur Keuangan
   Alamat Kantor : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231
   Alamat Domisili : Jl. Manyar Kertoadi Blok W/101 Surabaya

Menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pembangkitan Jawa-Bali dan Entitas Anak Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2022 dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dengan menerapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On behalf of the Board of Directors, we the undersigned:

1. Name : Gong Matua Hasibuan
   Position : President Director
   Office Address : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231
   Address of Domicile : Dharmahusada Indah Timur 4 Block M203 Surabaya

2. Name : Rawan Insani
   Position : Director of Finance
   Office Address : Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231
   Address of Domicile : Jl. Manyar Kertoadi Block W/101 Surabaya

Declare that:

The statement of The Board of Directors regarding the responsibility for the Consolidated Financial Statements of PT Pembangkitan Jawa-Bali and Subsidiaries as at December 31, 2020 and December 31, 2021, which we signed on May 20, 2022 is founded on sound system of risk management and internal control system are operating efficiently and effectively in all material aspect.

The declaration has been made truthfully.

Atas nama Direksi
For and behalf of the Board of Directors

Surabaya, 20 Mei 2022
Surabaya, May, 20 2022

Gong Matua Hasibuan
Direktur Utama
President Director

Rawan Insani
Direktur Keuangan
Director of Finance

Direksi
Board of Directors

1. Gong Matua Hasibuan
2. Rawan Insani
3. Iwan Purwana
4. M. Yossy Noval A
5. Rachmanoe Indarto
6. Karyawan Aji

6
5
1
3

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFIL

IDENTITAS PERUSAHAAN
COMPANY IDENTITY

Masuknya pengelolaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Sambelia (2x50 MW) di Nusa Tenggara Barat (NTB) kian memantapkan langkah PJB untuk berkontribusi lebih luas dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Management of Operation and Maintenance Services for Sambelia CFPP (2x50 MW) penetrated in West Nusa Tenggara (NTB) further strengthens PJB steps to contribute more comprehensively in maintaining national energy security.

PELUNCURAN *PLATFORM DIGITAL* PJB ACCESS
The Launching of PJB Access digital platform

PLTGU MUARA KARANG BLOK 3 CCPP MUARA KARANG BLOCK 3
COD 4 Juni 2021
COD on June 4, 2021

PLTS TERAPUNG CIRATA
Cirata Floating PV
Rencana COD 2023
COD Plan on 2023

ADD ON MUARA TAWAR BLOK 2.3.4
ADD ON MUARA TAWAR BLOCK 2-3-4
Rencana COD 2022
COD Plan on 2022

Nama Perusahaan PT Pembangkitan Jawa-Bali	**Company Name** PT Pembangkitan Jawa-Bali
Tanggal Pendirian 3 Oktober 1995	**Date of Establishment** October 3, 1995
Bidang Usaha 1. Pembangkitan tenaga Listrik; 2. Konstruksi Bangunan Elektrikal; 3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan; 4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan; 5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.	**Business Line** 1. Electric Power Plant; 2. Electrical Building Construction; 3. Installation of electricity equipment; 4. Maintenance and/or operation of electrical equipment; 5. Trading and/or supporting business activities to optimize the utilization of resources owned by the Company, including delegating assignments to Subsidiaries.
Status Perusahaan Anak Perusahaan PT PLN (Persero)	**Company Status** Subsidiary of PT PLN (Persero)
Pemegang Saham 1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 5.999.999.998 Saham Seri 2 (99,99%) dan 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 (0,01%)	**Shareholders** 1. PT PLN (Persero) has 1 Series-1 Share and 5.999.999.998 Series-2 Shares (99,99%) and 2. Yayasan Pendidikan and Kesejahteraan PT PLN (Persero) 1 Series-2 Share (0,01%)

Dasar Hukum Pendirian 1. Akta Pendirian PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II, Nomor 16 tanggal 3 Oktober 1995 2. Akta Perubahan Nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali, oleh Notaris Henny Singgih dengan Akta Nomor 34 tanggal 20 Februari 2001	**Legal Basis of Establishment** 1. Deed of Establishment of PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II, Number 16 on October 3, 1995 2. Deed of Name Change to PT Pembangkitan Jawa-Bali, made before Henny Singgih, Notary with Deed No. 34 on February 20, 2001
Modal Dasar Rp12.000.000.000.000,- (Dua belas triliun Rupiah)	**Authorized Capital** Rp12.000.000.000.000,- (Twelve Trillion Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp3.000.000.000.000,- (Tiga triliun Rupiah)	**Issued and Fully Deposited Capital** Rp3.000.000.000.000,- (Three Trillion Rupiah)
Jumlah Karyawan 3.071 orang	**Number of Employees** 3.071 employees
Kantor Pusat Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231 – Indonesia : (62-31) 828 3180 (Hunting) : (62-31) 828 3183 : info@ptpjb.com	**Headquarters** Jl. Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231 – Indonesia : (62-31) 828 3180 (Hunting) : (62-31) 828 3183 : info@ptpjb.com
Kantor Perwakilan Gedung 18 Office Park Lantai 8, TB Simatupang Kav 18 – Jakarta Selatan : - : - : perwakilan.jkt@ptpjb	**Representative Office** Building 18 Office Park 8th Floor, TB Simatupang Kav 18 – South Jakarta : - : - : perwakilan.jkt@ptpjb
Contact Center : (62-31) 828 3180 (*Hunting*) : (62-31) 828 3183 : www.facebook.com/ptpjb : @ptpjb : @ptpjb	**Contact Center** : (62-31) 828 3180 (Hunting) : (62-31) 828 3183 : www.facebook.com/ptpjb : @ptpjb : @ptpjb
Wilayah Kerja - 8 (delapan) Unit Pembangkit Eksisting dan 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata); - 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan FTP-1 Jawa; - 17 (tujuh belas) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Luar Jawa; - 5 (lima) Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit PLN di *Site* PJB; - 1 (satu) Unit Sewa Pembangkit; - 1 (satu) Unit *Maintenance, Repair & Overhaul*; - 1 (satu) Unit PJB Academy; - 1 (satu) Unit Pengembangan Usaha dan Pembangunan; - Kepemilikan saham pada 8 (delapan) Unit Pembangkit IPP; dan - Kepemilikan saham pada Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan untuk mengelola 1 (satu) unit pembangkit PLN.	**Working Area** - 8 (eight) Existing Generation Unit and 1 (one) Research Generation Unit (Cirata SPP); - 5 (five) FTP-1 Java Operation & Maintenance Service Business Units; - 17 (seventeen) Operation & Maintenance Service Business Units outside Java; - 5 (five) Operation & Maintenance Service Business Units for PLN Generation Unit at PJB Site; - 1 (one) Generation Units for Lease; - 1 (one) Unit Maintenance, Repair & Overhaul; - 1 (one) Unit of PJB Academy; - 1 (one) Business Development and Development Unit; - Share ownership in 8 (eight) IPP Units; and - Share ownership in the Operation and Maintenance Company to manage 1 (one) PLN Generation Unit.
Website www.ptpjb.com	**Website** www.ptpjb.com

RIWAYAT SINGKAT PJB
BRIEF HISTORY

PJB terus berupaya memperkuat portofolio bisnis yang dikelolanya dengan melanjutkan program *Corporate Transformation* II. Inovasi produk dan layanan *Beyond* kWh menjadi salah satu strategi yang digunakan. Tahun 2021, PJB telah meluncurkan *platform* PJB Access, yakni *platform digital Business to Business* (B2B) yang menawarkan layanan terbaik PJB bagi industri ketenagalistrikan, energi, dan utilitas lainnya melalui perangkat seluler pelanggan.

PJB keeps striving to strengthen the managed business portfolio by carrying forward the Corporate Transformation II program. Beyond kWh product and service innovation are one of the strategies used. In 2021, PJB launched PJB Access platform, a Business to Business (B2B) digital platform that offers the best services of PJB for the electricity, energy, and other utility industries through customer mobile devices.

Jejak Langkah
Milestones

PENDIRIAN PERUSAHAAN
1995

COMPANY ESTABLISHMENT
1995

STABLE GROWTH
2000 – 2010

Perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali.	2000	The Company name changed to PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali
Mendirikan anak perusahaan, PT PJB Services dengan bidang usaha O&M pembangkit.	2001	Established a subsidiary, PT PJB Services engaged in the power plant operations and maintenance services.
Penyertaan saham di PT Rekadaya Elektrika, bergerak di bidang jasa *Engineering, Procurement and Contruction* (EPC) pembangkit listrik.	2003	Shares Investments of PT Rekadaya Elektrika engaged in the Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services for power plants.
Penyertaan saham untuk pengembangan pembangkit di sejumlah perusahaan.	2004-2006	Shares Investments for power plant development in several companies.
Mendirikan Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM).	2009	Established O&M Service Business Unit (OMSBU).

STABLE GROWTH
2000 – 2010

OPERATIONAL EXCELLENCE
2011 – 2015

Implementasi Manajemen Aset PAS 55.	2012
Raih sertifikasi PAS 55 di seluruh unit pembangkit.	2013
Integrasi sistem manajemen PJB IMS dan kinerja ekselen tertinggi di Indonesia.	2014
2015 Pendirian anak perusahaan, PT PJB Investasi.	2015
Mendirikan Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM).	2016

CORPORATE TRANSFORMATION
2017 – 2020

Proper Emas PLTU Paiton	2017
Raih *Brand Industry Leader Baldrige Excellence Framework* pertama di Indonesia	2018
Commercial Operation Date (COD) PLTU Jawa 7 Unit 1 1.000 MW sebagai pembangkit terbesar dan pertama di Indonesia dengan teknologi *boiler ultra super critical*	2019
Go Live Komersialisasi *Co-firing* di 3 Pembangkit (PLTU Paiton 1-2, PLTU Ketapang dan PLTU Pacitan)	2020
Pendirian PT PJB Investindo, PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata dan PT PJB Masdar Solar Energi.	

CORPORATE TRANSFORMATION
2021 – 2024

Peluncuran PJB Access	2021
COD PLTGU Muara Karang Blok 3	
Financial Close Pendanaan Proyek PLTS Terapung Cirata 145 MWAc	
Peresmian PLTS Bawean	

OPERATIONAL EXCELLENCE
2011 – 2015

2012	PAS 55 Asset Management Implementation.
2013	Achieved PAS 55 Certification for all Power Plant Units.
2014	PJB Integrated Management System (PJB IMS) and the highest excellent performance in Indonesia.
2015	Establishment of a subsidiary, PT PJB Investasi
2016	Established O&M Service Business Unit (OMSBU).

CORPORATE TRANSFORMATION
2017 – 2020

2017	Gold Proper for Paiton CFPP
2018	Achieved Brand Industry Leader of Baldrige Excellence Framework, the first one in Indonesia
2019	Commercial Operation Date (COD) of Unit 1 of Java 7 CFPP with 1,000 MW was the largest and first power plant in Indonesia with ultrasupercritical boiler technology
2020	Go Live on Co-firing commercialization at three power plants, namely Paiton CFPP 1-2, Ketapang CFPP, and Pacitan CFPP.
	Establishment of PT PJB Investindo,PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata, and PT PJB Masdar Solar Energi.

CORPORATE TRANSFORMATION
2021 – 2024

2021	Launch of PJB Access
	COD Block 3 Muara Karang CCPP
	Financial Close of 145 MWAc Cirata Floating PV Project Funding
	Inauguration of Bawean SPP

RIWAYAT SINGKAT PJB
BRIEF HISTORY

PT Pembangkitan Jawa-Bali yang disingkat PJB memiliki sejarah panjang di dunia pembangkit listrik nasional. Berdirinya PJB tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang disingkat "PLN". Pendirian PJB berawal dari restrukturisasi yang dilakukan PLN pada tahun 1982, dengan melakukan pemisahan unit sesuai fungsinya, yaitu Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan serta Unit PLN Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan mendirikan 2 (dua) anak perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I yang berkantor pusat di Jakarta (berganti nama menjadi PT Indonesia Power) dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II yang berkantor pusat di Surabaya.

PT Pembangkitan Jawa-Bali, hereinafter abbreviated as PJB, has a long history in the world of national power plants. PJB establishment is inseparable from the long history of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), abbreviated as "PLN". PJB establishment originated from the restructuring by PLN in 1982, by separating the units based on their functions, namely PLN Distribution Unit and PLN Generation Unit, as well as PLN Transmission Unit. On October 3, 1995, PLN carried out special restructuration in the power plants field by establishing 2 (two) subsidiaries, namely PT PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali I, headquartered in Jakarta (changed name to PT Indonesia Power) and PT PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II, headquartered in Surabaya.

Keterangan Perubahan Nama Perusahaan
Description of Company Name Change

Pada tahun 2000, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dicatat dalam Akta Perubahan Nama Perusahaan Nomor 34 tanggal 20 Februari 2001 oleh Notaris Henny Singgih.

In 2000, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali changed its name to PT Pembangkitan Jawa-Bali stated in the notarial deed of Company Name Change No. 34 on February 20, 2001, by Henny Singgih, Notary.

Pendirian PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II dicatat dalam Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 3 Oktober 1995 oleh Notaris Poerbaningsih Adiwarsito. Pada tahun 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dicatat dalam Akta Perubahan Nama Perusahaan Nomor 9 tanggal 3 Agustus 2000 oleh Notaris Henny Singgih.

The establishment of PT PLN Pembangkitan Listrik Tenaga Jawa-Bali II was stated in the establishment deed No. 16 on October 3, 1995, by Poerbaningsih Adiwarsito, Notary. In 2000, PT PLN Pembangkitan Listrik Tenaga Jawa-Bali I changed its name to PT Indonesia Power (IP), while PT PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II changed its name to PT Pembangkitan Listrik Tenaga Jawa Bali, stated in the deed of Company Name Change No. 9 on August 3, 2000, by Henny Singgih, Notary.

PJB Saat Ini
PJB Currently

PJB kini telah menjadi salah satu perusahaan pembangkit listrik yang memainkan peranan penting di tanah air. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan tuntutan pasar, PJB saat ini juga melaksanakan kegiatan usaha pembangunan dan/atau pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan, serta usaha yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pembangkit listrik eksisting PJB tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi dengan total kapasitas terpasang 7.054 MW, dan 1 pembangkit riset PLTS Cirata 1 MW serta 650 MW yang masih berada pada tahap konstruksi. Selain itu, PJB telah memperluas jangkauan pengelolaan pembangkitnya ke luar Jawa, terutama untuk mengelola jasa operasi dan pemeliharaan (O&M) di unit PLN dan IPP. Saat ini, PJB mengelola total kapasitas sebesar 20.957 MW, dimana sebanyak 19.352 MW telah beroperasi dan 1.605 MW masih berada pada tahap konstruksi.

Tahun 2021 menjadi tahapan penguatan program transformasi, yakni *Corporate Transformation* II (2021-2024) yang fokus pada 5 (lima) strategi utama. Yaitu: (1) menjaga keamanan dan keandalan pembangkit, (2) optimasi utilisasi pembangkit dan penurunan BPP, (c) pengembangan usaha, (d) pengelolaan *human capital & organizational capital* serta (e) pengelolaan K3L dan Covid-19. PJB berupaya untuk terus mendukung dan sejalan dengan program SOLID (*Securing business sustainability, Optimizing cost efficiency, Leading industries capabilities, Increasing profit contribution & Developing new edge*) PLN. Seluruh proses bisnis PJB senantiasa disempurnakan dalam mendukung optimalisasi pencapaian kinerja. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat PAS 99:2012 sebagai perusahaan pertama di Indonesia dalam penerapan sistem manajemen terintegrasi. Selain itu, PJB telah menerapkan PJB IMS sebagai rangkaian seluruh sistem manajemen agar monitoring pemeliharaan berbagai sistem mudah dilakukan sehingga dapat mengurangi duplikasi, sebagaimana ditunjukkan pada skema berikut:

Currently, PJB already become one of power plant companies taking important role in the country. Along with the development of the business world and market demands, PJB is currently also carrying out business activities of construction and/or installation of electrical equipment, maintenance and/or operation of electrical equipment, and businesses related to the Company activities to optimize its potential. PJB's existing power plants are spread across East Java, West Java, Greater Jakarta and Sulawesi with a total installed capacity of 7,054 MW, and 1 Cirata SPP research plant with capacity of 1 MW and 650 MW which are still under construction. Also, PJB has expanded its power plant management reach outside Java, especially to manage operation and maintenance (O&M) services at PLN and IPP units. Currently, PJB manages a total capacity of 20,957 MW with 19,352 MW have been in operation and 1,605 MW are still in the construction stage.

2021 is the strengthening stage of transformation program, namely Corporate Transformation II (2021-2024) which focuses on 5 (five) main strategies. Namely: (1) maintaining the safety and reliability of plants, (2) optimization of plant utilization and reduction of BPP, (c) business development, (d) management of human capital & organizational capital and (e) management of K3L and Covid-19. PJB strives to continue to support and be in line with PLN's SOLID (Securing business sustainability, Optimizing cost efficiency, Leading industries capabilities, Increasing profit contribution & Developing new edge) program. All business processes continue to be refined to support the optimization of performance achievements as evidenced by PAS 99: 2012 Certificate as the first company in Indonesia to implement the integrated management system. Furthermore, PJB has implemented PJB IMS as a series of the entire management systems, therefore the maintenance of various systems is easy to be monitored and able to reduce duplications, as illustrated in the following scheme:

BIDANG USAHA
BUSINESS LINE

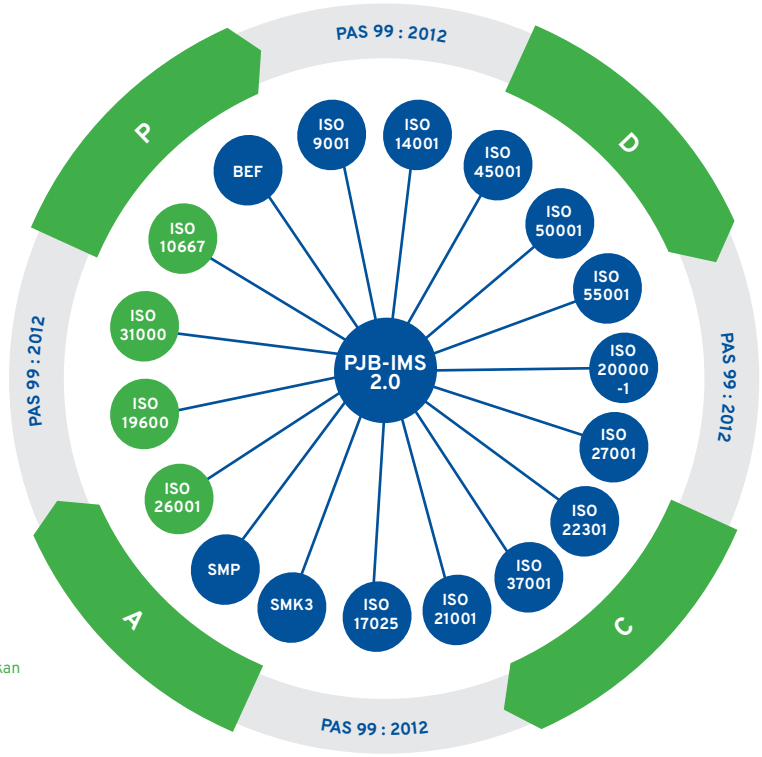

Sudah Bersertifikasi
Certified

Sudah diimplementasikan sesuai standar guide
Implemented based on standard guide

Sertifikasi ISM PJB-IMS PAS 99 mencakup
ISM Certification of PJB-IMS PAS 99 includes

Standar Internasional International Standard	
ISO 9001	Sistem Manajemen Mutu Quality Management System
ISO 14001	Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System
ISO 50001	Sistem Manajemen Energi Energy Management System
ISO 45001	Sistem Manajemen K3 OHS Management Systems
ISO 55001	Sistem Manajemen Aset Asset Management System
ISO 20000-1	Sistem Manajemen Layanan IT (Lingkup Layanan *Email*) Information-Technology Services Management System
ISO 27001	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Cyber Security Management System
ISO 22301	Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis Business Continuity Management System
ISO 37001	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System
ISO 21001	Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan Organiation Education Management System
BEF	*Baldrige Excellence Framework*

Standar Nasional National Standard	
SMK3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety Management System
SMP	Sistem Manajemen Pengamanan Safety Management System
ISO 17025	(KAN) Akreditasi Pengujian Lab Laboratory and Calibration Management System

Standar *Guide* diimplementasikan Implemented Guide Standard	
ISO 31001	Sistem Manajemen Risiko Risk Management System
ISO 26000	Sistem Manajemen Tanggung Jawab Sosial Corporate Social Responsibility Management System
ISO 19600	Sistem Manajemen Kepatuhan Compliance Management System

BIDANG USAHA
BUSINESS LINE

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar
Business Activities Based on Articles of Association

Bidang usaha PJB berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3 adalah menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang meliputi:

1. Pembangkitan tenaga Listrik;
2. Konstruksi Bangunan Elektrikal;
3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan;
5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.

PJB business line based on Article 3 of the Company's Articles of Association is running electricity business which includes the following:

1. Power Plant;
2. Electrical Building Construction;
3. Installation of electricity equipment;
4. Maintenance and/or operation of electrical equipment;
5. Trading and/or supporting business activities to optimize the utilization of resources owned by the Company, including providing assignments to the Subsidiaries

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini
Current Business Activities

Kegiatan usaha PJB yang dijalankan saat ini adalah:

1. Penyediaan tenaga listrik dengan keandalan yang baik melalui mekanisme Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero) sebagai *single buyer.*
2. Kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha Perusahaan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki PJB guna meningkatkan revenue dari lini bisnis *asset light* (*beyond* kWh). Usaha lainnya ini adalah untuk menuju *integrated power company,* baik dilakukan langsung oleh PJB maupun melalui Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi maupun perusahaan terafiliasi mencakup bidang usaha berikut:
   a. Pembangkit tenaga listrik melalui kepemilikan dalam *Independent Power Producer* (IPP);
   b. Jasa *Operation and Maintenance* (O&M) pembangkit termasuk jasa penunjangnya;
   c. Jasa *Maintenance, Repair & Overhaul* (MRO) pembangkit;
   d. Jasa *Technical Supporting* (TS) *assessment* pembangkit;
   e. Penyedia material cadang pembangkit (*stockist*);
   f. Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) pembangkit, transmisi dan gardu induk;
   g. Jasa *Enterprise Asset Management* (EAM);
   h. Pendanaan/investasi di bidang pembangkitan;
   i. Jasa konsultasi ketenagalistrikan;
   j. Jasa penyediaan tenaga kerja (SDM) untuk *Operation & Maintenance* (O&M) pembangkit listrik; dan
   k. Jasa sertifikasi kompetensi teknik ketenagalistrikan.

PJB's current business activities are as follows:

1. Eclectricity provision with good reliability through Power Purchase Agreement (PPA) mechanism with PT PLN (Persero) as the single buyer
2. Other business activities related to the Company business in order to utilize the most of PJB potential to increase revenue from the asset light (beyond kWh) business line. Other business activities towards the integrated power company, either directly carried out by PJB or through Subsidiaries, Associated Companies, and Affiliations, including the following business fields:
   a. Power Plant through ownership in Independent Power Producer (IPP);
   b. Operation and Maintenance (O&M) services for Power Plant, including the supporting services;
   c. Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) Services of Power Plant;
   d. Technical Supporting (TS) assessment and overhaul services for Power Plant;
   e. Providers of Power Plant spare-part (stockist);
   f. Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services for Power Plant, transmissions, and substations;
   g. Enterprise Asset Management (EAM) services;
   h. Funding/investment in Power Plant;
   i. Electricity consulting services;
   j. Human Capital (HC) provider for Operation & Maintenance (O&M) of power plants; and
   k. Competency certification service for electricity personnel.

BIDANG USAHA
BUSINESS LINE

Uraian Segmen Usaha
Business Segment Description

Segmen usaha utama PJB dibedakan berdasarkan pelanggannya, yang terbagi menjadi 2 (dua), yakni (1) segmen usaha penjualan tenaga listrik dan (2) segmen usaha bisnis lainnya. Pelanggan pada segmen usaha penjualan tenaga listrik terdiri dari pelanggan *grid* dan pelanggan *embedded*. Adapun pelanggan pada segmen usaha bisnis lainnya terdiri dari pelanggan jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M), jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC), jasa *Enterprise Asset Management* (EAM) dan Jasa Lainnya pada pembangkit milik PT PLN (Persero) maupun pembangkit IPP.

Indikator kinerja pada segmen usaha penjualan tenaga listrik adalah kinerja pembangkit, produksi dan penjualan tenaga listrik. Sedangkan indikator kinerja pada segmen usaha bisnis lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis dari jasa masing-masing. Secara keseluruhan, Direksi menggunakan ukuran pendapatan yang diperoleh untuk menilai kinerja seluruh segmen operasi yang ada.

PJB main business segments are divided based on customers that are divided into 2 (two) segments, namely (1) electricity sales business segment and (2) other business segments. Customers in the electricity sales and purchase business segment consist of grid customers and embedded customers. Customers in other business segments consist of Operations and Maintenance (O&M) customers, Engineering, Procurement and Construction (EPC) services, Enterprise Asset Management (EAM) services, and Other Services at power plants of PT PLN (Persero) and IPP Power Plant.

Performance indicators in the electricity sales business segment are the performance of electricity Power Plant, production, and sales. Meanwhile, the performance indicators for other business segments are different according to each services type. Overall, the Board of Directors uses the measure of revenue earned to assess performance of all existing operating segments.

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

Sebagai produsen listrik, produk utama PJB adalah kesiapan operasi Unit Pembangkit dan energi listrik yang dihasilkan oleh Unit Pembangkit melalui mekanisme saluran transmisi langsung kepada pelanggan berdasarkan kontrak jual beli yang dinyatakan dengan EAF *Declare*.

Berdasarkan segmen usahanya, PJB memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*/O&M) pembangkit dengan mengelola pembangkit milik sendiri maupun pihak lain yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, NTB, NTT dan Papua yang terdiri dari:

1. 8 (delapan) Unit Pembangkit yang dimiliki dan dioperasikan oleh PJB, serta 1 (satu) Unit Pembangkit Riset (PLTS Cirata) yang dimiliki oleh PJB;
2. 27 (dua puluh tujuh) Unit Pembangkit sebagai penyedia jasa O&M pembangkit yang dikelola PJB Grup;
3. 1 (satu) Unit Pembangkit yang dimiliki oleh PJB namun disewa dan dioperasikan oleh pihak lain;
4. 1 (satu) Unit Pembangkit melalui usaha kepemilikan saham pada perusahaan patungan PJB dengan Komipo;
5. 8 (delapan) Unit pembangkit melalui usaha kepemilikan Independent Power Producer (IPP);
6. 4 (empat) lokasi pembangunan pembangkit baru melalui jasa EPC;
7. 36 (tiga puluh enam) lokasi pelanggan *stockist* sebagai penyedia cadangan material pembangkit baik PLTU ataupun Non-PLTU; dan
8. Usaha pengelolaan aset pembangkit serta usaha pendukung lainnya.

Selain usaha utama pembangkitan tenaga listrik pada unit eksisting PJB, Berikut adalah ilustrasi gambar produk dan jasa PJB saat ini:

As the electricity producer, PJB main products are the readiness to operate the Generation Unit and the electrical energy produced by the Generation Unit through direct transmission line mechanism to customers according to the trading contract stated in the EAF Declare.

Based on its business segment, PJB has main business segment as the electricity provider as well as Operation and Maintenance/O&M provider for power plants by managing power plants owned by themselves and other parties spread across Java, Sumatera, Kalimantan and Sulawesi, NTB, NTT, as well as Papua which consists of the following:

1. 8 (eight) Generation Units owned and operated by PJB, and 1 (one) Research Generating Unit (Cirata SPP) belong to PJB;
2. 27 (twenty seven) Generation Units as O&M service providers for power plants managed by PJB Group;
3. 1 (one) Generation Units owned by PJB but leased and operated by the other parties;
4. 1 (one) Generation Units through shares ownership on PJB's joint venture companies with Komipo;
5. 8 (eight) Generation Units through Independent Power Producer (IPP) ownership;
6. 4 (four) new power plant construction sites through EPC services;
7. 36 (thirty six) locations of stockist customers as providers of power plant material reserves, both CFPP and Non-CFPP; and
8. Business of power plant asset management and other supporting businesses.

Apart from main business of power plants in PJB existing units, the following is the current illustration of PJB products and services:

Layanan Unggulan
Excellent Services

Selain memproduksi listrik yang andal, PJB terus mengembangkan lini bisnisnya hingga menghadirkan layanan-layanan unggulan yang mendukung usaha ketenagalistrikan.

Apart from producing reliable electricity, PJB continues to develop its business lines to present excellent services supporting electricity business.

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

O&M (*OPERATION & MAINTENANCE*)

Pengoptimalan operasi pembangkit yang mencakup dari instalasi pembangkit, penanganan energi primer, hingga pemeliharaan preventif dan prediktif.

Success Story:
a. PLTU Indramayu 3x330 MW
b. PLTU Pacitan 2X315 MW
c. PLTU Tj. Awar-awar 2x350 MW
d. PLTU Rembang 2x315 MW
e. PLTU Paiton #9 1x660 MW

Power plant operations optimization starting from power plant installation, primary energy handling, up to preventive and predictive maintenance.

Success Story:
a. Indramayu 3x330 MW CFPP
b. Pacitan 2X315 MW CFPP
c. Tj. Awar-awar 2x350 MW CFPP
d. Rembang 2x315 MW CFPP
e. Paiton #9 1x660 MW CFPP

MRO (*MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL*)

Pemeliharaan dan perbaikan komponen pembangkit secara menyeluruh untuk meningkatkan *output* dari pembangkit secara optimal.

Success Story:
a. PLTU Tj. Jati #3-4 2x660 MW
b. PLTP Lahendong 2x20 MW
c. PLTG Dongfang Tjiwi Kimia 1x70 MW

Maintenance and improvement of power plant components entirely to increase output from power plants optimally.

Success Story:
a. Tj. Jati #3-4 2x660 MW CFPP
b. Lahendong 2x20 MW GPP
c. Dongfang Tjiwi Kimia 1x70 MW GTPP

SPAREPART

Menghadirkan solusi *supply chain* terpercaya untuk mendukung stabilitas serta keberlanjutan penyediaan ketenagalistrikan.

Success Story:
a. PLTU Labuan dan PLTU Suralaya
b. *System Control* dan *Belt Conveyor*
c. Sparepart turbine PLTU Suralaya 8

Presenting reliable supply chain solutions to support the stability and sustainability of electricity supply.

Success Story:
a. Labuan CFPP dan Suralaya CFPP
b. System Control dan Belt Conveyor
c. Sparepart turbine Suralaya 8 CFPP

RLA (*REMAINING LIFE ASSESSMENT*)

Mengukur dan menilai umur pembangkit serta komponen untuk mengefisiensi biaya hingga meningkatkan performa pembangkit.

Layanan Unggulan:
a. *Turbin*
b. *Generator*
c. *Boiler* & HRSG
d. *Transformer*
e. *Plant*

Measuring and assessing power plants and components lifetime for cost efficiency up to increasing power plants performance.

Excellent Services:
a. Turbine
b. Generator
c. Bioler & HRSG
d. Transformer
e. Plant

EPC (*ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTIONS*)

Mendukung pengoptimalan industri ketenagalistrikan melalui eksekusi proyek pembangkit listrik, transmisi hingga gardu induk.

Success Story:
a. 117 MW Pembangkit Listrik
b. 2110,00 MVA Gardu Induk
c. 1084, 37 kmr Transmisi

Supporting optimization of electricity industry through execution of power plant project, transmissions, up to the main station.

Success Story:
a. 117 MW of Power Plants
b. 2110,00 MVA of Main Stations
c. 1084, 37 kmr of Transmissions

EAM (*ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT*)

Mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan proses bisnis guna mengoptimalkan manajemen aset pembangkit.

Success Story:
EAM telah diimplementasikan di 36 pembangkit

Integrating and consolidating business process to optimize power plants asset management.

Success Story:
EAM has been implemented in 36 (thirty six) power plants

LEARNING

Menyediakan layanan pembelajaran, pelatihan dan sertifikasi yang berstandar sesuai dengan kompetensi DJK Kementerian ESDM hingga standar internasional.

PJB Academy *Campus*:
a. **Kampus UP Gresik**
Manajemen Aset
b. **Kampus UP Paiton & UP Brantas**
Manajemen Pembangkit Listrik & K3
c. **Kampus UP Muara Karang**
RLA
d. **Kampus UP Cirata**
Pembangkit EBT & Pengembangan Usaha
e. **Kampus Surabaya**
Kepemimpinan & Budaya Perusahaan

Providing learning, training, and certification services according to DJK competency standards from EMR Ministry up to international standards.

PJB Academy Campus:
a. **Gresik GU Campus**
Asset Management
b. **Paiton GU & Brantas GU Campus**
Power Plant & OHS Management
c. **Muara Karang GU Campus**
RLA
d. **Cirata GU Campus**
NRE Power Plant & Business Development
e. **Surabaya Campus**
Leadership & Corporate Culture

SOLAR PV

Layanan EBT dengan menghadirkan panel surya pada gedung ritel, industri hingga bangunan pemerintahan.

Proyek *Solar Panel*:
a. PLTS Terapung Cirata 145 MW
b. PLTS Cirata 1 Mwp
c. PLTS 15 kWp SPKLU PLN UID Bali

NRE services by presenting solar panel on retail building, industry, up to government building.

Solar Panel Projects:
a. Floating Cirata 145 MW SPP
b. Cirata 1 Mwp SPP
c. SPKLU PLN UID Bali 15 kWp SPP

LABORATORIUM KALIBRASI
CALIBRATION LABORATORY

Laboratorium terakreditasi untuk mengkalibrasi dan mengefisiensikan biaya pemeliharaan peralatan pembangkit listrik.

Sertifikasi:
Terakreditasi oleh KAN

The accredited laboratory to calibrate and make efficient maintenance cost for power plant equipments.

Certification:
Accredited by KAN

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

Unit Pembangkitan (UP)
Generation Unit (GU)

Penyediaan tenaga listrik dilakukan PJB melalui pembangkit energi listrik dari pembangkit milik sendiri pada 8 (delapan) UP dengan total kapasitas terpasang sebesar 7.054,4 MW yang tersebar di pulau Jawa dan di luar Jawa serta 1 (satu) Pembangkit Riset PLTS Cirata dengan kapasitas 1 MW yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Selain pembangkit yang telah beroperasi, PJB juga memiliki Unit Pembangkit dalam tahap pengembangan yaitu *Add On* Muara Tawar Blok 2,3, dan 4 dengan kapasitas 650 MW yang dijadwalkan COD pada 2022-2023.

PJB provides electricity through power plants from its own power plants in 8 (eight) GUs with a total installed capacity of 7,054.4 MW spread across Java and outside Java, as well as 1 (one) Cirata SPP Research Power Plant with a capacity of 1 MW located in Purwakarta, West Java. Apart from the power plants that are already in operation, PJB also has Generation Unit in the development stage, namely Block 2,3, and 4 Add On Muara Tawar with a capacity of 650 MW which is scheduled for COD in 2022-2023

Unit Pembangkitan PJB terdiri dari:

Generation Unit of PJB consists of the following:

Tabel Unit Pembangkitan PJB Eksisting
Table of PJB Existing Generation Unit

No	Unit Pembangkitan (UP) Generation Unit (GU)	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Unit Pembangkit Eksisting Existing Generation Unit				
1	UP Gresik Gresik GU	2.219	Minyak dan gas Oil and gas	Gresik, Jawa Timur Gresik, East Java
2	PLTMG Bawean Bawean GEPP	3	Gas	Bawean, Jawa Timur Bawean, East Java
3	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1.778	Minyak dan gas Oil and gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java
4	UP Cirata Cirata GU	1.008	Tenaga air Hydropower	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
5	UP Muara Karang Muara Karang GU	909	Minyak dan gas Oil and gas	Pluit, Jakarta Pluit, Jakarta
6	UP Paiton Paiton GU	800	Batubara Coal	Probolinggo, Jawa Timur Probolinggo, East Java
7	UP Brantas Brantas GU	275	Tenaga air Hydropower	Malang, Jawa Timur Malang, East Java
8	PLTD Suppa Suppa DEPP	62,4	Diesel	Sulawesi Selatan South Sulawesi
Unit Pembangkit Riset Research Generation Unit				
9	PLTS Cirata Cirata SPP	1	Tenaga surya Solar Power	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
Unit Dalam Tahap Pengembangan Unit in the Development Stage				
10	*Add On* Muara Tawar Blok 2,3, dan 4 Add On Muara Tawar Block 2,3, and 4	650	Gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java

Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* Pembangkit (O&M)

Operation & Maintenance Service Business Unit (O&M) Power Plant

Pelayanan jasa operasi dan pemeliharaan (O&M) dilakukan dengan mekanisme penyampaian langsung ke pelanggan berdasarkan Kontrak Jasa O&M. Jasa O&M dilakukan langsung oleh PJB maupun melalui Anak Perusahaan (PT PJB Services) dan perusahaan patungan (PT Komipo PJB).

Total kapasitas pembangkit yang dikelola PJB melalui jasa O&M sebesar 6.246,6 MW yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) lokasi. Selain itu, PJB juga mengelola Jasa O&M pada unit pembangkit IPP (terdapat kepemilikan saham PJB) sebesar 400 MW yang tersebar di 2 (dua) lokasi.

Jasa O&M yang dioperasikan oleh PJB sebesar 5.922,6 MW berlokasi di Jawa atau Luar Jawa tersebar di 15 (Lima belas) lokasi, berikut:

Operation and maintenance (O&M) services are conducted with direct submission mechanism to the customers based on the O&M Service Contract. The O&M services are carried out directly by PJB or through its Subsidiary (PT PJB Services) and joint venture company (PT Komipo PJB).

Total power plant capacity managed by PJB through O&M services is 6,246.6 MW spread over 27 (twenty seven) locations. Furthermore, PJB also manages O&M services at IPP generation unit (PJB share ownership is available) of 400 MW spread over 2 (two) locations.

O&M services operated by PJB amounted to 5,922.6 MW are located in Java or Outside Java spread over 15 (Fifteen) locations, as follows:

Tabel Unit Bisnis Jasa O&M PJB
Table of PJB's O&M Service Business Unit

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location	UBJOM OMSBU
Jasa O&M FTP-1 Jawa (3.610 MW) FTP-1 Java (3,610 MW) O&M Service					
1	PLTU Rembang Rembang CFPP	2x315	Batubara Coal	Rembang, Jawa Tengah Rembang, Central Java	Jawa Java
2	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	3x330	Batubara Coal	Indramayu, Jawa Timur Indramayu, East Java	Jawa Java
3	PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2x315	Batubara Coal	Pacitan, Jawa Timur Pacitan, East Java	Jawa Java
4	PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	1x660	Batubara Coal	Probolinggo, Jawa Timur Probolinggo, East Java	Jawa Java
5	PLTU Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-Awar CFPP	2x350	Batubara Coal	Tuban, Jawa Timur Tuban, East Java	Jawa Java
Jasa O&M Pembangkit PLN di *Site* PJB (1.468,3 MW) PLN Power Plant O&M Service at PJB Site (1,468.3 MW)					
6	PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 CCPP	710	Gas	Pluit, Jakarta	Jawa Java
7	PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 CCPP	242	Gas	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java	Jawa Java
8	PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Muara Karang Block 3 Peaker CCPP	500	Gas	Pluit, Jakarta	Jawa Java
9	PLTA Ampel Gading Ampel Gading HPP	2x5	Tenaga air Tenaga air	Malang, Jawa Timur Malang, East Java	Jawa Java

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location	UBJOM OMSBU
10	PLTA Wonorejo Wonorejo HPP	1x6,3	Tenaga air Hydro	Tulung Agung, Jawa Timur Tulung Agung, East Java	Jawa Java
Jasa O&M Luar Jawa (844,3 MW) Outside Java (844.3 MW) O&M Service					
11	PLTMG Arun Arun GEPP	19x9,7	Gas	Aceh	Luar Jawa Outside Java
12	PLTU Tenayan Tenayan CFPP	2x110	Batubara Coal	Riau	Luar Jawa Outside Java
13	PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	2x110	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan	Luar Jawa Outside Java
14	PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	2x60	Batubara Coal	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	Luar Jawa Outside Java
15	PLTU Sambelia Sambelia CFPP	2x50	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	Luar Jawa Outside Java

Jasa O&M yang dikelola PJB melalui Anak Perusahaan, PT PJB Services dan berada di luar Jawa sebesar 324 MW tersebar di 12 (dua belas) lokasi sebagai berikut:

O&M service managed by PJB through its Subsidiary, PT PJB Services, and located outside Java of 324 MW spread over 12 (twelve) locations, as follows:

Tabel Unit Bisnis Jasa O&M PJB Oleh Anak Perusahaan
Table of PJB O&M Services Business Unit by Subsidiaries

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	PLTU Ampana Ampana CFPP	2x3	Batubara Coal	Sulawesi Tengah Central Sulawesi
2	PLTU Amurang Amurang CFPP	2x25	Batubara Coal	Sulawesi Utara North Sulawesi
3	PLTU Anggrek Anggrek CFPP	2x25	Batubara Coal	Gorontalo
4	PLTU Bangka Bangka CFPP	2x30	Batubara Coal	Bangka Belitung
5	PLTU Belitung Baru Belitung Baru CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Bangka Belitung
6	PLTU Bolok Bolok CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
7	PLTU Kendari Unit 1 & 2 Unit 1 & 2 Kendari CFPP	2x10	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
8	PLTU Kendari Unit 3 Unit 3 Kendari CFPP	1x10	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
9	PLTU Ketapang Ketapang CFPP	2x10	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan
10	PLTU Ropa (Ende) Ropa (Ende) CFPP	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
11	PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	2x7	Batubara Coal	Indragili Hilir, Riau
12	PLTU Tidore Tidore CFPP	2x7	Batubara Coal	Maluku Utara Maluku Utara

Jasa O&M pada IPP (terdapat kepemilikan saham PJB) melalui Anak Perusahaan yaitu PT PJB Services dan berada di luar Jawa sebesar 400 MW tersebar di 2 (dua) lokasi sebagai berikut:

O&M service at IPP (PJB share ownership) through its Subsidiary, PT PJB Services, and located outside Java of 400 MW spread over 2 (two) locations, as follows:

Tabel Unit Bisnis Jasa O&M Pada IPP Oleh Anak Perusahaan
Table of O&M Service Business Unit at IPP by Subsidiaries

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	PLTA Asahan Asahan HPP	2x90	Air Hydro	Sumatera Utara North Sumatera
2	PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	2x110	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera

Usaha Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M
Share Ownership Business in the O&M Company

PJB memiliki perusahaan patungan, yakni PT Komipo PJB yang melakukan jasa O&M pada unit pembangkit milik PT PLN (Persero) di Tanjung Jati B #3 dan #4 dengan kapasitas 2x660 MW.

PJB has joint venture company, namely PT Komipo PJB which performs the O&M service at PT PLN (Persero) generation units in Tanjung Jati B #3 and #4 with a capacity of 2x660 MW.

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

Usaha Kepemilikan *Independent Power Producer* (IPP)
Business Ownership of Independent Power Producer (IPP)

PJB mengembangkan pembangkit IPP melalui perusahaan patungan sebesar 5.665 MW sebagai berikut:

PJB developes the IPP power plant through its joint venture of 5,665 MW, as follows:

Tabel Unit Pembangkitan IPP PJB
Table of PJB's IPP Generation Unit

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Pembangkit IPP Beroperasi (4.710 MW) IPP Plant in Operations (4,710 MW)				
1	PLTA Asahan Asahan HPP	2x90	Tenaga air Hydropower	Sumatera Utara North Sumatera
2	PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	2x110	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera
3	PLTU Jawa 7 Unit 1 dan 2 Unit 1 and 2 Java 7 CFPP	2x1.000	Batubara Coal	Serang, Banten
4	PLTU Cilacap Unit #1 dan #2 Unit #1 and #2 Cilacap CFPP	2x300	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central java
5	PLTU Cilacap Unit #3 (Ekspansi 1) Unit #3 (Expansion 1) Cilacap CFPP	1x660	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central java
6	PLTU Cilacap Ekspansi 2 Expansion 2 Cilacap CFPP	1x1.000	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central java
7	PLTU Mamuju Mamuju CFPP	2x25	Batubara Coal	Mamuju, Sulawesi Barat Mamuju, West Sulawesi
Dalam Tahap Pengembangan (955 MW) In the Development Stage (955 MW)				
8	PLTA Batang Toru Batang Toru HPP	4x127,5	Tenaga air Hydropower	Tapanuli Selatan South Tapanuli
9	PLTS Terapung Cirata Cirata Floating SPP	145	Surya Solar	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
10	PLTU Sumbagsel 1 Southern Sumatera 1 CFPP	2x150	Batubara Coal	Sumatera Selatan South Sumatera

Usaha Jasa Pembangunan Pembangkit Baru (EPC)
Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Service

PJB menjalankan jasa pembangunan pembangkit baru (*Engineering Procurement and Construction*/EPC) melalui Anak Perusahaan, PT Rekadaya Elektrika yang tersebar di 4 (empat) lokasi sebagai berikut:

PJB carries out new power plant construction services (Engineering, Procurement, and Construction/EPC) through its Subsidiary, PT Rekadaya Elektrika, spread over 4 (four) locations, as follows:

Tabel Unit Pembangkitan EPC PJB
Tabel Unit Pembangkitan EPC PJB

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1	PLTU Timika (Sorong) Timika (Sorong) CFPP	4x7	Batubara Coal	Papua
2	PLTU Bima Bima CFPP	2x10	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
3	PLTU Sofifi Sofifi CFPP	2x3	Batubara Coal	Maluku Utara North Maluku
4	PLTU Ende Ende CFPP	2 x 7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara

Usaha Penyedia Material Cadang Pembangkit (*Stockist*)
Power Plant Spare Part Provider Business (Stockist)

Bidang usaha jasa *stockist* saat ini dikelola langsung oleh Anak Perusahaan PJB yaitu PT PLN SC, untuk melayani kebutuhan suku cadang pembangkitan, penyediaan services, dan dukungan retrofit kepada Pelanggan PLTU dan Pelanggan Non-PLTU di seluruh Indonesia yang berasal dari PT PLN, PJB, PT Indonesia Power, dan *Independent Power Producer* juga dukungan kepada Energi Baru Terbarukan. Berikut adalah rincian 36 (tiga puluh enam) lokasi usaha jasa *stockist*:

The stockist service business sector is currently managed directly by PJB's subsidiary, namely PT PLN SC, to serve spare part needs for generation, services procurement, and retrofit supports to the customers of CFPP and Non-CFPP throughout Indonesia which come from PT PLN, PJB, PT Indonesia Power, and Independent Power Producer, also supports to the New and Renewable Energy. The following is details of 36 (thirty six) stockist service business locations:

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

Pelanggan PLTU
CFPP Customers

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Regional Jawa (10.760 MW) Java Region (10,760 MW)				
1	PLTU Suralaya 8 Suralaya 8 CFPP	1x625	Batubara Coal	Merak, Jawa Barat Merak, West Java
2	PLTU Labuan Labuan CFPP	2x315	Batubara Coal	Pandeglang, Banten
3	PLTU Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu CFPP	3x330	Batubara Coal	Sukabumi, Jawa Barat Sukabumi, West Java
4	PLTU Adipala Adipala CFPP	2x660	Batubara Coal	Cilacap, Jawa Tengah Cilacap, Central Java
5	PLTU Lontar Lontar CFPP	3x315	Batubara Coal	Tangerang, Jawa Barat Tangerang, West Java
6	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	3x330	Batubara Coal	Indramayu, Jawa Barat Indramayu, West Java
7	PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2x315	Batubara Coal	Pacitan, Jawa Timur Pacitan, East Java
8	PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	1x660	Batubara Coal	Probolinggo, Jawa Timur Probolinggo, East Java
9	PLTU Rembang Rembang CFPP	2x315	Batubara Coal	Rembang, Jawa Tengah Rembang, Central Java
10	PLTU Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-Awar CFPP	2x350	Batubara Coal	Tuban, Jawa Timur Tuban, East Java
11	PLTU Tanjung Jati B Tanjung Jati B CFPP	2x660	Batubara Coal	Jepara, Jawa Tengah Jepara, Central Java
12	PLTU TJBPS TJBPS CFPP	2x660	Batubara Coal	Jepara, Jawa Tengah Jepara, Central Java
Regional Sumatera (720 MW) Sumatera Region (720 MW)				
12	PLTU Pangkalan Susu Pangkalan Susu CFPP	2x220	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera
14	PLTU Bangka (Air Anyir #3) Bangka (Air Anyir #3) CFPP	2x30	Batubara Coal	Bangka Belitung
15	PLTU Tenayan Tenayan CFPP	2x100	Batubara Coal	Pekanbaru, Riau
Regional Kalimantan (419 MW) Regional Kalimantan (419 MW)				
16	PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	2x110	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan
17	PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	2x60	Batubara Coal	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
18	PLTU Muara Jawa Muara Jawa CFPP	2x27,5	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan
19	PLTU Sanggau Sanggau CFPP	2x7	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan

No	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Regional Sulawesi (170 MW) Sulawesi Region (170 MW)				
20	PLTU Amurang Amurang CFPP	2x25	Batubara Coal	Sulawesi Utara North Sulawesi
21	PLTU Barru Barru CFPP	2x50	Batubara Coal	Barru, Sulawesi Selatan Barru, South Sulawesi
22	PLTU Kendari Unit 1 & 2 Unit 1 & 2 Kendari CFPP	2x20	Batubara Coal	Konawe, Sulawesi Tenggara Konawe, Southeast Sulawesi
Regional Papua (20 MW) Papua Region (20 MW)				
23	Holtekamp	2x10	Batubara Coal	Jayapura, Papua
Regional Nusa Tenggara (111 MW) Nusa Tenggara Region (111 MW)				
24	PLTU Jeranjang Jeranjang CFPP	2x25	Batubara Coal	Lombok Barat, NTB West Lombok, West Nusa Tenggara
25	PLTU Ropa Ropa CFPP	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
26	PLTU Bolok Bolok CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Kupang, Nusa Tenggara Timur Kupang, East Nusa Tenggara
27	PLTU Sumbawa Barat Sumbawa Barat CFPP	2x7	Batubara Coal	Sumbawa Barat, NTB West Sumbawa, West Nusa Tenggara

Pelanggan Non-PLTU
Non-CFPP Customers

No	Unit/Perusahaan Unit/Company
Regional Jawa Java Region	
28	KP Indonesia Power
29	KP PJB
30	PLN Pusertif
31	UJLJ
32	Cogindo
33	Indo Ridhlotama

No	Unit/Perusahaan Unit/Company
Regional Sulawesi Sulawesi Region	
34	UPK Kendari
Regional Nusa Tenggara Nusa Tenggara Region	
35	UPK Timor
36	UPK Tambora

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

Usaha Jasa *Enterprise Asset Management* (EAM)
Enterprise Asset Management (EAM) Services

EAM merupakan segmen usaha bisnis PJB lainnya, yakni upaya untuk mengelola aset Perusahaan agar memberikan kontribusi yang optimal melalui penerapan tata kelola aset yang disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis pada suatu Unit Kerja. Hal tersebut merupakan penciptaan nilai tambah dalam proses bisnis pembangkit tenaga listrik dan jasa pendukung lainnya. Pada tahun 2021, PJB telah melakukan implementasi EAM di sejumlah unit PLN, antara lain: EAM Tanjung Batu, EAM Gorontalo, EAM UID Jatim, EAM Asam-Asam dan EAM UPK Singkawang Tahap 1.

EAM is one of PJB's other business segments, which is the effort to manage the Company's assets in order to provide optimal contribution through the implementation of asset management adjusted to the needs of business processes in Work Unit. This is the creation of added value in the business process of power plant and other supporting services. In 2021, PJB had implemented EAM in a number of PLN units, including: Tanjung Batu EAM, Gorontalo EAM, Jatim UID EAM, Asam-Asam EAM, and Stage 1 Singkawang UPK EAM.

Usaha Jasa MRO (*Maintenance, Repair, Overhaul*)
MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) Service Business

Jasa *Maintenance, Repair, Overhaul* pembangkit merupakan pekerjaan pemeliharaan unit pembangkit sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mengembalikan kondisi pembangkit kepada performa terbaiknya. Pada tahun 2021, PJB melakukan Jasa Penyusunan Sistem *Equipment Reliability Prioritization* (SERP) ULPLTU Sumbawa Barat, Jasa Inspeksi Peralatan Listrik CI CT3 PT MCTN, Jasa Overhaul HGPI PLTG Tanjung Uncang, Jasa Pengukuran PA *Flow* PLTU Keban Agung Unit #2 dan Jasa *Expert Tunning* DEH PLTU Keban Agung.

Maintenance, Repair, and Overhaul services for power plants are the maintenance work for Generation Units in accordance with the needs in order to restore the condition of the power plant to its best performance. In 2021, PJB carried out Preparation Services for Equipment Reliability Prioritization (SERP) System of West Sumatera ULCFPP, Inspection Services for CI CT3 Electricity Equipment of PT MCTN, HGPI Overhaul Services for Tanjung Uncang GTPP, Measurement Services for PA Flow of Unit #2 Keban Agung CFPP, and Expert Tunning Services for DEH of Keban Agung CFPP.

Usaha Optimalisasi Aset
Asset Optimization Business

Kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset yang ada di area unit milik PJB agar memiliki nilai guna dan memberikan pemasukan terhadap pendapatan *Non-Core* PJB. Kegiatan usaha yang dilakukan antara lain adalah pemanfaatan aset, pemanfaatan lahan atau bangunan, fasilitas pendukung, serta *tools* yang dimiliki PJB. Pada tahun 2021, kegiatan usaha optimalisasi *asset* yang dilakukan antara lain Proyek Wisata Tulungagung, pemanfaatan *fly ash bottom* (FABA), pengembangan kawasan industri Paiton, pemanfaatan laboratorium UPHB, dan pemakaian lahan di BPWC untuk pembangunan PLTS Terapung 145 MWAC.

Business activities purposed to optimize the existing assets in PJB's unit area so as to have use value and provide PJB's Non-Core income. The business activities carried out, among others, the use of assets, utilization of land or buildings, supporting facilities, as well as tools owned by PJB. In 2021, asset optimization business activities carried out, among others, Tulungagung Tourism Project, fly ash bottom (FABA) utilization, Paiton industrial area development, UPHB laboratory utilization, and land use in BPWC for the construction of Floating SPP of 145 MWAC.

Uraian lengkap terkait kegiatan usaha yang dijalankannya PJB oleh 5 (lima) Anak Perusahaan dan 4 (empat) Perusahaan Patungan serta 10 (sepuluh) Perusahaan Asosiasi dalam menunjang kinerja PJB secara keseluruhan yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Daftar dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Patungan dalam Bab ini.

Complete description related to business activities carried out by PJB by 5 (five) Subsidiaries and 4 (four) Joint Ventures, as well as 10 (ten) Associates in supporting PJB's overall performance will be described further in the List and Addresses of Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures in this Chapter.

SKEMA PENYALURAN ENERGI LISTRIK
SCHEME OF ELECTRICITY TRANSMISSION

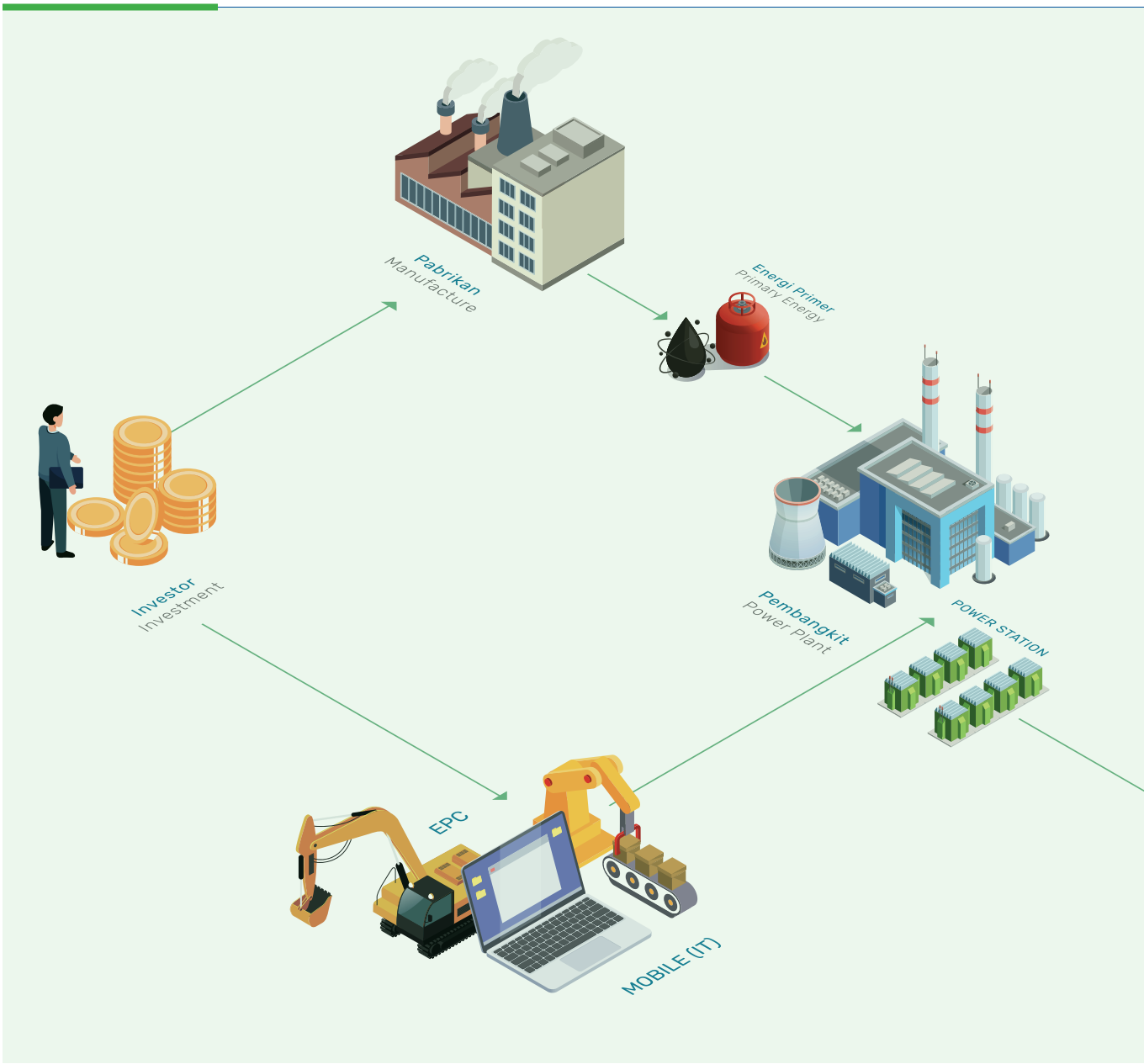

Bisnis pembangkit tenaga listrik terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Tenaga listrik yang diperlukan oleh konsumen akhir dihasilkan oleh pembangkit, disalurkan melalui sistem penyaluran (transmisi) dan didistribusikan melalui jaringan distribusi. Energi yang dihasilkan Unit Pembangkitan PJB dijual atau disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sistem Jawa-Bali yang dikelola oleh PT PLN (Persero) dan didistribusikan kepada pelanggan industri maupun rumah tangga.

Business of electric power generation consisted of 3 (three) parts: power plant, transmission, and distribution. Electricity needed by final consumer is generated by the power plant, channeled through the distribution system (transmission), and then distributed through the distribution network. The energy produced by PJB Generation Unit is sold or transmitted through the High Voltage Air Line (SUTT) of Java-Bali system managed by PT PLN (Persero) and transmitted to industrial and domestic customers.

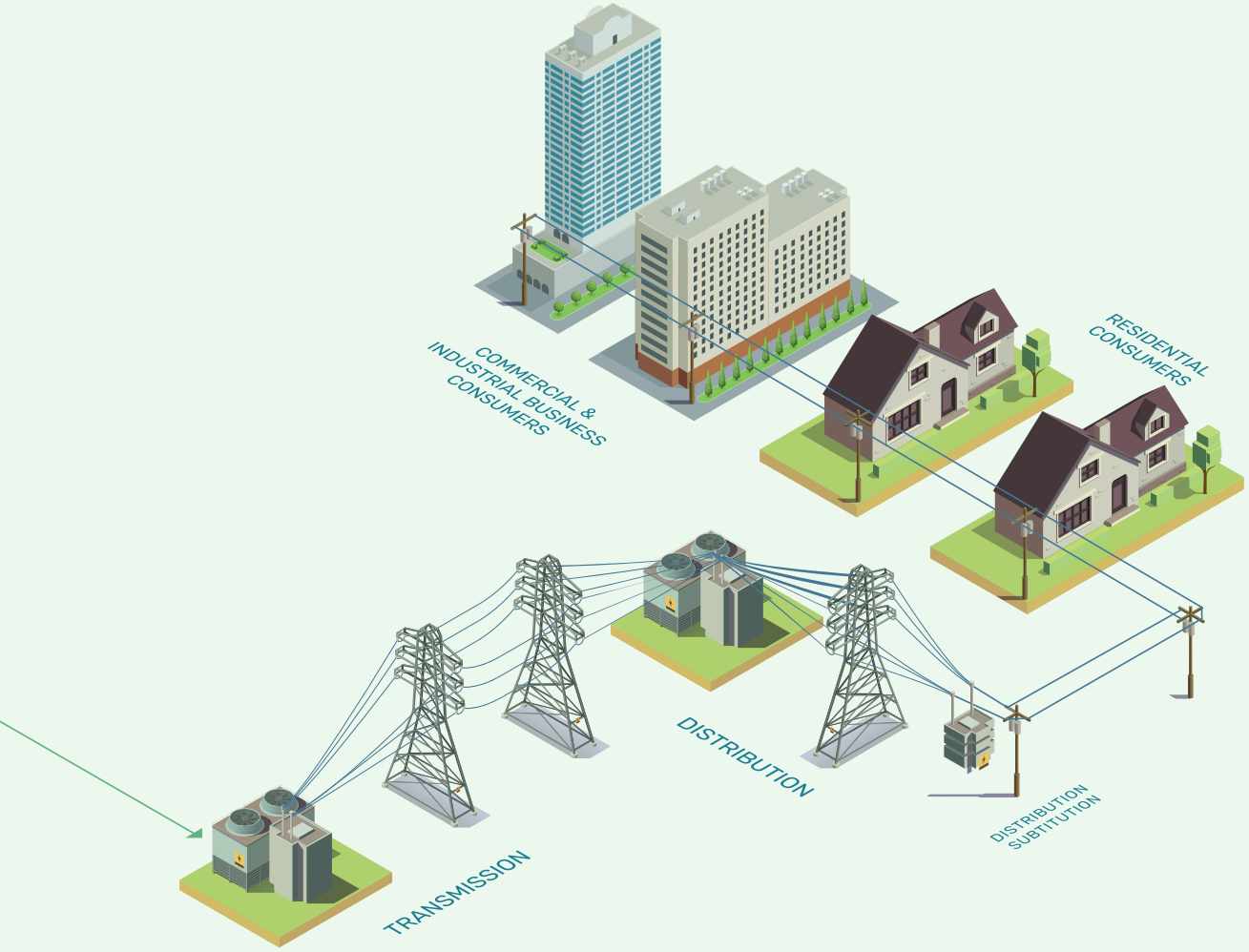
COMMERCIAL &
INDUSTRIAL BUSINESS
CONSUMERS
RESIDENTIAL
CONSUMERS
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
SUBTITUTION
TRANSMISSION

SKEMA PENYALURAN ENERGI LISTRIK
SCHEME OF ELECTRICITY TRANSMISSION

Sinergi Usaha Untuk Menjadi Perusahaan Energi Pilihan
Business Synergy To Be The Preferred Energy Company

PJB terus meningkatkan kontribusi dalam penyediaan listrik nasional melalui keandalan pembangkit yang baik dan menangkap peluang pasar ketenagalistrikan sehingga mendorong terwujudnya integrated power company terdepan.

PJB continues to increase contribution in providing national electricity through excellent power plant reliability with the spirit to encourage the realization of a leading integrated power company.

PJB dan Entitas Anak serta Afiliasinya sebagai bagian dari holding grup PT PLN (Persero) keberadaannya tidak lain untuk mendukung kelistrikan nasional yang bernilai tambah. Penyediaan energi listrik yang berkualitas dan handal hanya dapat terjadi berkat dukungan dari seluruh Entitas Anak dan Afiliasinya di berbagai bidang usaha dan keahlian masing-masing. Sinergi dan integrasi usaha dalam lingkungan bisnis PJB grup dalam rangka mencapai aspirasi Visi untuk menjadi Perusahaan Energi Pilihan. Lingkup sinergi usaha PJB grup mencakup bidang rekayasa teknik (EPC), pengelolaan pembangkit yang milik sendiri, pembangkit yang dikelola maupun berupa investasi, penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit, pendanaan, penyediaan SDM untuk jasa operasi dan pemeliharaan serta sertifikasi kompetensi SDM ketenagalistrikan, dan juga penyediaan suku cadang pembangkit.

PJB and its Subsidiaries as well as Affiliations are in the holding group of PT PLN (Persero) with their existence to support national electricity providing added-value. The highquality and reliable electricity supply are only able to be possible due to supports by Subsidiaries and Affiliations in various business fields and each expertise, as well as business synergy and integration in PJB group's business environment in order to reach the Vision aspirations to be Energy Company of Choice. The scope of PJB group business synergy is Engineering, Procurement, and Construction (EPC); management of power plants both owned, managed or invested; providing power plant operations & maintenance services; funding; HR for operations & maintenance services; HR Certification in Electrical Competency; and also supply of power plant spare parts.

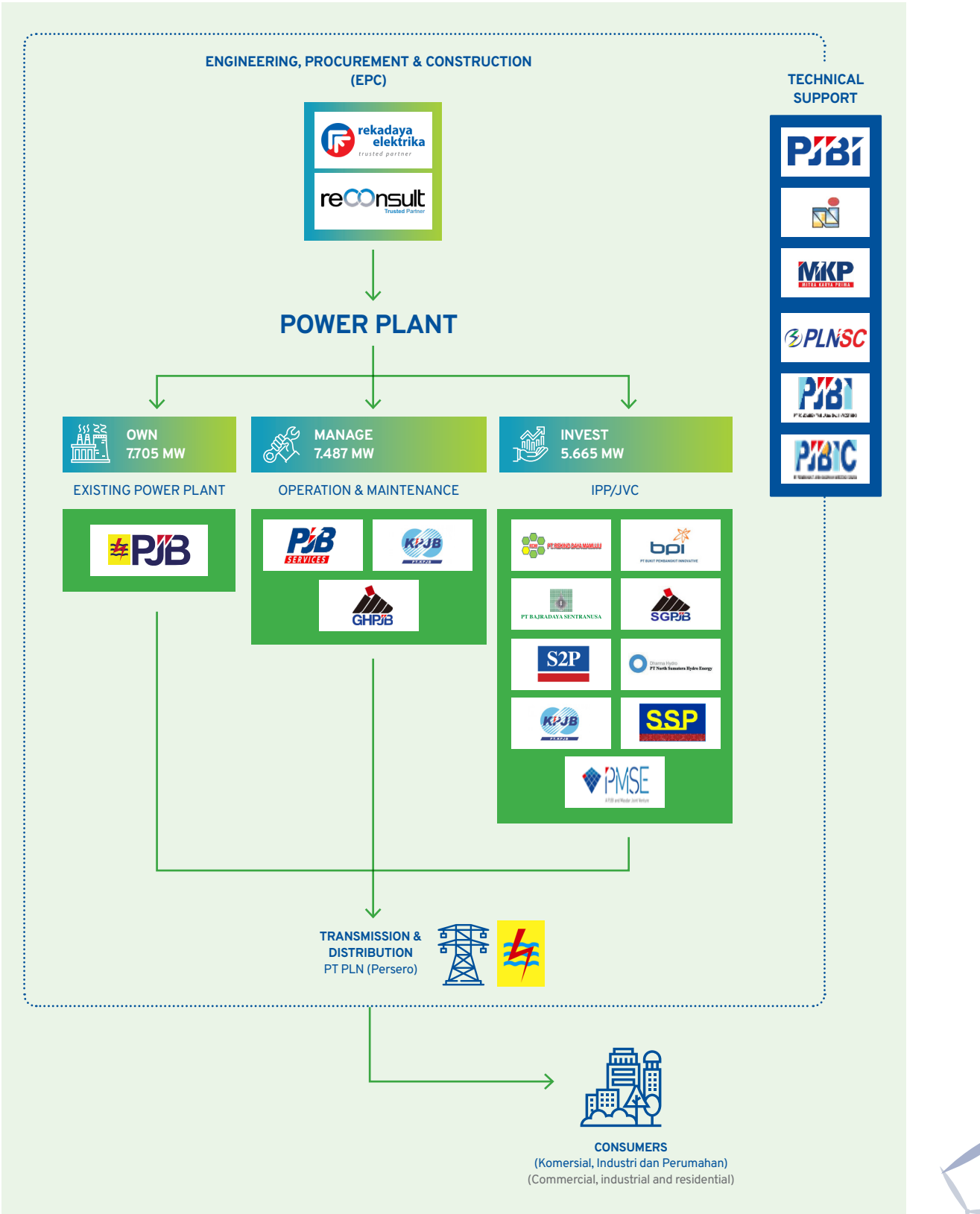
ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC)
rekadaya elektrika
trusted partner
reconsult
Trusted Partner
TECHNICAL SUPPORT
POWER PLANT
OWN
7.705 MW
MANAGE
7.487 MW
INVEST
5.665 MW
EXISTING POWER PLANT
OPERATION & MAINTENANCE
IPP/JVC
PJB SERVICES
KPJB
GHPJB
bpi
PT BAJRADAYA SENTRANUSA
SGPJB
S2P
SSP
PMSE
TRANSMISSION & DISTRIBUTION
PT PLN (Persero)
CONSUMERS
(Komersial, Industri dan Perumahan)
(Commercial, industrial and residential)

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

Dasar Pengesahan Visi dan Misi
Basis of Vision and Mission Ratification

Sejak setahun yang lalu, PJB telah melakukan penyelarasan terhadap Visi dan Misi Perusahaan dalam rangka mengantisipasi dinamika yang terjadi. Penyelarasan Visi dan Misi diarahkan untuk mengakomodir tren industri kelistrikan global yang dikenal dengan istilah "3D", yakni Dekarbonisasi, Desentralisasi dan Digitalisasi. Untuk itulah, PJB fokus mencapai arah pengembangan usaha di bidang "*New Energy*" untuk mencapai "*Sustainability*".

Visi dan Misi Perusahaan telah dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kondisi PJB saat ini dan dinamika industri listrik yang terjadi serta disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2020–2024 pada tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Rapat Direksi di Luar Rapat Nomor: 030/DIR/2020.

Since a year ago, PJB already adjusted the Company's Vision and Mission in order to anticipate the occurring dynamics. The adjustment of the Company's Vision and Mission, including the strategy implemented. The alignment of the Vision and Mission is directed towards global trends development affecting electricity system known as "3D", including Decarbonization, Decentralization, and Digitalization. PJB focuses on achieving the Company development in the field of "New Energy" to achieve "Sustainability".

The Company's Vision and Mission have been reviewed to determine its suitability with PJB current condition and been approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024 on July 30, 2020, and the Board of Directors Meeting Resolution Outside the Meeting No.030/DIR/2020.

Visi Vision

"Menjadi Perusahaan Terdepan dan Terpercaya Dalam Bisnis Energi Berkelanjutan di Asia Tenggara"

"To be the trusted leader company in sustainable energy of South East Asia"

Makna Visi

1. **Perusahaan Terdepan dan Terpercaya**, bermakna bahwa PJB merupakan perusahaan pionir yang menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan tata kelola perusahaan kelas dunia dengan indikator operasional dan finansial terbaik di Asia Tenggara sehingga meningkatkan kredibilitas Perusahaan untuk menjadi pilihan utama dalam melakukan bisnis.
2. **Bisnis Energi**, bermakna bahwa PJB memiliki kompetensi di bidang pembangkitan fosil dan energi terbarukan sesuai tren global mendatang dengan pengembangan usaha yang meliputi penjualan tenaga listrik, investasi bidang energi, dan jasa-jasa lainnya.
3. **Berkelanjutan**, bermakna bahwa PJB bergerak dan berkembang secara terus menerus dengan menjalankan bisnis eksisting, membangun dan mengembangkan bisnis baru serta berinovasi untuk meningkatkan *profit* dan *value* Perusahaan bagi *stakeholders*.

Vision Definition

1. **Trusted Leader Company** can be defined that PJB is the pioneer company running and developing its business based on the world-class corporate governance with the best operational and financial indicators in Southeast Asia, so as increasing the Company credibility to be the primary choice for partners in running business.
2. **Energy Business** can be defined that PJB has competence in the field of fossil generation and renewable energy following the upcoming global trend with business development including selling electricity, investing in energy, and other services.
3. **Sustainable** can be defined that PJB moves and develops continuously by running the existing businesses, building and developing new businesses, as well as innovating to increase the Company's profit and value for the stakeholders.

Misi Mission

- **Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.**
- **Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.**
- **Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif.**
- To conduct an innovative and collaborative, sustainably growing and environmentally-friendly energy business.
- To maintain the highest performance to provide added-value for the stakeholders.
- To attract interest and develop the best talent, and to run an agile and adaptive organization.

Makna Misi

a) **Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan** artinya PJB berfokus pada bisnis energi yang tidak terbatas pada pembangkitan *heavy asset*, melainkan *asset light* dan energi inovatif lainnya untuk mencapai diversifikasi usaha sehingga dapat meningkatkan nilai pertumbuhan Perusahaan secara berkelanjutan. PJB juga turut berpartisipasi aktif membentuk kerjasama dengan perusahaan lain melalui skema penugasan maupun IPP sesuai kaidah tata kelola perusahaan yang baik dan berorientasi pada keberlangsungan lingkungan.

b) **Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*** artinya dalam menjalankan bisnisnya, PJB berkomitmen untuk menjaga tingkat kinerja tertinggi baik dari sisi operasional maupun finansial sehingga mendukung pemegang saham dalam memberikan *value creation* yang optimal.

c) **Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif** artinya PJB berfokus dalam pengembangan kapabilitas dan kompetensi karyawan sesuai strategi pengembangan usaha dari aspek pengembangan bisnis, teknologi sampai dengan semua pendukung penting yang harus dimiliki oleh PJB. Diharapkan menghasilkan talenta terbaik sehingga PJB menjadi Perusahaan yang diminati serta organisasi yang terus *agile* dan adaptif.

Mission Definition

a) **To conduct an innovative and collaborative, sustainably growing and environmentally-friendly energy business** means that PJB focuses on the energy business that is not limited to heavy asset generation, but light assets and other innovative energies to achieve business diversification to sustainably increase the Company growth value. PJB also actively participates in collaborating with other companies through assignment schemes and IPP following the good corporate governance principles and environmental sustainability oriented.

b) **To maintain the highest performance to provide added value for the stakeholders** means that PJB in running business is committed to maintaining the highest performance level either from operational or financial perspective to support the shareholders in providing optimal value creation.

c) **To attract interest and develop the best talent, and to run an agile and adaptive organization** means that PJB focuses on developing capabilities and competencies of employees based on the Company's business development strategy from the aspects of business development up to the whole important supporters that PJB is required to have. It is expected to generate the best talents so that PJB is going to become the interested company and an organization continuing to be agile and adaptive.

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Budaya Perusahaan adalah nilai, anggapan, asumsi, sikap, dan norma perilaku yang telah melembaga kemudian diwujudkan dalam bentuk penampilan, sikap, dan tindakan, sehingga menjadi identitas PJB. Sejalan dengan transformasi *Human Capital* di BUMN dan transformasi PT PLN (Persero), PJB sebagai Anak Perusahaan BUMN turut serta mengimplementasikan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai *core values* di lingkungan PJB.

Corporate Culture is the institutionalized values, opinion, assumption, attitude, and norm of behavior manifested in the form of appearances, attitudes, and actions as the Company's identity. In line with the transformation of Human Capital in SEO and the transformation of PT PLN (Persero), PJB as SOE Subsidiary participates in implementing AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) as the core values within PJB.

Core Values dimaknai sebagai hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, serta menjadi jiwa dari organisasi dan menjadi panduan Insan PJB dalam bertindak dan berperilaku mencapai tujuan yang sama, yakni terwujudnya Visi Perusahaan.

Core Values are things that are valued, upheld, carried out, and are the soul of the organization and serve as guidance for PJB Personnel in acting and behaving towards the same goal, namely the realization of the Company's Vision.

Sejak tanggal 9 November 2020, PJB telah meresmikan core values AKHLAK sebagai Budaya Perusahaan di lingkungan PJB yang terdiri dari:

Since November 9, 2020, PJB has inaugurated the core values of AKHLAK as the Corporate Culture in within PJB which consists of the following:

AKHLAK PJB

CORE VALUES	DEFINISI DEFINITION	PANDUAN PERILAKU CODE OF CONDUCT
A **AMANAH** TRUSTWORTHY	**Memegang teguh kepercayaan yang diberikan** Upholding the trust given	- Memenuhi janji dan komitmen - Bertanggung-jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan - Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika - Keeping promises and commitments - Being responsible for the tasks, decisions, and actions taken - Upholding the moral and ethical values
K **KOMPETEN** COMPETENT	**Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas** Continuing to learn and develop capabilities	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik - Improving self-competence to respond to ever-changing challenges - Assisting others in learning - Completing tasks of the highest quality

CORE VALUES	DEFINISI DEFINITION	PANDUAN PERILAKU CODE OF CONDUCT
H **HARMONIS** HARMONIOUS	**Saling peduli dan menghargai perbedaan** Caring for each other and respecting differences	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif - Respecting everyone regardless of background - Willing to help others - Building conducive work environment
L ***LOYAL***	**Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara** Dedicated and prioritizing the interests of the nation and state	- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika - Maintaining the good reputation of fellow employees, leaders, SEOs, and the State - Willing to sacrifice to achieve a greater goal - Adhering the leadership as long as it is not against the law and ethics - Quickly adapting to be better
A **ADAPTIF** ADAPTIVE	**Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.** Keep innovating and being enthusiastic in driving or facing changes.	- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik - Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi - Bertindak proaktif - Continuously making improvements to keep up with technological developments - Acting proactively
K **KOLABORATIF** COLLABORATIVE	**Membangun kerja sama yang sinergis** Building synergistic cooperation	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. - Providing opportunities for various parties to contribute - Open in working together to generate added value - Mobilizing the use of various resources for common goals.

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Seiring perkembangan bisnis yang terjadi, PJB telah melakukan penguatan organisasi Perusahaan. Di tahun 2021 telah dilakukan perubahan struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi Nomor: 0001.P/019/DIR/2021 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 022.P/019/DIR/2020 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor: 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan dibentuknya struktur organisasi Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* dalam Peraturan Direksi Nomor: 0023.P/019/DIR/2021. Adapun skema struktur organisasi PJB saat ini adalah sebagai berikut:

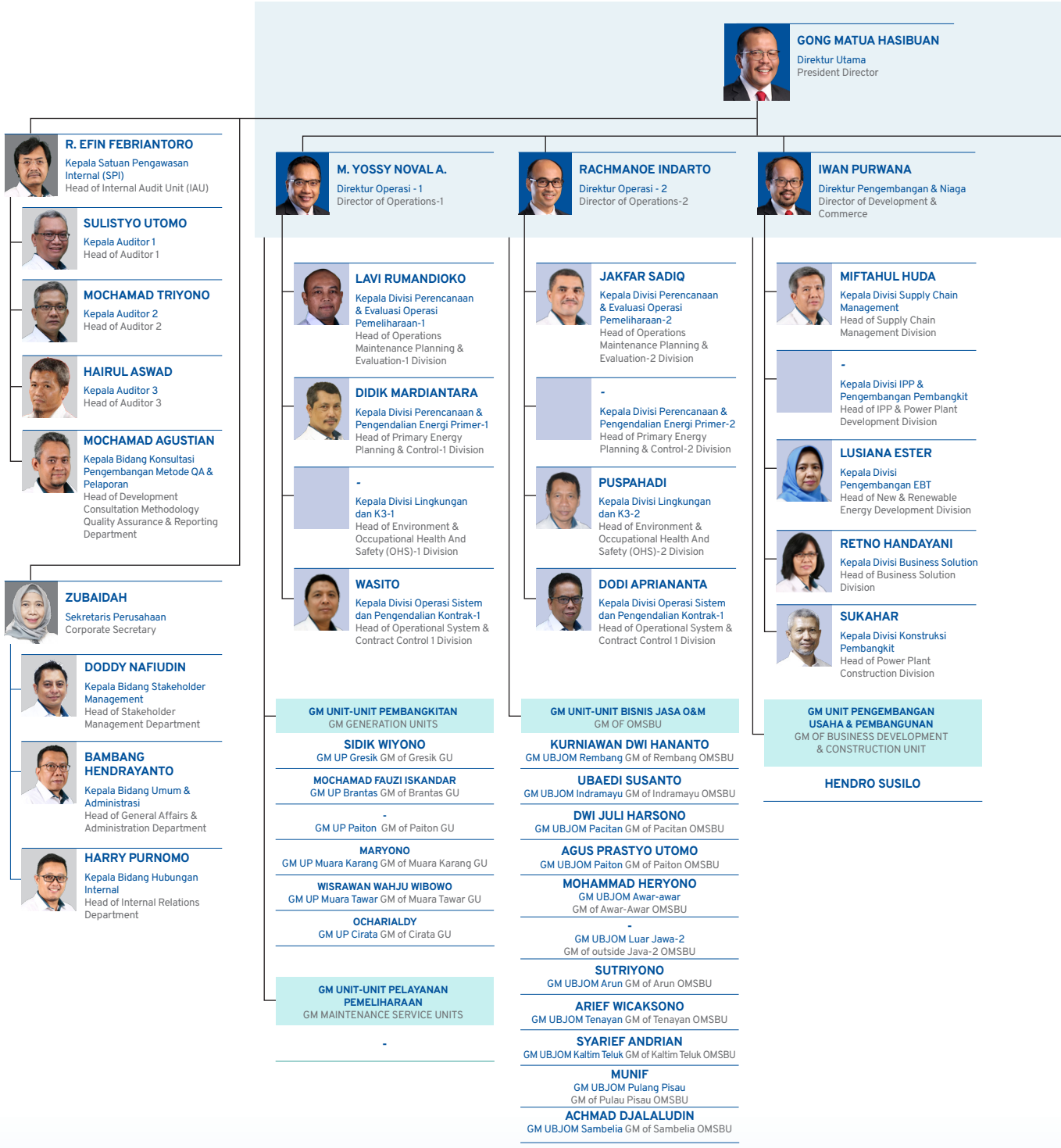

In line with business development, PJB has strengthened the Company organization. In 2021, changes were applied to the organizational structure as stipulated in the Board of Directors Regulation No. 0001.P/019/DIR/2021 as an amendment to the Board of Directors Decree No. 022.P/019/DIR/2020 concerning Amendment to the Board of Directors Decree No. 010.P /019/DIR/2019 concerning Organization and Work Procedures and the establishment of an organizational structure for the Maintenance, Repair & Overhaul Unit in the Board of Directors Decree No. 0023.P/019/DIR/2021. The current scheme of PJB organizational structure is as follows:

PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dedeng Hidayat MH

Komisaris Utama
(2021 - Sekarang)
President Commissioner
(2021 - Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Lahir di Sumedang, 17 September 1967. Berdomisili di Bekasi. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1992) dan Magister Non Teknik Lainnya dari Universitas Indonesia (2002).

Indonesian citizen, 55 years old. Born in Sumedang, September 17, 1967. Based in Bekasi. He obtained Bachelor in Law from the University of Indonesia (1992) and Masters in Other Non-Technical Engineering from the University of Indonesia (2002).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sejak pertama kali sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 21 Oktober 2021.

Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama PJB, beliau pernah menjabat sebagai Senior Executive Vice President Hukum PT PLN (Persero) (2018-sekarang). Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 2001 sebagai Ahli Muda Bantuan Hukum PT PLN (Persero). Pernah menduduki jabatan penting di PT PLN (Persero) antara lain sebagai Kepala Bidang Regulasi dan Kepatuhan pada Satuan Pelayanan Hukum Korporat di PLN Pusat (2010-2013), Senior Specialits I Pelayanan Hukum Korporat PT PLN (Persero) (2013-2014), dan Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat PT PLN (Persero) (2014 – 2018).

Rangkap Jabatan
Senior Vice President Hukum PT PLN (Persero)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham di PJB
-

Legal Basis of Appointment as the Board of Commissioners
Definitively first appointed as a member of the Board of Commissioners through the Shareholders Circular Decree on October 21, 2021.

Career History:
Before appointed as President Commissioner of PJB, he served as Senior Executive Vice President of Law at PT PLN (Persero) (2018-present). His career started at PT PLN (Persero) since 2001 as Junior Expert for Legal Aid at PT PLN (Persero). He held important positions at PT PLN (Persero), including the Head of Regulatory and Compliance at Corporate Legal Services Unit at PLN Central (2010-2013), Senior Specialties I Corporate Legal Services at PT PLN (Persero) (2013-2014), and the Head of Corporate Legal Services Unit at PT PLN (Persero) (2014 – 2018).

Concurrent Position:
Senior Vice President of Law at PT PLN (Persero)

Affiliation
Has no Affiliation with other members of the Board of Commissoners, the Board of Directors, as well as the Majority and Controlling Shareholders.

PJB Share Ownership:
-

Komang Parmita

Komisaris
(2021 - Sekarang)
Commissioner (2021 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun. Lahir di Singaraja, 23 Mei 1970. Berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Mesin dari Universitas Brawijaya (1993) dan gelar Pascasarjana bidang Teknik Lainnya dari Curtin University of Technology (2008).

Indonesian citizen, 52 years old. Born in Singaraja on May 23, 1970. Based in Jakarta. He obtained Bachelor of Mechanical from Brawijaya University (1993) and Post-graduate in Other Engineering from Curtin University of Technology (2008).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sejak pertama kali secara definitif berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 23 April 2021.

Riwayat Jabatan

Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1995 dan menduduki berbagai posisi penting antara lain sebagai Manajer UPK PLTU Lampung (2011), Manajer Produksi PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (2014-2016), Manajer Senior Pengelolaan Pembangkit Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) (2016-2018), General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B (2018-2019), dan *Executive Vice President Health, Safety, Security & Environment* PT PLN (Persero) (2019 - Sekarang)

Rangkap Jabatan

- *Executive Vice President Health, Safety, Security & Environment* PT PLN (Persero) (2019 - Sekarang)
- Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB (2021 - Sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham di PJB

-

Legal Basis of Appointment as the Board of Commissioners:

Definitively as Commissioner through the Shareholders Circular Decree on April 23, 2021.

Career History:

His career started at PT PLN (Persero) since 1995 with various important positions, including UPK Manager of Lampung CFPP (2011), Production Manager at PT PLN (Persero), Java Bali Generation Unit (2014-2016), Senior Manager of Central Java Regional Power Plant Management at PT PLN (Persero) (2016- 2018), General Manager at PT PLN (Persero) Tanjung Jati B Main Generation Unit (2018-2019), and Executive Vice President of Health, Safety, Security & Environment at PT PLN (Persero) (2019-Present)

Concurrent Positions:

- Executive Vice President of Health, Safety, Security & Environment at PT PLN (Persero) (2019-Present)
- Head of PJB's Risk Management and Compliance Committee (2021-Present)

Affiliation:

Has no affiliation with other members of the Board of Commissoners,the Board of Directors, but affiliated with the Majority and Controlling Shareholders.

PJB Share Ownership:

-

PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Jisman Parada Hutajulu

Komisaris
(2019 - Sekarang)
Commissioner (2019 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Lahir di Tapanuli, 18 Januari 1967. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta (1992) dan gelar Pascasarjana bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta (2004).

Indonesian citizen, 55 years old. Born in Tapanuli on January 18, 1967. Based in Jakarta. He obtained Bachelor of Electrical Engineering from the National Institute of Science and Technology, Jakarta (1992) and Post-graduated in Management from STML Jakarta (2004).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Plt. Komisaris pertama kali melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 11 Maret 2019 dan diangkat kembali secara definitif sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 12 November 2020.

Legal Basis of Appointment as the Board of Commissioners:
First appointed as Act. Commissioner through the Circular General Meeting of Shareholders on March 11, 2019, and definitively reappointed as Commissioner through the Shareholders Circular Decree on November 12, 2020.

Riwayat Jabatan
Memulai karier di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tahun 2000 dan menduduki berbagai posisi penting antara lain sebagai Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan (2011), Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik (2015), Kasubdit Harga Tenaga Listrik (2016), Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenalistrikan (2014-sekarang), dan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (2018-sekarang).

Career History:
His career started at the Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) since 2000 and he held various important positions, including Head of SubDirectorate of Electricity Standardization (2011), Head of Sub-directorate of Electricity Price and Subsidy (2015), Head of Sub-directorate of Electricity Prices (2016), Head of PPNS Electricity Section (2014-present), and Director of Electricity Program Development (2018-present).

Rangkap Jabatan
- Kepala Penyidik PPNS Bidang Ketenagalistrikan merangkap Kasubdit Haga dan Subsidi Listrik (Kementerian ESDM 2014 - Sekarang)
- Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Kementerian ESDM 2018 - Sekarang)
- Ketua Komite Nominasi & Remunerasi (2021 - Sekarang)

Concurrent Positions:
- Audit Head of PPNS in Electricity Sector and Head of Subdirectorate of Electricity Price and Subsidy (Ministry of Energy and Mineral Resources, 2014-Present)
- Director of Electricity Program Development (Ministry of Energy and Mineral Resources, 2018-Present)
- Deputy Head of HC and Organization Committee (2019 - Present)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation:
Has no affiliation with other members of the Board of Commissoners,the Board of Directors, but affiliated with the Majority and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham di PJB
-

PJB Share Ownership:
-

Hendra Iswahyudi

Komisaris
(2017 - Sekarang)
Commissioner (2017 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusaia 53 tahun. Lahir di Banyuwangi, 30 November 1968. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh November (1993), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2003) dan Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2013).

Indonesian citizen, 54 years old. Born in Banyuwangi on November 30, 1968. Based in Jakarta. He obtained Bachelor of Physics Engineering from the Sepuluh Nopember Institute of Technology (1993), Masters of Planning and Public Policy from Indonesia University (2003), and Doctor of Economics from Indonesia University (2013).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris

Diangkat sebagai Plt. Komisaris pertama kali melalui Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 19 Desember 2017 dan diangkat kembali secara definitif sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 12 November 2020.

Legal Basis of Appointment as the Board of Commissioners

First appointed as Act. Commissioner through the Circular General Meeting of Shareholders on December 19, 2017 and definitively reappointed as Commissioner through the Shareholders Circular Decree on November 12, 2020.

Riwayat Jabatan

Memulai karier di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan sejak tahun 1998 dan pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Kepala Bagian Rencana dan Laporan (2011-2016), Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2016-2017), Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (2017-2019), dan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2021 – Sekarang).

Career History:

His career started in Directorate General of Electricity at the Electricity Business Development Directorate since 1998 and important positions were occupied such as Head of Plan and Report Department (2011-2016); Director of Planning and Development of New and Renewable Energy, and Energy Conservation Infrastructure (2016-2017); Director of Electricity Business Development (2017-2019); and Director of Planning and Development of New and Renewable Energy, and Energy Conservation Infrastructure (2021-Present).

Rangkap Jabatan

- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2021 – Sekarang)
- Ketua Komite Audit (2021 - Sekarang)

Concurrent Positions:

- Director of Planning and Development of New and Renewable Energy, and Energy Conservation Infrastructure (2021 – Present)
- Deputy Head of PJB's Risk Management and Compliance Committee (2018-Present)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation:

Has no affiliation with other members of the Board of Commissoners,the Board of Directors, but affiliated with the Majority and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham di PJB

-

PJB Share Ownership:

-

PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Bagus Puruhito

Komisaris Independen
(2021 - Sekarang)
Independent Commissioner
(2021 - Present)

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Lahir di Purwokerto, 3 Oktober 1962. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2002) dan Pascasarjana di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2014).

Indonesian citizen, 60 years old. Born in Purwokerto, October 3, 1962. Based in Jakarta. He obtained Bachelor of Management from IMMI Jakarta Management College (2002) and a Postgraduate in Management from IMMI Management College Jakarta (2014).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pertama kali melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 30 Desember 2021.

Legal Basis of Appointment as the Board of Commissioners:
Definitively first appointed as a member of the Board of Commissioners through the Shareholders Circular Decree on October 21, 2021.

Riwayat Jabatan
Beliau mengawali karir di TNI Angkatan Udara RI sejak tahun 2001 di Lanud Hasanuddin dan memiliki pengalaman profesional antara lain sebagai Danlanud Halim Perdanakusuma (2009), Komandan Komando Pendidikan Angkatan Udara (2011), Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I (2012) dan Wakil Kepala Staf TBI Angkatan Udara (2014), Wakil Gubernur Lemhanas (2015) dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (2019-2021).

Career History:
His career started in the Indonesian Air Force since 2001 at Hasanuddin Air Base and has professional experience, among others as Danlanud Halim Perdanakusuma (2009), Commander of Air Force Education Command (2011), Commander of Air Force Operations Command I (2012) and Deputy Chief of Staff TBI Air Force (2014), Deputy Governor of Lemhanas (2015) and Head of National Search and Rescue Agency (Basarnas) (2019-2021).

Rangkap Jabatan
-

Concurrent Positions:
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation:
Has no affiliation with other members of the Board of Commissoners,the Board of Directors, but affiliated with the Majority and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham di PJB
-

PJB Share Ownership:
-

Emir Kresna W

Komisaris Independen
(2021 - Sekarang)
Independent Commissioner
(2021 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun. Lahir di Malang, 27 November 1980. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (2004), gelar Pascasarjana bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Master of Engineering Science) (1994) dan gelar Doktoral bidang Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung (2021).

Indonesian citizen, 41 years old. Born in Malang, November 27, 1980. Based in Jakarta. He obtained Bachelor in Informatics Engineering from Indonesian College of Informatics & Computers (2004), Postgraduate in Communication Science from Muhammadiyah University of North Sumatra (Master of Engineering Science) (1994) and Doctoral in International Relations from Padjadjaran University, Bandung (2021).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris pertama kali melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 30 Desember 2021.

Legal Basis of Appointment as the Board of Commissioners:
Definitively first appointed as a member of the Board of Commissioners through the Shareholders Circular Decree on October 21, 2021.

Riwayat Jabatan
Memulai karier di SonyBMG sebagai Talent, Arranger & Composer pada tahun 2005-2008 dan Manager General Affiar PT Sinergi Bara Pratama Energy (2011-2013) serta pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI (2012-2014), Tenaga Ahli Komisi I DPR RI (2014-2015), Staf Khusus I Sekretaris Kabinet RI (2015-Sekarang), Komisaris PT Patra Jasa (2018-2021).

Career History:
His career started at SonyBMG as Talent, Arranger & Composer in 2005-2008 and General Affiar Manager at PT Sinergi Bara Pratama Energy (2011-2013) and has held important positions, including as Expert Staff to Deputy Chair of the Indonesian Parliament (2012-2014), Staff Expert on Commission I of Indonesian House of Representatives (2014-2015), Special Staff I at Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia (2015-present), Commissioner at PT Patra Jasa (2018-2021).

Rangkap Jabatan
Staf Khusus I Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Concurrent Positions:
Special Staff I Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan anggota Direksi maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation
Has no Affiliation with other members of the Board of Commissoners, the Board of Directors, as well as the Majority and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham di PJB
-

PJB Share Ownership:
-

PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Gong Matua Hasibuan

Direktur Utama
(2021 - Sekarang)
President Director (2021 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Lahir di Pagaran Jalu-Jalu, 21 Februari 1968. Berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari STIE Nusa Bangsa (1994) dan Master Bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia (2008).

Indonesian citizen, 52 years old. Born in Pagaran Jalu-Jalu on February 21, 1968. Based in Surabaya. He obtained Bachelor of Accounting from STIE Nusa Bangsa (1994) and Masters in Financial Management from Indonesia University (2008).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Direksi
Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 19 Februari 2021.

Legal Basis of Appointment as the Board of Directors:
The Shareholders Circular Decree on February 19, 2021.

Riwayat Jabatan
Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1995 dan ditempatkan di PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara. Pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Senior Executive Vice President Pengelolaan Aset PT PLN (Persero) (2019-2020), Executive Vice President Portfolio Management PT PLN (Persero) (2018-2019), Kepala Divisi Transaksi Tenaga Listrik Dan Kemitraan Bisnis PT PLN (Persero) (2017-2018), Senior Specialist II Keuangan PT PLN (Persero) (2012), dan Manajer Senior Perencanaan Keuangan PT PLN (Persero) (2011).

Career History:
His career started at PT PLN (Persero) since 1995 and was assigned at PT PLN (Persero) Northern Sumatera Generation and Distribution. Significant position was also held, including as Senior Executive Vice President of Asset Management at PT PLN (Persero) (2019-2020), Executive Vice President of Portfolio Management at PT PLN (Persero) (2018-2019), Head of Electricity Transaction and Business Partnership Division at PT PLN (Persero) (2017-2018), Senior Specialist II of Finance at PT PLN (Persero) (2012), and Senior Manager of Financial Planning at PT PLN (Persero) (2011).

Rangkap Jabatan
-

Concurrent Positions:
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation:
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissoners, as well as the Majority and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham di PJB
-

PJB Share Ownership:
-

M. Yossy Noval A.

Direktur Operasi – 1
(2021 - Sekarang)
Director of Operations – 1
(2021 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Lahir di Jakarta, 18 November 1968. Berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1993) dan Master Bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (2002).

Indonesian citizen, 53 years old. Born in Jakarta on November 18, 1968. Based in Surabaya. He obtained Bachelor of Mechanical Engineering from the University of Indonesia (1993) and a Masters in Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (2002).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Direksi
Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 23 April 2021.

Riwayat Jabatan
Mengawali karir di PJB sejak tahun 1997 sebagai Ahli Muda II Kinerja UP Muara Karang. Pernah menduduki posisi penting antara lain Direktur Utama PT PJB Services (2021), General Manager UP Muara Karang (2019-2021), Kepala Satuan Rencana & Transformasi Korporat (2017-2019), Kepala Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen (2016-2017), Kepala Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan (2014-2015), Manajer Teknologi Informasi (2008-2009), dan Deputi Manajer Operasi (2005-2006).

Rangkap Jabatan
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham di PJB
-

Legal Basis of Appointment as the Board of Directors:
The Shareholders Circular Decree on April 23, 2021.

Career History:
His career started at PJB since 1997 as Junior Expert II of Performance at Muara Karang GU. Significant position was also held, including as President Director at PT PJB Services (2021), General Manager at Muara Karang GU (2019-2021), Head of Corporate Plan & Transformation Unit (2017-2019), Head of Corporate Performance & Management System Development Unit (2016-2017), Head of Risk Management & Compliance Unit (2014-2015), Information Technology Manager (2008-2009), and Deputy in Operations Manager (2005-2006).

Concurrent Positions:
-

Affiliation:
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissoners, as well as the Majority and Controlling Shareholders.

PJB Share Ownership:
-

PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Rachmanoe Indarto

Direktur Operasi – 2
(2020 - Sekarang)
Director of Operations – 2
(2020 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun. Lahir di Trenggalek, 10 November 1969. Berdomisili di Surabaya. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya (1993) dan Master di Bidang Manajemen dari ITB Bandung (2003).

Indonesian citizen, 52 years old. Born in Trenggalek, November 10, 1969. Domiciled in Surabaya. He obtainded Bachelor in Mechanical Engineering from Brawijaya University (1993) and Master in Management from ITB Bandung (2003).

Riwayat Penunjukkan Sebagai Direksi
Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 15 Juli 2020 dan 12 November 2020.

Riwayat Jabatan
Memulai karier di PJB sejak tahun 1997 dan ditugaskan sebagai AM II Keandalan Operasi PLTU/G-PLTGU. Pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai General Manager UP Sumbagsel (2019-2020), General Manager Unit Pembangkitan Gresik (2015-2016), General Manager Unit Pembangkitan Paiton (2013-2015), General Manager PLTU Pacitan (2011-2013), Manajer Perencanaan Korporat (2010-2011), dan Spesialis Pemeliharaan PLTU & PLTG (2002-2003).

Rangkap Jabatan
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Kepemilikan Saham di PJB
-

Legal Basis of Appointment as the Board of Directors:
The Shareholders Circular Decree on July 15, 2020 and November 12, 2020.

Career History:
His career started at PJB since 1997 and was assigned as AM II Operational Reliability of CFPP/CCPP. He held important positions, including as General Manager of Southern Sumatera GU (2019-2020), General Manager of Gresik Generation Unit (2015-2016), General Manager of Paiton Generation Unit (2013-2015), General Manager of Pacitan CFPP (2011-2013), Manager Corporate Planning (2010-2011), and CFPP & CCPP Maintenance Specialist (2002-2003).

Concurrent Positions:
-

Affiliation:
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissoners, as well as the Majority and Controlling Shareholders.

PJB Share Ownership:
-

Iwan Purwana

Direktur Pengembangan dan Niaga
(2020 - Sekarang)
Director of Development and Commerce (2020 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Lahir di Sumedang, 5 Maret 1967. Berdomisili di Surabaya. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (1992) dan Master Bidang Non Teknik Lainnya dari University of Missouri, USA (2007).

Indonesian citizen, 54 years old. Born in Sumedang on March 5, 1967. Based in Surabaya. He obtained Bachelor of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (1992) and Masters in Other Non-Engineering from University of Missouri, USA (2007).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Direksi
Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 12 Juni 2020 dan 12 November 2020.

Legal Basis of Appointment as the Board of Directors:
The Shareholders Circular Decree on June 12, 2020, and November 12, 2020

Riwayat Jabatan
Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1995 dan ditempatkan di PT PLN (Persero) Wilayah Khusus Batam. Pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Plt. Direktur Utama PT Indonesia Comnet Plus (2019-2020), General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat (2015-2019) dan Kepala Divisi Pengadaan Strategis PLN (2014-2015).

Career History:
His career started at PT PLN (Persero) since 1995 and was assigned at PT PLN (Persero) Batam Special Area. Significant position was also held, including as Act. President Director of PT Indonesia Comnet Plus (2019- 2020), General Manager of PT PLN West Java Distribution Main Unit (2015-2019), and Head of Strategic Procurement Division on Head Office PLN (2014–2015).

Rangkap Jabatan
-

Concurrent Positions:
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation:
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissoners, as well as the Majority and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham di PJB
-

PJB Share Ownership:
-

PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Rawan Insani

Direktur Keuangan
(2020 - Sekarang)
Director of Finance
(2020 – Present)

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Lahir di Gresik, 27 Juni 1965. Berdomisili di Surabaya. Meraih gelar Sarjana Teknik Listrik dari Institut Teknologi Sepuluh November (1991) dan Master Bidang Manajemen Bisnis University of Abertay Dundee Scotland, UK (2006).

Indonesian citizen, 56 year old. Born in Gresik on June 27, 1965. Based in Surabaya. He obtained Bachelor of Electrical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology (1991) and Masters in Business Management from University of Abertay Dundee Scotland, UK (2006).

Riwayat Penunjukkan Sebagai Direksi

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 12 Juni 2020 dan 12 November 2020.

Legal Basis of Appointment as the Board of Directors:
The Shareholders Circular Decree on July 12, 2020, and November 12, 2020.

Riwayat Jabatan
Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1995 sebagai Ahli Muda II Perencanaan Pengusahaan pada Seksi Perencanaan Konstruksi Jaringan Bagian Perencanaan Konstruksi Bidang Konstruksi PT PLN (Persero) Wilayah X. Pernah menduduki posisi penting antara lain Executive Vice President Corporate Planning PT PLN (Persero) (2019), General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten (2017-2018), Kepala Divisi Keuangan PT PLN (Persero) (2014-2017), dan Manajer Senior Pendanaan Luar Negeri PT PLN (Persero) (2012-2013).

Career History:
His career started at PT PLN (Persero) since 1995 as Junior Expert II of Business Planning in the Network Construction Planning Section of Construction Planning Section, Construction Department at PT PLN (Persero) X Area. Significant position was also occupied, among others, as Executive Vice President of Corporate Planning at PT PLN (Persero) (2019), General Manager at PT PLN (Persero) of Banten Distribution Center Unit (2017-2018), Head of Finance Division at PT PLN (Persero) (2014-2017), and Senior Manager of International Financing at PT PLN (Persero) (2012-2013).

Rangkap Jabatan
-

Concurrent Positions:
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation:
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissoners, as well as the Majority and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham di PJB
-

PJB Share Ownership:
-

Karyawan Aji

Direktur SDM & Administrasi
(2020 - Sekarang)
Director of HC & Administration
(2020 – Present)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Lahir di Yogyakarta, 1 Mei 1967. Berdomisili di Surabaya. Meraih gelar Sarjana Teknik Nuklir dari Universitas Gadjah Mada (1992) dan Master di bidang Kelistrikan dari Curtin University of Tehcnology Perth (2009).

Indonesian citizen, 54 years old. Born in Yogyakarta on May 1, 1967. Based in Surabaya. He obtained Bachelor of Nuclear Engineering from Gadjah Mada University (1992) and Masters in Electricity from Curtin University of Technology, Perth (2009).

Dasar Hukum Penunjukkan Sebagai Direksi
Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 12 Juni 2020 dan 12 November 2020.

Legal Basis of Appointment as the Board of Directors:
The Shareholders Circular Decree on July 12, 2020, and November 12, 2020.

Riwayat Jabatan
Memulai karier di PT PLN (Persero) sejak tahun 1994 dan pernah menduduki jabatan strategis di antaranya Executive Vice President Talent Development PT PLN (Persero) (2018-2020), Kepala Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) (2018), Kepala Divisi Pengembangan Organisasi PT PLN (Persero) (2017-2018), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat (2016-2017), dan Manajer Enjiniring PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B.

Career History:
His career started at PT PLN (Persero) since 1994 with strategic position, including Executive Vice President of Talent Development at PT PLN (Persero) (2018-2020), Head of Talent Development Division at PT PLN (Persero) (2018), Head of Organizational Development Division at PT PLN (Persero) (2017-2018), General Manager at West Nusa Tenggara Area PT PLN (Persero) (2016-2017), as well as Engineering Manager at PT PLN (Persero), Tanjung Jati B Generation unit.

Rangkap Jabatan
-

Concurrent Positions:
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi lainnya, dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation:
Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissoners, as well as the Majority and Controlling Shareholders.

Kepemilikan Saham di PJB
-

PJB Share Ownership:
-

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, KEPALA SPI DAN KEPALA SATUAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

EDUCATION AND TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT, AS WELL AS HEAD OF RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT UNIT

PJB berkomitmen memfasilitasi setiap organ Perusahaan mendapatkan program pengembangan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Adapun Informasi mengenai pendidikan dan pelatihan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Kepala SPI dan Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

PJB commits to facilitating each of the Company's organs to obtain development programs in performing their respective duties following the needs. Information regarding education and training for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Head of SPI, as well as Head of Risk and Compliance Management Unit throughout 2021 is as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Development Program for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/*Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Informant	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Sriyono D. Siswoyo	Komisaris Utama (1 Januari 2021 – 14 September 2021) President Commissioner (January 1, 2021 – September 14, 2021)	Webinar Tantangan Ekonomi Kreatif Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Masa Pandemi Covid 19 (Narasumber) Webinar on Challenges of Creative Economy in Facing Industrial Revolution 4.0 during the Covid 19 Pandemic (Source Person)	15 Februari 2021 February 15, 2021	Bandung Business School
		Webinar *Integrating Risk Management and Compliance* Webinar on Integrating Risk Management and Compliance	23 Februari 2021 February 23, 2021	LSPMR & GRC Management
		Diskusi Panel "Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekosistem *Battery, Electric Vehicle* dan *Solar* PV *Rooftop* di Indonesia Panel Discussion "Opportunities and Challenges for The Development of Battery, Electric Vehicle and Solar PV Rooftop Ecosystems in Indonesia	20 Mei 2021 May 20, 2021	PLN, IP, PJB Ditjen EBTKE, HAKIT
Dedeng Hidayat	Komisaris Utama (21 Oktober 2021 - Sekarang) President Commissioner (21 October 2021 – Present)	*Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem"* Topik *"Merger & Acquisition"* Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" "Merger & Acquisition" Topic	30 November 2021 November 30, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik *"Financial Risk Management"* Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" "Financial Risk Management" Topic	1 Desember 2021 December 1, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, KEPALA SPI DAN KEPALA SATUAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

EDUCATION AND TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT, AS WELL AS HEAD OF RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT UNIT

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/*Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Informant	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik *"Formulating Impactfull Value Creation Strategy and How to Create Business Ecosystem"* Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" "Formulating Impactfull Value Creation Strategy and How to Create Business Ecosystem" Topic	1 Desember 2021 December 1, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik "Praktek *Business Judgement Rule"* Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" "Practice business judgement rule" Topic	15 Desember 2021 December 15, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB
Defy Indiyanto Budiarto	Komisaris Commissioner	Webinar *Integrating Risk Management and Compliance* Webinar on Integrating Risk Management and Compliance	23 Februari 2021 February 23, 2021	LSPMR & GRC Management
		Seminar Indonesia Satu Tanpa Terorisme & Radikalisme Bersama BNPT Seminar on Indonesia One Without Terrorism &Radicalism with BNPT	16 Maret 2021 March 16, 2021	PLN
		Webinar *Fraud Prevention in Business Transformation Process During and Post Pandemic* Webinar on Fraud Prevention in Business Transformation Process During and Post Pandemic	7 April 2021 April 7, 2021	Asosiasi Auditor Internal
		Webinar #2 "PLN ICE 2021 *Innovation and Competition in Electricity* Webinar on #2 "PLN ICE 2021 Innovation and Competition in Electricity	19 April 2021 April 19, 2021	PLN
		Webinar GIRMA "COVID 19 : *Economic Risk and Response* GIRMA Webinar on "COVID 19 : Economic Risk and Response"	26 April 2021 April 26, 2021	GIRMA, LSPMR
		Diskusi Panel "Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekosistem *Battery, Electric Vehicle* dan *Solar* PV *Rooftop* di Indonesia Panel Discussion "Opportunities and Challenges for The Development of Battery, Electric Vehicle and Solar PV Rooftop Ecosystems in Indonesia	20 Mei 2021 May 20, 2021	PLN, IP, PJB Ditjen EBTKE, HAKIT
		Fast Break Menuju Generasi Emas BUMN Fast Break Towards the Golden Generation of SOEs	14 Juni 2021 June 14, 2021	BUMN, Forum Human Capital Indonesia
Sunarsip	Komisaris Commissioner	Webinar *Understanding to Project Finance Concept* (Pembicara) Webinar on Understanding to Project Finance Concept (Speaker)	12 April 2021 April 12, 2021	PLN, PJB, Spider Inspiring Leader
		Urgensi *Reshuffle* dan Penggantian Nomenklatur Kelembagaan (Narasumber) The Urgency of Reshuffle and Replacement of Institutional Nomenclature (Speaker)	13 April 2021 April 13, 2021	CNBC Indonesia TV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, KEPALA SPI DAN KEPALA SATUAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

EDUCATION AND TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT, AS WELL AS HEAD OF RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT UNIT

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/*Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Informant	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
		Power Lunch	14 April 2021 April 14, 2021	CNBC Indonesia
		Menimbang Regulasi dan *Roadmap* Pengembangan EBT Berkeadilan (Pembicara) Considering Regulation and Roadmap for the Development of Equitable NRE (Speaker)	19 Agustus 2021 August 19, 2021	Energy & Mining Editor Society
Benny MM Marbun	Komisaris Commissioner	Manajemen Risiko Risk Management	7 Januari 2021 January 7, 2021	LSPMR
		Webinar *Integrating Risk Management and Compliance* Webinar on Integrating Risk Management and Compliance	23 Februari 2021 February 23, 2021	LSPMR & GRC Management
Komang Parmita	Komisaris Commissioner	Dokumen Lingkungan, "Kitab Suci" Pembangunan Berkelanjutan (*Speech*) Environmental Document, "Scripture" of Sustainable Development (Speech)	5 Mei 2021 May 5, 2021	PLN
		HSSE *Talk* #7 *Understanding and Implementing Contractor Safety Management System.* PLN Pilih CSMS karena PLN Pilih Selamat (*Closing Speech*) HSSE Talk #7 Understanding and Implementing Contractor Safety Management System. PLN Choose CSMS because PLN Choose Congratulations (Closing Speech)	25 Agustus 2021 August 25, 2021	PLN
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik *"Merger & Acquisition"* Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" "Merger & Acquisition" Topic	30 November 2021 November 30, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik *"Financial Risk Management"* Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" "Financial Risk Management" Topic	1 Desember 2021 December 1, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik *"Formulating Impactfull Value Creation Strategy and How to Create Business Ecosystem"* Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topic "Formulating Impactfull Value Creation Strategy and How to Create Business Ecosystem"	1 Desember 2021 December 1, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, KEPALA SPI DAN KEPALA SATUAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

EDUCATION AND TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT, AS WELL AS HEAD OF RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT UNIT

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/*Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Informant	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik "Praktek *Business Judgement Rule*" Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" "Practice business judgement rule" Topic	15 Desember 2021 December 15, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB
Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	Manajemen Risiko Risk Management	7 Januari 2021 January 7, 2021	LSPMR
		Workshop Manajemen Perusahaan Berbasis GCG, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Workshop on GCG-Based Company Management, Compliance and Risk Management	21-22 Juni 2021 June 21-22, 2021	PLN
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik *"Merger & Acquisition"* Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" "Merger & Acquisition" Topic	30 November 2021 November 30, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik "Praktek *Business Judgement Rule*" Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" "Practice business judgement rule" Topic	15 Desember 2021 December 15, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB
Jisman Parada Hutajulu	Komisaris Commissioner	Webinar *Investment in Smart Grid* Webinar on Investment in Smart Grid	23 Februari 2021 February 23, 2021	Gatrik
		Leadership Development Program	6-7 Maret 2021 March 6-7, 2021	Daya Dimensi Indonesia
		Webinar *Smart Grid Implementation Strategy in* Indonesia (*Keynote Speaker*) Webinar on Smart Grid Implementation Strategy in Indonesia (Keynote Speaker)	29 April 2021 April 29, 2021	Kemen BUMN Ditjen Ketenagalistrikan, PLN, MKI Kemen BUMN Ditjen Ketenagalistrikan, PLN, MKI
		Clear Talk, Risk Insight 2022 (Narasumber) Clear Talk, Risk Insight 2022 (Source Person)	25 Mei 2021 May 25, 2021	PJB
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik "*Merger & Acquisition*" Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" "Merger & Acquisition" Topic	30 November 2021 November 30, 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB
		Training Directorship "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topik "Praktek *Business Judgement Rule*" Directorship Training "How to Grow Business in Upnormal Era and Create Business Ecosystem" Topic "Practice business judgement rule"	15 Desember 2021 15 Desember 2021	BUMN, PLN, PJB SOE, PLN, PJB

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, KEPALA SPI DAN KEPALA SATUAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

EDUCATION AND TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT, AS WELL AS HEAD OF RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT UNIT

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Competency Development Program for the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/ *Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Informant	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Gong Matua Hasibuan	Direktur Utama President Director	*Certified Risk Governance Professional* (CRGP)	26-28 Oktober 2021 October 26-28, 2021	PT RAP Consulting
M. Yossy Noval A	Direktur Operasi 1 Director of Operations-1	Pembekalan Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period Briefing	28-29 Juli 2021 July 28-29, 2021	PJB
		Workshop Insinyur *Professional Batch* 2 Professional Engineer Workshop Batch 2	06 September 2021 September 6, 2021	LPK TMI - YKTII
		Certified Risk Governance Professional (CRGP)	26-28 Oktober 2021 October 26-28, 2021	PT RAP Consulting
Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi 2 Director of Operations-2	Program Profesi Insinyur Engineer Profession Program	23 Februari 2021 February 23, 2021	UGM
		Pengelolaan Limbah B3 Toxic and Hazardous Waste Management	04 Juni 2021 June 4, 2021	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ministry of Environment and Forestry
		Pembekalan Masa Persiapan Pensiun Retirement Preparation Period Briefing	04-05 Juli 2021 July 4-5, 2021	PJB
Iwan Purwana	Direktur Pengembangan & Niaga Director of Development & Commerce	*Marketing Executive*	26-28 Februari 2021 February 26-28, 2021	Markplus Institute
		Business Judgment Rule	26-28 Oktober 2021 October 26-28, 2021	Pertamina Consulting
Rawan Insani	Direktur Keuangan Direktur Keuangan	*Accounting Management*	10 April 2021 April 10, 2021	IAI - JATIM
		Workshop Insinyur *Professional Batch* 1 Professional Engineer Workshop Batch 1	03 September 2021 September 3, 2021	LPK TMI - YKTII
Karyawan Aji	Direktur SDM dan Administrasi Director of Human Capital and Administration	Program Profesi Insinyur Engineer Profession Program	23 Februari 2021 February 23, 2021	UGM
		Marketing Executive	26-28 Februari 2021 February 26-28, 2021	Markplus Institute
		Penyusunan *Sustainability Report* Sustainability Report Writing	29 September 2021 September 29, 2021	TSC

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Competency Development Program for Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/*Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Informant	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Sigit Djalu Purwoko	Sekretaris Komite Audit Secretary of the Audit Committee	*Workshop* "Praktek Komite Audit" "Audit Committee Practice" Workshop	27 Februari 2021 February 27, 2021	PJBA
		Workshop Peningkatan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Nasional National Instructional Engineering Basic Skills Improvement Workshop (PEKERTI)	13 – 19 Juli 2021 July 13 – 19, 2021	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa / *Online Zoom*
		Power Plant Energy Audit	26 September 2021 September 26, 2021	Bangun Energi / *Online Zoom*
Andar Sudiar Sukma	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	*Workshop* "Praktek Komite Audit" Audit Committee Practice" Workshop	27 Februari 2021 February 27, 2021	PJBA
		Enhancing Your ERM (Webinar)	15 Maret 2022 March 15, 2022	GRC Management
		Sertifikasi *Team Leader* Audit ISO 37001 ISO 37001 Audit Team Leader Certification	20 Mei 2021 May 20, 2021	PECB Canada

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi & Remunerasi
Competency Development Program for Nomination & Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/*Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Informant	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Chaerudin Darsa	Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee	*Capacity Building* Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012 Capacity Building Understanding of SNI ISO/IEC 17020:2012	24 Februari 2021 February 24, 2021	BSN/Jakarta
		Energy Audit	26 September 2021 September 26, 2021	Bangun Energi/ Jakarta
		Capacity Building Analisa Manajemen Keuangan Organisasi dalam Penilaian Kriteria SNI *Award* Capacity Building Analysis of Organizational Financial Management in the Assessment of SNI Award Criteria	16 Desember 2021 December 16, 2021	BSN / JAKARTA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, KEPALA SPI DAN KEPALA SATUAN MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
EDUCATION AND TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT, AS WELL AS HEAD OF RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT UNIT

Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan
Competency Development Program for Risk Management & Compliance Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan/Seminar/*Workshop*/Narasumber Training/Seminar/Workshop/Informant	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer and Location
Bambang Istianto	Sekretaris Komite Committee Secretary	*Strategic Thinking and Competitive Strategy in A Changing Financial Environment)*	30 April 2021 April 30, 2021	Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
		Best Practices on Risk Aggregation	28 Oktober 2021 October 28, 2021	Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)
		Risk Beyond 2021	8-10 Desember 2021 December 8-10, 2021	ERMA

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Competency Development Program for Corporate Secretary

Nama Name	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer & Location
Zubaidah	*Enterprise Risk Management Certified Professional*	28 Juni – 01 Juli 2021 June 28 – July 1, 2021	CRMS Indonesia
	Penyusunan *Sustainability Report* Sustainability Report Writing	29-30 November 2021 November 29-30, 2021	TSC

Program Pengembangan Kompetensi Kepala Satuan Pengawasan Internal Audit

Nama Name	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer & Location
Efin Febriantoro R.	CIA *Review Course*	07-24 Juni 2021 June 7-24, 2021	IIA Indonesia

Program Pengembangan Kompetensi Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Competency Development Program for the Head of Risk Management and Compliance Unit

Nama Name	Pelatihan/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu Date	Penyelenggara & Lokasi Organizer & Location
Gunawan Yudi Hariyanto	*Lead Implementer* ISO 37001	01-05 Februari 2021 February 1-5, 2021	Sustain Indonesia
	Enterprise Risk Management Certified Professional	28 Juni – 01 Juli 2021 June 28 – July 1, 2021	CRMS Indonesia
	GRC Summit (Webinar)	06-13 Juli 2020 July 6-13, 2020	PJB Academy
	ISO 31010 Teknik *Assessment* Risiko ISO 31010 Risk Assessment Techniques	10-13 Agustus 2021 August 10-13, 2021	BSI
	Business Thinking & Innovation	30 Juni – 01 Juli 2021 30 June – 01 July 2021	UNAIR
	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	26-28 Oktober 2021 October 26-28, 2021	PT RAP Consulting
	Business Judgment Rule	26-28 Oktober 2021 October 26-28, 2021	Pertamina Consulting
	ERM *Fundamentals*	08-10 Desember 2021 December 8-10, 2021	ERMA

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR COMPETENCY PROFILE AND DEVELOPMENT

PJB berkomitmen mengembangkan kompetensi dan kapabilitas SDM yang sejalan dengan kondisi '*new normal*' dengan keterampilan digital yang mumpuni untuk kepemimpinan yang transformatif. Dengan dukungan komposisi SDM berasal dari generasi milenial lebih dari 70%, PJB memiliki semangat optimisme menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

PJB is committed to developing HR competencies and capabilities that are in line with the 'new normal' conditions with qualified digital skills for transformative leadership. With the support of the composition of human resources from the millennial generation of more than 70%, PJB highly believes to become a leading and trusted company in the sustainable energy business in Southeast Asia.

Mayoritas Usia Karyawan **26-30 tahun (26,68%)**
Dominant Age **26-30 years old (26,68%)**

Rata-rata Usia Karyawan **(36 tahun, 2 bulan)**
Average Age **(36 years, 2 months)**

Mayoritas Tingkat Pendidikan Karyawan **S1 (55,45%)**
Dominant Education Level **Bachelor's Degree (55,45%)**

PJB Academy Strategi Belajar Bersertifikasi Internasional
PJB Academy = International Certified Study Strategy

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah karyawan PJB tercatat sebanyak 3.071 orang mengalami penurunan 1,67% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 3.123 orang, yang didominasi dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 2.667 orang (86,84%) dan karyawan perempuan sebanyak 404 orang (13,16%).

As of the end of 2021, the number of PJB employees was recorded at 3,071 persons, a decrease of 1.67% compared to 2020 of 3,123 persons, which was dominated by the number of male employees of 2,667 persons (86.84%) and female employees of 404 persons (13.16%).

Berdasarkan usia, jumlah karyawan aktif PJB rata-rata didominasi oleh usia 26-30 tahun dengan jumlah sebanyak 881 orang (26,68%) dengan latar belakang pendidikan mayoritas adalah tingkat Sarjana sebanyak 1.703 orang (55,45%). Guna menunjang kegiatan operasionalnya, PJB mengalokasikan SDM berdasarkan kebutuhan Divisi, Unit Bisnis yang dimilikinya maupun Anak Perusahaan. Selama tahun 2021, jumlah karyawan terbesar berada di Kantor Pusat sebanyak 575 karyawan, Unit Pembangkitan Muara Karang sebanyak 313 orang dan Unit Pembangkitan Gresik sebanyak 294 orang.

Based on age, the number of active PJB employees on average is dominated by the age of 26-30 years with a total of 881 persons (26.68%) with the majority educational background being Bachelor's level of 1,703 persons (55.45%). To support its operational activities, PJB allocates human resources based on the needs of the Division, its Business Units, and Subsidiaries. In 2021, the largest number of employees will be at the Head Office with 575 employees, Muara Karang Generation Unit with 313 persons, and Gresik Generation Unit with 294 persons.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Number of Employees by Gender

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021 (orang)
Table of Number of Employees by Gender in 2019-2021 (person)

Jenis Kelamin Gender	2019	2020	2021	Perubahan 2021 Terhadap 2020 Comparison of 2021 and 2020
Pria Male	2.770	2.717	2.667	-50
Wanita Female	416	406	404	-2
Jumlah Total	**3.186**	**3.123**	**3.071**	**-52**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan
Number of Employees by Position

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2019-2021 (orang)
Table of Number of Employees by Position in 2019-2021 (person)

Jenjang Jabatan Position Level	2019	2020	2021	Perubahan 2021 Terhadap 2020 Comparison of 2021 and 2020
F1	20	10	17	7
F2	24	32	27	-5
F3	79	73	88	15
F4	506	495	474	-21
F5	1.309	1.257	1.402	145
F6	549	558	343	-215
Manajemen Atas Top Management	2	2	2	0
Manajemen Menengah Middle Management	55	56	56	0
Manajemen Dasar Basic Management	153	148	155	7
Supervisor Senior Senior Supervisor	405	410	417	7
Supervisor Dasar Basic Supervisor	84	82	90	8
Jumlah Total	**3.186**	**3.123**	**3.071**	**-52**

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR COMPETENCY PROFILE AND DEVELOPMENT

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Number of Employees by Education Level

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2021 (orang)
Table of Number of Employees by Education Level in 2019-2021 (person)

Tingkat Pendidikan Level of Education	2019	2020	2021	Perubahan 2021 Terhadap 2020 Comparison of 2021 and 2020
Sarjana S3 Doctor's Degree	1	1	1	0
Sarjana S2 Master's Degree	199	225	265	40
Sarjana S1 Bachelor's Degree	1.774	1.747	1.703	-44
Sarjana Muda Fresh Graduate	590	582	575	-7
D1 Diploma	31	29	28	-1
SMA High School Graduate	586	538	499	-39
SLTP Middle School Graduate	5	1	-	-1
Jumlah Total	**3.186**	**3.123**	**3.071**	**-52**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia
Number of Employees by Age

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia Tahun 2019-2021 (orang)
Table of Number of Employees by Age 2019-2021 (person)

Usia Age	2019	2020	2021	Perubahan 2021 Terhadap 2020 Comparison of 2021 and 2020
<26 tahun <26 years old	340	206	128	-78
26 - 30 tahun years old	1.106	1.038	881	-157
31 - 35 tahun years old	471	575	771	196
36 - 40 tahun years old	388	446	422	-24
41 - 45 tahun years old	132	137	172	35
46 - 50 tahun years old	488	461	398	-63
51 - 56 tahun years old	261	260	299	39
Jumlah Total	**3.186**	**3.123**	**3.071**	**-52**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Number of Employees by Employment Status

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019-2021 (orang)
Table of Number of Employees by Employment Status (person)

Status Karyawan Employee Status	2019	2020	2021	Perubahan 2021 Terhadap 2020 Comparison of 2021 and 2020
Karyawan Tetap Permanent employees	3.186	3.123	3.071	-52
OJT On-the-Job Training	28	-	-	-
Jumlah Total	**3.186**	**3.123**	**3.071**	**-52**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja
Number of Employees by Operational Area

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja 2019-2021 (orang)
Table of Number of Employees by Operational Area (person)

Wilayah dan Unit Kerja Work Unit and Area	2019		2020		2021		Perubahan 2021 Terhadap 2020 Comparison of 2021 and 2020
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	
Kantor Pusat Head Office	392	167	395	166	407	168	14
UP Gresik Gresik GU	297	35	269	33	261	33	-8
UP Muara Karang Muara Karang GU	297	31	296	31	283	30	-14
UP Paiton Paiton GU	254	20	242	19	232	19	-10
UP Cirata Cirata GU	128	12	128	10	153	15	30
UP Brantas Brantas GU	155	9	147	9	142	9	-5
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	274	22	265	21	259	21	-6
Unit Pemeliharaan Wilayah Timur Maintenance Service Unit of East Area	240	21	240	21	234	21	-6
Badan Pengelola Waduk Cirata Cirata Reservoir Management Unit	37	7	36	7	BPWC telah direorganisasi pada tahun 2021 CRMU has been reorganized in 2021		
UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU	33	0	35	0	35	0	0
UBJOM Paiton Paiton OMSBU	33	2	33	2	34	1	0
UBJOM Rembang Rembang OMSBU	33	2	33	2	32	2	-1
UBJOM Pacitan Pacitan OMSBU	34	1	34	1	34	1	0
UBJOM Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar OMSBU	34	1	33	1	34	1	1

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR COMPETENCY PROFILE AND DEVELOPMENT

Wilayah dan Unit Kerja Work Unit and Area	2019		2020		2021		Perubahan 2021 Terhadap 2020 Comparison of 2021 and 2020
	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	Pria Male	Wanita Female	
UBJOM Luar Jawa-2 Outside Java-2 OMSBU	33	11	32	11	15	9	-19
UBJOM Kaltim Teluk Kaltim Teluk OMSBU	33	0	31	0	32	0	1
UBJOM Tenayan Tenayan OMSBU	32	1	32	1	32	1	0
UBJOM Pulang Pisau Pulang Pisau OMSBU	33	0	32	0	33	0	1
UBJOM Arun Arun OMSBU	5	0	4	0	5	0	1
Unit Pengembangan Business Development Unit	25	11	28	11	27	10	-2
PJB Academy	34	14	31	14	33	15	3
UBJOM Sambelia Sambelia OMSBU					3	0	3
Tugas Karya ke PLN Work assignment to PLN	26	7	25	7	37	10	15
Tugas Karya ke PJBS Work assignment to PJBS	36	6	36	5	33	4	-4
Tugas Karya ke AP/PA Lain Assignment to Other AP/PA	91	14	104	15	104	14	-1
Jumlah Total	**2.770**	**416**	**2.717**	**406**	**2.667**	**404**	**-52**

Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Competency Development

PJB menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam peningkatan kinerja Perusahaan yang harus dikelola dan dikembangkan terus-menerus. Tantangan perubahan lingkungan bisnis mendorong setiap perusahaan melakukan adaptasi dan inovasi di berbagai bidang. Pada tahun 2021 PJB terus melakukan inovasi pengelolaan *human capital* terutama dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas setiap karyawan dalam mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan melalui program pengembangan kompetensi yang terstruktur dan lengkap, pengembangan kepemimpinan, sistem knowledge sharing dan *digital learning* yang memadai.

PJB realizes that human resources are the most important asset in improving the Company's performance which must be managed and developed continuously. The challenges of changing the business environment encourage every company to adapt and innovate in various fields. In 2021, PJB will continue to innovate in human capital management, especially in increasing the capacity and capability of each employee in supporting the organization's performance continuously through a structured and complete competency development program, leadership development, knowledge sharing system, and adequate digital learning.

Kebijakan
Policy

Kesetaraan dan Kesempatan yang Sama Dalam Pendidikan dan Pelatihan

PJB memberikan kesempatan yang sama bagi pengembangan kompetensi seluruh karyawan tanpa memandang *gender*, suku, agama dan ras (SARA) maupun level jabatan. Oleh karena itu, PJB menerapkan prinsip non diskriminasi yang ketat dan konsisten dalam pengelolaan SDM. PJB senantiasa berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kapabilitas setiap karyawan pada seluruh jenjang organisasi dalam mendukung kinerja Perusahaan saat ini dan di masa depan. Komitmen ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PJB dengan Serikat Kerja PJB Periode Tahun 2019-2021 dan kebijakan *Human Capital Management System*, terutama aspek pendidikan dan pelatihan karyawan.

Pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan mengedepankan kualitas berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas, terutama terkait dengan peningkatan keahlian teknis, operasional, manajemen, soft skills dan kepemimpinan. PJB meyakini bahwa kualitas SDM yang unggul dan berintegritas menjadi kunci dalam bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Pada tahun 2021 dalam rangka menjaring dan mempersiapkan kader-kader terbaik Perusahaan, PJB telah menyempurnakan berbagai kebijakan terkait pembinaan kompetensi karyawan, dukungan dalam *digital learning* dan uji portofolio kompetensi melalui Peraturan maupun Edaran Direksi. Untuk informasi lebih lengkap terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dalam Bab Fungsi Pendukung Bisnis bagian Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

Fairness and Equal Opportunity in Education and Training

PJB provides equal opportunities for competency development of all employees regardless of gender, ethnicity, religion, and race (SARA) as well as the level of position. Therefore, PJB applies strict and consistent principles of non-discrimination in HR management. PJB is always committed to increasing the capacity and capability of every employee at all levels of the organization in supporting the current and future performance of the Company. This commitment is contained in the Collective Labor Agreement between PJB and the PJB Labor Union for the 2019-2021 Period and the Human Capital Management System policy, especially regarding aspects of employee education and training.

Education and training are carried out by prioritizing quality based on the principles of efficiency and effectiveness, especially related to improving technical, operational, management, soft skills, and leadership skills. PJB believes that the quality of superior human resources and integrity is the key to competing in the era of the industrial revolution 4.0. In 2021, to capture and prepare the Company's best cadres, PJB has refined various policies related to employee competency development, support in digital learning, and competency portfolio testing through Regulations and Circulars of the Board of Directors. For more information regarding the management of Human Resources, it can be found in the Chapter on Business Support Functions in the Human Resources section of this Annual Report.

PJB Academy
PJB Academy

Sepanjang tahun 2021, PJB Academy telah memberikan pembelajaran terhadap 14.445 karyawan atau 123,15% dari target 11.729 karyawan.

In 2021, PJB Academy provided lessons for 14,445 employees, or 123.15% of the target of 11,729 employees.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR COMPETENCY PROFILE AND DEVELOPMENT

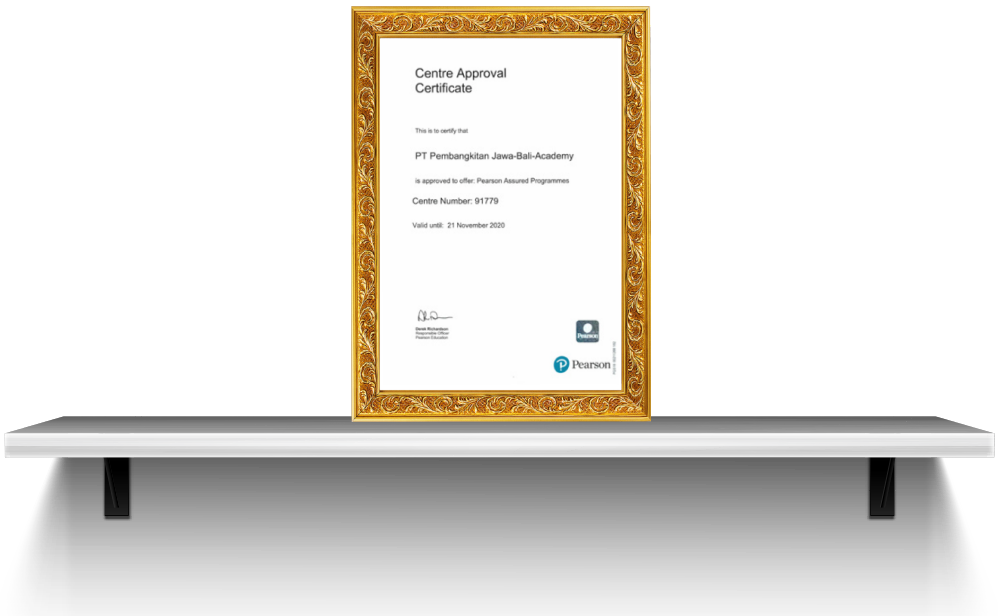

PJB Academy merupakan lembaga pembelajaran yang telah memperoleh sertifikasi internasional dari Pearson UK sejak tahun 2017, yang pendiriannya sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi karyawan di lingkungan PJB grup. Sertifikasi Pearson UK menjadi pengakuan bahwa pelaksanaan pembelajaran oleh PJB Academy dibangun dengan arah dan proses *learning & knowledge management* yang benar sekaligus untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa kehadirannya menjadi kebutuhan dalam perkembangan transformasi PJB saat ini dan masa mendatang. Selain itu PJB Academy juga telah tersertifikasi ISO 21001:2018 sehingga PJB Academy dapat memberikan layanan pembelajaran berskla internasional bagi seluruh penerima layanan pembelajaran. Saat ini, PJB Academy memiliki 24 karyawan dengan sertifikat *Corporate Learning Technologist* (CLT) untuk mengelola *learning processs* dan *content* berstandar internasional.

Pembelajaran di PJB Academy meliputi pembelajaran kepemimpinan, pembelajaran profesional dan sertifikasi (*Operation & Maintenance*, Manajemen Aset Pembangkitan dan Bisnis Pembangkitan Terintegrasi), serta pembelajaran *corporate strategic*. Adapun pendekatan pembelajaran dilakukan dengan 2 metode, yakni pertama, *Performance Based Learning* (PBL) dimana pembelajaran dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi disebabkan faktor karyawan atau SDM yang mengakibatkan kinerja unit tidak tercapai. Kedua, *Competence Based Learning* (CBL), yakni pembelajaran dilakukan untuk menutup kesenjangan kompetensi berdasarkan *assessment job competency* terhadap kebutuhan perusahaan baik yang bersifat jangka pendek maupun panjang.

PJB Academy is a learning institution that has obtained international certification from Pearson UK since 2017, which the establishment was an effort to improve employee competence within the PJB group. Pearson UK certification is a recognition that the learning implementation by PJB Academy is built with the right direction and process of learning and knowledge management as well as to convince the stakeholders that their presence is a necessity in the PJB transformation development in the present and future. Additionally, PJB Academy has also been certified to ISO 21001:2018 so that PJB Academy can provide international-class learning services for all recipients of learning services. Currently, PJB Academy has 24 employees with Corporate Learning Technologist (CLT) certificates to manage learning processes and content with international standards.

PJB Academy consists of leadership learning, professional learning, and certification (Operation & Maintenance, Generation Asset Management, and Integrated Generation Business), as well as corporate strategic learning. The learning approach is carried out with 2 methods. First, Performance Based Learning (PBL), carried out based on occurred issues due to employee or HC factors affecting the unit performance does not achieve. Second, CompetenceBased Learning (CBL), namely learning is carried out to close competency gaps based on job competency assessments of the Company's needs, both short and long term.

PJB Academy memiliki program pembelajaran rutin yang merupakan hasil dari *Learning Need Analysis* setiap tahun dalam bentuk Kalender Akademik, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan sesuai *gap* kompetensi masing-masing karyawan, temuan audit, regulasi baru atau pun menunjang tujuan Perusahaan.

PJB Academy has a regular learning program which is the result of the Learning Need Analysis every year in the form of an Academic Calendar, to improve employee competency according to respective employee's competency gap, audit findings, new regulations, or supporting the Company's goals.

Anggaran Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Competency Development Cost

Pada tahun 2021, realisasi anggaran untuk pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp46,83 miliar, mengalami naik sebesar 12,01% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp41,81 miliar. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengalami *trend* penurunan dibanding tahun 2020 sehingga membuat perubahan metode pelaksanaan pembelajaran dari digital menjadi *blended* (*mix*) *learning* dan memerlukan proses adaptasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik internal maupun eksternal.

In 2021, the realization of the budget for employee competency development was Rp.46.83 billion, an increase of 12.01% compared to 2020 of Rp 41.81 billion. This was due to the Covid-19 pandemic, which experienced a downward trend compared to 2020, thus changing the method of implementing learning from digital to blended (mixed) learning and requiring an adaptation process for the implementation of learning activities both internally and externally.

Tabel Realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2019-2021
Table of Budget Realization for Employee Education and Training for 2019-2021

Uraian Description	Tahun (Rp miliar) Year (Rp billion)			Perubahan 2021 Terhadap 2020 (%) Comparison of 2021 and 2020 (%)
	2019	2020	2021	
Realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Realization of Employee Education and Training Budget	97,66	41,81	46,83	12,01

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan
Competency Development by Position Level

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memastikan karyawan mampu melakukan pekerjaannya atau memiliki kapabilitas sesuai kebutuhan kompetensi jabatan yang diembannya sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Jenis pengembangan kompetensi karyawan yang diselenggarakan oleh PJB Academy terdiri dari pengembangan kompetensi mulai dari jenjang Pelaksana, Supervisor, Manajemen Dasar sampai dengan Manajemen Atas.

Education and training are held to ensure the employees are able to perform their jobs or have capabilities following the competency needs of the positions they carry to create a conducive work environment. The types of employee competency development organized by PJB Academy consist of competency development starting from the Executive, Supervisor, and Basic Management to Top Management levels.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR COMPETENCY PROFILE AND DEVELOPMENT

Rencana dan Realisasi Pengembangan Karyawan 2021
Employee Development Plan and Realization in 2021

Sampai dengan akhir tahun 2021 sebagian besar program pembelajaran yang direncanakan telah terealisasi. Berikut adalah perbandingan rencana program *training*, seminar & *workshop*, serta sertifikasi dan realisasi yang dilakukan sebagai berikut:

As of the end of 2021, most of the learning program plans have been realized. The following is the comparison of the training program plans, seminars & workshops, as well as certification and realization:

Jenis Pembelajaran Types of Learning		Jumlah *Batch* 2021 2021 Batch Quantity		Jumlah Peserta 2021 Number of Participants in 2021	
		Target	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization
Pelatihan Training	Teknik Engineering	285	284	6084	6023
	Non-Teknik Non-Engineering	191	262	3473	4746
Sertifikasi Certification	Teknik Engineering	94	104	1862	1421
	Non-Teknik Non-Engineering	67	57	904	803
Workshop	Teknik Engineering	50	9	500	303
	Non-Teknik Non-Engineering	49	24	490	515
PGD (*Peer Group Discussion*)	Teknik Engineering	12	7	120	268
	Non-Teknik Non-Engineering	6	1	60	1
Program Pendukung Supporting Program	Teknik Engineering		0		0
	Non-Teknik Non-Engineering		0		0
Program Purna Purna Program		0	0	0	0
Soft Leadership		0	0	0	0
Stakeholders (PJB *Class*)		8	16	200	365
Total		**762**	**764**	**13.693**	**14.445**

Pada tahun 2021, PJB telah melaksanakan program pembelajaran kepada 14.445 karyawan dengan jumlah *batch* mencapai 764 *batch*.

In 2021, PJB held learning programs for 14,445 employees with a total of 764 batches.

Tabel Jenis, Tujuan dan Peserta Pelatihan Teknik Tahun 2020-2021
Table of Types, Objectives, and Participants of Technical Training in 2020-2021

Level Jabatan Position Level	2020				2021			
	Jenis Pelatihan Types of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Jumlah Peserta	%	Jenis Pelatihan Types of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of partic-ipants	%
Manajemen Atas Top Management	TEKNIK ENGI-NEERING	Pemenuhan *gap* kompetensi dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menjalankan program-program strategis korporat maupun program Unit atau Bidang. Fulfillment of competency gaps and development of employee competence in executing strategic programs in the corporate or unit or field programs	1	0,01	TEKNIK ENGI-NEERING	Pemenuhan *gap* kompetensi dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menjalankan program-program strategis korporat maupun program Unit atau Bidang. Fulfillment of competency gaps and development of employee competence in carry out strategic programs corporate or Unit or Field programs.	0	0.00
Manajemen Menengah Middle Management			20	0,29			24	0.31
Manajemen Dasar Basic Management			123	1,82			254	3.27
Supervisor			562	8,32			1.503	19.37
Fungsional 1 Functional 1			0	0			0	0.00
Fungsional 2 Functional 2			3	0,04			5	0.06
Fungsional 3 Functional 3			40	0,59			49	0.63
Fungsional 4 Functional 4			291	4,30			260	3.35
Fungsional 5 Functional 5			2.781	41,17			2.992	38.55
Fungsional 6 Functional 6			2.933	43,42			2.674	34.45
TOTAL		**2.933**	**3.243**	**100**		**6.754**	**7.761**	**100**

Tabel Jenis, Tujuan dan Peserta Pelatihan Non-Teknik Tahun 2020-2021
Table of Types, Objectives, and Participants of Non-Engineering Training in 2020-2021

Level Jabatan Position Level	2020				2021			
	Jenis Pelatihan Types of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Jumlah Peserta	%	Jenis Pelatihan Types of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Peserta Number of partic-ipants	%
Manajemen Atas Top Management	NON-TEKNIK NON-ENGI-NEERING	Pemenuhan *gap* kompetensi dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menjalankan program-program strategis korporat maupun program Unit atau Bidang. Fulfillment of competency gaps and development of employee competence in executing strategic programs in the corporate or unit or field programs	12	0,31	NON-TEKNIK NON- EN-GINEERING	Pemenuhan *gap* kompetensi dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menjalankan program-program strategis korporat maupun program Unit atau Bidang. Fulfillment of competency gaps and development of employee competence in executing strategic programs in the corporate or unit or field programs	5	0.09
Manajemen Menengah Middle Management			219	5,58			166	2.83
Manajemen Dasar Basic Management			328	8,35			624	10.65
Supervisor			703	17,91			975	16.64
Fungsional 1 Functional 1			6	0,15			9	0.15
Fungsional 2 Functional 2			23	0,59			23	0.39
Fungsional 3 Functional 3			54	1,38			86	1.47
Fungsional 4 Functional 4			237	6,04			481	8.21
Fungsional 5 Functional 5			1746	44,47			2.722	46.44
Fungsional 6 Functional 6			610	15,54			770	13.14
TOTAL		**2.933**	**4.856**	**3.926**		**6.754**	**5.861**	**100**

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR COMPETENCY PROFILE AND DEVELOPMENT

Diklat Penjenjangan
Training for promotion

Diklat Penjenjangan merupakan diklat yang bersifat mandatory untuk diikuti oleh seluruh karyawan sebagai persyaratan kenaikan level atau penyetaraan level kompetensi dengan tanggung jawab pekerjaan. Hal tersebut berlaku bagi seluruh Anak Perusahaan yang telah meratifikasi sistem pembinaan karir dan kompetensi PT PLN (Persero) terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. *Executive Education* (EE)/*Supervisory Education* (SE), merupakan diklat bagi karyawan yang diproyeksikan menduduki jabatan struktural dengan persyaratan kebutuhan kompetensi jabatan di atas level kompetensinya, terdiri dari level SE-1 untuk *Level Supervisor*, EE-3 untuk *Level* Manajemen Dasar, EE-2 untuk *Level* Manajemen Menengah dan EE-1 untuk *Level Manajemen Atas.*
2. *Strategic Specialist Education* (SSE)/ *Strategic Specialist Education* (SPE), merupakan diklat bagi karyawan yang berada pada *grade* tertinggi pada suatu level kompetensi dan akan pindah level kompetensi di atasnya, atau ditujukan bagi karyawan yang akan menduduki jabatan fungsional dengan persyaratan kebutuhan kompetensi jabatan di atas *level* kompetensinya, terdiri dari Level SPE-1, SSE III sampai dengan Level SSE I.

Pada tahun 2021 terdapat pembaharuan mekanisme pada Diklat Penjenjangan jenis *Executive Education* dan *Supervisory Education* yaitu adanya tahapan *job exposure* yang merupakan pelaksanaan penugasan oleh peserta dalam lingkup tugas sesuai dengan jabatannya dengan persetujuan atasan langsung dan *Job Exposure* ini menjadi salah satu strategi untuk mengakselerasi pengembangan kapabilitas *leader*.

Training for promotion is mandatory training for the entire employees to participate in as requirements for promotion or equalization of competency level with job responsibilities. It applies to the entire Subsidiaries that have ratified the career and competency development system of PT PLN (Persero) consisting of 2 types, namely:

1. Executive Education (EE)/Supervisory Education (SE), is training for employees who are projected to occupy structural positions with job competency requirements above their competency level, consisting of SE-1 level for Supervisor Level, EE-3 for Basic Management Level, EE-2 for Middle Management Level, and EE-1 for Upper Management Level.
2. Strategic Specialist Education (SSE)/Strategic Specialist Education (SPE), is training for employees who are at the highest grade at a competency level and will move to a competency level above or is intended for employees who will occupy functional positions with competency requirements. positions above the competency level, consisting of SPE-1 Level, SSE III to SSE Level I.

In 2021, there was a renewal of the mechanism for Executive Education and Supervisory Education Leveling Education, namely the job exposure stage which is the implementation of assignments by participants within the scope of tasks following their positions with the approval of their direct superiors and Job Exposure is one of the strategies to accelerate the development of leadership capabilities.

Pendidikan Formal & *Scholarship*
Formal Education and Scholarship

Salah satu program pengembangan pendidikan formal kepada karyawan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kader sesuai dengan tuntutan perkembangan bisnis Perusahaan. Selama tahun 2021, untuk menjawab tantangan bisnis PT PJB ke depan melalui 5 (lima) pilar strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024 serta dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 maka diperlukan kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan aktif berinovasi dalam menjalankan peran masing-masing semaksimal mungkin demi terciptanya sinergi yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PJB menginisiasi pelaksanaan

One of the formal education development programs for employees is aimed at improving the competence of cadres following the demands of the Company's business development. In 2021, to answer PT PJB's business challenges going forward through 5 (five) strategic pillars as stipulated in the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024 and in facing the challenges of the Industrial Revolution 4.0, the readiness of human resources (HR) is required. quality and actively innovate in carrying out their respective roles as much as possible to create good synergy. In this regard, PJB initiated the implementation of employee competency development and management programs through the

program pengembangan dan pengelolaan kompetensi karyawan melalui penugasan karyawan PJB untuk mengikuti Program Pendidikan Formal Penugasan Khusus Jenjang S2 (Magister) yang bekerjasama dengan Universitas Airlangga (UNAIR) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

assignment of PJB employees to take part in the Master's Degree Special Assignment Formal Education Program in collaboration with Universitas Airlangga (UNAIR) and the Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) Surabaya.

Dengan adanya Program Pendidikan Formal Penugasan Khusus Jenjang Magister (S2) ini, diharapkan dapat:

1. Mendukung transformasi korporat dalam menghadapi tantangan baru Perusahaan menuju *beyond* KWH;
2. Menjawab tujuan dan tantangan strategis perusahaan sesuai yang tercantum dalam RJPP Tahun 2020 - 2024;
3. Meningkatkan kualitas, pengalaman (*soft competency*) dan *hard competency* Karyawan PJB mengacu pada standar akademisi praktis.

With this Masters (S2) Special Assignment Formal Education Program, it is hoped that:

1. Supporting the corporate transformation in facing the Company's new challenges beyond KWH;
2. Responding to the company's strategic goals and challenges as stated in the 2020-2024 Long-term Corporate Plan;
3. Improve the quality, experience (soft competency), and hard competency of PJB employees referring to engineering academic standards.

Adapun Program Pendidikan Formal Penugasan Khusus Jenjang Magister (S2) tahun 2021 dilakukan penugasan kepada 12 Karyawan PJB dengan rincian sebagai berikut:

While for the Formal Education Program Special Assignments for Master's Degree in 2021, assignments were made to 12 PJB employees with the following details:

No.	Lembaga Pendidikan Educational Institutions	Jurusan Major	Karyawan sebagai Peserta Employees as Participants
1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh November Institute of Technology	Magister (S2) Manajemen Teknologi konsentrasi Teknik Fisika (Teknologi Energi Terbarukan) Master of Technology Management majored in Engineering Physics (Renewable Energy Technology)	1 Orang 1 Person
2	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh November Institute of Technology	Magister (S2) Manajemen Teknologi konsentrasi Sistem Informasi Master of Management Technology Information Systems Major	1 Orang 1 Person
3	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh November Institute of Technology	Magister (S2) Manajemen Teknologi konsentrasi Analitika Bisnis Master of Technology Management majored in Business Analytics	1 Orang 1 Person
4	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh November Institute of Technology	Magister (S2) Manajemen Teknologi konsentrasi Teknik Fisika (Rekayasa Instrumentasi) Master of Technology Management majored in Engineering Physics (Instrumentation Engineering)	1 Orang 1 Person
5	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh November Institute of Technology	Magister (S2) Teknik Mesin Konsentrasi Manajemen Energi Master of Mechanical Engineering majored in Energy Management	1 Orang 1 Person
6	Universitas Airlangga Airlangga University	Magister (S2) Manajemen (Spesialisasi Keuangan) Master of Management (Finance Specialization)	2 Orang 2 Orang
7	Universitas Airlangga Airlangga University	Magister (S2) Manajemen Master of Management	2 Orang 2 Orang
8	Universitas Airlangga Airlangga University	Magister (S2) Psikologi Profesi Master of Professional Psychology	1 Orang 1 Person

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR COMPETENCY PROFILE AND DEVELOPMENT

No.	Lembaga Pendidikan Educational Institutions	Jurusan Major	Karyawan sebagai Peserta Employees as Participants
9	Universitas Airlangga Airlangga University	Magister (S2) Ilmu Hukum Master of in Law	1 Orang 1 Person
10	Universitas Airlangga Airlangga University	Magister (S2) Media dan Komunikasi Master of Media and Communication	1 Orang 1 Person

Disamping itu, PJB juga memberikan apresiasi kepada karyawan yang sedang menempuh pendidikan formal dalam bentuk skema restitusi atau penggantian biaya pendidikan yang telah dikeluarkan karyawan secara pribadi mengacu pada Perdir No.007/019/DIR/2019 tentang Program Pendidikan Formal dan Sertifikasi Profesi. Tahapan proses restitusi biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

Additionally, PJB also appreciates employees who are currently pursuing formal education in the form of a restitution scheme or reimbursement of education costs that have been personally incurred by employees referring to the Board of Directors Decree No. 007/019/DIR/2019 concerning Formal Education Programs and Professional Certification. The stages of the education fee restitution process are as follows:

1
Karyawan Mengirimkan Pengajuan Restitusi
Employees Send Restitution Proposal

2
Verifikasi Berkas Pengajuan Oleh Divisi Talenta
Verification of Proposal Document by the Talent Division

3
Penetapan Peserta Penerima Restitusi Oleh Direktur SDM Bagi Yang Sesuai Persyaratan
Determination of Recipient Participants Restitution by the HR Director for the Right Requirements

4
Restitusi Biaya Pendidikan
Restitution of Tuition Fees

Untuk tahun 2021 terdapat 8 karyawan yang mengajukan sebagai peserta calon penerima restitusi biaya pendidikan. Seluruh karyawan tersebut telah ditetapkan oleh DIRSDM sebagai penerima restitusi sesuai dengan syarat yang berlaku. Adapun daftar jurusan dari pengajuan karyawan penerima restitusi biaya pendidikan formal adalah sebagai berikut:

In 2021, 8 employees applied as candidates for recipients of education fee restitution. All of these employees have been designated by DIRSDM as recipients of restitution following applicable conditions. The list of majors from the submission of employees receiving formal education fee restitution is as follows:

No.	Jenjang Pendidikan Educational Level	Bidang Keahlian Areas of expertise	Universitas University
1	S2 Master's Degree	Magister Teknik Mesin Master of Mechanical Engineering	Universitas Diponegoro Diponegoro University
2	S2 Master's Degree	Magister Manajemen Lingkungan Master of Environmental Management	ITS
3	S2 Master's Degree	Manajemen Industri Master of Industrial Management	ITS
4	S2 Master's Degree	Teknik Kimia Master of Chemical Engineering	Universitas Indonesia University of Indonesia
5	S2 Master's Degree	Magister Manajemen Master of Management	UNAIR

Internship
Internship

Program *Internship* atau Magang di PJB ada 2 macam, pertama sebagai *reward* bagi peserta *scholarship* agar dapat mengembangkan diri sesuai tujuan PJB dalam membentuk SDM unggul dan yang kedua, diinisiasi oleh PJB sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Selama tahun 2021 telah dilakukan program *internship* yang diperuntukkan bagi karyawan di PLN Group yang berfokus pada percepatan bauran energi melalui pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS). Tujuan dari program magang ini diantaranya adalah:

- Memberikan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif tentang *end-to-end process project* PLTS;
- Menyiapkan ketrampilan karyawan melalui pengalaman pembelajaran bersama *expert*/mentor yang ditunjuk;
- Memberikan orientasi budaya, *social adaptation, agile learning* dan *network* di lokasi magang untuk diterapkan di unit asal peserta.

Adapun program magang yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu Program CENTER (*Interconnected Internship*). Program ini merupakan program magang yang mensinergikan dan memberdayakan seluruh *resource* di PLN Group sebagai upaya persiapan pengelolaan PLTS di wilayah kerja PLN Group. Prioritas peserta yang diikutkan terutama pernah memiliki pengalaman di bidang EBT. Sebanyak 10 orang yang terdiri dari 8 orang dari PT PLN (Persero) dan 2 orang dari PJB mengikuti serangkaian program selama 6 bulan pelaksanaan di PLTS Terapung Cirata dengan didampingi para *expert* dari PMSE (PJB Masdar Solar Energi).

There are 2 types of Internship Programs at PJB, firstly as a reward for scholarship participants so that they can develop themselves according to PJB's goals in forming superior human resources; and secondly, initiated by PJB based on the needs of the Company. In 2021, an internship program has been carried out for employees at the PLN Group which focuses on accelerating the energy mix through the installation of Solar Power Plants (SPP). The objectives of this internship program include:

- Provide comprehensive knowledge and understanding of the end-to-end process of PV mini-grid projects;
- Prepare employee skills through learning experiences with appointed experts/mentors;
- Provide cultural orientation, social adaptation, agile learning, and networking at the internship location to be applied in the participant's home unit

The internship program carried out in 2021 is the CENTER (Interconnected Internship) Program. This program is an internship program that synergizes and empowers all resources in the PLN Group as an effort to prepare for the SPP management in the work area of the PLN Group. The priority of participants who are included is especially those who have experience in the NRE field. A total of 10 persons consisting of 8 persons from PT PLN (Persero) and 2 persons from PJB participated in a series of programs for 6 months of implementation at the Cirata Floating PV accompanied by experts from PMSE (PJB Masdar Solar Energi).

Benchmarking
Benchmarking

Program *bencmarking* merupakan upaya PJB dalam menduplikasi dan menerapkan keunggulan perusahaan yang menjadi tujuan *benchmark* agar dapat diimplementasikan, telah dilakukan baik di dalam maupun ke luar negeri. Program *benchmarking* dilaksanakan dengan visitasi langsung ke perusahaan terkait agar mendapat *experience* secara langsung untuk kemudian dapat diimplementasikan prakteknya di PJB. Pada tahun 2021, kegiatan *benchmarking* ini terkendala adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan belum dapat dilaksanakan secara offline. Berdasarkan hasil evaluasi, program *Benchmarking* tidak dapat berjalan efektif jika dilaksanakan secara *online*.

The benchmarking program is PJB's effort in duplicating and implementing the company's advantages which are the benchmark objectives so that they can be implemented, both at home and abroad. The benchmarking program is carried out by direct visits to related companies to get hands-on experience so that the practice can then be implemented at PJB. In 2021, this benchmarking activity was constrained by the Covid-19 pandemic, which prevented it from being carried out offline. Based on the evaluation results, the Benchmarking program cannot run effectively if it is carried out online.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR COMPETENCY PROFILE AND DEVELOPMENT

Program Sertifikasi
Certification Program

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Unit maupun Korporat terkait isu keinsinyuran yang berkembang dewasa ini sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang menyebutkan bahwa bagi pekerja di bidang pembangkit wajib memiliki sertifikasi, jika tidak maka dianggap sebagai kegiatan malpraktek. Untuk itulah, PJB Academy menjalin kerjasama dengan UGM untuk melakukan pendampingan dan sertifikasi keinsinyuran bagi karyawan PJB di bidang teknik agar dapat diakui sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

In order to meet the needs of Units and Corporates related to today's engineering issues related to Law Number 11 of 2014 concerning Engineering states that workers in the power plant sector are required to have certification, otherwise it is considered a malpractice activity. For this reason, PJB Academy collaborates with UGM to provide engineering assistance and certification for PJB employees in the engineering field so that they can be recognized as members of the Indonesian Engineers Association (PII).

Selain itu, terdapat sertifikasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) yang diwajibkan oleh pemerintah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan. Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan tersebut, PJB Academy juga telah melakukan sertifikasi bagi seluruh karyawan di bidang teknik mengacu pada Permen ESDM Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Additionally, there is a certification from the Directorate General of Electricity (DJK) which is required by the government as a company engaged in the electricity business sector. As a form of commitment and compliance, PJB Academy has also certified all employees in the field of engineering, referring to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 46 of 2017 concerning Standardization of Competence for Electrical Engineering Personnel.

Sertifikasi merupakan pengakuan terhadap kompetensi seorang profesional yang telah memenuhi standar profesi pada bidangnya masing-masing. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri pembangkitan serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan kelistrikan, melakukan sertifikasi kepada karyawannya guna menjaga standar kompetensi yang dimiliki dalam bekerja.

Certification is an acknowledgment of the competence of a professional who has met professional standards in their respective fields. As a company engaged in the generation industry as well as providing electricity operation and maintenance services, it certifies its employees to maintain competency standards at work.

Selama tahun 2021, PJB melakukan sertifikasi (Teknik) karyawan sebanyak 1.421 karyawan, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebanyak 1.223 karyawan. Hal ini disebabkan oleh perubahan pada metode sertifikasi yang awalnya *full* tatap muka (*offline*) menjadi *online* maupun *blended* sehingga proses sertifikasi dapat dilaksanakan kembali oleh Internal PJB sendiri maupun oleh pihak ketiga yang kompeten dalam menyelenggarakan sertifikasi sebagai upaya pemenuhan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah maupun PT PLN (Persero).

In 2021, PJB certified (Engineering) employees for 1,421 employees, an increase compared to 2020 of 1,223 employees. This is due to a change in the certification method, which was previously face-to-face (offline) to online or blended so that the certification process can be re-implemented by PJB Internals themselves or by third parties who are competent in conducting certification as an effort to fulfill regulations determined by the government and PT PLN (Persero).

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Tahun 2019 - 2021
Table of Implementation of Competency Certification for Electrical Engineering Personnel in 2019 - 2021

Jenis Sertifikasi Types of Certification	Jumlah yang Disertifikasi Total Certifications		
	2019	2020	2021
Core Competence			
Sertifikasi PMK (Kelas B, C & D) PMK Certification (Class B, C & D)	74	53	180
Sertifikasi K3 (Listrik, Umum, Kimia, Ketinggian, Ruang Terbatas) HSE Certification (Electrical, Basic, Chemical, Altitude, Confined Space)	108	110	227
Sertifikasi *Operator Boiler* Boiler Operator Certification	23	0	19
Supporting Competence			
Sertifikasi *Process Safety* Sertifikasi Process Safety			
Process Safety Certification Management (PSM)	0	0	0
Sertifikasi Manajemen Pelatihan - BNSP Training Management Certification - BNSP	0	0	31
Sertifikasi *Training for Trainer* Certification Training for Trainers	17	0	103
CHRPE	0	0	0
Sertifikasi Auditor SMK3 OHSMS Auditor Certification	0	43	40

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Tahun 2019-2021
Table of Competency Certification for Electricity Engineering Personnel in 2019-2021

Program Sertifikasi Kompetensi Competency Certification Program	Ukuran Unit	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi Realization	Capaian Achievements	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievements	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievements
Sertifikasi DJK **DJK Certification**	Jumlah Pegawai Number of Employees	1530	1157	75,62%	521	228	43,76 %	444	251	56.53%

Pada tahun 2021, Realisasi Program Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan mencapai 56,53% dibandingkan target 2021. Pencapaian ini di bawah target 2021 karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaksanaan sertifikasi tatap muka untuk Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivas pelatihan, PJB secara berkala melaksanakan *assessment Human Capital Readiness* (HCR) pada tahun 2021 tercapai target *Maturity Level Index* (MLI) sebesar 4,56 meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 4,51 dengan target *Key Performance Indicator* (KPI) sebesar 5,00.

In 2021, the realization of the Electricity Engineering Competency Certification Program reached 56.53% compared to the 2021 target. This achievement is below 2021's target due to the Covid-19 pandemic which has caused the implementation of face-to-face certification for Electrical Engineering Competency Certification cannot be carried out.

In addition to increasing the effectiveness of training, PJB periodically conducts a Human Capital Readiness (HCR) assessment in 2021, and the Maturity Level Index (MLI) target of 4.56 is achieved, an increase compared to the previous year's realization of 4.51 with the Key Performance Indicator target (KPI) of 5.00.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR COMPETENCY PROFILE AND DEVELOPMENT

Program *Knowledge Sharing Forum* (KFS)
Program Knowledge Sharing Forum (KFS)

Perbandingan target dan realisasi untuk Program *Knowledge Sharing Forum* (KSF) dalam 3 tahun terakhir adalah:

The comparison of targets and realizations for the Knowledge Sharing Forum (KSF) Program in the last 3 years are as follows.

	2019	2020	2021
Target	525	692	448
Realisasi Realization	829	933	495

BAIK
Good

Program *Community of Practices* (COP)
Community of Practices Program

Perbandingan target dan realisasi Program *Community of Practices* (COP) dalam 3 tahun terakhir adalah:

The comparison of targets and realization of the Community of Practices (COP) Program in the last 3 years are as follows.

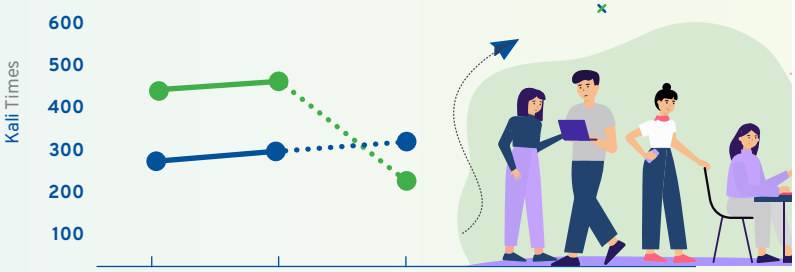

	2019	2020	2021
Target	490	218	159
Realisasi Realization	310	333	189

BAIK
Good

Sejak tahun 2021 untuk kegiatan KSF dan COP mulai diberlakukan SME *based knowledge management*, sehingga perencanaan dan materi *sharing* divalidasi oleh SME berdasarkan *need* dan *gap* dari masing-masing Unit dan jumlah *sharing* dibatasi sesuai perencanaan.

Since 2021, in the KSF and COP activities, SME-based knowledge management has been implemented; therefore, planning and sharing materials are validated by SMEs based on the needs and gaps of each unit and the number of sharing is limited according to the plan.

Program Dokumen *Expert* Teknik
Technical Expert Document Program

Perbandingan target dan realisasi Program Dokumen *Expert* Teknik dalam 3 tahun terakhir adalah:

Comparison of targets and realization of the Technical Expert Document Program in the last 3 years are as follows.

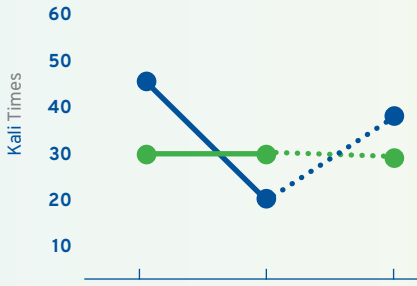

	2019	2020	2021
Target	30	30	36
Realisasi Realization	26	36	64

BAIK
Good

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Evaluation of Competency Development Implementation

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan produktifitas karyawan, PJB senantiasa melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran secara berkesinambungan guna mendapatkan tanggapan, masukan dan penyempurnaan, antara lain terkait aspek-aspek berikut:

1. Penambahan kompetensi baru pada karyawan dalam waktu yang singkat melalui penugasan khusus tanpa melepas jabatan melalui SIGAP (*Special Assignment Program*).
2. Penguatan kompetensi menyasar kompetensi baru yaitu tentang *business strategic*, diantaranya adalah kompetensi yang dibutuhkan dalam *enterpreneurship for emerging business* dan *skill marketing for business Beyod* kwh.
3. Penguatan kompetensi keahlian / Expertise untuk membina dan mengembangkan karyawan yang berkompetensi tinggi serta profesional sebagai salah satu solusi bisnis Perusahaan untuk mencapai sasaran strategis.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM untuk mendukung transformasi PJB secara berkelanjutan melalui penguatan kompetensi bisnis bekerja sama dengan pihak eksternal.
5. Penguatan *leadership* secara berjenjang melalui model pembelajaran yang berfokus pada praktek dengan skema *role played*, grup diskusi, pembelajaran interaktif dan sebagainya.
6. Membangun *digital mindset* melalui *digital culture* untuk menghadapi era disrupsi teknologi melalui pembelajaran *digital* dalam bentuk berbagai materi interaktif, *web confrence*, ujian *online* dan sebagainya.

In order to improve the effectiveness and productivity of employees, PJB evaluates learning activities continuously to receive feedback, inputs, and improvements, including those related to the following aspects:

1. Adding new competencies to employees in a short time through special assignments without leaving positions through SIGAP (Special Assignment Program).
2. Strengthening competencies targeting new competencies, namely strategic business, including the competencies needed in entrepreneurship for emerging businesses and marketing skills for business Beyod kWh.
3. Strengthening the competence of expertise to foster and develop highly competent and professional employees as one of the Company's business solutions to achieve strategic goals.
4. Increasing the capacity and capability of HR to support PJB's transformation sustainably through strengthening business competencies in collaboration with external parties.
5. Strengthening leadership in stages through learning models that focus on practice with role-played schemes, discussion groups, interactive learning, and so on.
6. Building a digital mindset through a digital culture to face the era of technological disruption through digital learning in the form of various interactive materials, web conferences, online exams, and so on.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM
HR COMPETENCY PROFILE AND DEVELOPMENT

Rencana Pengembangan Karyawan Tahun 2022
Employee Development Plan for 2022

Pada tahun 2022, PJB merencanakan kegiatan pengembangan dan pembelajaran karyawan sebagai berikut:

PJB has planned employee development and learning activities for 2022 as follows:

Jenis Pembelajaran Types of Learning		Rencana 2022 Plan for 2022	
		Jumlah *Batch* Number of Batches	Jumlah Peserta Number of participants
Pelatihan Training	Teknik Engineering	247	4.618
	Non-Teknik Non-Engineering	202	3.350
Sertifikasi Certification	Teknik Engineering	114	1.757
	Non-Teknik Non-Engineering	48	669
Workshop	Teknik Engineering	57	57
	Non-Teknik Non-Engineering	57	57
PGD (*Peer Group Discussion*)	Teknik Engineering	12	120
	Non-Teknik Non-Engineering	6	60
Total		**743**	**10.688**

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE SHAREHOLDERS

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on the Majority and Controlling Shareholders

Pemegang saham PJB yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan YPK PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali PJB. Direktur Utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali, dimana secara teknis hubungan dengan pemegang saham berada di bawah Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) Fungsi Hubungan Investor.

PJB shareholders are PT PLN (Persero) with 99.99% share ownership and PLN Education and Welfare Foundation (YPK) with 0.01% share ownership. PT PLN (Persero) is the majority and controlling shareholder of PJB. President Director of PT PLN (Persero) is the representation of the majority and controlling shareholders, and technically the relationship with the shareholders is under the Corporate Secretary of PT PLN (Persero) of Investor Relations function.

Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait dengan (a) Rincian 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya, (b) nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham maupun kelompok pemegang saham masyarakat yang kurang dari 5%.

Therefore, there are no information related to (a) Details of the 20 largest shareholders and their ownership percentage, (b) names of shareholders with 5% or more shares, or public less than 5%.

Komposisi Pemegang Saham
The Shareholders Composition

Skema komposisi pemegang saham PJB, termasuk pemegang saham utama dan pengendali adalah sebagai berikut:

The composition scheme of PJB shareholders, including the majority and controlling shareholder is as follows:

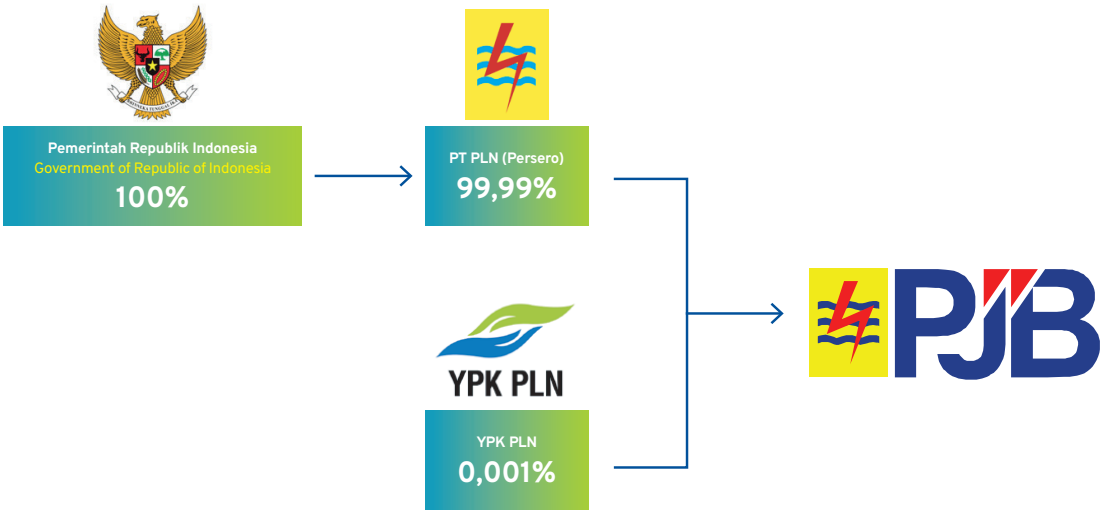

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE SHAREHOLDERS

Berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar, modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah) terbagi dalam 24.000.000.000 saham, terdiri atas 1 Saham Seri 1 dan 23.999.999.999 Saham Seri 2, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah).

Modal tersebut telah ditempatkan dengan komposisi sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 5.999.999.998 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp2.999.999.999.500,- (dua triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah).

Based on article 4 of the Company's Articles of Association, the Company's authorized capital is set at Rp12.000.000.000.000 (twelve trillion Rupiah) divided into 24.000.000.000 shares, consisting of 1 Series-1 Share and 23.999.999.999 Series-2 Shares, each share has the nominal value of Rp500 (five hundred Rupiah).

The capital has been set with the following composition:

1. PT PLN (Persero) has 1 Series-1 Share and 5.999.999.998 Series-2 Shares with nominal value of Rp2.999.999.999.500, - (two trillion nine hundred nine billion nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand five hundred Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) has 1 Series-2 Share with the nominal value of Rp500 (five hundred Rupiah).

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Share Ownership by the Board of Directors and the Board of Commissioners

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PJB tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.

The entire PJB Board of Directors and Board of Commissioners do not own any shares either directly or indirectly in the Company.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS PATUNGAN
CORPORATE GROUP STRUCTURE, SUBSIDIARIES, AND JOINT VENTURE

PJB terus memperluas kontribusi dan peran aktif dalam industri ketenagalistrikan nasional melalui pengembangan beragam proyek pembangkit unggulan di Indonesia.

PJB continues to expand its constributions and actively participates in the national electricity industry through the development of various leading power plant projects in Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2021, PJB telah memiliki **5** (lima) Entitas Anak, **4** (empat) Cucu-Cicit Perusahaan, **4** (empat) Entitas Asosiasi dan memiliki **6** (enam) Entitas Patungan (*Joint Venture Company*/JVC) dengan kepemilikan saham oleh Anak Perusahaan.

Up to the end of 2021, PJB has owned **5** (five) Subsidiaries, **4** (four) Second-Tier Subsidiaries, **4** (four) Associated Entities, and **6** (six) Joint Venture Companies with the shares owned by the Subsidiaries.

Entitas Anak adalah suatu perusahaan yang dikendalikan oleh PJB, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasionalnya untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut.

Subsidiary Entities are companies controlled by PJB and have the authority to manage financial policies and operational to gain benefits from those entities' activity.

Entitas Asosiasi adalah suatu entitas dimana PJB dan entitas anak mempunyai pengaruh yang signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Associated Entities are entities in which PJB and its Subsidiaries have significant influence. These entities are not subsidiary entities or the part of joint venture companies. "Significant Influence" definition is the authority to participate in making decision on financial policy and investee operational, but having any control over the policy.

Entitas Patungan (*Joint Venture Company*/JVC) merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi, dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada Entitas Patungan, keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Joint Venture Company (JVC) is companies having shares of participation and is governed by an agreement to share control over an activity. In a Joint Venture, strategic financial and operational decisions related to its activities are required by consensus from all parties who share control.

Adapun struktur grup PJB beserta Entitas Anak dan Entitas Asosiasi pada tahun 2021 dapat digambarkan pada skema gambar di bawah ini:

The structure of the PJB group along with its Subsidiaries and Associates in 2021 can be illustrated in the below schematic pictures:

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
CORPORATE GROUP STRUCTURE

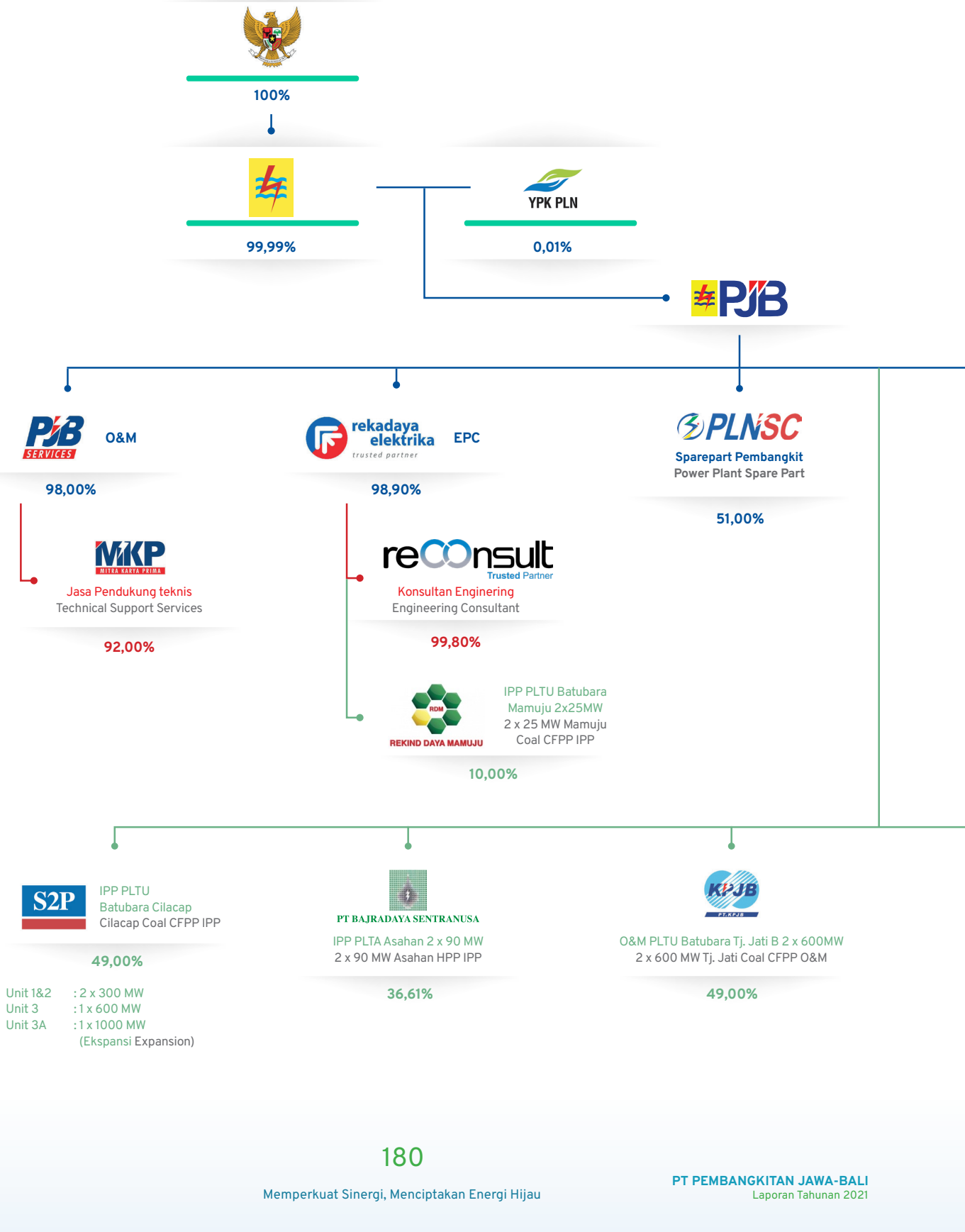

5 Anak Perusahaan
Subsidiary

PT PJBS	: PT PJB Services
PT RE	: PT Rekadaya Elektrika
PT PLNSC	: PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang
PT NII	: PT Navigat Innovative Indonesia
PT PJBI	: PT PJB Investasi

4 Perusahaan Asosiasi
Associated Entity

PT MKP	: PT Mitra Karya Prima
PT REC	: PT Rekadaya Elektrika Consult
PT PJB Investindo	: PT Pembangkit Jawa Bali Investindo
PT PJBIC	: PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata

10 Cucu-Cicit Perusahaan
Second to Third-Tier Subsidiary

PT KPJB	: PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	PT SGPJB	: PT Shen Hua Guo Hua PJB
PT S2P	: PT Sumber Segara Primadaya	PT GHTPJB	: PT Guo Hua Taidian PJB
PT BPI	: PT Bukti Pembangkit Innovative	PT NSHE	: PT North Sumatera Hulu Energi
PT BDSN	: PT Bajradaya Sentranusa	PT SSPewali	: PT Sumbagselenergi Sakti Pewali
PT RDM	: PT Rekind Daya Mamuju	PT PJB Masdar Solar Energi	

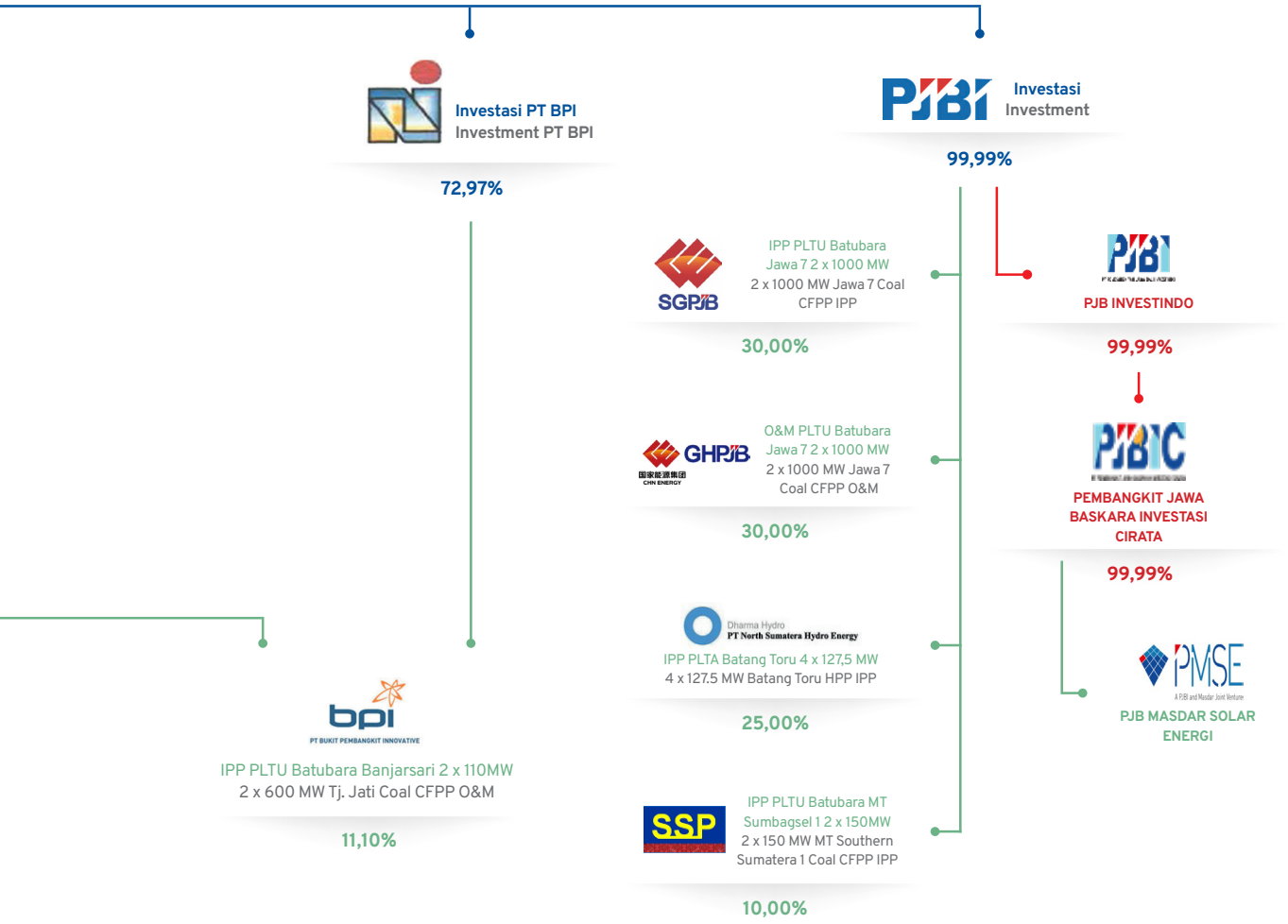

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
CORPORATE GROUP STRUCTURE

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
List of Subsidiary Entities and/or Associated Entities

Berikut adalah daftar Entitas Anak, Cucu Perusahaan, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Patungan PJB sampai dengan akhir tahun 2021:

The following is the list of PJB's Subsidiary Entities, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Venture Companies as of the end of 2021:

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Perusahaan Operation Status of the Company	Kepemilikan Saham PJB PJB Shares Ownership		Bidang Usaha Business Lines
				Penyertaan Modal Capital Investment	*Share*	
ENTITAS ANAK SUBSIDIARY ENTITIES						
1.	PT Rekadaya Elektrika	20 Oktober 2000 October 20, 2000	Beroperasi Operating	Rp710,7 miliar Rp.710,7 billion	98,90%	Jasa *Engineering Procurement Construction* (EPC) EPC Services
2.	PT PJB Services	30 Maret 2001 March 30,2001	Beroperasi Operating	Rp102,9 miliar Rp102,9 billion	98,00%	Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) O&M Services
3.	PT Prima Layanan Suku Cadang (PLN SC)	16 Juni 2017 June 16, 2017	Beroperasi Operating	Rp76,5 miliar Rp76,5 billion	51,00%	Penyediaan suku cadang pembangkit Power Plant Spare Part Provision
4.	PT Navigat Innovative Indonesia	21 Oktober 2002 October 21, 2002	Beroperasi Operating	Rp99,8 miliar Rp99,8 billion	72,97%	Investasi pada pembangkit *Independent Power Producer* (IPP) Investment on IPP Power Plant
5.	PT PJB Investasi	18 Desember 2015 December 18, 2015	Beroperasi Operating	Rp4.388 miliar Rp4.388 billion	99,99%	Investasi pada pembangkit *Independent Power Producer* (IPP) IInvestment on IPP Power Plant
CUCU PERUSAHAAN SECOND-TIER SUBSIDIARIES						
1.	PT Mitra Karya Prima	23 September 2004 September 23, 2004	Beroperasi Operating	Rp2,5 miliar Rp2,5 billion	92,00%	Penyediaan SDM untuk O&M Human capital provision for O&M
2.	PT Rekadaya Elektrika Consult	13 April 2010 April 13, 2010	Beroperasi Operating	Rp9,9 miliar Rp9,9 billion	99,80%	Jasa konsultansi bidang teknik, disain, manajemen SDM, studi perencanaan dan konstruksi Consultation Services in engineering, design, Human Capital management, planning studies and construction
3.	PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp23,9 miliar Rp23,9 billion	99,99%	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik Human Capital Competency Certification in Electricity Sector
4.	PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp23,9 miliar Rp23,9 billion	99,99%	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik Financing in the form of capital investment and electricity procurement business

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Perusahaan Operation Status of the Company	Kepemilikan Saham PJB PJB Shares Ownership		Bidang Usaha Business Lines
				Penyertaan Modal Capital Investment	*Share*	
ENTITAS ASOSIASI ASSOCIATED ENTITIES						
1.	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	30 September 2010 September 30, 2010	Beroperasi Operating	Rp11,1 miliar Rp11,1 billion	49,00%	Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) PLTU Tanjung Jati B Unit 3-4 (2x660 MW O&M Service of Tanjung Jati CFPP Unit 3-4 (2x660 MW)
2.	PT Sumber Segara Primadaya	12 Mei 2003 May 12, 2003	Beroperasi Operating	Rp437,5 miliar Rp437,5 billion	49,00%	*Independent Power Producer* (IPP) PLTU Cilacap Unit 1,2,3, Expansi Unit 4 Independent Power Producer (IPP) of Cilacap CFPP Unit 1,2,3, Expansion of Unit 4
3.	PT Bukti Pembangkit Innovative	28 Agustus 2006 August 28, 2006	Beroperasi Operating	Rp332,1 miliar Rp332,1 billion	29,15%	*Independent Power Producer* (IPP) PLTU Banjarsari Unit 1-2 (2x110 MW) Power Producer (IPP) of CFPP Banjarsari CFPP Unit 1-2 (2x110MW)
4.	PT Bajradaya Sentranusa	30 Oktober 1995 October 30, 1995	Beroperasi Operating	Rp388,5 miliar Rp388,5 billion	36,61%	*Independent Power Producer* (IPP) PLTA Asahan 1 (2x90 MW) Independent Pwer Producer (IPP) of Asahan HPP 1 (2x90MW)
ENTITAS PATUNGAN (*JOINT VENTURE COMPANY*/JVC) JOINT VENTURE COMPANY						
1.	PT Rekind Daya Mamuju	21 Februari 2013 February 21, 2013	Beroperasi Operating	Rp24,6 miliar Rp24,6 billion	10,0%	Pembangkitan Tenaga Listrik Power Plants
2.	PT Shenhua Guo Hua PJB	13 Januari 2016 January 13, 2016	Beroperasi Operating	Rp1.563,8 miliar Rp1.563,8 billion	30,00%	Pembangkit PLTU Jawa 7 (2x1000 MW) Java CFPP 7 (2x1000MW)
3.	PT Guo Hua Taidian PJB	23 September 2016 September 23, 2016	Beroperasi Operating	Rp1,95 miliar Rp1,95 billion	30,00%	Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listik PLTU Jawa 7 (2x1000 MW) Power Plant O&M Service of Jawa 7 CFPP (2x1000MW)
4.	PT North Sumatera Hulu Energy	30 April 2008 April 30, 2008	Tahap Konstruksi In Construction	USD76.330.820 USD76,330,820	25,00%	Pembangkit PLTA Batang Toru (3x125) MW Batang Toru HPP (3x125MW)
5.	PT Sumbagselenergi Sakti Pewali	6 Juni 2018 June 6, 2018	Tahap Konstruksi In Construction	Rp13,97 miliar Rp13,97 billion	10,00 %	Pembangkit PLTU MT Sumbagsel 1 (2x150 MW) Southern Sumatera CFPP MT 1 (2x150MW)
6.	PT PJB Masdar Solar Energy	7 Juli 2020 July 7, 2020	Seleksi EPC Kontraktor Contractor EPC Selection	Rp23,7 miliar Rp23,7 billion	51,00%	Pembangkit PLTS Terapung Cirata 145 MW Cirata Floating PV 145 MW

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

PJB SERVICES

Anak Perusahaan dengan pendapatan usaha tertinggi sebesar

Rp1.712,74 miliar

Subsidiary with the highest operating revenues of Rp1.712,74 billion

PJBI

Anak Perusahaan dengan aset terbesar mencapai

Rp6.463,41 miliar

membukukan *profit* tertinggi sebesar

Rp799,99 miliar

Subsidiary with the largest assets reached Rp6,463.41 billion and recorded the highest profit of Rp799.99 billion.

Anak Perusahaan
Subsidiaries

PT PJB SERVICES (PJBS)

Profil Perusahaan
PJBS bergerak di bidang penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, pengadaan peralatan ketenagalistrikan, dan pembangunan atau pemasangan peralatan energi listrik. PJBS didirikan pada tanggal 30 Maret 2001 dengan kepemilikan saham PJB sebesar 98% dan Yayasan Kesejahteraan PJB sebesar 2%.

Company Profile
PJBS is engaged in providing power plant operation and maintenance services, procurement of electrical equipment, and construction or installation of electrical energy equipment. PJBS was established on March 30, 2001, with PJB share ownership of 98% and Yayasan Kesejahteraan PJB 2%.

Alamat Address
Kantor Pusat Head Office
Jl. Raya Juanda No. 17 Sidoarjo 61253

Kantor Perwakilan Representative Office
Jl. Tebet Utara VI 6A, Tebet Timur, Jakarta Selatan 12810
: Info@pjbservices.com
: www.pjbservices.com

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	**Supangkat Iwan Santoso**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Komisaris Commissioner	**Retno Handayani**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Komisaris Commissioner	**Supriyadi**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Komisaris Commissioner	**I Nyoman Ngurah Widiyatnya**	10 September 2021 - 10 September 2024 September 10, 2021 - September 10, 2024

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Teguh Widjajanto**	1 Juli 2021 - 1 Juli 2024 July 1, 2021 to July 1, 2024
Direktur Perencanaan dan Pemasaran Director of Planning and Marketing	**I Nyoman Awatara**	10 September 2021 - 10 September 2024 September 10, 2021 to September 10, 2024

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Keuangan Director of Finance	**Rudy Hertanto**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Direktur Proyek Director of Project	**Hery Artady**	2 Januari 2021 - 1 Maret 2022 January 2, 2021 - March 1, 2022
Direktur Operation & Maintenance Director of Operations & Maintenance	**Purwono Jati Agung**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Direktur Human Capital Director of Human Capital	**Muhammad Bardan**	1 Mei 2021 - 5 Mei 2024 May 5, 2021 - May 5, 2024

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp miliar)
Financial Performance 2019-2021 (Rp billion)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	1.167,68	1.356,27	1.358,50
Pendapatan Usaha Operating Revenues	1.768,82	1.712,74	1.853,80
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	134,68	120,98	123,86

PT Rekadaya Elektrika (RE)

Profil Perusahaan
RE bergerak di bidang *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) sektor ketenagalistrikan yang melaksanakan pembangunan pembangkitan, serta fasilitas transmisi dan distribusi. RE berdiri sejak 20 Oktober 2000 dengan nama PT Delta Rekadaya Mandiri yang kemudian berganti nama menjadi PT Rekadaya Elektrika setelah PJB masuk sebagai pemegang saham pada 20 Desember 2002. Kepemilikan Saham RE adalah PJB sebesar 98,90%; PT Rekayasa Industri sebesar 1,04% dan YPK PLN sebesar 0,05%.

Company Profile
RE is engaged in Engineering, Procurement, and Construction (EPC) in the electricity sector that is performing power plants construction, as well as transmission and distribution facilities. RE was established on October 20, 2000, under the name PT Delta Rekadaya Mandiri which later changed its name to PT Rekadaya Elektrika after PJB turned shareholder on December 20, 2002. RE's share ownership is PJB of 98,90%; PT Rekayasa Industri is 1,04% and YPK PLN is 0,05%.

Kantor Pusat Head Office
Gedung 18 Office Park, Jl. TB Simatupang No.18, RT.2/RW.1, Kebagusan, Kec. Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
: (62-21) 2787 1818
: rekadaya@rekadaya.com
: www.rekadaya.co.id

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	**Alfath Cordea Imalutha**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Komisaris Commissioner	**Judi Rahmanu**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Komisaris Commissioner	**Ahmad Bustami**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Jonner MP Pardosi**	1 Juli 2021 - 1 Juli 2024 July 1, 2021 - July 1, 2024
Direktur Bisnis 1 Director of Business 1	**Indrayoga Suharto**	1 Juli 2021 - 1 Juli 2024 July 1, 2021 - July 1, 2024
Direktur Keuangan, SDM & Umum Director of HC & General	**Onny Afrizal**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Direktur Bisnis 2 Director of Business 2	**Nur Hidayat**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Director of Marketing and Business Development	**Vernon Sapalatua Tampubolon**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp miliar)
Financial Performance 2019-2021 (Rp billion)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	2.135,09	1.861,00	1.403,09
Pendapatan Usaha Operating Revenues	1.705,70	840,02	869,64
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	49,34	8,95	2,16

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

PT Navigat Innovate Indonesia (NII)

Profil Perusahaan
NII bergerak di bidang perdagangan, konstruksi dan pertambangan. NII didirikan pada 21 Oktober 2002 dan PJB masuk menjadi pemegang saham NII sejak 13 Januari 2012. Kegiatan usaha NII saat ini berupa penyertaan saham sebesar 11,10% di PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) sebagai pengembang IPP PLTU Banjarsari 2x110 MW serta pengembangan beberapa proyek pembangkit di wilayah Sumatera. Kepemilikan Saham NII oleh PJB sebesar 72,98%; Moh. Soleh Thamrin sebesar 13,51% dan Sri Andini sebesar 13,51%.

Company Profile
NII is engaged in trading, construction, and mining. NII was established on October 21, 2002, and PJB has become NII shareholder since January 13, 2012. Currently, NII business activities are in the form of 11,10% interest in PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) as the developer of Banjarsari IPP CFPP 2x110 MW as well as the development of several projects power plant in Sumatera. PJB's share ownership of NII is 72,98%, Moh. Soleh Thamrin at 13,51%, and Sri Andini at 13,51%.

Alamat Address
Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231
: (031) 8283180 ext 540,
: (031) 8283183

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Commissioner	**Yama Bellatrixiana**	1 Januari 2020 s.d. Ditetapkan Pejabat Definitif January 1, 2020- Determined by Definitive Officer
Komisaris Commissioner	**M. Soleh Thamrin**	1 Januari 2020 s.d. 1 Januari 2023 January 1, 2020 to January 1, 2023

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Kuswati**	1 Januari 2020 s.d Ditetapkan Pejabat Definitif January 1, 2020- Determined by Definitive Officer
Direktur Director	**Sri Andini**	1 Januari 2020 s.d. 1 Januari 2023 January 1, 2020 to January 1, 2023

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp miliar)
Financial Performance 2019-2021 (Rp billion)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	304,64	356,78	394,82
Pendapatan Usaha Operating Revenues	22,76	37,81	17,09
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	17,00	29,49	17,09

PT PJB Investasi (PJBI)

Profil Perusahaan
PJBI merupakan anak perusahaan PJB yang berfokus pada investasi di bidang pembangkit tenaga listrik, fasilitas pembangkit tenaga listrik, OM pembangkit dan usaha penunjang pembangkit tenaga listrik, pembuatan dan peralatan ketenagalistrikan, penyediaan energi primer dan transportasinya, serta perdagangan peralatan pembangkit listrik. PJBI didirikan pada tanggal 18 Desember 2015 dengan persentase kepemilikan PJB sebesar 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan PJB sebesar 0,01%.

Company Profile
PJBI is PJB subsidiary focusing on investment in power plant, power plant facilities, OM power plant and power plant supporting businesses, electricity manufacturing and equipment, primary energy supply and transportation, and trading of power plant equipment. PJBI was established on December 18, 2015, with a PJB ownership of 99,99% and Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan PJB of 0,01%.

Kantor Pusat Head Office
Menara Bidakara-2 Lt. 8
Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta Selatan, 12870
: (021) 837 08760
: (021) 837 08761
: info@pjbinvest.com
: www.pjbinvest.com

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	**Eni Wulansari**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Komisaris Commissioner	**Teguh Widhi Harsono**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Amir Faisal**	1 Mei 2021 - 5 Mei 2024 May 5, 2021 - May 5, 2024
Direktur Operasi Operations Director	**Wirawan**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Direktur Keuangan Director of Finance	**Ponti Silitonga**	1 Mei 2021 - 5 Mei 2024 May 5, 2021 - May 5, 2024

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp miliar)
Financial Performance 2019-2021 (Rp billion)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	4.559,45	5.196,28	6.483,41
Pendapatan Usaha Operating Revenues	170,99	389,41	708,28
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	125,14	444,44	799,99

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)

Profil Perusahaan
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC) merupakan anak perusahaan PJB yang bergerak di bidang Penyediaan spareparts pembangkit dari pabrikan, *reverse engineering*, standarisasi dan *product catalogue database*. PLN SC didirikan pada tanggal 16 Juni 2017 dengan persentase kepemilikan saham PJB sebesar 51% dan PT Indonesia Power sebesar 49%.

Company Profile
PT Prima Jasa Niaga Suku Cadang (PLN SC) is a PJB subsidiary that is engaged in the supply of power plant spare parts from manufacturers, reverse engineering standardization, and product catalog database. PLN SC was established on June 16, 2017, with PJB ownership of 51% and PT Indonesia Power of 49%.

Kantor Pusat Head Office
Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
: corsec@plnsc.co.id
: www.plnsc.co.id

Kantor Perwakilan Kantor Perwakilan
Recapital Building, 3rd Floor Jl Adityawarman No. 55, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160
: (021) 8370-8760/62
: (021) 8370-8761

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	**Yohanes Sukrilismono**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Komisaris Commissioner	**Miftahul Huda**	2 Januari 2021 - 1 Maret 2022 January 2, 2021 - March 1, 2022

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Thommi Haposan**	1 November 2021 - 1 November 2024 November 1, 2021 - November 1, 2024
Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	**Deni Susanto**	2 Januari 2021 - 1 Maret 2022 January 2, 2021 - March 1, 2022
Direktur Enjinering & Layanan Director of Engineering & Service	**Andy Adam**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp miliar)
Financial Performance 2019-2021 (Rp billion)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	282,85	426,41	293,23
Pendapatan Usaha Operating Revenues	413,82	356,52	261,84
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	17,23	34,64	11,66

Cucu Perusahaan
Cucu Perusahaan

PT Mitra Karya Prima (MKP)

Profil Perusahaan
MKP merupakan anak perusahaan PJBS yang bergerak di bidang penyediaan Tenaga Kerja atau SDM untuk *Operation & Maintenance* (O&M) pembangkit listrik. MKP adalah anak perusahaan PJBS yang didirikan pada tanggal 23 September 2004 dengan struktur kepemilikan saham PJBS sebesar 92 % dan YK PJB sebesar 8%.

Company Profile
MKP is PJBS subsidiary engaged in the provision of Manpower or HC for Operation & Maintenance (O&M) of power plant. MKP is PJBS subsidiary established on September 23, 2004, with a PJBS share ownership of 92% and YK PJB of 8%.

Alamat Address
Juanda Business Center (JBC)
Blok A, No. 4, 5 dan 6, Jl. Raya Juanda No. 1 – Sidoarjo (61253)
: 031-8548595
: 031-8548596
: Info@mitrakaryaprima.com
: www.mitrakaryaprima.com

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	**Ishvandono Yunaini A**	1 Februari 2021 - 1 Februari 2024 February 1, 2021 - February 1, 2024
Komisaris Commissioner	**Ade Sita Damayanti**	1 Februari 2021 - 1 Februari 2024 February 1, 2021 - February 1, 2024
Komisaris Commissioner	**Eny Mar'atus Solikah**	1 Februari 2021 - 1 Februari 2024 February 1, 2021 - February 1, 2024

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Hendra Hartanto Efendi**	1 November 2021 - 1 November 2024 November 1, 2021 - November 1, 2024
Direktur SDM dan Keuangan Director of HC and Finance	**Kunto Wibisono**	1 Juli 2019 - 1 Juli 2022 July 1, 2019 - July 1, 2022
Direktur Pemasaran & Operasi Director of Marketing & Operations	**Slamet Supriyanto**	1 Mei 2021 - 1 Mei 2024 May 1, 2021 - May 1, 2024

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp miliar)
Financial Performance 2019-2021 (Rp billion)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	98,01	123,08	152,67
Pendapatan Usaha Operating Revenues	278,02	285,15	360,84
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	16,34	23,53	24,47

PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkitan Tenaga Kerja (SKP)

PJB Group melalui PT PJBS telah Divestasi dari PT SKP sejak tanggal 20 Desember 2021

Profil Perusahaan
SKP merupakan anak perusahaan PJBS yang bergerak di bidang jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan klasifikasi usaha besar dan ruang lingkup bidang pembangkitan tenaga listrik dan sub bidang pengoperasian dan pemeliharaan. SKP didirikan pada tanggal 6 Mei 2015 dengan persentase kepemilikan saham PJBS sebesar 95% dan Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan PJB sebesar 5%.

Alamat Address
Gedung PT PLN (Persero) Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav-18 Jakarta Selatan
: 021-5251490
: halo@skptenagalistrik.com
: www.skptenagalistrik.co.id

PJB Group through PT PJBS has divested from PT SKP as of December 20, 2021

Company Profile
SKP is PJBS subsidiary that is engaged in the field of electrical engineering competency certification services with the large business classification and the scope of the power plant sector and the operation and maintenance sub-sector. SKP was established on May 6, 2015, with PJBS share ownership of 95% as well as Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan PJB of 5%.

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Commissioner	**Dicky Maryono**	6 Mei 2021 - 6 Mei 2024 May 6, 2021 - May 6, 2024

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Director	**Mudjiono**	6 Mei 2021 - 6 Mei 2024 May 6, 2021 - May 6, 2024

Kinerja Keuangan Tahun 2018-2020 (Rp miliar)
Financial Performance 2019-2021 (Rp billion)

Keterangan Description	2018	2019	2021
Total Aset Total Assets	5,65	7,88	9,15
Pendapatan Usaha Operating Revenues	7,86	11,04	9,77
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1,72	2,70	2,44

PT Rekadaya Elektrika Consult (Reconsult)

Profil Perusahaan
Reconsult merupakan anak perusahaan PT Rekadaya Elektrika yang bergerak di bidang penyediaan Jasa konsultasi ketenagalistrikan mulai dari penyusunan studi kelayakan hingga proses produksi yang meliputi proses *procurement*, proses pra-konstruksi, proses konstruksi, dan periode produksi. Reconsult didirikan pada tanggal 13 April 2010 dengan persentase kepemilikan saham PT Rekadaya Elektrika sebesar 99,8% dan Koperasi Karyawan Rekadaya Elektrika sebesar 0,02%.

Company Profile
Reconsult is subsidiary of PT Rekadaya Elektrika engaged in providing electricity consulting services starting from the preparation of feasibility studies to the production process including the procurement process, pre-construction process, construction process, and production period. Reconsult was established on April 13, 2010, with PT Rekadaya Elektrika share ownership of 99.8% and the Employee Cooperative of Rekadaya Elektrika at 0.02%.

Alamat Address
Wisma 46 Kota BNI Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220
: 021-5721375/76,
: 021-5721377
: marketing@reconsult.co.id,
: www.reconsult.co.id

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	***vacant***	-
Komisaris Commissioner	**Yudi Mulhadi**	4 Desember 2019 - 4 Desember 2022 December 4, 2019 - Desember 4, 2022

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Sulistijo Prasodjo**	1 Desember 2020 - 1 Desember 2023 December 1, 2020 - December 1, 2023
Direktur Bisnis Direktur Bisnis	**Desfinar Jaelani Madjid**	1 Desember 2020 - 1 Desember 2023 December 1, 2020 - December 1, 2023
Plt. Direktur Keuangan & Umum Act. Director of Finance & General Affairs	**Sulistijo Prasodjo (merangkap) (Concurrently)**	08 April 2021 s.d Ditetapkan Pejabat Definitif April 8, 2021 Determined by Definitive Officer

Kinerja Keuangan Tahun 2018-2020 (Rp miliar)
Financial Performance 2018-2020 (Rp billion)

Keterangan Description	2018	2019	2021
Total Aset Total Assets	172,29	156,15	117,33
Pendapatan Usaha Operating Revenues	258,17	215,87	90,40
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	57,27	30,82	3,95

PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo

Profil Perusahaan
PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo merupakan anak perusahaan PT PJB Investasi yang bergerak di bidang Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik. PJB Investindo didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham PT PJB Investasi sebesar 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan PJB (YK PJB) Elektrika sebesar 0,01%.

Company Profile
PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo is a subsidiary of PT PJB Investasi which is engaged in financing in the form of equity participation and electricity procurement business. PJB Investindo was established on July 7, 2020 with a 99.99% share ownership in PT PJB Investasi and 0.01% in Yayasan Kesejahteraan PJB (YK PJB).

Alamat Address
Menara Bidakara 2 Lt. 8 Jakarta Selatan
: 021 8370 8760

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Commissioner	**Fauzi Leilan**	7 Juli 2020 - 7 Juli 2023 July 7, 2020 to July 7, 2023

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Director	**Ariya Jati Pamungkas**	7 Juli 2020 - 7 Juli 2023 July 7, 2020 to July 7, 2023

Kinerja Keuangan Tahun 2018-2020 (Rp miliar)
Financial Performance 2018-2020 (Rp billion)

Keterangan Description	2018	2019	2021
Total Aset Total Assets	-	-	23,75
Pendapatan Usaha Operating Revenues	-	-	(37,04)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	-	(37,41)

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata

Profil Perusahaan
PT Pembangkitan Jawa Baskara Investasi Cirata merupakan anak perusahaan PT PJB Investindo yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik. PJB Investindo didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham PT PJB Investindo sebesar 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan PJB (YK PJB) Elektrika sebesar 0,01%.

Company Profile
PT Pembangkitan Jawa Baskara Investasi Cirata is a subsidiary of PT PJB Investindo which is engaged in financing in the form of equity participation and electricity procurement business. PJB Investindo was established on July 7, 2020 with a share ownership percentage of PT PJB Investindo of 99.99% and Yayasan Kesejahteraan PJB (YK PJB) Elektrika of 0.01%.

Alamat Address
Menara Bidakara 2 Lt. 8 Jakarta Selatan
: 021 8370 8760

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Commissioner	**Hikma Pratama**	28 Desember 2020 - 7 Juli 2023 December 28, 2020 - July 7, 2023

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Director	**Herry Nico Siagian**	7 Juli 2020 - 7 Juli 2023 July 7, 2020 to July 7, 2023

Kinerja Keuangan Tahun 2018-2020 (Rp miliar)
Financial Performance 2018-2020 (Rp billion)

Keterangan Description	2018	2019	2021
Total Aset Total Assets	-	-	23,75
Pendapatan Usaha Operating Revenues	-	-	3,09
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	-	(37,04)

Entitas Asosiasi
Entitas Asosiasi

PT Komipo Pembangkitan Jawa-Bali (KPJB)

Profil Perusahaan
KPJB merupakan perusahaan Asosiasi PJB yang bergerak di bidang jasa *Operation & Maintenance, coal handling, jetty* dan *port management* pada PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4 yang berkapasitas 2x660 MW.KPJB didirikan pada tanggal 24 November 2010 dengan persentase kepemilikan saham PJB sebesar 49% dan Korea Midland Power sebesar 51%.

Company Profile
KPJB is PJB Associated Company engaged in Operation & Maintenance, coal handling, jetty, and port management services at Unit 3 & 4 Tanjung Jati CFFP B with the capacity of 2x660 MW. KPJB was established on November 24, 2010, with PJB share ownership of 49% and Korea Midland Power of 51%.

Kantor Pusat Head Office
PLTU Tanjung Jati B Jawa Bali Unit 3 & 4,
Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Jawa Tengah
: 0291-4270493
: 0291-4270601
: www.kpjb.co.id

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	**Dodi Aprianata**	1 Desember 2021 - 1 Desember 2024 December 1, 2021 - December 1, 2024
Komisaris Commissioner	**Adi Setiawan**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Komisaris Commissioner	**Park Kyung Woo**	15 Maret 2021 - 15 Maret 2024 March 15, 2021 to March 15, 2024
Komisaris Commissioner	**Kang Hee Suck**	2 Januari 2020 - 2 Januari 2023 January 2, 2020 to January 2, 2023

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama Direktur Utama	**Kim Yun Kyu**	15 Maret 2021 - 15 Maret 2024 March 15, 2021 to March 15, 2024
Direktur Direktur	**Robert Manyuzar**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2024 January 2, 2021 - January 2, 2024
Direktur Direktur	**Rudi Jauhar Musyafa**	1 Juli 2019 - 1 Juli 2022 July 1, 2019 - July 1, 2022

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp miliar)
Financial Performance 2018-2020 (Rp billion)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	138,57	165,25	151,21
Pendapatan Usaha Operating Revenues	230,10	224,04	228,55
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	38,35	54,72	14,74

PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

Profil Perusahaan
S2P adalah Perusahaan Asosiasi PJB yang didirikan pada 12 Mei 2003 dengan struktur kepemilikan saham PJB sebesar 49,00% dan PT Sumberenergi Sakti Prima 51,00%. S2P bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik (IPP) dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap Cilacap 2X300 MW yang beroperasi komersial pada 2 September 2006, Unit 3 dengan kapasitas 1x660 MW yang beroperasi komersial pada Juni 2016, dan Unit IIIA dengan kapasitas 1x1000 MW yang beroperasi komersial pada tanggal 9 November 2019.

Company Profile
S2P is PJB Associated Company that was established on May 12, 2003, with PJB share ownership of 49,00% and PT Sumberenergi Sakti Prima of 51,00%. S2P is engaged in the provision of electricity (IPP) by operating Cilacap 2X300 MW CFPP which operated commercially on September 2, 2006, Unit 3 with a capacity of 1x660 MW which operated commercially in June 2016, and Unit IIIA with a capacity of 1x 1000MW which operated commercially on November 9, 2019

Kantor Pusat Head Office
Gedung Treasury Tower, Lt. 39. SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190
: (021) 2912 6888
: (021) 2912 6886
: Jakarta@ssprimadaya.co.id
: www.ssprimadaya.co.id

Kantor PLTU Cilacap Cilacap CFPP Office
Jl. Lingkar Timur Karang Kandri,
Kecamatan Kesugihan, Cilacap

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	**Dewi Kam**	3 Mei 2020 - 1 Mei 2023 May 3, 2020 - May 1, 2023
Komisaris Commissioner	**Mohamad Abdullah Jasin**	3 Mei 2020 - 1 Mei 2023 May 3, 2020 - May 1, 2023
Komisaris Commissioner	**Agus Bagyo Hartadi**	16 Janiari 2020 - 1 Mei 2023 January 16, 2020 - May 1, 2023
Komisaris Commissioner	**Gunawan Yudi Hariyanto**	2 Januari 2021 - 1 Mei 2023 January 2, 2021 - May 1, 2023
Komisaris Commissioner	**Kiswantara Partadiredja**	3 Mei 2020 - 1 Mei 2023 May 3, 2020 - May 1, 2023

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Agus Nurwahyudi**	3 Mei 2020 - 3 Mei 2023 May 3, 2020 - May 3, 2023
Direktur Teknologi & Operasi Director of Technology & Operations	**Irvan Rahmat**	3 Mei 2020 - 3 Mei 2023 May 3, 2020 - May 3, 2023
Direktur Keuangan & Umum Director of Finance & General	**Lifransyah Gumay**	3 Mei 2020 - 3 Mei 2023 May 3, 2020 - May 3, 2023

Kinerja Keuangan Tahun 2018-2020 (Rp miliar)
Financial Performance 2018-2020 (Rp billion)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	26.572,65	27.324,71	25.591,58
Pendapatan Usaha Operating Revenues	7.288,15	12.780,61	12.113,68
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	591,45	1.861,30	1.253,04

PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)

PT BAJRADAYA SENTRANUSA

Profil Perusahaan
BDSN merupakan perusahaan Asosiasi PJB yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik (IPP) mengoperasikan PLTA Asahan-I 2x90 MW. BDSN didirikan pada tanggal 30 Oktober 1995 dan PJB masuk sebagai pemegang saham pada tanggal 30 November 1996 dengan persentase kepemilikan saham saat ini Fareast Renewable Development Pte.Ltd sebesar 53,2%; PJB sebesar 36,61%; International Finance Corporation sebesar 5%; China Huadian Hongkong Company sebesar 4,75%; dan PT Bajragraha Sentranusa sebesar 0,42%.

Company Profile
BDSN is PJB associated company engaged in the field of electricity supply (IPP) operating Asahan-I 2x90 MW HPP. BDSN was established on October 30, 1995 and PJB became shareholder on November 30, 1996 with the current share ownership percentage of Fareast Renewable Development Pte.Ltd of 53.2%; PJB of 36.61%; International Finance Corporation of 5%; China Huadian Hongkong Company of 4.75%; and PT Bajragraha Sentranusa of 0.42%.

Alamat Address
Jl. Wijaya III No.5 Kebayoran Baru. Jakarta 12160
: (021) 7202117
: bdsn.ho@bajradaya.com
: www.bajradaya.com

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	**Kesti Irawati**	4 Desember 2020 - 7 Mei 2022 December 4, 2020 - May 7, 2022
Komisaris Commissioner	**Yusuf Didi Setiarto**	4 Desember 2020 - 7 Mei 2022 December 4, 2020 - May 7, 2022
Komisaris Commissioner	**Sarwono Kusumaatmaja**	7 Mei 2019 - 7 Mei 2022 May 7, 2019 - May 7, 2022
Komisaris Commissioner	**Di Na**	1 Januari 2020 - 7 Mei 2022 January 1, 2020 - May 7, 2022
Komisaris Commissioner	**Thana Boonyasirikul**	5 Februari 2021 - 5 Februari 2024 February 5, 2021 - February 5, 2024

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Adek Julianwar**	7 Mei 2019 - 7 Mei 2022 May 7, 2019 - May 7, 2022
Direktur Keuangan Director of Finance	**Amran Sattu**	4 Januari 2020 - 7 Mei 2022 January 4, 2020 - May 7, 2022
Director (General & Administration) Director (General & Administration)	**Sakchai Chaiyawan**	7 Mei 2019 - 7 Mei 2022 May 7, 2019 - May 7, 2022

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (USD)
Financial Performance 2018-2020 (USD)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	26.572,65	27.324,71	427.895,89
Pendapatan Usaha Operating Revenues	7.288,15	12.780,61	46.425,40
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	591,45	1.861,30	23.827,40

PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)

Profil Perusahaan
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) merupakan perusahaan Asosiasi PJB yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik (IPP) dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap Banjarsari 2x110 MW di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. BPI didirikan pada tanggal 28 Agustus 2006 dengan persentase kepemilikan saham PJB sebesar 29,15%, PT Bukit Asam Tbk sebesar 59,75% dan PT Navigat Innovate Indonesia sebesar 11,10%.

Company Profile
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) is PJB Associated Company engaged in the provision of electricity (IPP) by operating the Banjarsari 2x110 MW steam power plant in Lahat Regency, South Sumatera. BPI was established on August 28, 2006, with PJB share ownership of 29,15%, PT Bukit Asam Tbk of 59.75%, and PT Navigat Innovate Indonesia of 11,10%.

Kantor Pusat Head Office
Graha Surveyor Indonesia Building, Lt. 17, Suite 1703
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950
: 021-5212463, 021-5212470,
: 021-5210725 (Fax)
: secretary@bpi-ipp.com
: www. bpi-ipp.com

Kantor PLTU Banjarsari Kantor PLTU Banjarsari
Jl. Lintas Tengah Sumatera,
Desa Sirah Pulau & Desa Gunung Kembang

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	**Sri Andini**	12 Januari 2021 - 12 Januari 2025 January 12, 2021 - January 12, 2025
Komisaris Commissioner	**Farida Thamrin**	31 Mei 2021 - 31 Mei 2025 May 31, 2021 - May 31, 2025
Komisaris Commissioner	**Didik Mardiantara**	12 Januari 2021 - 12 Januari 2025 January 12, 2021 - January 12, 2025

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Wibisono**	31 Oktober 2021 - 31 Oktober 2021 October 31, 2021 - October 31, 2021
Direktur Keuangan & Umum Director of Finance & General	**Sugijanto**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2025 January 2, 2021 - January 2, 2025
Direktur Produksi dan Niaga Director of Production and Commerce	**Ompang Reski Hasibuan**	2 Januari 2021 - 2 Januari 2025 January 2, 2021 - January 2, 2025

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (USD)
Financial Performance 2018-2020 (USD)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	431.416.541	443.616.628	392.728,90
Pendapatan Usaha Operating Revenues	72.815.912	69.939.347	72.737,55
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	14.768.696	23.377.582	29.039,83

PT Rekind Daya Mamuju (RDM)

Profil Perusahaan
RDM adalah perusahaan asosiasi PT Rekadaya Elektrika sebagai IPP PLTU Mamuju 2x25 MW yang didirikan pada tanggal 21 Februari 2013 dengan struktur kepemilikan saham PT Rekayasa Industri sebesar 90% dan PT Rekadaya Elektrika sebesar 10%. IPP PLTU Mamuju 2x25 MW telah COD sejak tanggal 19 September 2018.

Company Profile
RDM is associated company of PT Rekadaya Elektrika as Mamuju IPP CFPP of 2x25 MW which was established on February 21, 2013 with PT Rekayasa Industri share ownership of 90% and PT Rekadaya Elektrika of 10%. Mamuju IPP CFPP of 2x25 MW has been COD since September 19, 2018.

Kantor Pusat Head Office
Gedung Nucira Lt. 4
Jl. MT. Haryono Kav 27 Jakarta Selatan
Jakarta 10230
: 021-83787760, 021-83785961, 021-8307578 (fax)
: info@rdm.co.id
: www.rdm.co.id

Kantor PLTU CFPP Office
Dusun Talaba, Desa Belang-Belang,
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Plt Komisaris Utama Acting President Commissioner	**Dedy Rinaldi**	9 November 2020 s.d Ditetapkan Pejabat Definitif November 9, 2020 - Determined by Definitive Officer
Komisaris Commissioner	**Iwan Slamet Triawan**	26 April 2021 - 26 April 2026 April 26, 2021-to April 26, 2026

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Plt Direktur Utama Acting President Director	**Harry Fardiman**	20 Februari 2018 - Ditetapkan Pejabat Definitif February 20, 2018 - Determined by Definitive Officer
Plt Direktur Keuangan Acting Director of Finance	**Harry Fardiman (merangkap) (Concurrently)**	21 Januari 2019 - Ditetapkan Pejabat Definitif January 21, 2019 - Determined by Definitive Officer
Direktur Operasi Operations Director	**Akmaludin**	1 April 2019 - 1 April 2014 April 1, 2019 - April 1, 2014

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (USD)
Financial Performance 2018-2020 (USD)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	126,188,873	123.214.951	119.904.700
Pendapatan Usaha Operating Revenues	21,102,071	19.931.938	16.962.849
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	432,919	1.970.627	(4.205.871)

PT Shenhua Guo Hua PJB (SGPJB)

Profil Perusahaan
SGPJB adalah perusahaan asosiasi PT PJB Investasi sebagai IPP PLTU Jawa 7 2x1000 MW yang didirikan pada tanggal 13 Januari 2016 dengan struktur kepemilikan saham PT PJB Investasi sebesar 30% dan China Shenhua Energy Company Limited sebesar 70%. IPP PLTU Jawa 7 2x1000 MW telah COD sejak tahun 2019.

Company Profile
SGPJB is associated company of PT PJB Investasi as Java 7 IPP CFPP of 2x1000 MW which was established on January 13, 2016, with PT PJB Investasi share ownership of 30% and China Shenhua Energy Company Limited of 70%. Java 7 IPP CFPP of 2x1000 MW has been COD since 2019.

Kantor Pusat Head Office
APL Tower Lt.39,
Jl. Letjen S. Parman Kav.28, Jakarta Barat

Unit PLTU CFPP Unit
Kramatwatu, Kabupaten Serang,
Banten

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Plt Komisaris Utama Acting President Commissioner	**Burhanudin**	13 Januari 2021 - 13 Januari 2026 January 13, 2021 - January 12, 2026
Komisaris Commissioner	**Jakfar Sadiq**	13 Januari 2021 - 13 Januari 2026 January 13, 2021 - January 12, 2026
Komisaris Commissioner	**Huang Bin**	13 Januari 2016 - 13 Januari 2021 January 13, 2016 - January 12, 2021
Komisaris Commissioner	**Wang Jihui**	13 Januari 2016 - 13 Januari 2021 January 13, 2016 - January 12, 2021
Komisaris Commissioner	**Sun Yiding**	13 Januari 2021 - 12 Januari 2026 January 13, 2021 - January 12, 2026
Komisaris Commissioner	**Hu Wei**	20 Juni 2019 - 13 Maret 2022 June 20, 2019 - March 13, 2022

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Wen Changhong**	20 Juni 2019 - 13 Maret 2022 June 20, 2019 - March 13, 2022
Direktur Director	**Zhao Zhigang**	20 Juni 2019 - 13 Maret 2022 June 20, 2019 - March 13, 2022
Direktur Director	**Xu Beichen**	13 Januari 2021 - 13 Juni 2026 January 13, 2021 to June 13, 2026
Direktur Director	**Cui Yukui**	13 Januari 2021 - 13 Juni 2026 January 13, 2021 to June 13, 2026
Direktur Director	**Teguh Handoyo**	13 Januari 2021 - 28 Februari 2022 January 13, 2021 to February 28, 2022
Direktur Director	**Satrio Wahyudi**	13 Januari 2021 - 13 Januari 2026 February 13, 2021 - January 13, 2026

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (USD)
Financial Performance 2019-2021 (USD)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	1.761.813.511	2.122.253.545	2.256.136.234
Pendapatan Usaha Operating Revenues	464.439.348	587.751.009	593.348.193
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	66.960.612	120.946.618	154.317.662

PT Guo Hua Taidian PJB (GHPJB)

Profil Perusahaan
GHPJB adalah perusahaan asosiasi PT PJB Investasi sebagai Jasa Operasi Pemeliharaan Pembangkit PLTU Jawa 7 2x1000 MW yang didirikan pada tanggal 23 September 2016 dengan struktur kepemilikan saham PT PJB Investasi sebesar 30% dan Guadong Guohua Yuedian Taishan Power Generation Company Limited sebesar 70%.

Company Profile
GHPJB is associated company of PT PJB Investasi as a Maintenance Operation Service of Java 7 CFPP of 2x1000 MW which was established on September 23, 2016, with PT PJB Investasi share ownership of 30% and Guadong Guohua Yuedian Taishan Power Plant Company Limited of 70%.

Kantor Pusat Head Office
APL Tower Lt. 39
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28

Unit PLTU CFPP Unit
Cilegon, Banten

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Plt Komisaris Utama Acting President Commissioner	**Lavi Rumandioko**	18 Januari - 22 September 2026 January 18, 2021 - September 22, 2026
Komisaris Commissioner	**Wei Aili**	18 Januari - 22 September 2026 January 18, 2021 - September 22, 2026
Komisaris Commissioner	**Lu Tao**	15 Desember 2021 - 22 September 2026 December 15, 2021 - September 22, 2026

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Zhao Zigang**	18 Januari 2021 - 22 September 2026 January 18, 2021 to September 22, 2026
Direktur Director	**Lu Chengjun**	18 Januari 2021 - 22 September 2026 January 18, 2021 to September 22, 2026
Direktur Director	**Eko Ariyanto**	18 Januari 2021 - 22 September 2026 January 18, 2021 to September 22, 2026

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (USD)
Financial Performance 2019-2021 (USD)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	2.272.554	2.272.554	3.189.152
Pendapatan Usaha Operating Revenues	10.075.926	13.726.342	16.540.805
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	2.435	66.048	68.486

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE)

Profil Perusahaan
NSHE adalah perusahaan asosiasi PT PJB Investasi sebagai IPP PLTA Batang Toru 4x125 MW yang didirikan pada tanggal 30 April 2008 dengan struktur kepemilikan saham PT PJB Investasi sebesar 30% dan Guadong Guohua Yuedian Taishan Power Generation Company Limited sebesar 70%.

Company Profile
NSHE is associate company of PT PJB Investasi as Batang Toru HPP IPP of 4x125 MW which was established on April 30, 2008, with PT PJB Investasi share ownership of 30% and Guadong Guohua Yuedian Taishan Power Plant Company Limited of 70%.

Kantor Pusat Head Office
Jl. Darmawangsa VII No. 7, Pulo
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Unit Pembangkit Power Plant Unit
Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Plt Komisaris Utama Acting President Commissioner	**Chen Qing**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024
Komisaris Commissioner	**Ong Tion Soon**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024
Komisaris Commissioner	**Jing Qiuyun**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024
Komisaris Commissioner	**Wandy Wanto**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024
Komisaris Commissioner	**Weddy Bernadi Sudirman**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Zhang Kaihong**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024
Direktur Keuangan Director of Finance	**Lin Weihong**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024
Direktur Urusan Luar Director of External Affairs	**I Putu Yoga Wahyu Diputra**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024
Direktur Bisnis Director of Business 1	**Du Yubao**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024
Direktur Proyek Director of Project	**Chen Linzhong**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024
Direktur Teknik Director of Technical	**Djauhar Husni**	19 Oktober 2021 - 19 Oktober 2024 October 19, 2021 - October 19, 2024

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (USD)
Financial Performance 2019-2021 (USD)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	357.731.820	390.607.040	416.003.075
Pendapatan Usaha Operating Revenues	47.113.588	42.032.194	96.452.977
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	8.857.894	17.792.587	15.167.312

PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali (SSP)

Profil Perusahaan
SSP adalah perusahaan asosiasi PT PJB Investasi sebagai IPP PLTU MT Sumbagsel 1 2x150 MW yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 dengan struktur kepemilikan saham PT PJB Investasi sebesar 10% dan PT Adimas Puspita Serasi sebesar 25%, PT D&C Engineering Company sebesar 10%, dan PT Sumberenergi Sakti Prima sebesar 55%.

Company Profile
SSP is associated company of PT PJB Investasi as Southern Sumatera IPP CFPP MT 1 2x150 MW which was established on June 6, 2018, with PT PJB Investasi share ownership of 10% and PT Adimas Puspita Serasi of 25%, PT D&C Engineering Company of 10%, and PT Sumberenergi Sakti Prima of 55%.

Kantor Pusat Head Office
KYK Building, Jalan Cideng Barat No. 32-33,
Jakarta Pusat

Unit
Kec. Semidang Aji, Kab.Ogan Komering Ulu,
Sumatera Selatan, Indonesia

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Plt Komisaris Utama Acting President Commissioner	**Dewi Kam**	06 Januari 2018 - 6 Januari 2023 January 6, 2018 - January 6, 2023
Komisaris Commissioner	**Muhammad Abdullah Jasin**	06 Januari 2018 - 6 Januari 2023 January 6, 2018 - January 6, 2023
Komisaris Commissioner	**Yasin Rizal**	06 Januari 2018 - 6 Januari 2023 January 6, 2018 - January 6, 2023
Komisaris Commissioner	**Arif Istanto**	06 Januari 2018 - 6 Januari 2023 January 6, 2018 - January 6, 2023

SEKILAS KINERJA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW ON SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED ENTITIES

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Hakim Nawawi**	06 Januari 2018 - 6 Januari 2023 January 6, 2018 - January 6, 2023
Direktur Director	**Miftahur Rahman**	06 Januari 2018 - 6 Januari 2023 January 6, 2018 - January 6, 2023
Direktur Director	**Zhou Jun**	06 Januari 2018 - 6 Januari 2023 January 6, 2018 - January 6, 2023
Direktur Director	**Ivony Salim**	14 Oktober 2021 - 6 Januari 2023 October 14, 2021 - January 6, 2023

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (dalam Rp miliar)
Financial Performance 2019-2021 (Rp billion)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	1.088,33	1.139,30	1.178,13
Pendapatan Usaha Operating Revenues	0	0	0
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(9,53)	1,53	(0,72)

PT PJB Masdar Solar Energy (PMSE)

PMSE
A PJBI and Masdar Joint Venture

Profil Perusahaan
SSP adalah perusahaan asosiasi PT PJB Investasi sebagai IPP PLTS Cirata 145 MW yang didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan struktur kepemilikan saham PT pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata sebesar 51% dan Masdar Cirata Solar RSC Limited sebesar 49%.

Company Profile
SSP is an associate company of PT PJB Investasi as IPP PLTS Cirata 145 MW which was established on 7 July 2020 with a share ownership structure of PT Generator Jawa Baskara Investasi Cirata of 51% and Masdar Cirata Solar RSC Limited of 49%.

Alamat Address
Menara Bidakara 2 Lt. 8
Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav 71-73 Jakarta Selatan
Phone : 021 8370 8760

Unit
Waduk Cirata, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
Cirata Reservoir, Kab. West Bandung, West Java

Dewan Komisaris
The Board of Commissioners

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Plt Komisaris Utama Acting President Commissioner	**Ochairialdy**	30 September 2021 - 7 Juli 2023 September 30, 2021 - Juli 7, 2023
Komisaris Commissioner	**Yudhy Bhagaskara**	7 Juli 2020 - 7 Juli 2023 Juli 7, 2020 - July 7, 2023
Komisaris Commissioner	**Borja Valero Polo**	7 Juli 2020 - 7 Juli 2023 Juli 7, 2020 - July 7, 2023
Komisaris Commissioner	**Abdulla Mohamed Abdulla Zayed**	7 Juli 2020 - 7 Juli 2023 Juli 7, 2020 - July 7, 2023

Direksi
The Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	**Przemyslaw Apoloniusz Lupa**	7 Juli 2020 - 7 Juli 2023 Juli 7, 2020 - July 7, 2023
Direktur Operasi Operations Director	**Dimas Kaharudin Indra Rupawan**	7 Juli 2020 - 7 Juli 2023 Juli 7, 2020 - July 7, 2023
Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	**Alfret Parulian Sinambela**	30 November 2021 - 7 Juli 2023 November 30, 2021 - Juli 7, 2023

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (dalam USD)
Financial Performance 2019-2021 (USD)

Keterangan Description	2019	2010	2021
Total Aset Total Assets	1.088,33	1.139,30	42.313,29
Pendapatan Usaha Operating Revenues	0	0	26.772,05
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(9,53)	1,53	(1.186,94)

PETA WILAYAH OPERASIONAL
OPERATIONAL MAP

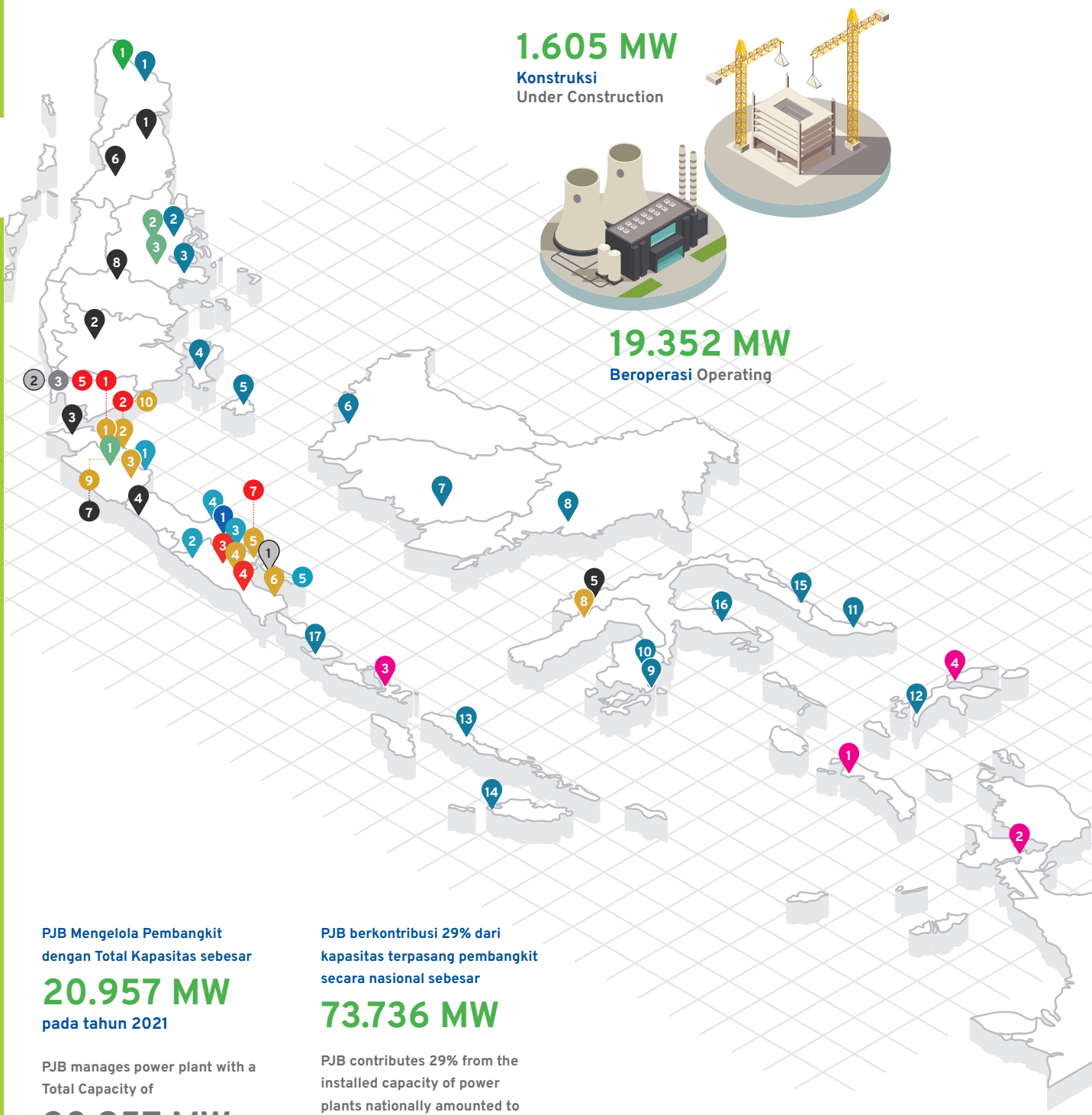

PJB Mengelola Pembangkit dengan Total Kapasitas sebesar

20.957 MW

pada tahun 2021

PJB manages power plant with a Total Capacity of

20.957 MW

in 2021

PJB berkontribusi 29% dari kapasitas terpasang pembangkit secara nasional sebesar

73.736 MW

PJB contributes 29% from the installed capacity of power plants nationally amounted to

73,736 MW

Pembangkit Eksisting
Existing Power Plant

- **7.054 MW (8 Pembangkit)** 7,054 MW (8 Power Plants)
- **1 MW (Pembangkit Riset - PLTS Cirata)**
  1 MW (Research Plants – Cirata SPP)
- **650 MW (Add On MTW 2-3-4)** 650 MW (Add-on MTW 2-3-4)

Beroperasi (7.054 MW)
Operating (7,054 MW)

1. **Muara Karang**
   PLTGU CCPP
   PLTU Gas/BBM
   Gas/Fuel CFPP
   909 MW
2. **Muara Tawar**
   PLTGU CCPP
   PLTG Gas/BBM
   Gas/Fuel GTPP
   1.778 MW
3. **Cirata**
   PLTA HPP
   1.008 MW
4. **Brantas**
   PLTA HPP
   275 MW
5. **Gresik**
   PLTGU CCPP
   PLTU Gas/BBM
   Gas/Fuel CFPP
   2.219 MW
6. **Paiton**
   PLTU Batubara CFPP
   800 MW
7. **Bawean**
   PLTMG GEPP
   3 MW
8. Suppa
   PLTD DPP
   62,4 MW

Pembangkit Riset (1 MW)
Research Plant (1 MW)

9. PLTS Cirata Cirata SPP
   1 MW

Tahap Pengembangan Konstruksi (650 MW)
Construction Development Stage (650 MW)

10. **Add On MTW 2-3-4**
    PLTGU CCPP 650 MW
    **Under construction,*
    COD 2021

Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M
Share Ownership in O&M Companies

1.320 MW (1 Pembangkit) 1,320 MW (1 Power Plant)

1. **Tanjung Jati B #3 dan #4**
   PLTU Batubara CFPP 2x660 MW
   (Jasa O&M dikelola oleh KPJB – Perusahaan JVC PJB dengan Komipo)
   (O&M Services Managed by KPJB - JVC company with Komipo)

Sewa Pembangkit
Power Plant for Lease

1.320 MW (1 Pembangkit) 1,320 MW (1 Power Plant)

1. **Duri**
   PLTG GPP
   1x20 MW

Jasa O&M FTP-1 Jawa
O&M Service of FTP-1 Java

3.610 MW (5 Pembangkit) 3,610 MW (5 Power Plants)

1. **Indramayu**
   PLTU Batubara CFPP
   3x330 MW
2. **Pacitan**
   PLTU Batubara CFPP
   2x315 MW
3. **Tanjung Awar-awar**
   PLTU Batubara CFPP
   2x350 MW
4. **Rembang**
   PLTU Batubara CFPP
   2x315 MW
5. **Paiton 9**
   PLTU Batubara CFPP
   1x660 MW

Jasa O&M Pembangkit PLN di *Site* PJB
O&M Service for PLN Power Plant at PJB Site

1.468,3 MW (5 Pembangkit) 1.468,3 MW (5 Power Plants)

Beroperasi (1.468,3 MW)
Operating (1,468.3 MW)

1. **MKR Blok 2**
   PLTGU CCPP
   710 MW
2. **MTW Blok 5**
   PLTGU CCPP
   242 MW
3. **Ampel Gading**
   PLTA HPP
   2x5 MW
4. **Wonorejo**
   PLTA HPP
   1x6,3 MW
5. **MKR Blok 3**
   PLTGU CCPP
   500 MW

Jasa EPC
EPC Services

(4 Pembangkit) (4 Power Plants)

1. **Ambon**
   PLTU CFPP 2x15 MW
   *menunggu tanda tangan kontrak
   *waiting for contract signatures
2. **Timika (Sorong)**
   PLTU CFPP
   4x7 MW
   *relokasi ke sorong
   *relokasi ke sorong
3. **Bima**
   PLTU CFPP
   2x10 MW
   *fase konstruksi
   *under construction phase
4. **Soffi**
   PLTU CFPP
   2x3 MW
   *penandatangan kontrak
   *contract signatures

Jasa O&M FTP-1 Luar Jawa
O&M Service Outside Java

1.068,3 MW (17 Pembangkit) 1,068 MW (17 Power Plants)

1. **Arun**
   PLTMG Gas Gas GEPP
   19x9,7 MW
2. **Tenayan**
   PLTU Batubara CFPP
   2x110 MW
3. **Tembilahan**
   PLTU Batubara CFPP
   2x7 MW
4. **Bangka**
   PLTU Batubara CFPP
   2x30 MW
5. **Belitung Baru**
   PLTU Batubara CFPP
   2x16,5 MW
6. **Ketapang**
   PLTU Batubara CFPP
   2x10 MW
7. **Pulang Pisau**
   PLTU Batubara CFPP
   2x60 MW
8. **Kaltim Teluk**
   PLTU Batubara CFPP
   2x110 MW
9. **Kendari 1-2**
   PLTU Batubara CFPP
   2x10 MW
10. **Kendari 3**
    PLTU Batubara CFPP
    1x10 MW
11. **Amurang**
    PLTU Batubara CFPP
    2x25 MW
12. **Tidore**
    PLTU Batubara CFPP
    2x7 MW
13. **Ropa (Ende)**
    PLTU Batubara CFPP
    2x7 MW
14. **Bolok**
    PLTU Batubara CFPP
    2x16,5 MW
15. **Anggrek**
    PLTU Batubara CFPP
    2x25 MW
16. **Ampana**
    PLTU Batubara CFPP
    2x3 MW
17. **Sambelia**
    PLTU Batubara CFPP
    2x10 MW

Unit Bisnis Pendukung
Supporting Business Unit

(3 Unit Bisnis) (3 Business Units)

1. **PJB Academy**
   Surabaya, Jawa Timur East Java
2. **Unit *Maintenance, Repair & Overhaul* (UMRO)**
   Maintenance, Repair & Overhaul Unit (UMRO)
   Pluit, Jakarta
3. **Unit Pengembangan Usaha dan Pembangunan**
   Business Development and Development Unit
   Jakarta

Kepemilikan Saham di IPP
Share Ownership in IPP

5.665 MW (8 Pembangkit) 5,665 MW (8 Power Plants)

Beroperasi (3.710 MW)
Operating (3,710 MW)

1. **Asahan**
   PLTA HPP 2x90 MW
   (Saham PJB 36,61%)
   (PJB Share ownership 36.61%)
   *Including O&M Services
2. **Banjarsari**
   PLTU Batubara CFPP
   2x110 MW
   (Saham PJB 29,15%)
   (PJB Share ownership 29.15%)
   *Including O&M Services
3. **Jawa 7 (Unit 1), Serang**
   PLTU Batubara CFPP
   1x1.000 MW
   (Saham PJB 30%)
   (PJB Share ownership of 30%)
4. **Cilacap**
   PLTU Batubara CFPP
   2x300 MW
   Ekspansi 1 Expansion 1,
   1x660 MW
   Ekspansi 2 Expansion 2,
   1x1.000 MW
   (Saham PJB 49%)
   (PJB Share ownership of 49%)
5. **Mamuju**
   PLTU Batubara CFPP
   2x25 MW
   (Saham PJB 10%)
   (PJB Share ownership of 10%)

Tahap Pengembangan Konstruksi (955 MW)
Construction Development Stage (955 MW)

6. **Batang Toru**
   PLTA HPP 4x127,5 MW
   (Saham PJB 25%)
   (PJB Share ownership of 25%)
   *Underconstruction,
   a.Unit #1 : COD 2021
   b.Unit #2 : COD 2022
   c.Unit #3 : COD 2022
   d.Unit #4 : COD 2022
7. **Cirata Floating PV**
   PLTS SPP 145 MW
   (Konsorsium PJBI – Masdar)
   (Consortium between PJBI – Masdar)
   *PPA
8. **Sumbagsel 1**
   Southern Sumatera 1
   PLTU Batubara CFPP
   2x150 MW
   (Saham PJB 10%)
   (PJB Share ownership 10%)

ALAMAT KANTOR PERWAKILAN DAN UNIT USAHA
ADDRESS OF REPRESENTATIVE OFFICE AND BUSINESS UNIT

Kantor Perwakilan
Representative Office

Gedung 18 Office Park Lantai 8,
TB Simatupang Kav 18 - Jakarta
: -
: -
: perwakilan.jkt@ptpjb

18 Office Park Building 8th Floor,
TB Simatupang Kav 18 – Jakarta
: -
: -
: perwakilan.jkt@ptpjb

Alamat Unit Usaha
Business Unit Address

Unit Pembangkitan (UP)
PJB Generation Unit (GU)

Unit Pembangkitan Gresik
Gresik Generation Unit
Jl. Harun Tohir Gresik 61112
: (62-31) 3981569, 3984540
: (62-31) 3981568
: upgrk@ptpjb.com

Unit Pembangkitan Muara Karang
Muara Karang Generation Unit
Jl. Raya Pluit Karang Ayu No. 01 Jakarta Utara 14450
: (62-21) 6600054, 6692784
: (62-21) 6692806
: upmkr@ptpjb.com

Unit Pembangkitan Muara Tawar
Muara Tawar Generation Unit
Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1
Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya Bekasi, Jawa Barat 17218
: (62-21) 88990052
: (62-21) 88990052
: upmtw@ptpjb.com

Unit Pembangkitan Cirata
Cirata Generation Unit
Desa Cadas Sari, Kecamatan Tegal Waru, Plered Purwakarta 41162
: (62-264) 270840, 270928
: (62-264) 270859
: upcrt@ptpjb.com

Unit Pembangkitan Brantas
Brantas Generation Unit
Jl. Basuki Rakhmad No.271 Karangkates Sumberpucung,
Malang 65165
: (62-341) 385545, 385546
: (62-341) 385462
: upbrs@ptpjb.com

Unit Pembangkitan Paiton
Paiton Generation Unit
Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton,
Kabupaten Probolinggo 67291
: ((62-335) 771805-9
: (62-335) 771810
: upptn@ptpjb.com

PLTD Suppa
Suppa DEPP
Jl. Pramuka, Lingkungan Karaballo, Kel. Tellumpanua
Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan 91272
: (0421) 25390
: pltdsuppa01@gmail.com

PLTMG Bawean
Bawean GEPP
Perikanan Bawean, Sungai Tlk. Sangkapura,
Bawean Jawa Timur 61181
: pltmgbawean@gmail.com

PLTS Cirata (Pembangkit Riset)
Cirata SPP (Research Generation Unit)
Desa Cadas Sari, Kecamatan Tegal Waru, Plered Purwakarta 41162
: (62-264) 270840, 270928
: (62-264) 270859

Unit *Maintenance, Repair, Overhaul* (UMRO)
Maintenance, Repair, Overhaul Unit (UMRO)

Jl. Raya Pluit Karang Ayu No.01 Jakarta Utara 14450
: (62-21) 6620594, 6620595
: (62-21) 6613190
: -

Jasa O&M (*Operation & Maintenance*)
Operation & Maintenance Service

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Rembang
Rembang Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU)
Jalan Raya Semarang-Surabaya Km. 130, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang 59272
: (0295) 4552792, (0295) 4552791
: (0295) 4552791

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Indramayu
Indramayu Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU)
Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu 45257
: (0234) 5613236
: (0234) 5613236

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Pacitan
Pacitan Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU)
Jl. Raya Pacitan - Trenggalek KM. 55, Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan
: 0357) 5173444
: (0357) 5156698

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Paiton
Paiton Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU)
Jl. Surabaya-Situbondo KM. 141, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo 67291
: (0335) 771668
: (0335) 771669

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Tanjung Awar-awar
Tanjung Awar-awar Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU)
Jl. Tanjung Awar-awar, Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban 62352, Jawa Timur
: (62-356) 320320
: (62-356) 329090

Jasa O&M PLTGU Muara Karang Blok 2
Muara Karang Block 2 CFPP O&M Service
Jl. Raya Pluit Karang Ayu No. 01 Jakarta Utara 14450
: (62-21) 6600054, 6692784
: (62-21) 6692806
: upmkr@ptpjb.com

Jasa O&M PLTGU Muara Tawar Blok 5
Muara Tawar Block 5 CFPP O&M Service
Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1
Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya Bekasi, Jawa Barat 17218
: (62-21) 88990052
: (62-21) 88990052
: upmtw@ptpjb.com

Jasa O&M PLTA Ampel Gading
Ampel Gading HPP O&M Services
Kalituri, Wonorejo, Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66262

Jasa O&M PLTA Wonorejo
Wonorejo HPP O&M Service
Purwoharjo, Ampelgading, Malang, Jawa Timur 65183

Jasa O&M PLTGU Muara Karang Blok 5
Muara Karang Block 5 CFPP O&M Service
Jl. Raya Pluit Karang Ayu No. 01 Jakarta Utara 14450
: (62-21) 6600054, 6692784
: (62-21) 6692806
: upmkr@ptpjb.com

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTMG Arun
Arun Gas GEPP OMSBU
Jl. Medan-Banda Aceh Gate 5.3 Desa Meuria Paloh Kec. Muara Satu Lhokseumawe, Aceh
: (0645) 8052555
: sekretariat.pjbarun@gmail.com

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Tenayan
Tenayan CFPP OMSBU
Simpang Badak, Jl. Ringroad 70 RT 4 RW 2, Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285
: (0811) 7085777 / 7083777
secretariat.pjbtenayan@gmail.com

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Teluk Balikpapan
Teluk Balikpapan CFPP OMSBU
Jl. PLTU Nomor 1 Kawasan Industri Karangriau KM.13 Kelurahan Karangriau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
: (0542) 8530818
: sekumujktbpn@gmail.com

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Pulang Pisau
Pulang Pisau CFPP OMSBU
Jl. Trans kalimantan, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau
: (0513) 2027 007

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Tembilahan
Tembilahan CFPP OMSBU Sungai Perak, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Luar Jawa - PLTU Bangka
Outside Java OMSBU - Bangka CFPP
Jl. Lintas Timur Desa Air Anyir, Kec. Merawang
Kab. Bangka - Bangka Belitung Kode Pos 33172

ALAMAT KANTOR PERWAKILAN DAN UNIT USAHA
ADDRESS OF REPRESENTATIVE OFFICE AND BUSINESS UNIT

Jasa O&M (*Operation & Maintenance*)
Operation & Maintenance Service

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Luar Jawa - PLTU Belitung Baru
Outside Java OMSBU - Belitung Baru CFPPDesa Pengantungan, Kecamatan Badau Kab. Belitung

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Ketapang
Outside Java OMSBU - Ketapang CFPPSuka Bangun Dalam, Delta Pawan, Ketapang,
Kalimantan Barat 78813

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Luar Jawa - PLTU Kendari
Outside Java OMSBU - Kendari CFPPDesa Nii Tanasa, Kecamatan Lalonggasumeeto
Kabupaten Kendari - Sulawesi Tenggara Kode Pos 93126

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Luar Jawa - PLTU Amurang
Outside Java OMSBU - Amurang CFPP
Jl. Raya Trans Sulawesi, Amurang – Tawang Kabupaten Minahasa Selatan - Sulawesi Utara Kode Pos 95954

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Luar Jawa - PLTU Tidore
Outside Java OMSBU - Tidore CFPP
Desa Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara,
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Luar Jawa - PLTU Ropa
Outside Java OMSBU - Ropa CFPP
Jl. Trans Utara, Dusun Ropa, Desa Kaliwumbu Kecamatan Mourole, Kab. Ende - Flores NTT Kode Pos 86351

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) Luar Jawa - PLTU Bolok
Outside Java OMSBU - Bolok CFPP
Kawasan Industri Bolok Desa Bolok, Kecamatan Alak
Kab. Kupang - NTT Kode Pos 85231

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Anggrek
Anggrek CFPP OMSBU
Ilangata, Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo 96525

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Ampana
Ampana CFPP OMSBU
Jl. Trans Sulawesi, Sabo, Ampana Tete, Tojo Una-Una Regency,
Central Sulawesi

UBJOM (Unit Bisnis Jasa O&M) PLTU Sambelia
Sambelia CFPP OMSBU
Labuhan Pandan, Sambelia, East Lombok Regency,
West Nusa Tenggara 83656

Kepemilikan Saham di IPP
Share Ownership in IPP

PLTA Asahan Asahan HPP
Komplek PT Bajradaya Sentranusa Simangkuk – Desa Tangga Batu, Kecamatan Permaksian, Porse Kab. Toba Samosir, Sulawesi Utara

PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP
Jl. Lintas Tengah Sumatera, Desa Sirah Pulau & Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia

PLTU Jawa 7 Java 7 CFPP
Kantor Proyek PLTU Jawa 7
Jl. Raya Bojonegara, Desa Terate,
Kec. Kramatwatu Serang, Banten, 42161

PLTU Cilacap Cilacap CFPP
Jl. Lingkar Timur Karang Kandri, Kecamatam Kesugihan, Cilacap
: (0282) 538863
: (0282) 538863

PLTU Mamuju Mamuju CFPP
Belang-Belang, Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91561

PLTA Batang Toru Batang Toru HPP
Desa Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

PLTS Terapung Cirata Cirata Floating SPP
Desa Cadas Sari, Kec. Tegal Waru, Plered Purwakarta 41162
: (62-264) 270840, 270928
: (62-264) 270859

PLTU MT Sumbagsel 1 Southern Sumatera 1 MT CFPP
Jl. Cideng Barat 32-33, Jakarta Pusat 10150
: (62 21) 63858 999
: (62 21) 63860 823

Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M
Share Ownership in O&M Companies

Tanjung Jati B #3 dan #4 Tanjung Jati B CFPP #3 and #4
Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Sekuping, Tubanan, Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59453
: (0291) 772121
: (0291) 4270601

Bisnis Penunjang
Supporting Business

Unit Pengembangan (UBANG)
Business Development Unit (UBANG)
Gedung Menara Bidakara 2 Lantai 16
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran – Jakarta Selatan 12870
: (62-21) 83708764-65
: (62-21) 83708746
: upas@ptpjb.com

PJB Academy
Jl. Raya Jemursari No.185, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237
: (031) 99841946
: (62-21) 29023227

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN
COMPANY SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

Akuntan Publik
Public Accountant

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)
Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)
WTC 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 - Indonesia
: +62 21 50992901 / 31192901
: +62 21 52905555 / 52905050
www.pwc.com/id

Notaris
Notary

Lenny Janis Ishak, S.H.

Jl. Hang Lekir IX No.1
Kebayoran Baru Jakarta 12120
: 021 – 7221077
: 021 - 7233855

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Public Appraiser

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP RHR)
Menara Kuningan 8th Floor
Jln. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5
Jakarta 12940
: +6221 3001 6002, +6221 2205 7243
: +6221 3001 6003
: secretariat@rhr.co.id
www.kjpp.rhr.co.id

Konsultan Bisnis
Financial Consultant

PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940
: 021-5212901

KPMG Siddharta Advisory
35th Floor Wisma GKBI 28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210, Indonesia
: 021 574 2333 / 2888

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN
COMPANY SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

Kantor Konsultan Hukum
Business Consultant

Murdono Lawfirm Mitra Building 9th floor, Suite 902 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 21 Jakarta 12930 : 021 - 5220027	**UMBRA Partnership** Telkom Landmark Tower, Tower 2, 49th Floor, Jakarta : 021 - 5082 0999
HHP Law Firm Pacific Century Place Lt.35 Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, Jakarta 12190 : 021 - 2129608888	**Azwar Hadisupani Rum & Partners** Menara Palma Lantai 15 Unit 15-01 Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 : 021 – 25983316
Lubis Ganie Surowidjojo Menara Imperium Lt. 30, Jl. H. Rangkayo Rasuna Said Kav. 1, Kuningan, Jakarta, 12980 : 021 - 8315005	**Ginting & Reksodiputro in association with Allen & Overy** The Energy Building, 15F SCBD Lot. 11A Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190 : 021 - 29951700
SSEK Legal Consultants 14th Floor, Mayapada Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta 12920 : 021 – 5212038, 2953 2000 : ssek@ssek.com	**Assegaf Hamzah & Partners** Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18, Jakarta 12170 : 021 – 2555 7800

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARE LISTING

Sampai dengan tahun 2021, PJB belum pernah melakukan pencatatan saham di Bursa Saham maupun di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa tempat saham dicatatkan.

As of 2021, PJB has not listed other securities on any Stock Exchange. Therefore, there is no information on securities listing chronology, types of corporate action, change in the number of securities as well as name of the exchange and securities rating.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA
CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES

Sampai dengan tahun 2021, PJB belum pernah melakukan pencatatan efek lainnya di Bursa Saham maupun di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan efek, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek.

As of 2021, PJB has not listed other securities on any Stock Exchange. Therefore, there is no information on securities listing chronology, types of corporate action, change in the number of securities as well as name of the exchange and securities rating.

INFORMASI *WEBSITE*
PJB WEBSITE

PJB berkomitmen meningkatkan kualitas dan akses informasi Perusahaan kepada publik sebagai wujud implementasi transparansi dan keterbukaan informasi yang sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

PJB is committed to managing website according to the applicable regulations in line with Public Information Disclosure Law and the good corporate governance.

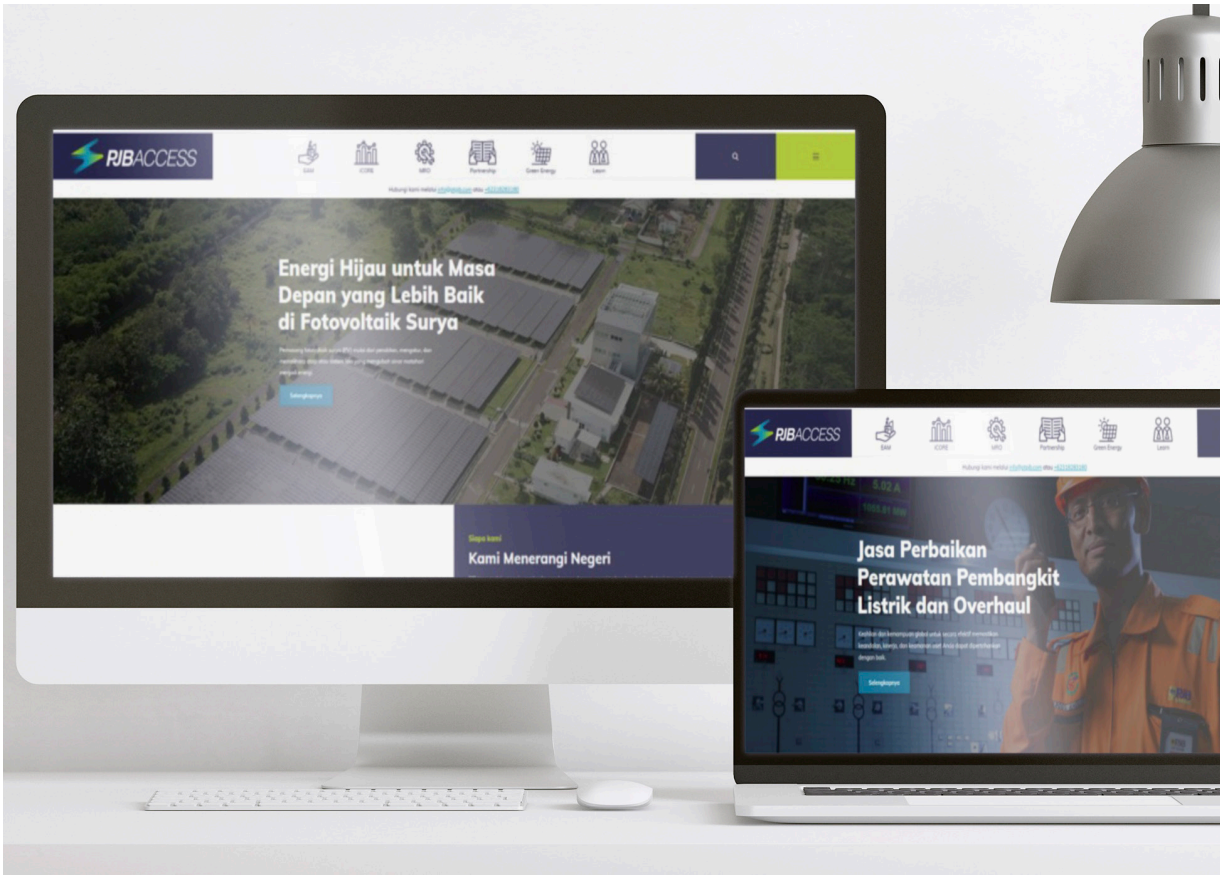

Situs web resmi PJB tersedia dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang dapat diakses pada *link* www.ptpjb.com, dengan menyajikan berbagai informasi terkini, akurat dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik.

PJB official website can be accessed at www.ptpjb.com and is available in Indonesian and English. PJB website provides communicative and up-to-date information needed by all stakeholders and general public following the principles of transparency and information disclosure to public.

INFORMASI WEBSITE
PJB WEBSITE

Website PJB dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, mencakup informasi antara lain sebagai berikut:

1. **Informasi terkait Perusahaan**, memuat informasi terkait dengan Tentang Kami, Struktur Organisasi, Lini Bisnis, PJB Group, Perjalanan PJB, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Penghargaan, Budaya Kerja, Pencapaian serta LK3 & CSR.
2. **Informasi terkait Tata Kelola Perusahaan**, menyajikan berbagai informasi terkait dengan *Whistle Blowing System,* Anti Penyuapan, PJB Bersih, Pedoman Kerja Direksi dan Dekom, Tata Kelola Perusahaan, RUPS, Penilaian Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Pengadaan, dan Piagam Internal Audit.
3. **Informasi Pengadaan**, menu ini berisikan pilihan informasi terkait dengan Info Pendaftaran CSMS, *E-Procurement* dan *Register* Daftar Penyedia Perusahaan (DPP)
4. **Informasi tentang Media**, memuat informasi terkait dengan MACO PJB, Info PJB, Seputar PJB, dan *Press Release.*
5. **Informasi terkait Investor**, menyajikan berbagai informasi terkait dengan Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan, Publikasi Posisi Keuangan, Ikhtisar Data Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Statistik Perusahaan.
6. **Informasi terkait Kontak**, menu ini berisikan pilihan informasi terkait dengan Alamat Kami dan *feedback sponsorship*.

PJB Access

Merupakan *platform digital* informasi layanan PJB untuk mempermudah pelanggan potensial dalam mengeksplor keunggulan layanan serta menggunakan layanan tersebut untuk meningkat performa bisnis Perusahaan, memuat 6 layanan unggulan yaitu EAM, ICORE, *Green Energy,* MRO, *Partnership*, dan *Learning.*

Informasi tambahan dapat dilihat di bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PJB website can be accessed easily by the wider community, including information as follows:

1. **Company related information**, containing About Us, Organizational Structure, Business Line, PJB Group, PJB Milestone, Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, Awards, Work Culture, Achievements, and LK3 & CSR.
2. **Corporate Governance Information**, presents various information related to Whistleblowing System, AntiBribery, Clean PJB, Board of Directors and Board of Commissioners Charter, Corporate Governance, GMS, Corporate Governance Assessment, Procurement Guidelines, and Internal Audit Charter.
3. **Procurement Information** contains the option of information related to CSMS Registration Info, CSMS Registration, E-Procurement, and List of Company Providers (DPP)
4. **Information on Media** contains information related to MACO PJB, PJB Info, Regarding PJB, and Press Release.
5. **Information on Investors** presents various information related to Annual Reports, Sustainability Reports, Financial Position Publications, Financial Data Highlights, Annual Financial Statements, and Company Statistics.
6. **Information related** to Contact, contains information option related to Our Address and sponsorship feedback..

PJB Access

Digital platform for PJB service information to make it easier for potential customers to explore services excellence and use these services to improve the Company's business performance, containing 6 excellent services, namely EAM, ICORE, Green Energy, MRO, Partnership, and Learning.

Additional information can be found in the Company Information and Data Access section of the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT REVIEW

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Sebagai *business driven* utama, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan andal menjadi kebutuhan dalam memaksimalkan kinerja Perusahaan. Perubahan lingkungan bisnis dan perkembangan industri yang dinamis membutuhkan dukungan yang maksimal dari SDM yang handal dan kompeten. Untuk menjawab kebutuh SDM yang berkualitas dan kompeten di bidangnya dibutuhkan pengelolaan SDM yang terintegrasi.

As the main business-driven, Qualified and Reliable Human Capital (HC) is required to optimize the Company's performance. Changes on business environment and dynamic industrial development require maximum support from reliable and competent human resources. To answer the need for the qualified and competent human resources in their fields, integrated human resource management is needed.

Pengelola Sumber Daya Manusia
Human Capital Management

Pengelolaan SDM di lingkungan PJB diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali beserta perubahannya yaitu Peraturan Direksi No. 022.P/019/DIR/2020 dan No. 0001.P/019/DIR/2021. Dalam mengelola SDM, Direktorat SDM dan Administrasi didukung oleh 3 (tiga) Divisi dan 1 (satu) Unit yaitu Divisi Sistem *Human Capital* & Organisasi, Divisi Pengembangan Talenta, dan Divisi *Performance Management* & Sistem Informasi *Human Capital* serta Unit PJB *Academy*. Fungsi utama Direktorat SDM adalah memastikan pengelolaan *Human Capital* baik dari sisi kapasitas dan kapabilitas yang meliputi perencanaan dan pengendalian Sistem Manajemen *Human Capital*, Pelatihan dan Pengembangan *Human Capital* serta Administrasi SDM sesuai dengan strategi yang menunjang pengembangan bisnis Perusahaan.

PJB's HC Management is regulated in the Decree of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 010.P/019/DIR/2019 regarding the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali and its amendments through Board of Directors Decree No. 022.P/019/DIR/2020 and No. 0001.P/019/DIR/2021. In managing its Human Capital, the HC and Administration Directorate is supported by 3 (three) Divisions and 1 (one) Unit: the Human Capital & Organizational Systems Division, Talent Development Division, and the Performance Management & Human Capital Information System Division as well as the PJB Academy Unit. The main function of the HC Directorate is to ensure the management of Human Capital both in terms of capacity and capability which includes planning and controlling the Human Capital Management System, Human Capital Training and Development, and HC Administration following the strategies that support the Company's business development.

Tata Kelola Sumber Daya Manusia
Human Capital Governance

Pengelolaan SDM meliputi perencanaan dan pengendalian sistem manajemen, pelatihan dan pengembangan, serta administrasi SDM. Pengelolaan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 009.P/019/DIR/2020 tentang *Human Capital Management System* (HCMS), yang terdiri dari tujuh sistem sebagai berikut:

HC Management includes planning and controlling management systems, training and development, and administration. The management is regulated in the Decree of the Board of Directors No. 009.P/019/DIR/2020 concerning the Human Capital Management System (HCMS), which consists of seven systems as follows:

Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja
HC Organizational Development and Planning System

Pengembangan organisasi adalah penjabaran strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang sesuai dengan visi, misi dan tata nilai. Perencanaan tenaga kerja digunakan sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen yang mengacu pada kebutuhan organisasi dan Strategi Perusahaan.

Organizational development is short-term, mid-term, and long-term elaboration of strategies in line with the vision, mission, and values. Manpower planning is used as the basis for the recruitment implementation that refers to organizational needs and Strategy of the Company

Sistem Rekrutmen Karyawan
Employee Recruitment System

Rekrutmen dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi Formasi Tenaga Kerja yang kosong atau akan kosong dalam rangka menjamin kontinuitas ketersediaan Karyawan untuk mendukung operasional, peningkatan kinerja dan pencapaian visi perusahaan.

Recruitment is carried out to hire employees who fulfill the competency required to occupy Manpower Formations that are unoccupied or will be unoccupied in order to ensure the continuity of Employee availability to support operational, performance improvement, and vision achievement of the Company.

Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir
Competency and Career Development System

Pembinaan Kompetensi dan Karir karyawan telah dilakukan secara sistemik dan dibuat menarik untuk dapat memacu peningkatan kinerja karyawan. Pembinaan kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria talenta yang diperoleh dan merupakan hasil pencapaian kinerja serta penilaian kompetensi yang ditetapkan periodik semester. Bagi karyawan yang memiliki penilaian kinerja baik akan lebih cepat mendapatkan kenaikan *grade*. Dalam setiap tingkatan levelnya diberikan pembekalan yang tersistematis dan komprehensif dalam suatu Diklat Penjenjangan untuk mempersiapkan kompetensi dalam menjalankan tugas yang lebih tinggi. Sedangkan kesempatan karir disusun untuk memberikan kesempatan percepatan karir bagi karyawan yang *star performer* untuk dapat menjalankan *fast track* program. Alur penempatan karyawan disusun dengan mempertimbangkan pengkayaan kompetensi secara berjenjang melalui mekanisme *career path*. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam rangka menonjolkan keunggulan kompetensi diberikan jalur karir kepakaran/*expertise*. Hal ini juga untuk memfasilitasi kemampuan karyawan yang memiliki kompetensi teknis yang baik namun memiliki keterbatasan kemampuan *leadership*. Kedua hal tersebut dibuat untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan yang mayoritas merupakan generasi millenial.

Employee Competency and Career Coaching has been carried out systemically and made interesting to be able to push ahead the improvement in employee performance. Competency coaching is implemented by considering the talent criteria obtained and is the result of performance achievement and competency assessment set periodically in the semester. For employees who have good performance assessment, are going to get faster grades. At each level, the systematic and comprehensive debriefing in the Education Training is given to prepare competencies in carrying out higher tasks. While career opportunities are prepared to provide career acceleration opportunities for star performers employees to be able to run the fast track program. The flow of employee placement is prepared by considering the gradual enrichment of competencies through the career path mechanism. To improve the Company competitiveness in order to highlight the advantages of competence, expertise career path is provided. It is also to facilitate the employees' ability who have good technical competence but have limited leadership abilities. Both are implemented to improve motivation and performance of employees which the majority are millennials.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Sistem Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training System

Pendidikan dan pelatihan karyawan dilakukan dengan prinsip berkesinambungan. Berdasarkan SK Direksi PT PJB No. 0033.K/019/DIR/2021 tentang Sistem Pembelajaran, jenis program pembelajaran adalah:

a. Program pembelajaran seleksi karyawan baru,
b. Program pembelajaran profesi,
c. Program pembelajaran Penjenjangan,
d. Program pembelajaran Penunjang,
e. Program pembelajaran Strategis Korporat,
f. Program pembelajaran Masa Purnabakti.

Employee education and training are carried out continuously. Based on the Decree of the Board of Directors of PT PJB No. 0033.K/019/DIR/2021 concerning Learning Systems, the types of learning programs are:

a. New employee screening program,
b. Professional learning program,
c. Promotional learning program,
d. Supporting learning programs,
e. Corporate Strategic learning program,
f. Retirement learning program.

Sistem Manajemen Kinerja
Performance Management System

Manajemen kinerja karyawan dilakukan untuk menyelaraskan target kinerja Perusahaan dan Unit dengan target kinerja Karyawan sekaligus memotivasi karyawan dalam meningkatkan kompetensi dan kontribusinya bagi Perusahaan dengan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai visi Perusahaan. Prinsip Manajemen Kinerja Karyawan adalah fokus, terukur, transparan dan obyektif. Manajemen Kinerja Karyawan terdiri atas 3 siklus yaitu Perencanaan, Pemantauan dan Penilaian Kinerja yang dilakukan setiap 1 (satu) semester.

Employee performance management is performed to adjust the Company and Unit performance targets with employee performance targets while motivating employees to improve their competence and contribution to the Company by optimizing resources to achieve the visions of Company. Principles of Employee Performance Management are focus, measurable, transparent, and objective. Employee Performance Management consists of three cycles, including Planning, Monitoring, and Performance Assessment conducted every 1 (one) semester.

Sistem Penghargaan
Reward System

Sistem penghargaan yang diberikan berupa:

a. Penghargaan Intrinsik: pendidikan formal, sertifikasi profesi, fasilitas kerja khusus, program keseimbangan hidup, bantuan hukum dan pengakuan (*recognition*).
b. Penghargaan Ekstrinsik: kompensasi baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap serta manfaat karyawan.

The reward system is provided in the form of the following:

a. Intrinsic awards: formal education, professional certification, special work facilities, work-life balance programs, legal assistance, and recognition.
b. Extrinsic Award: both permanent and non-permanent compensation as well as employee benefits.

Sistem Hubungan Industrial
Industrial Relations System

Prinsip yang dipegang dalam sistem hubungan industrial adalah profesional, harmonis, dan transparan. Permasalahan yang dibahas dalam hubungan industrial adalah permasalahan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan hubungan kerja antara karyawan, manajemen, dan pemerintah.

The principles held in the industrial relations system are professional, harmonious, and transparent. The issues discussed in industrial relations are issues which are directly and indirectly related to work relations among employees, management, and the government.

Program Strategis Pengelolaan SDM Tahun 2021
HC Management Strategic Program in 2021

Adapun program utama yang menjadi fokus pengelolaan SDM tahun 2021 sesuai dengan roadmap adalah:

1. **Organisasi, Kapabilitas, dan Budaya**
   a. Pengembangan *digital mindset*,
   b. Pengembangan infrastruktur pendukung/*mobile worker*.
2. **Penguatan Kapabilitas Bisnis, Teknologi, dan Manajemen**

   Penguatan Kapabilitas Bisnis & *Marketing* serta Keuangan

3. **Penyelarasan Organisasi, Sistem Manajemen SDM, dan Budaya dengan Strategi Perusahaan**
   a. *Flexible organization*,
   b. Pengembangan sistem penugasan karyawan untuk mendukung integrasi *resource* PJB Group,
   c. *Alignment* dan Penguatan Budaya Perusahaan.
4. **Penguatan Sistem Pengelolaan Karir, *Expertise*, dan Kepemimpinan**
   a. Program *Future Talent Development* PJB,
   b. Pengelolaan sistem *expertise* untuk merespon *customer*,
   c. Implementasi *talent mobility*,
   d. *Leader/expert create next leader/expert* sebagai bentuk penyiapan kapabilitas *resource*.
5. **Optimasi dan Penguatan PJB *Academy***
   a. Pengembangan ekosistem inovasi,
   b. Monetisasi kompetensi/pembelajaran.

The main programs as the focus of HC management in 2021 based on the roadmap are:

1. **Organization, Capabilities, and Culture**
   a. Digital mindset development,
   b. Development of supporting infrastructure/mobile workers.
2. **Strengthening Business, Technology, and Management Capabilities**
   Strengthening Business & Marketing and Finance Capabilities
3. **Alignment of Organization, HR Management System, and Culture with Company Strategy**
   a. Flexible organization,
   b. Development of employee assignment system to support PJB Group resource integration,
   c. Alignment and Strengthening of Corporate Culture.
4. **Strengthening Career Management System, Expertise, and Leadership**
   a. PJB Future Talent Development Program,
   b. Management of system expertise to respond to customers,
   c. Implementation of talent mobility,
   d. Leader/expert creates the next leader/expert as a form of preparing resource capabilities.
5. **Optimization and Strengthening of PJB Academy**
   a. Innovation ecosystem development,
   b. Monetization of competence/learning.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Rekrutmen Sumber Daya Manusia
Human Capital Recruitment

Sebagai salah satu program strategis yang dapat mendukung kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM, PJB melakukan *resourcing strategy* melalui *Build, Buy, and Borrow* yang merupakan kombinasi pemenuhan SDM yang berasal dari internal PJB, maupun dari eksternal melaui skema Tugas karya PLN Group, rekrutmen *Fresh Graduate* serta rekrutmen *Pro-Hire* melalui PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

- ***Build:*** mengembangkan talent yang ada di perusahaan, dengan cara merekrut talent-talent baru *(fresh graduate)* dan mengembangkan kompetensi mereka agar dapat memenuhi persyaratan.
- ***Buy:*** merekrut karyawan yang sudah kompeten dibidang tertentu dari eksternal perusahaan *(expert hiring).*
- ***Borrow:*** mendatangkan sementara karyawan yang kompeten dari luar perusahaan, diantaranya dengan tugas karya dari dan ke PLN atau ke anak perusahaan PJB.

Dalam merencanakan kebutuhan karyawan, atau yang disebut dengan *manpower planning,* setidaknya ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Karyawan yang akan pensiun,
2. Pengembangan unit bisnis/usaha perusahaan,
3. Pengembangan organisasi.

Pada tahun 2021, PJB mulai menjajaki skema pemenuhan kebutuhan melalui *Pro-Hiring* PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direksi No. 0028.P/019/DIR/2021 tentang Rekrutmen Karyawan PKWT.

Jumlah karyawan yang direkrut adalah sebanyak 1 karyawan dengan metode rekrutmen skema *buy Pro-Hire* PKWT. Adapun di tahun 2021 ini juga PJB membuka *open recruitment* dengan skema yang sama pada tanggal 18 – 23 November 2021 bagi 4 posisi sebagai berikut.

1. *Senior Specialist I Corporate Strategic,*
2. *Senior Specialist I Corporate Finance,*
3. *Senior Specialist II Project & Product Dealing,*
4. *Senior Specialist II Marketing Planning.*

As one of the strategic programs that can support the readiness of HC capacities and capabilities, PJB undertakes a resourcing strategy through Build, Buy, and Borrow which is a combination of fulfilling HC from PJB's internal sources, as well as from external sources through PLN Group's Assignment scheme, recruitment of Fresh Graduates, and Pro-Hire recruitment through PKWT (Specific Time Work Agreement).

- **Build**: develop existing talent in the company, by recruiting new talents (fresh graduates) and developing their competencies to meet the requirements.
- **Buy**: recruiting employees who are already competent in certain fields from external companies (expert hiring).
- **Borrow**: temporarily bring in competent employees from outside the company, including with work assignments to and from PLN or to PJB's subsidiaries.

In planning employee needs, or what is known as manpower planning, there are at least three factors to consider:

1. Employees who will retire,
2. Development of the Company's lines of business/business units,
3. Organizational development.

In 2021, PJB will start exploring a scheme to fulfill needs through Pro-Hiring PKWT (Specific Time Work Agreement) following the provisions of the Board of Directors Regulation No. 0028.P/019/DIR/2021 concerning Recruitment of PKWT Employees.

The number of employees recruited is 1 employee using the buy Pro-Hire PKWT scheme recruitment method. Meanwhile, in 2021, PJB will also open recruitment with the same scheme on 18 – 23 November 2021 for the following 4 positions.

1. Senior Specialist I Corporate Strategic,
2. Senior Specialist in Corporate Finance,
3. Senior Specialist II Project & Product Dealing,
4. Senior Specialist II Marketing Planning.

Joint Recruitment PLN Group
PLN Group's Joint Recruitment

Pelaksanaan rekrutmen di PLN dan Anak Perusahaannya terpusat melalui mekanisme *Joint Recruitment* PLN Group. Sinergi pelaksanaan rekrutmen ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan integrasi SDM di PLN Group. Proses ini dimulai dengan:

1. PJB mengirimkan data kebutuhan *Manpower Planning* (MPP) ke PLN,
2. PLN melakukan *Joint Recruitment* untuk pemenuhan kebutuhan setiap PLN Group.

Dikarenakan oleh adanya kebijakan *zero recruitment* sesuai dengan arahan yang tercantum dalam RUPS Tahun 2020, tidak ada kegiatan perekrutan karyawan melalui jalur *Joint Recruitment* PLN Group di tahun 2021.

Recruitment process at PLN and its subsidiaries has been centralized through the mechanism of PLN Group's Joint Recruitment. The synergy of this recruitment implementation is applied in order to improve the efficiency and integration of PLN Group's Human Capital. This process starts with the following:

1. PJB sends data on Manpower Planning (MPP) needs to PLN,
2. PLN conducts Joint Recruitment to meet the needs of each PLN Group.

Due to the zero recruitment policy following the directions stated in the 2020 GMS, there are no employee recruitment activities through PLN Group Joint Recruitment line in 2021.

Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia
HC Number and Composition

Jumlah SDM pada tahun 2021 adalah sebanyak 3.071 karyawan. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 sebanyak 3.123 karyawan. Komposisi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang jabatan, kelompok usia, dan jenis kelamin telah diuraikan sebelumnya pada bagian Profil Perusahaan sub bab Profil SDM PJB.

The number of HR in 2021 is 3,071 employees. This number decreased compared to 2020 as many as 3,123 employees. The composition of employees based on education level, position level, age group, and gender has been previously described in the Company Profile section, PJB HR Profile subchapter.

Pendidikan dan Pembelajaran Sumber Daya Manusia
Human Capital Education and Learning

Selama tahun 2021, pelaksanaan Pendidikan dan Pembelajaran adalah sebanyak 764 pelatihan dengan jumlah peserta yang diikutsertakan sebanyak 14.445 karyawan. Seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam ikut serta dalam pembelajaran dan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan bidang jabatan, tingkat kebutuhan dan kemampuan Perusahaan saat ini.

Pendidikan dan pelatihan SDM secara lebih lengkap telah diuraikan sebelumnya pada bagian Profil Perusahaan sub bab Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal.

In 2021, the implementation of Education and Learning is 764 training with the number of participating employees are 14,445. All employees have equal opportunities to participate in learning and education. However, in its implementation, it is still adjusted to the position, the needs, and the Company's conditions.

Human resources education and training have been described in more detail previously in the Company Profile section, sub-chapter Education and Training for the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

PJB Academy
PJB Academy

PJB Academy, dibentuk seiring dengan proses transformasi PJB Group berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB No. 041 tanggal 1 Juli 2016. Terbentuknya PJB Academy dilatarbelakangi oleh perlunya untuk membangun dan memperkuat kembali kejayaan PJB dalam keseimbangan, yaitu kompetensi *Operation & Maintenance* (O&M) serta Manajemen Aset Pembangkitan sebagai modal utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*, sementara di sisi lain, untuk menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan korporasi, maka PJB harus berkembang maju dalam *competitive market,* seiring dengan dinamika bisnis ketenagalistrikan di Indonesia yang utamanya sebagai dampak *multiplier effect* dari proyek 35 GW.

PJB Academy, established along with the transformation process of PJB Group based on Decree of PJB's Board of Directors No. 041 on July 1, 2016. The establishment of PJB Academy is according to the needs to rebuild and enhance the glory of PJB in balance, namely Operation & Maintenance (O&M) competence and Power Plant Asset Management as the main capital to provide best services to stakeholders; while on the other hand, to guarantee corporate growth, PJB has to develop in the competitive market, in line with the dynamics of the electricity business in Indonesia which is mainly the impacts of the multiplied effect of the 35 GW project.

PJB Academy mendapatkan Sertifikat Internasional dari PEARSON Assured UK sebagai bentuk pengakuan bahwa perangkat pembelajaran di PJB Academy sudah berstandar kelas dunia dan menjadi rujukan *best practice*. Hal ini berarti kualitas proses pembelajaran PJB Academy sudah memenuhi standar Internasional PEARSON Assured UK.

PJB Academy has received International Certificate from PEARSON Assured UK as the recognition that the learning facilities at PJB Academy already have world class standard and become the reference for best practices. It means that the quality of PJB Academy's learning process has met PEARSON Assured UK International standards.

Selama pandemi Covid 19, meskipun memiliki keterbatasan aksesibilitas, PJB Academy tetap berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi seluruh karyawan PJB, melalui *digital learning* yang telah dimiliki dan dikembangkan oleh PJB Academy, pembelajaran yang mengharuskan tatap muka kini dapat digantikan secara *virtual*. *Digital learning* yang dimiliki oleh PJB Academy selain dilaksanakan secara konvensional seperti *e-learning* atau *blended learning*, juga memiliki *Virtual Reality* sebagai bentuk pembelajaran simulasi untuk karyawan-karyawan yang bekerja di lapangan, selain itu juga pembelajaran dikemas dalam program seperti ngopi (ngobrol pintar), spider (*inspiring leader*), sparepart (*sharing* pengetahuan dari *partner*), daku (bedah buku), serta menghadirkan narasumber-narasumber profesional dan terkemuka untuk menarik minat karyawan PJB, sehingga *transfer knowledge* tetap dapat berjalan meski terhambat oleh kondisi/keadaan selama pandemi.

During COVID-19 Pandemic and all limited accessibilities, PJB Academy is still committed to developing the competency of all PJB employees, through digital learning that has been owned and developed by PJB Academy, the face-to-face learning is now can be replaced with virtual learning. Digital learning owned by PJB Academy is not only carried out coventionally such as e-learning or blended learning, but also has Virtual Reality as representation of simulation learning for employees who work in the field. In addition, the learning is also packaged in programs, such as ngopi (smart chat), spider (inspiring leader), sparepart (knowledge sharing from partner), and daku (book review) programs, as well as presenting professional and leading speakers to attract PJB employee's interest, so that the transfer knowledge can still be performed despite hampered by the condition/situation during the pandemic.

Realisasi Program Kerja Sumber Daya Manusia Tahun 2021
Realization of HC Work Program in 2021

Direktorat SDM PJB mempunyai beberapa indikator dalam mengukur kinerja pengembangan SDM melalui pencapaian sasaran strategis PJB SDM, di antaranya adalah kesiapan *Human Capital Readiness* (HCR), *Organization Capital Readiness* (OCR) dan *Information Capital Readiness* (ICR) dalam mengukur kematangan atau maturitas proses bisnis serta hasil kinerja yang dicapai. Pada tahun 2021, pencapaian pemenuhan target tersebut adalah sebagai berikut:

PJB's HC Directorate has several indicators for measuring the performance of HC Development through the achievement of PJB HC strategic targets, including the readiness of Human Capital Readiness (HCR), Organization Capital Readiness (OCR), and Information Capital Readiness (ICR) in measuring the maturity or maturity of business processes and performance results achieved. In 2021, the achievement of meeting these targets is as follows:

Indikator Kinerja SDM Tahun 2021
HC Performance Indicator in 2021

Aspek Aspect	Target			Realisasi Realization		
	MLI	KPI	Skor Score	MLI	KPI	Skor Score
HCR	4,2	5	4,56	4,2	5	4,56
OCR *Alignment*	4,2	5	4,56	4,2	5	4,56
OCR *Leadership*	4,2	5	4,56	4,2	5	4,56
OCR *Culture*	4,2	5	4,56	4,2	5	4,56
OCR *Teamwork*	4,2	5	4,56	4,2	5	4,56

Sistem Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia
Performance of HC Management System

Sistem Manajemen Kinerja Karyawan (SIMKK) PJB menggunakan sistem *online* yang terbagi dalam beberapa periode untuk memastikan terjadinya komunikasi, diskusi, dan bimbingan yang efektif dari atasan kepada para staf. Pelaksanaan SIMKK mengacu pada prinsip fokus, terukur, transparan, dan objektif. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, SIMKK dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja karyawan.

PJB's Employee Performance Management System (SIMKK) uses an online system that is divided into several periods to ensure effective communication, discussion, and guidance from higher-level to lower-level employees. The implementation of SIMKK refers to the principle of focus, measurable, transparent, and objective. Based on these principles, SIMKK is divided into 3 (three) stages: planning, monitoring, and evaluating employee performance.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Karyawan Employee

Melakukan pengisian Sasaran Kinerja Perorangan (SKP) di SIMKK
Filling out Individual Performance Target (IPT) in SIMKK

Atasan Supervisor

Melakukan komunikasi tentang KPI yang melekat di bawahan (target, kurun waktu, dll.)
Communicating KPI that is inherent in subordinate (targets, period of time, etc.)

1 Perencanaan SKP
IPT Planning

2 *Approval* SKP
IPT Approval

Atasan Supervisor

Melakukan *approval* terhadap SPK bawahannya melalui SIMKK
Approving the subordinate's IPT through SIMKK

3 Pemantauan (*Monitoring* & Revisi)
Monitoring (Monitoring & Revision)

Atasan Supervisor

Melakukan komunikasi terhadap *progress* pencapaian KPI bawahannya
Communicating KPI achievement progress of the subordinate

Karyawan Employee

Melakukan komunikasi tentang *progress* KPI yang dikerjakan (kendala yang dihadapi, status pencapaian, dll.)
Communicating KPI progress (challenges faced, status of achievement, etc.)

4 Pengisian Kuesioner Kompetensi
Filling out the Competence Questionnaire

Atasan Supervisor

Atasan melakukan pengisian kuesioner kompetensi bawahannya melalui SIMKK
Supervisor fills out competence questionnaire of its subordinate through SIMKK

5 Pengisian Pencapaian SKP
Filling out the IPT Achievement

Karyawan Employee

Melakukan pengisian realisasi SKP dan PDP lain di SIMKK
Filling out the realization of IPT and other PDPs in SIMKK

6 *Approval* Pencapaian Target
Approval of Target Achievement

Atasan Supervisor

Melakukan *approval* pencapaian terget SKP masing-masing bawahannya.
Approving the IPT target achievement of each subordinate

1. **Perencanaan**
   Persetujuan antara Atasan dan Bawahan terkait pekerjaan dan target yang harus diselesaikan.
2. **Pemantauan**
   Atasan memonitor progres pencapaian target bawahannya dan melakukan kegiatan *coaching/mentoring/counseling.*
3. **Evaluasi**
   Atasan melakukan pengukuran nilai sasaran kinerja perorangan dan kompetensi individu karyawan.

PJB melaksanakan penilaian kinerja terhadap karyawan pada setiap semester yang dilakukan oleh Divisi Performance Management & Sistem Informasi Human Capital.

1. **Planning**
   Agreement between higher-level and lower-level employees on job description and target to be settled.
2. **Monitoring**
   The higher-level employee monitors the lower-level employee's job completion progress and conducts coaching/mentoring/counseling.
3. **Evaluation**
   The higher-level employee assesses the individual performance results and competency of the lower-level employee.

PJB carries out employee performance appraisals every semester implemented by the Human Capital Performance Management & Information System Division.

Survei Karyawan
Employee Survey

Indeks Keterikatan Kerja Karyawan
Employee Engagement Index

PJB mengukur keterikatan karyawan terhadap Perusahaan melalui *Employee Engagement Survey* terhadap seluruh elemen tenaga kerjanya secara berkala, guna memastikan bahwa seluruh SDM berkontribusi maksimal terhadap kemajuan Perusahaan.

PJB measures employee engagement to the Company through the Employee Engagement Survey on all elements of its workforce on a regular basis, to ensure that all Human Capital has contributed optimally for the Company's progress.

Hasil *Employee Engagement Survey* pada tahun 2021 adalah sebesar 83,69 **(SANGAT *ENGAGED*).** Hasil tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar 84,41 **(SANGAT *ENGAGED*).** Berikut adalah rincian hasil *Employee Engagement Survey* pada tahun 2021:

The result of the Employee Engagement Survey in 2021 is 83.69 **(VERY ENGAGED).** This result decreased compared to 2020 which was 84.41 **(VERY ENGAGED).** The following are the detailed results of the Employee Engagement Survey in 2021:

Hasil *Employee Engagement Survey* Tahun 2021
Result of Employee Engagement Survey in 2021

Dimensi Dimension	*Engagement*
Brand Reputation & Culture	85,59
Career Management	82,24
Compensation & Benefits	84,06
Employee Value Proposition	83,76
Leadership	83,62
Learning & Development	82,52

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Dimensi Dimension	*Engagement*
Performance Management	83,16
Reward & Recognition	82,96
Teamwork	85,02
Working Environment & Infrastructure	84,04
Total	**83,69**

Indeks Kepuasan Kerja Karyawan
Job Satisfaction Index

PJB senantiasa berupaya memperhatikan dan meningkatkan kepuasan karyawan melalui penerapan berbagai kebijakan seperti remunerasi dan penghargaan. PJB secara rutin melakukan evaluasi terhadap kepuasan karyawan melalui *Job Satisfaction Survey* yang dilakukan secara *online*. Hasil survei tersebut kemudian dianalisis untuk kemudian dirumuskan tindak lanjutnya, baik tindak lanjut yang bersifat korporat maupun yang menjadi kewenangan unit-unit di struktur organisasi Perusahaan.

PJB always strives to consider and increase the employee satisfaction through the various policies implementation, such as remuneration and rewards. PJB routinely evaluates the employee satisfaction through online Job Satisfaction Survey. The results of the survey are then analyzed to formulate followup actions, both follow-up from the Company and other units in the Company's organization structure.

Hasil *Job Satisfaction Survey* pada tahun 2021 adalah sebesar 79,70 **(SANGAT PUAS).** Hasil tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 80,14 **(SANGAT PUAS).** Berikut adalah rincian hasil *Job Satisfaction Survey* pada tahun 2021:

The result of the Job Satisfaction Survey in 2021 is 79.70 **(VERY SATISFIED).** This result decreased compared to 2020 by 80.14 **(VERY SATISFIED).** The following are the details of the Job Satisfaction Survey results in 2021:

Hasil *Job Satisfaction Survey* Tahun 2021
Result of Job Satisfaction Survey in 2021

Dimensi Dimension	*Satisfaction*
Brand Reputation & Culture	80,78
Career Management	77,26
Compensation & Benefits	79,06
Employee Value Proposition	81,14
Leadership	80,19
Learning & Development	78,09
Performance Management	79,12
Reward & Recognition	78,76
Teamwork	82,42
Working Environment & Infrastructure	80,18
Total	**79,70**

Pengembangan Karir dan *Talent Management*
Career Development and Talent Management

PJB memfasilitasi pengembangan karier melalui program Manajemen Suksesi yang mengacu pada Peraturan Direksi PT PJB No. 031.P/019/DIR/2020 tentang Manajemen Suksesi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. PJB mengikutsertakan para karyawan yang memiliki kompetensi dan potensi terbaik dalam Manajemen Suksesi tanpa membedakan *gender* ataupun faktor-faktor lain seperti suku, agama, dan antar golongan. Seleksi Administrasi: memenuhi persyaratan dari sisi *grade*, penilaian kinerja, pendidikan, usia.

PJB facilitates career development through Succession Management program that refers to PJB's Board of Directors Regulation No. 031.P/019/DIR/2020 concerning Succession Management within PT Pembangkitan Jawa Bali. PJB assigns employee who has the best competency and potential in Succession Management regardless of gender or other factors such as ethnicity, religion, and groups. Administrative Selection: fulfilling the requirements in terms of grade, performance assessment, education, and age.

Manajemen Suksesi merupakan serangkaian proses penelusuran, pengidentifikasian, pembinaan dan pengembangan Karyawan dalam mengisi Jabatan yang dibutuhkan Perusahaan. Manajemen Suksesi ini difokuskan untuk pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional Ahli/ *Expertise* di Perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Adapun rangkaian proses dalam Manajemen Suksesi terdiri atas:

1. Pemetaan Karyawan,
2. Penetapan Karyawan yang masuk pada program *Talent Pool*,
3. Pembinaan pada program *Talent Pool* sebagai kandidat Suksesi Jabatan,
4. Persiapan urutan kandidat Suksesi Jabatan,
5. Penetapan dan pengesahan pemangku Jabatan.

Succession Management is a series of Employee tracking, identifying, coaching and developing processes in occupying Position needed by the Company. This Succession Management is focused for filling in the Structural and Expertise Functional Positions in the Company held routinely every year. The series of processes in Succession Management consist of:

1. Employee mapping,
2. Determining the Employee who gets in the Talent Pool program,
3. Coaching on Talent Pool program as Position Succession candidates,
4. Preparing the sequence of Position Succession candidates,
5. Determining and ratifying the management.

Dalam tahap pemetaan Karyawan akan d*ilakukan assessment talent* terhadap Karyawan yang telah memenuhi persyaratan secara administratif. *Assessment Talent* ini didesain untuk mengukur potensi dan kompetensi yang dimiliki para *talent*. Selanjutnya berdasarkan hasil *assessment talent* tersebut, Perusahaan akan mengelompokkan para *talent* tersebut ke dalam 9 Box HAV sebagaimana berikut:

In Employee mapping stage, talent assessment is also conducted to Employee who has meet the administrative requirements. This Talent Assessment is designed to measure potential and competencies owned by the talents. Futhermore, based on the talent assessment results, the Company wis going to classify the talent into 9 Box HAV as follows:

Potensi yang diperoleh dari hasil asesmen yang telah dilakukan,

1. Penilaian kompetensi yang diperoleh dari hasil penggabungan,
2. *History talent* (riwayat jabatan, jenjang jabatan, kriteria talenta),
3. Nilai kinerja,
4. Usulan diklat penjenjangan.

The potentials possessed from the results of the assessment that has been carried out:

1. Competency assessment obtained from the merger,
2. Talent's history (position history, position level, talent criteria),
3. Performance value,
4. Proposed promotional training.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Gambar HAV 9-*Box Model*
9-Box HAV Model

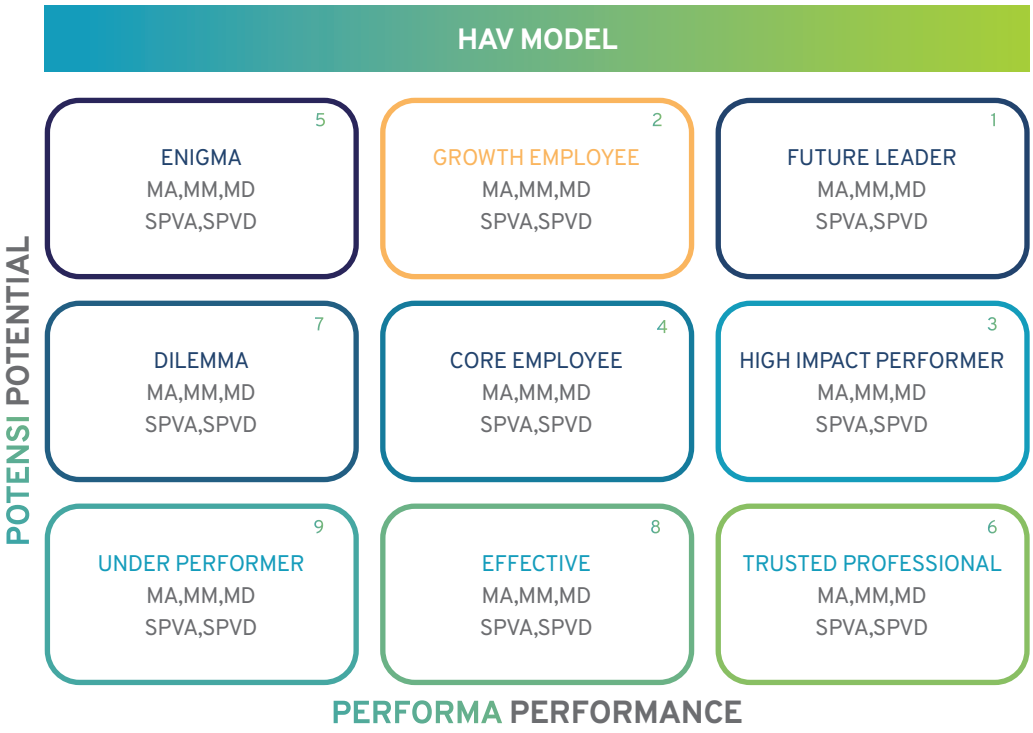

Catatan:
- MA = Manajemen Atas
- MM = Manajemen Menengah
- MD = Manajemen Dasar
- SPVA = Supervisor Atas
- SPVD = Supervisor Dasar

Notes:
- MA = Top Level Management
- MM = Middle Level Management
- MD = Basic Management
- SPVA = Top Level Supervisor
- SPVD = Basic Supervisor

Para *Talent* yang telah dikategorisasikan tersebut selanjutnya akan dilakukan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan *Talent* agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal saat menduduki jabatannya. Pembinaan *Talent* di PJB menggunakan metode pengembangan yang berfokus pada 4 (empat) ranah kompetensi yaitu *Interpersonal Skill, Leadership Skill, Business Skill,* dan *Intrapersonal Skill.* Program pembinaan *Talent* yang terdapat di PJB adalah sebagai berikut:

The Talents that have been classified then will be coached which purposed to increase Talent ability following the competency needed by the Company so that they can provide maximum contribution during occupying their position. The Talent coaching in PJB uses development methods that focus on 4 (four) competency areas, namely Interpersonal Skill, Leadership Skill, Business Skill, and Intrapersonal Skill. The Talent coaching program contained in PJB is as follows:

1. Diklat *Executive Education* (EE) untuk *level* manajemen dan *Supervisory Education*-1 (SE-1) untuk *level supervisor.*
2. *Project Assignment* yang terbagi menjadi:
   a. Program pengembangan dalam pekerjaan, seperti *On the Job Development, Job Enrichment, Job Enlargement, Special Assignment* dan Rotasi pekerjaan,
   b. Program pendidikan dan pelatihan, seperti *Action-based Learning*, Pelatihan/Lokakarya/Tugas Belajar, *Cross Training,* Studi Literatur,
   c. Program pendampingan seperti *Coaching, Counselling* dan *Mentoring.*

1. Training for Executive Education (EE) for management level and Supervisory Education-1 (SE-1) for supervisor level.
2. Project Assignment which is divided into:
   a. On-the-job development program, such as On the Job Development, Job Enrichment, Job Enlargement, Special Assignment and work rotation,
   b. Education and training program, such as Action-based Learning, Training/Workshops/Learning Assignment, Cross Training, Literature Study,
   c. Assistance program, such as Coaching, Counselling and Mentoring.

Di samping melaksanakan pembinaan, PJB juga melakukan retensi *Talent* guna memastikan *Talent* yang terpilih tetap bekerja dalam Perusahaan dan berkinerja sesuai dengan yang diharapkan melalui beberapa program akselerasi karir dan pendidikan formal pada Universitas terbaik dalam taraf nasional.

Besides coaching, PJB also conducts Talent retention to ensure that the chosen Talent continues to work in the Company and perform as expected through several career acceleration programs and formal education at the best national universities.

Pada tahun 2021, PJB telah melakukan serangkaian kegiatan *assessment* kader untuk berbagai level jabatan. Ketersediaan *talent* untuk jabatan Struktural seperti tergambar dibawah ini:

In 2021, PJB has carried out a series of cadre assessment activities for various levels of office. The availability of talent for Structural positions is explained as follows:

Tabel Pemenuhan Jabatan Struktural
Table of Structural Position Fulfillment

Deskripsi Description	Jumlah *Talent* Total Talents	Jumlah Formasi Total Formation
Manajemen Atas Top Level Management	10	2
Manajemen Tengah Middle Level Management	95	58
Manajemen Dasar Basic Management	375	155
Supervisor Atas Top Level Supervisor	800	415

Selain itu, sebagai bentuk integrasi PLN Group, PJB memberikan penugasan dan menerima karyawan melalui Sistem Tugas Karya. Berikut jumlah karyawan tugas karya masuk PJB dan tugas karya keluar PJB pada tahun 2021.

In addition, as a form of integration of the PLN Group, PJB assigns and receives work through the Work Assignment System. The following are the number of PJB's incoming work assignments and PJB's outgoing work assignments in 2021.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

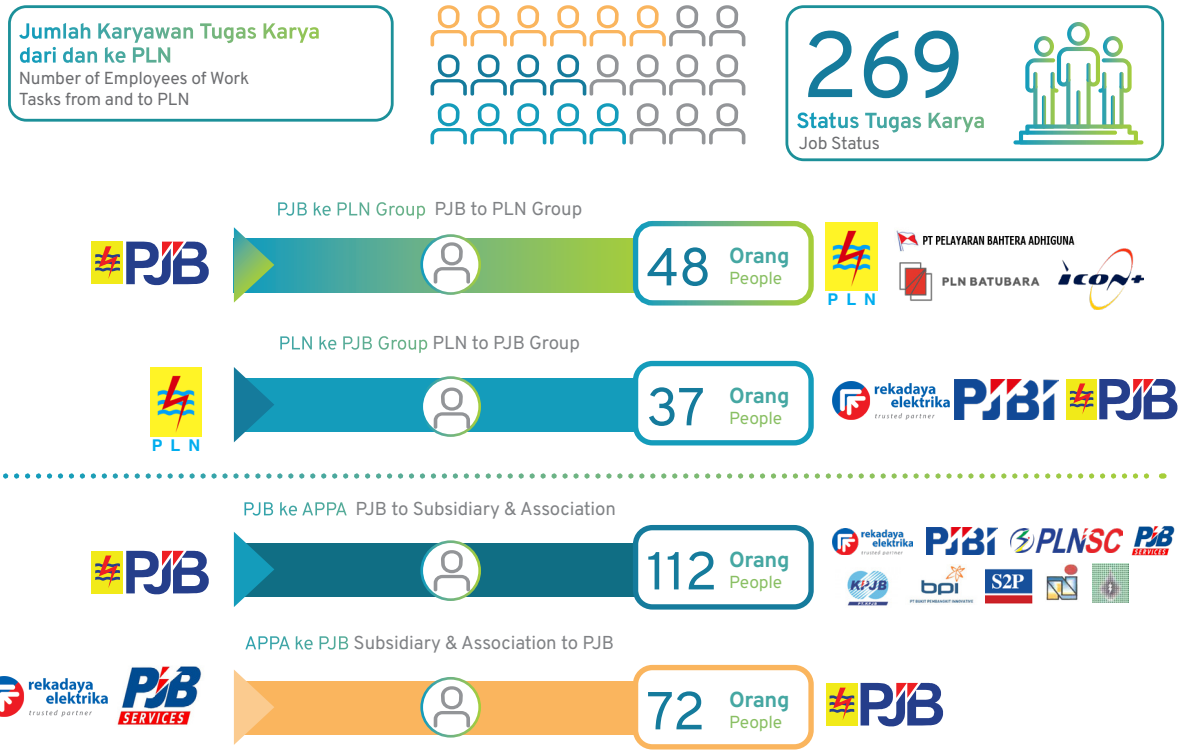

Pembentukan *Expertise Talent*
Expertise Talent Establishment

Sebagai salah satu program strategis PJB dalam mendukung sasaran kinerja perusahaan, telah dilakukan program pembentukan *talent* jalur *expertise* sejak tahun 2019 yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 009.P/019/DIR/2019 tentang Sistem *Expertise* dan pembaharuan Peraturan Direksi No. 011.P/019/DIR/2020 tentang Perubahan Peraturan Direksi PT PJB No. 009.P/019/DIR/2019 tentang Sistem *Expertise*. Pembentukan talent jalur kepakaran ini meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan kepakaran, yaitu tahapan penentuan jenis, jumlah dan nomenklatur kompetensi dan standar level kompetensi *expertise*.
2. Pemetaan *expertise*, yaitu tahap dalam menentukan kader *expertise*, proses seleksi kandidat sampai dengan penetapan *expert*. Tahapan seleksi dan uji kepakaran melewati serangkaian proses yang melibatkan Komite Uji Kepakaran baik dari internal maupun *external*.

As one of PJB's strategic programs in supporting the Company's performance targets, the expertise path talent formation program has been carried out since 2019 which is regulated in Board of Directors Regulation No. 009.P/019/DIR/2019 regarding the Expertise System and the renewal of the Board of Directors Regulation No. 011.P/019/DIR/2020 concerning Amendment to Regulation of the Board of Directors of PT PJB No. 009.P/019/DIR/2019 regarding Expertise System. The formation of this talent line of expertise includes several stages as follows:

1. Identifying the need of expertise, including determination of type, amount, and competency nomenclature stage and expertise competency level standards.
2. Expertise mapping, which is the stages in determining expertise talents, candidate selection process up to expert determination. Selection stage and expertise test pass through a series of processes involving the Expertise Test Committee both internal and external.

3. Pengelolaan dan pengembangan *expertise*, yaitu *talent expertise* dilibatkan dalam penugasan khusus serta mendapatkan program pengembangan seperti sertifikasi kompetensi, pendidikan formal ataupun menjadi narasumber di *international conference*.
4. Pembinaan *expertise*.

Adapun sejak tahun 2020, PJB sudah memilik 11 *expert* yang telah melewati serangkaian seleksi dan uji kepakaran dengan keterangan sebagai berikut:

3. Expertise management and development, namely the expertise talent is involved in special assignment as well as joining development programs such as competency certification, formal education, or becoming the resource person in international conference.
4. Expertise Coaching.

Since 2020, PJB has had 11 experts who have passed through a series of selections and expert tests with the following information:

Tabel Jumlah *Expert*
Table of Experts

No	Jenjang Kepakaran Expertise Path	Bidang Kepakaran Expertise Field	Jumlah Total
1	Expert	Electrical	2
2	Expert	Instrument & Control System	2
3	Junior Expert	Mechanical - Steam Turbine	2
4	Junior Expert	Mechanical - Gas Turbine	2
5	Junior Expert	Mechanical - CFB Boiler	1
6	Junior Expert	Mechanical - PC Boiler	1
7	Junior Expert	Mechanical - Pump	1

Pada tahun 2021, *expert* PJB telah dilibatkan dalam berbagai proyek di PJB dan juga dalam rangka memberi pengayaan dan pengembangan dalam menyusun kajian-kajian tentang pembangkit, telah diberikan pembekalan dan pembinaan dalam penyusunan *paper* dengan menggandeng pihak akademisi untuk melakukan pendampingan kepada para *expert* PJB dalam penyusunan *paper expertise*.

In 2021, PJB experts have been involved in various projects at PJB, and also to provide enrichment and development in compiling studies on power plants, briefing and coaching have been provided in the preparation of papers by cooperating with academics to assist PJB experts in the preparation of paper expertise.

Remunerasi Sumber Daya Manusia
HC Remuneration

PJB senantiasa mengimplementasikan strategi remunerasi yang kompetitif di industri tenaga listrik guna menarik, memotivasi individu-individu terbaik yang dimiliki PJB. PJB memiliki kebijakan remunerasi yang berlandaskan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019-2021 No. PT PJB 003.K/021/DIR/2019; No. SP PJB 067.K/SP-DPP/2019 (sebagaimana telah mengalami perpanjangan selama 1 tahun dan berakhir pada tanggal 25 Maret 2022) serta disesuaikan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PJB always implements a competitive remuneration strategy in the electric power industry to attract and motivate the best individuals owned by PJB. PJB has a remuneration policy based on the Collective Labor Agreement (CLA) for the period 2019-2021 No. PT PJB 003.K/021/DIR/2019; No. SP PJB 067.K/SP-DPP/2019 (as has been extended for 1 year which ends on March 25, 2022) and is adjusted to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Sesuai PKB 2019-2021, dalam nomenklatur kebijakan remunerasi di PJB terdapat istilah Kompensasi dan Sistem Remunerasi 3P. Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dalam bentuk uang yang diberikan pada kurun waktu tertentu (bulanan, semesteran, tahunan, winduan, dan lainnya). Sementara Sistem Remunerasi 3P adalah sistem remunerasi sebagai Kompensasi atas kompetensi individu, tanggung jawab dalam Jabatan, dan prestasi kerja yang diberikan kepada Karyawan dalam bentuk *Pay for Person, Pay for Position*, dan *Pay for Performance*. PJB menetapkan besaran remunerasi karyawan dengan mengacu pada Keputusan Direksi PJB. Berdasarkan keputusan Direksi tersebut, terdapat 3 jenis remunerasi yang diuraian sebagai berikut:

1. ***Pay for Person* (P1)**
   Tarif *Grade* (*Pay for Person*) adalah Kompensasi dalam bentuk uang setiap bulan, untuk menghargai kompetensi, kinerja, pengalaman kerja dan masa kerja yang besarannya ditentukan berdasarkan level kompetensi dan *Grade* Karyawan sesuai bentangan atau rentang nilai pada masing-masing *Grade* dengan mengikuti kenaikan remunerasi PT PLN (Persero).
2. ***Pay for Position* (P2)**
   Tunjangan Posisi (*Pay for Position*) adalah Kompensasi yang melekat pada jabatan yang besarnya ditentukan berdasarkan pengetahuan yang dibutuhkan, kompleksitas permasalahan yang dihadapi, tanggung jawab jabatan, tingkat kemahalan daerah dan faktor industri/indeks pembeda pasar/kompetensi khusus/keunggulan komparatif perusahaan, serta diberikan dalam bentuk uang setiap bulan yang bersifat tidak tetap.
3. ***Pay for Performance* (P3)**
   Pay for Performance adalah Kompensasi atas prestasi kerja Karyawan, penghargaan dari Perusahaan berdasarkan hasil kinerja yang dicapai, baik kinerja individu, kinerja unit maupun kinerja korporat yang merupakan kontribusi nyata dan terukur. PJB menerapkan kebijakan sistem remunerasi dengan berpedoman pada konsep *Merit System*. Perusahaan juga selalu memastikan telah mentaati seluruh aturan yang berlaku yang terkait dengan sistem remunerasi. Terkait dengan remunerasi, PJB senantiasa berupaya agar tidak terjadi *gap* remunerasi terlalu tinggi.

In line with the 2019-2021 CLA, in the nomenclature of the remuneration policy at PJB, there is the term Compensation and 3P Remuneration System. Compensation is a reward given by the Company to employees in the form of money given at a certain period (monthly, semi-annual, annual, 8-yearly, and others). Meanwhile, the 3P Remuneration System is a remuneration system as compensation for individual competencies, responsibilities in positions, and work performance given to employees in the form of Pay for Person, Pay for Position and Pay for Performance. PJB determines the amount of employee remuneration by referring to the Decree of the PJB Directors. Based on the decision of the Board of Directors, there are 3 types of remuneration which are described as follows:

1. **Pay for Person (P1)**
   The tariff for Pay for Person is monthly compensation in cash, to appreciate the competence, performance, work experience, and term of office which the amount is determined based on competency levels and Employee's Grade in accordance with the range or value ranges in each Grade by following the increase in remuneration of PT PLN (Persero).
2. **Pay for Position (P2)**
   Position Allowances (Pay for Position) is inherent to a position which is determined in accordance with the knowledge required, the complexity of the problems encountered, job responsibilities, regional cost, and industrial factor/market differentiator index/special competency/ comparative advantage of the Company, as well as provided in the non-permanent monthly allowances.
3. **Pay for Performance (P3)**
   Pay for Performance is Compensation for Employee's performance, reward from the Company is according to the performance results achieved, whether individual performance, unit performance or corporate performance as a tangible and measurable contribution. PJB implements remuneration system policy based on merit system concept. The Company also always ensures that it complies with all applicable rules related to the remuneration system. Related to remuneration, PJB always strives to avoid sharp remuneration gap.

Penerapan *Reward and Punishment*
Reward and Punishment

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan dibedakan dalam dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan dalam bentuk kompensasi dan manfaat karyawan. Untuk Kompensasi Karyawan terdiri dari:

1. Kompensasi tetap, berupa *Pay for Person* (P1) atau Tunjangan *Grade*.
2. Kompensasi tidak tetap yang terdiri atas:
   a. Kompensasi Jangka Pendek terdiri atas:
      - *Pay for Position* (P2) atau Tunjangan Posisi,
      - *Pay for Performance* (P3)
      - Insentif Kinerja/Bonus,
      - Tunjangan Hari Raya,
      - Tunjangan Cuti Tahunan
   b. Kompensasi Jangka Panjang, terdiri atas:
      - Tunjangan Cuti Besar,
      - Penghargaan Kesetiaan Kerja (winduan),
      - Bantuan Ganti Rugi/Peristiwa Luar Biasa,
      - Jaminan Sosial Karyawan,
      - Penghargaan Pensiun.

Untuk manfaat Karyawan terdiri atas :

1. Manfaat Umum yang terdiri atas Bantuan Pemeliharaan Kesehatan, Hak Cuti, Pakaian Dinas, Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP), Program Pensiun Iuran Pasti (Iuran Pemberi Kerja), Bantuan Pinjaman Pemilikan Rumah Karyawan (BPPR).
2. Manfaat Khusus (*Perquisites*) yang terdiri atas Rumah Jabatan, Rumah Instalasi, Kendaraan Dinas, Alat Komunikasi, Media Informasi dan Fasilitas Kerja.

Dan penghargaan Intrinsik yang diberikan berupa:

1. Program pendidikan formal dan sertifikasi profesi, yang merupakan kesempatan yang diberikan kepada Karyawan yang telah memberi kontribusi nyata kepada Perusahaan dan memenuhi kriteria talenta tertentu,
2. Fasilitas kerja khusus, yang merupakan fasilitas kerja khusus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Karyawan yang berhasil membuat inovasi yang berdampak pada efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan,

Awards presented to employees are divided into two types, namely extrinsic and intrinsic rewards. Extrinsic awards are provided in the form of compensation and employee benefits. For Employee Compensations consist of the following:

1. Fixed compensation, in the form of Pay for Person (P1) or Grade Allowance.
2. Variable compensation consisting of:
   a. Short Term Compensation consists of:
      - Pay for Position (P2) or Position Allowance,
      - Pay for Performance (P3)
      - Performance Incentives/Bonuses,
      - Holiday allowance,
      - Annual Leave Allowance
   b. Long-Term Compensation, consisting of:
      - Great Leave Allowance,
      - Work Loyalty Award (per eight years),
      - Compensation Assistance/Extraordinary Events,
      - Employee Social Security,
      - Retirement Award.

Employee benefits consist of:

1. General Benefits consisting of Health Care Assistance, Leave Entitlements, Official Clothing, Housing Facility Replacement Assistance (BPFP), Defined Contribution Pension Program (Employer Contribution), Employee Home Ownership Loan Assistance (BPPR).
2. Special Benefits (Perquisites) consisting of Office Houses, Installation Houses, Official Vehicles, Communication Tools, Information Media, and Work Facilities.

And the Intrinsic awards given are:

1. Formal education and professional certification programs, which are opportunities given to employees who have made a real contribution to the Company and meet certain talent criteria,
2. Special work facilities, which are special work facilities to carry out the duties and responsibilities assigned to Employees who have succeeded in making innovations that have an impact on cost efficiency and increased income,

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

3. Program Keseimbangan Hidup (*Life Balancing*) merupakan penghargaan bagi Karyawan yang berhasil melaksanakan efisiensi biaya Kesehatan pribadi dan keluarga dan atau presetasi kerja khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kerja Karyawan sehingga mampu meningkatkan loyalitas Karyawan pada Perusahaan,
4. Bantuan hukum berupa pembelaan atas tuntutan hukum dari pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab di perusahaan,
5. Pengakuan (*Recognition*) merupakan program pengakuan sosial yang diberikan kepada Karyawan yang telah mendapatkan penghargaan Direksi.

Bentuk pemberian penghargaan kepada karyawan dalam bentuk:
1. Pendidikan Formal,
2. Sertifikasi,
3. Penghargaan Kesetiaan Kerja (winduan),
4. Bantuan Pinjaman Pemilikan Rumah Karyawan (BPPR),
5. Penghargaan Pensiun.

Terdapat 2.578 karyawan yang mendapatkan *reward* sepanjang tahun 2021.

3. Life Balancing Program is a reward for employees who have succeeded in implementing cost efficiency for personal and family health and or special work performances that aim to improve the quality of life and work of employees to increase employee loyalty to the company,
4. Legal assistance in the form of defense of legal claims from other parties related to duties and responsibilities in the company,
5. Recognition is a social recognition program granted to employees who have received awards from the Board of Directors.

The form of giving awards to employees in the form of:

1. Formal Education,
2. Certification,
3. Work Loyalty Award (Winduan),
4. Employee Home Ownership Loan Assistance (BPPR),
5. Retirement Award.

There are 2,578 employees who received rewards in 2021.

Tabel *Reward* Tahun 2021
Table of Reward in 2021

No.	Jenis *Reward* Type of Reward	Jumlah Penerima Total Recipients
1	Pendidikan Formal Formal Education	20
2	Sertifikasi Certification	2.224
3	Penghargaan Kesetiaan Kerja (winduan) Loyalty Reward (per eight years)	141
4	Bantuan Pinjaman Pemilikan Rumah Karyawan (BPPR) Employee Housing Loan Assistance (BPPR)	140
5	Penghargaan Pensiun Pension Awards	53

Sedangkan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa:
1. Sanksi Pokok:
   - Peringatan Tertulis,
   - Pemotongan Tunjangan Posisi (P2),
   - Penurunan *Grade*,
   - Penurunan kriteria talenta, dan/atau
   - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2. Sanksi Tambahan:
   - Demosi, dan/atau
   - Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Pada tahun 2021, terdapat 1 karyawan yang mendapatkan penjatuhan sanksi disiplin.

Meanwhile, the forms of sanctions given can be in the form of:
1. Principal Sanctions:
   - Written Warning,
   - Position Allowance Deductions (P2),
   - Grade Drop,
   - Decrease in talent criteria, and/or
   - Work Termination (PHK).
2. Additional Sanctions:
   - Demotion, and/or
   - Claims.

In 2021, there was 1 employee who received disciplinary sanctions.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Occupational Health and Safety (OHS)

PJB memandang bahwa kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas operasional Perusahaan. Tingkat kesehatan dan keselamatan karyawan memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan hasil kerja karyawan, serta berdampak terhadap hubungan karyawan dengan karyawan lain. Uraian lebih lanjut mengenai K3 akan dijelaskan kembali di bagian *Corporate Social Responsibility* sub bab Tanggung Jawab kepada Tenaga Kerja.

PJB sees that occupational health and safety for employees is an important aspect that influences the sustainability of the Company's operational activities .The level of health and safety has the significant impacts on employee performance and achievement, and has impacts on the relations among employees. Further description of OHS can be found in the Corporate Social Responsibility section, Responsibility to Employee sub-section.

Hubungan Industrial
Industrial Relations

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan. Sedangkan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. PKB antara PJB dengan Serikat Pekerja yang berlaku di tahun 2021 adalah PKB 2019-2021.

Industrial relations are system of relationships established among parties in the process of producing goods and/ or services consist of the elements, including employers, workers/laborers, and the government according to the principles of Pancasila and the 1945 Constitution of Indonesia. The purpose of industrial relations is to establish harmonious, dynamic, conducive, and fair industrial relations in the Company. While Worker Unions are organizations that are established from, by, and for workers/laborers both internal and external which are free, transparent, independent, democratic, and responsible to hold, defend, and protect rights and interests of workers/laborers and improve the welfare of workers/laborers and their families. The Collective Labor Agreement between PJB and the Workers Union effective in 2021 is the Collective Labor Agreement 2019-2021.

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi:
1. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,
2. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi,
3. Menyalurkan aspirasi secara demokratis,
4. Mengembangkan keterampilan, dan keahliannya,
5. Ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

In establishing industrial relations, workers and Worker Unions have the following functions:
1. Working based on their responsibilities.
2. Maintaining discipline for the continuity of production.
3. Aspiring democratically.
4. Developing skills and expertise.
5. Participating in developing the company and promoting the welfare of members and their families.

Kegiatan Hubungan Industrial antara PJB dan Serikat Pekerja di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Industrial Relations activities between PJB and the Worker Union in 2021 are as follows:

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

1. **Perundingan PKB PT PJB**
   PKB yang dimiliki oleh PT PJB adalah sebagaimana antara PT PJB dengan SP PJB No. PT PJB: 003.K/021/DIR/2019; No. SP PJB: 067.K/SP-DPP/2019 tentang PKB Periode 2019-2021, dimana PKB ini berlaku mulai 27 Maret 2019 – 27 Maret 2021, dan diperpanjang 1 tahun sampai dengan 27 Maret 2022 (perundingan PKB selanjutnya menunggu pembentukan formatur kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Pekerja yang baru hasil Musyawarah Besar SP PJB Tahun 2022).

1. **PT PJB's CLA Agreement**
   The CLA of PT PJB is as between PT PJB and its Workers Union No. PT PJB: 003.K/021/DIR/2019; No. SP PJB: 067.K/SP-DPP/2019 regarding CLA for the 2019-2021 Period, where this PKB is effective from March 27, 2019 – March 27, 2021, and is extended by 1 year until March 27, 2022, (the next CLA agreement is waiting for the formation of the board management format The new Central Executive Board (DPP) of the Workers Union as a result of the 2022 PJB Workers Union General Meeting).

2. **Rapat Berkala antara Manajemen dan SP PJB**

   Dilaksanakan setiap Semester antara Manajemen dan SP PJB dalam membahas isu strategis Perusahaan baik dari segi Kinerja Perusahaan maupun SDM. Untuk Tahun 2021 Rapat Berkala Manajemen SP dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021 pada Semester I dan 24 Desember 2022 pada Semester II.

2. **Periodic Meetings between Management and PJB Workers Union**
   The meetings were held every semester between Management and PJB Workers Union to discuss strategic issues of the Company, both in terms of Company Performance and HC. In 2021, the Periodic Meetings were held on April 6, 2021, in Semester I and December 24, 2022, in Semester II.

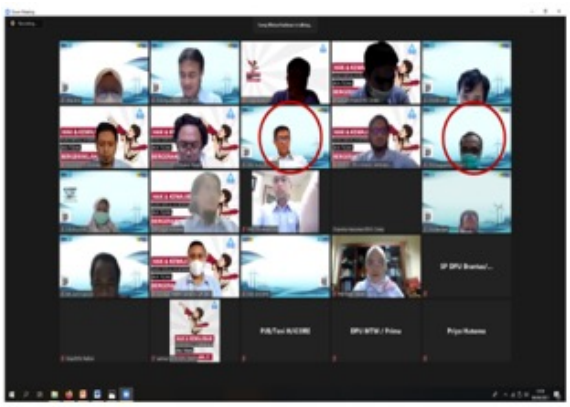

Semester I

Semester II

3. Rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. LKS Bipartit melaksanakan pertemuan 1 bulan sekali. Untuk Tahun 2021 telah dilaksanakan pertemuan LKS Bipartit sebanyak 12 kali.

3. Bipartite Cooperation Institution Meeting

The Bipartite Cooperation Institution is a communication and consultation forum on matters relating to industrial relations in a company whose members consist of entrepreneurs and trade unions that have been registered with the agency responsible for manpower affairs. The Bipartite LKS meets once a month. In 2021, 12 Bipartite meetings were held.

4. Pelaksanaan Kegiatan SP PJB

SP juga berperan penting sebagai mitra strategis bagi Manajemen, tidak hanya untuk menciptakan ketenangan berusaha dan bekerja namun juga memberikan masukan-masukan kepada Manajemen guna mendukung peningkatan produktivitas serta terwujudnya keberlangsungan Perusahaan. Adapun program-program yang dilaksanakan antara lain: pelaksanaan pelatihan untuk pengurus dan anggota (baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal), MUBES DPP SP, MUSNIT DPU SP serta pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pengembangan wawasan bagi anggotanya, dll.

4. PJB Worker Union's Program Execution

Workers Union also plays an important role as a strategic partner for Management, not only to harmonize in business and work but also to provide input to Management to support increased productivity and the realization of the Company's sustainability. The programs implemented include the implementation of training for management and members (both organized by internal and external parties), Workers Union's MUBES DPP, MUSNIT DPU, and the implementation of activities to support the development of insight for its members, etc.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Rencana Program Kerja Sumber Daya Manusia Tahun 2022

HC Work Program Plan for 2022

Rencana Program Kerja SDM di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan *business & digital mindset* karyawan PJB Group,
2. Penyiapan Kompetensi Pendukung Kesiapan & Keandalan Unit Eksisting dan PLTU FTP-1,
3. *Strategic Resourcing*, Penyiapan *Future Competency Asset Portfolio* & Pengembangan Usaha melalui implementasi *Competency Acceleration Program* (CompactPro),
4. Pengembangan *Youth Talent, Woman Talent*, dan *Selenial Talent* melalui program pembelajaran bagi milenial & *women talent* serta evaluasi efektivitas program *retaining potential talent*,
5. Penguatan *Human Resource* Anak Perusahaan PJB melalui *alignment system* pengelolaan SDM di PJB Group.

The HC Work Program Plan for 2022 is as follows:

1. Increasing the business & digital mindset of PJB Group employees,
2. Preparing to Support Competencies Readiness & Reliability of Existing Units and FTP-1 CFPP,
3. Strategic Resourcing, Future Competency Asset Portfolio Preparation & Business Development through the implementation of the Competency Acceleration Program (CompactPro),
4. Development of Youth Talent, Woman Talent, and Selenium Talent through learning programs for millennials & women talent as well as evaluating the effectiveness of the retaining potential talent program,
5. Strengthening the Human Resources of PJB Subsidiaries through the alignment of the HC management system in the PJB Group.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Implementasi Teknologi Informasi (TI) di Perusahaan menjadi salah satu keunggulan kompetitif di era digitalisasi. Di samping menjadi sebuah pemenuhan tuntutan bisnis, TI menjadi salah satu pendukung utama untuk mencapai kinerja operasional yang optimal.

Implementation of Information Technology (IT) is a competitive advantage in digitalization era. Apart from being business demand fulfillment, IT is one of business process supporters to increase optimal operational performance of the Company

Tujuan utama penerapan TI di Perusahaan adalah untuk memastikan kesiapan pengelolaan strategi dan kebijakan sistem infomasi terpadu Perusahaan secara optimal dan terintegrasi dalam mendukung kinerja Perusahaan. Dengan TI yang terintegrasi, diharapkan dapat menciptakan proses bisnis yang efisien, efektif dan berdaya saing tinggi.

The main objective of implementing IT in the Company is to ensure the readiness of the Company's integrated information system strategy and policy management in an optimal and integrated manner to support the Company performance. With integrated IT, it is expected to create efficient, effective and highly competitive business processes.

Pengelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

Pengelolaan Teknologi Informasi dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi yang merupakan sub organisasi PJB sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 0003.P/019/DIR/2021 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Tata Kerja pada Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa-Bali. Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Teknologi Informasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Teknologi Informasi dapat dibantu Manajer dan staf yang formasi jabatannya sesuai kebutuhan dan di tetapkan oleh Keputusan Direksi. Bidang Teknologi Informasi membawahi 3 (tiga) Fungsi yaitu Perencanaan & Kebijakan Teknologi Informasi, Pengembangan Teknologi Informasi & Analisa Bisnis dan Operasi Layanan Teknologi Informasi.

Information Technology Management is carried out by Information Technology Division, which is a sub-organization of PJB as stated in the Board of Directors Decree No. 0003.P/019/DIR/2021 concerning Organizational Structure and Work Procedures at Corporate Performance Unit & Management System Development of PT Pembangkitan Jawa-Bali. Information Technology Division is led by a Head of Information Technology Division responsible to the Head of Corporate Performance & Management System Development Unit. In performing the main duties and functions, the Head of Information Technology Division may be assisted by Managers and staff with position formations based on the needs and are determined by the Board of Directors Decision. Information Technology Sector is in charge of 3 (three) Functions, namely Information Technology Planning & Policy, Information Technology Development & Business Analysis as well as Information Technology Service Operations.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

Sebagai *business driven*, TI PJB memerlukan pengelolaan dengan perencanaan terstruktur dan mencakup seluruh proses bisnis yang berdasar pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI). Tata kelola TI PJB diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 067.K/010/DIR/2017 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi PT Pembangkitan Jawa-Bali, dan *best practice* lainnya seperti COBIT (*Control Objective for Information Technologies*). Secara garis besar pelaksanaan Tata Kelola TI PJB dapat dilihat pada gambar berikut:

As the business driven, PJB IT requires management with the structured planning and covers the enitre business processes in line with Information Technology Strategic Plan (ITSP). IT Governance of PJB is regulated in Board of Directors Decree No. 067.K/010/DIR/2017 concerning General Guidelines and Policies of Information Technology Governance of PT Pembangkitan Jawa- Bali, and other best practices such as COBIT (Control Objectives for Information and related Technology). Generally, PJB IT Governance implementation is available in the following picture:

Tata Kelola TI PJB
PJB IT Governance

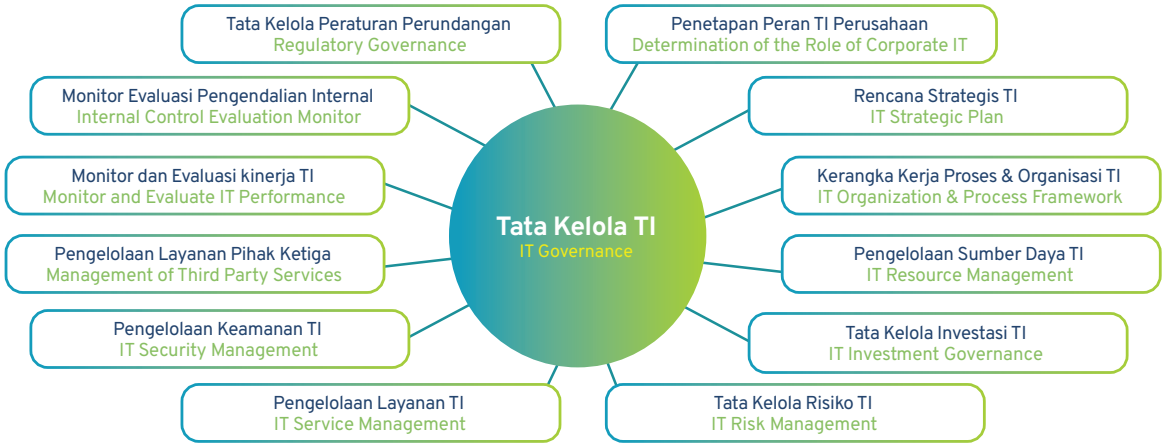

Arsitektur Teknologi Informasi
Information Technology Architecture

Arsitektur TI menggambarkan bangunan teknologi informasi, baik aplikasi maupun infrastruktur yang akan dibangun oleh PJB sebagai arah pengembangan aplikasi TI di lingkungan Perusahaan, sebagaimana dalam gambar berikut:

IT architecture represents the building of information technology, both applications, and infrastructure that is going to be built by PJB as direction for developing Information Technology applications in the Company, as follows:

Arsitektur Teknologi Informasi
Information Technology Architecture

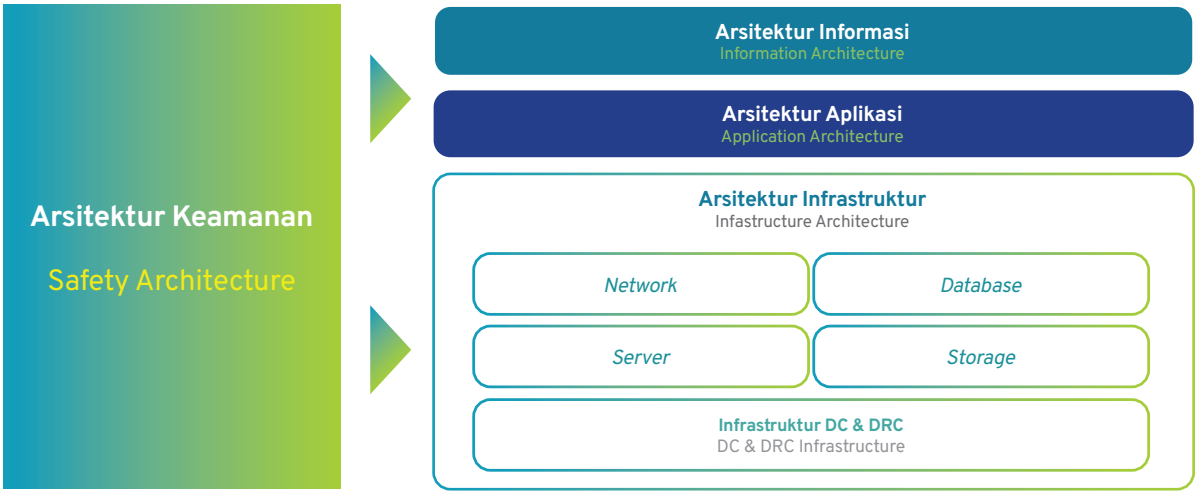

Prinsip Arsitektur Teknologi Informasi
Principles of Information Technology Architecture

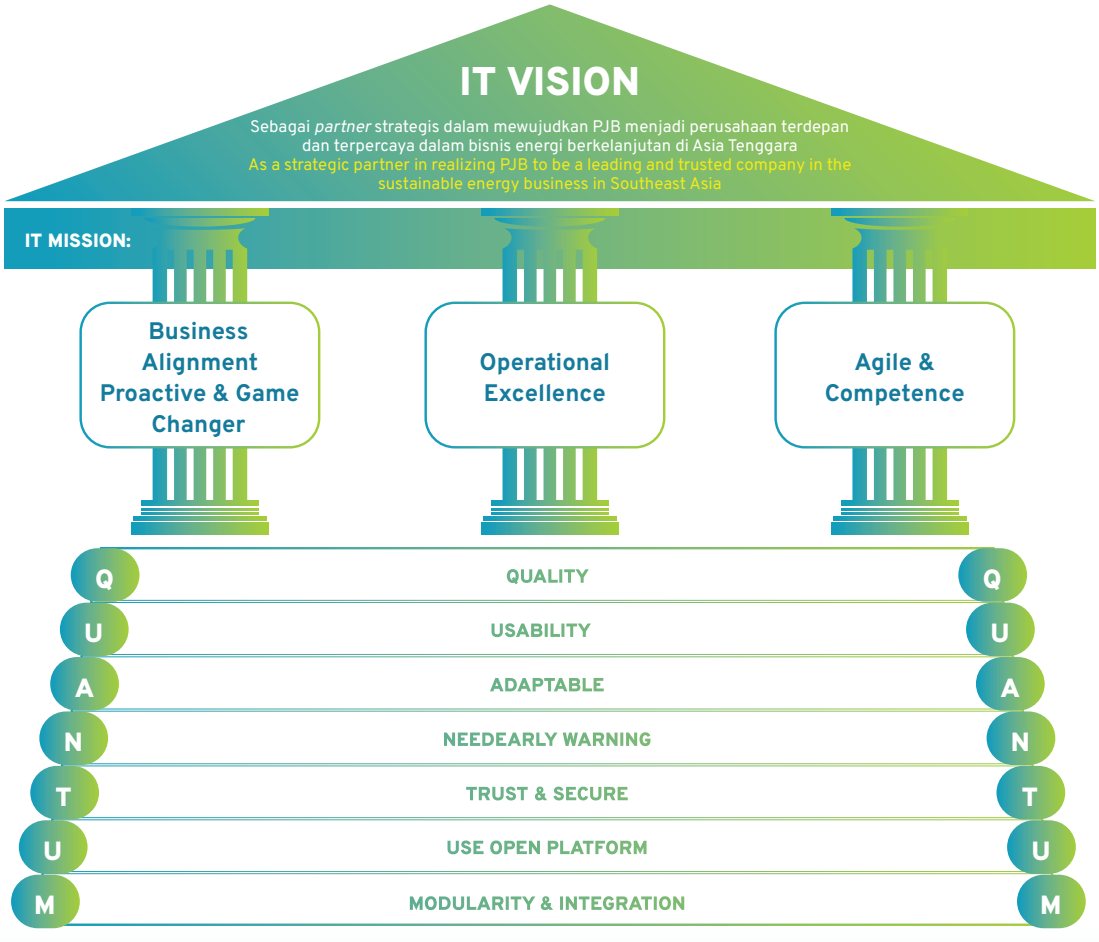

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Roadmap Teknologi Informasi
Information Technology Roadmap

Sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) PT Pembangkitan Jawa-Bali 2020-2024, PJB secara berkelanjutan mengembangkan TI Perusahaan dari tahun ke tahun sebagaimana dalam gambar berikut:

Based on Information Technology Strategic Plan (ITSP) of PT Pembangkitan Jawa-Bali for 2020-2024, PJB continuously develops the Company's IT annually as presented in the following picture:

Roadmap Teknologi Informasi
Information Technology Roadmap

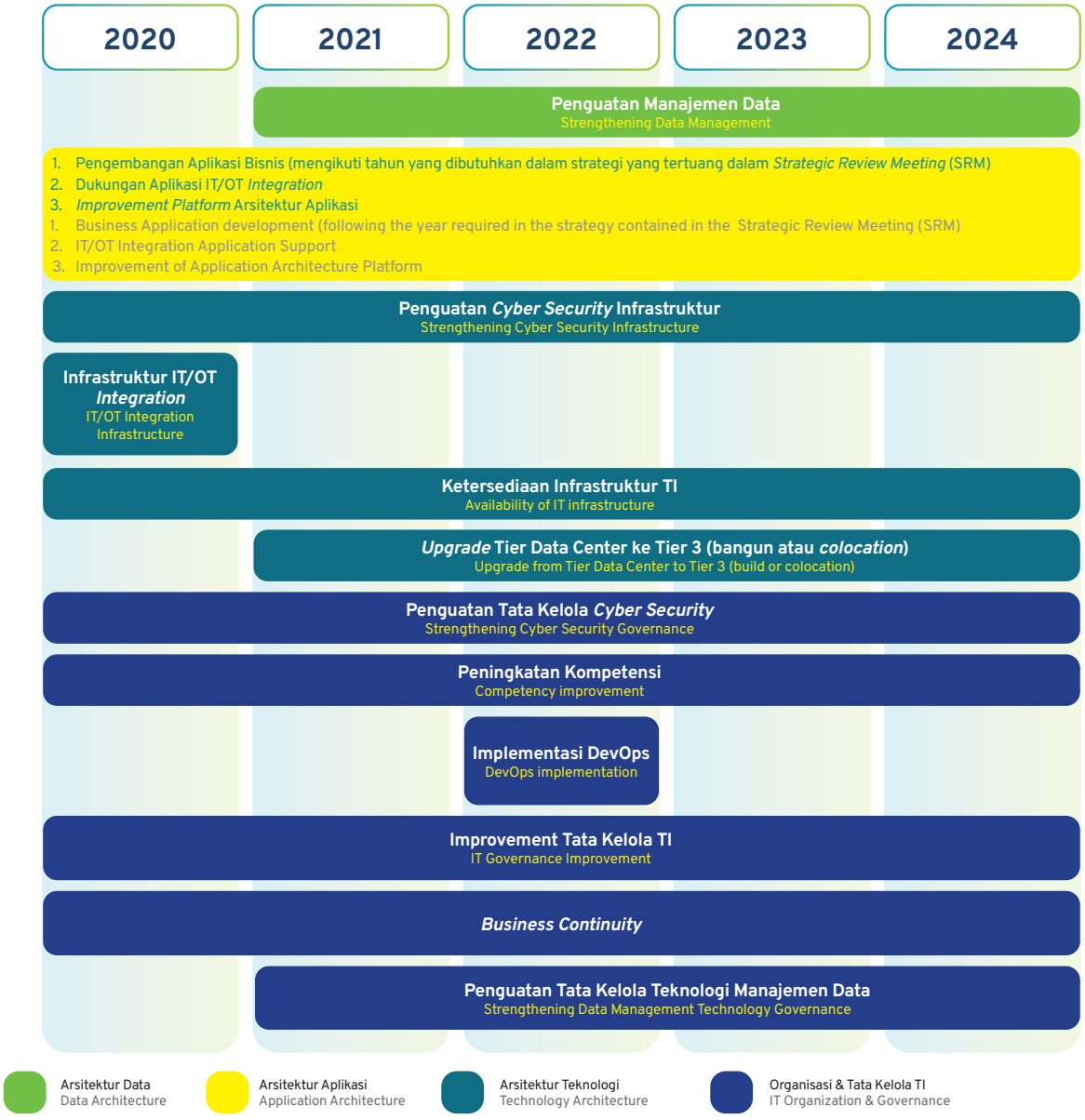

Realisasi Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2021
Realization of Information Technology Work Program in 2021

PJB telah melakukan beberapa program kerja TI selama tahun 2021, diantaranya adalah:

1. Fungsi Perencanaan dan Kebijakan TI:
   a. *Update IT Enterprise Architecture* (PJB IMS 2.0) 2021,
   b. Stevie International IT Awards 2021,
   c. *Assessment* IT *Maturity Level* COBIT 5,
   d. *Surveillance* ISO 27001,
   e. Audit ISO 20000-1:2018.
2. Fungsi Pengembangan Teknologi Informasi dan Analisa Bisnis:
   a. Aplikasi OMAMO (*Online Maintenance Monitoring*),
   b. *E-Invoicing*,
   c. *Upgrade* PJB *Access*, Aplikasi PMO (*Project Management Office*) dan SIPLAH (Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup),
   d. *Health Meter*,
   e. Implementasi *Advanced* e-Faktur,
   f. Aplikasi PJB MyHome,
   g. *Dashboard* iPortis.
3. Fungsi Operasi Layanan Teknologi Informasi
   a. Implementasi SD-WAN (*Software-Defined Wide Area Network*),
   b. Peremajaan *Precision Air Conditioning* dan Server Aplikasi Korporat,
   c. Pengelolaan *Cloud Meeting, Business Continuity Plan Disaster Recovery Plan*, dan Komunikasi Data (WAN Unit & Internet),
   d. Pengadaan Perangkat *Network Accesss Control* (NAC).

PJB has implemented several IT work programs during 2021, including:

1. IT Planning and Policy Functions:
   a. Updatd IT Enterprise Architecture (PJB IMS 2.0) 2021,
   b. Stevie International IT Awards 2021,
   c. Assessment of IT Maturity Level COBIT 5,
   d. Surveillance ISO 27001,
   e. Audit ISO 20000-1:2018.
2. Information Technology Development and Business Analysis Function:
   a. OMAMO (Online Maintenance Monitoring) Application,
   b. E-Invoicing,
   c. Upgrade of PJB Access, PMO (Project Management Office) and SIPLAH (Environmental Management Information System) Application,
   d. Health Meter,
   e. Implementation of Advanced e-Invoicing,
   f. PJB MyHome application,
   g. Dashboard iPortis.
3. Information Technology Service Operation Function
   a. Implementation of SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network),
   b. Rejuvenation of Precision Air Conditioning and Corporate Application Servers,
   c. Cloud Meeting Management, Business Continuity Plan Disaster Recovery Plan, and Data Communication (WAN Unit & Internet),
   d. Procurement of Network Accesss Control (NAC) Devices.

Audit Teknologi Informasi
Information Technology Audit

Evaluasi implementasi tata kelola TI senantiasa dilakukan PJB dalam rangka pengembangan dan perbaikan TI secara berkesinambungan. Di tahun 2021 dilakukan audit TI sebagai berikut:

PJB continues to evaluate the implementation of IT governance in order to develop and improve IT on an ongoing basis. In 2021, the Company carried out the following IT audit:

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Tabel Audit TI Tahun 2021
Table of IT Audit

No	Judul Audit Audit Title	Jumlah Temuan Total Findings	Jumlah OFI/ Rekomendasi Total OFI/ Recommendations	Status Status
1	ISO 20000-1:2018	0	0	*Closed*
2	ISO 27001:2013	0	0	*Closed*
3	SPI PJB AI PJB	0	2	*Closed*
4	SPI PJB AI PJB	7	0	*Closed*
5	KAP PAF	0	1	*Closed*

Tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi telah dilaksanakan seluruhnya.

Follow-up on the findings and recommendations has been fully implemented.

Assessment Eksternal Teknologi Informasi
Assessment of Information Technology External

Untuk meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi, PJB juga melaksanakan beberapa *assessment* yang dilakukan oleh tim independen, antara lain:

1. **IT *Maturity Level Assessment* COBIT 5 (*Control Objective for Information Technologies* 5)**
   PJB melaksanakan kegiatan *Assessment Maturity* dengan mengacu pada standar internasional yang digunakan juga di lingkungan BUMN sebagai *framework* pengukuran *maturity level* pengelolaan tata kelola TI yaitu *Standard Control Objectives for Information and related Technology* (COBIT). PJB mendapatkan nilai akhir 3,41 dari target KPI 3.

2. ***Cyber Security Maturity* (CSM) oleh BSSN**
   Untuk memperkuat sistem keamanan siber di PT PJB yang termasuk di dalam kategori Infrastruktur Informasi Vital (IIV), PJB berkomitmen untuk menerapkan keamanan siber di lingkungan perusahaan dengan melaksanaan pengukuran *Cyber Security Maturity* (CSM) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mulai dari pengukuran Tata Kelola, Identifikasi, Proteksi, Deteksi dan Respon. Dalam *assessment* ini PJB mendapatkan nilai akhir 4.25 dari skala 5.

In order to improve the quality of Information Technology services, PJB also carries out several assessments conducted by an independent team, including:

1. **IT Maturity Level Assessment COBIT 5 (Control Objective for Information Technologies 5)**
   PJB carries out Maturity Assessment activities by referring to international standards that are also used within SOEs as a framework for measuring maturity level of IT governance management, namely Standard Control Objectives for Information and related Technology (COBIT). PJB obtained final score of 3.41 from the target KPI of 3.

2. **Cyber Security Maturity (CSM) by BSSN**
   To strengthen cyber security system at PT PJB which is included in the Vital Information Infrastructure (IIV) category, PJB is committed to implementing cyber security in the corporate environment by carrying out Cyber Security Maturity (CSM) measurement by National Cyber and Crypto Agency (BSSN), starting from Governance, Identification, Protection, Detection and Response measures. In this assessment, PJB obtained final score of 4.25 out of a scale of 5.

Rencana Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2022

Information Technology Work Program Plan for 2022

Rencana Program Kerja TI di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. *Digital Power Plant* (DPP),
2. Digitalisasi Proses Energi Primer,
3. Digitalisasi Program Direktorat Keuangan,
4. Implementasi CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) PT PJB,
5. Pembangunan Infrastruktur *Microservices*.

IT Work Program Plan in 2022 is as follows:

1. Digital Power Plant (DPP),
2. Digitization of Primary Energy Process,
3. Digitization of Directorate of Finance Program,
4. Implementation of CSIRT (Computer Security Incident Response Team) of PT PJB,
5. Microservices Infrastructure Development

PJB *INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 2.0* (PJB-IMS 2.0)

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 2.0 (PJB-IMS 2.0)

Implementasi PJB-IMS 2.0 *Enterprise Architecture* bertujuan untuk memadukan dan menyelaraskan seluruh sistem di PJB. Implementasi PJB-IMS 2.0 *Enterprise Architecture* menjadikan PJB sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang meraih Sertifikasi PAS 99, sebuah penghargaan internasional terhadap kualitas implementasi sistem manajemen terintegrasi.

PJB-IMS 2.0 Enterprise Architecture purposes to combine and harmonize all systems in PJB. Due to PJB-IMS 2.0 Enterprise Architecture, PJB has become the first company in Indonesia to achieve PAS 99 Certification, an international award for the integrated management system implementation quality.

Sertifikasi PAS 99:2012 PJB membuktikan bahwa penerapan PJB-IMS 2.0 *Enterprise Architecture* di lingkungan Perusahaan mempunyai andil dalam memaksimalkan efektivitas dan efisiensi roda operasional Perusahaan. Secara keseluruhan, implementasi PJB-IMS menghadirkan efisiensi bagi Perusahaan melalui penghematan waktu, biaya, dan minimalisasi gangguan kegiatan bisnis.

PAS 99:2012 PJB certification proves that PJB-IMS 2.0 Enterprise Architecture within the Company has the role in maximizing the effectiveness and efficiency operations of the Company. Overall, PJB-IMS brings efficiency to the Company through time, cost savings, and business disruption minimization.

PJB-IMS 2.0 mengintegrasikan standar internasional *Baldrige Excellence Framework* (BEF), ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 55001:2014, ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO 17025:2017, ISO 19600:2014, ISO 31001:2018, ISO 9001:2015, ISO 26001:2010, ISO 37001:2016, ISO 21001:2018, ISO 10667-1:2020, ISO 10667-2:2020, SMK3, SMP, Sistem Manajemen lain yang terintegrasi dengan PJB-IMS 2.0.

PJB-IMS 2.0 integrates international standard Baldrige Excellence Framework (BEF), ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 55001:2014, ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO 17025:2017, ISO 19600:2014, ISO 31001:2018, ISO 9001:2015, ISO 26001:2010, ISO 37001:2016, SMK3, SMP, other Management Systems integrated with PJB-IMS 2.0.

Pengelola PJB-IMS 2.0

PJB-IMS 2.0 Management

PJB-IMS dikelola oleh Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen khususnya Bidang Pengembangan Sistem Manajemen. Hal ini berdasarkan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0003.P/019/DIR/2021 tentang Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pengelola PJB-IMS berada dibawah Satuan Kinerja Korporat & Pengembangan Sistem Manajemen dan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Kinerja Korporat, Bidang Teknologi Informasi, dan Bidang Pengembangan Sistem Manajemen.

PJB-IMS Management is Corporate Performance and Management System Development Unit specifically for Department of Management System Development. It is in line with Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali Board of Directors No. 0003.P/019/DIR/2021 concerning Organization and Work Procedure of PT Pembangkitan Jawa-Bali. PJB-IMS Management is under Corporate Performance and Management System Development Unit and supervises 3 (three) Departments, namely Corporate Performance Department, Information Technology Department, and Management System Development Department.

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 2.0 (PJB-IMS 2.0)

Tata Kelola dan Lingkup PJB-IMS 2.0
Governance and Scope of PJB-IMS 2.0

PJB-IMS 2.0 merupakan penyempurnaan dari berbagai proses sistem integrasi termasuk interelasi diantara proses-proses yang digambarkan dalam bagan Proses Bisnis atau Sistem Kerja menurut *Baldrige Excellence Framework.* PJB menetapkan, mengimplementasikan, mendistribusikan, memelihara, meninjau ulang, dan menyempurnakan PJB-IMS 2.0 sesuai kebutuhan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direksi No. 003.P/0/DIR/2019 tentang Implementasi PJB-IMS 2.0 di PT Pembangkitan Jawa-Bali. Dalam proses penyusunan PJB-IMS 2.0, PJB merujuk pada konsep *Plan Do Check Action* (PDCA) ISO 9001:2015 sebagai kerangka Integrated Process.

PJB-IMS 2.0 is refinement of various systems integration processes including interrelation among the processes described in the chart of Business Process or Work System based on Baldrige Excellence Framework. PJB establishes implements, distributes, maintains, reviews, and completes PJB-IMS 2.0 as needed. This is according to the Board of Directors Regulation No. 003.P/020/DIR/2019 concerning PJB-IMS 2.0 at PT Pembangkitan Jawa-Bali. In the process of preparing PJB-IMS 2.0, PJB refers to Plan Do Check Action (PDCA) of ISO 9001:2015 concept as the Integrated Process framework.

Skema Proses *Plan Do Check Action*
Plan Do Check Action Scheme

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 2.0 (PJB-IMS 2.0)
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 2.0 (PJB-IMS 2.0)

Dalam skema di atas dihasilkan dan dikendalikan melalui delapan langkah-langkah proses integrasi sebagai berikut:

a. Pemetaan bisnis proses dan interaksi prosesnya,
b. Identifikasi diagram konteks dan kesesuaian dengan tupoksi organisasi dan masing-masing unit,
c. *Alignment standard* yang digunakan dengan menghilangkan duplikasi prosedur dan format, uji dan *review* proses-proses,
d. Pengembangan kebijakan, *objective, target* dan *action plan* sistem integrasi,
e. Menetapkan manual integrasi dan pengembangan *generic procedure* yang berlaku dalam sistem integrasi,
f. Melaksanakan pelatihan pemahaman dan sosialisasi sebelum penerapan PJB-IMS 2.0,
g. Melaksanakan pemantauan dan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Integrasi,
h. Penjaminan *conformance* proses sistem integrasi terkait pemenuhan persyaratan standar-standar manajemen, melalui suatu badan sertifikasi.

Adapun sistem manajemen yang diadopsi PJB dalam PJB-IMS 2.0 meliputi beberapa sistem manajemen sebagai berikut:

Based on the scheme above, it is generated and controlled through eight steps of integration process as follows:

a. Business Processes and Interaction Mapping Process,
b. Identification of Context Diagrams and suitability with the main tasks and functions for the organization and each Unit,
c. Applied alignment standard through eliminating duplication of Procedure and Format, Test, and, Review of processes,
d. Policy Development, Objective, Target, and Action Plan Integrated System,
e. Establishment of Integrated Manual and Generic Procedure development applied in integrated systems,
f. Implementation of knowledge and socialization training prior to PJB-IMS 2.0 application,
g. Continuous monitoring and improvement towards Integrated System,
h. Conformance process Guarantee for the Integrated System process related to the fulfillment of management standard requirements through Certification department.

In the PJB-IMS 2.0, PJB adopts several management systems as follows:

Tabel Sistem Manajemen yang Diadopsi dalam PJB-IMS 2.0
Table of Management Systems Adopted in PJB-IMS 2.0

No	Sistem Manajemen Management System	Keterangan Penerapan Application Description
1	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System ISO 9001: 2015	Seluruh persyaratan klausal diterapkan kecuali Klausul 7.3 *Design and Development*, dikarenakan kegiatan ini tidak dilakukan oleh PJB. All requirement clauses are applied, unless the Clause 7.3 on Design and Development since this activity is not implemented by PJB
2	Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001: 2015	seluruh persyaratan klausal diterapkan. All requirement clauses are applied
3	Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 OHS Management System ISO 45001: 2018	seluruh persyaratan klausal diterapkan. All requirement clauses are applied
4	Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018 Energy Management System ISO 55001:2018	seluruh persyaratan klausal diterapkan. All requirement clauses are applied
5	Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014 Asset Management System ISO 55001:2014	seluruh persyaratan klausal diterapkan. All requirement clauses are applied
6	(KAN) Akreditasi Pengujian Lab ISO 17025:2017 (KAN) Laboratory and Calibration Management System ISO 17025:2017	seluruh persyaratan klausal diterapkan. All requirement clauses are applied
7	Sistem Manajemen Pelayanan Teknologi Infomasi ISO 20000-1:2018 IT Service Management System ISO 20000-1:2018	seluruh persyaratan klausal diterapkan. All requirement clauses are applied

No	Sistem Manajemen Management System	Keterangan Penerapan Application Description
8	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Cyber Security Management System ISO 27001:2013	seluruh persyaratan klausal diterapkan. All requirement clauses are applied
9	Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha/Bisnis ISO 22301:2012 Business Continuity Management System ISO 22301:2012	seluruh persyaratan klausal diterapkan. All requirement clauses are applied
10	Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016	seluruh persyaratan klausal diterapkan. All requirement clauses are applied
11	Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan ISO 21001:2018 Educational Organizations Management System ISO 21001:2018	seluruh persyaratan klausal diterapkan. All requirement clauses are applied
12	Sistem Manajemen Risiko ISO 31001:2018 Risk Management System ISO 31001:2018	seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance*. All requirement clauses are applied as guidance.
13	Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 19600:2014 Compliance Management System ISO 19600:2014	seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance*. All requirement clauses are applied as guidance.
14	Sistem Manajemen Tanggung Jawab Sosial ISO 26000:2010 Corporate Social Responsibility Management System ISO 26000:2010	seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance*. All requirement clauses are applied as guidance.
15	Sistem Manajemen *Assessment Service Delivery* ISO 10667:2020 Assessment Service Delivery Management System ISO 10667:2020	seluruh persyaratan klausal diterapkan sebagai *guidance*. All requirement clauses are applied as guidance.
16	Kriteria *Baldrige* Baldrige Criteria	seluruh dokumen kriteria. All criteria documents

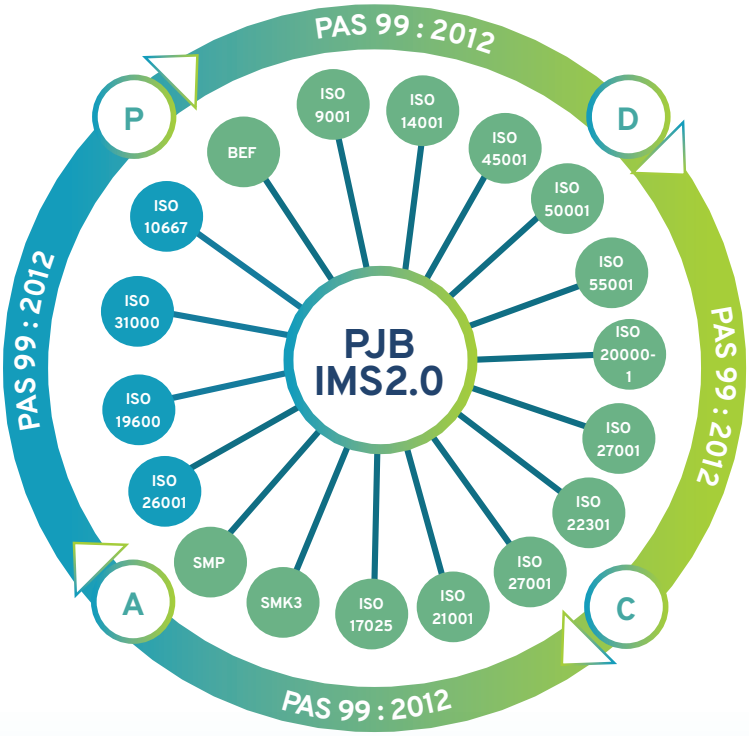

Sudah Bersertifikat
Certified

Sudah diimplementasikan sesuai standar *guide*
Applied based on guideline standard

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 2.0 (PJB-IMS 2.0)
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 2.0 (PJB-IMS 2.0)

PJB menjamin bahwa kebijakan, program, sasaran dan proses-proses selalu mutakhir (*up-to-date*) sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka pemenuhan masing-masing standar sistem manajemen yang diimplementasikan. Selain itu, persyaratan standar sistem manajemen ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara sesuai standar terbaru.

PJB guarantees that policies, programs, targets and processes are always up-to-date following the Company needs in order to meet each of the applied management system standards. In addition, management system standard requirements are established, implemented and maintained according to the latest standards.

Realisasi Program Kerja PJB-IMS Tahun 2021
PJB-IMS Performance Realization in 2021

PJB telah melakukan beberapa program kerja dalam rangka menjaga kualitas PJB-IMS selama tahun 2021, diantaranya adalah

1. Monitoring Implementasi *Re-Forge* (*Reliable and Efficient Powerplant Management*),
2. *Surveillance* Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO),
3. Sertifikasi ISO 21001:2018 dan ISO 10667:2020,
4. *Realignment* Proses Bisnis Digital.

PJB has implemented several work programs in maintaining PJB-IMS quality during 2021, including the following:

1. Monitored the Implementation of Re-Forge (Reliable and Efficient Powerplant Management),
2. Surveillance Integrated Management System (ISO),
3. Certification of ISO 21001:2018 and ISO 10667:2020,
4. Realignment of Digital Business Process.

Rencana Program Kerja PJB-IMS Tahun 2022
PJB-IMS Work Plan for 2022

Rencana Program Kerja PJB-IMS di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *alignment* Proses Bisnis, Organisasi dan Risiko,
2. Melakukan *alignment subholding*,
3. Melakukan *Surveillance* dan Resertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO).

PJB-IMS Work Program Plan for 2022 is as follows:

1. Aligning Business Process, Organizations and Risks,
2. Performing alignment sub holding
3. Surveillance and Recertification of Integrated Management Systems (ISO).

MANAJEMEN ASET
ASSET MANAGEMENT

Merupakan tahap awal untuk menjadi Perusahaan kelas dunia dengan diraihnya sertifikat ISO 55001:2014. PJB menjadi Perusahaan pembangkitan pertama di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik yang meraih sertifikat tersebut. Cakupan Manajemen Aset adalah kegiatan merumuskan keputusan, rencana, dan kegiatan terkait dengan aset menggunakan pendekatan berbasis risiko.

Initial stage to become a world-class company is through the achievement of ISO 55001:2014 certificate. PJB became the first power plant Company in Indonesia to achieve the certificate. Scope of Assets Management formulates decisions, plans, and activities related to assets using the risk-based approach.

Pengelola Manajemen Aset
Asset Management Manager

Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen merupakan unit organisasi di Perusahaan yang bertanggung jawab mengelola manajemen aset PJB sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0003.P/019/DIR/2021 tentang Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa-Bali, pengelola Aset Manajemen adalah Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen.

Corporate Performance and Management System Development Unit is an organizational unit in the Company responsible for managing asset management of PJB as stipulated in the Board of Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0003.P/019/DIR/2021 regarding Organs and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali, manager of Asset Management is Corporate Performance and Management System Development Unit.

Pengelolaan Manajemen Aset berada di bawah wewenang Satuan Pengembangan Sistem Manajemen dan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Kinerja Korporat, Bidang Teknologi Informasi, dan Bidang Pengembangan Sistem Manajemen.

Asset Management is under the authority of Corporate Performance and Management System Development Unit and supervises 3 (three) departments, namely Corporate Performance Department, Information Technology Department, and Management System Development Department.

Kerangka Kerja Manajemen Aset
Asset Management Framework

Pelaksanaan konsep manajemen aset di PJB, dituangkan dalam Kerangka Kerja Manajemen Aset Pembangkitan sebagaimana ditunjukkan melalui bagan berikut:

Implementation of asset management concept in PJB is stated in Power Plant Asset Management framework as follows:

MANAJEMEN ASET
ASSET MANAGEMENT

Kerangka Kerja Manajemen Aset Pembangkitan di PJB
PJB Power Plant Asset Management Framework

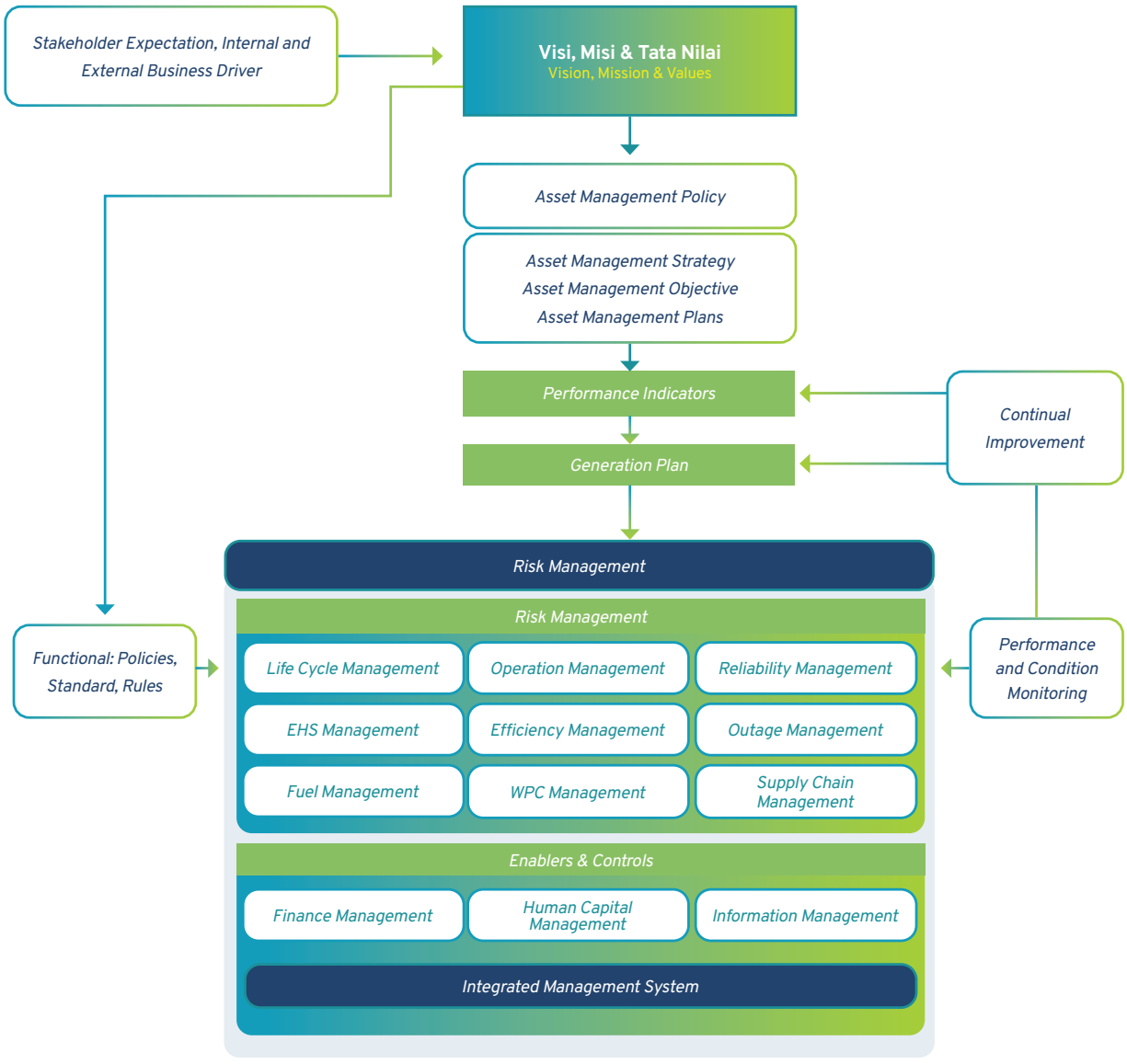

Strategi Manajemen Aset
Asset Management Strategy

PJB menerapkan *Asset Management Strategy* sebagai kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan aset, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta menyediakan dan mempertahankan aset sehingga mencapai hasil layanan yang *excellence*. *Asset Management Strategy* membantu elemen-elemen Perusahaan dalam membuat keputusan atas aset guna mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien diantaranya:

1. Pemanfaatan seoptimal mungkin aset yang ada,
2. Pemanfaatan nilai uang saat dilakukan investasi aset baru,
3. Pembuatan keputusan untuk berinvestasi, mempertahankan, atau divestasi aset dengan memperhatikan serta melindungi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

PJB applies Asset Management Strategy as the Company's policy in asset management purposed to fulfill the consumers needs as well as to provide and maintain assets for the excellent services. Asset Management Strategy then will help the Company elements in taking decisions on assets to achieve the expected results effectively and efficiently, including the following:

1. Optimal utilization of existing assets,
2. Utilization of money values for investing in new assets,
3. Deciding whether to invest, maintain, or divest assets by considering and protecting current and future generations needs.

Area yang menjadi sasaran strategis implementasi Manajemen Aset di PJB adalah sebagai berikut:

1. *Plant Availability & Reliability,*
2. Peningkatan *efisiensi thermal,*
3. Kepemimpinan yang *sustainable*,
4. *Sustainable Human & Knowledge Asset Performance,*
5. *Risk Management* dalam pengelolaan aset.

Strategic target areas for implementing Asset Management in PJB are as follows:

1. Plant Availability & Reliability,
2. Thermal efficiency enhancement,
3. Sustainable Leadership,
4. Sustainable Human & Knowledge Asset Performance.
5. Risk Management in asset management.

Pengelolaan aset ditujukan untuk mencapai kinerja ekselen pada area strategis di atas dengan menerapkan Strategi Manajemen Aset sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kesiapan dan keandalan pembangkit,
2. Mengoptimalkan efisiensi pembangkit,
3. Menyelaraskan *Supply Chain Management* dengan seluruh kegiatan pembiayaan dan kinerja pembangkit berdasarkan prinsip *life cycle cost*,
4. Mengoptimalkan komunikasi internal dan eksternal,
5. Mengembangkan kapasitas organisasi dalam mencapai dan mempertahankan pencapaian kinerja,
6. Mengoptimalkan *Knowledge Management*,
7. Pengelolaan aset pembangkit dengan mengedepankan faktor HSE (*Health, Safety and Environment*).

Asset management is purposed to achieve excellent performance in the aforementioned strategic areas by implementing Asset Management Strategy as follows:

1. Optimizing power plant readiness and reliability,
2. Optimizing power plant efficiency,
3. Aligning Supply Chain Management with all financing activities and power plant performance following life cycle cost principle,
4. Optimizing internal and external communication,
5. Developing organizational capacity in achieving and maintaining performance achievement,
6. Optimizing Knowledge Management.
7. Prioritizing HSE (Health, Safety and Environment) factor in the management of power plant assets.

MANAJEMEN ASET
ASSET MANAGEMENT

Proses Manajemen Aset
Asset Management Process

Proses Manajemen Aset di PJB ditunjukan dalam gambar sebagai berikut:

The PJB Asset Management process is as follows:

Diagram Proses Manajemen Aset PJB
Chart of PJB Asset Management Process

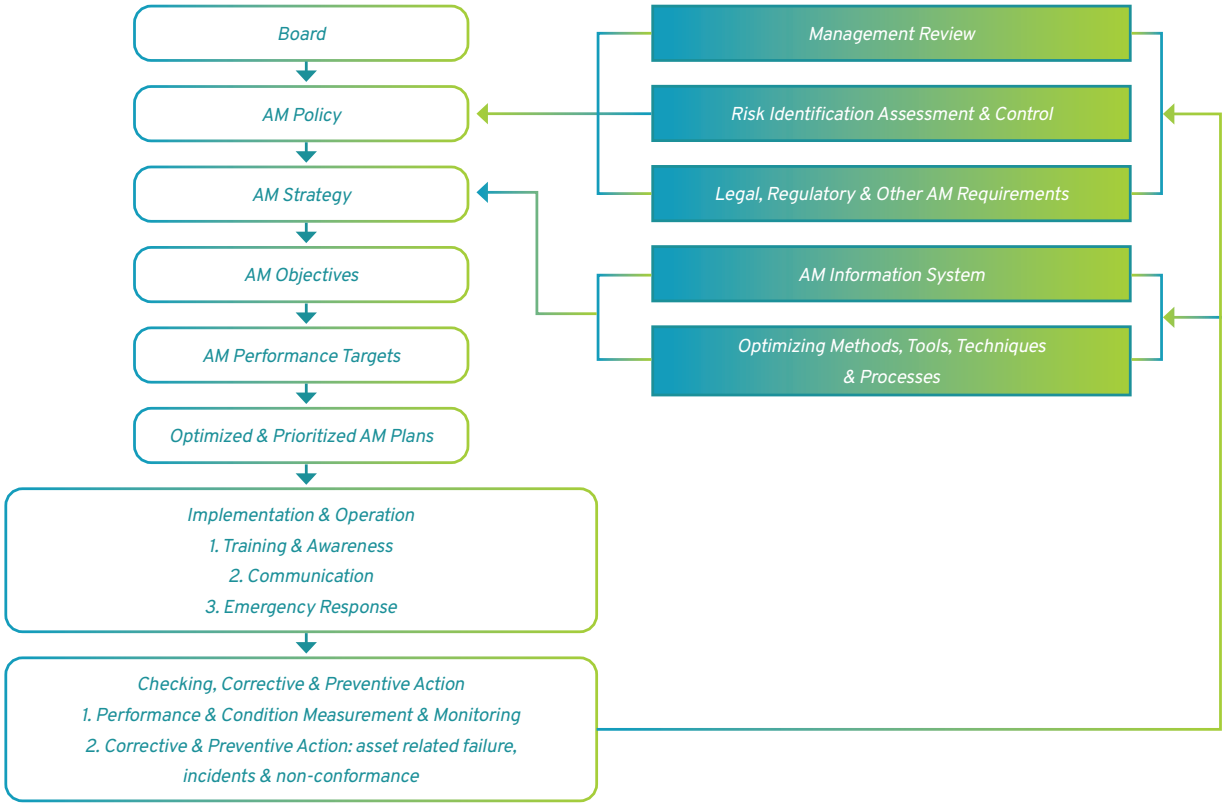

Eksekusi Manajemen Aset
Asset Management Execution

PJB menerapkan prinsip *life cycle* dan kaidah manajemen risiko dalam menjalankan program dan kegiatan pengelolaan aset. Selain itu, pengelolaan aset PJB juga didukung oleh berbagai sumber daya dan prosedur pengelolaan aset yang dilakukan oleh seluruh unit. Pengelolaan tersebut diwujudkan dengan melakukan *cascading* sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

PJB applies the life cycle and risk management principles in carrying out programs and activities concerning asset management. Additionally, PJB asset management is also supported by various resources and procedures performed by all units. Management is represented through cascading as shown in the following chart:

Cascading Manajemen Aset
Cascading of Asset Management

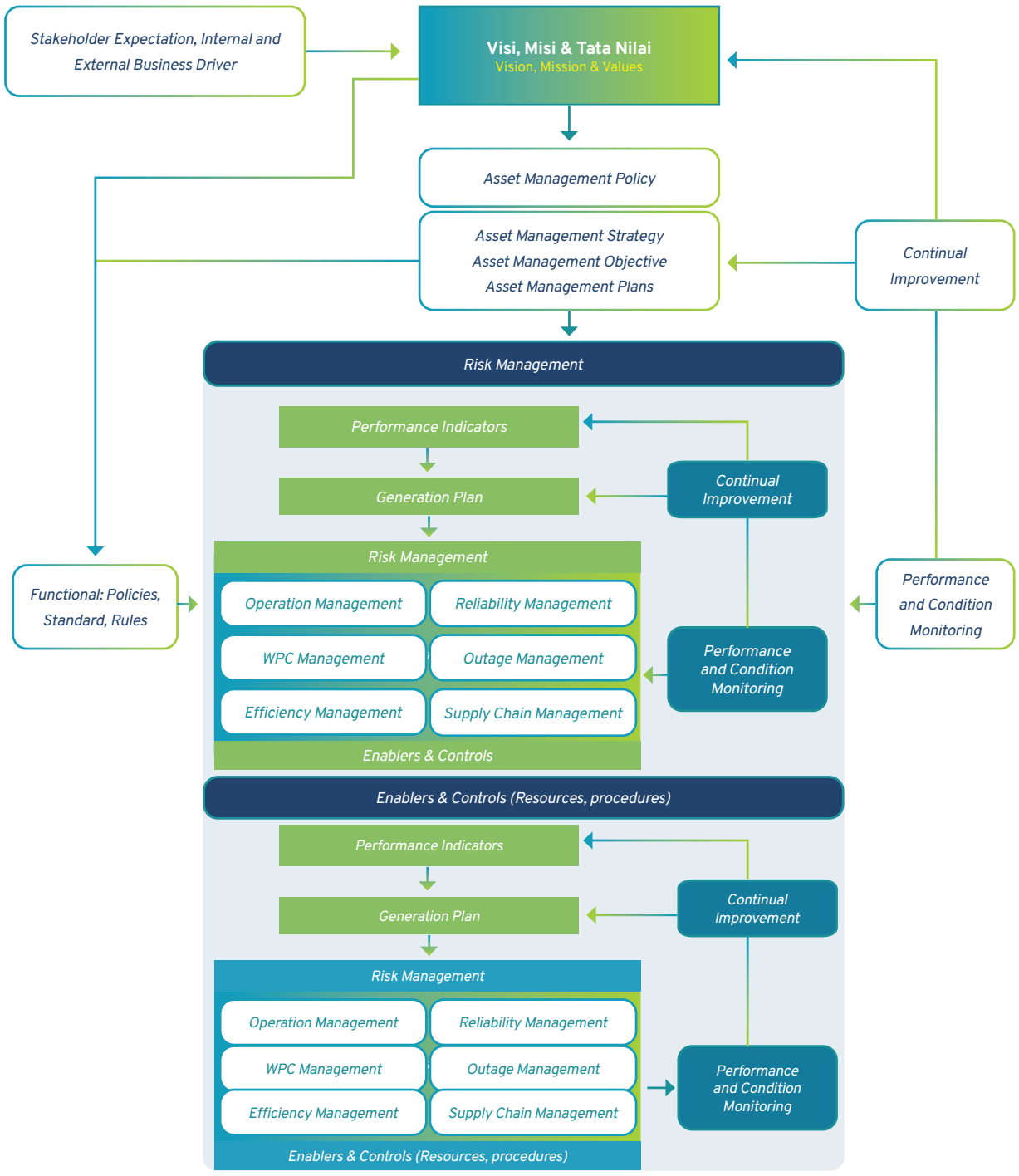

MANAJEMEN ASET
ASSET MANAGEMENT

Realisasi Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2021
Realization of Asset Management Work Program in 2021

PJB telah melakukan beberapa program kerja dalam rangka menjaga kualitas Manajemen Aset selama tahun 2021, diantaranya adalah:

1. Menyusun Tim Pengembangan Pedoman Manajemen Aset Pembangkitan PT PJB,
2. Mereview Pedoman Manajemen Aset Pembangkitan PT PJB dengan penambahan beberapa *stream* baru,
3. Mereview kesesuaian Pedoman Manajemen Aset dengan ISO 55001:2014,
4. *Alignment* kesesuaian proses bisnis dengan Pedoman Manajemen Aset yang ter-*update*,
5. Mendukung eksekusi bisnis *beyond power*, yaitu sebagai *project manager* maupun wakil *project manager* tim *implementator* pada proyek *Roll Out Enterprise Asset Manajemen* (EAM) Pembangkit dan Distribusi berbasis standar manajemen aset PT PLN (Persero).

PJB has carried out several work programs in order to maintain the quality of Asset Management throughout 2021, including the following:

1. Prepared the Development Team of PT PJB Power Generation Asset Management Guidelines,
2. Reviewed PT PJB Generation Asset Management Guidelines with the addition of several new streams,
3. Reviewed the suitability of the Asset Management Guidelines with ISO 55001:2014,
4. Alignment of business processes to conformity with the updated Asset Management Guidelines,
5. Supported beyond power business execution, namely as project manager and deputy project manager of the implementation team in the Roll Out Enterprise Asset Management (EAM) Power Plant and Distribution project based on PT PLN (Persero) asset management standards.

Rencana Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2022
Asset Management Work Plan for 2022

Rencana Program Kerja Manajemen Aset di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait implementasi ISO 55001 ke unit-unit PT Pembangkitan Jawa-Bali, sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai *Management Representative* ISO 55001,
2. Menginisiasi dan mengeksekusi *workshop,* sosialisasi dan bimbingan teknis terkait ISO 55001 dengan pihak-pihak terkait,
3. Menyusun kurikulum dan daftar peserta yang akan mengikuti sertifikasi manajemen aset pembangkit,
4. Melakukan pemutakhiran materi pembelajaran manajemen aset pembangkit.

Asset Management Work Plan in 2022 is as follows:

1. Socializing and guiding related to ISO 55001 implementation to PT Pembangkitan Jawa-Bali units, in connection with duties implementation as Management Representative of ISO 55001,
2. Initiating and executing workshops, socialization, and technical guidance related to ISO 55001 with relevant parties,
3. Developing curriculum and list of participants who will take part in power plant asset management certification,
4. Updating learning materials for power plant asset management.

PENGEMBANGAN USAHA
BUSINESS DEVELOPMENT

Di tengah dinamika industri yang terus berkembang dan tumbuh, diperlukan adaptasi strategi dan pengembangan usaha dari Perusahaan. Perencanaan usaha dan strategi yang tepat ditetapkan sebagai tahap awal dari implementasi keberlanjutan usaha dalam rangka mewujudkan visi Perusahaan.

Industry dynamic that continues to develop and grow requires adaptation of the Company's strategy and business development. The right business planning and strategy are determined as initial stage of implementing business sustainability in order to realize vision of the Company.

Fokus utama pengembangan usaha adalah mempersiapkan optimasi dari sumber daya internal untuk memberikan kontribusi yang maksimal dari segala peluang bisnis yang akan muncul. Selain itu, juga meningkatkan kinerja proyek yang telah berjalan sehingga maksimal dalam memberikan andil dalam pendapaian *excellent performance* dan *business sustainability*.

The main focus of business development is to prepare the optimization of internal resources to provide a maximum contribution from all business opportunities that will arise. It also improves projects performance that have been running to maximize their contribution to achieve excellent performance and business sustainability.

Pengelola Pengembangan Usaha
Business Development Management

Pengelola Pengembangan Usaha PJB dilakukan oleh Direktorat Pengembangan dan Niaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Berdasarkan struktur organisasi PJB, pengelola pengembangan usaha berada di bawah Direktorat Pengembangan dan Niaga, yang membawahi 5 divisi yaitu Divisi IPP & Pengembangan Pembangkit, Divisi Pengembangan EBT, Divisi Business Solution, Divisi Konstruksi Pembangkit, dan *Divisi Supply Chain Management*. Di dalam pelaksanaan pengembangan usaha, divisi-divisi tersebut didukung oleh Unit Bisnis Pengembangan Usaha yang berdomisili di Jakarta dan juga Anak Perusahaan di bidang Investasi yaitu PT PJBI yang berdomisili di Jakarta. Selain Unit Bisnis Pengembangan Usaha dan PT PJBI, dalam melakukan pengembangan usaha PJB juga didukung oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi lainnya.

PJB Business Development is carried out by the Directorate of Development and Commerce as stipulated in the Board of Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 010.P/019/DIR/2019 concerning Organization and Work Procedure of PT Pembangkitan Jawa-Bali. According to organizational structure of PJB, business development manager is under Directorate of Development and Commerce, which supervises 5 divisions, namely IPP & Power Plant Development Division, Renewable Energy Development Division, Business Solution Division, Power Plant Construction Division, and Supply Chain Management Division. In developing the business, these divisions are supported by Business Development Unit domiciled in Jakarta and also Subsidiary in the field of Investment, namely PT PJBI which domiciled in Jakarta. Apart from Business Development Unit and PT PJBI, PJB is also supported by its Subsidiaries and other Affiliated Companies in developing business.

PENGEMBANGAN USAHA
BUSINESS DEVELOPMENT

Tata Kelola Pengembangan Usaha
Business Development Governance

Tata Kelola Pengembangan Usaha di PJB dilaksanakan oleh Divisi IPP & Pengembangan Pembangkit PJB (DIVIPP) dan Divisi Pengembangan EBT (DIVEBT). Selain itu PJB juga mengembangkan bisnis jasa O&M Pembangkit listrik baik yang dimiliki oleh PLN maupun oleh IPP di berbagai wilayah di Indonesia. PJB saat ini juga mengembangkan bisnisnya dalam pengembangan Proyek Pembangkit Listrik yang memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan, diantaranya yaitu PJB telah memiliki pembangkit listrik tenaga surya skala *utility* sejak tiga tahun lalu dengan kapasitas sebesar 1 MWp di area Unit Pembangkitan Cirata, dan PJB juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Pembangkit IPP diantaranya 145 MWAC *Floating Photovoltaic* di Waduk Cirata, Jawa Barat dan mendapatkan penugasan untuk mengembangkan 70 MW lebih Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Tanah Laut, Kalimantan Selatan serta melakukan beberapa inisiasi pengembangan pembangkit EBT khususnya PLTS, PLTB dan PLTA/PLTM.

Business Development Governance in PJB is carried out by the IPP & Power Plant Development Division (DIVIPP) and the Renewable Energy Development Division (DIVEBT), which is currently developing ± 23 Projects, including assignment for the development of 9 IPP projects through the Assignment GMS Letter on May 15, 2017 with total capacity of 6000 MW. Furthermore, PJB also develops O&M service business of Power plants both owned by PLN and IPP in various regions in Indonesia. Currently, PJB is also developing its business in Power Plant Project development which utilizes New and Renewable Energy. PJB also has owned solar power plant in utility scale since three years ago with the capacity of 1 MWp in Cirata Generation Unit area. PJB is also building IPP GU Projects, one of them is 145 MW Floating Photovoltaic in Cirata Reservoir, West Java and is tasked to establish Wind Power Plant (WPP) with the capacity over 70 MW in Tanah Laut, South Kalimantan as well as to conduct several EBT power plant development initiation, especially Solar Power Plant, Wind Power Plant, and HPP/MHPP.

PJB telah memiliki kebijakan tata kelola pengembangan usaha untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan usaha oleh divisi terkait di PJB. Sedangkan untuk melaksanakan fungsi monitoring dan kontrol atas proyek-proyek yang dikembangkan oleh PJB tersebut, maka PJB mengembangkan suatu aplikasi yaitu PMO (*Project Management Office*), yang mana aplikasi ini dapat membantu *Project Manager* dalam melakukan fungsi kontrol dan monitor proyek mulai dari tahap inisiasi hingga tahap penyelesaian proyek tersebut.

PJB had established business development governance as manual in implementing business development by related PJB divisions. While for controlling and monitoring function over those projects developed by PJB, the Company creates an application, namely PMO (Project Management Office). This application is able to help Project Manager in controlling and monitoring function over the projects, from initiation to completion phase of those projects.

Realisasi Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2021
Business Development Performance Realization in 2021

PJB telah melakukan beberapa program kerja Pengembangan Usaha selama tahun 2021, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Commercial Operation Date* (COD) PLTU Jawa 7 telah tercapai pada 08 Juli 2021.
2. Penyampaian Proposal Pengembangan Bisnis Pembangkit PJB kepada PT PLN (Persero) pada 08 November 2021.

PJB implemented several Business Development work programs during 2021, including the following:

1. Commercial Operation Date (COD) of Java 7 CFPP Jawa had been reached on July 8, 2021.
2. Submitted PJB Power Plant Business Development Proposal to PT PLN (Persero) on November 8, 2021.

3. Penyampaian kajian awal Relokasi PLTGU PJB kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 19 November 2021 untuk menindaklanjuti surat PT PLN (Persero) perihal Penugasan untuk kajian Relokasi PLTGU ke Sistem di Luar Jawa oleh PT PLN (Persero) tanggal 30 Juli 2022.
4. Pemuktahiran Kontrak Jasa O&M yang akan dan telah habis masa berlakunya serta amandemen terkait hal lainnya.
5. Pengembangan proyek IPP EBT dan Non EBT yang dalam tahap konstruksi yaitu, PLTS Cirata (145 MWac) COD pada tahun 2023, PLTA Batang Toru (510 MW) COD pada tahun 2025, PLTU Sumbagsel 1 (300 MW) COD pada tahun 2024.

3. Submitted initial study of PJB CCPP relocation to PT PLN (Persero) on November 19, 2021 to follow up on PT PLN (Persero) letter regarding Assignment to study CCPP relocation to systems outside Java by PT PLN (Persero) on July 30, 2022.
4. Updated O&M Service Contract which will and has expired as well as amendments related to other matters.
5. Development of EBT and Non-EBT IPP projects that are under construction, namely, Cirata SPP (145 MWac) COD in 2023, Batang Toru HPP (510 MW) COD in 2025, Southern Sumatera CFPP 1 (300 MW) COD in 2024.

Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2022
Business Development Work Plan for 2022

Secara umum, Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kontrak Pengadaan dan Pemasangan PLTS *Off Grid* Kepulauan *Isolated* PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur antara PT Pembangkitan Jawa Bali dengan PT PLN (Persero).
2. Rencana *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama calon *partner* startegis dalam mengembangankan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) maupun Non-EBT.
3. Rencana COD Proyek PLTS di tahun 2022 yaitu PLTS Subtitusi PS (6,6 MW) dan PLTS Komunal 6 Lokasi PLN UID Jatim (400 kWp).
4. Rencana COD Proyek Relokasi PLTG Jakabaring-PLTG Batanghari ke PLTG Haltim Tahap 1 (15 MW) pada 31 Desember 2022.
5. Pengembangan proyek EBT dan Non-EBT sesuai RUPTL.
6. Pengembangan Relokasi Pembangkit.

In general, Business Development Work Plan in 2022 is as follows:

1. Contract Plan for Procurement and Installation of Isolated Islands Off-Grid SPP of PT PLN (Persero) East Java Distribution Main Unit between PT Pembangkitan Jawa-Bali and PT PLN (Persero).
2. Planned Memorandum of Understanding (MoU) whith prospective strategic partners in developing New and Renewable Energy (NRE) and Non-NRE projects.
3. COD plan for SPP Project in 2022, which is PS Substitution SPP (6.6 MW) and Communal SPP at 6 SPP Locations for PLN UID East Java (400 kWp).
4. COD Plan for the relocation of the Jakabaring-GTPP Batanghari GTPP to Haltim GTPP Phase 1 (15 MW) on December 31, 2022.
5. Development of NRE and Non-NRE projects according to Electricity Supply Business Plan.
6. Development of Power Plant Relocation.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

ANALISIS INDUSTRI
INDUSTRY ANALYSIS

Tinjauan Perekonomian Dunia
World Economy Overview

Perkembangan ekonomi global di tengah *recovery* atas dampak pandemi yang melanda lebih dari 200 negara di dunia sejak tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan perlemahan. Hal ini disebabkan oleh adanya penyebaran varian baru virus Omicron Covid-19. Untuk memitigasi penyebaran varian baru dari virus Covid-19 ini maka pembatasan mobilitas diterapkan kembali.

The development of global economy in the middle of recovery of the pandemic impact that hit more than 200 countries in the world since 2020 up to 2021 shows weakness. This is due to the spread of new variants of the Covid-19 Omicron virus. To mitigate the spread of new variants from this Covid-19 virus, restrictions on mobility is re-implemented.

World Economic Outlook memprediksi pertumbuhan global pada akhir tahun 2021 sebesar 5,9%, namun diperkirakan akan melambat menjadi 4,4%, menjadi setengah poin persentase lebih rendah. Dimana sebagian besar merupakan cerminan dari penurunan perkiraan pertumbuhan ekonomi di dua ekonomi terbesar yaitu Amerika Serikat dan China. Hal ini merupakan *domino effect* dari adanya varian Covid-19 baru yang memperpanjang dampak pandemi bahkan menginduksi gangguan perekonomian yang baru.

The World Economic Outlook predicted the global growth at the end of 2021 was 5.9%, however, it is estimated to slow down into 4.4%, become half of percentage point lower. Where the majority is the reflection of a decrease in economic growth estimation in two biggest economy, namely the United States and China. This is the domino effect from new Covid-19 variant which extends the pandemic impacts, even induces new economic disruption.

Di sisi lain terjadinya volatilitas harga energi dan gangguan rantai pasok global telah mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi dan lebih luas daripada yang diantisipasi. Hal ini terjadi terutama di Amerika Serikat, *emerging market,* dan negara berkembang. Inflasi yang meningkat diperkirakan akan bertahan lebih lama dari yang dibayangkan dalam *World Eonomic Outlook* akhir tahun 2021, dengan gangguan rantai pasok yang sedang berlangsung dan harga energi yang tinggi berlanjut hingga awal tahun 2022.

On the other hand, energy price volatility and global supply chain disruption have resulted in a higher and broader inflation than anticipated. This is mainly occurred in the United States, emerging market, and developing country. The increasing inflation is estimated to last longer than imagined in the World Economic Outlook for the end of 2021, with the ongoing supply chain disruption and high energy price continuing into the beginning of 2022.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, permintaan masyarakat mulai kembali meningkat. Namun, akibat *global supply disruption*, produksi tidak dapat mengimbangi permintaan. Inflasi di sebagian negara mulai meningkat. Penguatan inflasi kemudian direspon dengan peningkatan suku bunga acuan untuk meredam laju inflasi. Di sisi lain, sebagian besar negara lainnya masih mempertahankan tingkat suku bunga. Laju inflasi akan menurun secara bertahap karena ketidakseimbangan *supply and demand* berkurang, dan respon atas penerapan kebijakan moneter di negara-negara ekonomi utama.

In line with economic recovery, community demand is starting to increase once more. However, due to the global supply disruption, production cannot balance the demand. Inflation in some countries is starting to increase. The strengthening of inflation is then responded with the increasing benchmark interest rate to reduce inflation rate. On the other hand, most countries still maintain their interest rate. Inflation rate will decrease gradually due to the imbalance of supply and demand are decreasing, and the response of implementing monetary policy in the major economic countries.

Perkembangan harga komoditas energi, terutama batubara dan gas alam, meningkat tajam pada triwulan III tahun 2021 sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi di berbagai negara. Tingginya harga komoditas energi makin mendorong naik biaya *input* industri di tengah disrupsi pasokan bahan baku. Selain itu, kondisi tersebut juga menyebabkan gangguan pasokan listrik seperti yang terjadi di Tiongkok. Harga minyak mentah sendiri masih menunjukkan peningkatan meskipun tidak setinggi komoditas energi lainnya.

The development of energy commodity prices, especially coal and nature gas, increase sharply in the third quarter of 2021 in line with economic activities recovery in various countries. The high energy commodity prices increasingly encourage industrial input costs in the middle of the raw materials supply disruption. In addition, the condition also results in the electricity supply disruption as occurred in China. The crude oil price itself still shows an increase, even though not as high as other energy commodities.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)
Chart of World Economic Growth (%)

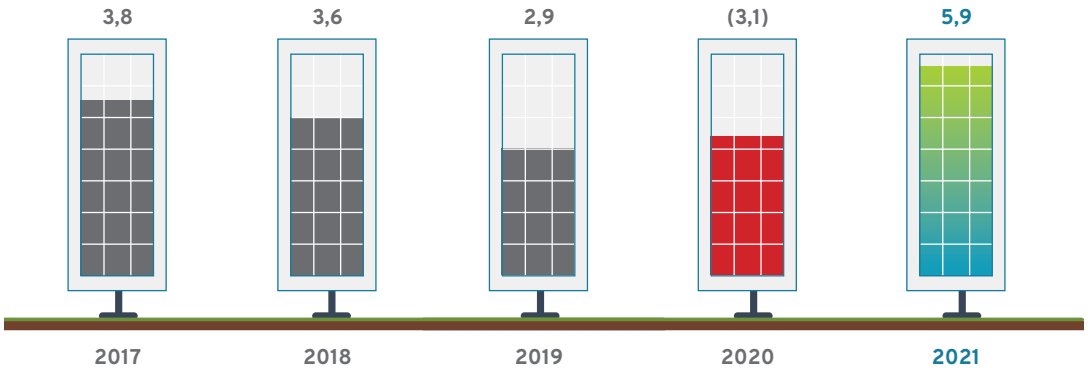

Sumber: *World Economic Outlook International Monetary Fund* (IMF) Januari 2022
Source: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) January 2022

Analisis Perekonomian Indonesia
Indonesian Economy Analysis

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indonesian Economic Growth

Penyebaran virus Covid-19 varian Delta yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 menyebabkan terjadinya lonjakan kasus baru selama triwulan III. Sebagai upaya pengendalian penyebaran yang makin meluas, pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai dari Jawa-Bali sejak Juli dan diperluas ke berbagai daerah lainnya. Pembatasan mobilitas tersebut pada gilirannya menyebabkan perlambatan pada kecepatan pemulihan ekonomi.

The spread of Delta variant of the Covid-19 virus occurred in the middle of 2021 resulted in the spike of new cases during the third quarter. As the effort of controlling the widespread, the government re-implements the Enforcement of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) started from Java-Bali since July and expanded to various other regions. Restrictions on mobility consequently results in the slowdown of economic recovery acceleration.

ANALISIS INDUSTRI
INDUSTRY ANALYSIS

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US$4.349,5. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,46%; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 6,81%; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,55%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 3,39%. Kelompok Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Kelompok Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,84% dan 4,65%.

In 2021, Indonesia's economy increased by 3.69%. Indonesia's economy in 2021 measured according to Gross Domestic Product (GDP) at current prices reached Rp16,970.8 trillion, and GDP per capital reached Rp62.2 million or US$4,349.5. The growth occurred in almost all business fields. The business field which experienced the highest growth was the Health Service and Social Activity of 10.46%; followed by Information and Communication of 6.81%; as well as Electrcity and Gas Procurement of 5.55%. Meanwhile, the Processing Industry that had dominant role increased by 3.39%. The group of Agriculture, Forestry, and Fishery, as well as the group of Wholesale and Retail Trade, Car and Motorcycle Reparation, increased by 1.84% and 4.65%, respectively.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89% dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66%.

The spatial structure of the Indonesian economy in 2021 was dominated by the group of provinces in Java Island which provided economic contribution at 57,89% and economic performance which experienced an increase of 3,66%.

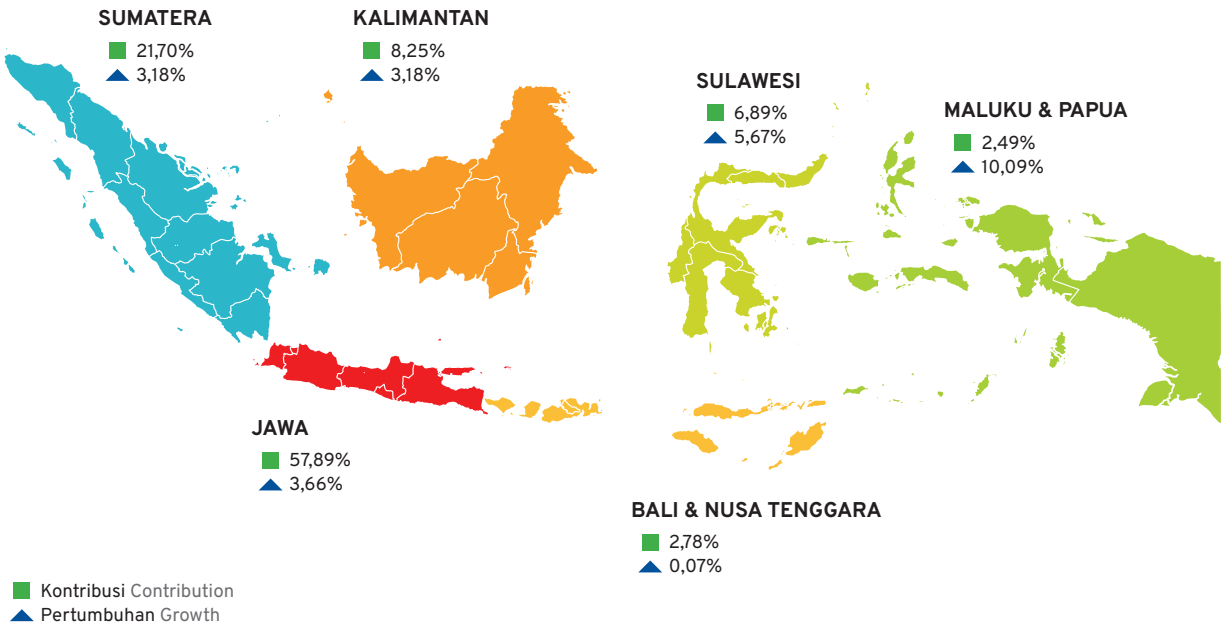

Sumber: Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia No. 14/02/Th. XXV, 7 Februari 2022
Source: Official Gazette of Indonesia's Economic Growth Statistics No. 14/02/Th. XXV, February 7, 2022

Tingkat Inflasi Indonesia
Indonesia's Inflation Rate

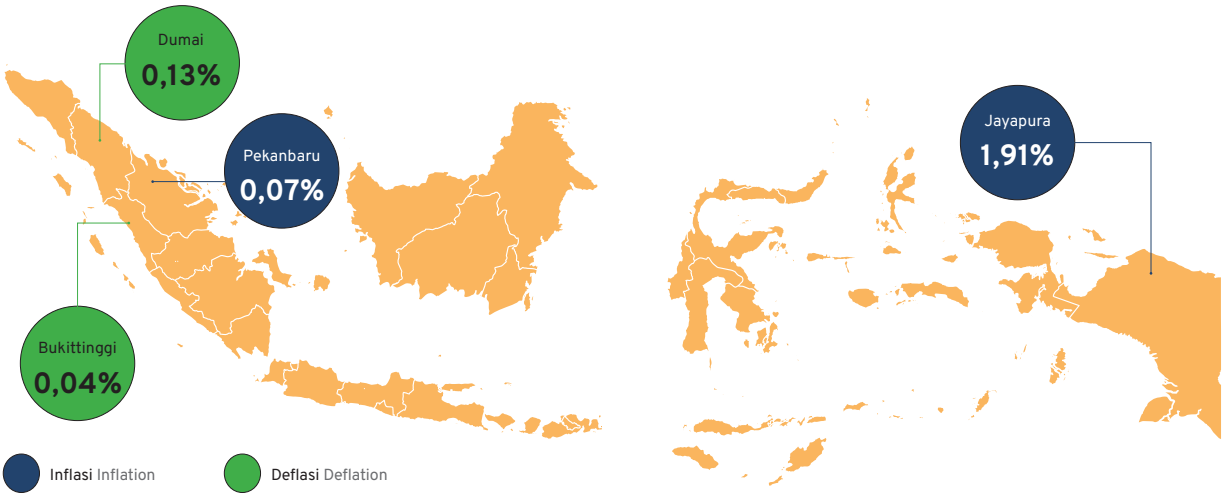

Pertumbuhan Inflasi di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 1,87%. Pada Desember 2021, terjadi infilasi sebesar 0,57% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,66. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,91% dengan IHK sebesar 105,87 dan terendah terjadi di Pekanbaru sebesar 0,07% dengan IHK 106,53. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Dumai sebesar 0,13% dengan IHK sebesar 107,70 dan terendah terjadi di Bukittinggi sebesar 0,04% dengan IHK sebesar 106,59.

The growth of inflation in 2021 was 1.87% compared to 2020. In December 2021, inflation of 0.57% occurred with the Consumer Price Index (CPI) of 107.66. From 90 CPI cities, 88 cities experienced inflation and 2 (two) cities experienced deflation. The highest inflation occurred in Jayapura at 1.91% with the CPI of 105.87, and the lowest inflation occurred in Pekanbaru at 0.07% with the CPI of 106.53. Meanwhile, the highest deflation occurred in Dumai at 0.13% with the CPI of 107.70 and the lowest deflation occurred in Bukittinggi at 0.04% with the CPI of 106.59.

Sumber: Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi No. 01/01/Th. XXV, 03 Januari 2022
Source: Official News Statistics on the Development of Consumer Price Index/Inflation No.01/01/XXV, January 3, 2022

Nilai Tukar Mata Uang
Currency Exchange Rates

Nilai tukar Rupiah menguat didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Nilai tukar Rupiah pada 18 Agustus 2021 menguat 0,89% secara rerata dan 0,63% secara *point-to-point* dibandingkan dengan level pada bulan Juli 2021. Penguatan nilai tukar Rupiah didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Dengan

The strengthening of Rupiah exchange rate is supported by Bank Indonesia's stabilization measures and the continued inflows of foreign capital into the domestic financial market. On August 18, 2021, the Rupiah exchange rate strengthened by 0,89% on average and 0,63% on point-to-point compared to the level in July 2021. The strengthening of the Rupiah exchange rate was supported by the increased inflows of foreign capital into the domestic financial market in line with easing uncertainty on global financial markets and positive investor perceptions of the prospects for improvement in the

ANALISIS INDUSTRI
INDUSTRY ANALYSIS

perkembangan tersebut, Rupiah sampai dengan 18 Agustus 2021 mencatat depresiasi sekitar 2,24% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020, relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

Sumber: Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus 2021
Source: Bank Indonesia, Monetary Policy Review August 2021

domestic economy. Regarding the development, as of August 18, 2021, the Rupiah recorded a depreciation around 2.,24% (ytd) compared to the level at the end of 2020, relatively lower compared to the currency depreciation of a number of other developing countries such as Philippines, Malaysia, and Thailand. Bank Indonesia continues to strengthen the policy of stabilizing Rupiah exchange rate in accordance with its fundamental and the operation of market mechanism, through monetary operations effectiveness and liquidity availability in the market.

Kondisi Industri Listrik Indonesia
Condition of Indonesian Electricity Industry

Berdasarkan Lapangan Usaha salah satu kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari industri pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 5,5%. Sebagai salah satu indikator penting perekonomian, PT PLN (Persero) juga mencatatkan konsumsi listrik yang meningkat. Terhitung hingga Agustus 2021, realisasi konsumsi listrik mencapai 166,17 *Terra Watt hour* (TWh) atau tumbuh 4,5% dibandingkan tahun 2020. Seiring dengan masifnya program vaksinasi dan penerapan new normal, beberapa sektor kegiatan ekonomi seperti rumah tangga, industri dan bisnis retail juga turut bergeliat. Sektor industri bahkan mencatatkan pertumbuhan konsumsi listrik yang cukup signifikan mencapai 10,5% selama Agustus 2021. Ditengah pemulihan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan di berbagai sektor, konsumsi listrik di tahun 2021 dinilai juga mulai membaik. Namun adapun beberapa tantangan bagi sektor energi dan ketenagalistrikan ke depan, yaitu:

1. RUPTL Tahun 2021-2030 yang disusun Pemerintah dengan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu 51,6% lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%
2. Adanya potensi ganggungan pertumbuhan listrik berupa *over supply* di sistem kelistrikan seperti sistem Jawa-Bali dan sistem Sumatera yang disebabkan oleh pandemi Covid-19
3. Pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan dalam pulau maupun antar pulau dalam meningkatkan keandalan listrik dan melakukan penetrasi EBT yang sumber energinya jauh dari pusat *demand* listrik

According to the Business Field, one of the highest contributions to Indonesia's economic growth comes from the electricity and gas procurement industry of 5.5%. As one of the important economic indicators, PT PLN (Persero) also records the increasing electricity consumption. As of August 2021, the realization of electricity consumption reached 166.17 Terra Watt hour (TWh) or increased by 4.5% compared to 2020. In line with the massive vaccination program and the implementation of new normal, several economic activity sectors such as household, industry, and retail business also increase. The industrial sector even recorded a significant increase of eletricity consumption that reached 10.5% during August 2021. In the middle of economic recovery marked with the growth in various sectors, electricity consumption in 2021 was considered to also start improving. However, there are several challenges for future energy and electricity sector, namely:

1. The 2021-2030 RUPTL prepared by the Government with the portion of the New and Renewable Energy (NRE) of 51.6%, higher compared to the additional fossil power plant of 48.4%
2. The potential electricity growth disruption in the form of over supply in the electricity system such as the Java-Bali system and Sumatera system due to the Covid-19 pandemic
3. The development of electricity interconnection within the island and among islands in improving the reliability of electricity and penetrating the NRE which its energy sources is far from the electricity demand center

4. Potensi adanya peran IPP yang lebih besar dalam pengembangan pembangkit berbasis EBT dalam rangka mencapai target penambagan pembangkit sebesar 40,6 GW, dengan adanya keterbatasan kapabilitas investasi PT PLN (Persero).

4. The potential of higher IPP role in the development of NRE-based power plants in order to achieve the target of adding power plants by 40.6 GW, with limited investment capability of PT PLN (Persero).

PLTU Batubara akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun, yaitu mencapai 8,5 GW atau 39,4%, disusul oleh PLTGU dengan kapasitas 3,4 GW atau 15,8%. Sementara untuk energi terbarukan diantaranya berupa PLTA/PLTM *pumped storage* sebesar 4,3 GW atau 20,1%, PLTP sebesar 1,9 GW atau 8,9%, serta pembangkit EBT lainnya sebesar 3,4 GW atau 16,9% yang berupa PLTS (2,9 GW), PLTB (0,3 GW), dan PLTBio (0,2 GW).

Coal CFPP will dominate the type of power plants that will be built, namely reaching 8.5 GW or 39.4%, followed by CCPP with the capacity of 3.4 GW or 15.8%. Meanwhile, for the renewable energy, including in the form of HPP/MHPP pumped storage of 4.3 GW or 20.1%, GPP of 1.9 GW or 8.9%, as well as other NRE power plants of 3.4 GW or 16.9% in the form of SPP (2.9 GW), WPP (0.3 GW), and Bio Power Plant (0.2GW).

Dalam upaya mengurangi pemakaian BBM, PLN berencana mengalihkan pemakaian BBM ke gas pada PLTG, PLTGU, dan PLTMG serta penggunaan campuran *biofuel* pada PLTD. *Fuel Switching* diterapkan juga pada PLTU mengingat bahwa target bauran energi di pembangkitan tenaga listrik untuk batubara paling besar sekitar 55% pada tahun 2025 sesuai dengan RUKN 2019-2038.

In the effort of reducing fuel consumption, PLN plans to transfer the consumption of fuel to gas on GTPP, CCPP, and GEPP, as well as the use of bio-fuel mixtures on DEPP. Fuel switching is also implemented on CFPP, considering that the target of energy mix in the power plant for coal is the biggest or around 55% in 2025 in accordance with the 2019-2038 RUKN.

Untuk sistem tenaga listrik Jawa-Bali, PLN telah mengadopsi teknologi PLTU batubara kelas 1.000 MW *ultra-supercritical* (*clean coal technology*) untuk memperoleh efisiensi yang lebih baik dan emisi CO_2 yang lebih rendah. Penggunaan unit sebesar ini dimotivasi oleh manfaat *economies of scale* dan didorong oleh semakin sulitnya memperoleh lahan untuk membangun pusat pembangkit skala besar di pulau Jawa. Pertimbangan lainnya adalah ukuran sistem Jawa Bali telah cukup besar untuk mengakomodasi unit pembangkit kelas 1.000 MW.

For the Java-Bali electricity system, PLN has adopted the ultra-supercritical 1,000 MW class coal CFPP technology (clean coal technology) to obtain better efficiency and lower CO_2 emission. This big usage of units is motivated by the economies of scale benefits and encouraged by the increasingly difficult to obtain land for building the large-scale power plant center in the Java island. Other judgements are the size of the Java-Bali system that is large enough to accommodate the 1,000 MW class power plant unit.

Sumber: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030
Source: Electricity Supply Business Plan (ESBP) of PT PLN (Persero) 2021-2030

Kontribusi PJB dalam Industri Pembangkit Listrik Indonesia
PJB's Contribution to Power Plant Industry of Indonesia

Sebagai Perusahaan dalam industri pembangkitan terkemuka, PJB menjadi Perusahaan yang sangat berkontribusi pada penyediaan tenaga listrik nasional. Bentuk kontribusi PJB terhadap penyediaan listrik nasional dan pembangkitan adalah sebagai berikut:

As the Company in the leading generation industry, PJB become the Company that greatly contributes to the provision of national electricity. The contribution of PJB to national electricity supply and generation is as follows:

ANALISIS INDUSTRI
INDUSTRY ANALYSIS

PJB Pemilik dan Pengelola Pembangkit Listrik berkapasitas 7.055 MW
PJB as the 7,055 MW-Power Plant Owners and Managers

PT PJB memiliki 8 unit pembangkit eksisting yang tersebar dalam 7 lokasi atau area yang memproduksi dan menjual tenaga listrik. Penjualan Tenaga Listrik merupakan bisnis utama yang dimiliki oleh PJB dimana lebih dari 75% pendapatan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting. PJB berkontribusi dalam penjualan tenaga listrik dengan pembangkit eksisting yang dimiliki sebesar 19,85 TWh di tahun 2021.

PT PJB has 8 existing power plant units spread over 7 locations or areas producing and selling electricity. Electricity sales are the main business owned by PJB where almost 75% of its revenue generates from the sales of electricity of existing power plants. In 2021, PJB contributed in the sales of electricity with its existing power plants of 19.85 TWh.

PJB Penyedia Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit
PJB as the Provider of Operations and Maintenance Services for Power Plant

Selain mengelola pembangkit sendiri, PJB juga berkontribusi memberikan layanan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*/O&M) tenaga listrik untuk pembangkit lain. PJB mengelola jasa O&M bersama dengan anak perusahaannya, PT PJB Services, adapun jasa O&M pembangkit di Jawa yang dikelola oleh PJB adalah 5 (lima) PLTU FTP-1 dan 5 (lima) pembangkit PLN lain yang berada di satu lokasi dengan pembangkit milik PJB. Selain FTP-1 Jawa, PJB juga mengelola O&M luar Jawa di 17 (tujuh belas) lokasi.

Besides managing the power plant itself, PJB also contributes to provide the electricity operation and maintenance (O&M) services for other power plants. PJB manages the O&M services with its subsidiary, PT PJB Services. The O&M services of power plants in Java managed by PJB are 5 (five) FTP-1 CFPP and 5 (five) other PLN power plants located in one location with PJB's power plants. Besides Java FTP-1, PJB also manages Outside Java O&M in 17 (seventeen) locations.

PJB Miliki Saham Perusahaan O&M
PJB Owns O&M Company Shares

PJB memiliki perusahaan patungan, yakni PT Komipo PJB yang melakukan jasa O&M pada unit pembangkit milik PT PLN (Persero) di Tanjung Jati B #3 dan #4 dengan kapasitas 1.320 MW.

PJB has a joint venture company, namely PT Komipo PJB conducting O&M services at the power plant unit owned by PT PLN (Persero) in Tanjung Jati B #3 and #4 with the capacity of 1,320 MW.

PJB Penyedia Jasa *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC)
PJB as the Provider of Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Services

Terdapat 4 proyek EPC yang dikelola oleh PJB melalui Anak Perusahaan yaitu PT Rekadaya Elektrika (RE) dengan total kapasitas 68 MW di tahun 2021.

In 2021, there were 4 EPC projects managed by PJB through its Subsidiary, namely PT Rekadaya Elektrika (RE) with the total capacity of 68 MW.

PJB Kembangkan Pembangkit IPP
PJB Develops IPP Power Plant

PJB juga memiliki pembangkit yang dikembangkan sebagai IPP melalui perusahaan patungan dengan kapasitas sebesar 5.665 MW baik pembangkit yang sudah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap pengembangan (konstruksi).

PJB also has the power plant developed as the IPP through a joint venture with the capacity of 5,665 MW, either that are already in operation or that are in the development stage (construction).

PJB Kembangkan Pembangkit EBT
PJB Develops New and Renewable Energy Power Plant

PJB juga tengah mengembangkan pembangkit ekonomis dan ramah lingkungan, salah satunya yang saat ini sudah masuk dalam masa konstruksi yaitu mega proyek PLTS *Floating* Cirata 145 MWAC yang berlokasi di Waduk Cirata, Jawa Barat. PLTS dengan model terapung ini akan menjadi PLTS terapung terbesar di Indonesia. Selain pengembangan IPP PLTS, PJB juga telah menginisiasi beberapa proyek EBT dari pengembangan PLTB skala besar sampai dengan inisiasi membangun PLTS di wilayah kepulauan.

PJB is also developing economical and environmentally friendly power plants, one of which is currently under construction, namely the megaproject of 145 MWAC Cirata Floating SPP located in Cirata Reservoir, West Java. SPP with this floating model will be the largest floating SPP in Indonesia. In addition to the development of IPP SPP, PJB has also initiated several New and Renewable Energy projects from large-scale WPP development to the building SPP in the archipelago.

PJB Mendukung Capaian Target Bauran Energi (EBT)
PJB Supports the Achievement of Energy Mix (NRE) Target

PJB terus melakukan upaya pengembangan dan implementasi co-firing dan biomassa untuk pembangkit yang dikelola PJB. Sebelas diantaranya telah melaksanakan *go-live* komersialisasi *co-firing* yaitu Paiton 1-2, Paiton 9, Indramayu, Rembang, Tanjung Awar-Awar, Ketapang, Anggrek, Pacitan, Ropa, Bolok, Pulang Pisau. Selain itu, PJB juga terus melakukan upaya aktif inisiasi pengembangan EBT (PLTS, PLTB, PLTMH, dll.) melalui:

a. Pendekatan & permohonan data *demand* ke *stakeholder* PLN
b. Inisiasi dengan calon *partner* yang kompeten dan dapat memberikan nilai tambah
c. Melakukan studi/kajian pengembangan proyek EBT
d. Pengembangan PLTS untuk subtitusi PS

PJB continues to conduct the efforts of developing and implementing co-firing and biomass for the power plants managed by PJB. Eleven of them have carried out go-live commercialization of co-firing, namely Paiton 1-2, Paiton 9, Indramayu, Rembang, Tanjung Awar-Awar, Ketapang, Anggrek, Pacitan, Ropa, Bolok, and Pulang Pisau. In addition, PJB also continues to conduct the initiation active effort of developing the NRE (SPP, WPP, MHPP, etc.) through:

a. Data demand approach & application to the stakeholder of PLN
b. Initiation with the prospective partner that is competent and able to provide added value
c. Conducting the NRE project development study
d. SPP development for PS substitution

PJB Mendukung Penggunaan Bahan Bakar EBT
PJB Supports the Use of the NRE Fuel

Salah satu strategi korporat di tahun 2021 yaitu penggunaan *co-firing biomass*, hal ini bertujuan untuk mendukung penambahan penggunaan bahan bakar EBT di dalam memproduksi energi listrik. Bukti dari pencapaian indikator ini adalah jumlah kapasitas MW Pembangkit yang mengimplementasikan *co-firing biomass* untuk meningkatkan ekosistem lingkungan hidup. Pada tahun 2021, produksi MW yang diperoleh dari bahan bakar biomassa sebesar 92,27 MW, lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 35,21 MW.

One of the corporate strategies in 2021 was the use of co-firing biomass; this is purposed to support the additional use of the NRE fuel in producing electricity energy. The proof of this indicator achievement is the total MW capacity of power plants that implement co-firing biomass to increase environmental ecosystems. In 2021, the MW production obtained from biomass fuels was 92.27 MW, better than the set target of 35.21 MW.

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Segmen Usaha PJB
PJB's Business Segment

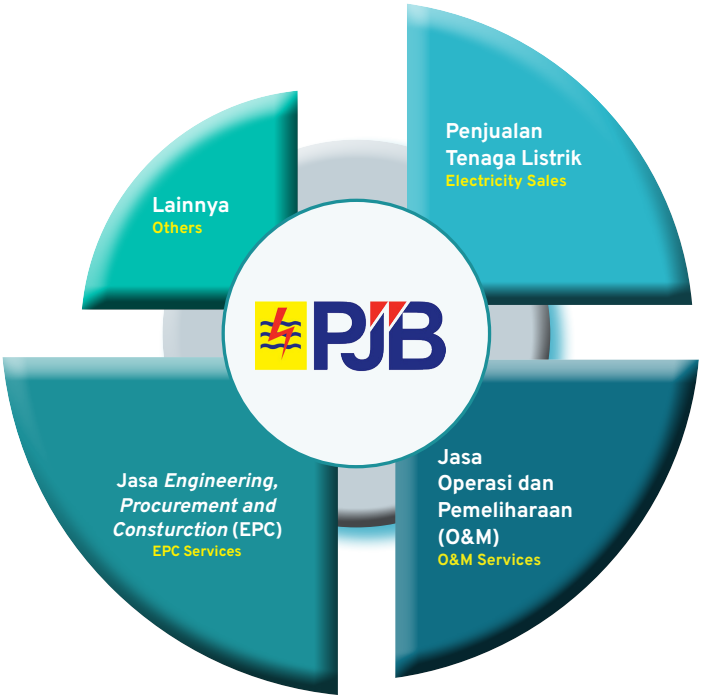

Segmen Usaha Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales Segment

PT PJB memiliki 8 unit pembangkit eksisting yang tersebar dalam 7 lokasi atau area yang memproduksi dan menjual tenaga listrik. Penjualan Tenaga Listrik merupakan bisnis utama yang dimiliki oleh PJB dimana 75% pendapatan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting. Segmen usaha penjualan tenaga listrik mencakup kegiatan pembangkitan tenaga listrik, sampai dengan penyaluran listrik kepada pelanggan. Dalam segmen usaha ini, PJB memperhatikan beberapa indikator kinerja yaitu kinerja pembangkit, produksi, dan penjualan tenaga listrik.

PT PJB has 8 existing power plant units spread over 7 locations or areas producing and selling electricity. Electricity sales are the main business owned by PJB where almost 75% of its revenues come from the sales of electricity from existing power plants. The electricity sales segment covers electricity power plant activities to electricity distribution to customers. In this operating segment, PJB focuses on several performance indicators, including the performance of power plants, production, and electricity sales.

Kinerja Pembangkit Eksisting
Existing Power Plant Performance

Indikator kinerja pembangkit mencakup faktor ketersediaan, faktor gangguan, efisiensi pembangkit, pemeliharaan pembangkit, dan kapasitas daya terpasang. Kinerja operasi PJB tahun 2021 dinilai memuaskan, terlihat dari beberapa indikator kinerja pembangkit yang mencakup efisiensi pembangkit, dan ketepatan pelaksanaan serta durasi pemeliharaan.

The indicators of power plant performance include the factors of availability, disruption, power plant efficiency, power plant maintenance, and installed power capacity. The performance of PJB operations for 2021 is considered satisfying as seen from several power plant performance indicators covering power plant efficiency and the accuracy of maintenance implementation and duration.

Faktor Ketersediaan Pembangkit Eksisting
Existing Power Plant Availability Factor

PJB menekankan fokus penciptaan nilai bisnis pembangkit eksisting pada penjualan tenaga listrik yang lebih optimal dengan standard performa *excellence* EAF yang mencapai *world-class standard* dan mengusung prinsip *cost leadership* agar dapat mendukung kinerja usaha pemegang saham. Faktor ketersediaan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Availability Factor* (EAF) dan *Scheduled Outage Factor* (SOF).

PJB emphasizes the focus to create the existing power plant business value in the electricity sales more optimally with the excellent performance standards of EAF that reach the world-class standard and carry the principle of cost leadership to be able to support the business performance of shareholders. The availability factor of a power plant engine is measured based on the Equivalent Availability Factor (EAF) and Scheduled Outage Factor (SOF) as the indicators.

Realisasi EAF sebesar 95,47%
menunjukkan bahwa tingkat kesiapan pembangkit PJB eksisting sangat tinggi untuk menyuplai kelistrikan di Sistem Jawa Bali
The realization of EAF of 95.47%
shows that the readiness level of PJB's existing power plant to supply electricity in the Java Bali System was very high

EAF Pembangkit Eksisting

EAF adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan energi listrik. EAF menjadi indikator utama Perusahaan dalam mewujudkan pelayanan kepada pelanggan. Nilai EAF korporat berfungsi untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit secara korporat untuk beroperasi dengan Daya Mampu Neto (DMN) pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan kinerja pembangkit yang semakin baik.

Nilai EAF pembangkit eksisting PJB pada tahun 2021 adalah 95,47% sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 95,52%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa gangguan pembangkit di UP Muara Tawar dan UP Cirata.

EAF of Existing Power Plant

EAF is the indicator that shows the readiness level of a power plant to operate and produce electricity. EAF is the main indicator of the Company in realizing services to the customers. The corporate EAF value has a function to know the factor of corporate power plant availability to operate with Net Dependable Capacity (NDC) for a certain period. The higher the EAF value, the better the power plant performance.

In 2021, the EAF value of PJB's existing power plant was 95.47%, slightly decreased compared to 2020 at 95.52%. The decrease was due to several power-plant disruptions in Muara Tawar GU and Cirata GU.

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Tabel EAF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (%)
Table of EAF of Existing Power Plant by Generation Types (%)

EAF Jenis Pembangkitan SOF of Generation Types	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTA HPP	98,03	96,26	93,35	(2,84)
PLTU Batubara Coal CFPP	90,28	94,05	95,12	1,14
PLTU Non-Batubara Non-Coal CFPP	96,86	99,56	99,47	(0,09)
PLTG GTPP	93,57	98,20	95,71	(2,53)
PLTGU CCPP	95,17	93,08	95,24	1,76
EAF Pembangkit Eksisting **EAF of Existing Power Plant**	**95,06**	**95,52**	**95,47**	**(0,05)**

Tabel EAF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)
Table of EAF of Existing Power Plant by Generation Units (%)

EAF Unit Pembangkitan EAF of Generation Units	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Brantas Brantas GU	98,19	98,99	97,67	(1,33)
UP Cirata Cirata GU	97,99	95,51	92,17	(3,50)
UP Gresik Gresik GU	97,36	96,23	97,77	1,60
UP Paiton Paiton GU	90,28	94,05	95,12	1,14
UP Muara Karang Muara Karang GU	92,10	94,97	97,81	2,99
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	93,76	95,21	93,72	(1,56)
EAF Pembangkit Eksisting **EAF of Existing Power Plant**	**95,06**	**95,52**	**95,47**	**(0,05)**

Grafik EAF Pembangkit Eksisting (%)
Chart of EAF of Existing Power Plant (%)

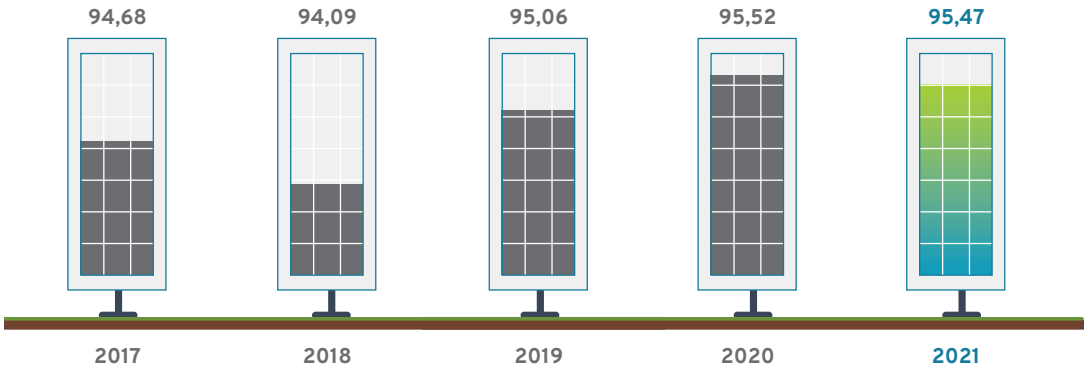

Realisasi SOF sebesar 2,27%
menunjukkan bahwa optimasi durasi pemeliharaan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
The realization of SOF of 2.27%
shows that the optimization of maintenance duration was better compared to the previous year.

SOF Pembangkit Eksisting

SOF adalah indikator untuk mengukur tingkat pembangkit keluar sistem karena pemeliharaan terencana, yaitu *Planned Outage Hour* dan *Maintenance Outage Hour* yang sudah direncanakan sebelumnya. Semakin tinggi nilai SOF menunjukkan pemeliharaan terencana yang dilakukan pada mesin pembangkit lebih banyak (dari sisi durasi). Semakin rendah nilai SOF, maka dinilai semakin baik karena menunjukkan optimasi durasi pemeliharaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Nilai SOF pembangkit eksisting PJB pada tahun 2021 adalah 2,27% meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 3,77%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh optimalisasi durasi pemeliharaan pembangkit PLTU Non Batubara, PLTGU, PLTU Batubara Eksisting, dan PLTA.

SOF of Existing Power Plant

SOF is the indicator to measure the power plant level out of the system due to planned maintenance known as Planned Outage Hour and Maintenance Outage Hour which have been planned previously. The higher the SOF value, the more planned maintenance is implemented on the power plant engine (in terms of duration). The lower the SOF value, the better it is due to indicating the optimization of maintenance duration that has been planned previously.

In 2021, the SOF value of PJB's existing power plant was 2.27%, an increase compared to 2020 by 3.77%. The increase was mainly due to the optimization of maintenance duration for Non-Coal CFPP, CCPP, Existing Coal CFPP, and HPP.

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Tabel SOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (%)
Table of SOF of Existing Power Plant by Generation Types (%)

SOF Jenis Pembangkitan SOF of Generation Types	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTA HPP	1,67	3,09	2,94	(8,60)
PLTU Batubara Coal CFPP	8,11	4,83	3,88	(19,67)
PLTU Non-Batubara Non-Coal CFPP	3,01	0,32	0,00	(100,00)
PLTG GTPP	6,28	1,73	4,27	146,91
PLTGU CCPP	3,71	5,71	1,20	(77,27)
SOF Pembangkit Eksisting SOF of Existing Power Plant	**4,22**	**3,72**	**2,27**	**(38,98)**

Tabel SOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)
Table of SOF of Existing Power Plant by Generation Units (%)

SOF Unit Pembangkitan SOF of Generation Units	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Brantas Brantas GU	1,81	0,99	2,26	128,28
UP Cirata Cirata GU	1,64	3,66	3,13	(14,48)
UP Gresik Gresik GU	1,71	3,00	1,04	(65,33)
UP Paiton Paiton GU	8,11	4,83	3,88	(19,67)
UP Muara Karang Muara Karang GU	7,31	3,85	1,42	(63,12)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	5,80	4,34	2,83	(34,79)
SOF Pembangkit Eksisting SOF of Existing Power Plant	**4,22**	**3,72**	**2,27**	**(38,98)**

Grafik SOF Pembangkit Eksisting (%)
Chart of SOF of Existing Power Plant (%)

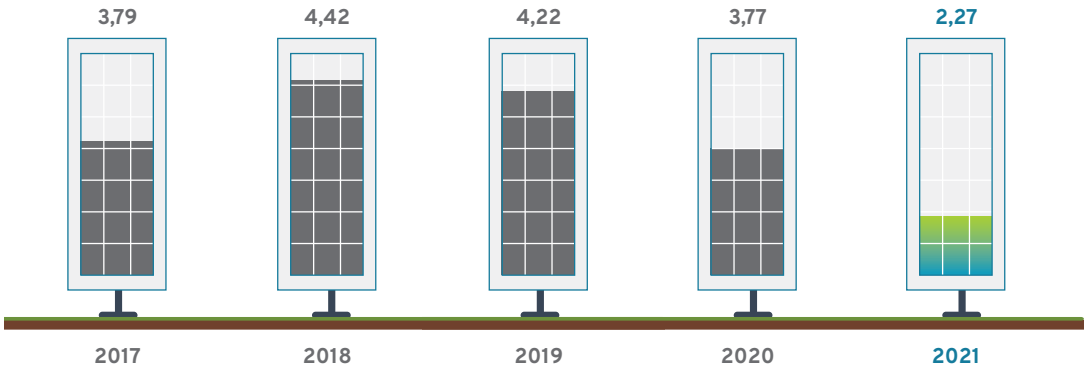

Faktor Gangguan Pembangkit Eksisting
Outage Factors of Existing Power Plant

Faktor gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) dan *Sudden Outage Frequency* (SdOF).

Outage factor is measured by using Equivalent Forced Outage Rate (EFOR), and Sudden Outage Frequency (SdOF) indicators.

Realisasi EFOR sebesar 3,70%
menunjukkan bahwa jumlah durasi jam gangguan pembangkit PJB eksisting meningkat dari tahun sebelumnya.
The realization of EFOR of 3.70%
shows that the amount of outage duration of PJB's existing power plant increased from the previous year.

EFOR Pembangkit Eksisting

EFOR merupakan indikator untuk mengukur tingkat mesin pembangkit keluar paksa atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan. Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan penanganan gangguan semakin cepat.

Nilai EFOR pembangkit eksisting PJB pada tahun 2021 adalah 3,70% meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,93%. Peningkatan nilai EFOR tersebut terutama disebabkan oleh adanya beberapa gangguan pembangkit di UP Muara Tawar dan UP Cirata.

EFOR of Existing Power Plant

EFOR is the indicator to measure the power plant's reliability level to operate during an outage or the inability of the unit to operate due to interference. The lower the EFOR value indicates more rapid handling of the outage.

In 2021, the EFOR value of PJB's existing power plant was 3.70%, an increase compared to 2020 by 0.93%. The increase in EFOR value was mainly due to several power-plant disruptions in Muara Tawar GU and Cirata GU.

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Tabel EFOR Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (%)
Table of EFOR of Existing Power Plant by Generation Types (%)

EFOR Jenis Pembangkitan EFOR of Generation Types	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTA HPP	0,92	2,37	9,06	282,21
PLTU Batubara Coal CFPP	1,78	1,10	0,92	(16,36)
PLTU Non-Batubara Non-Coal CFPP	0,18	0,41	2,02	392,76
PLTG GTPP	0,95	0,66	0,06	(91,59)
PLTGU CCPP	0,58	0,71	4,92	592,86
EFOR Pembangkit Eksisting **EFOR of Existing Power Plant**	**0,80**	**0,93**	**3,70**	**297,85**

Tabel EFOR Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (%)
Table of EFOR of Existing Power Plant by Generation Units (%)

EFOR Unit Pembangkitan EFOR of Generation Units	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Brantas Brantas GU	0,00	0,03	0,09	200,00
UP Cirata Cirata GU	1,41	3,47	11,51	231,70
UP Gresik Gresik GU	1,41	0,28	1,40	400,00
UP Paiton Paiton GU	1,78	1,10	0,92	(16,36)
UP Muara Karang Muara Karang GU	0,63	0,67	0,60	(10,45)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	0,95	1,61	8,78	445.34
EFOR Pembangkit Eksisting **EFOR of Existing Power Plant**	**0,80**	**0,93**	**3,70**	**297,85**

Grafik EFOR Pembangkit Eksisting (%)
Chart of EFOR of Existing Power Plant (%)

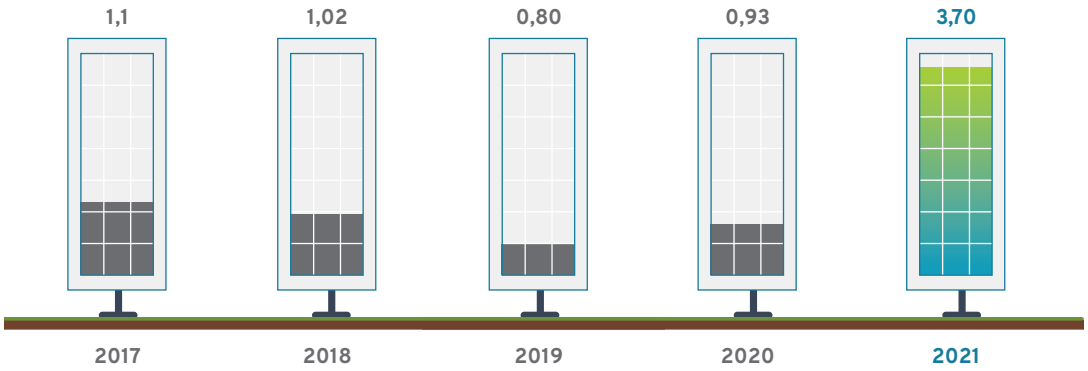

Realisasi SdOF sebesar 0,99 kali/unit
menunjukkan bahwa jumlah gangguan mendadak pembangkit PJB eksisting lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
The realization of SdOF of 0.99 times/unit
shows that the amount of sudden outage on PJB's existing power plant was higher than the previous year.

SdOF Pembangkit Eksisting

SdOF merupakan indikator yang menunjukkan jumlah gangguan yang terjadi dalam periode tertentu, terutama frekuensi terjadinya gangguan yang berulang. Semakin rendah nilai SdOF maka semakin baik.

Nilai SdOF pembangkit eksisting PJB pada tahun 2021 adalah 0,99 kali/unit meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,65 kali/unit. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh gangguan mendadak pada PLTU Batubara dan PLTGU.

SdOF of Existing Power Plant

SdOF is the indicator reflecting the total amount of outage that occurs within a certain period, especially the frequency of recurring outage. The lower the SdOF value, the better it is.

In 2021, the SdOF value of PJB's existing power plant was 0.99 times/unit, increased compared to 2020 by 0.65 times/unit. The increase was mainly influenced by the sudden outage of Coal CFPP and CCPP.

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Tabel SdOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (kali/unit)
Table of SdOF of Existing Power Plant by Generation Types (times/unit)

SdOF Jenis Pembangkitan SdOF of Generation Types	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	kali/unit times/unit
PLTA HPP	0,58	0,39	0,64	63,17	0,25
PLTU Batubara Coal CFPP	1,50	1,50	2,50	66,67	1,00
PLTU Non-Batubara Non-Coal CFPP	0,17	0,17	0,33	96,08	0,16
PLTG GTPP	0,50	0,90	0,30	(66,67)	(0,60)
PLTGU CCPP	1,55	1,00	1,95	95,00	0,95
SdOF Pembangkit Eksisting **SdOF of Existing Power Plant**	**0,83**	**0,65**	**0,99**	**52,31**	**0,34**

Tabel SdOF Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (kali/unit)
Table of SdOF of Existing Power Plant by Generation Units (times/unit)

SdOF Unit Pembangkitan SdOF of Generation Units	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	kali/unit times/unit
UP Brantas Brantas GU	0,40	0,36	0,40	11,11	0,04
UP Cirata Cirata GU	1,13	0,50	1,38	176,00	0,88
UP Gresik Gresik GU	0,33	0,50	0,72	44,00	0,22
UP Paiton Paiton GU	1,50	1,50	2,50	66,67	1,00
UP Muara Karang Muara Karang GU	2,17	1,33	2,50	87,97	1,17
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1,50	1,08	1,33	23,15	0,25
SdOF Pembangkit Eksisting **SdOF of Existing Power Plant**	**0,83**	**0,65**	**0,99**	**52,31**	**0,34**

Grafik SdOF Pembangkit Eksisting (kali/unit)
Chart of SdOF of Existing Power Plant (times/unit)

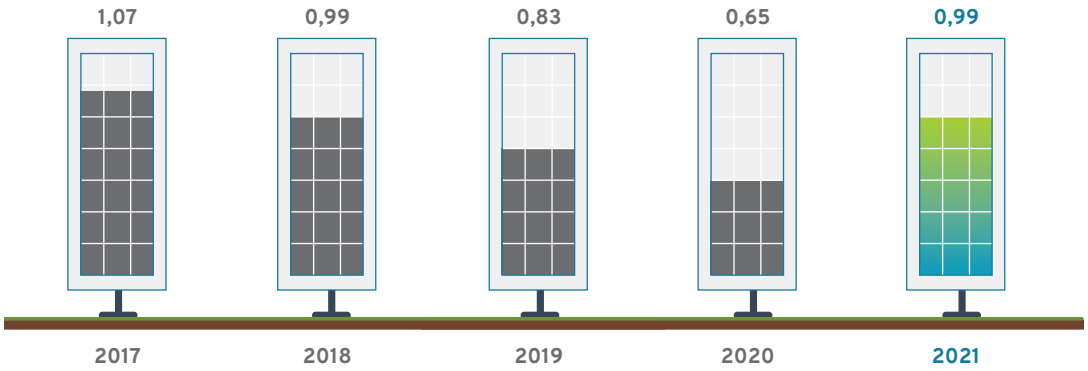

Faktor Efisiensi Pembangkit Eksisting
Efficiency Factors of Existing Power Plant

Realisasi Tara Kalor Neto sebesar 2.484,66 kcal/KWh
menunjukkan bahwa efisiensi pembangkit thermal PJB eksisting lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
The realization of Net Plant Heat Rate of 2,484.66 kcal/KWh shows that the efficiency of PJB's existing thermal power plant was higher than the previous year.

Efisiensi mesin pembangkit thermal diukur berdasarkan indikator Tara Kalor Neto (*Net Plant Heat Rate*/NPHR). Indikator Tara Kalor Neto bertujuan untuk mengukur efisiensi pemakaian bahan bakar yang dikonversikan ke dalam nilai kalori yang dibutuhkan untuk setiap KWh produksi neto yang dibangkitkan oleh unit pembangkit pada suatu periode. Semakin rendah nilai Tara Kalor Neto menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.

Nilai Tara Kalor Neto pembangkit eksisting PJB pada tahun 2021 adalah 2.484,66 kCal/KWh menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 2.509,04 kCal/KWh. Peningkatan *heat rate* tersebut terutama disebabkan oleh adanya efisiensi pada PLTGU dan PLTG.

The efficiency of a thermal power plant engine is measured according to the Net Plant Heat Rate (NPHR) indicator. The Net Plant Heat Rate indicator aims to measure the efficiency of fuel consumption converted into heat rate needed for every net production KWh generated by power plant units in a period. A lower NPHR value indicates more efficient power plants.

In 2021, the Net Plant Heat Rate value of PJB's existing power plant was 2,484.66 kCal/KWh, a decrease compared to 2020 of 2,509.04 kCal/KWh. The increase in heat rate was mainly due to the efficiency of CCPP and GTPP.

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (kCal/KWh)
Table of Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant by Generation Types (kCal/KWh)

Tara Kalor Neto Jenis Pembangkitan Net Plant Heat Rate of Generation Types	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/KWh
PLTU Batubara Coal CFPP	2.742,66	2.702,84	2.749,89	1,74	47,05
PLTU Non-Batubara Non-Coal CFPP	3.400,39	2.689,21	2.714,47	0,94	25,26
PLTG GTPP	2.195,47	3.279,09	3.278,57	(0,02)	(0,52)
PLTGU CCPP	2.195,55	2.281,41	2.233,92	(2,08)	(47,49)
Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting **Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant**	**2.490,62**	**2.509,04**	**2.484,66**	**(0,97)**	**(24,38)**

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (kCal/KWh)
Table of Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant by Generation Units (kCal/KWh)

Tara Kalor Neto Unit Pembangkitan Net Plant Heat Rate of Generation Units	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/KWh
UP Gresik Gresik GU	2.294,29	2.304,31	2.321,94	0,77	17,63
UP Paiton Paiton GU	2.742,66	2.702,84	2.749,89	1,74	47,05
UP Muara Karang Muara Karang GU	2.512,64	2.360,46	2.354,09	(0,27)	(6,37)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2.495,05	3.115,79	2.461,84	(20,99)	(653,95)
Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting **Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant**	**2.490,62**	**2.509,04**	**2.484,66**	**(0,97)**	**(24,38)**

Grafik Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting (kCal/KWh)
Chart of Net Plant Heat Rate of Existing Power Plant (kCal/KWh)

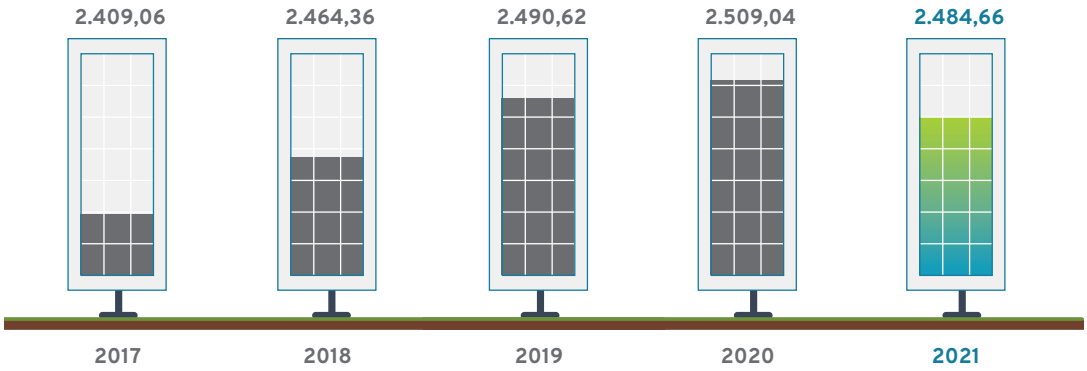

Faktor Pemeliharaan Pembangkit Eksisting
Overhaul Factors of Existing Power Plant

Realisasi Jumlah *Overhaul* 30
menunjukkan bahwa unit pembangkit PJB sedikit kurang mengoptimalkan pelaksanaan dan biaya overhaul sesuai kondisi pembangkit masing-masing dibanding tahun sebelumnya.

The realization of Total Overhaul of 30
shows that PJB's power plant units were slightly less optimizing the overhaul implementation and costs according to the condition of each power plant compared to the previous year.

Tingkat kesiapan pembangkit sangat dipengaruhi oleh pemeliharaan yang diterapkan. Oleh karena itu ketepatan pelaksanaan dan durasi pemeliharaan menjadi faktor yang sangat penting bagi tingkat kesiapan pembangkit.

Jumlah pemeliharaan pembangkit eksisting PJB pada tahun 2021 adalah sebanyak 30 *overhaul* sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020 sebanyak 29 *overhaul*. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah *overhaul* PLTG.

The readiness level of the power plant is strongly influenced by the maintenance implemented. Therefore, the accuracy of implementation and duration of maintenance becomes a significant factor in the readiness level of a power plant.

In 2021, total maintenance of PJB's existing power plant was 30 overhauls, a slightly increased compared to 2020 of 29 overhauls. The increase was mainly due to an increase in the total overhaul of the GTPP.

Tabel *Overhaul* Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (jumlah *overhaul*)
Table of Overhaul of Existing Power Plant by Generation Types (total overhaul)

Overhaul Jenis Pembangkitan Overhaul by Generation Types	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	jumlah *overhaul* total overhaul
PLTA HPP	12	14	14	0.00	**0**
PLTU CFPP	1	1	1	0.00	0
PLTG GTPP	7	4	8	100.00	4
PLTGU CCPP	13	10	7	(30.00)	3
***Overhaul* Pembangkit Eksisting** **Overhaul of Existing Power Plant**	**33**	**29**	**30**	**3,45**	**1**

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Grafik *Overhaul* Pembangkit Eksisting (jumlah overhaul)
Chart of Overhaul of Existing Power Plant (total overhaul)

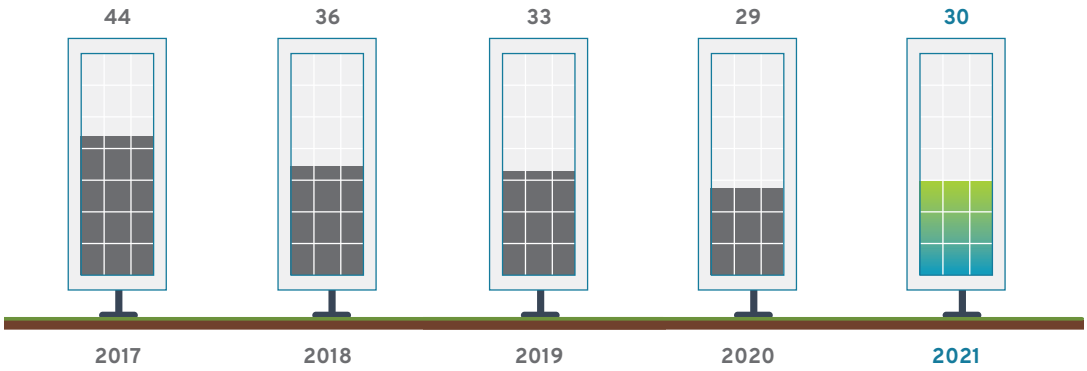

Daya Terpasang Pembangkit Eksisting
Installed Capacity of Existing Power Plant

Kontribusi PJB di DTP Sistem Jawa-Bali adalah 20,24% (6.992 MW)
PJB's Contribution in Installed Capacity of the Java-Bali System is 20.24% (6,992 MW)

DTP merupakan daya yang tertera sesuai dengan setiap mesin pembangkit. Dari total DTP sistem Jawa-Bali 34.550 MW, saat ini PJB memiliki DTP sebesar 6.992 MW, yaitu mencapai 20,24% dari DTP Sistem Jawa-Bali. Daya terpasang ini belum termasuk PLTD SUPPA karena bukan merupakan bagian sistem Jawa-Bali. Daya terpasang PJB eksisting secara keseluruhan adalah sebesar 7.054 MW.

Installed Capacity is the power listed following each power plant engine. From the total Installed Capacity of the Java-Bali system of 34,550 MW, PJB's Installed Capacity is currently 6,992 MW which reaches 20.24% of the Installed Capacity of the Java-Bali System. This installed capacity has not included the Suppa DPP due to the plant is not included in the Java-Bali system. The installed capacity in PJB's existing units comprehensively is 7,054 MW.

Tabel DTP Pembangkit Eksisting
Table of Installed Capacity of Existing Power Plant

Unit Pembangkitan Generation Units	DTP Installed Capacity	
	MW	%
UP Brantas Brantas GU	275	3,90
UP Cirata Cirata GU	1.008	14,29
UP Gresik Gresik GU	2.219	31,46
UP Paiton Paiton GU	800	11,34

Unit Pembangkitan Generation Units	DTP Installed Capacity	
	MW	%
UP Muara Karang Muara Karang GU	909	12,89
UP Muara Tawar Muara Tawar	1.778	25,21
PLTD Suppa DPP Suppa	62,4	0,88
UP Bawean Bawean GU	3	0,04
DTP Pembangkit Eksisting **Installed Capacity of Existing Power Plant**	**7.055**	**100,00**

Daya Mampu Neto
Net Dependable Capacity

> **Daya Mampu Neto PJB sebesar 6.449 MW atau berkontribusi sebesar 16,76% terhadap Sistem Jawa-Bali**
> PJB's Net Dependable Capacity is 6,449 MW or contributes by 16.76% to the Java-Bali System

Kapasitas Daya Mampu Neto (DMN) adalah daya mampu pembangkit dalam satuan Mega Watt berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dituangkan dalam Sertifikat Laik Operasi. Daya Mampu Neto Sistem Jawa Bali adalah sebesar 38.478 MW, sedangkan DMN PJB eksisting sebesar 6.449 MW, atau memberikan kontribusi di Sistem Jawa-Bali sebesar 16,76%.

Net Dependable Capacity (NDC) is the power plant capacity in Mega Watt units according to the examination and test results stated in the Commissioning Certificate. The NDC of the Java-Bali System is 38,478 MW, while the NDC of PJB's existing units is 6,449 MW, or provides a contribution to the Java-Bali System of 16.76%.

Tabel DMN Pembangkit Eksisting
Table of Net Dependable Capacity of Existing Power Plant

Unit Pembangkitan Generation Units	DMN Net Dependable Capacity	
	MW	%
UP Brantas Brantas GU	269	3,80
UP Cirata Cirata GU	984	13,92
UP Gresik Gresik GU	1.934	27,35
UP Paiton Paiton GU	740	10,47
UP Muara Karang Muara Karang GU	728	10,30

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Unit Pembangkitan Generation Units	DMN Net Dependable Capacity	
	MW	%
UP Muara Tawar Muara Tawar	1.729	24,45
PLTD Suppa DPP Suppa	3	0,04
UP Bawean Bawean GU	62	0,88
DMN Pembangkit Eksisting **Net Dependable Capacity of Existing Power Plant**	**6.449**	**100,00**

Net Capacity Factor

Net Capacity Factor (NCF) adalah rasio antara total produksi neto dengan daya mampu neto unit pembangkit dikali dengan jam periode tertentu. Semakin tinggi nilai NCF maka semakin baik tingkat utilitas unit pembangkit. Pada tahun 2021, NCF PJB Eksisting sebesar 35,13% dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat peningkatan penjualan KWh pada Unit Muara Tawar, Brantas, Muara Karang, dan Paiton.

Net Capacity Factor (NCF) is the ratio between total net production and net dependable capacity of power plant units multiplied by hours of a certain period. The higher the NCF value, the better the utility level of power plant units. In 2021, the NCF of PJB's Existing was 35.13% and higher than the previous year due to an increase in KWh sales on Muara Tawar, Brantas, Muara Karang, and Paiton units.

Tabel NCF Pembangkit Eksisting (%)
Table of Net Capacity Factor of Existing Power Plant (%)

Unit Pembangkitan Generation Units	2019	2020	**2021**	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Brantas Brantas GU	38,61	44,31	54,02	21,92
UP Cirata Cirata GU	14,01	16,16	14,70	(9,02)
UP Gresik Gresik GU	43,18	36,67	33,54	(8,55)
UP Paiton Paiton GU	83,60	71,27	80,80	13,37
UP Muara Karang Muara Karang GU	57,63	40,13	46,56	16,02
UP Muara Tawar Muara Tawar	25,12	8,16	22,33	173,65
PLTD Suppa DPP Suppa	2,25	0,37	2,18	489,71
UP Bawean Bawean GU	63,46	75,43	75,44	0,02
NCF Pembangkit Eksisting **Net Capacity Factor of Existing Power Plant**	**39,72**	**30,54**	**35,13**	**15,04**

Pemakaian Bahan Bakar
Fuel Consumption

Pemakaian bahan bakar untuk pembangkit di tahun 2021 masih didominasi bahan bakar batubara sebanyak 3.241.528 ton, HSD sebanyak 129.289 kL, gas sebanyak 106.500 BBTU, biomass sebanyak 61.408 ton, dan MFO sebanyak 59.612 kL, dengan *energy mix* sebagai berikut:

In 2021, fuel consumption for power plants was still dominated by coal fuel of 3,241,528 tons, HSD of 129,289 kL, gas of 106,500 BBTU, the biomass of 61,408 tons, and MFO of 59,612 kL, with the following energy mix:

Tabel Pemakaian Bahan Bakar
Table of Fuel Consumption

Jenis Bahan Bakar Fuel Types	Satuan Unit	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
					%	satuan unit
Batubara Coal	ton	3.293.951	2.846.189	3.241.528	13,89	395.339
Gas Alam Natural Gas	BBTU	139.852	95.612	106.500	11,39	10.888
HSD	kL	24.223	14.026	129.289	821,78	115.263
MFO	kL	33.589	8.618	59.612	591,72	50.994
Biomass	ton	-	8.212	61.408	647,78	53.196

Produksi Tenaga Listrik
Electricity Production

Produksi Tenaga Listrik adalah sebesar 20.640,92 GWh meningkat 15,86% dibandingkan dengan tahun 2020
Electricity Production was 20,640.92 GWh, increased by 15.86% compared to 2020

Produksi tenaga listrik unit eksisting PJB pada tahun 2021 adalah sebesar 20.640,92 GWh meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 17.815,81 GWh. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan pembebanan pada operasi Sistem Jamali (Jawa Madura Bali) hampir di semua jenis pembangkit PJB.

In 2021, the Electricity production of PJB's existing units was 20,640.92 GWh or an increase compared to 2020 of 17,815.81 GWh. The increase was influenced by an increase in the loading needs on the Jamali (Jawa Madura Bali) System operations in almost all PJB's power plant types.

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (GWh)
Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Generation Types (GWh)

Jenis Pembangkitan Generation Types	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
PLTA HPP	2.106,28	2.498,03	2.590,34	3,70	92,31
PLTU Batubara CFPP	5.836,13	5.005,90	5.604,96	11,97	599,06
PLTU Biomassa Biomass CFPP	-	9,79	63,98	553,47	54,19
PLTU BBM Fuel CFPP	121,87	34,49	227,62	559,96	193,13
PLTU Gas GFPP	3.494,48	1.387,36	944,39	(31,93)	(442,97)
PLTG HSD HSD GTPP	45,83	22,48	162,99	625,04	140,51
PLTG Gas Gas GTPP	1.089,85	824,89	905,17	9,73	80,28
PLTGU HSD HSD CCPP	32,41	17,06	323,88	1.798,49	306,82
PLTGU Gas Gas CCPP	10.556,00	7.992,52	9.784,56	22,42	1.792,04
PLTMG Gas Gas GEPP	17,76	21,25	20,88	(1,75)	(0,37)
PLTD DPP	12,38	2,05	12,15	492,72	10,10
PLTS SPP	-	-	-	-	-
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting **Total Electricity Production of Existing Power Plant**	**23.312,99**	**17.815,81**	**20.640,92**	**15,86**	**2.825,11**

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Unit Pembangkitan (GWh)
Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Generation Units (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Units	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
UP Brantas Brantas GU	920,05	1.070,28	1.294,96	20,99	224,68
UP Cirata Cirata GU	1.186,23	1.427,75	1.295,38	(9,27)	(132,37)
UP Gresik Gresik GU	7.642,00	6.355,27	5.809,60	(8,59)	(545,67)
UP Paiton Paiton GU	5.837,58	5.015,69	5.670,36	13,05	654,67

Unit Pembangkitan Generation Units	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
UP Muara Karang Muara Karang GU	3.804,44	2.664,97	3.093,48	16,08	428,51
UP Muara Tawar Muara Tawar	3.892,55	1.258,55	3.444,12	173,66	2.185,57
PLTMG Bawean PLTMG Bawean	17,76	21,25	20,88	(1,74)	(0,37)
PLTD Suppa DPP Suppa	12,38	2,05	12,15	492,68	10,10
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting **Total Electricity Production of Existing Power Plant**	**23.312,99**	**17.815,81**	**20.640,92**	**15,86**	**2.825,11**

Tabel Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Bahan Bakar (GWh)
Table of Electricity Production of Existing Power Plant by Fuel Types (GWh)

Jenis Bahan Bakar Fuel Types	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
Hidro Hydro	2.106	2.498	2.590,34	3,70	92,34
Batubara Coal	5.836	5.006	5.604,96	11,96	598,96
Gas Alam Natural Gas	15.158	10.226	11.655	13,97	1.429,00
HSD	82,15	46	494,64	975,30	448,64
MFO	130,34	30	232,01	673,37	202,01
Biomass	-	10	63,98	539,80	53,98
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting **Total Electricity Production of Existing Power Plant**	**23.312,99**	**17.815,81**	**20.640,92**	**15,86**	**2.825,11**

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Grafik Produksi Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting (GWh)
Chart of Electricity Production of Existing Power Plant (GWh)

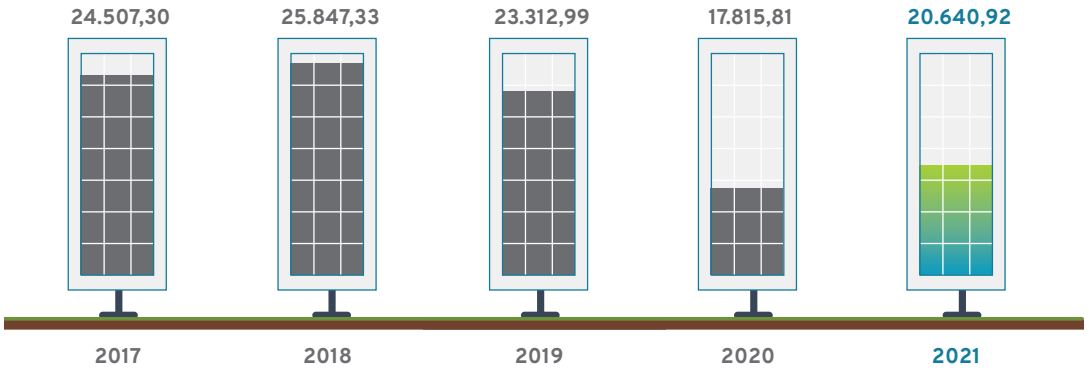

Peningkatan/Penurunan Kapasitas Produksi
Increase/Decrease in Production Capacity

Produksi tenaga listrik unit eksisting PJB pada tahun 2021 adalah sebesar 20.640,92 GWh yaitu lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 17.815,81 GWh. Jumlah produksi tersebut mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 106,36% dari RKAP 2021.

In 2021, the electricity production of PJB's existing units was 20,640.92 GWh or higher than in 2020 of 17,815.81 GWh. The total production reached the set target of 106.36% from the 2021 ABOP.

Tabel Pencapaian Realisasi Produksi Tenaga Listrik
Table of the Achievement of Electricity Production Realization

Produksi Production	Realisasi 2020 (GWh) Realization in 2020 (GWh)	Target RKAP 2021 (GWh) ABOP target in 2021 (GWh)	Realisasi 2021 (GWh) 2021 Realization (GWh)	Persentase (%) Percentage (%)	
				Pertumbuhan 2021 Growth in 2021	Pencapaian RKAP 2021 ABOP Achievement in 2021
Tenaga Listrik Electricity	17.815,81	19.407,50	20.640,92	15,86	106,36

Produksi tenaga listrik di tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020. Pencapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan pembebanan pada operasi Sistem Jamali hampir di semua jenis pembangkit PJB.

In 2021, electricity production was higher than in 2020. The achievement was mainly influenced by an increase in the loading needs on the Jamali System operations in almost all PJB's power plant types.

Pemakaian Sendiri
Self Consumption

Pemakaian Sendiri meningkat dari tahun lalu yaitu menjadi 792,49 GWh atau 3,84% terhadap produksi tenaga listrik.
Self Consumption increased from the previous year into 792.49 GWh or 3.84% to electricity production.

Pemakaian sendiri merupakan tenaga listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional unit pembangkit. Jumlah pemakaian sendiri pada tahun 2021 adalah sebesar 792,49 GWh atau 3,84%. Pemakaian sendiri tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar 698,72 GWh atau 3,92%.

The Self Consumption is electricity used for operational activities at power plant units. In 2021, total self-consumption was 792.49 GWh or 3.84%. The self-consumption was higher than in 2020 at 698.72 GWh or 3.92%.

Tabel Pemakaian Sendiri Berdasarkan Unit Pembangkitan (GWh)
Table of Self Consumption by Generation Units (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Units	2019		2020		2021		Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Brantas Brantas GU	11,66	0,05	23,98	0,13	16,36	0,08	(7,62)	(31,78)
UP Cirata Cirata GU	22,76	0,10	30,70	0,17	28,03	0,14	(2,67)	(8,71)
UP Gresik Gresik GU	186,65	1,79	136,06	0,76	127,89	0,62	(8,17)	(6,00)
UP Paiton Paiton GU	418,12	0,80	382,96	2,15	432,63	2,10	49,67	12,97
UP Muara Karang Muara Karang GU	179,77	0,77	104,52	0,59	124,18	0,60	19,66	18,81
UP Muara Tawar Muara Tawar	88,55	0,38	19,14	0,11	62,08	0,30	42,94	224,37
PLTMG Bawean PLTMG Bawean	1,09	0,00	1,37	0,01	1,05	0,01	(0,32)	(23,26)
PLTD Suppa DPP Suppa	0,29	0,00	0,05	0,00	0,26	0,00	0,21	424,27
Jumlah Pemakaian Sendiri **Total Self Consumption**	**908,88**	**3,90**	**698,72**	**3,92**	**792,49**	**3,84**	**93,77**	**13,42**

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales

Pejualan tenaga listrik unit eksisting PJB pada tahun 2021 adalah sebesar 19.848,44 GWh meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 17.117,04 GWh. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pembebanan (*dispatch*) pada PLTGU dan PLTU Batubara.

In 2021, electricity sales of PJB's existing units were 19,848.44 GWh, or an increase compared to 2020 of 17,117.04 GWh. The increase was mainly due to an increase in the loading (dispatch) on CCPP and CFPP.

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting Berdasarkan Jenis Pembangkitan (GWh)
Table of Electricity Sales of Existing Power Plant by Generation Types (GWh)

Jenis Pembangkitan Generation Types	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
PLTA HPP	2.071,86	2.443,35	2.545,95	4,20	102,60
PLTU Batubara CFPP	5.419,46	4.623,68	5.178,62	12,00	554,94
PLTU Biomassa Biomass CFPP	-	9,04	59,11	553,86	50,07
PLTU BBM Fuel CFPP	113,63	32,38	213,11	558,15	180,73
PLTU Gas GFPP	3.280,38	1.302,76	884,18	(32,13)	(418,58)
PLTG HSD HSD GTPP	45,12	22,19	160,74	624,36	138,55
PLTG Gas Gas GTPP	1.072,87	814,27	892,65	9,63	78,38
PLTGU HSD HSD CCPP	31,75	16,71	316,64	1.794,90	299,93
PLTGU Gas Gas CCPP	10.340,27	7.830,77	9.565,72	22,16	1734,95
PLTMG Gas Gas GEPP	16,68	19,88	19,83	(0,27)	(0.05)
PLTD DPP	12,10	2,00	11,89	494,43	9,89
PLTS SPP	-	-	-	-	-
Jumlah Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting **Total Electricity Sales of Existing Power Plant**	**22.404,11**	**17.117,04**	**19.848,44**	**15,96**	**2.731,40**

Grafik Penjualan Tenaga Listrik Pembangkit Eksisting (GWh)
Chart of Electricity Sales of Existing Power Plant (GWh)

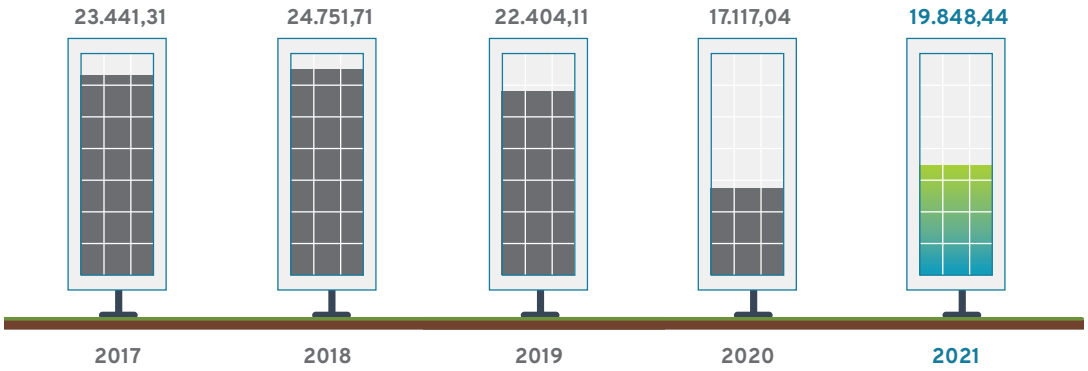

Segmen Usaha Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)
Operation And Maintenance (O&M) Service Segment

PJB menyediakan Jasa *Operation and Maintenance* (O&M) sebagai bentuk pengembangan Perusahaan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Bidang usaha jasa O&M dilakukan oleh PJB secara langsung (wilayah Jawa dan luar Jawa) maupun melalui anak perusahaan (PT PJB Services) dan perusahaan patungan (PT Komipo PJB). Total pembangkit yang dikelola PJB melalui jasa O&M adalah sebesar 6.146,6 MW.

PJB provides Operation and Maintenance (O&M) services as the form of developing the Company and utilizing its potential maximally. The O&M service business field is performed by PJB directly (Java and outside Java areas) or through its subsidiary (PT PJB Services) and joint ventures (PT Komipo PJB). The total power plant managed by PJB through O&M services is 6,146.6 MW.

Jasa O&M Wilayah Jawa
O&M Services in Java

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) yang dikelola oleh PJB di wilayah Jawa sebesar 5.078,3 MW tersebar di 10 (sepuluh) unit pembangkit, namun yang dikelola kinerjanya oleh PJB adalah 8 (delapan) unit pembangkit.

O&M Services Business Unit (OMSBU) managed by PJB in Java is 5,078.3 MW spread over 10 (ten) power plant units; however, the power plants whose performance is managed by PJB are 8 (eight) power plant units.

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

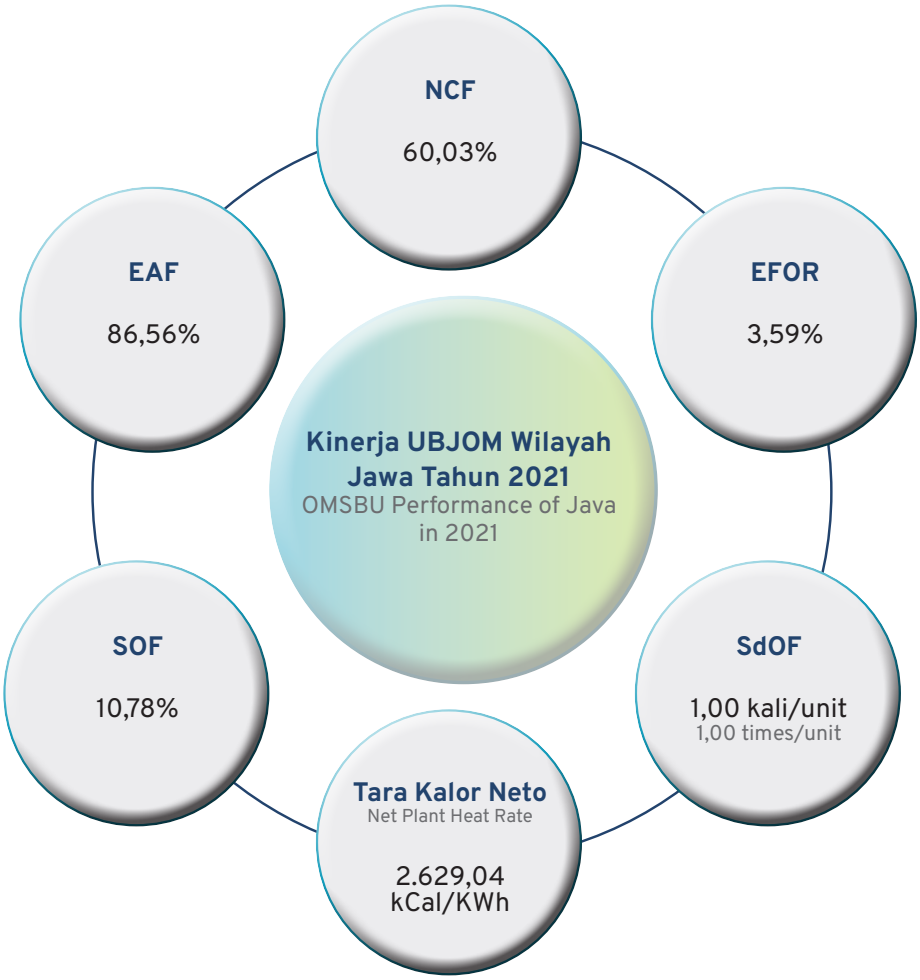

Tabel EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)
Table of EAF of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	89,22	93,82	86,08	(8,25)
PLTU Rembang Rembang CFPP	87,43	89,36	67,58	(24,37)
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	99,73	91,32	85,32	(6,57)
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	84,78	90,52	86,09	(4,89)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	**2021**	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	92,58	87,07	88,89	2,09
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Block 5 CCPP	98,31	94,66	87,59	(7,47)
PLTGU Muara Karang Blok 2 Muara Karang Block 2 CCPP	90,03	95,61	93,02	(2,71)
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Muara Karang Block 3 Peaker CCPP	-	-	98,56	-
EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **EAF of OMSBU Power Plant in Java**	**91,06**	**91,69**	**86,56**	**(5,60)**

Tabel SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)
Table of SOF of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	**2021**	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	9,36	3,67	9,99	172,21
PLTU Rembang Rembang CFPP	8,94	6,83	29,57	332,94
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	0,00	2,25	10,51	367,11
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	12,41	3,25	5,57	71,38
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	4,18	10,09	8,71	(13,68)
PLTGU Muara Karang Blok 2 Block 2 Muara Karang CCPP	8,18	3,27	6,19	89,30
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Block 5 Muara Tawar CCPP	1,53	4,97	12,01	141,65
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Block 3 Peaker Muara Karang CCPP	-	-	0,10	-
SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **SOF of OMSBU Power Plant in Java**	**6,92**	**4,83**	**10,78**	**123,11**

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Tabel EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)
Table of EFOR of OMSBU Power Plant in Java (%)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	**2021**	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	1,50	2,00	4,28	114,00
PLTU Rembang Rembang CFPP	3,96	4,02	4,02	0,00
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	0,67	6,16	4,51	(26,79)
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2,99	4,21	8,19	94,54
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	3,01	2,71	2,64	(2,58)
PLTGU Muara Karang Blok 2 Block 2 Muara Karang CCPP	0,66	1,01	0,02	(98,02)
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Block 5 Muara Tawar CCPP	0,20	0,42	1,21	188,10
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Block 3 Peaker Muara Karang CCPP	-	-	1,59	-
EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **EFOR of OMSBU Power Plant in Java**	**1,94**	**3,06**	**3,59**	**17,30**

Tabel SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (kali/unit)
Table of SdOF of OMSBU Power Plant Outside Java (times/unit)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	**2021**	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	kali/unit times/unit
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	1,67	3,00	0,67	(77,67)	(2,33)
PLTU Rembang Rembang CFPP	3,50	4,50	1,00	(77,78)	(3,50)
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	1,00	5,00	3,00	(40,00)	(2,00)
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	1,00	1,00	2,50	150,00	1,50
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	0,00	1,00	0,00	(100,00)	(1,00)
PLTGU Muara Karang Blok 2 Block 2 Muara Karang CCPP	0,80	0,20	0,20	0,00	0
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Block 5 Muara Tawar CCPP	4,50	3,50	2,00	(42,86)	(1,50)
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Block 3 Peaker Muara Karang CCPP	-	-	1,00	-	1,00
SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **SdOF of OMSBU Power Plant in Java**	**1,94**	**2,60**	**1,00**	**(61,54)**	**(1,60)**

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (kCal/KWh)
Table of Net Plant Heat Rate of OMSBU Power Plant Outside Java (kCal/KWh)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/KWh
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	2.629,50	2.700,63	2.797,04	3,57	96,41
PLTU Rembang Rembang CFPP	2.654,60	2.794,24	2.806,67	0,44	12,43
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	2.678,38	2.684,34	2.694,80	0,39	10,46
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	2.691,97	2.827,75	2.819,58	(0,29)	(8,17)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	2.678,00	2.794,94	2.825,96	1,11	31,02
PLTGU Muara Karang Blok 2 Block 2 Muara Karang CCPP	1.948,11	1.963,74	1.986,84	1,18	23,10
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Block 5 Muara Tawar CCPP	1.858,87	1.915,65	2.035,42	6,25	119,77
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Block 3 Peaker Muara Karang CCPP	-	-	1.909,98	-	1.909,98
Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **Net Plant Heat Rate of OMSBU Power Plant in Java**	**2.530,20**	**2.581,32**	**2.629,04**	**1,85**	**47,72**

Tabel NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa (%)
Table of NCF of OMSBU Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	85,33	82,10	71,34	(13.11)
PLTU Rembang Rembang CFPP	85,68	80,61	63,63	(21.06)
PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	76,87	77,50	73,76	(4.83)
PLTU Pacitan Pacitan CFPP	75,68	67,11	59,99	(10.61)
PLTU Tanjung Awar Awar Tanjung Awar-Awar CFPP	85,31	73,09	75,42	3.19
PLTGU Muara Karang Blok 2 Block 2 Muara Karang CCPP	61,90	44,82	36,73	(18.05)
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Block 5 Muara Tawar CCPP	75,45	80,13	21,91	(72.66)
PLTGU Muara Karang Blok 3 *Peaker* Block 3 Peaker Muara Karang CCPP	-	-	46,45	-
NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Jawa **NCF of OMSBU Power Plant in Java**	**78,46**	**71,57**	**60,03**	**(16,12)**

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Jasa O&M Wilayah Luar Jawa
O&M Services Outside Java

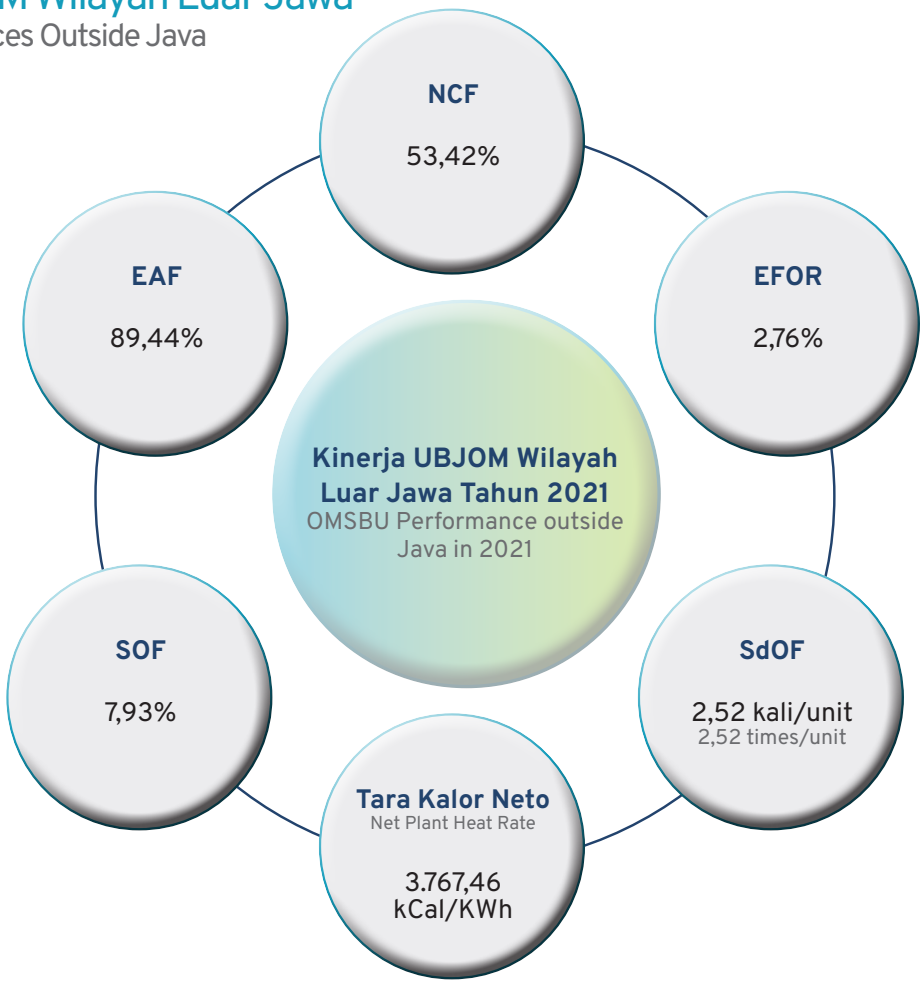

Tabel EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)
Table of EAF of OMSBU Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTU Tenayan-Riau Tenayan-Riau CFPP	78,33	77,55	81,02	4.47
PLTU Teluk-Balikpapan Teluk-Balikpapan CFPP	71,31	88,80	88,80	0.00
PLTMG Arun Arun GEPP	93,91	95,79	98,05	2.36
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	83,82	73,09	91,56	25.27
EAF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **EAF of OMSBU Power Plant outside Java**	**81,53**	**85,11**	**89,44**	**5.08**

Tabel SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)
Table of SOF of OMSBU Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	**2021**	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTMG Arun Arun GEPP	5,77	4,07	1,74	(57,25)
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	18,96	13,64	13,31	(2,42)
PLTMG Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	13,76	6,24	9,74	56,09
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	9,83	10,23	5,10	(50,15)
SOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **SOF of OMSBU Power Plant outside Java**	**10,39**	**8,37**	**7,93**	**(5,29)**

Tabel EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)
Table of EFOR of OMSBU Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	**2021**	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTMG Arun Arun GEPP	0,40	0,21	0,43	104,76
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	10,64	7,80	5,94	(23,85)
PLTMG Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	15,43	4,40	1,99	(54,77)
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	6,59	4,31	2,22	(48,49)
EFOR Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **EFOR of OMSBU Power Plant outside Java**	**8,68**	**4,22**	**2,76**	**(34,53)**

Tabel SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (kali/unit)
Table of SdOF of OMSBU Power Plant Outside Java (times/unit)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	**2021**	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	kali/unit times/unit
PLTMG Arun Arun GEPP	26,58	3,79	2,74	(27,70)	(1,05)
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	4,00	1,50	3,00	100,00	1,50
PLTMG Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	3,00	4,00	1,00	(75,00)	(3,00)
SdOF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **SdOF of OMSBU Power Plant outside Java**	**4,08**	**2,70**	**2,52**	**(6.67)**	**(5.22)**

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Tabel Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (kCal/KWh)
Table of Net Plant Heat Rate of OMSBU Power Plant Outside Java (kCal/KWh)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	kCal/KWh
PLTMG Arun Arun GEPP	2.222,70	2.232,53	2.253,34	0,93	20,81
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	4.159,03	4.107,45	4.638,00	12,92	530,55
PLTMG Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	3.430,08	3.809,76	3.575,83	(6,14)	(233,93)
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	3.865,17	3.787,33	3.948,73	4,26	161,40
Tara Kalor Neto Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **Net Plant Heat Rate of OMSBU Power Plant outside Java**	**3.367,28**	**3.461,41**	**3.767,46**	**8.84**	**306.05**

Tabel NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa (%)
Table of NCF of OMSBU Power Plant Outside Java (%)

Pembangkit Power Plant	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
PLTMG Arun Arun GEPP	77,34	66,43	36,05	(45,73)
PLTU Tenayan Tenayan CFPP	73,05	72,87	63,57	(12,76)
PLTMG Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	68,65	45,83	56,01	22,21
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	84,20	65,93	59,89	(9,17)
NCF Pembangkit UBJOM Wilayah Luar Jawa **NCF of OMSBU Power Plant outside Java**	**73,93**	**62,23**	**53,42**	**(14,16)**

Jasa O&M melalui Anak Perusahaan
O&M Services through Subsidiaries

Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM) melalui Anak Perusahaan (PT PJB Services) sebesar 793,4 MW yang tersebar di 15 lokasi.

O&M Services Business Unit (OMSBU) through Subsidiary (PT PJB Services) is 793.4 MW spread over 15 locations.

Kinerja Pembangkit UBJOM yang dikelola Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan
OMSBU Power Plant Performance Managed by Subsidiaries and Joint Ventures

Uraian Description	EAF (%)		SOF (%)		EFOR (%)		SdOF (kali/unit) SdOF (times/unit)		Tara Kalor Neto (kCal/KWh) Net Plant Heat Rate (kCal/KWh)		NCF (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Jasa O&M Luar Jawa **O&M Services Outside Java**												
PLTU Amurang Amurang CFPP	80,63	84,10	16,81	13,94	2,88	2,59	1,50	1,50	4.020,89	4.119,82	72.89	57,32
PLTU Bangka Bangka CFPP	67,62	72,77	5,83	10,49	25,59	18,02	0,00	2,50	4.625,4	4.893,69	61,4	65,48
PLTU Belitung Belitung CFPP	90,51	87,78	7,74	8,08	1,79	2,01	4,00	2,50	4.309,89	4.444,91	75,38	76,82
PLTU Bolok Bolok CFPP	79,55	84,98	16,20	13,02	4,07	1,79	2,50	2,50	4.164,64	4.144,00	75.77	78,27
PLTU Kendari Unit 1 & 2 Unit 1 & 2 Kendari CFPP	73,68	76,75	24,08	15,81	2,10	3,55	3,50	3,50	5.450,01	5.654,52	53.40	53,91
PLTU Ketapang Ketapang CFPP	77,58	69,05	14,07	12,96	6,43	4,59	2,50	4,00	6.112,37	6.481,23	71,95	66,37
PLTU Ropa Ropa CFPP	88,52	80,00	8,86	14,45	2,30	5,32	5,00	3,50	6.076,39	5.288,20	48,60	60,37
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	85,20	82,70	9,53	13,21	5,76	4,65	8,00	7,50	5.849,7	5.989,84	77,54	66,42
PLTU Tidore Tidore CFPP	84,33	86,40	9,68	10,00	6,71	3,99	2,50	1,00	5.095,35	5.533,59	71,88	62,95
PLTU Anggrek Aggrek CFPP	92,89	87,87	5,41	8,84	1,74	2,36	7,00	4,00	4.467,83	5.066,01	77,80	65,68
Jasa O&M IPP **O&M Services of IPP**												
PLTA Asahan Asahan HPP	96,27	98,60	2,85	0,96	0,92	0,45	0,0	0,0	-	-	82,56	88,19
PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	59,02	74,44	17,78	15,01	28,87	12,42	1	1,5	3.335,61	3.353,68	55,40	71,65
Pembangkit Sewa **Lease Power Plant**												
PLTG Duri Duri GTPP	98,86	99,92	0,18	0,06	10,52	0,11	0,0	0,0	4.586,35	4.524,68	7,89	14,42
Pembangkit Eksisting **Existing Power Plant**												
PLTD Suppa Suppa DPP	86,03	83,27	0,00	0,00	96,95	86,90	1,00	2,50	2.324,48	2.210,55	0,37	2,24
PLTMG Bawean Bawean GEPP	97,93	92,69	2,07	7,30	0,00	0,02	0,00	1,00	2.723,16	2.672,67	75,43	75,44

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Segmen Usaha Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC)
Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Services Segment

PJB menyediakan Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) melalui salah satu Anak Perusahaannya yaitu PT Rekadaya Elektrika (RE). Jasa EPC yang dilakukan oleh PJB tersebut terdiri atas pembangunan pembangkit-pembangkit baru, khususnya di luar Pulau Jawa yang didukung tenaga profesional dan kemampuan dalam penguasaan teknologi pembangkitan, serta pembangunan jaringan Transmisi dan Distribusi (T&D) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 3 proyek EPC yang dikelola oleh PT Rekadaya Elektrika (RE) dengan total kapasitas 54 MW.

PJB provides Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services through one of its Subsidiaries, namely PT Rekadaya Elektrika (RE). The EPC services run by PJB consist of developing new power plants, especially outside Java Island, which are supported by professionals and experts in power plant technology, as well as establishing the Transmission and Distribution (T&D) network spread throughout Indonesia. There are 3 EPC projects managed by PT Rekadaya Elektrika (RE) with a total capacity of 54 MW.

Tabel Proyek EPC yang dikelola PJB melalui Anak Perusahaan
Table of EPC Project Managed by PJB through Subsidiary

Pembangkit Power Plant	Kapasitas Terpasang Installed Capacity	Lokasi Location	Progres Pekerjaan (%) Working Progress(%)
PLTU Timika Timika CFPP	4 x 7 MW	Papua	45,35
PLTU Bima Bima CFPP	2 x 10 MW	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	30,03
PLTU Sofifi Sofifi CFPP	2 x 3 MW	Maluku Utara North Maluku	27,04

Segmen Usaha Jasa Lainnya
Other Business Segments

Segmen Usaha Lainnya merupakan proyek yang berada dibawah Divisi Business Solution dengan fungsi utama untuk memastikan pengembangan strategi bisnis, melakukan evaluasi eksekusi strategi bisnis, bertindak sebagai pelaku aktivitas pemasaran, serta mengelola bisnis penunjang Jasa O&M, dan pemanfaatan aset untuk mendukung pengembangan bisnis Perusahaan. adapun beberapa proyek strategis yang menjadi segmen jasa usaha lainnya di tahun 2021 terdiri dari Pemanfaatan Aset, Pemanfaatan Lahan/ Bangunan, Pemanfaatan Laboratorium, Marketing Strategis, serta Penunjang Jasa O&M.

Other Business Segments is the project under the Business Solution Division with its main function to ensure the business strategy development, evaluate the business strategy execution, act as the marketing activities people, as well as manage the supporting business of O&M Services, and assets utilization for supporting the Company's business development. In 2021, several strategic projects that became the other business segments consisted of Assets Utilization, Land/Buildings Utilization, Laboratory Utilization, Marketing Strategies, as well as Supporting O&M Services.

Pemanfaatan Aset
Assets Utilization

Wisata Tulungagung
Tulungagung Tourism

Kontrak kerjasama ditandatangani antara PJB dengan PT CIKAL pada tanggal 19 Maret 2021 untuk pengelolaan wisata dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun. Wisata PLTA Tulungagung telah meiliki izin operasional dan telah memenuhi uji protocol Covid-19 dari Sekretaris Daerah kabupaten Tulungagung untuk beroperasi tanggal 4 Juni 2021, dengan adanya PPKM menyebabkan aktivitas wisata masih terhenti.

The cooperation contract was signed between PJB and PT CIKAL on March 19, 2021, for the tourism management with a term of agreement of 5 years. Tulungagung HPP tourism had had the operational license and had complied with the Covid-19 protocol test from the Regional Secretary of Tulungagung Regency to operate dated June 4, 2021; the PPKM, caused tourism activities to remain stopped.

Pemanfaatan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA)
Fly Ash Bottom Ash (FABA) Utilization

PJB telah melakukan kerjasama jual-beli *Bottom Ash* (BA) ke PT Semen Imasco Asiatic (PT IMASCO) untuk *supply* BA sebesar 2.000 Ton per bulan. Kontrak ini berdurasi 1 tahun dan akan menyerap BA UP Paiton 1&2 sebanyak 24.000 Ton.

PJB has conducted the Bottom Ash (BA) purchase in cooperation with PT Semen Imasco Asiatic (PT IMASCO) for BA supplies of 2,000 Tons per month. This contract has a duration of 1 year and will absorb BA of Paiton 1&2 GU of 24,000 Tons.

Pemanfaatan Lahan dan Bangunan
Land and Buildings Utilization

Pemakaian Lahan di BPWC untuk Pembangunan PLS Terapung 145 MWAC
Land Use in BWPC for the Establishment of 145 MWAC Floating SPP

Tedapat 5 Lokasi yang akan digunakan oleh PMSE dalam pembangunan PLTS Apung Cirata 145 MWAC dengan rincian sebagai berikut:

a. Lahan pada waduk yang digunakan sebagai lokasi *floating* PV atas pemakaian akses dan utilisasi kerjasama atas pemakaian akses dan utilisasi waduk (RAUA).
b. Sewa lahan untuk kebutuhan fasilitas *Laydown* PLTS (LALA) seluas 26.413 m^2.
c. Sewa lahan *tower* tansmisi #10,11 (TLLA) dengan luas total 800m^2.
d. Sewa lahan *launching* modul PV ke *Reservoir* seluas 20.187m^2.
e. Perjanjian kompensasi Hak Melintas (ROW) untuk *Tower* Transmisi #10 #11.

5 locations will be used by PMSE in establishing 145 MWAC Cirata Floating SPP with the following details:

a. Land on the reservoir is used as the PV floating locations of access use and cooperation utilization for access use and reservoir utilization (RAUA).
b. Land lease for the needs of SPP Laydown facility (LALA) of 26,413 m^2.
c. Land lease for #10.11 transmissions tower (TLLA) with a total area of 800 m^2.
d. Land lease for launching the PV modules to Reservoir with an area of 20,187 m^2.
e. Right-of-Way (ROW) compensation agreement for #10 #11 Transmissions Tower.

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Sewa Menyewa Gedung Ex-BPWC dan Wisma Penginapan oleh BUT Sinohydro Corporation Limited

Lease of Ex-BPWC Building and Guest House by Sinohydro Corporation Limited BUT

Penandatanganan kontrak Sewa Gedung Perkantoran dan Fasilitas Penginapan di Bekas Gedung Kantor Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) antara PJB dengan BUT SInohydro Corporation Limited pada tanggal 5 Agustus 2021.

The signing of the Leases contract for the Office Building and Guest House Facility in Ex-Cirata Reservoir Management Unit Office (BPWC) between PJB and Sinohydro Corporation Limited BUT on August 5, 2021.

Pemanfaatan Laboratorium UPHB

MSUWA Laboratory Utilization

UPHB telah membangun sebuah ide bisnis *non core* baru yaitu jasa kalibrasi yang bergerak dan fokus di 2 jasa kalibrasi & repair dan telah memiliki sertifikasi KAN. Saat ini Laboratorium UPHB difokuskan untuk mendukung proses bisnis internal PT PJB. Rencana jangka panjang akan melakukan ekspansi ke pasar Eksternal seperti PLN, Indonesia Power dan menambah ruang lingkup U–LAB yaitu *Temperature* dan *Pressure*.

Pada akhir tahun 2021, Strukturisasi pada ULAB sudah diselesaikan dengan terbentuknya UMRO (Unit MRO) yang membawahi UPHB dan UPHT termasuk ULAB. Dengan perubahan ini, harapannya ULAB udah bisa melakukan proses bisnis *end to end,* mulai dari administrasi awal sampai ke penagihan secara mandiri.

MSUWA has developed a new idea of non-core business, namely calibration services engaging and focusing on 2 calibration & repair services, and has had KAN certification. Currently, MSUWA Laboratory is focused on supporting PJB's internal business process. The long-term plan will conduct expansion to the External such as PLN, Indonesia Power, and increase the scope of U-LAB, namely Temperature and Pressure.

At the end of 2021, the Structuring of U-LAB had been completed with the establishment of UMRO (MRO Unit) which supervised MSUWA and MSUEA, including U-LAB. With this change, U-LAB is expected to be able to conduct the end-to-end business process, starting from initial administration up to self-billing.

Marketing Strategis

Strategic Marketing

1. Pembangunan beberapa proyek EBT antara lain PLTS Bawean, PLTS Regional Sumatera, PLTS Regional Sulawesi, PLTS NTB, dan PLTS Bali (SPKLU).
2. Pekerjaan Perbaikan PLTS Tanakeke (200 kWp) dan PLTS Kodingareng (400 kWp).
3. Pekerjaan Jasa RLA *Boiler* Unit 1 PT S2P.
4. Pekerjaan *Upgrade Inverter* dan Perbaikan PLTS Kodingareng & Tanakeke.

1. The construction of several NRE projects, among others, Bawean SPP, Sumatera Region SPP, Sulawesi Region SPP, NTB SPP, and Bali SPP (SPKLU).
2. Maintenance Work of Tanakeke SPP (200 kWp) and Kodingareng SPP (400 kWp).
3. Boiler RLA Services of Unit 1 PT S2P.
4. Upgrade Inverter Work and Improvement of Kodingareng & Tanakeke SPP.

Penunjang Jasa O & M
Supporting O&M Services

Pada tahun 2021, PJB melakukan pekerjaan implementasi EAM sebanyak 5 (lima) unit antara lain EAM Tanjung Batu, EAM Gorontalo Minahasa, EAM UID Jatim, EAM Asam-Asam dan EAM UPK Singkawang (Tahap I). Selain *set up* EAM, PJB juga melakukan pekerjaan penunjang jasa O&M lainnya yaitu Jasa Pengukuran PA *Flow* PLTU Keban Agung, Jasa *Boroscope* & Vibrasi GT #1PLTGU Tanjung Uncang, Jasa SERP UPK Tambora, Jasa Inspeksi Peralatan Listrik CI CT3 PT MCTN, Jasa *Overhaul* HGPI PLTG, dan Jasa *Setup* EAM UPK Flores & UPK Timor (Tahap I).

In 2021, PJB performed EAM implementation work of 5 (five) units, among others, Tanjung Batu EAM, Gorontalo Minahasa EAM, Jatim UID EAM, Asam-Asam EAM, and Singkawang UPK EAM (Stage 1). Besides the EAM setup, PJB also conducted other supporting works of O&M services, namely Measurement Services of PA Flow of Keban Agung CFPP, Boroscope & Vibration Services of GT #1 Tanjung Uncang CCPP, SERP Services of Tambora UPK, Inspection Services of CI CT3 Electricity Equipment of PT MCTN, HGPI Overhaul Services of GTPP, and Setup Services of Flores UPK & Timor UPK EAM (Stage 1).

Usaha Jasa MRO (*Maintenance, Repair, and Overhaul*)
MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) Service Business

PJB senantiasa konsisten untuk melakukan upaya-upaya terkait pengembangan bisnis di luar negeri, hal ini dibuktikan dengan pada tanggal 2 Agustus 2021, PJB telah berhasil mendapatkan penunjukan dari BPBD (Bangladesh) untuk proyek MRO di Chandpur. Dan tanggal 28 Oktober 2021, PJB telah berhasil melakukan penandatanganan MoU dengan TNB Remaco (Malaysia).

PJB is always consistent to conduct efforts related to business development abroad; this was proven by PJB had managed to obtain an appointment from BPBD (Bangladesh) for the MRO project in Chandpur on August 2, 2021. On October 28, 2021, PJB managed to conduct the signing of an MoU with TNB Remaco (Malaysia).

Usaha Jasa Penyedia Material Cadang Pembangkit (*Stockist*)
Sparepart Procurement (Stockist) Service

Bidang usaha jasa stockist saat ini dikelola langsung oleh Anak Perusahaan PJB yaitu PT PLN SC dimaksudkan untuk melayani kebutuhan suku cadang pembangkitan, penyediaan services, dan dukungan retrofit kepada Pelanggan PLTU dan Pelanggan Non-PLTU di seluruh Indonesia yang berasal dari PT PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Indonesia Power, dan Independent Power Producer juga dukungan kepada Energi Baru Terbarukan. Berikut adalah rincian 36 (tiga puluh enam) lokasi usaha jasa stockist dengan total kapsitas 11.500 MW.

Currently, the stockist services business field is directly managed by a Subsidiary of PJB, namely PT PLN SC; it is intended to serve the needs of power plant spare parts, services procurement, and retrofit supports to the customers of CFPP and Non-CFPP throughout Indonesia which come from PT PLN, PT Pembangkitan Java-Bali, PT Indonesia Power, and Independent Power Producer, also supports to the New and Renewable Energy. The following are the details of 36 (thirty-six) stockist services business locations with a total capacity of 11,500 MW.

ANALISIS OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL ANALYSIS PER BUSINESS SEGMENT

Lingkup area operasional Usaha Jasa Penyedia Material Cadang Pembangkit adalah sebagai berikut:

Business Scope of Power Plant Spare Part Service for Operational Area is as follows:

Lingkup Area Operasional Usaha Jasa Penyedia Material Cadang Pembangkit
Sparepart Procurement Service's Scope of Operation

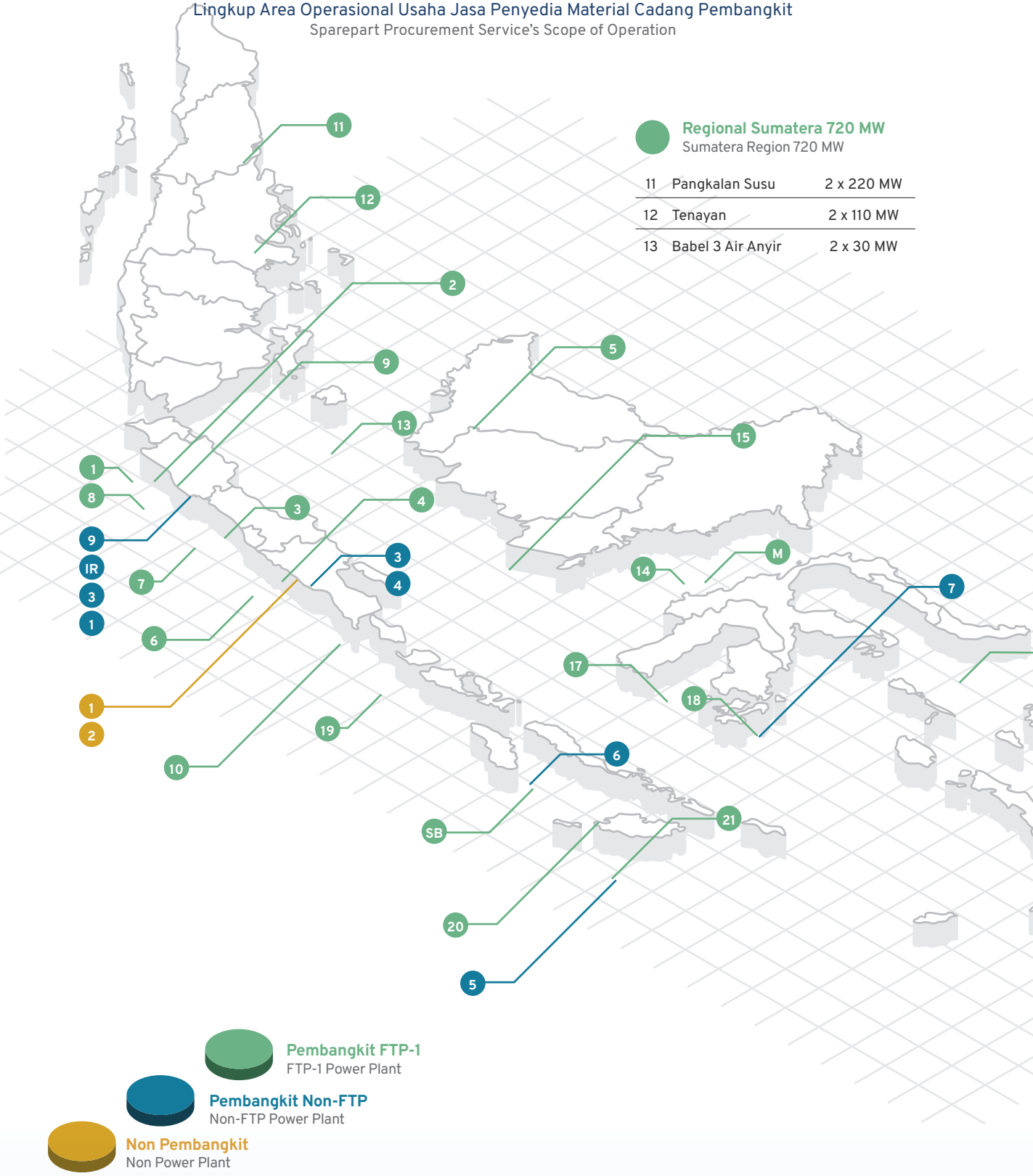

Regional Jawa 7.420 MW
Java Region 7.420 MW

1	Labuan	2 x 315 MW
2	Suralaya 8	1 x 625 MW
3	Indramayu	3 x 330 MW
4	Rembang	2 x 315 MW
5	Tj. Awar-Awar	2 x 300 MW
6	Pacitan	2 x 315 MW
7	Adipala	1 x 660 MW
8	Pelabuhan Ratu	3 x 350 MW
9	Lontar	3 x 315 MW
10	Paiton Baru	1 x 660 MW

Regional Kalimantan 419 MW
Kalimantan Region 419 MW

14	T. Balikpapan	2 x 110 MW
15	Pulang Pisau	2 x 65 MW
M	Muara Jawa	2 x 27.5 MW
S	Sanggau	2 x 7 MW

Regional Nusa Tenggara 111 MW
Nusa Tenggara Region 111 MW

19	Jeranjang	2 x 25 MW
20	Ropa	2 x 7 MW
21	Bolok	2 x 16.5 MW
SB	Sumbawa Barat	2 x 7 MW

Regional Sulawesi 170 MW
Sulawesi Region 170 MW

16	Amurang	2 x 25 MW
17	Barru	2 x 50 MW
18	Kendari	2 x 10 MW

Regional Papua 20 MW
Papua Region 20 MW

H	Holtekamp	2 x 10 MW

Regional Jawa
Java Region

1	KP Indonesia Power
2	KP PJB
3	Pusertif
4	UJLJ
C	Cogindo
IR	Indo Ridhlotama

Regional Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Region

5	UPK Timor
6	UPK Tambora

Regional Sulawesi
Sulawesi Region

7	UPK Kendari

Regional Jawa 2.640
Java Region 2.640

1	TJBPS	2 X 660 MW
2	KPJB	2 X 660 MW

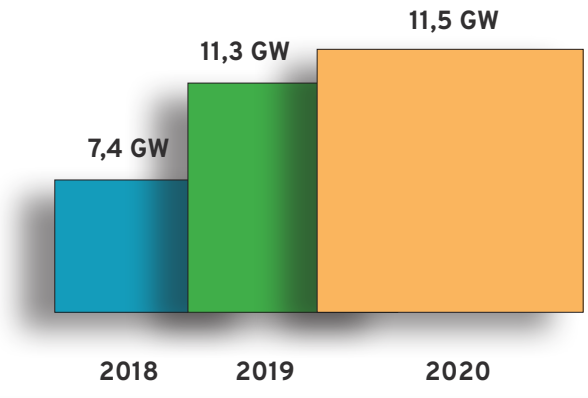

PROFITABILITAS PER SEGMEN
PROFITABILITY PER SEGMENT

Komponen Pendapatan Usaha
Component of Revenues

Segmen dengan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan usaha berasal dari Penjualan Tenaga Listrik sebesar 83,17% atau Rp24.541.378
Segment with the highest contribution to revenues comes from the Sales of Electricity of 83.17% or Rp24,541,378

Komponen pendapatan PJB sesuai dengan segmen usaha PJB yaitu penjualan tenaga listrik, jasa operasi dan pemeliharaan, konstruksi, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2021, kontribusi dari masing-masing segmen terhadap pendapatan usaha yaitu penjualan tenaga listrik sebesar 83,17%, jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 13,75%, konstruksi sebesar 2,46%, dan pendapatan lainnya sebesar 0,62%.

The component of PJB's revenues is based on PJB business segment, namely the sales of electricity, operation and maintenance services, construction, and other revenues. In 2021, the contribution of respective segment to revenues, namely sales of electricity was 83.17%, operation and maintenance services was 13.75%, construction was 2.46%, and other revenues were 0.62%.

Tabel Komponen dan Komposisi Pendapatan Usaha
Table of Revenues Component and Composition

Jenis Pendapatan Type of Revenues	2019		2020		2021	
	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Pendapatan Usaha: Revenues:						
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	33.681.317	84,72	25.476.470	83,71	24.541.378	83,17
Pendapatan Usaha Lainnya: Other Operating Revenues:						
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	4.422.238	11,12	4.093.834	13,45	4.057.567	13,75
Konstruksi Construction	1.396.106	3,51	702.929	2,31	727.224	2,46
Lainnya Others	258.289	0,65	160.943	0,53	181.965	0,62
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**39.757.951**	**100,00**	**30.434.176**	**100,00**	**29.508.134**	**100,00**

Pendapatan Usaha Per Segmen
Revenues per Segment

Pendapatan usaha PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp29,50 triliun menurun 3,04% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp30,43 triliun. Penurunan pendapatan usaha PJB disebabkan oleh penyesuaian *Margin* Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tahun 2021 menjadi sebesar Rp1,6 triliun dari *Margin* tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun serta belum terealisasinya beberapa kontrak AMC (Belawan, Sambelia, Pulang Pisau dan Kaltim Teluk).

In 2021, PJB's revenues were Rp29.50 trillion, decreased by 3.04% compared to 2020 of Rp30.43 trillion. The decrease in PJB's revenues was due to an adjustment to Sales of Electricity Margin in 2021 to Rp1.6 trillion from Margin in 2020 of Rp5.1 trillion, as well as several AMC (Belawan, Sambelia, Pulang Pisau, and Kaltim Teluk) contracts had not been realized.

Tabel Pendapatan Usaha Per Segmen (Rp juta)
Table of Revenues per Segment (Rp million)

Segmen Bisnis Business Segment	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Rp juta Rp million
Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik **Power Plant Business**	**33.681.317**	**25.476.470**	**24.541.378**	**(3,67)**	**(935.092)**
PLTGU CCPP	20.690.448	15.876.632	16.165.226	1,82	288.594
PLTU CFPP	9.815.582	6.534.397	6.072.357	(7,07)	(462.040)
PLTA HPP	3.120.684	3.016.618	2.264.250	(24,94)	(752.368)
PLTG GTPP	54.605	48.824	39.544	(19,01)	(9.280).
Usaha Jasa O&M dan EPC **O&M and EPC Services Business**	**7.183.044**	**5.908.368**	**6.179.739**	**4,59**	**271.371**
Usaha Jasa EAM, IMAP, *Stockiest* **EAM, IMAP, Stockiest Services Business**	**660.857**	**548.062**	**533.480**	**(2,66)**	**(14.582)**
Usaha Jasa Lainnya **Other Service Businesses**	**20.838**	**2.241**	**4.776**	**113,10**	**2.535**
Jumlah Pendapatan Usaha sebelum Eliminasi **Total Revenues before Elimination**	**41.546.056**	**31.935.142**	**31.259.372**	**(2,12)**	**(675.770)**
Eliminasi Elimination	(1.788.105)	(1.500.966)	1.751.238	16,67	(250.272)
Jumlah Pendapatan Usaha **Total Revenues**	**39.757.951**	**30.434.176**	**29.508.134**	**(3,04)**	**(926.042)**

PROFITABILITAS PER SEGMEN
PROFITABILITY PER SEGMENT

Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)
Chart of Revenues (Rp million)

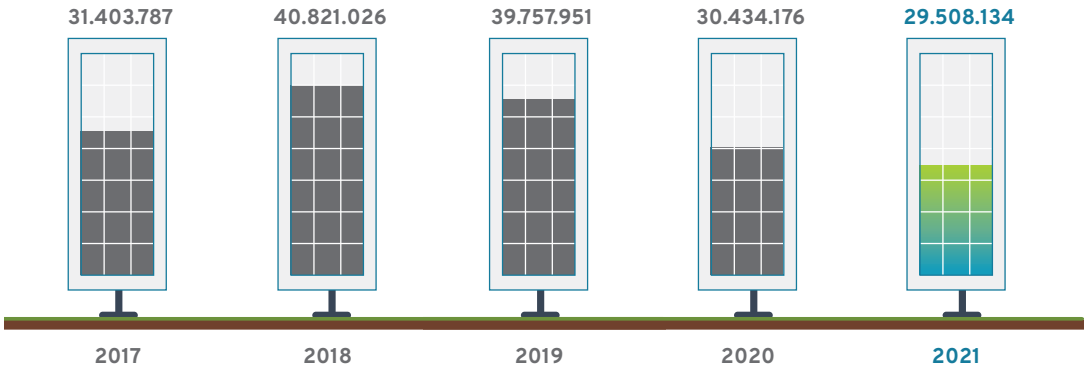

Laba Usaha Per Segmen
Operating Income per Segment

Laba usaha PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp7,19 triliun, menurun 29,77% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp10,24 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian *Margin* Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tahun 2021 menjadi sebesar Rp1,6 triliun dari *Margin* tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun serta belum terealisasinya beberapa kontrak AMC (Belawan, Sambelia, Pulang Pisau dan Kaltim Teluk).

In 2021, PJB's operating income was Rp7.19 trillion, decreased by 29.77% compared to 2020 of Rp10.24 trillion. The decrease was mainly due to an adjustment to Sales of Electricity Margin in 2021 to Rp1.6 trillion from Margin in 2020 of Rp5.1 trillion, as well as several AMC (Belawan, Sambelia, Pulang Pisau, and Kaltim Teluk) contracts had not been realized.

Tabel Laba Usaha Per Segmen (Rp juta)
Table of Operating Income per Segment (Rp million)

Segmen Bisnis Business Segment	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Rp juta Rp million
Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik **Power Plant Business**	**8.227.961**	**8.049.443**	**4.019.720**	**(50,06)**	**(4.029.724)**
PLTGU CCPP	4.685.041	4.110.701	1.747.625	(57,49)	(2.363.076)
PLTU CFPP	2.207.238	2.265.764	1.312.499	(42,07)	(953.265)
PLTA HPP	1.344.567	1.640.314	938.806	(42,77)	(701.508)
PLTG GTPP	(8.885)	32.665	20.790	(36,35)	(11.875)

Segmen Bisnis Business Segment	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Rp juta Rp million
Usaha Jasa O&M dan EPC **O&M and EPC Services Business**	**425.040**	**471.432**	**368.684**	**(21,79)**	**(102.748)**
Usaha Jasa EAM, IMAP, *Stockiest* **EAM, IMAP, Stockiest Services Business**	**42.057**	**4.748**	**18.588**	**291,48**	**13.840**
Jumlah Laba Usaha sebelum Eliminasi **Total Operating Income before Elimination**	**8.695.058**	**8.525.624**	**4.406.992**	**(48,31)**	**4.118.632**
Eliminasi Elimination	-	-	-	-	-
Hasil Segmen Segment Results	8.695.058	8.525.624	4.406.992	(48,31)	(4.118.632)
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Revenues (Expenses)	918.280	1.714.483	2.785.047	62,44	1.070.564
Jumlah Laba Usaha **Total Operating Income**	**9.613.338**	**10.240.107**	**7.192.040**	**(29,77)**	**(3.048.067)**

Grafik Laba Usaha (Rp juta)
Chart of Operating Income (Rp million)

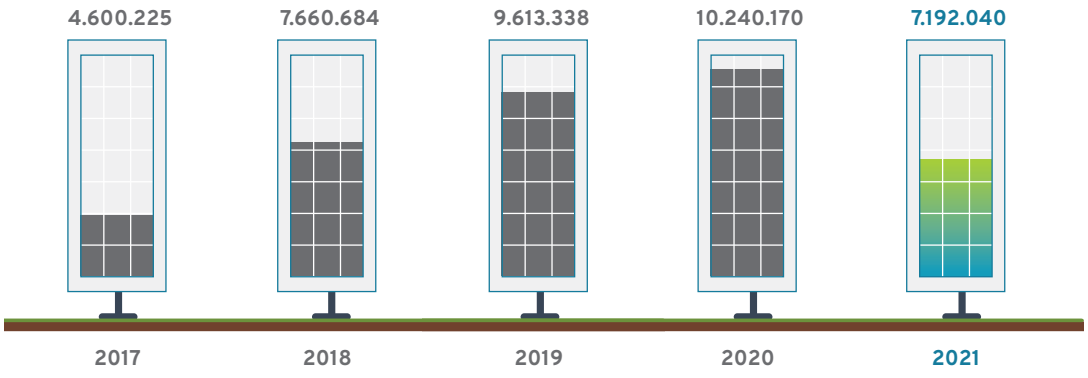

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha
Strategy and Direction of Business Segment Development

Dalam rangka keberlanjutan usaha, strategi dan arah pengembangan disusun untuk setiap segmen usaha sehingga operasional dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

In the event of business sustainability, the strategy and direction of development are prepared for every business segment, so that operations can be in accordance with the target that has been set.

PROFITABILITAS PER SEGMEN
PROFITABILITY PER SEGMENT

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Penjualan Tenaga Listrik

Development Strategy and Direction of the Electricity Sales Business Segment

Penjualan Tenaga Listrik merupakan bisnis utama yang dimiliki oleh PJB dimana sebesar 83,17% pendapatan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting. PJB menekankan fokus pada *best performance of existing power plant* dengan nilai EAF/EFOR yang mencapai *world class standard* dan mengusung prinsip *cost leadership* agar dapat mendukung kinerja usaha Pemegang Saham.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan pada tahun 2021 adalah:

1. *Security* dan keandalan pembangkit dengan 6 *line defense system* Jawa Madura Bali (JMB) melalui program sistem proteksi, *fail safe* dan fasilitas *blackstart* di Muara Tawar, Muara Karang dan Cirata
2. Penguatan keandalan *coal handling facility*
3. Penguatan *Plan assessment* dan RLA
4. Implementasi digitalisasi pembangkit
5. Relokasi pembangkit ke lokasi dengan *market* yang lebih membutuhkan
6. Pengaturan alokasi gas ke unit yang lebih efisien
7. *Coal switching* dan *coal optimation*
8. Meningkatkan kapasitas *co-firing* pembangkit PLTU
9. Menerapkan strategi *anti black-out* dengan melakukan *screening* ke setiap pembangkit dengan komprehensi

Electricity Sales is the main business owned by PJB where 83.17% of its revenues come from sales of electricity of the existing power plant. PJB focuses on the best performance of the existing power plant with the EAF/EFOR value reaching the world class standard and carries the principle of cost leadership to be able to support business performance of the Shareholders.

To achieve that goal, the strategies implemented in 2021 were as follows:

1. Power plant security and reliability with 6 lines of defense system of Java Madura Bali (JMB) through the protection, fail safe system program, and blackstart facility in Muara Tawar, Muara Karang and Cirata
2. Strengthening the reliability of coal handling facility
3. Strengthening Plan assessment ad RLA
4. Implementing power plants digitization
5. Power plants relocation to the location with more needed market
6. Gas allocation arrangement to the more efficient unit
7. Coal switching and coal optimation
8. Increasing the capacity of co-firing in CFPP
9. Implementing the anti black-out strategy by screening every power plant with comprehension

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Jasa O&M

Development Strategy and Direction of the O&M Service Business Segment

Penciptaan nilai bisnis jasa O&M melalui peningkatan proses operasi dan pemeliharaan pada pembangkit PJB maupun pembangkit milik pihak lain. Penerapan manajemen aset pembangkitan akan menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan aset yang berkinerja tinggi. Untuk mengoptimalikan kinerja dan peluang dalam segmen usaha jasa O&M PJB membentuk tim *Change Management* untuk pelaksanaan program sentralisasi organisasi pada beberapa fungsi melalui digitalisasi proses dan efisiensi proses bisnis pengelola unit jasa O&M di Luar Jawa (kapasitas <100 MW) serta pengalihan beberapa *resource* teknik ke beberapa fungsi di Kantor Pusat.

The creation of the business value of the O&M service through the improvement of operation and maintenance process in PJB's power plants and other parties-owned power plants. The implementation of power plant assets management will be the main power in managing high-performance assets. To optimize performance and opportunities in the O&M service business segment, PJB establishes the Change Management team for the implementation of organizational centralization program in several functions through process digitization and the efficiency of business process of the O&M service unit management outside Java (capacity of <100 MW) as well as the transfer of several technical resources to several functions in the Head Office.

Untuk pengembangan bisnis jasa O&M, strategi yang akan digunakan adalah pengembangan portofolio jasa O&M dengan melibatkan Anak Perusahaan PJB sebagai bagian dari segmentasi usaha jasa O&M dan meningkatkan *competitiveness* dan efisiensi biaya atas usaha jasa O&M. Pada tahun 2021 PJB menyusun strategi pengembangan pasar baru untuk pasar jasa operasi dan pemeliharaan serta bisnis *non-core* (*new business horizon*) dengan melakukan ekspansi pasar segmen jasa O&M ke negara lain.

For the development of the O&M service business, strategies that will be used are the development of the O&M service portfolio by involving PJB's subsidiaries as part of the O&M service segmentation and increasing competitiveness and cost efficiency on the O&M service business. In 2021, PJB prepared the new market development strategy for the operation and maintenance service market as well as non-core business (new business horizon) by expanding the O&M service market to other countries.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha EPC
Development Strategy and Direction of EPC Business Segment

Bisnis EPC yang dimiliki oleh PJB dikelola oleh anak perusahaan. Strategi yang akan digunakan pada bisnis EPC adalah mengembangkan jasa EPC untuk berbagai tipe dan ukuran pembangkit, serta dalam pembangunan transmisi. Fokus pengembangan bisnis EPC bertumpu pada pengembangan kapabilitas untuk memberikan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif agar dapat bersaing dalam *non-commercial* (penugasan PLN) dan *commercial market.* Untuk proses internal perusahaan, bisnis EPC akan mengembangkan *Integrated Management System* yang sesuai dengan *best practice.*

The EPC business owned by PJB is managed by its subsidiary. The strategy tha will be used in the EPC business is to develop EPC services for various types and measures of power plants, as well as in the transmission construction. The focus of EPC business development depends on the capability development for providing quality services at competitive prices to compete in non-commercial (assignment of PLN) and commercial market. Furthermore, for the Company's internal process, the EPC business will develop the Integrated Management System according to the best practices.

Strategi dan Arah Pengembangan Segmen Usaha Lainnya
Development Strategy and Direction of Other Business Segments

Dalam lini bisnis usaha lain ini, PT PJB memiliki beberapa usaha, seperti *Business Solution* dan pelayanan penyediaan suku cadang. *Business Solution* yakni lini bisnis jasa berbasis teknologi informasi yang menyediakan jasa pendukung O&M pembangkit. Di antaranya adalah jasa Implementasi Manajamen Aset Pembangkitan, dimana PJB menawarkan implementasi manajemen aset pembangkit yang terintegrasi dengan *software* yang mendukung prosedur dan proses bisnis yang dikembangkan. Bisnis pelayanan penyediaan suku cadang untuk pembangkit akan dikelola oleh anak perusahaan PJB yang akan men*supply* kebutuhan *spare part* untuk pembangkit FTP – 1 baik yang dikelola PJB, IP dan beberapa unit PLN.

In this business line of other businesses, PT PJB has several businesses such as Business Solution and spare parts procurement services. Business Solution is the information technology-based business service line that provides supporting services of the O&M power plant. One of them is the Implementation of Power Plant Assets Management, where PJB offers the implementation of integrated power plant assets management with a software that supports the developed business procedures and processes. Spare parts procurement service business for power plants will be managed by PJB's subsidiaries that will supply the needs of spare parts for FTP-1 power plants both managed by PJB, IP, and several PLN units.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Analisis Laba Rugi Komprehensif
Comprehensive Profit and Loss Analysis

Jumlah Laba Tahun Berjalan PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp5,82 triliun, menurun 24,45% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp7,70 triliun. Sedangkan, jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp3,52 triliun, menurun 56,24% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp8,04 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian *Margin* Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tahun 2021 menjadi sebesar Rp1,6 triliun dari *Margin* tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun.

In 2021, PJB's total Profit for the Year was Rp5.82 trillion, decreased by 24.45% compared to 2020 of Rp7.70 trillion. Meanwhile, PJB's total Comprehensive Income for the Year in 2021 was Rp3.52 trillion, decreased by 56.24% compared to 2020 of Rp8.04 trillion. The decrease was mainly due to an adjustment to Power Purchase Agreement Margin in 2021 to Rp1.6 trillion from Margin in 2020 of Rp5.1 trillion.

Tabel Laba Rugi Komprehensif (Rp juta)
Table of Comprehensive Income or Loss (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pendapatan Usaha Revenues	39.757.951	30.434.176	29.508.134	(3,04)	(926.042)
Beban Usaha Operating Expenses	31.062.892	(21.908.552)	(25.101.143)	14,57	(3.192.591)
Laba Usaha Operating Income	8.695.058	8.525.624	4.406.991	(48,31)	(4.118.633)
Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih Net Financial Items and Others	918.280	1.714.483	2.785.049	62,44	1.070.566
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	9.613.338	10.240.107	7.192.040	(29,77)	(3.048.067)
Beban Pajak Tax Expense	(2.950.016)	(2.536.295)	(1.371.852)	(45,91)	1.164.443
Laba Tahun Berjalan **Profit for the Year**	**6.663.322**	**7.703.812**	**5.820.188**	**(24,45)**	**(1.883.624)**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income (Expense) for the Year after Tax	(490.848)	336.930	(2.301.389)	(783,05)	(2.638.319)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	**6.172.474**	**8.040.742**	**3.518.799**	**(56,24)**	**(4.521.943)**
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	6.645.392	7.661.396	5.810.033	(24,16)	(1.851.363)
- Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	17.930	42.416	10.155	(76,06)	(32.261)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diataribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	6.159.853	7.995.887	3.494.125	(56,30)	(4.501.768)
- Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	12.621	44.855	24.674	(44,99)	(20.177)
Laba Per Saham Dasar (Rupiah penuh) **Basic Earnings per Share (full Amount)**	**1.108**	**1.284**	**970**	**(24,45)**	**(314)**

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Grafik Jumlah Laba Tahun Berjalan (Rp juta)
Chart of Total Profit for the Year (Rp million)

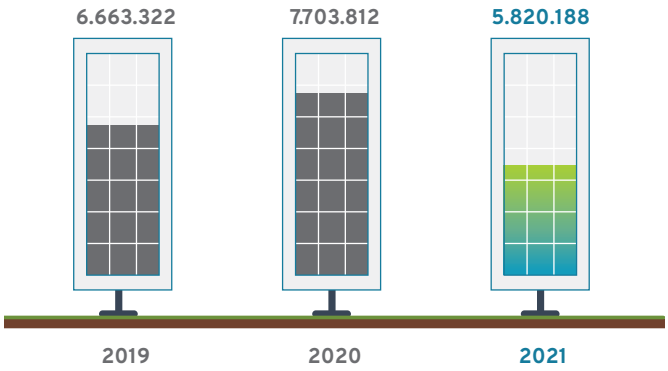

Pendapatan Usaha
Revenues

Pendapatan Usaha menurun menjadi Rp29,50 triliun
Revenues decrease to Rp29.50 trillion

Komponen atas pendapatan Usaha PJB terdiri dari Penjualan Tenaga Listrik, Jasa O&M, Jasa EPC dan Usaha Lainnya. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan usaha berasal dari penjualan tenaga listrik untuk sistem Jawa Bali.

The component of PJB's Revenues consists of Sales of Electricity, O&M Services, EPC Services, and Other Businesses. The largest contribution of revenues comes from the sales of electricity for the Java-Bali system.

Pendapatan usaha PJB tahun 2021 sebesar Rp29,51 triliun, menurun 3,04% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp30,43 triliun. Penurunan tersebut didominasi oleh penyesuaian Margin Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tahun 2021 menjadi sebesar Rp1,6 triliun dari *Margin* tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun serta belum terealisasinya beberapa kontrak AMC (Belawan, Sambelia, Pulang Pisau dan Kaltim Teluk).

In 2021, PJB's revenues were Rp29.51 trillion, decreased by 3.04% compared to 2020 of Rp30.43 trillion. The decrease was dominated by an adjustment to Power Purchase Agreement Margin in 2021 to Rp1.6 trillion from Margin in 2020 of Rp5.1 trillion, as well as several AMC contracts (Belawan, Sambelia, Pulang Pisau, and Kaltim Teluk) had not been realized.

Tabel Pendapatan Usaha (Rp juta)
Total Revenues (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	33.681.317	25.476.470	24.541.378	(3,67)	(935.092)
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenues	6.076.633	4.957.706	4.966.756	0,18	9.050
Jumlah Pendapatan Usaha **Total Revenues**	**39.757.951**	**30.434.176**	**29.508.134**	**(3,04)**	**(926.042)**

Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)
Chart of Revenues (Rp million)

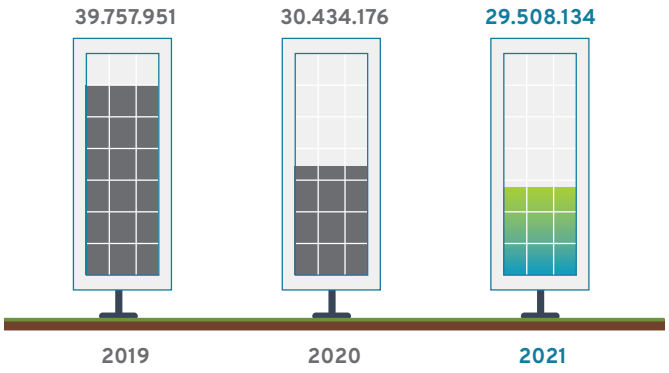

Penjualan Tenaga Listrik
Sales of Electricity

PJB memiliki sejumlah *Power Purchase Agreement* dengan PT PLN (Persero). Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Jumlah Penjualan Tenaga Listrik PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp24,54 triliun, menurun 3,67% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp25,48 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian *Margin* Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tahun 2021 menjadi sebesar Rp1,6 triliun dari *Margin* tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun.

Namun di tahun 2021 terjadi tren peningkatan dalam penjualan tenaga listrik melalui pembangkit PJB diantaranya PLTA dan PLTGU. Hal ini merupakan strategi Perusahaan dengan kemungkinan adanya kenaikan harga batubara di Pasar Internasional.

PJB has a number of Power Purchase Agreements with PT PLN (Persero). Under those agreements, PLN pays the Company for the supply of electricity at an amount determined in accordance with the payment formula. Such a payment formula includes the cost of capacity, energy, operations and maintenance components which depends on the level of energy supplied and other variables as stipulated in the agreement.

In 2021, PJB's total Sales of Electricity was Rp24.54 trillion, decreased by 3.67% compared to 2020 of Rp25.48 trillion. The decrease was due to an adjustment to Power Purchase Agreement Margin in 2021 to Rp1.6 trillion from Margin in 2020 of Rp5.1 trillion.

However, there was the trend of an increase in sales of electricity in 2021 through PJB's power plants, including HPP and CCPP. This was the Company's strategy with the possibility of an increase in coal price in the International Market.

Grafik Penjualan Tenaga Listrik (Rp juta)
Chart of Sales of Electricity (Rp million)

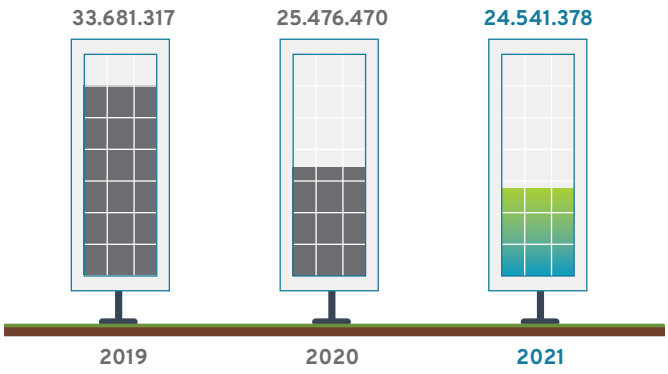

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Pendapatan Usaha Lainnya
Other Operating Revenue

Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp4,97 triliun, meningkat 0,18% dibandingan tahun 2020 sebesar Rp4,96 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya pendapatan atas jasa konstruksi dan lainnya yang diperoleh dari pihak ketiga.

In 2021, PJB's total Other Operating Revenue was Rp4.97 trillion, increased by 0.18% compared to 2020 of Rp4.96 trillion. The increase was mainly influenced by the increasing revenues for construction services and others obtained from the third party.

Tabel Pendapatan Usaha Lainnya (Rp juta)
Total Other Operating Revenue (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	4.422.238	4.093.834	4.057.567	(0,89)	(36.267)
Konstruksi Construction	1.396.106	702.929	727.224	3,46	24.295
Lainnya Others	258.289	160.943	181.965	13,06	21.022
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya **Total Other Operating Revenue**	**6.076.633**	**4.957.706**	**4.966.756**	**0,18**	**9.050**

Grafik Pendapatan Usaha Lainnya (Rp juta)
Chart of Other Operating Revenue (Rp million)

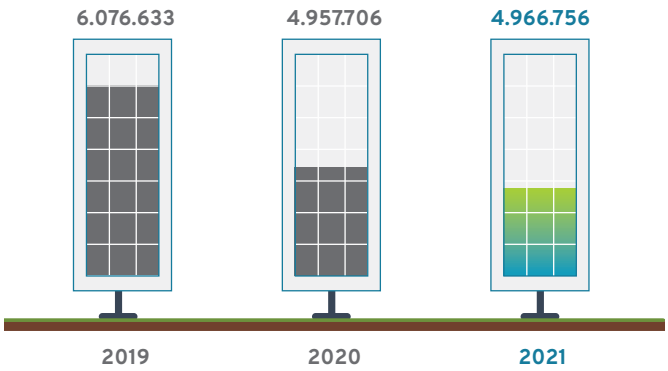

Beban Usaha
Operating Expenses

Beban Usaha meningkat menjadi Rp25,10 triliun
Operating Expenses increase to Rp25.10 trillion

Jumlah Beban Usaha PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp25,10 triliun, meningkat 14,57% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp21,91 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan beban biaya bahan bakar dan pelumas serta beban biaya kepegawaian.

In 2021, PJB's total Operating Expenses were Rp25.10 trillion, increased by 14.57% compared to 2020 of Rp21.91 trillion. The increase was influenced by an increase in fuel and lubricants expenses, as well as personnel expenses.

Tabel Beban Usaha Lainnya (Rp juta)
Table of Operating Expenses (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pembelian Tenaga Listrik Purchased Electricity	332.016	325.288	333,617	(99,90)	(324.954)
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	18.830.297	11.538.786	14.672.806	27,16	3.134.020
Pemeliharaan Maintenance	4.798.897	4.180.398	4.126.561	(1,29)	(53.837)
Penyusutan Depreciation	3.699.338	3.277.413	3.253.144	(0,74)	(24.269)
Kepegawaian Personnel	1.701.177	1.682.988	1.790.453	6,39	107.465
Lain-lain Others	1.701.167	903.679	924.562	2,31	20.883
Jumlah Beban Usaha **Total Operating Expenses**	**31.062.893**	**21.908.552**	**25.101.143**	**14,57**	**3.192.591**

Grafik Beban Usaha (Rp juta)
Chart of Operating Expenses
(Rp million)

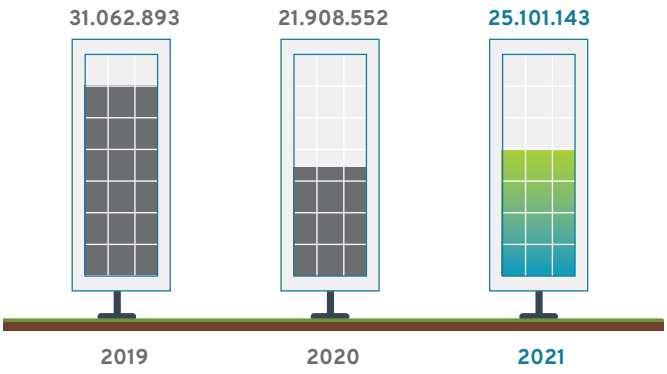

Beban Bahan Bakar dan Pelumas
Fuel and Lubricants

Jumlah Beban Bahan Bakar dan Pelumas PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp14,67 triliun, meningkat 27,16% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp11,54 triliun.

Peningkatan biaya bahan bakar di tahun 2021 salah satunya disebabkan dengan adanya kenaikan harga batubara di Pasar Internasional. Selain peningkatan harga batubara adapun penyebab meningkatnya beban bahan bakar dan pelumas terutama karena kenaikan beban biaya bahan bakar minyak secara signifikan.

In 2021, PJB's total Fuel and Lubricants Expenses were Rp14.67 trillion, increased by 27.16% compared to 2020 of Rp11.54 trillion.

One of the increases in fuel expenses in 2021 was due to an increase in coal price in the International Market. In addition to the increase in coal price, the cause of the increasing fuel and lubricants expenses was mainly due to a significant increase in fuel expenses.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Tabel Beban Bahan Bakar dan Pelumas (Rp juta)
Table of Fuel and Lubricants Expenses (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Bahan Bakar Minyak Fuels	**500.958**	**191.374**	**1.562.072**	**716,24**	**1.370.698**
Solar (HSD) Solar (High-Speed Diesel)	245.747	139.869	1.148.437	721,08	1.008.568
Residu (MFO) Residual (Marine Fuel Oil)	255.211	51.505	413.635	703,10	362.130
Bahan Bakar Non Minyak Non-Oil Fuels	**18.287.210**	**11.322.571**	**13.085.947**	**15,57**	**1.763.376**
Gas Alam Natural Gas	15.700.397	9.240.645	10.328.556	11,77	1.087.911
Batubara Coals	2.386.964	1.778.071	2.409.639	35,52	631.568
Air Water	141.803	249.469	295.026	18,26	45.557
Pajak Air Permukaan Surface Water Tax	16.882	19.147	17.203	(10,15)	(1.944)
Bahan Kimia dan Bahan Lainnya Chemicals and Other Materials	41.164	35.239	35.523	0,81	284
Minyak Pelumas Lubricants	**42.129**	**24.841**	**24.787**	**(0,22)**	**(54)**
Jumlah Beban Bakar dan Pelumas Total Fuel and Lubricants Expenses	**18.830.297**	**11.538.786**	**14.672.806**	**27,16**	**3.134.020**

Grafik Beban Bahan Bakar dan Pelumas (Rp juta)
Chart of Fuel and Lubricants Expenses (Rp million)

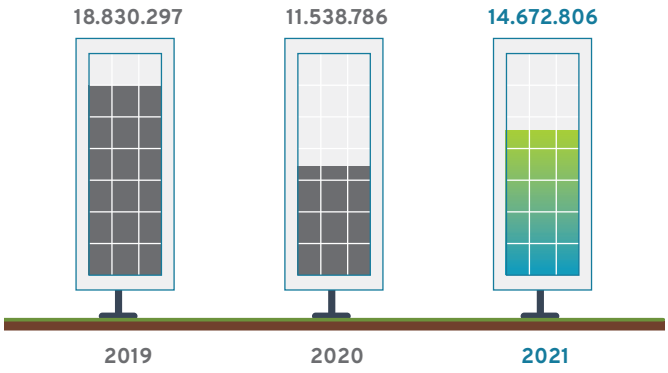

Beban Pemeliharaan
Maintenance Expenses

Jumlah Beban Pemeliharaan PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp4,12 triliun, menurun 1,29% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp4,18 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh efisiensi pembangkit yang lebih baik dan optimasi biaya pemeliharaan sehingga berdampak pada penundaan/ pengurangan *scope* pekerjaan O&M & pembatalan proyek-proyek investasi, serta *reschedule* kedatangan *sparepart* di PLNSC.

In 2021, PJB's total Maintenance Expenses were Rp4.12 trillion, decreased by 1.29% compared to 2020 of Rp4.18 trillion. This decrease was due to a better efficiency of the power plants and maintenance cost optimization, so that it had an impact on the delay/reduction of the scope of the O&M work and investment projects cancellation, as well as reschedule of sparepart arrival in PLNSC.

Tabel Beban Pemeliharaan (Rp juta)
Table of Maintenance Expenses (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pemakaian Material Pemeliharaan Maintenance Materials Used	1.717.984	1.460.754	1.386.272	(5,10)	(74.482)
Jasa Borongan Contracted Services	3.080.914	2.719.644	2.740.289	0,76	20.645
Jumlah Beban Pemeliharaan Total Maintenance Expenses	**4.798.897**	**4.180.398**	**4.126.561**	**(1,29)**	**(53.837)**

Grafik Beban Pemeliharaan (Rp juta)
Chart of Maintenance Expenses (Rp million)

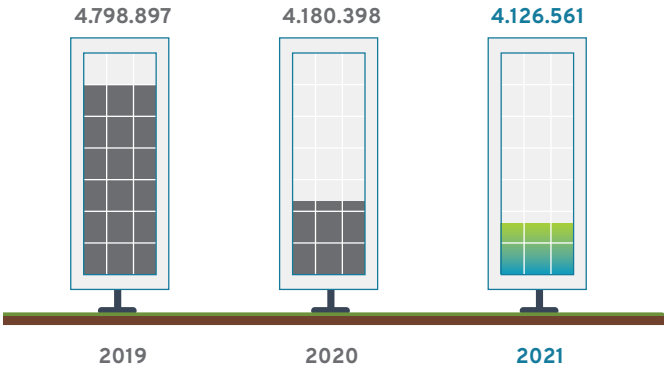

Beban Penyusutan
Depreciation Expenses

Jumlah Beban Penyusutan PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp3,25 triliun, menurun 0,74% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp3,28 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Revaluasi Aset Pembangkit yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2021 dan terdapat beberapa aset yang telah memiliki nilai buku 0 di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Depreciation Expenses were Rp3.25 trillion, decreased by 0.74% compared to 2020 of Rp3.28 trillion. The decrease was mainly due to an Assets Revaluation of the Power Plants conducted by the Company in 2021 and there were several assets with zero book value in 2021.

Beban Kepegawaian
Personnel Expenses

Jumlah Beban Kepegawaian PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp1,79 triliun, meningkat 6,39% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp1,68 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan jumlah bonus dan insentif atas kinerja karyawan serta kenaikan jumlah gaji dan tunjangan.

In 2021, PJB's total Personnel Expenses were Rp1.79 trillion, increased by 6.39% compared to 2020 of Rp1.68 trillion. The increase was mainly influenced by an increase in total bonus and incentives of employee performance, as well as an increase in total salaries and allowances.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Tabel Beban Kepegawaian (Rp juta)
Table of Personnel Expenses (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Gaji dan Tunjangan Salaries and Allowances	753.049	762.651	812.955	6,60	50.304
Imbalan Kerja Employee Benefits	352.010	374.959	353.705	(5,67)	(21.254)
Bonus dan Insentif Karyawan Employee Bonus and Incentives	390.676	396.936	448.048	12,88	51.112
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	111.628	43.172	54.275	25,72	11.103
Tunjangan Kesehatan Medical Allowances	60.704	76.570	90.367	18,02	13.797
Lain-lain Others	33.110	28.700	31.103	8,37	2.403
Jumlah Beban Kepegawaian Total Personnel Expenses	**1.701.177**	**1.682.988**	**1.790.453**	**6,39**	**107.465**

Grafik Beban Kepegawaian (Rp juta)
Chart of Personnel Expenses (Rp million)

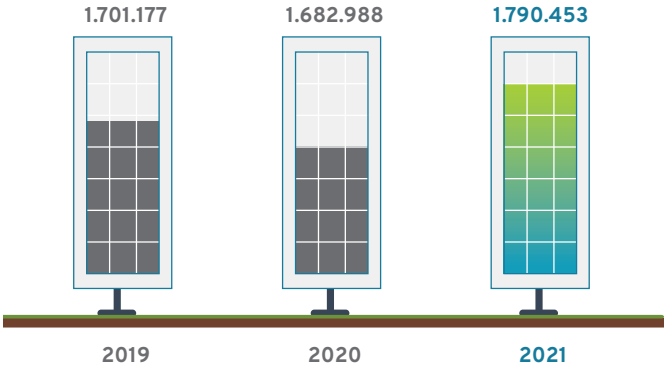

Beban Usaha Lain-lain
Other Operating Expenses

Jumlah Beban Lain-Lain PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp924,56 miliar, meningkat 2,31% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp903,68 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya sewa bangunan dan tanah.

In 2021, PJB's total Other Expenses were Rp924.56 billion, increased by 2.31% compared to 2020 of Rp903.68 billion. The increase was mainly influenced by an increase in building and land rental costs.

Tabel Beban Lain-Lain (Rp juta)
Table of Other Expenses (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Beban Konstruksi Construction Cost	1.213.598	550.108	596.759	8,48	46.651
Asuransi Insurance	88.878	73.370	54.803	(25,31)	(18.567)
Honorarium	86.590	78.095	69.125	(11,49)	(8.970)
Perjalanan Dinas Business Travelling	60.305	16.856	15.246	(9,55)	(1.610)
Konsumsi Meals Consumption	24.109	16.216	19.007	17,21	2.791
Pos dan Telekomunikasi Postage and Telecommunications	15.774	11.686	12.531	7,23	845
Jasa Profesional Professional Fees	80.392	18.504	17.261	(6,72)	(1.243)
Pajak dan Retribusi Lainnya Taxes and Other Retribution	131.523	37.953	28.130	(25,88)	(9.823)
Pajak Final Final Tax	-	23.342	25.459	9,07	2.117
Sewa Bangunan dan Tanah Building and Land Rental	-	13.394	24.171	80,46	10.777
Listrik, Air, dan Gas Electricity, Water, and Gas	-	12.089	11.479	(5,05)	(610)
Lain-lain Others	-	52.066	50.591	(2,83)	(1.475)
Jumlah Beban Lain-lain **Total Other Expenses**	**1.701.167**	**903.679**	**924.562**	**2,31**	**20.883**

Grafik Beban Lain-lain (Rp juta)
Chart of Other Expenses
(Rp million)

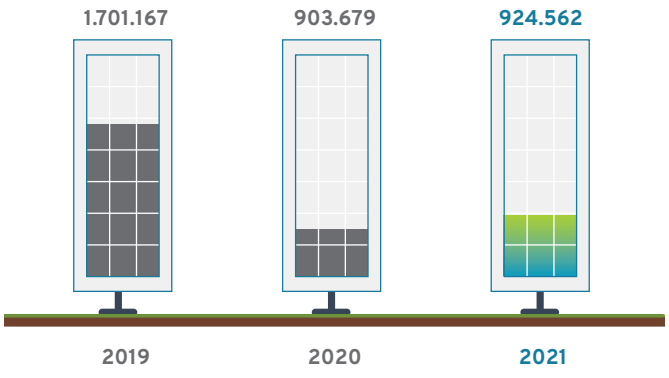

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Laba Usaha
Operating Income

Jumlah Laba Usaha PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp4,41 triliun, menurun 48,31% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp8,53 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian Margin Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tahun 2021 menjadi sebesar Rp1,6 triliun dari *Margin* tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun.

In 2021, PJB's total Operating Income was Rp4.41 trillion, decreased by 48.31% compared to 2020 of Rp8.53 trillion. The decrease was mainly due to an adjustment to Power Purchase Agreement Margin in 2021 to Rp1.6 trillion from Margin in 2020 of Rp5.1 trillion.

Pos Keuangan dan Lain-lain
Financial Items and Others

Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp2,78 triliun, meningkat 62,21% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,71 trilliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan laba bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama.

In 2021, PJB's total Net Financial Items and Others were Rp2.78 trillion, increased by 62.21% compared to 2020 of Rp1.71 trillion. The increase was mainly influenced by an increase in net income of associates and joint ventures.

Tabel Pos Keuangan dan Lain-Lain (Rp juta)
Table of Net Financial Items and Others (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penghasilan Keuangan Finance Income	115.096	126.658	186.603	47,33	59.945
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih Gain (loss) on foreign exchange - net	(46.799)	(8.913)	3.924	(144,03)	12.837
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share in net income of associates and joint ventures	891.393	1.952.507	2.868.311	46,90	915.804
Beban Lain-lain Bersih Net Other Expenses	(41.410)	(355.769)	(273.789)	(23,04)	81.980
Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih **Total Net Financial Items and Others**	**918.280**	**1.714.483**	**2.785.049**	**62,44**	**1.070.566**

Grafik Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih (Rp juta)
Chart of Net Financial Items and Others (Rp million)

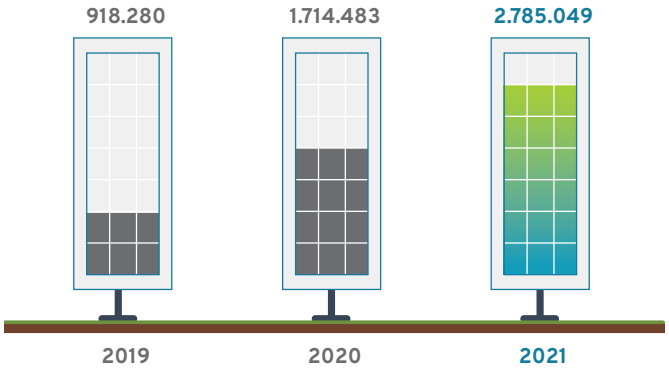

Beban Pajak
Tax Expense

Jumlah Beban Pajak PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp1,37 triliun, menurun 45,91% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp2,53 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba fiskal perusahaan di 2021.

In 2021, PJB's total Tax Expense was Rp1.37 trillion, decreased by 45.91% compared to 2020 of Rp2.53 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in the Company's fiscal profit in 2021.

Tabel Beban Pajak (Rp juta)
Table of Tax Expense (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Beban Pajak Kini Current Tax Expense	84.700	61.211	71.336	16,54	10.125
Beban Pajak Tangguhan Deferred Tax Expense	2.865.316	2.475.084	1.300.516	(47,46)	(1.174.568)
Jumlah Beban Pajak Total Tax Expense	**2.950.016**	**2.536.295**	**1.371.852**	**(45,91)**	**(1.164.443)**

Grafik Beban Pajak (Rp juta)
Chart of Tax Expense (Rp million)

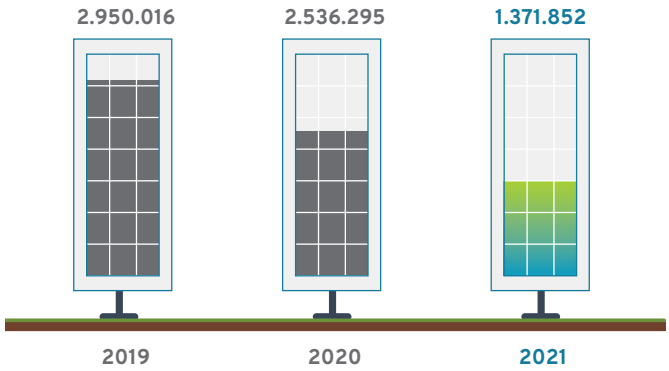

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan
Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak tahun 2021 adalah sebesar (Rp2,30) triliun, menurun 783,05% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp336,93 miliar. Penurunan penghasilan komprehensif lainnya merupakan dampak dari penerapan atas revalusasi aset tetap.

In 2021, total Other Comprehensive Income for the Year after Tax was (Rp2.30) trillion, decreased by 783.05% compared to 2020 of Rp336.93 billion. The decrease in other comprehensive income was the impact from the implementation of revaluation of property, plant, and equipment.

Tabel Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan (Rp juta)
Table of Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: **Items that may be Reclassified subsequently to Profit or Loss:**					
Bagian Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share in Other Comprehensive Income (Expenses) from Associates and Joint Ventures	(266.053)	191.041	(4.868)	(102,55)	(195.909)
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba rugi: **Items that will not be Reclassified to Profit or Loss:**					
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plans	(208.812)	234.360	192.415	(17,90)	(41.945)
Revaluasi Aset Tetap Revaluation of Property, Plant, and Equipment	(74.511)	(6.916)	(3.154.021)	45.504,70	(3.147.105)
(Beban)/Manfaat Pajak Terkait Related Income Tax (Expenses)/Benefits	58.528	(81.555)	665.085	(915,50)	746.640
Jumlah (kerugian)/Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan **Total Other Comprehensive Income/(Loss) for the Year**	**(490.848)**	**336.930**	**(2.301.389)**	**(783,05)**	**(2.638.319)**

Laba Per Saham Dasar
Basic Earnings per Share

Perusahaan memiliki jumlah saham sebanyak 6.000 juta saham dimana hampir seluruhnya dimiliki oleh PT PLN (Persero). Perhitungan jumlah laba per saham dasar atau biasa disebut *Earning Per Share* atau Laba per saham merupakan perhitungan yang dilakukan untuk menemukan pendapatan yang diperoleh perusahaan sesuai dengan jumlah saham beredar yang dimiliki. Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

The Company has total shares of 6,000 million shares where it almost entirely owned by PT PLN (Persero). The calculation of total Earnings per Share is the calculation conducted to find revenues obtained by the Company in accordance with outstanding shares. The Company has no potential stock dilution effect; therefore, the basic earnings per share are equal to the diluted earnings per share.

Jumlah Laba Per Saham PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp970 menurun 24,45% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.284. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya jumlah laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada Pemegang Saham.

In 2021, PJB's total Earnings per Share were Rp970, decreased by 24.45% compared to 2020 of Rp1,284. The decrease was mainly influenced by the decreasing total profit for the year attributable to Shareholders.

ANALISIS POSISI KEUANGAN
FINANCIAL POSITION ANALYSIS

Jumlah Aset PJB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp172,16 triliun, Jumlah Liabilitas sebesar Rp10,99 triliun, dan Jumlah Ekuitas PJB adalah sebesar Rp161,17 triliun.

In 2021, PJB's total Assets were Rp172.16 trillion, total Liabilities was Rp10.99 trillion, and total Equity was Rp161.17 trillion.

Tabel Posisi Keuangan (Rp juta)
Table of Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Assets	**173.223.365**	**175.561.020**	**172.163.828**	**(1,94)**	**(3.397.192)**
Aset Lancar Current Assets	28.588.694	31.686.542	32.460.225	2,44	773.683
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	144.634.671	143.874.478	139.703.603	(2,90)	(4.170.875)
Liabilitas Liabilities	**9.450.270**	**10.246.069**	**10.994.563**	**7,31**	**748.494**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.225.170	4.954.830	5.017.427	1,26	62.597
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	4.225.100	5.291.239	5.977.136	12,96	685.897
Ekuitas Equity	**163.773.095**	**165.314.952**	**161.169.265**	**(2,51)**	**(4.145.687)**

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Aset
Assets

> **Jumlah Aset menurun menjadi Rp172,16 triliun**
> Total Assets decrease to Rp172.16 trillion

Pada tahun 2021 komponen aset terbesar perusahaan masih didominasi oleh aset tidak lancar, namun untuk pertumbuhan yang positif di tahun 2021 merupakan kontribusi beberapa komponen dalam aset lancar, diantaranya Kas dan Setara Kas dimana berupa saldo dalam bank serta deposito berjangka dari pihak berelasi, Biaya Dibayar Dimuka, Pajak Dibayar Dimuka, serta Piutang Lain-lain.

In 2021, the largest assets component of the Company was still dominated by non-current assets. However, for the positive growth in 2021, it was a contribution of several components in current assets, including Cash and Cash Equivalents where it is in the form of cash in Banks and time deposits of related parties, Prepaid Expenses, Prepaid Taxes, as well as Other Receivables.

Jumlah Aset PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp172,16 triliun, menurun sebesar 1,94% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp175,56 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Revaluasi Aset yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Assets were Rp172.16 trillion, decreased by 1.94% compared to 2020 of Rp175.56 trillion. The decrease was mainly due to Asset Revaluation conducted by the Company in 2021.

Tabel Aset (Rp juta)
Table of Assets (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Lancar Current Assets	27.311.267	31.686.542	32.460.225	2,44	773.683
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	145.912.098	143.874.478	139.703.603	(2,90)	(4.170.875)
Jumlah Aset Total Assets	**173.223.365**	**175.561.020**	**172.163.828**	**(1,94)**	**(3.397.192)**

Grafik Aset (Rp juta)
Chart of Assets (Rp million)

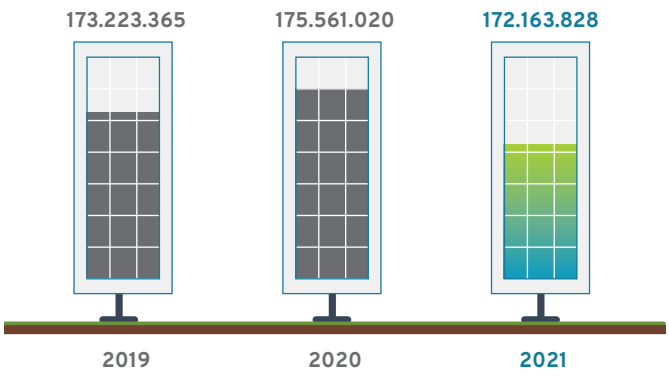

Aset Lancar
Current Assets

Jumlah Aset Lancar PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp32,46 triliun, meningkat 2,44% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp31,69 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh Kas dan Setara Kas yang ditujukan untuk pencadangan kebutuhan operasional dan investasi.

In 2021, PJB's total Current Assets were Rp32.46 trillion, increased by 2.44% compared to 2020 of Rp31.69 trillion. The increase was mainly influenced by Cash and Cash Equivalents intended to reserve operational and investment needs.

Tabel Aset Lancar (Rp juta)
Table of Current Assets (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.838.858	3.511.113	7.343.968	109,16	3.832.855
Deposito Berjangka Time Deposits	326.901	325.046	290.103	(10,75)	(34.943)
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks and time deposits	-	-	206.279	-	206.279
Piutang Usaha Trade Receivables	22.140.678	25.296.923	21.954.378	(13,21)	(3.342.545)
Piutang Lain-lain Other Receivables	362.755	182.172	187.199	2,76	5.027
Piutang kepada ventura bersama bagian lancar Receivables from joint ventures – current portion	-	-	124.055	-	124.055
Persediaan Inventories	1.833.195	1.546.239	1.463.848	(5,33)	(82.391)
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	729.081	733.167	755.157	3,00	21.990
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	79.799	91.882	135.238	47,19	43.356
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**27.311.267**	**31.686.542**	**32.460.225**	**2,44**	**773.683**

Grafik Aset Lancar (Rp juta)
Chart of Current Assets (Rp million)

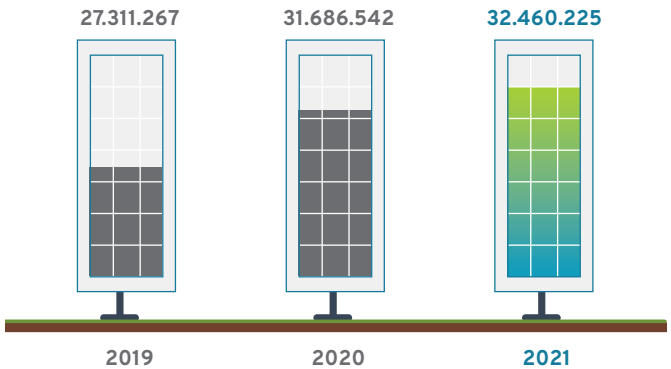

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

Jumlah Kas dan Setara Kas PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp7,34 triliun, meningkat 109,16% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp3,51 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kas untuk pencadangan kebutuhan operasional dan investasi di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Cash and Cash Equivalents were Rp7.34 trillion, increased by 109.16% compared to 2020 of Rp3.51 trillion. The increase was mainly influenced by the increasing cash to reserve operational and investment needs in 2021.

Tabel Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Table of Cash and Cash Equivalents (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas Cash	**2.676**	**2.673**	**1.804**	**(32,51)**	**(869)**
Bank Banks	**1.709.641**	**3.404.263**	**6.399.519**	**87,99**	**2.995.256**
Pihak Berelasi Related Parties	1.507.878	3.104.254	6.261.488	101,71	3.157.234
Pihak Ketiga Third Parties	201.763	300.009	138.031	(53,99)	(161.978)
Setara Kas - Deposito Berjangka **Cash Equivalents – Time Deposits**	**126.542**	**104.177**	**942.645**	**804,85**	**838.468**
Pihak Berelasi Related Parties	116.430	94.105	942,533	901,85	848.428
Pihak Ketiga Third Parties	10.112	10.112	112	(98,89)	(10.000)
Jumlah Kas dan Setara Kas **Total Cash and Cash Equivalents**	**1.838.858**	**3.511.113**	**7.343.968**	**109,16**	**3.832.855**

Grafik Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Chart of Cash and Cash Equivalents (Rp million)

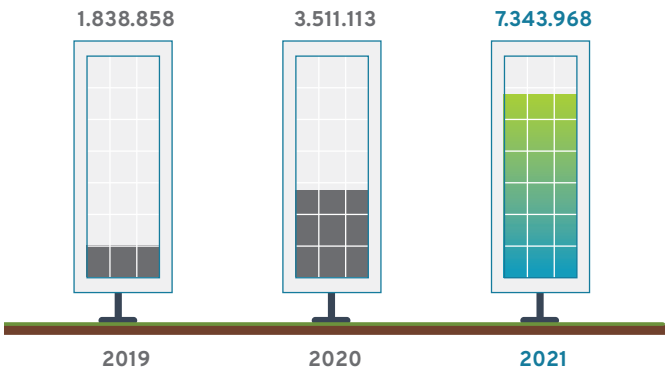

Deposito Berjangka
Time Deposits

Jumlah Deposito Berjangka PJB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp290,10 miliar, menurun 10,75% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp325,05 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tingkat suku bunga deposito berjangka yang lebih rendah di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

In 2021, PJB's total Time Deposits was Rp290.10 billion, decreased by 10.75% compared to 2020 of Rp325.05 billion. The decrease was mainly due to a lower interest rates on time deposits in 2021 compared to 2020.

Grafik Deposito Berjangka (Rp juta)
Chart of Time Deposits (Rp million)

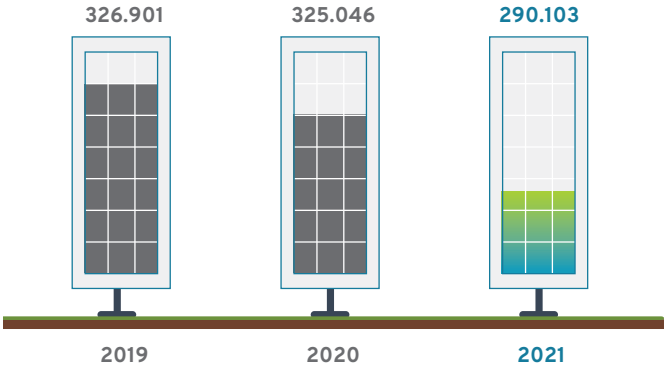

Piutang Usaha
Trade Receivables

Jumlah Piutang Usaha PJB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp21,95 triliun menurun 13,21% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp25,30 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh offset piutang PT PJB terhadap dividen kepada PT PLN (Persero).

In 2021, PJB's total Trade Receivables were Rp21.95 trillion, decreased by 13.21% compared to 2020 of Rp25.30 trillion. The decrease was mainly due to offset receivables of PT PJB towards dividend to PT PLN (Persero).

Tabel Piutang Usaha (Rp juta)
Table of Trade Receivables (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pihak Berelasi Related Parties	22.111.180	25.288.025	21.938.127	(13,25)	(3.349.898)
Pihak Ketiga Third Parties	29.498	32.595	39.948	22,56	7.353
Cadangan kerugian kredit ekspektasian Allowance for expected credit loss	-	(23.697)	(23.697)	-	-
Jumlah Piutang Usaha **Total Trade Receivables**	**22.140.678**	**25.296.923**	**21.954.378**	**(13,21)**	**(3.342.545)**

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Grafik Piutang Usaha (Rp juta)
Chart of Trade Receivables
(Rp million)

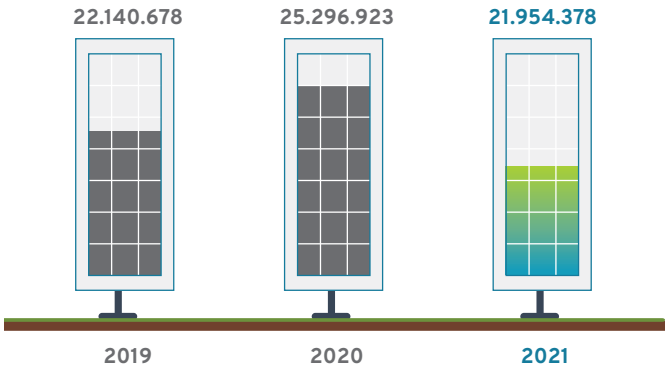

Piutang Lain-lain
Other Receivables

Jumlah Piutang Lain-lain PJB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp187,19 miliar, meningkat 2,76% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp182,17 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh koreksi pengakuan piutang usaha atas rekonsiliasi dengan PT PLN menjadi piutang lain-lain di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Other Receivables were Rp187.19 billion, increased by 2.76% compared to 2020 of Rp182.17 billion. The increase was mainly influenced by correction on trade receivables recognition of reconciliation with PT PLN into other receivables in 2021.

Persediaan
Inventories

Jumlah Persediaan PJB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1,46 triliun, menurun 5,33% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp1,55 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh krisis batubara yang terjadi di 2021 dan mengakibatkan pasokan batubara terlambat di sejumlah PLTU Jawa-Madura-Bali sehingga persediaan batubara menipis di akhir tahun 2021. Selain itu, adanya efisiensi pembangkit yang lebih baik dan optimasi biaya pemeliharaan sehingga berdampak pada penundaan/ pengurangan *scope* pekerjaan OM yang mencakup kedatangan material *spare part* pembangkit.

In 2021, PJB's total inventories were Rp1.46 trillion, decreased by 5.33% compared to 2020 of Rp1.55 trillion. The decrease was mainly due to coal crisis occurred in 2021 and it caused coal supplies to be late in a number of CFPPs in Java-Madura-Bali; therefore, coal inventories decreased at the end of 2021. In addition, the existence of a better efficiency of the power plants and maintenance cost optimization, so that it had an impact on the delay/reduction of the scope of the O&M work covering the power plants sparepart arrival.

Tabel Persediaan (Rp juta)
Table of Inventories (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Batu Bara, Bahan Bakar dan Pelumas Coal, Fuel, and Lubricants	1.453.875	1.139.853	1.135.328	(0,40)	(4.525)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Material Pemeliharaan Maintenance Materials	399.073	423.428	347.548	(17,92)	(75.880)
Sub Jumlah Sub Total	**1.852.948**	**1.563.281**	**1.482.876**	**(5,14)**	**(80.405)**
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment	(19.753)	(17.042)	(19.028)	11,65	(1.986)
Jumlah Persediaan Total Inventories	**1.833.195**	**1.546.239**	**1.463.848**	**(5,33)**	**(82.391)**

Grafik Persediaan (Rp juta)
Chart of Inventories (Rp million)

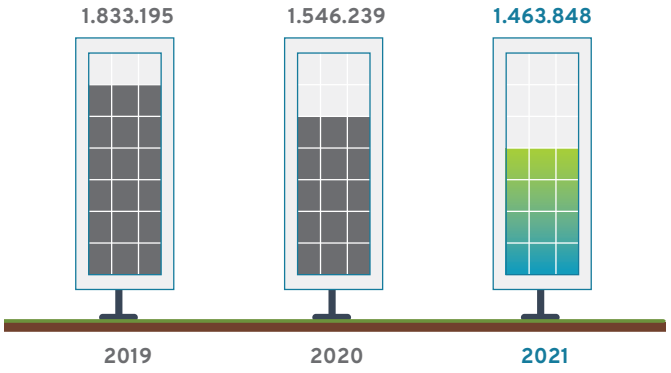

Pajak Dibayar Dimuka
Prepaid Taxes

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka Jangka Pendek PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp755,16 miliar, meningkat 3,00% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp733,17 miliar dan Pajak Dibayar Dimuka Jangka Panjang PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp752,25 miliar menurun 38,92% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar 1.231,54 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan penyisihan atas sengketa pajak PPh Pasal 22 sebesar 90,00 miliar.

In 2021, PJB's total Current Prepaid Taxes were Rp755.16 billion, increased by 3.00% compared to 2020 of Rp733.17 billion; and PJB's Non-Current Prepaid Taxes were Rp752.25 billion, decreased by 38.92% compared to 2020 of Rp1,231.54 billion. The decrease was mainly influenced by the addition of provision for Income Tax Article 22 disputes of Rp90.00 billion.

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka
Prepaid Expenses and Advances

Jumlah Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp135,24 miliar, meningkat 47,19% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp91,88 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan kontrak sewa baru di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Prepaid Expenses and Advances were Rp135.24 billion, increased by 47.19% compared to 2020 of Rp91.88 billion. The increase was mainly influenced by the addition of new rental contracts in 2021.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp139,70 triliun, menurun 2,90% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp143,87 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya aset tetap, aset tidak lancar lain, pajak dibayar dimuka, serta tidak adanya Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Non-Current Assets were Rp139.70 trillion, decreased by 2.90% compared to 2020 of Rp143.87 trillion. The decrease was mainly due to the decreasing property, plant, and equipment, other non-current assets, prepaid taxes, as well as the absence of Restricted Cash in Banks and Time Deposits in 2021.

Tabel Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Table of Non-Current Assets (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Tetap Property, Plant, and Equipment	130.956.129	129.523.845	124.151.268	(4,15)	(5.372.577)
Properti Investasi Investment Properties	1.493.375	1.540.756	1.460.599	(5,20)	(80.157)
Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Investment in Associates/Joint Ventures	7.880.576	9.744.556	12.390.846	27,16	2.646.290
Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash in Banks and Time Deposits	94.223	61.158	-	-	(61.158)
Aset Pajak Tangguhan - Bersih Deferred Tax Assets - Net	2.212.070	57.509	47.778	(16,92)	(9.731)
Piutang kepada Ventura Bersama bagian tidak lancar Receivables from Joint Ventures – non-current portion	785.639	797.169	692.002	(13,19)	(105.167)
Piutang Lain-lain bagian tidak lancar Other Receivables - non-current portion	41.955	45.467	44.028	(3,16)	(1.439)
Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar Prepaid Taxes - non-current portion	1.277.427	1.231.545	752.248	(38,92)	(479.297)
Aset Tidak Lancar Lain Other Non-Current Assets	1.170.704	872.473	164.834	(81,11)	(707.639)
Jumlah Aset Tidak Lancar **Total Non-Current Assets**	**145.912.098**	**143.874.478**	**139.703.603**	**(2,90)**	**(4.170.875)**

Grafik Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Chart of Non-Current Assets (Rp million)

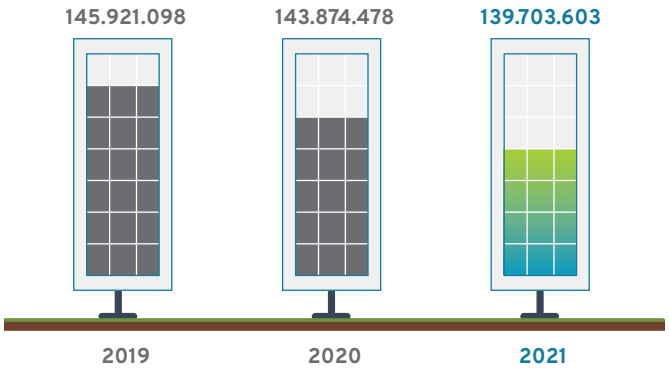

Aset Tetap
Property, Plant, and Equipment

Jumlah Aset Tetap PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp124.15 triliun, menurun 4,15% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp129,52 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh Revaluasi Aset yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Property, Plant, and Equipment were Rp124.15 trillion, decreased by 4.15% compared to 2020 of Rp129.52 trillion. The decrease was due to Assets Revaluation conducted by the Company in 2021.

Tabel Aset Tetap (Rp juta)
Table of Property, Plant, and Equipment (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Tanah dan Hak Atas Tanah Land and Land Rights	17.301.257	17.293.303	17.050.809	(1,40)	(242.494)
Bangunan Umum, Waduk, dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	7.998.406	7.747.954	7.899.199	1,95	151.245
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and Power Plants	95.227.922	93.192.744	87.981.243	(5,59)	(5.211.501)
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	4.839.878	4.733.297	4.287.673	(9,41)	(445.624)
Perlengkapan Pengolahan Data dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	8.385	7.454	5.908	(20,74)	(1.546)
Perlengkapan Umum General Equipment	267.804	255.937	296.976	16,03	41.039
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	50.583	53.321	42.750	(19,83)	(10.571)
Material Cadangan Utama Major Spare Parts	2.523	21.398	20.789	(2,85)	(609)

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	4.067.978	65.333	55.382	(15,23)	(9.951)
Aset Dalam Pembangunan Assets in Development	1.196.702	4.996.372	5.377.245	7,62	380.873
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets not Used in Operations	(5.309)	1.162.041	1.143.429	(1,60)	(18.612)
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment	-	(5.309)	(10.135)	90,90	(4.826)
Jumlah Aset Tetap **Total Property, Plant, and Equipment**	**130.956.129**	**129.523.845**	**124.151.268**	**(4,15)**	**(5.372.577)**

Grafik Aset Tetap (Rp juta)
Chart of Property, Plant, and Equipment (Rp million)

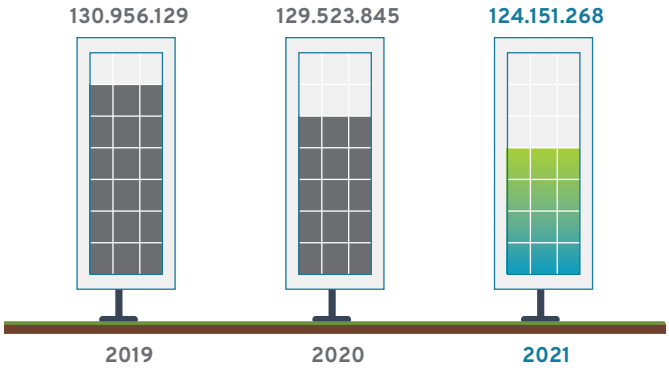

Properti Investasi
Investment Properties

Properti investasi merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Bekasi – Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cipeundeuy – Bandung Barat dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan berjangka waktu dari 32 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited dan PT Bajradaya Sentranusa.

Jumlah Properti Investasi PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp1,46 triliun, menurun 5,20% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,54 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perubahan pada nilai wajar. Grup

Investment properties pertain to pieces of land owned by the Company located in Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Cipeundeuy - West Bandung and Asahan - North Sumatera with legal rights in the form of Building Use Rights for periods between 32 to 40 years until 2032, which are leased to PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited, and PT Bajradaya Sentranusa.

In 2021, PJB's total Investment Properties were Rp1.46 trillion, decreased by 5.20% compared to 2020 of Rp1.54 trillion. The decrease was mainly due to the changes in fair value. The Group also recorded the changes in fair value presented as

juga mencatat perubahan nilai wajar yang disajikan sebagai bagian dari beban lain-lain-bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2021 dan 2020.

part of other expenses-net in the consolidated statements of profit or loss for the year ended December 31, 2021 and 2020.

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama
Investment in Associates/Joint Ventures

Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama PJB pada PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp12,39 triliun, meningkat 27,16% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp9,74 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perolehan laba asosiasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

In 2021, PJB's total Investment in Associates/Joint Ventures was Rp12.39 trillion, increased by 27.16% compared to 2020 of Rp9.74 trillion. The increase was mainly influenced by a better profit acquisition of associates from the previous year.

Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya
Restricted Cash in Banks and Time Deposits

Pada tahun 2021 tidak terdapat saldo atas Jumlah Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya pada PJB sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp61,16 miliar.

In 2021, there was no balance of Total Restricted Cash in Banks and Time Deposits on PJB, while it was Rp61.16 billion in 2020.

Aset Pajak Tangguhan – Bersih
Deferred Tax Assets - Net

Jumlah Aset Pajak Tangguhan – Bersih PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp47,78 miliar, menurun 16,92% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp57,51 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian *impairment* rugi fiskal sehingga posisi pajak tangguhan berada pada posisi liabilitas.

In 2021, PJB's total Deferred Tax Assets – Net was Rp47.78 billion, decreased by 16.92% compared to 2020 of Rp57.51 billion. The decrease was mainly due to an adjustment to fiscal loss impairment, so that the position of deferred tax was in liabilities position.

Piutang kepada Ventura Bersama
Receivables from Joint Ventures

Jumlah Piutang kepada Ventura Bersama PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp692,00 miliar, menurun 13,19% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp797,17 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi ke Nilai jangka pendek sesuai dengan jadwal pembayaran lebih kecil dibandingkan tahun 2020.

In 2021, PJB's total Receivables from the Joint Ventures were Rp692.00 billion, decreased by 13.19% compared to 2020 of Rp797.17 billion. The decrease was mainly due to the Reclassification to Current values in accordance with payment schedules was lower than in 2020.

Piutang Lain-lain
Other Receivables

Jumlah Piutang Lain-lain PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp44,01 miliar, menurun 3,16% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp45,47 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyesuaian nilai wajar piutang jangka panjang yang dilakukan di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Other Receivables were Rp44.01 billion, decreased by 3.16% compared to 2020 of Rp45.47 billion. The decrease was mainly due to an increase in adjustment to non-current receivables fair value conducted in 2021.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp164,83 miliar, menurun 81,11% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp872,47 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi pengakuan pendapatan *reimburse* AMC sumatera di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Other Non-Current Assets were Rp164.83 billion, decreased by 81.11% compared to 2020 of Rp872.47 billion. The decrease was mainly due to the realization of revenue recognition of Sumatera AMC reimburse in 2021.

Liabilitas
Liabilities

Jumlah Liabilitas meningkat menjadi Rp 10,99 triliun
Total Liabilities increase to Rp10.99 trillion

Jumlah Liabilitas PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp10,99 triliun, meningkat 7,31% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp10,25 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan pengakuan SHL (*Shareholder Loan*) kepada pemegang saham dan penyesuaian *impairment* rugi *fiscal* sehingga posisi pajak tangguhan berada pada posisi liabilitas.

In 2021, PJB's total Liabilities was Rp10.99 trillion, increased by 7.31% compared to 2020 of Rp10.25 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of Shareholder Loan recognition to shareholders and adjustment to fiscal loss impairment, so that the position of deferred tax was in liabilities position.

Tabel Liabilitas (Rp juta)
Table of Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.056.333	4.954.830	5.017.427	1,26	62.597
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	4.393.937	5.291.239	5.977.136	12,96	685.897
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**9.450.270**	**10.246.069**	**10.994.563**	**7,31**	**748.494**

Grafik Liabilitas (Rp juta)
Chart of Liabilities (Rp million)

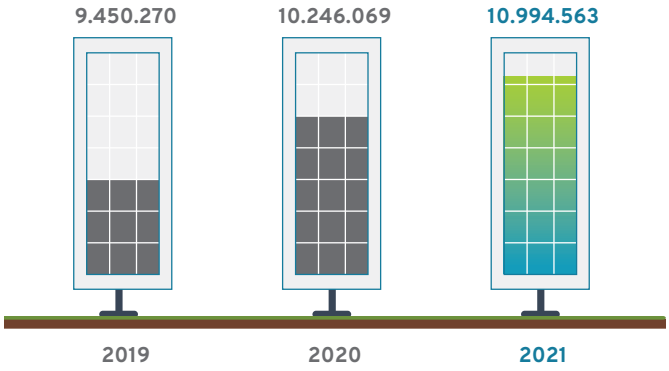

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp5,01 triliun, meningkat 1,26% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp4,95 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya liabilitas imbalan kerja jangka pendek serta utang usaha.

In 2021, PJB's total Current Liabilities was Rp5.01 trillion, increased by 1.26% compared to 2020 of Rp4.95 trillion. The increase was mainly influenced by the increasing short-term employee benefits liabilities and trade payables.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Table of Current Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Utang Usaha Trade Payables	3.431.194	3.048.614	3.261.362	6,98	212.748
Utang Lain-lain Other Payables	870.744	685.538	597040	(12,91)	(88.498)
Utang Pajak Taxes Payable	182.166	174.208	109.124	(37,36)	(65.084)
Biaya Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	75.127	89.391	61.761	(30,91)	(27.630)
Liabilitas Sewa Lease Liabilities		33.414	33.730	0,95	316
Pinjaman dari Pemegang Saham – Jangka Pendek Loan from Shareholders – Short-term	168.838	334.725	233.979	(30,10)	(100.746)
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-term Employee Benefits Liabilities	497.102	588.940	702.192	19,23	113.252
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**5.056.332**	**4.954.828**	**5.017.427**	**1,26**	**62.597**

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Grafik Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Chart of Current Liabilities (Rp million)

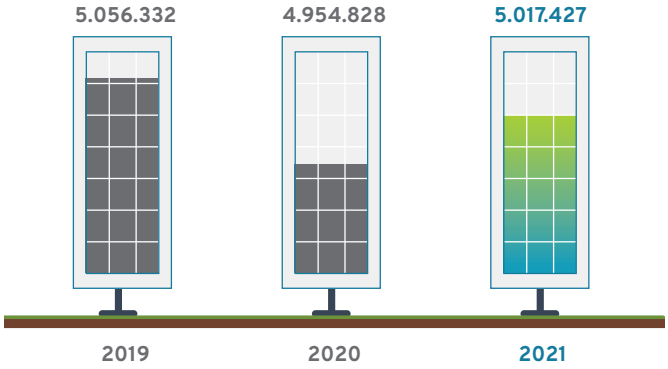

Utang Usaha
Trade Payables

Jumlah Utang Usaha PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp3,26 triliun, meningkat 6,98% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,05 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan pembelian bahan bakar minyak dan gas akibat adanya krisis pasokan batubara di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Trade Payables was Rp3.26 trillion, increased by 6.98% compared to 2020 of Rp3.05 trillion. The increase was mainly influenced by an increase in purchases of fuels oil and gas due to the coal supplies crisis occurred in 2021.

Tabel Utang Usaha (Rp juta)
Table of Trade Payables (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pihak berelasi Related Parties	1.290.009	1.198.456	1.541.586	28,63	343.130
Pihak ketiga Third Parties	2.141.185	1.850.158	1.719.776	(7,05)	(130.382)
Jumlah Utang Usaha Total Trade Payables	**3.431.194**	**3.048.614**	**3.261.362**	**6,98**	**212.748**

Grafik Utang Usaha (Rp juta)
Chart of Trade Payables (Rp million)

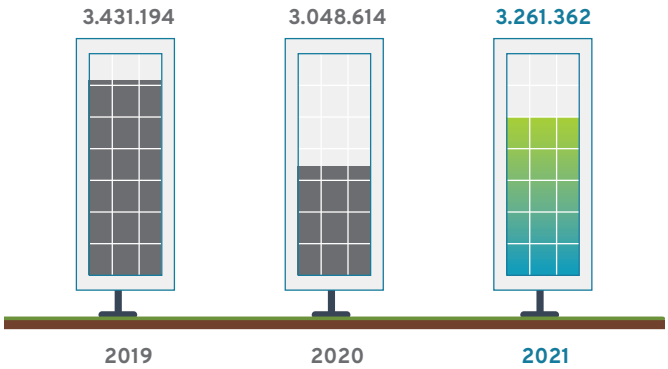

Utang Lain-lain
Other Payables

Jumlah Utang Lain-lain PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp597,04 miliar, menurun 12,91% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp685,54 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi pembayaran hutang akrual 2020 di Anak Perusahaan.

In 2021, PJB's total Other Payables were Rp597.04 billion, decreased by 12.91% compared to 2020 of Rp685.54 billion. The decrease was mainly due to the realization of the 2020 accrual payables payment in its Subsidiary.

Tabel Utang Lain-lain (Rp juta)
Table of Other Payables (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pihak ketiga Third parties	845.507	661.288	561.683	(15,06)	(99.605)
Pihak berelasi Related parties	25.237	24.250	35.357	45,80	11.107
Jumlah Utang Lain-lain Total Other Payables	**870.744**	**685.538**	**597.040**	**(12,91)**	**(88.498)**

Utang Pajak
Taxes Payable

Jumlah Utang Pajak PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp109,12 miliar, menurun 37,17% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp173,67 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai pajak final terutang di anak perusahaan akibat penundaan proyek-proyek investasi di tahun 2021 yang berimplikasi pada penurunan pendapatan EPC yang terkait nilai pajak final terutang.

In 2021, PJB's total Taxes Payable was Rp109.12 billion, decreased by 37.17% compared to 2020 of Rp173.67 billion. The decrease was mainly due to a decrease in final tax payables value in subsidiary due to the delay of investment projects in 2021 which had implications for a decrease in EPC revenue related to final tax payables value.

Tabel Utang Pajak (Rp juta)
Table of Taxes Payable (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pajak Lainnya Other Income Taxes	118.243	69.178	75.409	9,01	6.231
PPN VAT	63.681	103.147	33.313	(67,70)	(69.834)
Lain-lain Others	242	1.346	402	(70,13)	(944)
Jumlah Utang Pajak Total Taxes Payable	**182.166**	**173.671**	**109.124**	**(37,17)**	**(64.547)**

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Beban Masih Harus Dibayar
Accrued Expenses

Jumlah Beban Masih Harus Dibayar PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp61,76 miliar, menurun 44,74% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp89,39 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh telah terealisasinya beberapa biaya kepegawaian di tahun 2021 sehingga mengurangi jumlah akrual biaya kepegawaian.

In 2021, PJB's total Accrued Expenses were Rp61.76 billion, decreased by 44.74% compared to 2020 of Rp89.39 billion. The decrease was mainly due to several personnel expenses had been realized in 2021, so that it reduced the amount of accrued personnel expenses.

Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Pendek
Loan from Shareholders – Short-term

Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Pendek tahun 2021 adalah sebesar Rp233,98 miliar, menurun 30,10% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp334,72 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Reklasifikasi ke Nilai jangka pendek sesuai dengan jadwal pembayaran lebih kecil dibandingkan tahun 2020.

In 2021, Loan from Shareholders – Short-term was Rp233.98 billion, decreased by 30.10% compared to 2020 of Rp334.72 billion. The decrease was mainly due to the Reclassification to Current values in accordance with payment schedules was lower than in 2020.

Liabilitas Sewa
Lease Liabilities

Jumlah Liabilitas Sewa tahun 2021 adalah sebesar Rp33,73 miliar meningkat 0,95% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp33,41 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan kontrak sewa baru di tahun 2021.

In 2021, total Lease Liabilities was Rp33.73 billion, increased by 0.95% compared to 2020 of Rp33.41 billion. The increase was mainly influenced by the addition of new rental contracts in 2021.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek
Employee Benefits Liabilities – Short-term

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek tahun 2021 adalah sebesar Rp702,19 miliar, meningkat 19,23% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp588,94 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh nilai pengakuan akrual kepegawaian 2021 yang belum terealisasi dan penyesuaian nilai imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris akibat perubahan asumsi.

In 2021, total Employee Benefits Liabilities – Short-term was Rp702.19 billion, increased by 19.23% compared to 2020 of Rp588.94 billion. The increase was mainly influenced by the 2021 accrual recognition value for personnel that had not been realized and adjustment to the maturity employee benefits value by the actuary due to changes in assumpation.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp5,97 triliun, meningkat 12,96% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 5,29 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan pengakuan *Shareholder Loan* kepada pemegang saham dan penyesuaian *impairment* rugi fiskal sehingga posisi pajak tangguhan berada pada posisi liabilitas.

In 2021, PJB's total Non-Current Liabilities was Rp5.97 trillion, increased by 12.96% compared to 2020 of Rp5.29 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of Shareholder Loan recognition to shareholders and adjustment to fiscal loss impairment, so that the position of deferred tax was in liabilities position.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Table of Non-Current Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih Deferred Tax Liabilities - Net	44.538	446.617	1.072.316	140,10	625.699
Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Panjang Loan from Shareholders – Long-term	1.500.148	2.163.361	2.183.226	0,92	19.865
Liabilitas Sewa Lease Liabilities		34.246	26.274	(23,28)	(7.972)
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	2.680.414	2.647.016	2.695.320	1,82	48.304
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	**4.225.100**	**5.291.239**	**5.977.136**	**12,96**	**685.897**

Grafik Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Chart of Non-Current Liabilities (Rp million)

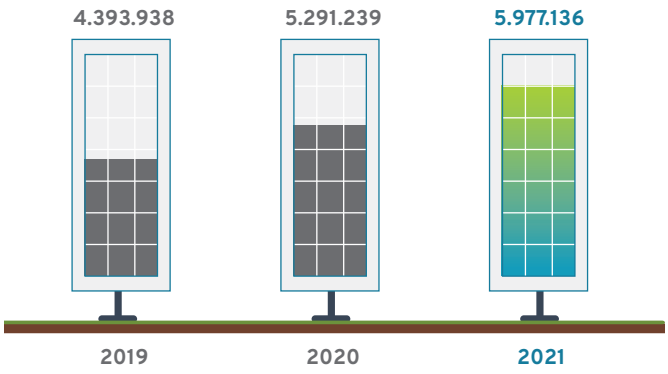

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih
Deferred Tax Liabilities - Net

Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp1,07 triliun, meningkat 140,10% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp 446,62 miliar. Peningkatan/ terutama dipengaruhi oleh penyesuaian *impairment* rugi fiskal sehingga posisi pajak tangguhan berada pada posisi liabilitas.

In 2021, PJB's total Deferred Tax Liabilities – Net was Rp1.07 trillion, increased by 140.10% compared to 2020 of Rp446.62 billion. The increase was mainly influenced by an adjustment to fiscal loss impairment, so that the position of deferred tax was in liabilities position.

Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Panjang
Loan from Shareholders – Long-term

Jumlah Liabilitas kepada Pemegang Saham PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp2,18 triliun, meningkat 0,92% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp2,16 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan *progress Add On* Muara Tawar sehingga meningkatkan jumlah pinjaman yang diteruskan oleh pemegang saham di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Liabilities to Shareholders was Rp2.18 trillion, increased by 0.92% compared to 2020 of Rp2.16 trillion. The increase was mainly influenced by the addition of Add On Muara Tawar progress, so that it increased the amount of loans forwarded by shareholders in 2021.

Liabilitas Imbalan Kerja
Employee Benefits Liabilities

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja tahun 2021 adalah sebesar Rp2,70 triliun, meningkat 1,82% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2,65 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian perhitungan nilai liabilitas sesuai dengan perhitungan aktuaris akibat penyesuaian asumsi di tahun 2021.

In 2021, total Employee Benefits Liabilities was Rp2.70 trillion, increased by 1.82% compared to 2020 of Rp2.65 trillion. The increase was mainly influenced by an adjustment to liabilities value calculation in accordance with the calculation of actuary due to an adjustment to assumptions in 2021.

Ekuitas
Equity

> **Jumlah Ekuitas menurun menjadi Rp161,17 triliun**
> Total Equity decrease to Rp161.17 trillion

Jumlah Ekuitas PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp161,17 triliun, menurun 2,51% dibandingkan 2020 adalah sebesar Rp165,31 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi laba usaha yang lebih rendah dibanding laba usaha pada tahun 2020.

In 2021, PJB's total Equity was Rp161.17 trillion, decreased by 2.51% compared to 2020 of Rp165.31 trillion. The decrease was mainly due to a lower operating income realization compared to operating income in 2020.

Tabel Ekuitas (Rp juta)
Table of Equity (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Modal Saham - Nilai Nominal Rp500 (Nilai Penuh) Per Saham Capital Stock – Par Value of Rp500 (Full Amount) per Share					
Modal Dasar - 24.000 juta Saham Authorized – 24,000 million Shares					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 6.000 juta Saham Subscribed and Fully Paid-up – 6,000 million Shares	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	2.915.205	2.915.205	2.915.205	-	-
Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali Difference in Transaction with Non-Controlling Interest	(62.725)	(62.725)	(62.725)	-	-
Saldo Laba: Retained Earnings:					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	1.429.875	1.429.875	1.429.875	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	30.754.064	31.915.518	30.064.155	(5,80)	(1.851.363)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	125.560.989	125.895.480	123.579.572	(1,84)	(2.315.908)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Equity Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	163.597.408	165.093.353	160.926.082	(2,52)	(4.167.271)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	175.687	221.598	243.183	9,74	21.585
Jumlah Ekuitas Total Equity	**163.773.095**	**165.314.951**	**161.169.265**	**(2,51)**	**(4.145.686)**

Grafik Ekuitas (Rp juta)
Chart of Equity (Rp million)

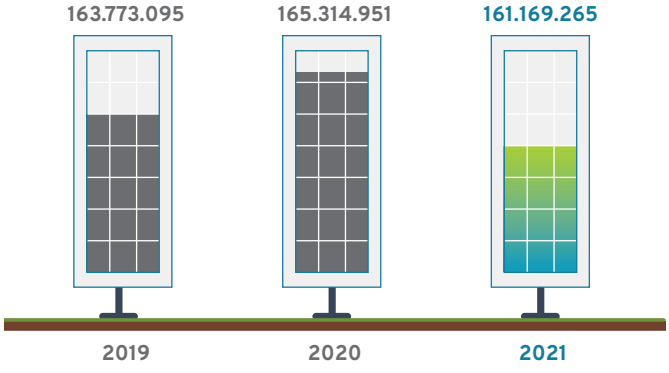

ANALISIS KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Subscribed and Fully Paid-up

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Under the Law of Limited Liability Company, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of total subscribed and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of this reserve. On December 31, 2021 and 2020, the Company had not yet established its general reserve in accordance with the Law.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh merupakan saham biasa yang memberikan hak untuk membawa satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp3,00 triliun, sebesar jumlah yang sama seperti pada tahun 2020.

Subscribed and Fully Paid-in Capital is a common stock granting the rights to bring one vote per share and participates in dividends. The amount of PJB's Subscribed and Fully Paid-in Capital in 2021 was Rp3.00 trillion, the same amount as in 2020.

Tambahan Modal Disetor
Additional Paid-in Capital

Tambahan Modal Disetor merupakan nilai pengalihan aset tetap, termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 (berdasarkan Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 1311/533/DIRUT/2001 tanggal 19 Maret 2001) dan material pemeliharaan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham. Jumlah Tambahan Modal Disetor tahun 2021 adalah sebesar Rp2,92 triliun, sebesar jumlah yang sama seperti pada tahun 2020.

Additional Paid-in Capital is the value of the transfer of property, plant and equipment, including rehabilitation funds for Gresik CFPP Unit 1 and 2 (according to the President Director Decree of PT PLN (Persero) No. 1311/533/DIRUT/2001 dated March 19, 2001) and maintenance materials from 1996 to 2000 received from PT PLN (Persero) as the shareholder. Total Additional Paid-in Capital in 2021 was 2.92 trillion, the same amount as in 2020.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Equity Attributable to Owners of the Parent

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp160,93 triliun, menurun 2,52% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp165,09 triliun meningkat. Penurunanan ini dikarenakan adanya realisasi laba usaha yang lebih rendah dibanding laba usaha pada tahun 2020.

In 2021, PJB's total Equity Attributable to Owners of the Parent was Rp160.93 trillion, decreased by 2.52% compared to 2020 of Rp165.09 trillion. This decrease was due to a lower operating income realization compared to operating income in 2020.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali
Equity Attributable to Non-Controlling Interests

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp243,18 miliar, meningkat 9,74% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp221,60 miliar. Peningkatan ini dikarenakan adanya penyesuaian pengakuan saldo kepentingan non pengendali sesuai dengan porsi kepemilikan di tahun 2021.

In 2021, PJB's total Equity Attributable to Non-Controlling Interests was Rp243.18 billion, increased by 9.74% compared to 2020 of Rp221.60 billion. This increase was due to an adjustment to the non-controlling interests balance recognition in accordance with ownership portion in 2021.

ANALISIS ARUS KAS
CASH FLOWS ANALYSIS

> **Jumlah Kas dan Setara Kas meningkat menjadi Rp7,43 triliun**
> Total Cash and Cash Equivalents increase to Rp7.43 trillion

Jumlah Kas dan Setara Kas PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp7,43 triliun, meningkat 109,16% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,51 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi.

In 2021, PJB's total Cash and Cash Equivalents were Rp7.43 trillion, increased by 109.16% compared to 2020 of Rp3.51 trillion. The increase was mainly influenced by the increase in net cash provided by operating activities.

Tabel Arus Kas (Rp juta)
Table of Cash Flows (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	1.195.765	2.177.126	4.323.208	98,57	2.146.082
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(2.523.516)	(1.371.476)	(334.356)	(75,62)	1.037.120
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	1.480.894	851.017	(167.500)	(119,68)	(1.018.517)

ANALISIS ARUS KAS
CASH FLOWS ANALYSIS

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas **Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents**	**153.143**	**1.656.667**	**3.821.352**	**130,67**	**2.164.685**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun **Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year**	**1.688.004**	**1.838.858**	**3.511.113**	**90,94**	**1.672.255**
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Changes in Foreign Currency	(2.289)	15.588	11.503	(26,21)	(4.085)
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun **Cash and Cash Equivalents at the End of the Year**	**1.838.858**	**3.511.113**	**7.343.968**	**109,16**	**3.832.855**

Grafik Jumlah Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Chart of Total Cash and Cash Equivalents (Rp million)

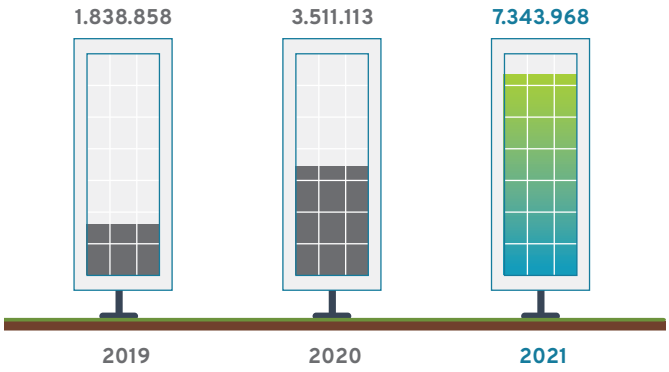

Arus Kas Aktivitas Operasi
Cash Flows of Operating Activities

Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp4,32 triliun, meningkat 98,57% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp2,18 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh Penerimaan restitusi Pajak Penambahan Nilai dan penerimaan pembayaran dari Pelanggan.

In 2021, PJB's total Net Cash Provided by Operating Activities was Rp4.32 trillion, increased by 98.57% compared to 2020 of Rp2.18 trillion. The increase was mainly influenced by Cash receipt for Value Added Tax refund and Payment receipts from the customers.

Tabel Arus Kas Aktivitas Operasi (Rp juta)
Table of Cash Flows of Operating Activities (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	12.743.949	11.667.301	15.415.195	32,12	3.747.894
Pembayaran Kas kepada Pemasok, Karyawan, dan Lainnya Cash Paid to Suppliers, Employees, and Others	(11.430.192)	(9.610.081)	(11.533.375)	20,01	(1.923.294)
Penerimaan Bunga Interest Received	115.096	80.181	106.441	32,75	26.260
Pembayaran surat keterangan pajak kurang bayar Payment of tax assessment letter for underpayment	-	(162.946)	(136.172)	(16,43)	26.774
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan Cash receipt for corporate income tax refund	-	252.192	227.944	(9,61)	(24.248)
Penerimaan restitusi Pajak Penambahan Nilai Cash receipt for Value Added Taxes refund	-	287.731	581.587	102,13	293.856
Pembayaran PPh Badan & PPh Final Payment of Corporate Income Tax & Final Income Tax	(233.088)	(337.252)	(338.412)	0,34	(1.160)
Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi **Total Net Cash Provided by Operating Activities**	**1.195.765**	**2.177.126**	**4.323.208**	**98,57**	**2.146.082**

Arus Kas Aktivitas Investasi
Cash Flows of Investing Activities

Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp334,35 miliar, menurun 75,62% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp1,37 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Penjadwalan Kembali (*Reschedule*) beberapa pekerjaan konstruksi proyek *Add On* Muara Tawar.

In 2021, PJB's total Net Cash Used in Investing Activities was Rp334.35 billion, decreased by 75.62% compared to 2020 of Rp1.37 trillion. The decrease was mainly due to the Reschedule of several construction works for the project of Add On Muara Tawar

ANALISIS ARUS KAS
CASH FLOWS ANALYSIS

Tabel Arus Kas Aktivitas Investasi (Rp juta)
Table of Cash Flows of Investing Activities (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Dividends Received from Associates and Joint Ventures	216.678	315.410	307.069	(2,64)	(8.341)
Penempatan Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Additional Investments in Associates and Joint Ventures	(26.291)	(23.778)	(92.598)	289,43	(68.820)
Penempatan Deposito Placement of Time Deposits	(14.096)	(31.962)	-	-	(31.962)
Penempatan Pinjaman kepada Ventura Bersama Placement of Loan to Joint Ventures	5.582	-	(9.632)	-	(9.632)
Penarikan Deposito Berjangka Withdrawal of Time Deposits	203.390	-	554.372	-	554.372
Penarikan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Withdrawal of Restricted Time Deposits	(25.926)	-	15.737		15.737
Penempatan Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Placement of Restricted Cash in Banks and Time Deposits	-	-	(15.400)	-	(15.400)
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Property, Plant, and Equipment	(2.882.853)	(1.591.389)	(1.093.904)	(31,26)	497.485
Penambahan Aset Tidak Lancar Lainnya Addition of Other Non-Current Assets	-	(39.757)	-	-	-
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi **Total Net Cash Used in Investing Activities**	**(2.523.516)**	**(1.371.476)**	**(334.356)**	**(75,62)**	**1.037.120**

Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Cash Flows of Financing Activities

Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan PJB tahun 2021 adalah sebesar Rp 167,50 miliar, menurun 119,68% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp851,02 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Penerimaan pinjaman pemegang saham.

In 2021, PJB's total Net Cash Provided by Financing Activities was Rp167.50 billion, decreased by 119.68% compared to 2020 of Rp851.02 billion. The decrease was mainly due to the decreasing Proceeds of loan from shareholder.

Tabel Arus Kas Aktivitas Pendanaan (Rp juta)
Table of Cash Flows of Financing Activities (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan pinjaman pemegang saham Proceeds of loan from shareholder	1.482.492	1.048.955	227.467	(78,31)	(821.488)
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham Payments of loan from shareholder	-	(165.340)	(334.297)	102,19	(168.957)
Pembayaran liabilitas sewa Payments of lease liabilities	-	(30.709)	(57.991)	88,84	(27.282)
Pembayaran Dividen oleh Entitas Anak Kepada Kepentingan Non-Pengendali Payments of Dividend by Subsidiaries to Non-Controlling Interests	(1.598)	(1.889)	(2.679)	41,82	(790)
Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan **Total Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities**	**1.480.894**	**851.017**	**(167.500)**	**(119,68)**	**(1.018.517)**

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
ANALYSIS OF SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Kemampuan Membayar Utang
Solvency

Tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Berikut adalah rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati:

The ability rate of the Company in fulfilling its obligations can be measured by using solvency and liquidity ratio. The following is details of contractual maturity date for financial liabilities with the agreed payment:

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
ANALYSIS OF SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Tabel Rincian Jatuh Tempo Liabilitas (Rp juta)
Table of Liabilities Maturity Details (Rp million)

Uraian Description	Jatuh Tempo Maturity				
	Satu tahun One Year	Lebih dari 1 tahun namun kurang dari 3 tahun More than 1 year but less than 3 years	Lebih dari 3 tahun namun kurang dari 5 tahun More than 3 years but less than 5 years	Lebih dari 5 tahun More than 5 years	Jumlah Total
Utang usaha Trade payables	3.261.362	-	-	-	3.261.362
Liabilitas Sewa Lease liabilities	54.450	52.926	-	-	107.376
Utang Lain-lain Other Payables	597.040	-	-	-	597.040
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	61.761	-	-	-	61.761
Pinjaman dari Pemegang Saham Loan from Shareholder	260.875	512.733	500.602	1.313.970	258.180
Jumlah Total	**4.235.488**	**565.659**	**500.602**	**1.313.970**	**6.615.719**

Rasio Solvabilitas
Solvency Ratio

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat dilihat melalui beberapa rasio keuangan diantaranya adalah *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Solvency ratio is ratio measuring the Company ability to pay all the payables, both short-term and long-term. Solvency ratio can be seen through several financial ratios, including Debt to Assets Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER).

Tabel Rasio Sovabilitas (%)
Table of Solvency Ratio (%)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease
DAR	5,46	5,84	6,39	9,35
DER	5,77	6,20	6,82	10,03

Debt to Assets Ratio (DAR)
Debt to Assets Ratio (DAR)

Nilai DAR PJB tahun 2021 adalah 6,39% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu 5,84%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai liabilitas kepada pemegang saham atas pendanaan proyek PLTGU *Add-On* Muara Tawar, peningkatan pembelian bahan bakar minyak dan gas akibat adanya krisis pasokan batubara di tahun 2021 serta peningkatan nilai liabilitas pajak tangguhan.

In 2021, PJB's DAR value was 6.39% or higher compared to 2020 of 5.84%. The increase was mainly caused by an increase in liabilities value to shareholders for financing the Add-On project of Muara Tawar CCPP, an increase in fuels oil and gas purchases due to coal supplies crisis in 2021, as well as increase in deferred tax liabilities values.

Grafik DAR (%)
Chart of DAR (%)

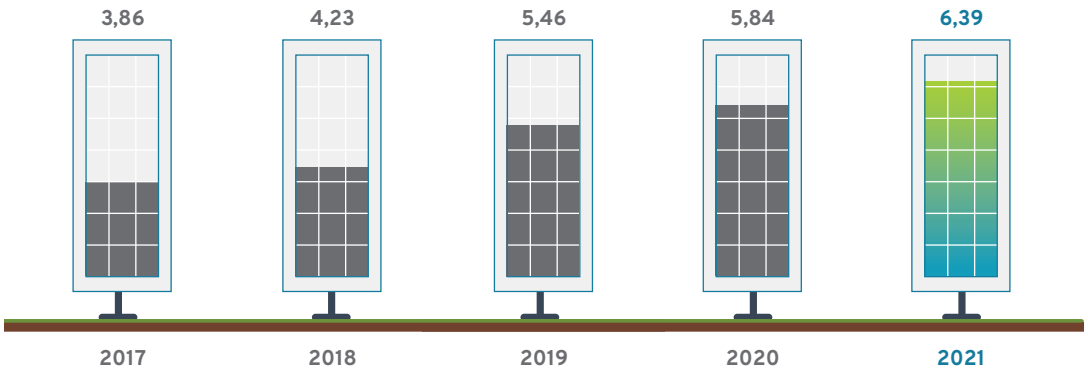

Debt to Equity Ratio (DER)
Debt to Equity Ratio (DER)

Nilai DER PJB tahun 2021 adalah 6,82% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu 6,20%. Sama halnya dengan rasio DAR, peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai liabilitas kepada pemegang saham atas pendanaan proyek PLTGU *Add-On* Muara Tawar serta peningkatan nilai liabilitas pajak tangguhan.

In 2021, PJB's DER value was 6.82% or higher compared to 2020 which was 6.20%. The same as DAR ratio, the increase was caused by the increase in liabilities value to the shareholders for financing the Add-On project of Muara Tawar CCPP as well as increase in the deferred tax liabilities value.

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
ANALYSIS OF SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Grafik DER (%)
Chart of DER (%)

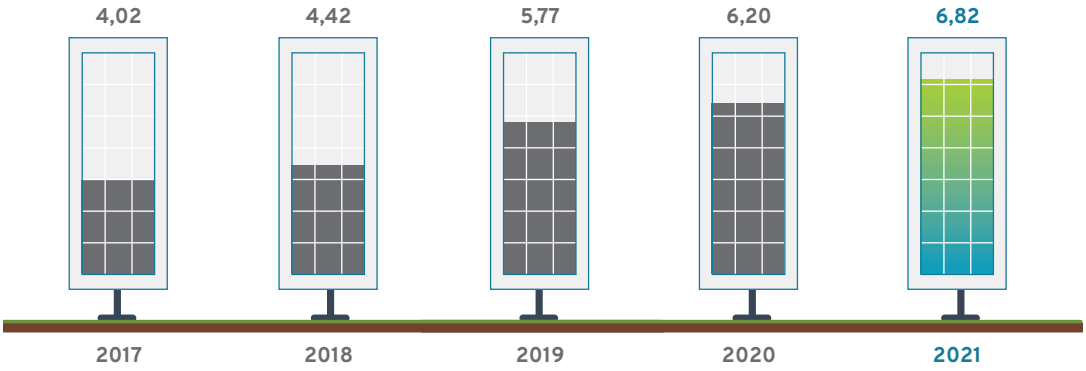

Namun secara keseluruhan rasio DAR dan DER masih sangat kecil dan tidak mengindikasikan adanya risiko *insolvency* dikarenakan perusahaan memiliki nilai ekuitas yang lebih tinggi dari nilai liabilitasnya.

However, the overall DAR and DER ratios were very small and not indicated insolvency risk since the Company has a higher equity value than its liabilities value.

Rasio Likuiditas
Liquidity Ratio

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Rasio yang digunakan untuk menilai rasio likuiditas diantaranya adalah *cash ratio, quick ratio,* dan *current ratio.* Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka mengindikasikan bahwa PJB mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo.

Liquidity ratio is used to measure the Company ability in fulfilling all short-term liabilities that will mature. The ratios used to assess liquidity ratio are cash ratio, quick ratio, and current ratio. The higher the ratios value, the higher of PJB chance to fulfill its obligations that will mature.

Tabel Rasio Likuiditas (%)
Table of Liquidity Ratio (%)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan (%) Increase/ Decrease (%)
Cash Ratio	36,37	70,86	152,15	114,72
Quick Ratio	529,15	608,30	589,71	(3.06)
Current Ratio	565,40	639,51	646,95	1,16

Cash Ratio

Cash Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar. Nilai *Cash Ratio* PJB tahun 2021 adalah 152,15% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu 70,86%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kas untuk pencadangan kebutuhan operasional dan investasi pada tahun 2021.

Cash ratio is used to measure the Company ability in paying obligations required to be fulfilled immediately with current assets. In 2021, PJB's Cash Ratio value was 152.15% or higher compared to 2020 of 70.86%. The increase was mainly influenced by the increasing cash to reserve operational and investment needs in 2021.

Grafik *Cash Ratio* (%)
Chart of Cash Ratio (%)

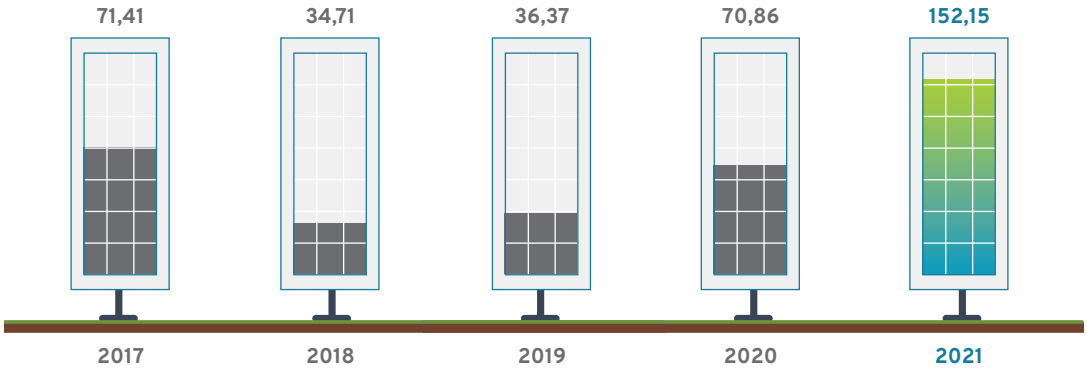

Quick Ratio

Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan Aset Lancar di luar persediaan, karena persediaan dianggap tidak mudah digunakan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Nilai *Quick Ratio* PJB tahun 2021 adalah 589,71% yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yaitu 608,30%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh *offset* piutang PT PJB terhadap dividen kepada PT PLN (Persero) pada Tahun 2021.

Quick ratio is used to measure the Company ability in paying liabilities required to be immediately fulfilled with Current Assets apart from inventories, since it is considered not easy to be used to fulfill the liabilities that will mature. In 2021, PJB's Quick Ratio value was 589.71% or lower compared to 2020 of 608.30%. The decrease was mainly due to offset receivables of PT PJB towards dividend to PT PLN (Persero) in 2021.

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
ANALYSIS OF SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Grafik *Quick Ratio* (%)
Chart of Quick Ratio (%)

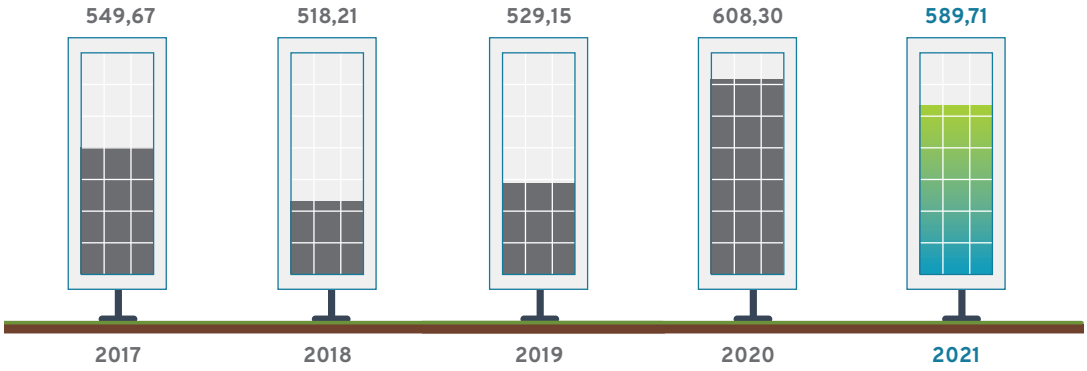

Current Ratio

Current Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo dengan Aset Lancar yang dimilikinya. Nilai *Current Ratio* PJB tahun 2021 adalah 646,95% yaitu sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yaitu 639,51%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh *offset* piutang PT PJB terhadap dividen kepada PT PLN (Persero) pada Tahun 2021.

Current ratio is used for measuring the Company ability in fulfilling obligations that will mature with its Current Assets. In 2021, PJB's Current Ratio value was 646.95% or slightly lower compared to 2020 of 639.51%. The decrease was mainly due to offset receivables of PT PJB towards dividend to PT PLN (Persero) in 2021.

Grafik *Current Ratio* (%)
Chart of Current Ratio (%)

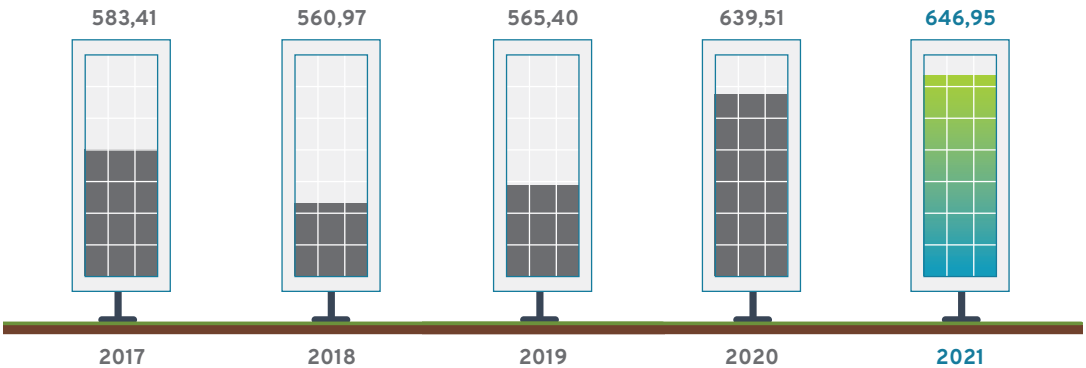

Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility

Kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung nilai *Collection Period*. Nilai *Collection Period* semakin kecil maka semakin baik, artinya kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat. Nilai *Collection Period* PJB tahun 2021 adalah 292 hari, yaitu lebih cepat dibandingkan tahun 2020 yaitu 303 hari. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh *offset* piutang PT PJB terhadap dividen kepada PT PLN (Persero) di Tahun 2021.

The Company ability in collecting receivables can be identified by calculating the Collection Period value. The smaller Collection Period value, the better it is, which means the Company ability in collecting receivables is increasingly faster. In 2021, PJB's Collection Period value was 292 days or faster compared to 2020 of 303 days. It was mainly influenced by offset receivables of PT PJB towards dividend to PT PLN (Persero) in 2021.

Grafik *Collection Period* (hari)
Chart of Collection Period (day)

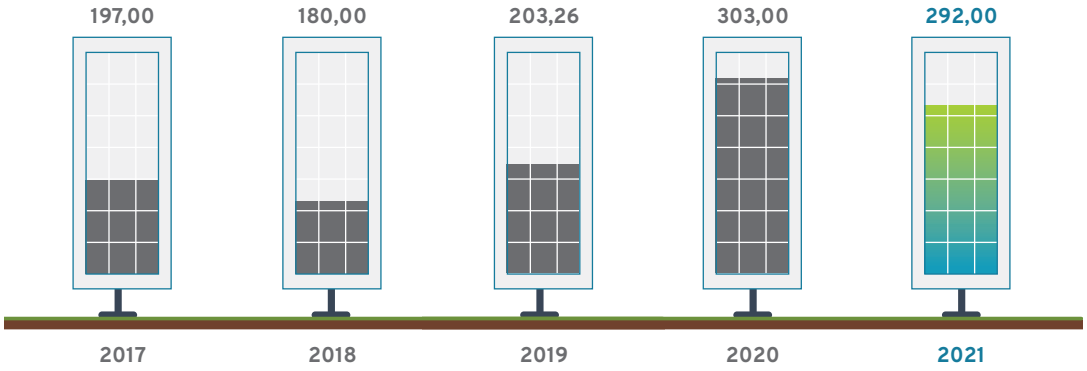

Rasio Keuangan Lainnya
Other Financial Ratios

Selain rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta tingkat kolektibilitas piutang, berikut diuraikan rasio penting lainnya yang relevan di PJB untuk mengukur kinerja keuangan.

Apart from ratio to determine the Company ability in fulfilling short-term and long-term liabilities as well as receivables collectibility, the following is described other important relevant ratios in PJB to measure financial performance.

Rasio Profitabilitas
Profitability Ratio

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas Perusahaan dapat dilihat dari *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Profitability ratio is ratio used to measure the Company ability in generating profits. The Company's profitability is reflected from Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE).

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
ANALYSIS OF SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Tabel Rasio Profitabilitas (%)
Table of Profitability Ratio (%)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan (%) Increase/ Decrease (%)
ROA	3,84	4,36	3,38	(22,00)
ROE	4,06	4,63	3,61	(22,46)

Return on Asset (ROA)
Return on Asset (ROA)

ROA digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas setiap nilai aset yang ada pada perusahaan. Nilai ROA PJB tahun 2021 adalah sebesar 3,38% lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yaitu 4,36%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian *Margin* Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tahun 2021 menjadi sebesar Rp1,6 triliun dari *Margin* tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun.

ROA is used to measure the acquisition of income available for the Company owners over every value of the existing assets in the Company. In 2021, PJB's ROA value was 3.38% or lower compared to 2020 of 4.36%. The decrease was mainly due to adjustment to Power Purchase Agreement Margin in 2021 into Rp1.6 trillion from Margin in 2020 of Rp5.1 trillion.

Grafik ROA (%)
Chart of ROA (%)

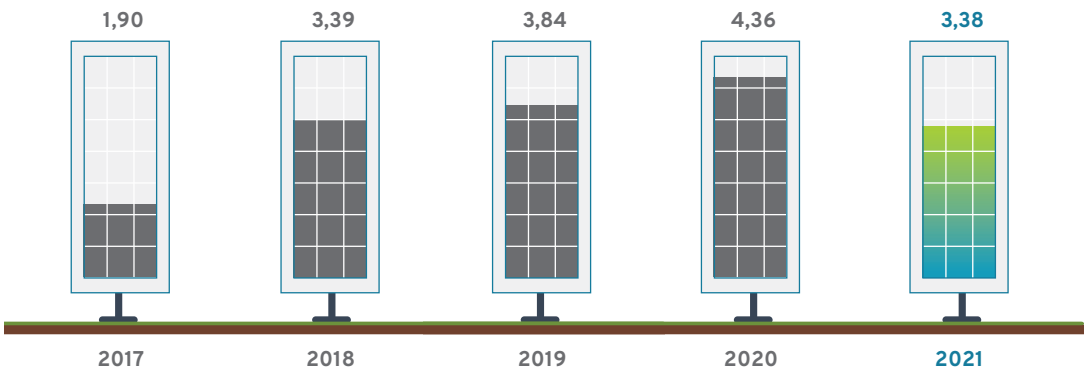

Return on Equity (ROE)
Return on Equity (ROE)

ROE digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Nilai ROE PJB tahun 2021 adalah 3,61%, yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yaitu 4,63%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian Margin Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tahun 2021 menjadi sebesar Rp1,6 triliun dari *Margin* tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun.

ROE is used to measure the acquisition of income available for the Company owners over capital invested in the Company. In 2021, PJB's ROE value was 3.61% or lower compared to 2020 of 4.63%. The decrease was mainly due to an adjustment to Power Purchase Agreement Margin in 2021 into Rp1.6 trillion from Margin in 2020 of Rp5.1 trillion.

Grafik ROE (%)
Chart of ROE (%)

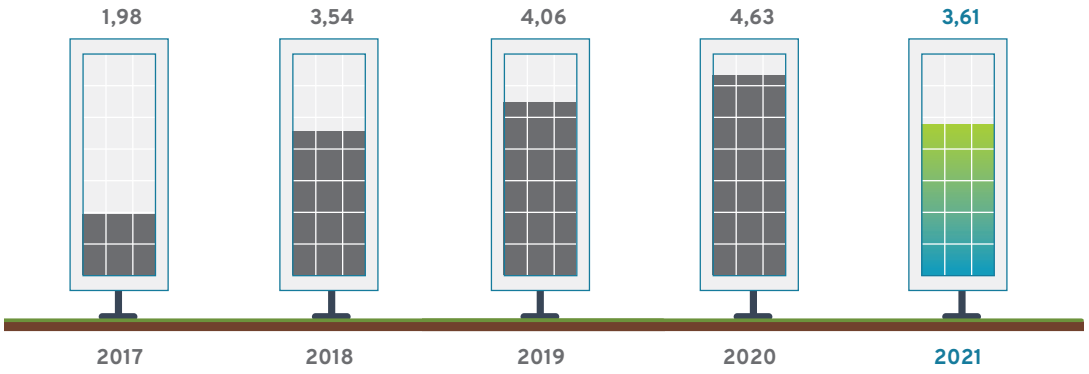

Rasio Aktivitas
Activity Ratio

Rasio aktivitas digunakan untuk memberikan gambaran aktivitas operasional yang dilakukan Perusahaan baik yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. *Inventory Turn Over* (ITO) dan *Total Asset Turn Over* (TATO) merupakan bagian rasio aktivitas.

Activity ratio is used to provide overview of operational activities performed by the Company which is related to sales, purchases, and other activities. Inventory Turn Over (ITO) and Total Asset Turn Over (TATO) are part of the activity ratio.

Tabel Rasio Aktivitas
Table of Activity Ratio

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan (%) Increase/ Decrease (%)
ITO (hari) ITO (days)	17	15	17	13,33
TATO (kali) TATO (times)	0,23	0,17	0,17	-

Inventory Turn Over (ITO)

ITO menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari persediaan dan tendensi untuk adanya *overstock*. Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan.

ITO signifies the ability of funds embedded in the inventory to turn over in a particular period, or the liquidity of inventories, and the tendency for the overstock. Inventory turnover measures the efficiency of inventories management to assess operational efficiency, which illustrates how well Management to control the existing capital in inventories.

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
ANALYSIS OF SOLVENCY, RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Nilai ITO PJB tahun 2021 adalah 17 yaitu lebih lambat dibandingkan tahun 2020 yaitu 15 hari. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya krisis pasokan batubara di tahun 2021.

In 2021, PJB's ITO value was 17 days or slower compared to 2020 of 15 days. The decrease was mainly due to coal supplies crisis in 2021.

Grafik ITO (hari)
Chart of ITO (days)

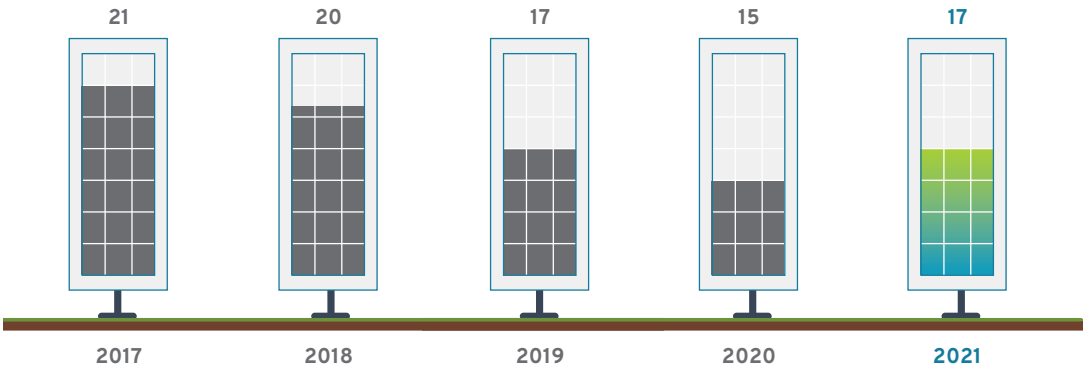

Total Asset Turn Over (TATO)

TATO merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aset diukur dari penjualan. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan penjualan.

Total Assets Turn Over is the ratio describing asset turnover measured from sales. Therefore, the greater the ratio, the faster the asset turns over and make profits, as well as signifies the use of all assets in making sales is increasingly efficient.

Nilai TATO PJB tahun 2021 sama dengan nilai TATO di tahun 2020 yaitu 0,17 kali. Hal tersebut terjadi karena peningkatan penjualan tenaga listrik pada Pembangkit Berbahan Bakar Minyak dan Gas menggantikan *derating* PLTU Batubara di Tahun 2021 meskipun terdapat penyesuaian *Margin* Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tahun 2021 menjadi sebesar Rp1,6 triliun dari *Margin* tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun.

In 2021, PJB's TATO value was the same as TATO value in 2020, namely 0.17 times. It was due to increase in sales of electricity on Oil and Gas-Fueled Power Plants replacing derating Coal CFPP in 2021, despite there was an adjustment to Power Purchase Agreement Margin in 2021 into Rp1.6 trillion from Margin in 2020 of Rp5.1 trillion.

Grafik TATO (kali)
Chart of TATO (times)

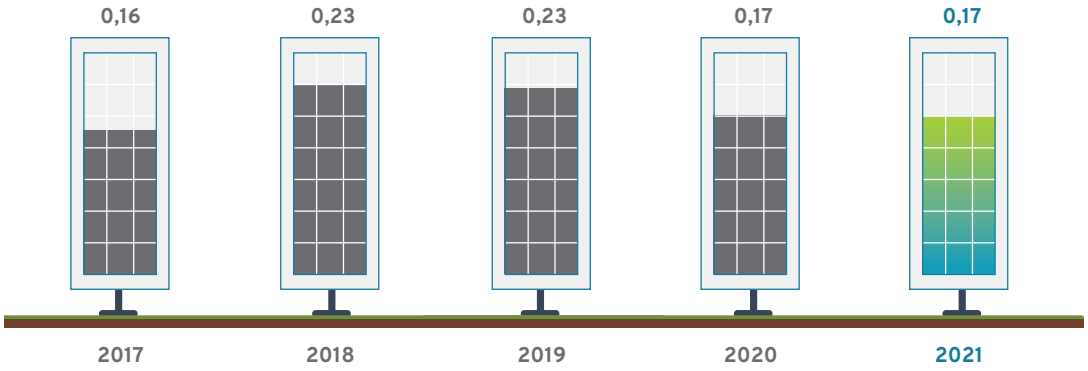

STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

Struktur modal adalah perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri dari saham disetor dan laba ditahan. PJB senantiasa mengelola struktur modal untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham.

Capital structure is comparison between liabilities and equity. Liabilities consist of long-term and short-term, while equity consists of paid-in shares and retained earnings. PJB consistently manages its capital structure to support business sustainability and optimize returns for the Shareholders.

Struktur Modal tahun 2021 didominasi oleh Ekuitas yaitu sebesar Rp161,16 triliun atau 93,61%, sedangkan Liabilitas sebesar Rp10,99 triliun, atau 6,39%.

In 2021, Capital Structure was dominated by Equity of Rp161.16 trillion or 93.61%, while Liabilities were Rp10.99 trillion or 6.39%.

Tabel Struktur Modal (Rp juta)
Table of Capital Structure (Rp million)

Uraian Description	2019		2020		2021	
Liabilitas Liabilities	9.450.270	5,46	10.246.069	5,84	10.994.563	6,39
Ekuitas Equity	163.773.095	94,54	165.314.951	94,16	161.169.265	93,61
Aset Assets	**173.223.365**	**100,00**	**175.561.020**	**100,00**	**172.163.828**	**100,00**

Tabel Struktur Modal (Rp juta)
Chart of Capital Structure (%)

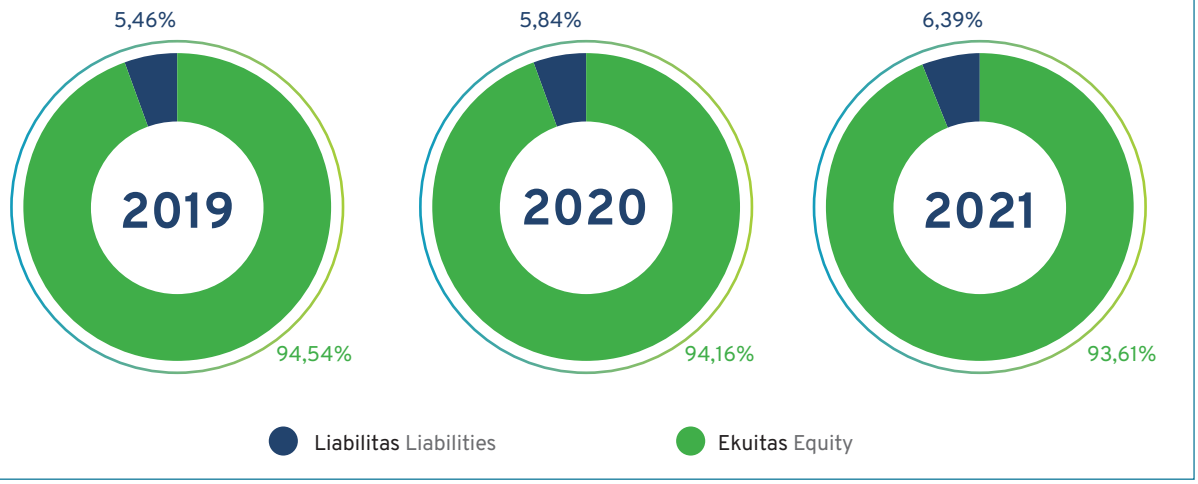

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Management Policy on Capital Structure

Manajemen mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa perusahaan akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batas rasio kecukupan modal. Kebijakan struktur modal tidak hanya ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko dan *control*, tetapi juga ditentukan oleh nilai, tujuan, preferensi, dan keinginan manajemen sebagai input pada keputusan struktur modal, yang memiliki implikasi pada kinerja keuangan suatu Perusahaan. Susunan struktur modal yang baik dapat menajdi langkah preventif bagi Perusahaan dari kapitalisasi berlebihan atau kekurangan kapitalisasi.

The management manages capital risk to ensure that the Company will be able to maintain business continuity and to ensure compliance with capital adequacy ratio. Capital structure policy is not only determined by internal and external factors that influence risk and control, but is also determined by values, purposes, preferences, and desire of Management as input on capital structure decision, which has implications on financial performance of the Company. Good composition of capital structure can be preventive measures for the Company from over-capitalization or under-capitalization.

Manajemen Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Struktur modal yang sehat dapat melindungi Perusahaan dari risiko finansial melalui komposisi utang dan ekuitas secara bijaksana. Struktur modal dapat menunjukkan proporsi hutang dan ekuitas yang bisa menghasilkan modal rata-rata tertimbang terendah untuk Perusahaan. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Company Management periodically reviews the capital structure. The Management considers the cost of capital and related risks. The sound capital structure can protect the Company from financial risks through the composition of payables and equity wisely. Capital structure may signify the proportion of payables and equity which may generate the lowest weighted average capital for the Company. The Company strives to minimize capital costs in order to maximize the Company values. Furthermore, the Company policy of seeking funding will always consider financial risks that may arise in the future.

Dasar Pemilihan Kebijakan Struktur Modal
Selection Basis of Capital Structure Policy

Perusahaan menetapkan kebijakan terkait struktur modal dengan mempertimbangkan:

1. Biaya permodalan dan risiko yang berhubungan;
2. Minimalisir biaya modal untuk memaksimalkan nilai Perusahaan
3. Memitigasi risiko dimasa depan dengan memperhitungkan risiko keuangan dalam pendanaan
4. Peningkatan kesiapan modal kerja untuk operasional dan investasi
5. Alternatif skema pembiayaan dari perbankan dan non perbankan

The Company determined policies related to capital structure by considering the following:

1. Related capital costs and risks;
2. Minimizing capital costs to maximize the Company values;
3. Mitigating future risks by calculating financial risks in funding;
4. Improving the working capital readiness for operational and investment;
5. Alternative for financing scheme from banking and non-banking;

STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

6. Menjalin kemitraan strategis dengan penyedia modal kerja, pabrikan, perusahaan jasa konsultasi, perusahaan EPC lain, serta Sub-Kontaktor dan/atau *Vendor* penunjang kegiatan EPC lainnya
7. Efisiensi biaya operasional Perusahaan
8. Restrukturisasi *Share Holder Loan* termasuk *review cost structure*
9. Pengelolaan aset untuk mendapatkan nilai tambah bagi Perusahaan

6. Establishing strategic partnership with the working capital providers, manufacturers, consulting service companies, other EPC companies, as well as Sub-Contractors and/or Vendors supporting other EPC activities;
7. Operational costs efficiency of the Company;
8. Share Holder Loan (SHL) restructuring, including reviewing the cost structure;
9. Assets management to obtain added values for the Company.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE INVESTMENT

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar
Fuel Procurement Agreement

Nama Pihak dan Tujuan Pengadaan Bahan Bakar
Name of the Party and Purposes of Fuel Procurement

Pada tahun 2021, PJB memiliki ikatan material untuk pengadaan bahan bakar dengan beberapa pemasok diantaranya perjanjian pengadaan batubara, perjanjian pengadaan gas alam, dan perjanjian pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Tujuan dari adanya perikatan ini agar Perusahaan memperoleh bahan bakar yang bermutu tinggi tanpa mengesampingkan efisiensi biaya modal. Sehingga dapat menunjang dengan baik keandalan kegiatan pembangkitan tenaga listrik. Berikut adalah bentuk bentuk perikatan pengadaan bahan bakar tersebut:

In 2021, PJB established material commitment for fuel procurements with several suppliers, including the coal, natural gas, and fuel procurement agreements. These commitments are purposed to obtain a high-quality fuel without compromising the efficiency of capital cost, so as to be able to support the reliability of power plant activities properly. The following is the forms of commitment for fuel procurements:

Perjanjian Pengadaan Batubara
Coal Procurement Agreement

Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Contract Number	Satuan Unit	Jumlah Total	Periode Period
PT PLN Batubara	013.PJ/061/PJB-PLNBB/V/2020	Metrik ton Metric ton	Sesuai kebutuhan Based on needs	Maret 2020 - Desember 2040 March 2020 - December 2040
PT Kaltim Prima Coal	070.PJ/061/2018	Metrik ton Metric ton	3.120.000	Januari 2019 - Desember 2021 January 2019 - December 2021
PT Arutmin Indonesia	071.PJ/061/2018	Metrik ton Metric ton	2.400.000	Januari 2019 - Desember 2021 January 2019 - December 2021
PT Solusi Sumber Energi	013.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	100.000	Februari 2021 - Maret 2021* February 2021 - March 2021*
PT Dua Kota Laut	015.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	50.000	April 2021*
PT Antang Gunung Meratus	016.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	50.000	April 2021*
PT Usaha Baratama Jesindo	023.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	30.000	April 2021 - Mei 2021* April 2021 - May 2021*
PT Antang Gunung Meratus	025.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	40.000	Juni 2021* June 2021*
PT Solusi Sumber Energi	026.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	350.000	Juni 2021 - Desember 2021* June 2021 - December 2021*
PT Rekamitra Cipta Tambang	035.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	22.500	Juli 2021* July 2021
PT Era Karya Mulya	036.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	15.000	Juli 2021* July 2021
PT Global Energi Lestari	037.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	30.000	Juli 2021* July 2021
PT Maharani Bara Perkasa	038.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	67.500	Agustus 2021 - Oktober 2021* August 2021 - October 2021*
PT Global Energi Lestari	039.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	121.000	Agustus 2021 - Desember 2021* August 2021 - October 2021*
PT Solusi Sumber Energi	040.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	15.000	Agustus 2021* August 2021*
PT Global Energi Lestari	043.PJ/061/2021	Metrik ton Metric ton	200.000	Agustus 2021 - Desember 2021* August 2021 - October 2021*

*Berlaku sampai kuota terpenuhi
*Valid until the quota is fulfilled

STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

Pada tanggal 31 Desember 2021, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk dan atas nama Menteri ESDM menerbitkan surat No. B-1605/MB.05/DJB.B/2021 (Surat B-1605) yang antara lain mengatur bahwa seluruh pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK Kelanjutan Kontrak/Perjanjian Operasi, dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yaitu:

1. Dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022.
2. Wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PLN dan *Independent Power Producer* (IPP).
3. Dalam hal sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan/atau telah dimuat di kapal, harus segera dikirim ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") milik Grup PLN dan IPP yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PLN. Dalam Surat B-1605 juga terdapat informasi bahwa larangan ekspor batubara akan dievaluasi dan ditinjau berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga batubara PLN dan IPP.

On December 31, 2021, Directorate General of Mineral and Coal for and on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources issued Letter No. B-1605/MB.05/DJB.B/2021 (Letter B-1605), among others, regulating that all holders of PKP2B, IUP, Production Operation IUPK, Contract Continuity/ Operation Agreement IUPK, as well as Coal Transportation and Sale License holder, namely:

1. Prohibited from selling coals abroad since January 1 up to 31, 2022.
2. Required to supply all of coal production to fulfill electricity needs for the interest of public according to domestic market obligation (DMO) and/or assignment from the Government to the Company and/or contract with PLN and Independent Power Producer (IPP).
3. In the event that coals are at the loading port and/or have been transported in the ship, it must be sent immediately to the Steam Power Plant ("SPP") of PLN Group and IPP with execution by PLN immediately. There is also an information in the Letter B-1605 that the coal export ban will be evaluated and reviewed according to the realization of coal supplies for the coal power plant of PLN and IPP.

Pada tanggal 19 Januari 2022, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 yang mengatur tentang pedoman pengenaan sanksi administratif, larangan ekspor batubara, pengenaan denda dan pemberian dana kompensasi untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

On January 19, 2022, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued the Ministerial Decree No. 13.K/HK.012/ MEM.B/2022 that regulates guideline for imposition of administrative sanctions, coal export ban, imposition of fine, and provision of compensation funds to fulfill the domestic coals needs.

Harga dasar batubara di tempat penyerahan *stockpile* unit berkisar antara Rp466.237 (nilai penuh) sampai dengan Rp921.941 (nilai penuh) per ton, yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* (AFT), *Hardgrove Grindability Index* (HGI) dan ukuran batubara.

Basic price of coal at the delivery point of the stockpile unit ranges from Rp466,237 (full amount) to Rp921,941 (full amount) per ton, which is adjusted to the value of calories, ash, sulfur, water, Ash Fusion Temperature (AFT), and Hardgrove Grindability Index (HGI), as well as coal size.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang AS$, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri.

According to Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 07 of 2017 on the Procedure for Determining Benchmark Sales of Metal and Coal Minerals, all the basic contract prices above will be reviewed periodically every 3 (three) months to be adjusted to Rupiah exchange rate against US$ currency, and the base price of HSD industrial oil.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

In connection with the coal trading agreement, suppliers are required to assure guarantees.

Perjanjian Pengadaan Gas Alam
Natural Gas Procurement Agreement

Sektor Sector	Pemasok Supplier	Nomor/Tanggal Kontrak Number/Date of Contract	Periode Period	Satuan Unit	Jumlah Total
Gresik	PT Pertamina Hulu Energi WMO	Kesepakatan Bersama Perjanjian Jual Beli Gas Joint Agreement of Gas Sale and Purchase Agreement	2002 - 2023	TBTU	837.692
Gresik	PGN SAKA (SIPL)	Amandemen GSA 8 Nov 2011 GSA Amendment on November 8, 20211	2011 – 2026	BCF	330.20
Gresik	Kangean Energy Indonesia	462.PJ AMDII/041/DIR/2010 beserta Amandemen 462.PJ AMDII/041/DIR/2010 and the Amendments	2008 – 2028	TBTU	371.00
Gresik	Santos (Madura Offshore) Peluang	Amandemen 0380-1.PJ/EPI.01.02/B01000000/2020 Amendment to 0380-1.PJ/EPI.01.02/B01000000/2020	2020 – 2021	TBTU	120.80
Gresik	PT Petrogas Jatim Utama	061.PJ/061/2013 beserta Adendum dan kesepakatannya 061.PJ/061/2013 along with the Addendum and Agreement	2016 – 2023	BCF TBTU	41.59 7.30
Muara Karang	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	0198-2.PJ/EPI.03.02/DITDAN/2017	2017 – 2022	TBTU	185.87
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara	0364.Pj/EPI.01.02/B01000000/2020	2019 – 2021*	TBTU	18.06
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara	0364.Pj/EPI.01.02/B01000000/2020	2019 – 2021*	TBTU	21.78
Muara Tawar	PT Pertamina EP	0103-2.PJ/EPI.01.02/DIR/2019	2018 – 2024	BBTU	29,244
Muara Karang & Muara Tawar	PT Nusantara Regas	PLN.273.PJ/041/DIR/2012	2012 – 2022	Kargo Cargo	191
Muara Karang & Muara Tawar	PT Tangguh PSC	0237.PJ/EPI.01.02/DIRUT/2016	2012 – 2034	Kargo Cargo	732
Muara Karang & Muara Tawar	PT Pertamina (Persero)	0592.PJ/EPI.01.02/DITDAN-2/2017	2017 – 2022	BBTU	sesuai kebutuhan according to the needs

*Dalam proses perpanjangan
*In extension process

Harga realisasi pembelian gas pipa pada titik penyerahan di tahun 2021 berkisar antara AS$2,38 sampai dengan AS$12,55 dan Rp33.960 sampai dengan Rp179.076 *per Million British Thermal Unit* (MMBTU)/*Million Standard Cubic Feet* (MSCF).

In 2021, the realization price of piped gas purchase at the delivery point ranges from US$2.38 to US$12.55 and Rp33,960 up to Rp179,076 per Million British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MSCF).

STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar Minyak
Fuel Procurement Agreement

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No.071. PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum pada tanggal 16 Mei 2007, dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain:

1. Penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mid Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah PPN untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.
2. Harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun.
3. Jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%.
4. Efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN paling lambat tanggal 31 Agustus 2007.
5. Utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun.
6. Perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
7. Sucofindo ditunjuk sebagai *surveyor* independen.

   Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Adendum VIII tertanggal 17 Desember 2021, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

   a. Selama masa negosiasi, formula harga baru untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, menggunakan formula harga sementara yang telah disepakati pada adendum untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
   b. Bersamaan dengan hal tersebut, akan disepakati formula harga baru untuk periode terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

      Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO selama tahun 2021 berdasarkan harga tersebut.

The Company through PLN and Pertamina made Fuel Sell and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 on October 8, 2001. This agreement amended on May 16, 2007 where PLN and Pertamina agreed the following:

1. The use of monthly fuel price determined by Pertamina for the period of January 1 to April 30, 2007, and the fuel price of 109,5% from Mid Oil Platts Singapore (MOPS) are added by Value Added Tax for the period from May 1, 2007 to December 31, 2007.
2. The fuel price after December 31, 2007, will be determined by both parties annually.
3. The terms of payment and penalty charges on late payment with interests rate of monthly Certificate of Bank Indonesia are added by 1.3%.
4. Effective starting on May 1, 2007, the unpaid balance of payments for the fuel purchases up to April 30, 2007, will be subjected interest with interests rate per year of Certificate of Bank Indonesia and will be added by 1.3% until settled by issuing PLN obligation not later than August 31, 2007.
5. Maximum payable to Pertamina, including obligations that will be issued, amounting to Rp18 trillion (full amount).
6. This agreement is valid for 5 years from January 1, 2007, to December 31, 2011.
7. PT Sucofindo (Persero) is appointed as an independent surveyor.

   This agreement has been changed several times. According to Addendum VIII dated December 17, 2021, the agreement on the sale and purchase price for fuel (HSD and MFO) since January 1, 2021 up to December 31, 2023, between Pertamina and the Company are as follows:

   a. During the negotiation period, the new price formula for the period of January 1, 2021 up to December 31, 2021, it used temporary price formula agreed in the addendum for the period of January 1, 2018 up to December 31, 2020.
   b. Along with that, new price formula will be agreed for the period as of January 1, 2022 up to December 31, 2023.

      The Company has recorded HSD and MFO purchase during 2021 based on those prices.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp833.450 juta dan Rp219.841 juta yang disajikan sebagai utang usaha dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

As of December 31, 2021, and 2020, debt from fuel purchase to Pertamina amounted to Rp833,450 million and Rp219,841 million respectively, which are recorded as trade payables in the consolidated statements of financial position.

RKAP Biaya Bahan Bakar
ABOP on Fuel Cost

RKAP untuk biaya bahan bakar tahun 2021 sebesar Rp12.805.737 juta.

In 2021, ABOP on fuel costs amounted to Rp12,805,737 million.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi Pengadaan Bahan Bakar
Denominated Currency for Fuel Procurement

Sampai dengan 31 Desember 2021, perincian ikatan material untuk pengadaan bahan bakar berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

As of December 31, 2021, denomination of material commitments for procurement of fuel is Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Pengadaan Bahan Bakar
Risk Mitigation Plan on the Fuel Procurement Currency

Untuk menghindari risiko terkait beberapa perikatan pengadaan bahan bakar dengan para pemasok termasuk didalamnya risiko keuangan dan risiko pasar (risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko (mitigasi risiko). Dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh dari ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

To prevent risks related to several agreements of fuel procurement with suppliers, including financial risk and market risk (foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and issues policies to manage each risk (risk mitigation). By implementing risk management policy with the purpose to minimize influence from the uncertain financial risk to the Company financial performance.

Perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing. Sehingga Perusahaan terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Perusahaan untuk mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima tas setiap kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan.

The Company has foreign currency exposures arising from transactions with the customers and the suppliers which are denominated in foreign exchange, therefore the Company is exposed to the exchange rate fluctuations. The Company's policy is to manage foreign currency exposure within acceptable limits of every relevant increase and decrease in Rupiah to foreign currency.

STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang AS$, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri. Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

According to Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 07 of 2017 on the Procedure for Determining the Benchmark Sales of Metal and Coal Minerals, all the basic contract prices above will be reviewed periodically every 3 (three) months to be adjusted to Rupiah exchange rate against US$ currency, and the base price of HSD industrial oil. In connection with the coal trading agreement, suppliers are required to assure guarantees.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA)
Power Purchase Agreement (PPA)

Perusahaan memiliki sejumlah PPA dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

The Company has various PPA with PLN. Under those agreements, PLN pays the Company for electricity supply at an amount determined based on payment formula. Such payment formula includes the costs of capacity, energy, operations and maintenance components depending on the level of energy supplied as well as other variables as stipulated in the agreement.

Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan
Procurement and Maintenance Agreement

Nama Pihak dan Tujuan Pengadaan dan Pemeliharaan
Name of the Party as well as Purposes of Procurement and Maintenance

Pada tanggal 7 Maret 2016, Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit PLTU dan PLTGU di Jawa. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Aset (AMC) yang terdiri atas:

i. Pengelolaan Aset PLTGU Blok II Muara Karang antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Barat pada tanggal 10 Februari 2020.
ii. Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang dan PLTGU Blok V Muara Tawar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Tengah pada tanggal 10 Februari 2020.
iii. Pengelolaan Aset PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-Awar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur dan Bali pada tanggal 10 Februari 2020.

On March 7, 2016, the Company and PLN signed Asset Management Services Master Agreement of CFPP and CCPP in Java. This agreement was followed-up by Asset Management Contract (AMC) consisting of the following:

i. Asset Management of Block II Muara Karang CCPP between the Company and West Java Region of PLN on February 10, 2020.
ii. Asset Management of Indramayu CFPP, Rembang CFPP and Block V Muara Tawar CCPP between the Company and Central Java Region of PLN on February 10, 2020.
iii. Asset Management of Paiton 9 CFPP, Pacitan CFPP and Tanjung Awar- Awar CFPP between the Company and East Java and Bali Region of PLN on February 10, 2020.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pengelolaan Aset antara PLN dan PJB tentang Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTGU Muara Karang Blok 2 dan PLTGU Muara Tawar Blok 5 pada tanggal 14 September 2021.

The agreement has been changed several times with the latest change on Amendment and Restatement of Asset Management Contract between PLN and PJB concerning Asset Management of Indramayu CFPP, Rembang CFPP, Paiton 9 CFPP, Pacitan CFPP, Tanjung Awar-Awar CFPP, Block 2 Muara Karang CCPP, and Block 5 Muara Tawar CCPP on September 14, 2021.

Sehubungan dengan adanya pengalihan Fungsi Aset Manager dan Aset Operator Pembangkit dari PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (PLN UIKSBU) dan PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN UIW BABEL) kepada Perusahaan. Pada tanggal 26 Maret 2018, Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit di Sumatera. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan AMC yang terdiri atas:

i. Pengelolaan Aset Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 11 April 2018. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum V, pada tanggal 27 November 2020.
ii. Pengelolaan Aset PLTU Air Anyir Bangka dan PLTU Belitung antara Perusahaan dan PLN UIW BABEL pada tanggal 11 April 2018. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum II, pada tanggal 26 November 2021.
iii. Pengelolaan Aset PLTU Tenayan antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 3 Desember 2018. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum IV, pada tanggal 26 November 2021.
iv. AMC PLTU Tembilahan antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 18 Oktober 2018. Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan amandemen pada tanggal 27 Juli 2020.

In connection to the transfer of the Power Plant Function of Asset Manager and Asset Operator from Main Generation Unit of Northern Sumatera PLN (PLN UIKSBU) and Main Generation Unit of Bangka Belitung PLN (PLN UIW BABEL) to the Company. On March 26, 2018, the Company and PLN signed Master Agreement on Sumatera Asset Management. This agreement is followed up with Asset Management Contract consisting of the following:

i. Asset Management of Arun Gas Engine Power Plant (GEPP) between the Company and PLN UIKSBU on April 11, 2018. The agreement has been changed several times with the latest change was Amendment V, on November 27, 2020.
ii. Asset Management of Air Anyir Bangka CFPP and Suge Belitung CFPP between the Company and PLN UIW BABEL on April 11, 2018. The agreement has been changed several times with the latest change was Addendum II, on November 26, 2021.
iii. Asset Management of Tenayan CFPP between the Company and PLN UIKSBU on December 3, 2018. The agreement has been changed several times with the latest change was Addendum IV, on November 26, 2021.
iv. AMC of Tembilahan CFPP between the Company and PLN UIKSBU on October 18, 2018. In 2020, the Company made amendment on July 27, 2020.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perusahaan sebagai Aset Manager dan Aset Operator Pembangkit oleh PLN Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Regional Jawa Bagian Tengah (JBT), dan Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JBTBN). Pada tanggal 29 November 2019, Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan AMC yang terdiri atas:

In connection to the establishment of the Company as Asset Manager and Asset Operator Operators by West Java Regional (JBB) PLN, Central Java Regional (JBT) PLN, and East Java Regional PLN, Bali PLN and Nusa Tenggara (JBTBN) PLN, the Company and PLN signed Plant Assets Management Asset Master Agreement on November 29, 2019. This agreement is followed up with the Asset Management Contract consisting of the following:

STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

- AMC CNG *Plant* Gresik antara Perusahaan dan PLN JBTBN tanggal 11 Desember 2019. Perusahaan menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian AMC PLTGU Muara Karang Peaker dan CNG *Plant* Gresik antara PLN dan PJB pada tanggal 14 September 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan PJB ditetapkan sebagai pemilik aset.

Untuk pengembangan bisnis di Luar Jawa, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan, diantaranya:

- Perjanjian induk PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW), tanggal 17 Juli 2014. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum VI, pada tanggal 25 Maret 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2021 atau berlakunya kontrak OM baru.
- Perjanjian induk PLTU Pulang Pisau (2x60 MW), tanggal 10 Februari 2015. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum X, pada tanggal 25 Maret 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2021.
- Perjanjian induk PLTU Ketapang (2x10 MW), tanggal 11 Maret 2016. Perjanjian ini ditingkatkan menjadi tahap *Performance Based* pada tanggal 29 Mei 2020. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Mei 2025.
- Perjanjian induk PLTU Amurang (2x25 MW), tanggal 30 Oktober 2013. Perjanjian ini ditingkatkan menjadi tahap *Performance Based* kontrak 5 tahun pada tanggal 16 Januari 2017. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum III, pada tanggal 25 Februari 2022. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2022.
- Perjanjian induk PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tanggal 19 September 2013. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum XIII, pada tanggal 30 Juni 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2021.
- Perjanjian induk PLTU Kendari Unit #3 (1x10 MW) tanggal 13 April 2015. Perusahaan melakukan amandemen kesatu PLTU Kendari Unit #3 tahap *Supporting Based* pada tanggal 24 April 2018.
- Perjanjian induk PLTU Anggrek tanggal 12 September 2018. Perjanjian ini ditingkatkan setelah *Commercial Operation Date* (COD) sampai dengan *Final Acceptance Certificate* (FAC) pada tanggal 30 September 2019.

- AMC CNG Plant Gresik between the Company and JBTBN PLN on December 11, 2019. The Company signed the Amendment and Restatement of AMC Agreement for Muara Karang Peaker CCPP and CNG Plant Gresik between PLN and PJB on September 14, 2021. The settlemet period of contract is until PJB being determined as the asset owner.

For business development outside Java, the Company has signed Operation and Maintenance Services Agreement, including:

- Master Agreement of Teluk Balikpapan CFPP (2x110 MW), dated July 17, 2014. The agreement has been changed several times with the latest change was Addendum VI, on March 25, 2021. Contract settlement period is until December 31, 2021 or until the validity of new OM contract.
- Master Agreement of Pulang Pisau CFPP (2x60 MW), dated February 10, 2015. The agreement has been changed several times with the latest change was Addendum X, on March 25, 2021. Contract settlement period is until December 31, 2021.
- Master Agreement of Ketapang CFPP (2x10 MW), dated March 11, 2016. This agreement was improved to the Performance Based phase on May 29, 2020. Contract settlement period is until May 31, 2025.
- Master Agreement of Amurang CFPP (2x25 MW), dated October 30, 2013. This agreement was improved to the Performance Based 5 years contract phase on January 16, 2017. The agreement has changed several times with the latest change was Addendum III, on February 25, 2022. Contract settlement period is until December 31, 2022.
- Master Agreement of Nii Tanasa Kendari CFPP (2x10 MW), dated September 19, 2013. The agreement has been changed several times with the latest change was Addendum XIII, on June 30, 2021. Contract settlement period is until December 31, 2021.
- Master Agreement of Unit #3 Kendari CFPP (1x10 MW) on April 13, 2015. The Company made the first amendment for Unit #3 Kendari CFPP Supporting Based phase on April 24, 2018.
- Master Agreement of Anggrek CFPP on September 12, 2018. This agreement was improved after Commercial Operation Date (COD) until Final Acceptance Certificate (FAC) on September 30, 2019.

- Perjanjian induk PLTU Ampana tanggal 12 September 2018. Perjanjian ini ditingkatkan setelah COD sampai dengan FAC tanggal 1 November 2019.
- Perjanjian induk PLTU Bolok (2x16,5 MW) dan PLTU Ropa (2x7 MW) pada tanggal 29 November 2019. Perjanjian ini ditingkatkan menjadi AMC pada tanggal 20 Desember 2019.
- Perjanjian induk PLTU Tidore (2x7 MW) tahap *Supporting Based* tanggal 12 Januari 2015. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum IV, pada tanggal 28 Desember 2020. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2022.
- Perjanjian induk PLTG Duri pada tanggal 18 Agustus 2011. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum IX, pada tanggal 23 Desember 2020. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2021.
- Perjanjian jasa operasi dan pemeliharaan PLTU Sambelia (2x50 MW) tahap *Supporting Based* pada tanggal 29 November 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 30 November 2022.
- Perjanjian induk PLTA Wonorejo tahap *Performance Based* pada tanggal 1 November 2010. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum VI, pada tanggal 30 Desember 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2024.
- Perjanjian induk PLTA Ampel Gading tahap *Performance Based* pada tanggal 1 November 2010. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Adendum V, pada tanggal 30 Desember 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2024.
- Perjanjian induk PLTD Bawean tahap *Performance Based* pada tanggal 1 Oktober 2019. Perjanjian tersebut terakhir diubah yaitu Adendum II, pada tanggal 23 Juni 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2023.

- Master Agreement of Ampana CFPP on September 12, 2018. This agreement was improved after COD up to FAC on November 1, 2019.
- Master Agreement of Bolok CFPP (2x16.5 MW) and Ropa CFPP (2x7 MW) on November 29, 2019. This agreement was improved to AMC on December 20, 2019.
- Master Agreement of Tidore CFPP (2x7 MW) Supporting Based phase dated January 12, 2015. The agreement has been changed several times with the latest change was Addendum IV, on December 28, 2020. Contract settlement period is until December 31, 2022.
- Master Agreement of Duri GTPP on August 18, 2011. The agreement has been changed several times with the latest change was Addendum IX, on December 23, 2020. Contract settlement period is until December 31, 2021.
- Operation and maintenance services agreement of Sambelia CFPP (2x50 MW) Supporting Based phase on November 29, 2021. Contract settlement period is until November 30, 2022.
- Master Agreement of Wonorejo HPP Performance Based phase on November 1, 2010. The agreement has been changed several times with the latest change was Addendum VI, on December 30, 2021. Contract settlement period is until December 31, 2024.
- Master Agreement of Ampel Gading HPP Performance Based phase on November 1, 2010. The agreement has been changed several times with the latest change was Addendum V, on December 30, 2021. Contract settlement period is until December 31, 2024.
- Master Agreement of Bawean DPP Performance Based phase on October 1, 2019. The agreement was recently changed into Addendum II on June 23, 2021. Contract settlement period is until December 31, 2023.

RKAP Pemeliharaan
ABOP on Maintenance

- RKAP pemeliharaan eksisiting tahun 2021 sebesar Rp1.061.239 juta.
- RKAP pemeliharaan Jasa O&M Jawa tahun 2021 sebesar Rp1.660.442 juta.
- RKAP pemeliharaan Jasa O&M Luar Jawa tahun 2021 sebesar Rp1.862.616 juta.

- ABOP on the existing maintenance in 2021 was Rp1,061,239 million.
- ABOP on the O&M Services maintenance in 2021 was Rp1,660,442 million.
- ABOP on the Outside Java O&M Services maintenance in 2021 was Rp1,862,616 million.

STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

Mata Uang yang Menjadi Denominasi Pengadaan dan Pemeliharaan
Denominated Currency for Procurement and Maintenance

Sampai dengan 31 Desember 2021, perincian ikatan material untuk pengadaan dan pemeliharaan berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

As of December 31, 2021, denomination of material commitments for procurement and maintenance is Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Pengadaan dan Pemeliharaan
Currency Risk Mitigation Plan on the Procurement and Maintenance

Dalam hal perikatan pengadaan dan pemeliharaan, PJB tidak menggunakan mata uang asing sehingga tidak dilakukan langkah perlindungan risiko dari posisi mata uang asing terkait berupa mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima atas setiap kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan.

In the procurement and maintenance agreements, PJB does not use foreign currencies; therefore, there is no risk mitigation taken from the position of related foreign currencies in the form of managing foreign currency exposure within acceptable limits of every relevant increase and decrease in Rupiah to foreign currency.

Perolehan Barang Modal
Acquisition of Capital Expenditures

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahan telah menandatangani perjanjian novasi dengan PLN, Konsorsium Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd dan PT Hutama Karya (Persero) sehubungan dengan Perjanjian Kontrak Nomor 0125.PJ/DAN.02.01/DIR/2017, tertanggal 29 Maret 2017 untuk proyek add on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4.

On December 19, 2017, the Company has signed novation agreement with PLN, Consortium of Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd, as well as PT Hutama Karya (Persero) in connection to the Contract Agreement No. 0125. PJ/DAN.02.01/DIR/2017, on March 29, 2017, for the add-on project of Block 2, 3, and 4 Muara Tawar CCPP.

RKAP Barang Modal
ABOP on Capital Expenditures

RKAP untuk *Add On* Muara Tawar Blok 2,3,4 tahun 2021 sebesar Rp1.079,4 juta.

In 2021, ABOP on the Add-On Project of Block 2,3,4 Muara Tawar was Rp1,079.4 million.

Mata Uang yang Menjadi Barang Modal
Denominated Currency for Capital Expenditure

Sampai dengan 31 Desember 2021, perincian ikatan material untuk barang berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

As of December 31, 2021, denomination of material commitments for capital expenditure is Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang atas Barang Modal
Currency Risk Mitigation Plan on Capital Expenditure

Dalam hal perikatan perjanjian atas barang modal, PJB tidak menggunakan mata uang asing sehingga tidak dilakukan langkah perlindungan risiko dari posisi mata uang asing terkait berupa mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima atas setiap kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan.

In terms of material commitments on capital expenditure, PJB does not use foreign currencies; therefore, there is no risk mitigation taken from the position of the related foreign currencies in the form of managing foreign currency exposure within acceptable limits of every relevant increase and decrease in Rupiah to foreign currency.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

PJB melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan umum, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi dan distribusi, perlengkapan umum dan kendaraan bermotor. Selain itu juga terdapat investasi pada penguatan pembangkitan dan pengembangan usaha pembangkitan. Secara umum, tujuan investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan adalah untuk mendukung kinerja operasional Perusahaan sehingga pembangkit semakin efisien dan andal serta memperlancar proses bisnis.

PJB invests capital goods in the form of property, plant, and equipment, including land, buildings, reservoirs, and infrastructure, installations and power plants, transmissions and distribution equipment, general equipment, and motor vehicles. Additionally, there is also investment in power plants strengthening and power plants business developing. In general, the purpose of capital goods investment conducted by the Company is to support operational performance of the Company, so that the power plant is more efficient and reliable as well as to make the business process smoother.

Investasi Barang Modal pada Aset Tetap
Capital Goods Investment in Property, Plant, and Equipment

Investasi barang modal PJB pada aset tetap di tahun 2021 adalah sebesar Rp1,15 triliun, meningkat 37,10% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1,83 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan progress proyek *Add On* Muara Tawar di tahun 2021.

In 2021, PJB's capital goods investment in property, plant, and equipment was Rp1.15 trillion, increased by 37.10% compared to 2020 of Rp1.83 trillion. The increase was mainly due to the addition of Add-On Muara Tawar project progress in 2021.

Tabel Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal Aset Tetap
Table of Type, Purpose, and Value of Capital Goods Investment in Property, Plant, and Equipment

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	Tujuan Investasi Investment Purpose	Realisasi Kegiatan Investasi (Rp juta) Realization of Investment Activities (Rp million)		Peningkatan/ Penurunan (%) Increase/ Decrease (%)
		2020	2021	
Tanah Land	Pembangunan pembangkit baru Building new power plant	-	-	-
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	Operasional Perusahaan Company Operational	10.532	18.646	(77,04)
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plants	Efisiensi dan keandalan pembangkit Power plant efficiency and reliability	105.634	77.812	26,34
Peralatan Transmisi dan Distribusi Trasmissions and Distribution Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	27.413	26.291	4,09
Perlengkapan, Pengolahan Data, dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	200	-	-
Peralatan Umum General Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	81.643	101.342	(24,13)
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	Operasional Perusahaan Company Operational	9.831	11.627	(18,27)

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Goods Investment	Tujuan Investasi Investment Purpose	Realisasi Kegiatan Investasi (Rp juta) Realization of Investment Activities (Rp million)		Peningkatan/ Penurunan (%) Increase/ Decrease (%)
		2020	2021	
Material Cadang Utama Main Spare Parts		12.637	-	-
Aset dalam Pembangunan Assets in Development	Operasional Perusahaan Company Operational	1.536.704	858.083	44,16
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets		47.525	44.991	5,33
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets Not Used in Operations	Operasional Perusahaan Company Operational	-	13.537	-
Jumlah Realisasi Kegiatan Investasi **Total Realization of Investment Activities**		**1.832.119**	**1.152.329**	**37,10**

Dengan capaian realisasi investasi di tahun 2021, maka jumlah Aset Tetap tahun 2021 adalah sebesar Rp124,15 triliun menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp129,52 triliun.

With the achievement of investment realization in 2021, total Property, Plant, and Equipment in 2021 were Rp124.15 trillion, decreased compared to 2020 of Rp129.52 trillion.

Tabel Aset Tetap (Rp juta)
Table of Property, Plant, and Equipment (Rp million)

Uraian Description	1 Januari 2021 January 1, 2021	Penambahan Addition	Pengurangan Deduction	Reklasifikasi Reclassification	Selisih Penilaian Kembali Difference Arising on Revaluation	31 Desember 2021 December 31, 2021
Biaya Perolehan: **Acquisition Cost:**						
Tanah dan Hak Atas Tanah Land and Land Rights	17.293.303	-	-	(846)	(241.648)	17.050.809
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	8.823.787	18.646	-	(4.372)	(938.862)	7.899.199
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plants	98.559.855	77.812	-	312.040	(10.968.464)	87.981.243
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	5.001.339	77.812	-	369	(10.968.464)	87.981.243
Perlengkapan, Pengolahan Data, dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	9.938	-	-	(455)	(3.575)	5.908

Uraian Description	1 Januari 2021 January 1, 2021	Penambahan Addition	Pengurangan Deduction	Reklasifikasi Reclassification	Selisih Penilaian Kembali Difference Arising on Revaluation	31 Desember 2021 December 31, 2021
Perlengkapan Umum General Equipment	1.104.908	101.342	-	61.556	-	1.267.806
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	151.205	11.627	-	1.519	-	164.351
Material Cadang Utama Main Spare Parts	21,654	-	-	(230)	(635)	20,789
Sub Jumlah Sub Total	**130.965.989**	**235.718**	**-**	**369.581**	**(12.893.510)**	**118.677.778**
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	104.700	44.991	(23.480)			126.211
Aset dalam Pembangunan Assets in Development	4.996.372	858.083	-	(477.210)	-	5.377.245
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets Not Used in Operations	1.927.399	13.537	-	73.837	(111.673)	1.903.100
Jumlah Biaya Perolehan Total Acquisition Cost	**137.994.460**	**1.152.329**	**(23.480)**	**(33.792)**	**(13.005.183)**	**126.084.334**
Akumulasi Penyusutan: Accumulated Depreciation:						
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	1.075.833	198.954	-	(686)	(1.274.101)	-
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installations and Power Plants	5.367.111	2.731.203	-	(30.174)	(8.068.140)	-
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	268.042	136.620	-	(12)	(404.650)	-
Perlengkapan, Pengolahan Data, dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	2.484	1.347	-	(74)	(3.757)	-
Perlengkapan Umum General Equipment	848.971	122.602	-	(743)	-	970.830
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	97.884	10.404	-	13.313	-	121.601
Material Cadang Spare Parts	256	1.055	-	(15)	(1.296)	-
Sub Jumlah Sub Total	**7.660.581**	**3.202.185**	**-**	**(18.391)**	**(9.751.944)**	**1.092.431**
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	39.367	50.959	(19.497)	-	-	70.829

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Uraian Description	1 Januari 2021 January 1, 2021	Penambahan Addition	Pengurangan Deduction	Reklasifikasi Reclassification	Selisih Penilaian Kembali Difference Arising on Revaluation	31 Desember 2021 December 31, 2021
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets Not Used in Operations	765.358	115.033	-	(9.047)	(111.673)	759.671
Jumlah Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	**8.465.306**	**3.368.177**	**(19.497)**	**(27.438)**	**(9.863.617)**	**1.922.931**
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment	(5.309)	-	-	-	(4.826)	(10.135)
Nilai Buku Book Value	**129.523.845**	**(2.215.848)**	**(3.983)**	**(6.354)**	**(3.141.566)**	**124.151.268**

Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan

Capital Goods Investment in Power Plant, Business Development, and Assignment

Selain investasi pada barang modal di aset tetap, PJB juga melakukan investasi barang modal dimana sebagian besar diprogramkan dalam rangka untuk penguatan kinerja *core business* aset eksisting dan pembiayaan program pengembangan usaha. Investasi tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1,28 triliun, menurun 23,4% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1,67 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi pembebanan kapitalisasi untuk program *multiyears* mengikuti *schedule Overhaul* yang dilaksanakan di tahun 2022 dan seterusnya, serta program-program pada jenis investasi yang bersifat penguatan pembangkit proses pembayarannya *partial* (termin) dan *mulltiyears* ke tahun berikutnya.

Apart from investing on capital goods in property, plant, and equipment, PJB also invests in capital goods where the majority are programmed in order to strengthening core business performance of the existing assets, and financing business development program. In 2021, the investment was Rp1.28 trillion, decreased by 23.4% compared to 2020 of Rp1.67 trillion. The decrease was mainly due to the realization of capitalization charges for the multiyears program following Overhaul schedule carried out in 2022 and so on, as well as programs on the type of power plant strengthening investment which its payment process was partial (term) and multiyears to the following year.

Tabel Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan
Table of Capital Goods Investment in Power Plant, Business Development, and Assignment

Jenis dan Tujuan Investasi Types and Objectives of Investment	2020	2021
Penguatan Pembangkitan: Power Plant Strengthening:		
Kapitalisasi Capitalization	603.203	134.783
Penguatan Pembangkit Power Plant Strengthening	318.186	194.788
Penggantian Peralatan Utama Pembangkit Main Power Plant Equipment Replacement	136.412	154.712
Sistem dan Sarana Informatika Information Systems and Facilities	38.271	37.301
Jumlah Penguatan Pembangkitan Total Power Plant Strengthening	**1.096.072**	**521.584**
Pengembangan Usaha Pembangkitan: Power Plant Business Development:		
Pengembangan Usaha Pembangkitan Power Plant Business Development	580.841	759.109
Jumlah Pengembangan Usaha Pembangkitan Total Power Plant Business Development	**580.841**	**759.109**
Jumlah Investasi Barang Modal pada Penguatan dan Pengembangan Usaha Pembangkitan Total Capital Goods Investment in Power Plant Strengthening and Business Development	**1.676.913**	**1.280.693**

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2021 DAN PROYEKSI TAHUN 2022

COMPARISON BETWEEN THE COMPANY'S TARGET AND REALIZED PERFORMANCE IN 2021 AND PROJECTION FOR 2022

Target, Realisasi dan Proyeksi Kinerja Keuangan

Target, Realization, and Projection of Financial Performance

Sebelum dimulainya tahun anggaran baru PJB membuat target terkait kinerja yang akan dicapai untuk tahun mendatang dalam RKAP. Hal ini sebagai bentuk evaluasi Perusahaan dengan melakukan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun 2 komponen inti untuk mengukur kinerja Perusahaan yang telah dicapai yaitu berdasarkan kinerja keuangan dan kinerja operasional.

Kinerja keuangan diuraikan dalam pencapaian PJB pada target pendapatan dan laba Perusahaan sebagaimana pada Laporan Laba Rugi Komprehensif sebagai berikut:

Prior the commencement of new fiscal year, PJB made the target related to performance that will be achieved for the following year in the ABOP. This is as evaluation by the Company through comparison between realization and the pre-determined target. There are two core components to measure the achieved Company performance, which is according to financial performance and operational performance.

The financial performance is described in achievement of PJB in the Company's revenue and profit targets as stated in the Comprehensive Income Statement as follows:

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022 (Rp juta)

Table of Comparison between Target and Realization of Revenue and Profit in 2021 as well as Projection for 2022 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2021 ABOP Target in 2021	Realisasi 2021 Realization in 2021	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2022 Projection for 2022
Pendapatan Usaha Revenues	30.779.721	29.508.134	95,87	29.395.680
- Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	22.257.709	24.541.378	110,26	20.172.006
- Jasa O&M O&M Service	6.208.092	4.057.567	65,36	5.880.621
- Jasa Konstruksi Construction Service	1.622.660	727.224	44,82	2.357.221
- Jasa Usaha Lainnya Other Business Services	691.258	181.965	26,32	985.831
Beban Usaha Operating Expenses	27.325.980	25.101.143	91,86	25.851.954
Laba Usaha Operating Income	3.453.740	4.406.991	127,60	3.543.726
Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih Financial Items and Others - Net	1.019.759	2.785.049	273,11	1.682.599
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	4.473.500	7.192.040	160,77	5.226.325
(Beban) Manfaat Pajak Tax (Expenses) Benefits	(1.265.953)	(1.371.852)	108,37	(1.168.472)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**3.207.546**	**5.820.188**	**181,45**	**4.057.853**
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	**3.207.546**	**3.518.799**	**109,70**	**4.057.853**

Target, Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Target, Realization, and Projection of Revenue

Pendapatan usaha yang dimaksud adalah hasil dari penjualan energi listrik untuk sistem Jawa Bali, Jasa Operasi & Pemeliharaan (O&M), Jasa Konstruksi, dan Lainnya.

The referred revenues are the result of electricity sales for Java Bali system, Operations & Maintenance Services, Construction Services, and Others.

Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales

Realisasi pendapatan dari penjualan tenaga listrik tahun 2021 adalah sebesar Rp24,54 triliun dengan pencapaian 95,87% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh penyesuaian *Margin* Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tahun 2021 menjadi sebesar Rp 1,6 triliun dari Margin tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp20,17 triliun berdasarkan asumsi proyeksi penjualan listrik di tahun 2022.

In 2021, the realization of revenue from the electricity sales was Rp24.54 trillion with the achievement of 95.87% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by adjustment to Power Purchase Agreement Margin in 2021 into Rp1.6 trillion from Margin in 2020 of Rp5.1 trillion. Furthermore, it is projected to Rp20.17 trillion in 2022, according to the assumption of projection for electricity sales in 2022.

Jasa O&M
O&M Services

Realisasi pendapatan dari jasa O&M tahun 2021 adalah sebesar Rp4,05 triliun dengan pencapaian 65,36% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh belum terealisasinya beberapa kontrak AMC (Belawan, Sambelia, Pulang Pisau dan Kaltim Teluk). Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp5,88 triliun berdasarkan asumsi kontrak-kontrak yang berjalan dan penambahan kontrak-kontrak baru yang akan didapatkan oleh perusahaan.

In 2021, the realization of revenue from O&M services was Rp4.05 trillion with the achievement of 65.36% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by several AMC contracts (Belawan, Sambelia, Pulang Pisau, and Kaltim Teluk) that had not been realized. Furthermore, it is projected to Rp5.88 trillion in 2022, according to the assumption of the ongoing contracts and addition of new contracts that will be obtained by the Company.

Jasa Konstruksi
Construction Services

Realisasi pendapatan dari jasa konstruksi tahun tahun 2021 adalah sebesar Rp727,22 miliar dengan pencapaian 44,82% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh penundaan/ pengurangan pembatalan proyek-proyek investasi. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp2,36 triliun berdasarkan asumsi program-program konstruksi di tahun 2022 dapat terlaksana sesuai rencana.

In 2021, the realization of revenue from the construction services was Rp727.22 billion with the achievement of 44.82% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by the delay/reduction of the investment projects cancellation. Furthermore, it is projected to Rp2.36 trillion in 2022, according to the assumption that construction programs in 2022 can be implemented following the plan.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2021 DAN PROYEKSI TAHUN 2022
COMPARISON BETWEEN THE COMPANY'S TARGET AND REALIZED PERFORMANCE IN 2021 AND PROJECTION FOR 2022

Jasa Lainnya
Other Services

Realisasi pendapatan dari jasa Lainnya tahun 2021 adalah sebesar Rp181,96 miliar dengan pencapaian 26,32% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh penundaan/ pengurangan pembatalan proyek-proyek investasi sehingga berdampak pada *reschedule* kedatangan *sparepart* di PLNSC. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp985,93 miliar berdasarkan asumsi perencanaan program penyediaan *Spare Part* dan usaha lainnya untuk mengejar bisnis di luar penjualan tenaga listrik.

In 2021, the realization of revenue from Other services was Rp181.96 billion with the achievement of 26.32% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by the delay/ reduction of the investment projects cancellation, so that it had impact on the reschedule of sparepart arrival in PLNSC. Furthermore, it is projected to Rp985.93 billion in 2022, according to the assumption of planning the Spare Part procurement program and other businesses to catch up business outside the electricity sales.

Target, Realisasi dan Proyeksi Laba
Target, Realization, and Projection of Profit

Realisasi Laba Tahun Berjalan tahun 2021 adalah sebesar Rp5,82 triliun dengan pencapaian 181,45% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh kontribusi perolehan laba investasi di perusahaan asosiasi sebesar Rp2,9 triliun sehingga dapat menutup penurunan *margin* dalam penetapan tarif penjualan tenaga listrik PJB di tahun 2021. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp4,06 triliun berdasarkan asumsi rencana program yang dimiliki PJB baik dalam bisnis tenaga listrik maupun bisnis non tenaga listrik.

In 2021, the realization of Profit for the Year was Rp5.82 trillion with the achievement of 181.45% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by the contribution of investment profits acquisition in associated company of Rp2.9 trillion, so that it was able to cover a decrease in margin in the determination of PJB's electricity sales tariffs in 2021. Furthermore, it is projected to Rp4.06 trillion in 2022, according to the assumption of program plans owned by PJB, both in electricity and non-electricity businesses.

Target, Realisasi dan Proyeksi Posisi Keuangan
Target, Realization, and Projection of Financial Position

Kinerja posisi keuangan ditunjukkan pada pencapaian pada target jumlah aset, liabilitas dan ekuitas sebagaimana pada Laporan Posisi Keuangan.

Financial position performance is signified in the target achievement on total assets, liabilities, and equity as in the Financial Position Statements.

Target, Realisasi dan Proyeksi Aset
Target, Realization, and Projection of Assets

Realisasi Jumlah Aset tahun 2021 adalah sebesar Rp172,16 triliun dengan pencapaian 99,99% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya kas untuk pencadangan kebutuhan operasional dan investasi di tahun 2021. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp174,44 triliun berdasarkan asumsi tumbuhnya perusahaan dengan bertambahnya aset tetap maupun investasi jangka panjang pada perusahaan-perusahaan asosiasi.

In 2021, the realization of total Assets was Rp172.16 trillion with the achievement of 99.99% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by the increasing cash for reserve of operational and investment needs in 2021. Furthermore, it is projected to Rp174.44 trillion in 2022, according to the assumption of the Company growth with the increasing property, plant, and equipment, as well as long-term investment in associates.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Jumlah Aset Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Total Assets in 2021 as well as Projection for 2022 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2021 ABOP Target in 2021	Realisasi 2021 Realization in 2021	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2022 Projection for 2022
Aset Lancar Current Assets	30.468.025	32.460.225	106,54	31.102.098
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	141.702.292	139.703.603	98,59	143.343.636
Jumlah Aset JTotal Assets	**172.170.318**	**172.163.828**	**99,99**	**174.445.734**

Aset Lancar
Current Assets

Realisasi Jumlah Aset Lancar tahun 2021 adalah sebesar Rp32,46 triliun dengan pencapaian 106,54% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya kas untuk pencadangan kebutuhan operasional dan investasi di tahun 2021. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp31,10 triliun berdasarkan asumsi adanya berdasarkan asumsi adanya penambahan dan pengurangan pada aset lancar.

In 2021, the realization of total Current Assets was Rp32.46 trillion with the achievement of 106.54% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by the increasing cash for reserve of operational and investment needs in 2021. Furthermore, it is projected to Rp31.10 trillion in 2022, according to the assumption of the addition and reduction in current assets.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Realisasi Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2021 adalah sebesar Rp139,70 triliun dengan pencapaian 98,59% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh Revaluasi Aset yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2021. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp143,34 triliun berdasarkan asumsi penambahan sejumlah aset baik aset tetap maupun penyertaan.

In 2021, the realization of total Non-Current Assets was Rp139.70 trillion with the achievement of 98.59% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by Assets Revaluation conducted by the Company in 2021. Furthermore, it is projected to Rp143.34 trillion in 2022, according to the assumption of additional number of assets, both property, plant, and equipment, as well as investment.

Target, Realisasi dan Proyeksi Liabilitas
Target, Realization, and Projection of Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas tahun 2021 adalah sebesar Rp10,99 triliun dengan pencapaian 95,07% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh penundaan/ pengurangan pembatalan proyek-proyek investasi yang berjalan selaras dengan penundaan pengakuan SHL kepada pemegang saham. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp12,56 triliun berdasarkan asumsi penyerapan *Shareholder Loan* sesuai dengan target.

In 2021, the realization of total Liabilities was Rp10.99 trillion with the achievement of 95.07% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by the delay/reduction of the investment projects cancellation that run in line with the delay of SHL recognition to the shareholders. Furthermore, it is projected to Rp12.56 trillion in 2022, according to the assumption that the Shareholder Loan absorption is following the target.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2021 DAN PROYEKSI TAHUN 2022
COMPARISON BETWEEN THE COMPANY'S TARGET AND REALIZED PERFORMANCE IN 2021 AND PROJECTION FOR 2022

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022 (Rp juta)
Table of Comparison between Targets and Realization of Liabilities and Equity in 2021 as well as Projection for 2022 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2021 ABOP Target in 2021	Realisasi 2021 Realization in 2021	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2022 Projection for 2022
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.979.581	5.017.427	168,39	3.739.228
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	8.584.923	5.977.136	69,62	8.825.484
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**11.564.504**	**10.994.563**	**95,07**	**12.564.712**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**160.605.814**	**161.169.265**	**100,35**	**161.881.022**

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2021 adalah sebesar Rp5,01 triliun dengan pencapaian 168,39% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan hutang bahan bakar & material pemeliharaan, serta tingginya hutang anak perusahaan. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp3,74 triliun berdasarkan asumsi penambahan dan pembayaran hutang di tahun 2022.

In 2021, the realization of total Current Liabilities was Rp5.01 trillion with the achievement of 168.39% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by an increase in fuel and maintenance material debts, as well as the high debts of subsidiary. Furthermore, it is projected to Rp3.74 trillion in 2022, according to the assumption of additional debts and debts payment in 2022.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2021 adalah sebesar Rp5,97 triliun dengan pencapaian 69,62% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh penundaan/ pengurangan pembatalan proyek-proyek investasi yang berjalan selaras dengan penundaan pengakuan SHL kepada pemegang saham. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp8,82 triliun berdasarkan asumsi peningkatan liabilitas pajak tangguhan.

In 2021, the realization of total Non-Current Liabilities was Rp5.97 trillion with the achievement of 69.62% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by the delay/reduction of the investment projects cancellation that run in line with the delay of SHL recognition to shareholders. Furthermore, it is projected to Rp8.82 trillion in 2022, according to the assumption of an increase in deferred tax liabilities.

Target, Realisasi dan Proyeksi Ekuitas
Target, Realization, and Projection of Equity

Realisasi Jumlah Ekuitas tahun 2021 adalah sebesar Rp161,17 triliun dengan pencapaian 100,35% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh Laba Periode berjalan di atas RKAP yang utamanya didukung kontribusi perolehan laba investasi di perusahaan asosiasi sebesar Rp2,9 triliun di tahun 2021. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp161,89 triliun berdasarkan asumsi perolehan laba bersih dan *offset* atas investasi serta pembayaran dividen kepada pemegang saham.

In 2021, the realization of total Equity was Rp161.17 trillion with the achievement of 100.35% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by Profit for the Period above the ABOP that was mainly supported by the contribution of investment profits acquisition in associates of Rp2.9 trillion in 2021. Furthermore, it is projected to Rp161.89 trillion in 2022, according to the assumption of net income acquisition and offset of investment, as well as dividend payment to the shareholders

Target, Realisasi dan Proyeksi Struktur Modal
Target, Realization, and Projection of Capital Structure

Realisasi Struktur Modal tahun 2021 adalah sebesar Rp172,16 triliun dengan pencapaian 100,00% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian realisasi laba operasi yang mendukung pencapaian ekuitas, nilai *outstanding* piutang usaha dan pencapaian realisasi penyertaan saham 2021.

In 2021, the realization of Capital Structure was Rp172.16 trillion with the achievement of 100.00% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by the achievement of operating profit realization which supported the achievement of equity, outstanding value of trade receivables, and the achievement of shares investment realization in 2021.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Capital Structure in 2021 as well as Projection for 2022 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2021 ABOP Target in 2021		Realisasi 2021 Realization in 2021		Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2022 Projection for 2022	
	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Komposisi Composition (%)		Nominal (Rp juta) (Rp million)	Komposisi Composition (%)
Liabilitas Liabilities	9.564.504	6,72	10.994.563	6,39	95,07	12.564.712	7,20
Ekuitas Equity	160.605.814	93,28	161.169.265	93,61	100,35	161.881.022	92,80
Aset Assets	**172.170.318**	**100,00**	**172.163.828**	**100,00**	**100,00**	**174.445.734**	**100,00**

Target, Realisasi dan Proyeksi Aspek Pemasaran
Target, Realization, and Projection of Marketing Aspects

Terkait aspek pemasaran dapat dilihat dari pencapaian atas target penjualan tenaga listrik dan cakupan pangsa pasar.

The marketing aspects is reflected from the achievement of electricity sales target and market share coverage.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Aspek Pemasaran Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022
Table of Comparison between Target and Realization of Marketing Aspects in 2021 as well as Projection for 2022

Uraian Description	Target RKAP 2021 ABOP Target in 2021	Realisasi 2021 Realization in 2021	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2022 Projection for 2022
Penjualan Tenaga Listrik (GWh) Sales of Electricity (GWh)	18.538,88	19.848,44	107,06	14.688,30
Pangsa Pasar (%) Market Share (%)	9,93	10,04	101,11	7,26

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2021 DAN PROYEKSI TAHUN 2022
COMPARISON BETWEEN THE COMPANY'S TARGET AND REALIZED PERFORMANCE IN 2021 AND PROJECTION FOR 2022

Penjualan Tenaga Listrik
Sales of Electricity

Realisasi Penjualan Tenaga Listrik tahun 2021 adalah sebesar 19.848.436 MWh dengan pencapaian 107,06% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini dipengaruhi oleh Pengoperasian Pembangkit BBM & Gas untuk menggantikan *Derating* PLTU Batubara. Selanjutnya, di tahun 2022 penjualan tenga listrik diproyeksikan sebesar 14.688.300 MWh, berdasarkan asumsi alokasi penjualan tenaga listrik yang diberikan oleh PLN.

In 2021, the realization of Sales of Electricity was 19,848,436 MWh with the achievement of 107.06% of 2021 ABOP target. This achievement was influenced by the Operations of Fuel and Gas Power Plants to replace Coal CFPP Derating. Furthermore, it is projected to 14,688,300 MWh in 2022, according to the assumption of the electricity sales allocation provided by PLN.

Pangsa Pasar
Market Share

Realisasi Pangsa Pasar tahun 2021 adalah sebesar 10,04% dengan pencapaian 101,11% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini dipengaruhi oleh Terjadinya krisis batu bara pada awal tahun 2021 sehingga pembangkit PJB yang mayoritas non batu bara (kecuali PLTU paiton) mendapatkan alokasi energi dari PLTU batu bara yang mengalami krisis energi primer. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar 7,26% berdasarkan asumsi banyaknya pembangkit baru yang masuk dengan kapasitas sekitar 7.000 MW di area Jawa Tengah dan Jawa Barat.

In 2021, the realization of Market Share was 10.04% with the achievement of 101.11% of 2021 ABOP target. This achievement was influenced by the coal crisis occurred at the beginning of 2021, so that PJB's power plants which the majority were non-coal (besides Paiton CFPP) obtained energy allocation from coal CFPP that experienced the primary energy crisis. Furthermore, it is projected to 7.26% in 2022, according to the assumption of many new power plants included with the capacity of around 7,000 MW in Central Java and West Java areas.

Target, Realisasi dan Proyeksi Aspek Operasional
Targets, Realization, and Projection of Operational Aspect

Aspek operasional mencakup pada pencapaian faktor kinerja pembangkit eksisting, produksi tenaga listrik dan pemakaian listrik.

Operational aspect includes the achievement of performance factors of existing power plant, electricity production, and electricity consumption.

Target, Realisasi dan Proyeksi Faktor Kinerja Pembangkit
Target, Realization, and Projection of Power Plant Performance Factors

Indikator kinerja pembangkit mencakup faktor ketersediaan, faktor gangguan dan efisiensi pembangkit.

Power Plant performance indicator includes the factors of availability, disruption, and efficiency of the power plant.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022
Table of Comparison between Target and Realization of Power Plant Performance in 2021 as well as Projection for 2022

Uraian Description	Target RKAP 2021 ABOP Target in 2021	Realisasi 2021 Realization in 2021	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2022 Projection for 2022
EAF Pembangkit Eksisting (%) EAF of Existing Power Plants (%)	93,56	95,47	102,04	91,04
EAF PLTU FTP-1 (%) EAF of FTP-1 CFPP (%)	86,30	83,31	96,53	84,38
EFOR Pembangkit Eksisting (%) EFOR of Existing Power Plants (%)	1,08	3,70	(142,59)	1,45
EFOR PLTU FTP-1 (%) EFOR of FTP-1 CFPP (%)	3,15	4,68	51,42	2,83
Tara Kalor Neto Pembangkit Eksisting (kCal/KWh) Net Plant Heat Rate of Existing Power Plants (kCal/KWh)	2.487,87	2.484,66	100,13	2.490,74
Tara Kalor Neto PLTU FTP-1 (kCal/KWh) Net Plant Heat Rate of FTP-1 CFPP (kCal/KWh)	2.752,00	2.787,60	98,71	2.782,02

Equivalent Availability Factor (EAF)

Realisasi EAF Pembangkit Eksisting tahun 2021 adalah sebesar 95,47% dengan pencapaian 102,04% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh optimasi realisasi durasi pemeliharaan Unit Gresik dan Muara Karang pada Tahun 2021. Selanjutnya, di tahun 2022 Capaian EAF diproyeksikan sebesar 91,04% berdasarkan asumsi pada rencana pemeliharaan Tahun 2022.

In 2021, the realization of EAF of Existing Power Plants was 95.47% with the achievement of 102.04% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by the optimization on realization of the duration of Gresik and Muara Karang Units maintenance in 2021. Furthermore, the achievement of EAF is projected to reach 91.04% in 2022 according to the assumption of maintenance plans for 2022.

Realisasi EAF PLTU FTP-1 tahun 2021 adalah sebesar 83,31% dengan pencapaian 96,53% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya beberapa UBJOM yang belum maksimal mencapai target diantaranya UBJOM Rembang, UBJOM Indramayu, dan UBJOM Paiton#9. Selanjutnya, di tahun 2022 Capaian EAF PLTU FTP-1 diproyeksikan sebesar 84,38% berdasarkan asumsi rencana pemeliharaan tahun 2022.

In 2021, the realization of EAF of FTP-1 CFPP was 83.31% with the achievement of 96.53% of 2021 ABOP target. This achievement was influenced by several unmaximized OMSBU to reach the target, including Rembang OMSBU, Indramayu OMSBU, and Paiton #9 OMSBU. Furthermore, the achievement of EAF of FTP-1 CFPP is projected to reach 84.38% in 2022 according to the assumption of maintenance plans for 2022.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2021 DAN PROYEKSI TAHUN 2022
COMPARISON BETWEEN THE COMPANY'S TARGET AND REALIZED PERFORMANCE IN 2021 AND PROJECTION FOR 2022

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

Realisasi EFOR Pembangkit Eksisting tahun 2021 adalah sebesar 3,70% dengan pencapaian (142,59) % dari target RKAP 2021. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya beberapa gangguan pembangkit di UP Muara Tawar dan UP Cirata. Selanjutnya, di tahun 2022 capaian EFOR diproyeksikan sebesar 1,45% berdasarkan asumsi histori realisasi gangguan 5 tahun terakhir.

In 2021, EFOR realization of Existing Power Plants was 3.70% with the achievement of (142.59)% of 2021 ABOP target. This achievement was influenced by several power plants disruption in Muara Tawar GU and Cirata GU. Furthermore, EFOR achievement is projected to reach 1.45% in 2022 according to the assumption of disruption realization history in the last five years.

Realisasi EFOR PLTU FTP-1 tahun 2021 adalah sebesar 4,68% dengan pencapaian 51,42% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya pencapaian EFOR di beberapa UBJOM yang belum mencapai target diantaranya UBJOM Indramayu, UBJOM Paiton#9, UBJOM Pacitan, dan UBJOM Rembang. Belum tercapainya target EFOR Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali (FTP-1) dikarenakan pembangkit mengalami *Reserve Shutdown* selama 326,95 jam. Selain itu, masih terjadi beberapa gangguan pada peralatan utama pembangkit yaitu *generator* dan *boiler* serta beberapa peralatan pendukung pada *boiler* dan turbin. Selanjutnya, di tahun 2022 capaian EFOR PLTU FTP-1 diproyeksikan sebesar 2,83% dengan asumsi optimalnya *tactical maintenance* & dukungan *strategic part*.

In 2021, EFOR realization of FTP-1 CFPP was 4.68% with the achievement of 51.42% of 2021 ABOP target. This achievement was influenced by EFOR achievement in several OMSBU that had not reached the target, including Indramayu OMSBU, Paiton #9 OMSBU, Pacitan OMSBU, and Rembang OMSBU. EFOR target of Java Bali AMC (FTP-1) CFPP had not been achieved due to the power plant experienced a Reserve Shutdown for 326.95 hours. Moreover, several disruptions still occurred on the main equipments of power plant such as generator and boiler, as well as several supporting equipments on the boiler and turbine. Furthermore, EFOR achievement of FTP-1 CFPP is projected to reach 2.83% in 2022 with the assumption of optimal tactical maintenance and strategic part supports.

Tara Kalor Neto
Net Plant Heat Rate

Realisasi Tara Kalor (*Net Plant Heat Rate* /NPHR) Neto Pembangkit Eksisting tahun 2021 adalah sebesar 2.484,66 kCal/KWh dengan pencapaian 100,13% dari target RKAP 2021. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar 2.490,74 kCal/KWh berdasarkan asumsi penjualan dan pemakaian bahan bakar sesuai RKAP Tahun 2022.

In 2021, the realization of Net Plant Heat Rate (NPHR) of Existing Power Plants was 2,484.66 kCal/KWh with the achievement of 100.13% of 2021 ABOP target. Furthermore, it is projected to reach 2,490.74 kCal/KWh in 2022 according to the assumption of fuel sales and consumption are in accordance with 2022 ABOP.

Realisasi Tara Kalor Neto PLTU FTP-1 tahun 2021 adalah sebesar 2.787,60 kCal/KWh dengan pencapaian 98,71% dari target RKAP 2021, hal ini dipengaruhi adanya start up unit pasca gangguan. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar 2782.02 kCal/KWh berdasarkan asumsi pencapaian CF sesuai RKAP Tahun 2022.

In 2021, the realization of Net Plant Heat Rate of FTP-1 CFPP was 2,787.60 kCal/KWh with the achievement of 98.71% of 2021 ABOP target. It was influenced by the post-disruption start up of unit. Furthermore, it is projected to reach 2,782.02 kCal/KWh in 2022 according to the assumption of CF achievement is following 2022 ABOP.

Target, Realisasi dan Proyeksi Produksi Tenaga Listrik
Target, Realization, and Projection of Electricity Production

Realisasi Produksi Tenaga Listrik tahun 2021 adalah sebesar 20.641 GWh dengan pencapaian 106,36% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kebutuhan pembebanan pada operasi Sistem Jamali hampir di semua jenis pembangkit PJB. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar 15.276 GWh, berdasarkan asumsi RKAP Tahun 2022.

In 2021, the realization of Electricity Production was 20,641 GWh with the achievement of 106.36% of 2021 ABOP target. This achievement was influenced by an increase in loading needs on the Jamali System operations in almost all types of PJB power plants. Furthermore, it is projected to reach 15,276 GWh in 2022, according to the assumption of 2022 ABOP.

Target, Realisasi dan Proyeksi Pemakaian Sendiri dan Susut Trafo
Target, Realization, and Projection of Self-Consumption and Transformer Loss

Realisasi Pemakaian Sendiri dan Susut Trafo tahun 2021 adalah sebesar 3,84% dengan pencapaian 114,22% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini didukung oleh efisiensi pemakaian sendiri Unit Gresik dan Muara Tawar. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar 3,85%, berdasarkan asumsi RKAP Tahun 2022.

In 2021, the realization of Self-Consumption and Transformer Loss was 3.84% with the achievement of 114.22% of 2021 ABOP target. This achievement was supported by the self-consumption efficiency of Gresik and Muara Tawar GUs. Furthermore, it is projected to reach 3.85% in 2022, according to the assumption of 2022 ABOP.

Target, Realisasi dan Proyeksi Pengembangan SDM
Targets, Realization, and Projection of HC Development

Terkait dengan pengembangan SDM, terdapat beberapa indikator yaitu HCR, OCR dan biaya pelatihan.

There are several indicators related to HC development, namely HCR, OCR, and training budget.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2022
Table of Comparison between Target and Realization of HC Development in 2021 as well as Projection for 2022

Uraian Description	Target RKAP 2021 ABOP Target in 2021	Realisasi 2021 Realization in 2021	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2022 Projection for 2022
HCR	4,56	4,56	100,00	-
OCR	4,56	4,56	100,00	-
Biaya Pendidikan & Pelatihan (Rp Miliar) Education & Training Budget (Rp billion)	71,25	46,83	65,73	58,19

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2021 DAN PROYEKSI TAHUN 2022
COMPARISON BETWEEN THE COMPANY'S TARGET AND REALIZED PERFORMANCE IN 2021 AND PROJECTION FOR 2022

Human Capital Readiness (HCR)

Indikator HCR bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan sasaran strategi Perusahaan yang diukur dari nilai hasil *Assessment Human Capital Readiness* pada suatu periode. Formula yang digunakan merupakan skor/nilai hasil *Assessment Human Capital Readiness* ditetapkan oleh pejabat setingkat EVP PT PLN (Persero) atau minimal pejabat berwenang selevel EVP. Berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan oleh tim HCR-OCR PLN melalui Nota Dinas Nomor 0297/ORG.01.04/EVP HST/2022 tanggal 3 Januari 2022. Realisasi HCR tahun 2021 menunjukkan skor sebesar 4,56 sama dengan target yang ditetapkan sebesar 4,56 sehingga pencapaian terhadap target sebesar 100,00%. Pencapaian ini didukung oleh tercapainya target *maturity level* dan KPI dalam mempersiapkan kompetensi karyawan melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tema strategis perusahaan.

HCR indicator is purposed to ensure that the employee competency development is in line with the Company strategic target measured from the value of Assessment results on Human Capital Readiness over time. The used formula is the score/value of Assessment results on Human Capital Readiness determined by EVP-level officials of PT PLN (Persero) or at least by the authorized officials at EVP level. According to the assessment results conducted by PLN HCR-OCR team through the Memorandum of Service No. 0297/ORG.01.04/EVP HST/2022 dated January 3, 2022. In 2021, the realization of HCR signified a score of 4.56 or similar with the established target of 4.56, so that achievement to target was 100.00%. This achievement was supported by the achievement of maturity level and KPI targets in preparing employee competence through the briefing of knowledge and skill which were based on the Company's strategic theme.

Organizational Capital Readiness (OCR)

Indikator OCR merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kesiapan organisasi dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan faktor yang mendorong perbaikan dan pembelajaran berkelanjutan untuk mendukung agenda perubahan organisasi melalui implementasi strategi Perusahaan. Pengukuran OCR bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan organisasi dalam memastikan setiap pegawai berkompeten, produktif, memiliki tata nilai dan etika kerja tinggi. Berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan oleh tim HCR-OCR PLN melalui Nota Dinas Nomor 0297/ORG.01.04/EVP HST/2022 tanggal 3 Januari 2022. Realisasi OCR tahun 2021 menunjukkan skor sebesar 4,56 sama dengan target yang ditetapkan dengan skor sebesar 4,56 sehingga pencapaian terhadap target sebesar 100,00%. Pencapaian ini didukung oleh implementasi program OCR tahun 2021 dan pemenuhan dokumen *Maturity Level* dan KPI OCR.

OCR indicator is performance measurement describing the readiness level of organization in integrating and aligning factors that encourage sustainable improvement and learning to support the agenda of changes in organization through strategy implementation of the Company. OCR measurement is purposed to find the readiness level of organization in ensuring that every employee is competent, productive, has values and high work ethics. According to the assessment results conducted by PLN HCR-OCR team through the Memorandum of Service No. 0297/ORG.01.04/EVP HST/2022 dated January 3, 2022. In 2021, the realization of OCR reached a score of 4.56 or similar with the established target of 4.56, so that achievement to target was 100.00%. This achievement was supported by the implementation of OCR program in 2021 and the fulfillment of Maturity Level and KPI OCR documents.

Biaya Pelatihan
Training Budget

Realisasi Biaya Pelatihan tahun 2021 adalah sebesar Rp46,83 miliar dengan pencapaian 65,73% dari target RKAP 2021. Pencapaian ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengalamai *trend* penurunan dibanding tahun 2020 sehingga membuat perubahan metode pelaksanaan pembelajaran dari

In 2021, the realization of Training Budget was Rp46.83 billion with the achievement of 65.73% of 2021 ABOP target. This achievement was due to the Covid-19 pandemic with the decreasing trend compared to 2020, so as to change the learning implementation method from digital learning

digital menjadi *blended* (*mix*) sehingga dibutuhkan proses adaptasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, di tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp58,19 miliar berdasarkan asumsi data kalender akademik tahun 2021.

to blended (mix) learning. Hence, the adaptation process for learning activities implementation was needed, both internal and external. Furthermore, it is projected to reach Rp58.19 billion in 2022 according to the assumption of academic calendar data in 2021.

Target, Realisasi dan Proyeksi Produktivitas Pegawai
Targets, Realization, and Projection of Employees Productivity

Indikator produktivitas pegawai bertujuan untuk memastikan optimalisasi produktivitas kinerja pegawai dalam mencapai tujuan Perusahaan. Produktifitas pegawai diukur dari realisasi GWh produksi neto pembangkit eksisting dibandingkan dengan jumlah pegawai pembangkit eksisting pada periode berjalan. Pada akhir tahun 2021, GWh produksi neto pembangkit eksisting sebesar 19.848 dan jumlah pegawai pembangkit eksisting sebanyak 2.568 pegawai, dengan hasil realisasi produktivitas sebesar 7,73 GWh/pegawai, lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 6,98 GWh/pegawai, sehingga pencapaian terhadap target sebesar 110,00%.

Employees productivity indicator is purposed to ensure the optimization of employee performance productivity in achieving objectives of the Company. Employees productivity is measured from the realization of net production GWh of existing power plant with total employees of existing power plant in current period. At the end of 2021, net production GWh of existing power plant was 19,848 and total employees of existing power plant were 2,568 employees, with realization results of productivity of 7.73 GWh/employee or better than the established target of 6.98 GWh/employee; thus, target achievement was 100.00%.

KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY

Kebijakan Pembagian Dividen
Dividend Distribution Policy

Kebijakan Dividen PJB diatur berdasarkan Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa-Bali Pasal 26 tentang Penggunaan Laba yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
2. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif,
3. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu,

Dividend policy of PJB is regulated in Article 26 of the Articles of Association of PT Pembangkitan Jawa-Bali on the Use of Profit as follows:

1. Distribution of dividends is decided at the General Meeting of Shareholders,
2. Dividends may only be distributed in the event the Company has positive earning balance,
3. Dividends which are not claimed within 5 (five) years after being declared available for distribution, will be deposited in special reserve funds,

KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY

4. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi,
5. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan,
6. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan,
7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan,
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

4. Dividends in the special reserved funds are able to be claimed by Shareholders holding legal proof of their entitlement to the Company Board of Directors on the condition that those are not collected all at once and by paying administrative fee determined by the Board of Directors,
5. Dividends in special reserved funds which are not claimed within 10 (ten) years will be the rights of the Company,
6. The Company may distribute interim dividends prior to the Company fiscal year ends if requested by the shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of issued shares after considering the projection of profit and the financial capabilities of the Company,
7. Distribution of interim dividends is established by the Board of Directors decision after obtaining approval from the Board of Commissioners,
8. In the condition that the Company suffers losses at the end of fiscal year, the distributed interim dividends shall be returned by the shareholders to the Company,
9. The Board of Directors and Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the Company losses in the event that the Shareholders fail to return the interim dividends.

Pembagian Dividen
Dividend Distribution

Pembagian Dividen Tahun 2021
Dividend Distribution in 2021

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2020. Berdasarkan surat PLN tanggal 31 Desember 2021, pembagian dividen untuk tahun buku 2020 ditetapkan sebesar Rp7.661.396 juta atau Rp1.277 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tahun 2021 PJB membagikan deviden berdasarkan surat Nomor ZE0004550 tanggal 4 Januari 2022 perihal Tindak Lanjut Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk

Based on the Minutes of General Meeting of Shareholders dated June 19, 2021, the Shareholders delegated authority to the Majority Shareholders to determine retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the Company income in 2020. Based on letter from PLN dated December 31, 2021, dividends distribution for 2020 fiscal year was determined at Rp7,661,396 million or Rp1,277 (full amount) per share.

In 2021, PJB distributed dividend according to Letter No. ZE0004550 dated January 4, 2022, concerning Follow-up of Determining the Use of the Company's Net Income for

Tahun Buku 2020. Disampaikan bahwa Laba Bersih Tahun Buku 2020 yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp7.661.396 juta ditetapkan 100% sebagai deviden dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

1. Dividen untuk PLN dilakukan melalui *offset* Dividen dengan Piutang Tenaga Listrik sebesar Rp7.661.396 juta.
2. Dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar Rp1.277 dibayarkan secara tunai.

2020 Fiscal Year. It was submitted that 2020 Fiscal Year Net Income distributed to owner of the parent entity was Rp7,661,396 million, determined 100% as dividends with the following distribution provisions:

1. Dividend for PLN was conducted through offset Dividend with Electricity Receivables of Rp7,661,396 million.
2. Dividend for the minority shareholders was Rp1,277, paid in cash.

Pembagian Dividen Tahun 2020
Dividend Distribution in 2020

Pembagian Dividen Tahun 2020 adalah pembagian dividen untuk tahun buku 2019. Pembagian dividen dilakukan berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2020, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2019. Berdasarkan surat PLN tanggal 11 September 2020, pembagian dividen untuk tahun buku 2019 ditetapkan sebesar Rp6.645.392 atau Rp1.108 (nilai penuh) per lembar saham.

Dividend distribution in 2020 was dividend distribution for 2019 fiscal year. Dividend distribution was conducted according to the Minutes of General Meeting of Shareholders dated June 23, 2020, the shareholders delegated authority to the majority shareholders to determine retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the Company income in 2019. Based on letter from PLN dated September 11, 2020, dividends distribution for 2019 fiscal year was determined at Rp6,645,392 or Rp1,108 (full amount) per share.

Pada tahun 2021 dan 2020, pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan pengurangan terhadap piutang usaha dari pihak berelasi.

In 2021 and 2020, dividend to PLN were paid by deducting trade receivables from the related parties.

Tabel Pembagian Dividen
Table of Dividend Distribution

Uraian Description	2019		2020	2021
Laba Bersih Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp juta) Net Income Attributable to Owners of the Parent (Rp million)	5.904.512	-	6.645.392	7.661.396
Dividen yang Dibagikan (Rp juta) Distributed Dividend (Rp million)	5.904.512	3.501.956	6.645.392	7.661.396
Dividen per Lembar (Rp juta) Dividend per Share (Rp million)	984	584	1.108	1.277
Dividend Pay Out Ratio	100	100	100	100
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	1 Juli 2019 July 1, 2019	30 Oktober 2019 October 30, 2019	12 Oktober 2020 October 12, 2020	31 Desember 2021 December 31, 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	29 November 2019 November 29, 2019	5 Desember 2019 December 5, 2019	2 November 2020 November 2, 2020	3 Januari 2022 January 3, 2022

KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY

Grafik Dividen yang Dibagikan (Rp juta)
Chart of Distributed Dividend (Rp million)

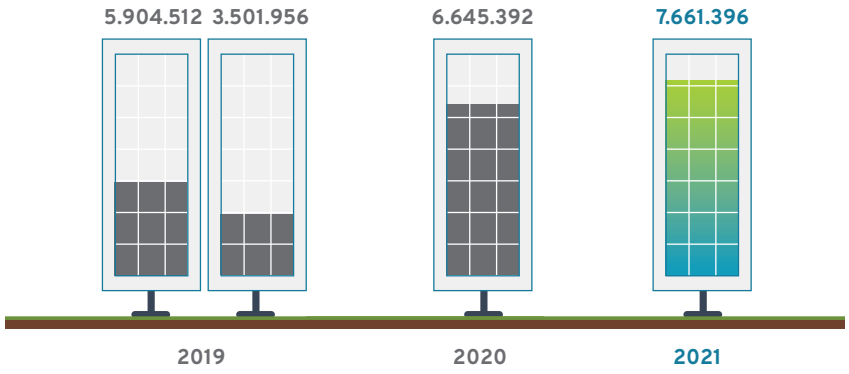

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
CONTRIBUTION TO THE STATE

PJB sebagai Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN yaitu PT PLN (Persero) ikut berperan sebagai *agent of value creator* dan *agent of development* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke Negara. Wujud komitmen PJB kepada Negara dengan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak melalui pembayaran pajak serta deviden. Jumlah setoran pajak tahun 2021 sebesar Rp1,125 triliun, meningkat 46,75% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp767,019 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pembelian material dan penggunaan jasa dari pihak ketiga.

Sebagai Pemotong Pajak, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan sewa bangunan; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

As the Company with the shares majority is owned by SOE, namely PT PLN (Persero), PJB has a role as agent of value creator and agent of development expected to be able to provide profit contribution to the State. PJB commitment to the State is actualized in the Company obligations fulfillment as Taxpayers through the payment of tax and dividend. In 2021, total tax payment was Rp1.125 trillion, increased by 46.75% compared to 2020 of Rp767,019 billion. The increase was mainly influenced by the increasing total material purchases and the use of service from the third parties.

As the Tax Withholder, the Company actively participates in deducting, depositing, and reporting on taxes such as Income Tax Article 4 paragraph 2 concerning services on construction and lease of buildings; Income Tax Article 21 concerning income received by individual taxpayers; and Income Tax Article 23 on income received by corporate taxpayers.

Tabel Setoran Pajak (Rp juta)
Table of Tax Payment (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	197.904,86	31.308,31	177.722,36	467,65	146.414,05
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	71.469,31	53.613,00	58.251,76	8,65	4.638,76
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 (2)	60.960,03	31.308,31	21.982,40	(29,79)	(9.325,91)
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	501,89	96,20	590,90	514,24	494,70
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	85.175,60	51.607,91	63.084,27	22,24	11.476,36
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	2.560,08	591,99	63,30	(89,31)	(528,69)
PBB Land and Building Tax	9.970,63	6.507,78	18.809,91	189,04	12.302,13
PPN Masukan Input VAT	625.562,17	484.313,60	785.104,43	62,11	300.790,83
Jumlah Setoran Pajak **Total Tax Payment**	**1.054.104,57**	**767.019,82**	**1.125.609,33**	**46,75**	**358.589,51**

Grafik Setoran Pajak (Rp juta)
Chart of Tax Payment (Rp million)

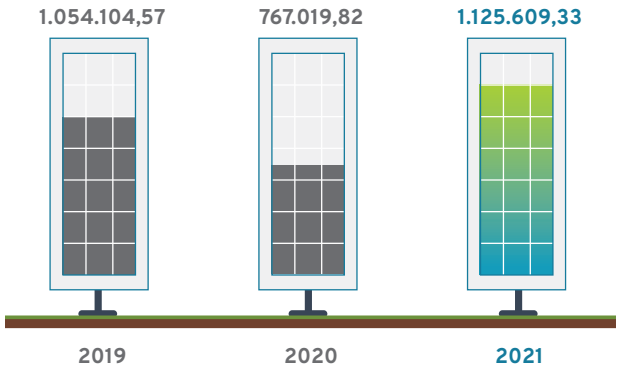

Pajak yang dipungut oleh pihak lain sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp243,74 miliar menurun 13,76% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp282,61 miliar yang terdiri dari:

Taxes deducted by other parties up to the end of 2021 were Rp243.74 billion, decreased by 13.76% compared to 2020 of Rp282.61 billion consisting of the following:

Tabel Penerimaan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain (Rp juta)
Table of Tax Revenues Deducted by Other Parties (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	207.768,45	258.513,78	202.908,59	(21,51)	(50.745,33)
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	42.410,62	24.097,36	40.826,72	69,42	18.313,26
Jumlah Pungutan Pajak **Total Tax Deducted**	**250.179,07**	**282.611,14**	**243.735,31**	**(13,76)**	**(32.432,07)**

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
CONTRIBUTION TO THE STATE

Selain pembayaran pajak kepada Negara, adapun kontribusi lain PJB terhadap Negara secara tidak langsung melalui peningkatan APBN yaitu PJB telah menyumbang dividen kepada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2021. Pembahasan mengenai pembagian dividen telah dijelaskan disub-bab sebelumnya yaitu bagian Kebijakan Dividen.

Apart from tax payment to the State, other indirect PJB contribution to the State is through the increase in APBN, where PJB has contributed dividends to PT PLN (Persero) as the State-Owned Enterprise (SOE) in 2021. Discussion on dividend distribution has been explained in the previous subsection, namely Dividend Policy sub-section.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN
EMPLOYEE AND MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM

Sampai dengan 31 Desember 2021, PJB tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) dan kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise*.

As of December 31, 2021, PJB did not have Employee Stock Option Program (ESOP) and Management Stock Option Program (MSOP). Therefore, there is no information regarding the number of ESOP/MSOP shares and the realization, the period of time, the requirements of eligible employees and/or management, as well as exercise prices.

REALISASI DANA PENAWARAN UMUM
REALIZATION OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

Sampai dengan 31 Desember 2021, status PJB bukan merupakan *Listed Company* dan belum melakukan penawaran umum, sehingga tidak ada informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

As of December 31, 2021, PJB status was not a Listed Company and had not proceed any public offering. Therefore, there is no information regarding the total funds received, plans for fund usage, details of fund usage, fund balance, and the date of the GMS approval of the changes in proceeds realization.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/ RELATED PARTIES

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transaction Containing Conflict of Interest

Sampai dengan 31 Desember 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

As of December 31, 2021, there were no transactions containing conflict of interest.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Transactions with Affiliation/Related Party

Pihak-Pihak Berelasi

Related Parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor,
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor, atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain),

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 7, Related Party Disclosures, as follows:

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity,
   ii. Has significant influence over the reporter or reporting entity, or
   iii. A member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same Group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others),

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI BERELASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura Bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor,
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a),
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas),

ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member),
iii. Both entities are joint ventures of the same third party,
iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity,
v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity,
vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a),
vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Government related entities are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the government. The government refers to government, government agencies and similar agencies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kuasa pemegang saham.

Government-related entities are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by Ministry of State-Owned Enterprise (SOE) as the shareholders representative.

Sifat Hubungan Pihak Berelasi
Nature of Related Party Relationship

Dalam kegiatan usahanya, PJB melakukan transaksi tertentu dengan pihak hubungan berelasi. Berikut adalah penjelasan mengenai sifat hubungan berelasi yang dimiliki oleh PJB:
a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN,
b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan,

In the business activity, PJB performs particular transaction with the related parties. Explanation on the related parties nature of PJB is as follows:
a. Government, in this case, is Minister of Finance of the Republic of Indonesia which is the shareholder of the Company and SOE,
b. The Company has related relationship with other SOEs jointly owned by the Ministry of Finance,

c. Grup mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama,
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

c. The Group has significant influence of investment on associated entities or joint ventures,
d. Board of Commissioners and Board of Directors are the key management personnel of the Group.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

The following is the list of related parties having transactions with the Company:

No.	Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of cash in banks and time deposits
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of cash in banks and time deposits
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka Placement of cash in banks and time deposits
4	PT Bank Syariah Indonesia (BSI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank Placement of cash in banks
5	PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Transaction of fuel and lubricant purchases
6	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Transaction of fuel purchase
7	PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Transaction of fuel purchase
8	PT Superintending Company of Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara Transaction of technical services, surveys, and coal measurements
9	PT Asuransi Jasa Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Asuransi instalasi dan mesin pembangkit, dan peralatan transmisi Insurance for installations, power plants, and transmission equipments
10	Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian air Transaction of water purchase

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

No.	Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
11	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pemegang saham Shareholder	Transaksi penjualan tenaga listrik Transaction of electricity purchase
12	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	Pemegang saham Shareholder	Penyertaan modal Capital investment
13	PT Indonesia Power	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pembelian barang dan jasa Sale of goods and services transaction
14	PT PLN Batam	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pembelian barang dan jasa Sale of goods and services transaction
15	PT PLN Batubara	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pembelian bahan bakar Sale of fuel purchase transaction
16	PT Haleyora Power	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pembelian barang dan jasa Sale of goods and services transaction
17	PT Indonesia Comnets Plus	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pembelian barang dan jasa Sale of goods and services transaction
18	PT PLN Enjinering	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pembelian barang dan jasa Sale of goods and services transaction
19	PT PLN Tarakan	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pembelian barang dan jasa Sale of goods and services transaction
20	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pembelian barang dan jasa Sale of goods and services transaction
21	PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Transaksi pembelian barang dan jasa Sale of goods and services transaction
22	PT Pelayaran Bahtera Adiguna	Entitas anak dari PT PLN (Persero) Subsidiary of PT PLN (Persero)	Jasa pemeliharaan dan pemeriksaan Maintenance and investigation services
23	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Asuransi bangunan dan perlengkapan umum Insurance for building and general equipment
24	PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi Associated entity	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
25	PT Rekind Daya Mamuju	Entitas asosiasi Associated entity	Transaksi jasa proyek Project service transactions
26	PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
27	PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
28	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Piutang kepada Ventura Bersama Receivables from Joint venture
29	PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy	Ventura bersama Joint venture	Piutang kepada Ventura Bersama Receivables from Joint venture
30	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services

No.	Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
31	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Jasa pemeliharaan dan pemeriksaan Maintenance and investigation services
32	PT Pupuk Indonesia Energi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Jasa pemeliharaan dan pemeriksaan Maintenance and investigation services
33	PT Hutama Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Controlling through Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Transaction of construction services
34	Dana pensiun PLN	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Pengelolaan dana pensiun Pension fund management

Kewajaran Transaksi
Transaction Fairness

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal Ini mengindikasikan bahwa Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All of transactions with the related party have been according to policies and requirements agreed by both parties; therefore, the Company considers that all transactions are within fair limit according to SFAS No. 7 on Related Parties Disclosure. It indicates that the Company has fairly performed transaction with the related parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

Alasan Dilakukannya Transaksi
Reason Behind the Transaction

Transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan profesional dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak (*efficient related party transaction*). Transaksi pihak berelasi menjadi efisien jika menguntungkan pemegang saham pemgendali maupun pemegang saham non pengendali.

Affiliation transactions are based on the principle of mutual need and professionalism with the aim of benefiting both parties (efficient related party transaction). Related party transactions are efficient in the event it benefits the controlling shareholders and non-controlling shareholders.

Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi
Transaction Value with Related Party

Berikut adalah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2020 dan 2021 (persentase yang diuraikan di tabel berikut merupakan persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas/ pendapatan/beban yang bersangkutan):

The following are the balances and transactions with related parties in 2020 and 2021 (the percentage described in the following table represents the percentage to the related total assets/liabilities/revenues/expenses):

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Tabel Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi (Rp juta)
Table of Transaction Value with Related Party (Rp million)

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Related Parties	2020		2021	
		Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	BNI	979,287	27,89	2.569.716	34,99
	Bank Mandiri	1.161.641	33,08	2.565.677	34,94
	BRI	1.057.431	30,12	2.068.627	28,17
	BSI	-	-	1	0,00
	Sub Jumlah Sub Total	**3.198.359**	**91,09**	**7.204.021**	**98,09**
Aset Tidak Lancar Lain Other Non-Current Assets	BRI	664.887	76,21	-	-
	Sub Jumlah Sub Total	**664.887**	**76,21**	**-**	**-**
Deposito Berjangka Time Deposits	BRI	324.964	99,97	260.000	89,62
	BNI	-	-	30.000	10,34
	Bank Mandiri	103	0,03	103	0,04
	Sub Jumlah Sub Total	**325.067**	**100,00**	**290.103**	**100,00**
Rekening Bank dan Deposito Berjangka dibatasi penggunaannya Restricted Cash in Banks and Time Deposits	BRI	-	-	160.792	77,95
	BNI	510	-	577	0,28
	Bank Mandiri	688	-	-	-
	Sub Jumlah Sub Total	**1.198**	**-**	**161.369**	**78,23**
Piutang Usaha Trade Receivables	PLN	25.078.299	99,14	21.788.196	99,24
	BPI	122.700	0,49	88.400	0,40
	IP	48.772	0,19	28.094	0,13
	BDSN	27.786	0,11	23.711	0,11
	S2P	2.772	0,01	7.450	0,03
	ICON	-	-	1.073	0,00
	EMI	-	-	1.022	0,00
	BAG	-	-	157	0,00
	PLN Batam	-	-	24	0,00
	PI Energy	423	0,00	-	-
	KPJB	3.592	0,01	-	-

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Related Parties	2020		2021	
		Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
	RDM	3.183	0,01	-	-
	Geodipa	498	0,00	-	-
	Sub Jumlah Sub Total	**25.288.025**	**99,96**	**21.938.127**	**99,93**
Piutang kepada ventura bersama Receivables from joint venture	PT Shenhua Guohua PJB	797.169	100,00	806.425	116,54
	PMSE	-	-	9.632	1,39
	Sub Jumlah Sub Total	**797.169**	**100,00**	**816.057**	**117,93**
Utang Usaha Trade Payables	PT Pertamina (Persero)	219.841	7,21	833.450	25,56
	PLNBB	221.301	7,26	307.854	9,44
	Perum Jasa Tirta	93.317	3,06	167.152	5,13
	PT Nusantara Regas	340.950	11,18	155.242	4,76
	Hutama Karya	59.323	1,95	71.043	2,18
	PLN	11.838	0,39	6.845	0,21
	PGN	251.886	8,26	-	-
	Sub Jumlah Sub Total	**1.198.456**	**39,31**	**1.541.586**	**47,27**
Utang Lain-lain Other Payables	PLN	11.823	1,72	16.965	2,84
	PT Indonesia Comnet Plus	9.548	1,39	14.023	2,35
	PT Haleyora Power	2.196	0,32	2.388	0,40
	PT Indonesia Power	683	0,10	1.981	0,33
	Sub Jumlah Sub Total	**24.250**	**3,54**	**35.537**	**5,95**
Pinjaman dari pemegang saham Loan from shareholder	PLN	2.498.086	115,47	2.417.205	110,72
	Sub Jumlah Sub Total	**2.498.086**	**115,47**	**2.417.205**	**110,72**
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	PLN	25.476.470	100,00	24.541.378	100,00
	Sub Jumlah Sub Total	**25.476.470**	**100,00**	**24.541.378**	**100,00**

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Related Parties	2020		2021	
		Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenues	PLN	4.645.032	93,69	4.593.225	92,48
	PT Indonesia Power	94.483	1,91	122.763	2,47
	PT Bukit Pembangkit Innovative	80.990	1,63	92.771	1,87
	PT Bajradaya Sentranusa	79.352	1,60	91.671	1,85
	PT Komipo Pembangkit Jawa Bali		0,00	18.276	0,37
	PT Sumber Segara Primadaya	-	-	8.155	0,16
	PLN Batam	-	-	1.855	0,04
	MCTN	-	-	929	0,02
	PLNE	-	-	725	0,01
	RDM	-	-	656	0,01
	PLN Batubara	-	-	59	0,00
	Geodipa	-	-	-	-
	Sub Jumlah Sub Total	**4.899.857**	**98,83**	**4.931.085**	**99,28**
Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricant Purchases	PT Pertamina (Persero)	3.168.943	0,11	4.705.735	0,16
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	2.437.718	0,11	2.696.693	0,10
	PT Nusantara Regas	559.118	0,07	731.108	0,03
	PT PLN Batubara	605.157	0,00	597.099	-
	Perum Jasa Tirta	249.469	0,29	295.026	0,29
	Sub Jumlah Sub Total	**7.020.405**	**0,11**	**9.025.661**	**0,16**
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	PT PLN Enjiniring	12.780	0,11	23.241	0,16
	PT Indonesia Comnet Plus	13.074	0,11	14.664	0,10
	PT Haleyora Power	7.972	0,07	4.243	0,03
	PT PLN Tarakan	206	0,00	-	-
	Sub Jumlah Sub Total	**34.032**	**0,29**	**42.148**	**0,29**

Jenis Transaksi Type of Transaction	Pihak Yang Bertransaksi Related Parties	2020		2021	
		Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Beban Usaha Lain-lain **Other Operating Expenses**	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	73.182	8,10	54.615	5,91
	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional	188	0,02	188	0,02
	Sub Jumlah Sub Total	**73.370**	**8,12**	**54.803**	**5,93**

* persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan
* percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

a. Pinjaman kepada Pemegang Saham

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar AS$280.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR USD enam bulan dengan marjin 0,98%. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek *add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp2,42 triliun juta (setara dengan AS$169.402.450) dan Rp2,50 triliun (setara dengan AS$177.106.338), dengan porsi jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp233,98 miliar dan Rp334,73 miliar.

b. Kompensasi Manajemen Kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp10,14 miliar dan Rp9,89 miliar. Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp24,288 miliar dan Rp15,80 miliar. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

a. Loan to the Shareholders

On March 20, 2018, the Company signed loan agreement with PLN amounted to US$280,000,000 with interest rate of LIBOR US$ six month and 0.98% margin annually. This loan is used to fund the add-on project of Muara Tawar Block 2, 3 and 4 CCPP. The term of this agreement is effective since the agreement is signed and will end on May 8, 2032.

The balance of these loans on December 31, 2021 and 2020, was Rp2.42 trillion (equivalent to US$169,402,450) and Rp2.50 trillion (equivalent to US$177,106,338), respectively, with the current portion on December 31, 2021 and 2020, of Rp233.98 billion and Rp334.73 billion, respectively.

b. Compensation for Key Management

Total remuneration of the Company's Board of Commissioners in 2021 and 2020 was Rp10.14 billion and Rp9.89 billion, respectively. Total remuneration of the Company's Board of Directors in 2021 and 2020 was Rp24,288 billion and Rp15,80 billion, respectively. All compensations to the Company's Boards of Commissioners and Board of Directors are short-term employee benefits.

Kebijakan Perusahaan terkait Mekanisme *Review* atas Transaksi
The Company Policy Related to Review Mechanism of Transaction

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor.

Review mechanism of transaction with the related parties is through audit process, both by internal auditor and external auditor. As the effort to ensure the level of transaction fairness and conformity with accounting standard that is generally applied in Indonesia, the report of affiliation transactions presented above has been audited by the Auditor.

INFORMASI MATERIAL INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Investasi
Investment

Pada tahun 2021, PJB melakukan tiga bentuk investasi yaitu investasi pada kinerja unit dan pengembangan usaha, investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama, dan investasi penyertaan saham pada entitas anak. Jenis mata uang yang digunakan adalah dalam mata uang Rupiah. Sumber dana investasi merupakan alokasi dana internal perusahaan/ Anggaran RKAP tahun 2021.

In 2021, PJB established three types of investment, namely investment in unit performance and business development, investment in associates/joint ventures, and share investment in subsidiaries. The type of currency used is in Rupiah. The source of investment funds is the internal fund allocation/ ABOP of the Company in 2021.

Investasi pada Penguatan Pembangkitan dan Pengembangan Usaha
Investment on Power Plant Strengthening and Business Development

Investasi penguatan pembangkit pada tahun 2021 adalah sebesar Rp521,58 milyar atau lebih rendah 52,41% bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1,10 triliun. Bila dibandingkan dengan RKAP 2021, pencapaiannya sebesar 62,13%. Investasi untuk program pengembangan usaha pada tahun 2021 adalah sebesar Rp759,10 miliar atau lebih tinggi 30,69% bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp580,84 miliar. Bila dibandingkan dengan RKAP 2021, pencapaiannya sebesar 52,46%. Ketidaktercapaian ini disebabkan terutama karena mundur COD Blok 2 *Add On* Muara tawar serta *levering material* untuk LTPSA Blok 3-4 yang tidak terpenuhi di tahun 2021 sehingga pembayaran *multiyears* ke tahun berikutnya.

In 2021, investment to strengthen the power plant was Rp521.58 billion or lower by 52.41% compared to the realization in 2020 of Rp1.10 trillion. When compared with the 2021 ABOP, the achievement was 62.13%. In 2021, investment in the business development program was Rp759.10 billion or higher by 30.69% compared to the realization in 2020 of Rp580.84 billion. When compared with the 2021 ABOP, the achievement was 52.46%. This failure was mainly caused by the delay in Commercial On Date (COD) of Add On Muara Tawar Block 2, as well as material lavering for Block 3-4 LTPSA that was not fulfilled in 2021, so that the multiyears payment was to the following year.

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama
Investment in Associates/Joint Ventures

PJB melakukan investasi pada enam perusahaan ventura bersama dan satu entitas asosiasi:

PJB conducts an investment in six joint ventures and one associated entity, as follows:

Tabel Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama
Table of Investment in Associates/Joint Ventures

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Operation Year	% Penyertaan % of Ownership	
				2020	2021
Entitas Asosiasi: Associated Entities:					
PT Sumber Segara Primadaya (SSP)	Cilacap	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2006	49,00	49,00
PT Rekindaya Mamuju (RDM)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2018	10,00	10,00
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	*)	10,00	10,00
Ventura Bersama: Joint Ventures:					
PT Bajradaya Sentranusa (BDSN)	Asahan	Pembangkit Listrik tenaga air Hydro power plant	2011	36,61	36,61
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)	Palembang	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2015	40,25	40,25
PT Komipo Pembangkitan	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2018	10,00	10,00
Jawa Bali (KPJB)	Jepara	Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	2010	49,00	49,00
PT Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa-Bali	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2019	30,00	30,00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa-Bali	Jakarta	Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	2019	30,00	30,00
PT Pembangkitan Jawa BaliMasdar Solar Energy (PMSE)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant	*)	51,00	51,00
PT North Sumatera Hydro Energy	Jakarta	Pembangkit Listrik Power Plant	*)	25,00	25,00

*) dalam tahap pengembangan
*) in the development stage

Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak
Share Investment in Subsidiaries

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company owns shares of its subsidiaries, both directly and indirectly, as follows:

INFORMASI MATERIAL INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL
MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Tabel Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak
Table of Share Investment in Subsidiaries

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	% Penyertaan % of Ownership	
			2020	2021
PT Pembangkitan Jawa-Bali Services (PJBS)	Surabaya	Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dan Pembangunan (Pemasangan) Peralatan Ketenagalistrikan Operation & Maintenance Service of Power Plant and Construction (Installation) of Electrical Equipment	98,00	98,00
PT Mitra Karya Prima (MKP) *	Surabaya	Jasa Service	92,00	92,00
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkit Tenaga Listrik (SKP) *	Jakarta	Sertifikasi kompetensi tenaga listrik, konsultasi dibidang ketenagalistirikan Power plant competency certification, consultation in the electricity sector	95,00	-
PT Rekadaya Elektrika (RE) dan entitas anak	Jakarta	Enjiniring, Pengadaan dan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Sektor Ketenagalistrikan Engineering, Procurement, and Construction, Operation and Maintenance in the Electricity Sector	98,90	98,90
PT Rekadaya Elektrika Consult (REC) *	Jakarta	Supervisi dan konsultasi Supervision and consultation	99,80	99,80
PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian Trade, construction, mining and agriculture	72,97	72,97
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJB Investasi)	Jakarta	Investasi Ketenagalistrikan Electricity Investment	100,00	100,00
PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo) *	Jakarta	Penempatan investasi di pengadaan listrik Placement of investment in electricity procurement	100,00	100,00
PT Pembangkit Jawa Baskara Investasi Cirata (PJBIC) *	Jakarta	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal Financing in the form of equity participation	100,00	100,00
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjiniring, rantai pasokan, dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan Goods and services trading, engineering, supply chain, and consultation in the electricity sector	51,00	51,00

* kepemilikan saham tidak langsung
* inidirect shares ownership

Ekspansi
Expansion

Pada tahun 2021, PJB tidak melakukan aktivitas ekspansi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2021, PJB did not undertake any expansion activity, so that there is no information regarding its purposes and values of the transactions.

Divestasi
Divestment

Efektif pada tanggal 20 Desember 2021, Perusahaan (melalui PT PJB Services) melakukan divestasi dalam upaya Penataan Iini usaha bisnis PLN Grup dengan melakukan perjanjian jual beli saham untuk menjual saham PT SKP ke Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali, dimana Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham PT SKP atau setara dengan 95% kepemilikan atas PT SKP dengan nilai pengalihan sebesar Rp9.785.

Effective on December 20, 2021, the Company (through PT PJB Services) divested in an effort to reorganize business lines of PLN Group by penetrating into a share purchase agreement to sell PT SKP shares to Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali, where the Company sold all the shareholdings. PT SKP or equivalent to 95% ownership of PT SKP with a transfer value of Rp9,785.

Akuisisi
Acquisition

Pada tahun 2021, PJB tidak melakukan aktivitas akuisisi perusahaan, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2021, PJB did not undertake any acquisition activity, so that there is no information regarding its purposes and values of the transactions.

Restrukturisasi Utang/Modal
Debt/Capital Restructuring

Pada tahun 2021, PJB tidak melakukan restrukturisasi baik utang maupun modal. sehingga tidak terdapat informasi terkait hal tersebut.

In 2021, PJB did not undertake any debt and capital restructuring activity, so that there is no information related to the matter.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi
Reason of Changes in Accounting Policy

Kebijakan akuntansi perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukant ingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Accounting policy of the Company is arranged following Financial Accounting Standards in Indonesia. Preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimation and assumption. It also requires management to exercise consideration in the process of accounting policies application of the Company. The areas involving a higher degree of consideration or complexity, or areas where assumption and estimation are significant to the financial statements

Perusahaan melakukan *review* berkelanjutan kebijakan akuntansi terhadap perkembangan revisi Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan perusahaan. Berikut adalah penerapan standar akuntansi keuangan baru dan revisi (PSAK) dan intepretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) yang berlaku efektif tahun 2021, dan standar yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan.

The Company continuously reviews accounting policy towards the development of FAS revision relevant to the Company. The following are the implementation of the new financial accounting standards and its revision as well as the interpretation of FAS (ISFAS) that is effectively applied in 2021, and standards that have been issued, but not yet implemented.

Uraian Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya
Description on the Changes in Accounting Policy and The Impacts

Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2021
Accounting Standards Effective in 2021

Penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- PSAK No. 112, Akuntansi Wakaf,
- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis,
- Amendemen PSAK No. 71, Amendemen PSAK No. 55, Amendemen PSAK No. 60, Amendemen PSAK No. 62 dan Amendemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga 2,
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, Akuntansi Sukuk,
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111, Akuntansi Wa'd,

The implementation of new standards, amendments, and annual adjustments effective for the financial year beginning on or after January 1, 2021, did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- SFAS No. 112, Accounting for Endowment,
- Amendment to SFAS No. 22, Business Combination - Business Definition,
- Amendment to SFAS No. 71, Amendment to SFAS No. 55, Amendment to SFAS No. 60, Amendment to SFAS No. 62 and Amendment to SFAS No. 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform 2,
- Annual improvement to SFAS No. 110, Sukuk Accounting,
- Annual improvement to SFAS No. 111, Wa'd Accounting,

- Amandemen PSAK No. 73, Covid-19 Terkait Konsesi Rental,
- Penyesuaian tahunan atas PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan, PSAK No. 13, Properti Investasi, PSAK No. 48, Penurunan Nilai Aset, PSAK No. 66, Pengaturan Bersama, ISAK No. 16, Pengaturan Jasa Konsesi.

- Amendment to SFAS No. 73, Covid-19 related Rent Concession,
- Annual improvement to SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements; SFAS No. 13, Investment Properties; SFAS No. 48, Impairment of Assets; SFAS No. 66, Joint Arrangements; ISFAS No. 16, Arrangement of Concession Services.

Dampak atas Penerapan Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2021
Impacts on the Accounting Standards Implementation Effective in 2021

Penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan.

The implementation of new standards, amendments, and annual adjustments effective for the financial year beginning on or after January 1, 2021, did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year.

Standar dan Interpretasi telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan
Issued Standards and Interpretations But Not Yet Effective

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, Kontrak Asuransi,
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas Lancar atau Tidak Lancar,
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi,
- Amandemen PSAK No. 16, Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan,
- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan,
- Amandemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi,
- Amandemen PSAK No. 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak,
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, Agrikultur,
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan,
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, Sewa,
- Revisi PSAK No. 107, Akuntansi Ijarah,
- Amandemen PSAK No. 74, Kontrak Asuransi sehubungan dengan Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 – Informasi Perbandingan,

The new standards, amendments, and annual improvements that have been issued but are not yet effective for the financial year beginning on January 1, 2021, are as follows:

- SFAS No. 74, Insurance Contracts,
- Amendment to SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements – Classification of Current or Non-Current Liabilities,
- Amendment to SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements – Disclosure of Accounting Policies,
- Amendment to SFAS No. 16, Property, Plant, Equipment – Prooceds before the Intended Use,
- Amendment to SFAS No. 22, Business Combination - Reference to Conceptual Framework for Financial Reporting,
- Amendment to SFAS No. 25, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimation and Error – Definition of Accounting Estimation,
- Amendment to SFAS No. 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling,
- Annual improvement to SFAS No. 69, Agriculture,
- Annual improvement to SFAS No. 71, Financial Instruments,
- Annual improvement to SFAS No. 73, Lease,
- Revision to SFAS 107, Ijarah Accounting,
- Amendment to SFAS No. 74, Insurance Contract in connection with the First Implementation of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 – Information on Comparison,

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

- Amandemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali Amandemen PSAK No. 1, Amandemen PSAK No. 16, Amandemen PSAK No. 25, Amandemen PSAK No. 46, dan Revisi PSAK No. 107 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

- Amendment to SFAS No. 46, Income Taxes – Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

The above new standards, amendments, and annual improvements are effective beginning January 1, 2022, unless for Amendment to SFAS No. 1, Amendment to SFAS No. 16, Amendment to SFAS No. 25, Amendment to SFAS No. 46, and Revision to SFAS No. 107, which are effective beginning January 1, 2023, as well as SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74 which are effective beginning January 1, 2025, but early adoption are permitted.

Potensi Dampak atas Standar dan Interpretasi yang telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan
Potential Impacts on Standards and Interpretations Published but Not Yet Implemented

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

On the settlement date of this consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries were evaluating the impacts that may arise from the implementation of new standards, amendments, and annual adjustment on the Company and subsidiaries' consolidated financial statements.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
REGULATORY CHANGES AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

Berikut beberapa perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan baru yang berlaku efektif pada tahun 2021 serta dampaknya terhadap kinerja PJB:

The following are some changes to laws and regulations and new regulations that are effective in 2021 and their impact on PJB's performance:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Table of Regulatory Changes and Its Impact on the Company

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
1.	Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	1. Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) terdiri dari 9 Bab dengan 6 (enam) ruang lingkup pengaturan. 2. No. Induk Kependudukan (NIK) menjadi No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif. 3. Pemberian natura yang merupakan pemberian kenikmatan balas jasa yang diterima/peroleh pegawai, karyawan maupun keluarganya tidak dalam bentuk uang merupakan Objek PPh 21. 4. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara dan beberapa jenis barang/jasa dikeluarkan dari objek bebas PPN. 5. Penyediaan listrik dihapus dari pajak terutang tidak dipungut atau tidak dibebaskan dari pengenaan pajak. 6. Penyediaan air bersih dihapus dari pajak terutang tidak dipungut atau tidak dibebaskan dari pengenaan pajaksehingga pemanfaatan air oleh orang/badan terutama untuk pembangkit listrik berpotensi dikenakan PPN. 7. Badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara akan menjadi badan yang pertama dikenakan Pajak Karbon dengan tarif Rp30.000 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan setara.	1. Pembayaran penghasilan karyawan di PJB mengikuti integrasi antara NIK dan NPWP. 2. Pemberian natura yang merupakan pemberian kenikmatan balas jasa yang diterima/diperoleh pegawai, karyawan maupun keluarga karyawan PJB yang tidak dalam bentuk uang akan dikenakan PPh mulai tahun pajak 2022. 3. Pembelian barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara dan beberapa jenis barang/jasa oleh PJB dikenakan PPN mulai 1 April 2022. 4. PJB berpotensi membayar PPN atas penyerahan listrik kepada PT PLN (Persero). 5. PJB sebagai pemanfaat air untuk pembangkit listrik berpotensi untuk dikenakan PPN. 6. PLTU yang dimiliki oleh PJB akan menjadi salah satu objek yang pertama dikenakan Pajak Karbon dengan tarif Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan setara.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
REGULATORY CHANGES AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
1.	Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations	1. Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU 7/2021) consists of 9 chapters with 6 (six) regulatory scopes. 2. Identity Number (ID) to No. Taxpayer Identification Number (NPWP) for individual taxpayers while still considering subjective and objective requirements. 3. In-kind gift, which is the provision of enjoyment of remuneration received/obtained by employees or their families not in the form of money, is the object of Income Tax 21. 4. Mining products or drilling products taken directly from the source, excluding coal mining products and certain types of goods/services are excluded from VAT-free objects. 5. Electricity provision removed from tax payable is not collected or is not exempt from taxation. 6. Provision of clean water removed from tax payable is not collected or is not exempt from the imposition of taxes so that the use of water by individuals/agencies, especially for power plants, has the potential to be subject to VAT. 7. Entities engaged in coal-fired power plants will be the first to be subject to a Carbon Tax at a rate of Rp30,000 per kilogram of carbon dioxide equivalent or equivalent unit.	1. Payment of employee income at PJB follows the integration between Identity Number (ID) and Tax Number (NPWP). 2. In-kind gifts, which are the provision of enjoyment of remuneration received/ obtained by PJB employees and their families that are not in the form of money will be subject to income tax starting from the 2022 tax year. 3. Purchases of mining products or drilling products taken directly from the source, excluding coal mining products and certain types of goods/services by PJB are subject to VAT starting from April 1, 2022. 4. PJB has the potential to pay VAT on the delivery of electricity to PT PLN (Persero). 5. PJB as a water user for power plants has the potential to be subject to VAT. 6. CFPP owned by PJB will be one of the first objects to be subject to a Carbon Tax at a rate of Rp. 30.00 (thirty rupiah) per kilogram of carbon dioxide equivalent or equivalent unit.
2.	Undang-Undang No. 10 tahun 2021 tentang Bea Materai	1. Pemerintah memutuskan untuk menghapus dua bea meterai yaitu Rp3.000 dan Rp6.000 dan menggantinya menjadi satu harga bea meterai/ tarif tunggal. 2. Tarif bea meterai ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 3. Batasan transaksi yang terkena bea meterai berubah dari yang sebelumnya dokumen dengan nilai transaksi lebih dari Rp250.000 diubah menjadi lebih dari Rp5 juta. 4. Selain menggunakan meterai tempel, dapat juga menggunakan meterai elektronik dan meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri. 5. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan peralihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28.	1. Dokumen Perusahaan yang termasuk obyek bea meterai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 wajib dikenakan bea meterai. 2. Meterai tempel Rp3.000 dan Rp6.000 yang masih tersisa, masih dapat digunakan oleh Perusahaan sampai dengan jangka waktu 1 tahun setelah UU Bea Meterai mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apa pun. 3. Meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang atas Dokumen Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel yang dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp9.000.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
2.	Law No. 10 of 2021 on Stamp Duty	1. The government decided to replace the two stamp duty fees with the value of Rp3,000 and Rp6,000 with a single stamp duty/tariff price. 2. The stamp duty value is set at Rp10,000.00 (ten thousand rupiah). 3. Transaction limit subject to stamp duty is changed from the previous document with a transaction value of more than Rp250,000 to be changed to more than Rp5 million. 4. Apart from using an adhesive stamp, electronic seals and other seals may also be used as determined by the relevant Ministry. 5. This Law shall come into force on January 1, 2021 with the transitional provisions as stated in Article 28.	1. Company documents included as objects of stamp duty as mentioned in Article 3 shall be subject to stamp duty. 2. The remaining stamps with a value of Rp3,000 and Rp6,000 can still be used by the Company for a period of 1 year after the Stamp Duty Law enforced and cannot be refunded. 3. The stamp duty used to make payment of the Stamp Payable on the Company Documents as referred to in number 2 above, can be used with a total value of the Stamp Duty affixed to the Document with a minimum value of Rp9,000.
3.	Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) terdiri dari 9 Bab dengan 6 (enam) ruang lingkup pengaturan. 2. No. Induk Kependudukan (NIK) menjadi No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif. 3. Pemberian natura yang merupakan pemberian kenikmatan balas jasa yang diterima/peroleh pegawai, karyawan maupun keluarganya tidak dalam bentuk uang merupakan Objek PPh 21. 4. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara dan beberapa jenis barang/jasa dikeluarkan dari objek bebas PPN. 5. Penyediaan listrik dihapus dari pajak terutang tidak dipungut atau tidak dibebaskan dari pengenaan pajak. 6. Penyediaan air bersih dihapus dari pajak terutang tidak dipungut atau tidak dibebaskan dari pengenaan pajak sehingga pemanfaatan air oleh orang/badan terutama untuk pembangkit listrik berpotensi dikenakan PPN. 7. Badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara akan menjadi badan yang pertama dikenakan Pajak Karbon dengan tarif Rp30.000 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan setara.	1. PJB sebagai pelaku usaha wajib memenuhi prasyarat Persetujuan Lingkungan sebagai salah satu prasyarat dalam penerbitan Perizinan Berusaha. 2. PJB dalam menyusun rencana kegiatan/usaha yang berdampak lingkungan harus memiliki Amdal dan UKL-UPL dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung yaitu masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi Amdal yang terkena dampak langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. 3. FABA yang dihasilkan PJB yang berasal dari proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU) atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi termasuk dalam kategori Limbah Non B3 Terdaftar. Sedangkan FABA yang dihasilkan PJB berasal dari *stocker boiler* dan/atau tungku industrl termasuk dalam kategori Limbah B3 Sumber Spesifik (memerlukan Uji Karakteristik untuk menjadi Limbah Non B3 Khusus).

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
REGULATORY CHANGES AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
3.	Government Regulation No. 22 of 2021 concerning the Implementation and Management of the Environment	1. Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU 7/2021) consists of 9 chapters with 6 (six) scopes of regulation. 2. Identity Number (ID) becomes Tax Number (NPWP) for individual taxpayers with due regard to subjective and objective requirements. 3. Giving in kind, which is the provision of enjoyment of remuneration received/obtained by employees, employees or their families not in the form of money, is the object of Income Tax (PPh) 21. 4. Mining products or drilling products taken directly from the source, excluding coal mining products and certain types of goods/services are excluded from VAT-free objects. 5. Electricity provision removed from tax payable is not collected or is not exempt from taxation. 6. The provision of clean water removed from the tax payable is not collected or is not exempt from the imposition of taxes so that the use of water by individuals/agencies, especially for power plants, has the potential to be subject to VAT. 7. Entities engaged in coal-fired power plants will be the first to be subject to a Carbon Tax at the rate of Rp30,000 per kilogram of carbon dioxide equivalent or equivalent unit.	1. PJB as a business actor is required to meet the prerequisites for Environmental Approval as one of the prerequisites for issuing a Business Licensing. 2. PJB in preparing activity/business plans with environmental impacts must have an Environmental Impact Analysis and UKL-UPL by involving community who are directly affected which are the people in the area of environmental impact study who are directly affected by both positive and/or negative impacts from the business plan and/or activities. 3. FABA produced by PJB which comes from the coal burning process at the Coal-Fired Power Plant (CFPP) or from other activities using technology is included in the Registered Non-Hazardous Waste category. Meanwhile, FABA produced by PJB comes from stocker boilers and/or industrial furnaces which are included in the category of Hazardous Waste from Specific Sources (requires Characteristic Test to become Specified Non-Hazardous Waste).
4.	Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	1. Pemberi Kerja TKA wajib memiliki RPTA, menfasilitasi Pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA, mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial, tidak mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama, tidak mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia, membayar DKPTKA, melaporkan penggunaan TKA dan melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setelah perjanjian. 2. Pengesahan RPTKA tidak berlaku bagi TKA sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1). 3. Kewajiban membayar DPTKA tidak berlaku bagi instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, Lembaga sosial, Lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan. 4. Pemberi Kerja TKA yang tidak melakukan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif.	1. Peraturan Pemerintah ini dapat digunakan sebagai acuan PJB Group dalam mempekerjakan TKA. 2. Dalam hal PJB Group tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, maka dapat dikenakan sanksi adminsitratif. 3. Penempatan direksi WNA pada PJB Group berstatus PKWT dan wajib memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki serta dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. 4. PJB Group wajib mengalokasikan anggaran biaya untuk memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
4.	Government Regulation No. 34 of 2021 concerning Foreign Workers	1. Employers of foreign workers are required to hold RPTA, facilitate Indonesian language education and training for foreign workers, register foreign workers in social security programs, not employ foreign workers in concurrent positions in the same company, not employ foreign workers in positions that deal with personnel, pay DKPTKA, report the use of foreign workers and report the implementation of the use of foreign workers after the agreement. 2. Ratification of RPTKA does not apply to foreign workers as stipulated in Article 19 paragraph (1). 3. The obligation to pay DPTKA does not apply to government agencies, representatives of foreign countries, international agencies, social institutions, religious institutions and certain positions in educational institutions. 4. Employers of foreign workers who do not perform their obligations will be subject to administrative sanctions.	1. This Government Regulation can be used as reference for PJB Group in employing foreign workers. 2. In the event that PJB Group does not perform its obligations as regulated in this Government Regulation, it may be subject to administrative sanctions. 3. The placement of foreign directors at PJB Group has the status of PKWT and is required to have competence in line with the position to be occupied and is prohibited from occupying positions in charge of personnel. 4. PJB Group is required to allocate a budget for repatriating foreign workers to their countries of origin after their working relationship ends.
5.	Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja	1. PKWT didasarkan atas: a. Jangka waktu, b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. 2. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 3. PKWT berdasarkan jangka waktu dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 4. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja. 5. PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. 6. Perjanjian Kerja Harian dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 bulan. 7. Perlindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya. 8. Persyaratan pengalihan perlindungan hak apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya.	1. PJB dapat melakukan skema PKWT setelah mendefinisikan terlebih dahulu semua jenis dan sifat pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak tetap. Hal ini untuk memperjelas batasan pekerjaan yang akan dilakukan melalui skema PKWT. 2. PJB dapat memilih mekanisme PKWT berdasarkan jangka waktu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan perusahaan. 3. PJB tidak diperbolehkan mensyaratkan masa percobaan kerja terhadap PKWT. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. 4. Apabila PJB membuat Perjanjian Kerja Harian dengan skema PKWT dan Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja Harian menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
REGULATORY CHANGES AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
		9. Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	5. PJB perlu memastikan bahwa Perusahaan Alih Daya melakukan kewajibannya memberikan perlindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. PJB perlu mensyaratkan dalam Perjanjian Kerja antara PJB dengan Perusahaan Alih Daya perihal pengalihan perlindungan pekerja/buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya dan sepanjang obyek pekerjaan tetap ada (prinsip *Transfer of Undertaking Protection of Employment* atau TUPE).
5.	Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Fixed Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Break Time, and Termination.	1. PKWT is based on: a. Working period, b. The completion of a certain job. 2. PKWT cannot be held for permanent work. 3. PKWT based on a working period is maximum 5 (five) years provided that the entire period of PKWT and its extension is not more than 5 (five) years. 4. PKWT based on the completion of a certain work is based on the agreement of the parties as outlined in the Work Agreement. 5. PKWT does not require probation. 6. Daily Work Agreement is made on condition that the Worker/Labourer works less than 21 (twenty one) days in 1 month. 7. Protection of Workers/Labourers, Wages, welfare, working conditions and disputes that arise are carried out in accordance with the provisions of laws and regulations and are the responsibility of the Outsourcing Company. 8. The requirement for rights transfer of protection in the event of a change in the Outsourcing Company is a guarantee for the continuity of work for the Worker/Labourer and is the responsibility of the Outsourcing Company. 9. The Outsourcing Company must be in the form of a legal entity and must fulfill the business license issued by the Central Government.	1. PJB may carry out PKWT scheme after first defining all types and characteristics of permanent and non-permanent work. This is to clarify the limits of work to be carried out through the PKWT scheme. 2. PJB may choose PKWT mechanism based on the time period or based on the completion of particular job according to the Company needs. 3. PJB is not allowed to require a trial period for PKWT. In the event that a probationary period is required, the required probationary period is null and void and the working period is still counted. 4. In the event PJB establishes Daily Work Agreement with PKWT scheme and the Worker/Labourer works 21 (twenty one) days or more for 3 (three) consecutive months or more, the Daily Work Agreement is invalid and the Employer Relationship between the Employer and the Worker /Labourers change by law based on PKWTT. 5. PJB is required to ensure that the Outsourcing Company performs its obligations to provide protection for Workers/Labourers, Wages, welfare, working conditions and disputes that arise are carried out based on the provisions of the laws and regulations. 6. PJB is required to state in the Employment Agreement between PJB and the Outsourcing Company regarding the transfer of worker/labor protection in the event of a change in the Outsourcing Company and as long as the object of work remains in place (the principle of Transfer of Undertaking Protection of Employment or TUPE).

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
6.	Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/ atau Entitas yang Dimilikinya	1. Entitas yang dimiliki LPI, pihak ketiga, termasuk Fund merupakan subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. 2. Yang menjadi objek Pajak Penghasilan bagi subjek pajak adalah berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Pihak Ketiga sehubungan dengan kerja sama dengan LPI yang berupa: a. Dividen yang berasal dari pembayaran Kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal, b. Dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, merupakan objek Pajak Penghasilan namun terhadap pihak ketiga yang merupakan subjek pajak dalam negeri hal tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.	1. PJB Group dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang dapat melakukan kerjasama dengan LPI sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PP ini. 2. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh PJB Group sebagai pihak ketiga yang juga merupakan subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan kerjasama dengan LPI, maka dikecualikan sebagai objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan.
6.	Government Regulation No. 49 of 2021 concerning Tax Treatment of Transactions Involving Investment Management Institutions and/or Owned Entities	1. Entities owned by LPI, third parties, including Fund are either domestic tax subjects or foreign tax subjects. 2. The object of Income Tax for tax subjects is in the form of any additional economic capability received or obtained, both from Indonesia and overseas, which can be used for consumption or to increase wealth in any name and in any form. 3. Income received or earned by Third Parties in connection with cooperation with LPI in the form of: a. Dividends originating from Repayments due to liquidation that exceed the amount of paid-up capital or the value of the initial investment, b. Other dividends in whatever name and form are objects of income tax, but for third parties who are domestic tax subjects, they are excluded as tax objects.	1. PJB Group can be categorized as a third party that can cooperate with LPI based on Article 4 paragraph (2) of this Governmental Regulation. 2. Income in the form of dividends received or obtained by PJB Group as a third party who is also a domestic tax subject in connection with the cooperation with LPI, is excluded as a tax object as referred to in Article 4 paragraph (3) letter f of the Income Tax Law.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
REGULATORY CHANGES AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
7.	Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1. Ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan diatur dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral. 2. Perizinan Berusaha pada sub-sektor ketenagalistrikan terdiri atas: a. Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, b. Jasa penunjang tenaga listrik. 3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha. 4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). 5. Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, dikenai sanksi administratif oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pelaku Usaha pada sub-sektor ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban, persyaratan, dan/atau standar pada subsektor ketenagalistrikan dikenai sanksi administratif yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya.	1. Dalam hal PJB telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 2. PJB perlu melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS setelah mendapatkan notifikasi melalui surat elektronik yang didaftarkan. 3. Apabila kegiatan usaha yang dilakukan PJB melanggar ketentuan mengenai kewajiban, persyaratan, dan/atau standar pada sub sektor ketenagalistrikan maka PJB akan dikenakan sanksi administratif.
7.	Government Regulation No. 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing	1. Provisions for the implementation of Business Licensing related to electricity are regulated in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the energy and mineral resources sector. 2. Business Licensing in the electricity sub-sector consists of the following: a. Electricity provision for public purposes, b. Electrical power support services.	1. In the event that PJB has obtained a Business Licensing but has not been effective before this Government Regulation comes into effect, the Business Licensing is processed following the provisions in this Government Regulation. 2. PJB is required to update access rights data on the OSS System after receiving notification via registered electronic mail.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
		3. Risk-Based Business Licensing is carried out based on the determination of the Risk level and business activity scale rating. 4. Risk-Based Business Licensing basically changes the concept of licensing which is ex-ante (requirements are met at the beginning) with the concept of licensing ex-post (verification is carried out afterward). 5. Every Business Actor based on the results of Supervision found a discrepancy or violation of Business Licensing in the environment and forestry sector, is subject to administrative sanctions by the ministry who administers government affairs in the environmental and forestry sector, governor, regent/mayor, SEZ Administrator, or the head of the KPBPB Concession Board based on the provisions of the legislation. 6. Business actors in the electricity sub-sector who violate the provisions regarding obligations, requirements, and/or standards in the electricity sub-sector are subject to administrative sanctions determined by the ministry who administers government affairs in the energy and mineral resources sector or the Governor based on their working area.	3. If the business activities carried out by PJB violate the provisions regarding obligations, requirements, and/or standards in the electricity sub-sector, PJB can be subject to administrative sanctions.
8.	Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional	1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha mendapatkan fasilitas kemudahan proyek strategis nasional yaitu pada tahapan: a. Perencanaan, b. Penyiapan, c. Transaksi, d. Konstruksi, e. Operasi dan pemeliharaan (Pasal 2), f. Pengadaan barang/jasa. 2. Kategori proyek strategis yang penyediaannya dapat dilakukan melalui prakarsa badan usaha meliputi: a. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik, b. Optimasi barang milik negara/barang milik daerah, c. Optimasi aset BUMN, d. Meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah (pasal 15). 3. *Project Develpoment Facilities* (PDF) dapat diberikan pemerintah pada Proyek Strategis Nasional berupa : a. Fasilitas untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyiapan, b. Fasilitas untuk meningkatkan efektifitas pelayanan transaksi. (Pasal 20).	1. Dalam hal PJB sebagai Badan Usaha Pemrakarsa, maka berpeluang untuk mendapatkan fasilitas kemudahan proyek strategis nasional. 2. Dalam hal PJB menjalankan kegiatan usaha yang termasuk dalam risiko tinggi pada proyek strategis nasional, maka berpeluang untuk mendapatkan percepatan perizinan berusaha. 3. PJB sebagai Badan Usaha dapat bertindak sebagai pemrakarsa proyek strategis nasional dengan melengkapi studi kelayakan dan dokumen pendukung atas proyek strategis nasional yang diusulkan.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
REGULATORY CHANGES AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
		4. Penyiapan Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan Bersama dengan Badan Usaha atau Lembaga/institusi/organisasi internasional berdasarkan kesepakatan dengan Menteri/ Kepala Lembaga/Gubernur atau Bupati/Walikota Pemilihan badan usaha tersebut dilakukan melalui Panel Konsultan atau penunjukan langsung. (Pasal 21) 5. Pasal 29 dan Pasal 30, Apabila Proyek Strategis Nasional diprakarsai oleh Pemerintah maka pengadaan badan usaha pelaksana dilakukan melalui pemilihan panel. 6. Apabila Proyek Strategis Nasional diprakarsai oleh Badan Usaha maka pengadaan badan usaha pelaksana dilakukan melalui *right to match* kepada Badan usaha Pemrakarsa. 7. Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan pelaksanaan kemudahan proyek strategis nasional.	
8.	Government Regulation No. 42 of 2021 on the Convenience of National Strategic Projects	1. The central government, regional governments, and/or business entities shall obtain facilities for facilitating national strategic projects, namely at the following stages: a. planning, b. Setup, c. Transaction, d. Construction, e. Operation and maintenance (Article 2), f. Procurement of goods/services. 2. Categories of strategic projects whose provision can be made through business entity initiatives include: a. Provision of public service infrastructure, b. Optimization of state property/regional property, c. SOE assets optimization, d. Increase state and/or regional income (article 15). 3. Project Development Facilities (PDF) may be provided by the government for National Strategic Projects in the form of: a. Facilities to increase the effectiveness of the implementation of the preparation, b. Facilities to increase the effectiveness of transaction services. (Article 20).	1. PJB, as the Initiating Business Entity, has the opportunity to obtain facilities for facilitating national strategic projects. 2. PJB carries out business activities that are included in high risk in national strategic projects, it has the opportunity to obtain accelerated business licensing. 3. PJB as a Business Entity can act as the initiator of a national strategic project by completing a feasibility study and supporting documents for the proposed national strategic project.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
		4. Preparation of National Strategic Projects can be carried out together with Business Entities or Institutions/institutions/international organizations based on an agreement with the Minister/Head of Institution/Governor or Regent/Mayor The selection of the business entity is carried out through a Consultant Panel or direct appointment. (Article 21) 5. Article 29 and Article 30, if the National Strategic Project is initiated by the Government, the procurement of implementing business entities which is carried out through panel selection. 6. If the National Strategic Project is initiated by a Business Entity, the procurement of the implementing business entity is carried out through the Right to Match to the Initiating Business Entity. 7. The Minister may exercise discretion to overcome concrete problems in the administration of government affairs related to the implementation of the ease of national strategic projects.	
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM oleh BUMN dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara Langsung oleh BUMN sebagai Pemungut PPN	Beberapa ketentuan terkait dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya (UU 8/1983) dilakukan penyesuaian dan harmonisasi sebagai berikut: 1. Penghapusan barang dan jasa tertentu dari barang dan jasa yang dikenai PPN (*negative list*). Pasal 4 UU 8/1983 menetapkan 4 jenis barang dan 16 jenis jasa yang menjadi non-objek PPN. 2. Dengan ditetapkannya UU 7/2021 terdapat penghapusan terhadap kelompok Barang/Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 3. Menghapus ketentuan "menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat" dari pajak terutang yang tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan pajak. 4. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat UU 7/2021 mulai diundangkan sampai dengan tanggal 1 April 2022, pengenaan PPN atas objek pajak masih menggunakan ketentuan sebelumnya yaitu sebesar 10%.	Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KMK.03/2021, PJB ditetapkan sebagai pemungut PPN. Untuk itu agar dapat diperhatikan hal-hal terkait faktur pajak yang diterbitkan oleh penyedia barang/jasa kepada PJB sebagai berikut: 1. Faktur Pajak yang diterbitkan kepada PJB dengan nilai tagihan lebih dari Rp10.000.000, maka Faktur Pajak tersebut wajib diterbitkan dengan Kode Transaksi 03. 2. Faktur Pajak yang diterbitkan kepada PJB dengan nilai tagihan sampai dengan Rp10.000.000, maka Faktur Pajak tersebut wajib diterbitkan dengan Kode Transaksi 01/04/08 (tergantung BKP dan/atau JKP yang diserahkan). 3. Faktur Pajak yang berasal dari pemungut PPN atau dengan kata lain transaksi antar pemungut PPN sesuai Pasal 2 ayat 3 PMK No.8/PMK.03/2021 (Contoh: PT Indonesia Comnets Plus, PT Hutama Karya (Persero), PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo, dll), maka penggunaan Kode Transaksi Faktur Pajak yang digunakan adalah Kode Transaksi 01/04/08 sesuai BKP dan/atau JKP yang diserahkan. Transaksi antar pemungut PPN tidak memperhatikan batasan nominal.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
REGULATORY CHANGES AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
9.	Ministry of Finance Regulation No. 8/PMK.03/2021 concerning Procedures for Collecting, Depositing, VAT Reporting and PPnBM by SOE and Certain Companies Directly Owned by SOE as VAT Collectors	Several related provisions in Law No. 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Taxes Sales of Luxury Goods and their amendments (Law 8/1983) are adjusted and harmonized as follows: 1. Elimination of certain goods and services from goods and services subject to VAT (negative list). Article 4 of Law 8/1983 stipulates 4 types of goods and 16 types of services that are non-object of VAT. 2. With the enactment of Law 7/2021, there is an abolition of the group of goods/services that are not subject to Value Added Tax. 3. Removing the provision of "ensure the availability of clean water and electricity which is urgently needed by the community" from taxes owed that are not collected or exempt from taxation. 4. Increase in VAT rate from 10% to 11% which will take effect April 1, 2022, then to 12% which will take effect no later than January 1, 2025. So it can be concluded that when Law 7/2021 was promulgated until April 1, 2022, the imposition of VAT on tax objects was still using the previous provision of 10%.	Based on the Decree of the Ministry of Finance No. 30/KMK.03/2021, PJB is designated as a VAT collector. Therefore, to consider the matters related to tax invoices issued by providers of goods/services to PJB is as follows: 1. Tax Invoice issued to PJB with a billing value which is more than Rp10,000,000, must be issued with Transaction Code 03. 2. Tax Invoice issued to PJB with invoice value which is up to Rp10,000,000, must be issued with Transaction Code 01/04/08 (depending on BKP and/or JKP submitted). 3. Tax Invoices from VAT collectors; in other words, transactions between VAT collectors based on Article 2 paragraph 3 PMK No. 8/PMK.03/2021 (Examples: PT Indonesia Comnets Plus, PT Hutama Karya Persero, PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo, etc.), the use of the Tax Invoice Transaction Code used is the Transaction Code 01/04/08 according to the BKP and/or JKP submitted. Transactions between VAT collectors are not limited to nominal limits.
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan PPM untuk Impor/ Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu	Penanganan dampak pandemi Corona Virus *Disease* 2019 masih diperlukan pemberian insentif perpajakan, sehingga diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dengan memperhatikan kapasitas fiskal untuk mendukung program penguatan Kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.	1. PJB berpotensi mendapatkan fasilitas pembebasan PPN untuk impor dan/ atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dalam hal PJB bertindak sebagai PKP (pemilik proyek) atau sebagai perusahaan EPC untuk mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan (baik terpasang maupun terlepas) yang digunakan langsung oleh PKP dalam memproduksi Barang Kena Pajak Tertentu, termasuk barang yang diimpor dan/atau diserahkan oleh Perusahaan EPC. 2. PJB berpotensi mendapatkan fasilitas pembebasan PPN untuk impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa *Liquified Natural Gas.*

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
10.	Ministry of Finance Regulation No. 115/ PMK.03/2021 concerning Procedures for Providing VAT Exemption Facilities for the Import/Delivery of Certain Taxable Goods	Handling the impact of 2019 Corona Virus Disease pandemic, it is still necessary to provide tax incentives; therefore, it is necessary to extend the period of giving tax incentives by considering fiscal capacity to support programs to strengthen public health and accelerate national economic recovery.	1. PJB has the potential to receive a VAT exemption facility for the import and/ or delivery of Certain Taxable Goods in the event that PJB acts as a PKP (project owner) or as an EPC company for machinery and factory equipment which are an integral part (both installed and detached) which are used directly by PKP in producing Certain Taxable Goods, including goods imported and/or delivered by the EPC Company. 2. PJB has the potential to receive a VAT exemption facility for the import and/or delivery of Certain Taxable Goods in the form of Liquified Natural Gas.
11.	Peraturan Menteri ESDM No. 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan	Persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan ditetapkan dengan maksud untuk mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi Instalasi Tenaga Listrik, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan. Persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan harus dipenuhi pada tahap perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik dengan tujuan untuk mencegah: 1. Kerusakan Instalasi Tenaga Listrik, 2. Gangguan penyediaan tenaga listrik, 3. Bahaya sengatan tenaga listrik dan kebakaran, 4. Keadaan luar biasa dan melakukan tindakan perlindungan, 5. Bahaya dan gangguan elektromagnetik, 6. Kerusakan lingkungan hidup. Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut diperlukan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan serta SNI atau standar internasional terkait.	1. PJB wajib mematuhi persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan. Persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan tersebut harus dipenuhi pada tahap perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik. 2. PJB wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2). Penerapan SMK2 dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan (21 Mei 2021). 3. PJB harus melakukan audit penerapan SMK2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Pelaksanaan audit tersebut dilakukan oleh penanggung jawab Teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2). 4. Apabila PJB mendapat peringkat ketaatan dengan predikat merah atau predikat hitam, maka PJB dikenakan sanksi administratif.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
REGULATORY CHANGES AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
11.	Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 10 of 2021 concerning Electrical Safety	General requirements for Electricity Safety are established with the purpose to create reliable and safe conditions for Electrical Power Installations, safe from danger to humans and environment or eco-friendly. General requirements for Electrical Safety must be met at the stages of planning, construction and installation, inspection and testing, operation, and maintenance of Electrical Power Installations aimed to prevent: 1. Damage to Electrical Power Installations, 2. Disruption of electricity supply, 3. Danger of electric shock and fire, 4. Extraordinary circumstances and protective measures, 5. Electromagnetic hazards and interference, 6. Environmental damage. In order to achieve these aims and objectives, it is required to comply with the legal provisions regarding Electrical Safety and SNI or related international standards.	1. PJB is required to comply with the general requirements of Electricity Safety. The general requirements for Electrical Safety must be met at the planning, construction and installation stages, inspection and testing, operation, and maintenance of the Electrical Power Installation. 2. PJB is required to implement the Electricity Safety Management System (SMK2). The application of SMK2 is carried out no later than 2 (two) years from the promulgation of this Ministerial Regulation (May 21, 2021). 3. PJB must audit the implementation of SMK2 at least 1 (one) time a year. The audit is carried out by the person in charge of Engineering who occupies a certain position and is given the authority to make decisions on the realization of Electricity Safety (PJK2). 4. In case PJB receives a compliance rating with a red predicate or a black predicate, then PJB is subject to administrative sanctions.
12.	Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	1. Terdapat perubahan istilah dalam perizinan berusaha ketenagalistrikan, dimana untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum disebut IUPTLU sedangkan untuk kepentingan sendiri disebut IUPTLS . 2. Terhadap IUPTL dan IUJPTL yang telah terbit sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. 3. Terdapat jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik baru yang diatur yaitu usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. 4. Terdapat kewajiban-kewajiban bagi pemegang IUPTLU seperti keselamatan ketenagalistrikan, pelaporan, pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dan lainnya	1. PJB saat ini telah memiliki IUPTL dan IUJPTL sebagai pemenuhan perizinan di bidang ketenagalistrikan. Terhadap keberlakuan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2021, maka IUPTL dan IUJPTL tersebut tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. 2. Terdapat potensi usaha baru bagi PJB yaitu usaha jasa penunjang tenaga listrik baru, yaitu usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. 3. PJB wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan serta kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2021.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
12.	Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2021 concerning the Implementation of Electricity Business	1. There is a change in terms in the licensing of electricity business, where for the Business of Providing Electricity for the public interest it is called IUPTLU while for self-interest it is called IUPTLS. 2. The previously issued IUPTL and IUJPTL shall be declared to remain valid until their validity period ends. 3. There is a new type of electricity support service business regulated which is other service businesses that are directly related to the provision of electricity. 4. There are obligations for IUPTLU holders such as electricity safety, reporting, prioritizing domestic products and potentials and others	1. PJB currently has IUPTL and IUJPTL as the fulfillment of permits in the electricity sector. With respect to the enactment of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 11 of 2021, the IUPTL and IUJPTL will remain valid until their validity period ends. 2. There is a new business potential for PJB, namely a new electric power support service business or other service businesses that are directly related to the provision of electricity. 3. PJB is required to be aware of the provisions and obligations stipulated in the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 11 of 2021.
13.	Peraturan Menteri LHK No. 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3	1. Peraturan Menteri LHK No. 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 449 huruf a sampai dengan huruf q Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Kegiatan pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam ketentuan ini meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan. 3. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. PJB wajib melakukan pelaporan pengelolaan atas seluruh limbah B3 yang dihasilkan oleh Unit Pembangkit kepada Menteri LHK secara elektronik melalui *website* Kementerian Lingkungan Hidup. 2. Dalam hal terdapat perubahan status limbah terhadap Limbah B3 yang dihasilkan PJB menjadi Limbah Non B3, maka PJB wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan yang memuat rincian pengelolaan Limbah Non B3. 3. Sebelum melakukan kerjasama dengan Pihak Pengangkut, PJB perlu meneliti kelengkapan perizinan yang dimliki oleh Pihak Pengangkut Limbah B3, sehingga PJB terbebas dari risiko tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan oleh Pihak Pengangkut Limbah B3. 4. Dalam hal PJB akan memanfaatkan limbah B3 sebagai produk samping, maka PJB harus mengajukan permohonan tertulis penetapan limbah B3 sebagai produk samping kepada Menteri LHK. 5. Tidak terpenuhinya ketentuan ini dapat berdampak pada tidak tercapainya target perolehan Proper Hijau Unit Pembangkitan terkait.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
REGULATORY CHANGES AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
13.	Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 6 of 2021 concerning Procedures and Requirements for Hazardous Waste Management	1. Regulation of the Ministry of Environment and Forestry No. 6 of 2021 concerning Procedures and Requirements for Hazardous Waste Management is a form of implementation of Article 449 letter a to letter q of Government Regulation No. 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. 2. Hazardous waste management activities regulated in this provision include reduction, storage, collection, transportation, utilization, processing and/or landfilling. 3. Violation of this provision will be subject to sanctions based on applicable laws and regulations.	1. PJB is required to report the management of all hazardous waste generated by the Generation Unit to the Ministry of Environment online through the official website of the Ministry of Environment. 2. In the event that there is a change in the status of PJB's hazardous waste to Non-hazardous Waste, PJB is then required to make changes to the Environmental Approval containing details of the management of Non-hazardous Waste. 3. Before collaborating with the Transporting Party, PJB is required to examine the completeness of the permits owned by the Hazardous Waste Transporter; therefore, PJB is free from the risk of not fulfilling the completeness of the permit documents by the Hazardous Waste Transporter. 4. In the event that PJB will utilize hazardous waste as a by-product, PJB then must submit a written application for the determination of hazardous waste as a by-product to the Ministry of Environment. 5. Non-fulfillment of this provision may result in the non-achievement of the relevant Generation Unit for the Green Proper achievement target.
14.	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 104 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019	1. Pelaksanaan Sistem Kerja Selama Pandemi Covid-19 terbagi atas 2 (dua) skema yaitu melalui WFH dan WFO secara bergantian atau Merumahkan pegawai/buruh. 2. Pelaksanaan WFO dapat dilakukan dengan ketentuan persentase jumlah pekerja/buruh dengan mengikuti pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau mengatur pembagian hari kerja dalam 1 (satu) bulan secara bergiliran serta mengurangi jam kerja. 3. Merumahkan pekerja/buruh merupakan tindakan pengusaha meliburkan atau membebaskan pekerja/buruh dari pekerjaannya dengan cara memerintahkan tinggal di rumah selama batas waktu tertentu dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dengan ketentuan tetap masih mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan tidak dalam upaya Pemutusan Hubungan Kerja.	1. PJB dapat menerapkan pelaksanaan Sistem Kerja Selama Pandemi Covid-19 terbagi atas 2 (dua) skema yaitu melalui WFH dan WFO secara bergantian atau merumahkan pegawai/buruh. 2. PJB dalam melaksanaan WFO dapat dilakukan dengan ketentuan persentasi jumlah pekerja/buruh mengikuti pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, mengatur pembagian hari kerja dalam 1 (satu) bulan secara bergiliran serta mengurangi jam kerja. 3. PJB dapat merumahkan pegawainya dengan cara meliburkan pegawainya atau membebaskan dari pekerjaannya dengan memerintahkan tinggal di rumah selama batas waktu tertentu dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dengan ketentuan tetap masih mempunyai hubungan kerja dengan PJB dan tidak dalam upaya Pemutusan Hubungan Kerja.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Changes Explanation	Dampaknya Terhadap PJB secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PJB
		4. Pekerja/buruh yang dikenakan bekerja bergilir WFH dan WFO atau dirumahkan tetap berhak atas upah. Namun, pengusaha dapat melakukan penyesuaian upah apabila pengusaha sungguh-sungguh mengalami dampak pandemi Covid-19 serta didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan dilakukan secara adil dan proporsional dengan memperhatikan kelangsungan hidup pekerja/buruh dan kelangsungan berusaha.	4. Pegawai PJB yang dikenakan bekerja bergilir WFH dan WFO atau dirumahkan tetap berhak atas upah. Namun, PJB dapat melakukan penyesuaian upah apabila PJB sungguh-sungguh mengalami dampak pandemi Covid-19 serta didasarkan pada kesepakatan antara PJB dengan pegawai PJB dan dilakukan secara adil dan proporsional dengan memperhatikan kelangsungan hidup pegawai PJB dan kelangsungan berusaha. 5. Secara bersama-sama, PJB dan pegawai PJB melakukan langkah-langkah pencegahan dan menjadikan PHK sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh setelah melalui berbagai upaya dalam menyikapi permasalahan hubungan industrial akibat pandemi Covid-19.
14.	Ministry of Manpower Decree No. 104 of 2021 concerning Guidelines for Employment Relations During the 2019 Corona Virus Pandemic	1. Implementation of the Work System During the Covid-19 Pandemic is divided into 2 (two) schemes which are WFH and WFO (shifted) or Temporarily Laying off employees/laborers. 2. WFO implementation can be carried out with provisions on the percentage of the number of workers/laborers by following the restrictions on community activities set by the government and/or regulating the division of working days in 1 (one) month in rotation and reducing working hours. 3. Workers/laborers lay-off is the employer's action to leave or release workers/laborers from their work by ordering them to stay at home for a certain time limit in the context of preventing the spread of Covid-19 provided that they still have a working relationship with the entrepreneur and are not in an attempt to terminate the employment relationship. 4. Workers/laborers who are subject to shifted work during WFH and WFO or laid off are still paid. However, employers can make wage adjustments if the employer significantly experiences the impact of the Covid-19 pandemic and is based on an agreement between the employer and the worker/labor and is carried out fairly and proportionally by considering the welfare of the worker/labor and employer's business continuity.	1. PJB may implement the implementation of the Work System During the Covid-19 Pandemic which is divided into 2 (two) schemes which are WFH and WFO (shifterd) or temporarily laying off employees/laborers. 2. PJB in implementing WFO can be carried out in a term that the percentage of the number of workers/labourers follows the restrictions on community activities set by the government, regulates the division of working days in 1 (one) month in rotation, and reduces working hours. 3. PJB may lay off its employees by granting its employees a leave or release from their work by ordering them to stay at home temporarily in order to prevent the spread of Covid-19 provided in a term that they still have a working agreement with PJB and are not in a condition to terminate the employment. 4. PJB employees who are subject to shifted work during WFH and WFO or are laid off are still paid. However, PJB can make wage adjustments if PJB significantly experiences the impact of the Covid-19 pandemic and is based on an agreement between PJB and PJB employees and is carried out fairly and proportionally by considering the welfare of PJB employees and business continuity. 5. PJB and PJB employees coordinatively take preventive steps and make layoffs as the last step that can be taken after going through various efforts in addressing industrial relations problems due to the Covid-19 pandemic.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND MATERIAL FACTS AFTER THE ACCOUNTANT REPORTING DATE

Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan terbit memuat informasi terkait kejadian material setelah periode pelaporan yaitu:

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 25 Januari 2022 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga susunan Dewan Komisaris and Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

   Komisaris Utama : Dedeng Hidayat
   Komisaris : Komang Parmita
   Komisaris : Jisman Parada Hutajulu
   Komisaris : Hendra Iswahyudi
   Komisaris : Emir Kresna Wardana
   Komisaris : Bagus Puruhito
   Direktur Utama : Gong Matua Hasibuan
   Direktur Operasional - 1 : M. Yossy Noval A.
   Direktur Operasional - 2 : Rachmanoe Indarto
   Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi : Karyawan Aji
   Direktur Pengembangan dan Niaga : Iwan Purwana
   Direktur Keuangan : Rawan Insani
2. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 10 Februari 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham dengan Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali untuk mengakuisisi 1.050.000 lembar saham atau setara dengan 1% kepemilikan atas PJBS dengan nilai peralihan sebesar Rp11.184.

Dari peristiwa di atas, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian grup.

After the Consolidated Financial Statements for 2021 fiscal year audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner was published, it contains information related to material events after the reporting period, including:

1. According to Notarial Deed No. 15 dated January 25, 2022, from Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders decided to approve changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, so that the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:
   President Commissioner : Dedeng Hidayat
   Commissioner : Komang Parmita
   Commissioner : Jisman Parada Hutajulu
   Commissioner : Hendra Iswahyudi
   Commissioner : Emir Kresna Wardana
   Commissioner : Bagus Puruhito
   President Director : Gong Matua Hasibuan
   Director of Operation - 1 : M. Yossy Noval A.
   Director of Operation - 2 : Rachmanoe Indarto
   Director of Human Resources and Administration : Karyawan Aji
   Director of Development and Commercial : Iwan Purwana
   Director of Finance : Rawan Insani
2. According to Shares Purchase Agreement dated February 10, 2022, the Company held shares purchase agreement with the Welfare Foundation of PT Pembangkitan Jawa-Bali for the acquisition of 1,050,000 shares or equivalent to 1% ownership of PJBS with transition value of Rp11,184.

From the events above, there is no significant impact on the consolidated financial statements of the Group.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan terbit memuat informasi terkait peristiwa yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi di tahun 2021 adalah dampak Covid-19 dimana sejak awal tahun 2020, telah terjadi wabah penyakit Covid-19 di seluruh dunia, yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi roda perekenomian antara lain, permintaan global untuk produk dan jasa dan rantai pasokan.

Di saat yang sulit ini, Grup terus berupaya mempertahankan kegiatan operasional dan terus berfokus untuk tetap efisien serta melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan. Tim kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3LH) di lapangan dan di Surabaya telah menerapkan langkah-langkah pencegahan maupun prosedur kesehatan yang harus dipatuhi setiap karyawan, termasuk peningkatan perilaku higienis, larangan perjalanan non esensial, penerapan jarak fisik di tempat kerja, identifikasi kelompok risiko tinggi di Grup, dan sedapat mungkin bekerja dari rumah untuk para karyawan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Setiap unit bisnis telah menyiapkan rencana manajemen krisis dan menyiapkan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Prioritas pertama Grup adalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan pemasok. Beberapa kegiatan utama yang telah Grup lakukan pada masa pandemi ini, meliputi antara lain:

a. Menjalankan program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna memastikan kesehatan karyawan,
b. Memberikan arahan dan dukungan kepada karyawan,
c. Memantau dengan cermat kapasitas infrastruktur dan keamanan kegiatan operasional,
d. Mengikuti arahan dari Pemerintah dan organisasi kesehatan,
e. Senantiasa melayani dan melibatkan pelanggan dan pemasok
f. Mengembangkan rencana kami sebagaimana diperlukan.

After the Consolidated Financial Statements for the audited 2021 fiscal year by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner are published containing information related to extraordinary and rare events in 2021, is the impact of Covid-19 where since the beginning of 2020 there was the Covid-19 outbreak throughout the world, that was stated by the World Health Organization (WHO) as pandemic. Covid-19 pandemic greatly influences the economy, including global demand for products and services as well as supply chains.

In this challenging time, the Group continuously strives to maintain operational activities and focuses to keep efficient as well as protects the employees health and safety. Health, Safety, and Environment Teams in the sites and Surabaya have implemented prevention steps and health procedures that are obliged to be complied by each employee, including the improvement of hygienic behaviour, prohibition of non-essential trip, implementation of physical distancing in workplace, identification of highrisk group in the Group, and as much as possible works from home for employees who indirectly involved in the production activities. Every business unit has prepared critical management plans and the required prevention actions.

The first priority of the Group is health, safety and welfare of the employees, customers, and suppliers. Several main activities that has been implemented by the Group during this pandemic, including the following:

a. Conducting promotional, preventive, curative and rehabilitative programs to ensure the health of employees,
b. Providing instruction and support for the employees,
c. Closely monitoring the capacity of infrastructure and the safety of operational activity,
d. Following guidance from the Government and health organization,
e. Continuing to serve and engage with the customers and suppliers,
f. Evolving our plans as necessary.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI
FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Grup telah melakukan penilaian atas dampak kejadian ini terhadap rencana operasi dan bisnis PJB. Berdasarkan penilaian yang dilakukan di atas, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional PJB sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi Covid-19 dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi PJB.

The Group has assessed this event impacts to PJB operational and business plans. Based on the assessment above, management does not see any material uncertainty that will cause significant losses to the business and operational of PJB until the settlement date of the consolidated financial statements. Management will continue to monitor the development of the Covid-19 pandemic and takes required actions related to its impact to the business, financial position, and operation results of PJB.

KEY PERFORMANCE INDICATOR DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
KEY PERFORMANCE INDICATOR AND SOUNDNESS LEVEL OF THE COMPANY

Key Performance Indicator (KPI)
Key Performance Indicator (KPI)

Sistem manajemen kinerja yang baik merupakan Inti bagi Perusahaan untuk memaksimalkan pencapaian visi dan misinya dengan mengoptimalisasi sumberdaya yang dimiliki. KPI diyakini sebagai sistem yang mampu memuat ukuran dengan merepresentasikan kinerja dari keseluruhan bagian organisasi, serta memuat indikator untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam tujuan mencapai target Perusahaan.

Pengelolaan KPI yang meliputi penyusunan standar, indikator, target kinerja Perusahaan dan penjabarannya sampai dengan satuan unit kerja terkecil di lingkungan Perusahaan serta seluruh pegawai dilakukan oleh Satuan Manajemen Mutu & Kinerja yang berada dibawah Satuan Manajemen Risiko dan Kinerja.

Rapat Umum Pemegang Saham RKAP PJB 2021 dimana salah satu agenda didalamnya terkait Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicator* (KPI)/Kontrak Manajemen Tahun 2021 oleh Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021. Adapun Realisasi KPI Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perusahaan tahun 2021 adalah sebesar 96,13 sebagaimana tabel berikut:

Good performance management system is the Core for the Company to maximize vision and mission achievement by optimizing its resources. KPI is believed as the system that is able to contain measurement by representing performance from the overall sections of organization, as well as contain indicators to evaluate organization performance with the purpose to achieve the Company targets.

KPI management covers the preparation of standards, indicators, performance targets of the Company, and the explanation even to the smallest work unit within the Company as well as all employees, performed by Quality and Performance Management Unit under the Risk and Performance Management Unit.

General Meeting of Shareholders on 2021 ABOP of PJB where one of its agendas is related to the Approval and Ratification of Key Performance Indicator (KPI)/Management Contract of 2021 by the Company's Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors held on January 28, 2021. The realization of Management Contract KPI between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders of the Company in 2021 was 96.13 as in the following table:

Tabel Realisasi Kontrak Manajemen Tahun 2021
Table of Management Contract Realization in 2021

No.	Indikator Kinerja Kunci Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value	Keterangan Description
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Fokus Pelanggan** Customer Focus		**17**				**9,68**	
1.1	*Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) Jawa Bali Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) Java Bali							
	a. EFOR Pembangkit PLTU Batubara Eksisting EFOR of Existing CFPP	▼	%	6	1,08	0,92	110,00%	6,60	🟢
	b. EFOR Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali EFOR of Java Bali AMC CFPP	▼	%	6	3,15	4,68	51,42%	3,08	🔴
	c. EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara EFOR of Non CFPP	▼	%	5	0,93	3,54	0,00%	0,00	🔴
II	**Efektifitas Produk dan Proses** **Products and Process Effectiveness**		**38**				**38,91**	
2.1	*Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit Jawa Bali Equivalent Availability Factor (EAF) of Java Bali Power Plant:							
	a. EAF Pembangkit PLTU Batubara Eksisting EAF of Existing CFPP	▲	%	5	93,56	95,12	101,66%	5,08	🟢
	b. EAF Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali EAF of Java Bali AMC CFPP	▲	%	5	86,30	83,31	96,53%	4,82	🟡
	c. EAF Pembangkit Non PLTU Batubara EAF of Non CFPP	▲	%	5	94,91	95,21	100,31%	5,01	🟢
2.2	Umur Persediaan Batubara Eksisting dan AMC Jawa Bali Coal Supply Maturity of Existing Coal and Java Bali AMC	◀▶	Hari Days	4	15-22	-	100,00%	4,00	🟢
2.3	*Milestone Achievement* proyek JV PLTS Cirata Milestone Achievement of JV Project for Cirata SPP	▲	Tahapan Stages	4	**SM 1.** Financing Date + IPPKH **SM 2.** Design Engineering and EPC 20% (PV Modules + Floater 20 MW)	**SM 1.** Financing Date + IPPKH **SM 2.** Design Engineering and EPC 15,23%	87,33%	3,49	🔴
2.4	*Purchasing Efectiveness*	▲	%	5	2,00	9,19	110,00%	5,50	🟢
2.5	Jumlah unit *power plant* yang sudah mengimplikasikan teknologi digital Total power plant units that have been implementing digital technology	▲	*Power Plant*	5	5	17	110,00%	5,50	🟢
2.6	*Co-firing biomass*	▲	MW	5	35,21	92,27	110,00%	5,50	🟢
III	**Fokus Tenaga Kerja** **Workforce Focus**		**12**				**12,20**	
3.1	*Human Capital Readiness* (HCR)	▲	Skor Score	2	4,56	4,56	100,00%	2,00	🟢
3.2	*Organizational Capital Readiness* (OCR)	▲	Skor Score	2	4,56	4,56	100,00%	2,00	🟢

KEY PERFORMANCE INDICATOR DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
KEY PERFORMANCE INDICATOR AND SOUNDNESS LEVEL OF THE COMPANY

No.	Indikator Kinerja Kunci Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value	Keterangan Description
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3	Produktivitas Pegawai Employee Productivity	▲ GWh/ Pegawai GWh/ Employee	2	6,98	7,73	110,00%	2,00	●
3.4	Pemenuhan *Talent Pool* dan *Talent Mobility* Talent Pool and Talent Mobility Fulfillment	▲						
	a. % Perempuan dalam *nominated talent* % Female in nominated talent	▲ %	3	15,00	15,00	100,00%	3,00	●
	b. % Millenial (<40 tahun) dalam *top talent* % millennial (<40 years old) in top talent	▲ %	3	50,00	50,00	100,00	3,00	●
IV	**Keuangan dan Pasar** **Financial and Market**		**21**				**22,75**	
4.1	Laba Rugi Tahun Berjalan Profit or Loss for the Year	▲ Rp Miliar Rp Billion	4	3.207,55	5.820,19	110,00%	4,40	●
4.2	EBITDA	▲ Rp Miliar Rp Billion	4	6.810,14	7.677,48	110,00%	4,40	●
4.3	Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit Cost of Electricity Supply (CES) of Power Plant:							
	a. BPP Pembangkit Eksisting CES of Existing Power Plant	▼ Rp/ KWh	4	1.047,75	1.034,27	101,28%	4,05	●
	b. BPP Pembangkit AMC CES of AMC Power Plant	▼ Rp/ KWh	3	802,93	716,37	110,00%	3,30	●
4.4	Sinergi Synergy							
	a. Sinergi antar Anak Perusahaan Lain Synergy among Other Subsidiaries	▲ Rp Miliar Rp Billion	3	982,44	1.612,36	110,00%	3,30	●
	b. Sinergi dengan Purhalis (termasuk O&M/AMC) Synergy with Purharlis (including O&M/AMC)	▲ Rp Miliar Rp Billion	3	22,00	36,97	110,00%	3,30	●
V	**Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan** **Leadership, Governance, and Community Responsibility**		**12**				**12,60**	
5.1	Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Implementation of Good Corporate Governance (GCG)	▲ Skor Score	3	95,56	95,67	100,12%	3,00	●
5.2	*Maturity Level* ERM	▲ Level	3	3,20	3,52	110,00%	3,30	●
5.3	IT *Maturity Level*	▲ Level	3	3,00	3,41	110,00%	3,30	●
5.4	Tingkat Proper Unit (*Beyond Compliance*) Proper Unit Level (Beyond Compliance)	▲ Jumlah Unit Total Unit	3	7	3 emas dan 4 hijau 3 gold and 4 green	100,00%	3,00	●

No.	Indikator Kinerja Kunci Perspective	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Pencapa-ian Achieve-ment	Nilai Value	Ket-eran-gan Descrip-tion
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5	Penyelesaian Temuan Audit (BPK, KAP, SPI dan Auditor Lainnya) Completion of Audit Findings (BPK, PAF, IAU, and Other Auditors)		Max (-5)	0	0,00	100,00	0,00	●
5.6	Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup) Compliance with OHSE (Occupational Health and Safety & Environment)		Max (-10)		Laporan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Report of Occupational Health & Safety	100,00	0,00	●
	Nilai Kerja Organisasi (NKO) **Organizational Performance Value (OPV)**		**100**				**96,13**	●

Keterangan:
- Belum dilakukan proses pengukuran
● Tercapai (NKO ≥ 100)
● Hampir Tercapai (NKO ≤ NKO < 100)
● Perlu Peningkatan (NKO < 95)

Information:
- Measurement process has not been carried out
● Achieved (NKO 100)
● Almost Reached (NKO NKO < 100)
● Need Improvement (NKO < 95)

Tingkat Kesehatan Perusahaan
Soundness Level of the Company

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pembangkitan Jawa-Bali (Perusahaan) tanggal 28 Januari 2021, tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, serta Kontrak Manajemen Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021. Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menyepakati Kontrak Manajemen/*Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2021.

Penilaian tingkat kinerja kesehatan PJB dilakukan berdasarkan Kriteria Penilaia yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2021, dimana pada tahun 2021 Tingkat Kesehatan PJB berada pada nilai AAA kategori SEHAT dengan skor 96,13 dari bobot 100.

According to the Minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Pembangkitan Jawa-Bali (the Company) dated January 28, 2021, concerning the Ratification of 2021 Annual Budget and Operational Plan (ABOP) as well as 2021 Management Contract dated January 28, 2021; the Company's Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors agreed the 2021 Management Contract/Key Performance Indicators (KPI).

Soundness level of PJB is assessed according to the stipulated Assessment Criterias at the General Meeting of Shareholders (GMS) on 2021 ABOP, where in 2021, PJB soundness level was at the level of AAA category SOUND with the score of 96.13 from a weight of 100.

KEY PERFORMANCE INDICATOR DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
KEY PERFORMANCE INDICATOR AND SOUNDNESS LEVEL OF THE COMPANY

Grafik Tingkat Kesehatan Perusahaan (skor)
Chart of Company's Soundness Level (score)

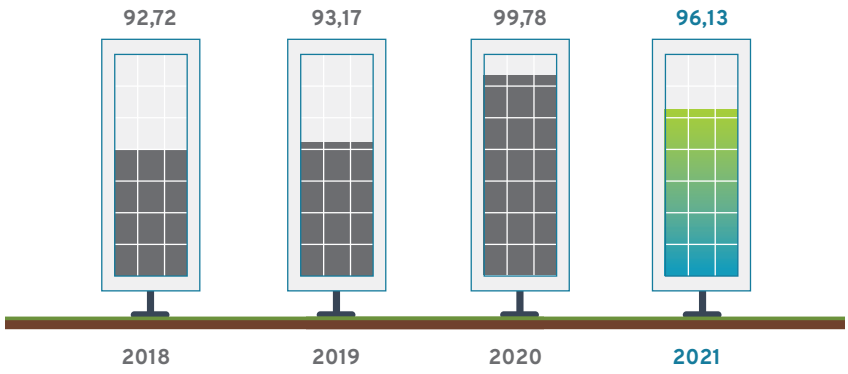

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha
Issues with Potential that Significantly Influence Business Continuity

Pada tahun 2021 tidak terdapat hal yang menyebabkan kelangsungan usaha Perusahaan terhenti, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan mitigasi risiko. Beberapa hal tersebut berasal dari faktor eksternal dan internal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha PJB.

Di sisi eksternal, pada tahun 2021 dampak Covid-19 hampir diseluruh sektor mulai menunjukkan *recovery*, namun Manajemen akan selalu memantau perkembangan pandemi Covid-19 dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi PJB.

In 2021, there were no issues resulting the business continuity of the Company to stop; however, there are some matters that require attention and risk mitigation monitoring. Several of these matters come from external and internal factors that have the potential to significantly influence the business continuity of PJB.

Externally, in 2021, the impact of the Covid-19 in almost entire sectors began to show a recovery; however, Management will always monitor the development of the Covid-19 pandemic and take the necessary actions in relation to its impact on the business, financial position and operating results of PJB.

Perhatian global terkait penggunaan energi antara lain *concern* terhadap *renewable energy* di beberapa negara yang merupakan *output* atas diadakannya Paris *Agreement*, dimana salah satunya fokus pada perubahan iklim yang terjadi. Oleh karena itu, penggunaan energi terbarukan mulai digalakkan hampir di seluruh dunia. Pengadopsian EBT di Negara-Negara Asia Tenggara sebagian besar tertinggal dari Negara lain baik pada saat ini maupun pada rencana di masa depan. Tantangan energi baru terbarukan di Asia Tenggara disebabkan antara lain oleh hambatan regulasi, filosofi perencanaan sistem kelistrikan dengan metode *least cost,* dan keterbatasan akses pembiayaan. *Geothermal* dan *Hydro* berkompetisi secara biaya dengan bahan bakar fosil tetapi ketidakpastian ekonomi dan peraturan menghambat perkembangan mereka. Perkembangan EBT di Indonesia, untuk solar, angin dan hidro akan menjadi relevan dengan *renewable energy services* (RES) dalam 10 tahun ke depan.

Global attention related to the use energy, among others, concern for the renewable energy in several countries which is the output of the Paris Agreement, where one of them focuses on climate changes. Therefore, the use of renewable energy is started to be promoted in almost the entire world. The adoption of NRE in the Southeast Asia Countries is mostly lagging behind from other Countries, both currently and on the plan in the future. The challenges of the new and renewable energy in the Southeast Asia are caused by, among others, regulatory barriers, philosophy of the electricity system planning with the least cost method, and limited financing access. Geothermal and Hydro are cost competitive with fossil fuels; however, the economic and regulatory uncertainties hinder its development. The development of the NRE in Indonesia for solar, wind, and hydro will be relevant with the renewable energy services (RES) in the next ten years.

Selain isu penggalakkan EBT terdapat dorongan dari digitalisasi pembangkit dimana dampak signifikan yang timbul adalah efisiensi biaya dan peningkatan kinerja operasi dengan cara memanfaatkan digitalisasi, advanced analytics dan otomisasi.

Besides the NRE promotion issue, there is the encouragement from power plant digitization where the significant impacts arising are cost efficiency and the improvement of operations performance by utilizing digitization, advanced analytics, and automation.

Untuk tantangan kedepan terdapat 9 proyek yang ditugaskan pada PJB, namun terdapat risiko terjadinya penundaan akibat perubahan pada rencana PLN. Sekitar 5.5 GW proyek yang ditugaskan pada PJB menghadapi delay, dan 0.6 GW berpotensi dibatalkan. Dampak yang mungkin dapat terjadi adalah alur *revenue* akan mengalami *delay* atau batal dan mengingat ketidakpastian rencana PLN, terdapat kemungkinan bahwa risiko yang sama akan tetap terjadi pada proyek di masa depan.

For future challenges, there are nine projects assigned to PJB. However, there is the risk of delaying due to the changes in PLN plans. Around 5.5 GW of projects assigned to PJB are delayed, and 0.6 GW have the potential to be canceled. The impact that may occur is revenue flows will be delayed or canceled; and considering the uncertainty of PLN plans, there is the possbility that similar risk will remain occurring on the projects in the future.

Selain itu ada beberapa hal yang dikategorikan dapat berpotensi berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan ke depan. Persaingan yang tinggi dalam industri ketenagalistrikan masih terus berkembang hingga saat ini. Hal ini dipicu oleh persaingan antara pembangkit energi konvensional dan energi terbarukan di masa depan yang terus meningkat dan berkurangnya hambatan akses terhadap proyek pembangkit listrik di masa depan. Di sisi lain, daya tawar konsumen juga dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha dimana skema tarif saat ini belum kompetitif dengan teknologi EBT dan *co-firing biomass* serta potensi akses ke solar PV berbiaya rendah akan mengakibatkan hilangnya kendali atas pembangkit yang tidak andal.

In addition, there are several matters categorized to have the potential effect on the Company performance in the future. A high competition in the electricity industry is still developing. This is triggered by the future competition between conventional energy and renewable energy power plants that continues increasing and the decreasing access barrier to the future power plant projects. On the other hand, the consumer bargaining power can also be a threat for business continuity where the current tariff scheme is not yet competitive with the NRE technology and biomass co-firing, as well as the potential access to the low-cost solar PV will result in loss of control over unreliable power plants.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Dari sisi internal, terdapat Kebijakan Pembentukan *Subholding* PT PLN (Persero) untuk memperkuat fokus bisnis ketenagalistrikan. Di sisi lain, usia pembangkit PJB yang sudah mendekati dan/atau melampaui *expected lifetime* memberikan tantangan untuk bersaing dengan pembangkit-pembangkit baru. Selain itu, kebijakan rekrutmen SDM yang tersentralisasi berpotensi memunculkan risiko kesiapan *human capital* dalam meningkatkan *competitiveness* PJB Group.

Internally, there is the Subholding Establishment Policy of PT PLN (Persero) to strengthen the electricity business focuses. On the other hand, PJB power plants lifetime approaching and/or exceeding the expected lifetime results in challenges to compete with new power plants. In addition, the policy of centralized HR recruitment has the potential human capital readiness risk in increasing the competitiveness of PJB Group.

Potensi Dampak pada Perusahaan
Potential Impact on the Company

Faktor eksternal dan internal di atas memiliki dampak terhadap Perusahaan di antaranya adalah:

1. Meningkatnya kesadaran lingkungan yang berdampak pada proyek-proyek batu bara terutama di Pulau Jawa
2. Risiko penundaan pembangunan di beberapa proyek yang sedang berjalan serta pembatalan proyek yang ada di PJB
3. Marginalisasi produksi PJB dikarenakan IPP baru - Pembangkit PJB terdampak pada penurunan produksi akibat komitmen *take-or-pay* terhadap IPP
4. Pemain baru di pasar pembangkit listrik, khususnya energi terbarukan
5. Kinerja secara umum di kuartil bawah, Posisi *merit order* & utilisasi pembangkit gas terus menurun, dan pembangkit berumur rata-rata 26 tahun
6. Pelaksanaan proyek tertunda serta kurangnya pengalaman proyek energi terbarukan

The external and internal factors above have impacts on the Company, including the following:

1. The increasing environmental awareness which has impact on the coal projects, mainly in the Java Island
2. The construction delaying risk in several ongoing projects, as well as cancellation of the existing project in PJB
3. Marginalization of PJB production is due to new IPP - Power Plants of PJB are affected by the decrease in production as the result of the take-or-pay commitment towards IPP
4. New player in the power plant market, especially the renewable energy
5. General performance in the lower quartile, the Position of merit order & gas power plant utilization continue to decrease, and the average lifetime of power plants is 26 years
6. The implementation of project is delayed, and lack of experience in the renewable energy project

Assessment Manajemen untuk Mengelola Potensi yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha
Management's Assessment to Manage Potentials that Significantly Influence Business Continuity

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini serta isu strategis yang berkembangkan maka Perusahaan melakukan beberapa langkah untuk melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan hal-hal yang berpotensi menghambat pertumbuhan atau perkembangan Perusahaan. adapun beberapa analisis yang digunakan yaitu berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal PJB, dan analisis PESTEL dengan mempertimbangkan faktor eksternal Perusahaan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan

By considering the current conditions and the developed strategic issues, the Company conducts several measures to mitigate risk of matters that have the potential to hinder the Company's growth and development. Several analysis used are based on the analysis of PJB internal and external conditions, and the PESTEL analysis by considering the Company's external factor including the political, economic, social, technology, environmental and legal sectors. Besides the PESTEL analysis, PJB also conducts the Five Forces analysis

dan hukum. Selain analisis PESTEL, PJB juga melakukan analisis *Five Forces* dengan berfokus pada kekuatan yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri, yaitu ancaman pesaing, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pemasok, dan daya tawar konsumen.

by focusing on the strength which determines the intensity of competition within an industry, namely competitors threat, new comers threat, substitute products threat, suppliers bargaining power, and consumers bargaining power.

Berdasarkan analisis faktor internal, PJB memiliki kekuatan internal menengah ("*MEDIUM*") karena memiliki kinerja operasi yang mencapai kelas dunia, pengalaman dalam bisnis pembangkit secara *end-to-end* dan SDM yang muda, dinamis dan *engagement* tinggi, akan tetapi dalam hal pengembangan bisnis baru masih terkendala beberapa hal antara lain terbatasnya sumber daya investasi, kurangnya pengalaman dalam pengelolaan pelanggan dan belum banyak pengalaman dalam proyek EBT non-PLTA.

According to internal factor, PJB has medium internal strength due to having the world class operations performance, having experience in the end-to-end power plant business, as well as having young, dynamic, and high engagement Human Resources. However, there is a constrains on several matters in terms of developing new business, among others, limited investment resources, lack of experience in managing customers, and not much experience in the NRE project for non-HPP.

Sedangkan hasil analisis faktor eksternal saat ini, PJB memiliki banyak kesempatan di pasar untuk berkembang dengan adanya inisiatif pemerintah untuk mencapai target *energy mix* dari sumber *renewable energy* sebesar 23% pada tahun 2025, potensi pengembangan PLTS di Indonesia besar, dan tuntutan atas peningkatan kehandalan sistem kelistrikan Nasional. Walaupun akan terdapat persaingan yang tinggi serta risiko perubahan peraturan yang berlaku, industri ketenagalistrikan di Indonesia diperkirakan akan masih mengalami pertumbuhan yang pesat karena kesempatan untuk implementasi teknologi digital terutama di sektor pembangkitan, transmisi dan distribusi dan dorongan untuk melakukan peningkatan efisiensi. Maka, *Industry Attractiveness* dapat diniliai secara positif ("*HIGH*").

While from the current external factor analysis results, PJB has many opportunities in the market to develop with the government's initiative for achieving the energy mix target from 23% of the renewable energy sources in 2025, huge potential SPP development in Indonesia, and demand for improving the reliability of the National electricity system. Even though there will be high competition and risk of changes in the prevailing regulations, the electricity industry in Indonesia is estimated to experience rapid growth due to the opportunity to implement digital technology, especially in the power plant, transmissions, and distribution sectors, as well as encouragement for increasing efficiency. Accordingly, Industry Attractiveness can be assessed positively ("HIGH").

Dari kedua analisis tersebut penilaian posisi Perusahaan berada pada kuadran *growth & build* yang menunjukkan bahwa PJB memiliki potensi untuk bertumbuh pesat, sehingga perlu dipastikan PJB memiliki sumber daya yang cukup untuk menopang pertumbuhan tersebut, baik dari internal, maupun eksternal. Investasi dapat dilakukan untuk menopang pertumbuhan organik di lini bisnis eksisting dan lini bisnis baru. Pertumbuhan organik diwujudkan dengan memperkuat dan menambah kapasitas lini bisnis utama yaitu pembangkit tenaga listrik, melakukan penetrasi market baru untuk lini bisnis jasa EPC, jasa O&M, investasi dalam proyek IPP dan pengembangan bisnis baru atas *resource* dan *capability* yang dimiliki PJB termasuk penetrasi ke industri *utility* lain.

From those two analyses, the assessment on the Company's position is in the growth & build quadrant which shows that PJB has the potential to grow rapidly, so it needs to be ensured that PJB has sufficient resources to support such growth, both internal and external. Investment can be implemented to sustain organic growth in existing business lines and new business lines. Organic growth is realized by strengthening and increasing the capacity of main business lines, namely power plants, penetrating new markets for the EPC service business line, O&M services, investing in IPP projects, as well as new business development of resource and capability owned by PJB, including penetrating to the other utilities industry.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Potensi pengaruh dari internal dan eksternal diatas, menjadi isu strategis dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan, serta sebagai bahan untuk penyusunan program strategis tahunan PJB dalam RKAP yang diselaraskan dengan arah pengembangan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Atas setiap isu strategis yang dimiliki PJB menyusun matriks mitigasi risiko yang akan dilakukan. Relevansi dan konsistensi antara isu, program, serta implementasi senantiasa dimonitor dalam pelaksanaan *strategic review meeting.*

Berdasarkan laporan kinerja Perusahaan telah mencapai target dalam pembangunan unit *power plant* yang sudah mengimplementasikan teknologi digital yaitu sebanyak 17 unit, serta jumlah kapasitas pembangkit yang melaksanakan *co-firing biomass* telah mencapai 92,27MW di tahun 2021. Dalam hal tata kelola perusahaan yang baik terkait pengelolaan perusahaan, setiap tahunnya dilakukan penilaian oleh asesor independen maupun dilakukan secara mandiri menggunakan parameter asesmen dari Kementerian BUMN. Berdasarkan *Asessment* yang dilakukan pada tahun 2021, PJB berhasil meraih skor yang dicapai sebesar **95,67** dari **100** dengan kategori **"Sangat Baik".**

The potentials of internal and external influences above become strategic issues in the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP), and as materials for the preparation of PJB's annual strategic programs in the ABOP which are in line with development direction on the Company's Long-term Plan (CLP). On every strategic issue, PJB prepares the risk mitigation matrix that will be implemented. The relevance and consistency between issues, programs, and implementation will always be monitored in the implementation of the strategic review meeting.

According to the performance report, the Company had reached the target in the power plant units construction that had been implementing digital technology with 17 units, and the total capacity of power plants carrying out the biomass co-firing had reached 92.27 MW in 2021. In terms of good corporate governance related to the Company management, assessment by the independent assessor and self-assessment using parameters from the Ministry of SOEs are conducted every year. According to the Assessment conducted in 2021, PJB successed to achieve the score of **95.67** out of **100** in the **"Very Good"** category.

Asumsi yang Digunakan dalam Melakukan *Assessment*
Applied Assumptions for the Assessment

Dalam hal penilaian dan evaluasi risiko kelangsungan usaha melalui analisis *five forces,* analisis SWOT per lini bisnis, realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, data pembanding industri sejenis, kondisi pasar dan perekonomian terkini, RUPTL, RJPP, Pedoman Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan. Asumsi tersebut diproyeksi dan dievaluasi secara periodik.

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi pengembangan PJB tertuang pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2020-2024. Dalam menyusun rencana jangka panjang untuk 5 tahun ke depan, PJB menggunakan beberapa asumsi eksternal berupa asumsi makro ekonomi, asumsi operasi, asumsi investasi, dan asumsi internal yang berupa list proyek IPP, EBT, dan sebagainya.

Assessment and evaluation of business continuity risk are through the five forces analysis, SWOT analysis for each business line, the realization of previous years performance, similar industry comparison data, current condition of market and economy, Electricity Supply Business Plan, CLP, Risk Management Guidelines, and Corporate Governance. These assumptions are periodically projected and evaluated.

Referring to those conditions, development strategy of PJB is disclosed in the Long-term Corporate Plan of the 2020-2024 period. In preparing long-term plans for the following five years, PJB uses several external assumptions in the form of macroeconomic assumption, operations assumption, investment assumption; and internal assumptions in the form of the IPP projects list, NRE, etc.

Pemodelan skenario dilakukan dengan memprioritaskan signifikansi variabel tingkat dampak pada permintaan daya dan bauran pasokan dan tingkat variabilitas. Variabel utama yang diperoleh adalah pertumbuhan kebutuhan (fungsi elastisitas pertumbuhan PDB), regulasi di sektor kelistrikan dan evolusi biaya energi terbarukan. Terpilih 5 prioritas kunci yaitu biaya dan kinerja, kebijakan, permintaan, proyek *pipeline*, dan kendala sebagai variabel-variabel penyusun tiga skenario (*Current Trend,* Pengembangan *Accelerated Technology,* dan Mandat Kebijakan).

Skenario *Current Trend* merupakan skenario dimana permintaan didorong oleh kekuatan ekonomi makro (misal PDB dan elastisitas) dan *supply* ditentukan berdasarkan teknologi biaya terendah. Skenario Pengembangan *Accelerated Technology* merupakan skenario dimana permintaan didorong oleh kekuatan ekonomi makro dan *supply* mengasumsikan biaya yang lebih rendah untuk EBT. Skenario Mandat Kebijakan adalah skenario dimana permintaan dan *supply* berdasarkan kebijakan dan target lingkungan yang tegas.

The scenario modeling is conducted by prioritizing the significant of variables of impact level on power demands and supply mix, as well as variability level. The main variable obtained is the needs growth (elasticity function of GDP growth), regulation in the electricity sector, and the renewable energy cost evolution. The five key priorities, namely cost and performance, policy, demand, pipeline project, as well as constrains are selected as the three scenario constituent variables (Current Trend, Accelerated Technology Development, and Policy Mandate).

The Current Trend scenario is scenario where the demand is driven by macroeconomic forces (such as GDP and elasticity) and the supply is determined according to the lowest cost technology. The Accelerated Technology Development scenario is scenario where the demand is driven by macroeconomic forces and the supply assumes lower cost for the NRE. The Policy Mandate scenario is scenario where the demand and supply are based on the strict environmental policies and targets.

Arahan atau Keputusan Manajemen atas hasil *Assessment*
Management's Directive or Decision on the Assessment Results

Hasil analisis SWOT memberikan gambaran posisi PJB saat ini. Dari hasil tersebut terdapat beberapa arahan dari Manajemen dalam hal ini Direksi sebagai berikut:

1. Melakukan *product & market development* salah satunya dengan Pemanfaatan lokasi disekitar pembangkit (Lokasi untuk penempatan PV Solar dan lainnya)
2. *Market Penetration* diantaranya yaitu :
   - Mengembangkan pembangkit baru selain RUPTL (IPP atau *Captive Power*) yang murah terutama di lokasi Sumatera/ Kalimantan (Timur dan calon ibukota baru)/ Jawa Timur serta pasar Luar Negeri
   - Pengembangan usaha jasa O&M dan pendukungnya, MRO, konstruksi, dan *spare part* untuk pasar PLN, IPP dan *Captive Power Plant* di Indonesia dan Luar Negeri
   - Melakukan sinergi anak perusahaan/perusahaan afiliasi PJB dalam menangkap peluang pasar dengan mengembangkan *research & technical support* untuk mendukung bisnis EBT, melakukan *set up* dan *partnership* untuk bisnis EBT khususnya solar PV, dan mengembangkan EV pada unit yang dikelola oleh PJBS Group
3. Melakukan *backward concentric diversification* dan *forward integration*

The SWOT analysis results provide the overview of the current PJB position. From these results, there are several directives from Management, in this case the Board of Directors, as follows:

1. Implementing product & market development, one of them by utilizing location around the power plants (Location for the placement of Solar PV and others)
2. Market Penetration, including:
   - Developing new power plants besides the inexpensive RUPTL (IPP or Captive Power), especially in Sumatera/ Kalimantan location (East and new prospective capital)/ East Java, and the Overseas market
   - Development of the O&M service and its supporting business, MRO, construction, and spare part for PLN market, IPP and Captive Power Plant in Indonesia and Overseas
   - Synergizing PJB's subsidiaries/affiliates in seizing market opportunities by developing research & technical support to support the NRE business, carrying out a set up and partnership for the NRE business, especially Solar PV, and developing EV on the unit managed by PJB Group
3. Conducting the backward concentric diversification and forward integration

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Penyesuaian yang Dilakukan
Adjustments

Sesuai dengan visi perusahaan untuk "Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara", PJB melakukan redefinisi atas strategi yang telah ditetapkan dalam rencana transformasi 5 tahun ke depan. Rencana transformasi tersebut diantaranya yaitu:

- PJB akan berupaya menyeimbangkan 3 (tiga) unsur trilema yaitu:
  1. penyediaan energi dan tenaga listrik berkelanjutan (*sustainability*),
  2. akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan (*equity*),
  3. serta pasokan energi dan tenaga listrik (*security*)

  dengan cara mengembangkan 5 (lima) pilar strategi sebagai cara mencapai kesuksesan di masa depan dalam merespon disrupsi teknologi yang sedang dihadapi sektor ketenagalistrikan Indonesia. Kelima pilar strategi itu adalah:
  (1) *Core Optimizing,*
  (2) *Core Expansion,*
  (3) *Renewable Energy,*
  (4) *Asset light,* dan
  (5) *Power Solutions*

PJB akan menjaga dan meningkatkan kesehatan kinerja keuangan dalam jangka pendek dan panjang dengan upaya peningkatan pendapatan dan *cost leadership*. Adanya integrasi antar lini bisnis dan portofolio produk & jasa yang ditawarkan PJB Grup sebagai strategi pengembangan bisnis agar dapat lebih bersaing di pasar kelistrikan yang lebih kompetitif.

PJB akan selalu mengembangkan talenta terbaik secara berkesinambungan untuk kebutuhan strategi pengembangan energi baru dan berkelanjutan. Optimasi teknologi dan proses manajemen aset yang efektif dan efisien sebagai dasar pengelolaan seluruh unit pembangkit yang masuk dalam lingkup PJB baik pembangkit eksisting maupun pembangkit jasa O&M.

In accordance with the Company's vision to "Becoming the leading and trusted company in the sustainable energy business in Southeast Asia", PJB redefines strategies that have been set in the following five years transformation plans. The transformation plans, including:

- PJB will strive to balance 3 (three) trilema elements, namely:
  1. procurement of sustainable energy and electricity (sustainability),
  2. access and affordability of energy and electricity (equity),
  3. as well as energy and electricity supplies (security)

  by developing 5 (five) strategic pillars as the way to achieve success in the future in responding technology disruption currently faced by the Indonesian electricity sector. Those five strategic pillars are:

  (1) Core Optimizing,
  (2) Core Expansion,
  (3) Renewable Energy,
  (4) Asset light, and
  (5) Power Solutions

PJB will maintain and improve the health of financial performance in short-term and long-term with the effort of increasing revenues and cost leadership. The integration between business line and the portfolio of products & services offered by PJB Group is as the business development strategy so that it can be more competitive in more competitive electricity market.

PJB will always develop the best talents on an ongoing basis for the needs of the new and sustainable energy development strategy. The technology optimization as well as an effective and efficient asset management process as the basis of managing the entire power plant units within PJB, both existing power plants and O&M service power plants.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA PERUSAHAAN
IMPACTS OF PRICE CHANGES ON THE COMPANY REVENUES AND PROFITS

Dampak Perubahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
Impact of Changes in Cost of Electricity Supply (CES)

Biaya pokok penyediaan tenaga listrik merupakan biaya yang disediakan PJB dalam hal ini adalah dari sisi pembangkit yaitu dari pembelian energi primer sampai tenaga listrik dijual kepada PLN.

The Cost of Electricity Supply (CES) is the cost provided by PJB, in this case, in terms of the power plants, which is from the purchase of primary energy until electricity is sold to PLN.

Dampak perubahan BPP terhadap pendapatan operasi yaitu setiap perubahan Rp1 biaya pokok penyediaan tenaga listrik mempengaruhi pendapatan operasi di tahun 2021 berubah sebesar Rp23,73 miliar dan Rp25,02 miliar di tahun 2020.

The changes impact in CES to operating income, which is every change of Rp1 in cost of electricity supply influences operating income to change by approximately Rp23.73 billion in 2021 and Rp25.02 billion in 2020.

Dampak perubahan BPP terhadap laba operasi perusahaan yaitu setiap perubahan Rp1 biaya pokok penyediaan tenaga listrik mempengaruhi laba operasi di tahun 2021 berubah sebesar Rp3,88 miliar dan Rp7,91 miliar di tahun 2020.

The changes impact in CES to operating profit, which is every change of Rp1 in cost of electricity supply influences operating profit to change by approximately Rp3.88 billion in 2021 and Rp7.91 billion in 2020.

Dampak Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik
Changes Impact in Electricity Selling Price

Dampak perubahan harga jual tenaga listrik terhadap pendapatan operasi yaitu setiap perubahan Rp1 harga jual listrik mempengaruhi pendapatan operasi di tahun 2021 berubah sebesar Rp19,85 miliar dan Rp17,12 miliar untuk tahun 2020.

The changes impact in electricity selling price to operating income, which is every change of Rp1 in electricity selling price influences operating income to change by approximately Rp19.85 billion in 2021 and Rp17.12 billion for 2020.

Dampak perubahan harga jual tenaga listrik terhadap laba operasi yaitu setiap perubahan Rp1 harga jual listrik mengakibatkan laba operasi di tahun 2021 berubah senilai Rp3,24 miliar dan Rp5,41 miliar untuk tahun 2020.

The changes impact in electricity selling price to operating profit, which is every change of Rp1 in electricity selling price influences operating profit to change by approximately Rp3.24 billion in 2021 and Rp5.41 billion for 2020.

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR
ASPECT OF MARKETING AND MARKET SHARE

Pelanggan dan Target Pasar
Customers and Market Target

Pelanggan PJB dalam segmen usaha penyediaan listrik adalah PT PLN (Persero) UIP2B (Unit Induk Penyaluran dan Pengaturan Beban), sedangkan segmen bisnis penyedia jasa O&M dan jasa lainnya adalah PT PLN (Persero) Regional maupun *Independent Power Producer* (IPP). Di tahun 2021 PJB telah melakukan melakukan upaya-upaya terkait pengembangan bisnis di luar negeri terkait jasa *Operation & Maintenance*, serta MRO.

Divisi Business Solution dibentuk oleh PJB dengan fungsi utama untuk memastikan pengembangan strategi bisnis, melakukan evaluasi eksekusi strategi bisnis, bertindak sebagai pelaku aktivitas pemasaran, serta mengelola bisnis penunjang Jasa O&M dan pemanfaatan aset untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan PJB untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya serta menjaga kepuasan pelanggannya adalah dengan melakukan survei kepuasan Pelanggan.

Proses pemasaran penyediaan listrik PJB baik unit eksisting berikut jasa O&M dibagi menjadi 5 (lima) pelanggan yaitu:

1. PT PLN Unit Penyaluran dan Pengatur Beban Wilayah Jakarta Raya,
2. PT PLN Unit Penyaluran dan Pengatur Beban Wilayah Banten,
3. PT PLN Unit Penyaluran dan Pengatur Beban Wilayah Jawa Barat,
4. PT PLN Unit Penyaluran dan Pengatur Beban Wilayah Jawa Tengah,
5. PT PLN Unit Penyaluran dan Pengatur Beban Wilayah Jawa Timur.

PJB customers in the electricity supply business segment are PT PLN (Persero) UIP2B (Main Unit of Load Distribution and Management), while O&M service business provider segments and other services are PT PLN (Persero) Regional and Independent Power Producer (IPP). In 2021, PJB undertook efforts related to overseas business development on the Operation & Maintenance services, as well as MRO.

Business Solution division is established by PJB with its main function to ensure the development of business strategies, evaluate the execution of business strategies, act as an actor in the marketing activities, as well as manage the supporting business of O&M Services and assets utilization to support business development of the Company. One of PJB efforts to continuously increase market share and maintain the customers satisfaction is by carrying out customer satisfaction survey.

Marketing process of PJB electricity provision, both in the existing unit and the O&M services is divided into 5 (five) customers as follows:

1. PT PLN Distribution and Load Management Unit for Jakarta Areas,
2. PT PLN Distribution and Load Management Unit for Banten Areas,
3. PT PLN Distribution and Load Management Unit for West Java Areas,
4. PT PLN Distribution and Load Management Unit for Central Java Areas,
5. PT PLN Distribution and Load Management Unit for East Java Areas.

Analisis Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan
Analysis of Market Segment and Competitive Condition

Perusahaan dalam menghadapi persaingan dalam segmen penjualan tenaga listrik dengan menyusun strategi pengembangan pencarian pasar baru untuk jasa *Operation & Maintenance* (O&M) serta bisnis *non core* (*new business horizon*) dengan tujuan memaksimalkan pencapaian target pendapatan perusahaan serta dalam rangka ekspansi bisnis dengan memperluas pangsa pasar baru. Adapun realisasi

In facing competition in the electricity sales segment, the Company prepares development strategy of searching new market for Operation & Maintenance (O&M) services as well as the non-core business (new business horizon) with the purpose to maximize revenues target achievement of the Company, and in the context of business expansion by expanding new market share. The realization in 2021 was the Company had

di tahun 2021 Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan perusahaan di luar negeri yaitu dengan Laos terkait penyediaan jasa O&M, serta dengan Bangladesh terkait proyek MRO.

cooperated with overseas companies such as Laos related to O&M services procurement, as well as with Bangladesh related to MRO project.

Selain itu, untuk menunjang performa ditengah persaingan industri sejenis dalam segmen penjualan listrik Perusahaan melakukan efisiensi dan optimalisasi Biaya Pokok Produksi (BPP) seta meningkatkan *security of supply* pembangkit yang ditunjukkan dalam angka EAF dan EFOR melalui penguatan sistem proteksi, dan penerapan digitalisasi pembangkit.

Furthermore, to support performance amid the similar industry competition in the electricity sales segment, the Company applies efficiency and optimization of Cost of Production (BPP) as well as increases security of supply on power plant as indicated in EAF and EFOR numbers through strengthening protection system and the implementation of power plants digitization.

Posisi Produk di Pasar
Product Position in the Market

Pasar utama Perusahaan terkait penjualan energi listrik masih berfokus di Sistem Jawa-Bali. Terlihat dari realisasi penjualan tenaga listrik PJB mencapai 22,49% dari total penjualan energi listrik Sistem Jawa-Bali dengan detail penjualan unit eksisting PJB mencapai 10,04% dan melalui pembangkit Unit Bisnis Jasa O&M yang dikelola oleh PJB mencapai 12,45%.

The main market of the Company related to electricity sales is still focused on Java-Bali System. It is reflected from electricity sales realization of PJB reaching 22.49% of total electricity sales of Java-Bali System with the detailed sales of PJB's existing unit reaching 10.04% and through the power plant of Operation & Maintenance Services Business Unit managed by PJB reaching 12.45%.

Peran pembangkit dalam operasi sistem biasanya diklasifikasikan menjadi pembangkit pemikul beban dasar (*base load*), beban menengah (*medium load/load follower*) dan pembangkit pemikul beban puncak (*peaker*). Pembangkit milik PJB sebagian besar didominasi oleh PLTGU atau pembangkit berbahan bakar gas, sehingga menempatkan PJB sebagai pembangkit *medium load* dan *peakers*.

The role of power plant in system operations is usually classified into base load, medium load/load follower, and peaker. PJB power plants are mostly dominated by CCPP or Combined Cycle Power Plants, so that it placed PJB at the medium load and peakers.

Sehingga sebagian besar pangsa pasar penjualan energi listrik di Sistem Jawa-Bali pada segmen *medium load* dan *peakers* masih didominasi oleh PJB, sedangkan kategori *base load* ditempati oleh PLN (sebagian pengelolaannya oleh PJB), Indonesia Power dan IPP (*Independent Power Producer*).

Therefore, majority of market share of electricity power sales in Java-Bali system for medium and peaker segments is still dominated by PJB, while the base load category is occupied by PLN (partly managed by PJB), Indonesia Power, and IPP (Independent Power Producer).

Strategi dan Target Pencapaian Strategi Pasar
Strategy and Target of Market Strategy Achievement

Seiring dengan pengembangan usaha PJB yang merambah pada *value chain* ketenagalistrikan selain pembangkitan, maka diperlukan perencanaan yang strategis terkait pemasaran. Adapun strategi yang ditetapkan perusahaan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta RJPP yang telah ditetapkan. Beberapa strategi utama yang direalisasikan antara lain:

Along with business development of PJB that has penetrated the electricity value chain apart from power plant, strategic planning related to marketing is required. The strategy set by the Company is the elaboration of the Vision and Mission as well as the established Company's Long-term Plan. Several main strategies actualized are as follows:

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR
ASPECT OF MARKETING AND MARKET SHARE

1. Meningkatkan efisiensi BPP dengan penurunan sebesar 1%,
2. Meningkatkan efisiensi biaya tahunan pemeliharaan pembangkit eksisting sebesar 7,75%,
3. Menjaga *sustainability performance* pembangkit kelas dunia,
4. Menjalankan *best loan* O&M,
5. Pertumbuhan pasar solusi terintegrasi untuk pembangkit dan industri sejenis dengan pertumbuhan jumlah konsumen dari 9 ke 32 institusi/perusahaan,
6. *Pilot project* usaha energi terintegrasi unutk segmen menengah komersial dan industri 5 klien,
7. Kapasitas pembangkit Solar PV & *Windfarm* terpasang 50MW dengan realisasi PS PLTMG Bawean sudah mencapai 500 kW.

1. Increasing CES efficiency with a decrease of 1%,
2. Increasing annual costs efficiency for the existing power plants maintenance of 7.75%,
3. Maintaining sustainability performance of world class power plant,
4. Carrying out the best loan for O&M,
5. Integrated solutions market growth for power plants and similar industries with the growth of total consumers from 9 to 32 institutions/companies,
6. Pilot project of the integrated energy business for commercial medium segment and 5 clients industry segment,
7. The capacity of installed Solar PV & Windfarm power plants 50MW with the realization of PS Bawean CCPP has reached 500 kW.

Pangsa Pasar
Market Share

Kegiatan pemasokan listrik di sistem Jawa Bali dipasok oleh PJB (Eksisting dan UBJOM), Indonesia Power (Eksisting dan UJP), PLN dan IPP. Berikut adalah gambar diagram pangsa pasar industri kelistrikan sistem Jawa Bali:

Electricity supply activities in the Java-Bali system are distributed by PJB (Existing and O&M Services Business Unit), Indonesia Power (Existing and UJP), PLN, and IPP. The following is the table of electricity industry market share of Java-Bali system:

Tabel Pangsa Pasar Kelistrikan Sistem Jawa Bali
Table of Electricity Market Share of Java-Bali System

Produsen Producer	2019		2020		2021	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%
PJB Eksisting PJB Existing	22.338	11,48	17.055	9,09	19.779	10,04
UBJOM O&M Services Business Unit	28.574	14,69	26.430	14,08	24.540	12,45
Indonesia Power Eksisting Indonesia Power Existing	38.749	19,92	33.117	17,64	37.426	18,99
UJP	32.906	16,91	32.341	17,23	28.709	14,57
PLN	20.419	10,50	17.532	9,34	19.018	9,65
IPP (Listrik Swasta) Independent Power Producer (Private Electricity)	51.553	26,50	61.244	32,63	67.568	34,29
Jumlah Sistem Jawa Bali **Total Java-Bali System**	**194.539**	**100,00**	**187.718**	**100,00**	**197.039**	**100,00**

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT

Prospek Perekonomian Dunia
World Economic Prospect

Pemulihan ekonomi global diprakirakan berlanjut di tengah kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron, tekanan inflasi yang tinggi, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral. Pemulihan tersebut diprakirakan akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Perbaikan yang terus berlangsung dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain *Purchasing Managers' Index* (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global tetap berlanjut hingga mencapai 4,4% pada 2022.

Global economic recovery is predicted to continuously develop despite the increase in the Omicron variant cases of the Covid-19 virus, high inflationary pressures, and accelerated normalization of monetary policy at several central banks. The recovery is predicted to be more balanced, not only relying on the United States (US) and China but also on the economic recovery in Europe, Japan, and India. Continuous improvement is confirmed by the performance of several indicators in December 2021, including Purchasing Managers' Index (PMI), consumer confidence, and retail sales which remain strong. With these developments, Bank Indonesia predicts global economic growth can continue to reach 4.4% in 2022.

Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi

The increasing trade volume and the world's commodity prices support export prospects of developing countries. Global financial market uncertainty continues in line with the acceleration of the Fed's normalization policy in response to

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT

the Fed sebagai respons tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasok dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2021
Source: Bank Indonesia, Monetary Policy Report, Quarter 4/2021

rising inflationary pressures in the US in line with supply chain disruptions and rising demand, as well as the high spread of Omicron variant of the Covid-19 virus. It resulted in limited capital flows and pressure on the exchange rate of developing countries, including Indonesia.

Prospek Perekonomian Indonesia
Indonesia's Economic Prospect

Perekonomian domestik diprakirakan tumbuh lebih tinggi pada 2022. Perkembangan indikator ekonomi pada Desember 2021 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2021 diprakirakan tetap berada dalam kisaran 3,2-4,0%. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5% pada 2022, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terus diwaspadai. Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Kinerja lapangan usaha (LU) Utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian tumbuh meningkat. Secara spasial, perbaikan ekonomi diprakirakan terjadi di seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Balinusra seiring dengan tetap kuatnya kinerja ekspor, perbaikan permintaan domestik, dan kinerja LU Utama.

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2021
Source: Bank Indonesia, Monetary Policy Report, Quarter 4/2021

Domestic economy is forecasted to grow higher in 2022. Developments in economic indicators in December 2021 indicate an accelerated recovery process, including public mobility, retail sales, and consuming power. Overall, economic growth in 2021 is predicted to remain in the range of 3.2-4.0%. Economic growth is forecasted to increase to the range of 4.7-5.5% in 2022, in line with the acceleration of private consumption and investment, while the Government's fiscal spending and exports are maintained, although the risk of an increase in Covid-19 cases requires continued vigilance. This forecast is supported by increased mobility in line with accelerated vaccinations, wider economic openings, and continued policy stimulus. The performance of the core sectors (LU), such as the manufacturing industry, trade, construction, and agriculture grew steadily. Spatially, economic recovery is predicted in all regions, especially Jawa, Sumatra, Kalimantan, and Balinusra in line with continued strong export performance, improvement in domestic demand, and performance of the main foreign sector.

Prospek Industri Kelistrikan Nasional
National Electricity Industry Prospect

Proyeksi Kondisi Pembangkit Listrik
Projection of Power Plant Condition

Berdasarkan data RUPTL 2021-2030, tambahan *supply* baru sebesar 30 GW berpusat pada gas, hidro dan batubara untuk menjamin kecukupan pasokan, solar, dan angin untuk meningkatkan bauran energi dari pembangkit Energi Baru dan Terbarukan di masa depan.

Penambahan kapasitas baru didominasi oleh EBT (51,6%) dengan porsi hidro (25,6%%) sebagai teknologi yang paling tepat untuk memenuhi target 23% EBT pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RUPTL. Porsi batubara sebesar 34% dalam kapasitas tambahan hanya terdiri atas *on-going project.* Jawa dan Sumatera tetap menjadi daerah dengan permintaan yang intensif dengan tingkat pertumbuhan 4% dan 6,6% secara berurutan.

Based on the data from the Electricity Supply Business Plan of 2021-2030, the additional new supply of 30 GW is focused on gas, hydro, and coal to ensure sufficient supply, diesel, and wind to increase the energy mix of future New and Renewable Energy plants.

The addition of new capacity is dominated by NRE (51.6%) with the hydro portion (25.6%) as the most appropriate technology to meet the target of 23% NRE in 2025 as stated in the Electricity Supply Business Plan. The coal portion of 34% in additional capacity only consists of ongoing projects. Java and Sumatra remain demand-intensive regions with growth rates of 4% and 6.6%, respectively.

Proyeksi Pengembangan Pembangkit
Power Plant Development Projection

Rencana penambahan kapasitas pembangkit selama 10 tahun mendatang (periode tahun 2021-2030) untuk seluruh Indonesia adalah 40,6 GW atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 4 GW per tahun. Dengan penambahan pembangkit EBT akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun sebesar 20,9 GW atau 51,6% terdiri dari PLTA/PLTM sebesar 10,4 GW atau 25,6% dari kapasitas total, disusul oleh PLTS sebesar 4,7 GW atau 11,5%, PLTP sebesar 3,4 GW atau 8,3% dan EBT lainnya 2,5 GW atau 6,2% berupa PLT EBT Base (1 GW), PLTB (0,6 GW), PLTSa, PLTBg, PLTBn, dan PLTBm (0,6 GW) serta BESS (0,3 GW).

Sedangkan untuk pengembangan PLTU batubara lebih kecil dari RUPTL 2019-2028 yaitu sebesar 13,8 GW atau 31,4% (terdiri dari PLTU MT sebesar 3,3 GW dan PLTU Non MT 10,5 GW). PLTGU akan dibangun dengan kapasitas sebesar 3,8 GW atau 9,5% dan PLTG/MG sebesar 1,9 GW atau 4,9%.

The plan to increase generation capacity for the next 10 years (period 2021-2030) all over Indonesia is 40.6 GW or an average capacity increase of 4 GW per year. With the addition of NRE power plants, 20.9 GW or 51.6% of power plants is planned to be built, consisting of HPP/MHPP of 10.4 GW or 25.6% of the total capacity, followed by SPP of 4.7 GW or 11.5%, GPP of 3.4 GW or 8.3% and other NRE 2.5 GW or 6.2% in the form of NRE-Based Power Plant (1 GW), WPP (0.6 GW), Waste Power Plant, Biogas Power Plant, Biofuel Power Plant, and Biomass Power Plant (0.6 GW) and BESS (0.3 GW).

Meanwhile, the development of coal-fired power plants is smaller than 2019-2028 Electricity Supply Business Plan, which is 13.8 GW or 31.4% (consisting of 3.3 GW MT CFPP and 10.5 GW Non-MT CFPP). CCPP is planned to be built with a capacity of 3.8 GW or 9.5% and GTPP/GEPP of 1.9 GW or 4.9%.

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT

Proyeksi Penjualan Listrik
Electricity Sales Projection

Dengan adanya penurunan proyeksi demand akibat pandemi Covid-19, kebutuhan pasokan listrik pun menurun. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan listrik pada RUPTL 2019-2028 yaitu 6,4% per tahun, pada RUPTL 2021-2030 rata-rata pertumbuhan turun signifikan ke angka 4,9% per tahun.

Optimisme pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 pada tahun 2021 di sektor pelanggan bisnis dan industri terlihat pada asumsi masuknya potensi-potensi pelanggan besar di kedua kelompok pelanggan tersebut. Jika pemulihan ekonomi di tahun 2021 tidak seoptimis yang diharapkan dan potensi-potensi pelanggan tersebut tidak masuk sesuai yang direncanakan maka penjualan diproyeksikan 247 TWh atau tumbuh hanya 2,3%. Kebutuhan tenaga listrik per golongan pelanggan diproyeksikan pada tabel di bawah.

With the decrease in the projected demand due to Covid-19 pandemic, the need for electricity supply has also decreased. When compared to the average electricity growth in the 2019-2028 Electricity Supply Business Plan, which was 6.4% per year, in the 2021-2030 Electricity Supply Business Plan the average growth fell significantly to 4.9% per year.

Optimism for economic recovery affected by Covid-19 in 2021 in the business and industrial customer sectors is reflected in the assumption that large potential customers will get into two customer groups. If the economic recovery in 2021 is not as optimistic as expected and the potential customers do not enter as planned, sales are projected to be 247 TWh or grow of 2.3% only. Electricity demand per customer class is projected in the table below.

Tabel Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Indonesia (GWh) dengan Skenario Moderat
Table of Indonesian Electricity Sales (GWh) Projection with Moderate Scenario

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rumah Tangga Household	117.194	122.102	127.073	132.118	137.287	142.292	147.428	152.679	157.948	163.417
Bisnis Business	45.675	48.346	51.532	55.313	59.015	62.954	67.022	71.347	75.806	80.392
Publik Public	16.718	17.640	18.631	19.684	20.783	21.925	23.102	24.314	25.556	26.851
Industri Industry	73.547	77.735	82.420	88.028	93.983	99.406	104.223	108.965	113.796	118.904
Total	**253.154**	**265.824**	**279.657**	**295.142**	**311.068**	**326.576**	**341.774**	**357.304**	**373.107**	**389.564**
Pertumbuhan (%) Growth (%)	5,0	5,0	5,2	5,5	5,4	5,0	4,7	4,5	4,4	4,4
Konsumsi tenaga listrik per kapita (KWh/kapita)* Electricity Consumption per Capita (KWh/capita)*	934	972	1.013	1.060	1.107	1.153	1.196	1.241	1.286	1.332
Beban Puncak *Non-Coincident* (MW) Non-Coincident Peak Load (MW)	42.575	44.734	47.160	49.636	52.176	54.591	56.951	59.392	61.892	64.695

*) KWh pada konsumsi listrik per kapita hanya melihat konsumsi listrik PLN
*) KWh on electricity consumption per capita only based on PLN electricity consumption

Sumber: RUPTL PLN 2021-2030
Source: PLN Electricity Supply Business Plan for 2021-2030

Proyeksi penjualan listrik terbagi berdasarkan wilayah penjualan. Wilayah Jawa-Bali memiliki kontribusi penjualan listrik terbesar di Indonesia yaitu diproyeksikan sebesar 187.403 GWh pada tahun 2022. Hal ini menjadi peluang bagi PJB untuk memaksimalkan operasional produksi dan pasokan listrik. Dengan proyeksi komposisi sebagian besar untuk sektor rumah tangga dan industri.

Electricity sales projections are divided by sales area. Java-Bali Region has the largest contribution to electricity sales in Indonesia, which is projected to be 187,403 GWh in 2022. This is an opportunity for PJB to optimize electricity production and supply operations; with the projected composition which is mostly for the household and industrial sectors.

Grafik Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Jawa, Madura, Bali (GWh) Skenario Moderat Tahun 2022
Graph of Projection of Electricity Sales for Moderate Scenario Java, Madura, Bali (GWh) in 2022

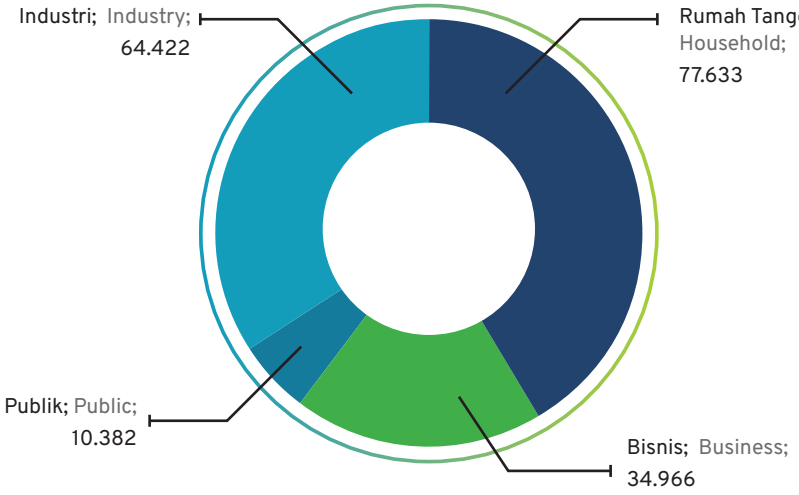

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT

Proyeksi Pengembangan Pembangkit EBT
NRE Power Plant Development Projection

Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara dengan potensi pasar terbesar karena diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Proyeksi peningkatan jumlah populasi Indonesia sebesar 2% hingga tahun 2030, sementara pertumbuhan ekonomi tercermin dari proyeksi peningkatan peningkatan nilai PDB sebesar 6% yang menunjukkan peningkatan pendapatan Negara. Perkembangan EBT di Indonesia untuk solar, angin dan hidro akan menjadi relevan dengan *renewable energy services* (RES) dalam 10 tahun ke depan.

Indonesia is one of the countries in Southeast Asia with the largest market potential since it is predicted to experience rapid growth. The projected increase in Indonesian population by 2% until 2030, while economic growth is reflected in the projected increase in the value of GDP by 6% which indicates increase in state income. New and renewable energy development in Indonesia for solar, wind and hydro energy will become relevant to Renewable Energy Services (RES) in the next 10 years.

Tabel Rencana Pengembangan Pembangkit EBT (MW)
Table of NRE Power Plant Development Plan (MW)

Pembangkit-EBT Power Plant – NRE	Satuan Unit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Jumlah Total
PLTP GPP	MW	136	108	190	141	870	290	123	450	240	808	3.355
PLTA HPP	MW	400	53	132	87	2.478	327	456	1.611	1.778	1.950	9.272
PLTM MHPP	MW	144	154	277	289	189	43	-	2	13	6	1.118
PLT Surya Solar PP	MWp	60	287	1.308	624	1.631	127	148	165	172	157	4.680
PLT Bayu PLT Bayu	MW	-	2	33	337	155	70	-	-	-	-	597
PLT Biomasa/sampah Biomass PP	MW	12	43	88	191	221	20	-	15	-	-	590
PLT EBT *Base* EBT Base PP	MW	-	-	-	-	-	100	265	215	280	150	1.010
PLT EBT *Peaker* EBT Peaker PP	MW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
Jumlah Total	MW	**752**	**648**	**2.028**	**1.670**	**5.544**	**978**	**991**	**2.458**	**2.484**	**3.370**	**20.923**

Sumber: RUPTL PLN 2021-2030
Source: PLN Electricity Supply Business Plan 2021-2030

Dalam kurun waktu tahun 2021-2030, produksi energi dan gas meningkat 1,5 kali, produksi energi dari batubara meningkat sebesar 1,3 kali, dan EBT meningkat 2,7 kali. Sementara pemakaian BBM sangat minimal mulai tahun 2023 dan seterusnya. Hal ini mengartikan bahwa perencanaan dalan RUPTL 2021-2030 sejalan dengan kebijakan Pemerintah mengenai diversifikasi energi, yaitu mengurangi pemakaian BBM, mengoptimalkan pemakaian batubara dan gas serta meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan.

From 2021 to 2030, energy and gas production will increase by 1.5 times, coal-based energy production will increase by 1.3 times, and NRE will increase by 2.7 times. Meanwhile, the use of fuel is very minimal from 2023 onwards. This can be said that the planning in 2021-2030 Electricity Supply Business Plan is in line with the Government policy on energy diversification, which is reducing the use of fuel, optimizing the use of coal and gas, and increasing the portion of new and renewable energy.

Komposisi produksi listrik per jenis energi primer di Jawa, Madura, dan Bali diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi 66,7% batubara, 17,1% gas (termasuk LNG), 4,6% tenaga air, 6,6% panas bumi, 0,2% BBM, dan 4,8% EBT lainnya. Porsi pembangkit EBT di Jakwa, Madura, dan Bali akan meningkat dari 8,5% tahun 2021 menjadi 16,1% di tahun 2030.

Composition of electricity production per type of primary energy in Java, Madura, and Bali is projected in 2030 to be 66.7% coal, 17.1% gas (including LNG), 4.6% hydropower, 6.6% geothermal, 0.2% fuel oil, and 4.8% other NRE. The share of NRE power plants in Java, Madura, and Bali will increase from 8.5% in 2021 to 16.1% in 2030.

Grafik Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Jawa, Madura, Bali (GWh) Skenario Moderat Tahun 2022
Chart of Electric Energy Mix Composition Based on Java, Madura, and Bali Fuel Types (GWh)

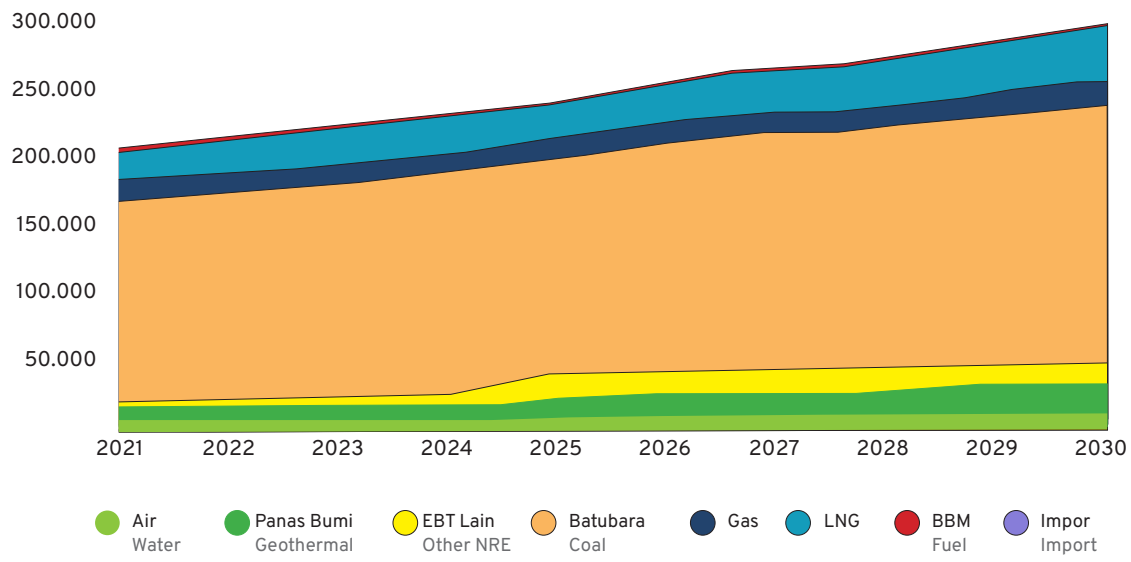

Sumber: RUPTL PLN 2021-2030
Source: PLN Electricity Supply Business Plan 2021-2030

Prospek Usaha PJB
PJB Business Prospect

Dengan target pemerintah pembangunan energi terbarukan untuk mencapai bauran energi nasional menuju 23% pada tahun 2025. PJB menargetkan untuk menjadi operator solar PV yang terbesar di Indonesia, menjadi *leader* dalam biomas *co-firing* hingga 5% *fuel mix,* menjadi *operator wind* terbesar di Indonesia dan pemain terkemuka di bidang *battery storage solution.*

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti Surya dan Angin saat ini telah mencapai tingkat kematangan baik secara teknologi maupun secara keekonomian. Perkembangan teknologi EBT yang semakin murah akan menggeser peran pembangkit berbahan bakar fosil (BBM, BBG, dan batubara) namun di sisi lain akan memberi peluang PJB bersama partner strategis untuk membangun tenaga listrik yang memanfaatkan energi yang berkelanjutan. PJB telah diberi penugasan pengembangan PLTS Apung di waduk Cirata dengan kapasitas sebesar 145 MWac melalui skema kerjasama dengan investor dari Unit Emirat Arab yakni MASDAR.

By the government target of developing new and renewable energy to achieve national energy mix of 23% by 2025; PJB targets to become the largest solar PV operator in Indonesia, become a leader in biomass co-firing up to 5% fuel mix, become the largest wind operator in Indonesia and a leading player in the sector of battery storage solutions.

The utilization of new and renewable energy such as solar and wind has now reached a maturity level both technologically and economically. Development of cheaper renewable energy technology will shift the role of fossil fuel power plants (fuel, gas, and coal) but on the other hand, it will provide opportunities for PJB and strategic partners to build electricity that utilizes sustainable energy. PJB has been assigned the task of developing a floating CFPP in Cirata Reservoir with a capacity of 145 MWac through a cooperation scheme with investors from the United Arab Emirates, MASDAR.

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT

Dalam pengembangan bisnis di bidang energi baru terbarukan, PT PJB berencana untuk melakukan *feasibility study* bisnis EBT, kajian pengembangan PLTSa/Biomasa, Implementasi Ekosistem SPKLU & PLTS, Pengembangan PLTS Dedieselisasi, Pengembangan PLTA Wado, Pengembangan PLTS Simeuleu dan relokasi Pembangkit PJB untuk program non penugasan. Sedangkan untuk penugasan terdapat PLTM Lodoyo II, PLTA Aceh Meurebo-2, PLTA Lasolo, PLTA Sibundong, PLTS Cirata, PLTB Tanah Laut, PLTA Batang Toru, PLTS Komunal 6 Lokasi UID Jatim.

Sasaran pengembangan usaha PT PJB adalah memastikan kedaulatan listrik nasional melalui partisipasi aktif dalam program 35.000 MW dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik, pengembangan pembangkit energi baru terbarukan. Dalam pengembangan di bisnis IPP, PJB akan menggunakan *vehicle company* (Anak Perusahaan) yaitu PJB Investasi, yang akan mengelola dana investasi atas penugasan IPP.

In business development in the sector of new and renewable energy, PT PJB plans to conduct a feasibility study on the NRE business, a study on the development of Waste/Biomass Power Plants, Implementation of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) & SPP Ecosystem, Development of SPP Dedieselization, Development of Wado HPP, Development of Simeuleu SPP, and relocation of PJB Power Plant for non-assignment programs. Related to the assignment, there are Lodoyo II GEPP, Aceh Meurebo-2 HPP, Lasolo HPP, Sibundong HPP, Cirata SPP, Tanah Laut WPP, Batang Toru HPP, and Communal 6 SPP of UID East Java.

The target of PT PJB's business development is to ensure national electricity sovereignty through active participation in the 35,000 MW program with the development of power plants, and the development of new renewable energy plants. In the development of IPP business, PJB will use a vehicle company (Subsidiary), namely PJB Investasi, which will manage the investment funds for IPP assignment.

Tabel Rencana COD Pembangkitan 2022-2023
Table of COD Generation Plan 2022-2023

Proyek Projects	Kapasitas Capacity	Keterangan Status	*Progress*
Add on Muara Tawar Blok 2 Add on Muara Tawar Block 2	150 MW	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
PLTS Komunal 6 Lokasi UID Jatim Communal 6 SPP of UID East Java	400 kWp	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
Total Rencana COD 2022 **Total COD Plan for 2022**	**150 + 400 kWp**		
Add on Muara Tawar Blok 3 Add on Muara Tawar Block 3	250 MW	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
Add on Muara Tawar Blok 4 Add on Muara Tawar Block 4	250 MW	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
PLTS Cirata Cirata SPP	145 MW	Penugasan Assignment	Konstruksi Construction
PLTS Bawean Bawean SPP	5 MW	Penugasan Assignment	FS
Total Rencana COD 2023 **Total COD Plan for 2023**	**650 MW**		
Total COD s.d 2023 **Total COD as of 2023**	**800 MW + 400 kWp**		

Strategi Perusahaan Kedepan
Further Strategy

PJB memiliki fokus pada 3 (tiga) arah pengembangan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni *Renewable Energy Champion, Digital Solution Champion* dan *Power Solution Champion.* Untuk mencapai sasaran strategis ini PJB menetapkan 5 (lima) pilar strategis yaitu:

1. **Pilar 1 *Core Optimizing***
   Berfokus pada penyelesaian proyek yang sedang berjalan, implementasi *co-firing* dalam meningkatkan bauran energi EBT yang murah, optimasi atas pembangkit yang sudah melewati umur ekonomis, menua dan tidak kompetitif, mendukung kehandalan *grid* melalui fungsi *fast response* serta pemanfaatan aset (lahan dan properti) di sekitar pembangkit.
2. **Pilar 2 *Core Expansion***
   Berfokus pada pengembangan pembangkit baik yang tercantum dalam RUPTL maupun selain RUPTL seperti misalnya *captive power,* dan penetrasi pasar luar negeri.
3. **Pilar 3 *Renewable Energy***
   Berfokus dalam pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti PLTS *on-grid*, PLTB, dan sumber lain serta pendukungnya seperti *energy storage* dan infrastruktur kendaraan listrik (SPKLU).
4. **Pilar 4 *Asset Light***
   Berfokus dalam pengembangan bisnis yang bersifat *non-heavy asset* seperti implementasi *Digital Power Plant* baik untuk pembangkit yang dikelola maupun pembangkit lain, penyediaan *rooftop solar* PV untuk pelanggan, mengembangkan jasa manjemen energi, dan pengembangan *platform* transaksi energi antar pihak.
5. **Pilar 5 *Power Solutions***
   Berfokus dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya PJB *Group* dalam bisnis pembangkit, pendukungnya serta industri *utility* lainnya.

PJB has focus on 3 (three) development programs in the next 5 (five) years: Renewable Energy Champion, Digital Solution Champion, and Power Solution Champion. To achieve this strategic target, PJB has established 5 (five) strategic pillars as follows:

1. **Pillar 1: Core Optimizing**
   Focusing on the completion of ongoing projects, implementing co-firing in increasing the low-cost renewable energy mix, optimizing power plants that are passed their economic, aging, and uncompetitive, supporting grid reliability through fast response functions and utilization of assets (land and property) in around the generator.
2. **Pillar 2: Core Expansion**
   Focusing on the development of power plants, both those listed in the Electricity Supply Business Plan and others, such as captive power, and foreign market penetration.
3. **Pillar 3: Renewable Energy**
   Focusing on the development of New and Renewable Energy (NRE) plants such as on-grid SPP, WPP, and other sources and their supporters such as energy storage and the Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU).
4. **Pillar 4: Asset Light**
   Focusing on non-heavy asset business development, such as implementing Digital Power Plants for both managed and other plants, providing rooftop solar PV for customers, developing energy management services, and developing an energy transaction platform between parties.
5. **Pillar 5: Power Solutions**
   Focusing on optimizing all PJB Group resources in the power generation business, supports, and other utility industries.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

Perusahaan menjalankan dan terus membangun usaha sesuai dengan tata kelola perusahaan kelas dunia dalam rangka meningkatkan kredibilitas perusahaan dan memperluas jangkauan layanannya. Dengan kompetensi utama di bidang pembangkitan fosil dan energi baru dan terbarukan, PJB terus bergerak dan berinovasi sesuai tren global dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan *value* perusahaan dan pemangku kepentingan.

The Company runs and continues to build its business following world-class corporate governance to increase the Company's credibility and expand its range of services. With core competencies in the field of fossil power generation and new and renewable energy, PJB continues to move and innovate in line with global trends in developing businesses to support national development and increase company and stakeholder value.

Industri ketenagalistrikan nasional maupun global dihadapkan pada tantangan seperti dorongan penggunaan energi bersih, dekarbonisasi, desentralisasi dan digitalisasi dalam pembangunan pembangkit ke depan. Tantangan yang dihadapi semakin besar dengan perubahan lingkungan bisnis di sektor ketenagalistrikan sebagai dampak dari bencana pandemik yang terjadi baik dari segi pasar dan persaingan, tren dan dorongan teknologi, iklim investasi serta hal-hal lain yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perusahaan berupaya merespon tantangan tersebut dengan melakukan transformasi menyeluruh guna mengeliminasi dampak dari perubahan tersebut dan menciptakan peluang untuk meningkatkan daya saing. Sehingga, PJB mampu memperluas jangkauan pasar dan memberikan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sesuai dengan arah pengembangan korporasi, PJB telah memasuki Transformasi Korporat 2 menuju ke arah *new energy* dan *sustainable*. Efektifitas dari pencapaian tujuan transpormasi tersebut sangat bergantung terhadap pemenuhan atas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan, menekan biaya, memperkuat kepatuhan terhadap hukum dan mendorong pertumbuhan nilai perusahaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sehingga, Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan daya saing baik dalam lingkup nasional maupun global serta berkontribusi positif atas pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

The national and global electricity industry is faced with challenges such as encouraging the use of clean energy, decarbonization, decentralization, and digitalization in future power generation development. The challenges faced are getting bigger with changes in the business environment in the electricity sector as a result of the pandemic and disasters that occurred both in terms of market and competition, technological trends and impetus, investment climate, and other matters that affect both directly and indirectly.

The Company seeks to respond to these challenges by carrying out a comprehensive transformation to eliminate the impact of these changes and create opportunities to increase competitiveness. Thus, PJB can expand its market reach and provide benefits for shareholders and stakeholders. According to the direction of corporate development, PJB has entered Corporate Transformation 2 towards new and sustainable energy. The effectiveness of achieving the objectives of the transformation is highly dependent on the fulfillment of the implementation of Good Corporate Governance principles.

The implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) plays an important role in increasing the trust of investors and stakeholders, reducing costs, strengthening legal compliance, and encouraging the growth of corporate value in line with the principles of sustainable development. Thus, the Company is expected to increase its competitiveness both nationally and globally and contribute positively to environmental preservation and social welfare.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
Principles of Good Corporate Governance (GCG)

Transparansi
Prinsip Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan bagi Perusahaan. Transparansi diupayakan dan diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholder serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan praktik terbaik GCG.

Transparency
The principle of transparency is openness in carrying out the decision-making process and presenting material information that is relevant to the Company. Transparency is pursued and realized by the Company by always trying to pioneer the disclosure of financial and non-financial information to stakeholders and in its disclosure not being limited to information that is mandatory by not violating applicable laws and regulations and in accordance with GCG best practices.

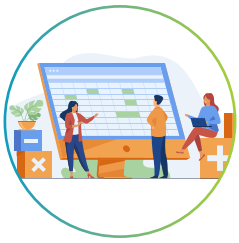

Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan dilaksanakan secara efektif. Penerapan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau Organ Perusahaan agar menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

Accountability
The principle of accountability is the clarity of the functions, implementation and responsibilities of the Company's organs so that the management of the Company is carried out effectively. Implementation of accountability by encouraging all individuals and/or Company Organs to be aware of their rights and obligations, duties and responsibilities and authorities.

Pertanggungjawaban
Prinsip pertanggungjawaban merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan Perusahaan. Pertanggungjawaban diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha menjadi warga Perusahaan yang baik (*Good Corporate Citizen*).

Responsibility
The principle of responsibility is compliance with applicable laws and regulations and the principles of good corporate governance and sound business ethics in managing the Company. Accountability is realized by the Company by always acting as a Good Corporate Citizen.

Kemandirian
Prinsip kemandirian merupakan pengelolaan Perusahaan secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat termasuk tidak adanya kepentingan politik dan kepentingan pribadi dalam pengelolaan Perusahaan.

Independence
The principle of independence is the management of the Company independently without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations and the principles of sound corporate governance including the absence of political interests and personal interests in the management of the Company.

Kewajaran
Prinsip kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholder* sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin bahwa setiap Pemegang Saham dan *Stakeholder* mendapatkan perlakuan yang wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fairness
The principle of fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders in accordance with the agreement and the prevailing laws and regulations. The Company guarantees that every Shareholder and Stakeholder gets fair treatment, and can exercise their rights based on the prevailing laws and regulations.

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

Perusahaan terus meningkatkan penerapan GCG dengan membangun kesadaran dan kepedulian setiap individu di lingkungan PJB untuk menjalankan praktik GCG yang mengutamakan kelangsungan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang dan kepentingan *stakeholders*. Selain itu, PJB mendorong kepatuhan dalam menjalankan praktik GCG yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company continues to improve the implementation of GCG by building awareness and concern for all PJB's people to carry out GCG practices that prioritize the Company's long-term business continuity and the interests of stakeholders. In addition, PJB encourages compliance in carrying out GCG practices that are required in the applicable laws and regulations.

Landasan Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Legal Basis for the Implementation of Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik diimplementasikan dengan memenuhi kaidah-kaidah dalam menata organ dan menjalankan operasional PJB guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain agar tercapai penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan berlandaskan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, serta perubahannya melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. 09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan juga mengadopsi praktik GCG yang sesuai dengan kebutuhan PJB, mempertimbangkan lingkungan tempat beroperasi, ukuran dan kompleksitas bisnis, serta sifat risiko dan tantangan yang dihadapi PJB yang mengacu pada:

1. *Principles of Corporate Governance* oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
3. ASEAN *Corporate Governance Scorecard;*
4. Pedoman Tata Kelola Peusahaan Terbuka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

The Company also adopts GCG practices that follow PJB's needs byconsidering the environment in which it operates, the size and complexity of the business, as well as the nature of the risks and challenges faced by PJB which refer to:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as well as its amendment through the Regulation of the Minister of SOE No. 09/MBU/2012 dated July 6, 2012;
4. Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises Secretary No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.

The Company has also adopted the principles of CCG which are in accordance with PJB's needs, considering the operating environment, business size and complexity, as well as the nature of risks and challenges faced by PJB referring to:

1. Corporate Governance Principles by the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) and the Financial Services Authority (OJK);
2. General Guidelines of Indonesian GCG by the National Committee for Governance Policy (KNKG);
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
4. Public Company Governance Guidelines in the Regulation of the Financial Services Authority (POJK).

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Purpose of Good Corporate Governance Practices

Pencapaian tujuan Perusahaan harus didukung dengan tata kelola yang baik mencakup pengelolaan seluruh rangkaian proses di dalam Perusahaan, baik proses inti maupun proses penunjang, dan mengontrol berjalannya setiap proses tersebut sesuai kententuan yang berlaku serta mengelola risiko sesuai dengan lingkungan, ukuran, kompleksitas dan tantangan bisnis yang dihadapi. Oleh karena itu, tujuan penerapan GCG di Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mencapai pertumbuhan dan timbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya;
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan;
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
4. Mengelola sumber daya secara lebih amanah;
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
6. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan;
7. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan Perusahaan.

Perusahaan memastikan pencapaian tujuan tersebut dengan menjabarkannya dalam bentuk sasaran penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sasaran penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PJB meliputi:

1. Terlaksananya sistem manajemen stratejik yang handal, sehingga mampu merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sejalan dengan rencana strategis Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Adanya keterbukaan serta komunikasi dua arah baik dengan regulator, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Berfungsinya dengan baik organ-organ pendukung kegiatan pengendalian internal dan pengembangan Perseroan, antara lain Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Komite Nominasi dan Remunerasi, Internal Audit, Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, dan sebagainya;

The achievement of the Company's objectives must be supported by good governance which includes the management of the entire series of processes within the Company, both core processes and supporting processes, and controlling the running of each of these processes according to applicable regulations and managing risks by the environment, size, complexity and business challenges faced. Therefore, the objectives of implementing GCG in the Company are as follows:

1. Achieving maximum growth and return of results, so that it increases the prosperity of the Company, as well as realizing Shareholders value in the long-term without ignoring other stakeholders' interests;
2. Controlling and directing good relations between the Shareholders, the Board of Directors, Board of Commissioners, and all stakeholders of the Company;
3. Supporting the Company's internal control and development activities;
4. Managing resources more reliably;
5. Increasing accountability to the stakeholders;
6. Improving the Company's work culture;
7. Making the Company value-added, namely improving the welfare of the Company's entire personnels and increasing the benefits for the Company's stakeholders.

The Company ensures the achievement of these goals by describing them in the form of targets for the implementation of Good Corporate Governance. The targets for implementing good corporate governance within PJB include:

1. Implementation of the reliable strategic management system, to be able to formulate Vision, Mission, Objectives, and Targets that are in line with the Company's strategic plan, both in the short-term and long-term;
2. There are openness and two-way communication with regulators, shareholders, and other stakeholders;
3. The supporting organs of the Company's internal control and development activities work well, including the Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee, Nomination and Remuneration Committee, Internal Audit, Risk Management, Corporate Secretary, and so on;

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

4. Tegaknya komitmen dan aturan main dari praktik penyelenggaraan bisnis yang beretika;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, unggul, profesional dan bebas dari benturan kepentingan;
6. Memastikan seluruh jajaran Perseroan mengetahui dan mampu menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku serta mengetahui *penalty* dan *reward*-nya;
7. Tegaknya kepedulian pada masyarakat sekitar dan pada kelestarian lingkungan melalui penerapan program CSR yang tepat di area sekitar pembangkit.

4. Enforcement of commitments and rules from ethical business practices;
5. Availability of human resources who are reliable, superior, professional, and free from conflicts of interest;
6. Ensuring that all Company levels understand and being able to carry out their duties, obligations, and responsibilities following the prevailing regulations, as well as understand the penalties and rewards;
7. Enforcement of concern for the surrounding community and environmental sustainability through the implementation of appropriate CSR programs in the area around the power plant.

Proses Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Process

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjelaskan substansi keluaran yang diharapkan dari implementasi GCG. Oleh karena itu, Perusahaan perlu memperhatikan praktik GCG yang sebaiknya diterapkan korporasi untuk dapat mencapai substansi keluaran yang tercermin dalam prinsip tersebut. PJB mendorong praktik GCG terbaik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam rangka menciptakan nilai yang berkelanjutan. Penerapan praktik GCG tersebut bukan hanya dalam bentuk penyusunan seperangkat aturan internal namun juga secara substansi dapat mendorong kepedulian terhadap kepentingan terbaik Perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Perusahaan merancang proses tata kelola yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada di PJB dalam rangka memastikan penerapan setiap proses bisnis dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The principles of good corporate governance explain the substance of the expected outputs from the implementation of GCG. Therefore, the Company needs to pay attention to GCG practices that should be implemented by corporations to be able to achieve the substance of the outputs reflected in these principles. PJB encourages best GCG practices following the Company's needs to create sustainable value. The implementation of GCG practices is not only in the form of compiling a set of internal rules but can also substantially encourage concern for the best interests of the Company in the long term. Therefore, the Company designs a governance process that is in line with the values that exist in PJB to ensure that the implementation of every business process is based on the principles of good corporate governance.

Proses Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Process

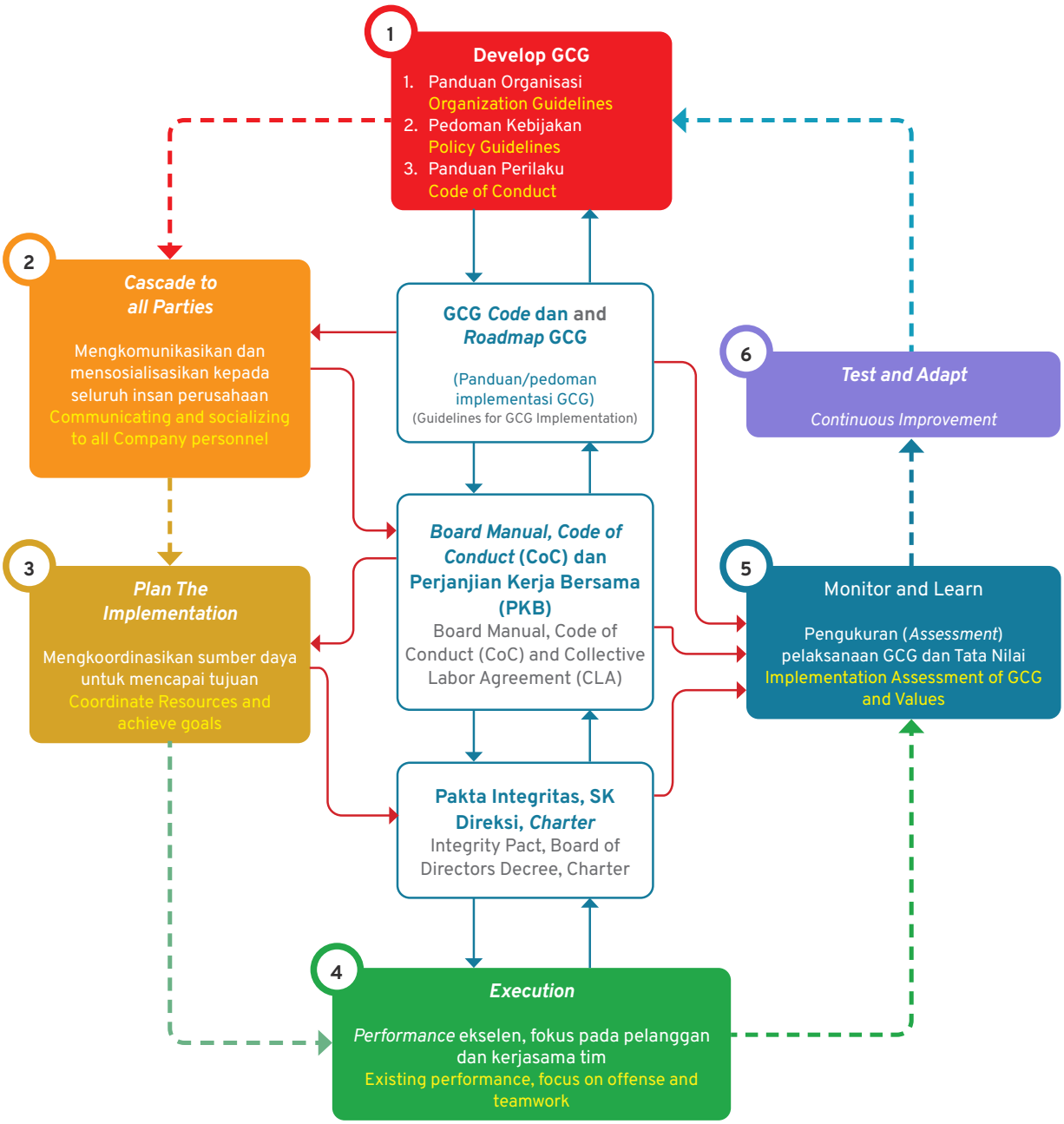

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

1. *Develop* GCG
   Pengembangan struktur dalam penerapan GCG, yang meliputi panduan organisasi, pedoman kebijakan dan panduan perilaku. Hasil *output* proses ini adalah CG *Code* dan *Roadmap* GCG sebagai pedoman implementasi GCG di PJB. Kedua *output* ini akan menjadi referensi dalam penyusunan pedoman kebijakan lainnya atau *soft structure* GCG. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan.
2. *Cascade to all Parties*
   Kegiatan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan *soft structure* yang telah ditetapkan kepada seluruh Insan Perusahaan. Hasil dari proses ini adalah ditetapkannya *Board Manual* (Tatalaksana Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris), PKB hasil kesepakatan Manajemen dengan Serikat Pekerja, dan *Code of Conduct* sebagai pedoman perilaku seluruh Insan Perusahaan. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan. Seluruh karyawan menandatangani komitmen atas kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap tahunnya.
3. *Plan the Implementation*
   Proses mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Hasil dari proses ini adalah ditetapkannya *Charter* (Komite *Audit Charter & Internal Audit Charter*), Pedoman Pelaksanaan Audit, Surat Keputusan Direksi, dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi.
4. *Execution*
   Tahapan proses dimana kegiatan bisnis yang dilaksanakan Perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.
5. *Monitor & Learn*
   Kegiatan pengukuran pelaksanaan GCG dan tata nilai Perusahaan. Hasil dari proses ini adalah hasil *assessment* GCG, baik yang dilakukan oleh badan independen (pada tahun genap), atau secara s*elf assessment* (pada tahun ganjil), serta Budaya Perusahaan dan *Workforce Engagement Survey.*
6. *Test & Adapt*
   Pengembangan berkelanjutan atas hasil *assessment* GCG. Perlu dilakukan *continuous improvement* dari penerapan GCG yang telah dilakukan dengan memperbaiki *Area of Improvement* yang ditemukaan saat pelaksanaan *assessment.*

1. Develop GCG
   The structure development in the GCG implementation includes organizational guidelines, policy guidelines, and behavioral guidelines. The output is the CG Code and GCG Roadmap as guidelines for the GCG implementation at PJB. These two outputs will be the reference in the preparation of other policy guidelines or the GCG soft structure. These guidelines are periodically evaluated following the needs development of the Company.
2. Cascade to all Parties
   It is purposed to communicate and socialize the soft structure that has been determined for all Company Personnel. This process results are the establishment of the Board Manual (Management of Relationships between the Board of Directors and the Board of Commissioners), Collective Labor Agreement (CLA) as agreement results between Management and the Labor Union, and the Code of Conduct as guidelines for all Company personnel. These guidelines are periodically evaluated following the needs development of the Company. All employees sign the commitment to complying with the code of conduct annually.
3. Plan the Implementation
   It is the process of coordinating resources to achieve goals. The results are the establishment of the Charter (Audit Committee Charter & Internal Audit Charter), Audit Implementation Guidelines, Board of Directors Decree, and the signing of the Integrity Pact by the Board of Directors.
4. Execution
   It is the process stage where business activities are run by considering the GCG principles.
5. Monitor & Learn
   It is measurement activities of the GCG implementation and corporate values. The results are the GCG assessment results, whether carried out by an independent party (in even years) or self-assessment (in odd years), as well as the Corporate Culture and Workforce Engagement Survey.
6. Test & Adapt
   Continuous development of the GCG assessment results. It is necessary to carry out continuous improvement from the GCG implementation that has been carried out by improving the Areas of Improvement found during the assessment.

Sasaran Strategis Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Strategic Goals

Sasaran strategis penerapan GCG PJB dijabarkan dalam bentuk *Roadmap* GCG yang merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi GCG di lingkungan PJB dalam memastikan efektifitas pencapain tujuan penerapan GCG. *Roadmap* pengembangan dan implementasi GCG PJB Tahun 2016–2021 dengan menerapkan konsep *Enterprise Governance* mencakup proses *Corporate Governance* dan proses *Business Governance* sebagai dasar dalam membangun tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. PJB mengusung visi *Good Corporate Citizen* pada tahun 2021, dengan melanjutkan apa yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya untuk meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang diadopsi berdasarkan standar global sesuai dengan kebutuhan PJB.

The strategic targets of PJB's GCG implementation are described in the form of a GCG Roadmap which is a grand strategy and milestone of GCG implementation within PJB in ensuring the effectiveness of achieving the objectives of GCG implementation. Roadmap for the development and implementation of GCG PJB 2016–2021 by applying the concept of Enterprise Governance including the Corporate Governance process and the Business Governance process as the basis for building sustainable corporate governance. PJB carries the vision of Good Corporate Citizen in 2021, by continuing what has been carried out in the previous year to improve the implementation of corporate governance adopted based on global standards following PJB's needs.

Roadmap Pengembangan dan Implementasi GCG PJB Tahun 2016–2021
Roadmap of PJB GCG Development and Implementation for 2016–2021

2016 - 2017	2018 - 2019	2020 - 2021
Visi Vision		
Good Corporate Governance	***Good Corporate Company***	***Good Corporate Citizen***
Implementasi Implementation		
1. Pemutakhiran Infrastruktur GCG **2. *Assessment* GCG Unit dan Anak Perusahaan** 1. GCG Infrastructure Update 2. Assessment of GCG Unit and Subsidiaries	**Penerapan standar Tata Kelola Perusahaan setara dengan Perusahaan Terbuka** Standard Implementation of Good Corporate Company in line with Limited Liability Company	**Analisa penerapan GCG sesuai standar ASEAN GC *Scorecard*** Analysis Implementation of Good Corporate Company following Standard of ASEAN CG Scorecard
Sasaran Indikator Indicator Target		
1. Pemenuhan ketentuan dan peraturan dalam Tata Kelola Perusahaan **2. Terbentuknya mekanisme Pengendalian Internal** 1. Fulfilling the laws and regulations in GCG 2. Establishment of Internal Control Mechanism	**Dapat mengendalikan operasi bisnis, khususnya aspek risiko usaha secara selektif** Able to control operational business, especially the aspect of business riks selectively	**Dikenal sebagai perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab** Known as an ethical and responsible Company

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

Program kegiatan yang telah dilakukan PJB pada tahun 2021 dalam rangka mendorong pencapaian sasaran strategis GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Hasil Rekomendasi atas *Assessment* GCG Tahun 2020;
2. Pembahasan Program Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AOI) *Assessment* GCG Tahun 2020 seluruh Anak Perusahaan PLN pada Aspek Pemegang Saham;
3. Penyusunan Program Tindak Lanjut AOI *Assessment* GCG Tahun 2020;
4. Penyelesaian Program Tindak Lanjut AOI *Assessment* GCG Tahun 2020, termasuk pada Aspek Pemegang Saham dan telah disampaikan kepada DIVPKK PLN;
5. *Review Board Manual*, BOD *Manual* dan BOC *Manual*, beserta penyusunan dan *review* kajian yang diperlukan;
6. Pelaksanaan induksi Direksi dan Dewan Komisaris yang baru;
7. *Review* dan pengesahan Peraturan Direksi Penerapan GCG Tahun 2021;
8. *Review* dan pengesahan Peraturan Direksi tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan;
9. Pelaksanaan *assessment* GCG Periode Tahun 2021 secara mandiri (*self assessment*);
10. Sosialisasi dan *refreshment* pemahaman terkait *soft structure* GCG kepada seluruh karyawan;
11. Komitmen Integritas atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

The program of activities that have been carried out by PJB in 2021 to assist the achievement of the Company's GCG strategic targets are as follows:

1. Submission of Recommendation Results on the 2020 GCG Assessment;
2. Discussion of the 2020 GCG Assessment Area of Improvement (AOI) Follow-up Program for all PLN Subsidiaries in the Shareholders Aspect;
3. Preparation of the 2020 GCG AOI Assessment Follow-up Program;
4. Completion of the 2020 GCG AOI Assessment Follow-up Program, including the Shareholders Aspect and has been submitted to the PLN DIVPKK;
5. Review Board Manual, BOD Manual, and BOC Manual, along with the preparation and review of necessary studies;
6. Implementation of the induction of the new Board of Directors and Board of Commissioners;
7. Review and ratification of the 2021 GCG Implementation Board of Directors Regulations;
8. Review and ratification of the Board of Directors' Regulations concerning Limits of Decision-Making Authority;
9. Implementation of GCG assessment for the 2021 Period independently (self-assessment);
10. Socialization and refreshment of understanding related to GCG soft structure to all employees;
11. Commitment to the Integrity of the Anti-Bribery Management System by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Practices Management

Direksi dan Dewan Komisaris memahami dan menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik jangka panjang Perusahaan. Direksi memastikan karyawan sepenuhnya memahami dan menghargai manfaat penerapan prinsip-prinsip, proses dan prosedur GCG melalui program pelatihan dan komunikasi yang efektif. Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala meninjau implementasi GCG yang sesuai dengan bisnis perusahaan.

The Board of Directors and the Board of Commissioners are aware to apply the principles of GCG following the needs and long-term best interests of the Company. The Board of Directors ensures that employees fully understand and appreciate the benefits of implementing GCG principles, processes and procedures through effective training and communication programs. The Board of Commissioners together with the Board of Directors periodically review the implementation of GCG following the Company's business.

Direksi melalui Keputusan Direksi di Luar Rapat tentang Penunjukkan Penanggung Jawab dalam Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) tanggal 2 Juli 2013 telah menetapkan secara khusus Direktur SDM dan Administrasi sebagai penanggung jawab atas penerapan dan pemantauan GCG. Secara teknis, Direktur SDM dan Administrasi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PJB dalam memastikan penerapan dan pemantauan GCG di lingkungan PJB.

Tanggung jawab Direktur SDM dan Administrasi terkait penerapan dan pemantauan GCG antara lain:

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PJB dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga;
4. Melaporkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS dan Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun.

Sekretaris Perusahaan menyusun laporan pelaksanaan GCG untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS melalui Laporan Hasil *Assessment* GCG, Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan Perusahaan.

The Board of Directors through the Decision of the Board of Directors outside the Meeting concerning the Appointment of Persons in Charge for the Implementation and Monitoring of Good Corporate Governance on July 2, 2013, has specifically appointed the Director of HC and Administration as the person in charge of implementing and monitoring GCG. Technically, the Director of HC and Administration is assisted by the Corporate Secretary following the Board of Directors Regulation No. 010.P/019/DIR/2019 regarding PJB's Organization and Work Procedures in ensuring the implementation and monitoring of GCG within PJB.

Responsibilities of the Director of HC and Administration related to the implementation and monitoring of GCG include:

1. Prepare a work plan needed to ensure that the Company complies with the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance at PJB and other laws and regulations to implement the principles of Good Corporate Governance;
2. Monitor and maintain that the Company's business activities do not deviate from the applicable provisions;
3. Monitor and maintain the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties;
4. Report on the implementation of Good Corporate Governance which is submitted to the GMS and the Board of Commissioners at least once a year.

The Corporate Secretary prepares a report on the implementation of GCG to be further submitted to the Board of Commissioners and the GMS through the GCG Assessment Result Report, Management Report, and the Company's Annual Report.

Penilaian Implementasi GCG
GCG Assessment

Pelaksanaan GCG dievaluasi secara berkala baik mandiri maupun oleh pihak independen. Penilaian implementasi GCG tahun 2021 dilakukan secara mandiri (*self assessment*) yang berita acara validasinya telah ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2022, setelah sebelumnya pada tahun 2020 dilakukan oleh Pihak Independen dalam hal ini yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur berdasarkan Nota Dinas Direktur SDM dan Administrasi Nomor ZF0209093 tanggal 22 Januari 2021.

The implementation of GCG is evaluated periodically, both independently and by an independent party. The GCG implementation assessment in 2021 is carried out independently (self-assessment) whose validation minutes have been signed on January 14, 2022, after previously in 2020 it was carried out by an Independent Party in this case namely the East Java Province BPKP Representative based on the Memorandum of the Director of HC and Administration No. ZF0209093 on January 22, 2021.

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

Kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah parameter penilaian yang mencakup 6 (enam) aspek *governance* yaitu Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya. Parameter tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Hasil penilaian GCG periode 2021 mencapai skor 95,673 dengan klasifikasi "Sangat Baik". Capaian tersebut meningkat dari tahun 2020 dengan skor 95,06. Skor penilaian di tahun 2021 tersebut sekaligus berhasil memenuhi 100% atas target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Manajemen 2020 yang sebesar 95,56. Pencapaian per aspek pengujian tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The criteria used in the assessment are assessment parameters covering 6 (six) aspects of governance, namely Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance in a Sustainable manner, Shareholders and GMS, Board of Commissioners, Board of Directors, Information Disclosure and Transparency, and Other Aspects. These parameters are stated in the Decree of the Secretary to the Minister of SOEs Number 16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance.

The results of the GCG assessment for the 2021 period reached a score of 95.673 with a classification of "Very Good". This achievement increased from 2020 with a score of 95.06. The assessment score in 2021 also succeeded in meeting 100% of the target set in the 2020 Management Contract which was 95.56. Achievements per testing aspect in 2021 are as follows:

Skor *Assessment* GCG PJB Periode 2021
PJB GCG Assessment Score of 2021

No.	Aspek Pengujian Assessment Aspects	Bobot Quality	Capaian Tahun 2021 Achievements in 2021		Keterangan Information
			Skor Score	% Capaian % Achievement	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	7,000	100,00	Sangat Baik Very Good
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9	7,646	84,96	Baik Good
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	33,358	95,31	Sangat Baik Very Good
4	Direksi Board of Directors	35	33,740	96,40	Sangat Baik Very Good
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9	8,929	99,21	Sangat Baik Very Good
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5	5,000	100,00	Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan Total Score		**100**		**95,673**	
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG **GCG Quality Qualification**				**Sangat Baik** **Very Good**	

Penilaian penerapan GCG Perusahaan telah dilakukan sejak tahun 2009. Capaian *assessment* GCG yang diperoleh PJB terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:

The assessment of the Company's GCG implementation has been carried out since 2009. The achievements of the GCG assessment obtained by PJB have continued to increase in the last 5 (five) years, as shown in the following graph:

Skor Penilaian GCG Tahun 2017 - 2021
GCG Assessment Score 2017 - 2021

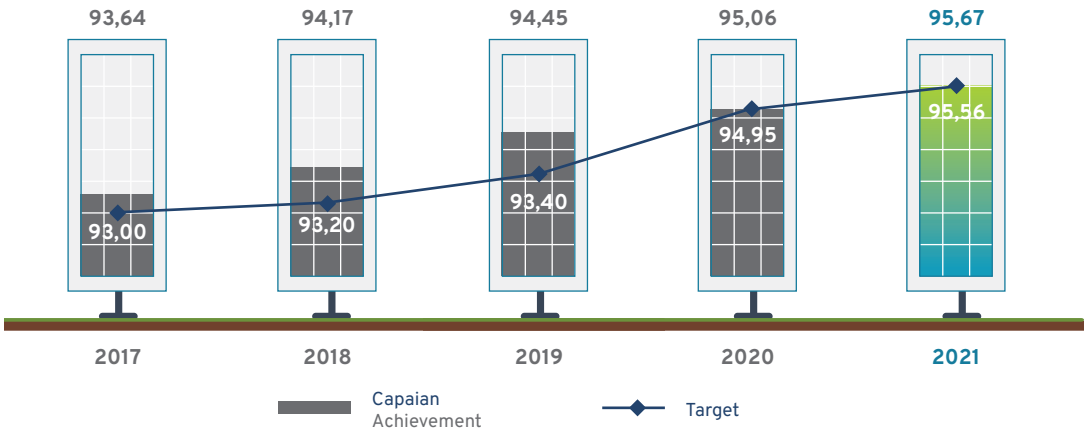

Terdapat beberapa *Area of Improvement* (AoI) dari hasil penilaian penerapan GCG tahun 2021, berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas penerapan GCG di tahun selanjutnya. Rekomendasi penilaian penerapan GCG tahun 2021 adalah sebagai berikut:

There are several Areas of Improvement (AoI) from the results of the 2021 GCG implementation assessment, in the form of recommendations to be followed up to improve the quality of GCG implementation in the following year. Recommendations for assessing the implementation of GCG in 2021 are as follows:

Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG PJB Periode 2021
Recommendations for PJB GCG Assessment Results of 2021

Aspek Aspects	Rekomendasi	Recommendation
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	-	-

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

Aspek Aspects	Rekomendasi	Recommendation
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	1. Pengangkatan/pelantikan anggota dewan komisaris baru didukung dengan berita acara pengangkatan/pelantikan 2. Membuat aturan yang secara eksplisit menetapkan jumlah maksimal jabatan sebagai komisaris yang dapat dipegang oleh seorang anggota komisaris 3. Mengesahkan RKAP perusahaan pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan 4. Memberikan persetujuan terhadap setiap usulan direksi tepat waktu yaitu tidak melebihi 30 hari sejak tanggal pengusulan dari direksi 5. Menetapkan pedoman/sistem penilaian kinerja direksi dan dewan komisaris yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan baik secara individual maupun secara kolegial 6. Menetapkan pedoman gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja bagi direksi dan dewan komisaris yang disahkan RUPS yang memuat formula penghitungan tantiem dengan mempertimbangkan pencapaian target, tingkat kesehatan dan faktor-faktor merit lainnya 7. Menetapkan Pedoman Penunjukkan Auditor Eksternal yang ditetapkan oleh RUPS 8. Meminta usulan imbal jasa/honorarium KAP dari Dewan Komisaris PT PJB dan membahasnya sebelum ditetapkan dalam RUPS 9. Menetapkan pedoman penyusunan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan tentang tugas pengawasan dewan komisaris 10. Menetapkan pedoman tentang dividen.	1. The appointment/inauguration of new members of the board of commissioners is supported by the minutes of the appointment/inauguration 2. Establish regulations that explicitly stipulate the maximum number of positions as commissioners that can be held by a member of the commissioner 3. Approve the Company's ABOP at the end of the year before the current fiscal year 4. Approve every proposal from the board of directors on time, which is not more than 30 days from the date of a proposal from the board of directors 5. Establish guidelines/systems for evaluating the performance of the board of directors and the board of commissioners that contain key performance indicators and success criteria, both individually and collectively 6. Establish guidelines for salary/honorarium, benefits, facilities, tantiem/performance incentives for directors and commissioners approved by the GMS which contain a formula for calculating bonuses taking into account the achievement of targets, health level, and other merit factors 7. Establish Guidelines for Appointing External Auditors determined by the GMS 8. Request a proposal for remuneration/ honorarium for PAF from the Board of Commissioners of PT PJB and discuss it before it is determined in the GMS 9. Establish guidelines for the preparation of annual reports and reports on the supervisory duties of the board of commissioners 10. Establish guidelines on dividends.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Dalam mengusulkan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan PT PJB disertai dengan usulan besaran honorarium/imbal jasa KAP tersebut.	In proposing the PAF to audit the financial statements of PT PJB, it is accompanied by the proposed amount of honorarium/remuneration for the accounting firm.
Direksi Board of Directors	1. Mengisi jabatan yang kosong pada *level* jabatan tertentu dalam struktur organisasi PT PJB sesuai dengan kebutuhan 2. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersifat terbuka	1. Occupy vacant positions at certain position levels in the organizational structure of PT PJB according to needs 2. Carry out the procurement of goods/services with a total value of open Self Estimated Price (SEP)

Aspek Aspects	Rekomendasi	Recommendation
	3. Terkait dengan pengelolaan anak perusahaan (*subsidiary governance*): a. Membuat pedoman tentang penilaian kinerja direksi (individu/kolegial) dan komisaris (kolegial) anak perusahaan/ perusahaan afiliasi yang ditetapkan oleh RUPS b. Membuat pedoman tentang gaji/ honorarium, tunjangan dan fasilitas penghasilan direksi dan komisaris anak perusahaan/perusahaan afiliasi yang ditetapkan oleh RUPS 4. Mengupayakan untuk memenuhi harapan pemegang saham melalui pencapaian target-target yang telah disepakati, dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki	3. Related to the management of subsidiaries (subsidiary governance): a. Making guidelines on performance appraisal of directors (individual/ collegial) and commissioners (collegial) of subsidiaries/affiliated companies determined by the GMS b. Make guidelines on salary/honorarium, allowances, and income facilities for directors and commissioners of subsidiaries/affiliated companies as determined by the GMS 4. Strive to meet shareholder expectations through the achievement of agreed targets, using the available resources
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	-	-
Aspek Lainnya Other Aspects	-	-

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penilaian GCG
Follow-Up Recommendation of Assessment Results of GCG

Berdasarkan *Area of Improvement* (AoI), PJB telah melakukan perbaikan dan *monitoring* atas pelaksanaannya. Tindak lanjut rekomendasi atas hasil penilaian tahun 2020 sebagai berikut:

Based on the Area of Improvement (AoI), PJB has made improvements and monitoring of its implementation. Follow-up recommendations on the results of the 2020 assessment are as follows:

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG PJB Periode 2020
Follow-up to the Recommendations of PJB's GCG Assessment Results of 2020

No.	Rekomendasi	Recommendation	Tindak Lanjut	Follow-up
	ASPEK 2 : PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL **ASPECT 2: SHAREHOLDERS AND GMS/CAPITAL OWNERS**			
1	Menetapkan anggota direksi definitif tidak melebihi 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir (lowong).	Determine the definitive members of the Board of Directors no more than 30 days from the end of the term of office (vacant).	Pemegang Saham telah menetapkan anggota direksi (Direktur Operasi-1) yang definitif tidak melebihi 30 hari jabatan tersebut berakhir (lowong).	Shareholders have appointed a definitive member of the board of directors (Director of Operations-1) not more than 30 days after the term ends (vacant).

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

No.	Rekomendasi	Recommendation	Tindak Lanjut	Follow-up
2	Meminta masukan secara formal dari kementerian teknis maupun Kementerian BUMN mengenai usulan calon anggota dewan komisaris.	Request formal input from the technical ministry and the Ministry of SOEs regarding the proposals for candidates for the board of commissioners.	Telah disampaikan surat ke Kementerian BUMN Nomor 48682/SDM.02.02/C0100000/2021-SR tanggal 14 September 2021 perihal Usulan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT PLN (Persero) PT PJB.	A letter has been submitted to the Ministry of SOEs Number 48682/SDM.02.02/C0100000/2021-SR on September 14, 2021, regarding the Proposal for Members of the Board of Commissioners of the Subsidiary of PT PLN (Persero), PT PJB.
3	Pengangkatan/pelantikan anggota dewan komisaris baru didukung dengan berita acara pengangkatan/pelantikan.	Appoint/inaugurate new members of the Board of Commissioners which are supported by minutes of appointment/inauguration.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.
4	Surat keputusan pengangkatan anggota komisaris oleh pemegang saham/RUPS dinyatakan secara eksplisit mengenai komisaris independen dengan jumlah 20% dari jumlah seluruh komisaris.	The decision letter on the appointment of commissioners by shareholders/GMS is stated explicitly regarding independent commissioners with a total of 20% of the total number of commissioners.	Telah dilakukan komunikasi dengan Divisi *Human Talent Development* PLN mengenai kepentingan pengangkatan Komisaris Independen.	Communication has been carried out with PLN's Human Talent Development Division regarding the importance of appointing an Independent Commissioner.
5	Membuat aturan yang secara eksplisit menetapkan jumlah maksimal jabatan sebagai komisaris yang dapat dipegang oleh seorang anggota komisaris.	Establish regulations that explicitly stipulate the maximum number of positions as commissioners that can be held by a member of the commissioner.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.
6	Membahas dan memberikan pengesahan Rencana Jangka Penjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP tepat waktu.	Discuss and provide timely approval of the Corporate Long Term Plan (CLP) or Revised CLP.	Telah terbit Keputusan RUPS Sirkuler Persetujuan Rencana Jangka Panjang PT PJB tanggal 9 November 2021.	The Circular GMS Decision Approval of PT PJB's Corporate Long Term Plan has been issued on November 9, 2021.
7	Mengesahkan RKAP perusahaan pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.	Approve the Company's ABOP at the end of the year before the current fiscal year.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.
8	Memberikan persetujuan terhadap setiap usulan direksi tepat waktu yaitu tidak melebihi 30 hari sejak tanggal pengusulan dari direksi.	Approve every proposal from the board of directors on time, which is not more than 30 days from the date of a proposal from the board of directors.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.

No.	Rekomendasi	Recommendation	Tindak Lanjut	Follow-up
9	Menetapkan pedoman/ sistem penilaian kinerja direksi dan dewan komisaris yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan baik secara individual maupun secara kolegial.	Establish guidelines/ systems for evaluating the performance of the board of directors and the board of commissioners that contain key performance indicators and success criteria, both individually and collectively.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.
10	Menetapkan kontrak manajemen yang memuat target kinerja direksi secara individual.	Establish management contracts that contain performance targets for individual directors.	Kontrak Kinerja Individu masing-masing Direksi telah disahkan oleh Anggota Direksi dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama, sesuai dengan Permen BUMN Per 11/MBU/11/2002 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN pasal 13 ayat 3.	Individual Performance Contracts for each Board of Directors have been ratified by Members of the Board of Directors with the President Director and President Commissioner, following SOE Ministerial Regulation Per 11/MBU/11/2002 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for SOE Directors Article 13 paragraph 3.
11	Menilai kinerja direksi secara individual.	Assess the performance of directors individually.	Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja direksi individu untuk Tahun 2021.	The Board of Commissioners has assessed the performance of individual directors for 2021.
12	Menetapkan pedoman gaji/honorarium, tunjuangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja bagi direksi dan dewan komisaris yang disahkan RUPS yang memuat formula penghitungan tantiem dengan mempertimbangkan pencapaian target, tingkat kesehatan dan faktor-faktor *merit* lainnya.	Establish guidelines for salary/honorarium, benefits, facilities, and tantiem/performance incentives for directors and commissioners approved by the GMS which contains a formula for calculating bonuses by taking into account the achievement of targets, health level, and other merit factors.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.
13	Menetapkan Pedoman Penunjukkan Auditor Eksternal yang ditetapkan oleh RUPS.	Establish Guidelines for Appointing External Auditors determined by the GMS.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.
14	Meminta usulan imbal jasa/honorarium KAP dari Dewan Komisaris PT PJB dan membahasnya sebelum ditetapkan dalam RUPS.	Request a proposal for remuneration/honorarium for PAF from the Board of Commissioners of PT PJB and discuss the proposal before it is determined in the GMS.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

No.	Rekomendasi	Recommendation	Tindak Lanjut	Follow-up
15	Menetapkan pedoman penyusunan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan tentang tugas pengawasan dewan komisaris.	Establish guidelines for the preparation of the annual report and reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.
16	Menetapkan pedoman tentang dividen.	Establish guidelines on dividends.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.
17	Menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari asesmen GCG tahun 2018 dan tahun 2020.	Follow up on areas of improvement resulting from the 2018 and 2020 GCG assessments.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham.	The follow-up process on this matter is currently under discussion with the Shareholders.
	ASPEK 3 : DEWAN KOMISARIS **ASPECT 3: BOARD OF COMMISSIONERS**			
1	Menetapkan *draft* revisi *Board Manual* Direksi-Dewan Komisaris menjadi dokumen kebijakan resmi perusahaan.	Stipulate the revised draft of the Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners to become the Company's official policy document.	Telah dilakukan pengesahan *Board Manual* atas hasil *review* dan evaluasi atas *Board Manual* tahun 2014.	The Board Manual has been ratified on the results of the review and evaluation of the 2014 Board Manual.
2	Menetapkan *draft* revisi *Board Manual* Dewan Komisaris (BOC) menjadi dokumen kebijakan resmi perusahaan.	Establish a revised draft of the Board Manual of the Board of Commissioners (BOC) to become the Company's official policy document.	Telah dilakukan pengesahan BOC *Manual* atas hasil *review* dan evaluasi BOC *Manual* Tahun 2014.	The BOC Manual has been ratified on the results of the 2014 BOC Manual review and evaluation.
3	Melakukan telaah terhadap kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis dilakukan setidaknya 3 tahun sekali.	Review the suitability of the Company's vision and mission for changes in the business environment is carried out at least every 3 years.	Terdapat hasil telaah dan masukan Dewan Komisaris terhadap kesesuaian visi dan isi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis.	There are results of studies and input from the Board of Commissioners regarding the suitability of the Company's vision and content with changes in the business environment.
4	Melakukan telaah terhadap *internal control report* (ICoFR).	Review the internal control report (ICoFR).	Terdapat hasil telaah dan masukan Dewan Komisaris terhadap peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern.	There are results of the review and input of the Board of Commissioners on increasing the effectiveness of the internal control system.
5	Melakukan telaah terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis yang mencakup keseluruhan proses manajemen risiko antara lain identifikasi, penilaian, respon, dan mitigasi risiko.	Review the policies and implementation of risk management in a structured and systematic manner that covers the entire risk management process, including identification, assessment, response, and risk mitigation.	Terdapat hasil telaah, saran dan masukan Dewan Komisaris terkait peningkatan kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya.	There are results of studies, suggestions, and input from the Board of Commissioners regarding the improvement of the Company's risk management policies and their implementation.

No.	Rekomendasi	Recommendation	Tindak Lanjut	Follow-up
6	Terkait pengawasan dewan komisaris atas kepatuhan direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, untuk melakukan telaah terhadap: a. Kepatuhan direksi terhadap anggaran dasar. b. Kepatuhan direksi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral). c. Laporan hasil audit atas kepatuhan direksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterbitkan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.	Regarding the supervision of the board of commissioners on the compliance of the board of directors with the articles of association and laws and regulations, to review: a. Board of Directors' compliance with the articles of association. b. The board of directors' compliance with the laws and regulations governing the Company's business (sectoral regulations). c. Reports on audit results on the compliance of directors with applicable laws and regulations issued by public accountants who audit financial statements, as well as reports on audit results conducted by BPK RI regarding compliance with applicable laws and regulations.	Terdapat hasil telaah, saran dan tanggapan Dewan Komisaris mengenai *Corporate Charter* terhadap RUPTL 2021-2030 dan Anggaran Dasar.	There are results of studies, suggestions, and responses from the Board of Commissioners regarding the Corporate Charter on the Electricity Supply Business Plan of 2021-2030 and the Articles of Association.
7	Dalam memberikan otorisasi atau rekomendasi atas usulan direksi tidak melebihi 14 hari sejak usulan atau dokumen diterima secara lengkap.	In giving authorization or recommendation on the proposal of the board of directors, it is not later than 14 days since the proposal or document is received in full.	Telah dilaksanakan.	Already implemented.
8	Dalam mengusulkan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan PT PJB disertai dengan usulan besaran honorarium/imbal jasa KAP tersebut.	In proposing the PAF to audit PT PJB's financial statements, it is accompanied by the proposed amount of honorarium/remuneration for the PAF.	Dewan Komisaris mengusulkan Nilai honorarium KAP mengikuti penetapan dari Pemegang Saham.	The Board of Commissioners proposes that PAF Fee follows the determination of the Shareholders.
9	Menilai efektivitas pelaksanaan audit eksternal, meliputi: a. Evaluasi atas kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya.	Assess the effectiveness of the external audit implementation, including: a. Evaluation of the suitability of the completion of the audit progress with the work plan.	Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan penilaian efektivitas pelaksanaan audit eksternal.	The Board of Commissioners through the Audit Committee has assessed the effectiveness of the external audit implementation.

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

No.	Rekomendasi	Recommendation	Tindak Lanjut	Follow-up
	b. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik. c. Evaluasi hasil dan kualitas rekomendasi audit eksternal.	b. Evaluation of conformity of audit implementation with public accounting professional standards. c. Evaluation of external audit results and recommendations quality		
10	Dalam melakukan penilaian kinerja direksi secara individual didasarkan pada kriteria, target dan indikator kinerja utama dalam kontrak kinerja direksi individu yang ditetapkan oleh RUPS.	In evaluating the performance of the individual directors, it is based on the criteria, targets, and key performance indicators in the performance contract of the individual directors determined by the GMS.	Telah ditetapkan Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja individu Direksi, dan dikirimkan ke *Executive Vice President Portfolio Management* PT PLN (Persero) melalui surat No. ZA0058010 tgl 13 Juli 2021.	A Management Contract has been established which contains the individual performance targets of the Board of Directors and has been sent to the Executive Vice President of Portfolio Management of PT PLN (Persero) through letter No. ZA0058010 July 13, 2021.
11	Laporan pengawasan dewan komisaris yang disusun secara berkala dan tahunan agar muatannya dilengkapi dengan uraian kinerja direksi secara individu.	The supervisory report of the Board of Commissioners is prepared periodically and annually so that the contents are accompanied by a description of the performance of the individual directors.	Telah dilakukan penilaian kinerja Direksi secara individual berdasarkan pada kriteria, target dan indikator kinerja utama dalam kontrak kinerja Direksi individu.	An individual Board of Directors' performance assessment has been carried out based on the criteria, targets, and key performance indicators in the individual Board of Directors' performance contract.
	ASPEK 4 : DIREKSI **ASPECT 4: BOARD OF DIRECTORS**			
1	Menginstruksikan kepada semua kepala divisi/ kepala bidang dan general manager untuk melaksanakan setiap kegiatan di perusahaan sesuai dengan SOP.	Instruct all division heads/ field heads and general managers to carry out every activity in the Company following SOPs.	Telah diterbitkan nota dinas No ZK0175115 pada tanggal 2 Juli 2021 perihal Pelaksanaan Kerja sesuai Proses Bisnis PJB IMS 2.0.	A memorandum of service has been issued No. ZK0175115 on July 2, 2021, regarding Work Implementation according to the PJB IMS 2.0 Business Process.
2	Mengisi jabatan yang kosong pada level jabatan tertentu dalam struktur organisasi PT PJB sesuai dengan kebutuhan.	Occupy vacant positions at certain position levels in the organizational structure of PT PJB according to needs.	Melakukan *monitoring* berkala jabatan kosong dan mengkomunikasikan dengan Divisi *Human Capital System & Organization* untuk memastikan proyeksi organisasi (penggabungan beberapa fungsi terkait urgensitas pemenuhan dan pengisian jabatan sesuai dengan prosedur berlaku.	Conduct periodic monitoring of vacant positions and communicate with the Human Capital System & Organization Division to ensure organizational projections (merger of several functions related to the urgency of fulfilling and filling positions following applicable procedures.

No.	Rekomendasi	Recommendation	Tindak Lanjut	Follow-up
			Pada jabatan yang tidak sedang dalam rangka transisi organisasi menuju penggabungan,atau karena pertimbangan yang lain, maka Divisi *Talent Development* akan melakukan proses pengisian menggunakan mekanisme yang berlaku. dengan *spare* waktu penyerahan SK sebelum masa berlakunya SK agar cukup waktu untuk *transfer knowledge* dari pejabat lama ke pejabat baru.	In positions that are not in the context of organizational transition to merge, or due to other considerations, then Talent Development Division will carry out the filling process using the applicable mechanism, with spare time for submitting the Decree before the validity period of the Decree so that there is enough time to transfer knowledge from old officials to new officials.
3	Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai total HPS bersifat terbuka.	Carry out the procurement of goods/services with a total value of SEP is open.	PJB melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengan nilai HPS secara tertutup karena untuk melihat kewajaran penawaran. HPS tertutup tidak mengurangi transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.	PJB carries out the procurement of goods/ services with the SEP value in a closed manner because it is to see the fairness of the offer. Closed SEP does not reduce transparency in the process of procuring goods and services.
4	Terkait dengan pengelolaan anak perusahaan (*subsidiary governance*): a. Membuat pedoman tentang penilaian kinerja direksi (individu/kolegial) dan komisaris (kolegial) anak perusahaan/ perusahaan afiliasi yang ditetapkan oleh RUPS. b. Membuat pedoman tentang gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas penghasilan direksi dan komisaris anak perusahaan/perusahaan afiliasi yang ditetapkan oleh RUPS.	Related to the management of subsidiaries (subsidiary governance): a. Make guidelines on performance appraisal of directors (individual/ collegial) and commissioners (collegial) of subsidiaries/ affiliated companies as determined by the GMS. b. Make guidelines on salary/honorarium, allowances, and income facilities for directors and commissioners of subsidiaries/ affiliated companies as determined by the GMS.	Proses tindak lanjut masih berjalan sampai tahun 2022.	The follow-up process is still ongoing until 2022.
5	Membayar tagihan dari pemasok/*vendor* tepat waktu sesuai dengan kontrak.	On-time payment for suppliers/vendors based on the contract.	Pembayaran tagihan dari pemasok/*vendor* dilakukan setelah dokumen permintaan pembayaran diterima dengan benar & lengkap.	Payment of invoices from suppliers/vendors is made after the payment request documents are received correctly & completely.

PENERAPAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOVERNANCE

No.	Rekomendasi	Recommendation	Tindak Lanjut	Follow-up
6	Mengupayakan untuk memenuhi harapan pemegang saham melalui pencapaian target-target yang telah disepakati, dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.	Strive to meet shareholder expectations through the achievement of agreed targets, using the available resources.	Telah dilakukan proses cascading target korporat pada kontrak kinerja Direksi / Unit / Divisi / Anak Perusahaan.	The cascading process of corporate targets has been carried out on the performance contracts of Directors / Units / Divisions / Subsidiaries.
7	Menyesuaikan jumlah personil yang ditugaskan di SPI berdasarkan analisis beban kerja.	Adjust the number of personnel assigned to IAU based on workload analysis.	Telah diterbitkan Peraturan Direksi No 0034.P/019/DIR/2021 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada SPI PJB.	The Board of Directors Regulation No. 0034.P/019/DIR/2021 has been issued regarding Changes in Organizational Structure and Manpower Formation at SPI PJB.
8	Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas staf auditor di SPI dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan dalam fungsional auditor intern.	Improve the competence and capability of the auditor's staff at the Internal Audit Unit by participating in education and training according to the level of position in the internal auditor's function.	Telah dilakukan Sertifikasi Auditor tahun 2021 seperti CIA (*Certified Internal Auditor*), QIA (*Qualified Internal Auditor*), dan CPIA (*Certified Practitioner of Internal Audit*).	Auditor Certifications have been carried out in 2021 such as CIA (Certified Internal Auditor), QIA (Qualified Internal Auditor), and CPIA (Certified Practitioner of Internal Audit).
9	Menyelenggarakan RUPS RJPP revisi 2020-2024.	Organize the revised GMS CLP for 2020-2024.	Pengesahan RJPP dilakukan secara sirkuler melalui Keputusan RUPS Sirkuler Persetujuan Rencana Jangka Panjang PT PJB tanggal 9 November 2021.	The ratification of the CLP is carried out circularly through the Circular GMS Decision Approval of PT PJB's Corporate Long Term Plan on November 9, 2021.
	ASPEK 5 : PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI **ASPECT 5: INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY**			
1	Mengungkapkan kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada perusahaan lain dan perubahannya dalam *annual report.*	Disclose the share ownership of members of the board of commissioners in other companies and their changes in the annual report.	Dalam Laporan Tahunan 2020 telah tercantum informasi mengenai kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada perusahaan lain.	The 2020 Annual Report has included information regarding the share ownership of members of the board of commissioners in other companies.
2	Menguraikan dalam *annual report* mengenai aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, disertai dengan pengungkapan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas tersebut.	Describe in the annual report the activities related to corporate social responsibility, especially environmental activities, accompanied by a disclosure of the total costs incurred for these activities.	Dalam Laporan Tahunan 2020 telah tercantum informasi mengenai aktivitas CSR yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk pengungkapan nilai anggaran dan realisasinya.	The 2020 Annual Report has included information on CSR activities related to the environment, including disclosure of the budget value and its realization.

Capaian PJB Terkait Penerapan GCG Tahun 2021

PJB Achievements Regarding the Implementation of GCG in 2021

Perusahaan telah memperoleh beberapa capaian atas penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan PJB. Capaian atas penerapan prinsip-prinsip GCG sepanjang tahun 2021 diantaranya sebagai berikut:

1. Penghargaan dari *Asia Responsible Enterprise Award* (AREA) 2021 pada kategori *Social Empowerment.* Penghargaan diraih melalui Program 'Pijar Berdaya-*Social Innovation and Women Entrepreneurship* PT PJB Unit Pembangkit Gresik;
2. PJB melalui UP Paiton, UP Gresik dan UBJOM Rembang berhasil meraih PROPER EMAS Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. PJB berhasil meraih *Gold Rating* dalam *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2021;
4. Penghargaan "*Power Utility of The Year*" pada *Asian Power Award* 2021;
5. Penghargaan dari *ASEAN Risk Award* 2021 yaitu Juara 1 pada kategori *Risk Innovation* dan Juara 2 pada kategori *Risk Technology*.

The Company has several achievements in the implementation of GCG principles within PJB. Achievements for implementing GCG principles in 2021 include:

1. Award from the Asia Responsible Enterprise Award (AREA) 2021 in the Social Empowerment category. The award was achieved through the 'Incandescent Empowerment-Social Innovation and Women Entrepreneurship' Program at PT PJB Gresik GU;
2. PJB through Paiton GU, Gresik GU, and Rembang OMSBU succeeded in achieving GOLD PROPER 2021 organized by the Ministry of Environment and Forestry;
3. PJB won a Gold Rating in the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021;
4. "Power Utility of The Year" Award at the 2021 Asian Power Award;
5. Award from the ASEAN Risk Award 2021, namely 1st place in the Risk Innovation category and 2nd place in the Risk Technology category.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Struktur tata kelola yang memadai baik dari segi organ maupun kebijakan dapat mendukung kinerja Perusahaan dan pengelolaan bisnis berkelanjutan. Perusahaan secala berkala melakukan evaluasi dan pengembangan struktur tata kelola sesuai dengan kubutuhan Perusahaan dan sejalan dengan ketentuan perundangan serta *best practices* yang terus berkembang sehingga mampu mendukung transformasi PJB dalam menghadapi perubahan lingkungan dan jangkauan bisnis untuk dalam mencapaian tujuan Perusahaan dan memberikan nilai tambah kepada *stakeholders*.

Adequate governance structure, both in terms of organs and policies, may support performance and sustainable business management of the Company. The Company periodically evaluates and develops the governance structure following the Company's needs and it is in line with the provisions of the legislation and best practices that continue to develop so as to be able to support PJB transformation in facing changes in business environment to encourage the Company performance and provide added values to the stakeholders.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Organizational

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perusahaan, Organ Utama dalam struktur tata kelola PJB terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Organ Utama tata kelola PJB dibantu oleh Organ Pendukung. Organ Pendukung di bawah Direksi terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Unit Kerja Lainnya. Sedangkan Organ Pendukung di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian organ pendukung Dewan Komisaris dimana Komite SDM dan Organisasi berubah menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi.

According to Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and the Company's Articles of Association, the Main Organs in the PJB governance structure consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Main Organ of PJB governance is assisted by the Supporting Organ. The Supporting Organs under the Board of Directors consist of Corporate Secretary, Internal Control Unit, Risk and Compliance Management Unit and Other Work Units. Meanwhile, the Supporting Organs under the Board of Commissioners consist of the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk and Compliance Management Committee, Nomination and Remuneration Committee. In 2021, there was an adjustment to the supporting organs under the Board of Commissioners where HR and Organization Committee changed to Nomination and Remuneration Committee.

Struktur Organ Tata Kelola PJB
PJB Corporate Governance Structure

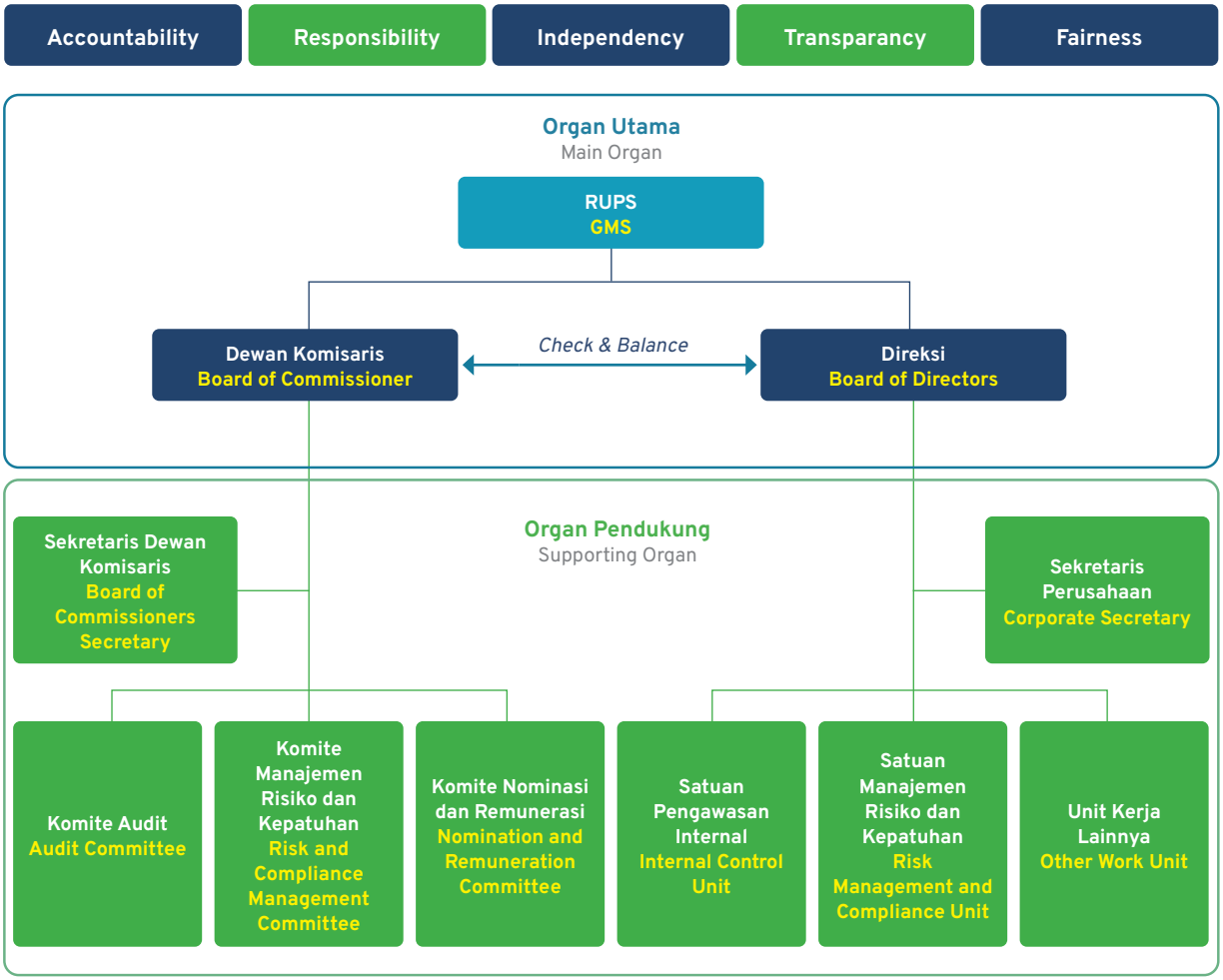

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Policies

Organ tata kelola Perusahaan perlu dilengkapi dengan kebijakan (*Soft structure*) sebagai perangkat aturan yang menjadi pedoman bagi organ tata kelola Perusahaan dalam mendukung implementasi GCG. Perusahaan menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan setiap fungsi dalam tata kelola berdasarkan pendekatan tiga pilar utama, yaitu *Objective, Risk and Control* (ORC). Sehingga setiap fungsi didorong untuk dapat mengelola risiko dan memiliki kontrol atas organisasi yang mencakup seluruh rangkaian proses di dalam Perusahaan sesuai dengan dinamika usaha dan regulasi yang berlaku.

Corporate governance organ is required to be equipped with Softstructure policy as a set of rules that be governance organs guideline of the Company in supporting GCG implementation. The Company formulates policies that support the implementation of each function in governance based on the three main pillars approach, namely Objective, Risk and Control (ORC). So that each function is encouraged to be able to manage risks and have control over the organization that covers the entire set of processes within the Company following the business dynamics and applicable regulations.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Kebijakan tata kelola Perusahaan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, *best practice* serta nilai-nilai budaya di lingkungan PJB. Perusahaan melakukan peninjauan ulang secara berkala dan memutahirkan kebijakan yang ada apabila diperlukan serta menyusun kebijakan pendukung lainnya untuk mengakomodir kebutuhan dan perkembangan Perusahaan, peraturan perundang-undangan serta *best practices* penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan tata kelola perusahaan PJB antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
2. Pedoman Perilaku;
3. Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris);
4. Pedoman Tatalaksana Kerja Dewan Komisaris;
5. Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi;
6. Pedoman *Subsidiary Governance* (Tata Kelola Komunikasi APPA);
7. Kebijakan Pengungkapan Informasi;
8. *Audit Internal Charter*;
9. *Charter* Komite;
10. Pedoman Kebijakan Perusahaan;
11. Tata Nilai Perusahaan;
12. Pedoman Penerapan *Governance, Risk, Compliance* (GRC);
13. Pedoman terkait Kebijakan Anti Penyuapan;
14. Pedoman terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN);
15. Pedoman terkait benturan kepentingan;
16. Program Pengedalian Gratifikasi;
17. Pedoman penegakan disiplin dan penanganan pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS);
18. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestasian Lingkungan (K3L);
19. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
20. Berbagai kebijakan dan prosedur Perusahaan yang senantiasa dilengkapi dan disempurnakan secara terus-menerus serta disesuaikan dengan peraturan/ perundang-undangan yang berlaku dan terbaru.

The Company's governance policy is prepared following the laws and regulations, best practices and cultural values within PJB. The Company periodically reviews and updates existing policies if necessary and formulates other supporting policies to accommodate the Company needs and development, laws and regulations and best practices for GCG implementation. PJB's corporate governance policies include the following:

1. Corporate Governance Code;
2. Code of Conduct;
3. Board Manual;
4. Board of Commissioners Manual;
5. Board of Directors Manual;
6. Subsidiary Governance Code (SAC Communication Governance);
7. Disclosure Information Policy;
8. Internal Audit Charter;
9. Committee Charter;
10. Company Policy Guidelines;
11. Company's Values;
12. Guidelines on the Implementation of Governance, Risk, Compliance (GRC);
13. Guidelines on Anti-Bribery Policy;
14. Guidelines on the Report of State Officials Asset (LKHPN);
15. Guidelines on conflicts of interest;
16. Gratification Control Program;
17. Guidelines on Whistleblowing System/WBS;
18. Occupational Health and Safety Policy and Environmental Conservation (OHSE);
19. Goods and Services Procurement Policy; and
20. Various policies and procedures of the Company that are continually updated and refined continuously following the applicable laws and regulations.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ kepemilikan yang menjadi sarana bagi Pemegang Saham Perusahaan untuk memperoleh sebagian hak-haknya. Sebagai organ utama tata kelola perusahaan, RUPS memiliki wewenang tertinggi dalam menentukan keputusan strategis serta hal-hal lain yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi. Mekanisme pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan baik dalam forum pertemuan secara fisik atau melalui surat keputusan yang ditetapkan secara sirkuler.

Kewenangan RUPS secara khusus diantaranya mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui atau menolak rencana kerja Perusahaan, menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, dan menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an ownership organ that is a means for the Company's Shareholders to express their authority. As the main organ of corporate governance, the GMS has the highest authority in determining strategic decisions and other matters that are not authorized by the Board of Commissioners or the Board of Directors. The decision-making mechanism can be carried out either in a physical meeting or through a circularly determined decision letter.

The special authorities of the GMS include ratifying amendments to the Articles of Association, appointing and dismissing the Board of Directors and the Board of Commissioners, approving or rejecting the Company's work plan, determining the calculation of the company's profit allocation, evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, giving approval to the annual report, and appointing a public accountant, as well as determine the amount and type of compensation for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Majority and Controlling Shareholders

Pemegang Saham dikatakan sebagai Pemegang Saham Utama apabila secara langsung maupun tidak langsung, memiliki hak suara sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perusahaan. Sementara, Pemegang Saham dikatakan sebagai Pemegang Saham Pengendali apabila 1 (satu) pemegang saham memiliki mayoritas (lebih dari 50%) hak suara dari seluruh saham dengan hak suara. Saham PJB dimiliki oleh PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham atas PJB masing-masing sebesar 99,99 % dan 0,01%. Komposisi kepemilikan saham tersebut menjadikan PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham utama dan pengendali PJB. Sehingga Direktur Utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali. Secara teknis hubungan dengan anak perusahaan berada di bawah Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) melalui Divisi Manajemen Portofolio.

A shareholder can be entitled as a Majority Shareholder if, directly or indirectly, has voting rights of at least 20% (twenty percent) of all shares with voting rights issued by a company. Meanwhile, a shareholder can be entitled as a Controlling Shareholder if 1 (one) shareholder has a majority (more than 50%) of the voting rights of all shares with voting rights. PJB shares are owned by PT PLN (Persero) and PT PLN (Persero) Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan with 99.99% and 0.01% share ownership in PJB, respectively. The composition of share ownership determines that PT PLN (Persero) is the majority and controlling shareholder of PJB. Therefore, the President Director of PT PLN (Persero) is a representation of the majority and controlling shareholders. Technically, the relationship with subsidiaries is under the Planning Director of PT PLN (Persero) through the Portfolio Management Division.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Skema Kepemilikan Saham PJB
PJB Share Ownership Scheme

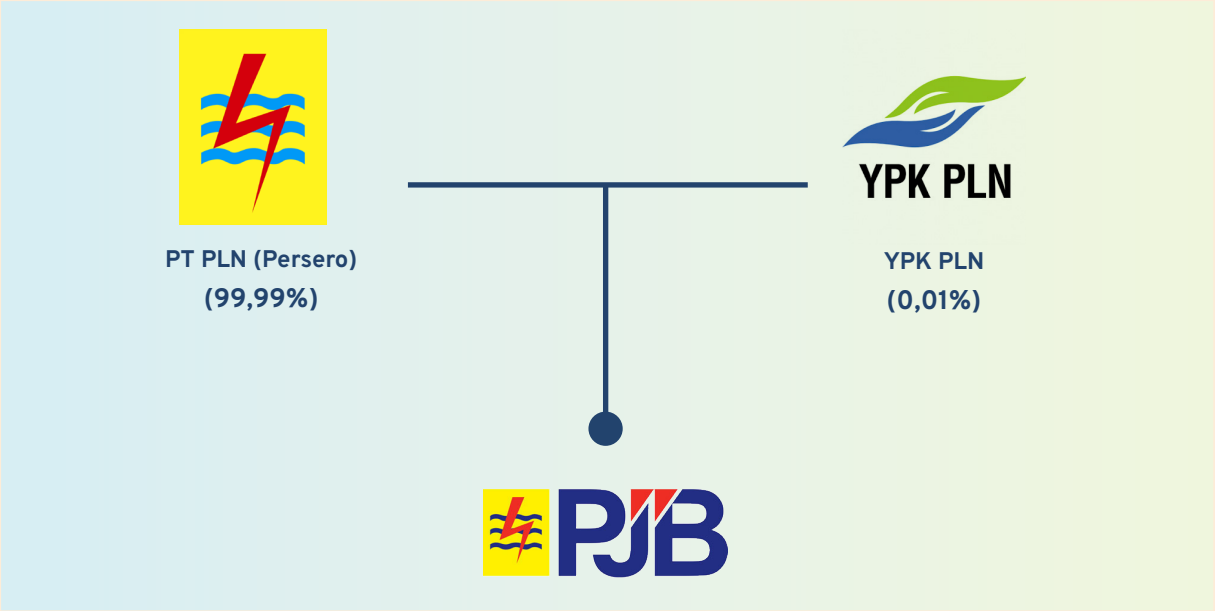

Pemegang Saham dalam pengambilan keputusan sepenuhnya didasarkan pada kepentingan Perusahaan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Pemegang Saham memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pemegang Saham harus:
   a. memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan *stakeholders* sesuai peraturan perundang-undangan;
   b. mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham Pengendali yang sebenarnya (*Ultimate Shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait;
   c. memisahkan kepemilikan harta Perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi;
   d. memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
2. Pemegang Saham yang merupakan Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara transparan.
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Shareholders in making decisions are fully based on the interests of the Company by considering the sustainability aspect. Therefore, Shareholders have the following responsibilities:

1. Shareholders are obliged to:
   a. Consider the interests of Minority Shareholders and stakeholders following the laws and regulations;
   b. Disclose to law enforcement agencies regarding the Ultimate Shareholders in case there are allegations of violations of laws and regulations or in case they are requested by the relevant authorities.
   c. Separate the ownership of the Company's assets from the ownership of personal assets;
   d. Separate their functions as a Shareholder and as a member of the Board of Commissioners or the Board of Directors in terms, the Shareholder serves in one of the two organs.
2. The Shareholders who are Controlling Shareholders in several companies must carry out the accountability and relationships among companies transparently;
3. Minority Shareholders are responsible to use their rights properly following the Company's Articles of Association and laws and regulations;

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS
GMS Provisions

Perusahaan sebagai entitas dari Grup PLN menjalankan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, ketentuan terkait dengan penyelenggaraan RUPS juga diatur dalam *Corporate Governance Code* (CG *Code*). Pada pelaksanaannya, Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan merupakan representasi manajerial Grup PLN dalam mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan atas entitas yang bernaung didalamnya, dimana RUPS PJB terdiri dari RUPS Tahunan serta RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan merupakan RUPS yang diselenggarakan terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Laporan Tahunan Perusahaan. RUPS tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah tahun anggaran berjalan. RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan yang diadakan paling lambat dalam bulan Juni atau 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.

RUPS Luar Biasa (RUPSLB) adalah RUPS yang diselenggarakan di luar jadwal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dapat diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. RUPSLB diadakan setiap saat jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB maka Dewan Komisaris/Pemegang Saham yang menandatangani surat permintaan, berhak untuk memanggil sendiri RUPS atas biaya Perusahaan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS didahului dengan pemanggilan RUPS yang dilakukan dengan surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan tata cara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Jangka waktu pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS. Selain itu, RUPS harus didokumentasikan

The Company as an entity of the PLN Group conducts the GMS as stipulated in the Company's Articles of Association. Additionally, provisions related to the holding of the GMS are also regulated in the Corporate Governance Code (CG Code). In its implementation, the General Meeting of Shareholders of the Company is the managerial representation of the PLN Group in being responsible for the entire implementation of the management and supervisory functions of the entities that are sheltered in it, where the PJB GMS consists of the Annual GMS, and Extraordinary GMS.

The Annual GMS is a General Meeting of Shareholders to discuss the approval of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and the Company's Annual Report. The GMS concerning Approval of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) must be held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year; while GMS concerning Annual Report Approval must be held no later than June or 6 (six) months after the closing of the fiscal year.

Extraordinary GMS (EGMS) is a GMS held outside the schedule set out in the Articles of Association, which can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Shareholders. The EGMS is held at any time if deemed necessary by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors is required to hold an EGMS according to a written request from the Board of Commissioners or Shareholders within a period of no later than 30 (thirty) days from the date the request for the GMS is received. If the Board of Directors does not convene an EGMS, the Board of Commissioners/Shareholders who sign the request letter have the right to invite the GMS themselves at the expense of the Company, after permitted by the Head of the District Court that covers the Company's jurisdiction area.

The holding of the GMS is preceded by an invitation to the GMS which is made by a registered letter stating the date, time, place, and procedure of the meeting accompanied by a notification that the material to be discussed at the GMS is available at the Company's office from the GMS invitation to the GMS date. The period for invitations to the GMS is carried out no later than 14 days before the GMS. Besides, the GMS must be documented in the form of minutes of the GMS which

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

dalam bentuk risalah RUPS yang memuat sekurang-kurangnya waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS dan keputusan RUPS. Risalah RUPS tersebut, wajib ditanda tangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan Akta Notaris.

contains at least the time, agenda, participants, opinions that developed in the GMS, and the resolutions of the GMS. The minutes of the GMS must be signed by the chairman of the GMS and at least 1 (one) shareholder appointed from and by the participants of the GMS. The signature is not required if the minutes of the GMS are made with a Notary Deed.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2021
2021 GMS Holding

Perusahaan telah melaksanakan RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 tanggal 29 Juni 2021 dengan dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham, bertempat di PT PLN (Persero) serta melalui *video conference.* Tahapan pelaksanaan dan hasil RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan 2020 adalah sebagai berikut :

The Company held the Annual GMS concerning the Ratification of the ABOP 2021 on January 28, 2021, and the Annual GMS concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the 2020 Fiscal Year on June 29, 2021, attended by all shareholders and/or their proxies/representatives of shareholders at PT PLN (Persero) as well as via video conference. The stages of implementation and the results of the Annual GMS regarding Approval of the 2020 Annual Report are as follows:

15 Juni 2021 June 15, 2021	**29 Juni 2021** June 29, 2021	**22 Juli 2021** July 22, 2021
Penyampaian Undangan RUPS kepada Pemegang Saham **Submission of GMS Invitations to Shareholders**	**Pelaksanaan RUPS Tahunan** **Annual GMS Holding**	**Berita Acara RUPS Tahunan** **Annual GMS Minutes of Meeting**
Melalui Surat No. ZA0035072 Through Letter No. ZA0035072	Melalui *Video Conference* Via Video Conference	Dimuat dalam Akta Notaris Nomor 13, Berita Acara RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 tanggal 29 Juni 2021. Included in the Notary Deed Number 13, Minutes of the Annual GMS concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the Financial Year 2020 on June 29, 2021.

Hasil Penyelenggaran RUPS Tahunan tahun 2021
Results of the 2021 Annual GMS

Pemanggilan : **Surat No. ZA0035072 tanggal 15 Juni 2021**	**Invitation:** **Letter No. ZA0035072 June 15, 2021**
Berita Acara : **Akta Notaris Nomor 13 Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2020, tanggal 29 Juni 2021**	**Minutes of Meeting:** **Notarial Deed Number 13 on Minutes of the Annual GMS for the 2020 Fiscal Year on June 29, 2021**
Agenda Rapat 1 : Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2020 serta Pemberian Pembebasan Tanggungjawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengelolaan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.	**Meeting Agenda 1:** Approval and Ratification of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2020 including the Report on the Implementation of Supervision of the Board of Commissioners for 2020 and the Granting of Full Liability Release (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the Management and Supervision that has been carried out during the Financial Year 2020.
Keputusan : 1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 yang terdiri atas : Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia) dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporan No.00917/2.1025/AU.1/02/0241-1/1/V/2021 tanggal 20 Mei 2021. 4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia). Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.	**Resolution:** 1. The GMS approved and accepted the Annual Report regarding the Condition and Operation of the Company during the 2020 Financial Year which consists of Financial Statements, Performance Evaluation Reports, and Compliance Reports. 2. The GMS approved and accepted the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2020 Financial Year. 3. The GMS ratified the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 which contains the Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Comprehensive Income Statement, Consolidated Cash Flow Statement, and Consolidated Statement of Changes in Equity and their explanations, and has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia) with the opinion "Fair in all material respects" as referred to in report No.00917/2.1025/AU.1/02/0241-1/1/V/2021 on May 20, 2021. 4. The GMS grants full release (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision following the responsibilities and actions in their respective fields that have been carried out during the 2020 Financial Year, as long as these actions do not conflict with applicable laws and regulations and contained in the Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PWC Indonesia). The ratification and discharge of responsibility do not release legal responsibility for the Board of Directors and/or Board of Commissioners if the disclosed report is proven to have violated applicable legal provisions and procedures and/or it is later proven that there have been deviant actions and/or detrimental to the Company.
Tindak Lanjut : Sudah dilaksanakan	**Follow-up :** Executed

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Agenda Rapat 2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020.	**Meeting Agenda 2:** Determination of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2020.
Keputusan : RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020.	**Resolution:** The GMS grants power of attorney to the majority shareholder to determine the use of net profit for the financial year 2020.
Tindak Lanjut : Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas PT PJB Nomor 78117/MNJ.01.02/C01000000/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2020.	**Follow-up :** Letter of the President Director of PT PLN (Persero) as the Majority Shareholder of PT PJB Number 78117/MNJ.01.02/C01000000/2021 on December 31, 2021, Regarding Determination of the Use of Net Profit in 2020.
Agenda Rapat 3 : Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020 dan Remunerasi Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2020.	**Meeting Agenda 3:** Determination of Tantiem for Fiscal Year 2020 and Remuneration for the Fiscal Year 2021 for Directors and Commissioners, as well as Bonuses for Employees for the Fiscal Year 2020.
Keputusan : RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2020 dan Remunerasi Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2020.	**Resolution:** The GMS authorizes the majority of Shareholders to determine Tantiem for the 2020 Fiscal Year and Remuneration for the 2021 Fiscal Year for Directors and Board of Commissioners as well as Bonuses for Employees for the 2020 Fiscal Year.
Tindak Lanjut : 1. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas PT PJB Nomor 61095/MNJ.01.02/C01000000/2021-R Tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Penetapan Remunerasi dan Tantiem Direksi/Dewan Komisaris PT PJB. 2. Surat Direktur SDM PT PLN Nomor 33067/SDM.06.01/C01060000/2021-R Tanggal 16 Juli 2021 perihal pembayar Insentif Kinerja Perusahaan (IKP) Tahun 2020.	**Follow-up :** 1. Letter from the President Director of PT PLN (Persero) as the Majority Shareholder of PT PJB Number 61095/MNJ.01.02/C01000000/2021-R on October 29, 2021, regarding the Determination of Remuneration and Tantiem for the Board of Directors/Board of Commissioners of PT PJB. 2. Letter from the HC Director of PT PLN Number 33067/SDM.06.01/C01060000/2021-R on July 16, 2021, regarding the 2020 Corporate Performance Incentive (IKP) payer.
Agenda Rapat 4 : Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Perseroan Tahun Buku 2021.	**Meeting Agenda 4:** Determination of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Report for the 2021 Fiscal Year.
Keputusan : RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2021.	**Resolution:** The GMS authorizes the majority of Shareholders to determine the Appointment of a Public Accounting Firm as the auditor who will audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Reports, and Compliance Reports for the 2021 Financial Year.
Tindak Lanjut : Surat EVP Akuntansi PT PLN (Persero) Nomor 47611/KEU.02.04/C01070400/2021 Tanggal 10 September 2021 Perihal Penunjukan KAP dan Permintaan Data Audit.	**Follow-up :** PT PLN (Persero) Accounting EVP Letter Number 47611/KEU.02.04/C01070400/2021 on September 10, 2021, Regarding PAF Appointment and Request for Audit Data.

RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya baik secara kolegial maupun individu. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Annual GMS was attended by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors to account for the implementation of their duties both collegially and individually. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors attending the 2021 Annual GMS are as follows:

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

- Sriyono D. Siswoyo
- Defy Indiyanto Budiarto
- Sunarsip
- Jisman P. Hutajulu
- Komang Parmita
- Hendra Iswahyudi

Direksi
Board of Directors

- Gong Matua Hasibuan
- M. Yossy Noval A.
- Rachmanoe Indarto
- Iwan Purwana
- Karyawan Aji
- Rawan Insani

Sepanjang tahun 2021, Pemegang Saham telah menerbitkan keputusan secara sirkuler terkait hal-hal yang memerlukan persetujuan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tahun 2021 adalah sebagai berikut:

In 2021, Shareholders issued circular decisions regarding matters that require shareholder approval following the provisions of the Articles of Association. The Circular Shareholders' Decisions for 2021 are as follows:

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Tahun 2021
Circular Shareholders Decision 2021

No.	Tanggal Date	Perihal Concerning
1	19 Januari 2021 January 19, 2021	Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Untuk Persetujuan konsolidasi pengadaan asuransi Perseroan dengan PT PLN (Persero). Circular Shareholders' Decision For Approval of the consolidation of the Company's insurance procurement with PT PLN (Persero).
2	19 Februari 2021 February 19, 2021	Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Mengenai Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan. Circular Shareholders' Decision Regarding the Appointment of Members of the Company's Board of Directors.
3	23 April 2021 April 23, 2021	Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Circular Shareholders' Decision Regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company.
4	31 Agustus 2021 August 31, 2021	Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler untuk Persetujuan Usulan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT PJB. Circular Shareholders' Decisions for Approval of Proposed Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT PJB's Subsidiary.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No.	Tanggal Date	Perihal Concerning
5	14 September 2021 September 14, 2021	Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler untuk pemberhentian anggota Komisaris Perseroan. Circular Shareholders' Decisions for the dismissal of members of the Company's Commissioners.
6	21 Oktober 2021 October 21, 2021	Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Circular Shareholders' Decisions concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of Commissioners.
7	09 November 2021 November 9, 2021	Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler untuk Persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2020 – 2024. Circular Shareholders' Decisions for Approval of Long Term Plans (RJP) for 2020 – 2024.
8	30 Desember 2021 December 30, 2021	Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Circular Shareholders' Decision regarding the Appointment of Members of the Company's Board of Commissioners.

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
The follow-up to Shareholder's Instructions

Terdapat beberapa arahan Pemegang saham baik melalui RUPS maupun secara sirkuler, terkait pengelolaan dan rencana pengembangan Perusahaan sepanjang tahun 2021 dan telah ditindaklanjuti dengan status sebagai berikut:

There are several directions from the Shareholders, both through the GMS and in a circular manner, regarding the management and development plans of the Company throughout 2021 and have been followed up with the following statuses:

Tabel Tindak Lanjut Arahan RUPS
The follow-up to the GMS Instruction Table

ARAHAN RUPS GMS INSTRUCTION			
Uraian Description	LPT 2020 (29 Juni 2021) 2020 Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements (June 29, 2021)	RKAP 2021 (28 Januari 2021) 2021 ABOP (January 28, 2021)	Jumlah Total
Jumlah Arahan Total Instruction	32	21	68
Selesai Executed	32	21	68
Proses Tindak Lanjut On progress	0	0	0

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan kebijakan tata kelola perusahaan di lingkungan PJB. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan Direksi dan jalannya kegiatan pengurusan Perusahaan pada umumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris merupakan majelis, dimana kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Sebagai salah satu organ utama tata kelola Perusahaan, pengawasan dan penasihatan yang dilakukan Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Anggaran Dasar semata-mata untuk kepentingan terbaik jangka panjang PJB.

The Board of Commissioners performs its functions and roles following the corporate governance policies applied in PJB. The Board of Commissioners supervises and provides advice to the Board of Directors on the policies of the Company's Board of Directors and the general management based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The Board of Commissioners is an assembly, where the position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal. Each member of the Board of Commissioners cannot act independently but based on the decree of the Board of Commissioners. As one of the main organs of corporate governance, the supervision and advisory function carried out by the Board of Commissioners which is in line with the Vision and Articles of Association is entirely on behalf of PJB's long-term best interests.

Komposisi Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners

Komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS. Anggota Dewan Komisaris PJB telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham setelah melalui proses penjaringan dan seleksi. Dewan Komisaris PJB berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 orang Komisaris Independen dan 4 orang Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris PJB periode Januari sampai dengan Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners as a supervisory organ is determined by the Shareholders through the resolutions of the GMS. Members of the PJB Board of Commissioners have been declared to have passed the fit and proper test by PT PLN (Persero) as the Shareholder after going through the screening and selection process. PJB's Board of Commissioners consists of 6 (six) members consisting 2 Independent Commissioners and 4 Commissioners. The composition of PJB's Board of Commissioners from January to December 2021 is as follows:

Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2021
Composition of the Board of Commissioners in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment
Sriyono Dwidjo Siswoyo[2]	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 2 Desember 2016 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 18 September 2017. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on December 2, 2016 jo. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on September 18, 2017.
Dedeng Hidayat[3]	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 21 Oktober 2021. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on October 21, 2021.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment
Defy Indiyanto Budiarto[2]	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT PJB Tanggal 18 September 2017. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of the Commissioner of PT PJB on September 18, 2017.
Sunarsip[2]	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT PJB Tanggal 18 September 2017. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of the Commissioner of PT PJB on September 18, 2017.
Jisman P. Hutajulu	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 11 Maret 2019 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 12 November 2020. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on March 11, 2019 jo. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on November 12, 2020.
Benny M.M. Marbun[1]	Plt Komisaris Act. Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 2 Desember 2016. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on December 2, 2016.
Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 19 Desember 2017 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 12 November 2020. Resolution of the Circular GMS regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on 19 December 2017 jo. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on November 12, 2020.
Komang Parmita[1]	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 23 April 2021. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT PJB on April 23, 2021.
	Plt Komisaris Utama Act. President Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 14 September 2021. Resolution of the Circular GMS regarding the Dismissal of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on September 14, 2021.
Bagus Puruhito[4]	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 30 Desember 2021. Resolution of the Circular GMS regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on December 30, 2021.
Emir Kresna Wardana[4]	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 30 Desember 2021. Resolution of the Circular GMS regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on December 30, 2021.

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Benny M.M Marbun sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 September 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sriyono Dwidjo Siswoyo sebagai Komisaris Utama, Sdr. Defy Indiyanto Budiarto sebagai Komisaris, Sdr. Sunarsip sebagai Komisaris, serta menunjuk Sdr. Komang Parmita merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan Sdr. Komang Parmita pada rangkap jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
4. RUPS Sirkuler tanggal 30 Desember 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris dan Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris

Information:
1. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Benny M.M Marbun as Acting Commissioner and appointed Mr. Komang Parmita as Commissioner.
2. Circular GMS on September 14, 2021, respectfully dismissed Mr. Sriyono Dwidjo Siswoyo as President Commissioner, Mr. Defy Indiyanto Budiarto as Commissioner, Mr. Sunarsip as Commissioner, and appointed Mr. Komang Parmita also serves as Acting President Commissioner
3. Circular GMS on October 21, 2021, appointed and determined Mr. Dedeng Hidayat as President Commissioner and dismissed Mr. Komang Parmita in his concurrent position as Acting President Commissioner
4. Circular GMS on December 30, 2021, appointed and determined Mr. Emir Kresna Wardana as Commissioner and Mr. Bagus Puruhito as Commissioner

Kriteria dan Komposisi Komisaris Independen
Criteria and Composition of Independent Commissioners

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Tata Laksana Kerja Direksi-Dewan Komisaris (*Board Manual*) PJB, Komisaris Independen Perusahaan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Berasal dari luar Perusahaan;
2. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direktur atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Selain itu, penetapan Komisaris Independen juga mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN. Komisaris independen harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and controlling shareholders, and are free from business relationships or other relationships that may affect their ability to act independently or act solely for the benefit of the Company. As explained in the Work Procedure of PJB's Board of Directors (Board Manual), the Company's Independent Commissioners have the following criteria:

1. From an external party (not the Company);
2. Not owning any share directly nor indirectly in the Company;
3. Not affiliated with the Company, Commissioners, Directors, or Majority Shareholders of the Company;
4. Not in a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

In addition, the determination of the Independent Commissioner also refers to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 on August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE as last amended by Regulation of the Ministry of SOE Number: PER-09/MBU/2012 on July 6, 2012, concerning Amendments to Regulation of the Minister of BUMN Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. The independent commissioner must meet the following criteria:

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan;
3. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya;
6. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

1. Having no financial, management, share ownership, and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholder or relationship with the relevant SEO, which may affect its ability to act independently;
2. Not serving as a member of the Board of Directors in affiliation with the Company;
3. Not working for the government, including departments, institutions, and the military within the last 3 (three) years;
4. Not working in the Company or the affiliation for within the last 3 (three) years;
5. Having no financial relationship, either directly or indirectly, with the Company or companies providing services and products to the Company and its cooperation;
6. Independent from business interests and activities or other relationships that may hinder or interfere with the ability of the Board of Commissioners to act or think independently within the Company

Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan memenuhi kriteria Komisaris Independen, namun tidak definitif dinyatakan sebagai Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang komisaris atau 30 % dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris PJB sampai dengan 14 September 2021 yaitu Sdr. Defy Indiyanto Budiarto dan Sdr. Sunarsip. Sehubungan dengan perubahan komposisi Dewan Komisaris, maka Komisaris Independen PJB per 31 Desember 2021 berjumlah 2 (dua) orang komisaris atau 30 % dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris PJB yaitu Sdr. Emir Kresna Wardana dan Sdr. Bagus Puruhito.

Members of the Board of Commissioners who are not affiliated with shareholders and meet the criteria for Independent Commissioners, but are not definitively declared as Independent Commissioners of 2 (two) commissioners or 30% of the 6 (six) members of PJB's Board of Commissioners until September 14, 2021, namely Mr. Defy Indiyanto Budiarto and Mr. Sunarsip. In connection with the change in the composition of the Board of Commissioners, the number of Independent Commissioners of PJB as of December 31, 2021, is 2 (two) commissioners, or 30% of the 6 (six) members of PJB's Board of Commissioners, namely Mr. Emir Kresna Wardana and Mr. Bagus Puruhito.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan
Declaration of Independence and Potential Conflict of Interest

Dewan Komisaris berupaya menjaga independensi dalam melaksanakan fungsi pengawasan semata-mata demi kepentingan Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan membuat Pakta Integritas dan menyampaikan kepada Perusahaan terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga di Perusahaan dan perusahaan lainnya.

The Board of Commissioners strives to maintain independence in carrying out its supervisory function solely for the benefit of the Company. Members of the Company's Board of Commissioners make Integrity Pacts and submit to the Company regarding personal and family ownership of shares in the Company and other companies.

Setiap Anggota Dewan Komisaris PJB telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan untuk bersikap independen dan bebas benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya setiap tahun dengan menyebutkan bahwa:

1. Tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transasksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT Pembangkitan Jawa Bali dan/atau anak perusahaannya yang terkonsolidasi dan terafiliasi;
2. Tidak memangku jabatan rangkap dalam jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan perusahaan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PJB;
3. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Dewan Komisaris PJB.

Each Member of PJB's Board of Commissioners has signed an Integrity Pact as a form of statement to be independent and free of conflicts of interest in carrying out their functions and duties annually by stating as follows:

1. Having no conflict of interest and/or is involved in transactions with the conflict of interest with PT Pembangkitan Jawa Bali and/or its consolidated and affiliated subsidiaries;
2. Having no concurrent position that can cause a conflict of interest harming the Company and it is forbidden from the prevailing laws and regulations to PJB;
3. Having no blood family relationship up to the second degree, either in the straight line or sideline or marital relationship with other Board of Directors members or with the Board of Commissioners members

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan
Declaration of Independence and Potential Conflict of Interest

Nama Name	Penandatanganan Pakta Integritas Integrity Pact Signing
Sriyono Dwidjo Siswoyo[2]	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
Defy Indiyanto Budiarto[2]	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
Sunarsip[2]	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
Jisman P. Hutajulu	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
Benny M.M. Marbun[1]	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 22 April 2021 The statement was signed on April 22, 2021
Hendra Iswahyudi	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
Dedeng Hidayat[3]	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 November 2021 The statement was signed on November 4, 2021
Komang Parmita[1]	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
Bagus Puruhito[4]	Baru diangkat menjadi Komisaris pada 30 Desember 2021 Newly appointed as Commissioner on December 30, 2021
Emir Kresna Wardana[4]	Baru diangkat menjadi Komisaris pada 30 Desember 2021 Newly appointed as Commissioner on December 30, 2021

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Benny M.M Marbun sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 September 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sriyono Dwidjo Siswoyo sebagai Komisaris Utama, Sdr. Defy Indiyanto Budiarto sebagai Komisaris, Sdr. Sunarsip sebagai Komisaris, serta menunjuk Sdr. Komang Parmita merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

3. RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan Sdr. Komang Parmita pada rangkap jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
4. RUPS Sirkuler tanggal 30 Desember 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris dan Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris

Information:
1. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Benny M.M Marbun as Acting Commissioner and appointed Mr. Komang Parmita as Commissioner.
2. Circular GMS on September 14, 2021, respectfully dismissed Mr. Sriyono Dwidjo Siswoyo as President Commissioner, Mr. Defy Indiyanto Budiarto as Commissioner, Mr. Sunarsip as Commissioner, and appointed Mr. Komang Parmita also serves as Acting President Commissioner
3. Circular GMS on October 21, 2021, appointed and determined Mr. Dedeng Hidayat as President Commissioner and dismissed Mr. Komang Parmita in his concurrent position as Acting President Commissioner
4. Circular GMS on December 30, 2021, appointed and determined Mr. Emir Kresna Wardana as Commissioner and Mr. Bagus Puruhito as Commissioner

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris beserta keluarga
Share Ownership by Members of the Board of Commissioners and Their Relatives

Nama Name	Kepemilikan Saham oleh Pribadi Personal Share Ownership		Kepemilikan saham oleh keluarga Relatives Share Ownership	
	Di perusahaan In the Company	Di perusahaan lain In another company	Di perusahaan In the Company	Di perusahaan lain In another company
Sriyono Dwidjo Siswoyo[2]	-	-	-	-
Defy Indiyanto Budiarto[2]	-	-	-	-
Sunarsip[2]	-	PT CSA (330 lot)	-	-
Jisman P. Hutajulu	-	-	-	-
Benny M.M. Marbun[1]	-	-	-	-
Hendra Iswahyudi	-	-	-	-
Dedeng Hidayat[3]	-	-	-	-
Komang Parmita[1]	-	-	-	-
Bagus Puruhito[4]	-	-	-	-
Emir Kresna Wardana[4]	-	-	-	-

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Benny M.M Marbun sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 September 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sriyono Dwidjo Siswoyo sebagai Komisaris Utama, Sdr. Defy Indiyanto Budiarto sebagai Komisaris, Sdr. Sunarsip sebagai Komisaris, serta menunjuk Sdr. Komang Parmita merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan Sdr. Komang Parmita pada rangkap jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
4. RUPS Sirkuler tanggal 30 Desember 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris dan Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris

Information:
1. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Benny M.M Marbun as Acting Commissioner and appointed Mr. Komang Parmita as Commissioner.
2. Circular GMS on September 14, 2021, respectfully dismissed Mr. Sriyono Dwidjo Siswoyo as President Commissioner, Mr. Defy Indiyanto Budiarto as Commissioner, Mr. Sunarsip as Commissioner, and appointed Mr. Komang Parmita also serves as Acting President Commissioner
3. Circular GMS on October 21, 2021, appointed and determined Mr. Dedeng Hidayat as President Commissioner and dismissed Mr. Komang Parmita in his concurrent position as Acting President Commissioner
4. Circular GMS on December 30, 2021, appointed and determined Mr. Emir Kresna Wardana as Commissioner and Mr. Bagus Puruhito as Commissioner

Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Manual

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris telah didukung dengan pedoman kerja internal yaitu *Board of Commissioners Manual* (BoC *Manual*) sebagai bagian tidak terpisahkan dari *Board Manual* dan mengacu pada Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. BoC *Manual* disusun dan ditetapkan oleh Komisaris Utama pada tanggal 12 Desember 2011 dalam bentuk Piagam Kerja Dewan Komisaris. Piagam Kerja Dewan Komisaris kemudian dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 011.K/DK/PJB/2014 tanggal 22 Desember 2014 menjadi pedoman kerja yang saat ini dikenal dengan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris atau *Board of Commissioners Manual* (BoC *Manual*). Muatan BoC *Manual* merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Board Manual* yang bersifat teknis pelaksanaan kerja organ Dewan Komisaris. Ketentuan terkait fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual*, antara lain:

1. Pengertian, persyaratan dan komposisi Dewan Komisaris;
2. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris;
3. Pengaturan rangkap jabatan;
4. Program pengenalan dan pelatihan;
5. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris serta *Key Performance Indicator* Dewan Komisaris;
6. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris, termasuk terkait persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP, tugas arahan dan pengawasan Dewan Komisaris dan Praktik GCG;
7. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris;
8. Tata Tertib Rapat;
9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Ketentuan dalam *Board Manual* terkait fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang dijabarkan lebih lanjut dalam BoC *Manual* sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum Dewan Komisaris;
2. Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris;
3. Hak Dan Kewajiban Dewan Komisaris;

The implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners has been supported by internal work guidelines, namely the Board of Commissioners Manual (BoC Manual) as an integral part of the Board Manual and refers to the Articles of Association and applicable laws and regulations. The BoC Manual was prepared and stipulated by the President Commissioner on December 12, 2011, in the form of the Board of Commissioners' Work Charter. The Manual of the Board of Commissioners was then updated based on the Decree of the Board of Commissioners Number 011.K/DK/PJB/2014 on December 22, 2014, to become a working guideline which is currently known as the Board of Commissioners' Work Procedure or the Board of Commissioners Manual (BoC Manual). The content of the BoC Manual is a further elaboration of the Board Manual which is technical in terms of implementing the work of the organs of the Board of Commissioners. Provisions related to the supervisory function by the Board of Commissioners as regulated in the Board Manual, among others:
1. Definition, requirements, and composition of the Board of Commissioners;
2. Principles of Decision Making of the Board of Commissioners;
3. Arrangement of concurrent positions;
4. Induction and training programs;
5. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners and Key Performance Indicators of the Board of Commissioners;
6. Duties and authorities of the Board of Commissioners, including the approval of the draft for CLP and ABOP, the task of directing and supervising the Board of Commissioners and GCG Practices;
7. Rights and Obligations of the Board of Commissioners;
8. Meeting Rules;
9. Reporting and Accountability;
10. Supporting Organs for the Board of Commissioners.

The provisions in the Board Manual regarding the supervisory function of the Board of Commissioners are further elaborated in the BoC Manual as follows:
1. General Provisions of the Board of Commissioners;
2. Duties and Authorities of the Board of Commissioners;
3. Rights and Obligations of the Board of Commissioners;

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

4. Prosedur Pengawasan Terhadap Kegiatan Operasional Perusahaan.
5. Rapat Dewan Komisaris;
6. Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris;
7. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris;
8. Administrasi Surat Menyurat Dewan Komisaris;
9. Komite - Komite Dewan Komisaris;
10. Sekretariat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan review terhhadap pedoman kerja Dewan Komisaris dan jika dipandang perlu, dilakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dan perkembangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Procedures for Supervision of the Company's Operational Activities.
5. Board of Commissioners meeting;
6. Annual Work Plan of the Board of Commissioners;
7. Working Visit of the Board of Commissioners;
8. Administration of Correspondence to the Board of Commissioners;
9. Committees of the Board of Commissioners;
10. Secretariat of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners periodically reviews the work guidelines of the Board of Commissioners and if deemed necessary, updates them according to the needs of the Board of Commissioners and the development of the Company as well as the prevailing laws and regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PJB dan diuraikan lebih jelas dalam *Board Manual* serta BoC *Manual* yang secara umum terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan Perusahaan. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang dijalankan Dewan Komisaris bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dilakukan secara proaktif, mencakup semua aspek bisnis Perusahaan.

Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan wewenang dan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris PJB meliputi:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities as stipulated in PJB's Articles of Association and is described more clearly in the Board Manual and BoC Manual which are generally related to the implementation of the supervisory function and providing advice on the management of the Company. The supervisory and advisory function carried out by the Board of Commissioners aims to ensure the effectiveness of the implementation of policies and decision-making processes carried out by the Board of Directors following the objectives of the Company and the direction of the Shareholders. Supervision carried out by the Board of Commissioners is carried out proactively, covering all aspects of the Company's business.

Decision-making by the Board of Commissioners is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners, so it does not negate the authority and responsibility of the Board of Directors for the implementation of management. The Board of Commissioners is not involved in making decisions related to operational activities except for other matters stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The main duties and responsibilities of the PJB Board of Commissioners include:

1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company.
2. Researching and reviewing and signing the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Company's Budget prepared by the Board of Directors, following the provisions of these Articles of Association.

3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang barulampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners signing the CLP and ABOP.
4. Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important to the management of the Company.
5. Report immediately to the General Meeting of Shareholders if there are symptoms of declining Company performance.
6. Researching and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report.
7. Provide explanations, opinions, and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report if requested.
8. Prepare the minutes of the Board of Commissioners' meeting and keep a copy thereof.
9. Reporting to the Company regarding the ownership of shares and/or their families in the Company and other Companies.
10. Provide reports on supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the General Meeting of Shareholders.
11. Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with the laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris
Duties Division of Members of the Board of Commissioners

Sebagai organ utama Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan menyangkut fungsi pengawasan. Pada prinsipnya fungsi pengawasan dilaksanakan secara kolegial. Namun sebagai upaya mendorong efektifitas fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menetapkan masing-masing anggota Dewan komisaris untuk secara khusus melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan pada bidang-bidang tertentu.

As the main organ of the Company which is tasked and responsible for supervising management policies and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners acts as an assembly and cannot act individually on behalf of the Board of Commissioners in making decisions regarding the supervisory function. In principle, the supervisory function is carried out collegially. However, to encourage the effectiveness of the supervisory function, the Board of Commissioners assigns each member of the Board of Commissioners to specifically supervise the management of the Company in certain areas.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

Nama Name	Tugas Pengawasan	Supervisory Task
Sriyono Dwidjo Siswoyo[2]	• Selaku koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.	• As coordinator of all duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
Dedeng Hidayat[3]	• Selaku koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.	• As coordinator of all duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
Defy Indiyanto Budiarto[2]	• Pengawasan dalam bidang Audit. • Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi. • Pengawasan dalam kinerja dan K3L.	• Supervision in the field of Audit. • Supervision in the field of HC and Organization. • Supervision in performance and HSE.
Sunarsip[2]	• Pengawasan dalam bidang Audit. • Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. • Pengawasan bidang keuangan. • Pengawasan bidang investasi dan pengembangan usaha.	• Supervision in the field of Audit. • Supervision in the field of Risk Management and Compliance. • Supervision of the financial sector. • Supervision of investment and business development.
Jisman P. Hutajulu	• Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. • Pengawasan bidang investasi dan pengembangan usaha.	• Supervision in the field of Risk Management and Compliance. • Supervision of investment and business development.
Benny M.M. Marbun[1]	• Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. • Pengawasan dalam bidang operasional pembangkitan.	• Supervision in the field of Risk Management and Compliance. • Supervision in the field of generation operations.
Hendra Iswahyudi	• Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi. • Pengawasan dalam kinerja dan K3L.	• Supervision in the field of HC and Organization. • Supervision in performance and HSE.
Komang Parmita[1]	• Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. • Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3). • Pengawasan dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Peralatan Pembangkit.	• Supervision in the field of Risk Management and Compliance. • Supervision in the field of Occupational Health and Safety (OHS). • Supervision in the field of Power Plant Equipment Health and Safety.
Bagus Puruhito[4]	• Pengawasan dalam bidang Operasi dan Pemeliharaan. • Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3). • Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi.	• Supervision in the field of Operations and Maintenance. • Supervision in the field of Occupational Health and Safety (OHS). • Supervision in the field of HC and Organization.
Emir Kresna Wardana[4]	• Pengawasan bidang investasi dan pengembangan usaha. • Pengawasan dalam biang Teknologi Informasi. • Pengawasan dalam bidang *Stakeholder Management.*	• Supervision of investment and business development. • Supervision in the field of Information Technology. • Supervision in the field of Stakeholder Management.

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Benny M.M Marbun sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 September 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sriyono Dwidjo Siswoyo sebagai Komisaris Utama, Sdr. Defy Indiyanto Budiarto sebagai Komisaris, Sdr. Sunarsip sebagai Komisaris, serta menunjuk Sdr. Komang Parmita merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan Sdr. Komang Parmita pada rangkap jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
4. RUPS Sirkuler tanggal 30 Desember 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris dan Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris

Information:
1. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Benny M.M Marbun as Acting Commissioner and appointed Mr. Komang Parmita as Commissioner.
2. Circular GMS on September 14, 2021, respectfully dismissed Mr. Sriyono Dwidjo Siswoyo as President Commissioner, Mr. Defy Indiyanto Budiarto as Commissioner, Mr. Sunarsip as Commissioner, and appointed Mr. Komang Parmita also serves as Acting President Commissioner
3. Circular GMS on October 21, 2021, appointed and determined Mr. Dedeng Hidayat as President Commissioner and dismissed Mr. Komang Parmita in his concurrent position as Acting President Commissioner
4. Circular GMS on December 30, 2021, appointed and determined Mr. Emir Kresna Wardana as Commissioner and Mr. Bagus Puruhito as Commissioner

Dewan Komisaris juga menempatkan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua dan wakil ketua pada komite di bawah organ Dewan Komisaris yang telah dibentuk. Pendelegasian anggota Dewan Komisaris pada komite mempertimbangkan kompetensi dan dianggap mampu melaksanakan tugas pada masing-masing komite tersebut. Susunan anggota Dewan Komisaris yang didelegasikan pada komite di bawah organ Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners also places members of the Board of Commissioners as chairman and deputy chairman on committees under the organs of the Board of Commissioners that have been formed. The delegation of members of the Board of Commissioners to the committees considers their competence and is considered capable of carrying out the duties of each of these committees. The composition of the members of the Board of Commissioners who are delegated to the committees under the organs of the Board of Commissioners are as follows:

Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris
Composition of Members of the Board of Commissioners on the Committee of the Board of Commissioners

Komite Committee	Ketua President	Wakil Ketua Vice President
Komite Audit Audit Committee	Sunarsip	Defy Indiyanto Budiarto
Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee	Benny MM Marbun	Hendra Iswahyudi
Komite SDM dan Organisasi HC and Organization Committee	Defy Indiyanto Budiarto	Jisman P. Hutajulu

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris dan perubahan Komite SDM dan Organisasi menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi maka, susunan anggota Dewan Komisaris yang didelegasikan pada komite di bawah organ Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

In connection with the change in the composition of the Board of Commissioners and the change in the HC and Organizational Committee to the Nomination and Remuneration Committee, the composition of the members of the Board of Commissioners delegated to the committees under the Board of Commissioners is as follows:

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris
Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners on the Committee of the Board of Commissioners

Komite Committee	Ketua President
Komite Audit Audit Committee	Hendra Iswahyudi
Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Committee	Komang Parmita
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jisman P. Hutajulu

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Implementation of the Supervisory Function of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas kegiatan pengelolaan Perusahaan mencakup aspek operasional dan keuangan serta aspek lainnya yang terkait dengan kelangsungan bisnis PJB. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi dalam mendukung kegiatan pengelolaan Perusahaan. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 secara garis besar meliputi:

1. Aspek Korporat
   a. Berperan sesuai fungsinya pada persiapan dan penyelenggaraan RUPS tahunan yakni RUPS Persetujuan RKAP dan RUPS Pertanggungjawaban Tahunan (LPT).
   b. Memberikan laporan pelaksanaan pengawasan tahun 2021 yang dilaporkan kepada Pemegang Saham pada RUPS PLT 2021.
   c. Arahan dalam penyusunan RJPP dan RKAP 2021.
   d. *Monitoring* pelaksanaan RJPP dan RKAP serta kebutuhan revisinya.
   e. Penasehatan dalam penyusunan Tata Kelola Niaga, Risiko Korporat, Risiko Bisnis, Kepatuhan, Agenda Korporat dan lain-lain.
   f. Pengawasan terhadap prosedur penanganan, pencegahan dan *monitoring* Covid-19 di lingkungan Perusahaan.
   g. Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000:2018.
   h. Pembaharuan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

2. Niaga dan Operasi - Pemeliharaan
   a. Produksi/penjualan KWh dan pengendalian Biaya Pokok Produksi.
   b. Analisa *market share* PJB di Sistem Kelistrikan Jawa Bali.
   c. *Energy mix* dan *security of supply* energi primer.
   d. Program dan realisasi pemeliharaan unit pembangkit.
   e. Bisnis O&M baik yang dilaksanakan oleh PJB maupun Anak Perusahaan.
   f. Bisnis lain di luar O&M ketenagalistrikan dengan kompetensi unggul yang dimiliki.
   g. Aspek K3L atas seluruh unit pembangkit untuk manjaga *Zero Accident* dan tingkat PROPER.

The Board of Commissioners has carried out supervision over the Company's management activities covering operational and financial aspects as well as other aspects related to PJB's business continuity. In addition, the Board of Commissioners also provides advice to the Board of Directors in supporting the Company's management activities. The implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners throughout 2021 broadly includes:

1. Corporate Aspect
   a. Play a role according to its function in the preparation and implementation of the annual GMS, namely the ABOP Approval GMS and the Annual Accountability GMS (LPT).
   b. Provide a 2021 supervisory implementation report that is reported to Shareholders at the 2021 LPT GMS.
   c. Direct the preparation of the CLP and ABOP of 2021.
   d. Monitor the implementation of CLP and ABOP and the need for revision.
   e. Recommend the preparation of Commercial Governance, Corporate Risk, Business Risk, Compliance, Corporate Agenda, and others.
   f. Supervise the procedures for handling, preventing, and monitoring Covid-19 within the Company.
   g. Update Risk Management Guidelines following ISO 31000:2018.
   h. Renew Work Procedures for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual).

2. Commerce and Operations - Maintenance
   a. Production/sales of KWh and control of Cost of Production.
   b. Analysis of PJB's market share in the Java Bali Electricity System.
   c. Energy mix and security of primary energy supply.
   d. Generation unit maintenance program and realization.
   e. O&M business, both carried out by PJB and its Subsidiaries.
   f. Other businesses outside of electricity O&M with superior competencies.
   g. HSE aspects of all generation units to maintain Zero Accident and PROPER levels.

3. Pengembangan Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan
   a. Arahan dalam menindaklanjuti penugasan yang diterima dari Pemegang Saham, termasuk dalam penyiapan SDM dan sumber daya lainnya.
   b. Evaluasi dan rekomendasi atas pelaksanaan program kemitraan IPP termasuk pemilihan *partner*/mitra bisnis.
   c. Evaluasi atas pembentukan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dan setoran sahamnya.
   d. Pengawasan dan penasehatan atas kemajuan seluruh proyek penugasan.
   e. Mendorong dan mendampingi Direksi dan Manajemen dalam pengembangan usaha di bidang energi baru terbarukan.

4. SDM & Organisasi
   a. Pemilihan Direksi & Komisaris pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
   b. Penyusunan organisasi dan pembagian tugas.
   c. Evaluasi dan analisa atas Efektivitas Organisasi.
   d. *Review* atas proses bisnis seluruh fungsi dengan mengacu pada standar APQC (*American Productivity Quality Center*) dan keselarasannya dengan teknologi informasi melalui penyusunan *Enterprise Architecture.*
   e. *Review* atas kebijakan aspek K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan).
   f. *Review Talent Mobility* untuk memastikan adaptasi lebih cepat terhadap perubahan transformasi dengan cara menyebarkan dan memindahkan kompetensi utama *Talent* lintas proyek atau lintas bisnis saat diperlukan.

5. Audit
   a. *Review* rencana kerja SPI serta pelaksanaannya, termasuk evaluasi temuan-temuan penting.
   b. Memantau pelaksanaan *Risk Based Audit* dan memberikan arahan dalam pelaksanaan *Three Line of Defences.*
   c. Memantau kebijakan dan pelaksanaan ICOFR (*Internal Control Over Financial Report*).
   d. Evaluasi hasil audit eksternal (KAP dan auditor eksternal lainnya).
   e. *Monitoring* tindak lanjut keputusan dan arahan RUPS.
   f. *Monitoring* pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) serta revisi terhadap pedomannya.
   g. Memberikan masukan mengenai pengkinian Piagam Audit Intern SPI PJB.

3. Business Development and Subsidiary Development
   a. Direct the follow-up on assignments received from Shareholders, including in the preparation of HC and other resources.
   b. Evaluate and recommend the implementation of the IPP partnership program including the selection of partners/business partners.
   c. Evaluate the establishment of Subsidiaries and Affiliated Companies and their share shares.
   d. Supervise and recommend the progress of all project assignments.
   e. Encourage and assist the Board of Directors and Management in business development in the field of new and renewable energy.

4. HC & Organization
   a. Election of Directors & Commissioners in Subsidiaries and Affiliated Companies.
   b. Preparation of organization and division of tasks.
   c. Evaluation and analysis of Organizational Effectiveness.
   d. Review of business processes for all functions by referring to APQC (American Productivity Quality Center) standards and their alignment with information technology through the preparation of Enterprise Architecture.
   e. Review of HSE (Health, Safety, and Environment) policies.
   f. Talent Mobility review to ensure faster adaptation to transformational changes by deploying and transferring Talent key competencies across projects or businesses when needed.

5. Audit
   a. Review the IAU work plan and its implementation, including evaluation of important findings.
   b. Monitor the implementation of the Risk-Based Audit and provide direction in the implementation of the Three Lines of Defenses.
   c. Monitor policies and implementation of ICOFR (Internal Control Over Financial Report).
   d. Evaluation of external audit results (PAF and other external auditors).
   e. Monitoring the follow-up to the decisions and directions of the GMS.
   f. Monitoring the implementation of the Whistle Blowing System (WBS) and revision of the guidelines.
   g. Provide input regarding the updating of PJB's Internal Audit Charter.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
Working Visit of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan ke Unit Pembangkit maupun Anak Perusahaan guna mendapat informasi secara langsung mengenai operasional Unit/Anak Perusahaan tersebut. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan sebagai berikut:

The Board of Commissioners regularly visits the Generation Units and Subsidiaries to obtain direct information regarding the operations of the Units/Subsidiaries. In 2021, the Board of Commissioners has made the following visits:

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
Working Visit of the Board of Commissioners

No.	Lokasi Location	Waktu Time
1	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTA Cirata Board of Commissioners visit to Cirata HPP	22 April 2021 April 22, 2021
2	Kunjungan Dewan Komisaris ke Ciheras Board of Commissioners Visit to Ciheras	4 - 5 Juni 2021 June 4-5, 2021
3	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTU Indramayu Board of Commissioners visit to Indramayu CFPP	13 Agustus 2021 August 13, 2021
4	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTA Cirata Board of Commissioners visit to Cirata HPP	3 September 2021 September 3, 2021
5	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTU Rembang Board of Commissioners visit to Rembang CFPP	9 September 2021 September 9, 2021
6	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTU Indramayu Board of Commissioners visit to Indramayu CFPP	30 September 2021 September 30, 2021
7	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTU Tj. Awar Awar The visit of the Board of Commissioners to Tj. Awar Awar CFPP	7 Oktober 2021 October 7, 2021
8	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTG Muara Tawar The visit of the Board of Commissioners to Muara Tawar GTPP	14 Oktober 2021 October 14, 2021
9	Kunjungan Dewan Komisaris ke Ciheras The visit of the Board of Commissioners to Ciheras.	6 November 2021 November 6, 2021
10	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTGU Gresik The visit of the Board of Commissioners to Gresik CCPP	27 November 2021 November 27, 2021
11	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTA Cirata The visit of the Board of Commissioners to Cirata HPP	03 Desember 2021 December 3, 2021
12	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTU Cilacap The visit of the Board of Commissioners to Cilacap CFPP	12 Desember 2021 December 12, 2021
13	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTU Indramayu The visit of the Board of Commissioners to Indramayu CFPP	17 Desember 2021 December 17, 2021
14	Kunjungan Dewan Komisaris ke PLTA Cirata The visit of the Board of Commissioners to Cirata HPP	24 Desember 2021 December 24, 2021

Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Approval and Recommendation

Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, memiliki wewenang memberikan pesetujuan dan rekomendasi kepada Direksi atas kegiatan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggran Dasar dan ketentuan internal lainnya berlaku di perusahaan. Persetujuan dan rekomendasi diberikan baik melalui keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notulen Rapat maupun dengan surat keputusan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan *monitoring* atas tindak lanjut keputusan dan rekomendasi Dewan Komisaris. Persetujuan dan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Usulan RKAP PT Pembangkitan Jawa Bali Tahun 2022.
2. Rekomendasi Tertulis Dewan Komisaris atas Usulan Permintaan Dukungan atas Program *Coal Switching* dan *Co-Firing*.
3. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Penambahan KBLI pada Dokumen Perizinan sebagai Landasan Hukum Pelaksanaan Bisnis *Non-Core* dan Usaha Lainnya di PT Pembangkitan Jawa Bali.
4. Rekomendasi Tertulis Dewan Komisaris atas Penempatan Wakil PT Pembangkitan Jawa Bali pada Anak Perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali.
5. Tanggapan Tertulis atas Rencana Perseroan Meningkatkan Porsi Saham Perseroan di PT PJBS.
6. Persetujuan atas Perubahan Organisasi PT Pembangkitan Jawa Bali.

The Board of Commissioners in carrying out the supervisory function has the authority to provide approval and recommendations to the Board of Directors on the Company's management activities following the provisions of the Articles of Association and other internal regulations applicable in the Company. Approval and recommendations are given either through the resolutions of the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings contained in the Minutes of the Meeting as well as by the Board of Commissioners' decision letter. The Board of Commissioners monitors the follow-up to the decisions and recommendations of the Board of Commissioners. The approvals and recommendations given by the Board of Commissioners throughout 2021 include the following:

1. Written Response of the Board of Commissioners to the Proposed ABOP of PT Pembangkitan Jawa Bali in 2022.
2. Written Recommendation from the Board of Commissioners on the Proposed Request for Support for the Coal Switching and Co-Firing Program.
3. Written response from the Board of Commissioners to the addition of the KBLI to the Licensing Document as the Legal Basis for the Implementation of Non-Core Business and Other Businesses at PT Pembangkitan Jawa Bali.
4. Written recommendation from the Board of Commissioners on the placement of representatives of PT Pembangkitan Jawa Bali in the Subsidiary of PT Pembangkitan Jawa Bali.
5. Written Response to the Company's Plan to Increase the Company's Share Portion in PT PJBS.
6. Approval of Organizational Change of PT Pembangkitan Jawa Bali.

Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

Pelaksanakan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris diantaranya dilakukan melalui mekanisme rapat, yang terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan bersama Direksi yang disebut Rapat Pengawasan Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris baik Rapat Internal maupuan Rapat Pengawasan masing-masing dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan sebagaimana

The implementation of the supervisory function by the Board of Commissioners is carried out through a meeting mechanism, which consists of an Internal Meeting of the Board of Commissioners and a joint meeting with the Board of Directors called the Supervisory Meeting of the Board of Commissioners. Meetings of the Board of Commissioners, both Internal Meetings and Supervisory Meetings, are each

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

diatur dalam BoC *Manual* dan Board *Manual* PJB. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dapat menghadiri Rapat Konsultasi yang diadakan oleh Direksi. Rapat Konsultasi merupakan Rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial PJB.

held at least once a month as stipulated in the BoC manual and PJB Board Manual. In addition, members of the Board of Commissioners may also attend Consultation Meetings held by the Board of Directors. Consultation Meeting is a Board of Directors Meeting attended by the Board of Commissioners to discuss various operational aspects and financial management of PJB.

Rencana rapat Dewan Komisaris disusun sebelum tahun berjalan baik rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Pengawasan masing-masing minimal 1 kali setiap bulan. Agenda rapat internal Dewan Komisaris secara umum meliputi tindak lanjut tugas Dewan Komisaris, Laporan Manajemen dan Kinerja, dan progres proyek dan penugasan. Sementara agenda rapat pengawasan secara umum meliputi Laporan Manajemen dan Kinerja, dan Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya. Materi yang akan dibahas dalam rapat pengawasan/konsultasi terlebih dahulu dikaji dalam Rapat Intern Dewan Komisaris (RID) maupun Rapat Komite berdasarkan laporan-laporan yang dibuat oleh Manajemen.

The Board of Commissioners meeting plan is prepared before the current year, both the internal meeting of the Board of Commissioners and the Supervisory Meeting each at least once a month. The agenda for the internal meeting of the Board of Commissioners generally includes follow-up to the duties of the Board of Commissioners, Management and Performance Reports, and project progress and assignments. Meanwhile, the supervisory meeting agenda, in general, includes Management and Performance Reports, and Follow Up on Previous Meetings. The material that will be discussed in the supervisory/consultation meeting is first reviewed in the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID) and the Committee Meeting based on the reports made by the Management.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 kali serta rapat pengawasan sebanyak 12 Kali dengan agenda dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagai berikut:

Throughout 2021, the Board of Commissioners has held 12 internal meetings and 12 supervisory meetings with the agenda and attendance ratio of the Board of Commissioners as follows:

Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2021
2021 Internal Meeting of the Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participants
1.	26 Januari 2021 January 26, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Progres Tindak Lanjut Rapat yang Lalu dan tugas Dewan Komisaris. 3. Laporan Kinerja PJB Bulan Desember 2020. 4. Laporan Kegiatan Komite Audit. 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Progress of Follow Up on Past Meetings and duties of the Board of Commissioners. 3. PJB Performance Report December 2020. 4. Audit Committee Activity Report. 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 6. HC & Organization Committee Activity Report.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M Marbun, Jisman P. Hutajulu, Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participants
2.	25 Februari 2021 February 25, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Progres Tindak Lanjut Rapat yang Lalu dan tugas Dewan Komisaris. 3. Laporan Kinerja PJB Bulan Januari 2021. 4. Laporan Kegiatan Komite Audit. 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Progress of Follow Up on Past Meetings and duties of the Board of Commissioners. 3. PJB Performance Report January 2021. 4. Audit Committee Activity Report. 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 6. HC & Organization Committee Activity Report.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
3.	25 Maret 2021 March 25, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Progres Tindak Lanjut Rapat yang Lalu dan tugas Dewan Komisaris. 3. Laporan Kinerja PJB Bulan Februari 2021. 4. Laporan Kegiatan Komite Audit. 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Progress of Follow Up on Past Meetings and duties of the Board of Commissioners. 3. PJB Performance Report for February 2021. 4. Audit Committee Activity Report. 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 6. HC & Organization Committee Activity Report.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
4.	29 April 2021 April 29, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Progres Tindak Lanjut Rapat yang Lalu dan tugas Dewan Komisaris. 3. Laporan Manajemen PJB Triwulan I 2021. 4. Laporan Kegiatan Komite Audit. 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Progress of Follow Up on Past Meetings and duties of the Board of Commissioners. 3. PJB Management Report Quarter I 2021. 4. Audit Committee Activity Report. 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 6. HC & Organization Committee Activity Report.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Komang Parmita, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
5.	27 Mei 2021 May 27, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi kegiatan bulan Mei 2021. 3. Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS LPT Tahun Buku 2020. 4. Laporan Kinerja PJB Bulan April 2020. 5. Laporan Kegiatan Komite Audit. 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of activities in May 2021. 3. Discussion of the Board of Commissioners' Responses in the LPT GMS for Fiscal Year 2020. 4. PJB Performance Report April 2020. 5. Audit Committee Activity Report. 6. HC & Organization Committee Activity Report.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Komang Parmita, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participants
6.	24 Juni 2021 June 24, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi kegiatan bulan Juni 2021. 3. Laporan Kinerja PJB Bulan Mei 2021. 4. Laporan Kegiatan Komite Audit. 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of activities in June 2021. 3. PJB Performance Report for May 2021. 4. Audit Committee Activity Report. 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 6. HC & Organization Committee Activity Report.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Komang Parmita, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
7.	29 Juli 2021 July 29, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi kegiatan bulan Juli 2021. 3. Laporan Manajemen PJB Triwulan II 2021. 4. Laporan Kegiatan Komite Audit. 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi. 7. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2021.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of activities in July 2021. 3. PJB Management Report Quarter II 2021. 4. Audit Committee Activity Report. 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 6. HC & Organization Committee Activity Report. 7. Supervisory Report of the Board of Commissioners Semester I of 2021.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Komang Parmita, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
8.	26 Agustus 2021 August 26, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi kegiatan bulan Juli dan Agustus 2021. 3. Laporan Kinerja PJB Bulan Juli 2021. 4. Laporan Kegiatan Komite Audit. 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 6. Laporan Kegiatan Komite SDM & Organisasi.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of activities in July and August 2021. 3. PJB Performance Report for July 2021. 4. Audit Committee Activity Report. 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 6. HC & Organization Committee Activity Report.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Komang Parmita, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, R Rawan Insani, Karyawan Aji
9.	28 September 2021 September 28, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi kegiatan bulan Agustus dan September 2021. 3. Laporan Kinerja PJB Bulan Agustus 2021. 4. Laporan Kegiatan Komite Audit. 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 6. Laporan Kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of activities in August and September 2021. 3. PJB Performance Report for August 2021. 4. Audit Committee Activity Report. 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 6. Nomination & Remuneration Committee Activity Report.	Komang Parmita, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participants
10.	28 Oktober 2021 October 28, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi kegiatan bulan September dan Oktober 2021. 3. Laporan Pengawasan Triwulan III Tahun 2021. 4. Laporan Manajemen PJB Triwulan III 2021. 5. Laporan Kegiatan Komite Audit. 6. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 7. Laporan Kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of activities in September and October 2021. 3. Quarter III Supervisory Report 2021. 4. PJB Management Report Quarter III 2021. 5. Audit Committee Activity Report. 6. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 7. Nomination & Remuneration Committee Activity Report.	Dedeng Hidayat, Komang Parmita, Jisman P. Hutajulu, Hendra Iswahyudi, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
11.	25 November 2021 November 25, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi Kegiatan Bulan November 2021. 3. Laporan Kinerja PJB Bulan Oktober 2021. 4. Laporan Kegiatan Komite Audit. 5. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 6. Laporan Kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of November 2021 Activities. 3. PJB Performance Report for October 2021. 4. Audit Committee Activity Report. 5. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 6. Nomination & Remuneration Committee Activity Report.	Dedeng Hidayat, Komang Parmita, Jisman P. Hutajulu, Hendra Iswahyudi, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
12.	22 Desember 2021 December 22, 2021	1. Arahan Dewan Komisaris. 2. Evaluasi kegiatan bulan Desember 2021. 3. Laporan Kinerja PJB Bulan November 2021. 4. Pembahasan *Draft* Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2022 dan Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022. 5. Laporan Kegiatan Komite Audit. 6. Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan. 7. Laporan Kegiatan Komite Nominasi & Remunerasi. 8. Penetapan Komite Periode Tahun 2022.	1. Directions from the Board of Commissioners. 2. Evaluation of activities in December 2021. 3. PJB Performance Report for November 2021. 4. Discussion on the Draft Response of the Board of Commissioners on the 2022 ABOP and the 2022 Work Plan of the Board of Commissioners. 5. Audit Committee Activity Report. 6. Risk Management & Compliance Committee Activity Report. 7. Nomination & Remuneration Committee Activity Report. 8. Determination of the Committee for the 2022 Period.	Dedeng Hidayat, Komang Parmita, Jisman P. Hutajulu, Hendra Iswahyudi, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Rapat Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021
2021 Board of Commissioners and Board of Directors Supervisory Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participants
1.	26 Januari 2021 January 26, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Desember 2020. 3. Persiapan dan Simulasi RUPS RKAP PT PJB Tahun 2021.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. PT PJB Performance Report December 2020. 3. Preparation and Simulation of PT PJB GMS on the 2021 ABOP.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M Marbun, Jisman P. Hutajulu, Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
2.	25 Februari 2021 February 25, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Perkembangan Penanganan Covid-19. 3. Target KPI 2021 dan Arahan RUPS RKAP. 4. Progres Proyek Pengembangan Usaha.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. Developments in Handling Covid-19. 3. 2021 KPI Target and ABOP GMS Directions. 4. Progress of Business Development Projects.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
3.	25 Maret 2021 March 25, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Progres KAP dan *Assessment* GCG tahun 2020. 3. Laporan Kinerja bulan Februari 2021. 4. Progres Proyek Pengembangan Usaha. 5. Perkembangan Penanganan Covid-19.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. Progress of PAF and GCG Assessment in 2020. 3. Performance Report for February 2021. 4. Progress of Business Development Projects. 5. Developments in Handling Covid-19.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Benny M.M Marbun, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
4.	29 April 2021 April 29, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Laporan Manajemen Triwulan I-2021. 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha. 4. Perkembangan Penanganan Covid-19.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. Management Report Quarter I-2021. 3. Progress of Business Development Projects. 4. Developments in Handling Covid-19.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Komang Parmita, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
5.	27 Mei 2021 May 27, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan April 2021. 3. Persiapan RUPS LPT 2020.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. PT PJB Performance Report April 2021. 3. Preparation of the 2020 LPT GMS.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Komang Parmita, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
6.	24 Juni 2021 June 24, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Mei 2021. 3. Review Arahan RUPS LPT 2020.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. PT PJB Performance Report for May 2021. 3. Review of 2020 LPT GMS Directions.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Komang Parmita, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participants
7.	29 Juli 2021 July 29, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Laporan Manajemen PT PJB Juni 2021. 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. PT PJB Management Report June 2021. 3. Progress of Business Development Projects.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Komang Parmita, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
8.	26 Agustus 2021 August 26, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Juli 2021. 3. Pembahasan Rencana Pembelian Saham YKPJB oleh PJBS. 4. Perkembangan Penanganan Covid-19.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. PT PJB Performance Report for July 2021. 3. Discussion on the Plan to Purchase YKPJB Shares by PJBS. 4. Developments in Handling Covid-19.	Sriyono D Siswoyo, Defy Indiyanto Budiarto, Sunarsip, Komang Parmita, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, R Rawan Insani, Karyawan Aji
9.	29 September 2021 September 29, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Laporan Kinerja PT PJB bulan Agustus 2021. 3. Progres Proyek Pengembangan Usaha.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. PT PJB Performance Report for August 2021. 3. Business Development Project Progress Report.	Komang Parmita, Hendra Iswahyudi, Jisman P. Hutajulu, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
10.	29 Oktober 2021 October 29, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Laporan Manajemen PT PJB Triwulan III 2021. 3. Laporan Progres Proyek Pengembangan Usaha.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. PT PJB Management Report Quarter III 2021. 3. Business Development Project Progress Report.	Dedeng Hidayat, Komang Parmita, Jisman P. Hutajulu, Hendra Iswahyudi, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
11.	25 November 2021 November 25, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan Oktober 2021. 3. RKAP PT PJB Tahun 2022.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. PT PJB Performance Report for October 2021. 3. PT PJB's ABOP for 2022.	Dedeng Hidayat, Komang Parmita, Jisman P. Hutajulu, Hendra Iswahyudi, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
12.	22 Desember 2021 December 22, 2021	1. Pengantar Dewan Komisaris. 2. Laporan Kinerja PT PJB Bulan November 2021. 3. Progres Pengembangan Usaha. 4. Persiapan RUPS RKAP PT PJB Tahun 2022.	1. Introduction to the Board of Commissioners. 2. PT PJB Performance Report for November 2021. 3. Business Development Progress. 4. Preparation of PT PJB's GMS on ABOP in 2022.	Dedeng Hidayat, Komang Parmita, Jisman P. Hutajulu, Hendra Iswahyudi, Gong Matua Hasibuan, M. Yossy Noval, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Tahun 2021
Frequency and Attendance of the Board of Commissioners in 2021 Meetings

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting		Rapat Pengawasan Supervisory Meeting	
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Ratio	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Ratio
Sriyono Dwidjo Siswoyo[2]	7	88%	8	100%
Dedeng Hidayat[3]	3	100%	3	100%
Defy Indiyanto Budiarto[2]	7	88%	8	100%
Sunarsip[2]	8	100%	8	100%
Jisman P. Hutajulu	11	92%	12	100%
Benny M.M. Marbun[1]	3	100%	3	100%
Hendra Iswahyudi	11	92%	10	83%
Komang Parmita[1]	6	67%	9	100%
Bagus Puruhito[4]	-	-	-	-
Emir Kresna Wardana[4]	-	-	-	-

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Benny M.M Marbun sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 September 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sriyono Dwidjo Siswoyo sebagai Komisaris Utama, Sdr. Defy Indiyanto Budiarto sebagai Komisaris, Sdr. Sunarsip sebagai Komisaris, serta menunjuk Sdr. Komang Parmita merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan Sdr. Komang Parmita pada rangkap jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
4. RUPS Sirkuler tanggal 30 Desember 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris dan Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris

Information:
1. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Benny M.M Marbun as Acting Commissioner and appointed Mr. Komang Parmita as Commissioner.
2. Circular GMS on September 14, 2021, respectfully dismissed Mr. Sriyono Dwidjo Siswoyo as President Commissioner, Mr. Defy Indiyanto Budiarto as Commissioner, Mr. Sunarsip as Commissioner, and appointed Mr. Komang Parmita also serves as Acting President Commissioner
3. Circular GMS on October 21, 2021, appointed and determined Mr. Dedeng Hidayat as President Commissioner and dismissed Mr. Komang Parmita in his concurrent position as Acting President Commissioner
4. Circular GMS on December 30, 2021, appointed and determined Mr. Emir Kresna Wardana as Commissioner and Mr. Bagus Puruhito as Commissioner

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Competency Development Program

Sebagai upaya menunjang pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris mengikuti Program pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan. Selama tahun 2021, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

As an effort to support the implementation of supervisory duties, the Board of Commissioners participates in a development program to increase knowledge and competencies relevant to the Company's business. In 2021, members of the Board of Commissioners have participated in competency development program activities as described in the description related to Education and Training of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of Internal Audit.

Program Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru
Induction Program for New Members of the Board of Commissioners

Program pengenalan (Program Induksi) harus dilaksanakan apabila terdapat anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Manual*) dan *Board Manual* PJB. Program pengenalan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Perusahaan yang diperlukan anggotan Dewan Komisaris yang baru menjabat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dalam pelaksana program pengenalan. Materi program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh PJB;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya sesuai dengan RJPP Perusahaan;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Program pengenalan PJB dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/Anak Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan PJB dimana program tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan program pengenalan bagi Komisaris baru sebagai berikut:

The Induction Program must be implemented if there is a new member of the Board of Commissioners as stipulated in the Board of Commissioners Manual and PJB Board Manual. The Induction Program aims to provide an overview of the Company that new members of the Board of Commissioners need to support the implementation of their duties and responsibilities. The Corporate Secretary coordinates with the Secretary to the Board of Commissioners in implementing the Induction Program. Induction Program materials include:

1. Implementation of the GCG principles by PJB;
2. An overview of the Company concerning the objectives, nature, and activity scope, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and various other strategic issues following the CLP;
3. Information concerning the delegated authority, internal audit, and external audit, as well as internal control system and policies, including the Audit Committee;
4. Information concerning the duty and responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The PJB Induction Program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company/Subsidiaries, and review of documents or other programs deemed following PJB where the program is implemented. In 2021, the following programs have been implemented for the Induction Program of new Commissioners:

Program Induksi Anggota Dewan Komisaris Baru Tahun 2021
Induction Program for New Members of the Board of Commissioners in 2021

No.	Tanggal Date	Agenda	Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners
1	10 Mei 2021 May 10, 2021	RJPP PJB PJB CLP	Komang Parmita
2	22 Juni 2021 June 22, 2021	1. *Good Corporate Governance* (GCG) 2. *Governance, Risk & Compliance* (GRC) 3. *Zero Accident Assistant Application*	Komang Parmita
3	9 November 2021 November 9, 2021	RJPP PJB PJB CLP	Dedeng Hidayat

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Penilaian Kinerja Komite–Komite Di Bawah Dewan Komisaris
Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas kinerja komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas masing-masing komite. Penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris berupa pencapaian target-target rencana kerja tahunan komite. Uraian lebih lanjut mengenai penilaian kinerja komite di dawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Board of Commissioners periodically evaluates the performance of the committees under the Board of Commissioners as a form of evaluation of the implementation of the duties of each committee. The performance appraisal of the committees under the Board of Commissioners is carried out based on the criteria set by the Board of Commissioners in the form of achieving the targets of the committee's annual work plan. Further descriptions regarding the performance appraisal of committees under the Board of Commissioners can be seen in the sections of the Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Performance Assessment

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris termasuk pencapaian realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan komisaris. Evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) pada setiap akhir periode tahun buku bersamaan dengan evaluasi atas kinerja komite Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan *Board Manual.*

Assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out as a form of evaluation of the implementation of the supervisory duties carried out by the Board of Commissioners, including the achievement of the realization of Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners. Evaluation of the implementation of supervisory duties is carried out independently (self-assessment) at the end of each financial year period along with an evaluation of the performance of the Board of Commissioners committee by taking into account the provisions of the Articles of Association and the Board Manual.

Assessment yang dilakukan secara berkala atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik juga mencakup penilaian atas aspek Dewan Komisaris termasuk organ pendukung Dewan Komisaris. Kriteria *assessment* penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai kerangka acuan pelaksanaan *Assessment* GCG berdasarkan parameter yang diaturdalam SK Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2012. Hasil *assessment* GCG pada aspek Dewan Komisaris tahun 2021 mencapai skor 33,358 dari skor maksimal 35,000 atau setara dengan 95,31 % dengan kategori Sangat Baik. Capaian masing-masing indikator dari aspek Dewan Komisaris tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Assessments that are carried out regularly on the implementation of good corporate governance also include an assessment of aspects of the Board of Commissioners including the supporting organs of the Board of Commissioners. The assessment criteria for the implementation of GCG for the aspects of the Board of Commissioners are carried out under the terms of reference for the implementation of the GCG Assessment based on the parameters stipulated in the Decree of the Secretary to the Minister of SOEs No.16/S.MBU/2012. The results of the GCG assessment on the aspects of the Board of Commissioners in 2021 reached a score of 33,358 out of a maximum score of 35,000 or equivalent to 95.31% in the Very Good category. The achievements of each indicator from the aspect of the Board of Commissioners in 2021 are as follows:

Capaian Penilaian GCG Indikator Aspek Dewan Komisaris Tahun 2021
Achievement of GCG Assessment Indicators of Aspects of the Board of Commissioners in 2021

No.	Indikator	Indicator	Capaian (%) Achievement (%)
1.	Dewan komisaris melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.	The Board of Commissioners carries out training/learning programs continuously.	100
2.	Dewan komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dewan komisaris.	The Board of Commissioners performs a clear division of duties, authorities, and responsibilities and determines the factors needed to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.	98
3.	Dewan komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh direksi.	The Board of Commissioners approves the draft CLP and ABOP submitted by the Board of Directors.	100
4.	Dewan komisaris memberikan arahan terhadap direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors on the implementation of company plans and policies.	98
5.	Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	The Board of Commissioners supervises the Board of Directors on the implementation of company plans and policies.	90
6.	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	The Board of Commissioners supervises the implementation of policies for managing subsidiaries/joint ventures.	100
7.	Dewan komisaris berperan dalam pencalonan anggota direksi, menilai kinerja direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja direksi.	The Board of Commissioners plays a role in nominating members of the Board of Directors, assessing the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposing performance bonuses/incentives under applicable regulations, and taking into account the performance of the Board of Directors.	80
8.	Dewan komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	The Board of Commissioners takes action against potential conflicts of interest involving him.	92
9.	Dewan komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	The Board of Commissioners monitors and ensures that Good Corporate Governance practices have been implemented effectively and sustainably.	90
10.	Dewan komisaris menyelenggarakan rapat dewan komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat dewan komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	The Board of Commissioners holds effective Board of Commissioners meetings and attends Board of Commissioners meetings following statutory provisions.	97
11.	Dewan komisaris memiliki sekretaris dewan komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan dewan komisaris.	The Board of Commissioners has a secretary to the Board of Commissioners to support the secretarial duties of the Board of Commissioners.	97
12.	Dewan komisaris memiliki komite dewan komisaris yang efektif	The Board of Commissioners has an effective Board of Commissioners committee	100

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Selain itu, RUPS melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris secara kolegial berdasarkan Laporan Tugas Pengawasan, realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik aspek Dewan Komisaris. Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Pencapaian KPI tahun 2021 adalah sebagai berikut:

In addition, the GMS evaluates the performance of the Board of Commissioners collegially based on the Supervisory Task Report, the realization of Key Performance Indicators (KPI), and the implementation of Good Corporate Governance aspects of the Board of Commissioners. The performance of the Board of Commissioners based on the 2021 KPI Achievements are as follows:

Realisasi *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris 2021
Realization of Key Performance Indicators of the Board of Commissioners 2021

No.	*Key Performance Indicator*	Formula	Polaritas Polarity	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2021 2021 Target	Nilai Perolehan Acquisition Value		Metode Pengukuran Measurement Method	s/d TW IV as of Quarter 4	
										Realisasi Realization	Nilai Capaian Achievement Value
Dewan Komisaris dengan Direksi **Board of Commissioners with the Board of Directors**					**45**						**43**
1.	*Review* dan Tanggapan atas Rencana Perusahaan Review and Response to the Company's Plan	Pembahasan saran atas RKAP 2021, KPI 2021 dan RJPP (*Review*) serta Revisi RKAP 2021 (apabila ada) Discussion of suggestions on the 2021 ABOP, the 2021 KPI and CLP (Review), as well as the Revised 2021 ABOP (if any)	+	Kali Times	5	2	- 1 kali - 2 kali atau lebih - 1 time - 2 times or more"	4 5 4 5	Jumlah Surat Dewan Komisaris kepada Direksi tentang RKAP 2021, KPI 2021 dan RJPP serta Revisi RKAP 2022 (bila ada) Number of Letters from the Board of Commissioners to the Board of Directors regarding the 2021 ABOP, the 2021 KPI and CLP, as well as the Revised 2021 RKAP (if any)	2	5
		Ukuran waktu tanggapan/*review* terhadap Rencana Perusahaan sesuai dengan *Board Manual* PJB The period of the response/review to the Company Plan in line with PJB's Board Manual	-	Hari Days	3	30	- Diatas 45 hari - 31 s/d 45 hari - 30 hari atau kurang - Over 45 days - 31 to 45 days - 30 days or less	1 2 3 1 2 3	Rata-rata hari Surat Tanggapan Komisaris Utama atas RKAP / RJPP diproses sejak Surat dari Direksi diterima Average days the President Commissioner's Response Letter on ABOP / CLP is processed since the letter from the Board of Directors is received	15	3
2	*Review* dan Tanggapan atas Kinerja Perusahaan Review and Response to the Company's Performance	Pembahasan dan Tanggapan atas: - LM dan KPI Triwulanan 2021 - LM dan KPI Tahun 2020 Discussion and Feedback on: - Quarterly LM and KPI of 2021 - Annual LM and KPI of 2020	+	Kali Times	10	5	- kurang dari 5 kali - 5 kali atau lebih - Less than 5 times - 5 times or more"	8 10 8 10	Jumlah Surat Tanggapan dan Risalah Rapat atas LM Triwulan dan Tahunan Surat Tanggapan berupa Surat dari Sekretaris Dewan Komisaris kepada Sekretaris Perusahaan Number of Response Letters and Minutes of Meeting regarding Quarterly and Annual LM Response Letter from the Secretary of the Board of Commissioners to the Corporate Secretary	2	8

No.	*Key Performance Indicator*	Formula	Polaritas Polarity	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2021 2021 Target	Nilai Perolehan Acquisition Value	Metode Pengukuran Measurement Method	s/d TW IV as of Quarter 4	
									Realisasi Realization	Nilai Capaian Achievement Value
3	Review tindak *lanjut* hasil/ temuan audit internal/eksternal Follow-up on internal/external audit's findings	Pembahasan dan Tanggapan/ saran atas Laporan Pemeriksaan internal dan *monitoring* Tindak Lanjut Temuan auditor eksternal Discussion and Feedback/suggestions on the Internal Audit Report and follow-up monitoring of the external auditor's findings	+	Kali Times	7	4	- kurang dari 4 kali 5 - 4 kali atau lebih 7 - Less than 4 times 5 - 4 times or more 7	Jumlah surat tanggapan dan risalah rapat dari Ketua Komite Audit kepada Kepala SPI Jumlah Pembahasan dan /atau Tanggapan atas Laporan Pemeriksaan Number of Response Letters and Minutes of Meeting from the Chairman of the Audit Committee to the Head of IAU Number of Discussions and/or Responses to the Audit Report	4	7
4	Memberi Tanggapan tertulis/ Persetujuan/nasehat/ saran terkait rencana strategis Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Written responses/ approvals/ recommendations/suggestions regarding the Company's strategic plans that require the approval of the Board of Commissioners	Pembahasan dan pemberian tanggapan tertulis/persetujuan atas permintaan Direksi (setelah data lengkap) Discussion and submission of written responses/approvals at the request of the Board of Directors (after the data has been completed)	-	Hari Days	20	14	- diatas 30 hari 10 - 15 s/d 30 hari 15 - 14 hari atau kurang 20 - More than 30 days 10 - 15 to 30 days 15 - 14 days or less 20	Rata-rata hari Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Direksi diproses sejak surat dari Direksi diterima Average days the Board of Commissioners' Response Letter to the Board of Directors' proposal to be processed after receiving from the Board of Directors	14	20
Dewan Komisaris Dengan RUPS Board of Commissioners with GMS					**20**					**18**
5.	Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahunan Submitting the Annual Work Program and KPI of the Board of Commissioners	Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2022 The Board of Commissioners' 2022 Work Plan and KPIs	+	Dokumen Document	4	1	1 dokumen 1 document 4	Jumlah dokumen rencana kerja dan KPI Dewan Komisaris Number of work plan documents and KPI for the Board of Commissioners	1	4
		Ketepatan waktu penyampaian Submission time	+	Hari Days	2	15	- 1 s/d 14 hari sebelum RUPS RKAP 1 - 15 hari atau lebih sebelum RUPS RKAP 2 - 1 to 14 days before the GMS on ABOP 1 - 15 days or more before the GMS on ABOP 2	Lama hari program kerja Dewan Komisaris dikirim sebelum RUPS RKAP Days for the work program of the Board of Commissioners to be submitted before the GMS on ABOP	20	2

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No.	*Key Performance Indicator*	Formula	Polaritas Polarity	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2021 2021 Target	Nilai Perolehan Acquisition Value	Metode Pengukuran Measurement Method	s/d TW IV as of Quarter 4	
									Realisasi Realization	Nilai Capaian Achievement Value
6.	Menyampaikan pendapat/usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS Submitting the opinion/ suggestion of the Board of Commissioners to the Shareholders/ GMS	Pendapat atas : - RJP/Review RJP jika ada (setelah TW I) - RKAP 2022 (sebelum RUPS RKAP) - LM & KPI 2021 (sebelum RUPS LPT) Menyampaikan : - usulan remunerasi tahun buku 2020 (sebelum RUPS LPT) Suggestions on: - LTP/LTP Review if any (after Q 1) - 2022 ABOP (before the GMS on ABOP) - 2021 LM & KPI (before the GMS on LPT) Submission of: - Proposed remuneration for the 2020 Fiscal Year (before the GMS on LPT)	+	Kali Times	3	3	- kurang dari 3 pendapat/ usul 2 - 3 pendapat/ usul atau lebih 3 - Less than 3 opinions/ suggestions 2 - 3 opinions/ suggestions or more 3	Jumlah surat Dewan Komisaris kepada RUPS tentang RJP, RKAP dan LM Number of letters from the Board of Commissioners to the GMS regarding LTP, CLP, and LM	2	2
		Ketepatan waktu penyampaian Submission time	+	Hari Days	2	15	- 1 s/d 14 hari sebelum RUPS 1 - 15 hari atau lebih sebelum RUPS 2 - 1 to 14 days before the GMS 1 - 15 days or more before the GMS 2	Lama hari penyampaian pendapat Dewan Komisaris dikirim sebelum RUPS RKAP Days for the submission of the opinion of the Board of Commissioners to be submitted before the GMS on ABOP	6	1
7.	Menyampaikan Laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris Submitting a Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners	Laporan terdiri atas: 1. Laporan Pengawasan Tahun 2020 2. Laporan Pengawasan Sem 1 Thn 2021 3. Laporan Pengawasan Sem 2 Thn 2021 The report consists of: 1. 2020 Monitoring Report 2. Monitoring Report of Semester 1 -2021 3. Monitoring Report of Semester 2 -2021	+	Laporan Report	4	2	- 1 laporan 2 - 2 laporan 4 - 1 report 2 - 2 reports 4	Jumlah surat Dewan Komisaris kepada RUPS tentang Laporan Pengawasan Number of letters from the Board of Commissioners to the GMS regarding the Supervisory Report	2	4
		Ketepatan waktu penyampaian: - Laporan Pengawasan Tahun 2021 Submission time: - Monitoring Report of 2021	+	Hari Days	3	15	- 1 s/d 14 hari sebelum RUPS LPT 2 - 15 hari atau lebih sebelum RUPS LPT 3 - 1 to 14days before the GMS on LPT 2 - 15 days or more before the GMS on LPT 3	Lama hari Laporan Pengawasan Tahun 2021 Dewan Komisaris dikirim sebelum RUPS RKAP Days for the 2021 Supervisory Report of the Board of Commissioners to be submitted before the GMS on ABOP	14	3

No.	*Key Performance Indicator*	Formula	Polaritas Polarity	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2021 2021 Target	Nilai Perolehan Acquisition Value		Metode Pengukuran Measurement Method	s/d TW IV as of Quarter 4	
										Realisasi Realization	Nilai Capaian Achievement Value
		- Laporan Pengawasan Semester I - 2021 - Supervisory Report of Semester 1 - 2021		Hari Days	2	30	- lebih dari 30 hari sejak akhir periode - 30 hari sejak akhir periode atau kurang - More than 30 days after the end of the period - 30 days after the end of the period or less	1 2 1 2	Lama hari Laporan Pengawasan Semester I Tahun 2021 Dewan Komisaris dikirim sebelum akhir periode Days for the Supervisory Report of Semester 1 of 2021 by the Board of Commissioners to be submitted before the end of the period	14	2
Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners					**35**						**35**
8	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	Rapat Dewan Komisaris terdiri dari: Rapat Internal (RID) dan Rapat Pengawasan dengan Direksi (RDD) Board of Commissioners meetings consist of Internal Meetings (RID) and Supervisory Meetings with the Board of Directors (RDD)	+	Frekuensi Frequency	20	24	- kurang dari 15 kali - 15 s/d 23 kali - 24 kali lebih - Less than 15 times - 15 to 23 times - 24 times or more	15 20 25 15 20 25	Jumlah RID dan RDD selama 1 tahun Total RID and RDD in 1 year	24	20
9	Kajian Komite Committee Review	Kajian / Usulan solusi permasalahan yang dihadapi di PJB atau Unit Kerja Study/Proposed solutions to issues faced at PJB or Work Units	+	Frekuensi Frequency	5	4	- kurang dari 2 kajian - 3 kajian - 3 kajian atau lebih - Less than 2 reviews - 3 reviews - 3 reviews or more	2 4 5 2 4 5	Jumlah kajian minimal 3 buah Minimum number is 3 studies	4	5
10	Pengenalan/ Induksi/ Peningkatan Kompetensi Induction/ Competency Development	- Mengikuti seminar/ workshop - Induksi jika ada komisaris baru - Seminar/workshop participation - Induction program for new commissioners	+	Frekuensi Frequency	5	3	- kurang dari 3 kali - 3 kali atau lebih - Less than 3 times - 3 times or more	3 5 3 5	Jumlah seminar/ *workshop* yang diikuti komisaris Number of seminars/ workshops attended by commissioners	3	5
11	Pengelolaan GCG GCG Management	Pencapaian skor asesmen GCG aspek Dewan Komisaris Tahun 2021 Achieved scores of GCG assessment in the aspect of the Board of Commissioners in 2021	+	Skor Score	5	>90	- Dibawah 90 - 90 atau lebih - Below 90 - 90 or above	3 5 3 5	Skor asesmen GCG aspek Dewan Komisaris GCG assessment score for the Board of Commissioners	>90	5

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi secara kolektif memimpin jalannya fungsi pengelolaan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan. Setiap anggota Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, bertindak secara cermat, hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan serta menggunakan wewenang, sumber daya yang dimiliki semata-mata untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang PJB dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Direksi berupaya menjalankan peran kepemimpinannya dan tata kelola yang baik sehingga PJB menjadi entitas bisnis yang berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang, beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis, berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh.

The Board of Directors collectively leads the management function of the Company following the Company's Articles of Association. Each member of the Board of Directors performs their duties in good faith and full of responsibility, acts carefully and prudently, and considers various important relevant aspects by their authority and resources solely to create sustainable value for the long-term interests of PJB and shareholders on behalf of the interests of stakeholders. The Board of Directors strives to carry out its leadership role and good governance so that PJB becomes a competitive business entity and focuses on long-term performance, is ethical and responsible in running the business, contributing positively to society and the environment; and the ability to survive and grow.

Komposisi Direksi
Composition of the Board of Directors

Komposisi Direksi sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan PJB ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS. Anggota Direksi PJB telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham setelah melalui proses penjaringan dan seleksi. Direksi PJB berjumlah 6 (enam) orang dan mengalami perubahan komposisi pada periode Januari sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors as the organ that carries out the PJB management function is determined by the Shareholders through the resolution of the GMS. Members of the Board of Directors of PJB have been declared to have passed the fit and proper test by PT PLN (Persero) as the Shareholder after going through the screening and selection process. The Board of Directors of PJB consists of 6 (six) people and the composition changes from January to December 2021 as follows:

Komposisi Direksi Tahun 2021
Composition of the Board of Directors in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment
Sugiyanto[2]	Plt. Direktur Utama Acting President Director	Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Nomor 010.K/DK-PJB/2020 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Sementara Direktur Utama PT PJB tanggal 8 Desember 2020 Decision of the Board of Commissioners outside the Meeting Number 010.K/DK-PJB/2020 concerning the Appointment of the Temporary Acting President Director of PT PJB on December 8, 2020.
	Direktur Operasi- 1 Director of Operations-1	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 10 Agustus 2017 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020 Circular GMS Resolution regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on August 10, 2017 jo. Circular GMS Resolution regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on November 12, 2020.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment
Gong Matua Hasibuan[1]	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 19 Februari 2021. Circular GMS decision regarding the appointment of members of the Board of Directors of PT PJB on February 19, 2021.
M. Yossy Noval A.[2]	Direktur Operasi- 1 Director of Operations-1	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 23 April 2021. Decision of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT PJB on April 23, 2021.
Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi - 2 Director of Operations-2	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 15 Juli 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020. Circular GMS Decision regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on July 15, 2020 jo. Circular GMS Resolution regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on November 12, 2020.
Iwan Purwana	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020. Decision of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on June 12, 2020 jo. Circular GMS Resolution regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on November 12, 2020.
R Rawan Insani	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020. Decision of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on June 12, 2020 jo. Circular GMS Resolution regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on November 12, 2020.
Karyawan Aji	Direktur SDM dan Administrasi Director of HC and Administration	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020. Decision of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on June 12, 2020 jo. Circular GMS Resolution regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on November 12, 2020.

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 19 Februari 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama
2. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sugiyanto sebagai Direktur Operasi – 1 serta mengangkat dan menetapkan Sdr. M. Yossy Noval A. sebagai Direktur Direktur Operasi - 1.

Information:
1. Circular GMS on 19 February 2021, appointed and determined Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director.
2. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Sugiyanto as Director of Operations – 1 and appointed and appointed Mr. M. Yossy Noval A. as Director of Operations - 1.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan
Declaration of Independence and Potential Conflict of Interest

Direksi berupaya menjaga independensi dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Perusahaan semata-mata demi kepentingan PJB. Anggota Direksi tidak berwenang mengambil keputusan dan mewakili Perusahaan apabila yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Oleh karena itu, Anggota Direksi Perusahaan membuat Pakta Integritas dan menyampaikan kepada Perusahaan terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga di Perusahaan dan perusahaan lainnya.

Setiap anggota Direksi Perusahaan telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan untuk bersikap independen dan bebas benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya setiap tahun dengan menyebutkan bahwa:

1. Akan melaksanakan tugas dan wewenang maupun pengembangan karir serta mengambil keputusan dalam keadaan mandiri, tidak berada di bawah tekanan dan/atau bebas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun termasuk tidak terbatas pada intervensi dari partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*independency*).
2. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya oleh karenanya tidak akan menyalahgunakan kewenangan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pihak manapun termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan pribadi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*duty care and loyalty*).
3. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan, tanpa ada kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait, atau pihak yang terafiliasi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (*conflict of interest*).
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan meminta, tidak akan menawarkan/tidak menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah, upeti, suap, sogok, gratifikasi apapun dan/atau bentuk imbalan lainnya yang bukan menjadi hak secara sah dan secara hukum dari pihak manapun.

The Board of Directors strives to maintain independence in carrying out the Company's management functions solely for the benefit of PJB. Members of the Board of Directors are not authorized to make decisions and represent the Company if they have a conflict of interest with the Company. Therefore, Members of the Company's Board of Directors make an Integrity Pact and submit to the Company regarding personal and family ownership of shares in the Company and other companies.

Each member of the Company's Board of Directors has signed an Integrity Pact as a form of statement to be independent and free of conflicts of interest in carrying out their functions and duties every year by stating that:

1. Will carry out duties and authority as well as career development and make decisions independently, not under pressure, and/or free from influence or intervention from any party, including but not limited to intervention from political parties, groups, or certain groups (independency).
2. Will carry out duties and authorities and make decisions by prioritizing the interests of the Company above other interests and therefore will not abuse the authority of office, either directly or indirectly, for the benefit of any party including but not limited to personal interests, political parties, groups or certain groups (duty care and loyalty).
3. Will carry out his/her duties and authorities and make decisions, without any personal interest or purpose to do something for his/her benefit, or to benefit the related parties, affiliated parties, political parties, groups, or certain groups (conflict of interest).
4. In carrying out the duties and authorities as well as in making decisions, will not ask for, will not offer/not promise to give/receive gifts, tributes, bribes, kickbacks, gratuities of any kind, and/or other forms of compensation that are not legally and legally entitled law from any party.

5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik yang secara langsung maupun tidak langsung.
6. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam penetapan harga pembelian, pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan.
7. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan pemahaman/penugasan yang cukup tentang berbagai ketentuan dan peraturan yang terkait (*prudent person role*), dan mematuhi serta melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*duty abaiding the laws*).

5. In carrying out duties and authorities as well as in making decisions, will not practice corruption, collusion, and nepotism (KKN), either directly or indirectly.
6. In carrying out the duties and authorities as well as in making decisions, will not take actions that result in irregularities in determining the purchase price, waste, and leakage of company finances.
7. Will carry out duties and authorities and make decisions with sufficient understanding/assignment regarding various relevant provisions and regulations (prudent person role), and comply with and implement all applicable laws and regulations (duty abiding the laws).

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan
Declaration of Independence and Potential Conflict of Interest

Nama Name	Penandatanganan Pakta Integritas Integrity Pact Signing
Sugiyanto[2]	Pernyataan telah ditandatangani pada bulan September 2020 The statement was signed in September 2020
Gong Matua Hasibuan[1]	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
M. Yossy Noval A.[2]	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
Rachmanoe Indarto	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
Iwan Purwana	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
R Rawan Insani	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021
Karyawan Aji	Pernyataan telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2021 The statement was signed on May 4, 2021

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 19 Februari 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sugiyanto sebagai Direktur Operasi – 1 serta mengangkat dan menetapkan Sdr. M. Yossy Noval A. sebagai Direktur Direktur Operasi - 1.

Information:
1. Circular GMS on 19 February 2021, appointed and determined Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director.
2. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Sugiyanto as Director of Operations – 1 and appointed and appointed Mr. M. Yossy Noval A. as Director of Operations - 1.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Kepemilikan Saham Anggota Direksi beserta keluarga
Share Ownership by Members of the Board of Directors and Their Relatives

Nama Nama	Kepemilikan Saham oleh Pribadi Personal Share Ownership		Kepemilikan saham oleh keluarga Relative's Share Ownership	
	Di perusahaan In the Company	Di perusahaan lain In another company	Di perusahaan In the Company	Di perusahaan lain In another company
Sugiyanto[2]	-	-	-	-
Gong Matua Hasibuan[1]	-	-	-	-
M. Yossy Noval A.[2]	-	-	-	-
Rachmanoe Indarto	-	-	-	-
Iwan Purwana	-	-	-	-
R Rawan Insani	-	-	-	-
Karyawan Aji	-	-	-	-

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 19 Februari 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sugiyanto sebagai Direktur Operasi – 1 serta mengangkat dan menetapkan Sdr. M. Yossy Noval A. sebagai Direktur Direktur Operasi - 1.

Information:
1. Circular GMS on 19 February 2021, appointed and determined Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director.
2. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Sugiyanto as Director of Operations – 1 and appointed and appointed Mr. M. Yossy Noval A. as Director of Operations - 1.

Pedoman Kerja Direksi
Board of Directors Manual

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi telah didukung dengan pedoman kerja internal yaitu *Board of Directors Manual* (BoD *Manual*) sebagai bagian tidak terpisahkan dari *Board Manual* dan mengacu pada Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. BoD *Manual* disusun sejak tahun 2013 dalam bentuk Tata Laksana Kerja Direksi. Tata Laksana Kerja Direksi kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 030.K/020/DIR/2014 tanggal 30 Desember 2014. Muatan BoD Manual merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Board Manual* yang bersifat teknis pelaksanaan kerja organ Direksi. Ketentuan terkait fungsi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi yang diatur dalam *Board Manual,* antara lain:

1. Ketentuan Umum Direktur;
2. Tugas Dan Wewenang Direksi;
3. Hak Dan Kewajiban Direksi;
4. Rapat Direksi;

The implementation of the Company's management function by the Board of Directors has been supported by internal work guidelines, namely the Board of Directors Manual (BoD Manual) as an integral part of the Board Manual and refers to the Articles of Association and applicable laws and regulations. The BoD Manual has been prepared since 2013 in the form of a Board of Directors Work Procedure. The Board of Directors' Work Procedure was then determined based on the Board of Directors' Decree Number: 030.K/020/DIR/2014 on December 30, 2014. The contents of the BoD Manual are a further elaboration of the Board Manual which is technical in nature of the work of the Board of Directors' organs. Provisions related to the Company's management function by the Board of Directors are regulated in the Board Manual, including:

1. General Provisions of the Director;
2. Duties and Authorities of the Board of Directors;
3. Rights and Obligations of the Board of Directors;
4. Board of Directors meeting;

5. Sekretaris Perusahaan;
6. Satuan Pengawasan Intern;
7. Hubungan Dengan Anak Perusahaan & Perusahaan Afiliasi.

Ketentuan dalam *Board Manual* terkait fungsi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi yang dijabarkan lebih lanjut dalam BoD *Manual* sebagai berikut:

1. Tata Laksana Kerja terkait Jabatan;
2. Tata Laksana Kerja terkait Batas Kewenangan;
3. Tata Laksana Kerja terkait Pelaksanaan Operasional Perusahaan;
4. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris.

5. Corporate Secretary;
6. Internal Control Unit;
7. Relationships with Subsidiaries & Affiliated Companies.

The provisions in the Board Manual regarding the function of managing the Company by the Board of Directors are further elaborated in the BoD Manual as follows:

1. The Board Manual related to Position;
2. The Board Manual related to the Limits of Authority;
3. The Board Manual related to the Company's Operational Implementation;
4. Workflow on the Authority of the Board of Directors which requires approval from the Board of Commissioners and the authority of the Board of Directors which requires approval of the GMS after obtaining a written response from the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PJB dan diuraikan lebih jelas dalam *Board Manual* serta BoD Manual yang secara umum untuk memimpin dan melaksanakan fungsi pengelolaan Perusahaan berdasarkan perinsip-prinsip CGC. Fungsi pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses binis Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham. Tujuan Perusahaan dituangkan dalam Visi dan Misi Perusahaan yang dicapai dengan mewujudkan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun Direksi atas persetujuan Pemegang Saham.

The Board of Directors carries out their duties and responsibilities as stipulated in PJB's Articles of Association and is described more clearly in the Board Manual and the BoD Manual which are generally to lead and carry out the management functions of the Company based on CGC principles. The Company's management function carried out by the Board of Directors aims to ensure the effectiveness of the implementation of the Company's policies and business processes following the Company's objectives and the direction of the Shareholders. The Company's objectives are stated in the Company's Vision and Mission which are achieved by realizing the implementation of the Corporate Long Term Plan (CLP) and Annual Budget and Operational Plan (ABOP) which are prepared by the Board of Directors with the approval of the Shareholders.

Sebagaimana telah diatur dalam *Board Manual* dan BoD *Manual*, tugas dan tanggung jawab Direks sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan dalam Anggaran Dasar. Secara jelas, tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

As regulated in the Board Manual and BoD Manual, the duties and responsibilities of the Board of Directors are under the prevailing laws and regulations and the provisions in the Articles of Association. Generally, the duties and responsibilities of the Board of Directors include:

1. Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities following the aims and objectives as well as its business activities.
2. Prepare on time the Corporate Long-Term Plan, Annual Budget, and Operational Plan, and any amendments thereto and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders for approval by the GMS.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya.
11. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.
14. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Provide an explanation to the GMS regarding the Corporate Long-Term Plan and the Company's Annual Budget and Operational Plan.
4. Make a Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, and Minutes of Meeting of the Board of Directors.
5. Prepare an Annual Report as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents.
6. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit them to Public Accountants for audit.
7. Submitting the Annual Report including Financial Statements to the GMS for approval and approval.
8. Provide an explanation to the GMS regarding the Annual Report.
9. Submitting the Balance Sheet and Profit and Loss Report which has been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights following the provisions of the legislation.
10. Maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of Meeting of the Board of Directors, Annual Report, Company financial documents, and other Company documents.
11. Keep at the domicile of the Company: Register of Shareholders, Special Register, Minutes of Meeting of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, Minutes of Meeting of the Board of Directors, Annual Report, and Company financial documents as well as other Company documents.
12. Develop an accounting system following Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision.
13. Provide periodic reports according to the method and time following applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/ or Shareholders.
14. Prepare the organizational structure of the Company complete with details and duties.
15. Provide an explanation of all matters asked or requested by the Members of the Board of Commissioners and the Shareholders.
16. Carry out other obligations following the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on the laws and regulations.

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Duties Division of Members of the Board of Directors

Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang tetang Perseroan Terbatas. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka hal tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. RUPS dalam menetapkan komposisi Anggota Direksi ditentukan berdasarkan nomenklatur jabatan anggota Direksi yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan. Selain itu, Direksi PJB juga menetapkan pembagian tugas melalui Keputusan Direksi Nomor: 010.P/019/DIR/2019 tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana telah diatur dalam BoD *Manual* PJB. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut:

The division of management duties and authorities among the members of the Board of Directors is determined based on the resolutions of the GMS as stated in the Law on Limited Liability Companies. If the GMS does not determine the division of duties and authorities of the members of the Board of Directors, then it is determined based on the decision of the Board of Directors. The GMS in determining the composition of the members of the Board of Directors is determined based on the nomenclature of the positions of the members of the Board of Directors whose duties and responsibilities are following the Company's organizational structure. In addition, the Board of Directors of PJB also determines the division of tasks through the Decree of the Board of Directors Number: 010.P/019/DIR/2019 on July 16, 2019, as stipulated in the BoD Manual of PJB. The division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is determined as follows:

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Duties Division of Members of the Board of Directors

Nama Position	Tugas & Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
Direktur Utama President Director	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan/perundang undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.	Carry out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company, as well as represent the Company both inside and outside the court regarding all matters and all events with restrictions as stipulated in the regulations/laws, Articles of Association, and / or the decision of the General Meeting of Shareholders.
Direktur Operasi- 1 Director of Operations-1	1. Memastikan pengelolaan Unit Pembangkit untuk memastikan *sustainability maturity* pengelolaan dan kinerja Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1. 2. Memastikan bahwa Unit Pembangkit mampu mencapai sasaran kinerja operasional yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang maupun RKAP dan menjaga kesehatan Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 guna menjamin *sustainability* dan mendukung pertumbuhan Perusahaan. 3. Memastikan pengendalian portofolio kinerja Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 (termasuk kinerja kontrak PPA).	1. Ensure the management of the Generation Unit to ensure the sustainability of the management maturity and performance of the Generation Unit and the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-1. 2. Ensure that the Generation Unit is able to achieve the operational performance targets set out in the Corporate Long Term Plan and ABOP and maintain the health of the Generation Unit and the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-1 to ensure sustainability and support the growth of the Company. 3. Ensure control of the performance portfolio of the Generation Unit and the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-1 (including the performance of PPA contracts).

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Nama Position	Tugas & Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
	4. Memastikan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 agar tingkat kesiapan unit, efisiensi, mutu dan keandalan setara kelas dunia dengan tetap memperhatikan aspek komersial untuk memperoleh harga jual yang kompetitif. 5. Memastikan pengelolaan operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 mengacu pada kaidah *best practices* untuk memastikan peningkatan *performance* pembangkit secara berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 6. Memastikan perencanaan dan pengendalian energi primer pada Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memperhatikan kondisi internal dan kebutuhan/peluang pasar, sekaligus untuk menjamin kelancaran operasi Unit Pembangkitan. 7. Memastikan pengelolaan Lingkungan dan K3 pada seluruh Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 agar memenuhi kaidah/ standar pengelolaan yang baik sesuai dengan pengelolaan standar kelas dunia. 8. Memastikan perencanaan, analisa dan evaluasi penyiapan jadwal pemeliharaan Unit Pembangkitan dan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1 dengan menerapkan sistem "*outage management*" secara optimal. 9. Memastikan pengendalian sistem operasi dan perniagaan ketenagalistrikan, serta pengendalian anggaran dan kontrak jasa O&M dan AMC Pembangkit Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-1.	4. Ensure the planning and control of the operation and maintenance of the Generation Unit and the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-1 so that the level of unit readiness, efficiency, quality and reliability is equivalent to world class while still paying attention to the commercial aspect to obtain a competitive selling price. 5. Ensure the management of the operation and maintenance of the Generation Unit and the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-1 referring to the best practices to ensure a sustainable increase in power plant performance in accordance with the performance targets that have been set. 6. Ensure the planning and control of primary energy in the Generation Unit and the O&M Services Business Unit under the coordination the Director of Operations-1 both in the short and long term by taking into account internal conditions and market needs/opportunities, as well as to ensure the smooth operation of the Generation Unit. 7. Ensuring Environmental and OHS management in all Generation Units and O&M Services Business Units under the coordination of the Director of Operations-1 in order to meet good management rules/standards in accordance with world-class management standards. 8. Ensure planning, analysis and evaluation of the preparation of the maintenance schedule for the Generation Unit and the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-1 by implementing an optimal "outage management" system. 9. Ensuring control of the operating system and electricity commerce, as well as budget control and O&M and AMC service contracts for the O&M Service Plant under the coordination of the Director of Operations-1.
Direktur Operasi - 2 Director of Operations-2	1. Memastikan pengelolaan Unit Pembangkit untuk memastikan *sustainability maturity* pengelolaan dan kinerja Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2. 2. Memastikan pengendalian portofolio kinerja Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2. 3. Memastikan bahwa Unit Pembangkitan mampu mencapai sasaran kinerja operasional yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang maupun RKAP dan menjaga kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 guna menjamin *sustainability* dan mendukung pertumbuhan Perusahaan.	1. Ensure the management of the Generation Unit to ensure the sustainability of the management maturity and performance of the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-2. 2. Ensure the portfolio control of the performance of the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-2. 3. Ensure that the Generation Unit is able to achieve the operational performance targets set out in the Corporate Long Term Plan and ABOP and maintain the health of the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-2 to ensure sustainability and support the Company's growth.

Nama Position	Tugas & Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
	4. Memastikan perencanaan dan pengendalian operasi & pemeliharaan kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 agar tingkat kesiapan unit, efisiensi, mutu dan keandalan setara kelas dunia dengan tetap memperhatikan aspek komersial untuk memperoleh harga jual yang kompetitif. 5. Memastikan pengelolaan operasi dan pemeliharaan kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 mengacu pada kaidah *best practices* untuk memastikan peningkatan *performance* pembangkit secara berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 6. Memastikan perencanaan dan pengendalian energi primer pada kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memperhatikan kondisi internal dan kebutuhan/peluang pasar. 7. Memastikan pengelolaan Lingkungan dan K3 pada seluruh kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 agar memenuhi kaidah/standar pengelolaan yang baik sesuai dengan pengelolaan standar kelas dunia. 8. Memastikan perencanaan, analisa dan evaluasi penyiapan jadwal pemeliharaan kesehatan Unit Bisnis Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2 dengan menerapkan sistem "*outage management*" secara optimal. 9. Memastikan pengendalian sistem operasi dan perniagaan ketenagalistrikan, serta pengendalian anggaran dan kontrak pengelolaan Jasa O&M dibawah koordinasi Direktorat Operasi-2.	4. Ensure the planning and control of the operation & health maintenance of the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-2 so that the level of unit readiness, efficiency, quality and reliability is equivalent to world class while still paying attention to the commercial aspect to obtain a competitive selling price. 5. Ensure the management of the operation and health maintenance of the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-2, referring to the best practices to ensure a sustainable increase in power plant performance in accordance with the performance targets that have been set. 6. Ensure planning and control of primary energy in the health of the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-2, both in the short and long term by taking into account internal conditions and market needs/opportunities. 7. Ensuring Environmental and OHS management in all O&M Services Business Unit health under the coordination of the Director of Operations-2 in order to meet good management rules/ standards in accordance with world-class management standards. 8. Ensure the planning, analysis and evaluation of the preparation of the health maintenance schedule for the O&M Services Business Unit under the coordination of the Director of Operations-2 by implementing an optimal "outage management" system. 9. Ensuring control of the operating system and electricity commerce, as well as budget control and management contracts for O&M Services under the coordination of the Directorate of Operations-2.
Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	1. Memastikan pengelolaan dan pengembangan Strategi Bisnis dan Pemasaran untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan. 2. Memastikan bahwa bisnis yang dijalankan dan akan dikembangkan mampu mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang maupun RKAP serta mendukung *sustainability* dan menjamin pertumbuhan Perusahaan. 3. Memastikan pengelolaan kegiatan pengembangan bisnis (baik pengembangan aset, pengembangan usaha, pengelolaan IPP) dengan proses kajian rencana dan rancangan pengembangan secara profesional, dalam rangka mendukung *sustainability* pertumbuhan Perusahaan.	1. Ensure the management and development of Business and Marketing Strategy to support the Company's business development. 2. Ensure that the business that is run and will be developed is able to achieve the targets set in the Corporate Long Term Plan and ABOP as well as support sustainability and ensure the growth of the Company. 3. Ensuring the management of business development activities (both asset development, business development, IPP management) with a process of reviewing plans and development plans in a professional manner, in order to support the sustainability of the Company's growth.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Nama Position	Tugas & Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
	4. Memastikan pelaksanaan penyusunan kontrak-kontrak bisnis dapat memenuhi syarat baik secara teknis, komersial dan hukum serta memenuhi kinerja keuangan Perusahaan. 5. Memastikan pengelolaan dan pengendalian proses kegiatan *supply chain* dan *purchasing management*, agar dapat mendukung kelancaran proses bisnis perusahaan. 6. Mengelola bisnis Penunjang Jasa O&M dan Pemanfaatan Aset agar memberikan kontribusi yang optimal bagi pengembangan bisnis Perusahaan. 7. Memastikan semua proyek yang sedang dijalankan Perusahaan terintegrasi dan selaras dengan arah pengembangan bisnis Korporat. 8. Memastikan pengelolaan monitoring dan evaluasi proyek pengembangan bisnis Perusahaan serta berperan sebagai *advisor* dalam penyelesaian segala permasalahan-permasalahan yang berpotensi menghambat proyek.	4. Ensure that the implementation of the preparation of business contracts can meet technical, commercial and legal requirements as well as meet the Company's financial performance. 5. Ensure the management and control of supply chain and purchasing management activities, in order to support the smooth running of the Company's business processes. 6. Manage the O&M Service Support business and Asset Utilization in order to provide an optimal contribution to the Company's business development. 7. Ensure that all projects being run by the Company are integrated and aligned with the direction of Corporate business development. 8. Ensure the management of monitoring and evaluation of the Company's business development projects as well as acting as an advisor in solving all problems that have the potential to hinder the project.
Direktur Keuangan Director of Finance	1. Memastikan tersusunnya pengelolaan anggaran perusahaan dilakukan secara optimal sesuai strategi dan program perusahaan, yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan maupun RKAP. 2. Mengelola perencanaan strategis pendanaan jangka panjang korporat. 3. Memastikan pengelolaan keuangan perusahaan secara optimal guna menjamin likuiditas dalam mendukung kegiatan perusahaan. 4. Memastikan pengelolaan kegiatan akutansi perusahaan sesuai kaidah akutansi yang berlaku. 5. Melakukan *monitoring* terhadap pengelolaan keuangan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, untuk memastikan integrasi dengan kebijakan pengelolaan keuangan PJB secara korporasi. 6. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan perolehan sumber pendanaan termasuk identifikasi penyedia dan ketersediaan sumber pinjaman lokal dan global.	1. Ensure that the Company's budget management is carried out optimally according to the Company's strategies and programs, which are set out in the Corporate Long-Term Plan and ABOP. 2. Manage the strategic planning of corporate long-term funding. 3. Ensure optimal financial management of the Company in order to ensure liquidity to support the Company's activities. 4. Ensure the management of the Company's accounting activities in accordance with applicable accounting rules. 5. Monitoring the financial management of Subsidiaries and Affiliated Companies, to ensure integration with PJB's corporate financial management policies. 6. Ensure the planning, implementation and evaluation of policies and strategies in the management of obtaining funding sources including identification of providers and availability of local and global loan sources.
Direktur SDM dan Administrasi Director of HC and Administration	1. Memastikan pengelolaan *human capital* dan organisasi dilakukan secara optimal dan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang maupun RKAP serta mendukung *sustainability* dan pertumbuhan Perusahaan. 2. Memastikan pengelolaan *human capital* dan pengembangan organisasi untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas. 3. Memastikan pengelolaan administrasi karyawan dan pengelolaan fasilitas kesejahteraan karyawan secara tertib.	1. Ensure that the management of human capital and organization is carried out optimally and achieves the targets set in the Corporate Long Term Plan and ABOP as well as supports the sustainability and growth of the Company. 2. Ensure the management of human capital and organizational development to increase motivation and productivity. 3. Ensure the management of employee administration and management of employee welfare facilities in an orderly manner.

Nama Position	Tugas & Tanggung Jawab	Duties and Responsibilities
	4. Memastikan pengelolaan dan kesiapan human capital di internal Perusahaan, Anak Perusahaan dan keberadaan di Perusahaan Afiliasi, untuk mendukung perkembangan bisnis Perusahaan. 5. Memastikan pengelolaan pengembangan talenta untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan *human capital* selaras dengan kebutuhan perusahaan. 6. Memastikan pengelolaan manajemen perubahan dan budaya perusahaan secara efektif untuk menciptakan lingkungan organisasi yang dinamis dan mampu menjawab tantangan persaingan. 7. Memastikan pengelolaan sistem otomatisasi *Human Capital* untuk mendukung kedinamisan dan keakuratan *database* Sistem Informasi *Human Capital.* 8. Memastikan penyusunan, pengkoordinasian dan evaluasi anggaran biaya fasilitas dan administrasi.	4. Ensure the management and readiness of human capital within the Company, Subsidiaries and presence in Affiliated Companies, to support the Company's business development. 5. Ensure the management of talent development to ensure the availability and readiness of human capital in line with the needs of the Company. 6. Ensure effective management of change management and corporate culture to create a dynamic organizational environment that is able to respond to competitive challenges. 7. Ensure the management of the Human Capital automation system to support the dynamics and accuracy of the Human Capital Information System database. 8. Ensure the preparation, coordination and evaluation of the budget for facilities and administrative costs.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dijalankan sesuai dengan tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan secara tahunan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta *Key Performance Indicators* (KPI). RKAP dan KPI tahun 2021 telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam RUPS tanggal 28 Januari 2021. Direksi telah melakukan inisiatif upaya pencapaian target-target RKAP dan KPI di tahun 2021 sebagai berikut :

The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is carried out in accordance with the Company's objectives that have been determined in the Corporate Long Term Plan (CLP) and is stated annually in the form of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and Key Performance Indicators (KPI). The 2021 ABOP and KPI have been approved by the Board of Commissioners and Shareholders at the GMS on January 28, 2021. The Board of Directors has taken initiatives to achieve the ABOP and KPI targets in 2021 as follows:

Inisiatif Upaya Pencapaian Target RKAP dan KPI di tahun 2021
Initiatives to Achieve ABOP and KPI Targets in 2021

Aspek Aspect	Program Kerja	Work program
Fokus Pelanggan **Customer Focus**	- Menjaga angka *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR).	- Maintain the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR).
Efektifitas Produk dan Proses **Product and Process Effectiveness**	- Menjaga angka *Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit. - Menjaga ketersediaan pasokan batu bara Unit Eksisting dan AMC Jawa Bali. - Menyelesaikan Proyek EBT : PLTS Cirata Terapung. - Mengimplementasikan teknologi digital pada Unit *Power Plant.* - Mengimplementasikan *Co-firing Biomass.*	- Maintain the power plant's Equivalent Availability Factor (EAF) number. - Maintain the availability of coal supply for the Existing Unit and AMC Java Bali. - Completed the NRE Project: Cirata Floating SPP. - Implementing digital technology in the Power Plant Unit. - Implementing Biomass Co-firing.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Aspek Aspect	Program Kerja	Work program
Fokus Tenaga Kerja **Workforce Focus**	- Pengukuran *Human Capital Readiness* (HCR). - Pengukuran *Organization Capital Readiness* (OCR). - Pengukuran produktivitas pegawai. - Pemenuhan *talent pool* dan *talent mobility*	- Measurement of Human Capital Readiness (HCR). - Measurement of Organization Capital Readiness (OCR). - Measurement of employee productivity. - Fulfillment of talent pool and talent mobility
Keuangan dan Pasar **Finance and Markets**	- Pencapaian laba rugi tahun berjalan. - Pencapaian EBITDA. - Efisiensi Biaya Pokok Pembangkit (BPP). - Sinergi dengan Anak Perusahaan lain dan Pusharlis.	- Achievement of profit and loss for the year. - EBITDA achievement. - Power Plant Cost Efficiency (BPP). - Synergy with other Subsidiaries and Pusharlis.
Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan **Leadership, Governance and Community Responsibility**	- Pelaksanaan Penerapan GCG. - Pencapaian *Maturity Level Enterprise Risk Management.* - Pencapaian *Maturity Level* Teknologi Informasi. - Pencapaian PROPER Unit. - Penyelesaian temuan auditor. - Tingkat Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup).	- Implementation of GCG Implementation. - Achievement of Maturity Level Enterprise Risk Management. - Information Technology Maturity Level Achievement. - PROPER Unit Achievement. - Completion of auditor findings. - Level of Compliance with HSE (Health, Safety & Environment).

Selain itu, Direksi juga telah mengeluarkan keputusan sepanjang tahun 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perusahaan berdasarkan aspek dan program kerja Direksi sebanyak 26 keputusan.

In addition, the Board of Directors has also issued decisions throughout 2021 relating to the implementation of the duties and responsibilities of managing the Company based on the aspects and work programs of the Board of Directors as many as 26 decisions.

Rapat Direksi
Board of Directors Meeting

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta pengambilan keputusan secara kolegial terkait fungsi pengelolaan Perusahaan melalui mekanisme Rapat Internal Direksi. Selain itu, dalam rangkan pelaporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan salah satunya dilakukan melalui Rapat Pengawasan Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. Direksi juga dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan mengundang Dewan Komisaris. Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan sebagaimana diatur dalam *Board Manual* PJB. Dalam pelaksanaannya, Direksi mengupayakan agar Rapat diselenggarakan minimal satu kali dalam satu minggu. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu serta bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan.

The Board of Directors carries out the duties and responsibilities as well as collegially making decisions related to the Company's management functions through the mechanism of the Board of Directors' Internal Meeting. In addition, in the context of reporting to the Board of Commissioners on the implementation of the Company's management functions, one of which is carried out through the Supervisory Meeting of the Board of Commissioners which is attended by the Board of Directors. The Board of Directors may also hold a Consultation Meeting by inviting the Board of Commissioners. Meetings of the Board of Directors are held whenever deemed necessary, but at least once a month as stipulated in the PJB Board Manual. In practice, the Board of Directors strives for the Meeting to be held at least once a week. Meetings of the Board of Directors may be held outside of the regular schedule, if deemed necessary and immediately and strategically, with an agenda of matters requiring decision making.

Rencana rapat Direksi disusun sebelum tahun berjalan yang membahas agenda rutin dan agenda non rutin (lain-lain). Agenda rutin terdiri dari Laporan Kondisi Pasar, Posisi PJB dan Laporan Manajemen. Agenda non rutin (lain-lain) adalah hal-hal diluar agenda rutin yang perlu dibahas sebagai laporan kepada Direksi maupun memerlukan persetujuan Direksi atau pembahasan atas arahan/keputusan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. Direksi telah melaksanakan 49 kali Rapat Internal Direksi selama tahun 2021, dengan agenda dan tingkat kehadiran Direksi adalah sebagai berikut:

The Board of Directors meeting plan is prepared before the current year which discusses the routine agenda and non-routine agenda (others). The routine agenda consists of Market Condition Reports, PJB Positions and Management Reports. Non-routine (other) agendas are matters outside the routine agenda that need to be discussed as a report to the Board of Directors or require the approval of the Board of Directors or discussion on the direction/decision of the Board of Commissioners and/or GMS. The Board of Directors held 49 Internal Meetings of the Board of Directors in 2021, with the agenda and attendance ratio as follows:

Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2021
2021 Internal Meeting of the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participant
1	7 Januari 2021 January 7, 2021	1. Laporan Kondisi Energi Primer Triwulan I. 2. *Update* RKAP 2021. 3. Laporan Progres *Quick Wins.* 4. Laporan dan *Monitoring* Likuiditas Keuangan RE.	1. Quarter I Primary Energy Condition Report. 2. The 2021 ABOP Update. 3. Quick Wins Progress Report. 4. RE Financial Liquidity Report and Monitoring	Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
2	14 Januari 2021 January 14, 2021	Persetujuan Usulan KPI 2021.	Approval of the 2021 KPI Proposal.	Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
3	27 Januari 2021 January 27, 2021	1. Rencana pengadaan batubara UP Paiton. 2. Usulan Arahan Pemegang Saham 2021. 3. Usulan KPI Anak Perusahaan 2021.	1. Coal procurement plan for Paiton GU. 2. Proposed Directives of Shareholders 2021. 3. Proposed Subsidiary KPI 2021.	Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
4	4 Februari 2021 February 4, 2021	1. Laporan Persiapan Rapat Kerja 2021. 2. PJB *Super Apps* (PJB Access). 3. *Digital Power Plant.* 4. Relokasi PLTG MTW Blok 5. 5. Proyek PLTS Pulau Tersebar. 6. AMC Pembangkit Sumatera. 7. Laporan Hasil Konsultansi PT RE	1. Report on the Preparation of the 2021 Work Meeting. 2. PJB Super Apps (PJB Access). 3. Digital Power Plant. 4. Relocation of GTPP MTW Block 5. 5. SPP Project in Pulau Tersebar. 6. Sumatera Power Plant AMC. 7. PT RE Consultancy Result Report.	Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, R Rawan Insani, Karyawan Aji
5	11 Februari 2021 February 11, 2021	1. Usulan *Draft Quick Wins* 2021. 2. Usulan Keikutsertaan PJB dalam Jasa Pendampingan Pengadaan *Hot Parts* PLTGU Tanjung Uncang – PLN Batam. 3. Laporan Pengembangan Bisnis SPKLU. 4. Laporan Pengembangan Bisnis PV *Rooftop.* 5. Laporan Pengembangan Bisnis *Digital Analytic.*	1. Proposed Draft Quick Wins 2021. 2. Proposed PJB Participation in Assistance Services for Procurement of Hot Parts for Tanjung Uncang CCPP – PLN Batam. 3. Public Electric Vehicle Charging Station Business Development Report. 4. Rooftop PV Business Development Report. 5. Digital Analytics Business Development Report.	Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participant
6	19 Februari 2021 February 19, 2021	1. Laporan Persiapan Rapat Kerja 2021. 2. Usulan Program *Quick Wins* 2021.	1. Report on the Preparation of the 2021 Work Meeting. 2. Proposed Quick Wins 2021 Program.	Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
7	25 Februari 2021 February 25, 2021	1. Laporan Skema Bisnis PV *Rooftop*. 2. Laporan Kondisi Pasar. 3. Laporan Kinerja Januari 2021. 4. Laporan Progres Pengembangan Usaha.	1. Rooftop PV Business Schematic Report. 2. Market Condition Report. 3. January 2021 Performance Report. 4. Business Development Progress Report.	Gong Matua Hasibuan, Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
8	18 Maret 2021 March 18, 2021	Pembahasan Merger atau Akuisisi SKP, RE dan REC.	Discussion on the Merger or Acquisition of SKP, RE and REC.	Gong Matua Hasibuan, Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
9	25 Maret 2021 March 25, 2021	1. *Cofiring* Unit Eksisting & UBJOM. 2. Laporan *Quick Wins*. 3. Persiapan RDD Pengawasan.	1. Cofiring of Existing Unit & OMSBU. 2. Quick Wins Report. 3. Preparation of Supervision RDD.	Gong Matua Hasibuan, Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
10	9 April 2021 April 9, 2021	*Re-Focusing* Bisnis MRO.	Re-Focusing MRO Business.	Gong Matua Hasibuan, Sugiyanto, Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
11	20 Mei 2021 May 20, 2021	Usulan Keputusan Pengadaan Batubara GAR 4100 UP Paiton.	Proposed Coal Procurement Decision GAR 4100 Paiton GU.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
12	27 Mei 2021 May 27, 2021	1. KPI Direksi. 2. Laporan Kondisi Pasar April 2021. 3. Laporan Kinerja Korporat April 2021. 4. Persiapan RUPS LPT 2020 (Laporan Keuangan).	1. KPI for the Board of Directors. 2. Market Condition Report April 2021. 3. Corporate Performance Report April 2021. 4. Preparation of the 2020 LPT GMS (Financial Report).	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
13	10 Juni 2021 June 10, 2021	1. Laporan Persiapan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI. 2. Laporan Persiapan *Go Live Cofiring.* 3. Penyampaian Usulan Riset *Smart Grid Virtual Power Plant.*	1. Report on the Preparation of a Specific Site Visit for Commission VII DPR RI. 2. Go Live of Co-firing Preparation Report. 3. Submission of the Smart Grid Virtual Power Plant Research Proposal.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
14	18 Juni 2021 June 18, 2021	1. Materi Tayang RUPS LPT 2020. 2. Materi Tayang *Performance Business Review.*	1. Materials for the 2020 LPT GMS. 2. Performance Business Review Material.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participant
15	23 Juni 2021 June 23, 2021	Penyampaian Rancangan Usulan RKAP 2022.	Submission of the 2022 ABOP Proposed Draft.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
16	25 Juni 2021 June 25, 2021	Penyampaian Usulan Keikutsertaan PJB dalam. Proyek *Technical Supporting Partner* O&M Nigeria.	Submission of PJB Participation Proposals in. Nigerian O&M Technical Supporting Partner Project.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
17	1 Juli 2021 July 1, 2021	1. Pemaparan Prosedur Baku Inkubasi dan Komersialisasi Ide Inovasi. 2. Penyampaian Arahan Pemegang Saham dalam RUPS.	1. Exposure to Standard Incubation Procedures and. Commercialization of Innovation Ideas. 2. Submission of Directions to Shareholders in the GMS.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
18	8 Juli 2021 July 8, 2021	Laporan Rencana *Kick Off* Pengembangan. Standarisasi Produk 2.0 Model 1 dan Model 2.	Development Kick Off Plan Report. Product Standardization 2.0 Model 1 and Model 2.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
19	18 Juli 2021 July 18, 2021	Materi Tayang *Performance Business Review.*	Performance Business Review Material.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
20	21 Juli 2021 July 21, 2021	Usulan Inovasi Strategis untuk Diikutsertakan dalam SPKI PLN 2021.	Proposed Strategic Innovations to be Included in the 2021 PLN SPKI.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
21	23 Juli 2021 July 23, 2021	Laporan & Usulan Pengadaaan Batubara *Spot.*	Spot Coal Procurement Report & Proposal.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
22	28 Juli 2021 July 28, 2021	1. Matriks Pembagian Kewenangan Direksi. 2. Batasan MoU PJB dengan Pihak Ketiga. 3. Laporan Kinerja Korporat Bulan Juni 2021. 4. Laporan Penugasan Pengembangan Usaha.	1. Matrix of Authority Distribution of the Board of Directors. 2. Limitation of PJB's MoU with Third Parties. 3. Corporate Performance Report for June 2021. 4. Business Development Assignment Report.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
23	2 Agustus 2021 August 2, 2021	1. Penyampaian Fasilitas *Non Cash Loan* (NCL) Perbankan. 2. Dukungan PJB atas *First Amendment Agreement* (FAA) Dokumen PLTS Cirata.	1. Submission of Non-Cash Loan (NCL) Banking Facilities. 2. PJB's support for the First Amendment. Agreement (FAA) Cirata SPP Document.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participant
24	6 Agustus 2021 August 6, 2021	1. Kelanjutan *Subscription* REMDO. 2. PLTH Pulau Simeulue, Aceh & PLTS Tanjung Redeb, Kalimantan Timur.	1. Continuation of REMDO subscription. 2. Pulau Simeulue Hybrid Power Plant, Aceh & Tanjung Redeb SPP, East Kalimantan.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
25	10 Agustus 2021 August 10, 2021	1. Kelanjutan *Subscription* REMDO. 2. Fasilitas Kartu Kredit Korporat. 3. Konsultasi Penandatangan MoU dengan TNB.	1. Continuation of REMDO subscription. 2. Corporate Credit Card Facility. 3. Consultation on the signing of the MoU with TNB.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
26	19 Agustus 2021 August 19, 2021	1. Program Penghijauan UP Brantas dan UP Cirata untuk Mendukung *Cofiring*. 2. Usulan Lokasi Baru Kantor Perwakilan.	1. Reforestation Program for Brantas GU and Cirata GU to Support Co-firing. 2. Proposed New Location of Representative Office.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
27	26 Agustus 2021 August 26, 2021	Pembahasan Penawaran Saham PT NII oleh Pemegang Saham Minoritas.	Discussion of PT NII's Share Offering by Minority Shareholders.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
28	30 Agustus 2021 August 30, 2021	Tindak Lanjut Penawaran Sahama PT NII oleh Pemegang Saham Minoritas.	Tindak Lanjut Penawaran Sahama PT NII oleh Pemegang Saham Minoritas.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
29	1 September 2021 September 1, 2021	1. Progres *Streamline Subsidiary*. 2. Laporan Progres Alih Aset PLTU, PLTGU, dan PLTA PLN ke PJB.	1. Subsidiary Streamline Progress. 2. Progress Report on Asset Transfer of CFPP, CCPP, and HPP of PLN to PJB.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
30	2 September 2021 September 2, 2021	1. Usulan Rangkaian Acara HUT PJB ke-26. 2. Penetapan Peraturan Direksi tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan PT PJB.	1. Proposed Series of Events for the 26th PJB Anniversary. 2. Stipulation of the Board of Directors' Regulation concerning the Limitation of PT PJB's Decision-Making Authority.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
31	4 September 2021 September 4, 2021	Rapat Konsultasi Revisi RKAP 2021.	2021 ABOP Revision Consultation Meeting.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
32	9 September 2021 September 9, 2021	1. Permohonan Persetujuan Melakukan MoU Permodelan & *Prototyping* CCS PLTU Batubara. 2. Usulan Kerjasama PJB-Rosatom terkait *Small Modular Reactor Technology*.	1. Application for Approval to Conduct MoU on Modeling & Prototyping of Coal CFPP CCS. 2. Proposed PJB-Rosatom Cooperation related to Small Modular Reactor Technology.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
33	14 September 2021 September 14, 2021	Perubahan Asumsi RKAP 2022.	Changes in the 2022 ABOP Assumptions.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participant
34	15 September 2021 September 15, 2021	1. Persetujuan *Risk Appetite* Perusahaan Tahun 2021. 2. Tindak Lanjut Rencana Relokasi Blok 5 PLTGU Muara Tawar. 3. Tindak Lanjut Pengembangan PLTM Lodoyo 2.	1. Approval of the Company's Risk Appetite for 2021. 2. Follow-up to the Relocation Plan for Block 5 Muara Tawar CCPP. 3. Follow-up to the Lodoyo MHPP 2.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
35	21 September 2021 September 21, 2021	1. Tanda Tangan Elektronik (TTE). 2. Penetapan Dividen PT PJBS.	1. Electronic Signature (TTE). 2. Determination of PT PJBS Dividend.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
36	24 September 2021 September 24, 2021	Tindak Lanjut Penawaran Saham PT NII oleh Pemegang Saham Minoritas.	Follow-up to PT NII's Share Offering by Minority Shareholders.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
37	28 September 2021 September 28, 2021	1. Persiapan RDD Pengawasan. 2. Konsultasi Ekshibisi dan Materi Konferensi PJB CONNECT.	1. Preparation of Supervision RDD. 2. PJB CONNECT Exhibition and Conference Material Consultation.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
38	29 September 2021 September 29, 2021	Pembahasan Bersama Penawaran Saham PT NII.	Joint Discussion on the Offer of PT NII Shares.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
39	30 September 2021 September 30, 2021	Konsultasi Permasalahan Penggunaan Tanah Reklamasi PLTGU Gresik dengan Pelindo III dan Pemkab Gresik.	Consultation on the Use of Reclamation Land for Gresik CCPP with Pelindo III and the Gresik Regency Government.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
40	10 Oktober 2021 October 10, 2021	Konsultasi Proyek Pembangkit dan Skema Pengembangan PLT EBT PJB.	PJB Power Plant Project Consultation and NRE Power Plant Development Scheme.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
41	17 Oktober 2021 October 17, 2021	1. Materi *Performance Business Review* Bulan Oktober 2021. 2. Rapat Terbatas: Penetapan NKO Semester 1 2021.	1. Performance Business Review Material for October 2021. 2. Limited Meeting: Determination of NKO Semester 1 2021.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
42	21 Oktober 2021 October 21, 2021	1. Persetujuan Pemberian Kewenangan kepada PJB untuk Melakukan Audit pada PLNSC. 2. Penggunaan Laba Bersih tahun 2020 PJBS. 3. Konsultasi Tindak Lanjut FGD PLN.	1. Approval of Authorization to PJB to Conduct Audit on PLNSC. 2. Use of 2020 PJBS Net Profit. 3. Follow-up consultation on PLN FGDs.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Peserta Participant
43	25 Oktober 2021 October 25, 2021	1. Pengembangan Tanaman Energu PLTA Cirata untuk biomassa. 2. Laporan Kinerja Korporat September 2021. 3. Laporan Progres Pengembangan Usaha.	1. Development of the Cirata Hydropower Plant Energy Plant for biomass. 2. Corporate Performance Report September 2021. 3. Business Development Progress Report.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
44	28 Oktober 2021 October 28, 2021	Usulan Pengembangan Pembangkit (Hasil Pemetaan RUPTL 2021-2030).	Proposed Power Plant Development (Results of Mapping RUPTL 2021-2030).	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
45	17 November 2021 November 17, 2021	1. Usulan Keputusan Program Pengembangan Tanaman Energi PLTA Cirata untuk Biomassa. 2. Penyampaian Rancangan RKAP Tahun 2022.	1. Proposed Decisions for the Cirata HPP Development Program for Biomass. 2. Submission of the 2022 ABOP Draft.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
46	18 November 2021 November 18, 2021	Laporan dan Rencana Pengadaan Batu Bara *Spot* Tahun 2022.	Spot Coal Procurement Report and Plan for 2022.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
47	25 November 2021 November 25, 2021	Persetujuan Percepatan Implementasi Inisiatif *Quick Win* Tranformasi Portofolio PLN Group *Cluster* A15 dan A16.	Approval for the Acceleration of Implementation of the Quick Win Initiative for PLN Group Cluster A15 and A16 Portfolio Transformation.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
48	9 Desember 2021 December 9, 2021	Laporan Keberlanjutan *Subscription* REMDO Periode November 2021.	REMDO Subscription Sustainability Report November 2021 Period.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji
49	23 Desember 2021 December 23, 2021	1. Laporan Progres Pengembangan Usaha. 2. Laporan *Update* Materi Rancangan RKAP 2022 sebagai Persiapan RUPS.	1. Business Development Progress Report. 2. Update Report on the 2022 ABOP Draft Material as Preparation for the GMS.	Gong Matua Hasibuan, M.Yossy Noval.A , Rachmanoe Indarto, Iwan Purwana, R Rawan Insani, Karyawan Aji

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Tahun 2021
Frequency and Attendance of the Board of Directors in 2021 Meetings

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting		Rapat Pengawasan Oversight Meeting	
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Sugiyanto[2]	10	100%	3	100%
Gong Matua Hasibuan[1]	43	98%	11	100%

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting		Rapat Pengawasan Oversight Meeting	
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
M. Yossy Noval A.[2]	39	100%	9	100%
Rachmanoe Indarto	49	100%	12	100%
Iwan Purwana	48	98%	11	92%
R Rawan Insani	49	100%	12	100%
Karyawan Aji	49	100%	12	100%

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 19 Februari 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama.
2. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sugiyanto sebagai Direktur Operasi – 1 serta mengangkat dan menetapkan Sdr. M. Yossy Noval A. sebagai Direktur Direktur Operasi - 1.

Information:
1. Circular GMS on February 19, 2021, appointed and determined Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director
2. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Sugiyanto as Director of Operations – 1 and appointed and appointed Mr. M. Yossy Noval A. as Director of Operations - 1.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi
Board of Directors Competency Development Program

Sebagai upaya menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait fungsi pengelolaan Perusahaan, Direksi mengikuti Program pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan. Selama tahun 2021, anggota Direksi telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

In an effort to support the implementation of duties and responsibilities related to the Company's management functions, the Board of Directors participates in a development program to increase knowledge and competencies relevant to the Company's business. During 2021, members of the Board of Directors have participated in competency development program activities as described in the description related to Education and Training of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Program Pengenalan Direksi
Board of Directors Induction Program

Program pengenalan (Program Induksi) harus dilaksanakan apabila terdapat anggota Direksi yang baru menjabat sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (*Board of Directors Manual*) dan *Board Manual* PJB. Program pengenalan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Perusahaan yang diperlukan anggota Direksi baru agar dapat bekerja selaras dengan tujuan dan organ Perusahaan lainnya. Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana Program Pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat, mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi:

The Induction Program must be implemented if there are new members of the Board of Directors as stipulated in the Board of Directors Manual and PJB Board Manual. The induction program aims to provide an overview of the Company that new members of the Board of Directors need in order to work in harmony with the objectives and other organs of the Company. The Corporate Secretary as the executor of the Induction Program for the newly appointed Directors, prepares the Induction program materials which include:

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh PJB.
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Implementation of GCG principles by PJB.
2. An overview of the Company with regard to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues.
3. Information relating to the delegated authority, internal audit and external audit, internal control system and policies, including the Audit Committee.
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Program Pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/ Anak Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan PJB dimana program tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2021, terdapat pergantian anggota Direksi dengan diangkatnya Sdr. Gong Matua Hasibuan dan Sdr. M. Yossy Noval A., sehingga dilaksanakan program pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat sebagai berikut:

The Company's Induction program can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company/Subsidiaries and review of documents or other programs deemed in accordance with the PJB where the program is implemented. In 2021, there will be a change in the members of the Board of Directors with the appointment of Mr. Gong Matua Hasibuan and Mr. M. Yossy Noval A., so that the Induction Program for the newly appointed Directors was implemented as follows:

Program Induksi Anggota Dewan Komisaris Baru Tahun 2021
2021 New Board of Directors Induction Program

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda	Anggota Direksi Member of Directors
1	23 Februari 2021 February 23, 2021	1. Paparan KPI Korporat 2021. 2. Update Kondisi Energi Primer.	1. Exposure to Corporate KPI 2021. 2. Update Primary Energy Conditions.	Gong Matua Hasibuan
2	1 Maret 2021 March 1, 2021	1. RJPP PJB. 2. RKAP 2021 PT PJB. 3. Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi. 4. Pengelolaan Organisasi.	1. PJB CLP. 2. PT PJB's ABOP 2021. 3. Management of Subsidiaries and Associated Companies. 4. Organizational Management.	Gong Matua Hasibuan
3	2 Maret 2021 March 2, 2021	Manajemen Aset Pembangkitan (Kinerja Operasi).	Generation Asset Management (Operational Performance).	M. Yossy Noval A.
4	17 Maret 2021 March 17, 2021	Likuiditas dan Laporan Keuangan.	Liquidity and Financial Statements.	M. Yossy Noval A.
5	11 Mei 2021 May 11, 2021	RJPP PJB	PJB CLP	M. Yossy Noval A.
6	23 Juni 2021 June 23, 2021	1. *Good Corporate Governance* (GCG). 2. *Governance, Risk & Compliance* (GRC). 3. *Whistle Blowing System* (WBS). 4. Audit Internal	1. Good Corporate Governance (GCG). 2. Governance, Risk & Compliance (GRC). 3. Whistle Blowing System (WBS). 4. Internal Audit	M. Yossy Noval A.

Penilaian Kinerja Komite–Komite dan Unit Kerja atau Organ Pendukung Tata Kelola dan Pengendalian Internal di Bawah Direksi

Performance Assessment of Committees and Work Units or Corporate Governance and Internal Control Organs under the Board of Directors

Perusahaan mempertimbangkan skala bisnis dan struktur organisasi PJB saat ini dipandang telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka belum diperlukan adanya komite di bawah Direksi. Oleh karena itu, tidak terdapat penilaian atas kinerja komite dibawah Direksi sepanjang tahun 2021.

The Company considers that the current business scale and organizational structure of PJB are considered adequate to support the implementation of the duties of the Board of Directors, so there is no need for a committee under the Board of Directors. Therefore, there is no assessment of the performance of the committees under the Board of Directors in 2021.

Sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan yang ada saat ini, PJB telah memiliki organ pendukung tata kelola dan pengendalian internal yaitu Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan. Direktur Utama secara berkala melakukan penilaian kinerja Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan berdasarkan parameter kriteria Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas. Pelaksanaan tugas organ pendukung tersebut dituangkan ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) yang disepakati sebagai acuan dan ukuran pencapaian target pelaksanaan tugas. Selain itu, penilaian atas pelaksanaan GCG atas organ pendukung tata kelola dan pengendalian internal juga menjadi bagian dalam penilaian penerapan GCG Perusahaan aspek Direksi berdasarkan SK Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2012.

In accordance with the current organizational structure of the Company, PJB already has supporting organs for governance and internal control, namely the Internal Supervision Unit and the Risk & Compliance Management Unit. The President Director periodically evaluates the performance of the Internal Monitoring Unit and the Risk & Compliance Management Unit based on the parameters of the Completeness and Implementation of Tasks criteria. The implementation of the duties of the supporting organs is stated in the agreed Key Performance Indicators (KPI) as a reference and measure of achievement of the target for the implementation of tasks. In addition, the assessment of the implementation of GCG on the supporting organs of governance and internal control is also part of the assessment of the implementation of the Company's GCG aspects of the Board of Directors based on the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.16/S.MBU/2012.

Kinerja Satuan Pengawasan Internal Perusahaan berdasarkan realisasi KPI tahun 2021 telah mencapai 103,66% dari target yang ditetapkan. Sedangkan kinerja Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan berdasarkan realisasi KPI tahun 2021 telah mencapai 102,19% dari target yang ditetapkan.

The performance of the Company's Internal Supervisory Unit based on the realization of KPI in 2021 has reached 103.66% of the target set. Meanwhile, the performance of the Risk & Compliance Management Unit based on the realization of KPI in 2021 has reached 102.19% of the target set.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Penilaian Kinerja Direksi
Board of Directors Performance Assessment

Direksi secara berkala memastikan efektifitas pelaksanaan tugas dan tangung jawabnya dengan melakukan evaluasi secara mandiri (*self-assessment*) baik individu maupun kolegial atas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta capaian target-target KPI. Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap bulan dan pada akhir periode tahun buku dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan *Board Manual*.

Penilaian aspek Direksi termasuk organ pendukung tata kelola dan pengendalian internal atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara berkala dilaksanakan melalui *assessment* GCG. *Assessment* penerapan GCG untuk Direksi dilaksanakan sesuai kerangka acuan pelaksanaan *Assessment* GCG berdasarkan paramater yang diatur dalam SK Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2012.

Assessment yang dilakukan secara berkala atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik juga mencakup penilaian atas aspek Direksi termasuk organ pendukung tata kelola dan pengendalian internal. Kriteria *assessment* penerapan GCG untuk aspek Direksi dilaksanakan sesuai kerangka acuan pelaksanaan *Assessment* GCG berdasarkan paramater yang diaturdalam SK Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2012. Hasil *assessment* GCG pada aspek Direksi tahun 2021 mencapai skor 33,740 dari skor maksimal 35,000 atau setara dengan 96,40 % dengan kategori Sangat Baik. Capaian masing-masing indikator dari aspek Direksi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Board of Directors periodically ensures the effectiveness of the implementation of their duties and responsibilities by conducting self-assessment, both individually and collectively, on the realization of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and the achievement of KPI targets. The evaluation is carried out every month and at the end of the financial year period by taking into account the provisions of the Articles of Association and the Board Manual.

Assessment of aspects of the Board of Directors including governance supporting organs and internal control over the implementation of good corporate governance is periodically carried out through a GCG assessment. Assessment of the implementation of GCG for the Board of Directors is carried out in accordance with the framework of reference for the implementation of the GCG Assessment based on the parameters stipulated in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.16/S.MBU/2012.

Assessments that are carried out regularly on the implementation of good corporate governance also include an assessment of aspects of the Board of Directors including the supporting organs of governance and internal control. The assessment criteria for the implementation of GCG for the Board of Directors aspect are carried out in accordance with the framework of reference for the implementation of the GCG Assessment based on the parameters regulated in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.16/S.MBU/2012. The results of the GCG assessment on the Board of Directors aspect in 2021 reached a score of 33,740 out of a maximum score of 35,000 or equivalent to 96.40% in the Very Good category. The achievements of each indicator from the aspect of the Board of Directors in 2021 are as follows:

Capaian Penilaian GCG Indikator Aspek Direksi Tahun 2021
Achievement of GCG Assessment Indicators Aspects of the Board of Directors in 2021

No.	Indikator	Indicator	Capaian (%) Achievements (%)
1.	Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/ pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.	The Board of Directors has Induction and training/learning and implements the program continuously.	100
2.	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	The Board of Directors performs a clear division of duties/functions, authorities and responsibilities.	100

No.	Indikator	Indicator	Capaian (%) Achievements (%)
3.	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	The Board of Directors prepares a company plan.	95
4.	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	The Board of Directors plays a role in meeting the Company's performance targets.	96
5.	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	The Board of Directors carries out operational and financial control over the implementation of company plans and policies.	100
6.	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	The Board of Directors carries out the management of the Company in accordance with the applicable laws and regulations and the articles of association.	100
7.	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.	The Board of Directors conducts value-added relationships for the Company and stakeholders.	96
8.	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota direksi dan manajemen di bawah direksi.	The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest of members of the Board of Directors and management under the Board of Directors.	100
9.	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada dewan komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.	The Board of Directors ensures that the Company carries out information and communication disclosure in accordance with applicable laws and regulations and timely delivery of information to the board of commissioners and shareholders.	100
10.	Direksi menyelenggarakan rapat direksi dan menghadiri rapat dewan komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	The Board of Directors holds board of directors meetings and attends board of commissioners meetings in accordance with statutory provisions.	100
11.	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	The Board of Directors is required to carry out quality and effective internal supervision.	95
12.	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	The Board of Directors performs the function of a qualified and effective corporate secretary.	95
13.	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	The Board of Directors holds the Annual GMS and other GMS in accordance with the laws and regulations.	87

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegial dan individu berdasakan laporan manajemen dan realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan. RUPS melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan Laporan Keuangan, Laporan realisasi RKAP (Manajemen), Laporan Tahunan dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi oleh RUPS merupakan hasil kerja kolegial dari seluruh Anggota Direksi. Pencapaian kinerja Direksi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors collegially and individually based on management reports and the realization of Key Performance Indicators (KPI) as part of the implementation of supervisory duties. The GMS evaluates the performance of the Board of Directors based on the Financial Statements, Report on the realization of the ABOP (Management), Annual Report and Realization of Key Performance Indicators (KPI) as well as the implementation of good corporate governance. The measurement of the success of the performance of the Board of Directors by the GMS is the result of the collegial work of all members of the Board of Directors. The Board of Directors' performance achievements in 2021 are as follows:

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Realisasi Key *Performance Indicators* Direksi 2021
Realization of Key Performance Indicators of the Board of Directors 2021

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicator		Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Realisasi s.d Des 2021 Realization as of December 2021	Pencapa-ian Achieve-ment	Nilai Value
A	**Fokus Pelanggan Customer Focus**		**17**					**9,68**
1	*Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) Jawa Bali Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) Java Bali							
	a. EFOR Pembangkit PLTU Batubara Eksisting EFOR of Existing CFPP	▼	6	%	1,08	0,92	110,00%	6,60
	b. EFOR Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali EFOR of Java Bali AMC CFPP	▼	6	%	3,15	4,68	51,42%	3,08
	c. EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara EFOR of Non CFPP	▼	5	%	0,93	3,51	0,00%	0,00
B	**Efektifitas Produk dan Proses** **Products and Process Effectiveness**		**38**					**38,90**
1	*Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit Jawa Bali Equivalent Availability Factor (EAF) of Java Bali Power Plant:							
	a. EAF Pembangkit PLTU Batubara Eksisting EAF of Existing CFPP	▲	5	%	93,56	95,12	101,67%	5,08
	b. EAF Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali EAF of Java Bali AMC CFPP	▲	5	%	86,30	83,31	96,53%	4,82
	c. EAF Pembangkit Non PLTU Batubara EAF of Non CFPP	▲	5	%	94,91	95,21	100,31%	5,01
2	Umur Persediaan Batubara Eksisting dan AMC Jawa Bali Coal Supply Maturity of Existing Coal and Java Bali AMC		4	Hari Days	15-22	-	100,00%	4,00
3	*Milestone Achievement* proyek JV PLTS Cirata Milestone Achievement proyek JV PLTS Cirata	▲	4	Tahapan Stages	**SM 1.** Financing Date + IPPKH **SM 2.** Design Engineering and EPC 20% (PV Modules + Floater 20 MW)	**SM 1.** Financing Date + IPPKH **SM 2.** Design Engineering and EPC 15,23%	87,33%	3,49
4	*Purchasing Efectiveness*	▲	5	%	2	9,19	110,00%	5,50
5	Jumlah unit *power plant* yang sudah mengimplikasikan teknologi digital Total power plant units that have been implementing digital technology	▲	5	*Power Plant*	2	9,19	110,00%	5,50
6	*Co-firing biomass*	▲	5	MW	35,21	92,27	110,00%	5,50
C	**Fokus Tenaga Kerja** **Workforce Focus**		**12**					**12,20**
1	*Human Capital Readiness* (HCR)	▲	2	Skor Score	4,56	4,56	100,00%	2,00
2	*Organizational Capital Readiness* (OCR)	▲	2	Skor Score	4,56	4,56	100,00%	2,00
3	Produktivitas Pegawai Workforce Productivity	▲	2	GWh/ Pegawai GWh/ Employ-ee	6,98	7,73	110,00%	2,00

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicator		Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Realisasi s.d Des 2021 Realization as of December 2021	Pencapa-ian Achieve-ment	Nilai Value
4	Pemenuhan *Talent Pool* dan *Talent Mobility* Talent Pool and Talen Mobility Fullfilment							
	a. % Perempuan dalam *nominated talent* % Female in nominated talent	▲	3	%	15	15,00	100,00%	3,00
	b. % Millenial (<40 tahun) dalam *top talent* % Millenials (<40) in top talent	▲	3	%	50	50,00	100,00	3,00
D	**Keuangan dan Pasar** **Finance and Market**		**21**					**22,75**
1	Laba Rugi Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	▲	4	Rp Miliar Rp Bilion	3.207,55	5.820,19	110,00%	4,40
2	EBITDA	▲	4	Rp Miliar Rp Bilion	6.810,14	7.677,48	110,00%	4,40
3	Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit Power Plant Cost of Supply (CES)							
	a. BPP Pembangkit Eksisting CES of Existing Power Plant	▼	4	Rp/kWh	1.047,75	1.034,27	101,29%	4,05
	b. BPP Pembangkit AMC CES of AMC Power Plant	▼	3	Rp/kWh	802,93	716,37	110,00%	3,30
4	Sinergi Synergy							
	a. Sinergi antar Anak Perusahaan Lain Synergy among Other Subsidiaries	▲	3	Rp Miliar Rp Bilion	982,44	1.612,36	110,00%	3,30
	b. Sinergi dengan Purhalis (termasuk O&M/AMC) Synergy with Purharlis (including O&M/AMC)	▲	3	Rp Miliar Rp Bilion	22	36,97	110,00%	3,30
E	**Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan** **Leadership, Governance, and Community Responsibility**		**12**					**12,60**
1	Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) GCG Implementation	▲	3	Skor Score	95,56	95,67	100,12%	3,00
2	*Maturity Level* ERM	▲	3	Level	3,2	3,52	110,00%	3,30
3	IT *Maturity Level*	▲	3	Level	3	3,41	110,00%	3,30
4	Tingkat Proper Unit (*Beyond Compliance*) Proper Unit Level (Beyond Compliance)	▲	3	Jumlah Unit Total Unit	7	3 emas dan 4 hijau 3 gold and 4 green	100,00%	3,00
5	Penyelesaian Temuan Audit (BPK, KAP, SPI dan Auditor Lainnya) Audit Findings Settlement (BPK, KAP, SPI and Other Auditors)		Max (-5)		0	0,00	100,00	0,00
6	Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup) Compliance with HSE (Health, Safety, and Environment)	▼	Max (-10)			Laporan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety Report	100,00	0,00
	Total Penilaian Kerja **Total Performance Assessment**		**97**					**96,13**
	Nilai Kerja Organisasi (NKO) **Organizational Perfomance Score**		**100**					**96,13**

HUBUNGAN AFILIASI DAN HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

AFFILIATION AND WORK RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan kerja. Sebagai organ utama tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan Direksi melaksanakan fungsi pengelolaan Perusahaan. Masing-masing organ bersikap independen dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan, meningkatkan nilai dan menjalankan peran strategis Perusahaan dalam pembangunan secara berkelanjutan, serta tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholder dengan kegiatan Perusahaan.

The nature between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a work relationship. As the main organs of Corporate Governance, the Board of Commissioners performs the supervisory function while the Board of Directors performs the management function of the Company. Every organ acts independently and prevents any form of conflict of interest. The Board of Commissioners and the Board of Directors ensure that every decision in performing their duties and authority is entirely to achieve goals, increase value, and implement the Company's strategic role sustainably while still considering the balance of stakeholders' interests with the Company's activities.

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Affiliation between Members of the Board of Commissioners

Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris mencakup hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali PJB. Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2021 tercermin pada tabel sebagai berikut:

The affiliation between members of the Board of Commissioners includes family and financial relationships of members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners with members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners with the Majority and/or Controlling Shareholders of PJB. The affiliation between the members of the Board of Commissioners who served in 2021 is shown in the following table:

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris
Affiliation between Members of the Board of Commissioners

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Sriyono Dwidjo Siswoyo[2]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Defy Indiyanto Budiarto[2]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Sunarsip[2]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Jisman P. Hutajulu	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Benny M.M. Marbun[1]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Hendra Iswahyudi	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Dedeng Hidayat[3]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Komang Parmita[1]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Bagus Puruhito[4]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Emir Kresna Wardana[4]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

1. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Benny M.M Marbun sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 September 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sriyono Dwidjo Siswoyo sebagai Komisaris Utama, Sdr. Defy Indiyanto Budiarto sebagai Komisaris, Sdr. Sunarsip sebagai Komisaris, serta menunjuk Sdr. Komang Parmita merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan Sdr. Komang Parmita pada rangkap jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
4. RUPS Sirkuler tanggal 30 Desember 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris dan Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris

1. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Benny M.M Marbun as Acting Commissioner and appointed Mr. Komang Parmita as Commissioner.
2. Circular GMS on September 14, 2021, respectfully dismissed Mr. Sriyono Dwidjo Siswoyo as President Commissioner, Mr. Defy Indiyanto Budiarto as Commissioner, Mr. Sunarsip as Commissioner, and appointed Mr. Komang Parmita who also serves as Acting President Commissioner
3. Circular GMS on October 21, 2021, appointed Mr. Dedeng Hidayat as President Commissioner and dismissed Mr. Komang Parmita in his concurrent position as Acting President Commissioner
4. Circular GMS on December 30, 2021, appointed Mr. Emir Kresna Wardana as Commissioner and Mr. Bagus Puruhito as Commissioner

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris PJB yang menjabat sepanjang tahun 2021 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Additionally, all members of PJB's Board of Commissioners in 2021 have no affiliation with other companies which are prohibited as stated in the Company's internal provisions and the applicable laws and regulations.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi
Affiliation between Members of the Board of Directors

Hubungan afiliasi anggota Direksi mencakup hubungan keluarga maupun keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi, anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali PJB. Hubungan afiliasi anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2021 tercermin pada tabel sebagai berikut:

Affiliation between members of the Board of Directors includes family and financial relationships of members of the Board of Directors with other members of the Board of Directors, members of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors with the Majority and/or Controlling Shareholders of PJB. The affiliation between the members of the Board of Directors in 2021 is shown in the following table:

HUBUNGAN AFILIASI DAN HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI
AFFILIATION AND WORK RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi
Affiliation between Members of the Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Sugiyanto[2]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Rachmanoe Indarto	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Iwan Purwana	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
R. Rawan Insani	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Karyawan Aji	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Gong Matua Hasibuan[1]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
M. Yossy Noval A.[2]	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

1. RUPS Sirkuler tanggal 19 Februari 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama
2. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sugiyanto sebagai Direktur Operasi – 1 serta mengangkat dan menetapkan Sdr. M. Yossy Noval A. sebagai Direktur Direktur Operasi - 1.
1. Circular GMS on February 19, 2021, appointed Mr. Gong Matua Hasibuan as President Director
2. Circular GMS on April 23, 2021, respectfully dismissed Mr. Sugiyanto as Director of Operations – 1 and appointed Mr. M. Yossy Noval A. as Director of Operations - 1.

Selain itu, seluruh anggota Direksi PJB yang menjabat sepanjang tahun 2021 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Additionally, all members of PJB's Board of Directors in 2021 have no affiliation with other companies which is prohibited as stated in the Company's internal provisions and the prevailing laws and regulations.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi
Work Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direki serta memberikan rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa keputusan atas pengelolaan Perusahaan yang diambil Direksi semata-mata demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Direksi mempertimbangkan keputusan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Sebagai organ utama tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi PJB menjalankan hubungan kerja secara *checks and balances* serta bersinergi demi kemajuan bisnis Perusahaan.

The Board of Commissioners supervises the execution of the Company's management tasks by the Board of Directors and provides recommendations to ensure that decisions on the Company's management by the Board of Directors are entirely for the long-term interest of the Company. The Board of Directors considers the decisions and recommendations of the Board of Commissioners in every strategic decision-making. As the main organs of Corporate Governance, PJB's Board of Commissioners and Board of Directors apply Checks-Balances Work Relationships and synergize for the progress of the Company's business.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang mengacu pada *Corporate Governance Code* sebagai payung kebijakan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PJB. *Corporate Governance Code* menjelaskan bahwa prinsip-prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PJB adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Sarana korespondensi baku yang digunakan dalam hubungan kerja Direksi Dewan Komisaris selain menggunakan surat-menyurat secara *hardcopy* juga menggunakan Tata Laksana Surat dan Kearsipan berdasarkan *Office Automation* yang berlaku di Perusahaan dan atau menggunakan email;
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat digunakan sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat di pertanggungjawabkan;
6. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat;
7. Direksi bertanggungjawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.

Sebagai penjabaran atas *Corporate Governance Code* hubungan kerja yang dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi PJB diuraikan lebih lanjut pada Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*). Tata Laksana Kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) terakhir kali ditetapkan pada tanggal 25 November 2014 yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten. Pedoman tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi, tugas serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

The work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is part of the implementation of Corporate Governance which refers to the Corporate Governance Code as the fundamental policy for the implementation of Good Corporate Governance in PJB. The Corporate Governance Code explains that the principles of the Work Relationship between PJB's Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

1. The Board of Commissioners respects the duties and authorities of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association;
2. The Board of Directors respects the duties and authorities of the Board of Commissioners to supervise and provide advice on the Company's management policies following the provisions of the Articles of Association;
3. Every work relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is a formal institutional relationship; in other words, it is always based on a standard mechanism or accountable correspondence;
4. The standard correspondence facilities used in the work relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, besides using hardcopy correspondence, use the Management of Letters and Archives based on Office Automation applicable in the Company and/or by email;
5. Any informal work relationship can be established by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors but cannot be used as a formal policy before passing through a mechanism or accountable correspondence;
6. The Board of Commissioners has the right to obtain Company information timely, completely, measurably, and accurately;
7. The Board of Directors is responsible for the delivery of Company information to the Board of Commissioners timely, completely, measurably, and accurately.

As elaborated concerning the Corporate Governance Code, the work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is described further in the Work Procedures of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Board Manual). The Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners was recently stipulated on November 25, 2014, which explains the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand manner, and can be carried out consistently. This manual is expected to support the implementation of the functions, duties, and responsibilities

HUBUNGAN AFILIASI DAN HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI
AFFILIATION AND WORK RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

dalam rangka mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Ketentuan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam Board Manual mencakup aspek diantaranya :

1. Tata Laksana Kerja Terkait Jabatan;
2. Tata Laksana Kerja Terkait Batas Kewenangan;
3. Tatalaksana Kerja Terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan;
4. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis Dari Dewan Komisaris;
5. Tata Tertib Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Rapat Pengawasan dan Rapat Konsultasi).

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi PJB dilakukan baik secara formal maupun informal. Hubungan kerja formal merupakan hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang dapat dilakukan melalui sarana/mekanisme korespondensi baku maupun Rapat Pengawasan dan Rapat Konsultasi. Rapat Pengawasan merupakan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. Rapat Konsultasi adalah rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris. Sedangkan mekanisme Hubungan Kerja Informal antara Dewan Komisaris dengan Pejabat PJB diatur sebagai berikut:

1. Pejabat PJB dapat melakukan pertemuan dengan Organ pendukung Dewan Komisaris yang bersifat Hubungan Kerja Informal terkait hal-hal yang memerlukan koordinasi dengan pihak Dewan Komisaris;
2. Permintaan kehadiran Pejabat PJB dilakukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris/Komisaris (selaku Ketua/Wakil Ketua Komite) yang ditujukan kepada Direksi untuk meminta Pejabat PJB yang bersangkutan hadir dengan tujuan berkoordinasi dan/atau mendapatkan informal untuk melengkapi informasi yang diperlukan Dewan Komisaris.

Organ pendukung Dewan Komisaris juga dapat melakukan pertemuan/mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat PJB yang bersifat hubungan kerja informal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Klarifikasi informasi dan dokumen sehubungan permintaan Direksi yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis Dewan Komisaris;
2. Klarifikasi informasi dan dokumen sehubungan hal-hal operasional PJB yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

of the Board of Directors and the Board of Commissioners to achieve the Company's Vision and Mission. The provisions of the work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors as regulated in the Board Manual cover aspects including:

1. The Board Manual Related to Position.
2. The Board Manual Related to Authority Lines.
3. The Board Manual Related to Implementation and Operational Supervision.
4. The Workflow of Board of Directors Authority Requiring Approval from Board of Commissioners and the Board of Directors Authority Requiring GMS Approval after the Written Responses from the Board of Commissioners.
5. Board of Directors and Board of Commissioners Meeting Regulations (Supervisory Meetings and Consultation

As stipulated in the Board Manual, the work relationship between PJB's Board of Commissioners and Board of Directors is established both formally and informally. A formal work relationship is a relationship that can be done through standard correspondence facilities/mechanisms as well as Supervision Meetings and Consultation Meetings. A Supervisory Meeting is a meeting of the Board of Commissioners attended by the Board of Directors. A Consultation Meeting is a meeting of the Board of Directors attended by the Board of Commissioners. Meanwhile, the mechanism for the Informal Work Relationship between the Board of Commissioners and PJB Officials is regulated as follows:

1. PJB officials are allowed to hold a meeting with the supporting organs of the Board of Commissioners which are Informal Work Relationship related to cases that need coordination with the Board of Commissioners;
2. The meeting invitation as the request by PJB Officials is written by the Board of Commissioners or a Commissioner (as Head/Vice-Head of the Committee) addressed to the Board of Directors to request the relevant PJB Officials to coordinate and/or receive information to complete the information required by the Board of Commissioners.

The supporting organs of the Board of Commissioners can also hold meetings/submit requests for information to PJB Officials with an informal working relationship to support the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners as follows:

1. Clarification of information and documents regarding the request of the Board of Directors requiring written approval or response from the Board of Commissioners;
2. Clarification of information and documents regarding PJB operation concerned by the Board of Commissioners

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI
SUCCESSION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Perusahaan memastikan tersedianya sumber daya manusia yang memadai di lingkungan PJB salah satunya dengan menjalankan fungsi nominasi. Setiap individu di lingkungan Perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan suksesi Direksi merupakan bagian dari penerapan fungsi nominasi di tingkat manajerial tertinggi dalam rangka mempersiapkan regenerasi untuk melanjutkan tonggak kepemimpinan Perusahaan.

Kebijakan suksesi Direksi PJB sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT PLN (Persero), mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Menteri BUMN Nomor PER- 04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/ MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Penunjukan calon anggota Direksi dilakukan melalui serangkaian proses yaitu penjaringan, penilaian calon Direksi dan penetapan. Bakal Calon Direksi harus memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain yang telah ditetapkan. Bakal calon Direksi PJB dapat berasal dari:

1. orang perserorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
2. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
3. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
4. berusia tidak lebih dari 58 tahun ketika akan menjabat;
5. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan; dan
6. tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

Proses penilaian Bakal Calon Direksi dilakukan oleh Lembaga Profesional. Hasil penilaian tersebut dikaji oleh Tim Evaluasi untuk kemudian ditetapkan dalam Daftar Calon (*short list*)

Human resources are one of the important factors to maintain business continuity. The Company ensures the availability of adequate human resources in the PJB environment, including through the nomination function. Every individual within the Company has the same opportunity to occupy position in the Company's organizational structure based on provisions of the applicable laws and regulations. The succession policy of the Board of Directors is part of the implementation of the nomination function at the highest managerial level in order to prepare for regeneration to continue the Company's leadership milestones.

Succession policy of PJB Board of Directors as a subsidiary of State-Owned Enterprise (SOE), namely PT PLN (Persero), refers to SOE Minister Regulation No. PER04/MBU/06/2020 concerning Amendment of the SOE Minister Regulation No. PER-03/ MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Subsidiaries of State-Owned Enterprises. Candidate appointment for the Board of Directors members is carried out through a series of processes, namely selection, evaluation of candidates for the Board of Directors and determination. Prospective Candidates for the Board of Directors must fulfill the established formal requirements, material requirements and other requirements. Candidates for the PJB Board of Directors may come from the following:

1. Individual who is capable to perform legal actions;
2. Not an administrators of political parties, and/or legislative members, and/or are not nominating as the prospective member of legislative;
3. Not the regional head/deputy head and/or are not nominating as the prospective regional head/deputy head;
4. No more than 58 years old when serving;
5. Not serving as officer in the Institutions of the Board of Commissioners/Supervisory Board member in SOE, the Board of Directors member in SOE, Subsidiaries and/or Companies, unless signing a statement letter of their willingness to resign from the positions in the event they chosen as the Subsidiaries' Board of Directors member;
6. Not serving as the Board of Directors member in the Company concerned during 2 (two) consecutive periods.

The process of assessing Prospective Directors is carried out by a Professional Institution. Then it is reviewed by Evaluation Team and determined in short list consisting of 3 (three)

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI
SUCCESSION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS

yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan rangking nilai terbaik. *Short list* tersebut disampaikan kepada Direksi BUMN untuk penetapan Calon Direksi terpilih disertai dengan penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil penilaian secara lengkap. Sebelum melakukan persetujuan, Direksi BUMN akan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris BUMN, RUPS/Menteri BUMN, atau Dewan Komisaris BUMN dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris BUMN, Direksi BUMN mengajukan Calon Direksi tersebut untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan.

persons for the respective positions of the Board of Directors member with the best ranking. The short list is submitted to SOE Directors for the determination of elected Candidates for the Board of Directors accompanied by an explanation of the determination process and an attachment to the complete assessment results. Prior to approval, SOE Board of Directors will first request approval from: the Board of Commissioners/ SOE Supervisory Board, the GMS/Minister of SOE, or SOE Board of Commissioners by first receiving approval from the Minister of SOE as the Dwiwarna A Series Shareholders after receiving approval from the Board of Commissioners/SOE Supervisory Board, SOE Board of Directors proposes the Prospective Board of Directors to be determined in the GMS of Subsidiaries to be the Subsidiaries Board of Directors member concerned.

Mekanisme Suksesi Direksi
The Board of Directors Succession Mechanism

Pembentukan Tim Evaluasi

Pemegang Saham membentuk Tim Evaluasi untuk :
- Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Direksi;
- Menetapkan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna mendapatkan penetapan;
- Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna disampaikan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris dan/atau Menteri Negara BUMN, jika diperlukan.

Evaluation Team Establishment

The Shareholders establish Evaluation Team for the following:
- Electing and assessing the prospective Board of Directors.
- Determining the final result of the evaluation to be delivered to the State-Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders in order to obtain the approval.
- Preparing evaluation result determined by SOE Board of Directors/ Shareholders to be delivered to the Board of Commissioners and/or Ministry of State- Owned Enterprises of Indonesia.

Proses Penjaringan

Pemegang Saham membentuk Tim Evaluasi untuk :
- Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Direksi dari berbagai sumber.
- Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (CV, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (*long list*) sebanyak minimal 5 (lima) orang calon untuk jabatan anggota Direksi.
- Tim Evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon (*long list*) kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.

Election Process

- The Evaluation Team receives the recommendation and collects information concerning the prospective Board of Directors from various sources.
- The Evaluation Team conducts selection based on stipulated administrative criteria and requirements (CV, other documents, and other information collected) to enlist the candidates in the long list with at least 5 (five) prospective Candidates.
- The Evaluation Team submits the Prospective Candidate List (long list) to the StateOwned Enterprises Board of Directors/Shareholders for approval.

Proses Penilaian

- Tim Evaluasi dapat menunjuk tenaga ahli atau Lembaga Profesional untuk melakukan Penilaian, jika diperlukan.
- Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap CV dan wawancara bakal Calon Direksi yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon (*long list*) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham sebagai Calon Direksi.
- Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Calon (*short list*) kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk menetapkan Calon Direksi terpilih.

Assessment Process

- The Evaluation Team may appoint experts or Professional Institutions to take the Assessment if necessary.
- The Evaluation Team evaluates the CV and interviews of prospective Board of Directors whose names are listed in the long list approved by the State-Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders to select the best candidates to be proposed to the State-Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders as the Prospective Board of Directors.
- The Evaluation Team submits Candidate List (short list) to the State-Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders to determine the elected Board of Directors.

Proses Penetapan

- Direksi BUMN/ Pemegang Saham melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) Calon Direksi terpilih untuk jabatan anggota Direksi PJB.
- Direksi BUMN/ Pemegang Saham mengajukan Calon Direksi untuk ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi PJB.
- Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS menetapkan calon Direksi terpilih sebagai anggota Direksi PJB.

Determination Process

- State-Owned Enterprises Board of Directors/ Shareholders conducts the final evaluation of the assessment results to determine 1 (one) Candidate to occupy the position of PJB's Board of Directors.
- State-Owned Enterprises Board of Directors/ Shareholders recommends the Candidate to be determined in the GMS of Subsidiaries to become member of PJB's Board of Directors.
- Shareholders decisions, both in the GMS and outside the GMS, determine candidates for the Board of Directors to be elected as PJB's Board of Directors members

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON COMPOSITION DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Perusahaan mempertimbangkan aspek keberagaman dalam menentukan komposisi serta mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah dan strategi pengembangan Perusahaan dengan pendekatan komprehensif dan sudut pandang yang lebih luas sehingga menghasilkan keputusan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Dewan Komisaris sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan komposisi Direksi sebagai pelaksana fungsi pengelolaan adalah beragam serta masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris.

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PJB secara tertulis mengacu pada Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PJB Tahun 2021 berdasarkan unsur jenis kelamin, usia, pendidikan dan pengalaman kerja adalah sebagai berikut:

The Company considers aspects of diversity in determining the composition and appointing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. It is expected to provide alternative problem solving and development strategies for the Company with a comprehensive approach and a broader point of view so as to produce more effective decisions to achieve the Company's goals. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors are appointed and determined in such way that the composition of the Board of Commissioners as the executor of the supervisory function and the composition of the Board of Directors as the executor of the management function are diverse and each consists of Directors and Commissioners who have commitment, knowledge, ability, experience and expertise needed to carry out the management role of the Board of Directors and the supervisory role of the Board of Commissioners.

The policy on the composition diversity of PJB's Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Articles of Association, Shareholder provisions, and applicable laws and regulations. Diversity in the composition of PJB's Board of Commissioners and Board of Directors in 2021 based on education, expertise, work experience, gender, and age are as follows:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Composition Diversity Of The Board Of Commissioner

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience
Sriyono Dwidjo Siswoyo[2]	Laki-laki Male	63 tahun 63 years old	• S1 Teknik Sipil • *Master of Project Management* • Bachelor of Civil Engineering • Master of Project Management	• Kepala Divisi Pengembangan Organisasi PT PLN (Persero) • Direktur Utama PT PLN Batam • Direktur SDM PT PLN Batam • Manajer Senior Pengembangan Unit PLN • Head of Development Division at PT PLN (Persero) • President Director at PT PLN Batam • HC Director at PT PLN Batam • Senior Manager at PLN Development Unit
Defy Indiyanto Budiarto[2]	Laki-laki Male	41 tahun 41 years old	• S1 Hubungan Internasional • S2 Ilmu Politik • Bachelor of International Relations • Master of Politics	• Komisaris Utama PT Rediss Papua • Direktur PT Definisi Bumi Resources • Komisaris Utama PT Wireless One Nusantara • General Manager PT Rediss Papua • Direktur PT Bara Inti Surya • Marketing Manager PT Rediss Papua • President Commissioner at PT Rediss Papua • Director at PT Definisi Bumi Resources • President Commissioner at PT Wireless One Nusantara • General Manager at PT Rediss Papua • Director at PT Bara Inti Surya • Marketing Manager PT Rediss Papua

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
POLICY ON COMPOSITION DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience
Sunarsip[2]	Laki-laki Male	49 tahun 49 years old	• S1/D4 Akuntansi (STAN) • S2 Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik • Bachelor of Accounting (STAN) • Master of Planning and Public Policy	• Strategic Advisor • Chief Economist • Tenaga Ahli Dewan Komisaris • Komite Pemantau Manajemen Risiko • Tenaga Ahli Kementerian BUMN, Bidang Risek & Kebijakan • Kepala Bidang Data Kementerian BUMN • Staf Khusus Kepala Bidan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan • Analisis Makro dan Fiskal Bisang Kebijakan Fiskal Kemeterian Keuangan • Peneliti di Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akutansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan • Kepala Divisi Riset, Pusat Pengembangan Akutansi dan Keuangan, STAN • Auditor BAPEKSTA, Kementerian Keuangan • Strategic Advisor • Chief Economist • Expert for Board of Commissioners • Risk Management Monitoring Committee • Ministry of SOE Expert, Research and Tech. & Policy Field • Head of Data, Ministry of SOE • Special Staff of the Ministry of Finance's Head of Fiscal Policy Division • Macro and Financial Analyst of the Ministry of Finance's Fiscal Policy • Researcher at the Institute for Public Finance Review and Government Accounting, Financial Education and Training Agency • Head of Research Division, Accounting and Financial Development Center, STAN • BAPEKSTA Auditor, Ministry of Finance
Jisman P. Hutajulu	Laki-laki Male	55 tahun 55 years old	• S1 Elektro – Arus Kuat • S2 Manajemen • Bachelor of Electrical Engineering – Integrated Circuit • Master of Management	• Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan • Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan • Kasubdit Harga Tenaga Listrik • Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik • Kasubdit Standardisasi Ketenagalistrikan • Kasie Penyiapan Aturan Usaha Tenaga Listrik • Kasie Harga Jual Tenaga Listrik • Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi • Director at Electricity Program Development • Chief of Civil Servant Investigator (PPNS) in the Electricity Field • Head of Sub-Directorate of Electric Power Price • Head of Sub-Directorate of Electricity Price and Subsidies • Head of Sub-Directorate of Electricity Standardization • Head of Division of Preparation of Electricity Business Rules • Head of Division of Electricity Sales Price • Head of Division of Analysis of Distribution Electricity Sales

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience
Benny M.M. Marbun[1]	Laki-laki Male	62 tahun 62 years old	• S1 Teknik Elektro • *Master of Engineering Science* • Bachelor of Electrical Engineering • Master of Engineering Science	• Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) • General Manager PLN Wilayah Papua • Ahli Layanan Pelanggan • Spesialis Layanan Pelanggan • Manager PLN Cabang • Kepala Bagian Distribusi • Head of Commerce Division at PT PLN (Persero) • General Manager at Papua Regional PLN • Customer Service Expert • Customer Service Specialist • Branch Manager of PLN • Head of Distribution Division
Hendra Iswahyudi	Laki-laki Male	54 tahun 54 years old	• S1 Teknik Fisika • S2 Perencanaan dan Kebijakan Publik • S3 Ekonomi • Bachelor of Engineering Physics • Master of Planning and Public Policy • Doctor of Economics	• Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan • Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi • Kepala Bagian Rencana dan Laporan • Staf - Dit Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan • Kasi Perhitungan Harga Tenaga Listrik - Dit Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan • Kepala Seksi Penyiapan Usaha – Ditjen LPE • Kasi Evaluasi Pemanfaatan Energi - Ditjen LPE • Pj. Kasi Evaluasi Konservasi Energi - Ditjen LPE • Director of Electricity Business Development • Director of Planning, Development of New, Renewable, and Energy Conservation Infrastructure • Head of Plan and Report Section • Staff - Directorate of Electricity Business Development • Head of Division for Calculation of Electricity Prices • Directorate of Electricity Business Development Guidance • Head of Business Planning Division - Directorate General of LPE • Head of Evaluation of Energy Utilization - Directorate General of LPE • PIC of Evaluation of Energy Conservation Head - Directorate General of LPE
Dedeng Hidayat[3]	Laki-laki Male	54 tahun 54 years old	• S1 Hukum • S2 Hukum • Bachelor of Law • Master of Law	• Senior Vice President Hukum PT PLN (Persero) • Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat PT PLN (Persero) • Senior Specialist I Pelayanan Hukum Korporat (PLT Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat) Pada Satuan Pelayanan Hukum Korporat PT PLN (Persero) • Kepala Bidang Regulasi Dan Kepatuhan pada Satuan Pelayanan Hukum Korporat PT PLN (Persero) • Manajer Komunikasi Kelembagaan Pada Sekretariat Perusahaan PT PLN (Persero) • Deputi Manajer Hukum pada Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi PT PLN (Persero) • Senior Vice President of Law at PT PLN (Persero) • Head of Corporate Legal Services Unit at PT PLN (Persero) • Senior Specialist I Corporate Legal Services (Acting Head of Corporate Legal Services Unit) at the Corporate Legal Service Unit of PT PLN (Persero) • Head of Regulation and Compliance at the Corporate Legal Service Unit of PT PLN (Persero) • Institutional Communication Manager at the Corporate Secretariat of PT PLN (Persero) • Deputy Legal Manager in the Field of Communication, Law and Administration at PT PLN (Persero

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
POLICY ON COMPOSITION DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience
Komang Parmita[1]	Laki-laki Male	51 tahun 51 years old	• S1 Teknik Mesin • S2 Teknik • Bachelor of Mechanical Engineering • Master of Engineering	• Executive Vice President Health, Safety, Security And Environment Pada Direktorat Human Capital Management PT PLN (Persero) • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B • Manajer Senior Pengelolaan Pembangkit Regional Jawa Bagian Tengah. Pada Divisi Operasi Regional Jawa Bagian Tengah Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) • Manajer Produksi PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali • Senior Engineer II Pengendalian Bahan Bakar Batu Bara (Plt Manajer Produksi I) Pada Bidang Produksi I PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B • Senior Engineer II Pengendalian Bahan Bakar Batu Bara Pada Bidang Produksi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B • Manajer UPK PLTU Lampung • Dosen Universitas Udayana Bali • Executive Vice President of Health, Safety, Security And Environment at the Directorate of Human Capital Management of PT PLN (Persero) • General Manager at PT PLN (Persero) Tanjung Jati B, Generation Main Unit • Senior Manager of Central Java Regional Power Plant Management. In the Central Java Regional Operations Division, the Central Java Regional Business Directorate at PT PLN (Persero) • Production Manager at PT PLN (Persero) Java Bali Generation Unit • Senior Engineer II Coal Fuel Control (Acting Production Manager I) in Production Sector I at PT PLN (Persero) Tanjung Jati B Generation Main Unit • Senior Engineer II for Coal Fuel Control in the Production Sector at PT PLN (Persero) Tanjung Jati B Main Unit of Generation • Manager of Lampung UPK CFPP • Lecturer at Udayana University Bali
Bagus Puruhito[4]	Laki-laki Male	59 tahun 59 years old	• S1 Manajemen • S2 Manajemen • Bachelor of Management • Master of Management	• Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) • Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia • Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) • Asisten Operasi (Asops) Kasau TNI Angkatan Udara • Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I (Pangkoopsau I) TNI Angkatan Udara • Komandan Komando Pendidikan Angkatan Udara (Dankodikau) TNI Angkatan Udara • Kas Koopsau I TNI Angkatan Udara • Danlanud Halim Perdanakusuma TNI Angkatan Udara • ADC (Ajudan Pribadi) Presiden Republik Indonesia • Head of National Search and Rescue Agency (Basarnas) • Deputy Governor of National Resilience Institute of the Republic of Indonesia • Deputy Chief of Air Force Staff (KSAU) • Assistant Operations (Asops) Rafters of the Air Force • Commander of Air Force Operations Command I (Pangkoopsau I) of the Air Force • Commander of the Air Force Education Command (Dankodikau) of the Air Force • Kas Koopsau I Air Force • Danlanud Halim Perdanakusuma Air Force • ADC (Personal Adjutant) President Republik Indonesia

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience
Emir Kresna Wardana[4]	Laki-laki Male	40 tahun 40 years old	• S1 Teknik Informatika • S2 Ilmu Komunikasi • S3 Hubungan Internasional • S1 Teknik Informatika • S2 Ilmu Komunikasi • S3 Hubungan Internasional	• Komisaris PT Patra Jasa • Staf Khusus I Sekretaris Kabinet Republik Indonesia • Tenaga Ahli Komisi I DPR RI • Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI • Manager General affair PT. Sinergi Bara Pratama Energy • Talent, Arranger & Composer Sony BMG • Talent, Arranger & Composer at Sony BMG • Commissioner at PT Patra Jasa • Special Staff I cabinet secretary Republic of Indonesia • Experts of Commission I of the House of Representatives Republic of Indonesia • Expert of the Deputy Speaker of the House of Representatives Republic of Indonesia • General Affairs Manager at PT Synergy Bara Pratama Energy

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Benny M.M Marbun sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 September 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sriyono Dwidjo Siswoyo sebagai Komisaris Utama, Sdr. Defy Indiyanto Budiarto sebagai Komisaris, Sdr. Sunarsip sebagai Komisaris, serta menunjuk Sdr. Komang Parmita merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan Sdr. Komang Parmita pada rangkap jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
4. RUPS Sirkuler tanggal 30 Desember 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris dan Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris

Information:
1. The Circular GMS on April 23, 2021 honorably dismissed Benny M.M Marbun as Acting Commissioner and appointed Komang Parmita as Commissioner
2. Circular GMS on September 14, 2021 honorably dismissed Sriyono Dwidjo Siswoyo as President Commissioner, Defy Indiyanto Budiarto as Commissioner, Sunarsip as Commissioner, and appointed Komang Parmita concurrently as Acting President Commissioner
3. Circular GMS on October 21, 2021 appointed Dedeng Hidayat as President Commissioner and dismissed Komang Parmita in his concurrent position as Acting President Commissioner
4. Circular GMS on December 30, 2021, appointed Emir Kresna Wardana as Commissioner and Bagus Puruhito as Commissioner

Keberagaman Komposisi Direksi
Composition Diversity of The Board Of Directors

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience
Sugiyanto[2]	Laki-laki Male	54 tahun 54 years old	• S1 Teknik Nuklir • S2 Teknik Mesin • Bachelor of Nuclear Engineering • Master of Mechanical Engineering	• General Manager PLN Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Utara • General Manager of PLN Power Generation Unit in North Sumatera.
Rachmanoe Indarto	Laki-laki Male	53 tahun 53 years old	• S1 Teknik Mesin • S2 Bidang Manajemen • Bachelor of Mechanical Engineering • Master of Management	• General Manager PLN Unit Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan • *Expert* Niaga Pada Ditaga • General Manager of PLN Power Generation Unit in South Sumatera. • Commerce Expert in Ditaga.
Iwan Purwana	Laki-laki Male	55 tahun 55 years old	• S1 Teknik Mesin • S2 Bidang Manajemen	• PLT Direktur Utama PT Indonesia Comnet Plus (Icon +) • General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat • Kepala Divisi Pengadaan Strategis PLN

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
POLICY ON COMPOSITION DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Working Experience
			• Bachelor of Mechanical Engineering • Master of Management	• Acting President Director at PT Indonesia Comnet Plus (Icon +). • General Manager of PT PLN West Java Distribution Main Unit • Head of Strategic Procurement Division on Head Office PLN
R Rawan Insani	Laki-laki Male	57 tahun 57 years old	• S1 Teknik Nuklir • S2 Bidang Kelistrikan • Bachelor of Nuclear Engineering • Master of Electricity	• Executive Vice President Perencanaan Korporat Pada Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat • Executive Vice President Corporate Planning Pada Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat • Executive Vice President of Corporate Planning in Directorate of Corporate Planning in Head Office at PT PLN (Persero). • Executive Vice President of Corporate Planning in Directorate of Corporate Planning in Head Office at PT PLN (Persero
Karyawan Aji	Laki-laki Male	55 tahun 55 years old	• S1 Teknik Listrik • S2 Bidang Manajemen Bisnis • Bachelor of Electrical Engineering • Master of Business Management	• Executive Vice President Talent Development Pada Direktorat Human Capital Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat • Kepala Divisi Pengembangan Talenta Pada Direktorat Human Capital Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat • Executive Vice President of Talent Development in Directorate of Human Capital Management in Head Office at PT PLN (Persero). • Head of Talent Development Division in Directorate of Human Capital Management in Head Office at PT PLN (Persero)
Gong Matua Hasibuan[1]	Laki-laki Male	53 tahun 53 years old	• S1 Ekonomi Akuntansi • S2 Bidang Manajemen Keuangan • Bachelor of Economics Accounting • Master of Financial Management	• Senior Executive Vice President Pengelolaan Aset PT PLN (Persero) Kantor Pusat • Executive Vice President Portfolio Management PT PLN (Persero) Kantor Pusat • Senior Executive Vice President of Asset Management at PT PLN (Persero) Head Office • Executive Vice President Portfolio Management at PT PLN (Persero) Head Office
M. Yossy Noval A.[2]	Laki-laki Male	53 tahun 53 years old	• S1 Teknik Mesin • S2 Manajemen • Bachelor of Mechanical Engineering • Master of Management	• Direktur Utama PT PJB Services • Expert Niaga Pada Ditaga PT PJB • General Manager UP Muara Karang PT PJB • President Director at PT PJB Services • Commercial Expert at DITAGA of PT PJB • General Manager at Muara Karang GU of PT PJB

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 19 Februari 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama
2. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sugiyanto sebagai Direktur Operasi – 1 serta mengangkat dan menetapkan Sdr. M. Yossy Noval A. sebagai Direktur Direktur Operasi - 1.

Information:
1. Circular GMS on February 19, 2021 appointed Gong Matua Hasibuan as President Director
2. Circular GMS on April 23, 2021 honorably dismissed Sugiyanto as Director of Operations – 1 and appointed and M. Yossy Noval A. as Director of Operations - 1.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Remunerasi merupakan bentuk apresiasi dan kompensasi yang diberikan Perusahaan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Remunerasi dapat diusulkan secara berkala setiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PJB berupaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Remuneration is manifestation of appreciation and compensation given by the Company for duties and responsibilities implementation by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Remuneration can be proposed periodically every year at the General Meeting of Shareholders to obtain approval based on applicable laws and regulations. PJB strives to ensure transparency and accountability in the implementation of policies and remuneration information received by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Kebijakan remunerasi dan pemberian fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi PJB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/06/2016, Nomor PER-01/MBU/06/2017, Nomor PER-06/MBU/06/2018, Nomor PER-01/MBU/05/2019, Nomor PER/12/MBU/11/2020 dan Nomor PER-13/MBU/09/2021. Perusahaan secara internal telah menetapkan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PJB melalui Keputusan Bersama antara Direktur PT Pembangkitan Jawa Bali dan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 004.K/021/DIR/2017 dan 012.K/DK-PJB/2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Remuneration policy and the provision of other facilities for the Board of Commissioners and Directors of PJB are carried out in following the provisions of PT PLN (Persero) as the majority shareholder referring to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 which has been several times amended by the Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/06/2016, No. PER-01/MBU/06/2017, No. PER-06/MBU/06/2018, No. PER-01/MBU/05/2019, No. PER/12/MBU/11/2020 and No. PER-13/MBU/09/2021. The Company has internally determined remuneration policy of PJB Board of Commissioners and Board of Directors through Joint Decree between the Director of PT Pembangkit Jawa Bali and Commissioner of PT Pembangkit Jawa Bali No. 004.K/021/DIR/2017 and 012.K/DK-PJB/2017 concerning the Determination of Remuneration of PT PJB Board of Directors and Board of Commissioners by considering the provisions of the Company's Articles of Association.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama antara Direktur PT Pembangkitan Jawa Bali dan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 004.K/021/DIR/2017 dan 012.K/DK-PJB/2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB, struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PJB terdiri dari komponen remunerasi berupa Gaji/Honorarium, tunjangan, fasilitas dan Insentif Kinerja. Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PJB secara rincian diuraikan sebagai berikut:

As stipulated in the Joint Decree between PT Pembangkitan Jawa-Bali's Board of Director and Board of Commissioners No. 004.K/021/DIR/2017 and 012.K/DK-PJB/2017 concerning the Determination of Income for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PJB, the remuneration structure of PJB Board of Commissioners and Board of Directors consists of remuneration components in the form of Salary/Honorarium, benefits, facilities and Performance Incentives. The remuneration components for PJB Board of Commissioners and Board of Directors are detailed as follows:

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Dewan Komisaris	Board of Commissioners	Direksi	Board of Directors
Gaji/Honorarium Salary/ Honorarium	Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45%(empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. Honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sernbilan puluh persen) dari Honorarium Komisaris Utama.	The President Commissioner's salary is set at 45% (forty-five percent) of the President Director's Salary. The Commissioners' salary is set at 90% (ninety percent) of the President Commissioner's salary.	Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Gaji Direktur yang lain ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.	The President Director's salary is set by using internal guidelines determined by the Shareholders. The salary of other Directors is set at 85% (eighty five percent) of the President Director's salary
Tunjangan Cuti Tahunan dan Cuti Besar Annual Leave and Collective Leave Benefits	Tidak diberikan	Not granted	Tidak diberikan	Not granted
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan hari raya diberikan sebesar I (satu) kali Honorarium.	Holiday allowance is provided at once Honorarium.	diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji	Provided at once Salary.
Fasilitas / Tunjangan Perumahan Facility/Housing Benefit	-	-	1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapan pemeliharaan, utilitas, dan pengamanannya ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan.	1 (one) Housing facility and its appliances maintenance, utilities, and security equipment are granted entirely by the Company
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris.	Transportation allowance is provided at 20% (twenty percent) of the Salary of the Board of Commissioners member respectively.	-	-
Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Ketentuan mengenai asuransi purna jabatan anggota Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris.	The provisions regarding retirement insurance for the Board of Directors members, mutatis mutandis, apply to the determination of retirement insurance for the Board of Commissioners members.	Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Direksi yang statusnya definitif. 2. Tidak diberikan untuk anggota Direksi yang berstatus pegawai PT PLN (Persero) atau pegawai Anak Perusahaan PT PLN (Persero).	Retirement insurance is provided with the following conditions: 1. Definitive Board of Directors. 2. Not provided to the Board of Directors member with PT PLN (Persero) or PT PLN (Persero) Subsidiaries employee status.

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Dewan Komisaris	Board of Commissioners	Direksi	Board of Directors
			3. Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun. 4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan,sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian .	3. The premium provided by the Company is at most 25% (twenty five percent) of the Salary in one year. 4. Premiums, contributions, or other terms relevant to retirement insurance include the premiums for life insurance.
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	-	-	Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) Fasilitas kendaraan dari perusahaan. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.	The Board of Directors Members are only provided 1 (one) vehicle facility from the Company. Vehicle facility including maintenance and operational costs are provided by considering financial condition of the Company.
Fasilitas Kesehatan Healthcare Facilities	Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris.	Provision regarding health facilities for the Board of Directors members, mutatis mutandis apply to health facilities for the Board of Commissioners members.	Fasilitas kesehatan diberikan berupa : a) Rawat jalan dan obat; b) rawat inap dan obat; dan c) *medical check up.*	Healthcare facilities are provided as follows: a) Outpatient care and medicine; b) Hospitalization and medicine; and c) Medical check-up
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Service Facilities	Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris serta mantan anggota Dewan Komisaris.	Provision regarding Legal service facilities for members and the former members of the Board of Directors, mutatis mutandis, applied to legal service facilities for members and former members of the Board of Commissioners.	Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.	Legal service facilities are provided in the form of financing the services of lawyer's firm/legal consultant covering the investigation process as witnesses, suspects, and defendants at the judicial institution.
Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Insentif Kinerja	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama; dan Anggota Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama.	Tantiem is determined by the Shareholders with composition of President Commissioner is granted 45% of the President Director; and the Board of Commissioners members are granted 90% of the President Commissioner.	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama.	Tantiem is determined by the Shareholders with a composition of 85% of the other Board of Directors members from the President Director.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Indikator Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Indicator for Determining Remuneration for The Board of Commissioners and The Board of Directors

Besaran masing-masing komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PJB memperhatikan indikator penetapan remunerasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Indikator penetapan remunerasi tersebut menjadi dasar perumusan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:

1. Faktor skala usaha.
2. Faktor kompleksitas usaha.
3. Tingkat inflasi.
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium dan tantiem akan dilakukan oleh Pemegang Saham dan disampaikan melalui surat penetapan tersendiri berdasarkan keputusan RUPS. Sedangkan untuk tunjangan dan fasilitas diberikan berdasarkan ketentuan PT PLN (Persero) selaku pemegang saham mayoritas yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/06/2016, Nomor PER-01/MBU/06/2017, Nomor PER-06/MBU/06/2018 dan Nomor PER-01/MBU/05/2019, Nomor PER/12/MBU/11/2020 dan Nomor PER-13/MBU/09/2021 sebagai revisi atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The amount of each component of remuneration for the Board of Commissioners and Directors of PJB pays attention to the indicators of determining remuneration which refers to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning guidelines for determining income of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Supervisory Board of SOE. Indicators for determining remuneration are the basis for the formulation of the proposed remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including:

1. Business scale.
2. Business complexity.
3. Inflation rate.
4. Financial conditions and capabilities of the Company.
5. Other relevant factors with no conflict with the statutory regulations.

Remuneration Determination in the form of salary/honorarium and tantiem will be conducted by the Shareholders and submitted through a decree according to GMS resolution. While the benefits and facilities are provided according to PT PLN (Persero) as the majority shareholder referring to the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/06/2016, No. PER-01/MBU/ 06/2017, No. PER-06/MBU/06/2018 and No. PER-01/MBU/05/2019, No. PER/12/MBU/11/2020 and No. PER-13/MBU/09/2021 as a revision to the Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State- Owned Enterprises.

Prosedur Penetapan Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Proposal Procedure in Determining Remuneration for The Board of Commissioners and The Board of Directors

Dewan Komisaris dan Direksi dapat melakukan kajian dan pengusulan remunerasi secara berkala setiap tahun untuk memperolah penetapan Pemegang Saham melalui RUPS sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

The Board of Commissioners and Board of the Directors may conduct periodic remuneration studies and proposals every year to process the Shareholders determination through the GMS in accordance with the applicable policies by taking into account the principles of prudence, reasonableness and

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan melalui beberapa tahap termasuk di level pengawasan untuk dikaji dan memperoleh rekomendasi dari organ pengawasan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai perwakilan Pemegang Saham sampai kemudian ditetapkan dalam RUPS. Mekanisme penetapan usulan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

accountability. Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is proposed through several stages including at the supervisory level with the nomination and remuneration functions as the shareholders representative until later stipulated in the GMS. The mechanism of providing remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Mekanisme Penetapan Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Mechanism for Determining Remuneration Proposal for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Usulan Remunerasi oleh Direksi
Remuneration Proposal by the Board of Directors

Direksi mengajukan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Board of Directors submits the remuneration proposal to the Board of Commissioners through the Nomination & Remuneration Committee.

Pembahasan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi
Discussion With Nomination and Remuneration Committees

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama. Dengan memperhitungkan kinerja usaha perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyiapkan rekomendasi.

Nomination and Remuneration Committee reviews the compensation provided in the market for the work concerned in other companies with the same business field and status. By considering the Company's business performance and the contribution of each individual, a discussion is then conducted by the Nomination and Remuneration Committee to prepare the recommendation.

Pembahasan dan Persetujuan oleh Dewan Komisaris
Discussion and Approval with the Board of Commissioners

Dewan Komisaris melakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan atas usulan remunerasi yang diajukan.

The Board of Commissioners conducts a further discussion for the proposed remuneration approval.

Penyampaian Usulan
Proposal Submission

Usulan remunerasi disampaikan kepada pemegang saham untuk mendapat persetujuan dan penetapan.

The remuneration proposal is then delivered to shareholders for approval and determination.

Persetujuan dan Penetapan Remunerasi
Approval and Determination of the Remuneration

Pemegang Saham memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi melalui RUPS.

The shareholders approve and determine remuneration through the GMS.

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Total Remuneration for The Board of Commissioners and The Board of Directors

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PJB untuk tahun 2021 ditetapkan oleh Pemegang saham melalui Surat Keputusan Pemegang Saham Mayoritas PJB No. 61095/MNJ.01.02/C01000000/2021-R tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Penetapan Remunerasi dan Tantiem Direksi/Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali. Rincian remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Remuneration for PJB's Board of Commissioners and Directors in 2020 through PJB Majority Shareholder Decree No. 61095/MNJ.01.02/C01000000/2021-R dated October 29, 2021 regarding Remuneration and Tantiem Determination for the Board of Directors/the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali. Details of the remuneration for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follow :

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Remunerasi Dewan Komisaris
Remuneration for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration			Tunjangan Tahunan Annual Allowances (Rp)	Honorarium dan Tunjangan 2021 (Rp) 2021 (Rp) Honorarium and Allowances 2021 (Rp)	Tantiem (Rp)
		Honor Per Bulan (Rp) Honorary Per Month (Rp)	Tunjangan Transport Per Bulan (Rp) Transportation Allowance Per Month (Rp)	Total (Rp)	THR (Rp) Annual Religious Holiday Allowances (Rp)		
Sriyono Dwidjo Siswoyo[2]	Komisaris Utama President Commissioner	60.750.000	15.187.500	75.937.500	60.750.000	778.612.500	492,660,000
Dedeng Hidayat[3]	Komisaris Utama President Commissioner	65.306.250	15.187.500	80.493.750	-	184.160.685	-
Defy Indiyanto Budiarto[2]	Komisaris Commissioner	54.675.000	13.668.750	68.343.750	54.675.000	700.751.250	443,394,000
Sunarsip[2]	Komisaris Commissioner	54.675.000	13.668.750	68.343.750	54.675.000	700.751.250	443,394,000
Jisman P. Hutajulu	Komisaris Commissioner	58.775.625	13.668.750	72.444.375	58.775.625	928.108.125	443,394,000
Benny M.M. Marbun[1]	PLT Komisaris Acting as Commissioner	54.675.000	13.668.750	68.343.750	-	273.375.000	443,394,000
Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	58.775.625	13.668.750	72.444.375	54.675.000	924.007.500	443,394,000
Komang Parmita[1]	Komisaris Commissioner	58.775.625	13.668.750	72.444.375	-	579.555.000	-
Bagus Puruhito[4]	Komisaris Commissioner	58.775.625	13.668.750	72.444.375	-	72.444.375	-
Emir Kresna Wardana[4]	Komisaris Commissioner	58.775.625	13.668.750	72.444.375	-	72.444.375	-

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Benny M.M Marbun sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Parmita sebagai Komisaris.
2. RUPS Sirkuler tanggal 14 September 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sriyono Dwidjo Siswoyo sebagai Komisaris Utama, Sdr. Defy Indiyanto Budiarto sebagai Komisaris, Sdr. Sunarsip sebagai Komisaris, serta menunjuk Sdr. Komang Parmita merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
3. RUPS Sirkuler tanggal 21 Oktober 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Dedeng Hidayat sebagai Komisaris Utama dan memberhentikan Sdr. Komang Parmita pada rangkap jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
4. RUPS Sirkuler tanggal 30 Desember 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Emir Kresna Wardana sebagai Komisaris dan Sdr. Bagus Puruhito sebagai Komisaris

Information:
1. Circular GMS on April 23, 2021, honorably dismissed Benny M.M Marbun as Acting Commissioner and appointed Komang Parmita as Commissioner.
2. Circular GMS on September 14, 2021, honorably dismissed Sriyono Dwidjo Siswoyo as President Commissioner, Defy Indiyanto Budiarto as Commissioner, Sunarsip as Commissioner, and appointed Komang Parmita concurrently as Acting President Commissioner
3. Circular GMS on October 21, 2021, appointed Dedeng Hidayat as President Commissioner and dismissed Komang Parmita in his concurrent position as Acting President Commissioner
4. Circular GMS on December 30, 2021, appointed Emir Kresna Wardana as Commissioner and Bagus Puruhito as Commissioner

Remunerasi Direksi
Remuneration for the Board of Director

Nama Name	Jabatan Position	Remunerasi Bulanan Monthly Remuneration			Tunjangan Tahunan (Rp) Annual Allowances (Rp)	Gaji dan Tunjangan 2021 (Rp) Honorarium and Allowances 2021 (Rp)	Tantiem (Rp)
		Gaji Perbulan (Rp) Honorary Per Month (Rp)	Tunjangan Per Bulan (Rp) Monthly Allowance (Rp)	Total (Rp)	THR (Rp) Annual Religious Holiday Allowances (Rp)		
Gong Matua Hasibuan[1]	Direktur Utama President Director	145.125.000	-	145.125.000	135.000.000	1.586.250.000	-
Sugiyanto[2]	Direktur Operasi- 1 Director of Operations-1	114.750.000	-	114.750.000	114.750.000	539.325.000	930,580,000
M. Yossy Noval A.[2]	Direktur Operasi- 1 Director of Operations-1	123.356.250	-	123.356.250	-	986.850.000	-
Rachmanoe Indarto	Direktur Operasi - 2 Director of Operations-2	123.356.250	-	123.356.250	114.750.000	1.595.025.000	453,657,750
Iwan Purwana	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	123.356.250	-	123.356.250	114.750.000	1.595.025.000	529,267,375
R. Rawan Insani	Direktur Keuangan Director of Finance	123.356.250	-	123.356.250	114.750.000	1.595.025.000	529,267,375
Karyawan Aji	Direktur SDM dan Administrasi Director of HC and Administration	123.356.250	-	123.356.250	114.750.000	1.595.025.000	529,267,375

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 19 Februari 2021, mengangkat dan menetapkan Sdr. Gong Matua Hasibuan sebagai Direktur Utama
2. RUPS Sirkuler tanggal 23 April 2021, memberhentikan dengan hormat Sdr. Sugiyanto sebagai Direktur Operasi – 1 serta mengangkat dan menetapkan Sdr. M. Yossy Noval A. sebagai Direktur Direktur Operasi - 1.

Information
1. Circular GMS on February 19, 2021, appointed and stipulated Br. Gong Matua Hasibuan as President Director
2. Circular GMS on April 23, 2021, honorably dismissed Br. Sugiyanto as Director of Operations – 1 and appointed and appointed Br. M. Yossy Noval A. as Director of Operations - 1

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Non-Performance Bonuses and Stock Options for The Board of Commissioners and The Board of Directors

Sampai dengan akhir tahun 2021, belum terdapat kebijkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang mencakup bonus non kinerja dan opsi saham. Sehingga PJB tidak memberikan bonus non kinerja dan opsi saham kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Until the end of 2021, there were no remuneration policy for the Company's Board of Commissioners and Directors which includes non-performance bonuses and stock options. So that PJB no longer provides non-performance bonuses and stock options to every member of the Board of Commissioners and Directors.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

Sekretariat Dewan Komisaris dalam struktur organ tata kelola PJB merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu kelancaran kegiatan dan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pengurusan Perusahaan. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris PJB dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya.

The Board of Commissioners Secretariat is in charge of assisting and supporting activities and duties of the Board of Commissioners in supervising and providing advice to the Board of Directors regarding the Company management. The Board of Commissioners Secretariat is led by The Board of Commissioners Secretary who is appointed by and responsible directly to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners Secretary is assisted by 2 (two) staff of the Board of Commissioners Secretariat in carrying out their duties.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Profile of The Board of Commissioners Secretary

Endang Sugiarto

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, berdomisili di Jakarta.

Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 004/DK/PJB/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Informatika dari Universitas Budi Luhur pada tahun 1981.

Riwayat Pekerjaan
Mengawali karir sejak tahun 1990 di PLN KJB. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Direksi (2003 - 2008) di PLN Pusat, Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring (2012 - 2014), Manajer Senior Pengembangan Project Management Office PLN Pusat (2014 - 2016), Ketua Tim Pembinaan Kinerja Direktorat Konstruksi (2014 – 2016), Ketua Tim Assessment Malcolm Baldrige (2014 – 2016) dan Ketua Tim Penyusunan Proses Bisnis dan Ketua Tim Manajemen Risiko pada PLN Enjiniring (2016 – 2017).

Indonesian citizen, 62 years old, domiciled in Jakarta

Have served as the Board of Commissioners Secretary since 2017 based on the Board of Commissioners Decree No.004/DK/PJB/2017 on July 19, 2017.

Education
Completed Bachelor of Computer education from Budiluhur University in 1981.

Career History
Started his career at PLN KJB in 1990. He served as Head of the Board of Directors Secretariat (2003 - 2008) at Central PLN, Corporate Secretary of PLN Enjiniring (2012 - 2014), Senior Manager of Project Management Office Development at PLN Central (2014 - 2016), Head of the Construction Directorate Performance Development Team (2014 - 2016), Head of the Assessment Team Malcolm Baldrige (2014 – 2016) and Head of the Business Process Preparation Team and Head of the Risk Management Team at PLN Enjiniring (2016 – 2017).

Pedoman Kerja dan Tugas Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Board Manual, Duties, and Responsibilities of The Board of Commissioners Secretary

Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada *Corporate Governance Code, Board Manual* dan *Board of Commissioners Manual* (BoC Manual) dalam melaksanakan tugasnya mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait fungsi pengawasan Perusahaan yang dijalankan organ Dewan Komisaris dan memahami sistem pengelolaan dan pembinaan Perusahaan, fungsi kesekretariatan serta memiliki integritas yang baik dan mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang rincian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
2. Mengoordinasikan penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris, seperti *monitoring* tindak lanjut hasil keputusan/ rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris, laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
3. Menyusun dan memfinalisasi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait.
5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Komite Komisaris.
6. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
7. Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak - pihak yang berkepentingan.
8. Menetapkan prosedur teknis kunjungan kerja Dewan Komisaris.
9. Menjadi penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

The Board of Commissioners Secretary is guided by the Corporate Governance Code, Board Manual and Board of Commissioners Manual (BoC Manual) in performing duties to support supervisory function of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners Secretary is required to have knowledge related to the Company's supervisory functions carried out by the Board of Commissioners organs and understand the Company management and guidance system, secretarial functions and have good integrity as well as be able to communicate and coordinate well.

Duties and responsibilities of the Board of Commissioners Secretary are as follows:

1. Leading and organizing secretarial activities within the Board of Commissioners with the details of duties are further regulated by the Board of Commissioners.
2. Coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners and the Committees of the Board of Commissioners, such as monitoring follow up on the decisions/recommendations and directions of the Board of Commissioners, periodic reports from the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, IAU Examination Results Reports) and other reports/information regarding the Company management carried out by the Board of Directors.
3. Drafting and finalizing obligation reports and documents of the Board of Commissioners, including Report on the Supervisory Results of the Board of Commissioners and the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.
4. Organizing the Board of Commissioners meetings, preparing and sending invitations, delivering meeting materials, and making minutes of meetings, as well as other related tasks.
5. Coordinating and facilitating the activities of the Board of Commissioners Committees.
6. Collecting technical data from the Board of Commissioners Committees for the Board of Commissioners.
7. Preparing and administering minutes of meetings and other Board of Commissioners documents and sending the results of meeting resolution to interested parties.
8. Establishing technical procedures for working visit of the Board of Commissioners.
9. Becoming liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

10. Dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut.
11. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

10. Being able to access records or information concerning employees, funds, assets, and other Company resources related to the implementation of their duties based on written assignment letters from the Board of Commissioners and is obliged to report in writing the assignment results.
11. The Secretary and Secretariat Staff of the Board of Commissioners are required to maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information, both from internal parties and external parties and are only used for the benefits of their duties.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris
Duty Implementation of The Board of Commissioners Secretary

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan fungsi kesekretariatan dalam lingkup organ pengawasan serta memberian informasi, reviu, kajian dan laporan kepada Dewan Komisaris dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Perusahaan. Selama tahun 2021, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022 dan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris 2021.
2. Membantu penyusunan *draft* laporan Dewan Komisaris yang merupakan kewajiban Dewan Komisaris sesuai ketentuan regulator yang berlaku antara lain:
   a. Laporan pengawasan Dewan Komisaris; dan
   b. Laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris.
3. Memantau, mereviu dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaharuan/penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris serta piagam komite-komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
5. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain:

The Board of Commissioners Secretary carries out secretarial functions within the scope of the supervisory organ as well as dissemination of information, reviews, studies and reports to the Board of Commissioners in order to support duties and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising the implementation of the Company management. During 2021, the Board of Commissioners Secretary had carried out duties that generally include the following:

1. Assisted the drafting of the Board of Commissioners Work Plan 2022 and the Board of Commissioners Work Plan Realization 2021.
2. Assisted the drafting of the Board of Commissioners report as its obligation following the prevailing regulatory provisions, including:
   a. The Board of Commissioners supervisory report; dan
   b. The Board of Commissioners official visit report.
3. Monitored, reviewed, and informed the development of the latest laws and regulations to be submitted to the Board of Commissioners, including the preparation, renewal/adjustment of the Board of Commissioners Decree and charter of committees under the Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.
4. Coordinated and organized the Board of Commissioners meetings including preparing meeting schedules, meeting materials, compiling and administering the minutes of the Board of Commissioners meetings, submitting suggestions and opinions of the Board of Commissioners based on the Board of Commissioners meeting resolution to the Board of Directors, and supervising follow-up to the suggestions and opinions of the Board of Commissioners.
5. Assisted and supported duty implementation of the Committees under the Board of Commissioners as part of the Board of Commissioners duties based on the prevailing regulations, including:

a. Mengkoordinasikan pembagian tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat, serta menyampaikan saran dan pendapat hasil evaluasi dan rapat Komite kepada Dewan Komisaris sebagai masukan;
c. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris; dan
d. Memastikan penyelesaian Laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

6. Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas Komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi dokumen/surat-menyurat Komisaris termasuk mempersiapkan surat-surat persetujuan serta masukan/ saran Dewan Komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.

a. Coordinated duty division of the committees under the Board of Commissioners;
b. Coordinated and held meetings of the committees under the Board of Commissioners including prepared the meeting materials, compiled, and administered minutes of meetings, as well as submitted suggestions and opinions on the evaluation results and committee meetings to the Board of Commissioners as a recommendation.
c. Supervised Work Plans Implementation of the committees under the Board of Commissioners; dan
d. Ensured the report completion of the committees under the Board of Commissioners.

6. Carried out administrative duties related to the Board of Commissioners duties, namely the management, storage, and administration of the Board of Commissioners documents/correspondence including drafted the approval letters and strategic input/suggestions from the Board of Commissioners to be submitted to the Board of Directors.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris
Remuneration for The Board of Commissioners Secretary

Komponen penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, Fasilitas dan Tunjangan ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Income component of the Board of Commissioners Secretary consists of honorarium, facilities and allowances determined by the Board of Commissioners. The amount and type of income of the Board of Commissioners Secretary is determined by considering the ability and provisions applicable in the Company.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris
Performance Assessment of the Board of Commissioners Secretary

Penilaian atas kinerja Sekretaris Dewan Komisaris merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris khususnya terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris dievaluasi secara internal dalam lingkup organ Dewan Komisaris secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan realisasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris serta indikator lain yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Performance assessment of the Board of Commissioners Secretary is an effort to improve the quality of duties implementation of the Board of Commissioners Secretary, especially related to the implementation of good corporate governance. Duties implementation of the Board of Commissioners Secretary is evaluated internally within the scope of the Board of Commissioners organ periodically at least 1 (one) time a year. Performance assessment of the Board of Commissioners Secretary is carried out based on the realization of the duties and responsibilities implementation of the Board of Commissioners Secretary in supporting supervisory function of the Board of Commissioners and other indicators determined by the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Dewan Komisaris PJB telah membentuk Komite Audit yang merupakan organ pendukung dalam tata kelola perusahaan PJB terkait fungsi pengawasan. Tugas pokok Komite Audit adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya terkait pengawasan atas efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Komite Audit memantau dan memastikan berjalannya fungsi-fungsi yang berhubungan dengan audit dan pengendalian internal Perusahaan secara profesional dan independen. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

PJB's Board of Commissioners has formed an Audit Committee which is a supporting organ in PJB's corporate governance related to the supervisory function. The main task of the Audit Committee is to assist in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, particularly related to the supervision of the effectiveness of the implementation of the internal control system. The Audit Committee monitors and ensures the functioning of the functions related to the audit and internal control of the Company professionally and independently. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed and are directly responsible to the Board of Commissioners.

Dasar Pembentukan Komite Audit
Establishment Basis of Audit Committee

Dasar pembentukan Komite Audit mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit PJB terakhir kali ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 014.K/DK/PJB/2020, tanggal 28 Desember 2020, tentang Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali.

The basis for the establishment of the Audit Committee refers to Law Number 19 of 2003; Law Number 40 of 2007 and Regulation of the Ministry of SOE Number: PER-12/MBU/2012 on August 24, 2012, Regulation of the Ministry of SOE Number PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER- 12/MBU/2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Regulation of the Ministry of SOE Number PER-14/MBU/10/2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises. PJB Audit Committee was last established based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 014.K/DK/PJB/2020, on December 28, 2020, regarding the Establishment of the Audit Committee at the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Duties and Responsibilities of Audit Committee

Tugas pokok dan tanggung jawab Komite Audit dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris PJB khususnya terkait penerapan audit internal dan efektifitas pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Secara spesifik tugas dan tanggung jawab Komite Audit diuraikan dalam Piagam Komite Audit PJB, antara lain adalah sebagai berikut :

The main duties and responsibilities of the Audit Committee are in supporting the supervisory function of the PJB Board of Commissioners, particularly related to the implementation of internal audits and the effectiveness of internal control, including the adequacy of the financial reporting process. Specifically, the duties and responsibilities of the Audit Committee are outlined in the PJB Audit Committee Charter, including the following:

1. Membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana kegiatan, jadwal dan penggunaan sumber daya.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit.
3. Menyampaikan dengan segera temuan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal maupun Internal yang potensial dan signifikan.
4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor, terutama temuan potensial dan signifikan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas.
5. Menelaah Laporan Keuangan Perusahaan dan Informasi Keuangan lainnya yang akan disampaikan kepada pemegang saham.
6. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris antara lain melakukan *review*/evaluasi internal *audit charter,* kinerja dan efektifitas kegiatan SPI, kecukupan SDM SPI serta struktur organisasi SPI.
7. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris agar Direksi menugaskan kepada SPI untuk melaksanakan pemeriksaan tertentu/pemeriksaan khusus.
8. Menyampaikan usulan dalam proses penetapan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik) yang akan melakukan audit.
9. Menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk memasukkan hal-hal strategik dalam ruang lingkup pemeriksaan, dalam penyusunan PKAT SPI PJB.

1. Preparing annual work plan/program containing activities, schedules, and the use of resources.
2. Submitting reports regularly to the Board of Commissioners regarding the Audit Committee activities.
3. Conveying immediately the potential and significant findings of internal or external auditor examination results.
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the follow-up of auditor examination results, especially potential and significant findings that have not been followed up completely.
5. Reviewing the Company's Financial Statement and other Financial Information to be submitted to the shareholders.
6. Providing suggestions and recommendations to the Board of Commissioners regarding matters related to the Board of Commissioners duties, among others, conducting review/evaluation of internal audit charter, performance, and effectiveness of IAU activities, IAU HR adequacy, and IAU organizational structure.
7. Proposing to the Board of Commissioners so as the Board of Directors assigns the IAU to carry out certain examinations/ special examinations.
8. Submitting proposal in the determining process of the External Auditor (Public Accounting Firm) that will conduct audits.
9. Submitting proposals to the Board of Commissioners to include strategic matters concerning the examination in the preparation of PJB's IAU AAWP.

Susunan Komite Audit
Audit Committee Composition

Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris merangkap anggota serta setidaknya 2 (dua) orang anggota. Susunan keanggotaan Komite Audit PJB pada tahun 2021 mengalami perubahan karena terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris yang jangka waktunya telah habis. Sehingga susunan keanggotaan Komite Audit PJB tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Audit Committee is chaired by a Chair who is a member of the Board of Commissioners and is assisted by a Secretary who is also a member and at least 2 (two) members. The composition of PJB's Audit Committee in 2021 was changed following the change in the composition of the Board of Commissioners due to the end of the term. Thus, the composition of the membership of the PJB Audit Committee in 2021 is as follows:

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Susunan Komite Audit Januari - September 2021
Composition of Audit Committee as of January - September 2021

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Sunarsip	Ketua Chairman (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Akuntansi, Keuangan dan Audit Accounting, Finance, and Audit	Januari - September 2021 January - September, 2021
Defy Indiyanto Budiarto	Wakil Ketua Vice Chairman (Komisaris) (Commissioner)	Komunikasi Korporat, Strategi Korporasi Corporate Communications, Corporate Strategy	Januari - September 2021 January - September, 2021
Sigit Djalu Purwoko	Sekretaris Secretary (Pihak Independen) (Independent Party)	Manajemen *Strategic*, Internal Auditing, dan Eksaminasi *Fraud*. Strategic Management, Internal Auditing, and Fraud Examination.	Januari - Desember 2021 January - December, 2021
Andar Sudiar Sukma	Anggota Member (Pihak Independen) (Independent Party)	Hukum/Kepatuhan, Internal *Auditing*, dan Eksaminasi *Fraud*. Legal/Compliance, Internal Auditing, and Fraud Examination.	Januari - Desember 2021 January - December, 2021

Susunan Komite Audit Oktober - Desember 2021
Susunan Komite Audit Oktober - Desember 2021

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Hendra Iswahyudi	Ketua Chairman (Komisaris) (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ekonomi Engineering Physics, Planning and Public Policy, Economics	Oktober - Desember 2021 October - December, 2021
Sigit Djalu Purwoko	Sekretaris Secretary (Pihak Independen) (Independent Party)	Manajemen *Strategic*, Internal Auditing, dan Eksaminasi *Fraud*. Strategic Management, Internal Auditing, and Fraud Examination.	Januari - Desember 2021 January - December, 2021
Andar Sudiar Sukma	Anggota Member (Pihak Independen) (Independent Party)	Hukum/Kepatuhan, Internal *Auditing*, dan Eksaminasi *Fraud*. Legal/Compliance, Internal Auditing, and Fraud Examination.	Januari - Desember 2021 January - December, 2021

Profil Anggota Komite Audit
Audit Committee Member Profile

Hendra Iswahyudi

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section.

Sigit Djalu Purwoko

Sekretaris Komite Audit
Secretary of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 014.K/DK/PJB/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Elektroteknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1984; S2 Bidang Manajemen Pemasaran dari STIE IPWI Jakarta tahun 2001 dan S3 Bidang Ekonomi Bisnis dari Universitas Padjajaran tahun 2014.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Sertifikasi *Advance to Integration/Requirements For Certification As Established In The CRMP Body Of Knowledge For Professional* (2012-2014), *Qualified Internal Auditor* (QIA) (2004), *Certified Fraud Examiner* (CFE) (2006), *Certified Risk Management Professional* (CRMP) (2010); *Certified Forensic Auditor* (CFrA) (2014) dan Ahli K3U (2020).

Indonesian citizen, 63 years old, domiciled in Jakarta.

Deed of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners Number 014.K/DK/PJB/2020 dated December 28, 2020.

Education
Completed Bachelor of Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology in 1984; S2 in Marketing Management from STIE IPWI Jakarta in 2001 and S3 in Business Economics from Padjadjaran University in 2014.

In addition, non-formal education that has been followed to obtain certification includes Advance to Integration/Requirements For Certification As Established In The CRMP Body Of Knowledge For Professional (2012-2014) Certification, Qualified Internal Auditor (QIA) (2004), Certified Fraud Examiner (CFE) (2006), Certified Risk Management Professional (CRMP) (2010); Certified Forensic Auditor (CFrA) (2014) and K3U Expert (2020).

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Riwayat Pekerjaan
Mulai berkarir sebagai Pegawai PLN sejak tahun 1984, Kepala Bagian Teknik di PLN (1987-1992), Kepala Cabang PLN (1992-2001), Manager Area PLN (2001), Manajer Distribusi dan Pemasaran (2001-2003), Advance Audit Khusus SPI PLN Kantor Pusat (2003-2008), Manager Senior Kinerja Distribusi Jawa Bali (2008-2009), Kepala Audit Internal (KAI) PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2009-2010), Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan SPI PLN Kantor Pusat (2010-2012), Expert Audit III (2012-2015) dan Pelaksana Tugas Kepala Satuan Pengawasan Intern PLN Kantor Pusat (2015). Setelah pensiun pada 1 Mei 2015, diminta oleh Direksi PT PLN (Persero) sebagai Expert Audit I, II, dan III untuk pembinaan dan pengembangan SPI PT PLN (Persero) dari 196 Auditor menjadi 1000 Auditor fresh graduate pada 31 Desember 2017. Pada masa itu juga menjabat sebagai Inspektur Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Regional Kantor Pusat (2016-2017).

Employment history
Started his career as a PLN employee since 1984, Head of Engineering at PLN (1987-1992), Head of PLN Branch (1992-2001), PLN Area Manager (2001), Distribution and Marketing Manager (2001-2003), Advance Special Audit for IAU of PLN Head Office (2003-2008), Senior Manager of Distribution Performance for Java and Bali (2008-2009), Head of Internal Audit (KAI) for PLN West Java and Banten Distribution (2009-2010), Head of Development and Development of IAU for PLN Head Office (2010 -2012), Expert Audit III (2012-2015) and Acting Head of the PLN Head Office Internal Control Unit (2015). After retiring on May 1, 2015, he was asked by the Board of Directors of PT PLN (Persero) as Expert Audit I, II, and III for the guidance and development of PT PLN (Persero) IAU from 196 Auditors to 1000 Auditors, freshly graduated on December 31, 2017. At that time also served as Inspector of the Internal Control Unit of PT PLN (Persero) Regional Head Office (2016-2017).

Andar Sudiar Sukma
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 014.K/DK/PJB/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum dari Universitas Indonesia tahun 2004.
Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya *Certified Fraud Examiner* (CFE) (2012), kandidat *Certified Risk Management Professional* (CRMP) (2016), *Certified Governance Profesional* (CGP) (2019), dan *Certified on Committee Audit Practice* (CACP) (2019); Sertifikasi *Team Leader* Audit ISO 37001 (2021) serta telah memiliki lisensi untuk menjalankan Profesi Advokat (2018).

Indonesian citizen, 41 years old, domiciled in Jakarta.

Deed of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners Number 014.K/DK/PJB/2020 dated December 28, 2020.

Education
Completed his Bachelor of Law education from the University of Indonesia in 2004.
In addition, non-formal education that has been followed to obtain certification include Certified Fraud Examiner (CFE) (2012), Certified Risk Management Professional (CRMP) candidate (2016), Certified Governance Professional (CGP) (2019), and Certified on Committee Audit Practice (CACP) (2019); ISO 37001 (2021) Audit Team Leader Certification and has a license to run the Advocate Profession (2018).

Riwayat Pekerjaan
Pernah berkarir sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) *Associate Consultant* Sofyan Djalil & Partner (2004-2005), *Executive Compliance* PT Prudential Life Assurance (Life Insurance) (2005-2006), *Resident Auditor* dan Auditor Internal untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2014), Manajer Hukum Perikatan Bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2014-2015), Legal Head/GM Legal untuk PT Transjakarta (2015-2016), *Associate Director* PT Sinergi Daya Prima (SDP Consulting) (2016-2018) dan Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan PT Pembangkitan Jawa Bali (2016 -2017).

Employment history
He had a career as Good Corporate Governance (GCG) Associate Consultant Sofyan Djalil & Partner (2004-2005), Executive Compliance at PT Prudential Life Assurance (Life Insurance) (2005-2006), Resident Auditor and Internal Auditor for PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2006-2014), Legal Manager of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2014-2015), Legal Head/GM Legal for PT Transjakarta (2015-2016), Associate Director of PT Sinergi Daya Prima (SDP Consulting) (2016 -2018) and the Risk Management & Compliance Committee of PT Pembangkitan Jawa Bali (2016 -2017).

Masa Jabatan Komite Audit
Audit Committee Term of Office

Anggota Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan masa jabatan yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris. Sedangkan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 (dua) tahun diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali pada masa jabatan berikutnya.

Members of the Audit Committee are determined based on the Decree of the Board of Commissioners with a term of office of 1 (one) year and can be extended following the term of office of the Board of Commissioners. Meanwhile, members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners who have served for a maximum of 2 (two) years are appointed for 1 (one) term of office and may be reappointed for 1 (one) time in the next term of office.

Dewan Komisaris PJB melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan dapat pula diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/ atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

PJB's Board of Commissioners appoints and dismisses members of the Audit Committee through a Decree of the Board of Commissioners and reports to the GMS. Dismissal of members of the Audit Committee can be done if the relevant term of office ends and can also be dismissed based on the decision of the Board of Commissioners if the person does not meet the predetermined performance and/or are not competent in performing their duties.

Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Audit dapat bertindak independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Audit PJB telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Board of Commissioners considers that the Audit Committee can act independently solely for the benefit of the Company, regardless of the influence of various parties who have interests that may conflict with the interests of the Company. PJB Audit Committee members have met the following independence criteria:

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence

Kriteria Independensi	Independence Criteria	Hendra Iswahyudi	Sigit Djalu Purwoko	Andar Sudiar Sukma
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	Not a person in a public accounting firm, legal consulting firm, or other party providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.	Not owning any share either directly or indirectly in the Company.	√	√	√
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not a person with the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda.	Not affiliated in blood family relationship with members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the second degree, either in the straight line or sideways or by marriage	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan	Not affiliated directly or indirectly in business relationships related to the Company's business activities; and	√	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.	Not currently in an institution in which business activities provide services to the Company	√	√	√

Pedoman Kerja Komite Audit
Audit Committee Charter

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja Komite Audit dalam bentuk Piagam Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2018 untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit. Piagam Komite Audit memuat ketentuan antara lain: Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok dan Tanggung Jawab, Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, Penilaian Kinerja Anggota Komite, Pertemuan/rapat dan Kode Etik.

The Board of Commissioners has determined the work guidelines of the Audit Committee in the form of the Audit Committee Charter on December 31, 2018, to support the implementation of the duties by the Audit Committee. The Audit Committee Charter contains provisions including Purpose and Objectives, Main Functions and Duties and Responsibilities, Authority, Organization and Membership, Performance Assessment of Committee Members, Meetings, and Code of Ethics.

Guna memastikan bahwa ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Audit tersebut senantiasa sesuai dengan kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan best practices, Komite Audit mengkaji ulang dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran terhadap Piagam Komite Audit secara berkala.

To ensure that the provisions stipulated in the Audit Committee Charter are always following the needs, applicable laws, and best practices, the Audit Committee reviews and if deemed necessary can be updated on the Audit Committee Charter regularly.

Rencana Program Kerja Komite Audit
Work Program Plan of Audit Committee

Komite Audit menyusun rencana program kerja setiap tahun untuk mendorong efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Program kerja Komite Audit tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari :
   a. Kegiatan internal Komite Audit yang mencakup :
      1) Evaluasi Laporan Manajemen dan Kinerja Korporat.
      2) Penyiapan surat Dewan Komisaris sesuai bidang tugas Komite Audit.
      3) Melakukan *monitoring* KPI Dewan Komisaris dan *monitoring* arahan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham sesuai RUPS.
      4) Penyiapan dan penyampaian Laporan Kinerja Komite Audit.
   b. Kegiatan Koordinasi Komite Audit Dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI), mencakup :
      1) *Review* dan Evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
      2) Pembahasan berkala mengenai Hasil Audit SPI dan Hasil Audit Eksternal.
      3) Supervisi terhadap pelaksanaan *Risk Based Audit* (RBA), evaluasi pengendalian internal korporat, implementasi *Quality Assurance Review,* dan Fungsi SPI diluar Audit.
      4) Kordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), SPI PT PLN (Persero) dan auditor eksternal lainnya.
2. Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari :
   a. *Review* dan pengkinian atas dokumen Piagam Komite Audit.
   b. *Review* dan Evaluasi atas program korporat tahun 2021 dibidang Akuntansi dan keuangan.
   c. *Review* dan Evaluasi atas isu/program operasional korporat tahun 2021 dibidang *Equivalent Availibility Factor* (EAF) Pembangkit Eksisting, serta dampak penerapan *coal switching* pada pembangkit eksisiting.

The Audit Committee annually prepares a work program plan to encourage the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Audit Committee in supporting the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners. The work program of the Audit Committee in 2021 is as follows:

1. Routine Activities:
   a. Internal Audit Committee activities, including:
      1) Evaluation of Management Reports and Corporate Performance.
      2) Preparation of the Board of Commissioners letter according to the Audit Committee's Duties.
      3) Monitoring the KPI of the Board of Commissioners and direction from the Board of Commissioners and the shareholders according to the GMS.
      4) Preparation and Submission of Audit Committee Performance Reports.
   b. Audit Committee Coordination Activities with Internal Audit Unit (IAU), include the following:
      1) Review and evaluation of the Annual Audit Work Program (AAWP).
      2) Periodic discussions concerning the results of the IAU audit and external audit.
      3) Supervision of the Risk-Based Audit (RBA) implementation, evaluation of corporate internal control, the implementation of the Quality Assurance Review, and the IAU function outside the audit.
      4) Coordination with the Public Accountant Firm (PAF), IAU of PT PLN (Persero), and other external auditors
2. Special/non-routine activities:
   a. Review and withdrawal of the Audit Committee Charter document.
   b. Review and evaluation of the Corporate Program in 2021 in the field of Accounting and Finance.
   c. Review and evaluation of corporate operational issues/ programs in 2021 in the field of Equivalent Availability Factor (EAF), existing power plant, as well as the impacts of the coal switching implementation on the existing power plant.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

d. *Review* dan Evaluasi mengenai penerapan *Three Line of Defence* di Perusahaan
e. Evaluasi atas rencana korporat untuk melaksanakan *Internal Control for Financial Reporting* (ICoFR)
f. Kunjungan lapangan ke pembangkit-pembangkit milik dan yang dikelola oleh Perusahaan
g. Koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris lainnya.

3. Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit.

d. Review and evaluation concerning the implementation of Three Line Defense in the Company
e. Evaluation of corporate plans to implement Internal Control for Financial Reporting (ICoFR)
f. Field visits to power plants owned and managed by the Company
g. Coordination with the Secretary of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Committee.

3. Competency Development Program of the Audit Committee.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit
Duty Implementation of Audit Committee

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana program kerja Komite Audit tahun 2021. Rencana program kerja tersebut direalisasikan diantaranya dengan melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, SPI dan pertemuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Komite Audit melaporkan realisasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris.

Pada periode tahun 2021 (Triwulan I - IV), Komite Audit PJB telah melaksanakan program kerja dan kegiatan serta memberikan masukan antara lain terkait dengan:

1. Pembahasan evaluasi PILAR.
2. Penyelesaian Laporan Komite Audit Triwulan IV Tahun 2020.
3. *Kick Off Meeting* GCG PLN Grup dengan BPKP.
4. Pembahasan Laporan Kerja Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan IV Tahun 2020 serta Triwulan I, II dan III Tahun 2021.
5. Kunjungan Kerja bersama Dewan Komisaris ke PLTU Indramayu, PLTS Cirata, Ciheras, Rembang, PLTA Batang Toru, PLTU Cilacap serta UP Paiton 1 dan 2.
6. Mengikuti Webinar GRC LSPMR.
7. *Focus Group Discussion* (FGD) *Assessment* GCG Aspek III Dewan Komisaris bersama BPKP.
8. Penyelesaian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2020.
9. Pembahasan Permasalahan Hukum PJB.
10. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Dewan Komisaris.

The Audit Committee has carried out its duties and responsibilities based on the 2021 Audit Committee work program plan. The work program plan is realized among others by conducting reviews, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, IAU, and other meetings related to the implementation duties of the Audit Committee as well as conducting working visits with the Board of Commissioners. The Audit Committee reports the realization of the work program quarterly to the Board of Commissioners.

In the period 2021 (Quarter I - IV), the PJB Audit Committee has implemented work programs and activities and provided input, among others, related to:

1. Discussion on the evaluation of PILAR.
2. Completion of the 2020 Quarter IV Audit Committee Report.
3. PLN Group's GCG Kick-Off Meeting with BPKP.
4. Discussion on the Internal Audit Unit Work Reports (IAUWR) for the fourth quarter of 2020 and the first, second, and third quarters of 2021.
5. Site visits with the Board of Commissioners to Indramayu CFPP, Cirata SPP, Ciheras, Rembang, Batang Toru HPP, Cilacap CFPP, and Paiton 1 and 2 GUs.
6. Participate in the LSPMR GRC Webinar.
7. Focus Group Discussion (FGD) GCG Assessment Aspect III of the Board of Commissioners with BPKP.
8. Completion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners in Semester II of 2020.
9. Discussion of PJB Legal Issues.
10. Discussion on the Follow-up to the Directions of the GMS and the Board of Commissioners.

11. Pembahasan *Overhaul* Pembangkit.
12. Pembahasan *Internal Control Over Finansial Report* (ICoFR).
13. Pembahasan KPI Individu Direksi.
14. Evaluasi Kinerja KAP tahun buku 2020.
15. *Sharing Knowledge* Komite Audit dengan PJBA.
16. Pembahasan Kinerja Keuangan PJB tahun 2021.
17. Mengikuti Webinar *Power Plant Audit.*
18. Diskusi *Three Line Of Defence* UP Cirata.
19. Pembahasan TKDN Proyek PLTS Cirata.
20. Pembahasan *Corporate Charter.*
21. Pembahasan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2022 dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) PJB.
22. Pembahasan RKAP tahun 2022.
23. *Self Assessment* GCG tahun buku 2021.
24. Peresmian PLTS Bawean.
25. Mengikuti Kegiatan yang diinisiasi oleh komite lainnya.

11. Discussion of Power Plant Overhaul.
12. Discussion on Internal Control over Financial Report (ICoFR).
13. Discussion of Individual KPIs for the Board of Directors.
14. Performance Evaluation of PAF for the 2020 Fiscal Year.
15. Knowledge Sharing of the Audit Committee with PJBA.
16. Discussion of PJB's Financial Performance in 2021.
17. Participate in the Power Plant Audit Webinar.
18. Discussion on Three Lines of Defense Cirata GU.
19. Discussion of TKDN Cirata SPP Project.
20. Discussion of Corporate Charter.
21. Discussion of the 2022 Annual Audit Work Program (AAWP) with PJB's Internal Audit Unit (IAU).
22. Discussion of the 2022 ABOP.
23. Self-Assessment of GCG for the 2021 Fiscal Year.
24. Inauguration of Bawean SPP.
25. Participate in activities initiated by other committees.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit. Selain itu, Komite Audit wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama fungsi keuangan dan Internal Audit dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana diuraikan dalam BoC *Manual* PJB. Komite Audit telah melaksanakan rapat internal sepanjang tahun 2021 sebanyak 30 kali.

The Audit Committee holds regular meetings at least once a month to complete the Audit Committee Work Program as stipulated in the Audit Committee Charter. In addition, the Audit Committee is required to hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once a month and hold meetings with related functions, especially the financial function and Internal Audit to discuss the developments and activities of the Company, either periodically or at any time if necessary as stated in PJB's BoC Manual. The Audit Committee has held 30 internal meetings in 2021.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	5 Januari 2021 January 5, 2021	Pembahasan evaluasi PILAR.	Discussion on PILAR evaluation.
2	13 Januari 2021 January 13, 2021	Penyelesaian Laporan Komite Audit Triwulan IV Tahun 2020.	Completion of the Fourth Quarter 2020 Audit Committee Report.
3	15 Februari 2021 February 5, 2021	Pembahasan Laporan Kerja Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan IV Tahun 2020.	Discussion on the Internal Audit Unit Work Reports (IAUWR) Quarter IV of 2020.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
4	18 Februari 2021 February 18, 2021	Pemantauan implementasi aplikasi IZAT, ICORE dan pemanfaatan FABA PLTU Indramayu.	Monitoring the implementation of the IZAT, ICORE, and FABA Indramayu CFPP applications.
5	15 Maret 2021 March 15, 2021	Pembahasan pemenuhan dokumen Asesmen GCG Aspek 3 Dewan Komisaris.	Discussion on the fulfillment of the GCG Assessment Aspect 3 of the Board of Commissioners.
6	16 Maret 2021 March 16, 2021	Penyelesaian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2020.	Completion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners for Semester II of 2020.
7	29 Maret 2021 March 29, 2021	Pembahasan Permasalahan Hukum PJB.	PJB Legal Issues Discussion.
8	20 April 2021 April 20, 2021	Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS.	Discussion on Follow-up to GMS Directions.
9	21 April 2021 April 21, 2021	Pembahasan *Overhaul* Pembangkit.	Discussion of Generator Overhaul.
10	25 Mei 2021 May 25, 2021	Pembahasan Laporan Kerja Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan I Tahun 2021.	Discussion on the Internal Audit Unit Work Reports (IAUWR) Quarter I 2021.
11	25 Mei 2021 May 25, 2021	Pembahasan *Internal Control Over Finansial Report* (ICoFR).	Discussion of the Internal Control Over Financial Report (ICoFR).
12	5 Juni 2021 June 5, 2021	Pembahasan pengembangan EBT khususnya PLTB skala kecil	Discussion on NRE development, especially small-scale PLTB
13	8 Juni 2021 June 8, 2021	Pembahasan KPI Individu Direksi.	Discussion of Individual KPIs for the Board of Directors.
14	14 Juni 2021 June 14, 2021	Evaluasi Kinerja KAP tahun buku 2020	KAP Performance Evaluation for the 2020 Fiscal Year
15	5 Juli 2021 July 5, 2021	*Sharing Knowledge* Komite Audit dengan PJBA.	Sharing Knowledge of the Audit Committee with PJBA.
16	26 Juli 2021 July 26, 2021	Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS.	Discussion on Follow-up to GMS Directions.
17	9 Agustus 2021 August 9, 2021	Pembahasan Laporan Kerja Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan II Tahun 2021.	The Internal Audit Unit Work Reports (IAUWR) of Quarter II 2021.
18	23 Agustus 2021 August 23, 2021	Pembahasan Kinerja Keuangan PJB tahun 2021.	Discussion of PJB's Financial Performance in 2021.
19	9 September 2021 September 9, 2021	Pembahasan capaian kinerja, FABA dan K3L PLTU Rembang.	Discussion of performance achievements, FABA, and HSE of Rembang CFPP.
20	15 Oktober 2021 October 15, 2021	Diskusi *Three Line Of Defence* dan TKDN Proyek UP Cirata.	Discussion on Three Lines of Defense and TKDN for the Cirata GU's Project.
21	23-24 Oktober 2021 October 23-24, 2021	Progres pembangunan PLTA Batang Toru.	Construction progress of Batang Toru HPP.
22	8 November 2021 November 8, 2021	Pembahasan Laporan Kerja Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan III Tahun 2021.	Discussion on the Internal Audit Unit Work Reports (IAUWR) Quarter III 2021.
23	9 November 2021 November 9, 2021	Pembahasan *Corporate Charter.*	Discussion of Corporate Charter.

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
24	13 November 2021 November 13, 2021	Pembahasan program pemberdayaan masyararakat, pengelolaan aspek lingkungan dan potensi penggunaan *biomassa* serta *cofiring*.	Discussion of community empowerment programs, management of environmental aspects, and the potential use of biomass and cofiring.
25	19 November 2021 November 19, 2021	Pembahasan *Basic Communication* lingkungan terkait proyek PLTS Cirata.	Discussion of environmental Basic Communication related to the Cirata SPP project.
26	22 November 2021 November 22, 2021	Pembahasan RKAP tahun 2022.	Discussion of the 2022 ABOP.
27	24 November 2021 November 24, 2021	Pembahasan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2022 dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) PJB.	Discussion of the 2022 Annual Audit Work Program (AAWP) with PJB's Internal Audit Unit (IAU).
28	7 Desember 2021 December 7, 2021	*Self Assessment* GCG aspek Dewan Komisaris.	GCG Self-Assessment aspects of the Board of Commissioners.
29	11 Desember 2021 December 11, 2021	Peran PLTU Cilacap sebagai *back bone* jalur selatan dan mendukung *Net Zero Emission.*	The role of Cilacap CFPP as the backbone of the southern route and supporting Net Zero Emission.
30	21 Desember 2021 December 11, 2021	Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Dewan Komisaris.	Discussion of Follow-up to GMS and Board of Commissioners' recommendations.

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit
Frequency of Internal Meetings and Attendance of Audit Committee Members

Nama Name	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Sigit Djalu Purwoko	30	30	100%
Andar Sudiar Sukma	30	30	100%

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Audit Committee Competency Development Program

Anggota Komite Audit PJB mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite Audit PJB sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

Members of the PJB Audit Committee participate in competency development activities to support the implementation of the duties of the Audit Committee. The competency development program for PJB Audit Committee Members throughout 2021 can be seen in the descriptions related to Education and Training for the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Penilaian Kinerja Komite Audit
Audit Committee Performance Assessment

Kinerja Komite Audit dievalusi secara berkala baik *self assessment* maupun oleh Dewan Komisaris dalam agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris untuk memastikan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas Komite Audit. Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target atas realisasi Rencana Kerja Tahunan Komite Audit dengan indikator penilaian yang meliputi:

1. Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris.
2. Kualitas pekerjaan.
3. Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris.
4. Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID).
5. Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM).
6. Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

The performance of the Audit Committee is evaluated periodically, both through self-assessment and by the Board of Commissioners in the agenda of the internal evaluation meeting of the Board of Commissioners and the organs of the Board of Commissioners to ensure and encourage the effectiveness of the implementation of the duties of the Audit Committee. Assessment of the performance of the Audit Committee is carried out based on criteria in the form of achieving targets for the realization of the Audit Committee's Annual Work Plan with assessment indicators which include:

1. Timeliness of the agenda for the activities of the Board of Commissioners.
2. Quality of work.
3. Contribution to the activities of the Board of Commissioners.
4. Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID).
5. Meetings (RID, RDD, RKM).
6. Preparation of the Board of Commissioners' Supervisory Report.

Berikut adalah hasil penilaian kinerja Komite Audit pada tahun 2021:

The following are the results of the Audit Committee's performance assessment in 2021:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Audit
Audit Committee Performance Evaluation Table

No.	Parameter Penilaian Rating Parameters	Rata-Rata Average
1	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris Timeliness of the agenda for the activities of the Board of Commissioners	9,00
2	Kualitas pekerjaan Quality of work	9,17
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris Contribution to the activities of the Board of Commissioners	8,83
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID) Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID)	8,50
5	Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM) Meetings (RID, RDD, RKM)	8,50
6	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners	9,17
Rata-Rata Skor Average Score		**8,86**

Hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The results of the assessment are then used to formulate corrective, development, and improvement steps needed to increase the effectiveness of the implementation of the duties of the Audit Committee in supporting the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

Dewan Komisaris PJB telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang merupakan organ pendukung dalam tata kelola perusahaan PJB terkait fungsi pengawasan. Tugas pokok adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya terkait pengawasan kebijakan dan strategi Perusahaan dari sisi risiko maupun kepatuhan. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penilaian tehadap hasil kajian risiko dan kepatuhan pada kegiatan perencanaan, operasional dan investasi Perusahaan serta kegiatan evaluasi atas penerapan *Enterprise Risk Management* di Perusahaan. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

PJB's Board of Commissioners of PJB established a Risk Management and Compliance Committee which is a supporting organ in PJB corporate governance related to the supervisory function. Their main task is to assist in the duties and responsibilities implementation of the Board of Commissioners, especially related to supervision of the Company's policies and strategies in terms of risk and compliance. The Risk Management and Compliance Committee provides input to the Board of Commissioners on the risk and compliance assessments results in the Company's planning, operational and investment activities as well as evaluation activities on the implementation of Enterprise Risk Management in the Company. The Risk Management and Compliance Committee is appointed and dismissed, as well as reports directly to the Board of Commissioners.

Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Basis for the Establishment of the Risk Management and Compliance Committee

Dasar pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB terakhir kali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 001.K/DK/PJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali.

The basis for the establishment of the Risk Management and Compliance Committee refers to Law Number 19 of 2003; No.40 of 2007 and the Minister of SOE Regulation NO: PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, the Minister of SOE Regulation Number PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to the Minister of SOE Regulation of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Organs of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOE No. PER-14/MBU/10/2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Directors Commissioner/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises. The Risk Management and Compliance Committee of PJB was last established based on the Board of Commissioners Decree of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 001.K/DK/PJB/2021 dated January 29, 2021 concerning the establishment of a Risk Management and Compliance Committee on the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Duties and Responsibilities of the Risk Management and Compliance Committee

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris PJB akan berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas pada semua kegiatan termasuk Direksi dan seluruh jajaran manajemen, terutama yang menangani manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab ini didasarkan kepada fungsi dan tugas pokok sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite. Tugas pokok Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Menilai dan memberi masukan terhadap kebijakan dan strategi Perusahaan kepada Dewan Komisaris, baik dari sisi risiko maupun kepatuhan.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penilaian tehadap hasil kajian analisa risiko dan kepatuhan pada:
   a. Kegiatan Perencanaan Perusahaan.
   b. Kegiatan Operasional Perusahaan.
   c. Kegiatan Investasi Perusahaan.
   d. Kegiatan Evaluasi atas penerapan *Enterprise Risk Management* di Perusahaan.
   e. Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite.
4. Memantau dan menilai bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada di dalam RJPP dan RKAP telah mengandung pendekatan *Enterprise Risk Management* terhadap berbagai risiko Perusahaan;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran kepada Direksi mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses manajemen risiko.
6. Melakukan penelaahan terhadap aksi korporasi strategis yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait aspek kepatuhan dan manajemen risiko.

Duties and responsibilities implementation of the Risk Management and Compliance Committee in supporting the supervisory function of PJB's Board of Commissioners will be in contact with the related parties, each of which has a clear responsibility for all activities including the Board of Directors and all management levels, especially those handling the risk management. The Risk Management and Compliance Committee is responsible to the Board of Commissioners. The main duties of Risk Management and Compliance Committee are as follows:

1. Assessing and providing input on the Company's policies and strategies to the Board of Commissioners, both in terms of risk and compliance.
2. Providing input to the Board of Commissioners on the assessment of the risk analysis and compliance study results on the following:
   a. The Company's Planning Activities.
   b. The Company's Operational Activities
   c. The Company's Investment Activities
   d. Evaluation activities on the implementation of Enterprise Risk Management in the Company.
   e. The Company's Compliance Level in submitting periodic reports to the Board of Commissioners.
3. Submitting periodic reports to the Board of Commissioners regarding the activities of the Committee.
4. Monitoring and assessing that all of the Company's activities in the CLTP and ABOP have contained Enterprise Risk Management approach to the Company's various risks;
5. Assisting the Board of Commissioners in providing advice to the Board of Directors on various matters that can improve the smoothness and effectiveness of the risk management process.
6. Reviewing strategic corporate actions that require written approval or response from the Board of Commissioners regarding compliance and risk management aspects.

7. Melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan apakah pengendalian risiko dan penerapan aspek kepatuhan telah dilaksanakan tepat dan efektif.
8. Melakukan penilaian terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
9. Bertindak sebagai *early warning system* dengan memberikan kajian berupa saran dan rekomendasi terkait penerapan manajemen risiko dan kepatuhan kepada Dewan Komisaris.

7. Reviewing the field to ensure whether risk control and implementation of compliance aspects have been implemented appropriately and effectively.
8. Assessing the implementation of the risk management and compliance function and reporting it to the Board of Commissioners.
9. Acting as early warning system by providing studies in the form of suggestions and recommendations regarding the implementation of risk management and compliance to the Board of Commissioners.

Susunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Work Program Plan of Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris merangkap anggota serta setidaknya 2 (dua) orang anggota. Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tanggal 23 April 2021 dan 18 September 2021, karena terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris yang jangka waktunya telah habis. Susunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Risk Management and Compliance Committee is headed by a Chairman who is a member of the Board of Commissioners and is assisted by the Secretary concurrently members and at least 2 (two) members. The composition of PJB Risk Management and Compliance Committee has changed several times, which was on April 23, 2021 and September 18, 2021, due to changes in the composition of the Board of Commissioners whose period has ended. The composition of the Company's Risk Management and Compliance Committee in 2021 is as follows:

Susunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Januari - April 2021
Composition of the Risk Management and Compliance Committee January – April 2021

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Benny MM Marbun	Ketua Chairman (Komisaris) (Commissioner)	Manajemen Bisnis Business Management	Januari - April 2021 January - April, 2021
Hendra Iswahyudi	Wakil Ketua Vice Chairman (Komisaris) (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ekonomi Engineering Physics, Planning and Public Policy, Economics	Januari - Desember 2021 January - December, 2021
Sunarsip	Anggota Member (Komisaris) (Commissioner)	Akuntansi, Keuangan dan Audit Accounting, Finance, and Audit	Januari - Desember 2021 January - December, 2021
Bambang Istianto	Sekretaris Secretary (Pihak Independen) (Independent Party)	*General Accounting and Cost Accounting, Capital Budgeting, Corporate Finance, Organization Management, Process Facilitation and Risk Management*	Januari - Desember 2021 January - December, 2021
Eko Prijatno Kestijanto B	Anggota Member (Pihak Independen) (Independent Party)	Manajemen Bisnis, Tata Kelola dan Operation & Maintenance Pembangkitan Business Management, Governance and Operation & Maintenance Generation	Januari - Desember 2021 January - December, 2021

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

Susunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Mei - September 2021
Composition of the Risk Management and Compliance Committee May – September 2021

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Komang Parmita	Ketua Chairman (Komisaris) (Commissioner)	Manajemen Bisnis; *Operation & Maintenance* Pembangkitan; *Health, Safety, Security And Environment* Business Management; Operation & Maintenance Generation; Health, Safety, Security And Environment	April - Desember 2021 April - December, 2021
Hendra Iswahyudi	Wakil Ketua Vice Chairman (Komisaris) (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ekonomi Engineering Physics, Planning and Public Policy, Economy	Januari - Desember 2021 January - December, 2021
Sunarsip	Anggota Member (Komisaris) (Commissioner)	Akuntansi, Keuangan dan Audit Akuntansi, Keuangan dan Audit	Januari - Desember 2021 January - December, 2021
Bambang Istianto	Sekretaris Secretary (Pihak Independen) (Independent Party)	*General Accounting and Cost Accounting, Capital Budgeting, Corporate Finance, Organization Management, Process Facilitation and Risk Management*	Januari - Desember 2021 January - December, 2021
Eko Prijatno Kestijanto B	Anggota Member (Pihak Independen) (Independent Party)	Manajemen Bisnis, Tata Kelola dan Operation & Maintenance Pembangkitan Business Management, Governance and Operation & Maintenance Generation	Januari - Desember 2021 January - December, 2021

Susunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan September - Desember 2021
Composition of the Risk Management and Compliance Committee September - December 2021

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Komang Parmita	Ketua Chairman (Komisaris) (Commissioner)	Manajemen Bisnis; *Operation & Maintenance* Pembangkitan; *Health, Safety, Security And Environment* Business Management; Operation & Maintenance Generation; Health, Safety, Security And Environment	April - Desember 2021 April - December, 2021
Bambang Istianto	Sekretaris Secretary (Pihak Independen) (Independent Party)	*General Accounting and Cost Accounting, Capital Budgeting, Corporate Finance, Organization Management, Process Facilitation and Risk Management*	Januari - Desember 2021 January - December, 2021
Eko Prijatno Kestijanto B	Anggota Member (Pihak Independen) (Independent Party)	Manajemen Bisnis, Tata Kelola dan Operation & Maintenance Pembangkitan Business Management, Governance and Operation & Maintenance Generation	Januari - Desember 2021 January - December, 2021

Profil Anggota Komite Audit
Profile of the Risk Management and Compliance Committee Member

Komang Parmita

Ketua Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Head of the Risk Management and Compliance Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile is available in the Board of Commissioners profile section.

Bambang Istianto

Sekretaris Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Secretary of the Risk Management and Compliance Committee

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 001.K/DK/PJB/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan Ahli Madya Manajemen Keuangan dan Perbankan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP Bandung tahun 1998 dan S1 Ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP) (2016), Pelatihan *Governance Risk & Compliance* (GRC) (2018), Pelatihan Meningkatkan Kinerja Program melalui *Monitoring & Evaluation* (2019), *Sharing session* "Peran GRC dalam Merealisasikan Kebijakan dan Pengawasan Terpadu (2020), *Developing Risk Based* KPI (2020), *Best Practices on Risk Aggregation* (2021) dan *Risk Beyond* 2021.

Indonesian citizen, 47 years old, domiciled in Jakarta.

Basis of Appointment
Appointed based on the Board of Commissioners Decree of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 001.K/DK/PJB/2021 dated January 29, 2021.

Education
Graduated as Associate Expert in Financial Management and Banking from YPKP Bandung School of Economics in 1998 and Bachelor of Economics from Padjadjaran University Bandung in 2009.

Additionally, non-formal education that has been participated to obtain certification includes the Certified Risk Management Professional (CRMP) Certification (2016), Governance Risk & Compliance (GRC) Training (2018), Training to Improve Program Performance through Monitoring & Evaluation (2019), Sharing session "The Role of the GRC in Realizing Integrated Policies and Monitoring" (2020), Developing Risk Based KPI (2020), Best Practices on Risk Aggregation (2021) dan Risk Beyond 2021.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

Riwayat Pekerjaan
Mulai berkarir sebagai staff keuangan dan administrasi PT Studio Cilaki 45 sebuah perusahaan konsultan manajemen dan teknik (1998), Manajer Administrasi, Keuangan dan Akuntansi PT ISI Indraco (2008), Manajer Keuangan PT Ganesha Petro (2009), Manajer Keuangan di PT Meisa Dwi Kencana (2010), Komisaris dan Tenaga Ahli pada PT Netritva Pradhana (2010 – sekarang) dan Anggota Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan Dewan Komisaris pada PT Pembangkitan Jawa Bali, (2014- 2016), Sekretaris Komite Manajemen Risiko & Kepatuhan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016-sekarang).

Career History
Started his career as finance and administration staff at PT Studio Cilaki 45, a management and engineering consulting firm (1998), Administration, Finance and Accounting Manager at PT ISI Indraco (2008), Finance Manager at PT Ganesha Petro (2009), Finance Manager at PT Meisa Dwi Kencana (2010), Commissioner and Expert at PT Netritva Pradhana (2010 – present) and Member of the Risk Management & Compliance Committee of the Board of Commissioners at PT Pembangkitan Jawa Bali (2014-2016), Secretary to the Risk Management & Compliance Committee of the Board of Commissioners at PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016-present).

Eko Prijatno Kestianto B

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Member of the Risk Management and Compliance Committee

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, berdomisili di Surabaya.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 001.K/DK/PJB/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada (1987) dan Magister Bisnis Administrasi dan Teknologi (MBAT) dari Institut Teknologi Bandung (2003).

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya ISO 9000 : 2000 Awareness Training (2001) dan OHSAS 18001 Awareness (2005).

Riwayat Pekerjaan
Pernah berkarir sebagai Enjinir Produksi C PLTGU Gresik PT PLN (1992–1998), Kepala Unit PLTGU Muara Tawar PT PLN PJB II UP Muara Karang (1998), Deputy Manager SDM dan Organisasi PT PLN PJB II UP Muara Karang (1998-2000), Deputy Manager Maintenance Control PT PLN PJB II UP Muara Karang (2000-2002), Asmen Pemantauan & Evaluasi Pembangkitan & Jaringan PT PJB (2002–2004), Manajer Lingkungan & K3 PT PJB (2004-2006), Manajer Pemasaran dan Pembinaan Unit Usaha PT PJB (2006-2009), Senior Manajer Humas & CSR PJB (2009–2011), Senior Manajer Niaga PT PJB sejak tahun (2011–2013), Sekretaris Perusahaan PT PJB (2013-2015), Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan Dewan Komisaris PT PJB (2018 – sekarang).

Indonesian citizen, 61 years old, domiciled in Surabaya.

Basis of Appointment
Appointed based on the Board of Commissioners Decree of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 001.K/DK/PJB/2021 dated January 29, 2021.

Education
Graduated as the bachelor in Electrical Engineering from Gadjah Mada University (1987) and Masters in Business Administration and Technology (MBAT) from Bandung Institute of Technology (2003).
Additionally, non-formal education that has been participated to obtain certification include ISO 9000: 2000 Awareness Training (2001) and OHSAS 18001 Awareness (2005).

Career History
He had career as Production Engineer of Gresik C CCPP of PT PLN (1992–1998), Head of Muara Tawar CCPP Unit at PT PLN PJB II Muara Karang GU (1998), Deputy Manager of HR and Organization of PT PLN PJB II Muara Karang GU (1998-2000), Deputy Manager Maintenance Control of PT PLN PJB II Muara Karang GU (2000-2002), Manager Assistant for Monitoring & Evaluation of Generation & Network of PT PJB (2002–2004), Manager of Environment & OHS of PT PJB (2004-2006), Manager of Marketing and Business Unit Development of PT PJB (2006-2009), Senior Manager of Public Relations & CSR of PJB (2009–2011), Senior Commerce Manager of PT PJB (2011–2013), Corporate Secretary of PT PJB (2013-2015), Member of the Risk Management and Compliance Committee of the Board Commissioner of PT PJB (2018 – present).

Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Term of Office of the Risk Management and Compliance Committee

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan masa jabatan yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris. Sedangkan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 (dua) tahun diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali pada masa jabatan berikutnya.

Dewan Komisaris PJB melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan dapat pula diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

The Risk Management and Compliance Committee Members are stipulated based on the Board of Commissioners Decree with a term of office of 1 (one) year and can be extended following the term of office of the Board of Commissioners. Meanwhile, Audit Committee members who are not the Board of Commissioners members serve a maximum of 2 (two) years to be appointed for 1 (one) term of office, and can be reappointed for 1 (one) time in the next term of office.

PJB Board of Commissioners PJB appoints and dismisses the Risk Management and Compliance Committee members through the Board of Commissioners Decree and reported it to the GMS. Dismissal of the Risk Management and Compliance Committee members can be applied if the person concerned ends the term of office and can also be dismissed based on the Board of Commissioners decision if he/she does not meet the predetermined performance and/or is incompetent in performing his/her duties.

Independensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Independence of the Risk Management and Compliance Committee

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat bertindak independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Board of Commissioners ensured that the Compliance Committee is required to act independently solely for the benefit of the Company only, regardless of the influence of various parties with interests that may conflict with the interests of the Company. Members of the Risk Management and Compliance Committee of PJB have met the following criteria for independence:

Independensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Independence of the Risk Management and Compliance Committee

Kriteria Independensi	Independence Criteria	Komang Parmita	Bambang Istianto	Eko Prijatno KB
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	Not a person in public accounting firm, legal consulting firm, or other parties providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	√	√	√

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

Kriteria Independensi	Independence Criteria	Komang Parmita	Bambang Istianto	Eko Prijatno KB
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.	Having no shares either directly or indirectly in the Company.	√	√	√
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not a person with the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last 6 (six) months.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda.	Having no blood family relationship with members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the second degree, either in the straight line or sideways as well as by marriage.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan	Having no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities; and	√	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.	Not currently in the institution whose business activities provide services to the Company.	√	√	√

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Work Guidelines of the Risk Management and Compliance Committee

Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang disebut Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada tahun 2018. Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengatur beberapa hal terkait antara lain: Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, *Key Performance Indicator* dan Penilaian kinerja Komite, Mekanisme Kerja dan Kode Etik.

Guna memastikan bahwa ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tersebut senantiasa sesuai dengan kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices,* Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengkaji ulang dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran terhadap Piagam Komite Audit secara berkala.

The Board of Commissioners established work guideline for the Risk Management and Compliance Committee called the Risk Management and Compliance Committee Charter in 2018. The Risk Management and Compliance Committee Charter regulates several related matters, including: Purpose and Objectives, Functions and Main Duties, Responsibilities and Authorities, Organization and Membership, Key Performance Indicators and Committee Performance Assessments, as well as Work Mechanisms and Code of Conduct.

In order to ensure that the provisions stipulated in the Risk Management and Compliance Committee Charter are always following the needs, applicable laws and regulations and best practices, the Risk Management and Compliance Committee reviews and if deemed necessary can be updated to Audit Committee Charter periodically.

Rencana Program Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Work Program Plan of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyusun rencana program kerja setiap tahun untuk mendorong efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Program kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari :
   a. Kegiatan koordinasi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan manajemen yang mencakup :
      1) *Review* RJPP.
      2) Menyiapkan bahan pertemuan Dekom dengan Pemegang Saham.
      3) Evaluasi RKAP 2021.
      4) Penyusunan RKAP 2022.
   b. *Monitoring* dan Evaluasi Laporan Manajemen berkala.
   c. Koordinasi Internal Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
   d. Koordinasi berkala Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan manajemen.
   e. Evaluasi Potensi/Mitigasi Risiko di Korporat.
   f. Rapat bersama dengan Komite lain.
2. Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari :
   a. *Review* kebijakan, strategi dan implementasi Penugasan PT PLN.
   b. *Review* strategi portofolio terkait *Unrestricted Subsidiaries*, RJPP dan *Corporate Charter.*
   c. *Monitoring* dan *Review* Implementasi Tindak Lanjut Hasil Audit IT.
   d. *Monitoring* dan *Review* Pengendalian Internal (COSO, ERM, ICOFR, APQC, *Three Lines of Defences*).
   e. *Monitoring* dan *Review* Kebijakan Strategi *Security of Supply.*
   f. *Review Enterprise Architecture.*
   g. *Monitoring* dan *Review* implementasi Corporate Agenda.
   h. *Monitoring* dan *Review* implementasi C*orporate Transformation.*
3. Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

The Risk Management and Compliance Committee prepares a work program plan every year to encourage the effectiveness of duties and responsibilities implementation of the Risk Management and Compliance Committee in supporting the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners. The work programs of the Risk Management and Compliance Committee in 2021 is as follows:

1. Routine activities consisting of the following:
   a. Coordination activities of the Risk Management and Compliance Committee with management include the following:
      1) RJPP review.
      2) Preparing materials for Board of Commissioners meeting with the Shareholders.
      3) 2021 ABOP Evaluation.
      4) Preparation of 2022 ABOP.
   b. Monitoring and Evaluation of Periodic Management Report.
   c. Internal Coordination of the risk management and compliance committees.
   d. Periodic coordination of the Risk Management and Compliance Committee with the management.
   e. Potential Evaluation/Risk Mitigation in the Corporation.
   f. Joint meetings with other Committees
2. Special/Non-routine Activities consisting of the following:
   a. Review of policies, strategies, and implementation of PT PLN Assignments.
   b. Review of portfolio strategy related to Unrestricted Subsidiaries, CLTP, and Corporate Charter.
   c. Monitoring and Reviewing the Implementation of Follow Up on IT Audit Results.
   d. Monitoring and Review of Internal Control (COSO, ERM, ICOFR, APQC, Three Lines of Defenses)
   e. Monitoring and Review of Security of Supply Strategy Policies
   f. Review on Enterprise Architecture.
   g. Monitoring and Review of Corporate Agenda implementation.
   h. Monitoring and Review of corporate transformation implementation.
3. Competency Development Program of the Risk Management and Compliance Committee.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Duties Implementation of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana program kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan tahun 2021. Secara umum, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melakukan pengawasan dan pendampingan serta memberikan masukan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RKAP 2021.
2. Proses penyusunan *draft* RKAP 2022.
3. Pelaksanaan *enterprise risk management* di level korporat.
4. Pengawasan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan *Three line of Defences.*
6. Permintaan rekomendasi dan persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas tindakan korporasi yang dilakukan oleh Direksi.
7. Pembaharuan informasi mengenai pengelolaan UBJOM dan Unit Pembangkit.
8. Proses investasi dan/atau pengembangan usaha korporat.
9. Proses bisnis internal diantaranya tapi tidak terbatas kepada bidang pengembangan usaha, pengadaan, UBJOM dan lain-lain.

The Risk Management and Compliance Committee had performed duties and responsibilities based on the Risk Management and Compliance Committee's work program plan for 2021. In general, the Risk and Compliance Management Committee has supervised and assisted and provided input, among others, on the following matters:

1. Evaluation of 2021 ABOP implementation.
2. Drafting process of 2022 ABOP draft
3. Implementation of enterprise risk management at the corporate level.
4. Supervision of policies on the management of Subsidiaries and Affiliations.
5. Supervision of the implementation of internal control using the Three line of Defenses approach.
6. Request for recommendation and written approval from the Board of Commissioners on corporate actions taken by the Board of Directors.
7. Updating information regarding the management of OMSBU and Generating Unit.
8. Process of investment and/or corporate business development.
9. Internal business process includes but is not limited to the fields of business development, procurement, OMSBU, and others.

Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Meetings of the Risk Management and Compliance Committee

Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Selain itu, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama mengenai pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan di Perusahaan dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana diuraikan dalam BoC Manual PJB. Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sepanjang tahun 2021 sebanyak 40 kali.

The Risk Management and Compliance Committee holds meeting periodically at least 1 (one) time a month to complete the Risk Management and Compliance Committee Work Program as stipulated in the Risk And Compliance Management Committee Charter. Also, the Risk Management and Compliance Committee is required to hold regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time a month and hold meetings with related functions, especially regarding the implementation of risk management and compliance in the Company in order to discuss the development and activities of the Company both periodically and at any time if necessary as outlined in the PJB Board of Commissioners Manual. The Risk Management and Compliance Committee held 40 meetings throughout 2021.

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Meeting Agenda of Risk Management and Compliance Committee

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	11 Januari 2021 January 11, 2021	Kemungkinan kerjasama pengembangan PLTMH di Jawa Timur.	Possibility of cooperation in MHPP development in East Java.
2	15 Januari 2021 January 15, 2021	Aplikasi *Project Monitoring.*	Project Monitoring Application.
3	19 Januari 2021 January 19, 2021	*Risk Profile* 2021.	Risk Profile 2021.
4	5 Februari 2021 February 5, 2021	*Board Manual.*	Board Manual.
5	10 Februari 2021 February 10, 2021	Pengelolaan FABA di UBJOM PLTU Pacitan.	FABA management at Pacitan CFPP OMSBU.
6	11 Februari 2021 February 11, 2021	HCR dan OCR PT PJB Tahun 2021.	HCR and OCR PT PJB in 2021.
7	16 Februari 2021 February 16, 2021	Kinerja O&M PLTU Banjarsari, PT BPI.	O&M Performance of Banjarsari CFPP, PT BPI.
8	24 Februari 2021 February 24, 2021	*Maturity Level* ERM PJB.	Maturity Level ERM PJB.
9	29 Maret 2021 March 29, 2021	Permasalahan Hukum di PJB.	Legal Issues in PJB.
10	9 April 2021 April 9, 2021	Pencegahan Kebakaran dan Pengelolaan FABA.	Fire Prevention and FABA Management.
11	13 April 2021 April 13, 2021	Peran PJB Group dalam Pengembangan PLTN di Indonesia.	The Role of PJB Group in the NPP Development in Indonesia.
12	16 April 2021 April 16, 2021	Membahas beberapa masukan yang disampaikan oleh SP PJB melalui surat ke DEKOM.	Discussed suggestions submitted by SP PJB through a letter to the Board of Commissioners.
13	19 April 2021 April 19, 2021	Peran PJB Group dalam Pengembangan PLTN di Indonesia. (lanjutan).	The Role of PJB Group in the Development of NPP in Indonesia. (continued).
14	20 April 2021 April 20, 2021	*Project Completion Report* (PCR).	Project Completion Report (PCR).
15	21 April 2021 April 21, 2021	Pergeseran *schedule Overhaul* Unit Pembangkit di 2020.	Shift scheduled for the Overhaul of the Generating Unit in 2020.
16	5 Mei 2021 May 5, 2021	EFOR PLTU Paiton di awal tahun 2021.	EFOR Paiton CFPP in early 2021.
17	6 Mei 2021 May 6, 2021	Bencana Tanah Longsor di Proyek PLTA Batang Toru.	Landslide Disaster at the Batang Toru HPP Project
18	16 Juni 2021 June 16, 2021	*Enterprise Architecture* dan *Progress* Pengembangan PJB IMS 2.0.	Enterprise Architecture and PJB IMS 2.0 Development Progress.
19	23 Juni 2021 June 23, 2021	Tinjauan Dewan Pengarah atas Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasar ISO 370001 2016.	Review by the Steering Board on Anti-Bribery Management System Policy based on ISO 370001 2016.
20	14 Juli 2021 July 14, 2021	Implementasi K3L Semester I / 2021 di PJB.	Implementation of HSE Semester I / 2021 in PJB.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
21	28 Juli 2021 July 28, 2021	Kemampuan dan Pengalaman ROSATOM Rusia dalam pengembangan *Small Modular Reactor* (SMR) dan *Floating Nuclear Power Plant,* dalam membantu pengembangan PLTN di Indonesia.	Capability and Experience of ROSATOM Russia in the development of Small Modular Reactor (SMR) and Floating Nuclear Power Plant, in assisting NPP development in Indonesia.
22	6 Agustus 2021 August 6, 2021	Kesiapan Pembangkit *Existing* dan Pasokan Energi Primer.	Readiness of the Existing Power Plant and Primary Energy Supply.
23	12 Agustus 2021 August 12, 2021	Laporan Manajemen Risiko Semester I 2021.	Risk Management Report on first half of 2021.
24	23 Agustus 2021 August 23, 2021	Pengembangan Pembangkit berbahan Bakar Hydrogen (H_2) dan Ammonia (NH_3) oleh Mitsubishi Power.	Development of Hydrogen (H_2) and Ammonia (NH_3) Fuel Power Plant by Mitsubishi Power.
25	23 Agustus 2021 August 23, 2021	Kinerja dan Kesehatan Keuangan PT PJB 2021.	Financial Performance and Health of PT PJB 2021.
26	24 Agustus 2021 August 24, 2021	Pengelolaan Lingkungan di PT PJB tahun 2021 dalam menghadapi PROPER.	Environmental Management at PT PJB in 2021 in facing PROPER.
27	6 September 2021 September 6, 2021	Perkembangan SOKET (Sistem Optimasi Keandalan dan Efisiensi Terintegrasi).	Development of SOKET (Integrated Reliability and Efficiency Optimization System).
28	14 September 2021 September 14, 2021	Usulan Perubahan Organisasi di PT PJB Kantor Pusat.	Proposed Organizational Changes at PT PJB Head Office.
29	1 Oktober 2021 October 1, 2021	*Progress* PJB IMS 2.0.	Progress PJB IMS 2.0.
30	5 Oktober 2021 October 5, 2021	*Draft* Risiko Korporat tahun 2022.	Corporate Risk Draft 2022.
31	6 Oktober 2021 October 6, 2021	RUPTL 2021 – 2026, terutama terkait Pengembangan Pembangkit EBT.	2021 – 2026 Electricity Supply Business Plan, especially related to the Development of NRE Power Plant.
32	19 Oktober 2021 October 19, 2021	*Sharing* Pengelolaan FABA di PT PJB.	Sharing of FABA Management at PT PJB.
33	26 Oktober 2021 October 26, 2021	PROPER	PROPER
34	1 November 2021 November 1, 2021	Rekomposisi RKAP 2021.	Recomposition of 2021 ABOP
35	9 November 2021 November 9, 2021	*Corporate Charter* PT PJB.	Corporate Charter PT PJB.
36	10 November 2021 November 10, 2021	*Engineering Judgment* PLTA Cirata.	Engineering Judgment Cirata HPP.
37	16 November 2021 November 16, 2021	Usulan Proyek EBT sesuai *Green* RUPTL.	Proposed NRE Project based on Green Electricity Supply Business Plan.
38	20 November 2021 November 20, 2021	Percepatan Implementasi Inisiatif Quick Win. (*corporate action* PJB terhadap PT RE dan PT REC).	Accelerated Implementation of the Quick Win Initiative. (PJB's corporate action against PT RE and PT REC).
39	22 November 2021 November 22, 2021	*Draft* RKAP PJB 2022.	Draft of PJB 2022 ABOP.
40	6 Desember 2021 December 6, 2021	Perkembangan SOKET (Sistem Optimasi Keandalan dan Efisiensi Terintegrasi).	Development of SOKET (Integrated Reliability and Efficiency Optimization System).

Frekuensi Internal Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Internal Meeting Frequency and Attendance Rate of Risk Management and Compliance Committee Members

Nama Name	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Bambang Istianto	40	40	100%
Eko Prijatno Kestianto B	40	40	100%

Program Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Competency Development Program for the Risk Management and Compliance Committee

Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan PJB sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

Risk Management and Compliance Committee Members participate in competency development activities in order to support duties implementation of the Risk Management and Compliance Committee Members. Competency development program for PJB Risk Management and Compliance Committee Members throughout 2021 is available in the description related to Education and Training for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Performance Assessment of the Risk Management and Compliance Committee

Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dievalusi secara berkala baik *self assessment* maupun oleh Dewan Komisaris dalam agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris untuk memastikan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dilakukan berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target atas realisasi Rencana Kerja Tahunan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan indikator penilaian yang meliputi:

1. Ketepatan waktu penyelesaian tugas.
2. Kualitas pekerjaan.
3. Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris.
4. Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID).
5. Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM).
6. Persiapan RUPS.

The Risk Management and Compliance Committee performance is evaluated periodically both self-assessment and by the Board of Commissioners in the agenda of internal evaluation meetings of the Board of Commissioners and its organs to ensure and encourage the effectiveness of duties implementation of the Risk Management and Compliance Committee. Performance assessment of the Risk Management and Compliance Committee is carried out based on criteria in the form of achieving targets for the realization of Annual Work Plan of the Risk Management and Compliance Committee with assessment indicators as follows:

1. Timely the tasks completion.
2. Quality of work.
3. Contribution to the Board of Commissioners activities.
4. Presentation at Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID).
5. Meetings (RID, RDD, RKM).
6. GMS Preparation.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

Berikut adalah hasil penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada tahun 2021:

The following is performance assessment result of the Risk Management and Compliance Committee in 2021:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Table of Performance Evaluation of Risk Management and Compliance Committee Members

No.	Parameter Penilaian Assessment Parameters	Rata-Rata Average
1	Ketepatan waktu penyelesaian tugas Timely the tasks completion	8,67
2	Kualitas pekerjaan Quality of work	9,00
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris Contribution to the Board of Commissioners activities	9,33
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID) Presentation at Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID)	8,67
5	Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM) Meetings (RID, RDD, RKM)	8,67
6	Persiapan RUPS GMS Preparation of GMS	9,00
Rata-Rata Skor Average Score		**8,89**

Hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The assessment results will be used to compile the necessary remedial, development and improvement measures to improve the effectiveness of duties implementation of the Risk Management and Compliance Committee in supporting duties implementation of the Board of Commissioners.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Dewan Komisaris PJB telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan organ pendukung dalam tata kelola perusahaan PJB terkait fungsi pengawasan. Tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya terkait pengawasan atas efektifitas pelaksanaan pengelolaan SDM dan Organisasi dan kebijakan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi memantau dan memastikan berjalannya fungsi-fungsi yang berhubungan dengan sistem pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja, nominasi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak serta remunerasi secara professional dan independen. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

PJB's Board of Commissioners has established a Nomination and Remuneration Committee which is a supporting organ in PJB's corporate governance related to the supervisory function. The main task of the Nomination and Remuneration Committee is to assist in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, particularly related to the supervision of the effectiveness of HC and organizational management and remuneration policies. The Nomination and Remuneration Committee monitors and ensures the running of functions related to the talent management system, performance assessment system, nominations for members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of subsidiaries as well as professional and independent remuneration. Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed, dismissed, and responsible directly to the Board of Commissioners.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi
Legal Basis of Nomination and Remuneration Committee Establishment

Dasar pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Sebelumnya, Komite Nominasi dan Remunerasi disebut sebagai Komite SDM dan Organisasi PJB yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 012.K/DK/PJB/2021, tanggal 21 September 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali.

The basis for establishing the Nomination and Remuneration Committee refers to Law Number 19 of 2003; Law Number 40 of 2007; and Regulation of the Ministry of SOEs Number: PER-12/MBU/2012 on August 24, 2012, Regulation of the Minister of SOEs Number PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises Number PER- 12/MBU/2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises and Regulation of the Ministry of SOEs Number PER-14/MBU/10/2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises. Previously, the Nomination and Remuneration Committee was referred to as the HC and Organization Committee of PJB which was later changed by the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 012.K/DK/PJB/2021 on September 21, 2021, regarding the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee at the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris PJB akan berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas khususnya terkait pengelolaan SDM dan Organisasi, termasuk Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab ini didasarkan kepada fungsi dan tugas pokok sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite. Tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PJB Nomor 012.K/DK/PJB/2021, tanggal 21 September 2021, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee in supporting the supervisory function of the PJB Board of Commissioners are related to relevant parties, each of which has clear responsibilities, especially regarding the management of HC and Organization, including Nomination and Remuneration. The Nomination and Remuneration Committee is responsible for the Board of Commissioners. This responsibility is based on the main functions and duties as stipulated in the Committee Charter. The main duties of the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PJB Number 012.K/DK/PJB/2021, on September 21, 2021, are as follows:

1. Conduct regular reviews of the company's Talent Management System as well as monitor and evaluate its implementation.
2. Evaluate the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS (*Nominated Talent*).
4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS.
5. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi.
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris.
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
10. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi dan sistim SDM dan Organisasi Perusahaan.
11. Melakukan analisa, memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan Organisasi yang dilakukan oleh Perusahaan.
12. Bersama komite lainnya menilai dan memberi masukan sesuai dengan bidang komite kepada Dewan Komisaris atas :
    a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan;
    b. Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP);
    c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
    d. Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Kinerja bulanan;
    e. *Good Corporate Governance* (GCG);
    f. *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan;.
13. Mempelajari, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Manajemen, Kinerja SDM dan Organisasi dan Laporan K3L yang disusun oleh Direksi.
14. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam:
    a. Program Pengembangan SDM dan Organisasi yang mendukung *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR);
    b. Nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

3. Validate and calibrate the Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent), to produce a list of Talents that will be nominated by the Board of Commissioners to the GMS (Nominated Talent).
4. Evaluate the Company's Representative Candidates who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, before submitting to the GMS.
5. Evaluate the proposed Key Performance Indicators for Individual members of the Board of Directors.
6. Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
7. Prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
8. Evaluate the remuneration policy for employees who require approval/response from the Board of Commissioners.
9. Evaluate the recommendation of the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.
10. Analyze and provide input and recommendations to the Board of Commissioners on policies, guidelines, strategies, HC systems, and the Company's Organization.
11. Analyze and provide input to the Board of Commissioners on the implementation of HC and Organization management activities carried out by the Company.
12. Assess and provide input together with other committees in line with the committee's field to the Board of Commissioners on:
    a. Articles of Association and Board Manual;
    b. Corporate Long Term Plan (CLP);
    c. Annual Budget and Operational Plan (ABOP);
    d. Annual Report, Quarterly Report, and Monthly Performance Report;
    e. Good Corporate Governance (GCG);
    f. Key Performance Indicators (KPI).
13. Study, evaluate, and provide input on Management Reports, HC and Organization Performance, and HSE Reports prepared by the Board of Directors.
14. Conduct analysis, provide input, and recommend the Board of Commissioners based on the Board of Directors' inputs concerning:
    a. HC and Organization Development Program that supports Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR);
    b. Nomination of officials who are one level below the Board of Directors.

15. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan LK3 (Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja) perusahaan.
16. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan budaya perusahaan, hubungan industrial serta pelaksanaan *reward and punishment* pegawai.
17. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
18. Mengidentifikan hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite Dewan Komisaris.
19. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

15. Analyze and provide input and recommendations to the Board of Commissioners on policies, strategies, and implementation of the Company's HSE (Health, Safety, and Environment) management.
16. Analyze and provide input and recommendations to the Board of Commissioners on policies, strategies, and implementation of corporate culture management, industrial relations, and the implementation of employee rewards and punishments.
17. Prepare activity plans and budget for the Nomination and Remuneration Committee, conduct committee meetings, prepare minutes of meetings and submit reports on the implementation of committee duties regularly to the Board of Commissioners.
18. Identify matters to discuss, ensure completion, and perform other tasks assigned by the Board of Commissioners based on the scope of duties and responsibilities of the Committee of the Board of Commissioners.
19. Maintain the confidentiality of company data and information following the applicable provisions of the Board of Commissioners.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi
Composition of Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris merangkap anggota. Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang sebelumnya adalah Komite SDM dan Organisasi PJB pada tahun 2021 mengalami perubahan karena terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris yang jangka waktunya telah habis. Sehingga susunan keanggotaan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Nomination and Remuneration Committee is chaired by a member of the Board of Commissioners and assisted by a Secretary acting as a member. The composition of the Nomination and Remuneration Committee, which was previously PJB's HC and Organization Committee in 2021, was changed in line with a change in the composition of the Board of Commissioners whose term had expired. Therefore, the composition of the committee in 2021 is as follows:

Susunan Komite SDM dan Organisasi Januari - September 2021
Composition of Human Capital and Organization Committee from January to September 2021

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Defy Indiyanto Budiarto	Ketua Chairman (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Komunikasi Korporat, Strategi Korporasi Corporate Communications, Corporate Strategy	Januari - September 2021 January - September, 2021
Jisman P. Hutajulu	Wakil Ketua Vice Chairman (Komisaris) (Commissioner)	Keselamatan, Standardisasi Ketenagalistrikan dan *Inspector, Auditor* Safety, Electrical Standardization and Inspector, and Auditor	Januari - Desember 2021 January - December, 2021
Chaerudin Darsa	Sekretaris merangkap Anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	*Human Capital*, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Corporate Culture* Human Capital, Occupational Health and Safety Management, Corporate Culture	Januari - September 2021 January - September, 2021

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi September - Desember 2021
Composition of Nomination and Remuneration Committee from September to December 2021

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Jisman P. Hutajulu	Ketua Chairman (Komisaris) (Commissioner)	Keselamatan, Standardisasi Ketenagalistrikan dan *Inspector, Auditor* Safety, Electrical Standardization and Inspector, and Auditor	September - Desember 2021 September - December, 2021
Chaerudin Darsa	Sekretaris merangkap Anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	*Human Capital*, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, *Corporate Culture* Human Capital, Occupational Health and Safety Management, Corporate Culture	September - September 2021 September - September, 2021

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Jisman P. Hutajulu

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section.

Chaerudin Darsa

Sekretaris dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Secretary and Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, berdomisili di Depok.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Nomor 012.K/DK/PJB/2021, tanggal 21 September 2021.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1984 dan S2 Manajemen Keuangan dari UPN Veteran tahun 2005.

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan setifikasi diantaranya Sertifikasi *Quality Management Systems Assessment* (1997), *Malcolm Baldridge Criteria* (2013), Sosialization of ISO/IEC 17021-1 : 2015; ISO/IEC 17021-3 : 2015; ISO 9001:2015 (2015), Implementasi Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000:2018 (2020) dan *Capacity Building* Pamahaman SNI ISO / IEC 17020:2012 (2021).

Riwayat Pekerjaan
Pernah berkarir sebagai Asisten ahli survei hidrologi dan Kasie Pemetaan (1984-1996), Asisten Manajer Sertifikasi Sistem Mutu (1996-2007), Manajer Bidang Pengembangan Usaha PT PLN (2007-2010), Manajer Senior Budaya Perusahaan dan Manajemen Perubahan pada Direktorat SDM PT PLN (2010-2015), Selain itu juga menjadi Auditor ISO 9001 & 14001 LMK QSC (1996-2010), Dosen Tidak Tetap STT PLN (2008-2011), Instruktur PLN Pusdiklat (2008-Sekarang), Auditor SNI Award (2010-Sekarang), Auditor KAN SNI 17021 (2012-Sekarang), Anggota Governing Board LSP PLN Pusdiklat (2014-2015), Auditor Malcolm Baldridge/ KPKU (2015-Sekarang) dan Konsultan ISO 9001 (2015-Sekarang), Ketua Komite Pengaman Ketidakberpihakan Lembaga Sertifikasi Produk LMK Cerification PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi (2019 – sekarang).

Indonesian, 62 years old, based in Depok.

Deed of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Number 012.K/DK/PJB/2021, on September 21, 2021.

Education
Completed Bachelor of Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 1984 and Master of Financial Management from UPN Veteran in 2005.

Also, non-formal education that has been followed to obtain certification includes Quality Management Systems Assessment Certification (1997), Malcolm Baldridge Criteria (2013), Socialization of ISO/IEC 17021-1: 2015; ISO/IEC 17021-3:2015; ISO 9001:2015 (2015), Implementation of Risk Management Based on SNI ISO 31000:2018 (2020) and Capacity Building for Understanding of SNI ISO/IEC 17020:2012 (2021).

Career History
He was previously an Assistant hydrological survey expert and Head of Mapping Section (1984-1996), Assistant Manager of Quality System Certification (1996-2007), Manager of Business Development at PT PLN (2007-2010), Senior Manager of Corporate Culture and Change Management at the HC Directorate of PT PLN (2010-2015), In addition, he is also an Auditor of ISO 9001 & 14001 LMK QSC (1996-2010), Non-Permanent Lecturer of STT PLN (2008-2011), Instructor of PLN Pusdiklat (2008-present), Auditor of SNI Award (2010-2015). Now), Auditor of KAN SNI 17021 (2012-Present), Member of the Governing Board of LSP PLN Pusdiklat (2014-2015), Auditor Malcolm Baldridge/ KPKU (2015-present), and ISO 9001 Consultant (2015-present), Chairman of the Committee for Safeguarding Institutional Impartiality Product Certification LMK Certification PT PLN (Persero) Certification Center (2019 – present).

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi
Term of Office of Nomination and Remuneration Committee

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan masa jabatan yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris. Sedangkan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 (dua) tahun diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali pada masa jabatan berikutnya.

The members of the Nomination and Remuneration Committee are determined based on the Decree of the Board of Commissioners with a term of office of 1 (one) year and can be extended based on the term of office of the Board of Commissioners. Meanwhile, members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners who have served max. 2 (two) years are appointed for 1 (one) term of office and may be reappointed for 1 (one) time in the next term of office.

Dewan Komisaris PJB melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan dapat pula diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

PJB's Board of Commissioners appoints and dismisses members of the Nomination and Remuneration Committee through a Decree of the Board of Commissioners which is then reported to the GMS. Dismissal of a member of the Nomination and Remuneration Committee can be done if the term of office concerned ends and can also be dismissed based on the decision of the Board of Commissioners if the member does not meet the predetermined performance and/or is not competent in performing his/her duties.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bertindak independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PJB telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Board of Commissioners considers that the Nomination and Remuneration Committee can act independently on behalf of the Company, regardless of the influence of various stakeholders that may conflict with the interests of the Company. Members of PJB's Nomination and Remuneration Committee have met the following independence criteria:

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Kriteria Independensi	Independence Criteria	Jisman P. Hutajulu	Chaerudin Darsa
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	Not a person in a public accounting firm, legal consulting firm, or other party providing audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan.	Not owning any shares either directly or indirectly in the Company.	√	√

Kriteria Independensi	Independence Criteria	Jisman P. Hutajulu	Chaerudin Darsa
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months.	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda.	Not in blood family relationship with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the second degree, either in a straight line or sideways or by marriage.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan	Not affiliated directly or indirectly in business relationships related to the Company's business activities; and	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan.	Not currently in an institution whose business activities provide services to the Company.	√	√

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Charter

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pelaksanaan tugasnya masih mengacu pada Piagam Komite SDM dan Organisasi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada tahun 2018. Piagam Komite SDM dan Organisasi mengatur beberapa hal terkait antara lain: Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, *Key Performance Indicator* dan Penilaian kinerja Komite, Mekanisme Kerja dan Kode Etik.

To perform the duties, the Nomination and Remuneration Committee still refers to the HC and Organization Committee Charter which was established by the Board of Commissioners in 2018. The HC and Organization Committee Charter regulates several related matters: Purpose and Objectives, Main Functions and Duties, Responsibilities and Authorities, Organization and Membership, Key Performance Indicators and Committee Performance Assessments, Work Mechanisms, and Code of Conduct.

Guna memastikan bahwa ketentuan yang diatur dalam Piagam tersebut senantiasa sesuai dengan kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices,* Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji ulang dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran terhadap Piagam tersebut secara berkala.

As an effort to ensure that the provisions stipulated in the Charter are always in line with the needs, applicable laws, and best practices, the Nomination and Remuneration Committee reviews; and if deemed necessary, the Charter can be updated periodically.

Rencana Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Program Plan of Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun rencana program kerja setiap tahun untuk mendorong efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Adapun Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

The Nomination and Remuneration Committee prepares a work program plan every year to encourage the effective implementation of the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee in supporting the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners. The 2021 Work Program of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

1. Kegiatan Internal Komite Nominasi dan Remunerasi :

   a. Evaluasi Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Kinerja setiap bulan.
   b. Evaluasi pencapaian target Program Bidang SDM dan Organisasi.
   c. Evaluasi pencapaian Target *Zero Accident* dan Proper.
   d. Evaluasi pencapaian Target HCR dan OCR.
   e. *Monitoring* dan Evaluasi Tata Kelola IT.
   f. Menyiapkan Laporan Kegiatan Komite SDM dan Organisasi.
   g. Menyiapkan dan memantau Program Kerja Komite SDM dan Organisasi.
   h. Mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dekom terhadap usulan Direksi dalam hal pengembangan Organisasi, Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.
   i. Berpartisipasi Aktif dalam Rapat Internal Dekom (RID), untuk membahas bahan rapat pengawasan dengan Direksi.
   j. Memberikan masukan (apabila diminta) kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan dengan Direksi.

2. Kegiatan bersama Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

   a. Melakukan rapat mingguan antar Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris.
   b. Melakukan evaluasi Laporan Kinerja dan Laporan Manajemen.
   c. Evaluasi atas usulan RKAP 2022 dan Usulan revisi RKAP 2021.
   d. Evaluasi atas Kinerja Anak Perusahaan / Perusahaan Afiliasi, Eavalusi atas IT *Governance* dan Evaluasi TLD (*Three Lines of Defence*).
   e. Menindaklanjuti arahan Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasehat.
   f. Menyiapkan dokumen pendukung terkait dengan asesmen GCG.
   g. Menyiapkan *draft* tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan LPT.
   h. Menyiapkan *draft* tanggapan / rekomendasi Dewan Komisaris atas surat Direksi.
   i. Pembahasan permasalahan korporat dengan jajaran manajemen sesuai permintaan Dewan Komisaris / Direksi.

1. Internal Activities of the Nomination and Remuneration Committee:
   a. Evaluate Quarterly Management Report and Performance Report every month.
   b. Evaluate the achievement of the targets of the HC and Organization Sector Program.
   c. Evaluate the achievement of Zero Accidents and Proper Targets.
   d. Evaluate achievement of HCR and OCR Targets.
   e. Monitor and evaluate the IT Governance.
   f. Prepare the HC and Organization Committee's Activity Report.
   g. Prepare and monitor the Work Program of the HC and Organization Committee.
   h. Evaluate and provide input to the Board of Commissioners on the Board of Directors' proposals in terms of Organizational development, Nomination, and Company Remuneration.
   i. Actively participate in the Board of Commissioners' Internal Meeting (RID), to discuss the material for the supervisory meeting with the Board of Directors.
   j. Provide input (if requested) to the Board of Commissioners in the supervisory meeting with the Board of Directors.
2. Activities with the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Risk Management and Compliance Committee.
   a. Conduct weekly meetings between the Committee and the Secretary to the Board of Commissioners.
   b. Evaluate Performance Reports and Management Reports.
   c. Evaluate the proposed 2022 ABOP and the proposed revision of the 2021 ABOP.
   d. Evaluate the Performance of Subsidiaries / Affiliated Companies, Evaluation of IT Governance, and Evaluation of Three Lines of Defense (TLD).
   e. Follow up on the direction of the Board of Commissioners regarding the supervisory function and provide advice.
   f. Prepare supporting documents related to GCG assessment.
   g. Prepare a draft response from the Board of Commissioners on the ABOP and the Annual Responsibility Report (ARR).
   h. Prepare a draft response/recommendation from the Board of Commissioners on the letter of the Board of Directors.
   i. Discuss corporate issues with management at the request of the Board of Commissioners/Board of Directors.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
Task Execution of Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2021. Secara umum, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pengawasan dan pendampingan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Laporan Kinerja setiap bulan dan Laporan Manajemen Triwulanan tahun 2021.
2. Pembahasan usulan wakil PJB pada Anak Perusahaan.
3. Membahas pelaksanaan Program Bidang SDM dan Organisasi termasuk mengevaluasi pencapaian targetnya.
4. Mengevaluasi pencapaian target *Zero Accident* terkait Implementasi K3L dan Reposisi Fungsi K3L dan Persiapan PROPER.
5. Mengevaluasi pencapaian target OCR dan HCR.
6. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola IT terkait IT *Master Plan, Enterprice Architecture* (EA) PJB, IMS - 2.0 dan Pengembangan Teknologi Informasi.
7. Pembahasan usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Komite SDM dan Organisasi secara Triwulanan sepanjang tahun 2021.
9. Menyiapkan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2022.
10. Berpartisipasi Aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris (RID).
11. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan dengan Direksi.
12. Mengikuti rapat Komite Audit; Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan; Sekretaris Dewan Komisaris.
13. Mengikuti rapat antar Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris.

The Nomination and Remuneration Committee has performed its duties and responsibilities based on the 2021 Nomination and Remuneration Committee's Work Program Plan. Generally, the Nomination and Remuneration Committee has supervised and assisted in the following matters:

1. Evaluating the Performance Report every month and Quarterly Management Report 2021.
2. Discussing the proposal of PJB representatives in Subsidiaries.
3. Discussing the implementation of the HC and Organization Sector Program including evaluating the achievement of its targets.
4. Evaluating the achievement of the Zero Accident target related to the implementation of HSE and Repositioning of the HSE Function and PROPER Preparation.
5. Evaluating the achievement of OCR and HCR targets.
6. Monitoring and Evaluating IT Governance related to the IT Master Plan, PJB Enterprise Architecture (EA), IMS - 2.0, and Information Technology Development.
7. Discussing the proposed Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.
8. Submitting Quarterly HC and Organizational Committee Activity Reports in 2021.
9. Preparing the Nomination and Remuneration Committee Work Program for 2022.
10. Actively participating in the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID).
11. Providing input to the Board of Commissioners in the supervisory meeting with the Board of Directors.
12. Attending Audit Committee meetings; Risk Management and Compliance Committee; Secretary to the Board of Commissioners.
13. Participating in joint meetings of the Committees and the Secretary to the Board of Commissioners.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam Piagam Komite.

The Nomination and Remuneration Committee holds regular meetings at least 1 (one) time a month to complete the Nomination and Remuneration Committee's Work Program as stipulated in the Committee's Charter. Additionally, the

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait menganai pelaksanaan nominasi dan remunerasi di Perusahaan dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana diuraikan dalam BoC Manual PJB. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sepanjang tahun 2021 sebanyak 28 kali.

Nomination and Remuneration Committee is required to hold regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time a month as well as hold meetings with related functions regarding the implementation of nomination and remuneration in the Company to discuss the development and activities of the Company both periodically and from time to time as required following PJB's BoC Manual. The Nomination and Remuneration Committee held 28 meetings in 2021.

Agenda Rapat Komite SDM dan Organisasi
HC and Organization Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	25 Januari 2021 January 25, 2021	Kinerja , K3L, Penanganan COVID.	Performance, HSE, COVID Handling.
2	25 Januari 2021 January 25, 2021	Pembahasan usulan wakil PT PJB pada PT BPI dan PJBI.	Discussion of the proposed representatives of PT PJB at PT BPI and PJBI.
3	10 Febuari 2021 February 10, 2021	Pengelolaan FABA Unit Pacitan.	FABA Management of Pacitan Unit.
4	11 Februari 2021 February 11, 2021	Pembahasan Pencapaian KPI HCR OCR.	Discussion on Achievement of KPI HCR OCR.
5	16 Februari 2021 February 16, 2021	Pembahasan Kinerja dan K3L Unit Banjarsari.	Discussion of Performance and HSE of Banjarsari Unit.
6	15 Maret 2021 March 15, 2021	Pembahasan Pengelolaan Cisabu , *Progress* PLTS Apung.	Discussion on Cisabu Management, Progress of Floating SPP.
7	1 April 2021 April 1, 2021	Reorganisasi Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT), Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB), dan Satuan Pengembangan Teknologi (STEK).	Reorganization of the Maintenance Service Unit of Eastern Area (MSUEA), the Maintenance Service Unit of Western Area (MSUWA), and the Technology Development Unit (STEK).
8	9 April 2021 April 9, 2021	Pencegahan Kebakaran dan pemanfaatan FABA.	Fire Prevention and utilization of FABA.
9	14 April 2021 April 14, 2021	*Virtual Visit* Unit Ropa, Membahas Kinerja K3L, Pencegahan Covid.	Virtual Visit to Ropa Unit, Discussing HSE Performance, and Covid Prevention.
10	16 April 2021 April 16, 2021	Pembahasan Surat dari Serikat Pekerja.	Discussion of Letters from Workers Union.
11	3 Mei 2021 May 3, 2021	Pembahasan Remunerasi Direksi.	Discussion of the Board of Directors' Remuneration.
12	6 Mei 2021 May 6, 2021	Longsor PLTA Batang Toru.	Landslide in Batang Toru HPP.
13	16 Juni 2021 June 16, 2021	Membahas progress Enterprise Architecture.	Discussion of the progress of Enterprise Architecture.
14	7 Juli 2021 July 7, 2021	Pembahasan *Talent* Woman.	Discussion of Talent Woman.

No.	Tanggal Date	Agenda	Agenda
15	12-13 Juli 2021 July 12-13, 2021	Instruktur Diklat di PJB Academy tentang Pengelolaan Komite Dewan Komisaris.	Instructor Training at PJB Academy on Management of the Board of Commissioners Committee.
16	14 Juli 2021 July 14, 2021	Pembahasan Pencegahan Kebakaran.	Discussion of Fire Prevention.
17	24 Agustus 2021 August 24, 2021	Pembahasan *Progress* PROPER.	Discussion of PROPER Progress.
18	14 September 2021 September 14, 2021	Pembahasan Usulan Perubahan Organisasi.	Discussion of Proposed Organizational Changes.
19	26 September 2021 September 26, 2021	Mengikuti *Training* Audit Energi.	Participation in Energy Audit Training.
20	1 Oktober 2021 October 1, 2021	Membahas *progress* IMS 2.0.	Discussion of the progress of IMS 2.0.
21	5 Oktober 2021 October 5, 2021	Pembahasan Usulan Perubahan Organisasi.	Discussion of Proposed Organizational Changes.
22	6 Oktober 2021 October 6, 2021	Pembahasan RUPTL.	Discussion of RUPTL.
23	7 Oktober 2021 October 7, 2021	Pembahasan Usulan Perubahan Organisasi.	Discussion of Proposed Organizational Changes.
24	7 Oktober 2021 October 7, 2021	Pembahasan *Progress* Program Sistem Optimasi Keandalan dan Efisiensi Terintegrasi (SOKET), Kinerja Unit dan K3L.	Discussion on the Progress of Integrated Reliability and Efficiency Optimization System Program (SOKET), Unit Performance, and HSE.
25	19 Oktober 2021 October 19, 2021	Pembahasan Pengelolaan FABA.	Discussion of FABA Management.
27	25 Oktober 2021 October 25, 2021	Pembahasan Progress PROPER.	Discussion of PROPER Progress.
28	29 November 2021 November 29, 2021	Rapat Terbatas Pembahasan Usulan Organisasi PLTU Sambelia.	Private Meeting to Discuss Organizational Proposals for Sambelia CFPP.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Meeting and Attendance Ratio of Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Ratio
Chaerudin Darsa	28	28	100%

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Competency Development Program for Nomination and Remuneration Committee

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PJB mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Program pengembangan kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PJB sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

Members of PJB's Nomination and Remuneration Committee participate in competency development activities to support the implementation of the duties of the Nomination and Remuneration Committee. The competency development program for PJB's Nomination and Remuneration Committee Members in 2021 can be seen in the chapter related to Education and Training for the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Performance Assessment of Nomination and Remuneration Committee

Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dievalusi secara berkala baik self assessment maupun oleh Dewan Komisaris dalam agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris untuk memastikan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target atas realisasi Rencana Kerja Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan indikator penilaian yang meliputi:

1. Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris.
2. Kualitas pekerjaan.
3. Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris.
4. Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID).
5. Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM).
6. Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2021:

The performance of the Nomination and Remuneration Committee is evaluated periodically both by self-assessment and by the Board of Commissioners in the agenda of the internal evaluation meeting of the Board of Commissioners and the organs of the Board of Commissioners to ensure and encourage the effectiveness of the implementation of the duties of the Nomination and Remuneration Committee. The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is carried out based on criteria in the form of achieving targets for the realization of the Nomination and Remuneration Committee's Annual Work Plan with assessment indicators which include:

1. Timeliness of the agenda for the activities of the Board of Commissioners.
2. Quality of Work.
3. Contribution to the activities of the Board of Commissioners.
4. Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID).
5. Meeting participation (RID, RDD, RKM).
6. Preparation of the Board of Commissioners' Supervisory Report.

The following are the results of the performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee in 2021:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Performance Assessment

No.	Parameter Penilaian Indicators	Rata-Rata Average
1	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris Timeliness of the agenda for the activities of the Board of Commissioners	8,67
2	Kualitas pekerjaan Quality of Work	9,00
3	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris Contribution to the activities of the Board of Commissioners	9,33
4	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID) Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID)	8,67
5	Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM) Meetings (RID, RDD, RKM)	8,50
6	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of the Supervisory Report of the Board of Commissioners	9,00
Rata-Rata Skor Average Score		**8,86**

Hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The results of the assessment are then used to formulate corrective, developmental, and improvement steps needed to increase the effectiveness of the implementation of the Nomination and Remuneration Committee's duties in supporting the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan memiliki peran dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi Perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika Perusahaan, prinsip tata kelola Perusahaan, dan nilai-nilai Perusahaan. PJB menyadari pentingnya peran tersebut dalam memperlancar hubungan antar Organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan *Stakeholders* serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung peranan tersebut, Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat satu *level* di bawah Direksi.

Kedudukan Sekretaris Perusahaan dalam struktur organ tata kelola Perusahaan adalah sebagai organ pendukung Direksi yang bertanggung jawab, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris. Pembentukan, pengangkatan dan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/ MBU/2012 dan Anggaran Dasar PJB.

Corporate Secretary has a role in facilitating communication among the Company's organs, being responsible for the formulation of policies, planning and ensuring the effectiveness and transparency of the Company's communications, institutional relations, investor relations while still paying attention to the principles of the Company's ethical standards, principles of corporate governance, and the Company values. PJB realizes the importance of this role in facilitating the relationship among the Company's Organs, the relationship between the Company and the Stakeholders as well as fulfillment of the provisions of applicable laws and regulations. To support this role, the Company appoints Corporate Secretary as an officer one level below the Board of Directors.

The Corporate Secretary position in the structure of the corporate governance organ is as a supporting organ for the Board of Directors who is responsible, appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval by the Board of Commissioners. The establishment, appointment, and implementation of the Corporate Secretary functions refer to Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER- 01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012 and PJB's Articles of Association.

Profil Sekretaris Perusahaan
Profile of Corporate Secretary

Zubaidah

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, dan berdomisili di Surabaya.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2021 melalui Surat Keputusan Direksi PT PJB No. P.129/440/PJB/2021 tanggal 26 April 2021.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Jurnalistik dari Universitas Padjadjaran (1992)

Riwayat Pekerjaan
Pernah menjabat sebagai VP CSR PT PLN (Persero) (2018 – 2021), Manajer Senior CSR PT PLN (Persero) (2017-2018) dan Manajer Komunikasi Hukum PT PLN (Persero) (2016-2017).

Indonesian citizen, 54 years old, and domiciled in Surabaya.

Has served as Corporate Secretary since 2021 through the President Director Decree No.P.129/440/ PJB/2021 on April 26, 2021.

Education
Graduated from Bachelor of Journalism from Padjadjaran University (1992)

Career History
Has served as VP CSR at PT PLN (Persero) (2018 - 2021), CSR Senior Manager at PT PLN (Persero) (2017-2018) and Legal Communication Manager at PT PLN (Persero) (2016-2017).

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan
Appointment and Dismissal of Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan sumber daya manusia terkait dengan promosi dan mutasi yang berlaku di lingkungan PJB. Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi mengangkat Sekretaris Perusahaan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan kompetensi yang memadai terkait dengan undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan, Administrasi, Komunikasi serta *managerial skill* yang dibutuhkan.

Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director through the decision letter by the Board of Directors with the approval by the Board of Commissioners following the provisions of the Internal Audit Charter and human capital policies related to promotions and transfers applied within PJB. The Company through the Board of Directors Decree appoints Corporate Secretary by considering adequate knowledge and competence related to laws and other regulations related to the implementation of the functions of Corporate Secretary, Administration, Communication, and managerial skills needed.

Kedudukan dan Struktur Organ Sekretaris Perusahaan
Position and Organ Structure of Corporate Secretary

Kedudukan dan Struktur Organ Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Peraturan Direksi No. 016.P/010/DIR/2019 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Sekretariat Perusahaan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan membawahi tiga bidang, yaitu Bidang Hubungan Internal, Bidang *Stakeholder Management,* serta Bidang Umum dan Administrasi.

The position and structure of Corporate Secretary Organ is determined based on the Board of Directors Regulation No. 010.P/019/DIR/2019 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali and The Board of Directors Regulation No. 016.P/010/DIR/2019 concerning the Organizational Structure and Formation of Manpower at the Corporate Secretariat of PT Pembangkitan Jawa-Bali. Corporate Secretary is directly responsible to the President Director and is in charge of three areas, namely Internal Relations Department, Stakeholder Management Department, as well as General Affairs and Administration Department.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

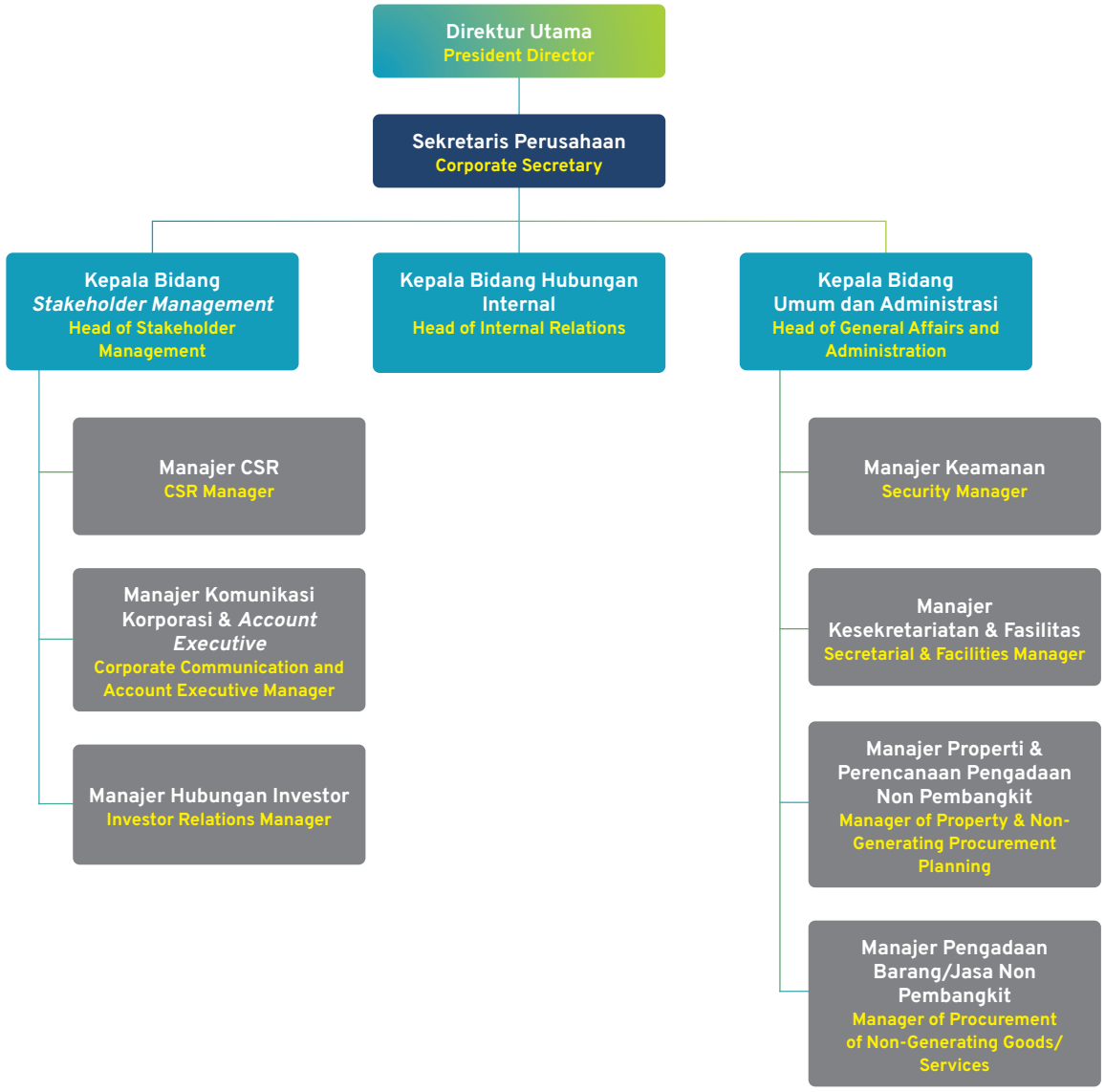

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Work Guidelines

Sekretaris Perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya menacu pada Peraturan Direksi Nomor 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Peraturan Direksi No. 016.P/010/DIR/2019 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Sekretariat

Corporate Secretary in running their duties refers to the Board of Directors Regulation No. 010.P/019/DIR/2019 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali and The Regulation of the Board of Directors No. 016.P/010/DIR/2019 concerning Organizational Structure

Perusahaan PT Pembangkitan Jawa-Bali yang mengatur lingkup tanggung jawab dan garis koordinasi sebagai organ Perusahaan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga berpedoman pada *Corporate Governance Code* dalam menjalankan fungsi organ pendukung Direksi dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Secara khusus Sekretaris Perusahaan telah memiliki pedoman kerja yang disebut *Corporate Secretary Manual* sebagai kebijakan turunan atas *Corporate Governance Code* terkait fungsi Sekretaris Perusahaan dan menjadi bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG) *soft structure*. Muatan *Corporate Secretary Manual* secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok
2. Uraian Tugas
3. Kualifikasi
4. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan
   a. Rapat Direksi
   b. Program Pengenalan Direksi
   c. Pengendalian Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
   d. Fungsi Tata Kelola
   e. Pelaksanaan RUPS
   f. Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Manajemen
   g. Manajemen Krisis
   h. Fungsi Hubungan *Stakeholders*
   i. Hubungan dengan Media
   j. Pengendalian Informasi
5. Lainnya

and Employment Formation at the Corporate Secretariat of PT Pembangkitan Jawa-Bali which regulates the scope of responsibility and coordination lines as the Company organs. Additionally, Corporate Secretary is also guided by the Corporate Governance Code in carrying out the functions of the Board of Directors Supporting Organs in the application of the principles of good corporate governance. In particular, the Corporate Secretariat already has a work guideline called the Corporate Secretary Manual as derivative policy of the Corporate Governance Code related to the Corporate Secretary function and is part of the Good Corporate Governance (GCG) soft structure.Contents of the Corporate Secretary Manual are broad as follows:

1. Main Duty
2. Job Description
3. Qualification
4. Duty Implementation of Corporate Secretary
   a. Board of Directors Meeting
   b. Board of Directors Introductory Program
   c. Control of Shareholders Register and Special Register
   d. Governance Function
   e. GMS Implementation
   f. Preparation of Annual Reports and Management Reports
   g. Crisis Management
   h. Stakeholder Relations Function
   i. Media Relations
   j. Information Control
5. Others

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Duty and Responsibility of Corporate Secretary

Peraturan Direksi Nomor 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Peraturan Direksi No. 016.P/010/DIR/2019 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Sekretariat Perusahaan PT Pembangkitan Jawa-Bali dan *Corporate Secretary Manual* sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan mengatur tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab dalam hal membangun, meningkatkan serta menjaga citra Perusahaan melalui kegiatan *corporate social responsibility* dan komunikasi aktif dengan para *stakeholder*, guna mendukung *sustainability* dan pertumbuhan Perusahaan.

Board of Directors Regulation Number 010.P/019/DIR/2019 concerning Organization and Work Procedure of PT Pembangkitan Jawa-Bali and the Board of Directors Regulation No. 016.P/010/DIR/2019 concerning Organizational Structure and Labor Formation at the Corporate Secretariat of PT Pembangkitan Jawa-Bali and Corporate Secretary Manual as a guideline in the implementation of the functions of Corporate Secretary regulates the duties and responsibilities of Corporate Secretary are as follows:

1. Responsible for creating, improving, and maintaining the Company's reputation through corporate social responsibility activities and active communication with the stakeholders to support the Company sustainability and growth.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

2. Memastikan pengelolaan *Corporate Image* dan *Corporate Branding* dapat berjalan secara optimal, sinergis dan terintegrasi dengan program-program pengembangan korporasi untuk mendukung arah pengembangan bisnis.
3. Menjamin bahwa kebijakan, program, sasaran maupun proses-proses selalu mutakhir (*up-to-date*) sesuai kebutuhan perusahaan terkait pemenuhan standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan.
4. Memastikan bahwa persyaratan standar sistem manajemen ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara sesuai standar terbaru guna pemenuhan terhadap persyaratan proses-proses terkait standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan.
5. Memastikan tersedianya perencanaan tindak lanjut perbaikan temuan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan, terkait proses audit dan asesmen kinerja.
6. Melaporkan kepada Direksi terkait kinerja *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan dan berbagai kebutuhan perbaikan serta promosi kepedulian atas persyaratan di seluruh Organisasi.
7. Memastikan penyelenggaraan program kehumasan, baik internal maupun eksternal Perusahaan.
8. Memastikan penyelenggaraan kegiatan protokoler.
9. Menjalankan fungsi mediator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Perusahaan.
10. Memastikan pengelolaan komunikasi korporasi serta menginventarisasi dan mengatur kanal-kanal komunikasi yang ada di Perusahaan.
11. Menjalankan fungsi seleksi (penyortiran, perumusan, klasifikasi, daftar prioritas, pemilihan kanal komunikasi dan persetujuan publikasi) atas seluruh materi informasi yang akan dipublikasikan.
12. Memastikan pengelolaan penyelenggaraan *Board & Committee Meeting,* Rapat Tinjauan Manajemen, Rapat rutin skala korporat lainnya dan Kunjungan Manajemen, termasuk pengelolaan pendokumentasian kegiatan.
13. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengarsiapan dokumen korporat.
14. Memastikan pengelolaan pemeliharaan kantor/gedung, keamanan, kegiatan kesekretariatan, administrasi perkantoran, fasilitas kerja, kebersihan lingkungan kerja, untuk mendukung kelancaran aktivitas kerja serta proses bisnis.

2. Ensuring that the management of Corporate Image and Corporate Branding are capable to run optimally, synergistically, and integrated with corporate development programs to support business development direction.
3. Ensuring that policies, programs, targets, and processes are always up-to-date according to the Company needs related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) standards;.
4. Ensuring that the management system standard requirements are established, implemented, and maintained according to the latest standards to comply with the requirements of the processes related to the implemented Good Corporate Governance (GCG) standards.
5. Ensuring the availability of follow-up plans to improve findings of non-compliance with the fulfillment of the requirements of the implemented Good Corporate Governance (GCG) standards, related to the audit process and performance assessment.
6. Reporting to the Board of Directors concerning the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the various needs for improvement and promotion of awareness of requirements throughout the Organization.
7. Ensuring the implementation of public relations programs both internal and external to the Company.
8. Ensuring the implementation of protocol activity.
9. Carrying out the mediator function in solving problems faced by the Company.
10. Ensuring the management of corporate communications as well as make the inventory and manage communication channels in the Company.
11. Carrying out the selection function (sorting, formulation, classification, priority list, selection of communication channels, and approval of publications) for all information materials to be published.
12. Ensuring the management of the Board & Committee Meetings, Management Review Meetings, other regular corporate-scale meetings, and Management Visits, including the management of activity documentation.
13. Being responsible for the management of corporate document archiving.
14. Ensuring the management of office/building maintenance, security, secretarial activities, office administration, work facilities, cleanliness of the work environment, to support the smooth running of work activities and business processes.

15. Memastikan pengelolaan sistem otomatisasi kesekretariatan kantor dan tata laksana surat & kearsipan.
16. Melayani pelanggan eksternal & internal perusahaan, Mitra, Unit/Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi dan memenuhi kebutuhan perusahaan serta pemegang saham, melalui dukungan terhadap implementasi Budaya Perusahaan dan Sistem Manajemen yang diterapkan sejalan dengan Visi & Misi Perusahaan.
17. Bertanggungjawab penuh atas perencanaan program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja dan anggaran pada Sekretariat Perusahaan secara *prudent* dengan mempertimbangkan kajian kelayakan dan risiko.
18. Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko terkait program-program yang menjadi kewenangan Sekretariat Perusahaan.
19. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan internal bidang.

15. Ensuring the management of the office secretarial automation system and management of letters and archives.
16. Serving the Company's external and internal customers, Partners, Units/Subsidiaries/Associated Companies and fulfilling the needs of the Company and shareholders through support for the implementation of the Corporate Culture and Management System implemented in line with the Company's Vision & Mission.
17. Being fully responsible for planning work programs, budgets and monitoring the realization of work programs and budgets at the Corporate Secretariat prudently by considering feasibility and risk studies.
18. Identifying risks and mitigating risks related to programs under the authority of the Corporate Secretariat.
19. Evaluating and developing field internal policies.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021
Duty Implementation of Corporate Secretary in 2021

Sekretaris Perusahaan menyampaikan kepada Direksi atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan yang mencakup realisasi atas pelaksanaan program kerja masing-masing bidang. Pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2021 meliputi:

1. Bidang Hubungan Internal
   a. Melaksanakan Rapat Direksi, yang selama 2021 telah terselenggara sebanyak 49 kali.
   b. Koordinasi pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris-Direksi (Konsultasi dan Pengawasan), yang selama 2021 telah terselenggara sebanyak 12 kali.
   c. Koordinasi pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan yang selama 2020 terlaksana sebanyak 2 kali, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2021 pada 28 Januari 2021 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Bukun 2020 pada tanggal 29 Juni 2021.
   d. Sosialisasi GCG mengenai pembinaan *scope* dalam *Good Corporate* seperti Standar Etika Perusahaan, Tata Nilai Perusahaan, Gratifikasi, LHKPN, Kebijakan Anti *Fraud*, Benturan Kepentingan, ISO 37001 Anti Penyuapan, *Compliance* dan *Whistle Blowing System.*

Corporate Secretary submits their duties implementation to the Board of Directors in the form of Corporate Secretary Report which includes the realization of the work program implementation of each field. The implementation of Corporate Secretary's functions throughout 2021 includes the following:

1. Internal Relations Department
   a. The Board of Directors Coordination Meeting had been held 49 times in 2021.
   b. Coordination of the Board of Commissioners – the Board of Directors Meeting (Consultation and Supervision) had been held 12 (twelve) times in 2021.
   c. Coordination of the Company's Annual GMS had been held 2 (two) times in 2020, namely GMS for 2021 ABOP Ratification on January 28, 2021, and GMS for Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statement for 2020 Fiscal Year on June 29, 2021.
   d. Carried out GCG Socialization regarding the development of scope in Good Corporate such as Corporate Ethics Standards, Corporate Values, Gratification, LHKPN, Anti-Fraud Policy, Conflict of Interest, ISO 37001 Anti-Bribery, Compliance and Whistle Blowing System.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

e. Evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan GCG PJB dengan melakukan *Self Assessment* GCG periode tahun 2021 berdasarkan parameter Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.
f. Melakukan *monitoring* atas tindak lanjut keputusan RUPS tahun 2020 dan 2021.
g. Menyelenggarakan Rapat Kerja tahun 2021 dalam 2 tahap yaitu Pra Rapat Kerja pada tanggal 2 Maret 2021 dan Rapat Kerja pada tanggal 10 Maret 2021.
h. Melaksanakan Induksi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2021 sebanyak 9 kali pertemuan.
i. *Plant Walkdown Performance Dialogue* (PWPD) sebanyak 16 kali.
j. Pengembangan Aplikasi Agenda PJB.
k. *Review* Proses Bisnis.
l. *Review Soft Structure* GCG PJB.
m. Menyusun perencanaan Agenda Korporat tahun 2022.

2. Bidang *Stakeholder Management*
   a. Menerbitkan Laporan Kinerja Bulanan, yang selama 2021 terbit sebanyak 8 (delapan) kali;
   b. Menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
      Laporan tersebut terdiri atas:
      1) Laporan Manajemen Tahunan *Unaudited* tahun 2020;
      2) Laporan Manajemen Tahunan *Audited* tahun 2020
      3) Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2021;
      4) Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2021;
      5) Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2021;
   c. Menyusun Laporan Tahunan 2020 (*Annual Report* dan *Sustainability Report*) yang telah didistribusikan kepada *stakeholder* PJB serta telah diunggah di *website* PJB;
   d. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta pihak ketiga lainnya;
   e. Menyusun *Corporate Presentation* Tahun 2021 untuk setiap triwulan;
   f. Menyusun Kaleidoskop Tahun 2021;
   g. Menyusun buku Statistik Perusahaan Tahun 2021;
   h. Melakukan koordinasi pelaksanaan *benchmark* tahun 2021 dari eksternal sebanyak 8 kali;
   i. *Media Relation : Press Release & Press Conference;*
   j. *Monitoring* Media Koran Cetak dan *Online*;
   k. *Stakeholder Mapping*;

e. Evaluated and monitored GCG implementation at PJB by conducting GCG Self-Assessment for 2021 period based on the parameters of the Decree by the Ministry of State-Owned Enterprises Secretary No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012.
f. Monitored the follow-up to the GMS resolution in 2020 and 2021.
g. Work Meeting in 2021 had been held in 2 times, including Pre-Work Meeting on March 2, 2021 and the Work Meeting on March 10, 2021.
h. Induction program for the Board of Directors had been held 9 times for 2021.
i. Plant Walkdown Performance Dialogue (PWPD) held 16 times.
j. PJB Agenda Application Development.
k. Business Process Review.
l. Review of PJB GCG Soft Structure.
m. planned the Corporate Agenda for 2022.

2. Stakeholders Management Department
   a. Monthly Performance Report had been published 8 (eight) times in 2021;
   b. Drafted the Company's Management Report to be published and submitted to the Shareholders and the Board of Commissioners.
      The report consists of the following:
      1) Unaudited 2020 Annual Management Report,
      2) Audited 2020 Annual Management Report;
      3) Management Report of Quarter I/2021;
      4) Management Report of Quarter II/2021;
      5) Management Report of Quarter III/2021;
   c. Drafted 2021 Annual Report (Annual Report and Sustainability Report) that have been distributed to PJB stakeholders and have been uploaded on the PJB website;
   d. Provided data and information services to the Shareholders, the Board of Commissioners, the Board f Directors, and other third parties;
   e. Prepared 2021 Corporate Presentation for each quarter;
   f. Prepared 2021 Kaleidoscope;
   g. Prepared the book of Company Statistics in 2021;
   h. Coordination of the external benchmark implementation had been held 8 times in 2021;
   i. Media Relations: Press Release & Press Conference;
   j. Monitored the Printed and Online Newspapers;
   k. Stakeholders Mapping;

l. Bertindak sebagai pelaksana kegiatan *sponsorship* dan iklan sebagai bentuk partisipasi Perusahaan kepada *stakeholders* agar tercipta hubungan yang baik di antara kedua belah pihak;
m. Melaksanakan fungsi kehumasan eksternal dengan memanfaatkan media sosial PJB, yang terdiri atas akun Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube;
n. Media Informasi Korporat meliputi Video *Company Profile*, TV Plasma, E-Kiosk, Portal, dan Mengelola majalah Info PJB yang merupakan majalah korporat Perusahaan;
o. Pengelolaan *Website* sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* mengenai perusahaan;
p. Koordinator Kegiatan Protokoler Perusahaan, seperti: *Coffee Morning,* Rapat Kerja/Koordinasi Tahun 2021, HUT PJB Tahun 2021, dan Pelaksanaan Upacara;
q. Koordinator CSR Perusahaan, PJB melaksanakan program CSR di 19 unit kerja. Aktivitas CSR tersebut diklasifikasikan dalam 4 bidang yaitu: *Empowerment, Capacity Building, Infrastruktur*, dan *Charity*;
r. Mengukur tingkat keberhasilan program CSR dengan mengukur indeks kepuasan pada masyarakat.

3. Bidang Administrasi & Umum
   a. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa non pembangkit;
   b. Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan;
   c. Perencanaan, penyediaan dan pengelolaan kebutuhan operasional seperti ATK, dan penggunaan ruang kantor termasuk fasilitas dan perlengkapannya;
   d. Pengelolaan keamanan lingkungan kantor sesuai dengan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), Manajemen Perkantoran (5S) dan Manajemen Gedung;
   e. Pengelolaan operasional dan pemeliharaan *asset property* serta *asset* tanah dan bangunan yang dimiliki Perusahaan;
   f. Pengelolaan sarana pemadam kebakaran;
   g. Pengelolaan keperluan kesekretariatan;
   h. Perencanaan dan pengembangan sistem otomatisasi kesekretariatan kantor, tata laksana surat dan tata laksana kearsipan;
   i. Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan protokoler kedinasan dan protokoler rapat;
   j. Pengelolaan pelayanan umum.

l. Acted as the executive of sponsorship and advertising activities as actualization of the Company participation to the stakeholders to create good relationship between the two parties;
m. Carried out external public relations by utilizing PJB's social media consisting of Facebook, Twitter, Instagram, and Youtube;
n. Corporate Information Media includes Company Profile Video, Plasma TV, E-Kiosk, Portal, and Managing PJB Info magazine as the Company's corporate magazine;
o. Website management as forum to provide information to the stakeholders regarding the Company.
p. Coordinator of Corporate Protocol Activities, such as Coffee Morning, 2021 Work/Coordination Meeting, 2021 PJB Anniversary, and Ceremony;
q. The Company's CSR Coordinator, PJB carries out CSR programs in 19 (nineteen) work units. CSR activities are classified into 4 (four) areas, namely Empowerment, Capacity Building, Infrastructure, and Charity;
r. Measured the success level of the CSR program by measuring the satisfaction index in the public.

3. Administration & General Affairs Department
   a. Planning and implementation of non-generating goods and services procurement;
   b. Implementation of administrative development;
   c. Planning, provision, and management of operational needs such as stationery, and usage of office space including facilities and equipment;
   d. Management of office environment security based on Security Management System (SMP), Office Management (5S), and Building Management;
   e. Operational management and maintenance of property assets as well as land and building assets of the Company;
   f. Management of firefighting facilities;
   g. Management of secretarial needs;
   h. Planning and development of office secretarial automation systems, management of letters, and management of archives;
   i. Guidance and implementation of official protocol activities and meeting protocols;
   j. Public service management.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Program Pengembangan Kompetensi Personel Sekretaris Perusahaan

Competency Development Program for Corporate Secretary

Perusahaan melaksanakan Program pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam lingkup organ Sekretaris Perusahaan untuk menunjang tugas yang dijalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Program pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan PJB sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI. Program pengembangan kompetensi tahun 2021 yang dikuti oleh staf pada Organ Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company carries out human capital competency development program for Corporate Secretary organ to support Corporate Secretary's duties. Competency development program for Corporate Secretary in 2021 is available in the descriptions related to Education and Training for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of IAU. In addition, staff of Corporate Secretary Organ also participated in the competency development program 2021 as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Personel Sekretaris Perusahaan
Competency Development Program for Corporate Secretary Personnel

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1.	Assistant Officer Hubungan Internal, Assistant Corporate Communication Officer Assistant Officer of Internal Relations, Assistant Officer of Corporate Communication	PJB IMS 2.0	15 Januari 2021 January 15, 2021
2.	Assistant Officer Hubungan Internal, Assistant Officer Hubungan Investor, Assistant Officer Rencana Pengadaan Non Pembangkit Assistant Officer of Internal Relations, Assistant Officer of Investor Relations, Assistant Officer of Non-Generation Procurement Plans	*Three Lines of Defense*	15 Maret 2021 March 15, 2021
3.	Assistant Officer Hubungan Investor Assistant Officer of Investor Relations	Pendalaman Kriteria MB 2021-2022 Deepening of MB Criteria 2021-2022	29 – 31 Maret 2021 March 29-31, 2021
4.	Assistant Officer Pengelolaan Gedung & Fasilitas, Assistant Officer Keamanan Assistant Officer of Investor Relations, Assistant Officer of Non-Generation Procurement	AK3 Umum General OHS	April 2021
5.	Assistant Officer Hubungan Investor, Assistant Officer Pengadaan Non Pembangkit Assistant Officer of Investor Relations, Assistant Officer of Non-Generation Procurement Plans	Manajemen Risiko ISO 31000 ISO 31000 Risk Management	5 – 6 April 2021 April 5-6, 2021
6.	Assistant Officer Pengadaan Non Pembangkit, Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Non-Generation Procurement Plans, Assistant Officer of Internal Relations,	ISO 37001 Manajemen Anti Suap ISO 37001 Anti-Bribery Management	7 April 2021 April 7, 2021

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
7.	Assistant Corporate Communication Officer Assistant Officer of Corporate Communication	Pemrograman Kotlin Kotlin Programming	21 April 2021 April 21, 2021
8.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	Manajemen Risiko ISO 31000 ISO 31000 Risk Management	28 Mei 2021 May 28, 2021
9.	Assistant Officer Pengadaan Non Pembangkit Assistant Officer of Non-Generating Procurement	*Effective Communication & Negotiation Skill*	28 Mei 2021 May 28, 2021
10.	Assistant Officer Pengadaan Non Pembangkit Assistant Officer of Non-Generating Procurement	Manajemen Risiko Risk Management	28 Mei 2021 May 28, 2021
11.	Assistant CSR Officer dan Junior CSR Officer Assistant CSR Officer and Junior CSR Officer	Sosmap dan SROI Sosmap and SROI	Juni 2021 June 2021
12.	Assistant Officer Rencana Pengadaan Non Pembangkit Assistant Officer of Non-Generation Procurement Plan	Manajemen Risiko ISO 3100 ISO 3100 Risk Management	Juni 2021 June 2021
13.	Assistant Officer Keamanan Assistant Officer of Security	Investigasi Kecelakaan Kerja Occupational Accident Investigation	Juni 2021 June 2021
14.	Assistant Officer Hubungan Investor Assistant Officer of Investor Relations	*Stakeholder Management*	16 – 17 Juni 2021 June 16-17, 2021
15.	Assistant CSR Officer, Junior CSR Officer Assistant CSR Officer, Junior CSR Officer	*Social Return On Investment Batch 1*	20-21 Juni 2021 June 20-21, 2021
16.	Assistant Officer Pengelolaan Gedung & Fasilitas Assistant Officer of Building & Facilities Management	Uji Struktur Sipil Civil Structure Test	Juli 2021 July 2021
17.	Assistant Officer Kesekretariatan Secretarial Assistant Officer	Keprotokolan Protocol	Juli 2021 July 2021
18.	Assistant Officer Keamanan Assistant Officer of Security	Auditor SMK3 OHSMS Auditor	Juli 2021 July 2021
19.	Manajer Hubungan Investor Investor Relations Manager	*Ecosystem Analysis*	7 – 13 Juli 2021 July 7-13, 2021
20.	Assistant Corporate Communication Officer Assistant Officer of Corporate Communication	*Designing Market Research*	16 Juli 2021 July 16, 2021
21.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	*Stakeholder Management*	29 Juli 2021 July 29, 2021
22.	Assistant Officer Pengelolaan Gedung & Fasilitas Assistant Officer for Building & Facilities Management	*Stakeholder Management*	Agustus 2021 August 2021
23.	Assistant Officer Kesekretariatan Secretarial Assistant Officer	TNDK	Agustus 2021 August 2021
24.	Assistant Officer Hubungan Investor Assistant Officer of Investor Relations	*Refreshment* AMS (*Audit Management System*) 2.0	12 Agustus 2021 August 12, 2021

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Certification/Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
25.	Assistant Officer Hubungan Investor Assistant Officer of Investor Relations	Pelatihan *Awareness* ISO 14064 Gas Rumah Kaca *Batch* 1 ISO 14064 Greenhouse Gas Awareness Training Batch 1	16 & 18 Agustus 2021 August 16 & 18, 2021
26.	Assistant Officer Hubungan Investor, Assistant CSR Officer dan Junior CSR Officer Assistant Officer of Investor Relations, Assistant CSR Officer and Junior CSR Officer	*Stakeholder Management*	24 – 25 Agustus 2021 August 24-25, 2021
27.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	GRC *Summit*	27 Agustus 2021 August 27, 2021
28.	Assistant Corporate Communication Officer Assistant Officer of Corporate Communication	*Open Broadcaster Software*	31 Agustus 2021 August 31, 2021
29.	Assistant Officer Keamanan Assistant Officer of Security	BCMCP	September 2021
30.	Assistant Officer Keamanan Korporat Assistant Officer of Corporate Security	*Corporate Security Inteligent*	Oktober 2021 October 2021
31.	Assistant Corporate Communication Officer Assistant Officer of Corporate Communication	Pelatihan Konseling Counseling Training	6 Oktober 2021 October 6, 2021
32.	Assistant Officer Kesekretariatan Secretarial Assistant Officer	*Public Relation*	November 2021
33.	Assistant Officer Keamanan Korporat Assistant Officer of Corporate Security	Auditor SMP SMP Auditor	November 2021
34.	Assistant Officer Hubungan Investor Assistant Officer of Investor Relations	Pelatihan ISO 26000 ISO 26000 Training	1 November 2021 November 1, 2021
35.	Manager CSR, Manajer Hubungan Investor CSR Manager, Investor Relations Manager	Sertifikasi QRMA QRMA Certification	1 – 4 November 2021 November 1-4, 2021
36.	Manajer Hubungan Investor dan Assistant Officer Hubungan Investor Investor Relations Manager and Assistant Officer of Investor Relations	Penyusunan *Sustainability Report* Preparation of Sustainability Report	29 – 30 November 2021 November 29-30, 2021
37.	Assistant Corporate Communication Officer, Assistant CSR Officer Assistant Officer of Corporate Communication, Assistant CSR Officer	ISO 26000 CSR	1 Desember 2021 December 1, 2021
38.	Kepala Bidang Hubungan Internal Head of Internal Relations	Penyusunan *Sustainability Report* Preparation of Sustainability Report	30 November 2021 November 30, 2021
39.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	ISO 26000 CSR	1 Desember 2021 December 1, 2021
40.	Assistant Officer Hubungan Internal Assistant Officer of Internal Relations	Administrasi Kearsipan Archival Administration	30 Desember 2021 December 30, 2021

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan
Performance Assessment of Corporate Secretary

Fungsi Sekretaris Perusahaan dievaluasi dalam rangka memastikan efektifitas realisasi atas program kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kualitas pelaksanaannya di masa yang akan datang. Pencapaian target pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan menjadi indikator yang disusun dalam bentuk *Key Performance Indicator* untuk menilai kinerja atas pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan juga melaksanakan tugas-tugas yang secara khusus diberikan oleh Direksi.

The Corporate Secretary function is evaluated in order to ensure the effectiveness of the work program realization as their duty and responsibility and to improve the quality of its implementation in the future. Target achievement of duties implementation of Corporate Secretary is an indicator prepared in the Key Performance Indicator to assess performance implementation of the Corporate Secretary functions. The Corporate Secretary also carries out duties specifically assigned by the Board of Directors.

Penilaian kerja Sekretaris Perusahaan PJB dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan parameter kriteria Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan sebagaimana dituangkan dalam *Key Performance Indicator.* Penilaian Sekretaris Perusahaan PJB dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Sekretaris Perusahaan tahun 2021 telah mencapai target sebesar 103,06% dari *Key Performance Indicator* telah disepakati.

Performance assessment of Corporate Secretary is carried out by the President Director based on the criteria for Completeness and Duty Implementation of Corporate Secretary as stated in the Key Performance Indicator. PJB Corporate Secretary assessment is conducted 2 (two) times a year. Corporate Secretary in 2021 has achieved the target of 103.06% of the agreed Key Performance Indicator.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pengendalian internal didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, pengamanan aset Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal merupakan serangkaian proses, kebijakan, dan prosedur yang menyeluruh, saling berkaitan dan berkesinambungan pada setiap tindakan dan kegiatan baik individu maupun kelompok mulai pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka memastikan tercapainya tujuan Perusahaan. Proses implementasi dan pengembangan sistem pengendalian internal mencakup aspek operasional dan keuangan meliputi 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan dan memberikan pemahaman atas penerapannya;
2. Membuat desain sistem pengendalian internal;
3. Penerapan atas desain sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dan melaksanakan reviu secara berkala;
4. Peningkatan keandalan sistem pengendalian internal.

Internal control is designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial statements, efficiency, and effectiveness of operations, compliance with laws and regulations, and safeguarding of the Company's assets. The Internal Control System is a series of comprehensive, interrelated, and continuous processes, policies, and procedures in every individual and group action and activity starting from the leadership and all employees to ensure the achievement of the Company's goals. The process of implementing and developing an internal control system covers operational and financial aspects, covering 4 (four) stages as follows:

1. Policy establishment and provision of an understanding of their implementation;
2. Internal control system design;
3. Implementation of the internal control system design that has been determined and conducting periodic reviews;
4. Improved reliability of the internal control system.

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System Policy

Sistem Pengendalian Internal PJB mengacu pada prinsip-prinsip Internal *Control-Integrated Framework* yang ditetapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dan diinternalisasikan ke dalam tata kelola PJB melalui Keputusan Direksi No. 098.K/020/DIR/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Tata Kelola Audit Internal PT Pembangkitan Jawa - Bali. Selain itu, PJB juga menetapkan Pedoman Umum *Three Lines of Defense* melalui Peraturan Direksi PT Pembangkit Jawa – Bali No.008.P/019/DIR/2020 tentang Pedoman Umum Penerapan *Three Lines of Defense* di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali.

PJB's Internal Control System refers to the principles of the Internal Control-Integrated Framework set by the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) and is internalized into PJB's governance through the Decree of the Board of Directors No. 098.K/020/DIR/2017 dated December 6, 2017, regarding the Internal Audit Governance of PT Pembangkitan Jawa - Bali. In addition, PJB also stipulates General Guidelines for Three Lines of Defense through the Regulation of the Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No.008.P/019/DIR/2020 concerning General Guidelines for the Implementation of Three Lines of Defense in PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System Framework

Sistem Pengendalian Internal sebagai sebuah proses yang integral melibatkan seluruh jenjang organisasi Perusahaan. Oleh karena itu, PJB mendorong setiap unsur yang ada di lingkungan Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, sampai dengan karyawan tingkat bawah memastikan penerapan pengendalian internal berjalan dengan baik. Implemetasi Sistem Pengendalian Internal mengacu

The Internal Control System as an integral process involves all levels of the Company's organization. Therefore, PJB encourages every element in the Company's environment, from the Board of Commissioners, Directors, and management, to lower-level employees to ensure the implementation of internal control runs well. The implementation of the Internal Control System refers to the internal control policies set by PJB

kepada kebijakan pengendalian internal yang ditetapkan PJB dan mengadopsi prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework* serta *Three Lines of Defense.* Kerangka Kerja tersebut dijalankan selaras dan saling berhubungan satu sama lain dalam mendorong efektifitas pengendalian intenal Perusahaan.

and adopts the principles of the Internal Control-Integrated Framework and Three Lines of Defense. The framework is implemented in harmony and interconnected with each other in promoting the effectiveness of the Company's internal control.

Internal Control-Integrated Framework
Internal Control-Integrated Framework

Kerangka kerja Sistem Pengendalian Internal PJB sejalan dengan prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework* yang mencakup lima komponen penunjang yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (*monitoring*).

PJB's Internal Control System framework is in line with the principles of the Internal Control-Integrated Framework which includes five supporting components which include the control environment, risk assessment, control procedures, information, and communication and monitoring.

Lingkungan Pengendalian
Control Environment

Lingkungan pengendalian dibangun dengan membentuk sikap dan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal yang diimplementasikan melalui Budaya Perusahaan; penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) PJB, melalui pemberian buku saku *Code of Conduct* yang sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Komite-komite, Direksi, semua insan PJB; perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi pada lingkungan pengendalian; penandatanganan Pakta Integritas; kompetensi karyawan, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.

The control environment is established by forming attitudes and awareness of the importance of internal control implemented through Corporate Culture; GCG (Good Corporate Governance) implementation of PJB, through the pocket book of Code of Conduct that has been socialized and distributed to the Board of Commissioners, Committees, the Board of Directors, and all PJB personnel; the attention and direction carried out by the Board of Directors in the control environment; signing of the Integrity Pact; employee competence, as well as organizing and developing human resources.

Penilaian Risiko
Risk Assessment

Pengelolaan risiko menjadi aspek strategis dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan. PJB melalui Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan kajian terhadap pengelolaan risiko usaha yaitu mengidentifikasi, menganalisis & evaluasi, menilai serta mengelola risiko usaha yang relevan.

Risk management is strategic aspect to achieve the Company's objectives. PJB through the Risk Management and Compliance Unit studies the business risk management, namely identifying, analyzing and evaluating, assessing, as well as managing relevant business risks.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Prosedur Pengendalian
Control Procedure

PJB memastikan efektifitas atas aktivitas pengendalian dengan melakukan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan); pembagian tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan terkait; penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan serta pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Terkait pendokumentasian dan pencatatan Laporan Keuangan *Audited* Tahunan, telah dilakukan pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta dilakukan pemeriksaan kinerja secara independen oleh Audit Internal maupun Audit Eksternal (Kantor Akuntan Publik).

PJB ensures the effectiveness of control activities by separating the operations and storage functions from the accounting (recording) function; division of duties and responsibilities for related activities; proper use of authority to carry out activity; as well as the creation and use of adequate documents and records. Regarding the documentation and recording of the Annual Audited Financial Statements, physical control over assets and records has been carried out and also for independent performance examinations by Internal Audit and External Audit (Public Accounting Firm).

Informasi dan Komunikasi
Information and Communication

Komunikasi yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan menjamin ketaatan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi Perusahaan. Terkait informasi dan komunikasi, PJB telah menyediakan media diantaranya melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, sosialisasi, *mail moderator, website* Perusahaan, intranet, portal dan media lainnya.

Effective and efficient communication is needed to support operational activities and ensure compliance with laws and regulations applied to the Company. Regarding information and communication, PJB has provided media including Work Meetings, Coordination Meetings, socialization, mail moderators, website, intranet, portals, and other media of the Company.

Pemantauan (*Monitoring*)
Monitoring

Pemantauan dilakukan secara berkala melalui *performance check* oleh Pembina Teknis, Audit Internal oleh Satuan Pengawasan Internal dan Bidang *Quality Assurance* dan Audit oleh eksternal (BPK dan KAP).

Monitoring is carried out periodically through performance investigations by the Technical Supervisor, Internal Audit by the Internal Supervision Unit and the Quality Assurance Division, and external audits (FAA and PAF).

Three Lines of Defense

Kerangka kerja *Three Lines of Defense* merupakan sistem pengendalian yang dirancang melalui pembagian peran dan tanggung jawab menjadi 3 (tiga) lapis dalam organisasi yang melibatkan *process owner* (*first line*), fungsi pembina unit (*second line*) dan fungsi evaluasi efektivitas sistem pengendalian yang dilakukan oleh *first line* dan *second line* (*third line*).

The Three Lines of Defense framework is a control system designed through the division of roles and responsibilities into 3 (three) lines within the organization involving the process owner (first line), the unit development function (second line), and the function of effectiveness evaluation of the control system carried out by the first line and second line (third line).

First Line

First Line dijalankan oleh unit atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garda terdepan atau ujung tombak organisasi. Fungsi pada *First Line* diharapkan untuk:

1. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif di unit bisnis mereka.
2. Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terutama dalam mengejar pertumbuhan perusahaan. Mereka diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya.
3. Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis mereka, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektifitas pengendalian internal tersebut.

First Line is run by business units or functions that carry out daily operational activities of the company, especially those who are at the forefront or spearhead of the organization. The function on the First Line is expected to:

1. Ensure a conducive control environment in their business units.
2. Implement risk management policies that have been established while carrying out their roles and responsibilities, especially in pursuing company growth. They are expected to consciously consider risk factors in their decisions and actions.
3. Able to demonstrate the existence of effective internal controls in their business units, as well as monitoring and transparency of the effectiveness of these internal controls.

Second Line

Second Line dijalankan oleh unit melaksanakan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang membina dan mendukung pelaksanaan fungsi pada *First Line.* Fungsi pada *Second Line* diharapkan untuk:

1. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko dan kepatuhan perusahaan secara keseluruhan.
2. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standard operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
3. Memantau dan melaporkan risiko-risiko dan kepatuhan perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di perusahaan.

The Second Line is run by units carrying out risk management and compliance functions that foster and support the implementation of functions on the First Line. Functions on Second Line are expected to:

1. Responsible for developing and monitoring the implementation of risk management and overall company compliance.
2. Supervise how business functions are carried out within the corridor of risk management policies and standard operating procedures set by the company.
3. Monitor and report the risks and compliance of the company as a whole to the organ that has the highest accountability in the company.

Third Line

Third Line dijalankan oleh auditor baik auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam kerangka kerja pengendalian *Three Lines of Defense*, dimana mereka adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Fungsi pada *Third Line* diharapkan untuk:

Third Line is run by auditors, both internal auditors and external auditors. The role of internal auditors is much more intense in the Three Lines of Defense control framework, where they are an internal part of the company that is independent of other functions. Functions on the Third Line are expected to:

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

1. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan, dan
2. Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

1. Review and evaluate the overall design and implementation of risk management, and
2. Ensure that the first and second layers of defense work as expected.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Operasional
Implementation of the Operational Internal Control System

Pengendalian Internal diimplementasikan sampai dengan level unit dan individu dengan memastikan aktivitas operasional yang dijalankan sesuai dengan *job desc* dan program kerja termasuk sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Setiap unit telah dilengkapi dengan prosedur proses bisnis sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasional di lingkungan PJB. Sistem Pengendalian Internal pada aspek operasional salah satunya bertujuan untuk memberikan

Internal control is implemented up to the unit and individual level by ensuring that operational activities are carried out following the job description and work program including the performance targets that have been set. Each unit has been equipped with business process procedures as guidelines in carrying out operational activities within PJB. The Internal Control System in the operational aspect aims to provide adequate assurance on the effectiveness and efficiency of

keyakinan yang memadai atas efektifitas dan efisiensi kegiatan fisik pengelolaan Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan, terpercayanya informasi, dan terjaganya aset-aset perusahaan.

Setiap unit dan individu melakukan aktivitas operasional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, menganalisis risiko dan melakukan upaya mitigasi di level unit masing-masing serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal berdasarkan ketersediaan sumber daya dan hasil yang peroleh. SPI melakukan audit pada unit dalam rangka memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan prosedur yang telah ditetapkan. Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan update profil risiko dan *monitoring* atas upaya mitigasi yang dijalankan pada aktivitas operasional Perusahaan.

Direksi memperoleh laporan pelaksanaan tugas dari setiap unit termasuk Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan SPI melalui rapat dan laporan tertulis. Selain itu, Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta SPI secara khusus menyampaikan laporan berkala kepada Dewan komisaris serta berkoordinasi dengan Komite Audit dan Komite Manajemen risiko. Berdasarkan laporan yang diterima dari setiap unit, Direksi memberikan laporan tertulis melalui laporan manajemen dan membahas kinerja operasional melalui rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga secara rutin melakukan kunjungan ke unit-unit bisnis untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik.

the physical activities of the Company's management to achieve the objectives, reliable information, and safeguard the company's assets.

Each unit and individual carry out operational activities following established procedures, analyzes risks and undertakes mitigation efforts at the respective unit level, and ensures that the implementation runs optimally based on the availability of resources and the results obtained. IAU conducts audits on units to ensure operational activities run following the Company's objectives and established procedures. The Risk Management and Compliance Unit updates the risk profile and monitors the mitigation efforts carried out in the Company's operational activities.

The Board of Directors obtains reports on the implementation of duties from each unit including the Risk Management and Compliance Unit and IAU through meetings and written reports. In addition, the Risk Management and Compliance Unit and IAU specifically submit periodic reports to the Board of Commissioners and coordinate with the Audit Committee and the Risk Management Committee. Based on reports received from each unit, the Board of Directors provides written reports through management reports and discusses operational performance through joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also regularly visits business units to ensure that operational activities are running well.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Keuangan
Implementation of the Financial Internal Control System

Perusahaan telah menerapkan *Internal Controls Over Financial Reporting* (ICoFR) sebagai bagian dari Pengendalian Internal atas aspek keuangan yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan pimpinan Perusahaan serta unit kerja terkait. Proses tersebut dilaksanakan secara berjenjang oleh Direksi, Manajemen, dan personil lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas dan pelaksanaan atas pengendalian internal dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap kehandalan pelaporan keuangan, terpercayanya informasi, dan terjaganya aset-aset perusahaan. Implementasi dan pengembangan ICoFR memiliki 3 (tiga) tahapan proses yang terdiri dari penyusunan pedoman dan rancangan pengendalian, pengujian dan pemutakhiran rancangan pengendalian serta pelaksanaan penyusunan pernyataan berjenjang.

Implementation of Internal Controls over Financial Reporting (ICoFR) is part of the Internal Control System on the financial aspect. It is implemented to ensure the effectiveness and implementation of internal control to provide adequate assurance on the reliability of financial reporting, the reliability of the information, and the protection of assets of the Company. The implementation and development of ICoFR have 3 (three) stages consisting of the guideline preparation and control designs, examination and updating of control designs, as well as the implementation of tiered statement preparation.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Perusahaan menunjuk Auditor Eksternal untuk memberi keyakinan atas hasil penyajian laporan keuangan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal pada tingkat entitas secara independen. Auditor Eksternal yang ditunjuk yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit keuangan guna memastikan integritas penyajian laporan keuangan Perusahaan pada setiap tutup buku, Audit Kinerja dan Audit Kepatuhan.

The Company appoints an External Auditor to provide assurance on the results of the presentation of the financial statements and the implementation of the Internal Control System at the entity level independently. The appointed External Auditor is the Public Accounting Firm (PAF) to carry out financial audits to ensure the integrity of the presentation of the Company's financial statements at each closing, Performance Audit, and Compliance Audit.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

Evaluasi atas efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dilakukan dengan metode pengumpulan dan *review* dokumen, survei persepsi, interview dan observasi serta review analitis oleh auditor Internal maupun eksternal sesuai prosedur audit yang berlaku. Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan audit pada tingkatan aktivitas atas objek yang ditetapkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) serta objek lain sebagai penugasan khusus dari pimpinan Perusahaan. Sedangkan secara entitas, audit dilakukan oleh Auditor Eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan general audit pada setiap tutup buku. Hasil audit berdasarkan Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2021 menunjukan bahwa **PJB mematuhi, dalam semua hal yang material.**

Evaluation of the effectiveness of the implementation of the internal control system is carried out by collecting and reviewing documents, perception surveys, interviews, and observations as well as analytical reviews by internal and external auditors following applicable audit procedures. The Internal Audit Unit (IAU) conducts audits at the activity level on objects specified in the Annual Audit Work Program (AAWP) as well as other objects as special assignments from the Company's leadership. As for the entity, the audit is carried out by an External Auditor, namely the Public Accounting Firm (PAF) which has been appointed at the General Meeting of Shareholders to carry out a general audit at each closing. The audit results based on the Independent Auditor's Report on compliance with laws and regulations and internal control for the 2021 Fiscal Year indicate that **PJB complies, in all material respects.**

Perusahaan juga melakukan asesmen pengendalian internal berdasarkan COSO 2013 sebagai evaluasi penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan prinsip-prinsip Internal *Control-Integrated Framework* terhadap seluruh elemen pengendalian. Asesmen pengendalian internal tahun 2021 dilakukan secara korporat melibatkan sebagian Unit antara lain UP Muara Tawar, UP Cirata, UPHB (UMRO), UJLJ, UBJOM Arun, PJB Academy, dan sebagian Divisi/Bidang Kantor Pusat. Berdasarkan survei persepsi melalui *vote* dan kuesioner diperoleh hasil bahwa pengendalian internal di PJB secara umum **sudah ada (*present*) dan berfungsi (*function*).** Selain itu diberikan rekomendasi terhadap prinsip-prinsip atas elemen pengendalian internal agar terjadi peningkatan atas prinsip pengendalian tersebut.

The Company also conducts an internal control assessment based on COSO 2013 as an evaluation of the implementation of an internal control system based on the principles of the Internal Control-Integrated Framework for all elements of control. The internal control assessment in 2021 was carried out corporately involving several units, including Muara Tawar GU, Cirata GU, MSUWA (UMRO), UJLJ, Arun OMSBU, PJB Academy, and other Head Office Divisions. Based on the perception survey through votes and questionnaires, it was found that the internal control in PJB entirely **exists and functions.** In addition, recommendations are given on the principles of internal control elements to increase the control principles.

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Keberadaan fungsi Audit Internal merupakan wujud pengawasan internal Direksi sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai organ tata kelola Perusahaan, fungsi Audit Internal dibentuk dan dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Anggaran Dasar PJB.

Fungsi Audit Internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan audit (*assurance*) dan konsultasi secara independen dan objektif. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI) yang memberikan pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SPI menerapkan pendekatan audit berbasis risiko pada proses bisnis, peningkatan nilai strategis dan operasional Perusahaan, serta kepatuhan atas peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

The existence of Internal Audit function is actualization of Internal Audit Unit by the Board of Directors as part of GCG implementation. As Corporate governance organ, Internal Audit function is established and carried out based on Regulation of the State Minister of SOE No: PER-01/MBU/2011 concerning GCG Implementation in State-Owned Enterprises, as amended by PER-09/MBU/2012, Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and PJB's Articles of Association.

Internal Audit function is carried out by Internal Audit Unit (IAU) which is in charge and responsible for audits (assurance) and consultation independently and objectively. Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit Unit (IAU) who provides reporting and is directly responsible to the President Director. IAU applies risk-based audit approach to business processes, increases the strategic and operational values of the Company, as well as compliance with the Company's internal regulations and applicable laws and regulations.

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal
Profile of the Head of Internal Audit

R. Efin Febriantoro

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Menjabat sebagai KSPI sejak tahun 2015 sesuai Keputusan Direksi PT PJB No. P.135/440/PJB/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan perbaharui melalui Surat Keputusan Direktur Utama No. P.078/440/PJB/2016 tanggal 15 April 2016, P.025/440/PJB/2017 tanggal 08 Februari 2017 dan No. P.262/440/PJB/2017 tanggal 10 November 2017.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 1996.
Sertifikasi yang dimiliki dan pelatihan audit yang telah diikuti diantaranya adalah *Qualified Internal Auditor* (QIA).

Riwayat Pekerjaan
Pernah menjabat sebagai Auditor BPK RI (1997-2001), Auditor SPI PJB (2001-2008), Asisten Manajer Pengembangan Akuntasi Sub Direktorat Akuntasi PJB (2008-2010), Manajer Pengembangan Akuntasi Sub Direktorat Akuntasi PJB (2010-2012) dan Senior Manajer Akuntasi Sub Direktorat Akuntasi PJB (2012-2015).

Indonesian citizen, 51 years old.

Has served as the Head of Internal Audit Unit since 2015 based on PT PJB's the Board of Directors Decree No. P.135/440/ PJB/2015 dated July 27, 2015 and updated through the President Director Decree No. P.078/440/PJB/2016 dated April 15, 2016, P.025/440/PJB/2017 dated February 8, 2017, and No. P.262/440/PJB/2017 dated November 10, 2017.

Education
Completed his education of Economics Bachelor from the Faculty of Economics, Brawijaya University in 1996.
Certifications and audit training that has been followed include the Qualified Internal Auditor (QIA).

Career History
Previously he served as Auditor of BPK RI (1997-2001), Auditor of PJB IAU (2001- 2008), Assistant Manager of Accounting Development Sub Directorate of PJB Accounting (2008-2010), Manager of Accounting Development of PJB Sub Directorate of Accounting (2010-2012), and Senior Manager of PJB Accounting Sub Directorate (2012-2015).

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Internal
Appointment and Dismissal of the Head of Internal Audit Unit

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI dilakukan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan melalui surat keputusan Direksi sesuai dengan kebijakan sumber daya manusia terkait dengan promosi dan mutasi yang berlaku di lingkungan PJB serta ketentuan Piagam Pengawasan Internal.

The Head of IUA is appointed and dismissed based on the Company's internal mechanism by the President Director with the approval by the Board of Commissioners. The Head of IUA is appointed and dismissed through the Board of Directors decree following human resources policies related to promotion and mutation applicable within the PJB and the provisions of Internal Audit Charter.

Kedudukan dan Struktur Organ Satuan Pengawasan Internal
Position and Structure of Internal Audit Unit

Organ Satuan Pengawasan Internal PJB secara struktural berada di bawah Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010.P/019/DIR/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PJB. Selain itu, secara fungsional SPI memiliki akses komunikasi langsung kepada Komite Audit untuk berkoordinasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil audit.

Internal Audit unit organ of PJB is structurally under the President Director based on the Board of Directors Decree No. 010.P/019/DIR/2019 concerning PT PJB's Organization and Work Procedures. Also, IAU in functional has direct communication access to Audit Committee to coordinate and convey information related to audit implementation and results.

Pedoman Kerja Satuan Pengawasan Internal
Internal Audit Unit Work Guideline

Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi Satuan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan kegiatan fungsi audit intenal. Kebijakan dan prosedur tersebut disesuaikan dengan struktur organisasi dan ukuran SPI serta kompleksitas kegiatan usaha PJB. Kebijakan dan prosedur SPI adalah sebagai berikut:

1. *International Professional Practices Framework* (IPPF)
   IPPF adalah kerangka kerja konseptual yang mengatur pedoman resmi praktik auditor internal yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor. Pedoman dalam IPPF meliputi Pedoman Wajib (*Mandatory Guidance*) dan Pedoman yang Disarankan (*Strongly Recommended Guidance*).

The Board of Directors established policies and procedures as guidelines for Internal Audit Unit in implementing activities of Internal Audit function. These policies and procedures are adjusted to IAU organizational structure and size as well as PJB business activities complexity. IAU policies and procedures are as follows:

1. International Professional Practices Framework (IPPF)
   IPPF is conceptual framework regulating official guidelines for internal auditors practice issued by the Institute of Internal Auditors. The guidelines in the IPPF include Mandatory Guidance and Strongly Recommended Guidance.

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

2. Piagam Pengawasan Internal
   Piagam Pengawasan Internal merupakan pedoman umum pelaksanaan pengawasan internal di PJB yang dijalankan oleh SPI. Piagam Pengawasan Internal ditetapkan terakhir kali pada tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani dan disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. SPI PJB akan meninjau Piagam Pengawasan Internal secara periodik dan melakukan penyesuaian sejalan dengan perkembangan standar audit, kondisi Perusahaan dan terintegrasi dengan Piagam Pengawasan Internal PLN. Piagam Pengawasan Internal PJB mencakup:
   1. Pendahuluan;
      1.1 Latar Belakang;
      1.2 Prinsip-Prinsip Pokok Satuan Pengawasan Internal;
      1.3 Tujuan Piagam Pengawasan Internal;
      1.4 Visi dan Misi;
      1.5 Dasar Hukum dan Referensi;
      1.6 Pengertian Audit Internal;
      1.7 Sifat Jasa *Assurance* yang Diberikan Satuan Pengawasan Internal Kepada Perusahaan;
      1.8 Sifat Jasa Konsultasi yang Diberikan Satuan Pengawasan Internal Kepada Perusahaan.
   2. Struktur;
      2.1 Struktur Organisasi;
      2.2 Persyaratan Auditor;
      2.3 Larangan Bagi Auditor.
   3. Tugas dan Tanggung Jawab serta Lingkup Pekerjaan;
   4. Wewenang;
   5. Penggunaan Jasa Audit Eksternal untuk Mendukung Tugas Audit Internal;
   6. Pelaporan;
   7. Komunikasi Satuan Pengawasan Internal;
   8. Standar Pelaksanaan Tugas Audit Internal, Kode Etik dan Program *Quality Assurance*;
      8.1 Standar Pelaksanaan Tugas Audit Internal;
      8.2 Kode Etik;
      8.3 Program *Quality Assurance;*
   9. Pertanggungjawaban Satuan Pengawasan Internal.
3. Standar Profesi Satuan Pengawasan Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB No.098.K/020/DIR/2017. Standar ini mengatur tentang kode etik, standar perilaku, standar profesi, standar atribut dari auditor.

4. Pedoman Umum Satuan Pengawasan Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB No.098.K/020/DIR/2017 yang merupakan panduan umum untuk pelaksanaan penugasan audit internal yang

2. Internal Audit Charter
   Internal Audit Charter is a general guideline for the internal audit in PJB carried out by IAU. Internal Audit Charter was last established on September 11, 2020, which was signed and ratified by the President Commissioner and President Director. PJB IAU will periodically review Internal Audit Charter and make adjustments in line with the development of audit standards, the Company condition and integrated with Internal Audit Charter of PLN. PJB Internal Audit Charter includes the following:
   1. Introduction;
      1.1 Background;
      1.2 Key Principles of Internal Audit Unit;
      1.3 Objectives of Internal Audit Charter;
      1.4 Vision and Mission;
      1.5 Legal Basis and References;
      1.6 Definition of Internal Audit;
      1.7 The Nature of Assurance Services Provided by Internal Audit Unit to the Company;
      1.8 The Nature of Consulting Services Provided by Internal Audit Unit to the Company.
   2. Structure;
      2.1 Organizational Structure;
      2.2 Auditor Requirements;
      2.3 Prohibitions for Auditors.
   3. Duties, Responsibilities, and Scope of Work;
   4. Authority;
   5. The Use of External Audit Services to Support Internal Audit Tasks;
   6. Reporting;
   7. Communication of Internal Audit Unit;
   8. Internal Audit Implementation Standards, Code of conduct, and Quality Assurance Program;
      8.1 Standard of Internal Audit Tasks Implementation;
      8.2 Code of Conduct;
      8.3 Quality Assurance Program.
   9. Accountability of Internal Audit Unit.
3. Internal Audit Unit Professional Standards are determined based on PJB's Board of Directors Decree No.098.K/020/DIR/2017. This standard regulates the code of conduct, standards of behavior, professional standards, and attributes standards of auditors.
4. General Guidelines for Internal Audit Unit are established based on PJB's Board of Directors No.098.K/020/DIR/2017 which are general guidelines for the implementation of internal audit assignments including

meliputi kegiatan *assurance* dan *consulting*, sehingga pelaksanaan penugasan dapat berjalan dengan efektif dan konsisten sesuai dengan kode etik dan standar profesi audit internal yang berlaku.

5. Pedoman Teknis Audit Internal Berbasis Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB No.098.K/020/DIR/2017 yang merupakan pedoman teknis bagi SPI dalam melakukan setiap tahapan proses audit dimulai dari perencanaan audit tahunan, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindakan perbaikan dan evaluasi penugasan audit dengan selalu mempertimbangkan risiko pada setiap tahapan tersebut.
6. Pedoman Pengembangan Audit Program yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB No.098.K/020/DIR/2017 yang merupakan pedoman teknis bagi SPI untuk menyusun audit program yang berisikan seperangkat prosedur analisis atau langkah-langkah pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit.

assurance and consulting activities, so that the implementation of assignments can run effectively and consistently following the code of conduct and applicable internal audit professional standards.

5. Risk-Based Internal Audit Technical Guidelines established based on PJB's Board of Directors Decree No.098.K/020/DIR/2017 which is a technical guideline for IAU in carrying out each stage of the audit process starting from annual audit planning, assignment planning, assignment implementation, communication of results assignments, monitoring corrective actions, to evaluating audit assignments by always considering the risks at each of these stages.
6. Guidelines for the Audit Programs Development established based on PJB's Board of Directors Decree No.098.K/020/DIR/2017 which is a technical guideline for IAU to compile audit program containing a set of analytical procedures or steps for collecting and testing audit evidence.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal
Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit

Satuan Pengawasan Internal berperan memastikan bahwa seluruh proses bisnis yang dijalankan Perusahaan dilakukan sesuai dengan kaidah, peraturan dan ketentuan yang berlaku guna mendukung *sustainability* dan pertumbuhan Perusahaan melalui pelaksanaan audit. Sasaran utama pelaksanaan audit didasarkan pada Standar Profesi Internal Auditor yaitu menjamin keandalan dan integritas informasi; ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, kebijakan dan prosedur yang disepakati; perlindungan terhadap aset; pemanfaatan sumber daya secara efisien dan ekonomis; pelaksanaan kegiatan operasi/program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab SPI PJB adalah sebagai berikut :

1. Memastikan penyusunan, evaluasi, pengembangan kebijakan dan prosedur satuan pengawasan internal.

2. Memastikan Perusahaan dikelola dengan prinsip niaga yang sehat dan berdasarkan GCG melalui pelaksanaan audit dan menjadi *counterpart* dari auditor eksternal (BPK/KAP).

Internal Audit Unit takes role in ensuring that all business processes by the Company are carried out in line with applicable rules, regulations and regulations to support the Company sustainability and growth through audit implementation. The main objectives of the audit are following Internal Auditor Professional Standards, which is to ensure the reliability and integrity of information; compliance with the agreed rules, regulations, policies and procedures; protection of assets; efficient and economical use of resources; implementation of operational activities/programs based on the established goals and objectives. Therefore, the duties and responsibilities of PJB IAU are as follows:

1. Ensuring the preparation, evaluation, as well as development of policies and procedures of Internal Audit unit.
2. Ensuring that the Company is managed with sound commercial principles and based on GCG through auditing and being counterpart to the external auditor (FAA/PAF).

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

3. Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan perusahaan berdasarkan hasil audit yang dilakukan dan melakukan *monitoring* atas tindaklanjut rekomendasi.
4. Melakukan kegiatan pelaporan kepada *external auditor*/ pihak regulator/ internal manajemen Perusahaan.
5. Menjalankan peran sebagai *third line of defence* dalam melakukan kegiatan pengendalian internal melalui pelaksanaan audit berdasarkan hasil inputan dari *first line of defence* (Satuan/ Divisi/ Bidang/ Unit Kerja Perusahaan) dan *second line of defence* (Bidang Kepatuhan) sehingga pengendalian internal perusahaan berjalan dengan optimal.
6. Melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan atas kebijakan, pedoman, dan prosedur Pengawasan Internal serta pemanfaatan aplikasi *Audit Management System* (AMS) untuk mendukung mekanisme kerja Satuan Pengawasan Internal.
7. Menjalankan fungsi pembinaan, supervisi, pengendalian, dan koordinasi terhadap program-program pengawasan, baik di Kantor Pusat maupun seluruh Unit Kerja Perusahaan.
8. Melayani pelanggan eksternal & internal perusahaan, Mitra, Unit/AP/PA dan memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemegang saham, melalui dukungan terhadap implementasi Budaya Perusahaan (PJB *Way*) dan Sistem Manajemen yang diterapkan perusahaan (SIT, GCG, PJB IMS, Kriteria *Baldrige*, SMK3, *Maturity Level* Proses Bisnis) sejalan dengan Visi & Misi Perusahaan.
9. Bertanggungjawab penuh atas perencanaan program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja dan anggaran pada Satuan Pengawasan Internal secara prudent dengan mempertimbangkan kajian kelayakan dan risiko.
10. Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko terkait program-program yang menjadi kewenangan fungsi Satuan Pengawasan Internal.
11. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan internal di Satuan Pengawasan Internal.

3. Providing recommendations for management improvement of the Company according to the audit results conducted and monitoring the follow-up to recommendations.
4. Conducting reporting activities to external auditors/ regulatory parties/internal management of the Company.
5. Carrying out the role as the third line of defense in running internal control activities through audit implementation in accordance with the input from the first line of defense (Unit/Division/Field/Company Work Unit) and second line of defense (Compliance Division) so that the Company's internal audit runs optimally.
6. Continuously improving policies, guidelines, and procedures of Internal Audit and using Audit Management System (AMS) application to support the work mechanism of Internal Audit Unit.
7. Implementing the functions of coaching, supervising, controlling, and coordinating the supervision programs, both at the Head Office and in the entire Work Units of the Company.
8. Serving the Company's external & internal customers, Partners, Unit/AP/PA and fulfilling the needs of the Company and shareholders, through the support for the Corporate Culture (PJB Way) implementation and Management System implemented by the Company (SIT, GCG, PJB IMS, Baldrige Criteria , OHSE, and Maturity Level Business Process) in line with the Company's Vision & Mission.
9. Being fully responsible for the planning of work programs and budgets, as well as monitoring the realization of work programs and budgets in Internal Audit Unit in prudent manner by considering feasibility and risk studies.
10. Identifying risks and mitigating risks related to programs under the authority of Internal Audit Unit function.
11. Evaluating and developing internal policies in Internal Audit Unit.

Formasi dan Kualifikasi Auditor Satuan Pengawasan Internal
Formation and Qualification of Internal Audit Unit Auditor

Auditor SPI pada tahun 2021 berjumlah 33 Orang. Pimpinan dan staf auditor SPI PJB memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dengan kualifikasi sebagai berikut:

Total IAU auditor in 2021 is 33 auditors. The leadership and staff of PJB's IAU auditors have adequate knowledge and expertise with the following qualifications:

Formasi dan Kualifikasi Auditor Satuan Pengawasan Internal
Formation and Qualification of Internal Audit Unit Auditor

No.	Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pendidikan Education History
1	R. Efin Febriantoro	Kepala Satuan Pengawasan Internal Head of Internal Audit Unit	• S1 Ekonomi dari Universitas Brawijaya (1992-1996) • Bachelor of Economics from Brawijaya University (1992-1996)
2	Sulistyo Utomo	Kepala Auditor 1 Head of Auditor 1	• S1 Fisika dari ITS Surabaya (1988-1992) • S2 Bidang Manajemen dari ITB (2000-2002) • Program Profesi Insinyur dari UGM (Sep-Des 2019) • Bachelor of Physics from ITS Surabaya (1988-1992) • Master of Management from ITB (2000-2002) • Professional Engineer Program from Gadjah Mada University (September - December 2019)
3	Mochamad Triyono	Kepala Auditor 2 Head of Auditor 2	• S1 Teknik Industri dari ITS Surabaya (1988-1992) • S2 Master of Business Administration dari Universitas Tenaga Nasional Malaysia (2003-2005) • Bachelor of Industrial Engineering from ITS Surabaya (1988-1992) • Master of Business Administration from the Malaysian National Power University (2003-2005)
4	Hairul Aswad	Kepala Auditor 3 Head of Auditor 3	• S1 Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sriwijaya (1989-1994) • S2 Ekonomi Syariah dari Universitas Indonesia (2008-2009) • Bachelor of Accounting Economics from Sriwijaya University (1989-1994) • Master of Sharia Economics from the University of Indonesia (2008-2009)
5	Mochammad Agustian	Kepala Bidang Konsultasi, QA, *Counterpart & Reporting* Head of Consulting, QA, Counterpart & Reporting	• S1 Teknik Elektro dari ITB (1995-1999) • S2 Manajemen Teknik dari ITS Surabaya (2004-2006) • S2 Teknik Elektro dari ITB (2007-2009) • Bachelor of Electrical Engineering from ITB (1995-1999) • Master of Engineering Management from ITS Surabaya (2004-2006) • Master of Electrical Engineering from ITB (2007-2009)
6	Sugito	Senior Spesialis I Konsultasi Senior Specialist I Consulting	• S1 Mesin dari STT YPK PT PLN (Persero) (1996-2000) • Bachelor of Engineering from STT YPK PT PLN (Persero) (1996-2000)
7	Hadeyanti Sylviani	Senior Spesialist I Auditor 3 Senior Spesialist I of Auditor 3	• S1 Akutansi dari Universitas Padjajaran (1991-1995) • S2 Manajemen Keuangan dari Universitas Padjajaran (1999-2000) • Bachelor of Accounting from Padjadjaran University (1991-1995) • Master of Financial Management from Padjadjaran University (1999-2000)
8	Agus Priyo Kusumo	Senior Spesialis II Auditor 2 Senior Spesialist II of Auditor 2	• S1 Teknik Industri dari Untag Surabaya (1991-1996) • Bachelor of Industrial Engineering from 17 August 1945 University Surabaya (1991-1996)
9	Ali Umar Sjafi'i	Senior Spesialis II Auditor 2 Senior Spesialist II of Auditor 2	• S1 Informatika dari STT Nurul Jadid (2009-2013) • Bachelor of Informatics from STT Nurul Jadid (2009-2013)
10	Ahmad Fajar Ridlo	Senior Spesialis II Auditor 2 Senior Spesialist II of Auditor 2	• S1 Elektro dari ITS Surabaya (1996-2000) • S2 Magister Manajemen Teknik dari ITS Surabaya • Bachelor of Electrical from ITS Surabaya (1996-2000) • Master of Engineering Management from ITS Surabaya

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

No.	Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pendidikan Education History
11	Rita Kartika	Senior Spesialis II Auditor 2 Senior Spesialist II of Auditor 2	• S1 Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya (1986-1991) • Bachelor of Law from 17 August 1945 University, Surabaya (1986-1991)
12	Suherman	Analyst Auditor 1	• S1 Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Malang (2000-2004) • Bachelor of Electrical from Engineering College Malang (2000- 2004)
13	Budi Purwono	Analyst Auditor 1	• S1 Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga (2000-2005) • S2 Magister Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (2013-2017) • Bachelor of Management Economics from Airlangga University (2000-2005) • Master of Accounting from Gadjah Mada University (2013-2017)
14	Lisna Mery T	Analyst Auditor 1	• S1 Manajemen dari Universitas Airlangga (1997-2003) • S2 Magister Manajemen dari Universitas Airlangga (2014-2016) • S1 Management from Airlangga University (1997-2003) • Master of Management from Airlangga University (2014-2016)
15	Ahmad Syaiful Zuhri	Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Industri dari Universitas Islam Indonesia (2006-2010) • S2 Bidang Manajemen dari Universitas Diponegoro (2013-2015) • Bachelor of Industrial Engineering from the Islamic University of Indonesia (2006-2010) • Master of Management from Diponegoro University (2013- 2015)
16	Ridho Adhie Hernowo	Analyst Methodology & QA	• S1 Manajemen dari Universitas Airlangga (2000-2005) • S2 Magister Manajemen dari Universitas Airlangga (2007-2009) • Bachelor of Management from Airlangga University (2000-2005) • Master of Management from Airlangga University (2007- 2009)
17	Bima Surya Sofhananda	Assistant Analyst Methodology & QA	• S1 Teknik Industri dari ITS Surabaya (2012-2016) • Bachelor of Industrial Engineering from ITS Surabaya (2012-2016)
18	Arizky Aryantio	Assistant Analyst Methodology & QA	• S1 Teknik Industri dari Telkom University (2014-2018) • Bachelor of Industrial Engineering from Telkom University (2014-2018)
19	Elvira Saris Virmania	Assisstant Analyst Counterpart & Reporting	• S1 Akuntansi dari Universitas Gajah Mada (2011-2015) • Bachelor of Accounting from Gajah Mada University (2011-2015)
20	Rachmatika Anjani K.	Assisstant Analyst Counterpart & Reporting	• S1 Manajemen dari Universitas Padjajaran (2012-2016) • Bachelor of Management from Padjadjaran University (2012-2016)
21	Riyo Hussain Muhammad	Assisstant Analyst Counterpart & Reporting	• S1 Teknik Fisika dari ITS Surabaya (2010-2015) • Bachelor of Physics Engineering from ITS Surabaya (2010-2015)
22	Therry Widya Laksmi	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Elektro dari Universitas Semarang (2000-2004) • Bachelor of Electrical Engineering from Semarang University (2000-2004)
23	Rina Febyanasari	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Kimia dari ITS Surabaya (2002-2006) • S2 Teknik Mesin dari ITS Surabaya (2012-2014) • Bachelor of Chemical Engineering from ITS Surabaya (2002-2006) • Master of Mechanical Engineering from ITS Surabaya (2012-2014)

No.	Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pendidikan Education History
24	Achmad Hatta Wiyata	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Elektro dari Institut Teknik PLN (2009-2014) • Bachelor of Electrical Engineering from PLN Engineering Institute (2009-2014)
25	Fadianto Mirza	Assistant Analyst Auditor 1	• S1 Teknik Elektro dari Universitas Brawijaya (2011-2015) • Bachelor of Electrical Engineering from Brawijaya University (2011-2015)
26	Fitratus Shiddiq S.P.	Assistant Analyst Auditor 2	• S1 Hukum dari Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta (2008-2013) • Bachelor of Law from Atma Jaya Catholic University Jakarta (2008-2013)
27	Dendi Mahawarman	Assistant Analyst Auditor 2	• D4 Teknik Elektronika dari Politeknik Negeri Bandung (2012-2016) • Diploma of Electronic Engineering from Bandung State Polytechnic (2012-2016)
28	Alex Munandar	Assistant Analyst Auditor 2	• S1 Teknik Elektro dari Universitas Lampung (2011-2016) • Bachelor of Electrical Engineering from Lampung University (2011-2016)
29	Achmad Farizal I.	Assistant Analyst Auditor 3	• S1 Teknik Industri dari Universitas Diponegoro (2012-2016) • Bachelor of Industrial Engineering from Diponegoro University (2012- 2016)
30	Lahmsa Alkautsa H.	Assistant Analyst Auditor 3	• S1 Manajemen dari Universitas Diponegoro (2009-2013) • Bachelor of Management from Diponegoro University (2009-2013)
31	Ricardo Pasaribu	Assistant Analyst Auditor 3	• S1 Manajemen dari Universitas Indonesia (2012-2016) • S2 Magister Manajemen Teknologi ITS (2018-2020) • Bachelor of Management from University of Indonesia (2012-2016) • Master of Technology Management from ITS (2018-2020)
32	Okky Gati Hambali	Assistant Analyst Auditor 3	• S1 Teknik Elektro dari Institut Teknik PLN (2009-2014) • Bachelor of Electrical Engineering from PLN Engineering Institute (2009-2014)
33	Malinda Dinna Auliya	Assistant Analyst Auditor 3	• S1 Teknik Elektro dari Universitas Brawijaya (2011-2015) • Bachelor of Electrical Engineering from Brawijaya University (2011-2015)

Satuan Pengawasan Internal PJB telah didukung dengan auditor yang kompeten dan memiliki sertifikasi profesi untuk mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal. Jumlah Auditor yang telah memiliki sertifikasi sampai dengan desember 2021 adalah sebagai berikut:

PJB Internal Audit Unit has been supported by competent auditors and has professional certification in supporting the implementation of Internal Audit function. Total Auditor who have been certified as of December 2021 are as follows:

Sertifikasi Profesi Auditor Satuan Pengawasan Internal
Professional Certification Auditors of Internal Audit Unit

Sertifikasi Profesi Professional Certification	Jumlah Auditor Total Auditor
Qualified Internal Auditor (QIA)	9
Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	9
Qualified Risk Management Officer (QRMO)	1
Certified Fraud Examiner (CFE)	1
Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	3

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Perusahaan terus mendorong peningkatan mutu dan kemapuan auditor dengan memfasilitasi personil SPI untuk mengikuti jenjang pelatihan dalam rangka mendapatkan sertifikasi profesi yang mendukung fungsi audit internal. Jumlah personil SPI yang mengikuti program diklat berjenjang sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Company keeps encouraging improvement of auditors quality and capability by facilitating IAU auditors to participate in training levels to obtain professional certifications that support the internal audit function. Total IAU auditor participated in tiered training program throughout 2021 is as follows:

Jenjang Sertifikasi Profesi Auditor Satuan Pengawasan Internal
Internal Auditor Professional Certification Level of Internal Auditor Unit

Jenjang Sertifikasi Profesi Auditor S Internal Auditor Professional Certification Level	Jumlah Auditor Total Auditor
Tingkat Manajerial Managerial Level	9
Tingkat Lanjutan Advanced Level	8
Tingkat Dasar Basic Level	13

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal
Report on the Implementation of Internal Control Audit Activities

Satuan Pengawasan Internal menggunakan pendekatan *Risk Based Internal Audit* (RBIA) dalam menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT). Pendekatan RBIA mengacu pada *Strategy Map* PJB yang berisi sasaran-sasaran strategis korporat. Berdasarkan sasaran strategis ini, manajemen menentukan profil risiko korporat beserta rencana mitigasinya. SPI menentukan sasaran audit berdasarkan profil risiko korporat beserta rencana mitigasinya untuk menguji seberapa efektif mitigasi tersebut dilaksanakan. Sasaran audit tersebut kemudian diturunkan menjadi program audit yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan audit.

Internal Audit Unit uses Risk Based Internal Audit (RBIA) approach in preparing Annual Audit Work Program (AAWP). RBIA approach refers to PJB Strategy Map which contains corporate strategic goals. Based on these strategic objectives, management determines the corporate risk profile and its mitigation plan. IAU determines audit targets based on corporate risk profile and its mitigation plan to test how effective the mitigation is implemented. Audit objectives are then reduced to audit program that will be used as reference in audit implementation.

Sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Pengawasan Internal tahun 2021, program-program utama Satuan Pengawasan Internal mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Audit Internal dengan objek audit Unit Pembangkitan (UP), Unit Pelayanan Pemeliharaan (UPHAR), Unit Bisnis Jasa *Operation and Maintenance* (UBJOM), Divisi/ Bidang/ Satuan Kerja PJB Kantor Pusat dan Anak Perusahaan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Komite Audit dan *Counterpart* eksternal auditor;
3. Peran sebagai *consultant* dan *catalyst*;
4. *Monitoring* tindak lanjut hasil audit;
5. Peningkatan kompetensi SDM.

According to Annual Audit Work Program (AAWP) of Internal Audit Unit in 2021, the main programs of Internal Audit Unit include the following activities:

1. Internal Audit with audit objects of Generation Unit (GU), Maintenance Service Unit (MSU), Operation and Maintenance Service Business Unit (OMSBU), Division/ Sector/Work Unit of PJB Head Office, and Subsidiaries;
2. Implementation of coordination with Audit Committee dan Counterpart external auditors;
3. Role as consultant and catalyst;
4. Monitoring follow-up audit results;
5. Increasing the HR competence.

Berdasarkan Rencana Kerja SPI tersebut sampai dengan akhir tahun 2021, SPI telah merealisasikan program kerja utama yang mencakup kegitan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Audit**
   Audit rutin dan audit tujuan tertentu telah dilakukan pada beberapa obyek audit meliputi Unit Pembangkitan (UP), Unit Pelayanan Pemeliharaan (UPHAR), Unit Bisnis Jasa Operation and *Maintenance* (UBJOM), Divisi/ Bidang/ Satuan Kerja PJB Kantor Pusat dan Anak Perusahaan. Sepanjang tahun 2021, telah dilakukan audit internal pada 35 obyek audit sebagai berikut:

Based on IAU Work Plan up to the end of 2021, IAU has actualized the main work program including the following activities:

1. **Audit Implementation**
   Routine audit and audit for specific purposes, including Generation Unit (GU), Maintenance Service Unit (MSU), Operation and Maintenance Service Business Unit (OMSBU), Division/Sector/Work Unit of PJB Head Office and Subsidiaries. Throughout 2021, internal audits carried out on 35 audit objects as follows:

Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2021
Implementation of Routine Audit in 2021

No.	Obyek Audit Audit Objects	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Triwulan I Quarter I		
1	Unit Pembangkitan Paiton Paiton Generation Unit	25 Januari – 12 Februari 2021 January 25 - February 12, 2021
2	Unit Pembangkitan Gresik Gresik Generation Unit	25 Januari – 12 Februari 2021 January 25 - February 12, 2021
3	Unit Pembangkitan Muara Tawar Muara Tawar Generation Unit	25 Januari – 12 Februari 2021 January 25 - February 12, 2021
4	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Paiton Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Paiton CFPP	8 – 26 Maret 2021 March 8-26, 2021
5	Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur (UPHT) Maintenance Service Unit of Eastern Area (MSUEA)	8 – 26 Maret 2021 March 8-26, 2021
6	Unit Pembangkitan Muara Karang Muara Karang Generation Unit	8 – 26 Maret 2021 March 8-26, 2021
7	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Tanjung Awar-Awar Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Tanjung Awar-Awar CFPP	29 Maret – 16 April 2021 March 29 - April 16, 2021
8	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Pacitan Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Pacitan CFPP	29 Maret – 16 April 2021 March 29 - April 16, 2021
9	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Indramayu Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Indramayu CFPP	29 Maret – 16 April 2021 March 29 - April 16, 2021
Triwulan II Quarter II		
10	Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (UPHB) Maintenance Service Unit of Western Area (MSUWA)	26 April – 21 Mei 2021 April 26 - May 21, 2021
11	Unit Pembangkitan Brantas Brantas Generation Unit	26 April – 21 Mei 2021 April 26 - May 21, 2021

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

No.	Obyek Audit Audit Objects	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
12	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Rembang Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Rembang CFPP	26 April – 21 Mei 2021 April 26 - May 21, 2021
13	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Pulang Pisau Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Pulang Pisau CFPP	2 Juni – 29 Juni 2021 June 2 -29, 2021
14	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Kaltim Teluk Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Kaltim Teluk CFPP	2 Juni – 29 Juni 2021 June 2 -29, 2021
15	Unit Pengembangan Usaha dan Pembangunan Business Development Unit	2 Juni – 29 Juni 2021 June 2 -29, 2021
16	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) Luar Jawa 2 (UJLJ 2) Outside Java 2 O&M Services Business Unit	2 Juni – 29 Juni 2021 June 2 -29, 2021
17	PJB Academy	21 Juni – 16 Juli 2021 June 21 - July 16, 2021
18	Unit Pembangkitan Cirata Cirata Generation Unit	21 Juni – 16 Juli 2021 June 21 - July 16, 2021
Triwulan III Quarter III		
19	Direktorat Pengembangan dan Niaga Directorate of Development and Commerce	2 – 20 Agustus 2021 August 2-20, 2021
20	Direktorat Operasi-1 Directorate of Operations-1	2 – 20 Agustus 2021 August 2-20, 2021
21	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Arun Operation & Maintenance Service Business Units of Arun CFPP	2 – 20 Agustus 2021 August 2-20, 2021
22	Direktorat Keuangan Directorate of Finance	30 Agustus – 24 September 2021 August 30 - September 24, 2021
23	Direktorat Operasi-2 Directorate of Operations-2	30 Agustus – 24 September 2021 August 30 - September 24, 2021
24	Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Tenayan Operation and Maintenance (O&M) Services Business Unit of Tenayan CFPP	30 Agustus – 24 September 2021 August 30 - September 24, 2021
25	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi Directorate of Human Capital and Administration	4 – 29 Oktober 2021 October 4-29, 2021
26	Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Unit	4 – 29 Oktober 2021 October 4-29, 2021
Triwulan IV Quarter IV		
27	Satuan Perencanaan dan Transformasi Korporat Corporate Planning and Transformation Unit	4 – 29 Oktober 2021 October 4-29, 2021
28	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	4 – 29 Oktober 2021 October 4-29, 2021
29	Satuan Kinerja Korporat dan Pengembangan Sistem Manajemen Corporate Performance and Management System Development Unit	4 – 29 Oktober 2021 October 4-29, 2021
30	Satuan Teknologi dan Enjiniring Technology and Engineering Unit	4 – 29 Oktober 2021 October 4-29, 2021

No.	Obyek Audit Audit Objects	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
31	Satuan Pelayanan Hukum Legal Service Unit	8 November - 3 Desember 2021 November 8 - December 3, 2021
32	PT PJB Investasi	8 November - 3 Desember 2021 November 8 - December 3, 2021
33	PT Rekadaya Elektrika	8 November - 3 Desember 2021 November 8 - December 3, 2021
34	PT PJB Services	8 November - 3 Desember 2021 November 8 - December 3, 2021
35	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	13 - 31 Desember 2021 December 13-31, 2021

Satuan Pengawasan Internal melakukan pengujian *Test Of Effectiveness* (TOE) atas *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR) yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari kontrol yang dirancang dalam ICoFR dan mengusulkan pemutakhiran rancangan *Business Process Model* (BPM) dan *Risk Control Matrices* (RCM). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, jumlah defisiensi periode 2021 adalah 2 Kontrol dari 1.378 Kontrol (0,15%) dan berhasil diremediasi 100%. Selain itu, SPI melakukan Audit PJB-IMS yang bertujuan untuk memastikan PJB-IMS telah ditetapkan, diimplementasikan, dikelola dan dipelihara dengan baik dan efektif sejalan dengan kebijakan, strategi dan tujuan perusahaan dan telah memenuhi seluruh persyaratan Standar Sistem Manajemen yang ditetapkan. Audit PJB-IMS menghasilkan 44 NC minor dan 337 rekomendasi dengan progress tindak lanjut mencapai 90% sampai dengan akhir tahun 2021.

Internal Audit Unit conducted Test Of Effectiveness (TOE) test of internal control over financial reporting (ICOFR) which aimed to evaluate the effectiveness of the controls designed in the ICoFR and proposed the update of business process model (BPM) and Risk Control Matrices (RCM) designs. Based on the test results, the number of deficiencies for 2021 period was 2 Controls out of 1,378 Controls (0.15%) and was successfully remediated by 100%. Apart from that, IAU conducts PJB-IMS Audit purposed to ensure PJB-IMS that has been determined, implemented, managed, and maintained properly and effectively is in line with policies, strategies, and purposes of the Company and has fulfilled all requirements of the established Management System Standard. PJB-IMS Audit generates 44 NC minor and 337 recommendations with the progress of followup reaches 90% as of the end of 2021.

2. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Komite Audit dan *Counterpart* Eksternal Auditor

Kegiatan koordinasi berupa pertemuan bersama Komite Audit dilakukan secara rutin setiap triwulan sebagai bagian dari fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Tahun 2021, SPI telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Komite Audit dengan realisasi sebagai berikut:

a. Tanggal 15 Februari 2021, SPI dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan IV 2020;
b. Tanggal 25 Mei 2021, SPI dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan I 2021;

2. Coordination with Audit Committee dan Counterpart External Auditors;

Coordination activities in the meeting with Audit Committee is held routinely quarterly as part of the supervisory function by the Board of Commissioners. In 2021, IAU held Coordination Meeting with Audit Committee with the actualization as follows:

a. February 15, 2021, Internal Audit Unit and Audit Committe held Discussion Meeting on Internal Audit Unit Works Reports (IAUWR) of Q4/2020;
b. May 25, 2021, Internal Audit Unit and Audit Committe held Discussion Meeting on Internal Audit Unit Works Reports (IAUWR) of Q1/2021;

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

c. Tanggal 9 Agustus 2021, SPI dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan II 2021;
d. Tanggal 8 November 2021, SPI dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan III 2021.

Sepanjang tahun 2021, SPI melakukan fungsi *Counterparting* terhadap auditor eksternal sebagai berikut:
a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Perhitungan Subsidi Listrik dan Pengelolaan Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 pada PT PLN (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta melalui Surat Tugas No.26/ST/IX-XX.1/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Audit dilaksanakan 25 hari sejak tanggal surat tugas.
b. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (KAP PwC Indonesia) ditunjuk oleh PT PLN (Persero) untuk melakukan *review* laporan keuangan konsolidasian PT PLN (Persero) dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 serta melaksanakan jasa professional lain dalam rangka penerbitan *Global Medium Term Note* (GMTN) melalui surat No.33368/KEU.02.02/C01070400/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan *Review* Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 dan Jasa Pendukung Program GMTN. KAP PwC Indonesia juga ditunjuk oleh PT PLN (Persero) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan tahun 2021 melalui melalui surat No.47611/KEU.02.04/C01070400/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan tahun 2021.
c. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit kepabeanan dan/atau audit cukai serta melakukan penindakan seperlunya terhadap PT Pembangkitan Jawa Bali melalui Surat Tugas No.ST-768/WBC.11/WBC.11/2021 tanggal 8 September 2021. Audit dilaksanakan pada tanggal 20 September – 1 Oktober 2021. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melakukan audit melalui Surat Tugas Nomor ST-928/WBC.11/WBC.11/2021 tanggal 7 Oktober

c. August 9, 2021, Internal Audit Unit and Audit Committe held Discussion Meeting on Internal Audit Unit Works Reports (IAUWR) of Q2/2021;
d. November 8, 2021, Internal Audit Unit and Audit Committe held Discussion Meeting on Internal Audit Unit Works Reports (IAUWR) of Q3/2021.

Throughout 2021, IAU performed Counterpart Functions to External Auditors as follows:
a. The Republic of Indonesia Audit Board (BPK RI) conducted Preliminary Examination of the Compliance of Electricity Supply Business Activities, Calculation of Electricity Subsidies and Financial Management in Handling the Covid-19 Pandemic in 2021 at PT PLN (Persero) and Related Agencies in Jakarta through Task Letter No.26 / ST / IX-XX.1 / 08/2021 dated August 30, 2021. The audit was carried out 25 days from the date of the letter of assignment.
b. Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia PAF) was appointed by PT PLN (Persero) to review the consolidated financial statements of PT PLN (Persero) and Subsidiaries for the financial year ended on September 30, 2021 and September 30, 2020 and to take other professional services in the context of issuing Global Medium Term Note (GMTN) through letter No.33368/KEU.02.02/C01070400/2021 dated July 19, 2021 concerning a Warrant to Carry out a Review Work Third Quarter 2021 Financial Report and GMTN Program Support Services. PwC Indonesia PAF was also appointed by PT PLN (Persero) to Audit 2021 Financial Statements through letter No.47611/KEU.02.04/C01070400/2021 dated September 10, 2021 concerning 2021 Financial Statement Audit.
c. The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Directorate General of Customs and Excise carried out customs audits and/or excise audits as well as took prosecution as necessary against PT Pembangkitan Jawa Bali through Task Letter No.ST-768/WBC.11/WBC.11/2021 dated September 8, 2021. The audit was conducted on September 20 – October 1, 2021. The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Directorate General of Customs and Excise also carried out audit through Task Letter Number ST-928/

2021 perihal melakukan pekerjaan lapangan tahap kedua dalam rangka audit kepabeanan dan/atau audit cukai serta melakukan penindakan seperlunya.

WBC.11/WBC.11/2021 dated October 7, 2021 regarding the second phase of field work implementation in the context of customs audits and/or excise audits and takethe prosecution as necessary.

3. Peran Sebagai Konsultan dan Katalis

Satuan Pengawasan Internal melakukan layanan konsultasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan saran perbaikan pada Manajemen dalam pengambilan keputusan, dalam rangka membangun dan memperbaiki pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola (*governance*). Peran SPI sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas manajemen; membantu manajemen dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi; meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) serta telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Kegiatan layanan konsultasi sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut.

3. Role as Consultant and Catalyst

Internal Audit Unit conducts consulting services that porpose to provide added values and suggestion for management improvement in decision making, in order to build and improve risk management, internal control and governance processes. IAU role as a consultant is expected to provide benefits in the advice for the management of organizational resources so as to assist management tasks; assist management in identifying risks that threaten the achievement of organizational goals; to ensure that the organization has made economical, efficient and effective use of the organization's resources (3E) and has carried out the organization activities leading to its goals. The consulting service activities until December 2021 are as follows.

Pelaksanaan Peran Sebagai Konsultan dan Katalis
Role Implementation as Consultant and Catalyst

No.	Unit Kerja Work Unit	Permasalahan Issues	Jumlah Saran Number of Suggestion
1.	UBJOM Rembang Rembang OMSBU	1. *Wall tube boiler* #20 mengalami kebocoran #20 boiler wall tube had a leak	6
		2. *Flash over* pada *stator generator* Flash over on the generator stator	5
		3. Kontaminasi minyak dalam *generator* Oil contamination in generator	9
2.	UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU	1. Gangguan *Pulverizer* 1C PLTU Indramayu Unit 1 Pulverizer Interference 1C in Indramayu CFPP Unit 1	14
		2. Gangguan *Belt Conveyor* PLTU Indramayu Conveyor Belt Interference in Indramayu CFPP	7
		3. Gangguan AVR Unit 1 PLTU Indramayu AVR Interference Unit 1 in Indramayu CFPP	11

4. *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Audit

Seluruh hasil audit ditindaklanjuti dan dimonitoring progres penyelesaiannya serta dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Komite Audit. Rekapitulasi atas pemantauan tindak lanjut hasil audit tahun 2021 adalah sebagai berikut:

4. Monitoring the Follow-Up on Audit Results

All audit results are followed up and the progress of their completion is monitored and reported regularly to the Board of Directors and Audit Committee. Recapitulation offollow-up monitoring of 2020 audit results is as follows:

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Signifikan
Recapitulation of the Follow-up on Significant Audit Results

Tahun Year	Status Awal Initial Status		Status Akhir Final Status		Prosentase Penyelesaian Percentage of Completion	
	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations
2017	98	271	0	0	100%	100%
2018	86	259	0	0	100%	100%
2019	85	283	0	0	100%	100%
2020	71	228	0	0	100%	100%
2021	73	229	13	33	82%	85%

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu
Recapitulation of the Follow-up on Significant Audit Result

Tahun Year	Status Awal Initial Status		Status Akhir Final Status		Prosentase Penyelesaian Percentage of Completion	
	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations
2021	4	4	4	4	0	0

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal Tahun 2021
Recapitulation of the Follow-up on External Audit Results in 2021

No.	Auditor Eksternal External Auditor	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendations	Selesai Settled	Monitor
1	BPK-RI	0	0	0	0
2	KAP	3	4	4	0
3	SPI PLN	9	15	15	0

5. Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal

Upaya memperluas wawasan personil SPI juga dilakukan melalui keikutsertaan dalam seminar, *workshop*, lokakarya maupun diskusi berkaitan dengan audit internal. Sepanjang tahun 2021 terdapat 43 program pendidikan, pelatihan dan kegiatan pembinaan lainnya yang diikuti oleh personil SPI sebagai berikut:

5. Auditor Development Program of Internal Audit Unit

Efforts to improve knowledge of IUA personnel are also carried out through participation in seminars, workshops, workshops and discussions related to internal audits. Throughout 2021 there were 43 educational programs, training and other coaching activities participated by IUA personnel as follows:

Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal
Auditor Development Program of Internal Audit Unit

No.	Pelatihan Training	Jumlah Auditor Number of Auditors	Tanggal Date
Triwulan I Quarter I			
1	Auditor Internal ISO 10667	7	8 Januari 2021 January 8, 2021
2	PJB IMS 2.0	1	14 Januari 2021 January 14, 2021
3	*Lead Auditor* ISO 14001	4	1 Maret 2021 March 1, 2021
4	Operasi Pembangkit Plant Operations	5	8 Maret 2021 March 8, 2021
5	*Lead Auditor* ISO 9001:2015	3	15 Maret 2021 March 15, 2021
6	*Three Lines Of Defense*	3	15 Maret 2021 March 15, 2021
7	*Startegic* SP EDU I (SSE I)	1	22 Maret 2021 March 22, 2021
8	*Lead Auditor* ISO 45001	2	22 Maret 2021 March 22, 2021
Triwulan II Quarter II			
9	Audit Internal ISO 50001 EMS ISO 50001 EMS Internal Audit	2	5 April 2021 April 5, 2021
10	Manajemen Risiko ISO 31000 ISO 31000 Risk Management	3	5 April 2021 April 5, 2021
11	Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Umum Training & Certification of OHS Specialist	2	5 April 2021 April 5, 2021
12	ISO 37001 Manajemen Anti Suap SO 37001 Anti-Bribery Management	3	7 April 2021 April 7, 2021
13	Audit Internal Manajemen Aset ISO 55001 ISO 55001 Asset Management Internal Audit	1	14 April 2021 April 14, 2021
14	*Internal Audit*	3	19 April 2021 April 19, 2021
15	*Effective Communication & Negotiation Skill*	2	20 April 2021 April 20, 2021
16	*Certified Practitioner Internal Auditor* (CPIA)	2	26 April 2021 April 26, 2021
17	Audit Internal & Forensik Internal Audit & Forensics	2	28 April 2021 April 28, 2021
18	*Lead Auditor* ISO 37001	6	3 Mei 2021 May 3, 2021
19	SML ISO 14001	2	6 Mei 2021 May 6, 2021
20	*Internal Control Finance Report*	9	20 Mei 2021 May 20, 2021
21	*Corporate Finance*	3	20 Mei 2021 May 20, 2021
22	CIA *Review Course*	2	7 Juni 2021 June 7, 2021
23	*Program Management Office*	2	7 Juni 2021 June 7, 2021
24	*Workshop* RLA	1	8 Juni 2021 June 8, 2021
25	Internal Auditor ISO 21001 Organisasi Pendidikan Internal Auditor ISO 21001 Organization Education	3	10 Juni 2021 June 10, 2021

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

No.	Pelatihan Training	Jumlah Auditor Number of Auditors	Tanggal Date
26	Auditor Internal ISO 22301 Internal Auditor ISO 22301	3	17 Juni 2021 June 17, 2021
27	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ISO 9001 Quality Management System	1	21 Juni 2021 June 21, 2021
28	*Project Manajement*	1	28 Juni 2021 June 28, 2021
Triwulan III Quarter III			
29	Pelatihan & Sertifikasi AK3 Umum Training & Certification of OHS Specialist	3	1 Juli 2021 July 1, 2021
30	*Workshop* COSO - 2013	10	5 Juli 2021 July 5, 2021
31	*Project Management*	1	26 Juli 2021 July 26, 2021
32	*Stakeholder Management*	1	28 Juli 2021 July 28, 2021
33	*Lead Auditor* ISO 20000-1:2018	2	2 Agustus 2021 August 2, 2021
34	ISO 31010 Teknik *Assessment* Risiko ISO 31010 Risk Assessment Techniques	1	10 Agustus 2021 August 10, 2021
35	*Audit Management System* 2.0	17	13 Agustus 2021 August 13, 2021
36	Audit Internal & Forensik Internal Audit & Forensics	1	26 Agustus 2021 August 26, 2021
37	*Fidic Silver Book*	2	26 Agustus 2021 August 26, 2021
38	*Workshop* Audit Internal & SMT Workshop Internal Audit & SMT	10	9 September 2021 September 9, 2021
39	Pelatihan *Mims Ellipse* Mims Ellipse Training	8	14 September 2021 September 14, 2021
Triwulan IV Quarter IV			
40	EPC *Procurement*	2	11 Oktober 2021 October 11, 2021
41	QRMA	1	25 Oktober 2021 October 25, 2021
42	*Probity* Audit Pengadaan Procurement Audit Probity	4	9 November 2021 November 9, 2021
43	ISO 19011 Audit Sistem Manajemen ISO 19011 Management System Audit	15	15 November 2021 November 15, 2021

Sistem Informasi Audit Internal
Information System of Internal Audit

Satuan Pengawasan Internal mengembangkan sistem informasi audit internal dalam mendukung pelaksanaan fungsi Audit Internal berupa aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) dengan basis aplikasi Teammate+. AMS merupakan aplikasi audit berbasis risiko yang telah sesuai standar yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA).

Internal Audit Unit developed internal audit information system to support the implementation of Internal Audit function in the form of System Management Audit (AMS) application on the basis of the Teammate + application. AMS is a risk-based audit application that has been based on standard issued by Institute of Internal Auditor (IIA). Its implementation is conducted

Penerapannya dilakukan secara menyeluruh mulai tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan monitoring tindak lanjut hasil audit. Aplikasi AMS dapat memantau proses *end to end audit* yang telah dilakukan oleh auditor. Selain untuk mendukung integritas data, aplikasi AMS juga berdampak langsung pada efektivitas pendokumentasian dokumen yang terdapat dalam kegiatan audit dan metodologi audit berbasis risiko.

comprehensively starting from the stages of audit planning, conducting audits, reporting audit results, to monitoring the follow-up of audit results. AMS application can monitor the process of end-to-end audit that has been carried out by auditor. Apart from supporting data integrity, AMS application also have direct impact on the effectiveness of documentation in audit activity and risk-based audit methodology.

Quality Assurance Review Audit Internal

Quality Assurance Review for Internal Audit

Perusahaan memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan internal telah berjalan efektif dan berkualitas. Fungsi audit internal PJB salah satunya berpedoman pada ketentuan International *Professional Practices Framework* (IPPF), dimana berdasarkan IPPF Standar 1300 ditetapkan bahwa pelaksanaan *Quality Assurance Review* internal terhadap program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan harus dilakukan setiap tahun melalui *self assessment*, sedangkan secara eksternal harus dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh asesor yang independen.

Quality Assurance Review oleh asesor independen telah dilaksanakan pada tahun 2018. PT BAI ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan *Quality Assurance Review* berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Kepala Bidang Umum dan Administrasi Nomor: 347.SPK/061/BMUM/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Pelaksanaan *Quality Assurance Review* untuk tahun 2021, dilakukan secara *self assessment* yang disimpulkan dan diselesaikan pada tanggal 17 Desember 2021. Hasil observasi dan evaluasi atas 4 (empat) aspek dari praktik-praktik audit internal, yaitu aspek tata kelola, manajemen audit internal, pengelolaan staf auditor dan pelaksanaan aktivitas audit internal berdasarkan standar IPPF 2017 menunjukan bahwa secara keseluruhan SPI PJB telah memenuhi Standar dan Kode Etik *The Institute of Internal Auditors* (IPPF 2017) dengan beberapa catatan yang memerlukan perbaikan.

The Company ensures the implementation of internal Audit unit has been effective and high quality. Internal audit displacement of PJB, one of which is guided by the provisions of the International Professional Practices Framework (IPPF), which is based on IPPF Standard 1300 stipulates that the implementation of internal Quality Assurance Review quality assurance programs and improvement the overall internal audit function must be carried out annually through self-assessment, while externally it must be carried out every 5 (five) years by independent assessor.

Quality Assurance Review has been carried out by independent assessor in 2018. PT Bina Audita Indonesia (BAI) was appointed and determined to carry out Quality Assurance Review according to the Assignment Letter from the Head of General Affairs and Administration No: 347. SPK/061/BMUM/2018 on October 24, 2018

The implementation of Quality Assurance Review for 2021 Review was carried out by self-assessment, summarized, and completed on December 17, 2021. The results of observation and evaluation of 4 (four) aspects of internal audit practices, namely aspects of governance, internal audit management, staff management auditors, and the implementation of internal audit activities according to the 2017 IPPF standard show that overall the PJB IAU has met Institute of Internal Auditors (IPPF 2017) Standards and Code of Conduct with some notes need to be improved.

AUDITOR EKSTERNAL
EXTERNAL AUDITOR

Perusahaan berupaya mengimplementasikan tata kelola Perusahaan yang baik khususnya terkait prinsip akuntabilitas dengan melakukan audit laporan keuangan tahunan oleh auditor eksternal yang ditunjuk atas persetujuan Pemegang Saham. Audit laporan keuangan Perusahaan merupakan bagian dari sistem pengendalian pada tingkat entitas yang dibantu oleh pihak independen yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan keyakinan yang memadai mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-asasan, dan kesesuaian laporan keuangan PJB dengan standar akuntansi keuangan.

The Company strives to implement good corporate governance, especially related to accountability principle by annual audit of financial statements by the external auditor appointed with the approval by the Shareholders. The Company's financial statements audit is part of control system at the entity level assisted by independent parties who are expected to provide accurate information and adequate confidence regarding the accountability of financial reporting and based on the generally accepted accounting principles and compliance with the laws and regulations. The Company provides all accounting records and supporting data required by external auditors so as to enable external auditors to give their opinions on the fairness, accuracy, and suitability of PJB's financial statements with financial accounting standards.

Penunjukan Auditor Eksternal
Appointment of External Auditor

Auditor eksternal yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan independensi bebas benturan kepentingan untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan. Auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan PJB adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditetapkan oleh pemegang saham melalui RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Penunjukan auditor eksternal memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkan Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Kantor Akuntan Publik ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2020 tanggal 29 Juni 2021, dimana RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PJB, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk tahun buku 2021. Dewan Komisaris menetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai auditor eksternal di PJB tahun buku 2021 sesuai

The appointed external auditor is obliged to fulfill provisions of the statutory regulations and independence statements on free of conflict of interests to guarantee the independence and quality of their audit results. The external auditor appointed to audit PJB financial statements is a Public Accounting Firm (PAF) determined by the shareholders through the Annual GMS considering recommendations by the Board of Commissioners and Audit Committee.

The external auditor appointment considers provisions by the Ministry of Finance Regulation No.17/PMK.01/2008 on February 5, 2008, concerning Public Accounting Services in article 3 paragraph 1, it is mentioned that the audit services in general for the financial statements by the Public Accounting Firm is no more than 6 (six) consecutive fiscal years and by Public Accountant no more than 3 (three) consecutive fiscal years.

Public Accounting Firm is determined based on the General Meeting of Shareholders (GMS) Resolution for the 2020 fiscal year dated June 29, 2021, where the GMS authorized the majority Shareholder to determine the appointment of Public Accounting Firm as auditor to audit PJB Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports for 2021 fiscal year. The Board of Commissioners appointed PAF Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as external auditors in PJB for 2021 fiscal year following the majority Shareholder

dengan keputusan Pemegang Saham mayoritas berdasarkan No.47611/KEU.02.04/C01070400/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan tahun 2021. Tahun buku 2021 merupakan periode tahun audit yang kedua bagi akuntan publik dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dalam lima tahun terakhir.

decision based on No.47611/KEU.02.04/C01070400/2021 dated September 10, 2021 concerning the financial statements Audit in 2021. 2021 fiscal year is the second audit year period for public accountants and PAF Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners in the last five years.

Biaya, Jasa dan Opini Audit
Audit Fees, Services, and Opinions

Akuntan publik dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan melaksanakan audit sesuai dengan keputusan Pemegang Saham mayoritas No.47611/KEU.02.04/C01070400/2021 tanggal 10 September 2021 dengan biaya audit sebesar Rp4.071.254.000 dan lingkup jasa yang diberikan dalam pelaksanaan audit eksternal meliputi audit Laporan Keuangan, Evaluasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. PJB selama 5 (lima) tahun terakhir secara konsisten mampu mempertahankan predikat opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara "Wajar Tanpa Pengecualian" dalam semua hal yang material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2017 sampai dengan 2021 dilakukan oleh Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

Public accountants and public accountants Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners audited according to the majority Shareholders decision No.47611/KEU.02.04/C01070400/2021 dated September 10, 2021 with an audit fee of Rp4,071,254,000 and the services scope provided in the external audit including audit of Financial Statements, Performance Evaluation and Compliance with Laws and Regulations and Internal Control. For the last 5 (five) years, PJB has been consistently able to maintain audit opinion predicate stating that financial statements of the Company have been presented as "Unqualified" in all material respects based on generally accepted accounting principles in Indonesia. The Company's Financial Statements Audits for 2016 fiscal year to 2020 fiscal year are carried out by Accountant and Public Accounting Firm (PAF) are as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountants	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firms	Biaya Audit Audit Fee	Jasa yang Diberikan Services	Jasa Lain Other Services	Opini Audit Audit Opinion
2021	Yanto Kamarudin	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Rp 4.071.254.000	Laporan Keuangan Konsolidasi	• Laporan Evaluasi Kinerja • Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal.	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2020		Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner	Rp 4.832.250.000			Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2019	Dedy Sukrisnadi	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner	Rp 1.507.900.000			Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified

AUDITOR EKSTERNAL
EXTERNAL AUDITOR

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Accountants	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firms	Biaya Audit Audit Fee	Jasa yang Diberikan Services	Jasa Lain Other Services	Opini Audit Audit Opinion
2018	Saptoto Agustomo	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Amir Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner	Rp 1.200.500.000	Consolidated Financial Statements	• Performance Assessment Report. • Compliance Report on Statutory Regulations and Internal Control.	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2017			Rp675.400.000			Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified
2016			Rp675.400.000			Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified

Audit Eksternal Lainnya
Other External Audits

Pelaksanaan audit eksternal juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan PJB dan permintaan dari Pemegang Saham terhadap aspek lainnya selain general audit yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Audit eksternal lainnya yang dilakukan sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Internal PT PLN Persero (SPI PLN) melakukan audit berdasarkan Surat Tugas No.142/PO AUDIT TI/SPI.01.02/ C01000205/2021 tanggal 7 April 2021 perihal audit operasional berbasis risiko pada PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) dengan ruang lingkup *acquire and maintenance application sofware* dan *acquire and maintenance technology infrastructure.*
2. Satuan Pengawasan Internal PT PLN Persero (SPI PLN) melakukan audit berdasarkan Surat Tugas No.017/PO AUDIT SK 2B/SPI.01.02/ C01000206/2021 tanggal 8 April 2021 perihal audit operasional berbasis risiko pada PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) dengan ruang lingkup pemenuhan kepatuhan dan organisasi & SDM.
3. Satuan Pengawasan Internal PT PLN Persero (SPI PLN) melakukan audit berdasarkan Surat Tugas No.026/PO AUDIT SK 2B/SPI.01.04/ C01000206/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal audit tematik *non allowable cost* (NAC) pada PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) dengan ruang lingkup biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP)/ *allowable cost* (AC) dan biaya yang tidak termasuk komponen biaya penyediaan tenaga listrik / *non allowable cost* (NAC).

Audit external is also carried out following PJB needs and requests from the shareholders on other aspects apart from general audits which are carried out regularly every year. Other external audits conducted throughout 2021 are as follows:

1. Internal Audit Unit of PT PLN Persero (SPI PLN) conducted an audit based on Task Letter No.142/PO AUDIT TI/ SPI.01.02/C01000205/2021 dated April 7, 2021 regarding risk-based operational audit at PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) with the scope of acquire and maintenance application software as well as acquire and maintenance Infrastructure technology.
2. Internal Audit Unit of PT PLN Persero (SPI PLN) conducted an audit based on Task Letter No.017/PO AUDIT SK 2B/ SPI.01.02/C01000206/2021 dated April 8, 2021 regarding a risk-based operational audit at PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) with the scope of compliance and organizational & HR fulfillment.
3. Internal Audit Unit of PT PLN Persero (SPI PLN) conducted an audit based on Task Letter No.026/PO AUDIT SK 2B/SPI.01.04/C01000206/2021 dated June 10, 2021 regarding a non-allowable cost (NAC) thematic audit at PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) with the scope of basic cost of providing electricity (BPP)/allowable cost (AC) and costs that do not include components of electricity supply/non allowable cost (NAC).

4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Perhitungan Subsidi Listrik dan Pengelolaan Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 pada PT PLN (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta melalui Surat Tugas No.26/ST/IX-XX.1/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
5. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (KAP PwC Indonesia) ditunjuk oleh PT PLN (Persero) untuk melakukan *review* laporan keuangan konsolidasian PT PLN (Persero) dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 30 September 2021 dan 30 September 2020 serta melaksanakan jasa professional lain dalam rangka penerbitan *Global Medium Term Note* (GMTN) melalui surat No.33368/KEU.02.02/C01070400/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan Review Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 dan Jasa Pendukung Program GMTN.
6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melakukan audit berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-768/WBC.11/WBC.11/2021 tanggal 8 September 2021 perihal melakukan audit kepabeanan dan/atau audit cukai serta melakukan penindakan seperlunya.
7. Surat Tugas Nomor ST-928/WBC.11/WBC.11/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal melakukan pekerjaan lapangan tahap kedua dalam rangka audit kepabeanan dan/atau audit cukai serta melakukan penindakan seperlunya.

4. Financial Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) who conducted a Preliminary Audit of the Compliance of Electricity Supply Business Activities, Calculation of Electricity Subsidies and Financial Management in Handling the Covid-19 Pandemic in 2021 at PT PLN (Persero) and Related Agencies in Jakarta through Task Letter No.26/ST/IX-XX.1/08/2021 dated August 30, 2021.
5. Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia PAF) was appointed by PT PLN (Persero) to review the consolidated financial statements of PT PLN (Persero) and Subsidiaries for the fiscal year ended on September 30, 2021 and September 30, 2020 and carry out other professional services in the context of issuing Global Medium Term Note (GMTN) through letter No.33368/KEU.02.02/C01070400/2021 dated July 19, 2021 concerning Warrant to Carry out Review Work on Quarter III/2021 Financial Statement and GMTN Program Support Services.
6. The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Directorate General of Customs and Excise also conducted an audit based on Task Letter No. ST-768/WBC.11/WBC.11/2021 dated September 8, 2021 regarding customs audits and/or excise audits as well as prosecution as necessary.
7. Letter of Assignment No. ST-928/WBC.11/WBC.11/2021 dated October 7, 2021 regarding carrying out the second phase of field work in the context of customs audits and/or excise audits as well as prosecution as necessary.

Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal
Evaluation of the Effectiveness of External Audit Implementation

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan audit eksternal yang pelaksanaannya secara khusus dijalankan melalui Komite Audit. Perusahaan melalui Satuan Pengawasan Internal dan unit terkait lainnya melakukan fungsi *counterparting* atas pelaksanaan audit eksternal dan memastikan pemenuhan dokumen dan data yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan audit eksternal. Komite Audit melakukan pengawasan dan koordinasi selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik dan Auditor lainnya untuk membahas progress pelaksanaan dan temuan atas pemeriksaan yang dilakukan serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit. Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal untuk melakukan telaah atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal serta memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti dan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

The Board of Commissioners supervises the implementation of external audits which the implementation is specifically carried out through Audit Committee. The Company through Internal Audit Unit and other related units performs counterparting functions for the external audits and ensures the fulfillment of documents and data needed to support the implementation of external audits. Audit Committee supervised and coordinated during the implementation of external audit process through regular meetings with Public Accounting Firm and other Auditors to discuss the progress of audit implementation and findings carried out and evaluate the quality of the audit process. Audit Committee coordinates with Internal Audit Unit to review the effectiveness of the external audits and ensures that all findings can be followed up and provides added values to the Company.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Penerapan manajemen risiko PJB mengacu pada ISO 31000:2018 (*Risk management – Guidelines*) yang diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan, memperbaiki identifikasi peluang dan ancaman secara efektif serta mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk mengelola risiko yang terjadi. Perusahaan telah menetapkan Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai unit yang bertugas mengkoordinasikan pengelolaan risiko PJB. Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan membawahi Bidang Manajemen Risiko dan Asuransi serta Bidang Kepatuhan. Melalui Bidang Manajemen Risiko dan Asuransi, PJB secara berkala me*review* seluruh risiko utama yang tergambar dalam profil risiko korporat sesuai dengan *risk appetite* dan melakukan analisis mendalam untuk menyusun profil risiko berdasarkan sasaran tahunan dan *strategic objective* jangka panjang Perusahaan. Profil risiko dikaji secara komprehensif oleh Direksi sebagai *risk owner* utama dan dikomunikasikan Kepada Dewan Komisaris.

The implementation of PJB risk management refers to ISO 31000:2018 (Risk management – Guidelines) which is expected to support the achievement of objectives, improve the identification of opportunities and threats effectively and allocate and use resources to manage risks that occur. The Company has established a Risk Management and Compliance Unit as the unit tasked with coordinating PJB risk management. The Risk Management and Compliance Unit oversee the Risk Management and Insurance Division as well as the Compliance Division. Through the Risk Management and Insurance Sector, PJB periodically reviews all major risks that are reflected in the corporate risk profile following risk appetite and conduct in-depth analysis to develop a risk profile based on the Company's annual goals and long-term strategic objectives. The risk profile is reviewed comprehensively by the Board of Directors as the main risk owner and communicated to the Board of Commissioners.

Profil Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Profile of Head of Risk Management and Compliance Unit

Gunawan Yudi Hariyanto

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Menjabat sebagai Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sejak tahun 2021 sesuai Keputusan Direksi PT PJB No. P.325/440/PJB/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Gajah Mada tahun 1999.

Pelatihan dan sertifikasi yang telah diikuti diantaranya *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP), *Governance, Risk Management and Compliance Professional* (GRCP) dan *Certified Risk Governance Professional* (CRGP).

Riwayat Pekerjaan
Pernah menjabat sebagai Komisaris PT S2P (2021-sekarang), Senior Specialist I Niaga pada DITAGA (2017-2021), Direktur Utama PT PJB Investasi (2017-2021), Kepala Divisi Akuntansi (2016-2017), Senior Manajer Akuntansi (2015-2016), Senior Manajer Anggaran & Pendanaan (2014-2015), Senior Manajer Perbendaharaan & Pajak (2014), Senior Manajer Keuangan (2012-2014) dan Manajer Keuangan (2010-2012).

Indonesian, 47 years old.

Served as Head of the Risk Management and Compliance Unit since 2021 according to the Decree of the Board of Directors of PT PJB No. P.325/440/PJB/2020 on December 4, 2020.

Education
Completed Bachelor of Accounting from Gajah Mada University in 1999.

The training and certifications that have been attended include Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP), Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP), and Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Employment History
Previously served as Commissioner of PT S2P (2021-present), Senior Specialist I Commerce at DITAGA (2017-2021), President Director of PT PJB Investasi (2017-2021), Head of Accounting Division (2016-2017), and Senior Accounting Manager (2015-2015). 2016), Senior Manager of Budget & Funding (2014-2015), Senior Manager of Treasury & Taxes (2014), Senior Manager of Finance (2012-2014), and Finance Manager (2010-2012).

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Appointment and Dismissal of the Head of the Risk Management and Compliance Unit

Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melalui surat keputusan Direksi sesuai dengan kebijakan sumber daya manusia terkait dengan promosi dan mutasi yang berlaku di lingkungan PJB.

The President Director appoints and dismisses the Head of the Risk Management and Compliance Unit through a decision letter from the Board of Directors following HC policies related to promotions and transfers applied in PJB.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Kedudukan dan Struktur Organ Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Position and Structure of the Risk Management and Compliance Unit

Organ Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara struktural berada di bawah Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 022.P/019/DIR/2020 Perubahan Peraturan Direksi PT PJB Nomor 010.P/019/DIR/2019 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali.

The Risk Management and Compliance Unit organs are structurally under the President Director based on the Board of Directors Decree Number 022.P/019/DIR/2020 Amendment to PT PJB Directors Regulation Number 010.P/019/DIR/2019 concerning Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa -Bali.

Struktur Organ Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Risk Management and Compliance Unit Organ Structure

Komposisi Karyawan Unit Kerja Manajemen Risiko

Composition of Risk Management Unit

Bidang Manajemen Risiko merupakan unit kerja dibawah Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang menjalankan fungsi pengelolaan risiko. Sampai dengan Desember 2021, formasi pada Bidang Manajemen Risiko dan Asuransi adalah 8 (delapan) pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

The Risk Management Division is a work unit under the Risk Management and Compliance Unit that carries out the risk management function. As of December 2021, the formation in the Risk Management and Insurance Sector is 8 (eight) employees with the following composition:

Profil SDM Bidang Manajemen Risiko
HR Profile in Risk Management

No.	Nama Name	Jabatan Position	Riwayat Pendidikan Educational Background
1	Hendrie Bastian	Kepala Bidang Manajemen Risiko & Asuransi Head of Risk Management & Insurance	• S1 Teknik Elektro ITS (1996 - 2001) • S2 Magister Manajemen Teknik ITS (2021 – saat ini) • S1 Electrical Engineering ITS (1996 - 2001) • Masters Degree in ITS Engineering Management (2021 – present)
2	Rina Sri Novrianti	Manajer Manajemen Risiko Risk Management Manager	• S1 Teknik Industri UGM (2002-2006) • S2 Magister Management Executive Kekhususan Pengembangan Bisnis Ketenagalistrikan PPM Manajemen (2018-2019) • S1 Industrial Engineering UGM (2002-2006) • Masters Degree in Management Executive, Specializing in Electricity Business Development, PPM Management (2018-2019)
3	Bimo Hani Basuki	Officer Klaim & Asuransi Claims & Insurance Officer	• S1 Elektro dari ITS Surabaya (1999 – 2004) • S2 Magister Management Executive Kekhususan Pengembangan Bisnis Ketenagalistrikan PPM Manajemen (2018-2019) • S1 Electrical from ITS Surabaya (1999 – 2004) • Masters Degree in Management Executive, Specializing in Electricity Business Development, PPM Management (2018-2019)
4	Dwi Handoko	Analyst Manajemen Risiko Risk Management Analyst	• S1 Ekonomi Perusahaan / Manajemen dari Universitas Panca Marga (2010-2014) • S1 Corporate Economics / Management from Panca Marga University (2010-2014)
5	Riana Pratiwiningrum	Assistant Analyst Manajemen Risiko Risk Management Assistant Analyst	• S1 Teknik Industri dari Universitas Diponegoro (2008-2012) • S1 Industrial Engineering from Diponegoro University (2008-2012)
6	Leni Khairani	Assistant Analyst Manajemen Risiko Risk Management Assistant Analyst	• S1 Teknik Industri dari Universitas Sumatera Utara (2013-2017) • S1 Industrial Engineering from the University of North Sumatra (2013-2017)
7	Abie Rezanto	Assistant Officer Klaim & Asuransi Assistant Officer Claims & Insurance	• S1 Non Teknik Perpajakan dari Universitas Indonesia (2008-2012) • S2 Magister Manajemen dari Universitas Airlangga (2015 – 2020) • S1 Non-Tax Engineering from the University of Indonesia (2008-2012) • Masters in Management from Universitas Airlangga (2015 – 2020)
8	Richarmond Aydol Fetra	Assistant Officer Klaim & Asuransi Assistant Officer Claims & Insurance	• S1 Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya (2010 – 2015) • S1 Mechanical Engineering from Brawijaya University (2010 – 2015)

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Bidang Manajemen Risiko dan Asuransi PJB telah didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dan kompetensi terkait manajemen risiko dengan sertifikasi profesi sebagai berikut:

PJB's Risk Management and Insurance fields have been supported by professionals who have expertise and competence related to risk management with professional certifications as follows:

Jenis Sertifikasi Profesi Types of Professional Certification	Jumlah Total
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	5
Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	1
Certified Risk Governance Professional (CRGP)	1
Certified Risk Management Professional (CRMP)	1
Governance Risk and Compliance Professional (GRCP)	3
Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP)	4

Kebijakan Manajemen Risiko
Risk Management Policy

Kebijakan Manajemen Risiko PJB memuat ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam pengelolaan risiko dan menjadi pedoman umum manajemen risiko sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan risiko PJB sesuai dengan standar ISO 31000:2018 (*Risk management - Guidelines*). Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PJB Nomor : 005.K/021/DIR/2020 dan Nomor : 008.K/DK-PJB/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali tanggal 27 Juli 2020 sebagai pemutakhiran atas Keputusan Direksi No. 128.K/010/DIR/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali. Untuk mendukung implementasi manajemen risiko maka PT PJB menetapkan Peraturan Direksi Nomor : 0030.P/019/DIR/2021 tentang Penerapan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PJB dan Keputusan Direksi Nomor: 0035.K/020/DIR/2021 tentang penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS). Kebijakan Manajemen Risiko ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebijakan, *best practices* serta skala organisasi dan bisnis yang dijalankan PJB.

PJB's Risk Management Policy contains the required provisions in risk management and becomes a general risk management guideline as a reference in implementing PJB's risk management following ISO 31000:2018 (Risk management - Guidelines) standards. The policy was determined through a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PJB Number: 005.K/021/DIR/2020 and Number: 008.K/DK-PJB/2020 concerning the Implementation of Risk Management in PT Pembangkitan Jawa Bali on July 27, 2020, as updating the Decree of the Board of Directors No. 128.K/010/DIR/2014 concerning the Implementation of Risk Management in PT Pembangkitan Jawa Bali. To support the implementation of risk management, PT PJB stipulates a Board of Directors Regulation Number: 0030.P/019/DIR/2021 concerning the Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) within PT PJB and a Board of Directors Decree Number: 0035.K/020/DIR/ 2021 regarding the determination of the Risk Appetite Statement (RAS). The Risk Management Policy is reviewed periodically following the policies, best practices, and the scale of the organization and business run by PJB.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

Sistem Manajemen Risiko PJB bersifat dinamis, terstruktur, terintegrasi dan perbaikan berkesinambungan yang mencerminkan siklus *Plan, Do, Check, Act* (PDCA) sebagai kerangka kerja dalam pengelolaan risiko Perusahaan. Kerangka kerja tersebut menjadi acuan dalam mengintegrasikan pengelolaan risiko kepada keseluruhan manajemen sehingga PJB mampu menerapkan manajemen risiko secara efektif.

PJB's Risk Management System is dynamic, structured, integrated, and continuous improvement that reflects the Plan, Do, Check, Act (PDCA) cycle as a framework for managing the Company's risk. The framework becomes a reference for integrating risk management into the overall management so that PJB can implement risk management effectively.

Kerangka Merja Manajemen Risiko
Risk Management Framework

Proses manajemen risiko dilakukan oleh *Risk Owner* yang dibantu oleh *Risk Officer* masing-masing Unit Kerja yang difasilitasi oleh Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Identifikasi dan penilaian risiko di lingkungan PJB menggunakan pendekatan *Enterprise Risk Management* berbasis ISO 31000 : 2018. Pengelolaan risiko aset pembangkit

The risk management process is carried out by the Risk Owner who is assisted by the Risk Officer of each Work Unit who is facilitated by the Risk Management and Compliance Unit. Identification and assessment of risk in PJB's environment use an Enterprise Risk Management approach based on ISO 31000: 2018. Risk management of generator assets is carried

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

dilakukan selaras dengan sistem manajemen aset PASS 55 – ISO 55000. Beberapa teknik *assessment* risiko untuk aset pembangkit seperti *Risk Evaluation and Prioritization* (REAP), *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA), *Root Cause Failure Analysis* (RCFA), dan *Life Cycle Cost* (LCC) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan investasi.

out following the PASS 55 – ISO 55000 asset management system. Several risk assessment techniques for generating assets such as Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Root Cause Failure Analysis (RCFA), and Life Cycle Cost (LCC) are used as investment considerations.

Struktur dan Tanggung Jawab dalam Manajemen Risiko
Structure and Responsibilities in Risk Management

Setiap *level* organisasi dalam Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan risiko PJB sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Fungsi utama pengelolaan risiko yang secara khusus dijalankan oleh Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melalui Bidang Manajemen Risiko dan Asuransi, terintegrasi dengan setiap jenjang jabatan mulai dari unit kerja sebagai pemilik risiko sampai dengan Dewan Komisaris beserta Komite sebagai pelaksanaan fungsi Pengawasan. Adapun pembagian tugas pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko di PJB dilakukan sebagai berikut:

Every organizational level within the Company has responsibility for managing PJB risk as part of the internal control system. The main function of risk management which is specifically carried out by the Risk Management and Compliance Unit through the Risk Management and Insurance Sector is integrated with every level of position starting from the work unit as the risk owner to the Board of Commissioners and Committees as the implementation of the Supervisory function. The division of tasks for monitoring and managing risk management at PJB is carried out as follows:

Struktur dan Tanggung Jawab dalam Manajemen Risiko
Structure and Responsibilities in Risk Management

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab	Responsibilities
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Melakukan pengawasan dan tuntunan (saran dan nasihat) terhadap Direksi dan Manajemen. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa RJPP dan RKAP telah mengandung pendekatan manajemen risiko terhadap berbagai risiko Perseroan.	Supervising and providing guidance (advice and input) to the Board of Directors and Management. The Board of Commissioners is responsible for ensuring that the CLP and ABOP contain a risk management approach to the Company's various risks.
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan kebijakan manajemen risiko, evaluasi manajemen risiko, pemantauan kesesuaian potensi risiko di Perseroan dan pengawasan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi.	Assisting the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners in supervising the implementation of risk management systems and policies, evaluating risk management, monitoring the suitability of potential risks in the Company, and supervising the Company's compliance with regulations.
Komite Audit Audit Committee	Pengawasan terhadap pelaksanaan audit internal secara efektif, proaktif dan berkesinambungan, termasuk pengawasan keberlangsungan pengelolaan risiko.	Supervising the implementation of internal audits in an effective, proactive, and continuous manner, including monitoring the sustainability of risk management.

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab	Responsibilities
Direksi Board of Directors	• Membentuk satuan kerja Manajemen Risiko Kantor Pusat dibawah Direksi yang bertugas sebagai *framework owner* dalam implementasi manajemen risiko di lingkungan perusahaan. • Menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan, termasuk didalamnya adalah penetapan matriks risiko yang digunakan di Perusahaan beserta *risk appetite*. • Menetapkan, mengelola dan memantau risiko-risiko utama (*key risks*) yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis perusahaan. • Menciptakan lingkungan internal Perusahaan yang kondusif untuk penerapan dan peningkatan *risk maturity* secara berkelanjutan, dan untuk menanamkan budaya manajemen risiko perusahaan. • Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko.	• Establishing a Head Office Risk Management work unit under the Board of Directors which serves as the framework owner in implementing risk management within the company. • Establishing policies for implementing risk management within the Company, including the determination of the risk matrix used in the Company and its risk appetite. • Defining, managing, and monitoring the key risks faced by the company in achieving the company's strategic goals. • Creating a conducive internal environment for the implementation and improvement of risk maturity sustainably, and instilling a corporate risk management culture. • Providing the necessary resources in the implementation of risk management.
Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Unit	• Menyusun dan meninjau kebijakan dan pedoman manajemen risiko (termasuk di dalamnya *maturity framework*) serta memastikan penerapannya di perusahaan. • Memastikan tersedianya infrastruktur risiko korporat dan data manajemen risiko pada setiap aktivitas strategis perusahaan. • Menyusun profil risiko korporat termasuk di dalamnya memberikan peringatan dini (*early warning*) kepada Direksi. • Memastikan keselarasan penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dengan kebijakan, strategi perusahaan maupun peraturan yang berlaku. • Memantau risiko-risiko utama (*key risks*) perusahaan dan efektifitas pengelolaannya oleh pemilik risiko. • Menyusun *road map* manajemen risiko perusahaan berdasarkan *strategic objective* perusahaan. • Memantau *risk maturity* perusahaan dan memfasilitasi perbaikan-perbaikannya menuju tujuan sesuai *road map* Manajemen Risiko Perusahaan. • Memfasilitasi pemilik risiko dalam implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. • Memfasilitasi pembangunan kompetensi (*capacity building*) Manajemen Risiko di Perusahaan. • Melakukan asesmen *risk maturity* unit kerja/ anak perusahaan/perusahaan afiliasi.	• Developing and reviewing risk management policies and guidelines (including the maturity framework) and ensure their implementation in the company. • Ensuring the availability of corporate risk infrastructure and risk management data in every strategic activity of the company. • Developing a corporate risk profile including providing an early warning to the Board of Directors. • Ensuring the overall alignment of risk management implementation with the company's policies, strategies, and applicable regulations. • Monitoring the company's key risks and the effectiveness of their management by risk owners. • Developing a corporate risk management road map based on the company's strategic objectives. • Monitoring the company's risk maturity and facilitate its improvements towards the objectives according to the Company's Risk Management road map. • Facilitating risk owners in the implementation of the Company's Risk Management. • Facilitating the development of Risk Management competency in the Company. • Conducting a risk maturity assessment of work units/subsidiaries/affiliates.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab	Responsibilities
Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit	• Berperan sebagai fungsi *independent assurance provider* yang bertugas sebagai filter akhir atas seluruh pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh *risk owner* sesuai mekanisme *three lines of defense.* • Merencanakan dan melaksanakan Audit Berbasis Risiko untuk memastikan fokus pada risiko utama Perusahaan. • Memberikan penilaian terhadap efektifitas penanganan risiko utama perusahaan oleh pemilik risiko dan memberikan rekomendasi perbaikannya sesuai mekanisme *three lines of defense.* • Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko di lingkungan perusahaan secara berkala.	• Acting as an independent assurance provider function that serves as the final filter on all risk management implementations carried out by the risk owner according to the three lines of defense mechanism. • Planning and carrying out Risk-Based Audits to ensure focus on the Company's main risks. • Providing an assessment of the effectiveness of the company's main risk management by the risk owner and provide recommendations for improvement following the three lines of defense mechanism. • Evaluating the implementation of risk management within the company regularly.
Kepala Satuan/ Kepala Divisi atau Bidang Head of Unit/Head of Division	• Bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko di satuan/ divisi/ bidang dengan cara menunjukkan komitmen penerapan manajemen risiko, mengidentifikasi risiko utama dan mengelola proses mitigasi sesuai divisi atau bidangnya. • Membangun *risk awareness* di lingkungan kerjanya. • Melakukan pembinaan dan pengendalian risiko pada divisi atau bidangnya.	• Responsible for the implementation of risk management in the unit/division/field by demonstrating a commitment to implementing risk management, identifying the main risks, and managing the mitigation process according to the division or field. • Building risk awareness in the work environment. • Conducting development and risk control in the division or its field.
General Manajer/ Kepala Unit General Manager/ Head of Unit	• Bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko di unit dengan cara menunjukkan komitmen, memberikan arahan, serta memastikan terlaksananya proses pengelolaan risiko di unitnya. • Membangun *risk awareness* dan memastikan pemenuhan kompetensi *risk owner* di lingkungan kerjanya. • Menyusun dan meninjau aturan pelaksanaan manajemen risiko di unit kerjanya serta memastikan penerapannya. • Menyusun profil risiko unit kerja termasuk di dalamnya memberikan *early warning* kepada Direksi. • Memastikan keselarasan penerapan manajemen risiko di unit kerjanya secara keseluruhan dengan kebijakan, strategi perusahaan maupun peraturan yang berlaku. • Memantau risiko unit kerja dan efektifitas pengelolaannya. • Menyusun laporan manajemen risiko secara berkala dan disampaikan kepada Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan Satuan Pengawasan Internal.	• Responsible for the implementation of risk management in the unit by showing commitment, providing direction, and ensuring the implementation of the risk management process in the unit. • Building risk awareness and ensuring the fulfillment of risk owner competencies in the work environment. • Developing and reviewing the rules for implementing risk management in their work units and ensure their implementation. • Preparing the risk profile of the work unit, including providing an early warning to the Board of Directors. • Ensuring the alignment of risk management implementation in the work unit as a whole with policies, company strategies, and applicable regulations. • Monitoring work unit risks and the effectiveness of their management. • Preparing periodic risk management reports and submitting them to the Risk Management and Compliance Unit and the Internal Control Unit.

Pengelola Management	Tugas & Tanggung Jawab	Responsibilities
Pemilik Risiko Risk Owner	• Menyusun dan menetapkan kajian risiko dalam posisinya sebagai inisiator atau penanggungjawab atas suatu inisiatif kegiatan. • Melakukan pengelolaan risiko pada bidang atau lingkup kerjanya secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya merencanakan (*assessment risk*) dan menindaklanjuti mitigasi risiko. • Mendokumentasikan proses bisnis yang ada di bidang atau lingkup kewenangannya, permasalahan yang telah terjadi dan risiko yang berpotensi terjadi beserta pengendaliannya. • Mempersiapkan sumberdaya yang diperlukan dalam pengelolaan risiko di bidang kerjanya. • Memastikan manajemen risiko dipahami dan diimplementasikan oleh bidang kerjanya.	• Preparing and establishing a risk assessment in his position as the initiator or person in charge of an activity initiative. • Carrying out risk management in the field or scope of work continuously, including planning (risk assessment) and following up on risk mitigation. • Documenting existing business processes in the field or scope of their authority, problems that have occurred and risks that have the potential to occur, and their controls. • Preparing the necessary resources in risk management in the field of work. • Ensuring that risk management is understood and implemented by the field of work.

Laporan Program Kerja Penerapan Manajemen Risiko
Risk Management Program Report

Perusahaan melaksanakan program kerja manajemen risiko yang dijalankan Bidang Manajemen Risiko dan Asuransi. Realisasi kegiatan program kerja terkait penerapan manajemen risiko sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Company carries out a risk management work program carried out by the Risk Management and Insurance Sector. The realization of work program activities related to the implementation of risk management until the end of 2021 is as follows:

Realisasi Program Kerja Manajemen Risiko
Realization of Risk Management Work Program

No.	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi pelaksanaan Program Realization
Aspek Strategic, Infrastruktur Strategic Aspect, Infrastructure		
1	Melakukan Validasi dan Persetujuan Dokumen Manajemen Risiko. Performing Validation and Approval of Risk Management Documents.	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
2	Melakukan penetapan profil Risiko 2021. Determine the 2021 Risk profile.	Telah ditetapkan di tanggal 29 Desember 2021 Set on December 29, 2021
3	Melakukan penyusunan profil risiko 2022. Conducting the preparation of the 2022 risk profile.	Telah ditetapkan di tanggal 16 Desember 2021 Set on December 16, 2021
4	Melakukan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko Korporat dan Regional PLN. Compile the Corporate and Regional Risk Management Report for PLN.	Selesai berkelanjutan Sustainably settled

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi pelaksanaan Program Realization
5	Melakukan Penyusunan Laporan Manajemen Risiko dan Evaluasi Kepatuhan Korporat. Prepare Risk Management Report and Corporate Compliance Evaluation.	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
6	Penyiapan *Maturity Level* ERM kriteria PLN. Preparation of PLN Maturity Level ERM criteria.	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
7	Melakukan *awareness*, pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko. Conduct risk management awareness, training, and certification.	Telah dilakukan *awareness* manajemen risiko dengan *risk officer* kantor pusat dan unit serta seluruh karyawan PJB melalui acara *Clear Talk* yang dilakukan setiap sebulan sekali Risk management awareness has been carried out with the head office and unit risk officers as well as all PJB employees through the Clear Talk event which is held once a month
8	Melakukan pendampingan penyusunan kajian kelayakan program kerja korporat yang dilakukan oleh *risk owner* masing-masing program yang memerlukan keputusan direksi. Assisting in the preparation of a feasibility study of corporate work programs carried out by the risk owner of each program that requires a decision from the board of directors.	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
9	Melakukan *endorsement progress* dan efektifitas mitigasi profil risiko korporat 2021. Perform endorsement of progress and effectiveness of 2021 corporate risk profile mitigation.	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
10	Melakukan *assessment* kontrak kinerja Unit *Stream* ERM. Conducting performance contract assessment of ERM Stream Unit.	Telah dilakukan di Triwulan III untuk semester I 2021. Untuk semester II 2021, dilakukan di Minggu ke-3 Januari 2022 It has been carried out in the third quarter for the first semester of 2021. For the second semester of 2021, it will be carried out on the 3rd week of January 2022
11	Melakukan CMC ke Unit Terkait ERM Maturitas, Implementasi Manajemen Risiko dan Program Bidang Manajemen Risiko. Conducting CMC to Units Related to ERM Maturity, Risk Management Implementation, and the Risk Management Department Program.	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
12	Melakukan Pendampingan Pelaksanaan *Assessment* ERM *Maturity Level* Korporat. Assisting in the implementation of the Corporate Level ERM Maturity Assessment.	Pelaksanaan *Assessment Maturity Level* ERM tahun 2021 oleh PT PLN (Persero) sudah selesai dilaksanakan. Hasil *Assessment* ERM *Maturity Level* Korporat pada Semester 1 Tahun 2021 sebesar 2,18 dan pada Semester 1 Tahun 2021 sebesar 3,52 The implementation of the 2021 ERM Maturity Level Assessment by PT PLN (Persero) has been completed. The results of the Corporate Level ERM Maturity Assessment in Semester 1 of 2021 are 2.18 and in Semester 1 of 2021 it is 3.52
13	Manajemen Eksekusi berbasis Risiko. Risk-based Execution Management.	Telah dilakukan *monitoring* risiko proyek dalam rapat rutin *Project Management Office* (PMO) setiap bulan. Project risk monitoring has been carried out in routine Project Management Office (PMO) meetings every month.

No.	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi pelaksanaan Program Realization
14	Penyusunan *risk appetite, risk capacity* dan *risk tolerance.* Preparation of risk appetite, risk capacity, and risk tolerance.	Telah ditetapkan Keputusan Direksi di tanggal 23 November 2021 Decision of the Board of Directors has been stipulated on November 23, 2021
15	Melakukan inisiasi dan implementasi proses bisnis berbasis risiko (pengambilan keputusan berbasis risiko, SOP berbasis risiko dll). Initiating and implementing risk-based business processes (risk-based decision making, risk-based SOPs, etc.).	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
16	Melakukan utilisasi pendokumentasian dan monitoring implementasi manajemen risiko melalui sistem informasi. Utilize documentation and monitoring of risk management implementation through the information system.	Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko telah selesai dan telah *Go Live* pada bulan Maret 2021. The development of the Risk Management Application has been completed and has gone live in March 2021.
17	Melakukan Pengembangan *Tool Monitoring* Manajemen Risiko. Performing Risk Management Monitoring Tool Development.	Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko telah selesai dan telah *Go Live* pada bulan Maret 2021. The development of the Risk Management Application has been completed and has gone live in March 2021.
18	Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen rutin dan melakukan *update progress m-action* minimal setiap bulan. Perform routine Management Review Meeting and update the progress of m-action at least every month.	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
19	Melakukan *review* dan *update* proses bisnis pada *Enterprise Architecture* sesuai kebutuhan. Review and update business processes on the Enterprise Architecture as needed.	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
20	*Update* dan sosialisasi Formulir Dokumen Manajemen Risiko (DMR). Update and socialize the Risk Management Document Form (DMR).	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
21	Pembuatan Pedoman Pelaksanaan GRC Making GRC Implementation Guidelines	Peraturan Direksi tentang GRC telah ditandatangani dan telah dilakukan sosialisasi pada acara *Clear Talk* periode 10 di pada tgl 29 desember 2021. The Board of Directors' regulations regarding the GRC has been signed and socialization has been carried out at the Clear Talk event period 10 on December 29, 2021.
Aspek Operasional & Asuransi Operational & Insurance Aspect		
22	Melakukan *Workshop* Tindaklanjut Penyelesaian Rekomendasi *Risk* dan *Underwriting Survey* Conducting a Follow-up Workshop on the Completion of Risk Recommendations and Underwriting Surveys	Selesai berkelanjutan Sustainably settled
23	Membantu mengumpulkan dokumen dan melakukan Proses Klaim Kerusakan Aset Operasional Milik PT PJB (jika terjadi *event*) Help collect documents and carry out the Claim Process for Damage to PT PJB's Operational Assets (if an event occurs)	Terjadi *loss event* dengan *claim* yaitu di UP Cirata (*Date of Loss* 03 Agustus 2021) A loss event occurred with a claim, namely at Cirata GU (Date of Loss 03 August 2021)

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Program Kegiatan Program Activity	Realisasi pelaksanaan Program Realization
24	Membantu mengumpulkan dokumen dan melakukan Proses Klaim Kerusakan Aset Operasional Milik PT PLN di JOM (jika terjadi *event*) Help collect documents and carry out the Claim Process for Damage to PT PLN's Operational Assets at JOM (if an event occurs)	Terjadi loss event dengan claim untuk 2 unit yaitu di UBJOM Pacitan (*Date of Loss* 23 September 2021) dan di UBJOM Rembang (*Date of Loss* 14 Mei 2021). There was a loss event with a claim for 2 units, namely at Pacitan OMSBU (Date of Loss 23 September 2021) and at Rembang OMSBU (Date of Loss 14 May 2021).
25	Penguatan *targeted* BCP BCP targeted strengthening	Pembuatan *basic communication*, dan *Guidline* implementasi. Making basic communication, and implementation guideline.
26	Pembuatan Surat Keputusan Direksi Asuransi PT PJB Making a Decree of the Insurance Directors of PT PJB	*Progress* berlanjut ke tahun 2022 Progress continues into 2022
27	*Review/ Update*/Pembuatan BIA, BCP Korporat, PJB Kantor Pusat dan Unit Review/Update/Make BIA, Corporate BCP, PJB Head Office and Units	*On progress* On progress
28	Mendampingi pelaksanaan Simulasi dari Skenario BCP PJB Kantor Pusat / Unit Assisting the implementation of the Simulation of the PJB BCP Scenario Head Office / Unit	Selesai berkelanjutan Sustainably settled

Aplikasi Manajemen Risiko Terintegrasi
Integrated Risk Management Application

Perusahaan telah mengembangkan teknologi informasi dalam pengelolaan risiko PJB berupa aplikasi manajemen risiko yang diberi nama I-CARE (*Integrated - Compliance, Risk Management, Effective and Efficient Operation*). Penggunaan I-CARE diharapkan dapat membantu mempermudah dalam pengoperasian, pengambilan dan pengolahan data sehingga proses pengambilan keputusan didukung dengan data-data yang akurat. Bidang Manajemen Risiko telah membuat tools untuk pengukuran efektivitas program mitigasi risiko dan sudah diimplementasikan pada I-CARE, dengan *tools* tersebut diharapkan akan bisa mengukur efektivitas suatu program mitigasi risiko, sehingga apabila diperlukan, bidang atau divisi sebagai *risk owner* bisa melakukan penyesuaian program mitigasi apabila dinilai program tersebut kurang efektif, untuk menjamin tercapainya sasaran Perusahaan.

The company has developed information technology for managing PJB risk in the form of a risk management application called I-CARE (Integrated - Compliance, Risk Management, Effective and Efficient Operation). The use of I-CARE is expected to help facilitate the operation, retrieval, and processing of data so that the decision-making process is supported by accurate data. The Risk Management Sector has created tools for measuring the effectiveness of risk mitigation programs and has been implemented in I-CARE, with these tools it is expected that they will be able to measure the effectiveness of a risk mitigation program so that if necessary, the field or division as the risk owner can make adjustments to the mitigation program if it is assessed. the program is less effective, to ensure the achievement of the Company's targets.

I-CARE sebagai *tools* pengelolaan manajemen risiko telah digunakan secara konsisten dalam melakukan identifikasi, analisa dan evaluasi risiko di lingkungan PJB. I-CARE dapat diakses oleh seluruh unit dan bidang di kantor pusat. Adapun konten pada I-CARE yaitu risiko-risiko yang ada di PJB baik

I-CARE as a risk management tool has been used consistently in identifying, analyzing, and evaluating risks within PJB. I-CARE can be accessed by all units and departments at the head office. The content in I-CARE is the risks that exist in PJB both the Head Office and Work Units which consist of Scope

Kantor Pusat maupun Unit Kerja yang terdiri dari Penetapan Scope, Identifikasi Risiko sampai dengan penentuan Program Mitigasi Risiko (*Action Plan*), *Loss Event, Risk and Underwritter Survey, Risk Evaluation and Prioritization* (REAP), *Business Continuity Management System* (BCMS).

Determination, Risk Identification to the determination of the Risk Mitigation Program (Action Plan), Loss Event, Risk and Underwriter Survey, Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Business Continuity Management System (BCMS).

Profil dan Mitigasi Risiko
Risk Profile and Mitigation

Perusahaan secara rutin melakukan *review* atas seluruh risiko utama yang tergambar dalam profil risiko tahun 2021. Terdapat beberapa risiko yang belum sesuai dengan *risk appetite* sehingga muncul kembali dalam profil risiko tahun 2021.

Pada tahun 2021, PJB mengidentifikasi 18 risiko utama yang dapat menghambat pencapaian sasaran di tahun 2021. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan Profil Risiko tahun 2020 yang berjumlah 12, hal ini dikarenakan ada pemecahan dan pendetailan risiko dari risiko tahun 2020 serta adanya risiko baru yang teridentifikasi di tahun 2021. Profil risiko tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Profil dan mitigasi risiko korporat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

The company routinely reviews all of the main risks that are reflected in the risk profile in 2021. Several risks are not following risk appetite so they will reappear in the risk profile in 2021.

In 2021, PJB identified 18 main risks that could hinder the achievement of targets 2021. This number is more than the Risk Profile in 2020 which amounted to 12, this is because there is a breakdown and detailed risk of 2020 risks as well as new risks identified in 2021. The risk profile is an integral part of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP). Corporate risk profile and mitigation in 2021 are as follows:

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Profil dan Mitigasi Risiko Tahun 2021
2021 Risk Profile and Mitigation

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
1	**Risiko :** Terjadinya kecelakaan kerja dan darurat kesehatan.	**Risk:** Occurrence of occupational accidents and health emergencies.
	Mitigasi : 1) Implementasi *reward* dan *punishment* terkait kedisiplinan K3. 2) Program-program pendisiplinan dalam bentuk pelatihan. 3) Melakukan vaksinasi atas Covid 19. 4) Pengembangan *i-diagnostic*. 5) Modifikasi ventilasi dan pendingin ruangan Lingkungan PJB. 6) Modifikasi tombol *lift* menjadi *touch less*. 7) Modifikasi meja kerja dengan penambahan akrilik. 8) Implementasi Budaya K3 termasuk pelatihan terkait penguatan *safety leadership*. 9) Inisiasi *Crisis Management* Korporat. 10) Implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) secara *full cycle*. 11) Implementasi IZAT 2.0. 12) Pemenuhan regulasi K3. 13) Penguatan Kompetensi SDM terkait Pengelolaan K3. 14) *Deliverable Output* berdasarkan hasil *assessment* dari *Fire Engineer*. 15) Optimalisasi program *dust control, wet cleaning* (*wash down system*), pembinaan pencapaian *cleaning index*, optimasi *system interlock* (*safety*) peralatan. 16) Inisiasi Program *Stop Work Authority* (SWA). 17) Inisiasi Kebijakan Implementasi *Fire Impairment* Program. 18) Implementasi *Process Safety Management*.	**Mitigation:** 1) Implementation of rewards and punishments related to HSE discipline. 2) Disciplinary programs in the form of training. 3) Vaccinate against Covid-19. 4) Development of i-diagnostic. 5) Modification of PJB environmental ventilation and air conditioning. 6) Modify the lift button to touch less. 7) Modification of the workbench with the addition of acrylic. 8) Implementation of OHS Culture including training related to strengthening safety leadership. 9) Initiation of Corporate Crisis Management. 10) Implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS) in full cycle. 11) IZAT 2.0 implementation. 12) Compliance with OHS regulations. 13) Strengthening HR Competencies related to OHS Management. 14) Deliverable Output based on the assessment results from the Fire Engineer. 15) Optimization of a dust control program, wet cleaning (wash down the system), fostering the achievement of cleaning index, optimization of equipment interlock (safety) system. 16) Initiation of the Stop Work Authority (SWA) Program. 17) Initiation of Fire Impairment Program Implementation Policy. 18) Implementation of Process Safety Management.
2	**Risiko :** Ketidaksiapan pembangkit jasa O&M Luar Jawa.	**Risk:** Unpreparedness of O&M Service Power Plant outside Java.
	Mitigasi : 1) Penguatan fungsi *Engineering Services* khususnya pengelolaan waktu pemeliharaan dan *repair*. 2) Optimalisasi fungsi O&M *digitalization*. 3) Optimalisasi *Outage Management*. 4) Kaderisasi dan Penyiapan *expert* bidang O&M. 5) Penyehatan unit berbasis PKU, *Assessment* dan *joint planning session*. 6) Melakukan analisa hasil pemetaan *Cronic Problem*, Pareto *Loss Output* (PLO) & Gap Efisiensi. 7) *Improvement* prosedur O&M. 8) Melaksanakan *joint planning session* untuk *review* rencana & realisasi Anggaran Operasi & Anggaran Investasi antara Unit, Kantor Pusat PJB Services, Unit Bisnis Luar Jawa (UJLJ) & PLN secara berkala. 9) Sertifikasi peralatan *fire protection*. 10) *Upgrade design* agar memenuhi *standard* (NFPA, ASME, dll), *repair*, *replace* sesuai hasil *assessment*. 11) Meningkatkan efisiensi pembangkit melalui *combustion tuning & monitoring* I-CORE.	**Mitigasi :** 1) Strengthening the function of Engineering Services, especially the management of maintenance and repair time. 2) Optimization of digitalization O&M function. 3) Optimization of Outage Management. 4) Cadreization and preparation of O&M experts. 5) PKU-based unit restructuring, assessment, and joint planning session. 6) Analyze the results of mapping the Cronic Problem, Pareto Loss Output (PLO) & Efficiency Gap. 7) Improvement of O&M procedure. 8) Conduct joint planning sessions to review plans & realization of Operational Budget & Investment Budget between Units, PJB Services Head Office, Business Unit Outside Java (UJLJ) & PLN regularly. 9) Fire protection equipment certification. 10) Upgrade the design to meet the standards (NFPA, ASME, etc.), repair, and replace according to the results of the assessment. 11) Improving generator efficiency through combustion tuning & I-CORE monitoring.

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
	12) Perluasan *scope* RLA *boiler*, turbin, *coal handling facility*. 13) Mendorong kontrak *supporting* menjadi AMC. 14) Melengkapi cakupan *advance analytics.* 15) Melakukan *training* SDM peningkatan kompetensi *digital power plant.* 16) Melakukan *join planning session* (JPS) dan rekonsiliasi rutin bersama dengan PLN Wilayah dan regional terkait, membuat *communication plan* atas pengelolaan jasa O&M, melakukan *plant walk down* secara berkala. 17) Pembinaan pelaksanaan BMS untuk menunjang kesiapan peralatan dengan pelaksanaan *assessment* secara berkala. 18) Memastikan ketersediaan anggaran dari PLN untuk pelaksanaan pemeliharaan pembangkit yang jatuh tempo waktu *overhaul*. 19) Penyusunan standarisasi produk 2.0 model 2 sebagai upaya mencari alternatif solusi efisiensi biaya melalui perencanaan yang terpusat.	12) Expansion of the scope of RLA boilers, turbines, and coal handling facilities. 13) Encouraging supporting contracts to become AMC. 14) Completes advanced analytics coverage. 15) Conduct HR training to increase competence in digital power plants. 16) Conduct joint planning sessions (JPS) and routine reconciliation with relevant regional and regional PLN, make communication plans for the management of O&M services, and conduct plant walk-downs regularly. 17) Fostering the implementation of BMS to support equipment readiness by conducting periodic assessments. 18) Ensuring the availability of a budget from PLN for the implementation of plant maintenance due to overhaul. 19) Preparation of product standardization 2.0 model 2 as an effort to find alternative cost-efficiency solutions through centralized planning.
3	**Risiko :** Penurunan *Market Share* PJB dari Penjualan Tenaga Listrik.	**Risk:** Decrease in PJB's Market Share from Electricity Sales.
	Mitigasi : 1) *Cofiring* untuk UP Paiton. 2) *Coal Switching* untuk UP Paiton. 3) Optimasi Pola Operasi Pembangkitan: - TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) untuk UP Cirata dan UP Brantas; - Optimalisasi penggunaan gas yang lebih efisien untuk unit thermal; - Digitalisasi Optimasi Operasi PLTA Brantas. 4) Prioritisasi Biaya Pemeliharaan dan Investasi sesuai dengan alokasi CF atau pasokan gas. 5) Kajian Relokasi Pembangkit ke lokasi dengan market yang lebih membutuhkan. Pengembangan bisnis baru dengan menggunakan piutang komponen A. 6) Pengembangan Bisnis PLTS *Rooftop* khususnya Jasa O&Mnya. 7) Pengembangan *Captive Power Unit.* Peningkatan *Integrated Marketing* produk PJB Group yang lebih *agresive*. 8) Pengembangan PJB *Digital Marketing System.* 9) Menjaga keandalan pembangkit : - Penguatan plant *assessment/ life assessment* secara *online* maupun *offline*; - Penguatan *Fail Safe;* - Optimasi *planned maintenance*, prediktif dan *preventif maintenance.* 10) Optimasi *Inventory Level* dan *Strategic Spare* melalui: - Pemanfaatan *sparepart*, baik yang ada di gudang maupun terpasang, untuk unit lain. 11) Progam Optimalisasi SDM di PJB Group untuk mendukung sasaran *Go To Market* : - Peningkatan *Resources* SDM bidang MRO; - Program *Mapping* Keunggulan Kompetensi Unit; - Pemanfaatan unit sebagai peningkatan kompetensi SDM melalui *learning & training;* - Pengembangan *workshop* dan Kompetensi SDM untuk *Repair* Pembangkit di PJB UP Gresik yang fokus pada pekerjaan repair peralatan pembangkit secara swakelola; - Penyusunan kebijakan penggunaan *resources* bersama dalam PJB Group.	**Mitigation :** 1) Co-firing for Paiton GU. 2) Coal Switching for Paiton GU. 3) Optimization of Generation Operation Patterns: - TMC (Weather Modification Technology) for Cirata GU and Brantas GU; - Optimizing more efficient use of gas for thermal units; - Digitalization of Brantas Hydropower Operation Optimization. 4) Prioritization of Maintenance and Investment Costs according to the allocation of CF or gas supply. 5) Study of Relocation of Power Plants to locations with more needy markets. New business development using component A receivables. 6) SPP Rooftop Business Development, especially O&M Services. 7) Captive Power Unit Development. Increased Integrated Marketing of PJB Group products that are more aggressive. 8) Development of PJB Digital Marketing System. 9) Generator reliability maintenance: - Strengthening of online and offline plant assessments/life assessments; - Fail-Safe Strengthening; - Optimization of planned maintenance, predictive and preventive maintenance. 10) Optimization of Inventory Level and Strategic Spare through: - Utilization of spare parts, both in a warehouse and installed, for other units. 11) HR Optimization Program at PJB Group to support the Go To Market target: - Increasing HR Resources in the MRO field; - Unit Competency Excellence Mapping Program; - Unit utilization as HR competency improvement through learning & training; - Development of workshops and HR Competencies for Power Plant Repair at PJB Gresik GU which focuses on the project of self-managed power plant equipment-repair; - Formulation of policies on the use of shared resources within PJB Group.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
4	**Risiko :** Strategi penetrasi pasar bisnis baru dan EBT tidak efektif	**Risk:** New business and NRE market penetration strategy is not effective
	Mitigasi : 1) Menyusun/mengupdate *Roadmap* Pengembangan Pembangkit EBT sesuai dengan RJPP PJB. 2) Melakukan *Market due dilligence* (kompetitor, *partner*, pasar) & penguatan value proposition bisnis. 3) Melakukan Program konversi PLTD ke PLTS (Dedieselisasi/ PLTS Bawean/ PLTS simeleu). 4) Peningkatan *integrated* dan digitalisasi *marketing* PJB Group dengan mendorong kinerja pemasaran Anak Perusahaan. 5) Melakukan survei harga pasar komponen pembangkit EBT dalam upaya mendapatkan biaya *Project Cost* yang ekonomis dengan kualitas yang baik. 6) Pengembangan bisnis *rooftop* solar PV khususnya pengembangan skema bisnis sesuai ekspektasi pelanggan. 7) Melakukan inisiasi pengembangan pembangkit di pasar luar negeri dengan ber*partner* dengan perusahaan global. 8) Melakukan inisiasi kerjasama dengan partner yang kredibel di bidang EBT (integrasi dengan berbagai pihak) dan pengembangan model bisnis yang kompetitif. 9) Melakukan kajian tingkat *maturity* jenis pembangkit sesuai dengan Keputusan Direksi No.061.K/010/DIR/2017 tentang Pedoman Pengembangan Bisnis. 10) Bidang EBT serta Bisnis Lain Yang Terkait untuk mengetahui jenis pembangkit mana yang dapat dikembangkan oleh PJB. 11) Optimasi *idle asset.* 12) Pengembangan bisnis *asset management* dan MRO. 13) Pengembangan bisnis sewa pembangkit. Melakukan pendekatan terhadap regulator dan Lembaga pemerintahan (Kementrian, Badan) untuk memperkuat dan mengembangkan pasar bisnis baru & EBT. 14) Pengembangan strategi standar layanan dalam memberikan *convenience customer experience* yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 15) Pemanfaatan potensi EBT di lokasi disekitar pembangkit eksisting. 16) Implementasi *digital light house* untuk pembangkit milik PJB dan IPP. 17) Pengurusan perijinan untuk pengembangan bisnis baru dan EBT. 18) Memastikan terpenuhinya aspek legal dalam penyesuaian peraturan/kebijakan PJB dengan peraturan/kebijakan PLN atau Pemerintah terkait pengembangan proyek EBT Ketenagalistrikan. 19) Melakukan supervisi & pendampingan pengurusan perijinan dan aspek legal lainnya yang diperlukan untuk pengembangan bisnis EBT non IPP pembangkit listrik sesuai dengan regulasi terkait yang Berlaku.	**Mitigation :** 1) Compile/update the Roadmap for the Development of NRE Power Plants following PJB's RJPP. 2) Market due diligence (competitors, partners, markets) & strengthening business value proposition. 3) Conversion program from DEPP to SPP (Dedieselization/ Bawean SPP/ Simeleu SPP). 4) Integrated marketing and digitalization improvement of PJB Group by encouraging the marketing performance of Subsidiaries. 5) Market price survey of NRE power plant's components to obtain economical Project Cost costs with good quality. 6) Development of rooftop solar PV business, especially the development of business schemes according to customer expectations. 7) Initiate the development of power plants in foreign markets by partnering with global companies. 8) Initiating collaboration with credible partners in the NRE sector (integration with various parties) and developing competitive business models. 9) Conduct a study on the maturity level of the type of generator following the Decree of the Board of Directors No.061.K/010/DIR/2017 concerning Guidelines for Business Development. 10) NRE and other related businesses to find out which types of power plants can be developed by PJB. 11) Optimization of idle assets. 12) Asset management and MRO business development. 13) Development of power plant rental business. Approaching regulators and government institutions (Ministries, Agencies) to strengthen and develop new business & NRE markets. 14) Development of a service standard strategy in providing a convenient customer experience following customer expectations. 15) Utilization of NRE potential in locations around existing power plants. 16) Implementation of the digital light house for PJB and IPP power plants. 17) Management of permits for new business development and NRE. 18) Ensuring the fulfillment of legal aspects in adjusting PJB regulations/policies with PLN or Government regulations/ policies related to the development of NRE Electricity projects. 19) Supervise & assist in licensing and other legal aspects required for the development of the Non-IPP NRE power plant business following applicable relevant regulations.

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
	20) Melakukan pelatihan teknis dan sertifikasi terkait pembangkit EBT. 21) Melakukan pelatihan dan sertifikasi terkait finansial dalam pengembangan pembangkit EBT. 22) Melakukan benchmark ke pembangkit EBT. 23) Penyusunan Tata Kelola Bisnis *Solution*	20) Conduct technical training and certification related to NRE power plants. 21) Conduct training and certification related to finance in the development of NRE power plants. 22) NRE generators benchmarks. 23) Preparation of Business Governance Solution.
5	**Risiko :** Ketidaksiapan Tata Kelola Perusahaan dalam mendukung *Digital Tranformation.*	**Risk:** Unpreparedness of Corporate Governance in supporting Digital Transformation.
	Mitigasi : 1) Penyusunan proses bisnis berbasis *digital.* 2) Me*review*/verifikasi proses bisnis berbasis *digital.* 3) Penyusunan tupoksi organisasi yang mendukung impelementasi transformasi *digital.* 4) Penyusunan target kinerja berbasis *digital.* 5) Penyusunan *roadmap digital transformation.* 6) Pengembangan aplikasi PJB *access.* 7) Menindaklanjuti hasil *survey digital mindset.* 8) Optimasi penggunaan modul *Failure Mode Failure Code* (FMFC) dan modul aset dalam *Computerized Maintenance Management System* (CMMS). 9) Penyusunan proses bisnis terkait penjualan dan pemasaran terkait digitalisasi. 10) Mempersiapkan SDM yang kompeten untuk menghadapi *digital transformation.*	**Mitigation :** 1) Preparation of digital-based business processes. 2 Reviewing/verifying digital-based business processes. 3) Preparation of organizational main functions that support the implementation of digital transformation. 4) Preparation of digital-based performance targets. 5) Preparation of digital transformation roadmap. 6) PJB access application development. 7) Result follow-up on the digital mindset survey. 8) Optimization of the use of the Failure Mode Failure Code (FMFC) module and asset module in the Computerized Maintenance Management System (CMMS). 9) Preparation of business processes related to sales and marketing related to digitization. 10) Preparation of competent human resources to face digital transformation.
6	**Risiko :** Ketidaksiapan pembangkit dalam menghadapi kondisi gangguan sistem kelistrikan yang meluas.	**Risk:** Unpreparedness of the generator in the face of widespread electrical system disturbance conditions.
	Mitigasi : 1) Membuat SOP *Blackout* Bersama PLN UIP2B. 2) Melakukan uji yang terintegrasi antara Unit Pembangkit dengan PLN UIP2B & GITET. 3) Penormalan *free governor* dan menyesuaikan *setting* P2B. 4) Pengujian bersama P2B pasca penyesuaian *logic* dan penormalan *line* komunikasi antara unit dengan P2B oleh Tim Icon+. 5) *Resetting deadband.* 6) Dukungan 6 *line of defense system* Jawa Bali dengan cara penguatan sistem proteksi dan fasilitas *blackstart* (Pengadaan Fasilitas *Blackstart* (EDG/*Emergency Diesel Generator*) di MTW & CRT). 7) Penguatan & Pengetasan *Fail Safe* secara rutin. 8) Melakukan pengujian rutin fasilitas bahan bakar untuk mendukung kehandalan. 9) Pelaksanaan *resetting* UFR-OFR sesuai *standard grid code* menyesuaikan jadwal OH pembangkit. 10) Penggantian *valve turbine* HP *by pass* di PLTU Paiton 9, dilanjutkan pengetesan *house load.*	**Mitigation :** 1) Making a Blackout SOP with PLN UIP2B. 2) Perform an integrated test between the Generating Unit and PLN UIP2B & GITET. 3) Normalizing free governor and adjusting P2B settings. 4) Joint testing of P2B after logic adjustment and normalization of communication lines between units and P2B by the Icon+ Team. 5) Reset the deadband. 6) Support for 6 lines of defense systems in Java and Bali by strengthening the protection system and black-start facilities (Procurement of Blackstart Facilities (EDG/ Emergency Diesel Generator) at MTW & CRT). 7) Fail-Safe Strengthening & Hacking regularly. 8) Perform routine testing of fuel facilities to support reliability. 9) Implementation of UFR-OFR resetting according to the standard grid code according to the generator OH schedule. 10) Replacement of HP by pass turbine valve at Paiton 9 CFPP, followed by house load testing.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
	11) Penguatan Keandalan *Coal Handling Facility.* 12) Penguatan *plant assessment* dan RLA. 13) Implementasi Digitalisasi Pembangkit. 14) Memastikan kesiapan peralatan dan teknologi pembangkit dalam mendukung program kerja anti *blackout* PLN. 15) Implementasi *Process Safety Management.*	11) Strengthening of Coal Handling Facility Reliability. 12) Strengthening of plant assessment and RLA. 13) Implementation of Power Digitization. 14) Ensure the readiness of generator equipment and technology to support PLN's anti-blackout work program. 15) Implementation of Process Safety Management.
7	**Risiko :** Ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan.	**Risk:** Non-compliance with environmental regulations.
	Mitigasi : 1) Pemenuhan regulasi lingkungan. 2) *Monitoring* pemenuhan izin lingkungan dan izin PPLH. 3) Pemasangan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) sesuai TOR Pemenuhan Regulasi CEMS. 4) Perencanaan pembangunan landfill dan pengurusan izin penimbunan untuk UBJOM Luar Jawa. 5) *Mapping* kondisi *Wastewater Treatment Plant (*WWTP). 6) Revitalisasi WWTP. 7) Mendukung peningkatan bauran EBT dengan implementasi *co-firing* di Unit-unit PJB. 8) Perencanaan alternatif pemanfaatan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) untuk UBJOM Luar Jawa. 9) Penguatan kompetensi SDM berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan. 10) Pengadaan batubara *low sulphur* untuk PLTU Batubara.	**Mitigation :** 1) Compliance with environmental regulations. 2) Monitoring the fulfillment of environmental permits and PPLH permits. 3) Installation of Continuous Emission Monitoring System (CEMS) following TOR for Compliance with CEMS Regulations. 4) Planning for landfill development and processing of stockpiling permits for UBJOM Outside Java. 5) Mapping of Wastewater Treatment Plant (WWTP) conditions. 6) Revitalization of WWTP. 7) Support increasing the NRE mix by implementing co-firing in PJB units. 8) Alternative planning for the use of Fly Ash Bottom Ash (FABA) for Outside Java OMSBU. 9) Strengthening HR competencies related to environmental management. 10) Procurement of low-sulfur coal for Coal CFPP.
8	**Risiko :** Tidak bisa mempertahankan stabilitas kinerja pembangkit jasa O&M Jawa.	**Risk:** Unable to maintain the stability of Java O&M service generator performance.
	Mitigasi : 1) Implementasi digitalisasi pembangkit. 2) Meningkatkan efisiensi pembangkit melalui *combustion tuning & Boiler Optimization.* 3) *Review* Kajian Modifikasi/ *Upgrade/ Life Extension* pada *Parts/Equipments* untuk memperpanjang interval pemeliharaan dan memenuhi standar layanan. 4) Penyusunan Sistem *Forensic Engineering – Equipment & Machinery Breakdown.* 5) *Review*, Evaluasi dan Rekomendasi Standarisasi PM & PdM. 6) Identifikasi peralatan HILP (*high impact low probability*). 7) Pelaksanaan dan implementasi *fire risk assessment* (FRA). 8) Integrasi EAM *Fire Protection System unit* pembangkit dengan CMMS (Maximo dan Ellipse). 9) Memastikan ketersediaan anggaran dari PLN untuk pelaksanaan pemeliharaan mesin yang telah mencapai EOH-nya.	**Mitigation :** 1) Implementation of power plant digitization. 2) Increase generator efficiency through combustion tuning & Boiler Optimization. 3) Review the Study of Modifications/Upgrades/ Life Extensions on Parts/Equipment to extend maintenance intervals and meet service standards. 4) Preparation of Forensic Engineering System – Equipment & Machinery Breakdown. 5) Review, Evaluation, and Recommendation of PM & PdM Standards. 6) Identification of HILP (high impact low probability) equipment. 7) Implementation and implementation of fire risk assessment (FRA). 8) Integration of EAM Fire Protection System generating units with CMMS (Maximo and Ellipse). 9) Ensure the availability of a budget from PLN for the implementation of machine maintenance that has reached its EOH.

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
	10) Pemenuhan material cadang (*Strategic Parts*) dan optimalisasi penggunaan material persediaan. 11) Optimalisasi biaya dengan melakukan *repair* peralatan pembangkit di UBJOM secara swakelola di *Workshop* MRO. 12) Penguatan *plant assessment* (termasuk *review* dan *update* POB *Assessment* Pembangkit), RLA, prediktif dan preventif *maintenance* untuk menghindari MO dan FO. 13) Meningkatkan kualitas *online monitoring* maupun RLA *Level* 1 dan 2. 14) Penguatan kompetensi SDM terkait OME (PGD, Sertifikasi, *Parenting & Sistering*) dan penguatan Bidang *Technical Support* (BTST). 15) Penyesuaian siklus dan *improvement* eksekusi OH. 16) Pemberdayaan *Expertise* untuk operational *Excellence*. 17) Optimalisasi Integrasi *Resources* PJB Group untuk meningkatkan *competitiveness* dan kompetensi SDM PJB Group. 18) Kajian Alih Aset Pembangkit FTP-1 dan PLTGU AMC. 19) Penyusunan tata kelola bisnis jasa O&M. 20) Implementasi *Process Safety Management.*	10) Fulfillment of spare materials (Main Parts) and optimizing the use of inventory materials. 11) Cost optimization by repairing generator equipment in OMSBU by self-managing at the MRO Workshop. 12) Strengthening of plant assessment (including review and update of POB Assessment of Generators), RLA, and predictive and preventive maintenance to avoid MO and FO. 13) Improve the quality of online monitoring and RLA Levels 1 and 2. 14) Strengthening of HR competencies related to OME (PGD, Certification, Parenting & Sistering) and strengthening of Technical Support (BTST). 15) OH cycle adjustments and execution improvement. 16) Empowerment of Expertise for Operational Excellence. 17) Optimization of PJB Group's Resources Integration to increase the competitiveness and competence of PJB Group's HC. 18) Study on Transfer of Assets for FTP-1 Power Plant and AMC CCPP. 19) Preparation of O&M service business governance. 20) Implementation of Process Safety Management.
9	**Risiko :** Kontribusi Anak Perusahaan & Perusahaan Asosisasi belum optimal mendukung bisnis PJB Group.	**Risk:** Subsidiaries & Associates contribution is not optimal in supporting PJB Group's business.
	Mitigasi : 1) Memonitor likuditas Anak Perusahaan (AP) dan memberikan masukan kepada AP untuk melakukan upaya percepatan proses penagihan agar dapat menurunkan piutang. 2) Memperkuat sistem *monitoring* progres proyek melalui PMO PJB. 3) Melakukan evaluasi dan kajian optimalisasi atas investasi PJB di Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi melalui asset *review*. 4) Mengawal proses restrukturisasi kredit Perusahaan Asosiasi agar dapat menurunkan beban keuangan. 5) Memonitor proses pelaksanaan rekomendasi program investasi yang telah disepakati antara BPIPJBS untuk improvement kinerja pembangkit di PLTU Banjarsari. 6) Optimalisasi pemilihan *partner* dengan metode *Due Diligence, Focus Selection* serta *Roadshow* untuk PIK, dan metode lainnya untuk non-PIK. 7) Mengoptimalkan peran Anak Perusahaan dalam penyusunan *business plan*, menyiapkan kompetensi bisnis baru serta standarisasi produk sesuai dengan *corporate charter.* 8) Memberikan masukan kepada PLNSC untuk memperbaiki skema komersial dan kepada RE untuk perbaikan proses bisnis. 9) Penyusunan Pedoman *Capital Recycling.*	**Mitigation :** 1) Monitoring the liquidity of the Subsidiary (AP) and provide input to the AP to make efforts to accelerate the collection process to reduce receivables. 2) Strengthening the project progress monitoring system through PJB PMO. 3) Evaluating and studying the optimization of PJB's investment in Subsidiaries/Associated Companies through asset reviews. 4) Supervising the credit restructuring process of Associated Companies to reduce the financial burden. 5) Monitoring the process of implementing the investment program recommendations that have been agreed between BPIPJBS for the improvement of generator performance at Banjarsari CFPP. 6) Optimizing partner selection using Due Diligence, Focus Selection, and Roadshow methods for PIK, and other methods for non-PIK. 7) Optimizing the role of Subsidiaries in preparing business plans, preparing new business competencies, and standardizing products following corporate charters. 8) Providing input to PLNSC to improve commercial schemes and to RE for business process improvements. 9) Preparing Capital Recycling Guidelines.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
10	**Risiko :** Ketidaksiapan dalam mengantisipasi perubahan jadwal dan program proyek ketenagalistrikan.	**Risk:** Unpreparedness in anticipating changes in electricity project schedules and programs.
	Mitigasi : 1) Penyelesaian COD MTW *Add On* Blok 2,3,4 dan Jawa 7. 2) Melakukan pengembangan usaha pembangkit IPP non EBT dan EBT sesuai RUPTL. 3) Melakukan kajian pengembangan pembangkit baru yang belum tercantum dalam RUPTL (IPP atau *Captive Power*) yang kompetitif. 4) Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan proyek konstruksi. 5) Melakukan *review* produk proses bisnis pengembangan usaha untuk mengantisipasi perubahan jadwal proyek dan peluang bisnis baru yang membutuhkan respon cepat dengan tetap mengacu pada kebijakan yang berlaku. 6) Penyiapan proses bisnis akselerasi proyek untuk mengantisipasi perubahan jadwal proyek dan peluang bisnis baru yang membutuhkan respon cepat dengan tetap mengacu pada kebijakan yang berlaku. 7) Melakukan koordinasi dengan PIC di PLN jika terjadi perubahan jadwal proyek. 8) Penyiapan sumber daya dan koordinasi internal jika terjadi perubahan jadwal proyek. 9) Penyiapan kebijakan terkait *sunk cost* Anggaran Operasi untuk proyek jangka pendek. 10) Penyiapan skema organisasi dan sumberdaya sebagai antisipasi perubahan jadwal eksekusi proyek. 11) Melakukan penyesuaian kebijakan internal dengan perubahan regulasi terkait pengembangan EBT. 12) Melakukan pelatihan penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (*Feasibility Study*) untuk jenis pembangkit EBT. 13) Melakukan *sharing knowledge* terkait aspek teknis dan finansial untuk jenis pembangkit EBT. 14) Penguatan kompetensi SDM berkaitan dengan Pengembangan Bisnis, EPC, dan EBT. 15) Penyiapan kehandalan PLTG PJB untuk menstabilkan sistem di masa yang akan datang khususnya untuk mengantisipasi masuknya PLTS. 16) Penyusunan tata Kelola EPC dan relokasi.	**Mitigation :** 1) Completion of COD MTW Add On Blocks 2,3,4 and Java 7. 2) Development of non-NRE and NRE IPP power plants following Electricity Supply Business Plan. 3) Conduct a study on the development of new power plants that have not been listed in the competitive Electricity Supply Business Plan (IPP or Captive Power). 4) Formulation of policies related to construction project management. 5) Conduct a product review of business development business processes to anticipate changes in project schedules and new business opportunities that require a quick response while still referring to the applicable policies. 6) Preparation of project acceleration business processes to anticipate changes in project schedules and new business opportunities that require quick responses while still referring to the applicable policies. 7) Coordinate with PIC at PLN if there is a change in the project schedule. 8) Preparation of internal resources and coordination in case of changes to the project schedule. 9) Preparation of policies related to operating budget sunk costs for short-term projects. 10) Preparation of organizational and resource schemes in anticipation of changes in the project execution schedule. 11) Adjusting internal policies with regulatory changes related to NRE development. 12) Conducting training on the preparation of a Feasibility Study for the type of NRE power plant. 13) Sharing knowledge related to technical and financial aspects for types of NRE power plants. 14) Strengthening HC competencies related to Business Development, EPC, and NRE. 15) Preparing PJB GTPP reliability to stabilize the system in the future, especially to anticipate the entry of SPP. 16) Preparing EPC Governance and relocation.

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
11	**Risiko :** Ketidakcukupan likuiditas untuk menopang operasional Jasa O&M AMC dan pengembangan bisnis.	**Risk:** Insufficient liquidity to support AMC's O&M Services operations and business development.
	Mitigasi : 1) Membuat proses bisnis terkait *spend control* termasuk melakukan prioritisasi program dan pengendalian belanja. 2) Mempercepat *collection period :* - Komunikasi rutin dengan PIC di PLN yang mempunyai kewenangan terkait pembayaran; - Melakukan akselerasi terhadap administrasi tagihan yang belum dilakukan terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan; - Melakukan digitalisasi pengelolaan pendapatan yang terintegrasi. 3) Terkait keterbatasan anggaran untuk eksekusi *Major Overhaul* (MKR B2 & MTW B5), perlu dilakukan pengaturan (optimasi) pola operasi Pembangkit baik unit eksisting maupun unit jasa O&M. 4) Mengusulkan relokasi dan alih *asset*. 5) Penyusunan tata Kelola EPC dan Relokasi. 6) Penyusunan Pedoman *Capital Recycling.* 7) Penguatan kompetensi SDM berkaitan dengan Pendanaan Proyek, Keuangan dan Akuntansi. 8) Penajaman proyeksi *cashflow* anggaran. 9) *Monitoring* dan inventaris kontrak yang berpotensi terjadinya gagal bayar. 10) Menyampaikan kondisi likuiditas dan meminta pencairan Piutang ke PLN atau permintaan dana talangan ke pemegang saham melalui skema SHL.	**Mitigation :** 1) Creating business processes related to spending control including prioritizing programs and controlling spending. 2) Accelerating collection period: - Routine communication with the PIC at PLN who has the authority regarding payments; - Accelerate the administration of invoices that have not been carried out on work that has been completed; - Digitizing integrated revenue management. 3) Regarding the limited budget for the execution of Major Overhaul (MKR B2 & MTW B5), it is necessary to regulate (optimize) the operating pattern of the Power Plant, both the existing unit and the O&M service unit. 4) Proposing relocation and transfer of assets. 5) Preparing EPC and Relocation Governance. 6) Preparing Capital Recycling Guidelines. 7) Strengthening HC competencies related to Project Funding, Finance, and Accounting. 8) Sharpening budget cashflow projections. 9) Monitoring and inventory of contracts that have the potential for default. 10) Delivering liquidity conditions and requesting disbursement of Receivables to PLN or requests for bailouts to shareholders through the SHL scheme.
12	**Risiko :** Tidak optimalnya pelaksanaan inisiatif strategi transformasi korporat	**Risk:** Unoptimal implementation of corporate transformation strategy initiatives.
	Mitigasi : 1) Penyusunan proses bisnis keselarasan strategi RJPP dengan KPI Korporat. 2) Membangun & *updating* proses *business* secara korporat terkait pelaksanaan inisiatif strategis RJPP. 3) Merespon dengan cepat perubahan dengan melakukan simplifikasi proses bisnis pengembangan usaha dan organisasi. 4) Merespon dengan cepat perubahan dengan melalui *review* produk proses bisnis pengembangan usaha dan organisasi. 5) Penguatan fungsi & kompetensi *office strategic management.* 6) Pengembangan strategi dan penguatan fungsi *marketing* termasuk AP/PA.	**Mitigation :** 1) Preparation of business processes to align the CLP strategy with Corporate KPIs. 2) Build & update business processes in a corporate manner related to the implementation of RJPP strategic initiatives. 3) Respond quickly to changes by simplifying business processes for business and organizational development. 4) Respond quickly to changes through product reviews of business and organizational development processes. 5) Strengthening office strategic management functions & competencies. 6) Strategy development and strengthening of marketing functions including AP/PA.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
13	**Risiko :** Terhambatnya kontinuitas implementasi *co-firing.*	**Risk:** Co-firing continuos implementation is challenging.
	Mitigasi : 1) Penyusunan proses bisnis terkait *co-firing* dan penyesuaian organisasi. 2) Me*review*/verifikasi proses bisnis terkait *co-firing.* 3) Pembuatan biomasa *storage.* 4) Pembatasan spesifikasi biomasa. 5) Melakukan pengujian *co-firing* dengan evaluasi yang akurat sebelum diimplementasikan secara kontinu. 6) Melakukan uji *durability* untuk mengetahui dampak *co-firing* setelah 3000 jam. 7) MOU dengan perhutani. 8) Melakukan kontrak jangka panjang terkait pengadaan biomasa.	**Mitigation :** 1) Preparing business processes related to co-firing and organizational adjustment. 2) Reviewing/verifying business processes related to co-firing. 3) Making storage biomass. 4) Limiting biomass specifications. 5) Conducting co-firing testing with accurate evaluation before continuous implementation. 6) Conducting durability test to determine the impact of co-firing after 3000 hours. 7) Establishing MOU with Perhutani. 8) Conducting long-term contracts related to biomass procurement.
14	**Risiko :** Organisasi tidak fleksibel dalam mendukung eksekusi program strategis korporat.	**Risk:** Inflexible organization in supporting the execution of corporate strategic programs.
	Mitigasi : 1) Penyusunan kajian Organisasi pengelola *integrated marketing* dan sales. 2) Penyusunan kajian Organisasi yang lean agar pengembangan Organisasi yang dilakukan tidak berdampak signifikan pada ketersediaan anggaran. 3) Menerbitkan Perdir Organisasi baru yang fleksibel dalam mengakomodir rekomendasi dari *Holding.* 4) Pembentukan tim untuk menyesuaikan organisasi denganbisnis baru (termasuk *co-firing*). 5) Penyusunan konsep Organisasi *matrix* dalam mendukung eksekusi setiap lini bisnis baru. 6) Dibentuknya suatu fungsi yang bersifat *project base.* 7) Penetapan product *owner* pada setiap lini bisnis baru. 8) Penguatan Organisasi pengelola MRO dalam mendukung tema strategis RJPP, khususnya Layanan Industri Ketenagalistrikan dan *Utility.* 9) Optimasi Organisasi pada Unit yang mengalami penurunan CF. 10) *Mengcascade* program strategis perusahaan ke individu (*to do list*). 11) Menyusun peraturan terkait skema penugasan khusus untuk mendukung berjalannya fungsi Divisi / Bidang dengan metode rangkap tugas. 12) Pembagian pekerjaan dengan menggunakan skema matrik untuk mendukung kebutuhan *load balance* yang bersifat dinamis. 13) Penguatan bidang OSM untuk mengawal eksekusi program strategis.	**Mitigation :** 1) Compilation of organizational studies managing integrated marketing and sales. 2) Preparation of lean Organizational studies so that the Organizational development carried out does not have a significant impact on the availability of the budget. 3) Issuing a new Organizational Regulation that is flexible in accommodating recommendations from Holding. 4) Team formation to adapt the organization to the new business (including co-firing). 5) Formulation of a matrix organization concept to support the execution of each new line of business. 6) Establishment of a function that is a project base. 7) Determination of product owner for each new line of business. 8) Strengthening the MRO management organization in supporting the strategic theme of the CLP, particularly the Electricity and Utility Industry Services. 9) Organizational Optimization in Units experiencing a decrease in CF. 10) Cascade the company's strategic programs to individuals (to-do list). 11) Prepare regulations related to special assignment schemes to support the functioning of the Division/ Field with the dual-task method. 12) Division of work using a matrix scheme to support dynamic load balance requirements. 13) Strengthening the OSM field to oversee the execution of strategic programs.

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
15	**Risiko :** Turunnya kepercayaan pelanggan terhadap pengelolaan Jasa O&M.	**Risk:** Decreased customer trust in the management of O&M Services.
	Mitigasi : 1) Peningkatan sistem *Customer Relationship Management* yang *best practice :* - Pelaksanaan Diskusi Operasi/*Capacity Building* dengan PLN terkait termasuk untuk penyampaian *product knowledge* kepada pelanggan (*competitiveness* harga, skema binis, standar layanan untuk mengurangi persepsi 3M; - Percepatan tindak lanjut keluhan pelanggan; - Meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses dalam memenuhi permintaan pelanggan; - Membangun proses bisnis *marketing* yang terintegrasi di PJB Group; - Memberikan *awareness* kepada PLN terkait tata Kelola pembangkitan; - Peningkatan *Soft competency* untuk personil pada pelayanan pelanggan. 2) *Review* skema bisnis dan kontrak AMC termasuk dibawah 50MW yang mendukung simplifikasi proses dan percepatan *collection period.* 3) Membuat proses bisnis *system monitoring* pekerjaan jasa O&M. 4) Pengembangan skema bisnis Jasa O&M dalam pengelolaan pembangkit FTP-1&2. 5) Penguatan fungsi *Engineering Services.* 6) Optimalisasi fungsi O&M digitalization. 7) Optimalisasi *Outage Management.* 8) Optimalisasi pelaksanaan Model 3. 9) Penyusunan standarisasi produk 2.0 model 2. 10) Melakukan *improvement Business Management System* internal. 11) Kaderisasi dan Penyiapan *expert* bidang O&M. 12) *Partnership & collaboration strategy* baik dengan PT PJB Group maupun eksternal. 13) Pengembangan usaha jasa O&M dan pendukungnya, MRO, Konstruksi dan Spare Part untuk pasar PLN, IPP dan *Captive Power Plant* di Indonesia dan Luar Negeri. 14) Optimalisasi dan Efisiensi Proses Bisnis UBJOM Luar Jawa. 15) Melakukan identifikasi regulasi yang terbaru & berlaku terkait jasa O&M. 16) Penyusunan tata Kelola pengembangan bisnis jasa O&M. 17) Implementasi *Process Safety Management.*	**Mitigation :** 1) Improvement of the best practice Customer Relationship Management system: - Implementation of Operations/Capacity Building Discussions with related PLN including for the delivery of product knowledge to customers (price competitiveness, business schemes, service standards to reduce 3M perceptions; - Acceleration of follow-up on customer complaints; - Increase the speed and accuracy of the process in meeting customer demands; - Building an integrated marketing business process in PJB Group; - Provide awareness to PLN regarding the governance of generation; - Soft competency improvement for personnel in customer service. 2) Review of AMC's business schemes and contracts including under 50MW which supports process simplification and acceleration of collection period. 3) Create a business process monitoring system for O&M service work. 4) Development of O&M Service business scheme in FTP-1&2 generator management. 5) Strengthening the Engineering Services function. 6) Optimization of digitalization O&M function. 7) Optimization of Outage Management. 8) Optimization of Model-3 implementation. 9) Preparation of product standardization 2.0 model-2. 10) Perform internal Business Management System improvements. 11) Cadreization and preparation of O&M experts. 12) Partnership & collaboration strategy both with PT PJB Group and externally. 13) Business development of O&M and supporting services, MRO, Construction, and Spare Parts for the PLN, IPP, and Captive Power Plant markets in Indonesia and Abroad. 14) Optimization and Efficiency of UBJOM Business Processes Outside Java. 15) Identify the latest & applicable regulations related to O&M services. 16) Preparation of O&M services business development governance arrangement. 17) Implementation of Process Safety Management.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
16	**Risiko :** Kesiapan *human capital* kurang cukup dalam meningkatkan *competitiveness* PJB Group.	**Risk:** Human Capital Readiness is not sufficient in increasing the competitiveness of PJB Group.
	Mitigasi : 1) Menyusun konsep sistem SDM dan mengkomunikasikan ke pemegang saham. 2) Penguatan *Values* Perusahaan selaras dengan *Values* PLN. 3) Membuat kebijakan *human resources* PJB Group yang mendukung kebutuhan bisnis perusahaan dengan tetap memperhatikan kebijakan pemegang saham (PT PLN). 4) Optimalisasi Integrasi Resources PJB Group untuk meningkatkan *competitiveness* dan kompetensi SDM PJB Group : - Menyusun dan Implementasi prosedur Integrasi *Resources* PJB Group; - Meningkatkan kompetensi karyawan dengan penugaskaryaan karyawan ke PLN Group dan APPA PJB; - Penguatan personil di UPHT atau UPHB melalui penambahan karyawan dari unit RSH, *fresh graduate* atau karyawan PJB yang memiliki pengalaman di APPA, untuk mendukung pengembangan UPHAR dalam bisnis kedepan sebagai penyedia jasa diluar bisnis pembangkitan. 5) Melakukan penempatan dan pengembangan karyawan berdasarkan *soft competency* yang dimiliki karyawan (*enterpreuner* untuk pengembangan usaha, professional untuk pengelolaan pembangkit). 6) Pemenuhan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam mendukung pengembangan bisnis *beyond* kWh melalui *talent mobility*. 7) Implementasi Standar *Product* 2.0 dan Tata Kelola Pembangkit Model 3. 8) Peningkatan *hard* dan *soft skill* untuk menghadapi revolusi industri 4.0. 9) Program *people development* melalui *parenting* dan *sistering*. 10) Memberikan kesempatan kepada *Expertise* untuk meningkatkan kompetensi melalui Magang, kesempatan mengikuti pendidikan formal atau mengikuti sertifikasi di bidang tertentu. 11) Peningkatan kompetensi karyawan dengan kegiatan magang. 12) Penugasan khusus bagi karyawan di lingkungan PJB Group (PJB ke anak perusahaan atau anak perusahaan ke PJB). 13) Transformasi Budaya Perusahaan melalui Peningkatan *Business Mindset* dan *Digital Mindset*. 14) Program *Directorship* bagi karyawan pada level Manajemen Menengah (MM) ke Atas.	**Mitigation :** 1) Developing the HC system concept and communicate it to shareholders. 2) Strengthening Company Values in line with PLN Values. 3) Making PJB Group's human resources policies that support the company's business needs while still paying attention to shareholder policies (PT PLN). 4) Optimizing PJB Group's Resources Integration to increase the competitiveness and competence of PJB Group's HR: - Develop and Implement PJB Group Resources Integration procedures; - Improving employee competence by assigning employees to the PLN Group and APPA PJB; - Strengthening of personnel in MSUEA or MSUWA through the addition of employees from the RSH unit, fresh graduates, or PJB employees who have experience in APPA, to support the development of UPHAR in the future business as a service provider outside the power generation business. 5) Appointing and developing employees based on soft competencies owned by employees (entrepreneur for business development, professional for plant management). 6) Fulfilling HR capacity and capability in supporting business development beyond kWh through talent mobility. 7) Implementing Product 2.0 Standards and Model-3 Power PLant Governance. 8) Improving hard and soft skills to face the industrial revolution 4.0. 9) Conducting people development program through parenting and sistering. 10) Providing opportunities for Expertise to improve competence through Internships, and opportunities to attend formal education or take certification in certain fields. 11) Increasing the competence of employees with internship activities. 12) Special assignments for employees within the PJB Group (PJB to subsidiaries or vice versa). 13) Transforming Corporate Culture through Increasing Business Mindset and Digital Mindset. 14) Directorship program for employees at Middle Management (MM) level and above.

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
	15) Peningkatan kompetensi melalui Model Pembelajaran *Pervasive Learning*, dengan focus pada kompetensi OME, Aset Management & Bisnis dan mendukung swakelola pengelolaan pembangkit. 16) Program pelatihan PJB Academy dalam mendukung : - pemanfaatkan air sebagai energi primer PLTA dan pengelolaan bendungan serta infrastruktur pendukung lainnya- PIC : PJB Academy; - program *Co Firing* – PIC : PJB Academy; - program *Coal Switching* Pembangkit - PIC : PJB Academy; - Implementasi dan kinerja pembangkit *green energy* menjadi lebih baik - PIC : PJB Academy; - memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti Program Pendidikan Formal terutama di bidang Manajemen Bisnis sesuai dengan RJPP PJB – PIC : DIVTLN dan PJB Academy. 17) Integrasi HRIS PJB group termasuk *update* data kompetensi PJB ke dalam SIT PJB. 18) Pengembangan IKLIMS sebagai LMS terintegrasi agar pengelolaan pelatihan dan pengembangan karyawan lebih mudah. 19) Meng*cascade* program strategis perusahaan ke individu (*to do list*).	15) Competency improvement through the Pervasive Learning Model, with a focus on OME, Asset Management & Business competencies, and supporting power plant self-management. 16) PJB Academy training program in support of: - utilization of water as primary energy for hydropower and management of dams and other supporting infrastructure- PIC : PJB Academy; - Co Firing program – PIC : PJB Academy; - Generator Coal Switching program - PIC : PJB Academy; - Better implementation and performance of green energy generators - PIC : PJB Academy; - provide opportunities for employees to improve competence by participating in Formal Education Programs, especially in the field of Business Management following RJPP PJB – PIC : DIVTLN and PJB Academy. 17) PJB group HRIS integration including updating PJB competency data into PJB SIT. 18) ICLIM development as an integrated LMS to make the management of training and employee development easier. 19) Cascading the company's strategic programs to individuals (to-do list).
17	**Risiko :** Pelanggaran Etika Bisnis.	**Risk :** Business Ethics Violation.
	Mitigasi : 1) Penguatan kompetensi SDM berkaitan dengan Regulasi Perizinan Ketenagalistrikan & ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. 2) Mengadakan *Knowledge Sharing* Forum Pengadaan. 3) *Refreshment* pengisian CSA Segmen sesuai dengan prosedur pengisian CSA. 4) Penyesuaian sanksi disiplin karyawan dan sosialisasi aturan disiplin karyawan. 5) Melakukan *review* dan implementasi prosedur penerimaan batubara yang dikirim *vendor* sebelum penandatangan BA penerimaaan barang untuk memastikan batubara yang disampaikan sesuai spesifikasi. 6) Melakukan *review* dan *update* terhadap regulasi di internal PJB yang mengatur tentang proses pemilihan *partner* agar tetap *inline* dengan peraturan terkait yang lebih tinggi melalui Aplikasi SISMINDOKUM dan JDIH. 7) Sosialisasi pengisian *form* dokumen pemilik manfaat dan surat pernyataan benturan kepentingan. 8) Pengisian dan *updating checklist* evaluasi kepatuhan. 9) Membangun mekanisme/ sistem untuk mengantisipasi intervensi dari pihak eksternal dalam pengembalian keputusan perusahaan.	**Mitigation :** 1) Strengthening HR competencies related to Electricity Licensing Regulations & ISO 37001 Anti-Bribery Management System. 2) Hold a Knowledge Sharing Procurement Forum. 3) Refreshment of CSA Segment filling following CSA filling procedure. 4) Adjustment of employee disciplinary sanctions and socialization of employee disciplinary rules. 5) Review and implement the coal acceptance procedure sent by the vendor before the signing of the goods receipt BA to ensure that the coal delivered is according to specifications. 6) Review and update PJB's internal regulations governing the partner selection process to stay in line with higher related regulations through the SISMINDOKUM and JDIH Applications. 7) Socialization of filling in the beneficial owner document form and a statement of conflict of interest. 8) Completing and updating the compliance evaluation checklist. 9) Build a mechanism/system to anticipate intervention from external parties in the return for company decisions.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Risiko dan Mitigasi	Risk and Mitigation
18	**Risiko :** Strategi Efisiensi tidak mampu mengimbangi Peningkatan BPP Unit Eksisting.	**Risk:** Efficiency Strategy is not able to keep up with the increase in BPP of Existing Units.
	Mitigasi : 1) *Coal Switching.* 2) Efisiensi Pemakaian Sendiri Pembangkit. 3) Penyusunan standarisasi produk 2.0 model 2 sebagai upaya mencari alternatif solusi efisiensi biaya melalui perencanaan yang terpusat. 4) Pengaturan alokasi gas ke unit yang lebih efisien. 5) Swakelola pemeliharaan dan pengaturan jadwal *overhaul.* 6) Pemanfaatan teknologi *Efficiency Correlated.* 7) Implementasi digitalisasi pembangkit. 8) Optimasi pemakaian material gudang dan material terpasang di unit RSH. 9) Digitalisasi SCM. 10) *Co-firing* PLTU batu bara eksisting dan jasa O&M untuk menaikkan CF. 11) Penyusunan Tata Kelola Bisnis *Solution.* 12) Negosiasi nilai manfaat langsung serta program pada SLA yang akan dimasukkan pada implementasi BJPSDA dengan PJT2.	**Mitigation :** 1) Coal Switching. 2) Power Generation Self-Use Efficiency. 3) Preparation of product standardization 2.0 model 2 as an effort to find alternative cost-efficiency solutions through centralized planning. 4) Arrangement of gas allocation to more efficient units. 5) Self-management of maintenance and overhaul schedule arrangement. 6) Utilization of Efficiency Correlated technology. 7) Implementation of generator digitization. 8) Optimizing the use of warehouse materials and materials installed in the RSH unit. 9) Digitizing SCM. 10) Co-firing of existing coal-fired power plants and O&M services to increase CF. 11) Preparation of Business Governance Solution. 12) Negotiation of the value of direct benefits and programs in the SLA that will be included in the implementation of BJPSDA with PJT2.

Level dari masing-masing risiko utama korporat dapat dilihat pada peta risiko tahun 2021 dimana terdapat *Current Risk* dan *Residual Risk*. *Current Risk* adalah realisasi lavel risiko yang berhasil dicapai atas upaya mitigasi yang dilaksanakan dan *Residual Risk* adalah risiko yang menjadi target level risiko yang ingin dicapai oleh PJB. Pemetaan risiko PJB pada akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

The level of each major corporate risk can be seen on the 2021 risk map where there are Current Risk and Residual Risk. Current Risk is the realization of the risk level that has been achieved due to the mitigation efforts implemented and Residual Risk is the risk that becomes the target level of risk that PJB wants to achieve. PJB risk mapping at the end of 2021 is as follows:

Pemetaan Risiko Tahun 2021
Risk Mapping in 2021

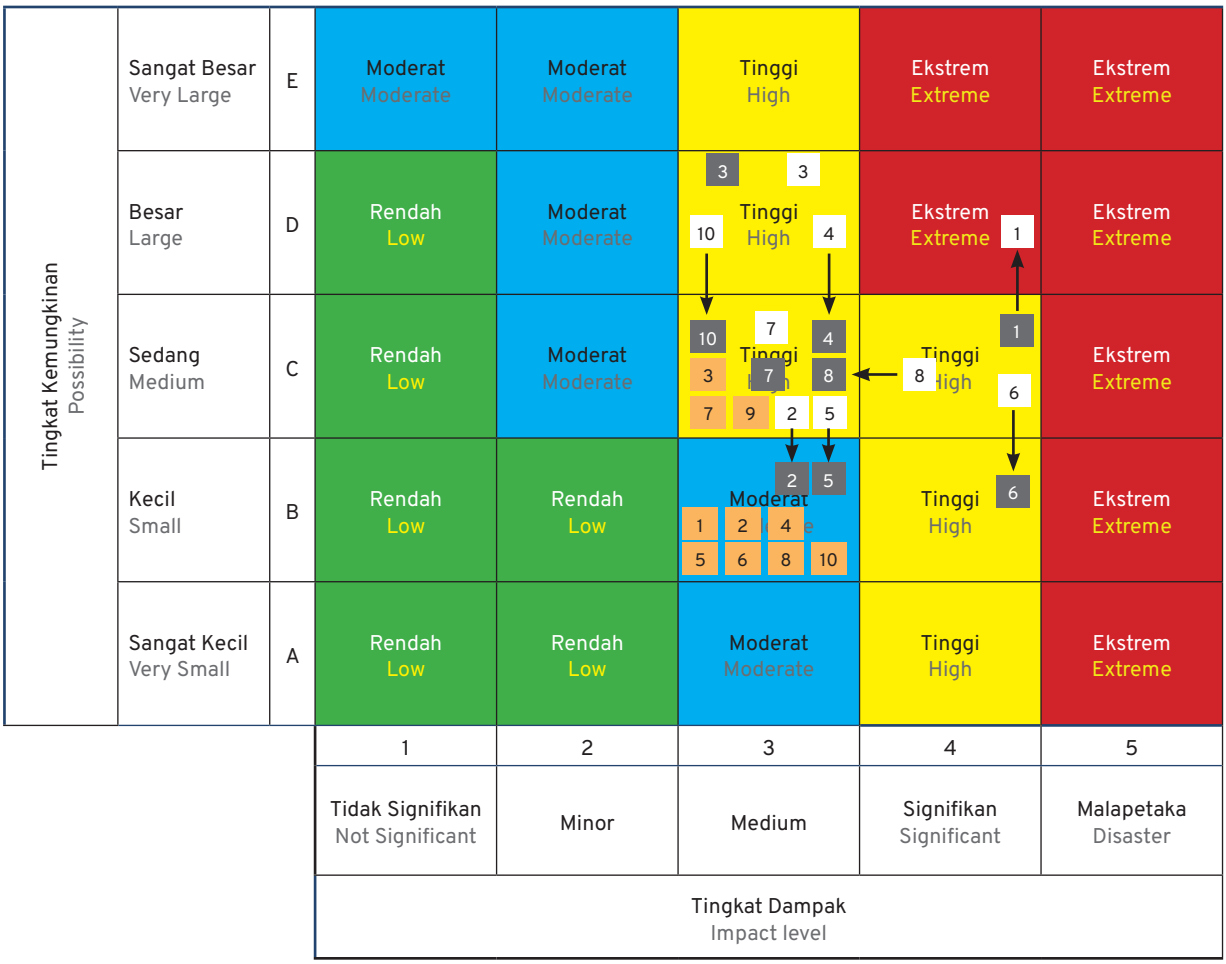

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

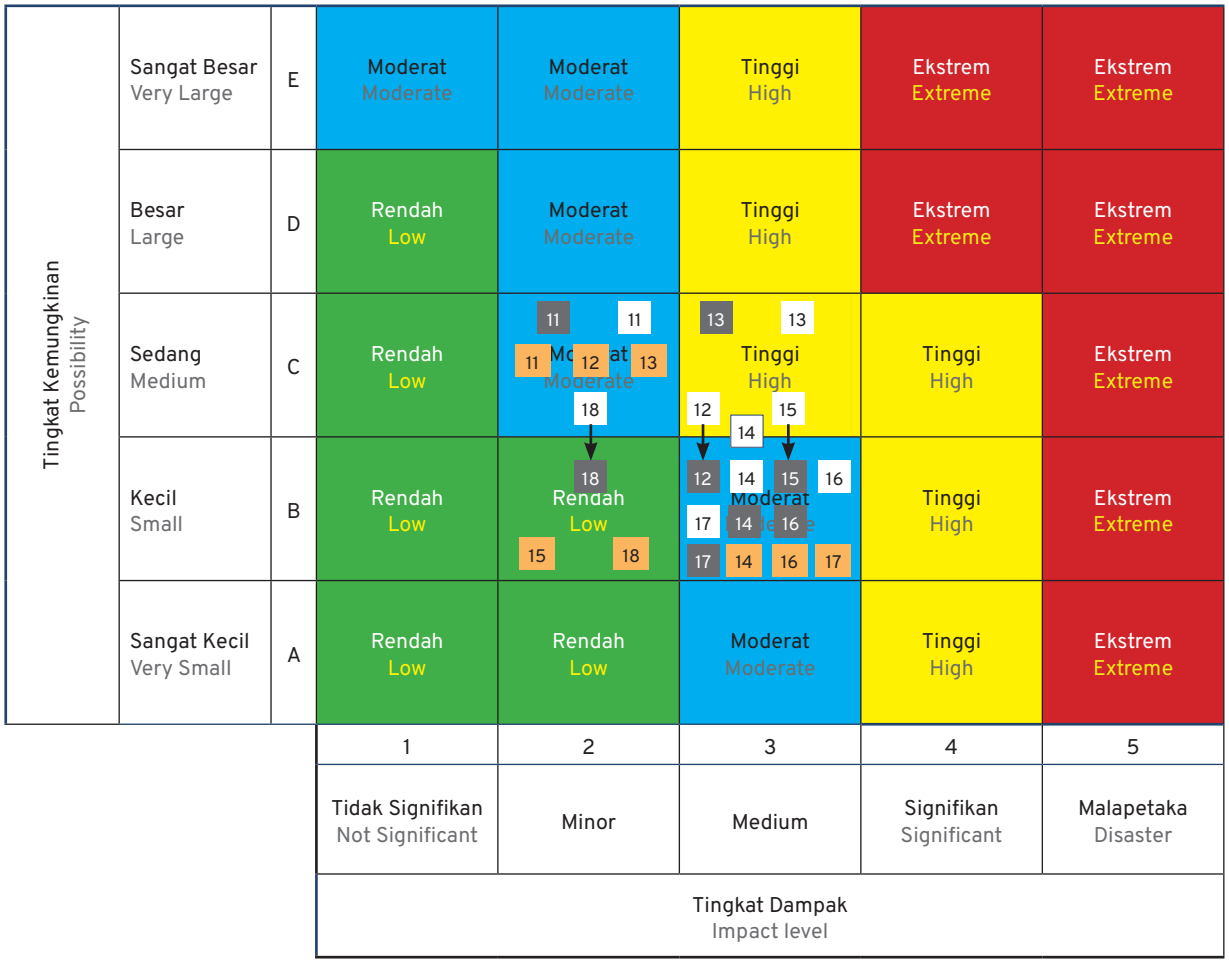

- Actual Risk Quarter III 2021
- Actual Risk Quarter IV 2021
- Residual Risk

Program Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Risk Management Competency Development Program

Perusahaan melaksanakan program pengembangan kompetensi baik berupa *public training* yang diselenggarakan oleh lembaga profesional maupun *in house training* yang bekerjasama dengan narasumber berpengalaman di dalam Manajemen Risiko. Program pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The Company carries out a competition development program in the form of public training organized by professional institutions and in-house training in collaboration with experienced resource persons in Risk Management. The competency development program related to risk management in 2021 is as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Terkait Manajemen Risiko
Competency Development Program Related to Risk Management

No.	Pelatihan Development Program	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date
1	*Certified Risk Management Professional*	24	22-25 Maret 2021 March 22-25, 2021
2	Pelatihan Manajemen Risiko ISO 31000 ISO 31000. Risk Management Training	58	5-6 April 2021 April 5-6, 2021
3	Pelatihan *Key Risk Indicator* Key Risk Indicator Training	32	19-21 Mei 2021 May 19-21, 2021
4	Pelatihan *Fire Risk Assessment* Fire Risk Assessment Training	37	9-10 Juni 2021 June 9-10, 2021
5	Pelatihan Manajemen Risiko ISO 31000 ISO 31000 . Risk Management Training	22	21 Juni 2021 June 21, 2021
6	*Enterprise Risk Management Certified Professional*	13	28 Juni – 1 Juli 2021 June 28 - July 1, 2021
7	*Governance Risk Certified Professional*	3	5-7 Juli 2021 July 5-7, 2021
8	Pelatihan ISO 31010 Teknik Asesmen Risiko ISO 31010 Training on Risk Assessment Techniques	20	12-14 Juli 2021 July 12-14, 2021
9	Pelatihan *Project Risk Management* Project Risk Management Training	22	16 Juli 2021 July 16, 2021
10	Pelatihan ISO 31010 Teknik Asesmen Risiko ISO 31010 Training on Risk Assessment Techniques	28	10-13 Agustus 2021 August 10-13, 2021
11	*Certified Risk Management Officer*	15	1-3 September 2021 September 1-3, 2021
12	*Certified Risk Governance Professional*	9	26-28 Oktober 2021 October 26-28, 2021
13	Pelatihan Manajemen Risiko Risk Management Training	54	28 May 2021 May 28, 2021
14	Sertifikasi *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA) Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Certification	59	18-28 Oktober 2021 October 18-28, 2021

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Kegiatan *Awareness* dan Sosialisasi Manajemen Risiko
Risk Management Awareness and Socialization

Kegiatan *awareness* dikemas dalam bentuk *sharing knowledge* manajemen risiko (*Clear Talk*) dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Selain itu, juga dilakukan kegiatan terkait manajemen risiko Perusahaan. Pada tahun 2021 telah dilakukan *Clear Talk* dan sosialisasi sebagai berikut :

Awareness activities are packaged in the form of risk management knowledge sharing (Clear Talk) by inviting resource persons who are competent in their fields. In addition, the Company's risk management activities were also carried out. In 2021, Clear Talk and socialization were carried out as follows:

No.	Sosialisasi Socialization	Tanggal Date
1	*Clear Talk* dengan tema "*How to Handle Corporate Risk*" Clear Talk with the theme "How to Handle Corporate Risk"	29 April 2021 April 29, 2021
2	*Clear Talk* dengan tema "*Risk Insight* 2022" Clear Talk with the theme "Risk Insight 2022"	25 Mei 2021 May 25, 2021
3	*Clear Talk* dengan tema "*Sharing From The Best*" Clear Talk with the theme "Sharing From The Best"	18 Juni 2021 June 18, 2021
4	*Clear Talk* dengan tema "*Risk Culture : Creating & Protecting Value by Nurturing Risk Culture*" Clear Talk with the theme "Risk Culture: Creating & Protecting Value by Nurturing Risk Culture"	8 Juli 2021 July 8, 2021
5	*Clear Talk* dengan tema "Peluang dan Risiko Pengembangan *Floating* PV – *Business Opportunity of Floating* PV & *Lesson Learned of Yamakura Dam*" Clear Talk with the theme "Opportunities and Risks of Floating PV Development – Business Opportunity of Floating PV & Lesson Learned of Yamakura Dam"	25 Agustus 2021 August 25, 2021
6	*Clear Talk* dengan tema "*Sharing From The Best Semester* 1 2021" Clear Talk with the theme "Sharing From The Best Semester 1 2021"	22 September 2021 September 22, 2021
7	*Clear Talk* dengan tema "*Sharing From the Best : Winner of ASEAN Risk Awards* (ARA)" Clear Talk with the theme "Sharing From the Best: Winner of ASEAN Risk Awards (ARA)"	21 Oktober 2021 October 21, 2021
8	*Clear Talk* dengan tema "*Top Six* Profil Risiko Korporat" Clear Talk with the theme "Top Six Corporate Risk Profiles"	29 November 2021 November 29, 2021
9	Sosialisasi Kebijakan Manajemen Risiko (GRC, RAS, I-CARE, Kajian Risiko Dissemination of Risk Management Policy (GRC, RAS, I-CARE, Risk Assessment	29 Desember 2021 December 29, 2021

Evaluasi Kinerja Manajemen Risiko
Risk Management Performance Evaluation

Perusahaan melakukan evaluasi atas pengelolaan risiko dengan metode *Risk Survey* dan *assessment Maturity Level* ERM. Kegiatan *Risk Survey* dilaksanakan dengan konsep baru yaitu Konsultasi tindak lanjut Rekomendasi *Risk* dan *Underwriting Survey.* Konsultasi tindak lanjut Rekomendasi Risk dan *Underwriting Survey* akan dilakukan secara internal

The company evaluates risk management using the Risk Survey method and the ERM Maturity Level assessment. Risk Survey activities are carried out with a new concept, namely Consultation on the follow-up to Risk Recommendations and Underwriting Surveys. Follow-up consultation on Risk Recommendations and Underwriting Survey will be conducted

PJB dengan berkolaborasi dengan Satuan Teknologi. Terkait tindak lanjut Rekomendasi *Risk* dan *Underwriting Survey* senantiasa dilakukan *monitoring* berkala setiap triwulan yang dilaporkan melalui Laporan Manajemen Risiko, serta saat ini untuk monitoring tindak lanjutnya sudah terintegrasi dengan aplikasi PLN *e-insurance* dan aplikasi *i-Care* PJB.

Self Assessment Maturity Level ERM PJB berdasarkan kriteria PLN di Semester II tahun 2021 mendapatkan hasil dengan nilai validasi 3,52 di atas target Semester 2 sebesar 3,2. *Assessment Maturity Level* ERM pada unit yang dikelola PJB dilakukan satu semester sekali oleh asesor yang ditunjuk oleh bidang kinerja korporat. Namun demikian, setiap triwulan unit tetap melakukan *self assessment maturity level.* Hasil *assessment maturity* oleh bidang kinerja korporat di lingkungan PJB untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

internally by PJB in collaboration with the Technology Unit. Regarding the follow-up to the Risk Recommendations and the Underwriting Survey, periodic monitoring is always carried out every quarter which is reported through the Risk Management Report, and currently, the follow-up monitoring has been integrated with the PLN e-insurance application and the PJB i-Care application.

PJB's ERM ERM Maturity Level Self Assessment based on PLN's criteria in Semester II 2021 obtained results with a validation value of 3.52 above the Semester 2 target of 3.2. The ERM Maturity Level Assessment in units managed by PJB is carried out once a semester by an assessor appointed by the corporate performance sector. However, every quarter the unit continues to conduct a self-assessment of the maturity level. The results of the maturity assessment by the corporate performance sector within PJB for 2021 are as follows:

Hasil *Assessment Maturity Level* ERM
ERM Maturity Level Assessment Results

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Target Semester II Tahun 2021 Second Semester Target in 2021	Realisasi sd Triwulan IV 2021 Realization as of Quarter IV 2021	Pencapaian (%) Achievement (%)
1	UP PAITON PAITON GU	3,40	3,40	100,0
2	UP GRESIK GRESIK GU	3,40	3,40	100,1
3	UP MUARA KARANG MUARA KARANG GU	3,40	3,40	100,0
4	UP MUARA TAWAR MUARA TAWAR GU	3,40	3,42	100,5
5	UP CIRATA CIRATA GU	3,40	3,40	100,0
6	UP BRANTAS BRANTAS GU	3,40	3,41	100,2
7	UPHT MSUEA	3,40	3,32	97,6
8	UPHB MSUWA	3,40	3,40	100,0
9	UBJOM INDRAMAYU INDRAMAYU OMSBU	3,33	3,33	100,0
10	UBJOM PACITAN PACITAN OMSBU	3,33	3,33	100,0
11	UBJOM PAITON PAITON OMSBU	3,33	3,33	100,0
12	UBJOM REMBANG REMBANG OMSBU	3,33	3,39	101,9
13	UBJOM TANJUNG AWAR-AWAR TANJUNG AWAR-AWAR OMSBU	3,33	3,39	101,7
14	UBJOM ARUN ARUN OMSBU	3,00	2,75	91,7

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Target Semester II Tahun 2021 Second Semester Target in 2021	Realisasi sd Triwulan IV 2021 Realization as of Quarter IV 2021	Pencapaian (%) Achievement (%)
15	UBJOM KALTIM TELUK KALTIM TELUK OMSBU	3,00	3,01	100,5
16	UBJOM PULANG PISAU PULANG PISAU OMSBU	3,00	3,00	100,0
17	UBJOM TENAYAN TENAYAN OMSBU	3,00	3,05	101,7
18	UBJOM LUAR JAWA-2 OUTSIDE JAVA-2 OMSBU	3,00	3,26	108,6
19	PJB ACADEMY	3,00	3,07	102,4
20	UBANG BUSINESS DEVELOPMENT UNIT	3,00	3,00	100,0

Hasil *assessment maturity level* ERM menunjukan bahwa tingkat kematangan sistem manajemen risiko PJB bahwa:

1. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya dilakukannya kajian risiko dan *self assessment* risiko.
2. Manajemen risiko telah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
3. Manajemen risiko telah menjadi bagian dari seluruh proses bisnis perusahaan.
4. Infrastruktur manajemen risiko telah disiapkan baik berupa sumber daya manusia yang tersertifikasi, *tools* berupa aplikasi manajemen risiko, dan kebijakan serta pedoman penerapan manajemen risiko perusahaan.

The results of the ERM maturity level assessment show that the maturity level of PJB's risk management system is that:

1. Risk awareness culture is quite attached to risk owners, this is indicated by efforts to carry out risk assessments and risk self-assessments.
2. Risk management has become the basis for decision-making.
3. Risk management has become a part of all company business processes.
4. Risk management infrastructure has been prepared in the form of certified human resources, tools in the form of risk management applications, and policies and guidelines for implementing company risk management.

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT

Standar Etika Perusahaan merupakan bagian dari kerangka kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance soft structure*) PJB. Perusahaan terakhir kali menetapkan Standar Etika Perusahaan pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 002.K/021/DIR/2019 dan 005.K/DK/PJB/2019 tentang Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Pembangkitan Jawa-Bali. Perusahaan juga menyusun ringkasan *Code of Conduct* dalam bentuk buku saku yang dapat mempermudah pemahaman penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Standar Etika Perusahaan secara berkala dievaluasi dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran dalam menjaga relevansinya terhadap kondisi bisnis, lingkungan dan sosial PJB yang terus berkembang. Penerapan COC dalam jangka panjang secara konsisten diharapkan akan mendorong perbaikan kinerja Perusahaan dan meningkatkan citra Perusahaan.

The Company's Code of Conduct is part of PJB's Good Corporate Governance's soft structure policy framework. The Company's latest Code of Conduct was enforced in 2019 based on the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 002.K/021/DIR/2019 and 005.K/DK/PJB/2019 concerning Code of Conduct of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Company also compiles a summary of the Code of Conduct in the form of a pocketbook that can facilitate understanding of its application in daily activities. The Company's Code of Conduct is regularly evaluated and if deemed necessary, updates can be made to maintain their relevance to PJB's business, environmental and social conditions that continue to develop. The consistent implementation of COC in the long term is expected to boost the Company's performance and build the Company's image.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Kegiatan Usaha PJB harus didukung dengan perilaku etis yang menjunjung tinggi norma-norma sosial yang diterima secara umum dan menjadi budaya PJB. Budaya Perusahaan adalah "*the way we do things around here*" yang merupakan nilai, anggapan, asumsi, sikap, dan norma perilaku yang telah melembaga kemudian berwujud dalam wujud penampilan, sikap, dan tindakan, sehingga menjadi identitas perusahaan.

Perusahaan sebagai Anak Perusahaan BUMN turut serta mengimplementasikan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai *core values* di lingkungan PJB yang sejalan dengan transformasi *Human Capital* di BUMN dan transformasi PT PLN (Persero). *Core Values* adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, serta merupakan jiwa dari sebuah organisasi. AKHLAK sebagai core values di lingkungan PJB, menjadi panduan Insan PJB dalam bertindak dan berperilaku menuju suatu tujuan yang sama yaitu terwujudnya Visi Perusahaan. Pada tanggal 9 November 2020, PJB telah meresmikan *core values* AKHLAK sebagai Budaya Perusahaan di lingkungan PJB yang terdiri dari:

PJB's business activities must be supported by ethical behavior that upholds generally accepted social norms and becomes PJB's culture. Corporate culture is "the way we do things around here" which are values, assumptions, assumptions, attitudes, and behavioral norms that have been institutionalized and then manifest in the form of appearance, attitudes, and actions so that they become the Company's identity.

The Company as an SOE subsidiary participates in implementing AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) as core values within PJB which are in line with the transformation of Human Capital in SOEs and the transformation of PT PLN (Persero). Core Values are things that are valued, upheld, practiced, and are the soul of an organization. AKHLAK as the core value of PJB becomes a guide for PJB Personnel in acting and behaving towards a common goal, namely the realization of the Company's Vision. On November 9, 2020, PJB has inaugurated the core values of AKHLAK as a Corporate Culture within PJB which consists of:

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT

Core Values AKHLAK
AKHLAK Core Values

Nilai Utama Core Value	Definisi Definition	Panduan Perilaku	Code of Conduct
Amanah **Trustworthy**	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Adhere to the trust given	1. Memenuhi janji dan komitmen. 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. 3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.	1. Fulfilling promises and commitments 2. Responsible for tasks, decisions, and actions. 3. Adhering to moral and ethical values.
Kompeten **Competent**	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continue to learn and develop capabilities	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.	1. Improving self-competence to respond to ever-changing challenges. 2. Helping others in learning. 3. Completing tasks with the best quality.
Harmonis **Harmonious**	Saling peduli dan menghargai perbedaan. Care for each other and respect differences.	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.	1. Respecting everyone regardless of their background. 2. Helping others. 3. Building a conducive work environment.
Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Dedicate and prioritize the interests of the Nation and the State.	1. Menjaga nama balk sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara. 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.	1. Maintaining the good name of fellow employees, leaders, SOE, and the State. 2. Willing to sacrifice to achieve a higher goal. 3. Complying with the leadership as long as it is not against the law and ethics
Adaptif **Adaptive**	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Continue to innovate and enthusiastic about moving or facing changes.	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. 3. Bertindak proaktif.	1. Adapting quickly to be better. 2. Improving continually following technological developments. 3. Acting proactively.
Kolaboratif **Collaborative**	Membangun kerja sama yang sinergis. Build synergistic cooperation.	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama	1. Providing opportunities for various parties to contribute. 2. Transparency in cooperation to generate added value. 3. Mobilizing the use of various resources for common goals

Internalisasi Budaya Perusahaan
Corporate Culture Internalization

Budaya Perusahaan diinternalisasikan agar dapat menjadi jiwa dari organisasi dan melekat pada setiap aktivitas Perusahaan. PJB menyusun *Roadmap* implementasi budaya perusahaan sebagai upaya internalisasi dimana tahapan implementasi penguatan budaya perusahaan PJB dimulai dengan membangkitkan awareness, membangun pemahaman dan kemudian mendorong keterlibatan insan PJB (*acceptance*), sehingga pada akhirnya semua karyawan PJB diharapkan memiliki komitmen penuh dalam mewujudkan visi perusahaan (*commitment/transform*).

Corporate culture is internalized to become the core of the organization which is attached to every activity of the Company. PJB prepares a Roadmap for implementing corporate culture as an internalization effort where the implementation stage of strengthening PJB's corporate culture begins with raising awareness, building understanding, and then encouraging the involvement of PJB people (acceptance); therefore, all PJB employees are expected to have full commitment in realizing the Company's vision in the end (commitment/transforms).

Roadmap Budaya Implementasi *Core Values* AKHLAK Tahun 2020-2024
Cultural Roadmap for the Implementation of AKHLAK Core Values for 2020-2024

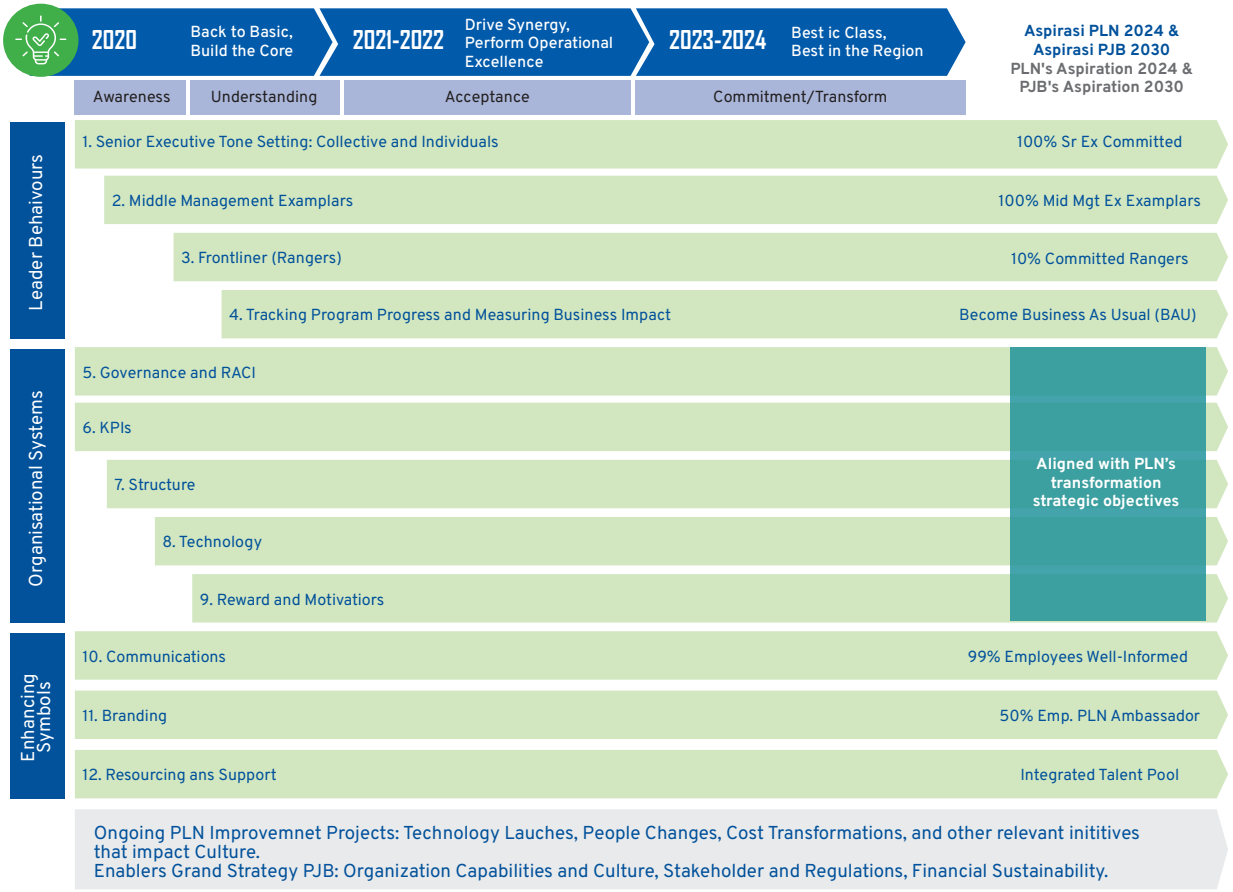

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT

Roadmap implementasi budaya perusahaan disusun dengan memperkuat 3 aspek untuk memperkuat budaya perusahaan PJB yang berkelanjutan, yaitu:

The roadmap for implementing corporate culture was prepared by strengthening 3 aspects to enhance PJB's sustainable corporate culture, namely:

Aspek Perkuat Budaya
Aspects of Strengthening Culture

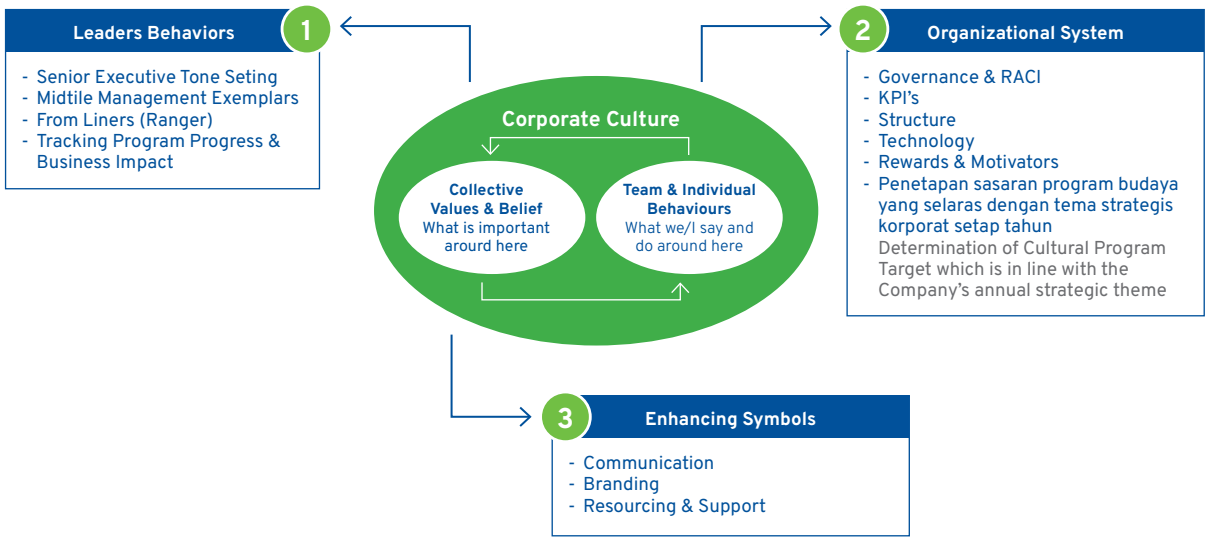

Mengacu pada *High Level Roadmap* Budaya Perusahaan 2020-2024, memasuki periode *Milestone* 2 tahun 2021-2022, tema penguatan budaya dan *key message* sebagai berikut: *Drive Sinergy, Perform Operational Excellence.* Tema ini sekaligus mengingatkan bahwa keberhasilan penguatan budaya hanya akan dicapai dengan sinergi seluruh *stakeholder* PJB, termasuk Tenaga Alih Daya.

Referring to the High-Level Corporate Culture Roadmap 2020-2024, approaching the Milestone 2 period 2021-2022, the theme of strengthening culture and key messages is as follows: Drive Synergy, Perform Operational Excellence. This theme also states that the success of cultural strengthening will only be achieved with the synergy of all PJB stakeholders, including Outsourcing.

Di *Milestone* 2, beberapa penguatan dilakukan pada Program Budaya PLN 123 di PJB, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

At Milestone 2, several reinforcements were carried out on the PLN 123 Culture Program at PJB, as described below:

Penguatan Impelementasi Budaya PLN 123 *Milestone* 2
Strengthening the Implementation of PLN Culture 123 Milestone 2

Fokus pada penguatan GRC, COllaboration & Performance Service Culture
Focused on strengthening GRC, Collaboration, Performance and Service Culture

Program Budaya Cultural Program	***Critical Few Behaviours*** (Perilaku Behavior AKHLAK #)	**Tujuan Program** Objectives	**PROGRAM PLN 123 DI PJB** PLN 123 PROGRAM AT PJB
PLN 1 ***GRC Culture*** (satu informasi setiap hari) (One Information Every Day)	# Memenuhi janji & komitmen # Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama # Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik # Fulfill the promise and commitment # Mobilize the utilization of various resources for common goals # Execute tasks with the highest quality	**Satu informasi** setiap harinya mengenai GRC (Transformasi, *Value, compliance, risk*, kebijakan prosedur, dll) **One Information Every Day** focusing on GRC Topic (Transformation, Risk, Policy, Procedure, and others) **Peningkatan *Maturity Level* Pecengahan *Fraud*** melaui *monitoring* FRA atau implementasi SMAP **Enhancement of Maturity Level to Prevent Fraud Risk** through FRA Monitoring or SMAP implementation **Peningkatan *Maturity Level* Pecengahan Risiko Operasional** melalui pengeolaan risiko unit kerja **Enhancement of Maturity Level to Prevent Operational Risk** through work unit's risk management	**PLN 1** 1. PJB JARKOM (Jaringan Komunikasi) PJB JARKOM (Communication Network) 2. #PJBAman Total Patrol
PLN 2 ***Collaboration Performance Culture***	# Terus-menerus malakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi # Bertindak proaktif # Menggerakan pemanfaatan bebagai sumber daya untuk tujuan bersama # Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik # Continuously make improvements & following technological developments # Act proactively # Mobilize the utilization of various resources for common goals # Execute tasks with the highest quality	Memperkuat kolaborasi melibatkan minimal: **1) 1 (satu) Unit Kerja di PLN (Divisi, Unit Induk, Anak Perusahaan lain) dan 2) 1 (satu) korporasi/Leambaga/instansi di luar PLN** untuk dua capaian setiap minggu mengenai: Strengthen the Collaboration involving: **1. One Work Unit in PLN (Division, Holding Unit, and Another Subsidiary) and 2. One corporation/organization/ institution outside PLN** to reach two weekly achievements concerning: a. Meningkatkan keandalan Reliability improvement b. Meningkatkan *revenue* Revenue improvement c. Menekan *cost* Cost improvement d. Meningkatkan layanan Service improvement **Pengutan SIstem:** Penerapan KPI Kolaborasi / **System Improvement:** Implementation of Collaborative KPI	**PLN 2** 1. *Collaboration for* SOKET *Implementation* (Digitalisasi *Power Plant* / SOKET - Sistem Optimasi Keandalan & Efisiensi Terintegritasi) Collaboration for SOKET Implementation (Digitalization of Power Plant / SOKET - Integrated Reliability and Efficiency Optimization System) 2. PJB *Data Science Club for Digital Power Plant* (*Club* OME & *Non* OME)
PLN 3 ***Service Culture***	# Terus-menerus malakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi # Bertindak proaktif # Menggerakan pemanfaatan bebagai sumber daya untuk tujuan bersama # Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik # Continuously make improvements & following technological developments # Act proactively # Mobilize the utilization of various resources for common goals # Execute tasks with the highest quality	Meningkatkan *service culture* dengan "membangun pengalaman bagi pelanggan" diantaranya dengan tiga perbaikan setiap bulan (fokus adalah pelanggan eksternal Unit kerja) mengenai: Strengthen the Service Culture through "Building Customer Experience" by three monthly improvements (focused on external customers of Work Unit) concerning: a. Mencari pelanggan baru New customer acquisition b. Meningkatkan Pemakaian/*revenue* Revenue improvement c. Meningkatkan kepuasan pelanggan Customer satisfaction improvement d. Meningkatkan produk/bisnis proses Product/Business process improvement ***Mandatory Program:*** Yantek *Optimization* (Budaya Melayani) Seluruh UID dan UIW / **Mandatory Program:** Yantek Optimization (Service Culture) for all UID UIW	**PLN 3** 1. *Relation Investment* 2. PJB *Ranger Business and Digital Experiential Learning* (BIDEX)

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT

Pokok Muatan Standar Etika Perusahaan
Core Contents of the Code of Conduct

Standar Etika Perusahaan PJB secara sederhana dikenal dengan akronim “PEMBANGKIT” yang mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan etika pengelolaan Perusahaan yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan PJB. Secara fundamental, Standar Etika Perusahaan PJB mengatur mengenai standar etika perilaku dan bisnis dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan, yaitu karyawan, pelanggan, rekanan, kompetitor, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat. Penjelasan mengenai cakupan muatan yang diatur dalam Standar Etika Perusahaan adalah sebagai berikut:

PJB's Code of Conduct is simply known as the acronym "PEMBANGKIT" which regulates several provisions relating to the ethics of corporate management that must be obeyed by all PJB Personnel. Fundamentally, PJB's Code of Conduct regulates ethical standards and business in building relationships with stakeholders which are employees, customers, partners, competitors, work partners, government, and the community. The explanation regarding the scope regulated in the Company's Code of Conduct is as follows:

Pokok Muatan Standar Etika Perusahaan
Core Contents of the Code of Conduct

Cakupan Muatan Payload Coverage	Penjelasan	Explanation
Kegiatan **P**olitik dan Sosial Perusahaan Company **P**olitical and Social Activities	Perusahaan mempertahankan sikap netral terhadap partai politik sesuai dengan tata nilai ***integrity*** dan perilaku utama etis. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politis, ataupun calon pejabat manapun. Namun hal ini tidak berarti PJB melarang hak karyawannya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Perusahaan juga berkomitmen untuk mengutamakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat kegiatan operasi. Pengembangan dan pemberdayaan tersebut diutamakan dalam bidang ekonomi sosial budaya dan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Insan Perusahaan yang berwenang dilarang untuk melakukan diskriminasi dan bersifat subjektif dalam menjalankan program CSR seperti mendahulukan program CSR di wilayah tempat asal Insan Perusahaan tersebut. Hal ini didasari oleh sesuai dengan tata nilai ***integrity*** dan perilaku utama ***amanah.***	The Company maintains a neutral attitude towards political parties following the **integrity** values and the main ethical code. Therefore, the Company does not provide financial assistance to any political parties, political, or candidates. However, it does not mean that PJB forbids the rights of its employees as citizens to participate in political activities. The Company is also committed to prioritizing community development and empowerment, around the center of operations in particular. Development and empowerment are prioritized in the economic, sociocultural, and religious fields, education, health, and the environment. The authorized Company personnel are prohibited from discriminating and being subjective in carrying out CSR programs such as prioritizing CSR programs in the surrounding Company Personnel's life/origin. It is based on compliance with the **integrity** values and the main behavior of **trustworthiness**.
Etika Bekerja Insan Perusahaan Work **E**thics of Company Personnel	Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan Perusahaan. Oleh karena itu, dirancang aturan-aturan untuk menjaga komitmen Insan Perusahaan terhadap pengembangan diri Insan Perusahaan serta Perusahaan secara keseluruhan. Komitmen yang dimaksud yaitu : 1. Komitmen pengembangan diri; 2. Komitmen kemajuan & perkembangan perusahaan; 3. Komitmen anti diskriminasi.	Every Company Personnel is committed to growing and developing together with the Company. Therefore, regulations are designed to maintain the commitment of the Company’s Personnel to the personal development of the Company’s Personnel and the Company as a whole. The commitments are as follows: 1. Commitment to self-development; 2. Commitment to the progress and development of the Company; 3. Commitment to anti-discrimination.

Cakupan Muatan Payload Coverage	Penjelasan	Explanation
Perlindungan Informasi, Hak Kekayaan Intelektual dan Penggunaan Media Sosial Protection of Information, Intellectual Property Rights, and Use of Social Media	Sesuai dengan tata nilai ***integrity*** dengan perilaku utama **jujur** dan **amanah**, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai klasifikasinya. Pengungkapan informasi kepada Publik dan *Stakeholder* lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perusahaan, dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.	Following the **integrity** value with the main behavior of being **honest** and **trustworthy**, every Company Person is obliged to maintain the confidentiality of Company information according to its classification. Information disclosure to the public and other stakeholders must be carried out by considering the information classification, the Company's interests, and the needs of interested parties based on the prevailing laws and regulations.
	Perusahaan tidak mentolerir adanya praktik penjualan informasi dari orang dalam (*insider trading*) dan Perusahaan akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku *insider trading* sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh insan Perusahaan dilarang melakukan praktik penjualan informasi dari orang dalam.	The Company tolerates no practices of trading information from insiders (insider trading) and the Company will take legal action against insider trading actors based on the prevailing rules. Therefore, all Company personnel is prohibited from insider trading information.
	Perusahaan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak lain, oleh karena itu Insan Perusahaan dilarang untuk menggunakan HAKI milik pihak lain tanpa izin dan prosedur yang sudah diatur karena dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum.	The Company respects the Intellectual Property Rights (IPR) of other parties; therefore the Company Personnel are prohibited from using IPR belonging to other parties without the permission and procedures that have been regulated since it may result in the Company bearing a lawsuit.
	Di sisi lain, Perusahaan dan seluruh Insan Perusahaan juga wajib melindungi HAKI milik Perusahaan karena HAKI adalah *intangible asset* yang sangat bernilai untuk Perusahaan.	On the other hand, the Company and all Company Personnel are also required to protect the Company's intellectual property rights due to the intellectual property rights are intangible assets that are highly valuable to the Company.
	Media sosial yang mengatasnamakan Perusahaan hanya boleh dikelola oleh pihak yang diberi hak oleh Perusahaan. Unit dan bagian lain dilarang membuat media sosial sendiri yang mengatasnamakan Perusahaan. Insan Perusahaan dilarang mengunggah pernyataan di media sosial yang mengatasnamakan Perusahaan, kecuali pihak yang telah diberi kewenangan oleh Perusahaan. Perusahaan menghormati kebebasan Insan Perusahan untuk menyampaikan pikirannya dalam bentuk lisan maupun tulisan di dalam media sosial pribadi Insan Perusahaan, selama konten yang diunggah bukan hal yang merugikan perusahaan.	Social media on behalf of the Company may only be managed by parties authorized by the Company. Other units and sections are prohibited from creating their social media in the name of the Company. The Company personnel is prohibited from uploading statements on social media on behalf of the Company, except for those who have been authorized by the Company. The Company respects the freedom of the Company's Personnel to express their thoughts in oral or written form on their social media, as long as the uploaded content is not detrimental to the Company.

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT

Cakupan Muatan Payload Coverage	Penjelasan	Explanation
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Aturan mengenai benturan kepentingan dibuat sesuai dengan tata nilai integrity dan perilaku utama **etis**, **jujur** dan **amanah**. Benturan kepentingan terjadi apabila Insan Perusahaan: 1. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing atau dengan Mitra Usaha Perusahaan. 2. Bekerja di perusahaan pesaing atau dengan Mitra Usaha Perusahaan. 3. Mempunyai hubungan keluarga langsung dengan pemilik atau pengambil keputusan Mitra Usaha Perusahaan. Apabila terjadi benturan kepentingan tersebut maka Insan Perusahaan harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan berlaku.	The rules concerning conflicts of interest are made following the integrity values and the main behavior is **ethical**, **honest**, and **trustworthy**. Conflict of interests occurs when the Company Personnel: 1. Involving directly or indirectly in the competitor management or with Business Partners of the Company. 2. Working in company's competitor or with Business Partners of the Company. 3. Having a direct family relationship with the owner or decision-maker of Business Partners of the Company. In case there is a conflict of interest, the Company personnel are required to resign from the decision-making process following the prevailing regulations.
Perlindungan **A**set Perusahaan Company **A**sset Protection	Harta/Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk pencapaian tujuan Perusahaan. Sesuai dengan tata nilai ***integrity*** dan **perilaku utama etis**, disusunlah pedoman perilaku yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan keselamatan Aset Perusahaan.	Assets are resources owned by the Company and used to achieve the Company's goals. Following the **integrity** values and the main **ethical code**, the Code of Conduct has been prepared to maintain the integrity and safety of the Company's assets.
***N**etworking* dengan *Stakeholder* **N**etworking with Stakeholders	Setiap Insan Perusahaan wajib untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh Stakeholder Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Pedoman dalam hubungan ini diatur dalam bentuk kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh seluruh Insan Perusahaan.	Every Company Personnel is obliged to maintain good relations with all Company Stakeholders following the Company's values. The guidelines in this relationship are regulated in the form of obligations and prohibitions that must be fulfilled by all Company Personnel.
Gratifikasi **G**ratification	Setiap Insan Perusahaan senantiasa menaati aturan terkait Gratifikasi sebagai pencerminan dari salah satu tata nilai Perusahaan, yaitu ***integrity*** dengan perilaku utama **etis, jujur** dan **amanah** yang bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan bersih di Perusahaan. Setiap Insan Perusahaan wajib mengetahui perkembangan aturan terkini mengenai Gratifikasi dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut. Aturan-aturan tersebut harus disosialisasikan ke seluruh Insan Perusahaan untuk menghindari terjadinya Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.	Every Company Personnel always obeys the rules concerning Gratification as a reflection of one of the Company's values, namely **integrity** with the main behavior of being **ethical, honest,** and **trustworthy** with the purpose to create a sound and clean competition climate in the Company. Every Company Personnel is required to be aware of the latest developments in Gratification regulations and to comply with the prevailing regulations. These rules must be socialized among all Company Personnel to avoid Gratification within the Company.
Kepedulian terhadap K3, serta Pelestarian Lingkungan Concern for OHS, and Environmental Preservation	Komitmen Perusahaan terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pelestarian lingkungan tercermin dari nilai professional dengan perilaku utama mengutamakan keselamatan dan lingkungan yang ada di dalam tata nilai Perusahaan. Aktivitas di Perusahaan berorientasi terhadap keselamatan dan keharmonisan lingkungan. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian dan menanamkan nilai-nilai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelestarian lingkungan hidup terhadap seluruh Insan Perusahaan.	The Company's commitment to the importance of Occupational Health and Safety (OHS) as well as environmental preservation is reflected in professional values with the main behavior of prioritizing safety and the environment in the Company's values. Activities in the Company are oriented toward safety and environmental harmony. The Company is committed to increasing awareness and instilling the values of Occupational Health and Safety as well as environmental preservation to all Company Personnel.

Cakupan Muatan Payload Coverage	Penjelasan	Explanation
In**T**egritas Proses dan Data Pelaporan Keuangan **I**n**T**egrity of Financial Reporting Process and Data	Seluruh transaksi bisnis Perusahaan harus digambarkan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini tercermin dari nilai *integrity* dengan perilaku utama **jujur** dan nilai **profesional** dengan perilaku utama **bertanggung jawab.** Perusahaan wajib membuat laporan keuangan secara tepat dan akurat untuk mendukung integritas dan reputasi Perusahaan. Semua proses pencatatan dibuat dengan memastikan bahwa seluruh berkas lengkap, akurat, tepat waktu dan dapat dilacak bukti transaksinya.	All Company's business transactions must be described in the form of financial statements. It is reflected in the integrity value with the main behavior of being **honest** and **professional** values with the main behavior of being **responsible**. The Company is obliged to make financial reports accurately to support the Company's integrity and reputation. All recording processes are made by ensuring that all files are complete, accurate, timely, and can be traced as proof of transactions.

Pemberlakuan Standar Etika Bagi Seluruh Level Organisasi
Code of Conduct Enforcement for the Entire Organizational Levels

Penetapan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 002.K/021/DIR/2019 dan 005.K/DK/PJB/2019 tentang Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Pembangkitan Jawa-Bali sekaligus menjadi pemberlakuan Standar Etika Perusahaan PJB bagi Direksi dan Dewan Komisaris beserta seluruh karyawan yang mempunyai hubungan kerja langsung baik karyawan tetap maupun kontrak. Selain itu, sosialisasi dan dijadikannya Standar Etika Perusahaan sebagai salah satu target kinerja unit di dalam aspek OCR merupakan bagian dari upaya pemberlakukan Standar Etika Perusahaan bagi seluruh level organisasi. Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan secara berkala setiap tahun.

Determination based on the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 002.K/021/DIR/2019 and 005.K/DK/PJB/2019 concerning the Company's Code of Conduct for PT Pembangkitan Jawa-Bali as well as being an implementation of PJB's Code of Conduct for the Board of Directors and the Board of Commissioners and all employees who have direct working relationships, both permanent and contract employees. In addition, the socialization and adoption of the Code of Conduct as one of the unit's performance targets in the OCR aspect is part of the effort to enforce the Company's Code of Conduct for all levels of the organization. The Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees are required to sign a Statement of Compliance with the Company's Code of Conduct annually.

Sosialisasi Standar Etika Perusahaan
Code of Conduct Socialization

Kegiatan sosialisasi Standar Etika Perusahaan merupakan upaya PJB untuk memberikan pemahaman dan mendorong kepedulian seluruh insan PJB untuk menaati dan menerapkan Standar Etika Perusahaan di setiap kegiatan usaha Perusahaan yang sejalan dengan Budaya Perusahaan. Standar Etika Perusahaan PJB dikomunikasikan dan disosialisasikan

The socialization activity of the Company's Code of Conduct is PJB's effort to provide the understanding and encourage concern for all PJB people to comply with and apply the Company's Code of Conduct in every business activity of the Company that is in line with the Company's Culture. PJB's Code of Conduct is communicated and socialized to all employees,

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT

kepada seluruh karyawan, dari level operasional sampai *top management* sebagai bagian dari tahapan internalisasi Budaya Perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi Standar Etika Perusahaan dilakukan melalui saluran media di seluruh Unit Kerja Perusahaan, meliputi BOD *Talk*, sosialisasi tatap muka, *email, website*, intranet, visual manajemen, dan forum internal. Bagi karyawan baru, sosialisasi dilakukan oleh tim GCG pada saat pembekalan *Code of Conduct* PJB, Budaya Perusahaan dan nilai-nilai GCG. Guna memastikan sosialisasi terlaksana secara efektif, PJB melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap proses pelaksanaan dan hasil/*output* mengenai pemahaman karyawan terhadap Standar Etika Perusahaan.

from the operational level to top management as part of the internalization stage of Corporate Culture. The socialization of the Code of Conduct is carried out through media channels throughout the Company's Work Units, including BOD Talks, face-to-face socialization, email, website, intranet, visual management, and internal forums. For new employees, socialization is carried out by the GCG team during the briefing on PJB's Code of Conduct, Corporate Culture, and GCG values. To ensure that the socialization is carried out effectively, PJB evaluates and measures the implementation process and the results/outputs regarding employees' understanding of the Company's Code of Conduct.

Penegakan Standar Etika Perusahaan
Code of Conduct Implementation

Implementasi Standar Etika Perusahaan di lingkungan PJB di*monitoring* secara berkala untuk memastikan bahwa setiap insan PJB taat atas setiap ketentuan yang diatur didalamnya dan pengeloaan Perusahaan telah dilaksanakan secara beretika. PJB berkomitmen menindak tegas setiap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap Standar Etika Perusahaan. Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan, dan yang bersangkutan dijatuhi sanksi sesuai jenis dan tindakan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku di PJB. Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi atas penerapan Standar Etika Perusahaan sesuai dengan mekanisme Intenalisasi Budaya Perusahaan.

Perusahaan menyediakan fasilitas pengaduan atas pelanggaran dalam mendukung penegakan Standar Etika Perusahaan. Terdapat dua saluran pengaduan yang disediakan yaitu melalui laporan kepada atasan langsung dan mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Setiap insan PJB didorong berperan aktif dan wajib melaporkan apabila terdapat indikasi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan.

The implementation of the Company's Code of Conduct is monitored regularly to ensure that every PJB employee complies with every provision stipulated therein and that the Company's management has been carried out ethically. PJB is committed to taking firm action against any violators following the provisions that have been set as a form of disciplinary enforcement of the Company's Code of Conduct. Employees who are proven to have committed violations are examined by the Employee Discipline Violation Examination Team, and those concerned are subject to sanctions based on the type and act of violation based on the applicable provisions in PJB. The Company periodically evaluates the implementation of the Code of Conduct following the Corporate Culture Internalization mechanism.

The Company provides a complaint facility for violations in support of the enforcement of the Code of Conduct. There are two complaint channels provided: direct reports to the supervisor and the Whistleblowing System (WBS) mechanism. Every PJB employee is encouraged to play an active role and is required to report if there are indications of actions that can be categorized as violations of the Company's Code of Conduct.

Sanksi Pelanggaran Standar Etika Perusahaan
Code of Conduct Disciplinary Sanctions

Pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran Standar Etika Perusahaan dilakukan berdasarkan mekanisme internal PJB yang mengacu pada Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No.0009.P/019/DIR/2021 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Insan PJB yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi disiplin untuk memberikan efek jera dan meminimalisir (mitigasi) dampak risiko *fraud* yang dapat mempengaruhi kinerja dan citra PJB berupa:

Sanctions are given to perpetrators of violations of the Company's Code of Conduct based on PJB's internal mechanism which refers to the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No.0009.P/019/DIR/2021 concerning the Employee Discipline Regulations of PT Pembangkitan Jawa-Bali. PJB employees who are proven to have committed violations are given disciplinary sanctions to provide a deterrent effect and minimize (mitigate) the impact of fraud risk that can affect PJB's performance and image in the form of following sanctions.

Sanksi Disiplin Standar Etika Perusahaan
Disciplinary Sanctions to the Code of Conduct

Jenis Hukuman Types of Penalty	Sanksi Sanction		
	Pokok	Main	Tambahan Additional
Disiplin Ringan Light Discipline	1. Peringatan tertulis yang berlaku selama 3 (tiga) bulan; atau 2. Peringatan tertulis yang berlaku selama 6 (enam) bulan.	1. A written warning valid for 3 (three) months; or 2. A written warning valid for 6 (six) months.	-
Disiplin Sedang Moderate Discipline	1. Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS). 2. Peringatan tertulis 2 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Pemotongan Tunjangan Posisi (P2) sebesar 75%; dan b. Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS). 3. Peringatan tertulis 2 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP). 4. Peringatan tertulis 3 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP). 5. Peringatan tertulis 1 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Pemotongan Tunjangan Posisi (P2) sebesar 100%; b. Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP); dan c. Penurunan 1 grade.	1. Written warning 1 valid for 6 (six) months with the Talent Needs Adjustment Criteria (PPS). 2. 2 written warnings valid for 6 (six) months with: a. Deduction of Position Allowance (P2) by 75%; and b. Talent Criteria in Need of Adjustment (PPS). 3. The last 2 written warnings that are valid for 6 (six) months with the Talent Criteria in Need of Adjustment (SPP). 4. The last 3 written warnings that are valid for 6 (six) months with the Talent Criteria in Need of Adjustment (SPP). 5. The last 1 written warning that is valid for 6 (six) months with: a. Withholding of Position Allowance (P2) by 100%; b. Talent Criteria to Highly Adjust (SPP); and c. 1-Grade Demotion.	1. Demosi 2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1. Demotion 2. Claim for Compensation (TGR)
Disiplin Berat Severe Discipline	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Work Termination (PHK)	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Claim for Compensation (TGR)

STANDAR ETIKA PERUSAHAAN
CODE OF CONDUCT

Kualitas Penerapan serta Jumlah dan Sanksi Pelanggaran Standar Etika Perusahaan

Implementation Quality and Violation Quantity and Sanctions of Company's Code of Conduct

Selama tahun 2021, terdapat 1 (satu) pelanggaran disiplin di Perusahaan. Kualitas penerapan dan penegakan Standar Etika Perusahaan di PJB selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

In 2021, there was 1 (one) disciplinary violation in the Company. The quality of the implementation and enforcement of PJB's Code of Conduct for the last four years can be seen in the following graph:

Penegakan Pelanggaran Standar Etika Perusahaan Tahun 2018-2021
Enforcement of Code of Conduct Disciplinary Saction for 2018-2021

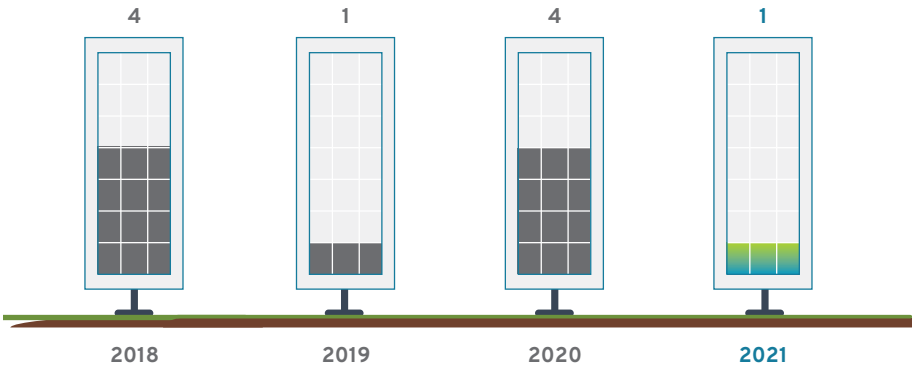

Bentuk pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran *Code of Conduct* yang telah dikeluarkan PJB tahun 2021 adalah sebagai berikut :

The forms of violations and sanctions against the Code of Conduct that has been issued by PJB in 2021 are as follows:

Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Pelanggaran Standar Etika
Types of Violations and Sanctions against the Code of Conduct

Bentuk Pelanggaran Types of Violation	Jumlah Karyawan Terkena Sanksi Disiplin Number of Employees Affected by Disciplinary Sanctions	Jenis Sanksi Types of Sanction	Hukuman	Penalty
Disiplin Sedang (Penyalahgunaan wewenang) Moderate Discipline (Positional abuse)	1	Sedang – Peringatan Tertulis I Moderate – Written Warning I	Sanksi Pokok : a) Pemotongan P2 100% selama 1 Semester b) Penghapusan hak atas IPK 1 Semester Sanksi Tambahan : a) Rotasi b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Principal Sanctions: a) 100% P2 Deduction for 1 Semester b) Elimination of the right to PAI for 1 Semester Additional Sanctions: a) Rotation b) Claim for Compensation (TGR)

Dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap penerapan Standar Etika Perusahaan serta perangkat pendukung lainnya, PJB mengevaluasi strategi sosialisasi dan kegiatan untuk mendorong kualitas penerapan dan penegakan Standar Etika Perusahaan agar mencapai sasaran tata kelola berkelanjutan. Standar Etika Perusahaan PJB sebagai pedoman yang bersifat dinamis, dikaji secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa muatannya senantiasa relevan dengan perkembangan Perusahaan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada pada Budaya Perusahaan.

To increase awareness of the implementation of the Code of Conduct and other supporting tools, PJB evaluates socialization strategies and activities to encourage the quality of implementation and enforcement of the Code of Conduct to achieve sustainable governance targets. PJB's Code of Conduct as a guideline is dynamic and reviewed regularly and continuously to ensure that the content is always relevant to the development of the Company while still considering the values that exist in the Corporate Culture.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

Sebagai upaya komitmen perusahaan dalam menjalankan setiap proses bisnis secara transparan dan akuntabel dengan memegang teguh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan kerja PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) maka PT PJB melakukan ratifikasi peraturan kebijakan Anti *Fraud* PT PLN (Persero) yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB Nomor 002.K/021/DIR/2020 dan Nomor 003.K/DK-PJB/2020 tentang Kebijakan *Anti Fraud* di Lingkungan PT PJB.

As an effort to the Company's commitment in running every business process in a transparent and accountable manner by upholding the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) principles in the working environment of PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), PT PJB ratified Anti-Fraud policy regulations of PT PLN (Persero) which was regulated in the Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PJB Number 002.K/021/DIR/2020 and Number 003.K/DK-PJB/2020 concerning Anti-Fraud Policy within PT PJB.

Program PJB Bersih
PJB Bersih Program

Program PJB Bersih menjadi salah satu wujud tanggung jawab Perusahaan dalam menciptakan perusahaan yang bersih dan terhindar dari tindak penyimpangan serta menjaga iklim bisnis yang sehat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan PJB Bersih melibatkan semua organ Perusahaan, karyawan, pejabat, dan pemangku kepentingan. Program tersebut diperkuat dengan Pedoman PJB Bersih yang ditetapkan Direksi melalui Keputusan Direksi No. 092.K/010/DIR/2014. Pedoman PJB Bersih adalah sebagai Pedoman bagj Direksi/Karyawan/Pemangku Kepentingan di lingkungan Perusahaan untuk terciptanya Perusahaan yang tangguh, unggul, bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk Korupsi, Kolusidan Nepotisme) dan memenuhi prjnsip-prinsip *Good corporate Governance* serta meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang sehat di lingkungan Perusahaan. Penyusunan pedoman PJB

PJB Bersih program is actualization of the Company responsibility in creating clean company and avoiding irregularities as well as maintaining the sound business climate in supporting sustainable development. PJB Bersih implementation covers all of the Company's organs, employees, officers, and stakeholders. The program is strengthened by the PJB Bersih Guidelines established by the Board of Directors through the Board of Directors Decree No. 092.K/010/DIR/2014. PJB Bersih Guidelines are as Guidelines for the Board of Directors/Employees/Stakeholders within the Company to create a strong, superior, dignified Company (clean from all forms of deviations and fraud including Corruption, Collusion and Nepotism) and fulfill the Good corporate Governance principles as well as to improve a sound corporate culture within the Company. PJB Bersih guidelines are also drafted by paying attention to the conformity of

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

Bersih turut memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan/perundang-undangan yang berlaku, serta kondisi lingkungan dan kegiatan bisnis yang dijalankan PJB. Pedoman PJB Bersih disosialisasikan kepada seluruh Insan PJB melalui media saluran informasi yang dimiliki PJB.

applicable laws and regulations, as well as environmental conditions and business activities carried out by PJB. The PJB Bersih Guidelines are socialized to all PJB personnel through media of information channels owned by PJB.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

Pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari implementasi PJB Bersih, Pengendalian Gratifikasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 092.K/010/DIR/2014. Komitmen Pengendalian Gratifikasi dipertegas dengan Surat Edaran Direksi Nomor 008.K/012/DIR/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Dewan Komisaris PJB turut mendukung program pengendalian gratifikasi dengan menyempurnakan kebijakan tersebut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 005.K/021/DIR/2017 dan Nomor 013.K/DK-PJB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Penerbitan SKB tersebut juga menjadi dasar pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di PJB. Kebijakan pengendalian gratifikasi merupakan kebijakan pendukung dalam mengimplementasikan Standar Etika Perusahaan.

Gratification Control is part of PJB Bersih implementation referring to the Board of Directors Decree No.092.K/010/DIR/2014. Commitment to Gratification Control is confirmed by the Board of Directors Circular No.008.K/012/DIR/2016 concerning Guidelines for Implementation of Gratification Reporting and Control in PT Pembangkitan Jawa-Bali. PJB's Board of Commissioners also supports gratification control program by refining policy through Joint Decree (JDL) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali No.005.K/021/DIR/2017 and No.013.K/DK-PJB/2017 concerning Guidelines for the Implementation of Gratification Reporting and Control in PT Pembangkitan Jawa-Bali. JDL issuance is also as the basis for the establishment of the Gratification Control Unit (GCU) at PJB. Gratification Control policy is a supporting policy in implementing the Company's Ethical Standards.

Ketentuan Pemberian Gratifikasi
Gratification Provisions

Pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 005.K/021/DIR/2017 dan Nomor 013.K/DK-PJB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali menguraikan ketentuan sebagai berikut:

1. Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan
   a. Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh Insan PJB dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima atau tidak sah secara hukum.

Gratification control stipulates that Joint Decree (JDL) of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali No.005.K/021/DIR/2017 and No.013.K/DK-PJB/2017 concerning Guidelines for Implementation of Gratification Reporting and Control in PT Pembangkitan Jawa-Bali describes the provisions related to the gratification types as follows:

1. Mandatory Gratification to Be Reported
   a. Gratification related to positions and contrary to the obligations or duties, as well as acceptances in any form obtained by PJB personnel from parties suspected of having relationship with the recipient position or legally invalid.

b. Penerimaan Gratifikasi harus ditolak, namun dapat diterima dalam hal:
   1) Gratifikasi tidak diterima secara langsung.
   2) Pemberi Gratifikasi tidak diketahui.
   3) Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima.
   4) Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan.
   5) Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Karyawan.
c. Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilaporkan kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi dan diteruskan kepada KPK.
d. Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain, namun tidak terbatas pada:
   1) Penerimaan Gratifikasi dari pihak ketiga / mitra kerja sebelum, selama dan setelah proses pengadaan barang dan jasa.
   2) Penerimaan Gratifikasi pada proses pelayanan pelanggan.
   3) Penerimaan Gratifikasi sebelum, selama dan setelah proses pemeriksaan, audit, monitoring dan/ atau evaluasi.
   4) Penerimaan Gratifikasi dari Mitra Kerja, pelanggan termasuk Anak Perusahaan yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima atau karena dapat mempengaruhi keputusan.
   5) Penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas/pejabat panitia pengadaan barang/jasa dari Mitra Kerja penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan.
   6) Penerimaan Gratifikasi oleh keluarga Insan PJB dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga.
   7) Penerimaan fasilitas *entertainment*, wisata, *voucher*, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban di Perusahaan dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Perusahaan.
   8) Penerimaan berupa potongan harga khusus pada saat Insan PJB membeli barang dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga.

b. Gratification Acceptance is required to be rejected, but it can be accepted in the event of the following:
   1) Gratification is not received directly.
   2) Gratification provider is unknown.
   3) The recipient has doubts on the qualifications of the gratification received.
   4) Gratification is given in the context of traditional activities or religious ceremonies.
   5) There are certain unrejected conditions, which is refusal which can cause damage to good institutional relations, endanger the recipient, and/or threaten the life/property or work of the employee.
c. Gratification acceptances as referred to in letter b are obliged to be reported to GCU no later than 10 (ten) working days after receiving the Gratifications and forwarded to CEC.
d. Gratification as referred to in letter a includes, but is not limited to the following:
   1) Gratification acceptance from the third parties/ work partners prior, during, and after the procurement process of goods and services.
   2) Gratification acceptance in the customer service process.
   3) Gratification acceptance prior, during, and after the inspection, audit, monitoring, and/or evaluation process.
   4) Gratification acceptance from Business Partners, customers including Subsidiaries which are known or reasonably suspected to be given due to authority related to the recipient position or since it can influence the decisions.
   5) Unofficial acceptances in the form of money, goods, facilities, or accommodation received by employees/officers of the goods/services procurement committee from the Work Partners providing goods and services related to the procurement process of goods and services that are being carried out.
   6) Gratification acceptance by the family of PJB Personnel from Work Partners and/or Third Parties.
   7) Acceptance of entertainment facilities, tours, vouchers, in activities related to the implementation of duties and obligations in the Company from Business Partners and/or Third Parties that are not relevant to the assignments received from the Company.
   8) Acceptance in the form of special discount when PJB Personnel purchase goods from Business Partners and/or Third Parties.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

9) Penerimaan *parcel* pada hari raya keagamaan atau hari besar lainnya yang berasal dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan dan/ atau berhubungan dengan jabatan.
10) Penerimaan sumbangan berupa *catering* atau fasilitas pendukung lainnya dari Mitra Kerja dan/ atau Pihak Ketiga pada saat karyawan/pejabat Perusahaan melaksanakan kegiatan terkait agama/ adat/tradisi.
11) Penerimaan uang saku, uang pengganti *transport* dan/atau fasilitas akomodasi (penginapan) oleh Insan PJB ditempat penugasan dimana yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima atau karena dapat mempengaruhi keputusan.
12) Penerimaan hadiah berupa uang/barang atau fasilitas lainnya kepada Insan PJB yang memiliki kewenangan dan/atau yang patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima atau karena dapat mempengaruhi keputusan penerimaan/penempatan/promosi karyawan.
13) Penerimaan hadiah berupa uang/barang atau fasilitas lainnya kepada Insan PJB yang memiliki kewenangan dan/atau yang patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima atau karena dapat mempengaruhi keputusan penilaian kinerja karyawan atau Unit Perusahaan.
14) Penerimaan uang/barang dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dan potensi benturan kepentingan kepada Insan PJB dalam suatu kegiatan seperti pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, upacara agama/adat/ tradisi lainnya yang melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan.
15) Penerimaan uang/barang dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dan potensi benturan kepentingan dengan penerima terkait musibah/ bencana yang dialami oleh Insan PJB yang melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.
16) Penerimaan honor, insentif, penghasilan lain dalam bentuk uang atau setara uang sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara/ narasumber/ konsultan atau fungsi serupa lainnya yang diterima Insan PJB dari instansi/lembaga lain yang berpotensi memiliki benturan kepentingan.

9) Acceptance of parcels on religious holidays or other holidays originating from Business Partners and/ or Third Parties having business relations with the Company and/or related to positions.
10) Donations acceptance in the form of catering or other supporting facilities from Business Partners and/or Third Parties when employees/ officers of the Company perform activities related to religion/ customs/traditions.
11) Acceptance of pocket money and replacement money for transportation and/or accommodation (lodgment) facilities by PJB personnel at the assignment where it is known or reasonably suspected to be given due to the authority related to the recipient's position or because it can influence the decisions.
12) Gift acceptance in the form of money/goods or other facilities to PJB personnel with the authority and/or which is reasonably suspected to be provided due to the authority related to the recipient's position or since it may influence the decision to accept/placement/promotion of the employees.
13) Gift acceptance in the form of money/goods or other facilities to PJB personnel with the authority and/or which is reasonably suspected to be provided due to the authority related to the recipient's position or since it may influence the performance assessment decisions of the employees or Company Units.
14) Money/goods acceptance from parties with position relationship and potential conflict of interests to PJB personnel in activity such as marriage, birth, aqiqah, baptism, circumcision, tooth cutting, other religious/traditional/ traditional ceremonies exceeding Rp1,000,000 (one million rupiah) per gift per person in each activity.
15) Money/goods acceptance from parties with position relationship and potential conflict of interests with recipients related to the disaster/ disaster experienced by PJB personnel exceeding Rp1,000,000.00 (one million rupiah) per gift per person.
16) Acceptance of honorarium, incentives, other income in the form of money or cash equivalent as compensation for carrying out their duties as speaker/resource person/consultant or other similar functions received by PJB Personnel from other agencies/institutions with the potential to have conflict of interests.

2. Gratifikasi Yang Tidak Wajib di Laporkan
   a. Gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan/ penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat dalam nilai batas yang wajar.
   b. Karakteristik Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah sebagai berikut:
      1) Berlaku Umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
      2) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      3) Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau
      4) Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
   c. Penerimaan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dapat diterima dan dinikmati (dimiliki pemanfaatannya) oleh penerima tanpa ada kewajiban pelaporan kepada UPG.
   d. Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas antara lain:
      1) Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/ bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan.
      2) Pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang Berlaku Umum.
      3) Pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum.
      4) Manfaat dari koperasi, organisasi kekaryawanan atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum.
      5) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/pelatihan/ *workshop*/konferensi atau kegiatan sejenis.

2. Non-Mandatory Gratification to Be Reported
   a. Gratifications that are generally accepted, having no conflict with applicable laws and regulations, considered as expression of hospitality/respect in social relations within the limits of reasonable value and gifts that are within the realm of customs, habits, and norms existing in the community within the limit reasonable values.
   b. The characteristics of Gratification that are not required to be reported are as follows:
      1) Generally Applicable, which is the giving condition applied equally in terms of type, form, requirements or value, for all participants and meets the principles of fairness or propriety;
      2) Having no conflict with the applicable laws and regulations;
      3) Considered as expression, hospitality, and respect in social relations among people within the limits of reasonable values; or
      4) Manifestation of gift in the realm of customs, habits, and norms living in society within the reasonable value limits
   c. Gratification acceptances that are not required to be reported, able to be received and enjoyed (owned by their use) by the recipient without any reporting obligation to GCU.
   d. Gratification as referred to in letters a and b above include the following:
      1) Gifts in the family, namely grandfather/ grandmother, father/mother/in-law, husband/ wife, child/son-in-law, adopted child/legal guardian, grandchildren, besan, uncle/aunt, brother/sister/in-law, cousin, and nephew, as long as there is no conflict of interest.
      2) Giving in the form of dishes or servings that are generally accepted.
      3) Giving in the form of profit or interest from fund placement, investment, or private share ownership which is generally accepted.
      4) Benefits from cooperatives, employee organizations or similar organizations based on generally accepted membership.
      5) Seminar kits in the form of a set of modules, stationery, placards, certificates, bags, and clothes with logos or information related to agencies that are generally accepted, which are accepted in seminars/trainings/workshops/conferences or similar activities.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

6) Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.

7) Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8) Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards,* atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan.
9) Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Karyawan yang bersangkutan.
10) Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan di internal Perusahaan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku di Perusahaan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan tidak terdapat benturan kepentingan.
11) Karangan bunga dengan nilai yang wajar yang berlaku secara umum.
12) Pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan.
13) Bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang diterima Insan PJB sebagai tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada butir 12 (dua belas) di atas paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan.
14) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi dalam setiap peristiwa yang tidak berpotensi memiliki benturan kepentingan.
15) Pemberian sesama karyawan dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak dalam bentuk setara uang yang tidak berpotensi memiliki benturan kepentingan.
16) Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau tidak dalam bentuk setara uang yang tidak berpotensi memiliki benturan kepentingan.

6) Prizes, appreciations, or awards from championships, events, or competitions participated at their own expenses and are not related to official services.
7) Rewards in the form of money or goods related to improving work performance given by the government in accordance with applicable laws and regulations.
8) Direct prizes/sweepstakes, discounts/rebates, vouchers, point rewards, or souvenirs that are generally applicable and not related to work.
9) Compensation or honorarium for professions outside of official activities that are not related to duties and obligations, as long as there is no conflict of interests and does not violate the regulations/ code of ethics of the Officer/Employee concerned.
10) Compensation received related to official activities within the Company such as honorarium, transportation, accommodation, and financing that have been stipulated in the provisions applicable in the Company as long as there is no double financing and there is no conflict of interest.
11) Wreaths with fair value that are generally accepted.

12) Gifts related to holding engagement parties, weddings, births, aqiqah, baptism, circumcision, tooth cutting, or other traditional/religious ceremonies are at most Rp1,000,000.00 (one million rupiah) per gift per person in each activity.

13) Gifts/prizes/souvenirs or similar objects received by PJB Personnel as guests/invitations in organizing party as referred to in point 12 (twelve) above are Rp1,000,000.00 (one million rupiah) per gift in each activity .

14) Giving related to the calamity or disaster experienced by the Gratification Recipient, husband, wife, child, father, mother, in-laws, and/ or son-in-law of the Gratification recipient in any event with no potential to have conflict of interest.
15) Giving to fellow employees in the context of farewell, retirement, promotion, and birthdays that are not in the form of money or not in the form of cash equivalents with no potential to have conflict of interest.
16) Giving to fellow employees that is not in the form of money or not in the form of money equivalent with no potential to have conflict of interest.

3. Gratifikasi Yang Terkait Kedinasan
   a. Gratifikasi yang diterima oleh Insan PJB dan ditujukan atau diperuntukkan kepada Perusahaan, bukan kepada personal yang mewakili Perusahaan.
   b. Karakteristik Gratifikasi dalam kedinasan adalah sebagai berikut:
      1) Diperoleh secara sah dalam penugasan resmi;
      2) Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan, yaitu dapat dimaknai terbuka dihadapan peserta lain atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan;
      3) Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk persyaratan dan nilai yang wajar yang berlaku secara umum untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda; dan
      4) Selain bentuk-bentuk Gratifikasi yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan dalam rangka kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf d.
   c. Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan harus dilaporkan kepada UPG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan/penolakan Gratifikasi terjadi untuk kemudian dilakukan penilaian oleh UPG.
   d. Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b antara lain, namun tidak terbatas pada:
      1) Penerimaan cinderamata dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas, dan kewajiban di perusahaan dari Mitra Kerja berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari PJB sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan dengan nilai yang wajar yang berlaku secara umum.
      2) Penerimaan hadiah pada waktu kegiatan kontes/ kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.
   e. Pemanfaatan penerimaan Gratifikasi terkait kedinasan dilakukan setelah mendapatkan penilaian oleh UPG dan penetapan oleh KPK, dengan cara:
      1) Digunakan oleh penerima untuk menunjang kinerja.
      2) Dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional, sebagai barang *display*, atau perpustakaan.

Pemberian gratifikasi yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi dibagi menjadi:

3. Gratification Related to Services
   a. Gratification received by PJB personnel and addressed or intended for the Company, not for the person representing the Company.
   b. Characteristics of Gratification in service are as follows:
      1) Legally obtained in official assignment;
      2) It is given openly in a series of official events, which can be interpreted openly in front of other participants or there is a acceptance for the gift given;
      3) Generally applicable, namely giving condition that is applied equally in terms of type, form of requirements and fair value which is generally applicable to all participants and meets the principle of fairness or propriety, as long as there is no double financing; and
      4) In addition to other forms of Gratification which are declared not obliged to be reported in the framework of official activities as referred to in Article 5 number 2 letter d.
   c. Acceptance of Gratification in service must be reported to GCU no later than 10 (ten) working days since the acceptance/rejection of Gratification occurs for later evaluation by GCU.
   d. Gratification as referred to in letters a and b include, but are not limited to the following:
      1) Acceptance of souvenirs in activities related to the implementation of duties and obligations in the Company from Business Partners based on official appointments and assignments from PJB as long as there is no double financing and accepted fair value at general.
      2) Acceptance of prizes during open contests/ competitions organized by other agencies or institutions based on official appointments or assignments.
   e. Utilization of Gratification acceptances related to services is carried out after obtaining assessment by the GCU and determination by the KPK, through the following:
      1) Used by the recipient to support performance.
      2) Used by the Company for operational activities, as display items, or libraries.

Gratification gift as regulated in the Guidelines for the Implementation of Gratification Reporting and Control are divided into the following:

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

1. Pemberian Dengan Tujuan Suap/Dianggap Suap Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dilarang untuk dilakukan oleh setiap Insan PJB, antara lain:
   a. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang karena jabatannya dapat mempengaruhi keputusan.
   b. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang karena jabatannya untuk melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan Perusahaan.
   c. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang karena jabatannya untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan Perusahaan.

2. Pemberian Gratifikasi Kepada Pihak Ketiga Pemberian Gratifikasi kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemberian Gratifikasi kepada instansi pemerintah, antara lain:
      1) Pemberian ditujukan langsung kepada instansi.
      2) Pemberian tidak boleh dalam bentuk uang atau setara uang, kecuali atas kerjasama kemitraan antar instansi dan Perusahaan, dengan menyalurkan ke rekening kas instansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
      3) Penerima pemberian dapat melalui wakil instansi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi penerima.
      4) Pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di instansi penerima.
      5) Pemberian tidak untuk tujuan suap/Gratifikasi yang dianggap suap.
   b. Pemberian Gratifikasi kepada korporasi/perusahaan, pemberian sebagaimana dimaksud bersifat resmi dan berlaku umum dalam kaitan hubungan bisnis sebagai Mitra Kerja, antara lain:
      1) Pemberian akomodasi atau fasilitas kepada korporasi/perusahaan sebagai *counterparty* yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Perusahaan dan tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di korporasi/perusahaan penerima.

1. Giving with the Purpose of Bribery/Considered Bribery Giving to civil servants or state administrators in relation to their positions and contrary to their duties and obligations is prohibited to be carried out by every PJB employee, including:
   a. Giving to civil servants or state administrators who due to their positions mau influence decisions.
   b. Giving to civil servants or state administrators who due to their positions, do/do not act in the interest of the Company.
   c. Giving to civil servants or state administrators who due to their positions to influence other parties to do/do not act in the interest of the Company.

2. Giving of Gratification to the Third Parties Giving of Gratification to the Third Parties can be carried out provided that the following conditions are fulfilled:
   a. Giving Gratification tot the government agencies, among others:
      1) The gift is addressed directly to the agency.
      2) The gift may not be in the form of money or money equivalent, unless in partnership between agencies and the Company, by distributing it to the accountable agency cash account.
      3) The gift recipient can be through legitimate agency representative based on the appointment of the recipient agency.
      4) The gift does not conflict with the Gratification acceptance rules applicable at the recipient agency.
      5) Giving is not for the purpose of bribery/ Gratification which is considered as bribe.
   b. Giving Gratification to corporations/companies, the gifts as intended are official and generally applicable in terms of business relationships as Business Partners, including the following:
      1) Providing accommodation or facilities to corporations/companies as counterparty having business relationship with the Company, following the budget set by the Company and does not conflict with the Gratification acceptance rules applicable at the receiving corporations/ companies.

2) Pemberian akomodasi atau fasilitas kepada Mitra Kerja penyedia barang dan jasa dengan syarat tercantum dalam kontrak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Perusahaan dan tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di perusahaan Mitra Kerja penyedia barang dan jasa.
3) Pemberian dalam rangka kegiatan pemasaran termasuk promosi, *sponsorship* dan sumbangan.

c. Pemberian Gratifikasi kepada individu antara lain:
1) Pemberian kepada Mitra Kerja perorangan baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri sipil dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi dalam rangka kegiatan bisnis, *sponsorship* dan kegiatan lainnya yang bersifat resmi (dapat melalui surat, MoU, kerjasama lainnya).
2) Pemberian kepada Mitra Kerja pegawai negeri merupakan pemberian Gratifikasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap mitra kerja.
3) Pemberian kepada Mitra Kerja pegawai negeri merupakan pemberian Gratifikasi dalam hubungan sebagai mitra kerja bukan dalam hubungan dengan jabatannya.
4) Pemberian diatas termasuk pemberian dalam rangka kegiatan pemasaran, promosi, *sponsorship*, sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam kaitan hubungan bisnis sebagai Mitra Kerja.

d. Pemberian berdasarkan *underlying transaction* dalam rangkaian hubungan bisnis dengan pihak ketiga yang bersifat resmi dan berlaku umum serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
e. Pemberian telah dianggarkan oleh Perusahaan.
f. Pemberian dalam kegiatan *sponsorship* dan sumbangan harus memenuhi kelengkapan dokumen (proposal pengajuan pemberian dari penerima, bukti penggunaan pemberian, tanda terima Gratifikasi).
g. Pemberian tidak diperbolehkan dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.
h. Insan PJB wajib melaporkan kepada UPG dalam hal terjadi pemberian Gratifikasi kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas.
i. Segala bentuk pemberian kepada pihak ketiga harus memenuhi aspek efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

2) Providing accommodation or facilities to the Work Partner providing goods and services with the provisions stated in the contract based on the budget set by the Company and does not conflict with the Gratification acceptance rules applicable at the Company's Work Partner providing goods and services.
3) Giving in the context of marketing activities including promotions, sponsorships, and donations

c. Giving Gratification to individuals, among others:
1) Giving to individual Work Partners, both civil servants and non-civil servants in the form of gifts, facilities, and accommodation in the context of business activities, sponsorships, and other official activities (can be through letters, MoUs, and other collaborations).
2) Giving to civil servant working partner is gratification giving generally accepted and given to every work partner.
3) Giving to work partners of civil servants is the gratification giving in relation to work partners, not in relation to their positions.
4) The above giving include gifts in the context of marketing activities, promotions, sponsorships, donations, and other gifts that are official and generally accepted in relation to business relationships as Business Partners.

d. Giving based on underlying transaction in a series of business relationships with third parties that are official and generally applicable and do not violate applicable regulations.
e. The gift has been budgeted for by the Company
f. The gifts in sponsorship activities and donations are required to meet the completeness of the documents (proposal for submission of gifts from the recipient, proof of use of gifts, and acceptance of Gratification).
g. Giving is not allowed in the form that violates decency and law.
h. PJB personnel are required to report to GCU in the event of giving Gratification to the third party that is not in accordance with the above provisions.
i. All forms of giving to third parties are required to meet the aspects of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

Mekanisme Pelaporan
The Reporting Mechanism

Pelaporan gratifikasi yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan terkait pengendalian gratifikasi dilakukan dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut:

1. Penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi wajib dilaporkan oleh Insan PJB kepada UPG dengan mengisi formulir yang akan diatur dalam prosedur kerja, disertai dokumen pendukung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan.
2. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang yang mudah busuk/rusak/cepat kadaluarsa dalam batas kewajaran, Insan PJB wajib melaporkan kepada UPG paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan dan disertai tanda bukti penyerahan barang. Selanjutnya UPG melaporkan ke KPK bukti penyerahan barang yang telah diserahkan kepada yayasan/panti sosial kemasyarakatan.
3. Insan PJB dilarang menerima/memberi Gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan dan apabila Insan PJB dimaksud tidak melaporkannya maka dapat dilaporkan melalui mekanisme *Whistle Blowing System.*
4. UPG melaporkan penerimaan Gratifikasi yang wajib dilaporkan disertai dengan dokumen pendukung kepada KPK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan Gratifikasi.
5. KPK akan melakukan analisa, verifikasi dan klasifikasi serta memberikan penetapan status Gratifikasi atas laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh UPG paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
6. UPG membuat laporan implementasi penerapan pedoman ini kepada Direktur Utama secara periodik setiap semester.
7. UPG membuat rekapitulasi laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi serta melaporkannya kepada KPK secara periodik setiap semester.

Gratification reporting managed by Gratification Control Unit (UPG) based on the established provisions related to gratification control is carried out by reporting is as follows:

1. Acceptance, rejection, and giving of Gratification are obliged to be reported by PJB personnel to GCU by filling out a form that will be regulated in the work procedure, accompanied by supporting documents no later than 10 (ten) working days after the date of acceptance.
2. Gratification acceptances in the form of perishable/ damaged/quickly expired goods within reasonable limits, PJB personnel are required to report to GCU no later than 2 (two) working days after the date of acceptance and accompanied by proof of delivery of goods. Furthermore, GCU reports to the KPK the delivery evidence of the goods handed over to the foundation/ social institution.
3. PJB personnel are prohibited from receiving/giving gratification that are not permitted or having the potential for abuse of authority/position and if the concerned PJB personnel do not report it, it can be reported through the Whistleblowing System mechanism.
4. GCU reports acceptance of Gratification which must be reported along with supporting documents to KPK no later than 20 (twenty) working days from the date of acceptance of the Gratification report.
5. CEC will analyze, verify, and classify as well as determine the status of Gratification on the Gratification report submitted by GCU within 30 (thirty) working days at the latest.
6. GCU drafts report on the implementation of this guideline application to the President Director periodically every semester.
7. GCU recapitulates reports on acceptance, rejection, and giving of the gratification and reports them to CEC periodically every semester.

Sanksi Atas Pelanggaran Pedoman gratifikasi
Sanctions for Violation of Gratification Guidelines

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi disiplin karyawan berdasarkan Peraturan Disiplin Karyawan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari penerapan Standar Etika Perusahaan.

Violations of the provisions in this Gratification Control Guidelines will be subject to employee disciplinary sanctions based on Employee Disciplinary Regulations and applicable laws and regulations as part of Ethical Standards application of the Company.

Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
Report on Gratification Control Implementation

Unit Pengendalian Gratifikasi melaporkan secara berkala kegiatan pengendalian gratifikasi yang telah dilaksanakan kepada Direksi. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi PJB pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Laporan Penolakan, Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi oleh Insan PJB.
2. Penyampaian Laporan Kegiatan UPG Tahun 2020 dan 2021.
3. Penyampaian Himbauan Internalisasi Program Pencegahan Gratifikasi.
4. Partisipasi pada *E-Learning* Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi.
5. Partisipasi UPG dalam Bimbingan Teknis Terkait Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi.
6. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Survei *Awareness* Integritas Semester-1 2021.
7. Pelaksanaan Survei *Awareness* Integritas Semester I Tahun 2021 pada Aplikasi COS PJB.
8. Pemberitahuan Larangan Menerima *Parcel*/Bingkisan atau hadiah lainnya dalam Hari Raya Keagamaan.
9. Diseminasi Media Sosialisasi Pesan Anti-Gratifikasi.
10. Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi oleh Admin UPG Unit kepada Insan PJB.
11. Bimbingan Teknis Aplikasi *Compliance Online System* (COS) PJB dan Pengelolaan Gratifikasi.
12. Penyampaian Laporan Kegiatan UPG Semester II Tahun 2021.
13. Sosialisasi Implementasi SMAP dan Pencegahan Gratifikasi pada Forum Komunikasi Pelanggan & *Closing Collaborace* 2021.
14. Pelaksanaan Survei *Awareness* Integritas Semester II Tahun 2021 pada Aplikasi COS PJB.
15. Penyampaian Himbauan Internalisasi Program Pencegahan Gratifikasi.
16. Pemberitahuan Larangan Menerima *Parcel*/Bingkisan atau hadiah lainnya dalam peringatan Hari Natal dan Tahun Baru 2022.

Laporan gratifikasi yang diterima UPG PJB dari seluruh unit dan anak perusahaan sepanjang tahun 2021 berjumlah 115 laporan. Laporan ini terdiri dari 37 Laporan Penolakan Gratifikasi, 45 Laporan Penerimaan dan 33 Laporan Pemberian Gratifikasi.

Gratification Control Unit periodically reports gratification control activities carried out to the Board of Directors. Activities that have been carried out by PJB Gratification Control Unit in 2021 are as follows:

1. Report Management of Rejection, Acceptance and Granting of Gratification by PJB Personnel.
2. Submission of GCU Activity Report for 2020 and 2021.
3. Submission of Internalization Appeal for Gratification Prevention Program.
4. Participation in E-Learning Technical Guidance on Gratification Control.
5. GCU Participation in Technical Guidance Related to the Implementation of Gratification Control Program.
6. Coordination of Preparation for the Implementation of Integrity Awareness Survey on semester-1 2021.
7. Implementation of Integrity Awareness Survey for the First Semester of 2021 on the COS PJB Application.
8. Notification of Prohibition on Receiving Parcels or other gifts on Religious Holidays.
9. Dissemination of Media Socialization of Anti-Gratification Messages.
10. Socialization of Gratification Prevention by UPG Unit Admin to PJB Personnel.
11. Technical Guidance on PJB Compliance Online System (COS) Applications and Gratification Management.
12. Submission of GCU Activity Report for the Second Semester of 2021.
13. Socialization of ABMS Implementation and Gratification Prevention at the Customers Communication Forum & Closing Collaborace 2021.
14. Implementation of Integrity Awareness Survey for the Second Semester of 2021 on PJB COS Application.
15. Submission of Internalization Appeal for Gratification Prevention Program.
16. Notification of Prohibition on Receiving Parcels or other gifts in commemoration of Christmas and New Year's Day in 2022.

Gratification reports received by PJB GCU from all units and subsidiaries throughout 2021 amounted to 115 reports. This report consists of 37 Reports of Refusal of Gratification, 45 Reports of Acceptances and 33 Reports of Giving Gratification.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

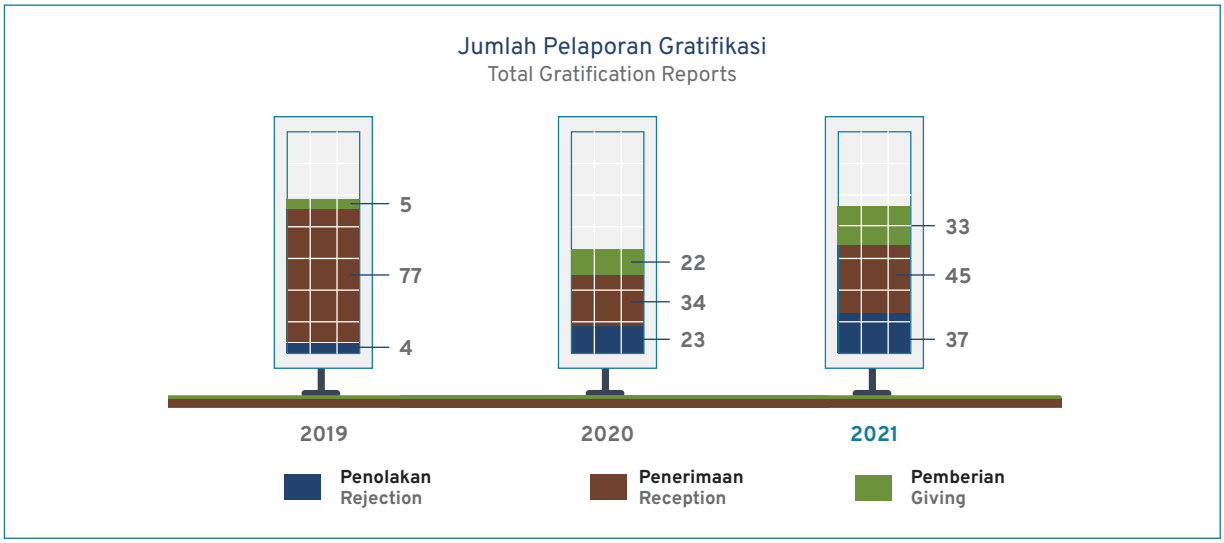

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Assets Report of State Official (LHKPN)

Pengelolaan dan administrasi LHKPN merupakan bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PJB untuk mendukung program anti korupsi. PJB secara internal menetapkan kebijakan LHKPN melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 004.K/021/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan LHKPN tersebut mengacu pada:

1. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
2. Permen BUMN No. PER-10/MBU/06/202 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/01/2018 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Direksi PT PLN Nomor 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT PLN (Persero).

LHKPN management and administration is part of GCG implementationwithin PJB to support anti-corruption program. PJB internally established LHKPN policy through a Joint Decree (SKB) between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali Number 004.K/021/DIR/2017 concerning Guidelines for the Report on the Assets of State Operators (LHKPN) within PT Pembangkitan Jawa-Bali. LHKPN policy refers to the following:

1. CEC Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to KPK Regulation Number 7 of 2016 concerning Procedures for Registration of Announcement and Audit of State Official Assets (LHKPN)
2. Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES No. PER-10/MBU/06/202 of 2021 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/01/2018 concerning Reporting of Assets of State Offical within the Ministry of State-Owned Enterprises
3. Regulation of the Board of Directors of PT PLN Number 0074.P / DIR / 2017 concerning Guidelines for Reports on the Assets of State Operators (LHKPN) within PT PLN (Persero).

Fungsi Pengelola LHKPN
LHKPN Management Function

Fungsi Pengelola LHKPN sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 004.K/021/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali dijalankan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Fungsi Pengelola LHKPN di lingkungan PLN sebagai Admin Instansi yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN yaitu Bidang Resiko Legal dan Kepatuhan pada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
2. Fungsi Pengelola LHKPN di lingkungan Perusahaan sebagai Admin Unit e-LHKPN yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN yaitu Bidang Kepatuhan Kantor Pusat PJB.
3. Tugas dan tanggung jawab dan Admin Instansi adalah:
   a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengelolaan LHKPN;
   b. Mensosialisasikan pemahaman tentang pedoman LHKPN, meng-*update* data Wajib LHKPN, menerima form aktivasi LHKPN, dan memfasilitasi penerusan form aktivasi LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
   c. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama PLN Group dalam pelaksanaan Pelaporan LHKPN;
   d. Memantau kepatuhan Wajib LHKPN dalam pelaporan LHKPN;
   e. Memfasilitasi pengumuman LHKPN;
   f. Memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait kepatuhan pelaporan LHKPN;
   g. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas efektivitas dari Pelaporan LHKPN;
   h. Sebagai admin tertinggi di Lingkungan PLN, mengkoordinasikan alur kerja dari semua Admin Unit e-LHKPN, dan memonitor pelaksanaannya.
4. Tugas dan tanggung jawab dari Admin Unit e-LHKPN adalah :
   a. Mensosialisasikan pemahaman serta teknik pelaporannya sesuai pedoman LHKPN kepada Wajib LHKPN, di lingkungan Perusahaan;
   b. Meng-*update* data Wajib LHKPN, menerima *form* aktivasi LHKPN, dan memfasilitasi penerusan *form* aktivasi LHKPN ke Admin Instansi;

LHKPN Function Manager as stipulated in the Joint Decree Number 004.K/021/DIR/2017 concerning Guidelines for the Report on the Assets of State Official (LHKPN) within PT Pembangkitan Jawa-Bali is carried out in according to the following provisions:

1. LHKPN Manager function within PLN is as Institutional Admin with special authority over LHKPN management, namely the Legal Risk and Compliance Department in the Risk Management and Compliance Division.
2. LHKPN Manager function within the Company is as the Admin Unit of the e-LHKPN with special authority over the LHKPN management, namely the Compliance Department of PJB Head Office.
3. Duties and responsibilities of the Institution Admin are as follows:
   a. Preparing a series of rules, technical instructions, and other similar requirements to support the implementation of LHKPN management;
   b. Disseminating understanding of LHKPN guidelines, updating mandatory LHKPN data, receiving LHKPN activation forms, and facilitating submission of LHKPN activation forms to the Corruption Eradication Commission;
   c. Coordinating, consulting, and corresponding to KPK on behalf of the PLN Group in the implementation of LHKPN Reporting;
   d. Monitoring mandatory LHKPN compliance in LHKPN reporting;
   e. Facilitating the announcement of LHKPN;
   f. Providing follow-up recommendations regarding compliance with LHKPN reporting;
   g. Monitoring and evaluating the effectiveness of LHKPN Reporting;
   h. As the highest admin in the PLN Environment, coordinating the workflow of all e-LHKPN Admin Units and monitoring the implementation.
4. The duties and responsibilities of the e-LHKPN Admin Unit are as follows :
   a. Disseminating the understanding and reporting techniques according to LHKPN guidelines to LHKPN Mandatory within the Company;
   b. Updating mandatory LHKPN data, receiving LHKPN activation forms, and facilitating the LHKPN activation forms forwarding to Institutional Admins;

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

c. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Admin Instansi atas nama Perusahaan dalam pelaksanaan laporan LHKPN;
d. Monitoring dan evaluasi kepatuhan Wajib LHKPN pada Perusahaan dalam pelaporan LHKPN;
e. Membuat laporan implementasi pedoman ini kepada Direktur Utama secara periodik;
f. Menerima konsultasi dan memfasilitasi pengumuman LHKPN Wajib LHKPN di Perusahaan.

Bidang kepatuhan kantor pusat berkoordinasi dengan Fungsi Kepatuhan unit dan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi (AP/PA) untuk membantu kelancaran pelaksanaan pelaporan LHKPN di masing-masing Unit.

c. Coordinating, consulting, and corresponding to the Institution Admin on behalf of the Company in the implementation of the LHKPN report;
d. Monitoring and evaluating of the Company's mandatory LHKPN compliance in reporting LHKPN;
e. Drafting periodic reports on the implementation of these guidelines to the President Director;
f. Receiving consultations and facilitating the announcement of LHKPN Mandatory LHKPN in the Company.

The head office compliance area coordinates with the Compliance Function of units and subsidiaries and associated companies (SAC) to assist the smooth implementation of LHKPN reporting in each Unit

Pejabat Wajib LHKPN
LHKPN Mandatory Officer

Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 004.K/021/DIR/2017 pasal 4 adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris Perusahaan
2. Direksi Perusahaan;
3. Wakil Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
4. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan struktural yang meliputi Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar dan Supervisor Atas;
5. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan fungsional yang meliputi Fungsional 1, Fungsional 2, dan Fungsional 3; dan
6. Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.

Bidang Kepatuhan secara berkala melakukan *monitoring* untuk mengetahui perubahan jumlah Wajib LHKPN dikarenakan jumlah Wajib LHKPN PJB mengalami pergerakan yang dinamis pada tiap periodenya. Daftar wajib LHKPN PJB sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 838 dengan rincian sebagai berikut :

Mandatory Officer are required to report LHKPN as stipulated in the LHKPN policy based on Joint Decree Number 004.K /021/DIR/2017 article 4 is as follows:
1. The Company's Board of Commissioners
2. The Company's Board of Directors;
3. Company representatives assigned as Directors or Commissioners in Subsidiaries and Affiliated Companies;
4. Company employees at structural levels which include Upper Management, Middle Management, Basic Management, and Upper Supervisors;
5. Company employees at functional positions which include Functional 1, Functional 2, and Functional 3; and
6. Procurement Planning Officer and Procurement Implementing Officer.

The Compliance Sector monitors to determine changes in total LHKPN Mandatory due to total LHKPN PJB Mandatory experiencing dynamic movements in each period. The list of mandatory LHKPN PJB up to the end of 2021 amounted to 838 with the following details :

Daftar Wajib Lapor LHKPN Tahun 2021
List of LHKPN Mandatory Reporting in 2021

No.	Jenjang Jabatan Position Level	Jumlah Total
1	Direktur PJB serta Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PJB Board of Director , Subsidiaries, and Affiliations	40
2	Komisaris PJB serta Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PJB Board of Commissioner, Subsidiaries, and Affiliation	4
3	Manajemen Atas Top Level Management	2
4	Manajemen Menengah Middle Level Management	75
5	Manajemen Dasar Basic Level Management	252
6	Supervisor Atas Top Level Supervisor	391
7	Pejabat Perencana Pengadaan (Supervisor Dasar) Procurement Planning Officer (Basic Supervisor)	8
8	Pejabat Pelaksana Pengadaan (Supervisor Dasar) Procurement Planning Officer (Basic Supervisor)	3
9	Fungsional 1 Functional 1	2
10	Fungsional 2 Functional 2	10
11	Fungsional 3 Functional 3	51
Jumlah Total		**838**

Perusahaan memastikan pemenuhan kepatuhan PJB terhadap pelaporan LHKPN melalui Bidang Kepatuhan yang melakukan *monitoring* melalui *e-filing*. Penyampaian LHKPN Tahun 2021 kepada KPK telah dilakukan secara tepat waktu oleh 838 Wajib LHKPN melalui e-lhkpn.kpk.go.id atau telah mencapai 100% dari total Wajib LHKPN.

The Company ensures the fulfillment of PJB compliance with LHKPN reporting through the Compliance Sector which monitors through e-filing. The delivery of 2021 LHKPN to CEC has been carried out in a timely manner by 838 LHKPN Mandatory through e-lhkpn.kpk.go.id or has reached 100% of the total LHKPN Mandatory.

Benturan Kepentingan
Conflict of Interests

Implementasi kebijakan anti korupsi juga dilakukan dengan menetapkan ketentuan terkait benturan kepentingan. Benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi/golongan Insan Perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan dan menimbulkan kerugian Perusahaan. Kebijakan Benturan Kepentingan merupakan kebijakan pendukung atas implementasi Standar Etika Perusahaan.

The implementation of anti-corruption policies is also carried out by establishing provisions related to conflict of interests. Conflict of interests is situation where there is difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the Company's personnel so that it may affect the Company performance and cause losses to the Company.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

Keputusan dan transaksi yang dilakukan oleh pejabat berwenang terkait kegiatan pengelolaan perusahaan harus terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan semeta-mata untuk pencapaian tujuan perusahaan. Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perusahaan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Decisions and transactions carried out by the authorized officials related to the Company management activities must be free from conflict of interests and arbitrarily for the achievement of the Company goals. The Board of Directors is prohibited from carrying out actions with conflict of interests and taking personal advantage, either directly or indirectly from the decision-making and activities of the Company concerned other than legitimate income.

Ketentuan Terkait Benturan Kepentingan
Provisions Related to Conflict of Interests

Keberpihakan Insan PJB kepada selain Perusahaan akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi dapat menimbulkan benturan kepentingan. Bentuk keputusan dan transaksi yang mengandung beturan kepentingan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian izin, rekomendasi dan/atau persetujuan dari Insan PJB yang diskriminatif.
2. Pengangkatan Insan PJB berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Insan PJB lainnya atau pihak lainnya yang melanggar prosedur.
3. Pemilihan Mitra Bisnis oleh Insan PJB berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
4. Menggunakan aset Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
5. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

The partiality of PJB personnel to other than the Company due to influence, close relationships, dependencies, and/or the provision of gratification may cause conflict of interests. The forms of decisions and transactions containing conflict of interest are as follows:

1. Granting permits, recommendations and/or approvals from discriminatory PJB Personnel.
2. Appointment of PJB Personnel based on close relationship/recompense/recommendation/influence from other PJB Personnel or other parties violating the procedures.
3. Selection of Business Partners by PJB Personnel based on unprofessional decisions.
4. Using Company assets and confidential information for personal gain.
5. Assessing the influence of other parties and not following the norms, standards, and procedures.

Dalam mendukung implementasi dari Standar Etika Perusahaan, PT PJB telah menerbitkan kebijakan terkait benturan kepentingan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB Nomor 003.K/021/DIR/2020 dan 004.K/DK/PJB/2020 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT PJB. Dalam kebijakan tersebut diatur lebih lanjut mengenai pencegahan yang harus dilakukan oleh Insan Perusahaan yaitu:

1. Melaporkan Dokumen Pemilik Manfaat (Dokumen yang menyatakan kepemilikan aset/saham/obligasi yang dimiliki oleh Insan Perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan) sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menghindari perangkapan jabatan;
3. Menolak dan menghindari pemberian hadiah/Gratifikasi yang terkait jabatan;

In supporting Ethical Standards implementation of the Company, PT PJB had issued policies related to conflict of interests as stated in the Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PJB Number 003.K/021/DIR/2020 and 004.K/DK/PJB/2020 concerning Conflict of Interests Management within PT PJB. In this policy, it is further regulated regarding the prevention that must be carried out by company personnel, including:

1. Reporting beneficial owner documents (documents stating ownership of assets/shares/bonds owned by Company personnel related to the Company's business activities) following the applicable regulations;
2. Avoiding the concurrent position;
3. Refusing and avoiding giving gifts/Gratification related to the position;

4. Menghindari melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan saat ini yang dapat mengganggu pekerjaan saat ini;
5. Membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada perusahaan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
6. Menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang dapat dipersepsikan Benturan Kepentingan oleh publik;
7. Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
8. Mendorong perbaikan sistem pengelolaan Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan/kebijakan Benturan Kepentingan dan memfasilitasi pengelolaannya jika terjadi; dan
9. Insan Perusahaan yang telah purnakarya, mengundurkan diri, atau diberhentikan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan/manajemen yang berwenang dalam pengambilan keputusan pada perusahaan pesaing, Mitra Usaha, atau calon Mitra Usaha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak terbitnya keputusan purnakarya, pengunduran diri, atau pemberhentian tersebut.

Sebagai informasi tambahan, pencegahan benturan kepentingan di PT PJB juga dilakukan dengan penyampaian Pakta Integritas setiap tahun oleh Insan Perusahaan, yang berisikan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan akan mencegah/menangani benturan kepentingan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

4. Avoiding doing other work outside of the current job that may interfere with the current work;
5. Limiting or avoiding ownership of assets in other companies related to duties performance;
6. Avoiding and limiting yourself to interacting directly with the related parties that are prohibited by applicable rules and regulations or that may be perceived as Conflict of interests by public;
7. Limiting and reducing personal interests that may affect duties performance;
8. Encouraging the improvement of Conflict of Interests management system in the Company to close loopholes in violations of the Conflict of Interest rules/policies and facilitating their management in term of occurrence; and
9. The Company's personnel who have retired, resigned, or been dismissed must not be involved in the management/ management authorized in making decisions at competitors, Business Partners, or prospective Business Partners within 6 (six) months from the issuance of the retirement decision, resignation, or dismissal.

As additional information, the prevention of conflict of interests in PT PJB is also carried out by submitting an Integrity Pact every year by the Company Personnel, which contains a statement that they have no conflict of interest and will prevent/handle conflict of interests so as not to cause losses to the Company.

Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan
Conflict of Interest Reporting Mechanism

Insan PJB harus berkomitmen, mendukung dan bertanggung jawab atas segala bentuk upaya pencegahan benturan kepentingan dan wajib melaporkan apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, melalui:

1. Konfirmasi Setiap Bulan
   Insan Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan situasi benturan kepentingan yang dialaminya setiap bulan melalui aplikasi *Compliance Online System* (COS). Konfirmasi ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran Insan Perusahaan mengenai benturan kepentingan.

PJB personnel must be committed, supportive and responsible for all forms of conflict-of-interest prevention efforts and must report in case there is a Conflict-of-Interest situation, through the following:

1. Monthly Confirmation
   The Company personnel are required to report conflict of interests situations they experience every month through the Compliance Online System (COS) application. This confirmation is carried out to grow awareness of the Company personnel regarding conflict of interests.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

2. Atasan Langsung
   Insan perusahaan yang mengalami benturan kepentingan wajib mendeklarasikan situasi benturan kepentingan yang dialaminya kepada Atasan Langsung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Atasan langsung yang bersangkutan. Deklarasi tersebut disampaikan melalui Surat Pernyataan Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung dan pelaksanaan atas surat pernyataan tersebut akan dimonitoring oleh Bidang Kepatuhan.
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System*
   Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan PJB atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan.

2. Direct Supervisor
   The Company personnel having conflict of interest must declare the situation of conflict of interest to their Direct Supervisor for follow-up by the direct supervisor concerned. The declaration is submitted through a Statement of Conflict of Interest to the Direct Supervisor and the implementation of the integrity pact will be monitored by the Compliance Department.

3. Violation Reporting System /Whistle Blowing System
   Reporting through the Whistleblowing System/Violation Reporting System is carried out in the event the complainant is PJB Personnel or other parties (Customers, Business Partners, and the Community) with direct involvement, but are aware of the existence or potential of Conflict of Interests in the Company.

Sanksi Atas Pelanggaran Benturan Kepentingan
Sanctions for the Conflict of Interests Violations

Keputusan dan transaksi yang terbukti bahwa didalamnya terdapat Benturan Kepentingan merupakan pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan. Perusahaan menindak secara tegas setiap pelanggaran akibat benturan kepentingan yang berpotensi merugikan PJB dan akan memberikan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Decisions and transactions that are proven to be Conflict of Interests are Ethical Standards violation of the Company. The Company strictly acts on any violations due to conflict of interests with potential to harm PJB and will provide sanctions based on the provisions applicable in the Company.

Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan
Statement of No Conflict of Interests

Pada tahun 2021, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah menandatangani pakta integritas berupa penyataan bebas benturan kepentingan dan diperbaharui secara berkala setiap tahun. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang memiliki potensi benturan kepentingan tidak diperkenankan ikut serta dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan Perusahaan.

In 2021, all of the Board of Directors and Board of Commissioners in office had signed an integrity pact in the form of conflict-of-interest-free statements and are updated regularly every year. In line with this statement, the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to avoid domination by any party, not affected by certain interests, free from conflict of interests and from all influences or pressures, so as to carry out decision making objectively. For members of the Board of Commissioners and Board of Directors and their duties and obligations, they must always prioritize economic interests of the Company above the economic interests of individuals or families, or other parties. Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors who have potential conflict of interests are not allowed to participate in the process of discussing and making decisions of the Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan berupaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih dalam rangka mendorong efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan serta meningkatkan kepercayaan *stakeholder* kepada PJB. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan yang terjadi pada Perusahaan yang disebut sistem pelaporan pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS). Kebijakan ini merupakan bagian dari penegakan Standar Etika Perusahaan sebagai komitmen Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan berkelanjutan, dan *Whistleblowing System* (WBS) menjadi bagian dari *soft structure Good Corporate Governance.*

The Company strives to actualize clean corporate governance in order to encourage the efficiency and effectiveness of goal achievement as well as enhance the stakeholders trust to PJB. One of the policies implemented is regarding reporting on alleged irregularities in the Company called the Whistleblowing System (WBS). This policy is part of Ethical Standards enforcement of the Company as the Company's commitment to running business activities in a professional and sustainable manner, and the Whistleblowing System (WBS) is part of soft structure Good Corporate Governance.

Kebijakan *Whistleblowing System*
Whistleblowing System Policy

Pedoman penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan PJB merupakan kebijakan internal yang ditetapkan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 004.K/021/DIR/2020 dan Nomor: 007.K/DK-PJB/2020 sebagai pemutakhiran atas Keputusan Direksi Nomor: 095.K/010/DIR/2012.

Guidelines for Whistleblowing System (WBS) implementation within PJB in the form of internal policy determined in 2020 following Joint Decree (JDL) between the Board of Directors and the Board of Commissioners No.004.K/021/DIR/2020 and No.007.K/DK/PJB/2020 as the update of the Board of Directors Decree No.095.K/010/DIR/2012.

Ketentuan pokok yang diatur dalam kebijakan WBS antara lain: Tujuan, Sasaran dan Manfaat; Penanganan Pelaporan Pelanggaran; Perlindungan Kepada Pelapor; Pemberian Insentif; Laporan Palsu; Batas Waktu Pelaporan Pelanggaran; Hubungan Antar Proses dalam WBS.

The main provisions stipulated in the WBS policy include: Objectives, Targets, and Benefits; Process for Handling Reports of Violation Complaints; Protection for the Whistleblower; Providing Incentives; Fake Reports; Deadline for Reporting/Reporting Violations; WBS Processes Interconnection.

Sosialisasi Kebijakan *Whistleblowing System*
Socialization of Whistleblowing System Policy

Perushaan mendorong peran serta setiap unsur Perusahaan baik internal maupun eksternal dan memberikan pemahaman akan pentingnya penerapan WBS dalam mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih. PJB secara rutin melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan kebijakan WBS. Kebijakan WBS dikomunikasikan melalui media komunikasi visual (*website*, media elektronik, dll) serta forum tatap muka (*Focus Group Discussion, Supplier Gathering, Customer Gathering*, dll).

The Company encourages participation by every Company personnel, both internal and external, and provides an understanding of the importance of WBS implementation in realizing clean management of the Company. PJB routinely conducts socialization in order to increase the effectiveness of WBS policy implementation. WBS policy is communicated through visual communication medias (website, electronic media, etc) as well as face-to-face forum (Focus Group Discussion, Supplier Gathering, Customer Gathering, etc).

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pengelola Pelaporan Pengaduan Pelanggaran
Whistleblowing Management

Perusahaan menetapkan Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran sebagai pengelola WBS di lingkungan PJB. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Karyawan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK).

1. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
   a. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibentuk dengan Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali dengan beranggotakan fungsi pengawasan internal, fungsi hukum dan fungsi kepatuhan.

   b. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk mengelola pelaporan/pengaduan pelanggaran, antara lain:
      1) Menerima pelaporan pelanggaran;
      2) Melakukan verifikasi;
      3) Menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut;
      4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan Pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor. Untuk keperluan ini anggota Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran mendapat akses terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan.

   Dalam menjalankan tugas Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta bantuan bidang/fungsi lain sesuai obyek pelaporan pelanggaran bila diperlukan.

   c. Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran juga mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

2. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK)
   a. TP2DK berfungsi untuk menindaklanjuti penerimaan pelaporan dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan. Dalam melakukan tugasnya, TP2DK berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Peraturan Disiplin Karyawan Perusahaan.
   b. Dalam hal pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran, maka TP2DK memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk diputuskan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS). Bila Terlapor adalah Karyawan Kantor Pusat, maka PYBMS adalah Direktur SDM dan Administrasi, bila Terlapor adalah Karyawan Unit, maka PYBMS adalah General Manager Unit.

The Company established Whistleblowing Management Committee as WBS manager within PJB. Further handling of violation reports especially those committed by Employees is conducted by the Employee Discipline Violation Inspection Team (EDVIT).

1. Whistleblowing Management Committee
   a. Whistleblowing System Management Committee was established with the Board of Directors Decision of PT Pembangkitan Jawa-Bali consisting of internal supervisory function, legal function, and compliance function.
   b. Whistleblowing Management Committee is in charge of managing reporting/complaints of violations, include the following:
      1) Receiving violation reporting;
      2) Verifying;
      3) Analyzing and selecting violation reports to decide whether further investigation is required to be conducted or not;
      4) Being responsible for the implementation of whistleblower protection program following the established policies by the Company, especially the confidentiality and security aspects of the Whistleblower. For this purpose, the member of Whistleblowing Management Committee have access to legal, financial, and operational assistances if necessary.

   In performing duties, Whistleblowing Management Committee may request assistance of other fields/functions in accordance with the object of violation reporting if necessary.
   c. Members of Whistleblowing Management Committee have access of direct reporting to the President Director and the Board of Commissioners.

2. Employee Discipline Violation Inspection Team
   a. Employee Discipline Violation Inspection Team has function to make follow-up on the violations report through further inspection into the violations substances committed by the Employees. In performing its duties, TP2DK refers to the guidelines on the Employees Disciplinary Regulation of the Company.
   b. In case that the inspection is proven to have violation, TP2DK provides recommendation for sanctions against violation committed to be decided by the Authorized Officer to Give Sanctions (PYBMS). If the Reported Party is the Head Office Employee, the PYBMS is the Director of HC & Administration, and if the Reported Party is the Unit Employee, the PYBMS is the General Manager Unit.

Sarana, Mekanisme dan Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

Facility, Mechanisms and Follow-up Processes for Whistleblowing System

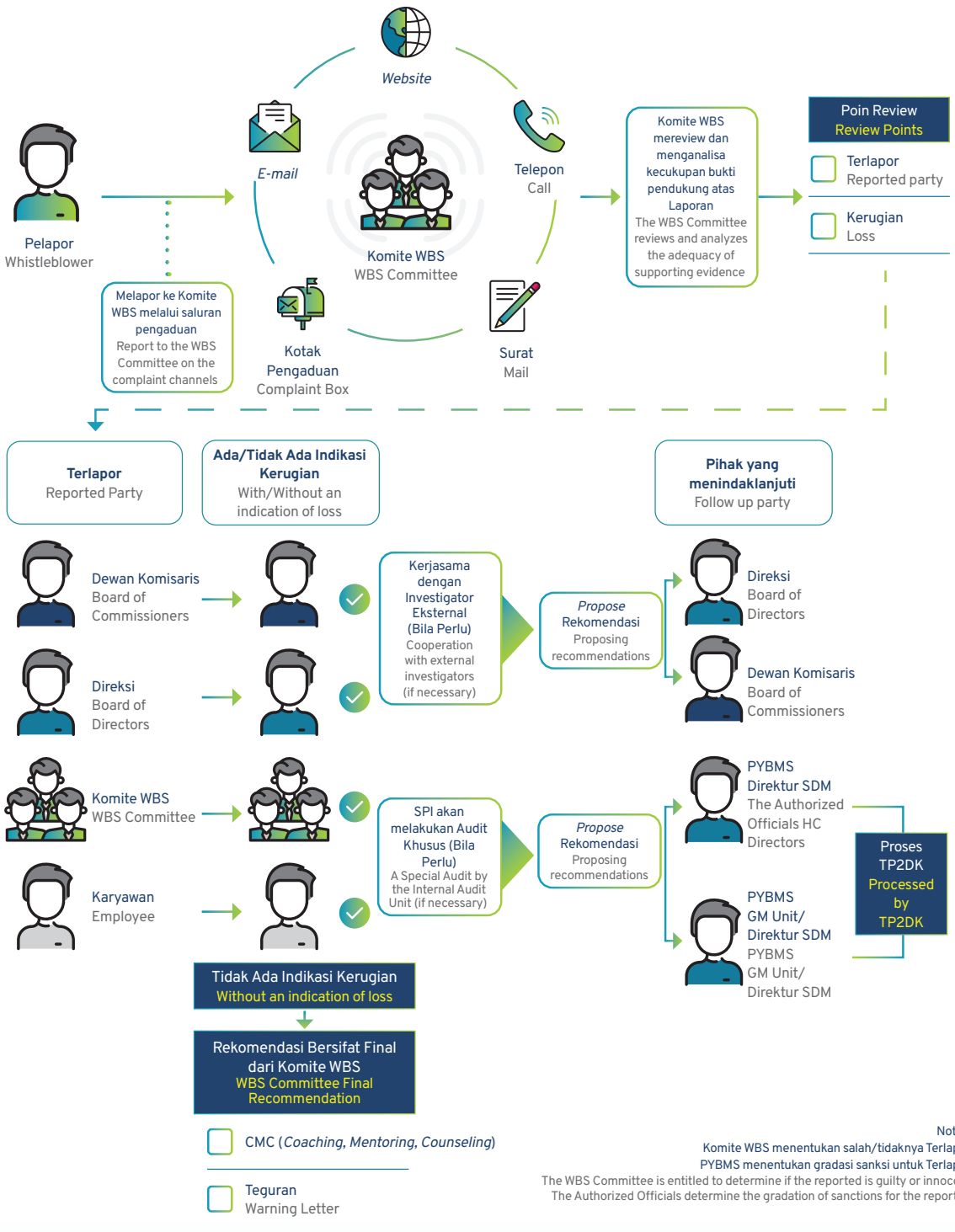

Notes:
Komite WBS menentukan salah/tidaknya Terlapor
PYBMS menentukan gradasi sanksi untuk Terlapor
The WBS Committee is entitled to determine if the reported is guilty or innocent
The Authorized Officials determine the gradation of sanctions for the reported

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing Mechanism

1. Perusahaan wajib menerima laporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, baik dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim). Semua laporan yang diterima wajib diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukti kuat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengarah kepada fitnah.
2. Pelaporan pelanggaran wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan disertai bukti pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran, diantaranya meliputi:
   a. Pelanggaran yang dilaporkan;
   b. Pihak yang terlibat/Terlapor;
   c. Waktu terjadinya pelanggaran;
   d. Tempat terjadinya pelanggaran;
   e. Bagaimana kejadiannya.
3. Saluran yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah:
   a. Surat menyurat dengan alamat:
      Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
      PT Pembangkitan Jawa-Bali
      Jalan Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231 Indonesia
   b. Kotak Pengaduan:
      1) Gedung PT Pembangkitan Jawa-Bali Kantor Pusat;
      2) Gedung Administrasi seluruh Unit Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali.
   c. Website dengan alamat www.ptpjb.com/wbs.
   d. Email dengan alamat pengaduan@ptpjb.com.
   e. Telepon/SMS/WhatsApp dengan nomor 08113388448.
   Saluran pelaporan di Unit Kerja dikelola oleh Unit Kerja dan dikomunikasikan secara periodik ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
4. Untuk mempermudah proses komunikasi dan klarifikasi, dapat dilakukan dengan cara:
   a. Tatap muka; dan/atau
   b. Telepon; dan/atau
   c. Email; dan/atau
   d. Surat menyurat/kotak pos; dan/atau
   e. Sarana komunikasi lainnya.

1. Company is obliged to accept the violation reports from internal and external parties, both from the Whistleblower including their identities or those exclude (anonymous). All reports received are required for further process, as long as it is able to provide strong evidence, be accounted, as well as not lead to defamation.
2. Violation reporting is required to be submitted clearly, accountable, and accompanied by the supporting evidence related to the violation, including the following:
   a. Violations reported;
   b. Parties involved/Reported Parties;
   c. Time of violations;
   d. Place of violations;
   e. How the violation occurred
3. Channels available to report violations are as follows:
   a. Correspondence with the following address:
      Whistleblowing Management Committee
      PT Pembangkitan Jawa-Bali
      Jalan Ketintang Baru No.11 Surabaya 60231 Indonesia
   b. Complaint Box:
      1) Head Office of PT Pembangkit Jawa-Bali;
      2) Administration Building of all Work Units in PT Pembangkitan Jawa-Bali.
   c. Website: www.ptpjb.com/wbs
   d. Email: pengaduan@ptpjb.com
   e. Telephone/SMS/WhatsApp: 08113388448
   Reporting channels in the Work Unit is managed by the Work Unit and periodically discussed to Whistleblowing Management Committee.
4. Communication and clarification processes can be facilitated through the following:
   a. Face-to-face; and/or
   b. Telephone; and/or
   c. Email; and/or
   d. Correspondence/mail box; and/or
   e. Other communication

Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran
Follow-up Process of Violation Reporting

1. Laporan pelanggaran ditujukan ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui saluran pelaporan yang tersedia.
2. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi untuk selanjutnya memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan pelanggaran tidak benar (tidak sesuai fakta) dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran (sesuai fakta) yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
4. Dalam proses verifikasi dan penentuan tindak lanjut, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mengklasifikasikan Terlapor sebagai berikut:
   a) Bila Terlapor adalah Karyawan
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada PYBMS untuk proses lebih lanjut. Usulan rekomendasi dapat berupa pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK bila jenis pelanggaran memiliki indikasi *fraud*;
      2) Bila tidak ada indikasi *fraud* maka usulan rekomendasi dapat berupa *Coaching Mentoring Conseling* (CMC) dan teguran kepada Karyawan yang bersangkutan;
      3) Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit dan memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk menugaskan SPI melakukan audit khusus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK sesuai ketentuan yang berlaku.
   b) Bila Terlapor adalah Direksi
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut;

1. Violation reports are addressed to Whistleblowing Management Committee through the available reporting channels.
2. Whistleblowing Management Committee verifies and subsequently decides whether further investigation of the whistleblowing report is required within 30 (thirty) days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) days.
3. In the event verification results signify that the violation report is incorrect (not in accordance with the facts) and there is not enough preliminary evidence then it will not be processed further. In the event verification results signify indication of violation (in accordance with facts) accompanied by sufficient preliminary evidence, then the complaint can be processed into investigation stage.
4. In the verification process and determining follow-up, Whistleblowing Management Committee classifies the Reported Parties as follows:
   a) In Case the Reported Party is Employee
      1) Whistleblowing Management Committee verifies and reports summary of the case as well as the proposed recommendations to PYBMS for further process. The proposed recommendations can be in the form of further examination by TP2DK if the type of violation has indications of fraud;
      2) In case there is no indications of fraud, the proposed recommendations can be in the form of Coaching Mentoring Counseling (CMC) and warning to the Employees concerned;
      3) In case according to the consideration of the types of violations are complex, complicated, and requiring more in-depth analysis for the evidence, Whistleblowing Management Committee may ask the Board of Directors to assign Internal Audit Unit for special audit at first prior to further audit by the TP2DK following the available provisions.
   b) In Case the Reported Party is the Board of Directors
      1) Whistleblowing Management Committee verifies and reports summary of the case as well as the proposes recommendations to the Board of Commissioners for further process;

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

2) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

c) Bila Terlapor adalah Dewan Komisaris
   1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Direksi untuk proses lebih lanjut;
   2) Direksi melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.

d) Bila Terlapor adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris
   1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut;
   2) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal.

e) Bila Terlapor adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
   Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan untuk sementara sampai menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan penggantian keanggotaan Komite.

5. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau Pejabat Lain yang diberi kuasa oleh Pemegang Saham sebagai Pejabat Penyerah Perkara.

2) Furthermore, the Board of Commissioners processes it to the violation reporting committed by the Board of Directors, including to decide whether cooperation with External Investigator is necessary or not. The results of further process are reported by the Board of Commissioners to the Shareholders.

c) In Case the Reported Party is the Board of Commissioners
   1) Whistleblowing Management Committee verifies and reports summary of the case as well as the proposes recommendations to the Board of Directors for further process;
   2) Furthermore, the Board of Directors processes it to the violation reporting committed by the Board of Commissioners, including to decide whether cooperation with External Investigator is necessary or not. The results of further process are reported by the Board of Directors to Shareholders.

d) In Case the Reported Party is the Board of Commissioners Supporting Organs
   1) Whistleblowing Management Committee verifies and reports summary of the case as well as the proposes recommendations to the Board of Commissioners for further process;
   2) Furthermore, the Board of Commissioners processes it to the violation reporting committed by the Board of Commissioners Supporting Organs, including to decide whether cooperation with External Investigator is necessary or not.

e) In Case the Reported Party is Member of Whistleblowing Management Committee
   In case the reported violator is a Member of Whistleblowing Management Committee, the concerned must be temporarily deactivated until the published results of verification and investigation. If it is not proven, the person concerned will be reactivated, but if it is proven, the Board of Directors may change the Committee membership.

5. In case the investigation results are proven to be violation that leads to criminal offense, it can be followed up with the applicable legal process to the law enforcement agencies with the Board of Directors or Other Officers authorized by the Shareholders as Case Submission Officer.

Perlindungan Terhadap Pelapor
Whistleblower Protection

Perusahaan berupaya mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya dengan memberikan perlindungan terhadap Pelapor. Perlindungan tersebut diberikan terhadap Pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS.

1. Jika Pelapor adalah pihak internal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atau pangkat;
   c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
   d. Catatan merugikan dalam *personal file record.*
2. Jika Pelapor adalah pihak eksternal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas tindakan balasan dari Terlapor atau Organisasi seperti:
   a. Diskriminasi dalam kerjasama usaha;
   b. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
3. Jika Pelapor adalah *Justice Collaborator*, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas laporan yang disampaikan. Apabila dalam proses investigasi Pelapor terbukti ikut bersalah dalam pelanggaran yang dilaporkan, maka kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan terhadap sanksi yang direkomendasikan TP2DK kepada PYBMS.
4. Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan) sebagaimana diatur pada pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pasal 12 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

The Company strives to encourage the violations reporting and ensure the safety of the Whistleblower and their family by providing protection to the Whistleblower. This protection is provided against whistleblowers of violations in good faith and the Company will comply with all related laws and regulations and best practices applicable in WBS implementation.

1. In case the Whistleblower is the internal parties of the Company, they will receive standard protection from the Company against adverse treatments, such as the following:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion;
   c. Harassment or discrimination in any form;
   d. Adverse records in the personal file record.
2. In case the Whistleblower is the external parties of the Company, they will receive standard protection from the Company against adverse treatments of retaliation from the Reported Parties or Organizations, such as the following:
   a. Discrimination in business cooperation;
   b. Discrimination in providing services.
3. In case the Whistleblower is a Justice Collaborator, they will receive standard protection from the Company against adverse treatments of the reports submitted. In the context during investigation process the Whistleblower is proven to be guilty for the violations reported, their testimony can be taken into consideration easing against sanctions recommended by TP2DK to the PYBMS.
4. Apart from the protection above, for the Whistleblowers with good faith, the Company will also provide legal protection (if necessary) as regulated in article 5 and article 10 of Law No.31 of 2014 concerning Amendment of Law No.13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, and article 12 of Government Regulation No.43 of 2018 concerning Procedures for Implementing Community Participation and Granting Awards in the Prevention and Eradication of Corruption Crimes, namely:

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
c. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Jika diperlukan, Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur pada pasal 5, pasal 10 dan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

a. Protection from criminal and/or civil claims;
b. Protection of personal safety, and/or family of the Reporting Party from physical and/or mental threats;
c. Protection of the Whistleblower assets;
d. Confidentiality of the Whistleblower identity;
e. Indirect information disclosure with the Reported Parties at every level of case investigation in the event that the violations include in court disputes.

If necessary, the Whistleblower is also able to request assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as regulated in article 5, article 10 and article 28 paragraph (3) of Law No.31 of 2014 concerning Amendment of Law No.13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection.

Insentif Bagi Pelapor
Incentives for Whistleblowers

Perusahaan dapat memberikan penghargaan/ insentif kepada Pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/ keuangan Perusahaan dapat diselamatkan. Bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan ditetapkan sesuai dengan mekanisme internal berdasarkan kebijakan Direksi dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

The Company may provide rewards/incentives to the Whistleblowers for proven violations so that the Company's assets/finances can be saved. The form and amount of the award given is determined based on the Board of Directors policy while maintaining the confidentiality of the Whistleblowers identity.

Pengaduan dan Penanganan Pelaporan
Incentives for Whistleblowers

Sepanjang tahun 2021, pengaduan yang masuk melalui WBS berjumlah 5 (lima) pengaduan dan berdasarkan verifikasi yang masuk ke tahap tindak lanjut sebanyak 5 (lima) laporan pelanggaran. Penanganan pelaporan yang masuk ke tahap tindak lanjut adalah sebagai berikut :

Throughout 2021, there were 5 (five) complaints submitted through WBS complaints and 5 (five) incoming violation reports based on verification got into follow-up stage. Handling of the submitted reporting to be in the follow-up stage is as follows:

Penanganan Pelaporan Tahap Tindak Lanjut
Handling Reports in the Follow-up Stage

No.	Pelapor Whistleblower	Kategori Laporan Pelanggaran Violation Category	Penanganan Handling	Sanksi/Tindak Lanjut Pengaduan yang telah Selesai Sanction/Finished Follow-Up
1	*Vendor*	Pelanggaran SOP Perusahaan terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa Violations on the Company SOP, specifically related to the procurement of goods and services	Komite WBS menghubungi Pelapor untuk mengkonfirmasi lebih lanjut namun tidak mendapatkan respon. Secara paralel Komite WBS melakukan pendalaman melalui proses audit oleh SPI pada unit yang dilaporkan. WBS committee contacted the Complainant for further confirmation got no response. In parallel, WBS Committee conducted a deepening through the audit process by IAU on the reported units.	Melakukan pembinaan dan *refresh training* untuk meningkatkan kompetensi pelaksana proses pengadaan. Coaching and refresh training to improve the competence of procurement process executives.
2	Perorangan Individual	Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan Action that may cause financial or non-financial losses to the Company or harm the Company interests	Komite WBS melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Pelapor WBS Committee confirmed and clarified to the Whistleblower and the Reported Person	Sesuai prosedur kerja Komite WBS, karena pihak terlapor bukan merupakan bagian dari PT PJB sehingga dalam hal ini Komite WBS memiliki keterbatasan wewenang untuk memproses laporan lebih lanjut. Namun demikian Komite WBS menyampaikan hasil konfirmasi Pelapor tersebut kepada Terlapor. According to the work procedure of WBS Committee, since the reported party is not part of PT PJB so the WBS Committee has limited authority to process further reports in this case. However, WBS Committee submitted the results of the Whistleblower's confirmation to the Reported Party.
3	*Vendor*	Pelanggaran SOP Perusahaan terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa Violations on the Company SOP, specifically related to the procurement of goods and services	Komite WBS melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Pelapor dan Terlapor WBS Committee confirmed and clarified to the Whistleblower and the Reported Person	Karena Pelapor tidak melaporkan adanya pelanggaran tetapi memberikan saran maka saran tersebut disampaikan Komite WBS kepada Terlapor pada saat dilakukan konfirmasi. Since the Whistleblower did not report any violations but gave advice, the suggestion was submitted by WBS Committee to the Reported Party at the time of confirmation.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

No.	Pelapor Whistleblower	Kategori Laporan Pelanggaran Violation Category	Penanganan Handling	Sanksi/Tindak Lanjut Pengaduan yang telah Selesai Sanction/Finished Follow-Up
4	Perorangan Individual	Ketidakjujuran Dishonesty	Komite WBS melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Pelapor dan Terlapor WBS Committee confirmed and clarified to the Whistleblower and the Reported Person	Tidak ada tindak lanjut karena yang terjadi bukan adanya pelanggaran tetapi *gap* informasi yang diperoleh Pelapor. There was no follow-up since what was happened not a violation but a gap in information obtained by the Whistleblower.
5	*Vendor*	Perbuatan Melanggar Hukum Unlawful Acts	Komite WBS melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Terlapor WBS Committee confirmed and clarified to the Whistleblower and the Reported Person	Menyelesaikan proses pembayaran lisensi produk milik Pelapor. Completed the payment process for the whistleblower's product license.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Whistleblowing System*
Monitoring and Evaluation of Whistleblowing System

Perusahaan menerima segala saran yang membangun dari setiap unsur Perusahaan baik internal maupun eksternal untuk mendorong efektivitas penerapan kebijakan WBS di lingkungan Perusahaan. Penerapan *Whistleblowing System* di*monitoring* secara berkala dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan *Whistleblowing System* sebagai bagian dari komitmen penerapan tata kelola yang baik. Pelaksanaan kebijakan *Whistleblowing System* disampaikan setiap semester dalam bentuk laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas *Whistleblowing System.*

The implementation of Whistleblowing System policy is submitted every semester in the form of reports to the President Director and the Board of Commissioners as manifestation of Whistleblowing System accountability. The implementation of Whistleblowing System is regularly monitored in order to ensure the effectiveness of Whistleblowing System policy as part of commitment to implementing the good corporate governance.

PERKARA PENTING
IMPORTANT CASES

Perkara penting mencakup setiap permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat. Perusahaan mencegah potensi munculnya permasalahan hukum yang dapat merugikan PJB dan para pemangku kepentingan serta menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan. Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat senantiasa dimonitoring dan dilaporkan secara berkala status penyelesaiannya.

Important cases include every legal issue currently faced by the Company, subsidiaries, as well as members of the Board of Commissioners and Board of Directors serving. The Company prevents the potential of legal issues that can harm PJB and stakeholders as well as resolves any legal issues faced by the Company. The settlement status of legal issues currently faced by the Company, subsidiaries, as well as serving members of the Board of Commissioners and Board of Directors is always monitored and reported periodically.

Perkara Hukum Perusahaan
The Company Legal Cases

Perkara hukum yang dihadapi Perusahaan dapat berupa permasalahan hukum yang timbul sejalan dengan proses perijinan yang ada di Perusahaan, yang timbul karena adanya sengketa perdata dan yang timbul sebagai akibat dari adanya dugaan tindak pidana yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan. Selama tahun 2021, kasus hukum yang dihadapi PJB adalah sebagai berikut:

Legal cases faced by the Company can be in the form of legal issues arising in line with the existing licensing process at the Company, arising due to civil disputes and resulted from alleged criminal acts related to business process of the Company. During 2021, the legal cases faced by PJB were as follows:

Jumlah Perkara Hukum Perusahaan
Total Legal Cases of the Company

Jenis Perkara Type of Case	Total	Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap) Settled (Already Has Permanent Legal Force)	Proses Penyelesaian In Settlement Process
Perkara Perdata/ Arbitrase Civil/Arbitration	2	1	1
Kasus Korupsi Corruption	0	0	0
Kasus Hubungan Industrial Industrial Relationship	0	0	0
Kasus Lain-lain Other Cases	0	0	0

PERKARA PENTING
IMPORTANT CASES

Penyelesaian Perkara Hukum Perusahaan
Legal Cases Settlement in the Company

Para Pihak Parties	Pokok Perkara Subject matter	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Effort	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan Influence/Risk to the Company
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 10/ Pdt.G/2020/PN.Lsm **Penggugat:** 1. PT Palma Nafindo Tergugat: 1. General Manager UBJOM PLTMG Arun 2. Direktur Utama PT PJB 3. Manajer Administrasi dan Umum UBJOM PLTMG Arun 4. Manajer Operasi UBJOM PLTMG Arun 5. Supervisor K3 dan Lingkungan UBJOM PLTMG Arun **Turut Tergugat:** -	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Palma Nafindo Pratama kepada PT PJB UBJOM PLTMG Arun terkait gagal lelang pada pengadaan jasa pemborongan pengamanan PT PJB UBJOM PLTMG Arun Tahun 2020.	Putusan banding sudah berkekuatan hukum tetap.	1. Mengikuti proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang dimulai sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan pembacaan putusan akhir pada bulan April 2021 dengan amar putusan menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang mengadili perkara. 2. Mengikuti proses banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dimulai sejak bulan April 2021 sampai dengan pembacaan putusan akhir pada bulan Juni 2021 dengan amar putusan menyatakan gugatan pembanding tidak dapat diterima.	Apabila Gugatan Penggugat diterima/ dimenangkan, maka PT PJB harus membayar ganti kerugian kepada para penggugat senilai Rp 7.727.796.238,40.
Lawsuit Against Law No. 10/Pdt.G/2020/PN.Lsm **Plaintiff:** 1. PT Palma Nafindo **Defendant:** 1. General Manager of PT PJB's Arun GEPP OMSBU 2. President Director of PT PJB 3. Administration & General Manager of Arun GEPP OMSBU 4. Operations Manager of Arun GEPP OMSBU 5. OHS and Environmental Supervisor of Arun GEPP OMSBU **Co-Defendant:** -	Lawsuit Against Law submitted by PT Palma Nafindo Pratama to PT PJB's Arun GEPP OMSBU related to the failed auction in the procurement of security services for PT PJB's Arun GEPP OMSBU in 2020	Appeal decision already has permanent legal force.	1. Participating in the civil court process at Lhokseumawe District Court began since October 2020 until the final verdict reading in April 2021, with a verdict that Lhokseumawe District Court was not authorized to adjudicate cases. 2. Participating in the appeal process at Banda Aceh High Court began since April 2021 until the final verdict reading in June 2021, with a verdict that the appeal cannot be accepted.	In case that the Plaintiff Claim is accepted/won, PT PJB is required to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp7,727,796,238.40.

Para Pihak Parties	Pokok Perkara Subject matter	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Effort	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan Influence/Risk to the Company
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 21/ pdt.G/2019/PN.Ckr **Penggugat:** 1. Ronald Manurung dkk **Tergugat:** 1. Budiawan Susantio 2. PT PLN (Persero) cq PT PJB UP Muara Tawar **Turut Tergugat** 1. BPN Kabupaten Bekasi 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi 3. Pemerintah Desa Segarajaya 4. Ahli Waris Alm. H.Serih bin Madang 5. PPAT Sementara Doktorandus Dwy Sigit Andrian, MM	Pada tahun 2018, Ronald Manurung dan rekan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Cikarang atas tanah seluas 11.918 m^2 yang telah dipergunakan oleh PLN dan PT PJB Unit Pembangkit Muara Tawar. Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik yang bersangkutan berdasarkan Girik, namun PT PJB telah memiliki HGB tanah tersebut. PT PJB telah memenangkan perkara tersebut di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Saat ini penyesalaian sengketa sedang dalam proses Kasasi dan masih menunggu putusan Mahkamah Agung.	Menunggu putusan kasasi	1. Mengikuti proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Cikarang yang dimulai sejak Februari 2018 sampai dengan pembacaan putusan akhir pada Oktober 2019 dengan amar putusan menolak gugatan penggugat. 2. Mengikuti proses banding di Pengadilan Tinggi Bandung yang dimulai sejak Oktober 2019 sampai dengan pembacaan putusan pada Maret 2020 dengan amar putusan menolak gugatan penggugat. 3. Mengikuti proses kasasi di Mahkamah Agung yang dimulai sejak Mei 2020. Adapun PT PJB telah menyerahkan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Mei 2020 dan telah diterbitkan Akta Penerimaan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Juni 2020. 4. Saat ini masih menjalani proses kasasi dan menunggu putusan kasasi.	Apabila Gugatan Penggugat diterima/ dimenangkan, maka PT PJB harus membayar ganti kerugian kepada para penggugat senilai Rp 33.836.000.000,00

PERKARA PENTING
IMPORTANT CASES

Para Pihak Parties	Pokok Perkara Subject matter	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Effort	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan Influence/Risk to the Company
GLawsuit Against Law No. 21/pdt.G/2019/PN/Ckr **Plaintiff:** 1. Ronald Manurung dkk **Defendant:** 1. Budiawan Susantio 2. PT PLN (Persero) cq PT PJB's Muara Tawar GU **Co-Defendant:** 1. Bekasi Regency BPN 2. Regional Government of Bekasi Regency 3. Government of Segarajaya Village 4. Heirs of Late H. Serih bin Madang 5. Temporary PPAT of Doctorandus Dwy Sigit Andrian, M.M	In 2018, Ronald Manurung and partners filed claims for compensation at Cikarang District Court over a land area of 11,918 m^2 that had been used by PLN and PT PJB for Muara Tawar Power Plant Unit. The Plaintiff stated that the land was owned by the person concerned according to Girik. However, PT PJB already had HGB of the land. PT PJB had won the case at the District Court and High Court. Currently, the settlement of dispute is in the process of being appealed and still waiting for the decision of the Supreme Court.	Waiting for appeal decision	1. Participating in the civil court process at Cikarang District Court began since February 2018 until the final verdict reading in October 2019, with a verdict that the plaintiff claim was rejected. 2. Participating in the appeal process at Bandung High Court began since October 2019 until the verdict reading in March 2020, with a verdict that the plaintiff claim was rejected. 3. Participating in the appeal process at the Supreme Court began since May 2020. PT PJB had submitted the counter appeal memory on May 20, 2020, and the Deed of Acceptance for counter appeal memory had been issued on June 2, 2020. 4. Currently in the appeal process and waiting for the appeal decision.	In case that the Plaintiff's Claim is accepted/won, PT PJB is required to pay compensation to the plaintiff in the amount of Rp33,836,000, 000.00

Perkara Penting yang sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat
Important Cases currently Faced by the Board of Commissioners and Board of Directors Serving

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Dewan Komisaris maupun Direksi PJB yang sedang menjabat baik perdata maupun pidana.

Throughout 2021, there were no legal issues faced by the Board of Commissioners and Board of Directors of PJB who are currently serving, both civil and criminal.

Perkara Hukum Anak Perusahaan
Legal Cases of Subsidiary

Sepanjang tahun 2021, Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan PJB baik perdata maupun pidana.

Throughout 2021, there were no legal issues faced by PJB's Subsidiaries, both civil and criminal.

Sanksi Administrasi Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi oleh Otoritas Terkait
Administrative Sanctions to the Company, Members of the Board of Commissioners, and Members of the Board of Directors by Relevant Authorities

Selama tahun 2021, tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan kepada PJB, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi oleh Otoritas Terkait.

Throughout 2021, there were no administrative sanctions imposed on PJB, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors by the Related Authorities.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Pengelolaan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu upaya PJB dalam menjaga efisiensi kegiatan operasional dan memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* dengan meminimalisasi terjadinya risiko *fraud* dalam proses pengadaan yang dapat mencederai implementasi GCG di lingkungan Perusahaan seperti praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta persaingan usaha tidak sehat.

Management of goods and services procurement is one of PJB efforts to maintain efficiency of operational activities and provide added values to the stakeholders by minimizing fraud risks in the procurement process that may harm GCG implementation within the Company such as Corruption, Collusion, and Nepotism practices as well as unfair business competition.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Policy

Perusahaan telah menyusun kebijakan internal sebagai landasan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PJB yang ditetapkan antara lain melalui Peraturan Direksi Nomor 034M.P/019/DIR/2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang-Jasa PJB dan Peraturan Direksi Nomor 035M.P/019/DIR/2020 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang-Jasa PJB.

Sebagai implementasi atas kebijakan pengadaan barang dan jasa, aktivitas pengadaan barang dan jasa memperhatikan prinsip pentingnya *Value for Money.* Prinsip tersebut merupakan kombinasi optimum dari 6 (enam) *rights* (6 Rs) yang terdiri dari tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan harga, sesuai kebutuhan dari pengguna, dan tidak selalu merupakan opsi harga awal paling murah (*lowest initial price option*), tetapi merupakan pengembalian tertinggi (*best return*) dari investasi yang mempertimbangkan kriteria evaluasi yang sudah ditentukan.

The Company had prepared basis for the goods and services procurement within PJB in the form of internal policy determined, including through the Board of Directors Regulation No. 034M.P/019/DIR/2021 concerning Guidelines for the Procurement of PJB Goods and Services and the Board of Directors Regulation No. 035M.P/019/ DIR/2020 concerning PJB's Goods and Services Procurement Authority.

As an implementation of the goods and services procurement, activities of the goods and services procurement consider the principle of Value for Money. The principle is optimum combination of 6 (six) rights (6 Rs) consisting of the right quality, quantity, time, place, socioeconomic purpose, and price, as per the user needs, and is not always the lowest initial price option, but is the highest return (best return) from the investments considering the predetermined evaluation criteria.

Pelaksana Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa
Executive of Goods and Services Procurement Functions

Fungsi pengadaan barang dan jasa PJB di Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk Direksi sedangkan untuk Unit ditunjuk oleh *General Manager.* Pelaksana fungsi pengadaan barang dan jasa PJB adalah Direksi atau Kepala Divisi *Supply Chain Management* sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Keputusan Direksi No 034M.P/019/DIR/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang-Jasa PJB. Sedangkan kewenangan *General Manager* terkait fungsi pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dalam SK Kewenangan.

PJB Goods and Services Procurement Functions at the Head Office is carried out by the officers appointed by the Board of Directors while for units it is appointed by the General Manager. Executive of PJB's goods and services procurement is the Board of Directors or Head of the Supply Chain Management Division as stipulated in the Goods and Services Procurement Policy through the Board of Directors Decree No. 034M. P/019/DIR/2021 concerning Guidelines for PJB's Goods and Services Procurement. Meanwhile, the authority of the General Manager related to function of procurement of goods and services is further regulated in the Authority Decree.

Pada kantor pusat dan unit terdapat *Value for Money Committee* yang bertugas melakukan reviu dan rekomendasi atas strategi Pengadaan Barang/Jasa yang disiapkan oleh fungsi Perencanaan Pengadaan untuk memastikan strategi pengadaan telah memenihi prinsip *value for money* serta melakukan reviu dan rekomendasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan untuk memastikan pelaksana pengadaan telah memenuhi prinsip *value for money* dan selanjutnya dilakukan penandatangan Perjanjian/ Kontrak. Pada Kantor Pusat *Value for Money Committee* dilaksanakan melalui Rapat Direksi untuk pengadaan yang memerlukan persetujuan Direksi dan Rapat Manajemen Divisi *Supply Chain Management* untuk pengadaan yang menjadi kewenangan Divisi *Supply Chain Management.* Sedangkan di Unit fungsi *Value for Money Committee* dilaksanakan melalui Rapat Manajemen.

At the head office and units there is a Value for Money Committee to review and recommend the Goods/Services Procurement strategy prepared by the Procurement Planning functions to ensure that the procurement strategy has fulfilled the principle of value for money, as well as review and recommend the implementation of Goods/Services Procurement carried out by the Procurement Executive Function to ensure the procurement executive has fulfilled the value for money principle and subsequently signed the Agreement/Contract. At the Head Office, the Value for Money Committee is carried out through the Board of Directors Meeting for procurement that requires approval from the Board of Directors and Management Meeting of Supply Chain Management Division for the procurement which is the authority of Supply Chain Management Division. Meanwhile in the Unit, the function of Value for Money Committee is carried out through Management Meeting.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
Procedures of Goods and Services Procurement

Proses pengadaan barang dan jasa dijalanakan sesuai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di lingkungan PJB. Kebijakan pengadaan barang dan jasa mengatur ketentuan terkait proses pengadaan barang dan jasa mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

1. **Dokumen Rencana Pengadaan (DRP)**
   Dokumen Rencana Pengadaan adalah daftar umum yang meliputi kebutuhan Kantor Pusat dan Unit PJB atas barang dan jasa, lengkap dengan kuantitas/ volume, waktu kebutuhan/waktu penyerahan, estimasi anggaran, strategi pengadaan, metode pengadaan, pelaksana pengadaan dan sistem pemaketan/*grouping/joint procurement*/ sentralisasi/desentralisasi. Penyusunan DRP meliputi:
   a. Melakukan indentifikasi dan kajian kebutuhan barang/ jasa meliputi kelengkapan spesifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAK), kepastian ketersediaan anggaran, ruang lingkup pekerjaan, kepastian kuantitas/volume, waktu penyerahan/kebutuhan serta kajian risiko.
   b. Melakukan kajian strategi pengadaan yang tepat (pemaketan/*grouping/joint procurement*) dan metode pengadaan termasuk rencana pengadaan yang ditangani bersama oleh Direktorat yang menangani pengadaan.
   c. Melakukan pemukhtahiran atas riset pasar.
   d. Meminta *review* dan rekomendasi *Value for Money Committee* atas hasil perencanaan.

The process of goods and services procurement is carried out following the established policies and procedures in the PJB environment. The policy on goods and services procurement regulates the provisions related to the goods and services procurement covering several aspects as follows:

1. **Procurement Plan Document (PPD)**
   Procurement Plan Document is general list covering the needs of PJB Head Office and Unit for goods and services complete with quantity/volume, time of need/delivery, budget estimation, procurement strategies, procurement methods, procurement executive, and the packaging system/grouping/joint procurement/ centralized/ decentralized. PPD preparation includes the following:
   a. Identifying and reviewing goods/services needs, including specification readiness, Terms of Reference (ToR), certainty of budget availability, scope of work, certainty of quantity/volume, time of delivery/ need, as well as risk review.
   b. Reviewing the appropriate procurement strategy (packaging/grouping/joint procurement) and procurement methods including procurement plans that are jointly handled by the Directorate in charge of procurement.
   c. Updating market research.
   d. Requesting review and recommendation of the Value for Money Committee on the planning results.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

2. Dokumen Pelelangan atau Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Dokumen Pelelangan/RKS disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pengadaan yang telah disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang. Penyiapan Dokumen Pelelangan/ RKS merupakan tugas dan tanggung jawab Fungsi Perencana Pengadaan yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Pengguna Barang/Jasa atau pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PJB dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang.

3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pengadaan dan Dokumen Pelelangan/ RKS. HPS merupakan alat untuk melihat kewajaran harga penawaran dan tidak wajib diumumkan serta tidak dapat dijadikan dasar sebagai satu-satunya penggugur penawaran. HPS dibuat oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan dan disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

4. Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Metode pelelangan terdiri dari:

a. Pelelangan Terbatas
   Dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/ Jasa yang terdapat dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Pelelangan Terbatas dapat berupa pelelangan internasional, nasional, dan lokal. Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa.
b. Pelelangan Terbuka
   Dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/ Jasa, yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi maupun pascakualifikasi, untuk mengikuti pelelangan.

c. Pengecualian dari Kompetisi:
   1) Penunjukan Langsung : dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Riset Pasar, *Due Diligence* atau dari DPT;
   2) Pengadaan Langsung : Pengadaan Barang/Jasa yang ada di pasaran untuk memenuhi kebutuhan operasional yang diyakini bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar, berteknologi sederhana dan berisiko kecil dengan nilai maksimal 500 juta;

2. Auction Documents or Work Plan and Requirements (WPR)

Auction Documents/WPR are prepared according to the Procurement Plan Document that has been ratified by the Authorized Officer. The preparation of Auction Documents/ RKS is the duty and responsibility of the Procurement Planner Functions which in its implementation can be assisted by Goods/Services Users or other parties based on the expertise of both internal and external of PJB and ratified by the Authorized Officer.

3. Self-Estimated Price (SEP)

Self-Estimated Price (SEP) is prepared according to Procurement Plan Documents and Auction Documents. SEP is a tool to find the fairness of bid price and is not mandatory to be announced as well as cannot be used as the basis for the only operator of the offer. SEP is made by the Procurement Executive Functions and ratified by the Authorized Officer.

4. Methods of the Goods and services procurement

The auction method consists of:

a. Limited Auction
   Limited auction is conducted by inviting Goods and Services Providers which are listed in the Selected Providers List (SPL). Limited auction can be in the form of international, national, and local auctions. Limited auction with the SPL is the main strategy of the Goods/ Services Procurement.
b. Open Auction
   The Open Auction is conducted by inviting Goods/ Services Providers, which is widely announced to provide opportunities for Goods/Services Providers with the qualifications fulfillment through the prequalification and post-qualification process, to take part in the auction.
c. Exemption from Competition:
   1) Direct Appointment: Direct Appointment is conducted directly by appointing Goods/Services Provider, according to Market Research, Due Diligence, or from the SPL;
   2) Direct Procurement: Direct Procurement, namely the Procurement of Goods/Services in the market to meet the operational needs, which is believed that the price is the competition result in the market, simple technology, and low risk with a maximum value of 500 million;

3) Penunjukan Langsung dengan Metode *Open Book :* Dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang kompetitif tanpa melalui proses Pelelangan Terbatas/Pelelangan Terbuka, dengan tetap menjaga kualitas/mutu dan memenuhi ketepatan waktu pengadaan di lingkungan PJB.

5. *Joint Procurement*

Joint Procurement dilakukan dengan Metode Pelelangan Terbatas atau Pelelangan Terbuka, dilaksanakan oleh 1 (satu) Pengguna Barang/Jasa yang mewakili beberapa Pengguna Barang/Jasa lainnya.

6. Metode Penawaran
   a. *Request for Quotation* (RFQ)
      RFQ digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang termasuk kategori Rutin, dengan spesifikasi yang mudah ditemui di pasar.
   b. *Initation to Bid* (ITB)
      ITB dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang termasuk kategori *Leverage* atau *Critical/ Bottleneck*, di mana spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya dapat dibuat secara jelas dan lengkap, serta penunjukan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran biaya terendah, sepanjang secara kualitas, kuantitas, waktu, tempat, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), telah memenuhi persyaratan.
   c. *Request for Proposals* (RFP)
      RFP digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang termasuk kategori Strategis (seperti EPC) atau jasa konsultansi atau pekerjaan yang memerlukan inovasi serta keahlian tertentu.

7. Jangka Waktu Pengadaan Barang dan Jasa

Perencanaan dan penyusunan jangka waktu pengadaan barang dan jasa harus memperhatikan dan menyesuaikan waktu kebutuhan barang/jasa, sehingga penyerahan barang/jasa sesuai yang direncanakan. Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa menyesuaikan dengan kompleksitas pengadaan barang dan jasa. Penayangan Pengumuman sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja di papan pengumuman dan/atau portal *e-Procurement* PJB, kecuali yang dilaksanakan melalui surat kabar minimal dilakukan 1 (satu) kali (untuk Pelelangan Terbuka).

3) Direct Appointment with the Open Book Method: Procurement with the Open Book patterns is conducted to obtain competitive prices without going through the process of Limited Auction/ Open Auction while maintaining quality and meeting the timeliness of procurement within PJB.

5. Joint Procurement

Joint Procurement is conducted with Limited Auction or Open Auction Methods, carried out by 1 (one) Goods/ Service User representing several other Goods/Services Users.

6. Offering Method
   a. Request for Quotation (RFQ)
      RFQ is used for the Procurement of Goods/Services that is included in the Routine category, with specifications that are easily found in the market.
   b. Initation to Bid (ITB)
      ITB can be used for the Procurement of Goods/ Services that is categorized as Leverage or Critical/ Bottleneck, where specifications, quality, and quantity can be made clearly and completely, and the appointment of winners is conducted according to the lowest cost bid, as long as in terms of quality, quantity, time, place, and Domestic Content Level (DCL), has fulfilled the requirements.
   c. Request for Proposals (RFP)
      RFP is used for the Procurement of Goods/Services that is categorized as Strategic (such as EPC) or consultancy services or jobs requiring innovation and certain expertise.

7. Goods and Services Procurement Period

The planning and preparation of period for goods and service procurement are required to consider and adjust the time of goods/service needs so that the delivery of goods/services is in accordance with the plan. The implementation period for each stage of the process of goods/services procurement adjusts with the goods/ service procurement complexity. The Announcement is at least 3 (three) working days in the announcement board and/or portal e-Procurement of PJB, unless those carried out through the news, it is conducted at least once (for Open Auction).

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

8. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
   Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terbagi atas beberapa tahapan yaitu:

8. Implementation of the Goods/Services Procurement
   The goods and services procurement is divided into several stages as follows:

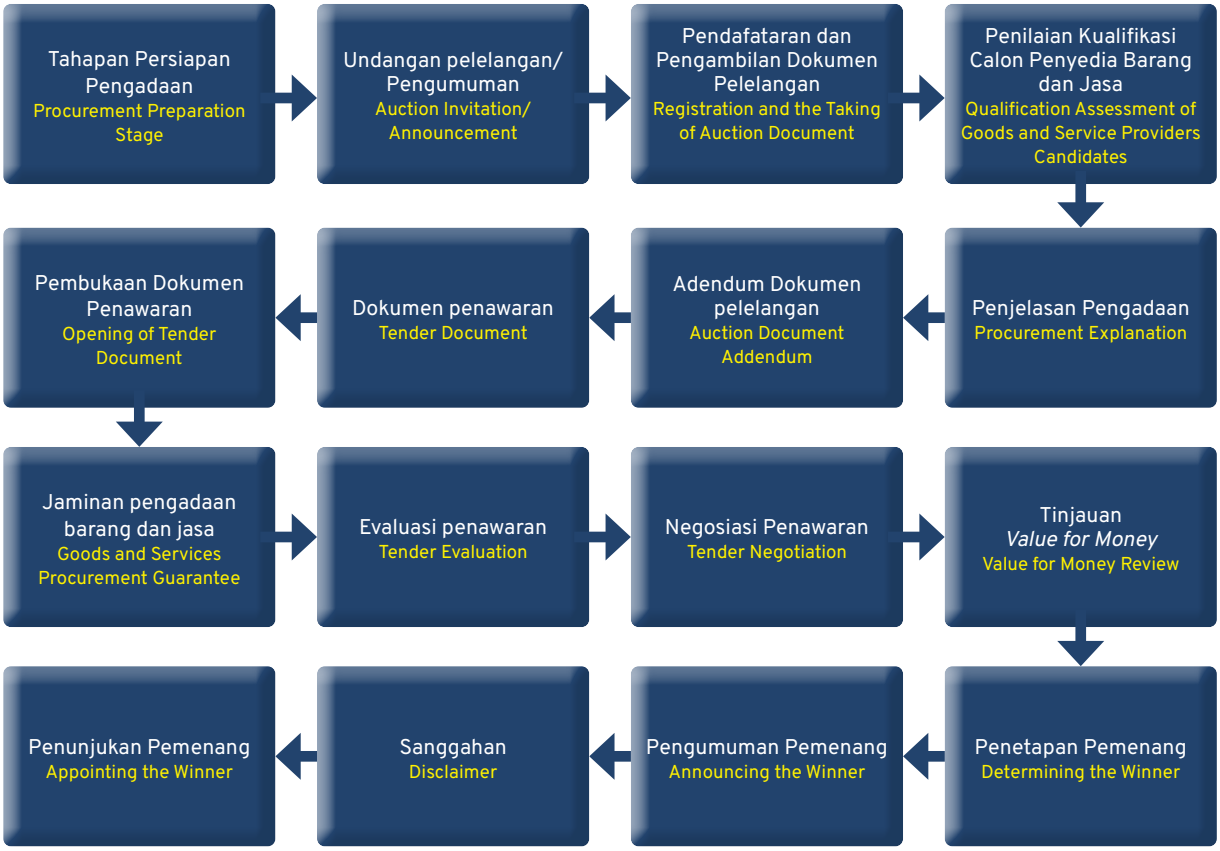

Pengadaan Khusus
Special Procurement

Perusahaan juga telah mengatur terkait dengan pengadaan khusus dalam rangka menunjang kegiatan operasional PJB berdasarkan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan pengadaan yang termasuk dalam kategori pengadaan khusus adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Gas Bumi/LNG/CNG
2. Pengadaan Batubara
3. Sewa Menyewa/Sewa Beli
4. Sewa Guna Usaha

The Company had also regulated related to special procurement in order to support PJB operational activities based on the Goods and Services Procurement Policy. Procurement activities included in special procurement category are as follows:

1. Procurement of Natural Gas/LNG/CNG
2. Coal Procurement
3. Lease/Rent-Buy
4. Lease

Sewa Guna Usaha terdiri dari:

a. *Financial Lease*
   Penyewa Guna (*Lessee*) pada akhir masa Perjanjian/ Kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna dari pihak yang menyewa gunakan (*Lessor*) berdasarkan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati bersama,
b. *Operating Lease*
   Adalah obyek sewa guna usaha yang dioperasikan sendiri oleh Lessee namun kepemilikan obyek sewa guna usaha tidak beralih kepada *Lesse*;

5. Alih Daya;
6. Pengadaan Jasa Konsultasi Perorangan;
7. Pengadaan Asuransi;
8. Pengadaan *parts* Pembangkit *Reverse Engineering* dan *Re-Engineering.*

Lease consists of the following:

a. Financial Lease
   Lessee, at the end of the term of Agreement/Contract, has the option rights to purchase business lease object from the Lessor following the residual value agreed together,
b. Operating Lease
   Operating lease is the lease object operated by Lessee, but the ownership of such object is not transferred to Lessee;

5. Outsourcing;
6. Procurement of Individual Consulting Services;
7. Procurement of Insurance;
8. Procurement of Reverse Engineering and Re-Engineering Power Plant parts.

Akuntabilitas dan Transparansi Proses Pengadaan

Accountability and Transparency of the Procurement Process

Berikut adalah upaya yang telah dilaksanakan PJB dalam rangka menjaga serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa:

1. Pemanfaatan Media Pengumuman Pengadaan berbasis Web
   Pengumuman Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya wajib dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman yang dapat diakses secara luas antara lain melalui *website* Perusahaan.
2. Penerapan Masa Sanggah
   Peserta kualifikasi yang keberatan atas penetapan pemenang dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil kualifikasi, dengan memberikan jaminan sanggah sebesar 2‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Sanggahan hanya diajukan terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan prosedur kualifikasi yang diatur dalam Dokumen Kualifikasi Pelelangan Pekerjaan bersangkutan, KKN dan atau pelanggaran persaingan yang sehat. Masa sanggah hasil prakualifikasi diberikan 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan Jawaban atas sanggahan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

The following are efforts implemented by PJB in order to maintain and increase accountability and transparency in the procurement process of goods and services:

1. Utilization of Web-based Procurement Announcement Media
   Announcement of the Procurement of Goods/ Construction Works/Other Services is required to be conducted transparently for the community with the announcement that can be widely accessed, among others, through the Company's website.
2. Disclaimer Period Implementation
   Qualification participants with the disclaimer to the winner establishment may submit their written objection no later than 3 (three) working days after the date of announcement for the qualification results, by providing guarantees by 2 ‰ (two per thousand) of total HPS value or a maximum of Rp50,000,000.00 (fifty million Rupiah). The disclaimer is only submitted towards irregularities in the implementation of qualification procedures regulated in the relevant Documents of Work Tender Qualifications, CCN, and/or violation of fair competition. The disclaimer period of prequalification results is provided by 3 (three) working days after the announcement of the qualification results and the Answer to the disclaimer is provided no later than

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

setelah diterimanya sanggahan dari peserta prakualifikasi. Surat sanggahan diajukan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI).

3. Menyediakan Media Pengaduan Pengadaan melalui Komite WBS
   Perusahaan menyediakan sarana pengaduan atas Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui *Whistleblowing System* sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 004.K/021/DIR/2020 dan Nomor: 007.K/DK-PJB/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Pembangkitan Jawa-Bali,
4. Pendampingan Lembaga Independen
   a. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).
   b. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
   c. ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya.

7 (seven) working days after the acceptance of disclaimer from the prequalification participant. Notice of disclaimer is addressed to the Officer authorized in determining the winner, accompanied by evidence of irregularities, with a copy submitted to the Head of Internal Audit Unit (HIAU).

3. Providing the Procurement Complaints Media through the WBS Committee
   The Company provides facility for complaints on Violations in the Process of Goods and Services Procurement through Whistleblowing System according to the Joint Decision Letter (JDL) between the Board of Directors and Board of Commissioners No. 004.K/021/DIR/2020 and No.007.K/DKPJB/2020 concerning Whistleblowing System at PT Pembangkitan Jawa-Bali.

4. Independent Institution Assistance
   a. BPKP (Financial and Development Supervisory Agency).
   b. High Court of East Java.
   c. ITS (Sepuluh Nopember Institute of Technology) Surabaya.

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Activities

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pengadaan dalam rangka menunjang kegiatan operasional PJB sesuai dengan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang telah dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   Sepanjang tahun 2021, Paket pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan operasi Perusahaan, baik yang menggunakan metode Pelelangan Terbatas, Pelelangan Terbuka, Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut:

Throughout 2021, the Company carried out procurement activities in order to support PJB's operational activities in line with the Goods and Services Procurement Policy. The activities for the goods and services procurement that have been carried out are as follows:

1. Procurement Management
   Throughout 2021, the complete Goods and services procurement packages to meet the Company's operations, both using the Limited Auction, Open Auction, Direct Appointment methods, and Direct Procurement are as follows:

Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021
Total Goods and Services Procurement in 2021

No.	Metode Method	Jumlah Total
1	Pelelangan Terbatas Limited Auction	114
2	Pelelangan Terbuka Open Auction	605
3	Penunjukan Langsung Direct Appointment	699
4	Pengadaan Langsung Direct Procurement	15.991

2. Pengelolaan Pergudangan
   Pengelolaan pergudangan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen material dalam memastikan kecukupan logistik untuk menunjang kegiatan operasional yang didalamnya terdapat kegiatan pengelolaan atau *maintenance* seluruh transaksi barang persediaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, pemindahan/mutasi, pengendalian persediaan, pengeluaran, pengembalian/*return* barang/material, *stock opname,* serta penghapusan material. Upaya yang dilakukan gudang salah satunya adalah metode *delivery service* dalam mencapai misi SCM PJB. Metode ini merupakan salah satu contoh pelayanan ekselen dari gudang untuk memaksimalkan nilai *service level.*
3. Pengelolaan *Supplier*
   Kegiatan pengelolaan *Supplier* bertujuan untuk membina hubungan baik serta meningkatkan kompetensi *Supplier* dalam meningkatkan kualitas barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan PJB dengan cara menyampaikan kebijakan program pendukung proses pengadaan, penilaian PJB atas kinerja Supplier selama 1 (satu) tahun dan penilaian *Supplier* atas PJB melalui catatan dalam angket yang dibuat oleh PJB. *Supplier Gathering* merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari pengelolaan *Supplier* serta menjadi sarana komunikasi antara PJB dengan Supplier. Kegiatan *Supplier Gathering* tahun dilaksanakan di semua unit pembangkit PJB, adapun garis besar agenda acara adalah:
   a. Laporan Pengadaan Tahun 2021
   b. Sosialisasi tentang CSMS, Gratifikasi dan ISO 37001, *whistle blowing system* dan sistem pengadaan baru di PJB
   c. Pengumuman Supplier terbaik
   d. Penandatanganan Pakta Integritas *Supplier.*

   Survei kepuasan Mitra Kerja dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kulitas proses pengadaan di lingkungan PJB. Survei dilakukan setiap berakhirnya kontrak/ perjanjian pengadaan secara *online* melalui survey.ptpjb.com pada tanggal 16 Juni 2021 untuk periode semester I dan pada tanggal 27 Desember 2021 untuk periode semester II. Hasil survei menunjukan tingkat rata-rata kepuasan *supplier* sebesar 85% atau masuk kategori Puas.

2. Warehouse Management
   Warehouse Management is strongly important in ensuring the adequacy of logistics to support the operational activities. Warehouse management is one of the parts of material management process in which there is management activity or maintenance of all inventory transactions including receipt, storage, care, security, transfer/mutation, inventory control, expenditure, goods/materials return, overnight stock, and material removal. Efforts carried out by the warehouse in achieving SCM PJB mission is the delivery service method. This method is one of the examples of excellent services from warehouse to maximize service level values.

3. Supplier Management
   The activity that turns into part of Supplier management as well as communication facility between PJB and Supplier is Supplier Gathering. The activity purposes to build good relations as well as improve the competence of Supplier in enhancing the quality of goods and services following the specifications determined by PJB by conveying the policies of procurement process supporting program, PJB's assessment of Supplier performance for 1 (one) year, and PJB Supplier assessment through the notes in questionnaire made by PJB. The activities of Supplier Gathering were carried out in all PJB generation units, while the outline of the agenda was:

   a. 2021 Procurement Report
   b. Socialization of CSMS, Gratification and ISO 37001, whistleblowing system and new procurement system in PJB
   c. Best Supplier Announcement
   d. The signing of the Integrity Pact of Supplier.

   Partners satisfaction survey was conducted as an efforts to improve the quality of procurement process within PJB. The survey was conducted online every the end of procurement contracts/agreements via survey.ptpjb.com on June 16, 2021 for the first semester period and on December 27, 2021 for the second semester period. The results of survey show average level of supplier satisfaction at 85% or included in the satisfied category.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

4. Pengelolaan Pengaduan Tindakan Penyimpangan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
   Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat pengaduan atas indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui *Whistleblowing System* (WBS) Perusahaan. Perusahaan berupaya menindaklanjuti setiap pengaduan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa demi mendorong kualitas proses pengadaan barang dan jasa.

4. Complaint Management on Violation during the Procurement Process of Goods and Services
   Throughout 2021, there wasn't complaint of irregularities indications in the process of goods and services procurement through the Company's Whistleblowing System (WBS). The Company strives to follow up on any complaints of irregularities in the process of goods and services procurement to encourage the quality of the process of goods and services procurement.

Evaluasi Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa
Evaluation of Goods and Services Procurement Activities

Aktivitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan PJB secara berkala dievaluasi oleh *Value for Money Committee* sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga dievaluasi pada saat kegiatan *Supplier Gathering* dan Survei kepuasan Mitra Kerja yang menghasilkan saran dalam rangka perbaikan proses pengadaan barang dan jasa.

Activity of goods and services procurement within the PJB is periodically evaluated by Value for Money Committee as the effort to encourage quality improvement of the procurement process for goods and services. The implementation of the goods and services procurement is also evaluated during Supplier Gathering and Partner Satisfaction Survey activities which generate suggestions in the context of improving the process of the goods and services procurement.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Akses informasi merupakan salah satu unsur penting yang dapat dioptimalkan Perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan publik dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kepercayaan publik merupakan aset penting Perusahaan yang harus dikelola dengan baik dalam rangka menjaga keberlanjutan Perusahaan. Kepercayaan pasar dan para pemangku kepentingan lainnya sangat bergantung dengan bagaimana Perusahaan dapat menyediakan informasi yang jelas, benar dan mudah diakses.

Access to information is one of important elements to be optimized by the Company to be able to build public trust and reach a wider market. Public trust is an important asset of the Company that must be managed properly in order to maintain sustainability of the Company. The trust of the market and other stakeholders depends largely on how the Company can provide clear, correct and easily accessible information.

PJB menyediakan akses serta pengungkapan informasi dan data Perusahaan bagi *stakeholders* khususnya yang bersifat publik dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan informasi PJB. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh pejabat atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya yang dalam hal ini adalah Sekretaris Perusahaan.

PJB provides access and disclosure of the Company information and data for the stakeholders and also for the public in particular by considering information management provisions of PJB. Information disclosure is carried out by the officials or work units based on their duties, authorities, and responsibilities, which in this case is the Corporate Secretary.

Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Data Perusahaan
Company Information and Data Management Policy

Pengelolaan informasi termasuk menjamin tersedianya akses informasi dan data Perusahaan khususnya yang bersifat publik dijalankan sesuai kebijakan pengelolaan informasi dan data perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 152.K/010/DIR/2010 tanggal 4 Desember 2010 dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang Perusahaan. Kebijakan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Klasifikasi Informasi meliputi informasi sangat rahasia, rahasia, terbatas dan biasa.
2. Pengungkapan Informasi meliputi prinsip dasar pengungkapan informasi, pengelola, juru bicara, dan akses terhadap pengungkapan informasi.
3. Mekanisme pemberian informasi, baik internal dan eksternal (publik).
4. Pengamanan Informasi, meliputi tugas dan tanggung jawab keamanan informasi, pengendali dan administrasi informasi, data dan dokumen Perusahaan, tanggung jawab pihak lain atas informasi sangat rahasia dan informasi rahasia, rumor, hubungan dengan komunitas investasi dan media.
5. Sanksi.
6. Panduan teknis.

Information management, including ensuring the availability of access to Company information and data for public in particular, is carried out according to the Company's information and data management policy based on the Board of Directors Decree No.152.K/010/DIR/2010 on December 4, 2010. The policy manages the following matters:

1. Information Classification includes highly confidential, confidential, limited, and ordinary information.
2. Information Disclosure includes the basic principles of information disclosure, management, spokesperson, and access to information disclosure.
3. Providing information mechanisms both internal and external (public).
4. Information Security includes duties and responsibilities of information security, information control, and administration, the Company data, and documents, other parties' responsibilities for highly classified and confidential information, rumors, as well as relations with the investment community and media.
5. Sanctions.
6. Technical guidance.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Insan PJB harus memperhatikan standar etika dalam pengungkapan informasi dan data kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjaga aset informasi Perusahaan dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Insan PJB tidak diijinkan untuk membicarakan, membocorkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Perusahaan yang dianggap sebagai rahasia kepada siapapun (kecuali rekan kerja yang perlu mengetahui tentang hal tersebut);
2. Insan PJB tidak diijinkan untuk memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia Perusahaan kepada pihak lain, baik yang menyangkut keuangan, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan PJB kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang;
3. Insan PJB yang tidak bekerja lagi di Perusahaan wajib untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama yang bersangkutan bekerja di Perusahaan, dan tidak diperkenankan mengambil dan/atau menyebarkan informasi rahasia Perusahaan kepada siapapun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh Lembaga yang berwenang.

PJB employees are obliged to pay attention to the ethical standards in information and data to the relevant parties reasonably and following the prevailing regulations to protect the Company's information assets by complying the following provisions:

1. Every PJB Personnel is not allowed to discuss, leak, or disseminate information on the Company which is considered confidential to anyone (except colleagues who need to acknowledge it);
2. PJB personnel are not permitted to provide any confidential data and information to other parties concerning finance, technology, personnel, and other data which are believed and deemed to be harmful to PJB, unless there are other provisions by the laws and regulations and/or required by the regulatory authority;
3. PJB personnel who are no longer working at the Company are required to protect the information confidentiality obtained while they are working. They are not allowed to take and/or disseminate confidential Company information to anyone, unless there are other provisions by the laws and regulations and/or required by the regulatory authority.

Klasifikasi Informasi dan Data Perusahaan
Classification of Company Information and Data

Perusahaan memastikan ketersediaan akses informasi dan data serta menjaga informasi penting Perusahaan dengan mengklasifikasikan informasi sesuai dengan kepentingan Perusahaan. Klasifikasi informasi perusahaan berdasarkan Kebijakan Pengelolaan Informasi PJB adalah sebagai berikut:

1. **Informasi Sangat Rahasia**
   Informasi yang sifatnya tidak dapat diungkapkan kepada pihak manapun, kecuali kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan pihak lain yang disetujui oleh Direktur Utama.
2. **Informasi Rahasia**
   Informasi yang karena sifatnya hanya dapat diungkapkan kepada pihak internal Perusahaan yang memiliki kewenangan.

The Company ensures access availability to information and data as well as maintains important information of the Company by classifying information following the Company interests. Information classification of the Company based on PJB Information Management Policy is as follows:

1. **Highly Confidential Information**
   Information that cannot be disclosed to any parties, unless to the Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other parties approved by the President Director.
2. **Confidential Information**
   Information that cannot be disclosed to any parties, unless to the Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other parties approved by the President Director.

3. **Informasi Terbatas**
   Informasi yang hanya ditujukan untuk kepentingan Perusahaan dan tidak untuk diungkapkan kepada publik.
4. **Informasi Biasa**
   Informasi yang tidak termasuk ke dalam kategori sangat rahasia, rahasia dan terbatas yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada Perusahaan apabila diungkapkan kepada publik.

3. **Limited Information**
   information that is only intended for the Company's benefit and not disclosed to the public.
4. **Ordinary Information**
   Information that is not categorized as highly confidential, confidential, and limited information and that does not harm the Company if it is disclosed to the public.

Akses Informasi bagi Internal Perusahaan
Information Access for Internal Company

Perusahaan memberikan akses yang seluas-luasnya atas informasi dan data dengan klasifikasi Informasi Terbatas dan Informasi Biasa bagi internal Perusahaan. Akses atas informasi dan data tersebut dapat diakses melalui:

1. MyPJB, yang merupakan aplikasi *smartphone* yang dapat digunakan untuk mengakses informasi Perusahaan. Aplikasi ini berisikan informasi antara lain agenda korporat, publikasi korporat, data kekaryawanan (gaji, absensi, perjalanan dinas, dan informasi pelatihan), kontak seluruh karyawan PJB, dan link menuju aplikasi korporat;
2. Intranet, *Office Automation* (OA), dan *Email* Serentak (*Email Blast*). Pengelolaan isi dan *update* dari *Intranet* dan OA dilakukan bersama antara Sekretaris Perusahaan dan Bagian Teknologi Informasi serta pihak terkait. Email serentak berisi informasi terkait keperluan pekerjaan dan Perusahaan atau *sharing knowledge* mengenai hal-hal yang bersifat manajerial, tidak mengandung unsur SARA dan politik, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, khususnya yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan;
3. Fasilitas Info PJB, merupakan media internal yang berfungsi sebagai sarana informasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan manajemen untuk seluruh pegawai yang terbit setiap dua bulanan;
4. Pendokumentasian Kegiatan PJB, dilakukan melalui koordinasi dengan Bidang *Stakeholder Management* (Kantor Pusat) atau Bidang Umum (Unit Pembangkitan (UP), Unit Pelayanan Pemeliharaan (UPHAR), Unit Bisnis (UB) dan Unit lain. Bentuk dokumentasi kegiatan PJB bisa berbentuk tulisan seperti artikel, bentuk visual foto atau video, bentuk audio seperti rekaman dan bisa juga kombinasi dari dua atau ketiga bentuk tersebut.

The Company provides the widest possible access to information and data with the classification of Limited Information and Ordinary Information for the Company. Access to such information and data can be accessed through the following:

1. MyPJB, a smartphone application, can be used to access Company information. It contains information including corporate agenda, corporate publications, employee data (salary, attendance, official travel, and training information), contacts for all PJB employees, and links to corporate applications;
2. Intranet, Office Automation (OA), and Simultaneous Email (Email Blast). Management of content and updates from Intranet and OA is carried out collectively between Corporate Secretary and Information Technology Section as well as the related parties. The simultaneous email that contains information related to work and the Company's needs or sharing knowledge concerning managerial matters, does not contain ethnicity, religion, race, and inter-group relations (SARA) and political elements, and is not used for personal interests, especially those causing unrest in internal and external environment of the Company;
3. PJB Info, an internal media with the functions as facilities of information, education, and socialization of management policies for all employees, is published every two months;
4. PJB activity documentation is carried out through the Stakeholder Management Division (Head Office) or the General Sector (Generation Unit (GU), Maintenance Service Unit (MSU), Business Unit (BU), and other units. The documentation can be displayed in articles, photos or videos, and recordings and can also be displayed in combination of two or all three forms.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Akses Informasi bagi Publik
Information Access for Public

Perusahaan memberikan akses yang seluas-luasnya atas informasi dan data dengan klasifikasi Informasi Biasa bagi Publik. Hal tersebut, merupakan upaya PJB untuk memenuhi ketentuan tentang persyaratan keterbukaan sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Informasi dan data tersebut dapat diakses melalui:

1. *Website*, dimana dokumen-dokumen untuk kepentingan publick dan tidak bersifat rahasia tersedia dalam *website* Perusahaan dan Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum pada *website* adalah akurat, lengkap dan terkini;
2. Surat elektronik (*email*) melalui alamat email info@ptpjb.com sebagai sarana komunikasi elektronik yang dikelola oleh Bidang Teknologi Informasi. Fungsi Komunikasi Korporasi bertugas memonitor, mengidentifikasi email yang masuk untuk selanjutnya memberikan respon yang memadai;
3. *Events*, partisipasi acara/pameran/*events* diupayakan memiliki ruang lingkup promosi, publikasi, dan cakupan kegiatan yang berskala nasional, atau acara/ pameran/ *events* kedaerahan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah operasi, atau kegiatan atau rencana pengembangan PJB dimasa depan, atau yang bersifat *career expo* sesuai dengan kebutuhan SDM PJB;
4. *Sponsorship* & Iklan Non-Media, partisipasi sponsor ataupun iklan pada kegiatan atau materi cetakan tertentu diupayakan semaksimal mungkin untuk kegiatan atau materi cetakan yang memiliki ruang lingkup promosi, publikasi dan cakupan kegiatan yang berskala nasional, atau kegiatan yang bersifat edukasi bagi banyak pihak;
5. Media Massa (cetak dan elektronik). Setiap proses wawancara pihak internal PJB dengan media cetak ataupun media elektronik harus didampingi oleh perwakilan dari Sekretaris Perusahaan (Kantor Pusat), atau bidang Umum (Unit Pembangkitan (UP)), Unit Pelayanan Pemeliharaan (UPHAR), Unit Bisnis (UB) dan Unit lain).

The Company provides the widest possible access to information and data with the classification of Ordinary Information for Public. This is an effort by PJB to meet the provisions on transparent requirements following the application of the principles of good corporate governance. Information and data can be accessed through the following:

1. Website, as documents for non-confidential public interest, are available on the Company's website and the Corporate Secretary is responsible for ensuring that the information contained on the website is accurate, complete, and up-to-date;
2. E-mail, the Company provides email address, info@ptpjb.com as facility of electronic communication managed by Information Technology section. The Corporate Communications functions to monitor and identify the incoming emails to subsequently provide adequate response;
3. Events, participation in events/exhibitions having space for promotion and publication. Moreover, events also have the national scale, or regional events/exhibitions that are closely related to the operation area, or activities or plans for future PJB development, or which is a career expo following human capital needs of PJB;
4. Sponsorship & Non-Media Advertising, sponsorship or advertising participation in certain activities or printed materials are made to the maximum extent possible for activities or printed materials with the scope of promotion, publication, and activities on the national scale, or educational activities for many parties;
5. Mass Media (printed and electronic). Every PJB internal interview process with print media or electronic media must be accompanied by representatives from the Corporate Secretary (Head Office), or General Affairs (Generation Unit (GU), Maintenance Service Unit (MSU), Business Unit (BU), and other units).

Media Informasi Perusahaan
Company Information Media

Seiring dengan terus berkembangnya teknologi informasi, Perusahaan memastikan bawah informasi dan data Perusahaan dapat diakses dengan mudah dan cepat secara online. Perusahaan menyediakan informasi dan data yang dapat diakses secara *offline*. Media yang dapat digunakan untuk dapat mengakses informasi dan data Perusahaan diantaranya Website, Media Sosial, Media internal, Media Cetak dan Media Elektronik Interaktif. Selain itu, informasi tentang PJB dapat pula diperoleh pada Sekretaris Perusahaan yang beralamat di:

Along with the continuous development of information technology, the Company ensures that the Company's information and data can be accessed easily and quickly online. The Company provides information and data that can be accessed by offline. Media that can be used to be able to access company information and data include Website, Social Media, Internal Media, Print Media, and Interactive Electronic Media. Additionally, information concerning PJB can also be obtained from the Corporate Secretary at the following address:

PT Pembangkitan Jawa Bali

Jl. Ketintang Baru No.11, Surabaya 60231 Indonesia
Telepon : (62-31) 8283180 (Hunting)
Faksimili: (62-31) 8283183

Website

Perusahaan menyediakan website Perusahaan yang dapat diakses melalui situs www.ptpjb.com dan disajikan secara bilingual yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris. Informasi yang dapat diakses melalui *Website* PJB diantaranya profil, kegiatan operasional, kinerja Perusahaan, peristiwa di lingkungan Perusahaan, kliping berita media, *soft copy* Info PJB, *soft copy* data Perusahaan (*Annual Report, Sustainability Report*, statistik, Laporan Keuangan), pengumuman pelelangan dan beberapa informasi lain yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dimanapun mereka, yang memuat informasi mengenai profil, kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan.

Selain itu, PJB telah mengembangkan *platform* layanan **"PJB *Access*"** yang menyatu pada website Perusahaan. Kehadiran PJB *Access* diharapkan dapat memperluas jangkauan Perusahaan terhadap pasar karena memudahkan pelaku bisnis dan memberikan akses kepada khalayak luas untuk mengeksplor beragam layanan terbaik dari PJB.

The Company provides the Company's website which can be accessed through www.ptpjb.com website and presented bilingually, namely in Indonesian and English. Information that can be accessed through PJB Website includes profiles, operational activities, Company performance, events within the Company, media news clippings, soft copies of PJB Info, soft copies of Company data (Annual Report, Sustainability Report, statistics, Financial Statements), auction announcements and some other information that can be easily accessed by public from anywhere which contains information concerning the Company's profile, operational activities and performance.

Furthermore, PJB has developed **"PJB Access"** service platform that was integrated into the Company's website. PJB Access is expected to expand the Company reach to the market since it makes it easier for business people and provides access to a wide audience to explore the best various services from PJB.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

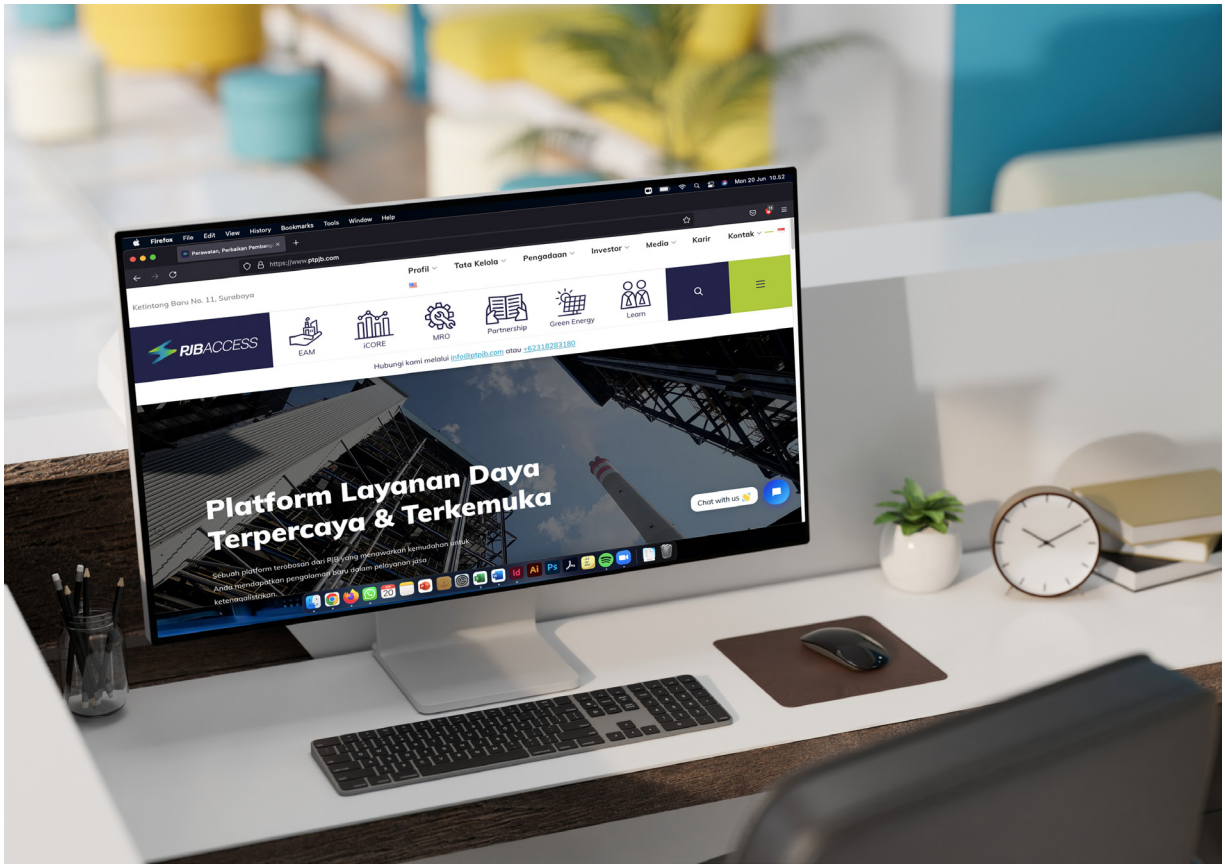

Informasi Pada Situs Web Resmi Perusahaan
Information on The Company Official Website

Kategori Category	Halaman Arsip	Archive Page	Keterangan Information
Halaman Muka Homepage	• *Highlight* • *Menu Bar* • Link PJB *Access* yang berisi Informasi terkait EAM, iCORE, MRO, *Partnership*, *Green Energy, Learn* • Sekilas Profil • Penghargaan dan Sertifikasi • Area Kerja • Pengalaman Perusahaan • Testimoni Pelanggan • Ringkasan Berita • Kontak • *Link* Tentang Kami • Langganan Berita	• Highlight • Menu Bar • PJB Access link containing information related to EAM, iCORE, MRO, Partnership, Green Energy, and Learn • Brief Profile • Awards and Certifications • Work Area • Company Experience • Customer Testimonials • News Summary • Contact • About Us • Subscribe to News	Pada halaman muka tersaji pilihan kategori menu dan tautan bagi publik dalam mengakses data dan informasi perusahaan. Selain itu, juga disajikan pilihan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris agar informasi yang tersaji juga dapat dibaca oleh pihak non-pengguna bahasa Indonesia. On the home page, there are options menu categories and links for the public to access data and information of the Company. Also, there are option languages, Indonesian and English so that the information presented can also be read by non-Indonesian users.

Kategori Category	Halaman Arsip	Archive Page	Keterangan Information
Profil Profile	• Tentang Kami • Struktur Organisasi • Lini Bisnis • PJB Group • Perjalanan PJB • Pemegang Saham • Dewan Komisaris • Direksi • Penghargaan • Sertifikasi • Budaya Kerja • Manajemen Risiko • Pencapaian • LK3 dan CSR	• About Us • Organizational Structure • Business Line • PJB Group • PJB Milestones • Shareholders • Board of Commissioners • Board of Directors • Awards • Certification • Corporate Culture • Risk Management • Achievements • OHSE and CSR	Pada bagian ini pengakses dapat memperoleh informasi tentang profil Perusahaan, profil manajemen Perusahaan, prinsip dan pedoman perilaku Perusahaan serta penghargaan yang telah diterima sebagai bukti rekam jejak profesionalisme PJB. Pada bagian ini pengakses dapat memperoleh informasi tentang profil Perusahaan, profil manajemen Perusahaan, prinsip dan pedoman perilaku Perusahaan serta penghargaan yang telah diterima sebagai bukti rekam jejak profesionalisme PJB.
Tata Kelola Governance	• *Whistle Blowing System* • Anti Penyuapan • PJB Bersih • Pedoman Kerja Direksi dan Dekom • Tata Kelola Perusahaan • RUPS • Penilaian Tata Kelola Perusahaan • Pedoman Pengadaan • Piagam Audit Internal	• Whistleblowing System • Anti-Bribery • PJB Bersih • Manual Board for the Board of Directors and the Board of Commissioners • Corporate Governance Guidelines • GMS • Corporate Governance Assessment • Procurement Guidelines • Internal Audit Charter	Pada bagian ini pengakses dapat memperoleh informasi-informasi penting mengenai penerapan GCG dan metode pengelolaan Perusahaan. In this section, the user is able obtain important information regarding GCG implementation and management methods of the Company
Pengadaan Procurement	• Info Pendaftaran CSMS • Pendaftaran CSMS • *E- Procurement* • Registrasi Daftar Penyedia Perusahaan (DPP)	• CSMS Registration Information • CSMS Registration • E-Procurement • Registration of Company Provider List (CPL)	Pada bagian ini pengakses memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran terkait proses pengadaan barang dan jasa. In this section, the user is able to obtain important information and registers related to the procurement process of goods and services.
Investor	• Laporan Tahunan • Laporan Keberlanjutan • Publikasi Posisi Keuangan • Ikhtisar Data Keuangan • Laporan Keuangan Tahunan • Statistik Perusahaan	• Annual Report • Sustainability Report • Publication of Financial Position • Financial Data Overview • Annual Finance Report • Company Statistics	Pada bagian ini pengakses dapat memperoleh informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh investor terkait rekam jejak Perusahaan beserta laporan terkait kinerja perusahaan. In this section, the user is able to obtain important information needed by investors regarding the Company's track record along with reports related to the Company performance.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Kategori Category	Halaman Arsip	Archive Page	Keterangan Information
Media	• MACO PJB • Info PJB • Seputar PJB • *Press Release*	• MACO PJB • PJB Information • About PJB • Press Release	Pada bagian ini pengakses dapat memperoleh informasi mengenai berita-berita aktual dan kegiatan yang dilaksanakan PJB. In this section, the user is able obtain information regarding actual news and activities carried out by PJB.
Kontak Contact	• Alamat Kami • *Feedback Sponsorship*	• Our Address • Feedback Sponsorship	Pada bagian ini pengakses dapat memperoleh informasi alamat kantor dan unit serta terkait *Sponsorship*. In this section, the user is able to obtain information on office and unit addresses as well as related to Sponsorship.

Media internal
Internal media

Perusahaan secara internal menyediakan dukungan untuk dapat membangun komunikasi yang efektif baik secara formal dan informal berupa pertemuan fisik maupun mengunakan media informasi *online*. Komunikasi secara formal dapat melalui forum rapat harian khusus di unit (*daily meeting*), rapat mingguan (*weekly meeting*), rapat bulanan, rapat kerja, upacara bendera, pesan Direksi, dan pertemuan manajemen dengan Serikat Pekerja. Sedangkan secara informal komunikasi dilakukan melalui majalah "Info PJB", *visibility board display* kegiatan, email, portal, BoD *Talk, Plant Walkdown, Briefing* dan Safari Ramadhan.

The Company internally provides support to be able to build effective communication both formally and informally in the form of physical meetings or online information media. Formal communication can be carried out through special daily meeting forums, weekly meetings, monthly meetings, work meetings, flag ceremonies, messages from the Board of Directors, and management meetings with Labor Unions. Meanwhile, informal communication is carried out through "PJB Info" magazine, visibility board display activities, email, portal, BoD Talk, Plant Walkdown, Briefing, and Safari Ramadhan.

Media Sosial
Social Media

Perusahaan juga memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi digital untuk semakin memperluas jangkauan akses informasi bagi individu maupun kelompok melalui media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah. PJB memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan menyediakan akses informasi dan data kepada publik melalui akun Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

The Company also utilizes the development of digital communication technology to increasingly expanding communication range for both individuals and groups through social media as facility of two-way communication. PJB utilizes social media as facility of communication and provides access to information and data to the public through Facebook, Twitter, Instagram, and Youtube.

ptpjb

@ptpjb

ptpjb

PJBTV Media

Media Cetak
Printed Media

Akses informasi dan data melalui media cetak diantaranya berupa *company profile, leaflet*, majalah korporat/buletin Info PJB, buku statistik, Laporan Tahunan (*Annual Report*) serta Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) yang mencakup seluruh kegiatan internal Perusahaan yang perlu diketahui oleh *shareholders* dan *stakeholders* maupun publik. Perusahaan juga menyadiakan media informasi tersebut dalam bentuk *softcopy* khususnya Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) dan Info PJB agar dapat dipublikasikan dan diakses secara luas oleh seluruh *stakeholders*. PJB telah menerbitkan Info PJB sebanyak 10 (sepuluh) edisi sepanjang tahun 2021 dan dapat diakses melalui https://www.ptpjb.com/info-pjb/.

Access to information and data through the printed media, including the Company profiles, leaflets, corporate magazines/info, PJB bulletins, statistical books, Annual Report, and Sustainability Report including all of the Company's internal activities for the shareholders and the stakeholders as well as the public. The Company also provides information media in the form of softcopy, especially Annual Report, Sustainability Report and PJB Info so as to be published and widely accessed by all stakeholders. PJB has published 10 (ten) editions of PJB Info throughout 2021 and can be accessed through https://www.ptpjb.com/info-pjb/.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Media Elektronik Interaktif
Interactive Electronic Media

Perusahaan juga menyediakan akses informasi dan data Perusahaan melalui media elektronik interaktif antara lain berupa *Kiosk*, CD *profile*, LCD TV di kantor pusat & unit dan email. Kiosk merupakan media informasi interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh tamu PJB untuk mengakses *company profile* dan pengumuman lelang PJB. Media informasi berupa CD *profile* dan display LCD TV tersedia di kantor pusat & unit yang menayangkan *company profile*, informasi terbaru terkait PJB dalam bentuk foto dan video dan informasi lain yang perlu diketahui oleh karyawan dan tamu PJB. Selain itu, terdapat juga alamat email PJB yaitu info@ptpjb.com yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi publik yang ingin menanyakan berbagai hal yang berhubungan dengan PJB.

The Company also provides access to the Company information and data through interactive electronic media including kiosks, CD profiles, LCD TVs at the head office &stool and email. Kiosk is an interactive information medium that can be used by PJB guests to access the company profile and announcement of PJB auctions. Information media in the form of CD profiles and LCD TV displays are available at the head office & unit that displays the Company profile, the latest information related to PJB in the form of photos and videos and other information that PJB employees and guests need to know. In addition, there is also PJB email address at info@ptpjb.com that is useful for providing convenience for public who want to ask various things related to PJB.

Publikasi dan Pemberitaan Perusahaan
Company Publications and News

Perusahaan melakukan monitoring atas publikasi dan pemberitaan terkait PJB baik yang dilakukan melalui media informasi Perusahaan maupun oleh media eksternal. Informasi tersebut dapat mempengaruhi citra Perusahaan di mata publik. Publikasi melalui media informasi Perusahaan diantaranya berupa Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*), Info PJB sebanyak 10 (sepuluh) serta 67 *press release*. Sementara itu, pemberitaan oleh media eksternal terkait PJB sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 587 pemberitaan dengan 587 tonasi positif.

The Company monitors publications and news related to PJB, both through the Company's information media and by external media. Such information may affect the Company reputation in the public eyes. Publications through the Company's information media include Annual Report, Sustainability Report, 10 (ten) PJB Info and 67 press releases. Meanwhile, reports by external media related to PJB throughout 2021 contained 587 reports with 587 positive tones.

Pertemuan dengan *Stakeholders*
Meeting with the Stakeholders

Penyediaan akses informasi dan data Perusahaan bagi *satakeholders* juga dilakukan melalui pertemuan langsung baik secara fisik maupun virtual dalam forum-forum tertentu yang melibatkan *satakeholder* Perusahaan. Sepanjang tahun 2021, PJB melakukan beberapa pertemuan dengan para *stakeholder* sebagai berikut:

Access for the Company information and data for the stakeholders is also provided through in-person meetings both physically and virtually in certain forums involving the Company's stakeholders. Throughout 2021, PJB held several meetings with the stakeholders as follows:

Pertemuan dengan *Stakeholders* Tahun 2021
Meeting with the Stakeholders

Stakeholder	Jenis Pertemuan Meeting	Jumlah Total
Pemegang Saham Shareholders	Forum Bisnis Business Forum	1 kali 1 time
Karyawan Karyawan	BOD *Talk* (*Coffee Morning*)	1 kali 1 time
	Plant Walkdown Performance Dialogue (PWPD)	16 kali 16 times
	Serikat Pekerja Labor Union	2 kali 2 times
Pelanggan Customer	*Customer Gathering*	Kantor pusat dan Unit masing-masing 1 kali Head office and Unit 1 time, respectively
Pemasok Supplier	*Supplier Gathering*	Kantor pusat dan Unit masing-masing 1 kali Head office and Unit 1 time, respectively
Media Massa Mass Media	*Media Gathering*	2 kali 2 times

KETERLIBATAN PADA KEGIATAN POLITIK DAN SOSIAL
INVOLVEMENT ON POLITICAL AND SOCIAL ACTIVITIES

Perusahaan termasuk setiap unsur yang ada didalamnya dilarang menggunakan nama dan aset Perusahaan untuk kepentingan politik serta memberikan dana Perusahaan kepada partai politik atau politisi. Selain itu, setiap insan PJB dilarang membawa, memperlihatkan, dan memasang simbol partai politik serta melakukan kampanye dan/atau aktivitas politik lain di lingkungan Perusahaan. PJB menetapkan kebijakan terkait dengan keterlibatan Perusahaan pada kegiatan politik dalam Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PJB.

The Company, including every element within, is prohibited from using the Company's name and assets for political purposes as well as provide the Company's funds to political parties or politicians. Also, every PJB employee is prohibited from carrying, displaying, and installing symbols of political parties as well as making campaigns and/or other political activities within the Company. PJB determines policy related to the Company's involvement on political activities in the Code of Conduct of PJB.

Selain itu, PJB mengutamakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan operasi perusahaan serta mendorong Insan PJB berperan aktif dalam program pengembangan masyarakat yang telah direncakan Perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial Perusahaan.

In addition, PJB prioritizes community development and empowerment around the location of the Company's operations as well as encourages its employees to actively participate in the community development program that has been planned by the Company. The costs incurred for social activities are part of the Corporate Social Responsibility program.

PJB

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

"PJB berpegang teguh pada prinsip-prinsip tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, ketenagakerjaan, masyarakat, dan pengguna jasa. PJB juga berupaya untuk meningkatkan kontribusi positif bagi seluruh *stakeholder* Perusahaan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial secara berkelanjutan"

"PJB upholds the principles of corporate social responsibility towards the environment, employment, society, and customers. PJB also increases its positive contributions to all stakeholders through the implementation of the Corporate Social Responsibility Program sustainably."

Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Commitment to Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibilty* (CSR) mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan. Program tanggung jawab sosial diterapkan oleh PJB sesuai dengan Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.002.K/021/DIR/2019 dan 005.K/DK/PJB/2019 serta Keputusan Direksi No.065.K/010/DIR/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR).

PJB senantiasa mendukung program pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi domestik ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, selain berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang tepercaya bagi pelanggan dan mendukung tingkat kesejahteraan jajaran karyawan, PJB pun memberikan perhatian penuh terhadap kemakmuran masyarakat setempat seraya tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Seluruh komitmen tersebut dituangkan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) di berbagai aspek yang meliputi:

1. ***Organizational Governance***
   PJB menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya terkait hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan seperti Pemegang Saham, masyarakat, dan pihak-pihak internal dalam upaya meningkatkan nilai dan citra Perusahaan sehingga keberlanjutan usaha terjamin.

Corporate Social Responsibility (CSR) requires business entities to establish policies and programs related to their commitment to building sustainable relationships with stakeholders. The corporate social responsibility program is implemented by PJB by following the Company's Ethical Standards (Code of Conduct) set out in the Joint Decrees of the Board of Directors and the Board of Commissioners No.002.K/021/DIR/2019 and 005.K/DK/PJB/2019 and Board of Directors' Decree No.065.K/010/DIR/2013 concerning Guidelines for the Implementation of Social and Environmental Responsibility (CSR).

PJB continuously supports government programs in leading the domestic economy in a better direction. Therefore, in addition to the commitment to trusted services for customers and employee welfare development, PJB is also fully aware of the prosperity of the local community while maintaining the preservation of the surrounding environment. All of these commitments are stated through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs in various aspects which include:

1. **Organizational Governance**
   PJB implements good corporate governance, particularly in the Company's relationship with stakeholders such as Shareholders, the community, and internal parties to increase the value and image of the Company to ensure business sustainability.

2. **Hak Asasi Manusia**
   Dalam menjalankan aktivitas operasional dan bisnisnya, PJB memenuhi tanggung jawab terkait hak asasi manusia, mulai dari hak-hak dasar pribadi hingga sosial, hukum, dan ekonomi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia.
3. **Ketenagakerjaan**
   PJB memperhatikan aspek-aspek ketenagakerjaan yang mencakup pemenuhan hak karyawan serta kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan mencapai *zero accident.*
4. **Lingkungan Hidup**
   PJB memperhatikan dan meminimalisasi dampak operasional terhadap lingkungan serta memberikan kontribusi yang berkesinambungan terkait pelestarian lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Perusahaan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan seiring dengan meningkatkan operasional Perusahaan yang ekselen.
5. **Praktik Operasi yang Adil**
   Program CSR yang dijalankan PJB melingkupi aspek operasional secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Dengan praktik operasi yang adil, maka Perusahaan telah berupaya mengatasi risiko kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap pengadaan yang tidak sesuai dengan regulasi.
6. **Isu Konsumen**
   Agar dapat memberikan kepuasan dan meningkatkan keterikatan bagi konsumen, maka PJB menjalankan aktivitas pemasaran yang terbuka serta berkomitmen melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen. Selain itu, PJB melakukan pengelolaan yang efektif atas layanan konsumen, termasuk layanan keluhan disertai perlindungan atas privasi konsumen.
7. **Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat**
   Sebagai bentuk kontribusi Perusahaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, PJB menekankan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan usaha pemberdayaan dan pengembangan masyarakat

Strategi dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial oleh PJB senantiasa disempurnakan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang

2. **Human Rights**
   In carrying out its operational and business activities, PJB fulfills responsibilities related to human rights, ranging from basic personal to social, legal, and economic rights to ensure that there are no violations of human rights values.

3. **Employment**
   PJB is aware of the employment aspect which covers the fulfillment of employee rights as well as occupational health and safety. This is done as a form of creating a conducive work environment and achieving zero accidents.

4. **Environment**
   PJB considers and minimizes operational impacts on the environment and provides sustainable contributions related to environmental preservation. This initiative is carried out as a form of the Company's commitment to maintaining a sustainable environment aligned with improving the Company's service excellence.

5. **Fair Operating Practices**
   PJB's CSR program covers operational aspects as a whole, from upstream to downstream. With fair operating practices, the Company has overcome the risk of potential violations of procurement practices that are incompliance with the regulation.

6. **Consumer Issues**
   To provide satisfaction and increase engagement for consumers, PJB implements open marketing activities through its commitment to protecting customers' safety and health. Additionally, PJB carries out effective management of customer services, including complaint services along with the protection of customer privacy.

7. **Community Involvement and Development**
   As a form of the Company's contribution to improving community's welfare, PJB emphasizes community involvement in the community empowerment and development effort

The strategies and policies that regulate the implementation of PJB's Corporate Social Responsibility Program are continuously refined by referring to Law no. 40 concerning Limited Liability Companies Article 74 on Social and Environmental Responsibility, Government Regulation No.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. PJB melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat secara umum.

PJB juga melengkapi panduan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dengan menyusun visi, misi, roadmap dan strategi CSR yang senantiasa disempurnakan untuk mendukung strategi korporasi dalam menjaga kelangsungan bisnisnya, serta berkontribusi dalam pemenuhan sasaran pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam implementasinya, CSR PT PJB mengedepankan kaidah *Good Corporate Governance* (GCG) yang dituangkan dalam *roadmap* CSR 2018-2022 guna mendukung pencapaian "*Most Trusted and Preferred Company*" yang tertuang pada peta strategi perusahaan.

47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility. PJB carries out corporate social responsibility as an effort to improve the quality of life and the environment that also has mutual benefit for the Company, the local community, and society in general.

PJB also completes guidelines for implementing corporate social responsibility programs by compiling a vision, mission, roadmap, and CSR strategy that are constantly refined to support corporate strategies in maintaining business continuity, as well as contributing to the fulfillment of Sustainable Development Goals (SDGs) proclaimed by the government. In its practices, PT PJB's CSR puts forward the principles of Good Corporate Governance (GCG) as outlined in the 2018-2022 CSR roadmap to support the achievement of "Most Trusted and Preferred Company" which is contained in the Company's strategy map.

Visi dan Misi CSR PJB
PJB CSR Vision and Mission

Visi CSR PJB PJB'S CSR Vision

Menjadi Perusahaan Energi yang memiliki kinerja tinggi dalam pengelolaan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara harapan pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan untuk menjadi "*most trusted and preferred company*"

To become an Energy Company that performs excellently in managing environmental, social, and economic impacts, by considering the balance between stakeholder expectations and the Company's goal to become the "most trusted and preferred company".

Misi CSR PJB PJB'S CSR Mission

- Meningkatkan reputasi perusahaan melalui peningkatan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan program-program CSR yang lebih berkualitas dan akuntabel.
- Meningkatkan orientasi pengelolaan program yang terukur dampaknya.
- Meningkatkan dukungan terhadap operasi PJB melalui peningkatan penerimaan para pemangku kepentingan terhadap eksistensi PJB sebagai bagian dari masyarakat (*corporate citizenship*).
- Meningkatkan konsistensi komitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan program-program CSR relevan dan unik.
- Meningkatkan kualitas hubungan yang luas dengan para pemangku kepentingan melalui strategi komunikasi yang elegan mempromosikan tema CSR yang kokoh, sesuai dengan tujuan perusahaan dan harapan para pemangku kepentingan.

- Improving the Company's reputation through environmental, social, and economic performance improvement through CSR programs that are more qualified and accountable.
- Improving the orientation of program management whose impact is measurable.
- Increasing support for PJB operations through improving corporate citizenship of stakeholder trust in PJB's existence as part of the community.
- Increasing the consistency of commitment to sustainability and community welfare through the involvement of stakeholders in the management of relevant and unique CSR programs.
- Improving the quality of extensive relationships with stakeholders through well-established communication strategies which promote a solid CSR theme aligned with company goals and stakeholder expectations.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Roadmap CSR 2018-2022
Roadmap CSR 2018-2022

2018	2019	2020	2021	2022
CSR Terdefinisi (Standard) Defined CSR (Standard)		**CSR Terkelola** Managed CSR		**CSR Optimal** Optimal CSR
- Penerapan SOP berstandard - Efektivitas organisasi CSR di Unit PJB - -Implementation of standardized SOPs - Effectiveness of CSR organization in PJB Unit	- Penerapan SOP berstandard - Pengukuran dampak dan *output* dengan metode SROI dan SLIA - Pengelolaan CSR berbasis TI - *Assurance* dan *registered* SR di GRI - SOP implementation with the standard - Risk and output measurement through SROI and SLIA methods - IT-based Management of CSR Program - Assurance and registered SR in GRI	- Pengukuran dampak dan *output* program seluruh unit - Pengelolaan CSR berbasis TI - *Assurance* dan *registered* SR di GRI - Eksposur pengelolaan risiko sosial - Inisiasi program *Co-firing* & *Renewable energy* melalui pemberdayaan masyarakat - Risk and Output Measurement in all units - IT-based Management of CSR Program - Assurance and registered SR in GRI - Social risk management exposure - Initiation of the Cofiring & Renewable energy program through community empowerment	- Pengukuran dampak dan *output* program secara penuh - Metode *Root Cause Analysis* dalam CSR - Pengelolaan CSR berbasis TI - *Assurance* dan *registered* SR di GRI - Budaya Inovasi dalam CSR - *Global* CSR *Awards*; *Global Energy Awards to* CSR - Pengembangan program *Co-firing & Renewable energy* - Full measurement of program impact and output - Root Cause Analysis method in CSR - IT-based CSR management - Assurance and registered SR at GRI - Culture of Innovation in CSR - Global CSR Awards; Global Energy Awards to CSR - Co-firing & Renewable energy program development	- Metode *Root Cause Analysis* dalam CSR - Pengelolaan CSR berbasis TI secara penuh - Budaya Inovasi dalam CSR di Pusat - Perbaikan berkelanjutan untuk siklus CSR - *Global* CSR *Awards*; *Global Energy Awards* to CSR - Pengembangan program *Co-firing & Renewable* - Root Cause Analysis method in CSR - Full IT-based CSR management - Culture of Innovation in CSR at the HO - Continuous improvement for CSR cycle - Global CSR Awards; Global Energy Awards to CSR - Co-firing & Renewable energy program development
Standar Kompetensi CSR; Integrasi CSR dan Komunikasi; PROPER Hijau dan Emas CSR Competency Standards; Integration of CSR and Communication; Green and Gold PROPER				

Untuk menjaga agar pelaksanaan program CSR dapat memberikan dampak yang terukur dan nyata bagi pemberdayaan masyarakat dan menjaga pelestarian lingkungan, PJB memiliki strategi pengelolaan CSR sebagai berikut :

To ensure that the implementation of CSR programs can have a measurable and tangible impact on community empowerment and environmental preservation, PJB has a CSR management strategy as follows:

Strategi CSR PJB
PJB CSR Strategy

Tagline

Energi Pembangkit Negeri
Energi Pembangkit Negeri

Strategi Utama Main Strategies

Mengelola dampak operasi
Memberi manfaat sesuai kompetensi inti
Delivery program berkualitas dan akuntabel
Managing the impact of operations
Providing advantages relevant to the core competency
Delivering high-quality and accountable programs

Fokus pada energi (hijau) keberlanjutan
Komunikasi dan pembinaan hubungan yang efektif
Focusing on Sustainable Energy (Green)
Communcating and fostering effective relationship

Mitra Partner

Perguruan tinggi kredibel, Pemerintah, Konsultan dengan reputasi baik, Lembaga Internasional, dll
Credible College, Government, highly reputable Consultants, International Institution, etc.

Pilar CSR CSR Pillars

PJB Inovasi Cerdas
PJB Smart Innovation

Program CSR terkait kompetensi inti inisiatif Pendidikan untuk mendukung daya saing PJB dan sektor industri kelistrikan nasional: PJB *Class*, Akademi Komunitas
CSR program related to core competency educational initiatives to support the competitive advantages of PJB in the sector of national electricity industry: PJB Class academy

PJB Inovasi Hijau
PJB Green Innovation

Program pemanfaatan sumberdaya yang terkait dengan *community development* & Pengelolaan Dampak dengan karakter HIJAU yang kuat Desa Bangkit Energi, Tabungan Karbon
Resource utilization program which is related to community development and Risk Management through solid GREEN character, of Bangkit Energi Village, Carbon Savings

PJB Unggul
PJB Excellence

Program wirausaha bangkit, ekonomi kreatif dan layanan pelatihan berbahasa asing dan keterampilan bersertifikat: Wirausaha Muda Kreatif, Pusat Pelatihan Keterampilan
Entrepreneur rise program, creative economy, and foreign language training services and certified skills: Creative Young Entrepreneur, Skills Learning Center

PJB Peduli
PJB Care

Program pengelolaan dampak, kepedulian dan relasi sosial. Inisiatif program perilaku hidup sehat, sanitasi lingkungan dan kesehatan; relasi dan kepedulian sosial
The program of Risk Management, charity, and social relationship. The initiatives of healthy-life program, environment sanitation, and health; social relation and charity

Kebijakan Policy

- Sinergi kegiatan dalam proses binsis dengan program CSR
- Tatakelola CSR dengan standard lebih tinggi, terukur serta melibatkan *stakeholder*
- Pengelolaan risiko sosial tingkat pusat dan unit
- Kompetensi *Human Capital* CSR dan kaitan dengan karir kerja (optional)
- Kinerja program sosial dapat diandalkan dan mekanisme perbaikan secara berkelanjutan
- Pengkomunikasian isu strategis kegiatan CSR sebagai jendela PJB dengan tema Energi Pembangkit Negeri
- Pelibatan bidang lain dan internal karyawan untuk promosi CSR
- Pengelolaan program CSR berbasis IT

- Synergy in the business process with CSR programs
- CSR management with higher-level, measurable, and stakeholder-engaged standards
- Social Risk Management at the level of head office and unit
- CSR Human Capital Competency and its relation to career (optional)
- Reliable performance of social programs and the mechanism of continuous improvement
- The disclosure of CSR program's strategic issues as a window for PJB with the theme "Nationally Elevating Energy"
- The Involvement of other fields and internal employee to promote CSR
- IT-based Management of CSR Program

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

PJB secara berkesinambungan berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan CSR serta senantiasa meluaskan ruang lingkup pelaksanaannya dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat secara maksimal yang dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

PJB continuously improves the quality of CSR implementation and expands the scope of its implementation aimed to provide optimal benefits for all stakeholders.

Metode dan Lingkup *Due Diligent* terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktifitas Perusahaan

Due Diligent Methods and Scope of Social, Economic, a nd Environmental Impacts of Company Activities

Untuk mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, PJB terus melaksanakan aktivitas berkelanjutan sebagai tanggung jawab sosial Perusahaan yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada kegiatan yang dilakukan. Perusahaan senantiasa memastikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan telah memenuhi prinsip:

1. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Memenuhi harapan para *stakeholder*;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Konsisten dengan norma perilaku internasional;
5. Terintegrasi ke seluruh kegiatan usaha dan hubungan kerjasama Perusahaan; dan
6. Mendorong perilaku bertanggung jawab pada seluruh bagian organisasi.

To support the sustainability of the Company's business which is focused on economic, social, and environmental aspects, PJB continues to carry out sustainable activities as a corporate social responsibility that has a positive impact to reduce negative impacts on the business activities. The Company always ensures the Company's corporate social responsibility activities to comply with the following principles:

1. Contribute to sustainable development, including public health and welfare;
2. Realize stakeholder expectations;
3. Comply with laws and regulations;
4. Act consistently towards international norms of behavior;
5. Integrate to all business activities and cooperative relationships of the Company; and
6. Encourage responsible behavior in all parts of the organization.

Struktur Pengelola CSR

CSR Management Structure

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tugas dan tanggung jawab Bidang *Stakeholder Management* (BSHM), yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan mengelola program CSR Kantor Pusat. Sementara itu, Bidang Umum dan CSR bertanggung jawab atas pengelolaan program CSR di Unit Pembangkitan.

The implementation of the corporate social responsibility program is the duty and responsibility of the Stakeholder Management Division (SMD), which is under the coordination of the Corporate Secretary to manage the Head Office's CSR program. Meanwhile, General Affairs and CSR Division is responsible for the management of CSR programs in the Generation Unit.

BSHM memiliki peran sebagai organ penghubung komunikasi antara Perusahaan dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab BSHM sebagai pengelola CSR PJB antara lain melakukan pemetaan sosial, menyusun perencanaan, eksekusi program, pemantauan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Tiap pemimpin dalam organ BSHM bertugas dan bertanggung jawab dalam memastikan pengelolaan hubungan baik Perusahaan dengan masyarakat dan Pemerintah, khususnya melalui pelaksanaan program CSR. Secara struktural, Kepala Bidang SHM membawahi Manajer CSR & Komunikasi Korporasi. Di Unit Pembangkitan, pengelolaan CSR PJB dipimpin oleh General Manager yang membawahi Manajer Keuangan dan Administrasi. Dalam mengelola pelaksanan CSR, Manajer Keuangan dan Administrasi membawahi Supervisor Umum dan CSR serta Staf CSR.

SMD has a role as a liaison between the Company and the community. The duties and responsibilities of SMD as the manager of PJB CSR cover conducting social mapping, planning, program execution, monitoring, and periodic evaluation of program effectiveness. Each leader in the SMD organ has the duty and responsibility to ensure the management of good relations between the Company and the community as well as with the Government, especially in the context of CSR programs. Structurally, the Head of the SMD Division supervises the CSR & Corporate Communications Manager. In the Generation Unit, the management of PJB CSR is led by the General Manager who supervises the Finance and Administration Manager. In managing the implementation of CSR, the Finance and Administration Manager supervises the General Affairs and CSR Supervisors and CSR Staff.

Metode Perumusan CSR PJB
PJB CSR Formulation Method

Sebelum menetapkan program tanggung jawab sosial, PJB melakukan *social mapping* dengan pemangku kepentingan untuk melakukan proses identifikasi masalah sosial yang terjadi di lingkungan Perusahaan, dan menetapkan sasaran dari program tanggung jawab sosial yang akan dirancang. Hal ini dilakukan agar sasaran dan program yang dibuat selaras sehingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan dapat berjalan secara tepat dan efektif sesuai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar Perusahaan, maupun potensi yang ada di lingkungan sekitar, untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dengan keberadaan PJB.

Ruang lingkup pelaksanaan program tangung jawab sosial Perusahaan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, olah raga, bencana alam serta lingkungan hidup. Namun, PJB telah memfokuskan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial menjadi 5 macam kegiatan yaitu *Empowerment, Capacity Building*, Infrastruktur, *Charity* dan Kejadian Luar Biasa (KLBS). Penerapan dari program tanggung jawab sosial tersebut merupakan pemenuhan kewajiban PJB atas aktivitas bisnis yang berpotensi menimbulkan masalah bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar Perusahaan.

Before establishing the corporate social responsibility program, PJB conducts social mapping with stakeholders to identify the social problems that occur in the Company's environment and determine the goals of the corporate social responsibility program to be designed. This is done so that the targets and programs can be aligned for the implementation of the Company's social responsibility programs to run appropriately and effectively based on the problems that occur in the surrounding environment, as well as potential risks in the surrounding environment, to meet community expectations with the presence of PJB.

The scope of the implementation of corporate social responsibility programs is in the aspects of education, health, social assistance, sports, natural disasters, and the environment. However, PJB CSR is only focused on 5 types of activities: Empowerment, Capacity Building, Infrastructure, Charity, and Extraordinary Events. The implementation of the corporate social responsibility program is the fulfillment of PJB's responsibilities for business activities that have the potential to cause problems for the environment and the local community.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Pemangku Kepentingan Utama
Key Stakeholders

Menurut Perusahaan, pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki dampak dan/atau terdampak oleh operasional Perusahaan. Dengan adanya interaksi yang positif, maka keberlanjutan usaha, juga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan dapat dilaksanakan dengan optimal demi sebesar-besarnya manfaat bagi pemangku kepentingan. PJB telah mengidentifikasi dengan seksama kelompok-kelompok pemangku kepentingan utama, berdasarkan pengaruh dominan kelompok-kelompok tersebut terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) PJB terdiri antara lain:

For the Company, stakeholders are those who have an impact and/or are affected by the Company's operations. With positive interactions, business sustainability and the implementation of corporate social responsibility and environmental sustainability can be carried out optimally to provide the highest value for stakeholders. PJB has carefully identified the main stakeholder groups, based on the dominant influence of these groups on the sustainability of the Company's business. PJB's stakeholders consist of:

Stakeholders Utama
Main Stakeholders

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Mekanisme Keterlibatan Engagement Mechanism	Isu/Topik Issues/Topics
Pihak Internal Internal Parties		
Pemegang Saham **Shareholders**	- RUPS - Rapat Kerja - Laporan Kinerja - GMS - Work Meeting - Performance Report	- Peningkatan Kinerja Perusahaan; - Dukungan Pada Kepentingan Pemegang Saham. - Improved Company Performance; - Support in the Interests of Shareholders.
Karyawan **Employee**	- Perjanjian Kerja Bersama - Pendidikan dan Pelatihan - Serikat Pekerja - Collective Labor Agreement - Education and Training - Workers Union	- Terjaminnya kesejahteraan Pegawai dan keluarganya; - Suasana kerja kondusif, sehat, dan aman; - Jenjang karir dan penilaian kinerja yang jelas, setara, dan tidak terdapat praktik diskriminasi. - Guaranteed welfare of employees and their families; - Conducive, healthy and safe work environment; - Career paths and performance assessments are clear and fair without any act of discrimination.
Pihak Eksternal External Parties		
Masyarakat **Public**	- Komunikasi melalui media telepon dan tertulis; - Kegiatan *Corporate Social Responsibility* - Pelatihan Masyarakat; - Forum koordinasi - Communication by telephone and in writing; - Corporate Social Responsibility Activities - Community Training; - Coordination forums	- Dapat tumbuh dan berkembang selaras dengan berkembangnya PJB; - Hubungan yang harmonis; - Dampak negatif terhadap lingkungan terminimalisir. - Able to grow and develop aligned with PJB's business development; - Harmonious relationship; - Negative impacts on the environment can be minimized.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Mekanisme Keterlibatan Engagement Mechanism	Isu/Topik Issues/Topics
Pelanggan **Customer**	- Survei Kepuasan Pelanggan - Rapat Koordinasi - Komunikasi melalui media masa - Customer Satisfaction Survey - Coordination Meeting - Communication through mass media	- Kontinuitas dan keandalan pasokan energy listrik - Harga jual yang bersaing - Continuity and reliability of electrical energy supply - Competitive selling price
Pemasok/Mitra Kerja **Suppliers/Partners**	- Kontrak dan Perjanjian; - *Vendor Gathering;* - Contracts and Agreements; - Vendor Gathering;	- Proses pengadaan yang adil dan transparan; - Pembayaran tepat waktu; - Hubungan yang harmonis - Fair and transparent procurement process; - Timely payment; - Harmonious relationship
Pemerintah **Government**	- Kepatuhan terhadap Peraturan; - Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan subsidi) - Compliance with Regulations; - Economic contribution to the Government (taxes and subsidies)	- Kepatuhan terhadap peraturan; - Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan subsidi) - Compliance with regulations; - Economic contribution to the Government (taxes and subsidies)
Media Massa **Mass media**	- Konferensi pers - Press conference	- Mendapatkan akses informasi yang mudah dan luas - Convenience and broad information access
Investor **Investors**	- Kontrak dan Perjanjian; - Contracts and Agreements;	- PJB *Strategic Partnership* dengan perusahaan swasta (nasional/asing) - PJB Strategic Partnership with private companies (national/foreign)
Lembaga Pendidikan/ Perguruan **Educational Institutions/ Universities**	- Penelitian dan Pengembangan SDM/teknologi pembangkit - HR Research and Development/power generation technology	- MOU kerjasama penelitian dan pengembangan inovasi teknologi - Bimbingan Akademisi untuk peningkatan kompetensi SDM - MOU on technological innovation research and development cooperation - Academic assistance for HR competency improvement

Pengelolaan Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan atas Dampak Aktifitas Bisnis Perusahaan

Management of the Social, Economic, and Environmental Impacts of the Impacts of the Company's Business Activities

PJB telah memetakan pemangku kepentingan yang berdampak dan terdampak dari aktivitas Perusahaan. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk dalam proses pemetaan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasi PJB, dan respon PJB terhadap dampaknya kepada pemangku kepentingan.

PJB has mapped the impacted and affected stakeholders from the Company's activities. Stakeholder involvement is very necessary for the mapping process. This relates to the impact of PJB's operational activities, and PJB's response to its impact on stakeholders.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Aspek Aspect	Isu-Isu Penting Sosial Ekonomi dan Lingkungan	Important Socio-Economic and Environmental Issues
Lingkungan Hidup Environment	1. Pengelolaan dan penggunaan Air; 2. Pengelolaan Emisi; 3. Pengelolaan Limbah (B3 dan non-B3); 4. Konsumsi Energi; 5. Kelestarian lingkungan.	1. Water management and use; 2. Emission Management; 3. Waste Management (Toxic and non-Toxic Waste); 4. Energy Consumption; 5. Environmental sustainability.
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social and Community Development	1. Implementasi program *Community Development* unggulan; 2. Penyediaan lapangan kerja; 3. Pemerataan Bantuan CSR ke masyarakat; 4. Masalah Lingungan;	1. Implementation of excellent Community Development programs; 2. Provision of employment opportunities; 3. Equitable distribution of CSR assistance to the community; 4. Environmental Problems;
Kenetagakerjaan dan K3 Employment and K3	1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Kesehatan dan keselamatan Tenaga Kerja; 3. Kesejahteraan karyawan; 4. Pengembangan kompetensi;	1. Legal compliance; 2. Occupational health and safety; 3. Employee welfare; 4. Competency development;
Konsumen Consumer	1. Pemberian layanan dengan standar kualitas yang baik kepada pelanggan; 2. Pemenuhan komitmen Perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan; 3. Penerimaan, pelayanan, dan penanganan pengaduan pelanggan atas kinerja Perusahaan.	1. Excellent quality services to customers; 2. Fulfillment of the Company's commitment to the improvement of customer satisfaction; 3. Receiving, servicing, and handling customer complaints regarding the Company's performance.
HAM Human Rights	Penguatan hubungan industri melalui penghargaan terhadap HAM dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Strengthening industrial relations through respect for human rights and obligations following applicable regulations.
Operasi yang Adil Fair Operation	Kompetensi profesional dan integritas yang diandalkan dalam kegiatan bisnis Perusahaan.	Professional competence and integrity are relied upon in the Company's business activities.
Anti Korupsi Anti-Corruption	PJB tidak menoleransi korupsi maupun *fraud* dalam bentuk apapun. Selama ini PJB telah konsisten menerapkan anti-korupsi hingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas tinggi.	PJB does not tolerate corruption or fraud in any form. So far, PJB has consistently applied anti-corruption to create a clean and high-integrity work environment.

Berdasarkan dampak di atas, PJB telah melakukan penanggulangan terhadap dampak tersebut, yaitu Pengelolaan Emisi Udara dengan menggunakan alat pengendali seperti *electronic presipitator* (ESP); pengukuran emisi gas buang, kualitas udara ambien dan kebisingan, serta penggunaan bahan bakar gas yang termasuk ramah lingkungan, Program Konservasi Air, Pengelolaan Limbah Cair, Limbah B3, dan Limbah Padat Non B3, Perlindungan Keanekaragaman hayati dengan sejumlah upaya pelestarian seperti konservasi terumbu karang di UP Gresik, UP Paiton,

Based on the above impacts, PJB has taken countermeasures against these impacts, namely Air Emission Management by using control devices such as electronic precipitators (ESP); measurement of exhaust emissions, ambient air quality, and noise, as well as the use of environmentally friendly gas fuels, Water Conservation Program, Management of Liquid Waste, Toxic Waste, and Non-Toxic Solid Waste, Protection of Biodiversity with several conservation efforts such as coral reef conservation in Gresik GU, Paiton GU, and Muara Tawar GU, Cooperation with local suppliers. In addition, PJB also

dan UP Muara Tawar, Kerjasama dengan pemasok lokal. Selain itu, PJB juga melakukan perekrutan tenaga lokal sebagai karyawan non-organik dan alternatif lainnya melalui program pemberdayaan masyarakat, contohnya adalah program Desa Wisata Binor Harmony. PJB juga senantiasa menghormati hak-hak karyawan dan melakukan sosialisasi terkait GCG *code*, CoC, Gratifikasi dan WBS kepada seluruh karyawan agar terciptanya tata kelola Perusahaan yang baik dan lingkungan Perusahaan yang bersih.

recruits local workers as non-organic employees and other alternatives through community empowerment programs, for example, the Binor Harmony Tourism Village program. PJB also respects the rights of employees and campaigns the GCG Code, CoC, Gratification, and WBS to all employees to implement Good Corporate Governance and create a clean Company environment.

Rencana dan Realisasi Program Tanggung Jawab Sosial
Corporate Social Responsibility Program Plan and Realization

Program tanggung jawab sosial PJB telah dimasukan dalam RKAP disetiap tahunnya. Anggaran tersebut berasal dari internal Perusahaan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan CSR di bidang pemberdayaan, pengembangan kapasitas, infrastruktur dan donasi. Anggaran program tanggung jawab sosial PJB tahun 2021 sebesar Rp42,106 miliar meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp39,14 miliar. Beberapa program CSR tidak dapat dilaksanakan selama pandemi karena PJB menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan sehingga intensitas kunjungan lapangan secara langsung dikurangi dan pelaksanaan program sebisa mungkin dilakukan secara daring untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pihak.

PJB's corporate social responsibility program has been included in the ABOP. The budget comes from the Company's internal which is allocated for CSR activities in the segments of empowerment, capacity development, infrastructure, and donations. The budget for PJB's CSR program in 2021 is Rp 42.106 billion, an increase compared to 2020 of Rp 39.14 billion. Some CSR programs cannot be implemented during the pandemic since PJB applies an approach that is adjusted to the health protocol; therefore, the intensity of field visits is reduced and mostly held online to prioritize the occupational safety and health of all parties.

Anggaran dan Realisasi Biaya CSR Tahun 2021 (dalam jutaan)
Budget and Realization of CSR Costs in 2021 (in millions)

No.	Tipologi Typology	RKAP 2021 2021 ABOP	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian terhadap RKAP Achievement of ABOP
1	*Empowerment*	15,193	11,510	76%
2	*Capacity Building*	10,745	10,629	99%
3	Infrastruktur Infrastructure	6,406	5,091	79%
4	*Charity*	5,871	4,417	75%
5	KLBS Extraordinary Events	3,890	3,513	90%
Total		**42,106**	**34,159**	**84%**

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Pengukuran Capaian Program Tanggung Jawab Sosial

Achievement Indicators of Corporate Social Responsibility Program

Untuk mengukur seberapa tepat capaian Perusahaan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dibandingkan dengan dampak yang ada dari kegiatan bisnis PJB, maka dibuatlah laporan untuk me*review* hasil realisasi program tanggung jawab sosial. Hal ini bertujuan agar apa yang telah direncanakan oleh pihak manajemen dapat lebih terukur dan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai pelaksanaan program tanggung jawab sosial kedepan. Pengukuran ini akan menimbulkan kesinambungan antara program tanggung jawab sosial yang terealisasi saat ini dengan rencana program tanggung jawab sosial ditahun berikutnya. Sehingga kedepannya diharapkan akan menjadi sebuah program tangung jawab sosial yang berkelanjutan.

PJB juga melaksanakan pengukuran melalui pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala setiap tahunnya yang merupakan bentuk dari pemantauan dan evaluasi. IKM menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan. Beberapa komponen penilaiannya berupa tingkat kepuasan terhadap keseluruhan program CSR, tingkat kepuasan terhadap manajemen program CSR, serta tingkat kepuasan pelayanan dan penyaluran program CSR. Selain itu, beberapa Unit Pembangkitan pun mengukur dampak kebermanfaatan program CSR terhadap pengembangan masyarakat yang terjadi melalui *studi Multiplier Effect* (MPE) dan *Social Return on Investment* (SROI). Dengan demikian, General Manager dari masingmasing unit terlibat untuk menentukan langkah berikutnya atas tindak lanjut terhadap capaian program CSR.

To measure how accurate the Company's achievements in implementing corporate social responsibility programs are compared to the existing impacts of PJB's business activities; a report is made to review the results of the realization of social responsibility programs. This is intended so that what has been planned by the management can be more measurable and can be used as evaluation material regarding the implementation of corporate social responsibility programs in the future. This measurement will create continuity between the currently realized CSR program and the planned CSR program in the following year. Thus, it is expected that it can become a sustainable CSR program in the future.

PJB also carries out measurements through the Community Satisfaction Index (CSI) approach annually which is a form of monitoring and evaluation. CSI shows the level of community satisfaction with the CSR program implemented by the Company. Some of the assessment components are the level of satisfaction with the overall CSR program, the level of satisfaction with the management of the CSR program, and the level of satisfaction with services and distribution of CSR programs. In addition, several Generation Units also measure the impact of the benefits of CSR programs on community development through studies of the Multiplier Effect (MPE) and Social Return on Investment (SROI). Thus, the General Manager of each unit is involved in determining the next steps for following up on the achievements of the CSR

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial *Core Subject* Hak Asasi Manusia
Commitment and Policy on Corporate Social Responsibility's Core Subject on Human Rights

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan Sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, HAM mencakup hal-hak terkait analisa dampak keputusan dan kegiatan, situasi berisiko terkait HAM, menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, diskriminasi dan kelompok marjinal, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

PJB menghormati Hak Asasi Manusia dan memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi HAM. PJB senantiasa berupaya memenuhi HAM dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku secara universal serta ketentuan Perusahaan. Komitmen anti diskriminasi di lingkungan kerja dan nilai-nilai lainnya telah dimuat dalam *Code Of Conduct* PJB. Hak-hak karyawan pun diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan berdasarkan Keputusan Bersama antara PT PJB dengan Serikat Pekerja PJB Nomor PT PJB: 003.K/021/DIR/2019 dan No. SP PJB: 067.K/SP-DPP/2019. PKB disusun mengacu pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Human Rights (HAM) are inherent, absolute, universal, inseparable, and interdependent rights, which are aligned with the 2nd Principle of Pancasila: Just and Civilized Humanity. In ISO 26000 on Guidelines for Social Responsibility, Human Rights cover matters related to the analysis of the impact of decisions and activities; risk situations on human rights; collusive prevention; handling a complaint, discrimination, and marginalized groups; civil and political rights; economic, social and cultural rights; and basic principles and rights to work.

PJB respects human rights and is committed to continuing to uphold human rights. PJB always strives to fulfill human rights by referring to universally applicable provisions and internal regulations. Commitment to anti-discrimination in the work environment and other values have been contained in PJB's Code Of Conduct. The rights of employees are also regulated in a Collective Labor Agreement (PKB) which was ratified based on a Joint Decree between PT PJB and the PJB Workers Union No. PT PJB: 003.K/021/DIR/2019 and No. SP PJB: 067.K/SP-DPP/2019. The PKB was prepared to refer to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Regulation of the Ministry of Manpower No. 28 of 2014 concerning Procedures for Preparing and Legalizing Company Regulations as well as Establishment and Registration of Collective Labor Agreements.

Rumusan Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Sosial *Core Subject* Hak Asasi Manusia
Company Formulation on CSR in the Scope of Core Subject Human Rights

Rumusan Perusahaan dalam lingkup hak asasi manusia adalah tanggung jawab Perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. PJB dituntut untuk tidak melanggar hak asasi seseorang dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional Perusahaan. Lingkup

The Company's formulation of the scope of human rights is the Company's responsibility to respect human rights. PJB is required not to violate a person's human rights by avoiding, reducing, or preventing the negative impact of the Company's operations. The scope of the Company's social responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

tanggung jawab sosial Perusahaan terkait hak asasi manusia antara lain pemangku hak di tempat kerja dan pemangku hak di komunitas yang berpotensi terkena dampak negatif dari kegiatan Perusahaan. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut tercermin dengan telah diterapkannya praktik non-diskriminasi, perhatian pada kelompok rentan, menghormati hak-hak sipil dan politik, menghormati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar, serta hak-hak dasar pegawai.

related to human rights includes, among others, rights holders in the workplace and rights holders in the community who have the potential to be negatively affected by the Company's activities. Legal compliance is reflected in the implementation of non-discrimination practices, attention to vulnerable groups, respect for civil and political rights, respect for the economic, social, and cultural rights of the surrounding community, as well as the basic rights of employees.

Rencana Kegiatan Tahun 2021
2021 Activity Plan

Rencana Perusahaan terkait penerapan tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia sejalan dengan komitmen PJB dan setiap unsur di lingkungan Perusahaan. Secara spesifik, untuk menghargai hak asasi manusia secara mendasar serta sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja karyawan untuk menjadi lebih baik, termasuk dalam mempertahankan loyalitas karyawan, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah penghargaan yang komprehensif. PJB tidak hanya fokus pada besaran remunerasi, *benefit*, tetapi juga melakukan intervensi kesehatan agar karyawan memiliki *mindset* gaya hidup sehat, yaitu sehat dalam pola makan, pola pikir dan pola hidup. PJB menekankan pentingnya penghargaan kepada setiap Karyawan, tidak hanya sebatas menghargai secara materi.

The Company's plan related to the implementation of corporate social responsibility on human rights is in line with the commitment of PJB and all elements of the Company. Specifically, to respect basic human rights and as an effort to support the improvement of employee performance for the better, including maintaining employee loyalty, one aspect that must be considered is a comprehensive award. PJB does not only focus on the amount of remuneration and benefits but also conducts health interventions so that employees have a healthy lifestyle mindset, namely healthy eating patterns, mindsets, and lifestyles. PJB emphasizes the importance of respect for each employee besides material appreciation.

Rencana program tanggung jawab sosial terkait HAM terhadap karyawan PJB meliputi kesetaraan dalam kesempatan kerja dan pengembangan kompetensi, keadilan dalam pengupahan dan penghapusan diskriminasi, serta perlindungan penyaluran aspirasi dan pengaduan karyawan. Disamping itu, PJB senantiasa melaksanakan sosialisasi kebijakan baik *Code of Conduct* maupun PKB secara berkala untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak agar prinsip HAM dapat ditegakkan secara konsisten. PJB juga memberlakukan pemberian sanksi bagi seluruh karyawan yang melakukan tindakan pelanggaran ketentuan Perusahaan berdasarkan BAB III Pasal 6 ayat 5 Peraturan Direksi PT PJB Nomor: 0009.P/019/DIR/2021 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT PJB.

The plan for corporate social responsibility programs on human rights for PJB employees includes equality in employment opportunities and competency development, fairness in wages, and elimination of discrimination, as well as protection for the distribution of employee aspirations and complaints. In addition, PJB always carries out policy socialization, both Code of Conduct and PKB regularly to improve the understanding of all parties so that human rights principles can be consistently enforced. PJB also imposes sanctions for all employees who violate the provisions of the Company based on Chapter III Article 6 paragraph 5 of the Regulation of the Board of Directors of PT PJB Number: 0009.P/019/DIR/2021 concerning the Disciplinary Regulations for Employees of PT PJB.

Pelaksanaan Inisiatif CSR Bidang Hak Asasi Manusia
Implementation of Human Rights CSR Initiatives

Melalui Laporan Tahunan PJB menginformasikan realisasi dari kegiatan yang telah diimplementasikan berkaitan pelaksanaan inisiatif CSR bidang HAM. Perusahaan telah merumuskan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan aspek HAM. Perusahaan berkomitmen untuk dapat memenuhi berbagai ketentuan terkait HAM, baik yang berlaku bagi karyawan maupun masyarakat. Pemenuhan ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Through this annual report, PJB informs the realization of activities that have been implemented related to the implementation of CSR initiatives in the field of Human Rights. The Company has formulated several activities related to human rights aspects. The company is committed to being able to fulfill various provisions related to human rights, both those that apply to employees and the community. The fulfillment of these provisions can be explained as follows:

Hak untuk Mengembangkan Potensi Diri, Minat dan Bakat
Right to Develop Potentials, Interests, and Talents

Setiap karyawan berhak untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat yang ada didalam dirinya. Hak dasar ini diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 21 Tahun 2000 serta didalam Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut menjelaskan jika setiap karyawan berhak untuk mengembangkan potensi kerja dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat yang dimiliki. Selain itu didalam Undang-Undang tersebut, pemerintah juga menjelaskan jika setiap karyawan mempunyai hak untuk terlindungi dari tindak kejahatan asusila. Komitmen anti diskriminasi diatur dalam *Code Of Conduct* yang memuat larangan bagi karyawan untuk mengeluarkan pernyataan yang mengejek, menyinggung dan memojokkan suatu gender, suku, ras, agama, asal usul dan hambatan fisik seseorang serta menghasut pihak lain untuk melakukan tindakan diskriminatif.

Every employee has the right to develop the possessed potential, interests, and talents. This basic right is regulated in the Manpower Act No. 21 of 2000 and the Manpower Act No. 13 of 2003. These laws explain that every employee has the right to develop work potential and have the opportunity to develop their interests. In addition to these laws, the government also explains that every employee has the right to be protected from immoral crimes. The anti-discrimination commitment is regulated in the Code of Conduct, which prohibits employees from issuing statements that mock, offend and intimidate a person's gender, ethnicity, race, religion, origin, and physical disability as well as inciting other parties to take discriminatory actions.

Kesempatan yang sama dalam meniti jenjang karir diberikan kepada seluruh karyawan termasuk karyawan wanita. Pada tahun 2021 karyawan wanita yang menduduki jabatan managerial sebanyak 73 karyawan atau sebesar 18.5% dari total pejabat struktural, yang meliputi 10 karyawan pada level Manajemen Menengah, 23 karyawan pada level Manajemen Dasar, dan 40 karyawan pada level *Supervisor* Atas. Hal ini mencerminkan bahwa pengembangan karir karyawan mengutamakan *performance* karyawan dan tidak terdapat diskiriminasi gender. Setiap karyawan PJB juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengembangan kompetensi dan mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh PJB *Academy*.

Fair career opportunities are also granted to all employees, including female employees. In 2021, 73 female employees were holding managerial positions or 18.5% of the total structural officers, which includes 10 employees at the Middle Management level, 23 employees at the Basic Management level, and 40 employees at the Upper Supervisor level. This reflects that employee career development prioritizes employee performance without any act of gender discrimination. Every PJB employee also has an equal opportunity to receive competency development and participate in education and training programs managed by PJB Academy.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

Hak untuk Mendapat Jaminan Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Right to Social Security and Occupational Health and Safety

Didalam Peraturan Menaker Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri No 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, pemerintah menjelaskan mengenai hak dasar yang diperoleh oleh setiap karyawan yaitu jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

In the Ministry of Manpower Regulation No. 5 of 2021, Ministerial Regulation No. 1 of 1998, and Law No. 13 of 2003, the government explains the basic rights granted to every employee which are health insurance, old-age insurance, life insurance, and occupational accident insurance.

Perlindungan atas keselamatan karyawan diterapkan melalui program dan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PJB senantiasa menerapkan sistem manajemen K3 dan mendorong implementasi budaya K3 agar setiap karyawan taat pada prosedur dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja (*zero accident*).

Protection for employee safety is implemented through Occupational Health and Safety (OHS) programs and activities. PJB always implements an OHS Management System and encourages the implementation of an OHS culture so that every employee obeys the procedures in carrying out their work to achieve zero accidents.

Hak untuk Mendapatkan Upah Layak
Right to Receive Decent Wage

Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku pada provinsi, kota atau kabupaten tempat perusahaan berdiri. Selain itu perusahaan juga diwajibkan untuk meninjau besaran upah setiap pergantian tahun agar upah yang didapat oleh karyawan tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan perusahaan tidak boleh bertindak diskriminatif kepada setiap karyawan maupun karyawati. Aturan tersebut tertuang didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Every employee is entitled to a decent wage following the applicable Minimum Wage provisions in the province, city, or district where the company is established. In addition, the Company is also required to review the number of wages annually so that the wages earned by employees are still sufficient to meet their living costs; and, the Company must not discriminate against male employees against female employees. These regulations are contained in the Manpower Act No. 13 of 2003.

Pencegahan Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa
Prevention of Child and Forced Labor

PJB tidak menerima pekerja di bawah umur sebagaimana amanat Pasal 68 dan 69 Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur larangan mempekerjakan anak atau orang yang berumur di bawah 15 tahun. Karyawan aktif PJB didominasi oleh karyawan yang berada pada usia 26-30 tahun dengan jumlah 881 orang atau 28,6% dari jumlah karyawan PJB 2021. Sedangkan, karyawan dengan usia 18-20 tahun berjumlah 2 orang dari jumlah karyawan PJB 2021.

PJB does not hire underage workers as mandated by Articles 68 and 69 of Law No. 13 concerning Manpower which regulates the prohibition of employing children or persons aged under 15 years. PJB's active employees are dominated by employees aged 26-30 years with a total of 881 persons or 28.6% of the total number of PJB employees in 2021. Meanwhile, employees aged 18-20 years are 2 persons from the entire number of PJB employees in 2021.

Pencegahan praktik kerja paksa di lingkungan PJB diterapkan dengan mengatur waktu kerja karyawan yang telah dimuat dalam SK 098.K/010/DIR/2014 tentang Ketentuan Masuk Kerja Karyawan PJB. Pengaturan waktu kerja juga dimuat dalam PKB Pasal 27 tentang waktu kerja dan hari libur dan Pasal 28 tentang Kerja Lebih. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara konsisten sehingga tidak terjadi insiden kerja paksa yang dialami oleh karyawan PJB

The prevention of forced labor practices within PJB is implemented by regulating the working time of employees which has been contained in SK 098.K/010/DIR/2014 concerning Provisions for PJB Employees' Work Entry. The work hour arrangements are also contained in Article 27 of the CLA concerning working hours and holidays and Article 28 concerning Overtime. This policy has been implemented consistently so that there is no forced labor act in PJB.

Hak Untuk Cuti, Istirahat dan Memperoleh Pembatasan Waktu Kerja
Right to Leave, Break, and Proper Working Hours

Setiap perusahaan wajib memberikan kompensasi apabila karyawan bekerja diluar jam kerja yang telah ditentukan dengan memberikan upah lembur. Selain itu karyawan juga mendapatkan hak untuk dapat menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Every company is obliged to provide compensation if employees work overtime that have been determined by providing overtime wages. In addition, employees also have the right to be able to perform religious worship based on their religion and beliefs.

Hak Dasar Perlindungan PHK
Basic Rights to Adjust Work Termination

Saat perusahaan hendak melakukan PHK terhadap karyawannya, maka karyawan berhak untuk meminta perusahaan mempertimbangkan segala hal dan meminta pihak perusahaan untuk melakukan perundingan agar dapat menemukan titik terang atau jalan keluar terbaik dari permasalahan yang terjadi dan tidak berujung Pemutusan Hubungan Kerja

When the Company plans to lay off its employees, the employee has the right to ask the Company to consider everything and negotiate to find a better result or resolution of the problems that occur to prevent the termination.

Hak Penyaluran Aspirasi Politik
Right to Express Political Aspirations

PJB memberi kebebasan bagi karyawan maupun manajemen untuk menyalurkan aspirasi politik, namun terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi. Untuk kegiatan aktivitas politik maka Perusahan mempertahankan sikap netral terhadap partai politik. Oleh karena itu, PJB tidak memberikan bantuan dalam bentuk dana ke partai politik, politisi, atau calon pejabat di negara. Hal ini telah diatur oleh PT Pembangkit Jawa Bali dalam bentuk *Code of Conduct* dan Peraturan Direksi PT PJB Nomor:0009.P/019/DIR/2021 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT PJB.

PJB provides freedom for employees and management to channel political aspirations, but some limitations must be adhered to. For political activities, the Company maintains a neutral attitude towards political parties. Therefore, PJB does not assist in the form of funds to political parties, politicians, or candidates for officials in the country. This has been regulated by PT Pembangkit Jawa Bali in the form of a Code of Conduct and PT PJB's Board of Directors Regulation Number: 0009.P/019/DIR/2021 concerning PT PJB Employee Discipline Regulations.

Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya
Social, Economic and Cultural Rights

PJB sangat menghormati Hak Masyarakat Adat memberikan dukungan penuh bagi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Melalui Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis Perusahaan menerapkan standar terkait penghormatan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan mempertimbangkan 8 kemampuan Perusahaan, Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan program sosial kemasyarakatan dengan cara:

PJB highly respects the Rights of Indigenous Peoples and provides full support for the economic, social, and cultural development of the community. Through the Guidelines for Work Ethics and Business Ethics, the Company applies standards related to respect for the economic, social, and cultural rights of the community, following the mandate of the Limited Liability Company Law. 40 of 2007 and taking into account the 8 capabilities of the Company, the Company is committed to implementing community social programs by:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

1. Memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan mengacu pada prosedur dan kebijakan Perusahaan.
2. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras, golongan dan/atau alasan apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan dan/atau kegiatan-kegiatan usaha kecil dan menengah.

1. Assisting the community based on their needs and abilities by referring to the Company's procedures and policies.
2. Not taking actions that lead to community discrimination based on ethnicity, religion, race, class, and/or any reason that is contrary to the applicable laws and regulations.
3. Empowering the community through education and skills and/or small and medium business activities.

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran HAM
Procedures and Mechanisms to Report Violations against Human Rights

PJB mengatur mekanisme pengendalian konflik ketenagakerjaan baik terkait HAM maupun permasalahan lainnya dalam Peraturan Direksi PT PJB Nomor : 0009.P/019/DIR/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT PJB.

PJB regulates the mechanism for controlling labor conflicts both related to human rights and other issues in the Regulation of the Board of Directors of PT PJB Number: 0009.P/019/DIR/2021 on May 18, 2021, concerning the Disciplinary Regulations for PJB's Employees.

Dampak Kegiatan dan Pencapaian
Activity Impacts and Achievements

Berkat implementasi dan pengawasan yang baik, sepanjang tahun 2021 PJB tidak pernah mendapat teguran dan sanksi dari pihak berwenang terkait pelanggaran hak asasi manusia seperti pengaduan tindakan diskriminasi, insiden pelanggaran maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkungan PJB serta insiden kerja paksa yang dialami pekerja Perusahaan. Hingga akhir tahun 2021, tidak terdapat laporan, baik dari karyawan maupun masyarakat terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PJB. Hubungan PJB dengan masyarakat sekitar area operasional pun terjalin baik dan harmonis. Partisipasi PJB melalui program CSR telah menciptakan peningkatan kesejahteraan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, PJB tidak menerima pengaduan terkait pelanggaran HAM yang menyebabkan gangguan operasional akibat konflik dengan masyarakat sampai dengan tahun 2021. Ke depan, PJB berharap masyarakat dapat terus tumbuh selaras dengan perkembangan Perusahaan.

Through proper implementation and supervision in 2021, PJB did not receive any warning or sanction from the authorities related to human rights violations such as complaints of acts of discrimination, incidents of violations, and complaints related to freedom of association within PJB as well as acts of forced labor in the Company. As of the end of 2021, there were no reports, either from employees or the public regarding human rights violations committed by PJB. PJB's relationship with local communities around the operational area is harmoniously established. PJB's participation in CSR programs has created an increase in welfare and provided broad benefits for the community. Therefore, PJB has never received any complaint received related to human rights violations that may cause operational setbacks due to conflicts with the community until 2021. In the future, PJB hopes that the community can continue to grow in line with the development of the Company.

Penghargaan Terkait HAM
Awards for the Act of Human Rights

Selama Tahun 2021 PJB tidak mendapat penghargaan dibidang tanggung jawab sosial terkait HAM.

In 2021, PJB did not receive an award in the aspect of corporate social responsibility on human rights.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATION

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial terkait Operasi yang Adil
Commitments and Policies of Corporate Social Responsibility on Fair Operations

Perusahaan menyadari bahwa iklim bisnis yang sehat sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan usaha yang dijalankan dan peningkatan ekonomi lingkungan disekitarnya. PJB dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil berupaya mendorong pengelolaan Perusahaan yang bersih dan berperilaku etis sesuai norma standar perusahaan kelas dunia. PJB berkomitmen menciptakan lingkungan bisnis yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui penerapan budaya perusahaan *No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxiorous Hospitality*. Disamping itu, PJB menjaga netralitas dalam isu-isu politik, menghormati hak kekayaan intelektual, berkompetisi dengan adil serta patuh pada hukum dan regulasi untuk memitigasi risiko gangguan operasional sehingga mendorong keberlanjutan bisnis.

The Company realizes that a sound business climate greatly influences the business continuity and the economic improvement of the surrounding environment. PJB in corporate social responsibility on fair operations strives to encourage the management of the Company that is clean and behaves ethically based on the norms of world-class company standards. PJB is committed to creating a business environment that is free of Corruption, Collusion, and Nepotism through the implementation of a corporate culture of No Bribery, No Kickback, No Gift, and No Luxiorous Hospitality. Additionally, PJB maintains neutrality on political issues, respects intellectual property rights, competes fairly, and complies with laws and regulations to mitigate the risk of operational disruptions to encourage business sustainability.

PJB telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakannya operasi yang adil diantaranya kebijakan *Code Of Conduct*, Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi, Pedoman *Whistleblowing System*, dan Kebijakan Anti *Fraud*. Kebijakan tersebut dibangun di atas fondasi yang kuat dari visi, misi serta tata nilai Perusahaan yang diimplementasikan di seluruh fungsi serta seluruh wilayah operasional Perusahaan. Pengimplementasian dari operasi yang adil ini mencakup bebas dari praktik korupsi dan suap, netralitas dalam isu-isu politik, serta kompetisi yang sehat. Kebijakan tersebut ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan isu-isu yang relevan.

PJB already has various policies that regulate the implementation of fair operations including policies of Code Of Conduct, Guidelines for Implementation of Gratification Reporting and Control, Whistleblowing System Guidelines, and Anti-Fraud. These policies are built on a strong foundation of the Company's vision, mission, and values which are implemented in all functions and all operational areas of the Company. The implementation of this fair operation includes the act of corruption and bribery free, neutrality in political issues, and fair competition. These policies are reviewed and updated regularly based on the development of relevant issues.

Rumusan Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Sosial *Core Subject* Operasi Yang Adil
Company Formulation in the Scope of Corporate Social Responsibility Core Subject on Fair Operations

PJB telah melakukan perencanaan yang matang dalam proses kegiatan CSR, melalui Laporan Tahunan PJB menginformasikan realisasi dari kegiatan yang telah diimplementasikan. *Stakeholder* memiliki ekspektasi terhadap praktik operasi yang adil di lingkungan PJB melalui proses pengadaan yang

PJB has carried out careful planning in the process of CSR activities, through PJB's Annual Report informing the realization of the activities that have been implemented. Stakeholders have expectations of fair operating practices within PJB through an honest, transparent, and professional

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATION

jujur, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, dibuatlah rencana kegiatan terkait operasi yang adil dengan melakukan *Stakeholder Maping.* Hal ini dilakukan untuk melibatkan seluruh *Stakeholder* PJB dalam pembuatan rencana terkait hal tersebut. Serta untuk menentukan siapa pemangku kepentingan yang akan terdampak dengan adanya rencana kegiatan tersebut. Hal ini agar tujuan bisnis Perusahaan tercapai dan senantiasa berupaya menegakkan kebijakan-kebijakan terkait dengan operasi yang adil sehingga bisa meningkatkan nilai para pemangku kepentingan Perusahaan, selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai Perusahaan.

procurement process. Therefore, an activity plan related to fair operations was made by conducting Stakeholder Mapping. This is done to involve all PJB Stakeholders in preparing plans related to this matter. Meanwhile, to determine the involved stakeholders, it may be affected by the planned activity. This is for the Company's business objectives to be achieved and continued to enforce policies related to fair operations to increase the value of the Company's stakeholders, which in turn will have an impact on increasing the Company's value.

Rencana Kegiatan 2021
2021 Activity Plan

Komitmen PJB dalam menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, bersih, dan berintegritas diwujudkan dengan meningkatkan implementasi program PJB Bersih serta pengendalian gratifikasi, anti korupsi dan anti penyuapan. Karyawan dan pemangku kepentingan lainnya dilibatkan dalam program PJB Bersih melalui kegiatan *Multi Stakeholders Forum* (MSF) agar senantiasa menjunjung nilai integritas dalam hubungan bisnis yang terjalin dengan PJB Hal ini dilakukan untuk melibatkan seluruh *Stakeholder* PJB dalam pembuatan rencana terkait hal tersebut. PJB menerapkan sistem *blacklist* bagi pemasok sebagai mekanisme dan prosedur dalam menghadapi konflik terkait operasi yang adil. Hal ini diatur dalam Peraturan Direksi PT PJB No 034M.P/019/DIR/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali dan Peraturan Direksi PT PJB No 035M.P/019/DIR/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali. Dengan penerapan program dan kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil, diharapkan PJB dapat mencegah terjadinya risiko penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tindakan *fraud* lainnya.
Adapun rencana kegiatan ditahun 2021 terkait dengan operasi yang adil yaitu sebagai berikut:

1. Program Anti Korupsi;
2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3. Aktivitas Sosial dan Politik;
4. Pencegahan Benturan Kepentingan;
5. Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan.

PJB's commitment to running business activities accountably, responsibly, and integratedly is realized by increasing the implementation of the Clean PJB program as well as controlling gratification, anti-corruption, and anti-bribery. Employees and other stakeholders are involved in 'PJB Bersih' through the Multi-Stakeholder Forum (MSF) activities to always uphold the value of integrity in the business relationships that exist. PJB implements a blacklist system for suppliers as a mechanism and procedure for dealing with conflicts related to fair operations. This is regulated in the Regulation of the Board of Directors of PT PJB No. 034M.P/019/DIR/2021 on November 22, 2021, regarding Guidelines for the Procurement of Goods/Services for PT Pembangkitan Jawa-Bali and Regulation of the Board of Directors of PT PJB No. 035M.P/019/DIR/2021 on November 22, 2021, concerning the Authority for the Implementation of the Procurement of Goods/Services for PT Pembangkitan Jawa-Bali. With the implementation of corporate social responsibility programs and activities on fair operations, it is expected that PJB can prevent the risk of irregularities such as corruption, collusion, and nepotism as well as other fraudulent acts.

The planned activities in 2021 on fair operations are as follows:

1. Anti-Corruption Program;
2. Protection of Intellectual Property Rights
3. Social and Political Activities;
4. Prevention of Conflicts of Interest;
5. Transparent Procurement of Goods and Services.

Inisiatif Penerapan Praktik Operasi Yang Adil
Implementation of Fair Operating Practices

Upaya-upaya inisiatif yang telah dilakukan PJB dalam rangka menjalankan operasi yang adil diantaranya:

The Initiative that has been carried out by PJB to implement fair operations include:

Program Anti Korupsi
Anti-Corruption Program

PJB senantiasa melandaskan setiap kegiatannya pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Ketaatan pada prinsip-prinsip GCG ini diaplikasikan pada seluruh aktivitas Perusahaan sebagai Perusahaan yang profesional, independen, dan berintegritas. Isu anti Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) menjadi fokus manajemen Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, perusahaan mendukung upaya dalam mecegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melalui implementasi PJB Bersih, salah satunya dengan melaksanakan melalui pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN merupakan laporan atas harta kekayaan yang wajib dilaporkan oleh setiap penyelanggara Negara. Pelaksanaan LHKPN merupakan salah satu wujud komitmen PJB dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020.

PJB always follows the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every activity. Adherence to these GCG principles is applied to all activities of the Company as a professional, independent, and high-integrity company. The issue of anti-Corruption Collusion Nepotism is the focus of the Company's management in carrying out business activities. Therefore, the Company supports efforts to prevent the practice of Corruption, Collusion, and Nepotism through the implementation of a Clean PJB, one of which is through reporting on the Assets Report of State Officials (LHKPN). LHKPN is a report on assets that must be reported by every state official. The implementation of LHKPN is a manifestation of PJB's commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) in the Company by referring to the provisions of the Corruption Eradication Commission Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Administrators Assets as amended by Commission Regulation Corruption Eradication Number 2 of 2020.

Perusahaan memastikan pemenuhan kepatuhan PJB terhadap pelaporan LHKPN melalui *monitoring e-filing* oleh Bidang Kepatuhan. Penyampaian LHKPN Tahun 2020 kepada KPK telah dilakukan secara tepat waktu oleh 831 Wajib LHKPN melalui e-lhkpn.kpk.go.id atau telah mencapai 100 % dari total Wajib LHKPN yang ditunjukkan dengan monitoring Wajib LHKPN pada Gambar berikut ini. Pelaporan melalui E-lhkpn sudah dilakukan per 31 Januari 2021 dari target 31 Maret 2021.

The Company ensures its compliance with LHKPN reporting through e-filing monitoring by the Compliance Division. The submission of the 2020 LHKPN to the KPK has been carried out promptly by 831 LHKPN Mandatory at e-lhkpn.kpk.go.id or has reached 100% of the total LHKPN Mandatory as shown by monitoring the LHKPN Mandatory in the following figure. Reporting through E-LHKPN has been carried out as of January 31, 2021, from the target as of March 31, 2021.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATION

Monitoring Pelaporan Wajib Lapor LHKPN Tahun 2020
Reporting Mandatory Reporting LHKPN 2020

Kepatuhan
Compliance

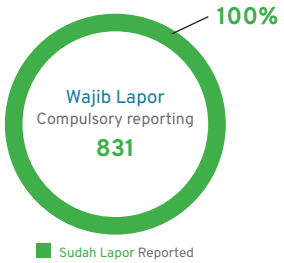

Sudah Lapor Reported	Wajib Lapor Compulsory reporting
831	831

Ketepatan
Accuracy

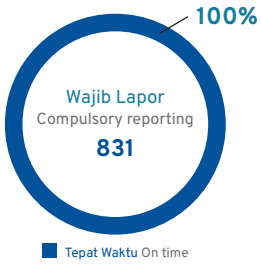

Sudah Lapor Reported	Wajib Lapor Compulsory reporting
831	831

Grafik Penyampaian LHKPN
Submission Graph of LHKPN

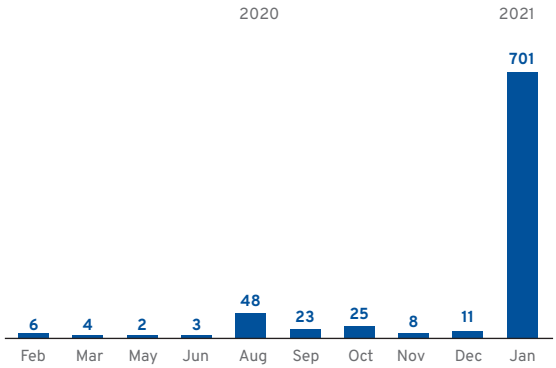

Penyampaian LHKPN Tahun 2021 kepada KPK telah dilakukan secara tepat waktu oleh 838 Wajib LHKPN melalui e-lhkpn.kpk.go.id atau telah mencapai 100 % dari total Wajib LHKPN yang ditunjukkan dengan monitoring Wajib LHKPN pada Gambar berikut ini. Pelaporan melalui E-lhkpn sudah dilakukan per 31 Januari 2022 dari target 31 Maret 2022.

The submission of the 2021 LHKPN to the KPK has been carried out promptly by 838 LHKPN Mandatory via e-lhkpn.kpk.go.id or has reached 100% of the total LHKPN Mandatory as shown by monitoring the LHKPN Mandatory in the following figure. Reporting through E-LHKPN has been carried out as of January 31, 2022, from the target of March 31, 2022.

Monitoring Pelaporan Wajib Lapor LHKPN Tahun 2021
Reporting Mandatory Reporting LHKPN 2021

Kepatuhan
Compliance

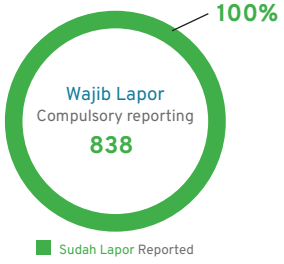

Sudah Lapor Reported	Wajib Lapor Compulsory reporting
838	838

Ketepatan
Accuracy

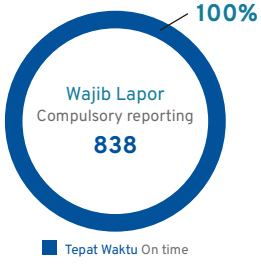

Sudah Lapor Reported	Wajib Lapor Compulsory reporting
838	838

Grafik Penyampaian LHKPN
Submission Graph of LHKPN

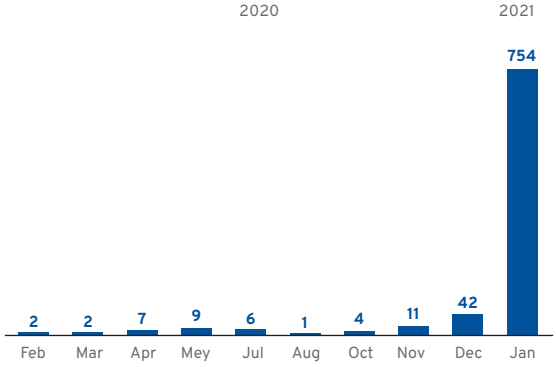

PJB melarang karyawan dan/atau keluarga menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, dalam bentuk apapun serta meminta atau menerima secara langsung ataupun tidak langsung gratifikasi dari pihak pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam *Code of Conduct*. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) juga dibentuk sebagai wujud kesungguhan PJB dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan. Pada tahun 2021, jumlah laporan gratifikasi yang diterima UPG PT PJB dari seluruh unit dan anak perusahaan sejumlah 115 laporan. Laporan ini terdiri dari 37 Laporan Penolakan Gratifikasi, 45 Laporan Penerimaan Gratifikasi dan 33 Laporan Pemberian Gratifikasi.

PJB prohibits employees and/or their families from offering or presenting bribes, or gratuities, in any form as well as requesting or receiving gratuities directly or indirectly from stakeholders as stipulated in the Code of Conduct. The Gratification Control Unit (GCU) was also formed as a form of PJB's seriousness in controlling gratification within the Company. In 2021, the number of gratification reports received by PT PJB GCU from all units and subsidiaries was 115 reports. This report consists of 37 Gratification Refusal Reports, 45 Gratification Acceptance Reports, and 33 Gratification Granting Reports.

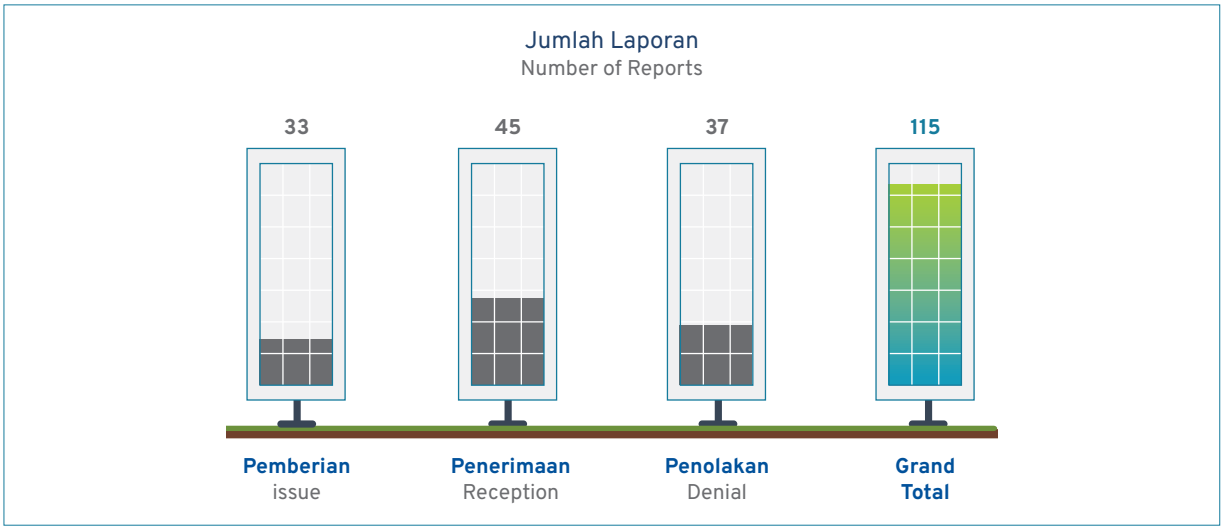

Pengeloalan pelaporan pemberian gratifikasi berhenti di instansi sebagai wujud pengamalan nilai transparansi *Good Corporate Governance* (GCG). Pemberian Gratifikasi yang diperbolehkan yang dilakukan oleh Insan PJB adalah pemberian yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi PT PJB dan Dewan Komisaris PT PJB Nomor 005.K/021/DIR/2017 dan Nomor 013.K/DK-PJB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PJB serta yang masuk dalam kelompok Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor: B.1341/01-13/03/2017 pasal 4 huruf a butir 10 bahwa Seminar Kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum.

The management of reporting on giving gratuities stops at the agency as a form of implementing the value of transparency in Good Corporate Governance (GCG). The granting of Gratification allowed by PJB employees is the provision specified in the Joint Decree between the Directors of PT PJB and the Board of Commissioners of PT PJB Number 005.K/021/DIR/2017 and Number 013.K/DK-PJB/2017 concerning Guidelines for Implementation of Reporting and Gratification Control within PT PJB as well as those included in the Gratification group that is not required to be reported based on the KPK Circular Number: B.1341/01-13/03/2017 article 4 letter a point 10 that the Seminar Kit is in the form of a set of modules and stationery as well as certificates obtained from official activities such as meetings, seminars, workshops, conferences, training, or other similar generally accepted activities.

Sedangkan pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan terlebih dahulu diverifikasi sebelum diteruskan ke KPK. Dari total 82 laporan penolakan dan penerimaan, sebanyak 25 laporan dikelola UPG dan 57 laporan diproses di KPK.

Meanwhile, the management of acceptance and rejection reports is verified before being forwarded to the KPK. Of the total 82 rejection and acceptance reports, 25 were managed by the UPG, and 57 were processed at the KPK.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATION

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Protection of Intellectual Property Rights

Inovasi telah menjadi budaya di lingkungan PJB. Karyawan mendapatkan kesempatan untuk berkarya dan berkontribusi melalui ide inovasi dalam rangka menunjang pengembangan proses bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan. Lomba karya inovasi pun diselenggarakan baik di tingkat PJB maupun di PLN Grup setiap tahun.

Karya inovasi merupakan *intangible asset* yang sangat bernilai untuk Perusahaan. PJB mengelola hasil karya inovasi karyawan sesuai dengan SK Direksi No.110.K/010/2010 tentang Prosedur Manajemen Inovasi di Lingkungan PJB dan SK Direksi No.023.P/019/DIR/2018 Tentang Tata Kelola Manajemen Pengetahuan dan Inovasi. PJB juga melakukan pendaftaran hak cipta atau hak paten atas karya-karya inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai upaya melindungi hak kekayaan intelektual PJB dari kemungkinan pihak lain menggunakan karya tersebut tanpa izin. Sampai dengan tahun 2021, PJB telah mendaftarkan 30 hak kekayaan intelektual. Disamping itu, PJB dan seluruh Insan Perusahaan wajib melindungi hak kekayaan intelektual dan melarang penggunaan hak kekayaan intelektual milik pihak lain tanpa izin sebagai upaya pencegahan potensi gugatan hukum kepada Perusahaan sebagaimana diatur dalam *Code Of Conduct.*

Innovation has become a culture within PJB. Employees get the opportunity to work and contribute through innovative ideas to support the development of business processes and increase the added value of the Company. Innovation work competitions are also held at the PJB level and the PLN Group every year.

Innovation work is an intangible asset that is very valuable to the Company. PJB manages the innovations of its employees following the Decree of the Board of Directors No.110.K/010/2010 concerning Innovation Management Procedures within PJB and the Decree of the Board of Directors No.023.P/019/DIR/2018 concerning Governance of Knowledge and Innovation Management. PJB also registers copyright or patent rights for these innovative works to the Directorate General of Intellectual Property Rights as an effort to protect PJB's intellectual property rights from the possibility of other parties using these works without permission. Until 2021, PJB has registered 30 intellectual property rights. In addition, PJB and all Company employees are required to protect intellectual property rights and prohibit the use of intellectual property rights belonging to other parties without permission as an effort to prevent potential lawsuits against the Company as stipulated in the Code of Conduct.

Aktivitas Sosial dan Politik
Social and Political Activities

PJB memberikan hak bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi politik, mengharuskan Direksi dan karyawan untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perusahaan dalam urusan politik.

PJB telah mengatur ketentuan terkait keterlibatan karyawan dalam berpolitik dalam *Code of Conduct* serta dalam Peraturan Disiplin Karyawan PT PJB. Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial, PJB tidak memberikan bantuan dana ke politisi, ataupun calon pejabat manapun sebagai perwujudan nilai Perusahaan yaitu integritas. Selain itu, PJB juga menerapkan kegiatan berikut antara lain:

PJB grants its employees the right to express political aspirations and requires the Board of Directors and employees to comply with all laws and regulations governing the Company's involvement in political affairs.

PJB has regulated provisions regarding employee involvement in politics in the Code of Conduct and the PT PJB Employee Discipline Regulations. In implementing its social responsibility program, PJB does not provide financial assistance to politicians, or any candidate for office as a manifestation of the Company's value, namely integrity. In addition, PJB also implements the following activities, among others:

- Insan PJB berhak menyampaikan aspirasi dan pandangan kepada pemerintah dan *stakeholder* lainnya terhadap aspek operasional yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan. Namun, proses penyampaian aspirasi harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut PJB.
- Insan PJB dilarang menggunakan nama dan aset Perusahaan untuk kepentingan politik serta memberikan dana PJB kepada partai politik atau politisi.
- Insan PJB dilarang membawa, memperlihatkan, dan memasang simbol partai politik di lingkungan Perusahaan.
- Insan PJB dilarang melakukan kampanye dan aktivitas politik lain di lingkungan Perusahaan.
- PJB mewajibkan seluruh Insan PJB yang menduduki jabatan tertentu dalam partai politik atau menjadi calon legislatif atau eksekutif dari partai politik dalam Pemilu untuk mengundurkan diri dari Perusahaan.

- PJB employees have the right to express their aspirations and views to the government and other stakeholders on operational aspects that affect the Company's business activities and operations. However, the process of submitting aspirations must be done outside of working hours and does not use PJB attributes.
- PJB employees are prohibited from using the Company's name and assets for political purposes and from providing PJB funds to political parties or politicians.
- PJB employees are prohibited from carrying, displaying, and installing symbols of political parties within the Company.
- PJB employees are prohibited from conducting campaigns and other political activities within the Company.
- PJB requires all PJB employees who hold certain positions in political parties or become legislative or executive candidates from political parties in the General Election to resign.

Pencegahan Benturan Kepentingan
Prevention of Conflicts of Interest

Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada Karyawan PJB yang memiliki hubungan keluarga atau pertemanan dengan kompetitor, vendor, atau rekan kerja. Dalam
menghadapi adanya benturan kepentingan maka setiap Karyawan PJB dilarang untuk:

1. Terlibat dalam pengembalian keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan PJB dalam proses pengadaan untuk kepentingan Perusahaan yang dimiliki keluarga atau teman, atau perusahaan dimana keluarga atau teman adalah pejabat pengambil keputusan.
2. Berupaya selalu menghindari segala bentuk keterlibatan keluarga dalam hubungan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan keterlibatan yang harus dihindari dan didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan langsung, atasan tidak langsung maupun Pemimpin Unit Pengelola SDM.

Conflicts of interest can be experienced by PJB employees who have family or friendship relations with competitors, vendors, or co-workers. To prevent the conflict of interest, every PJB employee is prohibited from:

1. Involved in making decisions or influencing PJB's decisions in the procurement process for the benefit of companies owned by family or friends, or companies they work for.
2. Prevent any act of family involvement in business relationships to avoid conflicts of interest. All forms of transactions carried out with involvement must be avoided and discussed in advance with direct superiors, indirect superiors, and the Head of the HR Management Unit.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATION

Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan
Transparent Procurement of Goods and Services

PJB menjamin pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Perusahaan berlangsung dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga tertuang dalam Ketentuan Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi pedoman bagi penanggung jawab dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ketentuan ini secara rinci dan operasional dituangkan dalam beberapa prosedur pengadaan barang dan jasa SK Direksi No.087.K/010/2012 mengenai Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa PJB sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Code of Conduct* (CoC). Dalam ketentuan ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan yang merupakan uraian dari Ketentuan Pembelian sebagaimana diatur dalam Sistem Mutu Perusahaan, elemen sistem mutu, pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan secara eksternal. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PJB wajib dilakukan menggunakan sistem aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) Modul *Procurement* yang dimulai dari Seleksi Rekanan, Pembuatan *Purchasing Requisitions* (PR) sampai dengan Penerimaan barang dan jasa. Dalam pembuatan PR harus menggunakan kode *account*/perkiraan yang sama pada item barang dan jasa yang sama. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa didasarkan atas prinsip-prinsip:

1. Efisien berarti pengadaan barang dan jasa diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya di dasarkan pada harga terendah;
2. Efektif berarti pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besamya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Kompetitif berati pengadaan barang dan jasa terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

PJB guarantees that the implementation of the procurement process for goods and services within the Company is transparent and accountable. This is also stated in the General Provisions for the Procurement of Goods and Services which serve as guidelines for the Person in Charge in the process of implementing the procurement of goods and services. These provisions are detailed and operationally outlined in several procedures for the procurement of goods and services through Board Directors' Decree No.087.K/010/2012 regarding Guidelines for Procurement of Goods/Services of PJB as part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Code of Conduct (CoC). This provision regulates the main matters relating to the procurement of goods and services needed by the company which is a description of the Purchase Provisions as stipulated in the Company's Quality System, elements of the quality system, process control, products, and services provided externally. The process of implementing the procurement of goods and services within PJB must be carried out using the Enterprise Resource Planning (ERP) application system for the Procurement Module starting from Partner Selection, Making Purchasing Requisitions (PR) to Receiving goods and services. In making PR, the same account code/estimate must be used for the same goods and services. The implementation of the procurement of goods and services is based on the following principles:

1. Efficiency which means that the procurement of goods and services is endeavored to obtain optimal and best results in a short time by using a minimum of funds and capabilities reasonably and not only based on the lowest price;
2. Effectiveness which means the procurement of goods and services following the needs that have been set and providing the maximum benefit following the targets that have been set;
3. Competitiveness which means that the procurement of goods and services is open to providers of goods and services that meet the requirements and are carried out through fair competition among providers of goods and services that are equal and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures;

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat;
5. Adil dan wajar berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat;
6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;
7. Terarah dan terkendali, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta fungsi setiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direksi, dengan tetap memperhatikan peluang usaha yang akan memberikan keuntungan optimal kepada Perusahaan.

4. Transparency which means that all provisions and information regarding the procurement of goods and services including technical requirements for procurement administration, evaluation procedures, evaluation results, and determination of prospective providers of goods and services, are open to interested participants in providing goods and services;
5. Fairness which means giving equal treatment to all potential providers of goods and services who meet the requirements;
6. Accountability means having to achieve the target and can be accounted for to keep away from the potential for abuse and deviation;
7. Directed and controlled which means that the procurement of goods and services must be following the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) as well as the functions of each work unit determined by the Board of Directors while taking into account business opportunities that will provide optimal benefits to the Company.

Selama tahun 2021 nilai pengadaan barang dan jasa PJB mencapai 3,51 Triliun. Jumlah pemasok lokal dan nasional mencapai 99,89% dari seluruh jumlah pemasok PJB sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

In 2021, the value of PJB's procurement of goods and services reached Rp. 3.51 trillion. The number of local and national suppliers reached 99.89% of the total number of PJB suppliers is shown in the following table:

Tabel Pemasok PJB Tahun 2019-2021
Table of PJB Suppliers for 2019-2021

Jenis Pemasok Types of Supplier	Jenis Barang Yang Dipasok Types of Activity	Jumlah Pemasok Types of Activity		
		2019	2020	2021
Lokal (dalam satu provinsi) Local (same province)	*Safety Valve, Condensate Polishing. Motor* BFP Safety Valve, Condensate Polishing. Motor BFP	787	915	1244
Nasional (lintas provinsi) National (inter provinces)	Batubara, Trafo, Rotor, Generator, Turbin, Jasa Konsultan Coal, Transformer, Rotor, Generator, Turbine, Consulting Services	507	764	726
Luar Negeri International	*Original Equipment Manufacturer*	17	7	2
Jumlah Total		**1.311**	**1.686**	**1.972**

Proses pemilihan pemasok tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip transparan, terbuka, adil, dan kompetitif. Seleksi pemasok pun diatur sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat untuk setiap pengadaan.

The selection process of suppliers is carried out by applying the principles of transparency, openness, fairness and competitiveness. Supplier selection is also regulated based on the Work Plan, Terms, and Conditions for each procurement.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Operasi yang Adil

Fair Operations Violation Complaints Procedures and Mechanisms

Penanganan konflik terkait operasi yang adil dilakukan melalui penerapan *whistleblowing system* dan *code of conduct.* Uraian tentang *whistleblowing system* dan *code of conduct* disajikan dalam tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan ini. *Stakeholder* berharap bahwa mekanisme *whistleblowing system* dan *code of conduct* ditegakkan sehingga bisa meningkatkan nilai para pemangku kepentingan Perusahaan, selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai Perusahaan.

The handling of conflicts related to fair operations is carried out through the implementation of a whistleblowing system and a code of conduct. A description of the whistleblowing system and code of conduct is presented in corporate governance in this annual report. Stakeholders hope that the whistleblowing system mechanism and code of conduct are enforced so that they can increase the value of the Company's stakeholders, which in turn will have an impact on increasing the value of the Company.

Penghargaan dan Capaian yang Diperoleh

Awards and Achievements

Selama tahun 2021 PJB tidak memiliki kasus indikasi terjadinya korupsi, dan suap baik ditingkat Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan. Selain itu tidak terdapat gugatan yang ditujukan kepada PJB terkait penyalahgunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan gugatan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Laporan Pelaksanaan *Whistleblowing System* dan Laporan Pengendalian Gratifikasi. Berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat pelaporan pada tahun 2021, dan tidak terdapat pelanggaran ketentuan Gratifikasi pada tahun 2021 di semua divisi Perusahaan. Pencapaian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi *Stakeholder*, serta mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan dalam jangka pendek dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

In 2021, PJB did not have any cases of corruption and bribery at the levels of the Board of Directors, Board of Commissioners, or employees. Additionally, there are no lawsuits addressed to PJB regarding the abuse of Intellectual Property Rights and lawsuits related to the procurement of goods and services. This is indicated by the existence of a Whistleblowing System Implementation Report and a Gratification Control Report. Based on the report, there were no reports in 2021, and there were no violations of the provisions of Gratification in 2021 in all divisions of the Company. This achievement is expected to provide benefits both directly and indirectly to stakeholders, as well as support the Company's business short-term growth and ensure business long-term sustainability.

Pencapaian lainnya antara lain:

- PJB telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Kantor Pusat PT PJB (*surveillance*) dan 3 unit pembangkitan PJB (UP Muara Karang, UP Paiton & UP Cirata)
- PJB juga telah memperluas *scope* implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 : 2016 di Anak Perusahaan PJB dan telah diperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PT PJB Services, PT Rekadaya Elektrika dan PT PLN SC.

Other achievements include:

- PJB has obtained ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification at PT PJB Head Office (surveillance) and 3 PJB generation units (UP Muara Karang, UP Paiton & UP Cirata)
- PJB has also expanded the scope of implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) SNI ISO 37001: 2016 in PJB Subsidiaries and has obtained ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification at PT PJB Services, PT Rekadaya Elektrika, and PT PLN SC.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Komitmen dan Kebijakan
Commitments and Policies

Komitmen PJB untuk tetap menjaga dan mempertahankan sekaligus melestarikan lingkungan hidup telah dituangkan dalam Keputusan Direksi No.017.K/020/DIR/2020 tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan ini mengacu pada peraturan yang berlaku diantaranya PP 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Kebijakan tersebut mengatur penggunaan sumber daya energy dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit PJB secara efisien. Untuk itu, PJB berupaya untuk mempraktikkan operasional Perusahaan yang ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dengan memaksimalkan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). PJB terus mendukung dan melestarikan lingkungan dalam bentuk efisiensi penggunaan sumber daya alam yang kian terbatas, penghematan kertas, energi (listrik dan bahan bakar minyak), penghematan air, serta mengurangi penggunaan bahan perusak ozon. Hal ini juga merupakan bentuk pengimplementasian kepatuhan PJB terhadap PP 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan Lingkungan tersebut merupakan pedoman bagi PJB dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

PJB's commitment to environmental preservation has been stated in the Decree of the Board of Directors No.017.K/020/DIR/2020 concerning the Management System Policy of PT Pembangkitan Jawa-Bali. This policy refers to the applicable regulations including PP 22 of 2021 concerning Environmental Protection and Management and ISO 14001 concerning Environmental Management Systems. The policy regulates the efficient use of energy resources and natural resources in the operational and maintenance activities of PJB's power generation units. Therefore, PJB strives to apply eco-friendly operations and minimize negative impacts on the environment by maximizing the 3R principle (reduce, reuse, and recycle). PJB continues to support and preserve the environment in the form of efficient use of increasingly limited natural resources, paper saving, energy-saving (electricity and fuel oil), water-saving, and reduced use of ozone-depleting substances. This is also a form of implementing PJB's compliance with PP 22 of 2021 concerning Environmental Protection and Management. The Environmental Policy is a guideline for PJB in running operational activities to become more eco-friendly.

Manajemen PJB senantiasa meninjau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala untuk menjamin kesesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku dan efektivitas penerapan program. Kebijakan yang berlaku saat ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi 0029.K/020/DIR/2021 Tentang Kebijakan Sistem Manajemen. Kesungguhan PJB dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan wujud kontribusi dalam memelihara kualitas lingkungan hidup di sekitar area operasional Perusahaan.

PJB's management continues to review environmental management policies regularly to ensure compliance with applicable regulations and the effectiveness of program implementation. The current policy is a refinement of the previous policy regulated in the Decree of the Board of Directors 0029.K/020/DIR/2021 concerning Management System Policy. PJB's commitment to the implementation of corporate social responsibility programs toward on environmental aspect is a form of contribution to maintaining the quality of the environment around the Company's operational areas.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Rencana Kegiatan 2021
2021 Activity Plan

Dalam menjalankan aktivitas operasinya, PJB senantiasa menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama. Untuk itu, PJB telah menetapkan sejumlah target agar aktivitas operasional tidak memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan hidup. PJB menyusun rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan dan program tanggung jawab sosial berdasarkan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selanjutnya, Divisi Lingkungan dan K3 (DIVLK3) menyusun program kerja yang menjadi rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan area operasional PJB, sedangkan rencana program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan disusun oleh Bidang *Stakeholder Management* (BSHM) dan Bidang Umum dan CSR setiap Unit Pembangkitan sebagaimana dimuat dalam RKAP 2021. Rencana kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan PJB sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen lingkungan masing-masing unit dan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya (PPLH). Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Pengelolaan air limbah yang dihasilkan pada setiap pembangkit dengan menyediakan sarana prasarana unit pengolahan air limbah berupa WWTP Proses Utama, *Sewage treatment Plant, Coal Yard Run Off Pond, Ash Run Off Pond*, yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dihasilkan sehingga aman atau kadar air limbah berada dibawah batas baku mutu yang di izinkan, selain itu dilakukan juga upaya *Reuse / Recycle* air limbah untuk digunakan kembali pada *Coal Handling Facilities & Ash Handling Facilities* hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan air bersih (efisiensi) dan mengurangi debit air limbah yang dibuang ke badan air (laut).
2. Pemantauan rutin air limbah dilakukan untuk menunjang dan memastikan bahwa unit pengolahan air limbah berfungsi secara optimal dengan indikator kualitas air limbah yang di olah di Outlet lebih kecil dari pada di Inlet. Pemantauan kualitas air limbah di setiap peralatan pengolahan air limbah dilakukan setiap hari dan Setiap Bulan oleh Laboratorium Terakreditasi KAN.
3. Pemantauan Kualitas Air Laut sekitar pembangkit dilakukan secara periodik 6 bulanan oleh Laboratorium Terakreditasi KAN sesuai dengan izin yang telah di berikan, parameter yang digunakan yakni Fisika dan Kimia.

In running its operational activities, PJB always makes the environment the main consideration. Therefore, PJB has set several targets so that operational activities do not harm the environment. PJB prepares an environmental management/monitoring plan and corporate social responsibility program based on an Environmental Impact Analysis (AMDAL) study.

Furthermore, the HSE Division prepares a work program that becomes the environmental management/monitoring plan for PJB's operational areas, while the corporate social responsibility program's plan on the environment is prepared by the Stakeholder Management Division (SMD) and the General Affairs and CSR Division of each Generation Unit as contained in the 2021 ABOP. PJB's environmental monitoring and management activity plan is following what is stated in the environmental documents of each unit and other environmental protection and management permits (PPLH). These activities are as follows:

1. Management of wastewater generated at each power plant by providing facilities for wastewater treatment units in the form of WWTP Main Process, Sewage treatment Plant, Coal Yard Run-Off Pond, and Ash Run-Off Pond, which function to treat the wastewater produced so that it is safe or high levels wastewater is below the permitted quality standard limits, besides that efforts are also made to Reuse / Recycle wastewater to be reused in Coal Handling Facilities & Ash Handling Facilities this aims to reduce the use of clean water (efficiency) and reduce the discharge of wastewater discharged to a body of water (seawater).
2. Routine monitoring of wastewater is carried out to support and ensure that the wastewater treatment unit functions optimally with the wastewater quality indicators treated at the Outlet being smaller than at the Inlet. Monitoring the quality of wastewater in each wastewater treatment equipment is carried out daily and monthly by a KAN Accredited Laboratory.
3. Monitoring of Seawater Quality around the power plant is carried out periodically for 6 months by a KAN Accredited Laboratory following the permit that has been given, the parameters used are Physics and Chemistry.

4. Pemantauan Kualitas Air Laut juga dilakukan dengan memantau biota perairan yang terdapat di sekitar pembangkit untuk memastikan kondisi perairan secara Biologis.
5. Pengelolaan udara emisi sumber tidak bergerak dengan cara melakukan kontroling kualitas bahan bakar yang digunakan, melakukan efisiensi pembakaran sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna (yang mengurangi *polutan release* ke lingkungan), dan dilakukan kontroling kualitas Pengendali Emisi yang di miliki setiap pembangkit dengan cara *Predictive Maintenance, Corrective Maintenance* dan *OverHoul* pada Pengendali Emisi, kemudian dilakukan monitoring kualitas emisi yang dihasilkan berupa,
6. Pemantauan rutin setiap hari dengan alat pengukur Emisi secara terus menerus atau disebut CEMS dan/atau pemantauan manual oleh Laboratorium Terakreditasi KAN setiap 3 atau 6 bulan sekali (disesuaikan dengan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan).
7. Pengelolaan limbah B3 pada setiap masing pembangkit dengan menyediakan TPS Limbah B3 yang sangat memadai secara fasilitas ketentuan teknis bangunan, kapasitas bangunan maupun kondisi *house keeping* yang sangat tertata.
8. Melakukan pengelolaan lanjutan berupa menyerahkan Limbah B3 ke pengelola lanjutan dengan mempertimbangkan aspek legal yang dimiliki (sesuai izin yang dimiliki) maupun aspek sosial lainnya.
9. Melakukan upaya mitigasi gas rumah kaca di antaranya penghijauan, pelaksanaan *cofiring*, dan pembangunan pembangkit EBT.

Anggaran biaya untuk kegiatan pengelolaan lingkungan PJB baik di unit eksisting dan unit FTP-1 sebesar Rp76,93 miliar naik dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp62,06 miliar.

4. Monitoring of Seawater Quality is also carried out by monitoring the aquatic biota around the power plant to ensure the biological condition of the waters.
5. Management of immovable source emission air by controlling the quality of the fuel used, performing combustion efficiency to produce perfect combustion (which reduces pollutant release to the environment), and controlling the quality of the Emission Controls owned by each generator using Predictive Maintenance, Corrective Maintenance, and Overhaul on the Emissions Controller, then monitoring the quality of the resulting emissions in the form of,
6. Daily routine monitoring with continuous emission measuring devices called CEMS and/or manual monitoring by a National Committee on Accreditation (NCA) Accredited Laboratory every 3 or 6 months (adjusted with the obligations stated in the environmental document).
7. Management of Toxic Waste at each power plant by providing a Toxic Waste Landfill which is very adequate in terms of facilities for building technical provisions, building capacity, and very well-organized housekeeping conditions.
8. Implementation of advanced management in the form of submitting the Toxic Waste to the advanced manager by considering the legal aspects owned (based on the permits owned) as well as other social aspects.
9. Implementation of greenhouse gas mitigation efforts including reforestation, implementation of cofiring, and construction of NRE power plants.

The budget for PJB environmental management activities both in the existing unit and the FTP-1 unit is Rp76.93 billion, an increase compared to 2020 of Rp 62.06 billion.

Tabel Anggaran Kegiatan Pengelolaan Lingkungan PJB Tahun 2019-2021 (Rp Ribu)
Table of PJB Environmental Management Activities Budget of 2019-2021 (Rp Thousand)

No.	Jenis Kegiatan Types of Activity	2019	2020	2021
1	UP Gresik Gresik GU	11.615.118	10.975.225	11.307.166
2	UP Muara Karang Muara Karang GU	11.446.297	10.329.414	9.736.246
3	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	12.726.409	10.359.523	10.330.775
4	UP Paiton Paiton GU	14.544.047	14.626.689	16.452.881
5	UP Cirata Cirata GU	9.337.875	9.735.375	8.440.207

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

No.	Jenis Kegiatan Types of Activity	2019	2020	2021
6	UP Brantas Brantas GU	1.271.500	1.371.500	1.405.240
7	UBJOM PLTU Indramayu Indramayu CFPP OMSBU	4.279.573	3.404.000	3.693.160
8	UBJOM PLTU Rembang Rembang CFPP OMSBU	3.317.664	3.020.853	3.521.988
9	UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar Tj. Awar-Awar CFPP OMSBU	3.595.000	3.870.000	3.625.000
10	UBJOM PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP OMSBU	2.265.259	2.501.818	2.961.695
11	UBJOM PLTU Pacitan Pacitan CFPP OMSBU	2.550.000	2.969.320	2.968.560
Jumlah Total		**76.948.742**	**73.163.717**	**76.931.048**

Penurunan anggaran dipengaruhi oleh keefektifan PJB dalam mengelola dan memantau lingkungan di antaranya pengelolaan yang lebih sederhana, mencari rekanan laboratorium yang lebih murah dengan kualitas yang tetap baik (terakreditasi), menerapkan inovasi-inovasi lingkungan, dan lain-lain. PJB merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp 80,79 miliar untuk kegiatan tanggung jawab sosial terkait lingkungan selama tahun 2021.

The budget decline was influenced by PJB's effectiveness in managing and monitoring the environment, including simpler management, seeking cheaper laboratory partners with good quality (accredited), implementing environmental innovations, and others. PJB realized the budget of Rp 80.79 billion for corporate social responsibility programs on the environment in 2021.

Tabel Realisasi Biaya Kegiatan Pengelolaan Lingkungan PJB Tahun 2019-2021 (Rp Ribu)
Table of Cost Realization of PJB Environmental Management Activities in 2019-2021 (Rp Thousand)

No.	Jenis Kegiatan Types of Activity	2019	2020	2021
1	UP Gresik Gresik GU	11.530.419	9.577.523	12.687.007
2	UP Muara Karang Muara Karang GU	10.206.563	10.364.072	11.940.444
3	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	12.263.167	10.537.302	14.307.751
4	UP Paiton Paiton GU	13.915.980	14.493.407	17.245.220
5	UP Cirata Cirata GU	8.669.650	8.620.808	7.559.349
6	UP Brantas Brantas GU	1.680.413	1.488.061	1.401.410
7	UBJOM PLTU Indramayu Indramayu CFPP OMSBU	5.608.589	3.209.004	3.282.689
8	UBJOM PLTU Rembang Rembang CFPP OMSBU	4.090.752	2.413.324	2.779.158
9	UBJOM PLTU Tj. Awar-Awar Tj. Awar-Awar CFPP OMSBU	2.780.645	3.154.451	3.489.946
10	UBJOM PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP OMSBU	2.878.086	3.228.585	3.129.107
11	UBJOM PLTU Pacitan Pacitan CFPP OMSBU	1.161.477	2.917.375	2.968.560
Jumlah Total		**74.785.741**	**70.003.912**	**80.790.641**

PJB juga melibatkan *stakeholder* dalam berbagai kegiatan lingkungan diantaranya pada kegiatan sebagai berikut:

PJB also involves stakeholders in various environmental activities including the following activities:

Program/Kegiatan
Programs/Activities

Konservasi Mangrove di lahan 27 ha di Pulau Bawean. Penanaman 30.000 mangrove ini dilakukan di lahan kritis di Pulau Bawean dimana terjadi abrasi yang sangat masih sehingga diperlukan upaya pencegahan dan perbaikan.
Mangrove Conservation on 27 ha land on Bawean Island. The planting of 30,000 mangroves is carried out on critical land on Bawean Island where abrasion is still occurring, so prevention and improvement efforts are needed.

Stakeholder

Pemerintah desa di Pulau Bawean, pemerintah kabupaten Gresik, serta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Timur.
The village government on Bawean Island, the Gresik district government, as well as the Department of Marine Affairs and Fisheries of East Java province.

Program/Kegiatan
Programs/Activities

Program penanaman mangrove di Kali Adem-Muara Karang dengan luas 1,93 ha. Program ini dilakukan sejak tahun 2014 dengan jumlah bibit yang telah ditanam sebanyak 70.500 bibit (10.000 bibit pada tahun 2020 & 10.000 bibit pada tahun 2021).
Mangrove planting program in Kali Adem-Muara Karang with an area of 1.93 ha. This program has been carried out since 2014 with a total of 70,500 seeds that have been planted (10,000 seeds in 2020 & 10,000 seeds in 2021).

Stakeholder

Komunitas Mangrove Muara Angke (KOMMA)
Muara Angke Mangrove Community (KOMMA)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Program/Kegiatan
Programs/Activities

Konservasi lahan seluas 6,4 Ha di area Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Jembatan Cinta Paljaya, Tarumajaya. Sebanyak kurang lebih 2.626 mangrove telah berhasil ditanam pada tahun 2021 dan total seluruh mangrove yang ditanam kurang lebih 26.250 mangrove.
Conservation of an area of 6.4 ha in the area of the Paljaya Love Bridge Mangrove Restoration and Learning Center, Tarumajaya. A total of approximately 2,626 mangroves have been successfully planted in 2021 and a total of 26,250 mangroves have been planted.

Stakeholder

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kecamatan Tarumajaya, Pemerintah Desa Segarajaya, Pokmaswas, dan warga sekitar.
West Java Provincial Marine and Fisheries Service, Bekasi Regency Marine and Fishery Service, Tarumajaya District Government, Segarajaya Village Government, Pokmaswas, and residents.

Program/Kegiatan
Programs/Activities

Pemanfaatan Limbah Non-B3 (FABA)
Pemanfaatan FABA sebagai Bahan Baku Substitusi Produk Beton Perkerasan, *Roadbase* (*subgrade* atau *sub-base*), Bata Ringan, Paving/Batako, Penetralisir Air Asam Tambang, *Break Water* dan Pupuk.
Utilization of Non-Toxic Waste (FABA)
Utilization of FABA as Raw Material for Substitute Concrete Products for Pavement, Roadbase (subgrade or sub-base), Lightweight Brick, Paving/Brick, Neutralizer for Acid Mining Water, Break Water, and Fertilizer.

Stakeholder

- Masyarakat sekitar unit pembangkit
- UMKM / Bumdes desa sekitar unit pembangkit
- Perusahaan semen dan *ready mix*
- Pemerintah daerah setempat
- Communities around the generating unit
- MSMEs / Village Bumdes around the generating unit
- Cement and ready mix companies
- Local government

Kegiatan dan Dampaknya
Activity Impacts

Dalam setiap aktifitas bisnisnya, PJB selalu berupaya memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan di tahun 2021 sebagai berikut:

In each of its business activities, PJB always strives to pay attention to environmental aspects through various activities in 2021 as follows:

Penggunaan Energi Ramah Lingkungan
Penggunaan Energi Ramah Lingkungan

Melengkapi komitmen di atas, PJB telah melakukan upaya untuk mengembangkan konsep yang mendukung pelestarian alam dan ramah lingkungan. Salah satunya diwujudkan melalui penggunaan energi yang ramah lingkungan demi meminimalkan dampak negatif akibat polusi udara, air, dan tanah.

Complementing the above commitments, PJB has made efforts to develop concepts that support nature conservation and are environmentally friendly. One of them is realized through the use of environmentally friendly energy to minimize the negative impacts of the air, water, and soil pollution.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, PJB selalu menggunakan energi primer yaitu Bahan Bakar Minyak, Diesel, Batubara, dan Gas/LPG/CNG untuk produksi listrik. Beberapa inisiatif program efisiensi energi yang diterapkan pada pembangkit dalam proses produksi listrik antara lain:

- Retrofit unit pembangkit PLTGU
- Penggantian lampu *Tubular Lamp* (TL) ke lampu *Light Emitting Diode* (LED)
- Penggantian *valve* bocor
- Kalibrasi dan penormalan sistem pembakaran batubara
- Penggantian PLTD menjadi PLTMH
- Pemasangan PLTS
- Penggunaan *Reverse Osmosis* (RO) Plant
- Penggantian *Valve Boiler* dan Turbin
- Mekanisme *Tiny Oil Boiler*
- *Solar energy* Gedung Simulator
- *Cold Start* tanpa *Aux Boiler*

In carrying out its activities, PJB always uses primary energy, namely Fuel Oil, Diesel, Coal, and Gas/LPG/CNG for electricity production. Some program initiatives for energy efficiency are implemented in power plants in the electricity production process including:

- Retrofit of CCPP generator units
- Replacement of Tubular Lamp (TL) lamps to Light Emitting Diode (LED) lamps
- Replacement of leaky valve
- Calibration and normalization of coal combustion systems
- Replacement from DEPP to MHPP
- SPP installation
- Use of Reverse Osmosis (RO) Plant
- Boiler and Turbine Valve Replacement
- Tiny Oil Boiler Mechanism
- Solar energy Building Simulator
- Cold Start without Aux Boiler

Komitmen dalam penerapan insiatif efisiensi khususnya energi primer PJB ditunjukkan dengan penggunaan biomassa sebagai campuran bahan bakar pembangkit. Jumlah konsumsi energi primer tahun 2021 yaitu 216.757.947,54 Gigajoule meningkat dari tahun 2020 sebesar 185.200.951,45 Gigajoule, yang dirincikan dalam table berikut.

Commitment to implementing efficiency initiatives, especially PJB's primary energy, is demonstrated by the use of biomass as a fuel mixture for power plants. Total primary energy consumption in 2021 is 216,757,947.54 Gigajoules, an increase from 2020 of 185,200,951.45 Gigajoules, which is detailed in the following table.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Konsumsi Energi Primer Tahun 2019-2021
Primary Energy Consumption in 2019-2021

No.	Jumlah Energi Power Total Power Energy	2019	2020	2021
1	HSD	973.707,14	563.801,45	5.197.111,12
2	MFO	1.350.198,13	346.423,61	2.396.261,00
3	Batubara Coal	96.537.793,33	83.414.979,26	95.001.406,01
4	Gas	147.551.671,10	100.875.747,13	112.363.448,30
5	Biomassa Biomass	-	-	1.799.721,10
Total		**246.413.374,10**	**185.200.951,45**	**216.757.947,54**

Penghematan Kertas dan Bahan yang tidak dapat didaur ulang
Paper Saving and Unrecycled Waste

Penghematan Kertas di PJB dilakukan dengan berbagai program diantaranya penyebaran surat menyurat internal yang dulunya menggunakan faximile kini beralih ke jaringan internet. PJB juga senantiasa menekankan kepada karyawan untuk menggunakan kertas bekas untuk cetak coba dokumen dalam setiap pekerjaan.

Paper Savings at PJB is carried out through various programs, including the distribution of internal correspondence that used to use facsimile, but now switches to the internet network. PJB also always emphasizes to employees to recycle used paper for office printing.

Green Power Plant
Green Power Plant

Dalam pelaksanaan kegiatannya PJB berkomitmen untuk menerapkan teknologi pembangkitan yang ramah lingkungan dan mendorong pengembangan program *green power plant.* PJB berhasil mengelola *Green Power Plant* Cirata yang meliputi agroforestri dengan varian tanaman endemik dan buah-buahan sebagai bagian dari upaya PJB dalam melindungi keanekaragaman hayati, Gedung dan *Control Centre* yang menjadi pusat kontrol dan monitoring Bendungan Cirata, Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan *underground power house* terbesar di dunia dan *Photovoltaic* atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas 1 MW sebagai pembangkit riset di pulau Jawa. Seiring dengan perkembangan energi baru terbarukan di dunia dan kepedulian terhadap produksi listrik melalui energi hijau, PJB juga bekerjasama dengan Masdar Energy dari Uni Emirat Arab. Melalui kerjasama ini, PJB bersama dengan Masdar akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara yaitu PLTS Terapung Cirata 145 MW.

In carrying out its activities, PJB is committed to implementing environmentally-friendly generation technology and encouraging the development of a green power plant program. PJB has succeeded in managing the Cirata Green Power Plant which includes agroforestry with endemic plant and fruit variants as part of PJB's efforts to protect biodiversity, the Building, and Control Center which is the center of control and monitoring of the Cirata Reservoir, Hydroelectric Power Plant with the largest underground powerhouse. in the world and Photovoltaic or Solar Power Plants with a capacity of 1 MW as a research generator on the island of Java. Along with the development of new renewable energy in the world and concern for electricity production through green energy, PJB also cooperates with Masdar Energy from the United Arab Emirates. Through this collaboration, PJB together with Masdar will build the first Floating Solar Power Plant (SPP) in Indonesia and the largest in Southeast Asia, namely the 145 MW Cirata Floating SPP. PJB continues to produce innovations

PJB terus melahirkan inovasi-inovasi yang memperkokoh posisi Perusahaan menjadi yang terdepan dalam bisnis pembangkitan serta wujud kontribusi kepada sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Beberapa inovasi yang telah dihasilkan oleh PJB pada tahun 2020 diantaranya *Coal Switching, Co Firing*, dan *Re-Forge (Reliable and Efficient Powerplant Management*). Ketiga inovasi tersebut mendapatkan apresiasi dari Pemegang Saham dan diharapkan dapat dikembangkan di lingkungan PT PLN (Persero). Penerapan *Coal Switching* tidak hanya menghemat pemakaian energi primer, tetapi Sedangkan, inovasi *Re-Forge* membuat model bisnis pengelolaan unit pembangkit menjadi lebih terpusat dan tidak ada redundansi proses, sehingga akan memberikan keunggulan bagi unit pembangkit PJB dan pembangkit IPP lainnya juga menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) dan diharapkan dapat meningkatkan *ranking merit order* di sistem ketenagalistrikan di wilayah masing-masing. Inovasi *Co-Firing* yang berhasil dikembangkan ke unit-unit PJB lainnya setelah uji coba di PLTU Paiton unit 1 dan 2, mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi emisi SO2 dan NO2 sehingga lebih ramah lingkungan dan menjadi wujud kontribusi dan solusi atas perubahan iklim global. Inovasi ini juga menghidupkan ratusan industri pellet dan membuka lapangan kerja yang tidak sedikit sehingga akan mempengaruhi pengembangan ekonomi di Indonesia.

that strengthen the Company's position as a leader in the power generation business as well as a form of contribution to the electricity sector in Indonesia. Several innovations that have been produced by PJB in 2020 include Coal Switching, Co Firing, and Re-Forge (Reliable and Efficient Powerplant Management). The three innovations received appreciation from Shareholders and are expected to be developed within PT PLN (Persero). The application of Coal Switching not only saves primary energy use but also Re-Forge innovation makes the business model of generating unit management more centralized and there is no process redundancy so that it will provide advantages for PJB generating units and other IPP generators as well as lowering the Cost of Supply and is expected to increase the merit order ranking in the electricity system in their respective regions. The Co-Firing innovation which was successfully developed into other PJB units after trials at Paiton CFPP unit 1 and unit 2 can reduce the use of fossil fuels, reduce SO2 and NO2 emissions so that they are more environmentally friendly, and become a form of contribution and solution to global climate change. This innovation also encourages hundreds of pellet companies and opens up job opportunities that can affect economic development in Indonesia.

Penataan Sampah
Waste Management

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan sehat PJB selalu menatausahakan dan mengelola sampah dan limbah sesuai dengan SOP PJB. Sesuai dengan SOP tersebut, Perusahaan secara kontinyu melakukan pembersihan sampah dari tempat kerja oleh petugas kebersihan PJB untuk kemudian disatukan kedalam sebuah bak khusus penampungan sampah.

To create a clean and healthy work environment, PJB always administers and manages waste and waste following PJB SOPs. Following the SOP, the Company continuously cleans waste from the workplace by PJB's cleaning staff and then puts it into a specific trash bin.

Sistem Pengolahan Limbah
Waste Management System

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan sehat, diperlukan suatu pengelolaan limbah padat/sampah serta limbah B3 secara terpadu dan terintegrasi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti bau, penyakit, kotor, dan dampak buruk lainnya. PJB juga melaksanakan pengelolaan limbah cair dan padat baik yang termasuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) maupun Non B3 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

To create a clean and healthy work environment, integrated and integrated management of solid waste/garbage and toxic waste is required so that it does not cause negative impacts such as odor, disease, dirt, and other negative impacts. PJB also carries out the management of liquid and solid waste, including Toxic and Hazardous (B3) and Non-Toxic (Non-B3) Materials following applicable procedures and provisions.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Limbah Cair
Liquid waste

PJB melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke badan air baik itu laut maupun sungai untuk mencegah potensi pencemaran akibat aktivitas operasional pembangkit. PJB juga memiliki unit instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di setiap unit pembangkitan. Secara umum, IPAL terdiri dari proses fisik (sedimentasi & oil separator), kimia (penambahan koagulan dan flokulan), serta filtrasi (media pasir). Ketiga metode ini digunakan untuk mengontrol parameter kontaminan agar tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 seperti pH, TSS, minyak dan lemak, sisa klor, dan lain-lain. Selain itu, PJB melakukan pengukuran kualitas air limbah di unit eksisting dan unit FTP-1 sebagai berikut.

PJB manages wastewater before it is discharged into water bodies, both seas, and rivers to prevent potential pollution due to plant operational activities. PJB also has a wastewater treatment plant (WWTP) unit in each generation unit. In general, WWTP consists of physical processes (sedimentation & oil separator), chemical (addition of coagulants and flocculants), and filtration (sand media). These three methods are used to control the contaminant parameters so as not to exceed the quality standards required by the Minister of Environment Regulation No. 8 of 2009 such as pH, TSS, oils and fats, residual chlorine, and others. In addition, PJB measures the quality of wastewater in the existing unit and the FTP-1 unit as follows.

Unit Eksisting
Existing Unit

Tabel Kualitas Air Limbah Proses/WWTP
Table of Process Wastewater Quality/WWTP

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Gresik		Paiton		Muara Karang		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
pH	-	6 – 9	7,8	6,4	8,1	7,06	8,4	7,00	8,83	6,72
TSS	mg/l	100	12	2,8	21	2	10,0	0,5	27	10
Minyak dan Lemak Oil and fat	mg/l	20	2,4	0,8	5	0,59	1,0	0,54	2	2
Chlorine (Cl_2)	mg/l	0,5	0,04	0,01	0,03	0,004	0,04	0,01	0,13	0,02
Cr Total Total Cr	mg/l	0,5	0,108	0,01	0,05	0,026	0,03	0,02	0,01	0,01
Tembaga (Cu) Copper (Cu)	mg/l	1	0,12	0,01	0,104	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Besi (Fe) Iron (Fe)	mg/l	3	1,2	0,02	2,47	0,04	0,32	0,02	1,07	0,04
Seng (Zn) Zinc (Zn)	mg/l	1	0,73	0,03	0,49	0,011	0,05	0,01	0,17	0,05
Phosphate (PO_4)	mg/l	10	2,7	0,11	0,22	0,04	0,09	0,006	0,21	0,06

Tabel Kualitas Air Limbah Bahang/ Air Laut Pendingin
Table of Heat Wastewater Quality/ Cooling Seawater

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Gresik		Paiton		Muara Karang		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Suhu Temperature	°C	40	38,4	33,2	37,40	31,20	38,40	33,00	36,1	32
Chlorin	mg/l	0,5	0,04	0,04	0,17	0,02	0,02	0,01	0,19	0,08

Kualitas Air Limbah da Air Limbah Bahang (Air Laut Pendingin) masih dibawah ambang batas:

The quality of Wastewater and Heat Wastewater (Cooling Seawater) is still below the threshold:

Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Kualitas Air Limbah Proses/ WWTP
Table of Process Wastewater Quality/ WWTP

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Indramayu		Rembang		Tanjung Awar-Awar		Paiton 9		Pacitan	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
pH	-	6 – 9	7,9	7,86	8,1	7,85	*	*	*	*	*	*
TSS	mg/l	100	15	14	1	1	*	*	*	*	*	*
Minyak dan Lemak Oil and fat	mg/l	10	0,37	0,37	2,4	2,4	*	*	*	*	*	*
Cr Total Total Cr	mg/l	0,5	0,039	0,039	0,108	0,108	*	*	*	*	*	*
Tembaga (Cu) Copper (Cu)	mg/l	1	0,015	0,015	0,05	0,04	*	*	*	*	*	*
Besi (Fe) Iron (Fe)	mg/l	3	0,76	0,52	0,27	0,21	*	*	*	*	*	*
Seng (Zn) Zinc (Zn)	mg/l	1	0,044	0,039	0,59	0,045	*	*	*	*	*	*
Phosphate (PO_4)	mg/l	10	0,033	0,033	#	#	*	*	*	*	*	*

* Paiton 9, Tanjung Awar-Awar & Pacitan, tidak memiliki kewajiban penaatan pada titik *outlet* WWTP SK Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut
\# Parameter yang dimaksud tidak Dipersyaratkan dalam SK Izin Pembuangan Limbah Cair ke Laut yang dimiliki Unit yang bersangkutan
* Paiton 9, Tanjung Awar-Awar & Pacitan are not obligated to comply with the WWTP outlet point based on Decree for Liquid Waste Disposal into the Sea
\# The parameters aforementioned are not required in the Decree of the Permit for Disposal of Liquid Waste into the Sea owned by the relevant Unit

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Tabel Kualitas Air Limbah Bahang/ Air Laut Pendingin (Kep.Men.LHK. No. SK 434/Menlhk/ Setjen/ PKL 1/7/2019, KepMenLHK No. SK.284/Menlhk/ Setjen/ PKL.1/6/2017, KepMenLHK No. SK.213/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/5/2018, KepMenLHK No. SK.443/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/6/2016, KepMenLHK No. SK.328/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/7/2017)
Table of Heat Wastewater/Seawater Cooling Quality (Kep.Men.LHK. No. SK 434/Menlhk/ Setjen/ PKL 1/7/2019, KepMenLHK No. SK.284/Menlhk/ Setjen/ PKL.1/6/2017, KepMenLHK No. SK.213/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/5/2018, KepMenLHK No. SK.443/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/6/2016, KepMenLHK No. SK.328/ Menlhk/ Setjen/ PKL.1/7/2017)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Paiton 9		Pacitan		Rembang		Tanjung Awar-Awar		Indramayu	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Suhu Weather	°C	40	37	34	0,06	0,05	39	30,1	33,4	30,5	32,6	31,7
Chlorin	mg/l	0,5	0,2	0,0	37	36	0,14	0,07	0,15	0,12	0,2	0,15

Limbah B3
Toxic Waste

PJB dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini di antaranya Permen LHK No. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permen LHK No. 6 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan dari operasional pembangkit, maka limbah B3 tersebut disimpan di TPS LB3 yang berizin atau terintegrasi di dalam dokumen lingkungan selama masa simpan yang diperbolehkan. Selanjutnya, limbah B3 tersebut diserahkan ke pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 (pengumpul/pemanfaat/pengolah). PJB juga bekerja sama dengan transporter yang memiliki perizinan lengkap dari KLHK dan Kemenhub.

PJB in managing toxic waste following the regulations currently in force, including the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 1 of 2021 concerning the Company Performance Rating Program in Environmental Management and Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 6 of 2021 concerning toxic waste management. Toxic waste is generated from plant operations, the toxic waste is stored in a licensed Toxic Waste Landfill or integrated into environmental documents for the allowed shelf life. Furthermore, the toxic waste is handed over to a third party with a toxic waste management permit (collector/ useful/processor). PJB also cooperates with transporters who have been granted a permit from the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Transportation.

Limbah Non-B3
Non-Toxic Waste

PJB dalam melakukan pengelolaan limbah Non-B3 yaitu memaksimalkan 3R agar sampah yang berakhir di TPA berkurang. PJB melakukan pemanfaatan limbah organik menjadi kompos ataupun briket, sedangkan sebagian limbah anorganik seperti kardus kemasan, botol minuman sekali pakai, plastik, dan limbah non-B3 lainnya dikelola di bank sampah binaan di sekitar lokasi pembangkit. Sisa limbah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, diserahkan ke TPA.

PJB in managing Non-toxic waste, namely maximizing the 3Rs so that the waste processed to the landfill is reduced. PJB utilizes organic waste into compost or briquettes, while some inorganic waste such as cardboard packaging, disposable drink bottles, plastic, and other non-toxic waste is managed in the waste banks built around the generator site. The remaining waste that cannot be reused is handed over to the landfill.

FABA dikategorikan menjadi Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan Pemanfaatan FABA merupakan salah satu bentuk pengelolaan limbah Non B3 yang dilakukan oleh perusahaan penghasil limbah (PLTU). Pemanfaatan FABA yang dilakukan oleh PLTU merupakan kegiatan tambahan (*beyond compliance*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengelola lingkungan yg lebih baik. Total pemanfaatan FABA tahun 2021 sebesar 443.959,88 Ton atau 59,42% dari total FABA yang dihasilkan. Dalam upaya untuk mengurangi kegiatan Penimbunan FABA di *Landfill*, dilakukan Pemanfaatan FABA sebagai Bahan Baku Substitusi Produk Beton Perkerasan, *Roadbase* (*subgrade* atau *sub-base*), Bata Ringan, Paving/Batako, Penetralisir Air Asam Tambang, Break Water dan Pupuk.

FABA is categorized as Non-Hazardous and Toxic Waste (Non-B3) according to Government Regulation (PP) 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. The FABA utilization activity is a form of non-toxic waste management carried out by a waste-producing company (CFPP). Utilization of FABA carried out by CFPP is an additional activity (beyond compliance) carried out by the Company in managing a better environment. The total utilization of FABA in 2021 is 443,959.88 Tons or 59.42% of the total FABA produced. To reduce FABA stockpiling activities in Landfills, FABA is used as a Raw Material for the Substitution of Concrete Pavement Products, Roadbase (subgrade or sub-base), Lightweight Brick, Paving/Brick, Neutralizer for Acid Mine Water, Break Water, and Fertilizer.

Berikut adalah berbagai macam inovasi yang dilakukan perusahaan dalam pengelolaan limbah baik B3 maupun non-B3:

The following are various types of innovations carried out by the Company in the management of both toxic and non-toxic waste:

Unit	Inovasi Innovation	Penjelasan Explanation
UP Gresik Gresik GU	Aplikasi *Health Meter* Health Meter App	Aplikasi ini mengurangi penggunaan kertas untuk cetak *form* resep obat dan jaminan rumah sakit bagi karyawan. Program ini mampu mengurangi 0,022 ton penggunaan kertas. This application reduces the use of paper to print prescription drug forms and hospital guarantees for employees. This program can reduce 0.022 tons of paper usage.
UP Gresik Gresik GU	Pengomposan dengan Bahan Baku Sampah Organik di rumah Kompos Composting with Organic Waste Raw Materials at the Compost house	Program ini mampu mengolah sampah organik sebanyak 46,6 ton. Kompos yang sudah diolah selain digunakan sendiri, juga diserahkan ke masyarakat setempat dan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik. This program can process 46.6 tons of organic waste. The compost that has been processed is not only used for its use, it is also handed over to the local community and the Agriculture Office of Gresik Regency.
UP Gresik Gresik GU	*Hydro Cyclone* pada *inlet Chlorint Plant* Hydro Cyclone at Chlorine Plant inlet	Program ini digunakan untuk pengurangan limbah B3. Dengan adanya *hydro cyclone*, kegiatan *acid cleaning* berkurang sehingga mengurangi timbulan kemasan terkontaminasi B3 sebesar 0,3 ton. This program is used for the reduction of toxic waste. With the hydro cyclone, acid cleaning activities are reduced, thereby reducing the hazardous (toxic) packaging by 0.3 tons.
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	Pengurangan Penggunaan AKI dengan Program REPOWER (*Reused Portable Power Bank*) Reducing the Use of Battery (Accumulator) with the REPOWER (Reused Portable Power Bank) Program	program ini bertujuan untuk menggunakan kembali AKI yang tidak digunakan lagi untuk menyuplai Tegangan DC untuk menjaga Pembangkit Listrik tetap beroperasi. Melalui program ini PT PJB UP Muara Tawar berhasil melakukan pemakaian kembali Aki bekas sebesar 16,499% selama tahun 2021 This program aims to reuse Battery that is no longer used to supply DC Voltage to generate the Power Plant. Through this program, PT PJB's Muara Tawar GU succeeded in reusing used battery by 16.499% in 2021

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Unit	Inovasi Innovation	Penjelasan Explanation
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	Purifikasi Minyak Pelumas dan Trafo Lubricant and Transformer Oil Purification	Minyak trafo dan minyak pelumas gas turbin yang sudah dilakukan purifikasi dapat digunakan kembali sehingga pengurangan limbah B3 yang dihasilkan dapat berkurang. Hasil Absolut Program Tahun 2021 mampu menghasilkan pengurangan limbah B3 sebesar : 81,6 Ton Melalui program purifikasi minyak mampu menghemat sebesar : Rp293.760.000,00 Transformer oil and gas turbine lubricating oil that has been purified can be reused so that the toxic waste can be reduced. The Absolute Results of the 2021 Program can produce a reduction in toxic waste of: 81.6 Tons. Through the oil purification program, it can save Rp. 293.760.000.
UP Muara Karang Muara Karang GU	Modifikasi Struktur Inlet HRSG 1.1 HRSG 1.1. Inlet Structure Modification	Dampak lingkungan yang dihasilkan dari program ini adalah berupa penurunan timbulan limbah refraktori bekas pada tahun 2020-2021 sebesar 7,3565 ton yang setara dengan penghematan biaya sebesar Rp385.337.560. The environmental impact resulting from this program is a reduction in the generation of used refractory waste in 2020-2021 by 7,356.5 tons, which is equivalent to a cost savings of Rp. 385,337,560.
UP Paiton Paiton GU	Pemanfaatan Limbah Rantai *Chain Block* Dan Kayu Bekas Menjadi *Folding Table Set* Utilization of Chain Block Waste and Reclaimed Wood into Folding Table Sets	Dampak lingkungan yang dihasilkan dari program ini adalah berupa penurunan timbulan limbah padat non B3 sebesar 0,101 ton yang setara dengan penghematan biaya sebesar Rp 3.816.400. Program ini termasuk dalam *Ecoinovasi Product Sharing* dimana hasil dari inovasi dapat digunakan oleh masyarakat dan juga program ini memberikan nilai tambah layanan produk, untuk UMKM selaku konsumen dapat menghemat biaya pembelian *furniture*/meja kursi baru sebesar Rp 6.000.000,- , selain itu juga penggunaan meja lipat (*folding table*) ini mempermudah masyarakat pengelola UMKM untuk melakukan perubahan tata ruang menyesuaikan tren masyrakat yang sedang berkembang, sedangkan untuk PT PJB UP Paiton selaku produsen nilai tambah layanan produknya adalah tidak perlu membeli bahan baku untuk pembuatan *table set* dan mengurangi timbulan limbah padat non B3 The environmental impact resulting from this program is a decrease in the generation of non-toxic solid waste by 0.101 tons, which is equivalent to a cost savings of Rp. 3,816,400. This program is included in Eco-innovation Product Sharing where the results of innovation can be used by the community and this program also provides added value for product services, for MSMEs as consumers they can save the cost of buying new furniture/table chairs by Rp. 6,000,000. This folding table enables the MSME management community to make changes to the spatial layout according to the developing community trends, while for PT PJB's Paiton GU as a producer of value-added product services, there is no need to buy raw materials for the manufacture of table sets and reduce non-toxic solid waste.

Pemantauan Kualitas Lingkungan
Environmental Quality Control

PJB melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan berupa pengelolaan emisi udara dan emisi gas rumah kaca sebagai upaya untuk memelihara kualitas udara di sekitar area operasional Perusahaan.

PJB carries out environmental quality control activities in the form of managing air emissions and greenhouse gas emissions as an effort to maintain air quality around the Company's operational areas

Pengelolaan Emisi Udara
Air Emission Management

Emisi udara dikelola oleh PJB dengan menggunakan alat pengendali seperti *electronic presipitator* (ESP). Alat ini digunakan terutama untuk mengontrol partikulat yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Beberapa pembangkit PJB pun menggunakan bahan bakar gas yang termasuk bahan bakar ramah lingkungan. PJB juga melakukan pengukuran emisi gas buang yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Emisi gas buang untuk seluruh PLTU/PLTGU minyak dan gas serta PLTU Batubara baik unit eksisting maupun Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* (UBJOM) FTP-1 diukur secara berkala. Hasil pengukuran emisi gas buang tersebut menunjukkan bahwa emisi gas buang berada di bawah ambang batas sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut:

Air emissions are managed by PJB by using a controller such as an electronic precipitator (ESP). This tool is used primarily to control particulates produced from coal combustion. Several PJB power plants also use gas fuel, which is an environmentally friendly fuel. PJB also measures exhaust emissions resulting from operational activities. Exhaust gas emissions for all CFPP/CCPP oil and gas as well as Coal-fired CFPP, both existing units, and the FTP-1 Operation & Maintenance Service Business Unit (OMSBU) are measured regularly. The results of the exhaust emission measurement show that the exhaust emission is below the threshold as detailed in the following table:

Unit Eksisting

Existing Unit

Tabel Emisi Gas Buang PLTU/PLTGU Minyak dan Gas – Unit Eksisting
Table of Exhaust Gas Emissions from CFPP/CCPP Oil and Gas – Existing Units

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Gresik		Muara Karang		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO_2	mg/Nm³	150	30,7	30,7	10	3	14,3	2
NO_x	mg/Nm³	400	26,55	23,8	399	121	188	60,2
Total Partikulat Total Particulate	mg/Nm³	30	7,04	4,9	28	5	15,9	5,51

Tabel Emisi Gas Buang PLTU Batubara – Unit Eksisting
Table of Coal CFPP Exhaust Emission– Existing Units

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Paiton	
			Max	Min
SO_2	mg/Nm³	550	522	334
NO_x	mg/Nm³	550	330	217
Total Partikulat Total Particulate	mg/Nm³	100	29,7	26
Merkuri (Hg) Mercury (Hg)	mg/Nm³	0,03	0.0001	0,0001

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Emisi Gas Buang PLTU Batubara (Per.Men.LH.K No.P15/2019)
Table of Coal CFPP Exhaust Emission (Minister of Environment Regulations No.P15/2019)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Indramayu		Rembang		Tanjung Awar-Awar		Paiton 9		Pacitan	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO_2	mg/Nm³	550	303	205	304	9	276,15	267,71	351	31	20	10
NO_x	mg/Nm³	550	320	259	298	114	353,21	350,41	314	158	303	234
Partikulat Particulate	mg/Nm³	100	94	58,7	47,7	7,61	77,4	75,92	24	3	31,84	8,28
Hg	mg/Nm³	0,03	0,003	0,003	0,011	0,008	0,004	0,004	0,01	0,0001	0,011	0,011

PJB juga mengukur kualitas udara ambien dan kebisingan untuk unit eksisting dan UBJOM FTP-1. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara *ambient* dan kebisingan unit eksisting dan UBJOM FTP-1 berada di bawah ambang batas. Unit PJB melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan kebisingan baik terhadap paparan ke pekerja serta sebaran kebisingannya melalui penambahan tanaman sebagai peredam kebisingan kompresor dan penggunaan alat pelindung diri di area kompresor. Rincian hasil pengukuran kualitas udara *ambient* dan kebisingan unit eksisting dan unit FTP-1 ditunjukkan dalam tabel berikut. Udara *ambient* di sekitar pembangkit menunjukkan hasil memenuhi standar. Ini menunjukkan PJB telah berhasil mengelola kualitas udara emisi yang keluar dari cerobong dengan cara menggunakan alat pengendali partikulat ESP serta pengendalian kualitas bahan bakar yang digunakan.

PJB also measures ambient air quality and noise for existing units and UBJOM FTP-1. The results of these measurements indicate that the ambient air quality and noise of the existing unit and UBJOM FTP-1 are below the threshold. The PJB unit made several efforts to control noise both on exposure to workers and the distribution of noise through the addition of plants as compressor noise dampers and the use of personal protective equipment in the compressor area. Details of the results of measurements of ambient air quality and noise of the existing unit and the FTP-1 unit are shown in the following table. The ambient air around the generator shows the results meet the standards. This shows that PJB has succeeded in managing the quality of air emissions coming out of the chimney by using the ESP particulate controller and controlling the quality of the fuel used.

Unit Eksisting

Existing Unit

Tabel Kualitas Udara Ambient Dan Kebisingan (SK.Gub. Jawa Timur No. 10 / 2009, SK.Gub. DKI No. 551 / 2001, dan PP. RI. No. 41 / 1999, dan Kep Men LH No.48/11/1996)
Table of Ambient Air and Noise Quality (Decree of East Java Gov. No. 10 / 2009, SK.Gub. DKI No. 551 / 2001, and PP. RI. No. 41 / 1999, and Ministry of Environment Decree No. 48/11 /1996)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Gresik		Paiton		Muara Karang		Muara Tawar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO_2	µg/Nm³	365	18,3	8,28	40	30	40	8	21,4	21,4
NO_x	µg/Nm³	150	6,5	6,5	27,6	21	50	5	8,81	5,84
Debu Dust	ug/Nm³	230	36,6	18,3	92	66	104	87	34,4	15,1
Kebisingan Noise	dBA	55-70	46,8	50,6	69	53	61,82	51,34	65,3	52,6

Unit FTP-1

FTP-1 Unit

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan (SK.Gub. Jawa Timur No. 10/2009 tentang Baku Mutu Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak)

Table of Ambient Air and Noise Quality (Decree of East Java Gov. No. 10/2009 concerning Ambient and Emissions Quality Standards from Immovable Sources)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Pacitan		Paiton		Tj. Awar-Awar	
			Max	Min	Max	Min	Max	Min
SO_2	µg/Nm³	262	31,9	8,2	36	36	58,41	14,45
NO_x	µg/Nm³	92,5	7,22	6,5	32	32	23,3	10,1
Debu Dust	ug/Nm³	0,26	147,6	17,1	24	24	0,23	0,11
Kebisingan Noise	dBA	55-85	65,2	44,8	67	50	64,5	46,5

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan untuk PLTU Indramayu (Peraturan Pemerintah No. 41/1999 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambient Nasional)

Table of Ambient Air and Noise Quality for Indramayu CFPP (Government Regulation No. 41/1999 concerning National Ambient Air Quality Standards)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Indramayu	
			Max	Min
SO_2	µg/Nm³	365	56,54	12,51
NO_x	µg/Nm³	150	60,86	10,5
Debu Dust	ug/Nm³	230	111,42	50,23
Kebisingan Noise	dBA	55-85	60,8	40,5

Tabel Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan untuk PLTU Rembang (SK Gub. Jateng No. 08/2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa Tengah

Table of Ambient Air and Noise Quality for Rembang CFPP (Decree of Central Java Gov. No. 08/2001 concerning Ambient Air Quality Standards in Central Java)

Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality standards	Rembang	
			Max	Min
SO_2	µg/Nm³	365	23,5	0,6
NO_x	µg/Nm³	150	44,8	7,6
Debu Dust	ug/Nm³	230	89,9	27,5
Kebisingan Noise	dBA	55-85	83,5	52,4

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
Greenhouse Gas Emission Reduction

Perusahaan mendukung upaya pemerintah dalam program mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini tercermin melalui upaya dan inisiatif PJB terkait pengurangan emisi kegiatan operasi dengan melakukan penghematan energi dan merealisasikan program penanaman pohon yang mampu menyerap CO_2 di dalam maupun di luar daerah operasi PJB. Sama seperti listrik, ketersediaan BBM sebagai sumber energi tidak terbarukan semakin terbatas. Sebab itu, Perusahaan berupaya menggunakan sumber energi tersebut secara bijaksana, antara lain, dengan berupaya melakukan upaya efisiensi atau penghematan.

The Company supports the government's efforts in mitigating the Greenhouse Gas (GHG) emissions. This is reflected through PJB's efforts and initiatives related to reducing emissions from operating activities by saving energy and campaigning tree planting programs that can absorb CO2 inside and outside PJB's operating areas. It is the same as electricity which the availability of fuel as a non-renewable energy source is increasingly limited. Therefore, the Company seeks to use these energy sources wisely, among others, by making efforts to make efficiency or savings.

Program pengurangan emisi melalui *Carbon Offset* atau dikenal juga sebagai pembelian kredit karbon guna mengurangi pencatatan pelepasan emisi dari pembakaran bahan bakar fosil. *Carbon offset* dilingkungan perusahaan pertama kali berhasil dilakukan antara kolaborasi PLTU Paiton dengan PLTA Sipansihaporas dengan besaran 1000 Ton CO_2. Kredit karbon yang diperjualbelikan berasal dari mekanisme sukarela VCS (*Verified Carbon System*) yang diverifikasi oleh pihak internasional Southpole, Inc.

Emission reduction programs through Carbon Offset or also known as the purchase of carbon credits to reduce the recording of emission releases from burning fossil fuels. Carbon offset within the Company's environment was successfully carried out for the first time by collaborating Paiton CFPP with Sipansihaporas HPP with a volume of 1000 tons of CO2. The carbon credits traded come from the Voluntary VCS (Verified Carbon System) Mechanism verified by the international Southpole, Inc.

Perusahaan juga melakukan pengelolaan terhadap emisi bahan perusak ozon (BPO) yang menjadi salah satu sumber perubahan iklim. BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer. BPO biasa terdapat di mesin pendingin ruangan (AC), kulkas, dan tabung pemadam api. Penggunaan BPO akan menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon yang mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, keterbatasan sumber air bersih, kerusakan rantai makanan di laut, menurunnya hasil produksi pertanian dan sebagainya. Oleh karena dampak buruk akibat pemanfaatan BPO sangat besar, PJB mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memperketat penggunaan BPO. Langkah konkret yang dilakukan Perusahaan adalah menggunakan AC dengan refrigeran (zat pendingin) yang ramah lingkungan. Kebijakan yang sama berlaku untuk penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), yaitu menggunaan zat pemadam non-Halon. Dengan demikian, Perusahaan ikut andil dalam upaya untuk mencegah penipisan/terjadinya lubang lapisan ozon di atmosfer yang memicu pemanasan global dan potensial menimbulkan masalah bagi bumi dan penduduknya.

The Company also manages the emission of ozone-depleting substances (ODS) which is one of the sources of climate change. BPO is a chemical compound that has the potential to react with ozone molecules in the stratosphere. ODS is commonly found in air conditioners (AC), refrigerators, and fire extinguishers. The use of ODS will cause depletion of the ozone layer which results in environmental degradation, limited sources of clean water, damage to the marine food chain, decreased agricultural production, and so on. Because the negative impact of the use of ODS is very large, PJB fully supports the government's policy to tighten the use of ODS. A concrete step taken by the Company is to use an air conditioner with refrigerant (coolant) that is eco-friendly. The same policy applies to the use of Fire Extinguishers, namely the use of non-Halon suppression agents. Thus, the Company takes part in efforts to prevent the depletion/occurrence of the ozone layer hole in the atmosphere which triggers global warming and has the potential to cause problems for the earth and its inhabitants.

Pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca juga dilakukan melalui pengukuran komposisi emisi gas rumah kaca secara berkala sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

The GHG emissions control is also carried out through periodic measurement of the composition of GHG emissions as described in the following table:

Tabel Emisi Gas Rumah Kaca PJB Tahun 2019-2021
Table of PJB Greenhouse Gas Emissions in 2019-2021

Unit Pembangkit Generation Unit	Satuan Unit	2019	2020	2021
Paiton	Ton CO_2	5.592.634,76	4.813.716,86	5.557.835,77
Muara Karang	Ton CO_2	3.185.413,83	2.316.355,94	3.124.446,92
Gresik	Ton CO_2	3.345.679,14	2.782.831,81	2.640.290,14
Muara Tawar	Ton CO_2	2.933.960,28	1.160.832,33	1.867.910,6
Indramayu	Ton CO_2	6.461.518,21	6.578.152,40	5.839.874,04
Rembang	Ton CO_2	4.339.112,87	4.345.918,38	3.432.679,77
Paiton 9	Ton CO_2	4.358.338,07	4.395.766,63	4.192.336,97
Pacitan	Ton CO_2	3.999.191,44	3.715.890,99	3.247.550,99
Tj.Awar-Awar	Ton CO_2	5.128.835,23	4.571.270,81	4.683.153,76
Total	**Ton CO_2**	**39.344.683,83**	**34.680.736,15**	**34.586.078,96**

Unit Eksisting

Existing Unit

Tabel Komposisi Emisi Gas Rumah Kaca
Table of Greenhouse Gas Emissions

Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emissions	Paiton (Ton)	Muara Karang (Ton)	Gresik (Ton)	Muara Tawar (Ton)
CO_2	5.530.068,78	2.951.763,97	2.612.591,13	1.865.526,26
CH_4	75,89	68,72	60,28	42,24
N_2O	84,43	7,62	6,76	4,83

Unit FTP-1

Unit FTP-1

Tabel Komposisi Emisi Gas Rumah Kaca
Table of Greenhouse Gas Emission Composition

Emisi Gas Rumah Kaca Greenhouse Gas Emissions	Indramayu (Ton)	Rembang (Ton)	Tj. Awar-Awar (Ton)	Paiton 9 (Ton)	Pacitan (Ton)
CO_2	5.839.874,04	3.432.679,77	4.683.153,76	4.192.336,97	3.247.550,99
CH_4	62,43	36,86	48,48	47,29	37,78
N_2O	86,08	50,42	69,14	61,61	47,42

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

Penanaman Pohon
Tree planting

PJB melaksanakan penanaman pohon di seluruh unit pembangkitan sebagai salah satu program *Green and Clean Power Plant.* Program ini merupakan wujud peran PJB untuk mengatasi emisi karbondioksida yang berasal dari proses produksi listrik. Penanaman pohon dapat membuat proses produksi listrik lebih aman dan bersih karena karbondioksida dapat terserap. Berikut adalah daftar program penanaman pohon selama tahun 2021

PJB carries out tree planting in all power plants as part of the Green and Clean Power Plant program. This program is a manifestation of PJB's role in overcoming carbon dioxide emissions from the electricity production process. Planting trees can make the electricity production process safer and cleaner because carbon dioxide can be absorbed. The following is a list of tree planting programs for 2021

Program Penanaman Pohon Tahun 2021
2021 Tree Planting Program

No.	Unit	Jumlah Pohon Number of Trees
1	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	5.326
2	UP Muara Karang Muara Karang GU	11.521
3	UP Gresik Gresik GU	2.500
4	UP Cirata Cirata GU	112.700
5	UP Brantas Brantas GU	200
6	UP Paiton Paiton GU	10.600
7	UBJOM Indramayu Indramayu OMSBU	1.737
8	UBJOM Rembang Rembang OMSBU	8.725
9	UBJOM Tj. Awar-Awar Tanjung Awar-Awar OMSBU	181
10	UBJOM Paiton Paiton OMSBU	6.489
11	UBJOM Pacitan Pacitan OMSBU	180

Mekanisme dan Penanganan Pengaduan Lingkungan dan Masyarakat

Mechanisms and Handling of Environmental and Social Complaints

PJB menilai bahwa pengaduan adalah bentuk kepedulian masyarakat luas dan pengguna jasa demi kemajuan Perusahaan. Komitmen PJB dalam mewujudkan lingkungan sekitar area operasional baik dan sehat telah mendorong upaya pengelolaan perusahaan berbasis lingkungan secara konsisten. Program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang dilaksanakan menjadi wujud kepedulian PJB terhadap lingkungan sekitar melalui pengelolaan risiko dan dampak lingkungan yang berpotensi timbul dari kegiatan operasional Perusahaan. Disamping itu, masyarakat pun dapat menyampaikan pengaduan terkait masalah lingkungan di sekitar wilayah operasional PJB melalui surat resmi.

PJB considers that complaints are a form of concern for the wider community and service users for the progress of the Company. PJB's commitment to realizing a good and healthy environment around the operational area has encouraged efforts to manage an environment-based company consistently. The social responsibility program for the environment that is implemented is a form of PJB's concern for the surrounding environment through the management of environmental risks and impacts that have the potential to arise from the Company's operational activities. In addition, the public can also submit complaints related to environmental problems around PJB's operational areas through official letters.

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Lingkungan yang Dimiliki

Awards and Certifications in the Environmental Aspect

PJB telah menerapkan sistem manajemen lingkungan secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem manajemen yang lain serta terus konsisten melaksanakan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan untuk mencapai visi misi PJB. Dengan komitmen PJB tersebut, PJB dan Anak Perusahaan mendapatkan beberapa sertifikasi antara lain ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 5001:2011 tentang Sistem Manajemen Energi, dan ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset. PJB juga membekali karyawan dengan beragam sertifikasi terkait lingkungan diantaranya penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Air (PPPA), penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPPU), operator Pengendalian dan Pencemaran Air (PPA), operator Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPU), dan Pengendalian Limbah B3 (PLB3).

PJB has implemented an integrated environmental management system and is integrated with other management systems and continues to consistently implement continuous improvement efforts to achieve PJB's vision and mission. With PJB's commitment, PJB and its Subsidiaries received several certifications including ISO 14001:2015 for Environmental Management systems, ISO 5001:2011 for Energy Management systems, and ISO 55001:2014 for Asset Management Systems. PJB also provides employees with various certifications related to the environment including those in charge of Water Pollution and Control, those in charge of Air Pollution and Control, Water Pollution and Control operators, Air Pollution and Control operators, and Toxic Waste Control.

Selama Tahun 2021, PJB berhasil mendapatkan penghargaan dibidang lingkungan, yaitu: PROPER Emas untuk unit PLTGU Gresik, PLTU Paiton, dan PLTU Rembang. PROPER Hijau untuk PLTGU Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, PLTU Indramayu, PLTU Paiton 9.

In 2021, PJB received awards in the environmental aspect as follows: Gold PROPER for the Gresik CCPP, Paiton CFPP, and Rembang CFPP. Green PROPER for Muara Karang CCPP, Muara Tawar CCPP, Indramayu CFPP, Paiton 9 CFPP.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Komitmen dan Kebijakan Ketenagakerjaan dan K3

Commitments and Policies on Employee and OHS

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama bagi PJB. Karena itu, Perusahaan selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain aspek ketenagakerjaaan, Perusahaan juga mempriotaskan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Perusahaan berkomitmen untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan maupun pihak lain yang beraktivitas di lingkungan PT PJB melalui penerapan SMK3 sesuai ISO 45001:2018 dan PP 50 Tahun 2012, dengan target tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident.* Komitmen tersebut juga tertuang dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PT PJB, *Safety Golden Rules*, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Oleh karena itu, Manajemen PJB ikut andil sebagai Tim Perunding dan Tim Perumus dalam penyusunan dan kesepakatan PKB. PKB yang berlaku saat ini yaitu PKB PT PJB Periode 2019 – 2021 telah didaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran No B.130/PHIJSK-PK/PP&PKB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019. PKB PT PJB tersebut berlaku selama 2 tahun dan telah mengalami perpanjangan selama 1 tahun dan berakhir pada tanggal 25 Maret 2022. Saat ini Manajemen dan SP PJB sedang dalam tahap persiapan untuk penyusunan PKB PT PJB Periode 2022–2024. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan aspek penting dalam rangka menunjang keberhasilan aktivitas Perusahaan. Selain itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga dinilai memiliki peran strategis yang dapat menjaga eksistensi dan citra Perusahaan.

Human Resources is the main asset for PJB. Therefore, the Company always strives to fulfill the rights of employees by following the prevailing laws and regulations; in this case, the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. In addition to employee aspects, the Company also prioritizes Occupational Health and Safety (OHS) aspects for employees as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety, Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 concerning Electricity and Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management System.

The Company is committed to ensuring Occupational Health and Safety for employees and other parties who are actively involved in PT PJB through the implementation of OHSMS following ISO 45001: 2018 and PP 50 of 2012, with a zero-accident rate target. This commitment is also contained in PT PJB's Integrated Management System Policy, Safety Golden Rules, and Collective Labor Agreement (CLA). Therefore, PJB Management takes part as the Negotiating Team and Formulating Team in the preparation and agreement of the CLA. The current CLA for the 2019-2021 period has been registered to the Ministry of Manpower with Registration Number No. B.130/PHIJSK-PK/PP&PKB/V/2019 on May 28, 2019. PJB CLA is valid for 2 years and has been extended for 1 more year which will end on March 25, 2022. Currently, the Management and PJB Labor Union are in the preparation stage for the preparation of the CLA in PT PJB for the 2022–2024 period. Occupational Health and Safety is an important aspect to support the success of the Company's activities. Additionally, Occupational Health and Safety are also considered to have a strategic role that influences the Company's reputation.

Lingkup dan Rencana Terhadap Kegiatan Ketenagakerjaan 2021

Scope and Plans for 2021 Employment Activities

Lingkup kegiatan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja antara lain meliputi program ketenagakerjaan (kesetaraan gender dan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja lokal, kesetaraan kesempatan pengembangan kompetensi, remunerasi, kebebasan berserikat serta program pensiun), program pengelolaan kesehatan kerja serta program keselamatan kerja. Beberapa kegiatan sebagai wujud tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan yang direncanakan pada tahun 2021 antara lain:

1) Pelatihan dan sosialisasi K3 serta implementasi PJB *Safety Golden Rules*.
2) Penguatan K3 Kontraktor melalui CSMS (*Contractor Safety Management System*).
3) Pencegahan penyakit terdiri dari identifikasi penilaian dan pengendalian potensi bahaya kesehatan, pemenuhan *industrial hygiene*, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pemberian imunisasi dan *extrafooding*.
4) Peningkatan kesehatan dilakukan dengan kegiatan *workshop* atau seminar kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat, penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas olahraga.
5) Penanganan penyakit meliputi pemberian P3K di tempat kerja, penyediaan ruang kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas alat kesehatan dan dokter hiperkes serta *paramedic* hiperkes atau kerjasama dengan Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan, serta penyediaan obat obatan bekerjasama dengan apotek.
6) Pemulihan kesehatan dengan pelaksanaan program kembali bekerja/pemulihan kerja dan pemulihan medis.
7) Kebebasan berserikat:
   a. Pelaksanaan kegiatan Lembaga Kerjasama (LKS Bipartit)
   b. Pelaksanaan pertemuan berkala manajemen – SP PJB
8) Program Pensiun dilaksanakan dan dikelola oleh DP PLN dan DPLK.

The scope of employee and occupational health and safety activities includes employment programs (gender equality and employment opportunities, use of local workers, equal opportunities for competency development, remuneration, freedom of association, and pension programs), occupational health management programs, and occupational safety programs. Some of the activities as a form of responsibility toward employment that is planned for 2021 include:

1) OHS training and campaign and implementation of PJB Safety Golden Rules.
2) Strengthening Contractor OHS through CSMS (Contractor Safety Management System).
3) Disease prevention which consists of identification, assessment, and control of potential health hazards, compliance with industrial hygiene, implementation of health checks, immunization, and extra fooding.
4) Health improvement which is carried out through workshops or health seminars, cultivating healthy living behavior, organizing activities, and sports facilities.
5) Disease management which includes providing first aid in the workplace, providing a health room equipped with medical equipment facilities, and Company Hygiene and Occupational Health (hyperkes) doctor and Company Hygiene and Occupational Health (hyperkes) Paramedic or in collaboration with hospitals/health facilities, as well as providing medicines in collaboration with pharmacies.
6) Health recovery by implementing return to work/ occupational recovery and medical recovery programs.
7) Freedom of association:
   a. Implementation of the activities of the Cooperation Institution (LKS Bipartite)
   b. Implementation of periodic management meetings – PJB Labor Union
8) Pension Program which is implemented and managed by DP PLN and DPLK.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahan Terhadap Ketenagakerjaan dan K3

Realization of Corporate Social Responsibility Activities on Employees and OHS

Selama Tahun 2021 telah direalisasikan berbagai program kerja yang mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2021 sebagai berikut:

In 2021, various work programs have been realized which refer to the Company's 2021 Budget Work Plan as follows:

Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Education, Training, and Competency Development

PJB melakukan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan *knowledge, skill,* dan *ability* yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, *performance*, dan sikap mental karyawan PJB melalui PJB *Academy*. Program yang dilaksanakan berbeda-beda sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan tiap karyawan. Program PJB *Academy* melibatkan Direktur Utama sebagai Dean dan anggota Direksi sebagai Vice Dean serta Kepala Divisi, General Manager dan Kepala Satuan sebagai *learning steering committe*. PJB *Academy* pun menjalin kerjasama dengan institusi pembelajaran kelas dunia diantaranya *Tokyo Electric Power Company* (TEPCO) dan mendapatkan pengakuan internasional berupa *International Certificate* dari PEARSON UK. Proses pembelajaran PJB *Academy* dinilai telah memenuhi standar PEARSON UK dalam aspek *managing the organization, managing learning,* dan *managing assessment.* Pengelola PJB *Academy* pun telah memenuhi standar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat *Corporate Learning Technologist*. Selain itu PJB *Academy* juga sudah terstandar ISO 21001:2018 dari *British Standard Institution* (BSI) yang merupakan standar yang diakui secara internasional untuk dapat menyajikan layanan pembelajaran yang bermutu dan efektif bagi penerima layanan Pendidikan.

PJB holds education and training programs to improve knowledge, skills, and abilities that aim to improve the competence, performance, and mental attitude of PJB employees through PJB Academy. The programs implemented are varied based on the competencies required by each employee. The PJB Academy program involves the President Director as Dean and members of the Board of Directors as Vice Dean as well as Division Heads, General Managers, and Unit Heads as the learning steering committee. PJB Academy has also collaborated with world-class learning institutions including Tokyo Electric Power Company (TEPCO) and received international recognition in the form of an International Certificate from PEARSON UK. PJB Academy's learning process is considered to have met PEARSON UK standards in the aspects of managing the organization, managing learning, and managing assessment. The management of PJB Academy has also met international standards as evidenced by the Corporate Learning Technologist certificate. In addition, PJB Academy has also been standardized to ISO 21001:2018 from the British Standard Institution (BSI), which is an internationally recognized standard to provide higher quality and effective learning services for education service recipients.

Adapun program-program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu:

a. Pelatihan Non-Teknik
   - *Marketing Intelligence*
   - *Mastering Business Analysis*
   - *Corporate Finance*
   - Data Analysis
   - *Social Return on Investment*

The education, training, and competency development programs for employees that have been implemented in 2021 are:

a. Non-Technical Training
   - Marketing Intelligence
   - Mastering Business Analysis
   - Corporate Finance
   - Data Analysis
   - Social Return on Investment

b. Pelatihan Teknik
   - *Machine Learning*
   - *Photovoltaic System*
   - *Power Quality*
   - *Microgrid*
c. Sertifikasi
   - Sertifikasi AK3 Umum
   - Program Profesi Insinyur
   - *Certified Business Analyst Professional*
   - *EC-Council Certified Incident Handler*
d. Leadership
   - Diklat Penjenjangan *Supervisory Education*
   - *Jump Leadership*
   - *Leader in ME*
   - *Business Thinking & Innovation*
   - *Ecosystem Analysis*
e. Pelatihan Pembelajaran Masa Purnabakti
   - Diklat pembekalan masa purna
   - Diklat Keterampilan/Sertifikasi/Kerohanian
f. Pendampingan Inovasi
   - Pembekalan inovator

b. Technical Training
   - Machine Learning
   - Photovoltaic System
   - Power Quality
   - Microgrids
c. Verification
   - General OHS Expert Certification
   - Professional Engineer Program
   - Certified Business Analyst Professional
   - EC-Council Certified Incident Handler
d. Leadership
   - Supervisory Education Leveling Training
   - Jump Leadership
   - Leader in ME
   - Business Thinking & Innovation
   - Ecosystem Analysis
e. Retirement Learning Training
   - Full-time training and training
   - Skills/Certification/Spirituality Training
f. Innovation Assistance
   - Provision of innovators

Penghargaan Produktivitas Karyawan
Employee Productivity Award

Dalam rangka memberikan motivasi kinerja kepada karyawan, serta untuk meningkatkan produktivitas karyawan, maka PJB memberikan penghargaan bagi karyawan yang produktif di lingkungan Perusahaan. Pemberian penghargaan ini diberikan berdasarkan absensi, perilaku disiplin, dan tingkat produktivitas. Adapun pemberian yang diberikan oleh PJB kepada karyawan yang produktif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu dalam bentuk hadiah atau sertifikat.

In order to motivate employees and increase employee productivity, PJB provides awards for productive employees. This award is presented based on daily presence, disciplined behavior, and level of productivity. Meanwhile, the presents from PJB to productive employees are based on predetermined criteria, namely in the form of gifts or certificates.

Pemberian Kesejahteraan
Welfare Support

Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja agar semakin tertantang untuk berprestasi dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Perusahaan serta untuk menarik calon karyawan potensial, dan mempertahankan karyawan kompeten sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, PJB menerapkan sistem remunerasi yang setara dan kompetitif dengan industri sejenis. Remunerasi yang diberikan kepada karyawan PJB dibagi menjadi 2 yaitu penghargaan ekstrinsik (kompensasi dan manfaat karyawan) dan penghargaan instrinsik (program ataupun fasilitas lainnya) diantaranya:

In order to boost performance motivation so that they become more challenged to compete, present the best contribution, attract potential employees, and retain competent employees while increasing employee welfare; PJB implements a remuneration system that is equal and competitive with similar industries. Remuneration granted to PJB employees is divided into 2 types: extrinsic rewards (employee compensation and benefits) and intrinsic rewards (other programs or facilities) including:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

- Kompensasi Tetap *Pay for Person*
- Kompensasi tidak tetap
  - Kompensasi Jangka Pendek terdiri atas
    a) *Pay for Position*
    b) *Pay for Performance*
    c) Insentif Kinerja/Bonus
    d) THR
    e) Tunjangan Cuti Tahunan
  - Kompensasi Jangka Panjang terdiri atas
    a) Tunjangan Cuti Besar
    b) Penghargaan Kesetiaan Kerja (winduan)
    c) Bantuan Ganti Rugi/Peristiwa Luar Biasa
    d) Jaminan Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    e) Penghargaan Pensiun
- Manfaat Karyawan
- Penghargaan Intrinsik

Setiap tahun PJB melaksanakan penyesuaian remunerasi. Gaji seluruh karyawan baik wanita maupun laki-laki telah sesuai dengan ketentuan pemberian upah yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, PJB juga memberikan insentif atau bonus berdasarkan kinerja karyawan serta tunjangan cuti tahunan maupun cuti besar dan penghargaan kesetiaan kerja (winduan) sebagai bentuk apresiasi sehingga karyawan dapat senantiasa meningkatkan produktivitas dan loyalitasnya. PJB juga menyediakan Bantuan Ganti Rugi yaitu bantuan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan yang mengalami musibah akibat peristiwa luar biasa atau karena kecelakaan kerja.

- Fixed Compensation Pay for Person
- Compensation is not fixed
  - Short Term Compensation consists of
    a) Pay for Position
    b) Pay for Performance
    c) Performance Incentives/Bonus
    d) Religious Allowance
    e) Annual Leave Allowance
  - Long-Term Compensation consists of
    a) Mass Leave Allowance
    b) Work Loyalty Award (per 8 years)
    c) Compensation Assistance/Extraordinary Events
    d) Social Security, Work Accident Insurance, and Life Insurance
    e) Retirement Award
- Employee Benefits
- Intrinsic Rewards

Annually, PJB carries out remuneration adjustments. The salaries of all employees, both male, and female, are adjusted based on the provisions of wages set by the Government. In addition, PJB also provides incentives or bonuses based on employee performance as well as annual leave allowances and long leave and work loyalty awards (per 8 years) as a form of appreciation so that employees can continuously improve their productivity and loyalty. PJB also provides Compensation Assistance, the assistance provided by the Company to employees who experience an accident due to an extraordinary event or work accident.

Program Pensiun
Retirement Program

Karyawan yang mencapai batas usia pensiun yaitu 56 tahun mendapatkan manfaat pensiun dari PJB. Beberapa program jaminan sosial dan hari tua yang diterapkan oleh PJB antara lain:

- **Program Pensiun Manfaat Pasti**
  Program ini diselenggarakan untuk karyawan yang diangkat sebelum tahun 2012 yang memasuki masa pensiun. Dana Pensiun PLN (Persero) atau DP-PLN menjadi pengelola program ini. Pendanaan DP-PLN berasal dari iuran Peserta sebesar 6% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan iuran Pemberi Kerja (Perusahaan) sebesar 17,77% dari PhDP. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor 0049.K/DIR/2022 tanggal 8 Februari 2022.

Employees who reach the retirement age of 56 years receive pension benefits from PJB. Several social security and old age programs implemented by PJB include:

- **Defined Benefit Pension Program**
  This program is held for employees who were appointed before 2012 and are approaching retirement age. The PLN (Persero) Pension Fund or DP-PLN is the manager of this program. DP-PLN funding comes from Participant contributions of 6% from Basic Pension Income (PhDP) and Employer (Company) contributions of 17.77% from PhDP. This is in line with the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) as the Founder of the Pension Fund of PT PLN (Persero) Number 0049.K/DIR/2022 on February 8, 2022.

- **Program Pensiun Iuran Pasti**
  Program ini diselenggarakan bagi karyawan yang diangkat mulai tahun 2012 ke atas yang memasuki masa pensiun sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 074.K/010/DIR/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Peraturan Dana Pensiun melalui Program Pensiun Iuran Pasti (PDP – PPIP). Iuran Pasti dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dengan iuran Peserta sebesar 6% x Pay for Person (P1) dan iuran Pemberi Kerja sebesar 4% x P1. DPLK yang ditunjuk untuk mengelola program pensiun ini yaitu DPLK – BNI, DPLK – BRI, DPLK – Jiwasraya, dan DPLK – AIA.

- **Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan**
  PJB telah mengikutsertakan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Sertifikat Kepesertaan Nomor: 1500000007781 tanggal 10 Februari 2015, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Iuran program jaminan hari tua dihitung sebesar 5,7% dari upah dengan komposisi terdiri atas 2% iuran pekerja dan 3,7% iuran pemberi kerja (Perusahaan). Sedangkan, iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja (Perusahaan) dan 1% iuran pekerja. Selain itu, untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dihitung sebesar 1,27% dari upah dengan ditanggung oleh perusahaan, sedangkan Jaminan Kematian dihitung sebesar 0,3% dari upah dengan ditanggung oleh Perusahaan.

- **Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pensiunan**
  Pensiunan dan keluarganya mendapatkan bantuan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 039.K/010/ DIR/2017 tentang Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Karyawan Yang Telah Berhenti Bekerja (Pensiunan) di PJB.

- **Defined Contribution Pension Program**
  This program is held for employees who are appointed from 2012 to date and are approaching retirement age as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 074.K/010/DIR/2013 on September 18, 2013, concerning Pension Fund Regulations through the Defined Contribution Pension Program (PDP – PPIP). The Defined Contribution is managed by the Financial Institution Pension Fund (DPLK), with a Participant contribution of 6% x Pay for Person (P1) and an Employer contribution of 4% x P1. The DPLK appointed to manage this pension program is DPLK – BNI, DPLK – BRI, DPLK – Jiwasraya, and DPLK – AIA.

- **Old Age Security and Pension Guarantee by BPJS *Ketenagakerjaan***
  PJB has enrolled its employees in BPJS Ketenagakerjaan as stated in the Certificate of Participation Number: 1500000007781 on February 10, 2015, which includes Work Accident Insurance (JKK), Life Insurance (JKM), and Old Age Security (JHT). Contributions for the old-age insurance program are calculated at 5.7% of wages with a composition consisting of 2% employee contributions and 3.7% employer (company) contributions. Meanwhile, the contribution to the pension insurance program is calculated at 3%, which consists of 2% employer (Company) contributions and 1% employee contributions. In addition, Work Accident Insurance (JKK) is calculated at 1.27% of wages to be borne by the company, while Life Insurance is calculated at 0.3% of wages paid by the company.

- **Health Care for Retirees**
  Retirees and their families receive health care assistance based on the Decree of the Board of Directors Number 039.K/010/DIR/2017 concerning Health Care Assistance for Retired Employees (Retirees) at PJB.

Bidang Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja dan Keamanan
Occupational Health, Safety, and Security

Pengembangan penerapan K3 dalam Perusahaan adalah sebuah kewajiban. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasi risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja, memberikan hak keselamatan terhadap tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan, dan melahirkan deretan tenaga kerja yang sehat serta produktif.

The development of OHS practices is the Company's commitment. This aims to minimize the risk of occupational accidents, provide the right to occupational safety, and build healthy and productive employees.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Program Pemeriksaan Kesehatan Berkala
Periodic Health Checkup Program

PJB menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala bagi seluruh karyawan. Kegiatan ini mencakup penyediaan fasilitas P3K, penyediaan fasilitas tanggap darurat kecelakaan dan pelaksanaan *medical check up* berkala untuk seluruh karyawan. Implementasi program ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas karyawan

PJB provides periodic health check facilities for all employees. These activities include providing first aid facilities, providing accident emergency response facilities, and conducting periodic medical check-ups for all employees. The implementation of this program is also an effort to increase employee productivity

Program Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat
Emergency Preparedness and Response Program

PJB melaksanakan program kesiagaan dan penanggulangan keadaan darurat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja antara lain penguatan organisasi tanggap darurat, pemenuhan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat pelaksanaan simulasi dan lomba tanggap darurat dan peringatan Bulan K3 PJB. Implementasi program ini telah berhasil meningkatkan kesiapan personil di Unit PJB untuk menghadapi keadaan darurat yang terjadi.

PJB implements emergency preparedness and response programs to prevent occupational accidents, including strengthening emergency response organizations, supplying emergency response equipment and supplies, implementing simulations and emergency response competitions, and commemorating PJB's OHS Month. The implementation of this program has succeeded in increasing the readiness of personnel in the PJB Unit to deal with emergencies that occur.

Program Peningkatan K3 di Tempat Kerja
Occupational Health and Safety Improvement Program

PJB melaksanakan program pemantauan lingkungan kerja melalui kegiatan pengukuran faktor fisika, kimia, biologi, ergonomik dan psikologi di lingkungan kerja sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Implementasi program ini dapat meningkatkan kinerja personil dalam melaksanakan pekerjaan.

PJB carries out a work environment monitoring program by measuring physical, chemical, biological, ergonomic, and psychological factors in the work environment following the Ministry of Manpower Regulation No. 5 of 2018 concerning Occupational Health and Safety in the operational environment. This program's implementation can improve the performance of employees in their daily operations.

Selain itu, PJB juga menerapkan beberapa program terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:

1) Pelatihan K3
   PJB melaksanakan pelatihan K3 yang diikuti oleh karyawan organik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pekerja di bidang operasional terkait K3 serta meningkatkan kewaspadaan pekerja terhadap penerapan K3 di lingkungan PJB. Pelatihan K3 tersebut meliputi pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan P3K, sertifikasi personil AK3 umum, sertifikasi AK3 Spesialis, sertifikasi operator angkat-angkut dan alat berat.

In addition, PJB also implements several programs related to Occupational Health and Safety, including:

1) OHS training
   PJB conducts OHS training which is attended by organic employees. This program aims to increase the knowledge and competence of workers in the operational field related to OHS and increase workers' awareness of the implementation of OHS in the PJB environment. The OHS training includes fire fighting training, first aid training, General OHS Expert Certification, Specified OHS Expert certification, lifting and transporting operator certification, and heavy equipment.

2) *Awareness* K3
PJB melaksanakan *awareness* K3 yang diikuti oleh seluruh karyawan organik dan *stakeholder* PJB. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja di bidang operasional terkait K3 serta meningkatkan kewaspadaan pekerja terhadap penerapan K3 di lingkungan PJB. Pelatihan K3 tersebut meliputi *on site training* implementasi budaya K3, s*afety induction, safety briefing, safety meeting, toolbox meeting.*
3) *Coaching, Mentoring, Counseling* (CMC) kepada K3 Unit
PJB melaksanakan proses CMC kepada K3 Unit dalam penerapan K3 di Unit, dengan melakukan Sosialisasi Kontrak Kinerja maturity level K3 terbaru kepada seluruh Unit PJB, Penguatan implementasi K3 dan 5S dalam kegiatan overhaul, Penyusunan dan sosialisasi *safety golden rules*, Pelaksanaan *workshop* NFPA 850, 654 sebagai tindak lanjut pencegahan kebakaran, Pelaksanaan Audit Internal SMK3 dan pendampingan resertifikasi SMK3 Unit.

2) OHS Awareness
PJB conducts OHS awareness which is attended by all organic employees and PJB stakeholders. This program aims to increase the knowledge of workers in the operational field related to OHS and increase workers' awareness of the implementation of OHS in PJB's environment. The OHS training includes on-site training on the implementation of OHS culture, safety induction, safety briefing, safety meeting, and toolbox meeting.
3) Coaching, Mentoring, Counseling (CMC) to OHS Unit
PJB carries out the CMC process to OHS Units in applying OHS in the Unit, by campaigning the latest OHS maturity level Performance Contract to all PJB Units, Strengthening OHS and 5S implementation in overhaul activities, Preparation and socialization of safety golden rules, Implementation of NFPA 850, 654 workshops as a follow-up to fire prevention, Implementation of OHSMS Internal Audits and assistance for recertification of OHSMS Units.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor
Implementation of Contractor Work Safety Management System

PJB mendorong penerapan K3 tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga rekanan/mitra kerja yang bekerja di lingkungan Perusahaan. Sistem manajemen keselamatan kerja kontraktor atau *Contractor Safety Management System* (CSMS) diterapkan oleh PJB secara ketat bagi para rekanan/mitra kerja untuk menjamin aspek K3 dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Perusahaan. Rekanan/mitra kerja yang mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan PJB atau Anak Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dan prakualifikasi CSMS secara online. Implementasi CSMS secara *full cycle* dapat diakses di https://csms. ptpjb.com/. Penerapan CSMS menjadi salah satu wujud sinergi antara PJB dengan *stakeholder* dalam mewujudkan budaya K3 secara menyeluruh agar nihil kecelakaan pada rekanan juga dapat tercapai.

PJB encourages the implementation of OHS which is not only intended for employees, but also for partners/partners who work within the Company. The Contractor Safety Management System (CSMS) is implemented by PJB strictly for partners/work partners to ensure OHS aspects in the implementation of work within the Company. Partners/partners who participate in job auctions within PJB or Subsidiaries are required to register and pre-qualify CSMS online. The full cycle implementation of CSMS can be accessed at https://csms.ptpjb.com/. The implementation of CSMS is a form of synergy between PJB and stakeholders in realizing OHS Culture to achieve zero accidents for partners.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja
Gender Equality and Fair Job Opportunities

PJB berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi yakni dengan melakukan pengelolaan karyawan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang khususnya karyawan PJB terkait rekrutmen, program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, sampai dengan pemberian remunerasi dan kesejahteraan kepada karyawan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, dan faktor keberagaman lainnya.

PJB seeks to apply the principles of equality and anti-discrimination, namely by managing employees without discriminating against gender, education, and background. The company provides equal opportunities for everyone, especially PJB employees regarding recruitment, competency development programs, performance assessments, and career development to provide remuneration and welfare to employees regardless of gender, religion, and other diversity factors.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Selama tahun 2021, tidak terdapat laporan mengenai insiden diskriminasi terkait ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, asal usul sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang terkait Perusahaan.

In 2021, there were no reports of acts of discrimination related to race, color, gender, religion, political opinion, social origin, and all other forms of discrimination involving internal and external stakeholders of the Company.

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal
Local Labor

Perusahaan senantiasa melakukan proses rekrutmen yang mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional.

The Company always conducts a recruitment process that prioritizes the principles of openness, fairness, and competence possessed by candidates by considering the availability of local/national workers.

Digitalisasi Proses Bisnis K3
Digitizing OHS Business Processes

Pada Tahun 2021 PJB melakukan digitalisasi proses bisnis K3 untuk mengoptimalkan fungsi *monitoring* dan evaluasi K3 melalui program:
- Sosialisasi dan *set-up* implementasi IZAT 2.0 fitur inspeksi perangkat;
- Pengembangan *dashboard monitoring* performa kinerja K3;
- Pembahasan konsep pengembangan materi *game base learning* K3;
- Pengembangan aplikasi WPO *Plus* yang berisi modul *working permit, safety permit, safety induction* dan *security sistem.*
- Pengembangan lanjutan aplikasi CSMS PT PJB.

In 2021, PJB digitized OHS business processes to optimize the OHS monitoring and evaluation function through the following programs:
- Socialization and set-up of IZAT 2.0 implementation of device inspection features;
- Development of an OHS performance monitoring dashboard;
- Discussion of the concept of developing OHS game-based learning materials;
- Development of the WPO Plus application which contains modules for working permits, safety permits, safety induction, and security systems.
- Further development of PT PJB's CSMS application.

Turnover Pekerja
Employee Turnover

Karyawan yang keluar *(turn over)* merupakan hal yang lumrah atau jamak terjadi pada setiap Perusahaan, termasuk PJB. Pada pada 2021, jumlah *turn over* tercatat sebesar 65 orang atau 2,12% dari total karyawan sebanyak 3.071 orang, menurun dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 86 orang atau 2,75% dari total karyawan sebanyak 3.123 orang. *Turn over* karyawan terjadi karena sejumlah penyebab, yakni pensiun, berakhir masa kerja dan sebab-sebab lain.

Employee turnover is a common event in every company, including PJB. In 2021, the number of turnovers was recorded at 65 employees or 2.12% of the total 3,071 employees, a decrease compared to 2020 which was 86 employees or 2.75% of the total 3,123 employees. Employee turnover occurs due to retirement, end of term, and others.

Turn Over Karyawan 2020-2021
Employee Turn Over 2020-2021

No	Penyebab *Justification*	Jumlah Total	
		2020	2021
1	Pensiun Pension	63	52
2	Meninggal Dunia Passed Away	11	9
3	Diberhentikan Dismissed	0	0
4	Mengundurkan Diri Resigned	12	4

Tingkat Kecelakaan Kerja
Occupational Accident Rate

Komitmen PJB dalam menerapkan budaya K3 mampu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di lingkungan PJB. Selama tahun 2021 nihil *lost time injuries* diseluruh Unit PT PJB dengan pencapaian jam kerja aman selama tahun 2021 sejumlah 29.409.682 Jam dan penurunan *accident frequency rate* menjadi 0,03 dari 0,24 pada tahun 2020. Selain itu, tidak terdapat kejadian tertentu yang menyebabkan penyakitakibat kerja di seluruh unit PJB.

PJB's commitment to implementing an OHS culture can prevent occupational accidents and diseases in PJB's environment. In 2021, there were zero Lost Time Injuries in all PT PJB units with the achievement of safe man-hours in 2021 of 29,409,682 hours and a decrease in the accident frequency rate to 0.03 from 0.24 in 2020. Additionally, there were no certain events that caused occupational diseases in all PJB units.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan
Complaint Submission Mechanism on Employment Issue

Tentunya, pengaduan ataupun masukan terkait ketenagakerjaan dari masyarakat luas dan pelanggan dapat membantu PJB dalam mengembangkan kapasitas SDM. Oleh karena itu, PJB telah menyediakan saluran pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan. Mekanisme pengaduan bagi karyawan yang diterapkan di lingkungan PJB sebagai berikut:

Complaints or input on employment issues from the wider community and customers can certainly assist PJB in developing its HR capacity. Therefore, PJB has provided a complaint channel related to employment issues. The complaint mechanism for PJB's employees is as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Tata Cara Tingkatan Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Complaints and Reports Mechanism			
Keluhan dan Pengaduan Karyawan dibicarakan dan diselesaikan dengan Atasannya Langsung Employee Complaints and Reports are discussed and resolved with their Direct Supervisor	Bila penyelesaian tingkat pertama belum mencapai hasil yang memuaskan, maka dengan sepengetahuan Atasannya langsung, Karyawan dapat meneruskan keluhan dan pengaduannya kepada Atasannya yang lebih tinggi. If the settlement of the first level has not achieved a satisfactory result, it is then immediately forwarded to the supervisor, employees can forward the complaint and report to a higher person in charge.	Bila penyelesaian tingkat kedua tersebut telah dijalankan tanpa hasil yang memuaskan, maka Pekerja dapat meneruskan keluhan dan pengaduannya kepada Serikat Pekerja. Dalam tingkatan ini keluhan dan pengaduan Pekerja tersebut akan diselesaikan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja dalam Lembaga Bipartit. When the settlement of the second level has been carried out without satisfactory results, it will be forwarded to the Labor Union. At this level, it will proceed with the presence of the Employer and the Labor Union through the Bipartite Institution.	Untuk memudahkan pelaksanaan dari ketentuan dalam pasal ini maka dibuat Berita Acara Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Karyawan. To facilitate implementation of provisions in this article, a Minutes of Settlement is made for Complaints and Reports.

Selama tahun 2021 PJB tidak menerima pengaduan dari karyawan mengenai masalah ketenagakerjaan. Kondisi ini mencerminkan kepuasan karyawan terhadap penerapan pengelolaan SDM di PJB.

In 2021, PJB did not receive any complaints from employees regarding employment issues. This condition reflects employee satisfaction with the implementation of HC management at PJB.

Tingkat Keterikatan dan Kepuasan Karyawan
Employee Engagement and Satisfaction Index

Aspek yang berperan penting dalam pencapaian kinerja karyawan diantaranya keterikatan dan kepuasan karyawan. PJB melaksanakan PJB *Group Workforce Engagement Survey* (WES) setiap tahun sebagai salah satu media untuk menilai efektivitas program pengelolaan SDM dari sudut pandang karyawan. Aspek-aspek yang mempengaruhi keterikatan dan kepuasan karyawan PJB yang diukur dalam survei tersebut diantaranya:

1) *Brand Reputation and Culture*
2) *Career Management*
3) *Compensation & Benefits*
4) *Employee Value Proposition*

One of the aspects that play an important role in achieving employee performance is employee engagement and satisfaction. PJB conducts the PJB Group Workforce Engagement Survey (WES) every year as a medium to assess the effectiveness of HR management programs from the employee's point of view. Aspects that affect the engagement and satisfaction of PJB employees as measured in the survey include:

1) Brand Reputation and Culture
2) Career Management
3) Compensation & Benefits
4) Employee Value Proposition

5) Leadership
6) Learning & Development
7) Performance Management
8) Reward & Recognition
9) Teamwork
10) Working Environment & Infrastructure

Hasil *Survei Engagement Satisfaction Workforce* PJB tahun 2021 yaitu *Engagement Index* sebesar 83,69 dan *Satisfaction Index* sebesar 79.7

5) Leadership
6) Learning & Development
7) Performance Management
8) Reward & Recognition
9) Teamwork
10) Working Environment & Infrastructure

The results of the 2021 PJB Workforce Engagement Survey show that the Engagement Index is 83.69 and the Satisfaction Index is 79.7

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Awards and Certifications in the Scope of Occupational Health and Safety

Penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh PJB terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja selama tahun 2021 adalah:

Awards and certifications that have been achieved by PJB related to Occupational Health and Safety in 2021 are as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

1. Juara 1 Implementasi Budaya Terbaik Kategori Anak Perusahaan (*Culture Festival* PLN Group 2021)
2. Juara 3 Ranger Budaya Terbaik Kategori Anak Perusahaan (*Culture Festival* PLN Group 2021)
3. PJBAc mendapatkan pengakuan internasional berupa *International Certificate* dari PEARSON UK.
4. PJBAc mendapatkan sertifikasi *Educational Organizations Management System* - ISO 21001:2018
5. PJB berhasil memperoleh ISO 10667-1:2020 dan ISO 10667-2:2020 yang merupakan asesmen dalam pelaksanaan *Procedures and Methods to Assess People* dalam bekerja pada suatu institusi.
6. Piagam Penghargaan sebagai Badan Usaha yang telah berpartisipasi dalam Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
7. Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Renta (GN Lingkaran), melalui pemberian perlindungan terhadap 1000 Relawan COVID-19 di Kota Surabaya
8. Apresiasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara terkait keberhasilan UP Muara Karang dalam memproduksi oksigen medis bagi kebutuhan masyarakat di wilayah Jakarta Utara
9. Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 7 Tahun Beruntun untuk UP Paiton (17 Juta Jam Kerja Nihil Kecelakaan)
10. Penghargaan Subroto Award Bidang K2 Tahun 2021 dari Kementerian ESDM RI
11. Penghargaan Kecelakaan Nihil Tahun 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI
12. Penghargaan SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan kategori pencapaian memuaskan atau Bendera Emas
13. Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Covid di Tempat Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan RI

1. 1st Place for the Best Culture Implementation in the Subsidiary Category (Culture Festival by PLN Group 2021)
2. 3rd Place Best Cultural Ranger in the Subsidiary Category (Culture Festival by PLN Group 2021)
3. PJBAc received international recognition in the form of an International Certificate from PEARSON UK.
4. PJBAc received Educational Organizations Management System certification - ISO 21001:2018
5. PJB has succeeded in obtaining ISO 10667-1:2020 and ISO 10667-2:2020 which are assessments in the implementation of Procedures and Methods to Assess People in working at an institution.
6. Certificate of Appreciation as a Business Entity that has participated in the National Movement for the Program of Protection of BPJS Ketenagakerjaan for Vulnerable Workers in East Java Province in 2021.
7. BPJS Ketenagakerjaan Award in the National Movement to Care for the Protection of Elderly Workers (GN Circle), through the provision of protection for 1000 COVID-19 Volunteers in Surabaya
8. Appreciation from the North Jakarta Government for the success of Muara Karang GU in producing medical oxygen for the needs of the people in the North Jakarta
9. Award for Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) for 7 consecutive years performed by Paiton GU (17 Million Safe Man Hours, Zero Accident)
10. Subroto Award for K2 Sector 2021 from the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia
11. 2021 Zero Accident Award from the Indonesian Ministry of Manpower
12. OHSMS Award from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia in the category of satisfactory achievement or the Gold Flag
13. Covid-19 Prevention and Control in the Workplace Award from the Indonesian Ministry of Manpower

PROGRAM CSR PJB TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA RENTAN KEMBALI RAIH PENGHARGAAN DARI DISNAKER
BERKARYA DENGAN AKHLAK
PJBers Terus Maju Menjadi Nomor Satu!
KONSISTEN TERAPKAN AKHLAK, PJB DINOBATKAN SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN PLN TERBAIK
CULTURE FESTIVAL
Kontribusi PJB Dalam Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan
BPJS APRESIASI KEPEDULIAN PJB TERHADAP 1000 TENAGA RELAWAN
Bantuan Kesehatan untuk Optimalkan Kinerja Tenaga Kesehatan
PJB PENUHI KEBUTUHAN OKSIGEN MEDIS DI JAKARTA
KAPASITAS PRODUKSI OKSIGEN PLTGU MUARA KARANG
17 JUTA JAM KERJA NIHIL KECELAKAAN, PT PJB SABET PENGHARGAAN SMK3
PLTU Paiton 1 dan 2
PLTU Tenayan
PLTU Belitung
PLTU Tidore
PLTGU Gresik
PLTA Cirata
PLTA Sutami
PLTA Tulungagung

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYEE, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Biaya yang Dikeluarkan terkait Kegiatan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Budget Cost for Occupational Health and Safety (OHS) Activities

Dana yang dianggarkan oleh Perusahaan untuk kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap Ketenagakerjaan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.790 Miliar meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 1.683 Miliar. Biaya yang dikeluarkan meliputi gaji dan tunjangan; bonus dan insentif karyawan; imbalan kerja; pendidikan dan pelatihan; tunjangan kesehatan; serta biaya kepegawaian lainnya.

The funds budgeted by the Company for activities related to responsibility for Manpower in 2021 are Rp. 1,790 billion, an increase compared to 2020 of Rp. 1,683 Billion. Costs incurred include salaries and allowances; employee bonuses and incentives; employee benefits; education and training; health benefits; and other staffing costs.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CUSTOMERS

Komitmen dan Kebijakan Terhadap Pelanggan
Commitment and Policies on Customers

Perusahaan memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan tanggung jawab kepada Pelanggan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dalam setiap proses pembuatan keputusan, dampak pada Pelanggan akibat operasional perusahaan merupakan isu penting yang harus dipertimbangkan, baik dampak bagi lingkungan sekitar, *stakeholder*, maupun perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa kepuasan Pelanggan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan usaha PJB. Dengan kepuasan maksimal yang diperoleh Pelanggan, maka mereka menjadi pelanggan setia atau loyal dalam waktu lama. Di era digital yang begitu kuat saat ini, kepuasan Pelanggan semakin menemukan nilai pentingnya.

PJB menerapkan sejumlah ketentuan dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan di antaranya:

- Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali tahun 2007 yang mencakup manajemen jaringan, operasi, perencanaan dan pelaksanaan operasi, *settlement*, dan pengukuran (*metering*);
- Aturan Transaksi Pembangkitan 2010 yang mengatur komunikasi transaksi jual-beli tenaga listrik, mengatur *ancillary services*;
- Prosedur Tetap Deklarasi Kondisi Pembangkit dan Indeks Kinerja Pembangkit tahun 2017, yang mengatur status kondisi pembangkit, tata cara komunikasi operasi, dan perhitungan kinerja pembangkit;
- Pedoman Operasi Baku Komunikasi Pengelolaan Tenaga Listrik tahun 2019.

Standar pelayanan berupa kesiapan operasi dan *energy* listrik serta jasa *Operation & Maintenance* (O&M) diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dan Kontrak Perjanjian Jasa O&M antara PJB dengan PT PLN (Persero) sebagai pelanggan tunggal. Faktor-faktor yang menjadi indikator tingkat kualitas layanan pun dijadikan target KPI Korporat setiap tahun, sehingga pencapaian indikator tersebut dipantau secara berkala oleh Manajemen PJB. Indikator tersebut antara lain *Equivalent Availability Factor* (EAF) sebagai indikator faktor kesiapan pembangkit untuk beroperasi, *Scheduled Outage Factor* (SOF) sebagai indikator ketepatan jadwal pemeliharaan dan Efisiensi *Thermal* Pembangkit.

The Company is highly committed to its responsibilities to customers by following company policies. In every decision-making process, the impact on customers due to the Company's operations is an important issue to consider, both the impact on the surrounding environment, stakeholders, and the Company. The Company believes that customer satisfaction is an important element for the sustainability of PJB's business. With optimal satisfaction for customers, they can become loyal customers with a long-term impact. In today's powerful digital era, customer satisfaction becomes more important.

PJB implements several provisions in providing the best service to customers, including:

- The 2007 Java-Madura-Bali Electric Power System Network Regulation covers network management, operation, planning, and implementation of operations, settlement, and metering;
- Generation Transaction Regulations 2010 which regulates the communication of buying and selling electricity transactions, regulating ancillary services;
- Fixed Procedures for Declaration on Power Plant Conditions and Power Plant Performance Index 2017, which regulates the status of generator conditions, procedures for operating communications, and calculation of generator performance;
- Electric Power Management Communication Standard Operating Guidelines for 2019.

Service standards in the form of operational readiness and electrical energy, as well as Operation & Maintenance (O&M) services, are regulated in the Electricity Sales and Purchase Agreement and the O&M Service Agreement Contract between PJB and PT PLN (Persero) as per the sole customer. The factors that become indicators of the level of service quality are also targeted by the Corporate KPI every year; therefore, the achievement of these indicators is monitored regularly by PJB Management. These indicators include the Equivalent Availability Factor (EAF) as an indicator of the plant's readiness to operate, the Scheduled Outage Factor (SOF) as an indicator of the accuracy of the maintenance schedule, and the Thermal Efficiency of the Power Plant.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CUSTOMERS

Rencana Kegiatan 2021
2021 Activity Plan

PJB berusaha untuk memenuhi ekspektasi Pelanggan dengan pelayanan optimal yang diberikan dengan pertimbangan dampak aktivitas bisnis Perusahaan terhadap Pelanggan baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa Program tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan yaitu pembuatan Survei Kepuasan Pelanggan terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan Perusahaan secara berkala. Perusahaan juga menyediakan wadah bagi Pelanggan yang memiliki *complain* atau keluhan terhadap ketidakpuasan pelayanan maupun harapan kebutuhan yang belum terpenuhi oleh Perusahaan melalui *Call Center*, Telepon, SMS, *Whatsapp*, *website*, *email*, media sosial, dll.

PJB strives to meet customer expectations with optimal services by considering the impact of the Company's business activities on customers, both directly and indirectly. Some of the Company's corporate social responsibility programs on customers are the Customer Satisfaction Surveys on the Company's products and services regularly. The Company also provides a forum for customers to report complaints concerning service dissatisfaction or unachieved expectations on the Company through Call Center, Telephone, SMS, Whatsapp, website, email, social media, etc.

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahan Terhadap Pelanggan
Realization of Corporate Social Responsibility Activities on Customers

Peningkatan Layanan Pelanggan
Customer Service Improvement

PJB memandang perlindungan Pelanggan merupakan suatu kewajiban, hal ini sejalan dengan setiap proses bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan selalu memperhatikan kesesuaian rangkaian prosedur Standar Pelayanan PJB, hal ini merupakan komitmen Perusahaan untuk terus meningkatkan mutu dan layanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan yaitu:

1. Memberikan kemudahan layanan bagi Pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan operasional bisnis Perusahaan di *Call Center*, *website*, dan media sosial Perusahaan;
2. Melakukan survei kepuasan Pelanggan;
3. Menangani keluhan serta pendapat Pelanggan untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan;
4. Mempercepat rangkaian proses bisnis dan pekerjaan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lancar dan optimal;
5. Memberi kepastian dalam penyelesaian klaim sehingga dapat meningkatkan kepuasan Pelanggan.

PJB sees Customer protection as an obligation, this is in line with every business process carried out by the Company always paying attention to the suitability of the PJB Service Standard procedure series; this is the Company's commitment to continuously improving quality and service as a form of the Company's social responsibility towards Customers. The steps taken by the Company to improve service to customers are:

1. Provide service facilities for Customers to obtain information related to the Company's products, services, and business operations at the Call Center, website, and the Company's social media;
2. Conduct customer satisfaction surveys;
3. Handle customer complaints and opinions to continuously improve processes and service quality;
4. Accelerate a series of business processes and other work to provide smooth and optimal services;
5. Provide certainty in the settlement of claims to increase customer satisfaction.

Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey

Pada tahun 2021 telah dilakukan survei untuk mengukur persepsi dan penerimaan Pelanggan terhadap layanan yang disediakan dan dilakukan oleh PJB. Survei tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang menjadi prioritas untuk dilakukannya perbaikan, selain itu untuk mengukur kepuasan Pelanggan, dan sebagai media untuk memperoleh saran dan masukan dari kebutuhan Pelanggan

In 2021, a survey was conducted to measure customer perceptions and acceptance of the services provided and carried out by PJB. The survey aims to identify priority areas for improvement, customer satisfaction measurement, and suggestion channels concerning customer needs.

Hasil Penilaian Pelanggan PJB
PJB Customer Assessment Results

Nilai Kepuasan, Ketidakpuasan dan Keterikatan Pelanggan PT PJB
PT PJB Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement Index

No	Jenis Nilai Category	Nilai (%) Value (%)		
		2019	2020	2021
A	Nilai Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Value	84.23	85.94	87.10
B	Nilai Ketidakpuasan Pelanggan Customer Dissatisfaction Rate	14.91	14.27	11.61
C	Nilai Keterikatan Pelanggan Customer Engagement Value	94.27	89.50	95.45

Pada Tahun 2021, nilai kepuasan pelanggan PJB mencapai 87.10 meningkat dari tahun 2020. PJB terus berupaya memperbaiki kualitas layanan yang diberikan agar senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan pelanggan.

In 2021, PJB's customer satisfaction index scored 87.10, an increase from 2020. PJB continues to strive to improve the quality of services provided so that it is always able to meet customer needs and expectations by prioritizing customer health and safety.

Akses Informasi Layanan dan Pengaduan Pelanggan
Access to Service Information and Customer Complaints

Guna mendukung jaminan kepuasan pelanggan, Perusahaan menyediakan fasilitas pusat informasi dan layanan pengaduan terkait keluhan pelanggan. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Simaco (*Sistem Management Complaint*) sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. SIMACO (*Sistem Management Complaint*) adalah saluran/jembatan komunikasi

To support the guarantee of customer satisfaction, the Company provides information center facilities and complaint services related to customer complaints. This is realized through the establishment of Simaco (Complaint Management System) as a form of the Company's commitment to providing the best service to service users. SIMACO (Complaint Management System) is a communication channel/bridge

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CUSTOMERS

antara pengguna jasa dengan Perusahaan yang akan memenuhi kebutuhan permintaan informasi terkait layanan Perusahaan (*inquiry*), saran, apresiasi, serta penanganan keluhan dari pengguna jasa (*complain handling*).

Tujuan pembentukan SIMACO (*Sistem Management Complaint*) secara terperinci adalah untuk:

a. Memenuhi permintaan informasi layanan yang akurat dan cepat bagi pengguna jasa, misalnya mengenai jadwal keberangkatan kapal, tarif, dll;
b. Menerima setiap saran dan apresiasi yang disampaikan oleh pengguna jasa dan melaporkannya kepada Divisi/Cabang terkait agar dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan pelayanan di masa mendatang;
c. Menerima dan menjawab keluhan dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Divisi/Cabang terkait untuk segera ditindaklanjuti;
d. Mencatat dan merekam permintaan informasi, saran, apresiasi, dan keluhan dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Manajemen Perusahaan sebagai proses evaluasi kinerja; dan
e. Meningkatkan kepercayaan pengguna jasa terhadap Perusahaan melalui penyediaan informasi yang lengkap dan akurat serta memberikan tanggapan cepat atas keluhan yang disampaikan.

Untuk meningkatkan jangkauan media SIMACO (*Sistem Management Complaint*) kepada pengguna jasa di seluruh Indonesia, Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa sarana berikut:

- 031-8283180 pesawat 417
- 031-8283192
- sdme@ptpjb.com
- Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60231
- https://maco.ptpjb.com/pages/UI.php

Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Divisi OSK. Pengaduan atau keluhan yang masuk akan dikelompokkan berdasarkan dimensi kepuasan pelanggan untuk setiap produk sebagaimana ditetapkan dalam PJB IMS IPM-06.2.3 Mengelola Keluhan Pelanggan. Mekanisme pengaduan pelanggan dan tindaklanjutnya diuraikan dalam skema berikut.

between service users and the Company that can fulfill the needs of information requests related to the Company's services (inquiry), suggestions, appreciation, and handling complaints from service users (complaint handling).

More detailed information on the purpose of establishing SIMACO (System Management Complaint) is as follows:

a. Fulfill requests for accurate and fast service information for service users, for example regarding ship departure schedules, fares, etc.;
b. Receive every suggestion and appreciation submitted by service users and report it to the relevant Division/Branch so that it can be used as a reference for service improvement in the future;
c. Receive and respond to complaints from service users and report them to the relevant Divisions/Branches for immediate follow-up;
d. Record and record requests for information, suggestions, appreciation, and complaints from service users and report them to Company Management as a performance evaluation process; and
e. Increase the trust of service users in the Company by providing complete and accurate information as well as providing quick responses to complaints submitted.

To increase the reach of SIMACO (Complaint Management System) media for users all over Indonesia, Customers can submit complaints through the following channels:

- Telephone: 031-8283180 plane 417
- Fax: 031-8283192
- Email: tbspe@ptpjb.com
- Mail: Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya, East Java, Indonesia, 60231
- Official Website: https://maco.ptpjb.com/pages/UI.php

All complaints will be followed up by the OSK Division. Incoming complaints or reports are then grouped based on customer satisfaction dimensions for each product as stipulated in PJB IMS IPM-06.2.3 Managing Customer Complaints. The customer complaint mechanism and its follow-up are described in the following scheme.

Mekanisme Pengaduan Pelanggan
Customer Complaint Mechanism

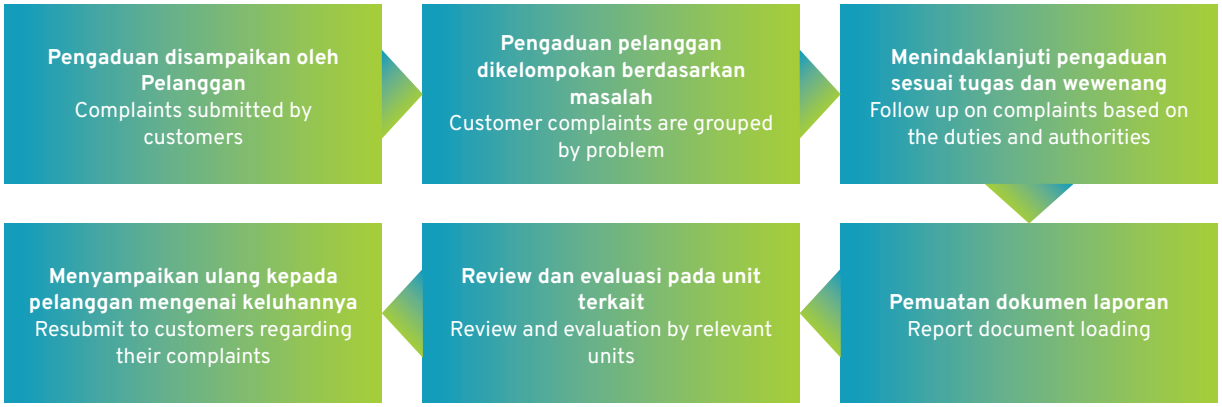

Sampai dengan tahun 2021 pengaduan yang diterima oleh PJB melalui aplikasi MACO berjumlah 123 laporan dan seluruh keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi PJB dalam melindungi hak pelanggan untuk didengar pendapat dan keluhannya sehingga layanan yang diperoleh dapat sesuai dengan kontrak perjanjian.

As of 2021, the complaints received by PJB through the MACO application are 123 reports and all customer complaints have been followed up. This shows PJB's high commitment to protecting the rights of customers to have their opinions and complaints heard so that the services obtained can be following the contract agreement.

Perlindungan Privasi Pelanggan
Customer Privacy Protection

PJB berkomitmen menjamin kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh pelanggan termasuk menjaga nama baik pelanggan sebagaimana yang diatur dalam *Code of Conduct.* Informasi berupa keluhan pelanggan yang disampaikan melalui SIMACO (*Sistem Management Complaint*) dikelola secara professional oleh PJB, sehingga hanya pihak terkait yang memiliki akses terhadap informasi tersebut guna menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan tersebut. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keluhan pelanggan diharapkan dapat menjaga kepercayaan pelanggan sehingga kualitas layanan PJB dapat terus dikembangkan.

PJB is committed to ensuring the confidentiality of information submitted by customers, including maintaining customers' identities as regulated in the Code of Conduct. Information in the form of customer complaints submitted through SIMACO (Complaint Management System) is managed professionally by PJB; therefore, there are only relevant parties that are granted to access the information to follow up and resolve the complaint. The use of technology in the management of customer complaints is expected to maintain customer trust so that the quality of PJB services can continue to be developed.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CUSTOMERS

Dampak atas Kegiatan Perusahaan terhadap Pelanggan
Impact of Company Activities on Customers

Secara garis besar kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PJB terkait pelanggan selama tahun 2021, menyebabkan timbulnya dampak positif bagi Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelanggan dapat melihat komitmen PJB dalam menindaklanjuti suara pelanggan yang didapat dalam hasil Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2021;
2. Meningkatkan sinergi dengan Pelanggan PJB;
3. Mempererat hubungan dan komunikasi dengan Pelanggan PJBP;
4. Adanya saran dan diskusi bersama untuk perbaikan kedepan;
5. Mengetahui Nilai Kepuasan, Ketidakpuasan, dan Keterikatan Pelanggan selama periode 2021;
6. Mendapat masukan (*feedback*) untuk perbaikan di tahun 2021;
7. Memecahkan masalah terkait keluhan pelanggan yang masuk;
8. Mendapat solusi dan kesepakatan bersama untuk perbaikan kedepan dalam hal hubungan pelanggan.

Principally, PJB's activities on customers of 2021 resulted in positive impacts for the Company, including the following:

1. Customers can see PJB's commitment to following up on customer voices obtained in the results of the 2021 Customer Satisfaction Survey;
2. Increased synergy with PJB Customers;
3. Maintained relationships and communication with PJB Customers;
4. Suggestions and joint discussions for future improvements;
5. Knowing the Value of Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement during the 2021 period;
6. Feedback for improvement in 2021;
7. Problems solving related to incoming customer complaints;
8. Solutions and mutual agreements for future improvements in customer relations.

Biaya Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggan
Budget Cost of Corporate Social Responsibility on Customers

Selama tahun 2021 PJB menganggarkan dana sebesar Rp 1,79 Miliar untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan yaitu untuk pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pelanggan PJB dan Anak Perusahaan, Forum Komunikasi Pelanggan, Diskusi Operasi dan Kunjungan Pelanggan.

In 2021, PJB budgeted Rp 1.79 billion for the implementation of corporate social responsibility on customers which is for the implementation of PJB and Subsidiaries' customer satisfaction survey activities, Customer Communication Forums, Operations Discussions, and Customer Visits.

Capaian dan Penghargaan yang Diperoleh
Achievements and Awards

Pada tahun 2021 PJB memperoleh capaian positif atas komitmennya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada Pelanggan yaitu menjaga kepuasan pelanggan serta menerapkan pengelolaan mutu secara konsisten berdasarkan ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen Mutu.

In 2021, PJB achieved positive performance for its commitment to implementing corporate social responsibility on customers, namely maintaining customer satisfaction and implementing quality management consistently based on ISO 9001:2015 regarding Quality Management System.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Komitmen dan Kebijakan

Commitments and Policies

PJB sebagai grup, bersama-sama Anak Perusahaan PJB dan PLN terus berkomitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Partisipasi dan kepercayaan masyarakat luas tentunya telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan serta perjalanan usaha Perusahaan. Berangkat dari pemahaman tersebut, PJB senantiasa berupaya memberikan timbal balik yang setimpal kepada masyarakat luas dan penduduk di sekitar wilayah operasional. Potensi risiko yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan operasional dikelola dan dimitigasi dengan cermat oleh seluruh unit PJB untuk melindungi hak masyarakat terkait aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Selain itu, PJB memperkuat kolaborasi bersama semua pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan energi yang lebih bersih di lingkungan operasional.

PJB as a group, together with PJB's Subsidiaries and PLN, continues to be committed to supporting sustainable development. The participation and trust of the wider community have certainly made a positive contribution to the growth and business journey of the Company. By this condition, PJB always strives to provide commensurate feedback to the wider community and residents around the operational area. The potential risks that may arise from operational activities are carefully managed and mitigated by all PJB units to protect community rights related to environmental, social, and economic aspects. Additionally, PJB strengthens collaboration with all stakeholders to support the development of cleaner energy in the operational environment.

Komitmen penerapan program tanggung jawab sosial pengembangan masyarakat didukung dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan yang matang. PJB menetapkan panduan penerapan program ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 065.K/010/CIR/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang mengacu pada sejumlah peraturan yang berlaku antara lain Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas yang tercantum pada pasal 74 terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Secara garis besar, tujuan pelaksanaan program-program Tanggung Jawab Sosial terkait Kemasyarakatan adalah untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan sosial, menggali sumber daya, membina dan mengupayakan perubahan perilaku serta pencapaian kesejahteraan, dan menjalin hubungan harmonis berkelanjutan dengan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang terintegrasi dan menyeluruh. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial terkait Kemasyarakatan terus ditingkatkan oleh Perusahaan dengan turut melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan.

The commitment to the corporate social responsibility program for community development is supported by prudent policy-making and planning. PJB set guidelines for the implementation of this program based on the Decree of the Board of Directors No. 065.K/010/CIR/2013 concerning Guidelines for the Implementation of Social Responsibility which refers to several applicable regulations, including Law no. 40 concerning Limited Liability Companies as stated in article 74 related to Social and Environmental Responsibility and Government Regulation no. 47 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility. Principally, the objectives of implementing Corporate Social Responsibility programs on Social Communities are to overcome and reduce social problems, explore resources, foster and strive for behavior change and the achievement of welfare, and establish sustainable harmonious relationships with the community. With an integrated and comprehensive implementation. The Company continues to improve the implementation of Corporate Social Responsibility programs on the Community by involving all stakeholders.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Informasi Tentang Isu-Isu Sosial yang Relevan dan Risiko terkait Kegiatan Sosial yang Dikelola Perusahaan

Information on Relevant Social Issues and Social Activity Risks

PJB menyadari risiko sosial yang timbul atau berkaitan dengan lingkungan sosial dimana perusahaan beroperasi. Aspek sosial budaya seperti tingkat kesejahteraan, latar belakang budaya dan pendidikan dapat menimbulkan risiko baik yang positif maupun negatif. Budaya masyarakat yang tidak peduli terhadap aspek keselamatan akan mempengaruhi keselamatan operasi perusahaan. Oleh karenanya peran PJB perlu dikelola dengan manajeman risiko. Risiko yang ditimbulkan oleh perusahaan dikelola dengan menggunakan kaidah yang ada dalam Manajemen PJB sehingga tidak menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun reputasi.

PJB is aware of the social risks that arise or are related to the social environment in which the company operates. Socio-cultural aspects such as welfare, culture, and education can pose both positive and negative risks. The culture of the people who are not aware of the safety aspect may affect the safety of the Company's operations. Therefore, the role of PJB is required to be managed with risk management. The risk posed by the company is managed by using the existing rules in PJB Management so that it does not cause losses both financially and reputationally.

Rencana Kegiatan 2021

2021 Activity Plan

Setiap tahun PJB menyusun rencana dan anggaran program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Rencana program tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi bagian dari RKAP Perusahaan tahun 2021. Program CSR dikembangkan guna mendukung rencana jangka panjang Perusahaan dalam menjaga kelangsungan bisnisnya, serta berkontribusi dalam pemenuhan sasaran pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Dalam implementasinya, CSR PT PJB mengedepankan kaidah *Good Corporate Governance* (GCG) yang dituangkan dalam roadmap CSR 2018-2022 guna mendukung pencapaian *"Most Trusted and Preferred Company"* yang tertuang pada peta strategi Perusahaan.

Annually, PJB prepares plans and budgets for corporate social responsibility programs on social and community development. The corporate social responsibility program plan has become part of the Company's 2021 ABOP. The CSR program was developed to support the Company's long-term plans in maintaining its business continuity, as well as contributing to the fulfillment of the Sustainable Development Goals (SDGs) that have been proclaimed by the Government. In its implementation, PJB CSR puts forward the principles of Good Corporate Governance (GCG) as outlined in the 2018-2022 CSR roadmap to support the achievement of "Most Trusted and Preferred Company" which is contained in the Company's strategy map.

Tipologi pelaksanaan CSR secara umum terdiri dari: *Empowerment* (Desa Wisata Binor Harmony, Kampung Setrum, Pijar Berdaya *Level Up*, Ekowisata Mangrove, Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan, Kerajinan Batik, dll), *Capacity Building* (Pengembangan akademi komunitas PJB dan PJB *Call*, PJB Mengajar, Komunitas *Safety* Indramayu, Perilaku Hidup Bersih & Sehat, serta Pengelolaan Sampah), Infrastruktur (Sarana Air Bersih dan Penghijauan Pesisir) serta *Charity*.

The typology of CSR implementation in general consists of Empowerment (Binor Harmony Tourism Village, Kampung Strum, Pijar Berdaya Level-Up, Mangrove Ecotourism, Empowerment of farmer and fisherman groups, Batik Crafts, and others), Capacity Building (Development of PJB community academy and PJB Call, PJB Teaching, Safety Community Indramayu, Clean & Healthy Lifestyle, and Waste Management), Infrastructure (Clean Water Facilities and Coastal Reforestation) and Charity.

Anggaran untuk pelaksanaan program tersebut pada tahun 2021 mencapai Rp42,10 miliar yang terdiri dari *Empowerment* Rp13,09 Miliar, *Capacity Building* Rp14,20 miliar, infrasturktur Rp6,6 Miliar, *Charity* Rp4,09 miliar dan KLBS Rp4,04 miliar. Anggaran CSR PJB tahun 2021 meningkat 10,7% atau Rp2,96 miliar dibanding tahun 2020.

The program budget in 2021 reached Rp42.10 billion, consisting of Rp13.09 billion for Empowerment, Rp14.20 billion for Capacity Building, Rp6.6 billion for infrastructure, Rp4.09 billion for Charity, and Rp4.04 billion for Extraordinary Events. PJB CSR Budget in 2021 increased by 10.7% or Rp. 2.96 billion compared to 2020.

Kegiatan dan Dampaknya
Activities and Impact

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilaksanakan pada 18 unit kerja yang meliputi Kantor Pusat, Muara Tawar, Muara Karang, UP Cirata, UP Gresik, Paiton, UP brantas, UBJOM Rembang, UBJOM Indramayu, UBJOM Pacitan, UBJOM Tanjung Awar-awar, UBJOM Palton 9, UBJOM Arun, UBJOM Kaltim Teluk, UBJOM Pulang Pisau, UBJOM tenayan, UJLI, dan Suppa. Program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diterapkan sesuai tipologi yang ditetapkan yaitu *Empowerment*, *Capacity Building*, Infrastruktur, *Charity* dan KLBS.

The implementation of social responsibility programs for social and community development is carried out in 18 work units which include Head Office, Muara Tawar, Muara Karang, Cirata GU, Gresik GU, Paiton, Brantas GU, Rembang OMSBU, UBJOM Indramayu, Pacitan OMSBU, Tanjung Awar-awar OMSBU, Paiton 9 OMSBU, Arun OMSBU, Kaltim Teluk OMSBU, Pulang Pisau OMSBU, Tenayan OMSBU, UJLI, and Suppa. Corporate social responsibility programs on social and community development are implemented based on the established typology, namely Empowerment, Capacity Building, Infrastructure, Charity, and Extraordinary Events.

Pelaksanaan CSR pada tahun 2021 dilaksanakan dengan baik dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 meskipun masih terdapat pembatasan terkait covid-19, namun program dapat terakselerasi dengan optimal dan perkembangan pemberdayaan menunjukan tren yang positif. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 beserta dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

The CSR activity in 2021 was held more properly than the previous year; in 2021, although there are still restrictions related to covid-19, the program can be accelerated optimally and the development of empowerment shows a positive trend. Some of the activities carried out in 2021 and their impacts are as follows:

Program Pijar Berdaya
Pijar Berdaya Program

Program Pijar berdaya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari beberapa sub program serta berfokus pada lingkungan dan kesehatan ibu dan anak. Program ini dilaksanakan di tiga yaitu Desa Kramatinggil, Desa Sidorukun dan Desa Pulopancikan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi nyata pada lingkungan yang lebih berkualitas yang terlebih mampu memberikan manfaat ekonomi masyarakat dari lingkungan sekitar. Selain itu tujuan program Pijar Berdaya yang berslogan “Pijarkan Kebaikan untuk Semua” yaitu untuk kebaikan kesehatan Ibu dan anak. Adapun beberapa pelaksanaan sub program dalam program Pijar Berdaya adalah :

Pijar Berdaya Program is a community empowerment program that covers several sub-programs and focuses on the environment and the health of women and children. This program is implemented in three villages: Kramatinggil Village, Sidorukun Village, and Pulopancikan Village, intended to create a real contribution to a higher quality environment that potentially provides economic benefits to the community from the surrounding environment. In addition, the goal of the Pijar Berdaya Program with the slogan “Spread Goodness for All *(Pijarkan Kebaikan Untuk Semua)*” is for the good of the health of women and children. The implementation of several sub-programs in Pijar Berdaya Program are:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Bank Sampah
Waste Bank

Program Pijar Berdaya di ring I ini dilaksanakan menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu diperuntukan untuk Desa Kramatinggil yang telah difouskan pada pembentukan *"Community Center"* dan dua desa lainnya yaitu Desa Pulopancikan dan Desa Sidorukun untuk pembentukan "Wilayah Perintis". *Community Center* adalah Program pengembangan potensi yang ada di wilayah kampung hijau produktif yang telah memiliki kemampuan aplikasi program terdahulu secara lebih menyeluruh di berbagai bidang/pilar. Terdapat tiga pilar utama untuk penguatan *Community Center* yaitu Pilar Lingkungan, Pilar Nutrisi, Pilar Sanitasi. Total bank sampah yang ada di tiga desa adalah 40 bank sampah dengan 303 kader lingkungan. Program Bank Sampah juga telah di replikasikan ke Kelurahan Ketintang. Sudah dilakukasn usaha dalam pengembangan unit usaha bank sampah, bekerjasama dengan BNI menjadikan unit usaha bank sampah sebagai *payment point* agen 46. Sudah ada 2 unit usaha yang berpartisipasi menjadi agen 46 yaitu bank sampah Bilkarnis dan bank sampah RT 07 RW 01 Desa Sidorukun.

Tujuan dari program ini adalah :
- Menciptakan lingkungan hidup yang hijau dan bersih dari program Pijar Berdaya di Desa Kramattinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Pulopancikan.
- Timbul kesadaran Masyarakat dalam memilah sampah.
- Masyarakat mampu memanfaatkan sampah menjadi prakarya yang bernilai ekonomi
- Mengembangkan unit usaha untuk bank sampah.
- Digitalisasi Bank Sampah.
- Bisa Melakukan Diseminasi ke Desa lain

The Powerful Incandescent Program in the ring was carried out in two parts. The first part is intended for Kramatinggil Village which has focused on the establishment of a "Community Center" and two other villages namely Pulopancikan Village and Sidorukun Village for the establishment of a Pioneer Area (Wilayah Perintis). Community Center is a potential development program in the productive green village area that already can apply to previous programs more thoroughly in various fields/pillars. There are three main pillars for strengthening the Community Center, namely the Environmental Pillar, the Nutrition Pillar, and the Sanitation Pillar. The total waste banks in the three villages are 40 waste banks with 303 environmental cadres. The Waste Bank Program has also been replicated in Ketintang Village. Efforts have been made in developing the waste bank business unit, in collaboration with BNI to make the waste bank business unit a payment point agent 46. There are already 2 business units that have participated to join as agent-46, namely the Bilkarnis Waste Bank and RT-07-RW-01 Sidorukun Village Waste Bank.

The aims of this program are:
- To create a green and clean living environment from the Powerful Incandescent program in Kramattinggil Village, Sidorukun Village, and Pulopancikan Village.
- To raise public awareness of sorting waste.
- To assist the community to reuse waste into crafts that have economic value
- To develop a business unit for a waste bank.
- To digitize Waste Banks.
- To conduct Dissemination to Other Villages

Bank Tanaman
Plant Bank

Setelah program bank sampah dinilai berhasil dan bisa diterapkan di desa-desa Ring I lainnya (desa perintis), PT PJB UP Gresik kembali membuat program untuk membantu meminimalisir permasalahan yang ada, diantaranya adalah sosial, pengembangan, dan lingkungan sehat, dengan membuat program debayur (desa banyak sayur). Program ini juga dilaksanakan di Desa Kramatinggil, perusahaan membagikan beberapa jenis bibit tanaman untuk penghijauan. Adapun jenis bibit tanaman yang diberikan yaitu, jeruk, mangga, sirsak,

After the success of the waste bank program which has been implemented in other Ring I villages (pioneer villages), PT PJB's Gresik GU made a program to help minimize existing problems, including social, development, and a healthy environment, by making a debayur program (village with lots of vegetables). This program is also implemented in Kramatinggil Village, the Company distributes several types of plant seeds for reforestation. The types of plant seeds given were citrus, mango, soursop, guava, passion fruit, star fruit, figs, olives,

jambu, markisa, belimbing, buah tin, buah zaitun, rosela, dan tanaman obat keluarga (TOGA). Tanaman tersebut dibagikan ke setiap RT dan diharapkan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis. Pada program penghijauan ini diharapkan setiap RT memiliki tanaman unggulan, untuk mencapai hal tersebut perusahaan memberikan tanaman khusus ke 3 RT sebagai RT percontohan yaitu, RT01, RT02, dan RT07. Dengan adanya RT percontohan ini diharapkan memotivasi RT lainnya untuk melakukan penghijauan. Program Bank sampah dan debayur terintegrasi dengan kampung hijau produktif yang merupakan integrasi program di Desa Kramatingil, yang kemudian PT PJB UP Gresik melakukan ekspansi program kampung hijau produktif menjadi Pijar Berdaya.

roselle, and family medicinal plants (TOGA). The plants are distributed to each RT and are expected to be processed into products of economic value. In this reforestation program, it is expected that each RT has superior plants; to achieve this, the Company provides special plants to 3 RTs as Pilot RTs: RT01, RT02, and RT07. With these Pilot RTs, it is expected that they can motivate other RTs to do reforestation. The Waste Bank and Debayur program is integrated with the productive green village which is an integration program in Kramatingil Village, which then PT PJB's Gresik GU expands the productive green village program into Pijar Berdaya.

Tujuan dari program ini adalah :

- Menciptakan lingkungan hidup yang hijau dan bersih dari program Pijar Berdaya di Desa Kramattinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Pulopancikan.
- Masyarakat mampu memanfaatkan hasil tanaman yang ada untuk memenuhi kebutuhan dari hasil tanaman.
- Terciptanya pasar produksi terkait pemasaran hasil olahan produk panen Bank Tanaman yang memberikan dampak ekonomi dari program Pijar Berdaya di Desa Kramattinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Pulopancikan.
- Menjadi Pusat Rumah pembibitan bagi segala jenis tanaman yang ada di Desa Kramattinggil, Desa Sidorukun, dan Desa Pulopancikan.
- Menciptakan *organic market center* sebagai wadah untuk memasarkan produk bank tanaman.
- Mengadakan kegiaan *cooking class* sebagai inovasi dalam mengelola produk unggulan yang dihasilkan.
- Digitalisasi Bank Tanaman.
- Penyelenggaraan *event* bank tanaman seru "batru".
- Bank tanaman membantu *café* jamu dalam penyediaan jamuku untuk negatifmu.
- Produk Bank Tanaman dijadikan sebagai minuman penambah imun setelah kegiatan vaksinasi.

The aims of this program are:

- To create a green and the clean living environment from Pijar Berdaya program in Kramattinggil Village, Sidorukun Village, and Pulopancikan Village.
- To assist the community to take advantage of existing plant products to meet the needs of crop products.
- To create a production market related to the marketing of processed products harvested by the Plant Bank has an economic impact on Pijar Berdaya program in Kramattinggil Village, Sidorukun Village, and Pulopancikan Village.
- To become a center for nursery houses for all types of plants in Kramattinggil Village, Sidorukun Village, and Pulopancikan Village.
- To create an organic market center as a place to market plant bank products.
- Holding cooking class activities as an innovation in managing the superior products produced.
- To digitize Plant Banks.
- To organize a "new" exciting plant bank event.
- To allow the plant bank in assisting the herbal medicine cafe in providing herbal medicine for your negativity.
- For Plant Bank products to be used as immune-boosting drinks after vaccination activities.

Polihatra dan *Café* Jamu

Polihatra and Café Jamu

Program Polihatra dan *Cafe* Jamu merupakan inovasi program dengan membuka poli kesehatan tradisional (Poli Hatra). Polihatra dapat menjadi alternatif pada saat pandemi untuk Masyarakat yang takut berobat ke rumah sakit atau dokter. Pada saat pelaksanaan vaksinasi *covid-19* banyak Masyarakat yang gagal vaksinasi akibat tidak lolos *screaning*, dikarenakan masalah

The Polihatra and Cafe Jamu programs are program innovations by opening a traditional health poly (Poli Hatra). Polihatra can be an alternative during a pandemic for people who are afraid to go to a hospital or doctor. During the Covid-19 vaccination scheme, some people failed to get vaccinated since they did not pass the screening, due to health problems, either low blood or

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

kesehatan baik darah rendah atau darah tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pada saat pelaksanaan vaksinasi *covid-19* di PT PJB UP Gresik, di dirikanlah posko kesehatan polihatra. Di posko kesehatan polihatra peserta vaksinasi yang tidak lolos *assessment* kesehatan diterapi dan diberikan jamu herbal, yang dapat membantu menaikan atau menurunkan tensi peserta, sehingga peserta dapat lolos *screaning* dan dapat mendapatkan vaksinasi *covid-19.* Tujuan program ini di tahun 2021 adalah membantu meningkatkan angka keberhasilan vaksinasi di kecamatan Gresik.

high blood pressure. With this background, during the COVID-19 vaccination at PT PJB's Gresik GU, the Polihatra Health Post was then established. At the polihatra health post, vaccination participants who did not pass the health assessment are treated and given herbal medicine, which can help raise or lower the participant's tension; therefore, those participants could pass screening and get the covid-19 vaccination. The aim of this program in 2021 is to help increase the success rate of vaccination in Gresik sub-district.

Daun *Suistanable Village*

Daun Suistanable Village

Daun *Sustainable Village* adalah program CSR dengan pendekatan pemberdayaan berkelanjutan yang berada di Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik Pulau Bawean. Program tersebut merupakan program pengembangan dari upaya merestorasi lahan-lahan yang terdampak abrasi melalui penanaman dan pelestarian mangrove. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga mangrove, mereka juga didorong untuk dapat mandiri dalam hal ekonomi, kesetaraan sosial, energi dan pengelolaan lingkungan.

Daun Sustainable Village is a CSR program with a sustainable empowerment approach located in Daun Village, Sangkapura District, Gresik Regency, Bawean Island. The program is a development program of efforts to restore land affected by abrasion through planting and preserving mangroves. Apart from increasing public awareness about the importance of protecting mangroves, they are also encouraged to be independent in terms of economy, social equality, energy, and environmental management.

Adapun kegiatan program selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

The program activities in 2021 are as follows:

Kegiatan di Rumah Kompos dan Diseminasi serta replikasi terkait program

Activities at the House of Compost and Dissemination and program-related replication

Kegiatan sosialisasi ketahanan masyarakat wisata semasa pandemi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat selama berkurangnya kegiatan di dalam Ekowisata Mangrove Hijau Daun. Hal yang paling utama dalam menjalankan kegiatan ekowisata adalah dari lini kebersihan, mulai dari pengurus ekowisata yang selalu menjaga dan melakukan pembersihan rutin dan tidak kalah pentingnya menjaga agar selama pandemi meskipun tidak ada kegiatan di dalam ekowisata namun tetap mematuhi protokol yang di sampaikan oleh pemerintah. Selain itu mencari solusi saat kegiatan di ekowisata tidak bisa semaksimal dulu, misalnya kelompok sedang mencba untuk membuat pupuk organik di rumah kompos.

Socialization activities for tourism community resilience during the pandemic to increase public awareness during reduced activities in Hijau Daun Mangrove Ecotourism. The most important matter in carrying out ecotourism activities is from the line of cleanliness, starting from ecotourism administrators who always maintain and carry out routine cleaning and it is no less important to keep during the pandemic even though there are no activities in ecotourism but still comply with the protocols conveyed by the government. In addition, looking for solutions when activities in ecotourism cannot be as optimal as they used to be, for example, a group is trying to make organic fertilizer in a compost house.

Program Tambak Udang Ramah Lingkungan
Eco-Friendly Shrimp Farm Program

Adanya pandemi *Covid-19* membuat kegiatan Ekowisata terhenti, maka dari itu Pokmaswas dan Perusahaan membuat kegiatan alternatif lain untuk menunjang ekonomi Masyarakat, yaitu program tambak udang, adapun jenis udang yang ada di tambak ini adalah Udang Vaname. Kegiatan ini dilakukan dengan memaksimalkan pengalihan fungsi lahan bekas abrasi seluas 4,85 Ha, sehingga dapat dikatakan sebagai tambak udang ramah lingkungan karena tidak perlu membuka lahan lagi.

An impact of the Covid-19 pandemic is the stopped activity of Ecotourism; therefore, Pokmaswas and the Company made other alternative activities to support the community's economy, namely the shrimp farm program, while the type of shrimp in this pond is Vaname Shrimp. This activity is carried out by optimizing the transfer of the function of the former abrasion area of 4.85 hectares to realize an eco-friendly shrimp farm since there is no need to clear more land.

Bank Sampah Putri Majeti (Replikasi Program Bank Sampah Pijar Berdaya)
Putri Majeti Waste Bank (Replication of Pijar Berdaya Waste Bank Program)

Desa Daun merupakan salah satu desa binaan CSR PT PJB UP Gresik melalui program Daun *Sustainable Village* yang bertujuan untuk menciptakan Desa Daun yang mandiri di bidang lingkungan, ekonomi dan sosial. Seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Desa Daun, menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sehingga menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bangunan Rumah Kompos yang sudah dibangun untuk mendukung Program Daun *Sustainble Village* di bidang lingkungan melalui pengelolaan sampah, belum dimanfaatkan secara maksimal.

Daun Village is one of the CSR villages fostered by PT PJB's Gresik GU through Daun Sustainable Village program which aims to make Daun Village independent in the environmental, economic, and social sectors. Along with population growth and changes in the consumption pattern of Daun Village, it causes an increase in the volume, types, and characteristics of increasingly diverse waste. This may harm public health and the surrounding environment. The Compost House which has been built to support the Daun Sustainable Village Program in the environmental field through waste management has not been utilized to its full potential.

Program Desa Wisata Lontar
Lontar Tourism Village Program

Desa wisata Lontar Sewu berada di Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Gresik. Desa Hendrosari memiliki pohon siwalan yang sangat banyak, dan ini merupakan potensi karena pohon siwalan merupakan varietas pohon langka dan manggar dari pohon siwalan dapat dijadikan produk legen. Dahulu Desa Hendrosari terkenal negatif, terkenal sebagai dea penghasil tuak yang bisa memabukan. Hal itu terjadi karena banyaknya legen yang dihasilkan dari pohon siwalan tidak sebanding dengan penjualan, karena pemasarannya yang kurang. Akhirnya dengan bantuan berupa *chiller*, dan oven yang dimaksudkan agar legen tersebut dapat diolah menjadi produk turunan agar dapat bertahan lama. Akirnya desa

Lontar Sewu Tourism Village is located in Hendrosari Village, Menganti District, Gresik. Hendrosari village has a lot of siwalan trees, and this is potential because the siwalan tree is a rare tree variety and the Manggar from the siwalan tree can be used as a Neera product. In the past, Hendrosari Village was known to be negative, known as a dea producing palm wine which can be a liquor. This happens since the number of Neera produced from the siwalan tree is not proportional to sales, due to lack of marketing. Finally, with the help of a chiller, and an oven, which is intended so that the legend can be processed into derivative products so that it can last longer. Finally, Hendrosari village has been known as a Neera-producing village in Gresik;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Hendrosari dikenal menjadi desa penghasil legen di Gresik, banyak masyarakat yang mencari legen datang ke desa ini, itu menjadikan desa Hendrosari berinisiatif untuk membuat ekowisata yang diberi nama ekowisata lontar sewu, sehingga orang yang datang berkunjung selain membeli legen mereka juga bisa berekreasi. Hal ini membuat pemasaran dari produk legen semakin baik. Desa Hendrosari juga mendapatkan dana dari kotaku yang diperuntukan untuk pembuatan TPS3R, namun pengelolaannya belum maksimal. Selama tahun 2021, kegiatan besar dari program ini adalah *Green House* Lontar Sewu Program desa wisata lontar terdiri dari empat pilar, salah satu pilarnya adalah Pilar Lingkungan. Untuk merealisasikan pilar lingkungan, maka dibangun *Green House* Lontar Sewu. Bangunan *Green House* dibangun di Dusun Hendrosalam. Hal ini dikarenakan Dusun Hendrosalam memiliki lahan kosong yang dapat digunakan untuk *Green House*. Karang Taruna Dusun Hendrosalam juga cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan, sehingga dapat turut mengelola *Green House*.

various communities who are looking for Neera come to this village, it makes Hendrosari village take the initiative to create ecotourism called lontar sewu ecotourism so that the people who come to visit besides buying Neera can also have recreation. This makes the marketing of Neera products better. Hendrosari Village also received funds from Kotaku which were intended for the construction of TPS3R, but the management was not optimal. In 2021, the major activity of this program is the Lontar Sewu Green House. The Lontar Sewu tourism village program consists of four pillars, one of which is the Environmental Pillar. To realize the environmental pillar, the Lontar Sewu Green House was built. The GreenHouse building was built in Hendrosalam Hamlet. This is because Hendrosalam Hamlet has vacant land that can be used for a Green House. Karang Taruna Dusun Hendrosalam is also quite active in youth activities; therefore, it can participate in managing the Green House.

Program Kampung Mang Jasri
Mang Jasri Village Program

Tumpukan sampah yang menggunung di wilayah pesisir Muara Angke menjadi permasalahan utama yang kemungkinan sudah tidak bisa lagi teratasi. Sampah tersebut berasal dari laut dan terus menumpuk hingga menjadi daratan dengan ketebalan mencapai 1,5 meter. Gunungan sampah tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem hutan mangrove, hilangnya habitat bagi satwa liar, limbahnya pun dapat menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. KOMMA sebagai komunitas lokal wilayah Muara Angke tidak ingin melihat lingkungannya semakin buruk. Maka dari itu, KOMMA bersama PT PJB UP Muara Karang berkomitmen untuk melestarikan kembali kawasan pesisir Muara Angke dengan melakukan rehabilitasi lahan yang penuh sampah menjadi kawasan hutan mangrove yang asri. Penanaman dilakukan dengan memanfaatkan daratan sampah sebagai lahan subur untuk menanam bibit mangrove. Dan ternyata hal tersebut berhasil menumbuhkan mangrove menjadi pohon besar. Kegiatan pengembangan yang telah dilakukan antara lain penanaman dan perawatan rutin, pembuatan tambak *silvofishery*, pengolahan produk olahan mangrove, serta produksi batik berbahan mangrove.

The piling-up waste in the coastal area of Muara Angke is a major problem that may no longer be resolved. The waste comes from the sea and continues to pile up and creates itself a land with a thickness of up to 1.5 meters. The mountain of waste causes damage to the mangrove forest ecosystem, and loss of habitat for wildlife, the waste can also be a source of disease for the surrounding community. KOMMA, as a local community in the Muara Angke area, takes a step to see the environment getting better. Therefore, KOMMA together with PT PJB Muara Karang GU is committed to preserving the coastal area of Muara Angke by rehabilitating land full of waste into a beautiful mangrove forest area. Planting is done by utilizing wasteland as fertile land for planting mangrove seedlings. And, it turns out that this has succeeded in growing mangroves into big trees. Development activities that have been carried out include planting and routine maintenance, making silvofishery ponds, processing processed mangrove products and producing batik made from mangroves.

Tujuan dari program adalah :
- Merehabilitasi lautan sampah menjadi kawasan hutan mangrove
- Menciptakan habitat yang nyaman bagi satwa liar yang hidup di kawasan hutan mangrove

The objectives of the program are:
- Rehabilitate the ocean of waste into a mangrove forest area.
- Create a comfortable habitat for wild animals living in mangrove forest areas
- Prevent seawater intrusion and beach abrasion.

- Mencegah terjadinya intrusi air laut dan abrasi pantai
- Menambah pendapatan masyarakat lewat program tambak *silvofishery* dan *Mangrovee* (produk olahan mangrove)
- Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan komunitas serta masyarakat Muara Angke
- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Muara Angke yang lebih luas lagi.

- Increase community income through silvofishery and Mangrovee ponds programs (processed mangrove products).
- Increase the capacity and knowledge of the Muara Angke community.
- Increase the active participation of the wider Muara Angke community.

Adapun kegiatan program selama tahun 2021 adalah:

The program activities in 2021 are:

Audit Sertifikasi Halal MUI Produk Dodol Mangrovee

MUI Halal Certification Audit for Mangrovee Dodol Products

Mang Jasri telah memanfaatkan buah dari pohon mangrove pidada menjadi olahan dodol, sirup dan selai. Ketiga produk tersebut telah berhasil mendapatkan sertifikat Halal MUI pada tahun 2018, namun telah habis masa berlakunya pada tahun 2020. Oleh karenanya, pada tahun 2021 kembali mengajukan Sertifikasi Halal MUI yang kini prosesnya dibantu oleh tim dari Jakpreneur. Di tahun ini, pengajuannya tidak bisa sekaligus 3 produk, maka dari itu, hanya dapat mengajukan 1 produk olahan yaitu dodol mangrove. Proses pengajuan telah dilaksanakan ke LPPOM MUI dan telah memenuhi berkas dan persyaratan yang diminta. Setelah mengupload berkas yang diminta, tahap selanjutnya ialah audit produk bersama LPPOM MUI yang dilakukan secara *online* menggunakan *zoom meeting*. Audit dilaksanakan kurang lebih selama 3 jam, dihadiri 2 orang auditor dari LPPOM MUI, 4 orang pengurus kelompok Mangrove dan 2 orang dari Jakpreneur. Agenda yang dilaksanakan pada saat audit meliputi presentasi produk, *cross-check* bahan, alat, gedung yang digunakan, menjawab beberapa kuis/tes dari tim auditor, dan demo cara memasak dodol. Seluruh agenda berjalan dengan lancar, seluruh dokumen yang dibutuhkan pun telah disubmit dan selanjutnya menunggu penerbitan Sertifikasi Halal MUI.

Mang Jasri has used the fruit from the pidada mangrove tree to make dodol, syrup, and jam. These products succeeded in obtaining the MUI Halal certificate in 2018 but expired in 2020. Therefore, in 2021, the MUI Halal Certification is conducted for which the process is now being assisted by a team from Jakpreneur. Currently, 3 products cannot be submitted at once; therefore, 1 processed product can only be submitted, mangrove lunkhead. The submission process has been carried out to LPPOM MUI and has fulfilled the requested files and requirements. After uploading the requested file, the next step is a product audit with LPPOM MUI which is carried out online using a zoom meeting. The audit was carried out for approximately 3 hours, attended by 2 auditors from LPPOM MUI, 4 administrators of the Mangrovee group, and 2 persons from Jakpreneur. The agenda carried out during the audit included product presentations, cross-checking materials, tools, buildings used, answering several quizzes/tests from the auditor team, and demonstrations on how to make dodol. The entire agenda went smoothly, all the required documents have been submitted, and are waiting for the issuance of the MUI Halal Certification.

Penanaman 10.000 bibit mangrove

10,000 Mangrove Planting

PT PJB UP Muara Karang secara rutin mendukung pelestarian lingkungan di hutan mangrove Muara Angke dengan melakukan penanaman mangrove berkolaborasi dengan KOMMA (Komunitas Mangrove Muara Angke). Karena kondisi *Ecomarine* Mangrove Muara Angke yang sedang banjir, sehingga acara penanaman tidak bisa dilakukan langsung di lokasi hutan mangrove. Oleh karenanya, acara yang diadakan hanya berupa simbolis penyerahan bibit mangrove dari PT PJB UP Muara Karang ke KOMMA. Acara ini dihadiri oleh MKAD PT PJB UP

PT PJB's Muara Karang GU routinely supports environmental conservation in the Muara Angke mangrove forest by planting mangroves in collaboration with KOMMA (Muara Angke Mangrove Community). Due to the flooded condition of the Ecomarine Mangrove Muara Angke, the planting event could not be carried out directly in the mangrove forest location. Therefore, the event that was held was only a symbolic handing over of mangrove seedlings from PT PJB Muara Karang GU to KOMMA. The event was attended by MKAD of PT PJB Muara

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Muara Karang, Camat Penjaringan, Sekretaris Lurah Pluit, staf perwakilan DLH Jakarta Utara serta KOMMA. Tahun ini dilakukan penanaman sebanyak 10.000 bibit mangrove yang mana berarti hingga tahun 2021 telah tertanam 70.500 bibit mangrove di *Ecomarine* Mangrove Muara Angke.

Karang GU, Head of Penjaringan, Secretary of Pluit Village Head, North Jakarta DLH representative staff, and KOMMA. Currently, 10,000 mangrove seedlings were planted, which means that by 2021, 70,500 mangrove seedlings have been planted at Ecomarine Mangrove Muara Angke.

Pemasangan cerucuk
Cerucuk Construction

Cerucuk adalah sebuah pondasi atau pagar yang terbuat dari bambu yang dipasang di sekeliling hutan mangrove Muara Angke. Guna cerucuk antara lain sebagai alat pemecah ombak, selain itu juga membantu menangkal sampah-sampah dari laut supaya tidak bertumpuk dia area hutan mangrove. Karena berbahan dasar bambu, setelah kurang lebih 5 tahun, cerucuk bambu mulai mengikis dan tidak kuat lagi menahan timbunan sampah yang datang. Oleh karenanya, cerucuk akan diganti oleh bambu yang baru agar lebih kokoh. Cerucuk dipasang disekeliling hutan mangrove Muara Angke yang langsung berbatasan dengan laut.

Cerucuk is a foundation or fence made of bamboo that is installed around the Muara Angke mangrove forest. The use of the cerucuk is as a tool for breaking waves, to help ward off garbage from the sea to prevent pile-ups in the mangrove forest area. Since it is made of bamboo, after about 5 years, the bamboo culms begin to erode and are no longer strong enough to withstand the incoming pile of garbage. Therefore, cerucuk is then replaced by new bamboo to become more sturdy. *Cerucuk* is installed around the Muara Angke mangrove forest which is directly adjacent to the sea.

Pemasangan jembatan bambu
Bamboo Bridge Construction

Jembatan bambu dibangun sebagai akses bagi pejalan kaki untuk bisa menelusuri hutan mangrove Muara Angke. Jembatan bambu telah bertahan kurang lebih 5 tahun, dan kini kondisnya sudah mulai keropos. Hal ini menyebabkan terputusnya akses pejalan kaki untuk menelusuri hutan mangrove. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya penggantian bahan jembatan dengan bambu yang baru.

The bamboo bridge was built as access for pedestrians to be able to explore the Muara Angke mangrove forest. The bamboo bridge has lasted approximately 5 years; currently, its condition is starting to deteriorate. This causes the loss of pedestrian access to explore the mangrove forest. Based on these problems, efforts have been made to replace the bridge material with new bamboo.

Program Sanggar Ceria: Cerita Tari Betawi
Sanggar Ceria Program: Betawi Dance Stories

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya meliputi aspek ekonomi dan lingkungan saja, aspek sosial dan budaya pun dapat turut andil dalam membangun kapabilitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial dan budaya dapat dilakukan melalui pelestarian budaya daerah. Di Jakarta Utara sangat kental dengan budaya betawi khususnya lewat tarian-tariannya. PT PJB UP Muara Karang sebagai salah satu perusahaan yang berlokasi di Jakarta Utara memiliki semangat untuk berupaya melestarikan budaya betawi. Oleh karenanya, PT PJB UP Muara Karang bekerjasama dengan Yayasan Pewaris Negeri berupaya untuk menularkan semangat ini

Community empowerment does not only cover economic and environmental aspects, social and cultural aspects can also contribute to building community capabilities. Community empowerment in social and cultural aspects can be done through the preservation of regional culture. North Jakarta is very thick with Betawi culture, especially through the dances. PT PJB Muara Karang GU, a company located in North Jakarta, has a passion for trying to preserve Betawi culture. Therefore, PT PJB Muara Karang GU, in collaboration with Pewaris Negeri Foundation seeks to transmit this spirit to the people of Muara Angke, especially to the younger generation and children

kepada masyarakat Muara Angke, khususnya bagi generasi muda yaitu anak-anak lewat program pelatihan menari tradisional secara gratis yang diberi nama Sanggar Ceria (Cerita Tari Betawi). Minimnya kegiatan positif dan produktif bagi anakanak yang ada diwilayah Muara Angke juga menjadi salah satu latar belakang terciptanya program ini. Melalui Sanggar Tari Ceria, diharapkan dapat menjadi wadah bermain dan belajar yang positif bagi anak-anak, selain itu mereka juga dapat lebih lagi mengenal dan mencintai budayanya, sehingga budaya lokal tetap lestari dan tidak dilupakan. Memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri.

Adapun tujuan program:
- Menambah wawasan Budaya Betawi pada anak-anak Muara Angke
- Melestarikan budaya lokal khususnya Tari Betawi kepada anak-anak Muara Angke
- Memberikan wadah bagi anak-anak Muara Angke untuk berekspresi
- Meningkatkan kepercayaan diri dan kreatifitas anak-anak Muara Angke
- Menciptakan generasi yang cinta akan budayanya sendiri

through free training for a traditional dance called Sanggar Ceria (Betawi Dance Story). The lack of positive and productive activities for children in the Muara Angke area is also one of the backgrounds for the creation of this program. Through Sanggar Tari Ceria, it is expected that it can become a positive place for children to play and learn, besides that they can also get to know and love their culture more so that local culture remains sustainable and not forgotten. It also provides a place for children to express themselves.

The program objectives are as follows:
- To increase knowledge of Betawi Culture for the children in Muara Angke
- To preserve local culture, especially Betawi Dance for the children in Muara Angke
- To provide a platform to express for the children in Muara Angke
- To increase the self-confidence and creativity of the children in Muara Angke
- To create a cultural-aware generation

Program Batik Khas Desa Sengguruh Kab. Malang Batik Jagadjowo Khas Blitar

Sengguruh Village's Typical Batik Program, Malang Regency and Blitar's Jagadjowo Typical Batik

Peningkatan ekonomi masyarakaat di pedesaan, menjadi fokus perhatian dari pemerintah maupun perusahaan yang ada di sekitar. Diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Aparat desa perlu melakukan *monitoring* terhadap industri kerajinan yang ada di desa sebagai salah satu cara pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa, pengembangan termasuk dalam bidang, seperti pertanian, kerajinan batik dan sebagainya. Dalam bidang kerajinan batik, perlu dikembangkan dan dilestarikan, selain untuk meningkatkan pendapatan pengrajin batik juga untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sasaran program adalah kelompok Batik Zeng desa Sengguruh Kec. Kepanjen Kabupaten Malang, dan Organisasi Batik Jagadjowo di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
Tujuan program ini adalah :
- Melestarikan seni batik tradisional
- Mendatangkan penghasilan tambahan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar

Improving the economy of the community in rural areas has become the focus of attention from the government and the surrounding companies. Community empowerment is required to improve the quality of community life. Village officials are also required to monitor the handicraft industry in the village as a way of developing the economic resources of the village community, including development in fields such as agriculture, batik, and so on. In the context of batik, it is necessary to develop and preserve to increase the income of batik craftsmen and to preserve the culture that exists in Indonesia. The target of the program is the Batik Zeng group in Sengguruh village, Kepanjen District, Malang Regency, and Jagadjowo Batik Organization in Kanigoro District, Blitar Regency.
The aims of this program are:
- To preserve Batik as a traditional art
- To generate additional income to help the local community's economy

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

- Membantu mewujudkan program pemerintah untuk membeli produk-produk lokal
- Membantu mewujudkan program pemerintah untuk mengampanyekan batik ke mancanegara

Sepanjang tahun 2021, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diantaranya pendatanganan MoU terkait pelatihan membatik bagi masyarakat di desa Sengguruh Kec. Kepanjen, Kab. Malang dan pembangunan sarana dan prasarana Batik Jagadjowo di Lodoyo, Kabupaten Blitar berupa:

- Bantuan 2 (dua) tungku Kompor Gas
- Bantuan 10 (sepuluh) set Kompor Minyak
- Bantuan 2 (dua) unit Panci Lurik
- Bantuan 20 unit Canting
- Bantuan 135 yard Kain Katun

- To help realize the government's program to buy local products
- To help realize the government's program to campaign for Batik abroad

In 2021, the activities held include the signing of an MoU concerning Batik training for the community in Sengguruh village, Kepanjen District, Malang Regency, and construction of facilities and infrastructure for Batik Jagadjowo in Lodoyo, Blitar Regency in the form of:

- Assistance with 2 (two) Gas Stove stoves
- Assistance with 10 (ten) sets of Oil Stoves
- Assistance with 2 (two) Lurik Pans
- Assistance with 20 units of Canting
- Assistance with 135 yards of Cotton Fabric

Program Pembuatan Rumah Edukasi Porang Tahap Ketiga
Third Construction Phase of Porang Educational Home

Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun memiliki wilayah 1.819 Hektar (Ha) terdiri 4 Dusun, yaitu Dusun Giringan, Dusun Dowo, Dusun Kepel dan Dusun Gligi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Desa Kare, Sebelah Timur : Kecamatan Ngebel, Sebelah Selatan : Desa Bodag dan Desa Bolo, Sebelah Barat : Desa Kuwiran Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Kepel adalah Petani dan Pekebun. Perkembangan dan ketertarikan masyarakat Desa Kepel khususnya anggota kelompok Tani Sarwo Asih tentang tanaman porang semakin terlihat dengan dibuktikan jumlah produksi yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir, bahkan sudah menggunakan pola intensif dalam penanaman hal ini disebabkan kebutuhan akan porang dengan jumlah produksi porang yang masih sangat kurang karena merupakan komoditas eksport yang memiliki nilai jual tinggi.

Kepel Village, Kare Sub-district, Madiun Regency has an area of 1,819 hectares (Ha) consisting of 4 Hamlets: Gringan Hamlet, Dowo Hamlet, Kepel Hamlet, and Gligi Hamlet, with regional boundaries as follows: North: Kare Village, East: Ngebel District, South: Bodag Village and Bolo Village, West: Kuwiran Village. The majority of the livelihoods of Kepel People are farmers and planters. The development and interest of the people of Kepel Village, especially members of the Sarwo Asih Farmer's group about Porang plants, is increasingly shown as evidenced by the amount of production that has increased significantly in the last 5 years, even though they have used an intensive pattern of planting. This is due to the need for Porang with the amount of Porang production which is still inadequate since it is an export commodity that has a high selling value.

Adapun tujuan program adalah :

- Meningkatkan penjualan bibit, bahan baku olahan porang, dan paket edukasi porang lengkap dengan modul pembelajaran, wisata edukasi, *home stay* lokal, dll.
- Meningkatan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan Infrastruktur
- Meningkatkan kapasitas kelompok

Kegiatan selama tahun 2021 adalah:

- Pembinaan sekretariat rumah edukasi porang
- Pembangunan Rumah Edukasi Budidaya Porang di Desa Kepel
- Pelaksanaan pendampingan secara rutin maupun insidentil terhadap proses pembangunan
- Rumah Edukasi Kelompok Tani Sarwo Asih.

The program objectives are as follows:

- To increase sales of seeds, raw materials for Porang processing, and Porang education packages complete with learning modules, educational tours, local homestays, etc.
- To improve community welfare
- To improve Infrastructure
- To increase group capacity

Activities in 2021 are as follows:

- Development of the Porang Education House secretariat
- Construction of Porang Cultivation Education House in Kepel Village
- Implementation of routine and incidental assistance to the development process
- Sarwo Asih Farmer's Group Education House.

Manfaat Benefit	2019	2020	2021
Pendapatan Kelompok Group Income	23.220.000	12.316.400	2.780.000
Penerima Manfaat Beneficiary	38 Orang Person	98 Orang Person	106 Orang Person

Biaya Yang Dikeluarkan
Budget Cost

PJB mengeluarkan biaya untuk program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan sebesar Rp35,159 miliar yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, serta lingkungan dengan rincian yang diklasifikasikan berdasarkan tipologi sebagai berikut:

PJB reserved the cost of Rp35.159 billion for corporate social responsibility programs on social and community development covering the aspects of education, health, economy, social culture, and religion, as well as the environment with more detailed information based on the following typology:

Anggaran dan Realisasi Biaya CSR Tahun 2021 (dalam jutaan)
Budget and Realization of CSR Costs in 2021 (in millions)

No	Tipologi Typology	RKAP 2021 2021 ABOP	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian terhadap RKAP ABOP Achievement
1	*Empowerment*	15,192	11,510	76%
2	*Capacity Building*	10,745	10,629	99%
3	Infrastruktur Infrastructure	6,406	5,091	79%
4	*Charity*	5,871	4,417	75%
5	KLBS Extraordinary Event	3,890	3,513	90%
Total		**42,106**	**35,159**	**84%**

Penghargaan
Awards

Pada tahun 2021 PJB mendapatkan penghargaan dan apresiasi atas program-program CSR yang berhasil dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain:

1) Indonesia CSR *Awards* 2021
   PT PJB UP Cirata berhasil meraih gelar silver ajang Indonesia CSR *Awards* pada kategori 'Bangun Karsa Rupa'. Ajang CSR Indonesia *Awards* 2021 yang digelar untuk ke-4 kalinya oleh Majalah CSR Indonesia dan Meprindo *Communications*

In 2021, PJB received awards and appreciation for CSR programs that were successfully implemented continuously, including:

1) Indonesia CSR Awards 2021
   PT PJB Cirata GU won a silver title at the Indonesia CSR Awards in the category 'Bangun Karsa Rupa'. The CSR Indonesia Awards 2021, which was held for the 4th time by CSR Indonesia Magazine and Meprindo Communications,

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

digelar pada Kamis bertempat di Banten, namun juga pengumuman tersebut diselenggarakan secara daring. Kategori Bangun Karsa Rupa (bidang sosial) merupakan penghargaan untuk program Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat sehingga bisa bangkit dan terbangung kembali.

2) ISDA 2021
Melalui program-program CSR yang dikelola secara berkelanjutan, PJB kembali mendapatkan apresiasi di bidang CSR pada Jumat (17/9) yang dianugerahkan oleh *Indonesian Sustainable Development Goals Awards* (ISDA) tahun 2021 yang bertempat di Hotel Js Luwansa, Jakarta Selatan.

Secara total terdapat 11 program CSR dan 2 penghargaan individu untuk *local hero* yang meraih penghargaan dari 7 Unit yang mengikuti penjurian, yaitu UP Paiton, UP Muara Tawar, UBJOM Indramayu, UP Gresik, UBJOM Tanjung Awar-awar, UBJOM Rembang dan UP Cirata. PJB juga mendapatkan tiga penganugerahaan sekaligus:

- *The Top Leadership on SDGs*
- *The Most Committed Corporate on Social Pilar*
- *The Most Committed Corporate on Economy Pilar*

3) AREA (*Asia Responsible Enterprise Award*)
PT PJB melalui UP Gresik dengan program 'Pijar Berdaya-*Social Innovation and Women Entrepeneurship*' berhasil meraih gelar juara di ajang *Asia Responsible Enterprise Awards* (AREA) 2021 pada Kamis yang diumumkan secara virtual.

4) TOP CSV *Awards* 2021
Penghargaan untuk PT PJB didapatkan dari Program CSV: *Co-Firing* penerapan *green energy* pada PLTU dengan memanfaatkan biomassa sebagai substitusi (campuran bahan bakar), dengan melibatkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai penyedia biomassa.

5) TJSL & CSR *Awards* 2021
Penghargaan ini didapatkan oleh PJB melalui program Pijar Berdaya UP Gresik, Program Kampung *Stroom UP* Paiton dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam program *Co-Firing*. Pencapaian tersebut tentunya senada dengan tema yang diangkat pada penghargaan ini, yaitu 'Kontribusi BUMN dalam mendukung Pencapaian SDG's Berbasis ISO 26000'.

was held on Thursday in Banten, but the announcement was also made online. The category of Bangun Karsa Rupa (social sector) is an award for the Disaster Risk Reduction program for the community to help them rise and rebuild.

2) ISDA 2021
Through CSR programs that are managed sustainably, PJB again received appreciation in the field of CSR on Friday (17/9) which was awarded by the 2021 Indonesian Sustainable Development Goals Awards (ISDA) which took place at the Js Luwansa Hotel, South Jakarta.

In total, there were 11 CSR programs and 2 individual awards for local heroes who received awards from 7 units participating in the judging, namely Paiton GU, Muara Tawar GU, Indramayu OMSBU, Gresik GU, Tanjung Awar-awar OMSBU, Rembang OMSBU, and Cirata GU. PJB also received three awards at the same moment:
- The Top Leadership on SDGs
- The Most Committed Corporate on Social Pilar
- The Most Committed Corporate on Economy Pillar

3) AREA (Asia Responsible Enterprise Award)
PT PJB through Gresik GU's 'Pijar Berdaya-Social Innovation and Women Entrepreneurship' program won the title at the Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 on Thursday which was announced virtually.

4) TOP CSV Awards 2021
The award for PT PJB was obtained from the CSV Program: Co-Firing the application of green energy in CFPP by utilizing biomass as a substitute (fuel mixture), involving Micro and Small Enterprises (SMEs) as biomass providers.

5) TJSL & CSR Award 2021
This award was obtained by PJB through the Gresik GU's Pijar Berdaya Program, Paiton GU's Stroom Village Program, and the empowerment of Micro and Small Enterprises (MSE) in the Co-Firing program. This achievement is certainly in line with the theme raised in this award, 'The contribution of SOEs in supporting the achievement of SDGs Based on ISO 26000'.

Manfaat Program Tanggung Jawab Sosial dan Pengembangan Masyarakat

Positive Impacts of Corporate Social Responsibility on Community Development

Nilai positif yang dapat diambil oleh para mitra binaan dalam penyaluran program kemitraan, antara lain:

1. Dapat meningkatkan usaha ekonomi kecil di area
2. Dapat meningkatkan image mitra binaan;
3. Dapat meningkatkan derajat/taraf hidup masyarakat golongan ekonomi kecil menengah beserta keluarganya;
4. Dapat menjadi mitra binaan secara berkelanjutan hingga usaha masyarakat yang menjadi mitra binaan dapat mandiri.

The positive values that can be taken by the fostered partners in the distribution of the partnership program include:

1. Able to improve small economic enterprises in the area
2. Able to improve the image of the fostered partners;
3. Able to improve the quality/standard of living of the small and medium economic group and their families;
4. Able to be a foster partner continuously so that the community businesses that become foster partners can be independent.

Nilai positif yang dapat diambil oleh para penerima bantuan dari dana bina lingkungan, antara lain:

1. Dapat meningkatkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan di suatu lingkungan;
2. Dapat membantu dan berperan serta dalam pembangunan dan pengembangan di suatu wilayah;
3. Dapat meningkatkan kondisi wilayah di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, sarana peribadatan, pelestarian alam dan membantu bencana alam.

Positive values that can be taken by recipients of assistance from the environmental development fund include:

1. Able to increase social and community activities in an environment;
2. Able to assist and participate in development and development in an area;
3. Able to improve regional conditions in various aspects, such as education, health, facilities and infrastructure, worship facilities, nature conservation, and assisting natural disasters.

Sedangkan nilai positif yang dapat diambil oleh PJB sebagai perusahaan antara lain:

1. Masyarakat sekitar tempat usaha diharapkan menjadi partner usaha dengan pedulinya PJB kepada lingkungan sekitar diharapkan masyarakat juga peduli dengan keberadaan PJB sehingga keberadaan PJB memiliki nilai tambah bagi masyarakat sekitar;
2. Dapat meningkatkan pelayanan Perusahaan;
3. Dapat meningkatkan *image* Perusahaan;

Meanwhile, the positive values that can be taken by PJB as a company include:

1. Local communities are expected to become business partners with PJB's care for the surrounding environment. It is expected that the community is also aware of the presence of PJB so that PJB has added values for the surrounding community;
2. Able to improve the Company's services;
3. Able to improve the Company's reputation;

Serta nilai positif yang dapat diambil oleh pemerintah, antara lain:

1. Mengurangi pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja;
2. Ikut menggerakkan sektor riil, sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah setempat;
3. Memasyarakatkan koperasi;
4. *Multiplier* efek lainnya.

Additionally, positive values that can be taken by the government include:

1. Reduce unemployment by creating jobs;
2. Participate in moving the real sector to improve the local economy;
3. Promote cooperatives;
4. Multiplier other effects.

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED*

AUDITED FINANCIAL STATEMENT

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2021 DAN 2020/
31 DECEMBER 2021 AND 2020

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2021 AND 2020 AND FOR THE YEARS THEN ENDED

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/
AND ITS SUBSIDIARIES

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:*

Nama	Gong Matua Hasibuan	*Name*
Alamat Kantor	Jalan Ketintang Baru No.11 Surabaya	*Office Address*
Alamat Domisili	Jalan Cipinang Baru Bunder No. 25, RT 003 RW 013, Cipinang,Kebayoran Baru, Jakarta Timur	*Address of Domicile*
Telepon	(031) 8283180	*Telephone*
Jabatan	Direktur Utama/*President Director*	*Position*
Nama	R. Rawan Insani	*Name*
Alamat Kantor	Jalan Ketintang Baru No. 11 Surabaya	*Office Address*
Alamat Domisili	Jalan Gading IV No. 753 RT 013 RW 010, Pondok bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur	*Address of Domicile*
Telepon	(031) 8283180	*Telephone*
Jabatan	Direktur Keuangan/*Finance Director*	*Position*

menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pembangkitan Jawa-Bali dan entitas anaknya ("Grup"); / *The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pembangkitan Jawa-Bali and its subsidiaries (the "Group");*
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan / *The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and*
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup. / *The Board of Directors is responsible for the Group's internal control system.*

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *The statement is made truthfully.*

Atas nama dan mewakili Direksi. / *For and on behalf of the Board of Directors.*

Surabaya, 31 Maret 2022 / *31 March 2022*

METERAI TEMPEL
047A5AJX554424226

GONG MATUA HASIBUAN	R. RAWAN INSANI
Direktur Utama/ *President Director*	Direktur Keuangan/ *Finance Director*

PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI
Jl. Ketintang Baru 11 Surabaya 60231 - Indonesia, ☎ : 62-31- 8283180 (hunting) Fax : 62-31 - 8283183 E-mail : Info@ptpjb.com website : www.ptpjb.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pembangkitan Jawa-Bali dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pembangkitan Jawa-Bali and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00488/2.1025/AU.1/02/0241-2/0/III/2022

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangkitan Jawa-Bali dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pembangkitan Jawa-Bali and its subsidiaries as at 31 December 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
31 Maret/*March* 2022

Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP.0241

00488/2.1025/AU.1/02/0241-2/0/III/2022

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	12	7,343,968	3,511,113	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka	13	290,103	325,046	*Time deposits*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	9	206,279	-	*Restricted cash in banks and time deposits*
Piutang usaha	14	21,954,378	25,296,923	*Trade receivables*
Piutang lain-lain - bagian lancar		187,199	182,172	*Other receivables - current portion*
Piutang kepada ventura bersama - bagian lancar	10	124,055	-	*Receivables from joint ventures - current portion*
Persediaan	15	1,463,848	1,546,239	*Inventories*
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	28a	755,157	733,167	*Prepaid taxes - current portion*
Biaya dibayar di muka dan uang muka		135,238	91,882	*Prepaid expenses and advances*
Jumlah aset lancar		**32,460,225**	**31,686,542**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	6	124,151,268	129,523,845	*Property, plant and equipment*
Properti investasi	7	1,460,599	1,540,756	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	8	12,390,846	9,744,556	*Investments in associates and joint ventures*
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	9	-	61,158	*Restricted cash in banks and time deposits*
Aset pajak tangguhan - bersih	28d	47,778	57,509	*Deferred tax assets - net*
Piutang kepada ventura bersama - bagian tidak lancar	10	692,002	797,169	*Receivables from joint ventures - non-current portion*
Piutang lain-lain - bagian tidak lancar		44,028	45,467	*Other receivables - non-current portion*
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	28a	752,248	1,231,545	*Prepaid taxes - non-current portion*
Aset tidak lancar lain	11	164,834	872,473	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar		**139,703,603**	**143,874,478**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET		**172,163,828**	**175,561,020**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
EKUITAS DAN LIABILITAS				***EQUITY AND LIABILITIES***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	19	3,261,362	3,048,614	*Trade payables*
Utang lain-lain	20	597,040	685,538	*Other payables*
Utang pajak lainnya	28b	109,124	173,671	*Other taxes payable*
Utang pajak penghasilan badan		18,239	537	*Corporate income tax payable*
Beban masih harus dibayar		61,761	89,391	*Accrued expenses*
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek	31	233,979	334,725	*Loans from a shareholder - short-term portion*
Liabilitas sewa		33,730	33,414	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	30	702,192	588,940	*Short-term employee benefits liabilities*
Jumlah liabilitas jangka pendek		**5,017,427**	**4,954,830**	***Total current liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	28d	1,072,316	446,616	*Deferred tax liabilities - net*
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka panjang	31	2,183,226	2,163,361	*Loans from a shareholder - long-term portion*
Liabilitas sewa		26,274	34,246	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	30	2,695,320	2,647,016	*Employee benefits liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang		**5,977,136**	**5,291,239**	***Total non-current liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**10,994,563**	**10,246,069**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham				*Capital stock - par value of Rp500 (full amount) per share*
Modal dasar - 24.000 juta saham				*Authorised - 24,000 million shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 6.000 juta saham	16	3,000,000	3,000,000	*Subscribed and fully paid-up - 6,000 million shares*
Tambahan modal disetor	17	2,915,205	2,915,205	*Additional paid-in capital*
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali		(62,725)	(62,725)	*Difference in transaction with non-controlling interest*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya		1,429,875	1,429,875	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya		30,064,155	31,915,518	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain		123,579,572	125,895,480	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				*Equity attributable to*
Pemilik entitas induk		160,926,082	165,093,353	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	18	243,183	221,598	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**161,169,265**	**165,314,951**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		**172,163,828**	**175,561,020**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUE***
Penjualan tenaga listrik	21	24,541,378	25,476,470	*Sales of electricity*
Pendapatan usaha lainnya	22	4,966,756	4,957,706	*Other operating revenue*
Jumlah pendapatan usaha		**29,508,134**	**30,434,176**	***Total revenue***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Bahan bakar dan pelumas	23	(14,672,806)	(11,538,786)	*Fuel and lubricants*
Pemeliharaan	25	(4,126,561)	(4,180,398)	*Maintenance*
Penyusutan	6	(3,253,144)	(3,277,413)	*Depreciation*
Kepegawaian	26	(1,790,453)	(1,682,988)	*Employee costs*
Pembelian tenaga listrik	24	(333,617)	(325,288)	*Purchased electricity*
Lain-lain	27	(924,562)	(903,679)	*Others*
Jumlah beban usaha		**(25,101,143)**	**(21,908,552)**	***Total operating expenses***
LABA USAHA		**4,406,991**	**8,525,624**	***OPERATING INCOME***
Penghasilan keuangan		186,603	126,658	*Finance income*
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing - bersih		3,924	(8,913)	*Gains/(losses) on foreign exchange - net*
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	8	2,868,311	1,952,507	*Share in net profit of associates and joint ventures*
Beban lain-lain - bersih		(273,789)	(355,769)	*Other expenses - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**7,192,040**	**10,240,107**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	28c	(1,371,852)	(2,536,295)	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN		**5,820,188**	**7,703,812**	***PROFIT FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2021	2020	
LABA TAHUN BERJALAN (lanjutan)		**5,820,188**	**7,703,812**	***PROFIT FOR THE YEAR (continued)***
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain tahun berjalan:				***Other comprehensive income/(loss) for the year:***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Bagian (kerugian)/penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	8	(4,868)	191,041	*Share in other comprehensive (loss)/income from associates and joint ventures*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Revaluasi aset tetap	6	(3,154,021)	(6,916)	*Revaluation of property, plant and equipment*
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	30	192,415	234,360	*Remeasurement of defined benefit plans*
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait	28d	665,085	(81,555)	*Related income tax benefits/(expenses)*
		(2,296,521)	145,889	
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		(2,301,389)	336,930	*Other comprehensive (loss)/income for the year after tax*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**3,518,799**	**8,040,742**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				***Profit for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		5,810,033	7,661,396	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		10,155	42,416	*Non-controlling interests*
LABA TAHUN BERJALAN		**5,820,188**	**7,703,812**	***PROFIT FOR THE YEAR***
Jumlah penghasilan komprehensif berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		3,494,125	7,995,887	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		24,674	44,855	*Non-controlling interests*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**3,518,799**	**8,040,742**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to the owners of the parent entity*											
				Saldo laba/*Retained earnings*		Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*							
		Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and fully paid-up capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Surplus revaluasi aset tetap/ *Property, plant and equipment revaluation surplus*	Pengukuran kembali atas program manfaat pasti/ *Remeasurement on defined benefit plan*	Bagian penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share of other comprehensive income/ (loss) from associates and joint ventures*	Selisih transaksi kepentingan non-pengendali/ *Difference in transaction with non-controlling interest*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk/ *Equity attributable to the parent entity*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020		3,000,000	2,915,205	1,429,875	30,899,514	125,737,981	(624,861)	447,869	(62,725)	163,742,858	178,632	163,921,490	*Balance as at 1 January 2020*
Dividen	29	-	-	-	(6,645,392)	-	-	-	-	(6,645,392)	(1,889)	(6,647,281)	*Dividends*
Laba tahun berjalan		-	-	-	7,661,396	-	-	-	-	7,661,396	42,416	7,703,812	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	-	(6,916)	148,909	192,498	-	334,491	2,439	336,930	*Other comprehensive income for the year*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	7,661,396	(6,916)	148,909	192,498	-	7,995,887	44,855	8,040,742	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		**3,000,000**	**2,915,205**	**1,429,875**	**31,915,518**	**125,731,065**	**(475,952)**	**640,367**	**(62,725)**	**165,093,353**	**221,598**	**165,314,951**	***Balance as at 31 December 2020***
Dividen	29	-	-	-	(7,661,396)	-	-	-	-	(7,661,396)	(2,679)	(7,664,075)	*Dividends*
Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	*Issuance of subsidiaries' shares to non-controlling interest*
Pelepasan entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(414)	(414)	*Disposal of a subsidiary*
Laba tahun berjalan		-	-	-	5,810,033	-	-	-	-	5,810,033	10,155	5,820,188	*Profit for the year*
Kerugian komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	-	(2,462,877)	166,086	(19,117)	-	(2,315,908)	14,519	(2,301,389)	*Other comprehensive losses for the year*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	5,810,033	(2,462,877)	166,086	(19,117)	-	3,494,125	24,674	3,518,799	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		**3,000,000**	**2,915,205**	**1,429,875**	**30,064,155**	**123,268,188**	**(309,866)**	**621,250**	**(62,725)**	**160,926,082**	**243,183**	**161,169,265**	***Balance as at 31 December 2021***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	15,415,195	11,667,301	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(11,533,375)	(9,610,081)	*Cash paid to suppliers, employees and others*
Penerimaan bunga	106,441	80,181	*Interest received*
Pembayaran surat keterangan pajak kurang bayar	(136,172)	(162,946)	*Payments of tax assessment letter for underpayment*
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	227,944	252,192	*Cash receipt for corporate income tax refund*
Penerimaan restitusi Pajak Penambahan Nilai	581,587	287,731	*Cash receipts for Value Added Taxes refund*
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan final	(338,412)	(337,252)	*Payments of corporate income tax and final income tax*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**4,323,208**	**2,177,126**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	307,069	315,410	*Dividends received from associates and joint ventures*
Penempatan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(92,598)	(23,778)	*Additions of investments in associates and joint ventures*
Penambahan piutang kepada ventura bersama	(9,632)	-	*Additions of receivables from joint ventures*
Penempatan deposito	-	(31,962)	*Placement of time deposits*
Perolehan aset tetap	(1,093,904)	(1,591,389)	*Purchase of property, plant and equipment*
Penambahan aset tidak lancar lainnya	-	(39,757)	*Addition of other non-current assets*
Penarikan deposito berjangka	554,372	-	*Withdrawal of time deposits*
Penarikan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	15,737	-	*Withdrawal of restricted cash in banks and time deposits*
Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(15,400)	-	*Placement of restricted cash in banks and time deposits*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(334,356)**	**(1,371,476)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	227,467	1,048,955	*Proceeds of loans from a shareholder*
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	(334,297)	(165,340)	*Payments of loans from a shareholder*
Pembayaran liabilitas sewa	(57,991)	(30,709)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen oleh entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	(2,679)	(1,889)	*Payments of dividends by subsidiaries to non-controlling interests*
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(167,500)**	**851,017**	***Net cash (used in)/provided by financing activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**3,821,352**	**1,656,667**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**3,511,113**	**1,838,858**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	11,503	15,588	*Effect of changes in foreign currency*
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**7,343,968**	**3,511,113**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Lihat Catatan 34 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 34 for the presentation of the Group's cash flow information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/1 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pembangkitan Jawa-Bali ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 3 Oktober 1995, dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-12495-HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 9229 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 90.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 14 Agustus 2020, dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, terkait perubahan susunan Dewan Direksi Perseroan. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0366073 tanggal 26 Agustus 2020.

Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan satuan-satuan usaha yang berlokasi di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a. Pembangkitan tenaga listrik;
b. Konstruksi bangunan elektrikal;
c. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
d. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan; dan
e. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan termasuk memberikan penugasan kepada entitas anaknya.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN").

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anaknya (secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup") masing-masing sebanyak 9.607 karyawan (tidak diaudit) dan 9.794 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Pembangkitan Jawa-Bali (the "Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 16 dated 3 October 1995, of Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-12495-HT.01.01.Th.95 dated 3 October 1995 and was published in State Gazette No. 9299 dated 10 November 1995, Supplement No. 90.

The Articles of Association of the Company were recently amended by Notarial Deed No. 19 dated 14 August 2020, of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta, in relation to changes in the composition of the Company's Board of Directors. This change was received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0366073 dated 26 August 2020.

The Company is domiciled in Surabaya with business units located in Java, Kalimantan, and Sumatera. The Company's head office is located in Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in the electric power industry business, based on the principles of competitive industry and commerce, consisting of the following activities:

a. Power plants;
b. Electrical buildings construction;
c. Installation of electrical equipments;
d. Maintenance and/or operation of electrical equipments; and
e. Sales and/or other supporting business activities in order to optimise the available resources of the Company, including delegating assignments to its subsidiaries.

The Company is one of the group of companies owned by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN").

As at 31 December 2021 and 2020, the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") had total permanent number of employees of 9,607 (unaudited) and 9,794 (unaudited), respectively.

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan pengurus dan informasi lain

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Komisaris Utama	Dedeng Hidayat	Sriyono D. Siswoyo	*President Commissioner*
Komisaris	Komang Parmita	Defy Indiyanto Budiarto	*Commissioners*
	Jisman P. Hutajulu	Sunarsip	
	Hendra Iswahyudi	Jisman P. Hutajulu	
	Emir Kresna Wardana*)	Hendra Iswahyudi	
	Bagus Puruhito*)		
Plt Komisaris	-	Benny MM Marbun	*Acting as Commissioner*

*) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tanggal 30 Desember 2021.

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Direktur Utama	Gong Matua Hasibuan**)	-	*President Director*
Plt Direktur Utama	-	Sugiyanto	*Acting as President Director*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	Karyawan Aji	Karyawan Aji	*Director of Human Resources and Administration*
Direktur Pengembangan dan Niaga	Iwan Purwana*)	Iwan Purwana	*Director of Development and Commerce*
Direktur Keuangan	R. Rawan Insani	R. Rawan Insani	*Director of Finance*
Direktur Operasi 1	M. Yossy Noval A.***)	Sugiyanto	*Director of Operation 1*
Direktur Operasi 2	Rachmanoe Indarto	Rachmanoe Indarto	*Director of Operation 2*

*) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 25 Januari 2021.
**) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 19 Februari 2021.
***) Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 23 April 2021.

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Ketua	Hendra Iswahyudi*)	Sunarsip	*Chairman*
Wakil Ketua	-	Defy Indiyanto Budiarto	*Vice Chairman*
Sekretaris/Anggota	Sigit Djalu Prakoso	Sigit Djalu Prakoso	*Secretary/Members*
Anggota	Andar Sudiar Sukma	Andar Sudiar Sukma	*Members*

*) Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 010.K/DK/PJB/2021.

***1. GENERAL** (continued)*

b. Management and other information

The composition of the Company's Board of Commissioners was as follows:

*) *Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 30 December 2021.*

The composition of the Company's Board of Directors as at 31 December 2021 and 2020 was as follows:

*) *Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 25 January 2021.*
**) *Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 19 February 2021.*
***) *Based on decision of the shareholders at the Circular General Shareholders Meeting of the Company dated 23 April 2021.*

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2021 and 2020 was as follows:

*) *Based on decision of the Audit Committee No. 010.K/DK/PJB/2021.*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/3 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU, AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN TAHUNAN, SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

Penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
- Amendemen PSAK No. 71, Amendemen PSAK No. 55, Amendemen PSAK No. 60, Amendemen PSAK No. 62 dan Amendemen PSAK No. 73 tentang "Reformasi Acuan Suku Bunga 2"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd"
- Amandemen PSAK No. 73, "COVID-19 Terkait Konsesi Rental"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK No. 13, "Properti Investasi", PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", ISAK No. 16, "Pengaturan Jasa Konsesi"

Sehubungan dengan amandemen PSAK No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 dan No. 73, Grup saat ini memiliki piutang kepada ventura bersama (Catatan 10) dan pinjaman dari pemegang saham (Catatan 31) yang mengacu pada Dolar Amerika Serikat *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") dan berlaku hingga lebih dari tahun 2022. Pada tanggal 31 Desember 2021, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan.

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"

2. NEW, AMENDMENTS AND ANNUAL IMPROVEMENTS STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS") AND INTERPRETATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("IFAS")

The adoption of the following new standards, amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from 1 January 2021 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the year:

- *SFAS No. 112, "Accounting for Endowments"*
- *Amendment to SFAS No. 22, "Business Combinations - Business Definition"*
- *Amendment to SFAS No. 71, Amendment to SFAS No. 55, Amendment to SFAS No. 60, Amendment to SFAS No. 62 and Amendment to SFAS No. 73 regarding "Interest Rate Benchmark Reform 2"*
- *Annual improvement to SFAS No. 110, "Sukuk Accounting"*
- *Annual improvement to SFAS No. 111, "Wa'd Accounting"*
- *Amendment to SFAS No. 73, "COVID-19 related Rent Concessions"*
- *Annual improvements to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements", SFAS No. 13, "Investment Property", SFAS No. 48, "Impairment of Assets", SFAS No. 66, "Joint Arrangements", IFAS No. 16, "Service Concession Arrangements"*

With respect to the amendments to SFAS No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 and No. 73, the Group currently has receivables from joint ventures (Note 10) and loans from a shareholder (Note 31) which refer to United States Dollars London Interbank Offered Rate ("LIBOR") and extend beyond 2022. As at 31 December 2021, the alternative benchmark has not yet been determined.

New standards, amendments and annual improvements issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 are as follows:

- *SFAS No. 74, "Insurance Contracts"*
- *Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current"*
- *Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"*
- *Amendment to SFAS No. 16, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"*

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU, AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN TAHUNAN, SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"
- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi sehubungan dengan Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Perbandingan"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal"

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali Amandemen PSAK No. 1, Amandemen PSAK No. 16, Amandemen PSAK No. 25, Amandemen PSAK No. 46, dan Revisi PSAK No. 107 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. NEW, AMENDMENTS AND ANNUAL IMPROVEMENTS STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS") AND INTERPRETATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("IFAS") *(continued)*

New standards, amendments and annual improvements issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 are as follows: (continued)

- *Amendment to SFAS No. 22, "Business Combinations - Reference to Conceptual Framework for Financial Reporting"*
- *Amendment to SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"*
- *Amendment to SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract"*
- *Annual improvement to SFAS No. 69, "Agriculture"*
- *Annual improvement to SFAS No. 71, "Financial Instruments"*
- *Annual improvement to SFAS No. 73, "Leases"*
- *Revision of SFAS No. 107, "Ijarah Accounting"*
- *Amendment to SFAS No. 74, "Insurance Contract relating to Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information"*
- *Amendment to SFAS No. 46, "Income Tax - Deferred Taxes related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction"*

The above new standards, amendments and annual improvements are effective beginning 1 January 2022, except for Amendments to SFAS No. 1, Amendment to SFAS No. 16, Amendment to SFAS No. 25, Amendment to SFAS No. 46, and Revision of SFAS No. 107 which are effective beginning 1 January 2023, and SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74, which are effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and annual improvements on the Group's consolidated financial statements.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/5 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on a going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquired entity and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred is the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/7 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

3. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

c. *Principles of consolidation* *(continued)*

i.2. Acquisition *(continued)*

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investment in an associate is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/9 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Akuisisi**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- **Metode ekuitas**

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Acquisitions***

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of the acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- ***Equity method of accounting***

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Metode ekuitas** (lanjutan)

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- **Pelepasan**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Equity method of accounting*** *(continued)*

Unrealised gains on transactions between the Group and its associate or joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of the impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- ***Disposals***

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/11 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- **Pelepasan** (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup, diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kurs konversi yang digunakan Grup untuk mata uang Dolar Amerika Serikat ("AS$") adalah masing-masing Rp14.269 dan Rp14.105.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- ***Disposals*** *(continued)*

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate and joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss, where appropriate.

d. Foreign currency transactions

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities, are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such a date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

The conversion rates used by the Group on 31 December 2021 and 2020 for United States Dollar ("US$") are Rp14,269 and Rp14,105, respectively.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

iii. Entitas dalam Grup

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari seluruh entitas dalam Grup (tidak ada yang memiliki mata uang fungsionalnya mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi) yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajian Perusahaan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

(a) Aset dan liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan, dijabarkan pada kurs penutup tanggal laporan posisi keuangan tersebut;

(b) Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dijabarkan menggunakan kurs rata-rata (kecuali jika rata-rata tersebut bukan perkiraan wajar efek kumulatif dari kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, maka penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi); dan

(c) Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Pada konsolidasian, selisih kurs yang timbul dari penjabaran setiap investasi neto pada entitas asing dan instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan sebagai lindung nilai atas investasi tersebut, diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi dijual, selisih kurs terkait direklasifikasi ke laba rugi.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Foreign currency transactions *(continued)*

iii. Group companies

The results of the operations and financial position of the Group's entities (none of which has the currency of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the Company's presentation currency are translated into the Company's presentation currency using the following procedures:

(a) The assets and liabilities presented in the statement of financial position are translated at the closing rate at the date of the statement of financial position;

(b) The income and expenses for each statement of profit or loss and other comprehensive income are translated at the average exchange rates (unless this average is not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case the income and expenses are translated at the rates in force on the dates of the transactions); and

(c) All resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

On consolidation, exchange differences arising from the translation of any net investments in foreign entities and other financial instruments designated as hedges of such investments, are recognised in other comprehensive income. When the investment is sold, the associated exchange differences are reclassified to profit or loss.

e. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 7, "Related Party Disclosures" as follows:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  (i) Has control or joint control over the reporting entity;
  (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
  (iii) A member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/13 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
(i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
(ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
(v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
(vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Transactions with related parties *(continued)*

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:

(i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
(iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
(iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
(v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
(vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
(vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

A Government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

f. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:
- aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Transactions with related parties *(continued)*

Government-related entities include entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State-Owned Enterprise ("SOE") as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following categories:
- *financial assets measured at amortised cost; and*
- *financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI").*

The classification depends on the Group's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows are solely payment of principal and interest.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/15 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

Debt instruments

The subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI"): Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam penghasilan/(beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing - bersih dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

Debt instruments (continued)

- *Fair value through other comprehensive income ("FVOCI"): Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses are presented in other gains or losses on foreign exchange - net and impairment expenses in other expenses.*

- *Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss.*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/17 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognised in other gains/(losses) in the statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and reversals of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive the cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

iii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

iv. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan umum dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan. Kerugian kredit ekspektasian dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian kredit ekspektasian disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (kerugian kredit ekspektasian 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu *default* (kerugian kredit ekspektasian seumur hidup).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

iv. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies a general approach to calculating the expected credit losses ("ECL") for financial assets. ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in the credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for the credit losses that are expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/19 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, "Aset tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:
- Tanah dan hak atas tanah;
- Bangunan umum, waduk dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadang utama.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Property, plant and equipment

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of its land rights so that it accurately represents an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS No. 73, "Leases". If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16, "Property, plant and equipment" under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

Property, plant and equipment are initially recognised at cost, which comprises the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

The following classes of assets are measured using the revaluation method:
- *Land and land rights;*
- *Buildings, reservoirs and infrastructure;*
- *Installations and power plants;*
- *Transmissions equipment;*
- *Distribution equipment;*
- *Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply; and*
- *Major spare parts.*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Aset tetap (lanjutan)

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah dan hak atas tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain termasuk aset yang ditransfer ke aset tidak digunakan dalam operasi; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Aset tetap, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Property, plant and equipment *(continued)*

The classes of asset above, are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land and land rights are not depreciated. The valuation of those assets is performed by external independent valuers that are registered with the Financial Services Authority ("FSA"). The valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Assets that do not change significantly in fair value must be re-evaluated at least every 3 (three) years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use a revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income including the assets that are transferred to assets not used in operations; all other decreases are charged to profit or loss.

Property, plant and equipment are depreciated to their residual values using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 - 50	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	40	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	*Motor vehicles*
Material cadang utama	20 - 40	*Major spare parts*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/21 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Aset tetap (lanjutan)

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 3.h).

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan dihapuskan dan aset tetap yang sedang diperbaiki. Aset tetap ini disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Property, plant and equipment *(continued)*

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 3.h).

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs that are incurred in order to add, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognised as assets if and only if it is probable that the future economic benefits that are associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

For property, plant and equipment that can no longer be utilised or sold, the carrying amounts are eliminated from the group of property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be disposed of and property, plant and equipment that will be repaired. These assets are depreciated using the straight-line method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

Construction in progress represents the costs that are directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, the depreciation of property, plant and equipment that is used in the construction and the cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during the commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill*, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

i. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment losses for assets other than goodwill would be recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised as the date of which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

i. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is classified as an operating lease.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/23 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

Pendapatan sewa dari operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pesewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 3 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:
- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Leases *(continued)*

The Group as a lessor *(continued)*

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial statements based on their nature.

The Group as a lessee

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and an assessment of whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment, for which the rental contracts are typically made for fixed periods of 1 to 3 years but they may have extension options. Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:
- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;*
- *variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and*
- *penalty payments for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Grup:
- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:
- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:
- *where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;*
- *uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, which does not have recent third-party financing; and*
- *makes adjustments specific to the lease, e.g. term, country, currency and security.*

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:
- *the amount of the initial measurement of the lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *any initial direct costs; and*
- *restoration costs.*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/25 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 3.h).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Grup menyajikan aset hak guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Opsi perpanjangan dan terminasi

Opsi perpanjangan dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Modifikasi sewa

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying assets's useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 3.h).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

The Group presents right-of-use assets as part of "Property, plant and equipment" in the consolidated statement of financial position.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of the extension and termination options that are held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Residual value guarantees

To optimise lease costs during the contract period, the Group sometimes provides residual value guarantees in relation to equipment leases.

Lease modification

A lessee shall account for a lease modification as a separate lease if both:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

j. Biaya pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Leases *(continued)*

Lease modification (continued)

- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification a lessee shall:

- *allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease; and*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the remeasurement of the lease liability by:

- *decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease.*
- *making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

j. Borrowing costs

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/27 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Biaya pinjaman

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, dialui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (*debt for equity swap*), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

k. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah dan hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

j. Borrowing costs

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognised in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Loans are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer payment of the liability for at least 12 months after the reporting date.

k. Investment properties

Investment properties are properties (land and land rights or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi diakui sebagai aset jika, dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan seta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan (pada tanggal penerima mendapatkan kontrol) atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Dalam menentukan nilai pertimbangan dari pelepasan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari variabel pertimbangan, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, dan pertimbangan utang ke pembeli (jika ada).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Investment properties *(continued)*

Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprising its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group chooses to use the fair value model and measure all of its investment properties at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognised in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on an annual valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property, the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/29 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Properti investasi (lanjutan)

Pengalihan dilaksanakan ke (atau dari) properti investasi hanya ketika adanya perubahan pemakaian. Untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang ditempati pemilik, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan pemakaian tersebut. Jika properti yang ditempati pemilik menjadi properti investasi, Grup mengakui properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum pada aset tetap sampai tanggal perubahan pemakaian.

l. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

n. Persediaan

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban pemeliharaan pada periode digunakan.

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Investment properties *(continued)*

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

l. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

m. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

n. Inventories

Spare parts, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow-moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow-moving inventory is determined on the basis of estimated future usage. Supplies of maintenance materials are charged to maintenance costs in the period in which they are used.

o. Revenue and expense recognition

Revenue recognition

Revenue recognition has to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin; dan
v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- Pada waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue recognition *(continued)*

i. Identify contract(s) with a customer;
ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

iii. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer. If the consideration that is promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period;

iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling prices are estimated based on expected cost plus margin; and

v. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised good or service to the customer (which is when the customer obtains control of that good or those services).

A performance obligation may be satisfied at the following:
- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/31 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Dalam hal kontrak harga tetap, pelanggan membayar jumlah tetap berdasarkan jadwal pembayaran. Jika jasa yang diberikan oleh Grup melebihi pembayaran, maka aset kontrak diakui. Jika pembayaran melebihi jasa yang diberikan, liabilitas kontrak diakui.

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PLN dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu ketika listrik dikonsumsi oleh PLN.

Pendapatan listrik termasuk estimasi nilai listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan dari tanggal pembacaan meter terakhir mereka dan periode pelaporan. Pendapatan yang belum ditagih yang masih harus dibayar diakui sebagai aset kontrak dan dicadangkan pada bulan berikutnya ketika penagihan aktual terjadi. Pendapatan diakui berdasarkan jasa aktual yang diberikan sampai akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total jasa yang akan diberikan karena pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaatnya secara bersamaan.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jasa lainnya

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu hanya jika Grup dapat mengukur dengan andal atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, Grup mungkin tidak dapat mengukur hasil atas kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Grup berekspektasi untuk memulihkan biaya yang timbul dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Grup mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang timbul sampai saat yang dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Revenue and expense recognition *(continued)*

Revenue recognition *(continued)*

In the case of fixed-price contracts, the customer pays the fixed amount based on a payment schedule. If the services rendered by the Group exceed the payment, a contract asset is recognised. If the payments exceed the services rendered, a contract liability is recognised.

Sales of electricity

Revenue from sales of electricity is recognised based on electricity usage (kWh) to PLN using the tariff formula stipulated in the power purchase agreements. The tariff formula includes the calculation of the capacity component, the fixed cost for operations and maintenance components, the fuel costs, power supply levels and other variables.

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time when electricity is consumed by PLN.

Electricity revenue includes an estimated value of the electricity consumed by customer from the date of their last meter reading and the reporting period. Accrued unbilled revenues recognised as contract assets and are reserved in the following month when actual biiling occurs. Revenue is recognised based on the actual service provided to the end of the reporting period as a proportion of the total services to be provided because the customers receive and consume the benefits simultaneously.

Rendering of services on maintenance and operation, power plant construction and other services

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time only if the Group can reasonably measure its progress towards the complete satisfaction of the performance obligation. In some circumstances, the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs that have been incurred in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the Group recognises revenue only to the extent of the costs that have been incurred until such a time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jasa lainnya (lanjutan)

Pendapatan jasa diakui atas dasar pekerjaan yang diselesaikan dalam sepanjang waktu pada saat jasa tersebut diberikan kepada pelanggan.

Komponen pembiayaan

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

p. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Revenue and expense recognition *(continued)*

Rendering of services on maintenance and operation, power plant construction and other services (continued)

Revenue from services is recognised on the basis of the work that is completed over time as the services are rendered to the customers.

Financing component

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and the payment by the customer exceeds one year. As a consequence, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Expense recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

p. Employee benefits

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/33 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") (sebelum 1 Januari 2021: Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU Ketenagakerjaan")) atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

Sehubungan dengan program manfaat pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Employee benefits *(continued)*

Post-employment benefits (continued)

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Law No. 11/2020 on Job Creation (the "Job Creation Law") (before 1 January 2021: Labour Law No. 13/2003 (the "Labour Law")), or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Job Creation Law or Labour Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Job Creation Law or Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position with respect to the defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of the plan's assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment awards.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the statement of other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in retained earnings.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada Perjanjian Kerja Bersama.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun terus menerus. Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris bagi karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun tidak. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Employee benefits *(continued)*

Post-employment benefits (continued)

For defined contribution plans, the Group pays contributions to public or private pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in the future payments is available.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit and loyalty benefit. The benefits that are paid are based on the Collective Labour Agreement.

Long leave allowance is given to employees who have worked for at least 6 years continuosly. Disability benefit is provided to employees who have a work accident. Death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident. Loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 16 years continuously.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The long-term employee benefits liabilities that are recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" that involve the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees who are expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/35 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

q. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi diukur pada nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi.

r. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

q. Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The provision is measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liabilities. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognised when, and only when, it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognised for the reimbursement shall not exceed the amount of the provision.

r. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year of the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income that is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue that is recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and that are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/37 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Pajak penghasilan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak dari investasi pada operasi asing ketika perusahaan bisa mengontrol periode pengembalian dari perbedaan temporer dan ada kemungkinan bahwa perbedaan itu tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

t. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Income tax *(continued)*

Deferred tax liabilities and assets are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in foreign operations where the company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

t. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group as reported in future years.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau Grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use and the right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

In determining the lease term, the Group considers all the facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the Group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/39 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Kepentingan dalam pengaturan bersama (lanjutan)

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  - persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  - fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 8).

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical judgements in applying accounting policies *(continued)*

Interest in joint arrangements (continued)

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle;*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  - *the legal form of the separate vehicle;*
  - *the terms of the contractual arrangement; and*
  - *other facts and circumstances (when relevant).*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded final conclusions were that the arrangements are joint ventures (Note 8).

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian piutang, manajemen diharuskan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dalam membuat asumsi dan estimasi untuk memasukkan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi. Pertimbangan telah diterapkan dalam menentukan umur dan titik pengakuan awal piutang.

Tingkat penyisihan tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas akun. Dalam kasus ini, Grup menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk hubungan dengan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo dalam jumlah yang diharapkan dapat diterima. Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and the other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Provision for expected credit losses of trade receivables and other financial assets

In determining ECL, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but relationship with the customers credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in amounts that it expects to collect. These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/41 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup, ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang menggunakan model revaluasi

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan masing-masing dalam Catatan 6 dan 7.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Estimated useful lives of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant, and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Fair value of property, plant and equipment and investment properties that use revaluation model

Management, with the assistance of an independent valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use the revaluation model.

Details of the valuation approach and significant data inputs used in the revaluation of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 7, respectively.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Post-employment benefits

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and the expected remaining service periods of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions.

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/43 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi pajak dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Sewa - estimasi suku bunga pinjaman inkremental

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Income taxes (continued)

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

Leases - estimating the incremental borrowing rate

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need estimation in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining, the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki saham entitas anak, baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

5. SUBSIDIARIES

The Company has ownership interests directly or indirectly in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2021	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2020	Tahun operasi komersial/ *Start of commercial operations*	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2021	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2020
PT Pembangkitan Jawa Bali Services ("PJBS") dan entitas anaknya/ *and its subsidiaries*	Surabaya	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan/(pemasangan) peralatan ketenagalistrikan/ *Operation and maintenance of power plant and construction/ (installation) of electricity equipment*	98.00	98.00	2001	1,414,145	1,349,157

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Perusahaan memiliki saham entitas anak, baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: (lanjutan)

***5. SUBSIDIARIES** (continued)*

The Company has ownership interests directly or indirectly in the following subsidiaries: (continued)

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2021	2020	Tahun operasi komersial/ *Start of commercial operations*	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2021	2020
PT Mitra Karya Prima ("MKP") *)	Surabaya	Jasa/*Service*	92.00	92.00	2005	146,005	111,239
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkit Tenaga Listrik ("SKP") *)	Jakarta	Sertifikasi kompetensi tenaga teknik, konsultasi dibidang ketenagalistirikan/ *Certification competency technician, Consulation in power producer*	-	95.00	2015	-	9,175
PT Rekadaya Elektrika ("RE") dan entitas anaknya/ *and its subsidiary*	Jakarta	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan/ *Engineering, procurement and construction, and operations and maintenance in the electricity sector*	98.90	98.90	2004	1,437,002	1,825,304
PT Rekadaya Elektrika Consult ("REC") *)	Jakarta	Supervisi dan konsultasi/ *Supervision and consultation*	99.80	99.80	2010	123,025	174,086
PT Navigat Innovative Indonesia ("NII")	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ *Trade, construction, mining and agriculture*	72.97	72.97	2002	394,773	321,644
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi ("PJBI") dan entitas anaknya/ *and its subsidiary*	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan/ *Investment in electricity*	100.00	100.00	2015	6,428,282	5,376,096
PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo ("PJB Investindo") *) dan entitas anaknya/ *and its subsidiary*	Jakarta	Penempatan investasi di pengadaan listrik/ *Investments in electricity procurement*	100.00	100.00	2020	117,840	23,759
PT Pembangkitan Jawa Baskara Investasi Cirata ("PJBIC") *)	Jakarta	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal/ *Financing through equity participation*	100.00	100.00	2020	123,100	23,750
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLNSC")	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjiniring, rantai pasokan, dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan/ *Operation and services trading, engineering, supply chain, consultation in the electricity sector*	51.00	51.00	2018	298,601	426,370

*) Pemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*

Pada tahun 2020, PJBI, entitas anak, mendirikan PJB Investindo dengan penyertaan saham sebesar AS$1.646.000 (setara dengan Rp23.867) yang merupakan 100,00% kepemilikan saham di PJB Investindo.

In 2020, PJBI, a subsidiary, established PJB Investindo with share ownership amounted to US$1,646,000 (equivalent Rp23,867) equivalent to 100.00% share ownership in PJB Investindo.

Pada tahun 2020, PJB Investindo, entitas anak PJBI, mendirikan PJBIC dengan penyertaan saham sebesar AS$1.646.000 (setara dengan Rp23.867) yang merupakan 100,00% kepemilikan saham di PJBIC.

In 2020, PJB Investindo, a subsidiary of PJBI, established PJBIC with share ownership amounted to US$1,646,000 (equivalent Rp23,867) equivalent to 100.00% share ownership in PJBIC.

Efektif pada tanggal 20 Desember 2021, sesuai dengan Akta Notaris No. 7 dari Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si., Notaris di Surabaya, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham untuk menjual saham SKP ke Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali, dimana Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham SKP atau setara dengan 95% kepemilikan atas SKP dengan nilai pengalihan sebesar Rp9.785. Nilai buku bersih SKP untuk porsi kepemilikan Perusahaan adalah sebesar Rp6.158. Keuntungan dari penjualan saham sebesar Rp3.627 disajikan sebagai bagian dari penghasilan/(beban) lain-lain - bersih dalam dalam laporan laba rugi konsolidasian Grup.

Effective on 20 December 2021, in accordance with Notarial Deed No. 7 of Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si., Notary in Surabaya, the Company entered into a share sale and purchase agreement to sell shares of SKP to Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali, under which the Company sold all shares or equivalent to 95% ownership of SKP with a total transaction value of Rp9,785. The net book value of the Company's ownership portion in SKP was Rp6,158. The gain on sales of investment amounted to Rp3,627 is presented as part of other income/(expenses) - net in the Group's consolidated statements of profit or loss.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/45 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Pada tahun 2021, PJBI, entitas anak, melakukan penambahan penyetoran modal sebesar Rp66.290 sehingga nilai penyertaan pada PJB Investindo menjadi Rp85.013.

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan penambahan penyetoran modal sebesar Rp181.092 sehingga nilai penyertaan pada PJBI menjadi Rp6.038.048.

***5. SUBSIDIARIES** (continued)*

In 2021, PJBI, a subsidiary, made additional investments amounting to Rp66,290 thus the investment amount in PJB Investindo changed into Rp85,013.

In 2021, the Company made additional investments amounting to Rp181,092, therefore, the carrying amount of investments in PJBI amounting to Rp6,038,048.

6. ASET TETAP / ***6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT***

	2021						
	1 Januari/ *January* 2021	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih penilaian kembali/ *Difference arising on revaluation*	31 Desember/ *December* 2021	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Tanah dan hak atas tanah	17,293,303	-	-	(846)	(241,648)	17,050,809	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	8,823,787	18,646	-	(4,372)	(938,862)	7,899,199	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	98,559,855	77,812	-	312,040	(10,968,464)	87,981,243	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	5,001,339	26,291	-	369	(740,326)	4,287,673	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	9,938	-	-	(455)	(3,575)	5,908	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	1,104,908	101,342	-	61,556	-	1,267,806	*General equipment*
Kendaraan bermotor	151,205	11,627	-	1,519	-	164,351	*Motor vehicles*
Material cadang utama	21,654	-	-	(230)	(635)	20,789	*Major spare parts*
Sub-jumlah	130,965,989	235,718	-	369,581	(12,893,510)	118,677,778	*Sub-total*
Aset hak guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	9,983	7,813	(8,683)	-	-	9,113	*Buildings*
Peralatan	1,061	-	(845)	-	-	216	*General equipment*
Kendaraan	93,656	37,178	(13,952)	-	-	116,882	*Motor vehicles*
Sub-jumlah	104,700	44,991	(23,480)	-	-	126,211	*Sub-total*
Aset dalam pembangunan	4,996,372	858,083	-	(477,210)	-	5,377,245	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,927,399	13,537	-	73,837	(111,673)	1,903,100	*Assets not used in operations*
Jumlah	137,994,460	1,152,329	(23,480)	(33,792)	(13,005,183)	126,084,334	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	1,075,833	198,954	-	(686)	(1,274,101)	-	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	5,367,111	2,731,203	-	(30,174)	(8,068,140)	-	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	268,042	136,620	-	(12)	(404,650)	-	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	2,484	1,347	-	(74)	(3,757)	-	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	848,971	122,602	-	(743)	-	970,830	*General equipment*
Kendaraan bermotor	97,884	10,404	-	13,313	-	121,601	*Motor vehicles*
Material cadang utama	256	1,055	-	(15)	(1,296)	-	*Major spare parts*
Sub-jumlah	7,660,581	3,202,185	-	(18,391)	(9,751,944)	1,092,431	*Sub-total*
Aset hak guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	5,562	6,439	(8,683)	-	-	3,318	*Buildings*
Peralatan	116	146	(127)	-	-	135	*General equipment*
Kendaraan	33,689	44,374	(10,687)	-	-	67,376	*Motor vehicles*
Sub-jumlah	39,367	50,959	(19,497)	-	-	70,829	*Sub-total*
Aset tidak digunakan dalam operasi	765,358	115,033	-	(9,047)	(111,673)	759,671	*Assets not used in operations*
Jumlah	8,465,306	3,368,177	(19,497)	(27,438)	(9,863,617)	1,922,931	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	(5,309)	-	-	-	(4,826)	(10,135)	*Provision for impairment losses*
Jumlah tercatat	**129,523,845**					**124,151,268**	***Net carrying value***

6. ASET TETAP (lanjutan) / *6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

	2020						
	1 Januari/ *January* 2020	Penyesuaian sehubungan penerapan PSAK No. 73/ *Adjustment upon implementation of SFAS No. 73*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	31 Desember/ *December* 2020	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Tanah dan hak atas tanah	17,301,257	-	-	-	(7,954)	17,293,303	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	8,802,049	-	10,532	-	11,206	8,823,787	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	97,879,451	-	105,634	-	574,770	98,559,855	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	4,972,815	-	27,413	-	1,111	5,001,339	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	9,738	-	200	-	-	9,938	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	1,015,229	-	81,643	-	8,036	1,104,908	*General equipment*
Kendaraan bermotor	139,250	-	9,831	-	2,124	151,205	*Motor vehicles*
Material cadang utama	2,593	-	12,637	-	6,424	21,654	*Major spare parts*
Sub-jumlah	130,122,382	-	247,890	-	595,717	130,965,989	*Sub-total*
Aset hak guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	-	9,983	-	-	-	9,983	*Buildings*
Peralatan	-	500	561	-	-	1,061	*General equipment*
Kendaraan	-	46,692	46,964	-	-	93,656	*Motor vehicles*
Sub-jumlah	-	57,175	47,525	-	-	104,700	*Sub-total*
Aset dalam pembangunan	4,067,978	-	1,536,704	-	(608,310)	4,996,372	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,922,215	-	-	-	5,184	1,927,399	*Assets not used in operations*
Jumlah	136,112,575	57,175	1,832,119	-	(7,409)	137,994,460	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct acquisition*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	803,643	-	272,190	-	-	1,075,833	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	2,651,529	-	2,715,661	-	(79)	5,367,111	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	132,937	-	135,105	-	-	268,042	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	1,353	-	1,131	-	-	2,484	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	747,425	-	104,556	-	(3,010)	848,971	*General equipment*
Kendaraan bermotor	88,667	-	9,217	-	-	97,884	*Motor vehicles*
Material cadang utama	70	-	186	-	-	256	*Major spare parts*
Sub-jumlah	4,425,624	-	3,238,046	-	(3,089)	7,660,581	*Sub-total*
Aset hak guna							*Right-of-use assets*
Bangunan	-	-	5,562	-	-	5,562	*Buildings*
Peralatan	-	-	116	-	-	116	*General equipment*
Kendaraan	-	-	33,689	-	-	33,689	*Motor vehicles*
Sub-jumlah	-	-	39,367	-	-	39,367	*Sub-total*
Aset tidak digunakan dalam operasi	725,513	-	36,756	-	3,089	765,358	*Assets not used in operations*
Jumlah	5,151,137	-	3,314,169	-	-	8,465,306	*Total*
Penyisihan penurunan nilai	(5,309)	-	-	-	-	(5,309)	*Provision for impairment losses*
Jumlah tercatat	**130,956,129**					**129,523,845**	***Net carrying value***

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/47 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2021	2020	
Beban usaha	3,253,144	3,277,413	*Operating expenses*
Beban lain-lain	115,033	36,756	*Other expenses*
Jumlah	**3,368,177**	**3,314,169**	***Total***

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu, sedangkan HGB akan jatuh tempo antara tahun 2022 sampai dengan 2044, tetapi dapat diperpanjang oleh Grup. Grup juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Grup.

The Group owns several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date, while HGB will expire from 2022 to 2044, but they are renewable by the Group. The Group also has several pieces of land rights, that are still in the extension process and in the process of transfer of certificates to the name of the Group.

Aset tetap, kecuali tanah dan kendaraan bermotor, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya (termasuk *machinery breakdown*) kepada PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") dan PT Asuransi Perisai Listrik Nasional ("APLN"), dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS$2.900 juta dan Rp89.905 pada 31 Desember 2021. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kerugian aset.

The property, plant and equipment, except land and motor vehicles, has been insured against fire and other possible risks (including machinery breakdown) with PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") and PT Asuransi Perisai Listrik Nasional ("APLN"), with the coverage amounting to US$2,900 million and Rp89,905 at 31 December 2021. Management believes that the sum insured is adequate to cover the possible losses on the assets.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing sebesar Rp646.080 dan Rp846.779.

As at 31 December 2021 and 2020, the gross carrying amount of property, plant and equipment that had been fully depreciated but was still in used amounted to Rp646,080 and Rp846,779, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") dalam laporan No. 00113/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin usaha No. 2.09.0012 dan OJK.

On 31 December 2021, the Group performed a revaluation of the fair value of its property, plant, and equipment which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") in report No. 00113/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 dated 30 March 2022, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit No. 2.09.0012 and FSA.

6. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hirarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68 berdasarkan valuasi tanggal 31 Desember 2021. Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

The table below analyses the fixed assets that have been recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 68 based on valuation as at 31 December 2021. The different levels of fair value are defined as follows:

	Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2021 menggunakan/ *Fair value measurements as at 31 December 2021 using*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Jumlah/ *Total*	
Tanah dan hak atas tanah	-	980,619	16,070,190	17,050,809	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	564,134	7,335,065	7,899,199	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	87,981,243	87,981,243	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan penyaluran	-	-	4,282,848	4,282,848	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	-	5,907	5,907	*Telecommunications and data processing equipment*
Material cadang utama	-	-	20,789	20,789	*Major spare parts*
Jumlah	**-**	**1,544,753**	**115,696,042**	**117,240,795**	***Total***

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- Input selain harga yang kuotasian dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

There were no fixed assets which could be classified at Level 1 fair value.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

There were no transfers between Levels 1 and 2 during the year.

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dan hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan tergantung dari kondisi tertentu, sedangkan untuk bangunan umum, instalasi dan mesin pembangkitan, serta gardu induk menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pasar yaitu antara lain:

The Level 2 fair value of land and land rights is calculated using the market approach and income approach depends on certain circumstances, building, installation and power plant, and substation value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of among others:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
f. Tingkat depresiasi;
g. Biaya operasional;
h. Keuntungan pengembang; dan
i. Indeks Kemahalan Konstruksi.

a. Sale or rental price per square meter;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount and capitalisation rate;
e. Replacement cost new per square meter;
f. Depreciation rate;
g. Operasional expense;
h. Developer margin; and
i. Construction Cost Index.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/49 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

Reconciliation of the beginning balances to the closing balances of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follow:

	1 Januari/ *January* 2021	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Jumlah yang diakui dalam laba rugi/ *Amounts to be recognised in profit or loss*		Penghasilan/ (kerugian) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain/ *Gains/(losses) recognised in other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2021	
				Depresiasi/ *Depreciation*	Penurunan nilai/ *Impairment*			
Tanah dan hak atas tanah	16,198,463	-	661	-	-	(128,934)	16,070,190	*Land and land rights*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	7,244,567	5,972	-	(172,910)	-	257,436	7,335,065	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	93,192,744	77,812	342,214	(2,731,203)	-	(2,900,324)	87,981,243	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan penyaluran	4,733,297	26,291	381	(136,620)	(4,825)	(335,676)	4,282,848	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	7,454	-	(381)	(1,347)	(1)	182	5,907	*Telecommunications and data processing equipment*
Material cadang utama	21,398	-	(215)	(1,055)	-	661	20,789	*Major spare parts*
Jumlah	**121,397,923**	**110,075**	**342,660**	**(3,043,135)**	**(4,826)**	**(3,106,655)**	**115,696,042**	***Total***

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, gardu listrik dan lainnya.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants, transmission and distribution networks, substations and others.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3) adalah sebagai berikut:

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2021/ *Fair value as at 31 December 2021*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable inputs*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable inputs*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Tanah						***Land***
Tanah kantor dan pembangkit	16,070,190	Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan lahan/ *The income approach with the land development method*	-Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	60% - 80%*	-Semakin tinggi koefisien luas bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher KLB, the higher fair value*	*Office and power plant land*
			-Data luas dan aspek legal/ *Land area and legal aspects*	-	-Tanah bersertifikat akan memiliki nilai wajar lebih tinggi/ *Certified land will have higher fair value*	
			-Perubahan peruntukan/ *Zoning changes*	-	-Peruntukan tanah sekitar mengindikasikan nilai wajar yang lebih tinggi/ *Zoning of neighboring land might have higher fair value*	

6. ASET TETAP (lanjutan)

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Level 3) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows: (continued)

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2021/ *Fair value as at 31 December 2021*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable inputs*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable inputs*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Bangunan						***Buildings***
Bangunan umum	1,100,571	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	0.45 - 5.46	-Semakin besar indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*General buildings*
			-Volume bangunan/ *Building volumes*	60% - 70%*	-Semakin besar volume maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher building volumes, the higher fair value*	
Waduk dan prasarana	6,210,770	Trending/ *Trending*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	1.00 - 2.27	-Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*Reservoir and infrastructure*
Jalan dan sepur samping	23,724	Trending/ *Trending*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	1.00 - 2.35	-Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*Road and rail side*
Instalasi dan mesin pembangkit	87,981,243	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat kemunduran fungsional/ *Functional obsolescence rate*	1% - 30%	-Semakin besar tingkat kemunduran fungsional maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher functional obsolescence rate, the lower fair value*	***Installation and power plants***
			-Tingkat kemunduran ekonomis/ *Economical obsolescence rate*	1% - 3%	-Semakin besar tingkat kemunduran ekonomis maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher economical obsolescence rate, the lower fair value*	
			-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 2.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	
Perlengkapan transmisi dan distribusi	4,282,848	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Transmissions and distribution equipment***
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	5,907	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.01 - 1.02	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Telecommunications and data processing***
Material cadang utama	20,789	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Major spare parts***

*) kisaran bobot dari input yang tidak dapat diobservasi/*the range of weights of the unobservable input*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/51 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Surplus revaluasi, dikurangi dengan pajak penghasilan tangguhan terkait, telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset tetap pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Selain yang menggunakan model revaluasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Pergerakan surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Saldo awal tahun	125,731,065	125,737,981	*Balance at beginning of year*
Revaluasi aset tetap	(3,141,566)	-	*Revaluation of property, plant and equipment*
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba atas aset tetap yang dihapuskan	(12,455)	(6,916)	*Reclassification on revaluation surplus from disposals of property, plant and equipment*
Sub-jumlah	(3,154,021)	(6,916)	*Sub-total*
Manfaat pajak terkait	691,144	-	*Related income tax benefit*
Saldo akhir tahun	**123,268,188**	**125,731,065**	***Balance at end of year***

Jika Grup tidak menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp19.653.043 dan Rp21.237.317.

Aset dalam pembangunan

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/ perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

	2021	2020	
Pembangkit tenaga listrik			*Power plants*
Tenaga gas uap ("PLTGU")	5,237,478	4,871,371	*Steam gas power plant ("PLTGU")*
Tenaga uap ("PLTU")	62,517	93,724	*Steam power plant ("PLTU")*
Tenaga gas ("PLTG")	24,853	24,786	*Gas power plant ("PLTG")*
Tenaga surya ("PLTS")	24,436	-	*Solar power plant ("PLTS")*
Tenaga air ("PLTA")	14,643	2,785	*Hydro power plant ("PLTA")*
Fungsi pendukung	13,318	3,706	*Supporting function*
Jumlah	**5,377,245**	**4,996,372**	***Total***

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT *(continued)*

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes, were credited to other comprehensive income and are presented in property, plant, and equipment revaluations surplus in the consolidated statements of changes in equity.

There is no significant difference between the fair value and the carrying value of the property, plant, and equipment other than the assets that have applied the revaluation model.

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus are as follows:

If the Group did not apply the revaluation model, the net carrying value of the property, plant and equipment as at 31 December 2021 and 2020 would have amounted to Rp19,653,043 and Rp21,237,317, respectively.

Construction in progress

This account represents the costs that have been incurred in relation to the construction and renovation/repairs of power supply facilities, as follows:

6. ASET TETAP (lanjutan) / *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah tercatat aset dalam pembangunan Grup adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2021 and 2020, the carrying amount of the Group's construction in progress was as follows:

Nama Proyek/*Project Name*	Nilai/*Amount* 2021	2020
Proyek/*Project add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4	5,101,227	4,506,651
Lainnya/*Others*	276,018	489,721
Jumlah/*Total*	**5,377,245**	**4,996,372**

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sebesar Rp33.997 dan Rp56.781.

As at 31 December 2021 and 2020, the borrowing costs that were capitalised to construction in progress were Rp33,997 and Rp56,781, respectively.

Aset tidak digunakan dalam operasi

Assets not used in operations

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang yang sementara belum digunakan dalam operasi dan aset tetap akan diperbaiki.

Assets not used in operations comprised property, plant and equipment temporarily not in use in operations, and those to be repaired.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap secara siginifikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Based on management's assessment, there were no events or changes in circumstances that may significantly impair the value of the property, plant and equipment as at 31 December 2021 and 2020.

7. PROPERTI INVESTASI / *INVESTMENT PROPERTIES*

	2021					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan nilai wajar/ *Change in fair value*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pemilikan langsung Tanah dan bangunan	1,540,756	(86,511)	-	6,354	1,460,599	*Direct acquisition* *Land and buildings*

	2020					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan nilai wajar/ *Change in fair value*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pemilikan langsung Tanah dan bangunan	1,493,375	39,972	-	7,409	1,540,756	*Direct acquisition* *Land and buildings*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/53 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Properti investasi merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cipeundeuy - Bandung Barat dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 32 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited dan PT Bajradaya Sentranusa.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh KJPP RHR dalam laporan No. 00113/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan No. 00155/2.0027-00/PI/02/0196/1/IV/2021 tanggal 12 April 2021, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai Tingkat 2 dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:
a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto;
e. Biaya operasional; dan
f. Keuntungan pengembang.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, tanah dan aset tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Grup juga mencatat perubahan nilai wajar yang disajikan sebagai bagian dari beban lain-lain-bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2021 dan 2020.

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

***7. INVESTMENT PROPERTIES** (continued)*

Investment properties pertain to pieces of land that are owned by the Company located in Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Cipeundeuy - West Bandung and Asahan - North Sumatera with HGB for periods between 32 to 40 years, which will be expired in 2032, which are leased to PT PLN (Persero), PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cirata Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited and PT Bajradaya Sentranusa.

As at 31 December 2021 and 2020, the Company performed a revaluation of the fair value of its investment properties which was performed by KJPP RHR in report No. 00113/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 dated 30 March 2022 and Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun and Partners in the report No. 00155/2.0027-00/PI/02/0196/1/IV/2021 dated 12 April 2021, independent valuers registered with the Ministry of Finance and FSA.

The fair values of the investment properties are within Level 2 of the fair value hierarchy.

The Level 2 fair value of the land is calculated using the market approach and the income approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of:
a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount rate;
e. Operational expense; and
f. Developer margin.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land and land rights and other comparison elements.

The Group also recorded the changes in fair value were presented as part of other expenses - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended 31 December 2021 and 2020.

Based on management's assessment, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of the investment properties as at 31 December 2021 and 2020.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA / *8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES*

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details of the investments in associates and joint ventures are as follows:

Nama entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Name of associates and joint ventures*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Awal operasi komersial/ *Start of commercial operations*	Persentase penyertaan/ *Percentage of ownership* 2021	2020
Investasi pada entitas asosiasi/ *Investments in associates*					
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Cilacap	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam gas electricity power plant*	2006	49.00	49.00
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam gas electricity power plant*	2018	10.00	10.00
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali ("SS Pewali")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam gas electricity power plant*	*)	10.00	10.00
Investasi pada ventura bersama/ *Investments in joint ventures*					
PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN")	Asahan	Pembangkit listrik tenaga air/ *Hydro electricity power plant*	2011	36.61	36.61
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Palembang	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam gas electricity power plant*	2015	40.25	40.25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("KPJB")	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2010	49.00	49.00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap/ *Steam gas electricity power plant*	2019	30.00	30.00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali ("GTPJB")	Jakarta	Operasi dan pemeliharaan/ *Operational and maintenance*	2019	30.00	30.00
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy ("PMSE")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya/ *Solar electricity power plant*	*)	51.00	51.00
PT North Sumatera Hydro Energy ("NSHE")	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga air/ *Hydro electricity power plant*	*)	25.00	25.00

*) Dalam tahap pengembangan/*Under development stage*

Pergerakan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The movements in the investments in associates and joint ventures are as follows:

	2021						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2021/ *Carrying amount 1 January 2021*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi)/ *Share in net profit/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share in other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2021/ *Carrying amount 31 December 2021*	
Entitas asosiasi							***Associates***
S2P	3,640,270	-	(229,042)	1,781,443	-	5,192,671	*S2P*
RDM	61,384	-	-	(6,887)	-	54,497	*RDM*
SS Pewali	25,491	-	-	14	-	25,505	*SS Pewali*
Sub-jumlah	**3,727,145**	**-**	**(229,042)**	**1,774,570**	**-**	**5,272,673**	***Sub-total***
Ventura bersama							***Joint ventures***
BDSN	874,060	-	(74,268)	99,293	37,880	936,965	*BDSN*
BPI	1,373,266	-	-	65,169	63,992	1,502,427	*BPI*
KPJB	60,295	-	(6,441)	5,633	-	59,487	*KPJB*
SGPJB	2,589,526	-	-	662,539	58,278	3,310,343	*SGPJB*
GTPJB	2,474	-	-	296	(44)	2,726	*GTPJB*
PMSE	23,741	56,740	-	(10,520)	(720)	69,241	*PMSE*
NSHE	1,094,049	35,858	-	271,331	(164,254)	1,236,984	*NSHE*
Sub-jumlah	**6,017,411**	**92,598**	**(80,709)**	**1,093,741**	**(4,868)**	**7,118,173**	***Sub-total***
Jumlah	**9,744,556**	**92,598**	**(309,751)**	**2,868,311**	**(4,868)**	**12,390,846**	***Total***

	2020						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2020/ *Carrying amount 1 January 2020*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi)/ *Share in net profit/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share in other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2020/ *Carrying amount 31 December 2020*	
Entitas asosiasi							***Associates***
S2P	2,632,008	-	(203,776)	1,212,038	-	3,640,270	*S2P*
RDM	58,704	-	-	2,680	-	61,384	*RDM*
SS Pewali	26,291	-	-	(800)	-	25,491	*SS Pewali*
Sub-jumlah	**2,717,003**	**-**	**(203,776)**	**1,213,918**	**-**	**3,727,145**	***Sub-total***

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/55 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

8. *INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)*

Pergerakan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in the investments in associates and joint ventures are as follows: (continued)

	2020						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2020/ *Carrying amount 1 January 2020*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi)/ *Share in net profit/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share in other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2020/ *Carrying amount 31 December 2020*	
Ventura bersama							***Joint ventures***
BDSN	794,887	-	(99,570)	138,275	40,468	874,060	*BDSN*
BPI	1,282,000	-	-	44,025	47,241	1,373,266	*BPI*
KPJB	33,481	-	-	26,814	-	60,295	*KPJB*
SGPJB	2,041,733	-	-	528,740	19,053	2,589,526	*SGPJB*
GTPJB	1,945	-	-	287	242	2,474	*GTPJB*
PMSE	-	23,778	-	3	(40)	23,741	*PMSE*
NSHE	1,009,527	-	-	445	84,077	1,094,049	*NSHE*
Sub-jumlah	**5,163,573**	**23,778**	**(99,570)**	**738,589**	**191,041**	**6,017,411**	***Sub-total***
Jumlah	**7,880,576**	**23,778**	**(303,346)**	**1,952,507**	**191,041**	**9,744,556**	***Total***

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As at 31 December 2021 and 2020, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investments in associates and joint ventures.

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

The following tables contain the summarised financial information for the associates and joint ventures as at 31 December 2021 and 2020, that have been accounted for using the equity method:

Entitas asosiasi

Associates

	31 Desember/*December 2021*				
	S2P	RDM	SS Pewali	Total	
Kas dan setara kas	1,139,399	797	1,058,385	2,198,581	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	3,024,301	284,865	30	3,309,196	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	4,163,700	285,662	1,058,415	5,507,777	*Total current assets*
Utang usaha	1,246,735	97,749	-	1,344,484	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	5,077,251	167,058	38	5,244,347	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	6,323,986	264,807	38	6,588,831	*Total current liabilities*
Aset tidak lancar	29,863,035	1,425,822	119,718	31,408,575	*Non-current assets*
Liabilitas keuangan	9,424,681	872,117	923,043	11,219,841	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	6,558,646	36,933	-	6,595,579	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	15,983,327	909,050	923,043	17,815,420	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	11,719,422	537,627	255,052	12,512,101	*Net assets*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	5,742,517	53,763	25,505	5,821,785	*The Group's share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	(549,846)	734	-	(549,112)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**5,192,671**	**54,497**	**25,505**	**5,272,673**	***Total carrying value***

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)*

Entitas asosiasi (lanjutan) / ***Associates** (continued)*

	31 Desember/*December 2021*				
	S2P	RDM	SS Pewali	Total	
Pendapatan	11,645,263	272,200	-	11,917,463	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(5,775,285)	(236,981)	-	(6,012,266)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(207,503)	-	-	(207,503)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	7,322	68	1,048	8,438	*Finance income*
Beban keuangan	(999,357)	(46,031)	(9)	(1,045,397)	*Finance costs*
Beban operasi	(1,960,675)	(13,954)	(4,251)	(1,978,880)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	1,287,830	(52,084)	3,356	1,239,102	*Other income/(expenses)-net*
Beban pajak penghasilan	(361,997)	7,909	-	(354,088)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	3,635,598	(68,873)	144	3,566,869	*Profit for the year*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih asosiasi tahun berjalan	**1,781,443**	**(6,887)**	**14**	**1,774,570**	***The Group's share in net profit for the year of associates***
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	*Other comprehensive income*
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya asosiasi	-	-	-	-	***The Group's share of other comprehensive income of associates***
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	**(229,042)**	-	-	**(229,042)**	***Dividends received from associates***

	31 Desember/*December 2020*				
	S2P	RDM	SS Pewali	Total	
Kas dan setara kas	2,234,735	4,639	1,053,302	3,292,676	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	2,694,706	284,476	23	2,979,205	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	4,929,441	289,115	1,053,325	6,271,881	*Total current assets*
Utang usaha	(5,135,469)	(224,620)	-	(5,360,089)	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	(1,028,276)	(30,190)	(23)	(1,058,489)	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	(6,163,745)	(254,810)	(23)	(6,418,578)	*Total current liabilities*
Aset tidak lancar	29,615,216	1,455,140	85,971	31,156,327	*Non-current assets*
Liabilitas keuangan	(9,330,123)	(749,268)	(883,505)	(10,962,896)	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	(9,064,708)	(50,368)	-	(9,115,076)	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	(18,394,831)	(799,636)	(883,505)	(20,077,972)	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	9,986,081	689,809	255,768	10,931,658	*Net assets*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	4,893,180	68,981	25,577	4,987,738	*The Group's share of the net assets of associates*
Penyesuaian metode ekuitas	(1,252,910)	(7,597)	(86)	(1,260,593)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**3,640,270**	**61,384**	**25,491**	**3,727,145**	***Total carrying value***
Pendapatan	12,379,726	290,865	-	12,670,591	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(5,364,159)	(210,260)	-	(5,574,419)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	(294,984)	-	-	(294,984)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	14,105	74	3,258	17,437	*Finance income*
Beban keuangan	(1,005,532)	(40,172)	(16)	(1,045,720)	*Finance costs*
Beban operasi	(2,226,030)	(10,288)	(4,714)	(2,241,032)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(258,140)	(3,419)	(6,528)	(268,087)	*Other income/(expenses)-net*
Beban pajak penghasilan	(771,439)	-	-	(771,439)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	2,473,547	26,800	(8,000)	2,492,347	*Profit for the year*
% kepemilikan	49.00%	10.00%	10.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih asosiasi tahun berjalan	**1,212,038**	**2,680**	**(800)**	**1,213,918**	***The Group's share in net profit for the year of associates***
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	*Other comprehensive income*
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya asosiasi	-	-	-	-	***The Group's share of other comprehensive income of associates***
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	**(203,776)**	-	-	**(203,776)**	***Dividends received from associates***

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/57 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)*

Ventura bersama / *Joint ventures*

	31 Desember/*December* 2021							
	BPI	KPJB	SGPJB	BDSN	NSHE	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	293,902	20,981	1,929,434	355,570	92,070	236,592	2,928,549	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	561,615	76,750	6,224,185	320,009	2,033	7,867	7,192,459	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	855,517	97,731	8,153,619	675,579	94,103	244,459	10,121,008	*Total current assets*
Utang usaha	769,800	2,941	19,442	60,560	-	2,723	855,466	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	647,454	17,318	4,245,300	453,895	614,308	44,179	6,022,454	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	1,417,254	20,259	4,264,742	514,455	614,308	46,902	6,877,920	*Total current liabilities*
Aset tidak lancar	4,657,167	53,479	24,039,202	5,437,068	5,841,849	390,546	40,419,311	*Non-current assets*
Liabilitas keuangan	-	-	15,650,358	1,872,532	-	434,991	17,957,881	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	539,072	11,207	1,243,255	942,450	373,710	3,996	3,113,690	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	539,072	11,207	16,893,613	2,814,982	373,710	438,987	21,071,571	*Total of non-current liabilities*
Aset bersih	3,556,358	119,744	11,034,466	2,783,210	4,947,934	149,116	22,590,828	*Net assets*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,431,434	58,675	3,310,340	1,018,933	1,236,984	74,141	7,130,507	*The Group's share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	70,993	812	3	(81,968)	-	(2,174)	(12,334)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**1,502,427**	**59,487**	**3,310,343**	**936,965**	**1,236,984**	**71,967**	**7,118,173**	***Carrying value***
Pendapatan	1,046,089	228,549	8,492,010	664,441	1,380,437	619,894	12,431,420	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(601,323)	(179,652)	(5,324,028)	(65,024)	(871,073)	(373,770)	(7,414,870)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	-	(6,610)	-	(855)	-	-	(7,465)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	1,464	1,141	330,615	158	2,514	109	336,001	*Finance income*
Beban keuangan	(34,199)	(322)	(687,586)	(182,674)	(81,235)	(19,998)	(1,006,014)	*Finance costs*
Beban operasi	(82,257)	(21,046)	(238,453)	-	(77,822)	(233,969)	(653,547)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(60,402)	(3,106)	(23,788)	3,095	867,339	(3,950)	779,188	*Other income/(expenses) - net*
Beban pajak penghasilan	(107,461)	(7,458)	(340,307)	(147,922)	(134,836)	(7,958)	(745,942)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan	161,911	11,496	2,208,463	271,219	1,085,324	(19,642)	3,718,771	*Profit/(loss) for the year*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih ventura bersama tahun berjalan	**65,169**	**5,633**	**662,539**	**99,293**	**271,331**	**(10,224)**	**1,093,741**	***The Group's share of net profit/(loss) for the year of joint ventures***
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lainnya	158,988	-	194,261	103,470	(657,017)	(1,558)	(201,856)	*Other comprehensive income/(loss)*
Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya ventura bersama	**63,992**	**-**	**58,278**	**37,880**	**(164,254)**	**(764)**	**(4,868)**	***Share of other comprehensive income/(loss) of joint ventures***
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	**-**	**(6,441)**	**-**	**(74,268)**	**-**	**-**	**(80,709)**	***Dividends received from joint ventures***

	31 Desember/*December* 2020							
	BPI	KPJB	SGPJB	BDSN	NSHE	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan setara kas	267,942	20,878	1,161,181	396,984	406,625	76,178	2,329,788	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	496,257	93,075	4,471,202	238,719	6,410	8,456	5,314,119	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	764,199	113,953	5,632,383	635,703	413,035	84,634	7,643,907	*Total current assets*
Utang usaha	(275,363)	-	(3,128,846)	(259,400)	(552,702)	(22,325)	(4,238,636)	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	(1,133,706)	(31,583)	(20,754)	(318,476)	-	(10,619)	(1,515,138)	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	(1,409,069)	(31,583)	(3,149,600)	(577,876)	(552,702)	(32,944)	(5,753,774)	*Total current liabilities*
Aset tidak lancar	5,004,812	51,298	24,302,014	5,475,141	4,408,975	2,368	39,244,608	*Non-current assets*
Liabilitas keuangan	(487,094)	-	(14,510,002)	(2,103,702)	(18,131)	(22,125)	(17,141,054)	*Financial liabilities*
Liabilitas lainnya	(508,711)	(15,038)	(3,543,806)	(817,883)	-	-	(4,885,438)	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	(995,805)	(15,038)	(18,053,808)	(2,921,585)	(18,131)	(22,125)	(22,026,492)	*Total of non-current liabilities*
Aset bersih	3,364,137	118,630	8,730,989	2,611,383	4,251,177	31,933	19,108,249	*Net assets*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,354,065	58,129	2,619,297	956,027	1,062,794	14,602	6,064,914	*The Group's share of the net assets of joint ventures*
Penyesuaian metode ekuitas	19,201	2,166	(29,771)	(81,967)	31,255	11,613	(47,503)	*Adjustments of equity methods*
Jumlah tercatat	**1,373,266**	**60,295**	**2,589,526**	**874,060**	**1,094,049**	**26,215**	**6,017,411**	***Carrying value***

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)*

Ventura bersama (lanjutan) / ***Joint ventures** (continued)*

	31 Desember/*December* 2020							
	BPI	KPJB	SGPJB	BDSN	NSHE	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan	1,019,174	224,044	8,564,860	652,097	-	200,024	10,660,199	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(436,498)	(137,598)	(5,843,729)	-	-	-	(6,417,825)	*Cost of revenue*
Depresiasi dan amortisasi	-	-	-	(907)	-	-	(907)	*Depreciation and amortisation*
Penghasilan keuangan	2,655	2,678	19,114	-	-	47	24,494	*Finance income*
Beban keuangan	(67,390)	(467)	(812,259)	(205,536)	-	(561)	(1,086,213)	*Finance costs*
Beban operasi	(77,237)	(15,101)	(141,683)	(72,894)	-	(181,983)	(488,898)	*Operating expenses*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	(477,696)	304	17,902	920	1,780	(1,134)	(457,924)	*Other income/(expenses) - net*
Beban pajak penghasilan	146,371	(19,138)	(41,738)	4,018	-	(15,429)	74,084	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	109,379	54,722	1,762,467	377,698	1,780	964	2,307,010	*Profitre for the year*
% kepemilikan	40.25%	49.00%	30.00%	36.61%	25.00%	30.00% - 51.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba/(rugi) bersih ventura bersama tahun berjalan	44,025	26,814	528,740	138,275	445	290	738,589	***The Group's share of net profit/(loss) for the year of joint ventures***
Penghasilan komprehensif lainnya	117,368	-	63,510	110,538	336,308	674	628,398	*Other comprehensive income*
Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya ventura bersama	47,241	-	19,053	40,468	84,077	202	191,041	***Share of other comprehensive income of joint ventures***
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	-	-	-	(99,570)	-	-	(99,570)	***Dividends received from joint ventures***

Investasi pada entitas diatas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there are no indications of impairment.

9. REKENING BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA DIBATASI PENGGUNAANNYA / *RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS*

	2021	2020	
Jaminan bank garansi			*Bank guarantees*
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	-	688	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")*
Rupiah	10,000	-	*Rupiah*
AS$	150,792	-	*US$*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	577	510	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*
Pihak ketiga			*Third party*
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")			*PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")*
Rupiah	44,910	57,991	*Rupiah*
AS$	-	1,969	*US$*
Jumlah	206,279	61,158	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**(206,279)**	-	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	-	**61,158**	***Non-current portion***

Pada tanggal 19 Juli 2021, PJBI dan PJBIC memberikan jaminan berupa *Standby Letter of Credit* ("SBLC") kepada Sumitomo Mitsui Banking Co. sebesar Rp122.111 untuk proyek PLTS Cirata di Kabupaten Purwakarta.

As at 19 July 2021, PJBI and PJBIC provides guarantee in form of Standby Letter of Credit ("SBLC") to Sumitomo Mitsui Banking Co. amounting to Rp122,111 for PLTS Cirata project in Purwakarta Regency.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/59 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG KEPADA VENTURA BERSAMA / *10. RECEIVABLES FROM JOINT VENTURES*

	2021	2020	
SGPJB	806,425	797,169	*SGPJB*
PMSE	9,632	-	*PMSE*
Jumlah	816,057	797,169	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**(124,055)**	-	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**692,002**	**797,169**	***Non-current portion***

Pada tanggal 20 November 2018, PJBI, entitas anak, melakukan perjanjian pinjaman jangka panjang dengan SGPJB, dimana PJBI memberikan pinjaman sebesar AS$56.516.733 dengan suku bunga LIBOR 6 bulan + 4%. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2033. Bunga akan jatuh tempo setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli.

On 20 November 2018, PJBI, a subsidiary, entered into a long-term loan with SGPJB, whereby PJBI agreed to provide long-term loans to SGPJB amounting to US$56,516,733 with an interest rate of LIBOR 6 month + 4%. The agreement will mature on 15 December 2033. The interest will be due every 15 January and 15 July.

Pada tanggal 20 Mei 2021, PJBIC memberikan pinjaman jangka panjang sebesar AS$663.000 kepada PMSE dengan suku bunga tahunan sebesar 4,7%.

On 20 May 2021, PJBIC granted a long-term loan to PMSE amounting to US$663,000 with an annual interest rate of 4.7%.

Berdasarkan penilaian penyisihan kerugian kredit ekspektasian, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang kepada ventura bersama tidak material, sehingga penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Based on the assessment of allowance for expected credit losses, the management of the Group is of the opinion that the provision for expected credit losses of receivables from joint ventures is not material, therefore, a provision for expected credit losses is considered not necessary as at 31 December 2021 and 2020.

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

11. ASET TIDAK LANCAR LAIN / *11. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

	2021	2020	
Biaya ditangguhkan	112,876	141,676	*Deferred charges*
Aset takberwujud			*Intangible assets*
Piranti lunak	3,333	16,457	*Software*
Biaya legal terkait perpanjangan hak atas tanah	48,625	49,453	*Legal costs for renewal of land rights*
Deposito jangka panjang (Catatan 31)			*Long-term time deposits (Note 31)*
BRI			*BRI*
AS$	-	664,887	*US$*
Jumlah	**164,834**	**872,473**	***Total***
Tingkat bunga deposito jangka panjang per tahun			*Interest rates per annum on long-term time deposits*
AS$	-	3.10%	*US$*
Jangka waktu	- bulan/ *months*	24 bulan/ *months*	*Maturity*

12. KAS DAN SETARA KAS / *12. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2021	2020	
Kas	1,804	2,673	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
Bank Mandiri			*Bank Mandiri*
Rupiah	2,356,052	989,279	*Rupiah*
AS$	149,625	132,362	*US$*
BRI			*BRI*
Rupiah	890,283	208,536	*Rupiah*
AS$	505,680	828,895	*US$*
BNI			*BNI*
Rupiah	2,283,706	847,683	*Rupiah*
AS$	76,141	97,499	*US$*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	1	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")*
Sub-jumlah	6,261,488	3,104,254	***Sub-total***
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank CIMB Niaga			*Bank CIMB Niaga*
Rupiah	126,966	215,394	*Rupiah*
AS$	115	115	*US$*
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")			*PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")*
Rupiah	8,268	79,676	*Rupiah*
AS$	2,556	2,526	*US$*
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			*Others (each below 5% of total)*
Rupiah	125	-	*Rupiah*
AS$	1	2,298	*US$*
Sub-jumlah	138,031	300,009	***Sub-total***
Jumlah bank	6,399,519	3,404,263	***Total cash in banks***
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
Bank Mandiri	60,000	40,000	*Bank Mandiri*
BRI			*BRI*
Rupiah	135,000	20,000	*Rupiah*
AS$	537,664	-	*US$*
BNI			*BNI*
Rupiah	50,000	20,000	*Rupiah*
AS$	159,869	14,105	*US$*
Sub-jumlah	942,533	94,105	***Sub-total***
Pihak ketiga			*Third parties*
Bank Bukopin	-	10,000	*Bank Bukopin*
Bank CIMB Niaga	112	112	*Bank CIMB Niaga*
Sub-jumlah	112	10,112	***Sub-total***
Sub-jumlah	942,645	104,217	*Sub-total*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/61 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *12. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

	2021	2020	
Deposito berjangka (lanjutan)			*Time deposits (continued)*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	-	(40)	*Allowance for expected credit losses*
Jumlah deposito berjangka	942,645	104,177	***Total time deposits***
Jumlah	**7,343,968**	**3,511,113**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rates per annum on time deposits*
Rupiah	2.25% - 2.60%	2.75% - 3.75%	*Rupiah*
AS$	0.20% - 0.40%	2.50%	*US$*
Jangka waktu	1 - 3 bulan/ *months*	1 - 3 bulan/ *months*	*Maturity*

13. DEPOSITO BERJANGKA / *13. TIME DEPOSITS*

	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 31)			*Related parties (Note 31)*
BRI			*BRI*
Rupiah	260,000	295,000	*Rupiah*
AS$	-	29,964	*US$*
BNI	30,000	-	*BNI*
Bank Mandiri	103	103	*Bank Mandiri*
Jumlah	290,103	325,067	*Total*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	-	(21)	*Allowance for expected credit losses*
Jumlah, bersih	**290,103**	**325,046**	***Total, net***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			*Interest rates per annum on time deposits*
Rupiah	2.25% - 3.00%	3.75% - 6.00%	*Rupiah*
AS$	-	2.50%	*US$*
Jangka waktu	6 - 12 bulan/ *months*	6 - 12 bulan/ *months*	*Maturity*

14. PIUTANG USAHA / *14. TRADE RECEIVABLES*

	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 31)	21,938,127	25,288,025	*Related parties (Note 31)*
Pihak ketiga	39,948	32,595	*Third parties*
Sub-jumlah	21,978,075	25,320,620	*Sub-total*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(23,697)	(23,697)	*Allowance for expected credit losses*
Jumlah, bersih	**21,954,378**	**25,296,923**	***Total, net***

Pergerakan cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for expected credit losses is as follows:

	2021	2020	
Saldo awal tahun	23,697	16,132	*Balance at beginning of year*
Penambahan	-	9,342	*Additions*
Pembalikan	-	(1,777)	*Reversals*
Saldo akhir tahun	**23,697**	**23,697**	***Balance at end of year***

Berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan PLN, piutang usaha Perusahaan disalinghapuskan terhadap utang usaha terkait pembelian energi primer dan utang bunga atas pinjaman dari pemegang saham (Catatan 33e).

Based on the agreement between the Company and PLN, the trade receivables of the Company were offset with trade payables related to the purchase of primary energy and interest payable on loans from a shareholder (Note 33e).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang dibentuk cukup untuk menutupi risiko kerugian kredit dari piutang usaha.

Management is of the opinion that the established allowance for expected credit losses of trade receivables as at 31 December 2021 and 2020 is adequate to cover the credit loss risk of trade receivables.

15. PERSEDIAAN / *15. INVENTORIES*

	2021	2020	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	1,135,328	1,139,853	*Coal, fuel and lubricants*
Material pemeliharaan	347,548	423,428	*Maintenance materials*
Sub-jumlah	1,482,876	1,563,281	*Sub-total*
Cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	(19,028)	(17,042)	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Jumlah, bersih	**1,463,848**	**1,546,239**	***Total, net***

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/63 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERSEDIAAN (lanjutan) / *INVENTORIES (continued)*

Pergerakan cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for the decline in the value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	2021	2020	
Saldo awal tahun	(17,042)	(19,753)	*Balance at beginning of year*
Penambahan	(3,817)	-	*Additions*
Pembalikan	1,831	2,711	*Reversal*
Saldo akhir tahun	**(19,028)**	**(17,042)**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah cukup untuk menutupi risiko kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang.

Management is of the opinion that the allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence as at 31 December 2021 and 2020 is adequate to cover the possible losses on the decline in the value of inventories and inventory obsolescence.

16. MODAL SAHAM / *CAPITAL STOCK*

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholders as at 31 December 2021 and 2020 were as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* %	Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital*	*Shareholders*
PLN	5,999,999,999	100	3,000,000	*PLN*
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	-	-	*Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)*
Jumlah	**6,000,000,000**	**100**	**3,000,000**	***Total***

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of this reserve. As at 31 December 2021 and 2020, the Company had not yet established its general reserve in accordance with the Limited Liability Company Law.

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 (berdasarkan Surat Direktur Utama PLN No. 1311/533/DIRUT/2001 tanggal 19 Maret 2001), dan material pemeliharaan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN.

Additional paid-in capital represents the transferred property, plant and equipment, including the funds that were provided for the rehabilitation of Gresik PLTU Unit 1 and 2 (based on Letter No. 1311/533/DIRUT/2001 dated 19 March 2001 from the President Director of PLN), and the maintenance materials from 1996 to 2000 that were received from PLN.

18. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI / *18. NON-CONTROLLING INTERESTS*

	2021							
	Jumlah tercatat 1 Januari 2021/ *Carrying amount 1 January 2021*	Penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali/ *Issuance of subsidiaries' shares to non-controlling interests*	Pelepasan entitas anak/ *Disposal of a subsidiary*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba bersih/ *Share of net profit*	Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2021/ *Carrying amount 31 December 2021*	
PJBS	26,679	-	(414)	(2,640)	4,265	281	28,171	*PJBS*
NII	86,925	-	-	-	5,510	14,249	106,684	*NII*
RE	6,663	-	-	(39)	(3)	(11)	6,610	*RE*
PJBI	3	4	-		2	-	9	*PJBI*
PLNSC	101,328	-	-	-	381	-	101,709	*PLNSC*
Jumlah	**221,598**	**4**	**(414)**	**(2,679)**	**10,155**	**14,519**	**243,183**	***Total***

	2020						
	Jumlah tercatat 1 Januari 2020/ *Carrying amount 1 January 2020*	Dampak penyesuaian atas penerapan PSAK No. 72/ *Impact from adjustment of SFAS No. 72 implementation*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba bersih/ *Share of net profit*	Penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2020/ *Carrying amount 31 December 2020*	
PJBS	20,914	2,945	(1,889)	4,545	164	26,679	*PJBS*
NII	68,313	-	-	16,331	2,281	86,925	*NII*
RE	2,133	-	-	4,536	(6)	6,663	*RE*
PJBI	2	-	-	1	-	3	*PJBI*
PLNSC	84,325	-	-	17,003	-	101,328	*PLNSC*
Jumlah	**175,687**	**2,945**	**(1,889)**	**42,416**	**2,439**	**221,598**	***Total***

19. UTANG USAHA / *19. TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian bahan bakar, barang dan jasa sebagai berikut:

This account represents the payables arising from purchases of fuel, goods and services as follows:

	2021	2020	
Pihak ketiga	1,719,776	1,850,158	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 31)	1,541,586	1,198,456	*Related parties (Note 31)*
Jumlah	**3,261,362**	**3,048,614**	***Total***

20. UTANG LAIN-LAIN / *20. OTHER PAYABLES*

	2021	2020	
Pihak ketiga	561,683	661,288	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 31)	35,357	24,250	*Related parties (Note 31)*
Jumlah	**597,040**	**685,538**	***Total***

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/65 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENJUALAN TENAGA LISTRIK / *SALES OF ELECTRICITY*

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PLN (Catatan 31).

This account represents the sales of electricity to PLN (Note 31).

22. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / *OTHER OPERATING REVENUE*

Akun ini merupakan pendapatan jasa pemeliharaan, konstruksi dan lainnya yang diperoleh dari pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents the operating revenues from maintenance services, constructions and others, which were obtained from related parties and third parties, with details as follows:

	2021	2020	
Jasa operasi dan pemeliharaan	4,057,567	4,093,834	*Operation and maintenance services*
Konstruksi	727,224	702,929	*Constructions*
Lain-lain	181,965	160,943	*Others*
Jumlah	**4,966,756**	**4,957,706**	***Total***

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

23. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS / *FUEL AND LUBRICANTS EXPENSES*

	2021	2020	
Bahan bakar minyak			*Fuel oils*
Solar High Speed Diesel ("HSD")	1,148,437	139,869	*High Speed Diesel ("HSD")*
Fuel Marine Oil ("MFO")	413,635	51,505	*Fuel Marine Oil ("MFO")*
Sub-jumlah	1,562,072	191,374	*Sub-total*
Bahan bakar non-minyak			*Non-oil fuels*
Gas alam	10,328,556	9,240,645	*Natural gas*
Batubara	2,409,639	1,778,071	*Coals*
Air	295,026	249,469	*Water*
Bahan kimia dan bahan lainnya	35,523	35,239	*Chemicals and other materials*
Pajak air permukaan	17,203	19,147	*Surface water tax*
Sub-jumlah	13,085,947	11,322,571	*Sub-total*
Minyak pelumas	24,787	24,841	*Lubricants*
Jumlah	**14,672,806**	**11,538,786**	***Total***

Lihat Catatan 31 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 31 for the balances and transactions with related parties.

24. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK / *PURCHASED ELECTRICITY EXPENSES*

Akun ini merupakan biaya pemakaian tenaga listrik dari *auxiliary equipment* mesin pembangkit.

This account represents the cost of using electricity from auxiliary equipment of generating machineries.

25. BEBAN PEMELIHARAAN / *MAINTENANCE EXPENSES*

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

This account represents the spare parts used and the contractor fees for maintenance purposes. The details are as follows:

	2021	2020	
Jasa borongan	2,740,289	2,719,644	*Contracted services*
Pemakaian material pemeliharaan	1,386,272	1,460,754	*Maintenance materials used*
Jumlah	**4,126,561**	**4,180,398**	***Total***

26. BEBAN KEPEGAWAIAN / *EMPLOYEE COSTS*

	2021	2020	
Gaji dan tunjangan	812,955	762,651	*Salaries and allowances*
Bonus dan insentif karyawan	448,048	396,936	*Employee bonus and incentives*
Imbalan kerja (Catatan 30)	353,705	374,959	*Employee benefits (Note 30)*
Tunjangan kesehatan	90,367	76,570	*Medical allowances*
Pendidikan dan pelatihan	54,275	43,172	*Education and trainings*
Lain-lain	31,103	28,700	*Others*
Jumlah	**1,790,453**	**1,682,988**	***Total***

27. BEBAN USAHA LAIN-LAIN / *OTHER OPERATING EXPENSES*

	2021	2020	
Beban konstruksi	596,759	550,108	*Construction cost*
Honorarium	69,125	78,095	*Honorarium*
Asuransi (Catatan 31)	54,803	73,370	*Insurance (Note 31)*
Pajak dan retribusi lainnya	28,130	37,953	*Taxes and other retribution*
Pajak final	25,459	23,342	*Final tax*
Sewa bangunan dan tanah	24,171	13,394	*Building and land rental*
Konsumsi	19,007	16,216	*Meals consumption*
Jasa profesional	17,261	18,504	*Professional fees*
Perjalanan dinas	15,246	16,856	*Business travelling*
Pos dan telekomunikasi	12,531	11,686	*Postage and telecommunications*
Listrik, gas dan air	11,479	12,089	*Electricity, gas and water*
Lain-lain	50,591	52,066	*Others*
Jumlah	**924,562**	**903,679**	***Total***

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/67 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN / *TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *Prepaid taxes*

	2021	2020	
Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan")			*Corporate Income Taxes ("CIT")*
2021	259,319	-	*2021*
2020	253,043	253,043	*2020*
2019	-	227,944	*2019*
Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	388,727	342,555	*Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment*
PPN	606,316	1,141,170	*VAT*
Jumlah	1,507,405	1,964,712	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**(755,157)**	**(733,167)**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**752,248**	**1,231,545**	***Non-current portion***

b. Utang pajak lainnya / *Other taxes payable*

	2021	2020	
Pajak lainnya			*Other income taxes*
Pasal 21	16,917	12,672	*Article 21*
Pasal 22	11,868	9,086	*Article 22*
Pasal 23	9,790	9,673	*Article 23*
Pasal 4 (2)	36,834	37,747	*Article 4 (2)*
PPN	33,313	103,147	*VAT*
Lain-lain	402	1,346	*Others*
Jumlah	**109,124**	**173,671**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan / *Income tax expense*

	2021	2020	
Beban pajak kini			*Current tax*
Perusahaan			*The Company*
Tahun berjalan	-	-	*Current year*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Tahun berjalan	65,708	61,211	*Current year*
Tahun sebelumnya (Catatan 28e)	5,628	-	*Prior year (Note 28e)*
Sub-jumlah	71,336	61,211	*Sub-total*

28. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***28. TAXATION*** *(continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / ***c. Income tax expense*** *(continued)*

	2021	2020	
(Manfaat)/beban pajak tangguhan			*Deferred tax (benefit)/expense*
Perusahaan	1,294,766	2,511,471	*The Company*
Entitas anak	5,750	(36,387)	*Subsidiaries*
Sub-jumlah	1,300,516	2,475,084	*Sub-total*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**1,371,852**	**2,536,295**	***Consolidated income tax expense***

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits of the consolidated subsidiaries as follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	7,192,040	10,240,107	*Consolidated profit before income tax*
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku 22%	1,582,249	2,252,824	*Tax expense at prevailing tax rate of 22%*
Penghasilan keuangan telah dikenakan pajak final	(41,482)	(20,467)	*Finance income subject to final tax*
Penghasilan lain tidak dapat dikurangkan	(518,972)	(347,671)	*Other non-deductible income*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	321,680	358,059	*Unrecognised deferred tax assets*
Penyesuaian perubahan tarif pajak	28,377	293,550	*Adjustments due to changes in tax rate*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**1,371,852**	**2,536,295**	***Consolidated income tax expense***

Rugi pajak perusahaan yang dibawa ke depan yang masih dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa depan untuk jangka waktu lima tahun dari periode di mana kerugian itu terjadi pada tanggal kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

Tax losses carried-forward that can still be offset against future taxable income for a period of five years from the period in which the loss was incurred, with expiration dates as follows:

Tahun pajak/ *Fiscal year*	Tanggal kedaluwarsa/ *Expiry year*	Saldo/ *Balance*
2017	2022	1,651,349
2021	2026	1,462,182
Jumlah/*Total*		**3,113,531**

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/69 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan komprehensif lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

28. *TAXATION (continued)*

c. *Income tax expense (continued)*

The taxable income resulting from the reconciliation will become the basis for filing the Annual Corporate Income Tax Return.

The income tax relating to other comprehensive income during the year is as follows:

	2021			2020			
	Sebelum pajak/ *Before tax*	Kredit/(beban) pajak/ *Tax credit/(charge)*	Setelah pajak/ *After tax*	Sebelum pajak/ *Before tax*	Kredit/(beban) pajak/ *Tax credit/(charge)*	Setelah pajak/ *After tax*	
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	192,415	(26,059)	166,356	234,360	(85,293)	149,067	*Remeasurement on defined benefit plan*
Surplus revaluasi aset tetap	(3,154,021)	691,144	(2,462,877)	(6,916)	-	(6,916)	*Property, plant and equipment revaluation surplus*
Bagian penghasilan/ (kerugian) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(4,868)	-	(4,868)	191,041	3,738	194,779	*Share of other comprehensive income/(loss) from associates and joint ventures*
Jumlah	**(2,966,474)**	**665,085**	**(2,301,389)**	**418,485**	**(81,555)**	**336,930**	***Total***

d. Pajak tangguhan

Pergerakan pajak tangguhan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

d. *Deferred tax*

The movements in the Group's deferred tax for the years ended 31 December 2021 and 2020 is as follows:

	2021							
	31 Desember/ *December 2020*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	Reklasifikasi aset pajak tangguhan menjadi liabilitas pajak tangguhan/ *Reclassification from deferred tax assets to deferred tax liabilities*	Penyesuaian perubahan tarif pajak yang disajikan ke laba rugi/ *Adjustments due to changes in tax rate presented in profit or loss*	Penyesuaian perubahan tarif pajak yang disajikan ekuitas/ *Adjustments due to changes in tax rate presented in equity*	31 Desember/ *December 2021*	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan								***Deferred tax assets/ (liabilities)***
Perusahaan								***The Company***
Liabilitas imbalan kerja	561,615	41,493	(34,519)	-	34,812	12,441	615,842	*Employee benefit liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	82,417	3,747	-	-	3,022	-	89,186	*Short-term employee benefits liabilities*
Penyisihan untuk persediaan usang	1,653	(403)	-	-	1,875	-	3,125	*Provision for obsolete inventories*
Penyisihan untuk penurunan nilai piutang	1,874	(705)	-	-	2,599	-	3,768	*Provision for impairment of receivables*
Aset tetap	(647,559)	(1,326,876)	691,144	625,700	(54,330)	-	(711,921)	*Property, plant and equipment*
Sub-jumlah	-	(1,282,744)	656,625	625,700	(12,022)	12,441	-	*Sub-total*

28. PERPAJAKAN (lanjutan) / *28. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred tax (continued)*

	2021							
	31 Desember/ *December* 2020	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	Reklasifikasi aset pajak tangguhan menjadi liabilitas pajak tangguhan/ *Reclassification from deferred tax assets to deferred tax liabilities*	Penyesuaian perubahan tarif pajak yang disajikan ke laba rugi/ *Adjustments due to changes in tax rate presented in profit or loss*	Penyesuaian perubahan tarif pajak yang disajikan ekuitas/ *Adjustments due to changes in tax rate presented in equity*	31 Desember/ *December* 2021	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan								***Deferred tax assets/ (liabilities)***
Entitas anak								***Subsidiaries***
Liabilitas imbalan kerja	15,724	1,754	(4,565)	-	(1,770)	584	11,727	*Employee benefit liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	36,023	9,094	-	-	(14,261)	-	30,856	*Short-term employee benefits liabilities*
Penyisihan untuk persediaan usang	650	(3)	-	-	192	-	839	*Provision for obsolete inventories*
Penyisihan untuk penurunan nilai piutang	3,473	-	-	-	1,034	-	4,507	*Provision for impairment of receivables*
Aset tetap	1,639	(240)	-	-	(1,550)	-	(151)	*Property, plant and equipment*
Sub-jumlah	57,509	10,605	(4,565)	-	(16,355)	584	47,778	*Sub-total*
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**57,509**	**(1,272,139)**	**652,060**	**625,700**	**(28,377)**	**13,025**	**47,778**	***Total of deferred tax assets - net***
Perusahaan								***The Company***
Aset tetap	(446,616)	-	-	(625,700)	-	-	(1,072,316)	*Property, plant and equipment*
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	**(446,616)**	**-**	**-**	**(625,700)**	**-**	**-**	**(1,072,316)**	***Total of deferred tax liabilities - net***
Beban pajak tangguhan		**(1,272,139)**	**652,060**	**-**	**(28,377)**	**13,025**		***Deferred tax expense***

	2020							
	31 Desember/ *December* 2019	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/ (charged) to other comprehensive income*	Reklasifikasi aset pajak tangguhan menjadi liabilitas pajak tangguhan/ *Reclassification from deferred tax assets to deferred tax liabilities*	Penyesuaian perubahan tarif pajak yang disajikan ke laba rugi/ *Adjustments due to changes in tax rate presented in profit or loss*	Penyesuaian perubahan tarif pajak yang disajikan ekuitas/ *Adjustments due to changes in tax rate presented in equity*	31 Desember/ *December* 2020	
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan								***Deferred tax assets/ (liabilities)***
Perusahaan								***The Company***
Liabilitas imbalan kerja	691,363	48,158	(43,353)	-	(92,613)	(41,940)	561,615	*Employee benefit liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	79,296	14,871	-	-	(11,750)	-	82,417	*Short-term employee benefits liabilities*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	4,938	(466)	-	-	(945)	-	3,527	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Aset tetap	250,828	(1,293,694)	-	446,616	(51,309)	-	(647,559)	*Property, plant and equipment*
Akumulasi rugi pajak	1,123,723	(988,876)	-	-	(134,847)	-	-	*Accumulated tax losses*
Sub-jumlah	2,150,148	(2,220,007)	(43,353)	446,616	(291,464)	(41,940)	-	*Sub-total*
Entitas anak								***Subsidiaries***
Liabilitas imbalan kerja	19,731	(1,639)	-	-	(2,368)	-	15,724	*Employee benefit liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	38,356	2,270	-	-	(4,603)	-	36,023	*Short-term employee benefits liabilities*
Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai piutang	3,234	1,277	-	-	(388)	-	4,123	*Provision for obsolete inventories and impairment of receivables*
Aset tetap	601	1,110	-	-	(72)	-	1,639	*Property, plant and equipment*
Sub-jumlah	61,922	3,018	-	-	(7,431)	-	57,509	*Sub-total*
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	**2,212,070**	**(2,216,989)**	**(43,353)**	**446,616**	**(298,895)**	**(41,940)**	**57,509**	***Total of deferred tax assets - net***
Perusahaan								***The Company***
Aset tetap	-	-	-	(446,616)	-	-	(446,616)	*Property, plant and equipment*
Entitas anak								***Subsidiaries***
Laba bersih dari entitas asosiasi	(44,538)	35,455	-	-	5,345	3,738	-	*Share in net income of associates*
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	**(44,538)**	**35,455**	**-**	**(446,616)**	**5,345**	**3,738**	**(446,616)**	***Total of deferred tax liabilities - net***
Beban pajak tangguhan		**(2,181,534)**	**(43,353)**	**-**	**(293,550)**	**(38,202)**		***Deferred tax expense***

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/71 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

Rugi pajak dapat dikompensasikan dengan laba pajak pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian pajak terjadi. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan dari rugi pajak karena manajemen memperkirakan bahwa kerugian pajak tidak dapat dikompensasikan dengan laba pajak di masa mendatang.

e. Surat ketetapan pajak

Perusahaan

Jenis pajak/*Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat ketetapan pajak/ *Tax assessment letters*	Tanggal surat ketetapan pajak/ *Date of tax assessment letters*	Jumlah yang diperkarakan/ *Dispute amount*	Status
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2016	Kurang bayar/ *Underpayment*	Juli/ *July* 2018	307,089	Peninjauan kembali/ *Judicial review*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2017	Kurang bayar/ *Underpayment*	Agustus/ *August* 2019	172,520	Banding/*Appeal*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2018	Kurang bayar/ *Underpayment*	Agustus/ *August* 2020	162,946	Keberatan/*Objection*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2019	Kurang bayar/ *Underpayment*	Juni/ *June* 2021	136,172	Keberatan/*Objection*
Jumlah				**778,727**	***Total***

PJBS

Pada tanggal 20 Desember 2021, PJBS menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2016 sebesar Rp5.628 yang telah diterima PJBS pada bulan Desember 2021. PJBS telah mengakui seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada tanggal 10 Mei 2021, PJBS menerima SKPLB atas PPN bulan Desember 2019 sebesar Rp100.878 yang telah diterima PJBS pada bulan Mei 2021. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh PJBS pada tahun 2021.

RE

Pada bulan 3 Mei dan 7 Juni 2021, RE menerima SKPLB atas PPN bulan Januari 2018 sampai April 2020 sebesar Rp196.510. Kelebihan bayar pajak tersebut telah diterima oleh RE pada tahun 2021.

28. *TAXATION* *(continued)*

d. Deferred tax *(continued)*

The tax loss can be compensated against taxable income for a period of five years subsequent to the year in which the tax loss was incurred. As at 31 December 2021 and 2020, the Company does not recognise deferred tax assets from tax losses due to management believing that it is probable that future taxable profits will not be able to fully offset tax losses.

e. Tax assessment letters

The Company

PJBS

On 20 December 2021, PJBS received a SKPKB for its 2016 income tax articles 23 amounting to Rp5,628 which was received by PJBS in December 2021. PJBS has recognised all the underpayment tax as part of income tax expense in the statement of profit or loss for the year ended 31 December 2021.

On 10 May 2021, PJBS received a SKPLB for its VAT of December 2019 amounting to Rp100,878 which was received by the PJBS in May 2021. These overpayment tax has been received by PJBS in 2021.

RE

On 3 May and 7 June 2021, RE received a SKPLB for its VAT of January 2018 until April 2020 amounting to Rp196,510. These overpayment tax has been received by RE in 2021.

28. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

g. Tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19") dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, dengan demikian tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022, serta pengenaan pajak karbon mulai 1 April 2022 dengan tarif minimal sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

***28. TAXATION** (continued)*

f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

g. Tax rate

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020, on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on 16 May 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020-2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

On 29 October 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and to 12% at the latest by 1 January 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%, Taxpayer Voluntary Disclosure Program which starts from 1 January to 30 June 2022, and imposition of a carbon tax at a minimum rate of Rp30 per kilogram of carbon dioxide equivalent to carbon emissions that have a negative impact on the environment.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/73 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2020. Berdasarkan surat PLN tanggal 31 Desember 2021, pembagian dividen untuk tahun buku 2020 ditetapkan sebesar Rp7.661.396 atau Rp1.277 (nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2020, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2019. Berdasarkan surat PLN tanggal 11 September 2020, pembagian dividen untuk tahun buku 2019 ditetapkan sebesar Rp6.645.392 atau Rp1.108 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tahun 2021 dan 2020, pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan pengurangan terhadap piutang usaha dari pihak berelasi (Catatan 14 dan 31).

29. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 29 June 2021, the shareholders granted the authority to the majority shareholder to determine the Company's retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the 2020 net income. Based on the letter from PLN dated 31 December 2021, the distribution of dividends for the year 2020 amounted to Rp7,661,396 or Rp1,277 (full amount) per share.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 23 June 2020, the shareholders granted the authority to the majority shareholder to determine the Company's retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the 2019 net income. Based on the letter from PLN dated 11 September 2020, the distribution of dividends for the year 2019 amounted to Rp6,645,392 or Rp1,108 (full amount) per share.

In 2021 and 2020, the dividend payments to PLN were made through deduction of the trade receivables from related parties (Notes 14 and 31).

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2021	2020	
Program pensiun manfaat pasti	64,671	70,362	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	1,069,360	988,054	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1,607,882	1,684,411	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	116,579	104,769	*Other long-term benefits*
Jumlah	2,858,492	2,847,596	*Total*
Bagian jangka panjang	**(2,695,320)**	**(2,647,016)**	***Non-current portion***
Bagian jangka pendek	163,172	200,580	*Current portion*
Bonus dan insentif prestasi kerja	539,020	388,360	*Bonus and performance incentives*
Bagian jangka pendek	**702,192**	**588,940**	***Current portion***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

	2021	2020	
Beban diakui di laba rugi (Catatan 26):			***Expense recognised in profit or loss (Note 26):***
Program pensiun manfaat pasti	12,066	7,050	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	148,729	159,881	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	155,316	178,490	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	37,594	29,538	*Other long-term benefits*
Jumlah	**353,705**	**374,959**	***Total***

	2021	2020	
Pengukuran kembali program manfaat pasti diakui di penghasilan/(kerugian) komprehensif lain:			***Remeasurement on defined benefit plan recognised in other comprehensive income/(loss):***
Program pensiun manfaat pasti	8,467	(58,639)	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	(3,031)	15,875	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	186,979	277,124	*Health care benefits*
Jumlah	**192,415**	**234,360**	***Total***

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan

Program pensiun manfaat pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas peningkatan manfaat pasti pensiun yang disediakan Grup dalam program dana pensiun.

Post-employment benefit obligations

Defined benefit pension program

The Group has established a defined benefit pension program covering all of its eligible permanent employees. This plan provides benefits based on the basic pension income and the period of employment.

The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated 15 May 1997.

DP-PLN has obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-8/NB.1/2016 dated 11 February 2016 in relation to the increase in the pension benefits that are provided by the Group's pension plan.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/75 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 17,77% dari penghasilan dasar pensiun.

Imbalan pascakerja lain

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

PJBS melakukan pendanaan dana pensiun yang dikelola bank swasta sebesar 4% dari penghasilan dasar.

MKP serta RE, memberikan imbalan pascakerja manfaat pasti tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan UU Cipta Kerja (2020: UU Ketenagakerjaan).

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Grup menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan manfaat penghargaan winduan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan aktuaria atas program pensiun manfaat pasti, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dihitung oleh kantor konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan dalam laporannya masing-masing tertanggal 24 Maret 2022 dan 6 Mei 2021.

***30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

***Post-employment benefit obligations** (continued)*

Defined benefit pension program (continued)

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 6.00% and 17.77% from the basic pension income, respectively.

Other post-employment benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Group also provides unfunded severance benefits and completion of employment awards for eligible employees.

PJBS provides funded pension plan that is managed by a private bank at 4% of the basic income.

MKP and RE, provided the unfunded post-employment benefits for their qualifying employees under the Job Creation Law (2020: the Labour Law).

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Group also provides unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long service leave, work accident, death and funeral allowances and an eight-year service awards for the qualifying employees.

The actuarial calculations of the defined benefit pension program, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended 31 December 2021 and 2020 were calculated by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan based on its report dated 24 March 2022 and 6 May 2021, respectively.

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja:

Tabel mortalita	CSO-58
Usia pensiun normal	56 tahun/*years old*

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Grup. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tahun 2021, Grup melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan studi, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011 dan TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup memutuskan bahwa aset mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58 (2020: CSO-58).

Program pensiun manfaat pasti

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

	2021	2020	
Nilai kini kewajiban yang didanai	544,874	513,853	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar aset program	(480,203)	(443,491)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	**64,671**	**70,362**	***Liability in the consolidated statements of financial position***

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Post-employment benefit obligations *(continued)*

Other long-term benefits (continued)

The principal actuarial assumptions that have been used in the calculations of the employment benefits obligation:

Mortality table	CSO-58
Normal retirement age	56 tahun/*years old*

The assumptions regarding the future mortality experience are based on actuarial advice in accordance with published statistics and experiences by the Group. The mortality assumptions that have been used are based on the CSO-58 mortality table which was applied when calculating the long-term benefits liability recognised within the consolidated statement of financial position.

In 2021, the Group conducted a study to determine which mortality tables best suited most of the Group's employees' and pensioners' mortality profile. In the study, the Group considered CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011 and TMI-2019. Based on the study, the Group decided that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group's employees and pensioners was CSO-58 (2020: CSO-58).

Defined benefit pension program

The amounts recognised in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/77 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefit obligations*** *(continued)*

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / ***Defined benefit pension program*** *(continued)*

Pergerakan liabilitas program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *The movements in the defined benefit pension program obligations during the years were as follows*:

	2021	2020	
Pada awal tahun	513,853	450,003	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	10,379	9,638	*Current service cost*
Biaya bunga	37,382	33,900	*Interest expense*
	47,761	43,538	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	446	48,521	*Losses from experience adjustments*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	16,311	4,056	*Losses from changes in financial assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	(415)	*Gains from changes in demographic assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	-	(1,084)	*Gains from changes in other assumptions*
	16,757	51,078	
Pembayaran manfaat	(33,497)	(30,766)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**544,874**	**513,853**	***At end of the year***

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *The movements in the fair value of the plan assets during the years were as follows:*

	2021	2020	
Pada awal tahun	443,491	436,798	*At beginning of year*
Imbalan hasil aset program	32,558	33,327	*Return on plan assets*
Iuran dari pemberi kerja	9,290	8,532	*Contribution from employers*
Iuran pekerja	3,137	3,161	*Contribution from employees*
Keuntungan/(kerugian) aktuarial yang diakui	25,224	(7,561)	*Recognised actuarial gains/(losses)*
Pembayaran manfaat	(33,497)	(30,766)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**480,203**	**443,491**	***At end of the year***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Aset program terdiri dari:

	2021 Jumlah/ *Total*	2021 %	2020 Jumlah/ *Total*	2020 %	
Instrumen utang	254,790	53.06	191,874	43.26	*Debt instruments*
Instrumen ekuitas	84,206	17.54	92,411	20.84	*Equity instruments*
Properti	59,327	12.35	47,420	10.69	*Property*
Kas dan setara kas	22,912	4.77	45,405	10.24	*Cash and cash equivalents*
Lain-lain	58,968	12.28	66,381	14.97	*Others*
Jumlah	**480,203**	**100.00**	**443,491**	**100.00**	***Total***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	6.97%	7.52%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari liabilitas program pensiun manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

	Dampak atas liabilitas/ *Impact on obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(14,651)	16,277	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	15,993	(14,592)	*Salary increase rate*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Imbalan perhitungan sensitivitas liabilitas kerja jangka panjang atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

30. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES* *(continued)*

Post-employment benefit obligations *(continued)*

Defined benefit pension program *(continued)*

The plan assets comprise the following:

The principal actuarial assumptions used that were as follows:

The sensitivity of the defined benefits pension program obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

The sensitivity analysis are based on a change in a single assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the long-term benefits liabilities to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the long-term benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the long-term benefits liabilities recognised in the consolidated statement of financial position.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/79 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefit obligations** (continued)*

Imbalan pascakerja lain / ***Other post-employment benefits***

Pergerakan liabilitas imbalan pascakerja lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *The movements of the other post-employment benefits obligations during the years were as follows:*

	2021	2020	
Pada awal tahun	988,054	925,675	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	80,747	81,196	*Current service cost*
Biaya bunga	67,982	70,183	*Interest expense*
Biaya jasa lalu	-	8,502	*Past service cost*
	148,729	159,881	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	26,056	49,857	*Losses from changes in financial assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	(3,958)	*Gains from changes in demographic assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	(291)	(19,016)	*Gains from changes in other assumptions*
Keuntungan dari penyesuaian atas pengalaman	(22,734)	(42,758)	*Gains from experience adjustments*
	3,031	(15,875)	
Pembayaran manfaat	(70,454)	(81,627)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**1,069,360**	**988,054**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut: / *The principal actuarial assumptions used that were as follows:*

	2021	2020	
Tingkat diskonto	7.12% - 7.59%	7.01% - 7.48%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	1.00% - 7.12%	1.00% - 7.02%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pascakerja lain terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut: / *The sensitivity of the other post-employment benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:*

		Dampak atas liabilitas/ *Impact on obligations*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(104,624)	122,610	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	125,797	(109,176)	*Salary increase rate*

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefit obligations*** *(continued)*

Imbalan pemeliharaan kesehatan / ***Health care benefits***

Grup memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun manfaat pasti.

The Group has a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and the frequency of the valuations are similar to those used for the defined benefit pension schemes.

Pergerakan liabilitas imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements of the health care benefits obligations during the years were as follows:

	2021	2020	
Pada awal tahun	1,684,411	1,821,162	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	30,501	37,926	*Current service cost*
Biaya bunga	124,815	140,564	*Interest expense*
	155,316	178,490	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(395,254)	75,703	*(Gains)/losses from changes in financial assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	(1,504)	(453)	*Gains from changes in other assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	(4,912)	*Gains from changes in demographic assumptions*
Kerugian/(keuntungan) dari penyesuaian atas pengalaman	209,779	(347,462)	*Losses/(gains) from experience adjustments*
	(186,979)	(277,124)	
Pembayaran manfaat	(44,866)	(38,117)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**1,607,882**	**1,684,411**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used that were as follows:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	7.53%	7.51%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	5.40%	7.00%	*Future health cost increase rate*

Sensitivitas dari liabilitas liabilitas pemeliharaan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the health care benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

		Dampak atas liabilitas/ *Impact on obligations*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(199,259)	247,956	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	250,579	(204,264)	*Medical inflation rate*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/81 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefit obligations** (continued)*

Imbalan kerja jangka panjang lainnya / ***Other long-term employee benefits***

Pergerakan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *The movements of the other long-term employee benefits obligations during the years were as follows:*

	2021	2020	
Pada awal tahun	104,769	92,675	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	28,246	26,510	*Current service cost*
Biaya bunga	6,615	6,526	*Interest expense*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	6,148	1,223	*Losses from changes in financial assumptions*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	17	(21)	*Losses/(gains) from changes in other assumptions*
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	(372)	*Gains from changes in demographic assumptions*
Keuntungan dari penyesuaian atas pengalaman	(3,432)	(4,328)	*Gains from experience adjustments*
	37,594	29,538	
Pembayaran manfaat	(25,784)	(17,444)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	**116,579**	**104,769**	***At end of the year***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut: / *The principal actuarial assumptions used that were as follows:*

	2021	2020	
Tingkat diskonto	4.92% - 7.38%	7.14% - 7.43%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	7.00%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut: / *The sensitivity of the other long-term employee benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions were as follows:*

		Dampak atas liabilitas/ *Impact on obligations*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(2,840)	2,998	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	3,025	(2,919)	*Salary increase rate*

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program pensiun manfaat pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada *Zero Coupon Bond* dari *Indonesia Government Securities Yield Curve* ("IGSYC"). Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang, meskipun Grup juga berinvestasi pada instrumen ekuitas, properti, kas dan setara kas dan lain-lain. Grup meyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari liabilitas program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Rata-rata durasi adalah masing-masing 10,56 tahun untuk program pensiun manfaat pasti, 12,52 - 25,35 tahun untuk imbalan pascakerja lainnya, 16,94 tahun untuk imbalan pemeliharaan kesehatan dan 2,63 - 3,82 tahun untuk imbalan jangka panjang lainnya.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

***30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension program and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Zero Coupon Bond from Indonesia Government Securities Yield Curve ("IGSYC"). If the plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Group also invests in equity instruments, property, cash and cash equivalents and others. The Group believes that debt instruments offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Life expectancy

The majority of the plans' obligations are to provide lifetime benefits, so that the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

The weighted average durations are 10.56 years for defined benefit pension program, 12.52 - 25.35 years for other post-employment benefits, 16.94 years for health care benefits, and 2.63 - 3.82 years for other long-term benefits, respectively.

The expected maturity analysis of the undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	Antara 1-2 tahun/ *Between 1-2 years*	Antara 2-5 tahun/ *Between 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/ *Total*	
Program pensiun manfaat pasti	34,525	34,323	110,292	1,188,596	1,367,736	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	52,183	50,197	320,613	9,478,776	9,901,769	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	51,794	56,125	202,854	8,862,589	9,173,362	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	24,670	51,349	104,200	93,935	274,154	*Other long-term benefits*
Jumlah	**163,172**	**191,994**	**737,959**	**19,623,896**	**20,717,021**	***Total***

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas imbalan pascakerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam UU Cipta Kerja (2020: UU Ketenagakerjaan).

The Group's management is of the opinion that the post-employment benefit obligation is adequate to cover all benefits provided for in the Job Creation Law (2020: the Labour Law).

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/83 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Sifat hubungan berelasi / ***Nature of related parties***

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: / *Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group:*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka/ *Placement of cash in banks and time deposits*
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka/ *Placement of cash in banks and time deposits*
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka/ *Placement of cash in banks and time deposits*
BSI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan rekening bank/ *Placement of cash in banks*
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ *Purchase of fuels and lubricants*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas fuel*
PT Nusantara Regas ("NR")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ *Purchase of gas fuel*
PT Superintending Company of Indonesia (Persero) ("Sucofindo")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara/ *Engineering services, survey and coal measurement*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi instalasi dan mesin pembangkit, dan perlengkapan transmisi/ *Insurance services for installation and power plants and transmissions equipment*
Perum Jasa Tirta ("Jasa Tirta")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian air/ *Purchase of water*
PT PLN (Persero)	Pemegang saham/ *Shareholder*	Transaksi penjualan tenaga listrik/ *Sales of electricity*
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	Pemegang saham/ *Shareholder*	Penyertaan modal/ *Paid-in capital*
PT Indonesia Power ("IP")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ *Subsidiary of PT PLN (Persero)*	Transaksi penjualan barang dan jasa/ *Sales of goods and services*

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	**Sifat hubungan/** *Nature of relationship*	**Sifat transaksi/** *Nature of transaction*
PT PLN Batam ("PLN Batam")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ *Subsidiary of PT PLN (Persero)*	Transaksi penjualan barang dan jasa/ *Sales of goods and services*
PT PLN Batubara ("PLNBB")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ *Subsidiary of PT PLN (Persero)*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Haleyora Power ("HP")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ *Subsidiary of PT PLN (Persero)*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT Indonesia Comnets Plus ("ICON")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ *Subsidiary of PT PLN (Persero)*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT PLN Enjinering ("PLNE")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ *Subsidiary of PT PLN (Persero)*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT PLN Tarakan ("PLN Tarakan")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ *Subsidiary of PT PLN (Persero)*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT Energy Management Indonesia (Persero) ("EMI")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ *Subsidiary of PT PLN (Persero)*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara ("MCTN")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ *Subsidiary of PT PLN (Persero)*	Transaksi pembelian barang dan jasa/ *Purchase of goods and services*
PT Pelayaran Bahtera Adiguna ("BAG")	Entitas anak dari PT PLN (Persero)/ *Subsidiary of PT PLN (Persero)*	Jasa pemeliharaan dan pemeriksaan/ *Maintenance and inspection services*
APLN	Pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Asuransi bangunan dan perlengkapan umum/ *Insurance for buildings and general equipment*
S2P	Entitas asosiasi/*Associate*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
RDM	Entitas asosiasi/*Associate*	Transaksi jasa proyek/ *Project services*
BDSN	Ventura bersama/*Joint venture*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
BPI	Ventura bersama/*Joint venture*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
SGPJB	Ventura bersama/*Joint venture*	Piutang kepada ventura bersama/ *Receivables from joint ventures*
PMSE	Ventura bersama/*Joint venture*	Piutang kepada ventura bersama/ *Receivables from joint ventures*
KPJB	Ventura bersama/*Joint venture*	Jasa operasi dan pemeliharaan/ *Operation and maintenance services*
PT Geo Dipa Energi (Persero) ("Geodipa")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Jasa pemeliharaan dan pemeriksaan/ *Maintenance and inspection services*
PT Pupuk Indonesia Energi ("PI Energi")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Jasa pemeliharaan dan pemeriksaan/ *Maintenance and inspection services*
PT Hutama Karya (Persero) ("HK")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services*
Dana pensiun PLN	Pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Pengelola dana pensiun/ *Pension fund manager*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Komisaris, Direktur dan Kepala Divisi/ *Commissioners, Directors and Division Heads*	Upah dan tunjangan/ *Salaries and allowances*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/85 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi / ***The balances and transactions with related parties***

	2021	2020	
Kas dan setara kas			***Cash and cash equivalents***
BNI	2,569,716	979,287	*BNI*
Bank Mandiri	2,565,677	1,161,641	*Bank Mandiri*
BRI	2,068,627	1,057,431	*BRI*
BSI	1	-	*BSI*
Jumlah	**7,204,021**	**3,198,359**	***Total***
Aset tidak lancar lain (Catatan 11)			***Other non-current assets (Note 11)***
BRI	-	**664,887**	*BRI*
Deposito berjangka (Catatan 13)			***Time deposits (Note 13)***
BRI	260,000	324,964	*BRI*
BNI	30,000	-	*BNI*
Bank Mandiri	103	103	*Bank Mandiri*
Jumlah	**290,103**	**325,067**	***Total***
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya (Catatan 9)			***Restricted cash in banks and time deposits (Note 9)***
BRI	160,792	-	*BRI*
BNI	577	510	*BNI*
Bank Mandiri	-	688	*Bank Mandiri*
Jumlah	**161,369**	**1,198**	***Total***
Piutang usaha (Catatan 14)			***Trade receivables (Note 14)***
PLN	21,788,196	25,078,299	*PLN*
BPI	88,400	122,700	*BPI*
IP	28,094	48,772	*IP*
BDSN	23,711	27,786	*BDSN*
S2P	7,450	2,772	*S2P*
ICON	1,073	-	*ICON*
EMI	1,022	-	*EMI*
BAG	157	-	*BAG*
PLN Batam	24	-	*PLN Batam*
PI Energi	-	423	*PI Energi*
KPJB	-	3,592	*KPJB*
RDM	-	3,183	*RDM*
Geodipa	-	498	*Geodipa*
Jumlah	**21,938,127**	**25,288,025**	***Total***
Piutang kepada ventura bersama (Catatan 10)			***Receivables from joint ventures (Note 10)***
SGPJB	806,425	797,169	*SGPJB*
PMSE	9,632	-	*PMSE*
Jumlah	**816,057**	**797,169**	***Total***
Utang usaha (Catatan 19)			***Trade payables (Note 19)***
Pertamina	833,450	219,841	*Pertamina*
PLNBB	307,854	221,301	*PLNBB*
Jasa Tirta	167,152	93,317	*Jasa Tirta*
NR	155,242	340,950	*NR*
HK	71,043	59,323	*HK*
PLN	6,845	11,838	*PLN*
PGN	-	251,886	*PGN*
Jumlah	**1,541,586**	**1,198,456**	***Total***
Utang lain-lain (Catatan 20)			***Other payables (Note 20)***
PLN	16,965	11,823	*PLN*
ICON	14,023	9,548	*ICON*
HP	2,388	2,196	*HP*
IP	1,981	683	*IP*
Jumlah	**35,357**	**24,250**	***Total***
Pinjaman dari pemegang saham			***Loans from a shareholder***
PLN	**2,417,205**	**2,498,086**	*PLN*

31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

31. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

The balances and transactions with related parties *(continued)*

	2021	2020	
Penjualan tenaga listrik (Catatan 21)			***Sales of electricity (Note 21)***
PLN	**24,541,378**	**25,476,470**	*PLN*
Pendapatan usaha lainnya			***Other operating revenue***
PLN	4,593,225	4,645,032	*PLN*
IP	122,763	94,483	*IP*
BPI	92,771	80,990	*BPI*
BDSN	91,671	79,352	*BDSN*
KPJB	18,276	-	*KPJB*
S2P	8,155	-	*S2P*
PLN Batam	1,855	-	*PLN Batam*
MCTN	929	-	*MCTN*
PLNE	725	-	*PLNE*
RDM	656	-	*RDM*
PLNBB	59	-	*PLN BB*
Geodipa	-	-	*Geodipa*
Jumlah	**4,931,085**	**4,899,857**	***Total***
Beban bahan bakar dan pelumas			***Fuel and lubricants expenses***
Pertamina	4,705,735	3,168,943	*Pertamina*
PGN	2,696,693	2,437,718	*PGN*
NR	731,108	559,118	*NR*
PLNBB	597,099	605,157	*PLNBB*
Jasa Tirta	295,026	249,469	*Jasa Tirta*
Jumlah	**9,025,661**	**7,020,405**	***Total***
Beban pemeliharaan			***Maintenance expenses***
PLNE	23,241	12,780	*PLNE*
ICON	14,664	13,074	*ICON*
HP	4,243	7,972	*HP*
PLN Tarakan	-	206	*PLN Tarakan*
Jumlah	**42,148**	**34,032**	***Total***
Beban usaha lain-lain (Catatan 27)			***Other operating expenses (Note 27)***
Jasindo	54,615	73,182	*Jasindo*
APLN	188	188	*APLN*
Jumlah	**54,803**	**73,370**	***Total***

a. Pinjaman dari pemegang saham

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar AS$280.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR USD enam bulan dengan marjin 0,98%. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek *add-on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp2.417.205 (setara dengan AS$169.402.450) dan Rp2.498.086 (setara dengan AS$177.106.338), dengan porsi jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp233.979 dan Rp334.725.

a. Loans from a shareholder

On 20 March 2018, the Company entered into a loan agreement with PLN amounted to US$280,000,000 with an annual interest rate of LIBOR USD six-month with 0.98% margin. The loan will be used to fund the add-on project of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3 and 4. The terms of this agreement is effective since the loan is signed and will be expired on 8 May 2032.

The outstanding balances of this loan as at 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp2,417,205 (equivalent to US$169,402,450) and Rp2,498,086 (equivalent to US$177,106,338), respectively, with the current portion as at 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp233,979 and Rp334,725, respectively.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/87 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp10.140 dan Rp9.892.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp24.287 dan Rp15.802.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

31. THE NATURE OF THE RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Key management compensation

The total remuneration of the Company's Board of Commissioners in 2021 and 2020 amounted to Rp10,140 and Rp9,892, respectively.

The total remuneration of the Company's Directors in 2021 and 2020 amounted to Rp24,287 and Rp15,802, respectively.

All of the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors are short-term employee benefits.

32. IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar

i. Batubara

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As at 31 December 2021, the Group had significant commitments and contingencies as follows:

a. Fuel Supply Agreements

i. Coal

Pemasok/*Supplier*	No. Kontrak/ *Contract no.*	Satuan/ *Unit of measure*	Jumlah/ *Quantity*	Periode/ *Period*
PT PLN Batubara	013.PJ/061/PJB-PLNBB/V/2020	Metrik ton/ *Metric ton*	Sesuai kebutuhan	Mar 2020 - Mar 2040
PT Kaltim Prima Coal	070.PJ/061/2018	Metrik ton/ *Metric ton*	3,120,000	Jan 2019 - Dec 2021*
PT Arutmin Indonesia	071.PJ/061/2018	Metrik ton/ *Metric ton*	2,400,000	Jan 2019 - Mar 2021*
PT Solusi Sumber Energi	013.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	100,000	Feb 2021 - Mar 2021*
PT Dua Kota Laut	015.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	50,000	Apr 2021*
PT Antang Gunung Meratus	016.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	50,000	Apr 2021*
PT Usaha Baratama Jesindo	023.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	30,000	Apr 2021 - May 2021*
PT Antang Gunung Meratus	025.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	40,000	Jun 2021*
PT Solusi Sumber Energi	026.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	350,000	Jun 2021 - Dec 2021*
PT Rekamitra Cipta Tambang	035.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	22,500	Jul 2021*
PT Era Karya Mulya	036.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	15,000	Jul 2021*
PT Global Energi Lestari	037.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	30,000	Jul 2021*
PT Maharani Bara Perkasa	038.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	67,500	Aug - Oct 2021*
PT Global Energi Lestari	039.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	121,000	Aug - Dec 2021*
PT Solusi Sumber Energi	040.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	15,000	Aug 2021*
PT Global Energi Lestari	043.PJ/061/2021	Metrik ton/ *Metric ton*	200,000	Aug - Dec 2021*

*) Berlaku sampai kuota terpenuhi

*) *Valid until quota fulfilled*

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

i. Batubara (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk dan atas nama Menteri ESDM menerbitkan surat No. B-1605/MB.05/DJB.B/2021 ("Surat B-1605") yang antara lain mengatur bahwa seluruh pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK Kelanjutan Kontrak/Perjanjian Operasi, dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara (a) dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022; (b) wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PLN dan *Independent Power Producer* ("IPP") ; dan (c) dalam hal sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan/atau telah dimuat di kapal, harus segera dikirim ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") milik Grup PLN dan IPP yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PLN. Dalam Surat B-1605 juga terdapat informasi bahwa larangan ekspor batubara akan dievaluasi dan ditinjau berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga batubara PLN dan IPP.

Pada tanggal 19 Januari 2022, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 yang mengatur tentang pedoman pengenaan sanksi administratif, larangan ekspor batubara, pengenaan denda dan pemberian dana kompensasi untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Fuel Supply Agreements *(continued)*

i. Coal (continued)

On 31 December 2021, the Director General of Mineral and Coal for and on behalf of Minister of EMR issued letter No. B-1605/MB.05/DJB.B/2021 ("Letter B-1605") which, among others, stipulated that all holders of CCA/CCoW, IUP, IUPK Operation Production, IUPK for the Continuation of Contract/Agreement Operation, and holders of Coal Transportation and Sales Permit (a) are prohibited from selling coal overseas from 1 to 31 January 2022; (b) must supply all of its coal production to meet electricity needs for public interests in accordance with DMO fulfilment and/or assignment from the Government to companies and/or contracts with PLN and Independent Power Producer ("IPP"); and (c) in the event that coal is already available at the loading port and/or has been loaded on a ship, it must immediately be sent to the Coal-Fired Steam Power Plant belonging to PLN Group and IPP, the implementation of which will be concluded with PLN. There is also information in Letter B-1605 that the prohibition on coal exports will be evaluated and reviewed based on the realisation of coal supply for coal fired power plants of PLN and IPP.

On 19 January 2022, the MoEMR issued Ministerial Decree No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 which stipulates the guidelines for imposing administrative sanctions, prohibition of coal exports, imposing fines and providing compensation funds to fulfil domestic coal requirements.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/89 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

i. Batubara (lanjutan)

Harga dasar batubara di tempat penyerahan *stockpile* unit berkisar antara Rp466.237 (nilai penuh) sampai dengan Rp921.941 (nilai penuh) per ton, yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fusion Temperature* ("AFT"), *Hardgrove Grindability Index* ("HGI") dan ukuran batubara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang AS$, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

ii. Gas

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Fuel Supply Agreements *(continued)*

i. Coal (continued)

The stockpile price of coal ranges from Rp466,237 (full amount) to Rp921,941 (full amount) per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, Ash Fusion Temperature ("AFT"), Hardgrove Grindability Index ("HGI") and coal size.

Based on the Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia No. 07 year 2017 regarding the Procedures of Coal and Metal Sales Pricing, the base prices in all contracts above will be reviewed quarterly to justify the price with the exchange rate from Rupiah to US$, and the HSD basic price for industries.

In relation to the coal sales and purchase agreement, suppliers are obliged to submit their performance guarantees.

ii. Gas

Sektor/*Sector*	Pemasok/*Supplier*	Nomor dan tanggal kontrak/ *Contract number and date*	Jumlah yang disepakati/ *Agreed quantity*		
			Periode/ *Periods*	Satuan/*Unit of measure*	Jumlah/ *Quantity*
Gresik	PT Pertamina Hulu Energi WMO	Kesepakatan Bersama Perjanjian Jual Beli Gas	2002 - 2023	TBTU	837,692
Gresik	PGN SAKA (SIPL)	Amandemen GSA 8 Nov 2011	2011 - 2026	BCF	330.20
Gresik	Kangean Energy Indonesia	462.PJ AMDII/041/DIR/2010 beserta Amandemen dan Kesepakatannya	2008 - 2028	TBTU	371.00
Gresik	PT Petrogas Jatim Utama	061.PJ/061/2013 beserta Addendum dan kesepakatannya	2016 - 2023	BCF	41.59
				TBTU	7.30
Gresik	Santos (Madura Offshore) Peluang	Amandemen 0380-1.PJ/EPI.01.02/B01000000/2020	2020 - 2021	TBTU	120.80
Muara Karang	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	0198-2.PJ/EPI.03.02/DITDAN/2017	2017 - 2022	TBTU	185.87
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara	0364.Pj/EPI.01.02/B01000000/2020	2019 - 2021*	TBTU	18.06
Muara Tawar	PT Perusahaan Gas Negara	0364.Pj/EPI.01.02/B01000000/2020	2019 - 2021*	TBTU	21.78
Muara Tawar	PT Pertamina EP	0103-2.PJ/EPI.01.02/DIR/2019	2018 - 2024	BBTU	29,244
Muara Karang & Muara Tawar	PT Nusantara Regas	PLN.273.PJ/041/DIR/2012	2012 - 2022	Kargo/ *Cargo*	191
Muara Karang & Muara Tawar	PT Tangguh PSC	0237.PJ/EPI.01.02/DIRUT/2016	2012 - 2034	Kargo/ *Cargo*	732
Muara Karang & Muara Tawar	PT Pertamina (Persero)	0592.PJ/EPI.01.02/DITDAN-2/2017	2017 - 2022	BBTU	Sesuai kebutuhan

*) Dalam proses perpanjangan

Harga realisasi pembelian gas pipa pada titik penyerahan di tahun 2021 berkisar antara AS$2,38 sampai dengan AS$12,55 dan Rp33.960 (nilai penuh) sampai dengan Rp179.076 (nilai penuh) per *Million British Thermal Unit* ("MMBTU")/ *Million Standard Cubic Feet* ("MSCF").

*) *In the extension progress*

The gas pipe purchase prices at the point of delivery range from US$2.38 to US$12.55 and Rp33,960 (full amount) to Rp179,076 (full amount) per Million British Thermal Unit ("MMBTU")/ Million Standard Cubic Feet ("MSCF").

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

iii. Bahan Bakar Minyak ("BBM")

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diaddendum pada tanggal 16 Mei 2007, dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mid Oil Platts Singapore* ("MOPS") ditambah PPN untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN paling lambat tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun (angka penuh); (vi) perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011; dan (vii) Sucofindo ditunjuk sebagai surveyor independen.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 17 Desember 2021, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Selama masa negosiasi, formula harga baru untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, menggunakan formula harga sementara yang telah disepakati pada addendum untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.

32. *COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

a. *Fuel Supply Agreements* *(continued)*

iii. Fuel

The Company through PLN and Pertamina entered into a Fuel Sell and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated 8 October 2001. This agreement has been amended on 16 May 2007, whereby PLN and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period from 1 January until 30 April 2007 was determined by Pertamina and, that the fuel price of 109.5% from Mid Oil Platts Singapore ("MOPS") plus VAT was used for the period from 1 May 2007 until 31 December 2007; (ii) the fuel price subsequent to 31 December 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payments with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective from 1 May 2007, the unpaid balances of payables for purchases of fuel until 30 April 2007 will bear interest at a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by the issuance of PLN Bonds, which is no later than 31 August 2007; (v) the maximum payables to Pertamina, including the bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion (full amount); (vi) this agreement is valid for 5 years which is from 1 January 2007 until 31 December 2011; and (vii) that Sucofindo is assigned as an independent surveyor.

The agreement has been amended several times. Based on Amendment VIII dated 17 Desember 2021, the agreement on the sale and purchase price of fuel oil (HSD and MFO) from 1 January 2021 to 31 December 2023 between Pertamina and the Company is as follows:

a. During the negotiation period, the new price formula for the period of 1 January 2021 to 31 December 2021, using the provisional price formula agreed in the amendment for the period of 1 January 2018 to 31 December 2020.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/91 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

iii. Bahan Bakar Minyak ("BBM") (lanjutan)

b. Bersamaan dengan hal tersebut, akan disepakati formula harga baru untuk periode terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD dan MFO selama tahun 2021 berdasarkan harga tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp833.450 dan Rp219.841 yang disajikan sebagai utang usaha dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PPA")

Perusahaan memiliki sejumlah PPA dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

c. Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan

Pada tanggal 7 Maret 2016, Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit PLTU dan PLTGU di Jawa. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Aset ("AMC") yang terdiri atas:

i. Pengelolaan Aset PLTGU Blok II Muara Karang antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Barat pada tanggal 10 Februari 2020.
ii. Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang dan PLTGU Blok V Muara Tawar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Tengah pada tanggal 10 Februari 2020.
iii. Pengelolaan Aset PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-Awar antara Perusahaan dan PLN Regional Jawa Bagian Timur dan Bali pada tanggal 10 Februari 2020.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

a. Fuel Supply Agreements *(continued)*

iii. Fuel (continued)

b. At the moment, a new price formula will be agreed for the period starting from 1 January 2022 to 31 December 2023.

The Company has recorded purchases of HSD and MFO for the year 2021 based on those prices.

As at 31 December 2021 and 2020, the payables on purchases of fuel from Pertamina amounted to Rp833,450 and Rp219,841, respectively which are presented as trade payables in the consolidated statements of financial position.

b. Power Purchase Agreements ("PPA")

The Company has various PPAs with PLN. Under those agreements, PLN will pay the Company for the supply of electricity at the amount determined based on the payment formula. Such a payment formula includes the cost of capacity, energy, as well as operations and maintenance components which depends on the level of energy supplied and other variables as stipulated in the agreement.

c. Supply and Maintenance Agreements

On 7 March 2016, the Company and PLN entered into an Asset Management Services Master Agreement of PLTU and PLTGU in Java. This agreement was followed by an Asset Management Contract ("AMC") consisting of:

i. Asset Management of PLTGU Block II Muara Karang between the Company and PLN Region West Java on 10 February 2020.
ii. Asset Management of PLTU Indramayu, PLTU Rembang and PLTGU Block V Muara Tawar between the Company and PLN Region Central Java on 10 February 2020.
iii. Asset Management of PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan and PLTU Tanjung Awar-Awar between the Company and PLN Eastern Java and Bali on 10 February 2020.

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan (lanjutan)

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pengelolaan Aset antara PLN dan PJB tentang Pengelolaan Aset PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTGU Muara Karang Blok 2 dan PLTGU Muara Tawar Blok 5 pada tanggal 14 September 2021.

Sehubungan dengan adanya pengalihan Fungsi Aset Manager dan Aset Operator Pembangkit dari PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara ("PLN UIKSBU") dan PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung ("PLN UIW BABEL") kepada Perusahaan. Pada tanggal 26 Maret 2018, Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit di Sumatera. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan AMC yang terdiri atas:

i. Pengelolaan Aset Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ("PLTMG") Arun antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 11 April 2018. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum V, pada tanggal 27 November 2020.
ii. Pengelolaan Aset PLTU Air Anyir Bangka dan PLTU Belitung antara Perusahaan dan PLN UIW BABEL pada tanggal 11 April 2018. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum II, pada tanggal 26 November 2021.
iii. Pengelolaan Aset PLTU Tenayan antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 3 Desember 2018. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum IV, pada tanggal 26 November 2021.
iv. AMC PLTU Tembilahan antara Perusahaan dan PLN UIKSBU pada tanggal 18 Oktober 2018. Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan amandemen pada tanggal 27 Juli 2020.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. Supply and Maintenance Agreements *(continued)*

The agreements have been amended several times with the latest amendment, Amendment and Restatement for Asset Management Contract between PLN and PJB about Asset Management of PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTGU Muara Karang Blok 2 dan PLTGU Muara Tawar Blok 5 being dated 14 September 2021.

Regarding the transfer function of Asset Manager and Asset Operator Power Plant from PLN Unit Induk Pembangkitan North Sumatera ("PLN UIKSBU") and PLN Region Bangka Belitung ("PLN UIW BABEL") to the Company. On 26 March 2018, the Company and PLN entered into an Asset Management Services Master Agreement for the Power Plant in Sumatera. This agreement was followed by an AMC consisting of:

i. Asset Management of Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ("PLTMG") Arun between the Company and PLN UIKSBU on 11 April 2018. The agreement has been amended several times with the latest amendment, Amendment V, being dated 27 November 2020.

ii. Asset Management of PLTU Air Anyir Bangka and PLTU Belitung between the Company and PLN UIW BABEL on 11 April 2018. The agreement has been amended several times with the latest amendment, Amendment II, being dated 26 November 2021.

iii. Asset Management of PLTU Tenayan between the Company and PLN UIKSBU on 3 December 2018. The agreement has been amended several times with the latest amendment, Amendment IV, being dated 26 November 2021.

iv. AMC of PLTU Tembilahan between the Company and PLN UIKSBU on 18 October 2018. In 2020, the Company made the first amendment on 27 July 2020.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/93 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan (lanjutan)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perusahaan sebagai Aset Manager dan Aset Operator Pembangkit oleh PLN Regional Jawa Bagian Barat ("JBB"), Regional Jawa Bagian Tengah ("JBT"), dan Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara ("JBTBN"). Pada tanggal 29 November 2019, Perusahaan dan PLN menandatangani Perjanjian Induk Pengelolaan Aset Pembangkit. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan AMC yang terdiri atas:

- AMC CNG Plant Gresik antara Perusahaan dan PLN JBTBN tanggal 11 Desember 2019. Perusahaan menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian AMC PLTGU Muara Karang Peaker dan CNG Plant Gresik antara PLN dan PJB pada tanggal 14 September 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan PJB ditetapkan sebagai pemilik aset.

Untuk pengembangan bisnis di Luar Jawa, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan, diantaranya:

- Perjanjian induk PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW), tanggal 17 Juli 2014. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum VI, pada tanggal 25 Maret 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2021 atau berlakunya kontrak OM baru.
- Perjanjian induk PLTU Pulang Pisau (2x60 MW), tanggal 10 Februari 2015. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum X, pada tanggal 25 Maret 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2021.
- Perjanjian induk PLTU Ketapang (2x10 MW), tanggal 11 Maret 2016. Perjanjian ini ditingkatkan menjadi tahap *Performance Based* pada tanggal 29 Mei 2020. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Mei 2025.

32. *COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

c. *Supply and Maintenance Agreements* *(continued)*

In connection with the stipulation of the Company as an Asset Manager and Asset Operator for the Generators in the PLN Region West Java ("JBB"), Region Central Java ("JBT"), and Eastern Java, Bali and Nusa Tenggara ("JBTBN"). On 29 November 2019, the Company and PLN entered into an Asset Management Contract Master Agreement for power plant. This agreement was followed by an AMC consisting of:

- *AMC of CNG Plant Gresik between the Company and PLN JBTBN dated 11 December 2019. The Company signed Amendment and Restatement of the AMC PLTGU Muara Karang Peaker and CNG Plant Gresik Agreement between PLN and PJB being dated 14 September 2021. The contract period is until PJB is determined as the owner of the asset.*

Regarding the expansion outside Java, the Company has entered into an Operation and Maintenance Service Agreements which consist of:

- *Main agreement with PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW), dated 17 July 2014. The agreement has been amended several times with the latest amendment, Amendment VI, being dated 25 March 2021. The contract period is until 31 December 2021 or enter into a new OM contract.*
- *Main agreement with PLTU Pulang Pisau (2x60 MW), dated 10 February 2015. The agreement has been amended several times with the latest amendment, Amendment X, being dated 25 March 2021. The contract period is until 31 December 2021.*
- *Main agreement with PLTU Ketapang (2x10 MW), dated 11 March 2016. The contract has been upgraded to Performance Based on 29 May 2020. The contract period is until 31 May 2025.*

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan (lanjutan)

Untuk pengembangan bisnis di Luar Jawa, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan, diantaranya: (lanjutan)

- Perjanjian induk PLTU Amurang (2x25 MW), tanggal 30 Oktober 2013. Perjanjian ini ditingkatkan menjadi tahap *Performance Based* kontrak 5 tahun pada tanggal 16 Januari 2017. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum III, pada tanggal 25 Februari 2022. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2022.
- Perjanjian induk PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) tanggal 19 September 2013. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum XIII, pada tanggal 30 Juni 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2021.
- Perjanjian induk PLTU Kendari Unit #3 (1x10 MW) tanggal 13 April 2015. Perusahaan melakukan amandemen kesatu PLTU Kendari Unit #3 tahap *Supporting Based* pada tanggal 24 April 2018.
- Perjanjian induk PLTU Anggrek tanggal 12 September 2018. Perjanjian ini ditingkatkan setelah *Commercial Operation Date ("COD")* sampai dengan *Final Acceptance Certificate ("FAC")* pada tanggal 30 September 2019.
- Perjanjian induk PLTU Ampana tanggal 12 September 2018. Perjanjian ini ditingkatkan setelah COD sampai dengan FAC tanggal 1 November 2019.
- Perjanjian induk PLTU Bolok (2x16,5 MW) dan PLTU Ropa (2x7 MW) pada tanggal 29 November 2019. Perjanjian ini ditingkatkan menjadi AMC pada tanggal 20 Desember 2019.
- Perjanjian induk PLTU Tidore (2x7 MW) tahap *Supporting Based* tanggal 12 Januari 2015. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum IV, pada tanggal 28 Desember 2020. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2022.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. Supply and Maintenance Agreements *(continued)*

Regarding the expansion outside Java, the Company has entered into an Operation and Maintenance Service Agreements which consist of: (continued)

- *Main agreement with PLTU Amurang (2x25 MW), dated 30 October 2013. The contract has been upgraded to Performance Based five years contract phase on 16 January 2017. The agreement has been amended several times with the latest amendment, Amendment III, being dated 25 February 2022. The contract period is until 31 December 2022.*
- *Main agreement with PLTU Nii Tanasa Kendari (2x10 MW) on 19 September 2013. The agreement has been amended several times with the latest amendment, Amendment XIII, being dated 30 June 2021. The contract period is until 31 December 2021.*
- *Main agreement with PLTU Kendari Unit #3 (1x10 MW) on 13 April 2015. The Company has first amendment PLTU Kendari Unit #3 Supporting Based phase on 24 April 2018.*
- *Main agreement with PLTU Anggrek on 12 September 2018. The contract was upgraded after the Commercial Operation Date ("COD") until the Final Acceptance Certificate ("FAC") on 30 September 2019.*
- *Main agreement with PLTU Ampana on 12 September 2018. The contract was upgraded after the COD until the FAC on 1 November 2019.*
- *Main agreement with PLTU Bolok (2x16.5 MW) and PLTU Ropa (2x7 MW) on 29 November 2019. This contract was upgraded to AMC on 20 December 2019.*
- *Main agreement with PLTU Tidore (2x7 MW) Supporting Based phase on 12 January 2015. The agreements have been amended several times with the latest amendment, Amendment IV, being dated 28 December 2020. The contract period is until 31 December 2022.*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/95 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian Pengadaan dan Pemeliharaan (lanjutan)

Untuk pengembangan bisnis di Jawa, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan, diantaranya: (lanjutan)

- Perjanjian induk PLTG Duri pada tanggal 18 Agustus 2011. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum IX, pada tanggal 23 Desember 2020. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2021.
- Perjanjian jasa operasi dan pemeliharaan PLTU Sambelia (2x50 MW) tahap *Supporting Based* pada tanggal 29 November 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 30 November 2022.
- Perjanjian induk PLTA Wonorejo tahap *Performance Based* pada tanggal 1 November 2010. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum VI, pada tanggal 30 Desember 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2024.
- Perjanjian induk PLTA Ampel Gading tahap *Performance Based* pada tanggal 1 November 2010. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Addendum V, pada tanggal 30 Desember 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2024.
- Perjanjian induk PLTD Bawean tahap *Performance Based* pada tanggal 1 Oktober 2019. Perjanjian tersebut terakhir diubah yaitu Addendum II, pada tanggal 23 Juni 2021. Masa penyelesaian kontrak sampai dengan 31 Desember 2023.

d. Perolehan barang modal

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahan telah menandatangani perjanjian novasi dengan PLN, Konsorsium Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. dan PT Hutama Karya (Persero) sehubungan dengan Perjanjian Kontrak No. 0125.PJ/DAN.02.01/ DIR/2017, tertanggal 29 Maret 2017 untuk proyek *add on* PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4.

32. *COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

c. Supply and Maintenance Agreements *(continued)*

Regarding the expansion in Java, the Company has entered into an agreement Operation and Maintenance Service Agreements which consist of: (continued)

- *Main agreement with PLTG Duri on 18 August 2011. The agreements have been amended several times with the latest amendment, Amendment IX, being dated 23 December 2020. The contract period is until 31 December 2021.*
- *Operation and maintenance service agreement with PLTU Sambelia (2x50 MW) Supporting Based phase on 29 November 2021. The contract period is until 30 November 2022.*
- *Main agreement with PLTA Wonorejo for the Performance Based phase on 1 November 2010. The agreements have been amended several times with the latest amendment, Amendment VI, being dated 30 December 2021. The contract period is until 31 December 2024.*
- *Main agreement with PLTA Ampel Gading for the Performance Based phase on 1 November 2010. The agreements have been amended several times with the latest amendment, Amendment V, being dated 30 December 2021. The contract period is until 31 December 2024.*
- *Main agreement with PLTD Bawean for the Performance Based phase on 1 October 2019. The latest amendment, Amendment II, being dated 23 June 2021. The contract period is until 31 December 2023.*

d. Capital expenditures

On 19 December 2017, the Company signed a novation agreement with PLN, Consortium of Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. and PT Hutama Karya (Persero) which entered into an agreement with Trade Agreement No. 0125.JP/DAN.02.01/DIR/ 2017, dated 29 March 2017 for the add on project of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3 and 4.

32. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Litigasi

Pada tahun 2019, Ronald Manurung dan rekan ("Penggugat") mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Cikarang atas tanah seluas 11.918 m2 yang telah dipergunakan oleh PLN dan PT PJB Unit Pembangkit Muara Tawar ("UPMT") dengan meminta pembayaran ganti rugi sebesar Rp33.836. Dari hasil persidangan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Pada tanggal 6 Mei 2020, penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses kasasi oleh Penggugat pada Mahkamah Agung.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil litigasi di atas belum dapat dipastikan dan estimasi andal tidak dapat ditentukan pada saat ini, atau Grup memiliki dasar yang kuat dalam kasus ini karena keputusan pengadilan terakhir menguntungkan Grup, sehingga tidak ada provisi kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

e. Litigation

In 2019, Ronald Manurung and partners ("Plaintiff") filed claims for compensation in the Cikarang District Court over a land area of 11,918 sqm that has been used by PLN and PT PJB Muara Tawar Unit ("UPMT") by asking for a compensation payment of Rp33,836. From the results of the Cikarang District Court, the Plaintiff's claim was rejected in its entirely. On 6 May 2020, plaintiff submitted an appeal to Supreme Court. As at the completion date of the consolidated financial statements, this case is still in the process of being appealed by the Plaintiff at the Supreme Court.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the result of the above litigation is either still uncertain and no reliable estimate can be made at this point, or the Group has strong grounds supporting the case as the recent court decisions were in the favour of the Group, therefore no provision has been recorded in these consolidated financial statements.

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, piutang kepada ventura bersama dan deposito jangka panjang sebesar Rp30.842.012 (2020: Rp30.883.935) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, liabilitas sewa dan pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp6.397.372 (2020: Rp6.389.289) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Categories and classes of financial instruments

As at 31 December 2021, the Group classified its cash and cash equivalents, time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits, receivables from joint ventures and long-term time deposits amounting to Rp30,842,012 (2020: Rp30,883,935) as financial assets at amortised cost.

As at 31 December 2021, the Group classified its trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities and loans from a shareholder amounting to Rp6,397,372 (2020: Rp6,389,289) as financial liabilities carried at amortised cost.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/97 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko, Grup telah memiliki panduan dalam bentuk Pedoman Umum Manajemen Risiko. Pedoman ini mengatur keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko keuangan.

Risiko keuangan utama Grup adalah pada risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Grup menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh dari ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Grup. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

i. Manajemen risiko mata uang asing

Grup memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga Grup terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Kebijakan Grup untuk mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies

The objectives and policies of the Group's financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risks and interest rate risks), credit risks and liquidity risks. The Group operates within defined policies approved by the Board of Directors.

In performing the risk management, the Group has established a guidance in the form of a Risk Management General Manual. This manual provides guidance to manage the harmonisation between the business's operational function and financial risk management.

The main financial risks of the Group are market risks (including foreign currency risks and interest rate risks), credit risks and liquidity risks. The management evaluates and establishes policies for managing each of these risks. The Group applies the financial risk management policies to minimise the impact of the financial risks unpredictability on the Group's financial performance. The summary of the financial risk management policies is as follows:

i. Foreign currency risk management

The Group has foreign currency exposures arising from transactions with customers and suppliers which are denominated in foreign exchange, therefore the Group is exposed to exchange rate fluctuations.

The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

i. Foreign currency risk management *(continued)*

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes only after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

	Dampak pada laba setelah pajak dalam AS$/ *Effect of profit after tax in US$*				
	2021		2020		
	+10%	-10%	+10%	-10%	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	111,686	(111,686)	84,068	(84,068)	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka	-	-	2,321	(2,321)	*Time deposits*
Piutang lain-lain	2,262	(2,262)	2,566	(2,566)	*Other receivables*
Deposito jangka panjang	-	-	51,861	(51,861)	*Long-term time deposits*
Piutang kepada ventura bersama	70,324	(70,324)	62,179	(62,179)	*Receivables from joint ventures*
Sub-jumlah	184,272	(184,272)	202,995	(202,995)	*Sub-total*
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Pinjaman dari pemegang saham	(188,542)	188,542	(194,850)	194,850	*Loans from a shareholder*
Utang usaha	(662)	662	(80,772)	80,772	*Trade payables*
Sub-jumlah	(189,204)	189,204	(275,622)	275,622	*Sub-total*
Jumlah	**(4,932)**	**4,932**	**(72,627)**	**72,627**	***Total***

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Grup hanya terekspos risiko tingkat suku bunga melalui saldo kas di bank dan pinjaman dari pemegang saham.

ii. Interest rate risk management

As at 31 December 2021 and 2020, management believes that the exposure from interest rate risk is minimal because the Group is exposed interest rate risk only from cash in bank and loans from a shareholder.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/99 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika tingkat suku bunga atas pinjaman dari pemegang saham 50 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp9.411 (2020: Rp9.721).

iii. Manajemen risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2021, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp30.840.208 (2020: Rp30.881.262). Risiko kredit terutama berasal dari rekening bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, piutang kepada ventura bersama dan deposito jangka panjang.

Semua rekening bank, deposito berjangka, dan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank lokal yang memiliki reputasi.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

ii. Interest rate risk management *(continued)*

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments after tax at the reporting date. The analysis has been prepared by assuming that the amounts of assets and liabilities that were outstanding at the end of the reporting period were outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables being held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in interest rates after considering the current economic conditions.

As at 31 December 2021, if interest rates on loans from a shareholder had been 50 basis points higher/lower with all other variables being held constant, the post-tax profit for the year would have been Rp9,411 (2020: Rp9,721) lower/higher.

iii. Credit risk management

As at 31 December 2021, the total maximum exposure from credit risk was Rp30,840,208 (2020: Rp30,881,262). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits, receivables from joint ventures and long-term time deposits.

All of the cash in banks, time deposits and restricted cash in banks and time deposits are placed in reputable local banks.

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, PLN memberikan kontribusi masing-masing sebesar 99,24% dan 99,14% dari seluruh nilai piutang usaha. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit dari PLN rendah dimana Grup telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN untuk penjualan listrik dan jasa lainnya.

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Kualitas kredit aset keuangan Grup dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat internal. Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan sistem peringkat grup. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit dan Sistem Peringkat Perusahaan Grup dinilai sebagai berikut:

- Tingkat tinggi
  Aset keuangan tingkat tinggi meliputi kas dan setara kas kepada pihak ketiga atau bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh sebab itu, risiko kredit adalah minimal. Untuk piutang usaha, pelanggan maupun pihak berelasi dapat diberi peringkat tingkat tinggi jika tidak memiliki kesulitan keuangan, tidak terjadi pelanggaran kontrak, tidak ada pemberian keringanan dan memiliki kelangsungan usaha.

- Tingkat rendah
  Aset keuangan peringkat rendah termasuk piutang usaha yang tidak diklasifikasikan sebagai tingkat tinggi. Untuk piutang usaha, pelanggan dapat diberi peringkat rendah jika pelanggan memiliki kesulitan keuangan, melakukan pelanggaran kontrak, menerima pemberian keringanan, dan tidak memiliki kelangsungan usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kualitas kredit semua aset keuangan Grup berada dalam klasifikasi tingkat tinggi.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iii. Credit risk management *(continued)*

As at 31 December 2021 and 2020, PLN gave a contribution of 99.24% and 99.14% from the total trade receivables, respectively. Management believes that the credit risk is limited because the credit default of PLN is low since the Group has legally binding agreement with PLN for sales of electricity and other services transactions.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, have an impairment loss assigned to them on an individual basis.

The credit quality of the Group's financial assets is assessed and managed using internal ratings. The credit quality is monitored using the group rating system. The rating system is assessed and updated regularly to maintain accurate and consistent risk ratings. The Group's internal ratings are as follows:

- *High grade*
  High grade financial assets include cash and cash equivalents to counterparties with good credit ratings or bank standings. Consequently, the credit risk is minimal. For trade receivables, a customer or a related party, is given a high grade rating if it does not have any financial difficulties, if there are no breaches of contract, or waivers and if it will be able to continue as a going concern.

- *Low grade*
  Low grade financial assets include trade receivables that are not classified as high grade. For trade receivables, a customer is given a low grade rating if it is deemed to have a financial difficullty, if there is a breach of contract, or waivers and if it will not be able to continue as going concern.

As at 31 December 2021 and 2020, all of the Group's financial assets are classified as high grade.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/101 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan nilai tukar kurs asing yang relevan pada akhir periode pelaporan. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar adalah sebagai berikut:

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or other financial assets. The ultimate responsibility for liquidity risk management was in the Directors, who have built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's funding and liquidity management requirements. The Group manages its liquidity risk by maintaining adequate cash and reserve borrowing facilities by continuously monitoring the forecast and actual cash flows and by matching the maturity profiles of financial liabilities and assets.

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment periods as at 31 December 2021 and 2020. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest dates on which the Group can be required to pay. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortisation is translated using the relevant foreign exchange rate at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest dates on which the Group may be required to pay was as follows:

	2021					
	Dalam satu tahun/*Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/*More than one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/*More than three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/*More than five years*	Jumlah/*Total*	
Utang usaha	3,261,362	-	-	-	3,261,362	*Trade payables*
Liabilitas sewa	54,450	52,926	-	-	107,376	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	597,040	-	-	-	597,040	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	61,761	-	-	-	61,761	*Accrued expenses*
Pinjaman dari pemegang saham	260,875	512,733	500,602	1,313,970	2,588,180	*Loans from a shareholder*
Jumlah	**4,235,488**	**565,659**	**500,602**	**1,313,970**	**6,615,719**	***Total***

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

iv. Liquidity risk management (continued)

	2020					
	Dalam satu tahun/*Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/*More than one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/*More than three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/*More than five years*	Jumlah/*Total*	
Utang usaha	3,048,614	-	-	-	3,048,614	*Trade payables*
Liabilitas sewa	34,956	37,274	-	-	72,230	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	685,538	-	-	-	685,538	*Other payables*
Beban masih harus dibayar	89,391	-	-	-	89,391	*Accrued expenses*
Pinjaman dari pemegang saham	354,739	462,316	452,171	1,397,798	2,667,024	*Loans from a shareholder*
Jumlah	**4,213,238**	**499,590**	**452,171**	**1,397,798**	**6,562,797**	***Total***

Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar.

The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortisation is translated using the relevant forwards exchange curve at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

c. Manajemen modal

c. Capital management

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of equity shareholders that consist of capital stock, additional paid-in capital and retained earnings.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Group aims to minimise the cost of capital, in order to maximise its value. Therefore, the Group's policy in seeking the fundings that will always take into account the financial risks that may arise in the future.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/103 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

d. Estimasi nilai wajar

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas, deposito berjangka, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaanya, piutang usaha dan piutang lain-lain merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

2. Nilai tercatat dari piutang ventura bersama mendekati nilai wajarnya karena merupakan bunga pinjaman mengambang yang pada awalnya diakui pada nilai wajar berdasarkan tingkat bunga pasar pada saat tanggal pengakuan awal.

3. Utang usaha, utang lain-lain, dan beban masih harus dibayar merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

4. Pinjaman dari pemegang saham merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

e. Saling hapus aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

d. Fair value estimation

As at 31 December 2021 and 2020, the carrying amounts of the financial assets and liabilities approximates their fair values as follows:

1. *Cash and cash equivalents, time deposits, restricted cash in banks and time deposits, trade receivables and other receivables are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.*

2. *The carrying amount of the receivables from joint ventures approximates its fair value as they are floating interest receivables which were initially recognised at fair value based in market rates at initial recognition date.*

3. *Trade payables, other payables, and accrued expenses are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.*

4. *Loans from a shareholder comprises liabilities with floating interest rates where the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.*

e. Offsetting financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position where the Group currently has a legally enforceable right to offset the recognised amounts, and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

33. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

e. Saling hapus aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan instrumen keuangan yang diakui yang saling hapus pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

33. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

e. Offsetting financial assets and liabilities (continued)

The following table presents the recognised financial instruments that are offset as at 31 December 2021 and 2020:

	Jumlah bruto instrumen keuangan yang diakui/ *Gross amounts of recognised financial instruments*	Jumlah bruto instrumen keuangan yang diakui disalinghapuskan di laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Gross amounts of recognised financial instruments offset in the consolidated statement of financial position*	Jumlah neto instrumen keuangan yang disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Net amounts of financial instruments presented in the consolidated statement of financial position*	Jumlah terkait yang tidak disalinghapuskan di laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Related amounts not offset in the consolidated statement of financial position*		
				Jumlah yang tunduk pada pengaturan induk/ *Amounts subject to master netting arrangements*	Jumlah neto/ *Net amount*	
31 Desember 2021						***31 December 2021***
Aset keuangan						***Financial assets***
Piutang usaha	22,531,954	(577,576)	21,954,378	(4,166)	21,950,212	*Trade receivables*
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Utang usaha	3,838,938	(577,576)	3,261,362	-	3,261,362	*Trade payables*
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek	233,979	-	233,979	(4,166)	229,813	*Loans from a shareholder short-term portion*
31 Desember 2020						***31 December 2020***
Aset keuangan						***Financial assets***
Piutang usaha	25,296,923	-	25,296,923	(5,608)	25,291,315	*Trade receivables*
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek	334,725	-	334,725	(5,608)	329,117	*Loans from a shareholder short-term portion*

34. INFORMASI ARUS KAS

a. Transaksi non-kas

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas:

34. CASH FLOW INFORMATION

a. Non-cash transactions

Supplemental disclosures on non-cash investing and financing activites:

	2021	2020	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:			***Non-cash investing and financing activities:***
Saling hapus piutang usaha dengan utang usaha	9,738,649	8,892,064	*Offsetting trade receivables with trade payables*
Saling hapus piutang usaha dengan utang bunga	35,439	65,609	*Offsetting trade receivables with interest payables*
Pembayaran dividen dengan memperhitungkan piutang usaha	7,661,396	6,645,392	*Dividend payments through trade receivables offset*

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/105 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan) / ***34. CASH FLOW INFORMATION*** *(continued)*

a. Transaksi non-kas (lanjutan) / ***a. Non-cash transactions*** *(continued)*

	2021	2020	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas: (lanjutan)			***Non-cash investing and financing activities:*** *(continued)*
Penarikan deposito dengan reklasifikasi ke kas dan setara kas	-	34,002	*Withdrawal of time deposits through reclassification to cash and cash equivalents*
Penarikan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dengan reklasifikasi ke kas dan setara kas	-	33,065	*Withdrawal of restricted cash in banks and time deposits through reclassification to cash and cash equivalents*
Penambahan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dengan reklasifikasi dari deposito berjangka	23,347	-	*Placement of restricted cash in banks and time deposits through reclassification from time deposits*
Penambahan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dengan reklasifikasi dari deposito jangka panjang	122,111	-	*Placement of restricted cash in banks and time deposits through reclassification from long-term time deposits*
Penambahan aset tidak digunakan dalam operasi melalui reklasifikasi dari persediaan	13,537	-	*Additions of assets not used in operations through reclassifications from inventories*
Penambahan aset tetap dari liabilitas sewa	44,991	47,525	*Additions of property, plant and equipment through lease liability*
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	584,947	619,047	*Additions of property, plant and equipment through trade payables*
Perolehan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman	33,997	56,781	*Additions of property, plant and equipment through capitalisation of borrowing costs*
Penambahan aset tetap melalui reklasifikasi dari properti investasi	751	545	*Additions of property, plant and equipment through reclassification from investment property*
Penambahan properti investasi yang berasal dari reklasifikasi aset tetap	7,105	7,954	*Additions of investment property from reclassification of property, plant and equipment*
(Pengurangan)/penambahan nilai properti investasi melalui hasil revaluasi nilai wajar	(86,511)	39,972	*(Deductions)/additions of carrying amount of investment properties through revaluation of assets*
Penurunan nilai aset tetap melalui hasil revaluasi nilai wajar	(3,146,392)	-	*Deductions of value of assets through revaluation of property, plant and equipment*
Dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang belum diterima	2,682	-	*Dividends from associates and joint ventures that have not been received*

34. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan) / *34. CASH FLOW INFORMATION (continued)*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The below tables set out the reconciliation of the liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2021 and 2020 as follows:

	2021					
	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities*		Perubahan transaksi non-kas/ *Non-cash changes*			
	1 Januari/ *January 2021*	Arus kas/ *Cash flows*	Sewa baru/ *New leases*	Perubahan lainnya/ *Other changes*	31 Desember/ *December 2021*	
Pinjaman dari pemegang saham	2,498,086	(106,830)	-	25,949	2,417,205	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	67,660	(57,991)	44,991	5,344	60,004	*Lease liabilities*

	2020					
	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities*		Perubahan transaksi non-kas/ *Non-cash changes*			
	1 Januari/ *January 2020*	Arus kas/ *Cash flows*	Sewa baru/ *New leases*	Perubahan lainnya/ *Other changes*	31 Desember/ *December 2020*	
Pinjaman dari pemegang saham	1,668,986	883,615	-	(54,515)	2,498,086	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	-	(30,709)	46,445	51,924	67,660	*Lease liabilities*

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN / *35. EVENT AFTER REPORTING PERIOD*

a. Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 25 Januari 2022 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga susunan Dewan Komisaris and Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Based on the Notarial Deed No. 15 dated 25 January 2022, of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the changes of the composition of the Boards of Commissioners and Directors, therefore, the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

Komisaris Utama	Dedeng Hidayat	*President Commissioner*
Komisaris	Komang Parhita	*Commissioners*
	Jisman Parada Hutajulu	
	Hendra Iswahyudi	
	Emir Kresna Wardana	
	Bagus Puruhito	

b. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 10 Februari 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham dengan Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali untuk mengakuisisi 1.050.000 lembar saham atau setara dengan 1% kepemilikan atas PJBS dengan nilai peralihan sebesar Rp11.184.

b. Based on the Sale and Purchase Agreements dated 10 February 2022, the Company entered into a share sale and purchase agreement with Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali to acquire 1,050,000 ordinary shares or equivalent to 1% of PJBS with total transaction value of Rp11,184.

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/107 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI LAINNYA

Sejak awal tahun 2020, telah terjadi wabah penyakit COVID-19 di seluruh dunia, yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") sebagai pandemi. Pandemi sangat mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan jasa dan rantai pasokan.

Di saat yang sulit ini, Grup terus berupaya mempertahankan kegiatan operasional dan terus berfokus untuk tetap efisien serta melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan. Tim kesehatan, keselamatan dan lingkungan ("K3LH") di lapangan dan di Surabaya telah menerapkan langkah-langkah pencegahan maupun prosedur kesehatan yang harus dipatuhi setiap karyawan, termasuk peningkatan perilaku higienis, larangan perjalanan non esensial, penerapan jarak fisik di tempat kerja, identifikasi kelompok risiko tinggi di Grup, dan sedapat mungkin bekerja dari rumah untuk para karyawan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Setiap unit bisnis telah menyiapkan rencana manajemen krisis dan menyiapkan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Prioritas pertama Grup adalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan pemasok. Beberapa kegiatan utama yang telah Grup lakukan pada masa pandemi ini, meliputi antara lain:

a. Menjalankan program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna memastikan kesehatan karyawan.
b. Memberikan arahan dan dukungan kepada karyawan.
c. Memantau dengan cermat kapasitas infrastruktur dan keamanan kegiatan operasional.
d. Mengikuti arahan dari Pemerintah dan organisasi kesehatan.
e. Senantiasa melayani dan melibatkan pelanggan dan pemasok.
f. Mengembangkan rencana sebagaimana diperlukan.

Grup telah melakukan penilaian atas dampak kejadian ini terhadap rencana operasi dan bisnis Grup. Berdasarkan penilaian yang dilakukan di atas, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Grup sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi Grup.

36. OTHER INFORMATION

Since early 2020, there has been an outbreak of COVID-19 around the world, which the World Health Organisation ("WHO") has declared a pandemic. The pandemic may severely effect, among others, global demand for products and services and supply chains.

In this challenging time, the Group continues to strive to maintain its operational activities and continues to focus on staying efficient and protecting the health and safety of its employees. The health, safety, and environment ("K3LH") teams in the sites and in Surabaya have implemented preventive measures and health procedures that every employee must comply with, including improvement of the hygienic behavior, the prohibition of non-essential travel, implementation of physical distancing in the workplace, identification of high risk groups in the Group, and wherever possible to work from home for employees who are not directly involved in production activities. Each business unit has prepared a crisis management plan and prepared the necessary preventive measures.

The Group's first priority continues to be the health, safety and well-being of the employees, customers, and suppliers. Some of the key activities that the Group has carried out during this pandemic, include among others:

a. Conducting promotional, preventive, curative, and rehabilitative programmes, to ensure the health of the employees.
b. Providing guidance and support to employees.
c. Closely monitoring infrastructure capacity and the security of the operational activities.
d. Following guidance from the Government and health organisations.
e. Continuing to serve and engage with customers and vendors.
f. Evolving our plans as necessary.

The Group has assessed the effects of the event on the Group's operations and business plan. Based on the assessment, management does not foresee any material uncertainty that may have a significant adverse impact on the Groups business and operations up to the completion date of these consolidated financial statements. Management will closely monitor the developments of the COVID-19 pandemic and take the necessary actions in relation to its impact on the business, the financial position and operating results of the Group.

37. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022.

37. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorised for issue on 31 March 2022.

REFERENSI KRITERIA ARA

ARA Criteria References

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
I	**Umum** **General**		
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. The annual report is presented in proper and correct Bahasa Indonesia and is recommended to be presented in English as well		✓
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The annual report is printed in fine quality, with easy-to-read font types and sizes.		✓
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. The annual report presents clear identity of the company.		✓
4	Nama perusahaan dan tahun *Annual Report.* Company's name and the year of Annual Report.	Nama perusahaan dan tahun *annual report* ditampilkan di: Company's name and the year of Annual Report are shown in: 1. Sampul muka; Front cover; 2. Samping; Side margin; 3. Sampul belakang; dan Back cover; and 4. Setiap halaman. Every page.	✓
5	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. The annual report is available on the company's website.	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. Includes the current annual report and at the very least the last 4 years.	✓
II	**Ikhtisar Data Keuangan Penting** **Important Financial Data Highlights**		
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information on the Company's operational results with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. **Catatan:** Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total. The information contains, among others: 1. Sales/revenues; 2. Profit (loss): a. Attributable to the owner of the parent entity; and b. Attributable to the non-controlling interest; 3. Comprehensive income for the period: a. Attributable to the owner of the parent entity; and b. Attributable to the non-controlling interest; and 4. Profit (loss) per share. **Remark:** If the company does not have any subsidiary, the company presents profit (loss) and comprehensive income for the period in total.	34-36

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information on the Company's financial position with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. The information contains, among others: 1. Total investments in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity.	37-39
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial ratios in the form of comparisons throughout 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. The information encloses 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the company's industry.	40-43
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Information on stock price in tables and charts.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan. The information contains, among others: 1. Number of outstanding shares; 2. The information in tables covers: a. Market capitalization based on the Stock Exchange price where the shares were listed; b. The highest, lowest, and closing price of shares based on the Stock Exchange where the shares were listed; and c. Share trading volume on the Stock Exchange where the shares were listed. 3. Information in charts contains at least: a. The closing price of shares based on the Stock Exchange where the shares were listed; and b. Share trading volume on the Stock Exchange where the shares were listed for every quarter in the last 2 (two) years. **Remark:** if the company does not have market capitalization, information on shares price, and share trading volume, explanation shall be given.	48

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Information on outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds of the last 2 (two) fiscal years.	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan. The information covers: 1. Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds; 2. Interest rate/yield; 3. Maturity date; and 4. Bonds/sukuk rating. **Remark:** if the company does not have bonds/sukuk/convertible bonds, explanation shall be given.	48
III	**Laporan Dewan Komisaris dan Direksi** **Reports of the Board of Commissioners and Board of Directors**		
1	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan *whistleblowing system* (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Contains the following: 1. Assessment on the Board of Directors' performance on the company's management and the basis for the assessment; 2. Perspective on the company's business prospects set by Board of Directors and its basic consideration; 3. Assessment on the whistleblowing system (WBS) implementation/management in the company, and the Board of Commissioners' role in the WBS; and 4. Changes in the Board of Commissioners' composition and the reason behind the change (if any).	62-77
2	Laporan Direksi Board of Directors' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. Kebijakan strategis; b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Contains the following: 1. Analysis of the company's performance, which among others covers: a. Strategic policies; b. Comparisons between realizations and targets; and c. Challenges faced by the company, and the steps for solving them; 2. Analysis of business prospects; 3. Development of good corporate governance implementation on the fiscal year; and 4. Changes in Board of Directors' composition and the reason behind the change (if any).	80-98

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signatures of members of Board Of Commissioners and Board of Directors	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. Contains the following: 1. Signatures are given on separate sheets; 2. Statement on full accountability by the Board of Commissioners and Board of Directors on the truthfulness of the Annual Report's contents; 3. Signed by all members of Board of Commissioners and Board of Directors by stating names and positions; and 4. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that a member of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or written explanation in separate letter from the other member(s) in the event that the person(s) concerned fails to provide a written explanation.	99-100
IV	**Profil Perusahaan** **Company Profile**		
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan Name and complete address of the company	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan *website*. The information contains, among others: name and address, postcode, telephone number, facsimile number, email, and website.	106-107
2	Riwayat singkat perusahaan Company's brief history	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. **Catatan:** apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. Includes, among others: date/year of establishment, name, changes in the company's name and the effective date of changes on the company's name (if any). **Remark:** explanation shall be given in the event that the entity has never conducted name changes	108-112
3	Bidang usaha Business sector	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Description of, among others: 1. Company's business activities in accordance with the updated Articles of Association; 2. Business activities conducted; and 3. The outcome of products and/or services.	113-127
4	Struktur Organisasi Organizational Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi. In the form of chart, consists of names and positions, at least until the position reporting directly to the Board of Directors.	136-137

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan. Includes: 1. Corporate vision; 2. Corporate mission; 3. Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners in the fiscal year; and 4. Statement on the Company's corporate culture.	132-135
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Identity and brief CV of members of Board of Commissioners	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. 1. Name; 2. Position and tenure (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Tenure); and 7. Appointment history (period and tenure) as the member of Board Of Commissioners in the Company since first appointed.	138-143
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Identity and brief CV of members of the Board of Directors	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. The information contains, among others: 1. Name; 2. Position and tenure (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Tenure); and 7. Appointment history (period and tenure) as the member of Board Of Directors in the Company since first appointed.	144-149

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing *level* organisasi. Total number of employees (2 years' comparison) and description of competency development which reflects the opportunity for each level of organization.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (*level* jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. The information contains, among others: 1. Number of employees on each organizational level; 2. Number of employees on each educational level; 3. Number of employees by employment status; 4. Data of employee competence development conducted on the fiscal year, which includes the employee (position) attended training, type of training, and the purposes of training; and 5. Incurred costs for employee competency development on the fiscal year.	158-176
9	Komposisi Pemegang Saham. Shareholders Composition.	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. **Catatan:** apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Detailed name of shareholders comprises of 20 largest shareholders and their shareholding percentage; 2. Details of shareholders and their shareholding percentage include: a. Name of shareholders with 5% or more percent of shares; and b. Community shareholding groups with their respective shareholding of less than 5%. 3. Name of Director and Commissioner as well as their shareholding percentage, directly or indirectly. **Remark:** if Director and Commissioner do not have direct and indirect share, explanation shall be given.	177-178
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi. List of subsidiaries and/or associates.	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). In the form of table, covers information: 1. Name of subsidiaries and/or associates; 2. Shareholding percentage; 3. Explanation on the subsidiaries and/or associates' field of business; and 4. Explanation of the operational status of the subsidiaries and/or associates (in operation or has not yet operate).	182-183, 184-209
11	Struktur grup perusahaan. Company's group structure.	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV). Company's group structure in the form of chart, describing the parent entity, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPVs).	179-181

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronologies of shares issuance (including private placement) and/or listing of shares from the issuance date until the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Year of share issuance, number of shares, shares' nominal value, and shares price for each corporate action; 2. Shares number listed after each corporate action; and 3. Name of stock exchange where the shares are listed. **Remark:** if the company does not have share listing chronologies, explanation shall be given.	216
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronologies of issuance and/or listing of other securities from the issuance date until the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Name of other securities, year of other securities issuance, interest rate/exchange for other securities, and other securities maturity date; 2. Offer value of other securities; 3. Name of stock exchange where the other securities are listed; and 4. Other securities rating. **Remark:** if the company does not have other securities issuance and listing chronologies, explanation shall be given.	216
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang. Names and addresses of supporting institutions and/or professions.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. The information contains, among others: 1. Name and address of Securities Administration Bureau (BAE)/parties administrating company's securities; 2. Name and address of Public Accounting Firm; and 3. Name and address of rating agency.	215
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. Awards received in the current fiscal year and/or certification that is still valid in the current fiscal year, both national and international scale.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). The information contains, among others: 1. Name of the award and/or certification; 2. Year of the achievement of awards and/or certification; 3. The agency appreciator and/or certificates; and 4. Validity period (for certification).	12-19
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Name and address for subsidiaries and/or branch offices or representative office (if any).	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. The information encloses, among others: 1. Names and addresses of subsidiaries; and 2. Names and addresses of branch/representative offices. Remark: explanation shall be given in the event that the company does not have any subsidiaries/branches/representatives.	182-183, 212-214

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
17	Informasi pada Website Perusahaan. Information on the Company's Website.	Meliputi paling kurang: 1. Informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Covers at least: 1. Information on Shareholders to last individual owner; 2. Code of Conducts; 3. Information on General Meeting of Shareholders (GMS) at least covers the agenda discussed in the GMS, Minutes of GMS, and important dates, i.e. announcement of GMS date, summoning date for GMS, date of GMS, date of announcement for Minutes of GMS; 4. Separate annual financial statements (the last 5 years); 5. Board Of Commissioners and Board of Directors' Profile; and 6. Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	217-218
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal. Education and/or training for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal, yang diikuti pada tahun buku. **Catatan:** apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan Covers at least information (type and party relevant in attending): 1. Education and/or training for Board of Commissioners; 2. Education and/or training for the Board of Directors; 3. Education and/or training for Audit Committee; 4. Education and/or training for Nomination and Remuneration Committee; 5. Education and/or training for other Committee; 6. Education and/or training for Corporate Secretary; and 7. Education and/or training for Internal Audit Unit, attended on the fiscal year. **Remark:** if there is no education and/or training on the fiscal year, explanation shall be given.	150-157
V	**Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan** **Management Discussion and Analysis of Company's Performance**		
1	Tinjauan operasi per segmen usaha. Operational review per business segment.	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. Contains descriptions of: 1. Explanation of each business segment. 2. Performance of each business segment, among others: a. Productions; b. Increase/decrease in productions capacity; c. Sales/revenues; and d. Profitability.	276-317

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Description of the company's financial performance.	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas. Analysis of financial performance containing comparisons between current financial performance and previous year's financial performance and causes for the increase/decrease (in narration and tables), among others concerning: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales/revenues, expenses, profit (loss), other comprehensive incomes, and total comprehensive profit of the current period; and 5. Cash flow.	318-355
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Discussion and analysis of the company's solvency and liquidity by presenting ratios that are relevant to the company's industry.	Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. Explanation on: 1. Solvency for short-term and long-term debts; and 2. Collectability Level of Receivables.	355-365
4	Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*). Discussion on capital structure and capital structure policy.	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. Explanation on: 1. Capital structure, consists of interest/sukuk-based debt and equity; and 2. Management policy on capital structure policies; and 3. The management basis for the capital structure policy chosen.	365-367
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. Discussion on material commitments for capital investments (not funding investment) in the current fiscal year.	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. **Catatan:** apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. Explanation on: 1. Name of the party involved in the commitments; 2. The purpose of the commitments; 3. Sources of funds expected to meet these commitments; 4. Currency used; and 5. Planned measures to protect the company from risks arising from relevant currency. **Remark:** explanation shall be given in the event that the company does not have any commitments relating to capital investments in the current fiscal year.	368-378

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Discussion on capital expenditures realized in the current fiscal year.	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Explanation on: 1. Type of capital expenditure; 2. Purposes of the capital expenditures; and 3. Investment value of capital expenditures spent in the current fiscal year. **Remark:** explanation shall be given in the event that there were no capital expenditures realizations.	379-383
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Information on comparisons between the fiscal year's targets and realizations, and expected targets or projection for the coming year relating to revenue, profit, capital structure, and other matters considered important to the company.	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. The information contains, among others: 1. Comparisons between the fiscal year's targets and realizations; and 2. Expected targets or projection for the coming year.	384-395
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Material fact and information after the accounting reporting date.	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. **Catatan:** apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Material information and facts occurring after the date of the accountant's report and its impact on future performance and business risks. **Remark:** explanation shall be given in the event that there were no significant events after	433-434
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Description of company's business prospect.	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. Description of business prospect related to the industry and economy in general, followed by quantitative supporting data from reliable sources.	451-459
10	Uraian tentang aspek pemasaran. Description of marketing aspects.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. Description of marketing aspect on company products and/or services, among other marketing strategies and market share.	448-450
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per sahamdan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of dividend policy and amount of cash dividends per share and amount of dividends per year announced or paid for the last 2 (two) fiscal years.	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. *Payout ratio*; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. **Catatan:** apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Contains descriptions of: 1. Policy on distribution of dividends; 2. Total dividends distributed; 3. Amount of cash dividends per share; 4. Payout ratio; and 5. Date of announcement and payment of cash dividends for each year. **Remark:** explanation shall be given in the event that any distribution of dividends is nonexistent.	395-398

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku. Employee and/or Management Stock Ownership Plan (ESOP/MSOP) carried out by the company until the fiscal year.	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga *exercise*. **Catatan:** apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Total ESOP/MSOP shares and its realization; 2. Term; 3. Requirements for entitled employees and/or management; and 4. Exercise price. **Remark:** explanation shall be given in the event that there is no program concerned.	400
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Realization of the use of proceeds from public offering (in the event that the company still has the obligation to report the proceed use realization).	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). **Catatan:** apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Total proceeds; 2. Planned use of the proceeds; 3. Detailed use of the proceeds; 4. Balance of proceeds; and 5. Date of GMS/GMB approval on changes in the use of proceeds (if any). **Remark:** If there is no information on realization of the use of proceeds from public offering, explanation shall be given.	400
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. Information on material transactions with conflict of interest and/or transactions with affiliated or related parties.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. **Catatan:** apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Name of affiliates and the nature of affiliation; 2. Explanation of the fairness of transaction; 3. Reason behind the transaction; 4. Realization of transactions in the current fiscal year; 5. Company policy relating to review mechanism on transactions; and 6. Compliance with relevant regulations and provisions. **Remark:** explanation shall be given in the event that there is no transaction concerned.	401-409
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. Description of regulatory changes having significant impact on the company in the current fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. **Catatan:** apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Name of the law changed; and 2. Its impacts (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or statement that the impact was not significant. **Remark:** explanation shall be given in the event that there was no regulatory change on the current fiscal year.	417-433

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Description of changes in accounting policies applied by the company in the current fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. **Catatan:** apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Amendment to accountancy policy; 2. The reasons for the amendment; and 3. Its impact quantitatively towards financial statement. **Remark:** explanation shall be given in the event that there are no changes in accounting policies.	414-416
17	Informasi kelangsungan usaha. Business continuity information.	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. *Assessment* manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan *assessment*. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Disclosure of information includes: 1. Potential matters that may significantly affect the business continuity on the current fiscal year; 2. Management assessment on matters in point 1; and 3. Management assumption in carrying out the assessment. Remark: if there were no issues that would affect Company's business continuity in the current fiscal year, the Management's assumption as the base to ensure that there were no potential issues that would significantly affect the business continuity on the current fiscal year shall be disclosed.	440-446
VI.	***Good Corporate Governence***		
1	Uraian Dewan Komisaris. Board of Commissioners' description.	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). The descriptions contain, among others: 1. Description of responsibilities of the Board of Commissioners; 2. Assessment on performance of each committee reporting directly to the Board of Commissioners and the basis of assessment; and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct of the Board of Commissioners).	495-523
2	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Independent Commissioners (the number is minimum 30% from the total of Board of Commissioners).	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Includes, among others: 1. The criteria of Independent Commissioner appointment; and 2. Statement of independence from each Independent Commissioner.	497-500

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
3	Uraian Direksi. Board of Directors' descriptions.	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). The descriptions contain, among others: 1. Scopes of work and responsibilities of each Board of Directors' member; 2. Assessment on performance of committees reporting directly to the Board of Directors (if available); and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct of Board of Directors).	524-549
4	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2021 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Assessment on GCG Implementation for the fiscal year of 2020 consisting of the very least aspects on the Board of Commissioners and Directors.	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. **Catatan:** apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2021, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. The criteria utilized in assessment; 2. Assessing party; 3. Assessment score on each criterion; 4. Assessment result recommendation; and 5. Reasons on why recommendations are not/have not yet implemented. **Remark:** If there is no assessment on GCG implementation for the fiscal year of 2021, it shall be disclosed.	471-482, 519, 546
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Description of remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors.	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). **Catatan:** apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Disclosure of remuneration procedure, from nomination to determination of remuneration for Board of Commissioners; 2. Disclosure of remuneration procedure, from nomination to determination of remuneration for Board of Directors; 3. Remuneration structure that indicates components of remuneration and nominal amount of each component for each Board of Commissioners' member; 4. Remuneration structure that indicates components of remuneration and nominal amount of each component for each Board of Directors' member; 5. Disclosure of indicators for the determination of Board of Directors' remuneration; and 6. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or stock option that are received by each Board of Commissioners and Directors' member (if available). **Remark:** If there is no performance bonus, non-performance bonus, and/or stock option that are received by each Board of Commissioners and Directors' member, it shall be disclosed.	563-569

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
6	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan). Frequency and Meeting Attendance Rate that is attended by the majority of members on Board of Commissioners' meeting (at least once in two months), Board of Directors' meeting (at least once in a month), and Joint Meeting between Board of Commissioners and Directors (at least once in four months).	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. The information contains, among others: 1. Meeting Date; 2. Meeting Participants; and 3. Meeting Agenda. for each meeting of Board of Commissioners, Board of Directors, and Joint Meetings.	509-516, 536-543
7	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Information on major and controlling shareholders, both directly and indirectly, to individual holders.	Informasi dimuat dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan Pemegang Saham utama dengan pemegang saham pengendali. **Catatan:** yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. Informal education must be disclosed in the form of a scheme or diagram that separates major Shareholders from controlling shareholders. **Remark:** what referred to as major shareholders are the party that, both directly and indirectly, has at least 20% (twenty percent) of voting right from the total of shares that are published by a company, but is not the controlling shareholders.	487-488
8	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Disclosure of affiliations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Major and/or Controlling Shareholders.	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. **Catatan:** apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Affiliate relationship between fellow members of the Board of Directors; 2. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; 3. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliation between fellow members of Board of Commissioners; and 5. Affiliation between fellow members of the Board of Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholders. **Remark:** If there is no aforementioned affiliation, it shall be disclosed.	550-552

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
9	Komite Audit. Audit Committee.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. Includes, among others: 1. The name, position, and work period of audit committee members; 2. Education history (field of study and education institution) and work experience (position, institution, and work period) of audit committee members; 3. Independence of audit committee members; 4. Description of duties and responsibilities; 5. Description of audit committee activities implementation on the fiscal year; and 6. Meeting frequency and attendance of audit committee.	574-586
10	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi. Nomination and/or Remuneration Committee.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi. Includes, among others: 1. Names, positions, and brief life history of nomination and/or remuneration committee members; 2. Independence of nomination and/or remuneration committee; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of nomination and/or remuneration committee activities implementation on the fiscal year; 5. Meeting frequency and attendance of nomination and/or remuneration committee; 6. Statements about the existence of guidelines for nomination and/or remuneration committee; and 7. Policy relating to the board of directors' succession.	600-612
11	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh Perusahaan. Other committees reporting directly to the Board of Commissioners that are owned by Company.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. Includes, among others: 1. Names, positions, and brief life history of other committee members; 2. Independence of other committee; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of other committee activities implementation on the fiscal year; and 5. Meeting frequency and attendance of others committee.	587-600
12	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. Description of duties and functions of Corporate Secretary.	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. Includes, among others: 1. Name, and brief CV of corporate secretary; 2. Domicile; 3. Description of duties and responsibilities; and 4. Description of corporate secretary's duties implementation on the fiscal year.	614-625

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
13	Uraian mengenai unit audit internal. Description of internal audit unit.	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. Includes, among others: 1. Name of head of internal audit unit; 2. The number of employee (internal auditor) on internal audit unit; 3. Certification as internal audit profession; 4. The position of internal audit unit within organizational structure; 5. Description of internal audit unit activities implementation on the fiscal year; and 6. Parties appointing and discharging head of internal audit unit.	633-651
14	Akuntan Publik. Public Accountant.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. The information contains, among others: 1. The name and year of public accountant that performs audit on annual financial statements for the past 5 years; 2. The name and year of Public Accountants Firm that performs audit on annual financial statements for the past 5 years; 3. The amount of fee for each type of service that is provided by Public Accountants Firm on the last fiscal year; and 4. Other service provided by Public Accountants Firm and public accountant other than auditing service on annual financial statement on the current fiscal year. **Remark:** explanation shall be given in the event that there is no service aforementioned.	652-655
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Description of the company's risk management.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Includes, among others: 1. Explanation of risk management system implemented by the company; 2. Explanation of review result carried out over risk management system on the fiscal year; 3. Explanation of risks experienced by the company; and 4. Efforts implemented in managing those risks.	656-688

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
16	Uraian mengenai sistem pengendalian intern. Description of internal control system.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – *internal control framework*); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. Includes, among others: 1. Brief explanation of internal control system, among them are financial and operational control. 2. Explanation of compliance between applied internal control system and regulated framework that is acknowledged internationally (COSO-internal control framework); and 3. Explanation of review result carried out over internal control system implementation on the fiscal year.	626-632
17	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Description of corporate social responsibility that is related to social responsibilities.	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial. 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup *due diligent* terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan. 3. Informasi tentang *stakeholder* penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan. 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan. 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakankan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban. 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya *stakeholders engagement* dan meningkatkan *value* untuk *stakeholder* dan *shareholder*. 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan. 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial. Includes information on: 1. Information on commitment to social responsibility 2. Information on methods and scope of due diligence on social, economic, and environmental impacts of the company activities 3. Information on important stakeholders affected or influenced by the impact of company activities 4. Information on important socio-economic and environmental issues related to the impact of company activities 5. Information on the scope of corporate social responsibility that is both an obligation or more than obligation 6. Information on the company's strategies and work programs in handling social, economic, and environmental issues in stakeholders' engagement, and increasing value for stakeholders and shareholders 7. Information on various programs that exceed the company's minimum responsibilities that are relevant to the business implementation 8. Information about financing and budgets of social responsibility	729-733

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
18	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait *core subject* Hak Azasi Manusia Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial *core subject* Hak Azasi Manusia. 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial *core subject* Hak Azasi Manusia. 3. Informasi tentang perencanaan *corporate social responsibility* bidang Hak Azasi Manusia. 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia. 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia. Includes information on: 1. Information on the commitment and policies of the core subject of social responsibility, i.e. Human Rights 2. Information on the formulation on the core subject of social responsibility, i.e. Human Rights 3. Information on the planning of the core subject of social responsibility, in Human Rights 4. Information on the CSR initiatives implementation in Human Rights 5. Information on the CSR awards and achievement in Human Rights	769-774
19	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait *core subject* Operasi yang adil. Description of corporate social responsibility related to the core subject, i.e. fair operations	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial *core subject* Operasi yang adil. 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial *core subject* operasi yang adil. 3. Informasi tentang perencanaan *corporate social responsibility* bidang operasi yang adil. 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. Includes information on: 1. Information on the commitment and policies of the core subject of social responsibility, i.e. fair operations 2. Information on the formulation on the core subject of social responsibility, i.e. fair operations 3. Information on the planning of the core subject of social responsibility, in fair operations 4. Information on the CSR initiatives implementation in fair operations 5. Information on the CSR awards and achievement in fair operations	775-784

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
20.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup. Description of corporate social responsibility related to environment.	Mencakup antara lain: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan. 2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2021 yang ditetapkan manajemen. 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. 5. Informasi tentang pelaksanaan inisitaif CSR terkait lingkungan hidup. 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. Includes, among others: 1. Information on environmental commitments and policies 2. Information on important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company 3. Information about the target/plan of activities in 2021 set forth by management; 4. Information about activities carried out in relation to the environmental programs related to the company's operational activities 5. Information on CSR initiatives related to environment 6. Information related to the quantitative impacts of such programs; and material utilization that is environment-friendly and recyclable, company's waste processing system, environmental issues complaint mechanism, considerations on credit grants to customer related to environmental aspects, etc. 7. Certification acquired in the environmental field.	785-805
21	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Description of corporate social responsibility that is related to employment, health, and work safety	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan *core subject* ketenagakerjaan. 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan. 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2021 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut. 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Corporate social responsibility commitment and policies related to employment 2. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of employment 3. Information about the target/plan of activities in 2021 set forth by management; and 4. Activities that have been carried out and quantitative effects out of those activities 5. Information related to employment, occupational health, and safety practices, such as gender equality and equal work opportunity, occupational facilities and safety, employee turnover rate, workplace accidents, remuneration, whistleblowing mechanism on employment, etc.	806-820

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
22	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Description of corporate social responsibility that is related to responsibilities to consumers.	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2021 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Goals/activity plan in the year 2021 that was established by management; and 2. Activities that have been carried out and effects from those activities 3. Related to product responsibility, such as consumer's health and safety, product information, facilities, number and response on customers' complaints, etc.	821-826
23	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Description of corporate social responsibility that is related to social and community development	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan *core subject* pengembangan sosial dan kemasyarakatan. 2. Informasi tentang isu isu sosial yang relevan dengan perusahaan. 3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan. 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2021 yang ditetapkan manajemen. 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan. 8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Core corporate social responsibility policies and commitments, the core subject of social and community development 2. Information on social issues that are relevant to the company 3. Information about social risks managed by the company 4. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of social and community development 5. Goals/activity plan in the year 2021 that was established by management; 6. Activities that have been carried out and effects from those activities; and 7. Expenditure 8. Related to social and community development, such as the use of local workforce, empowerment of surrounding communities, reparation of social facilities and infrastructure, other forms of donations, dissemination on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, etc.	827-841
24	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan. Significant cases currently faced by the company, subsidiaries, Board of Directors and/or Board of Commissioners member(s) serving during the period of the annual report	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). **Catatan:** dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Principle case/lawsuit; 2. Dispute/lawsuit settlement status; 3. Risks faced by the company and nominal value of dispute/lawsuit; and 4. Administrative sanctions imposed to Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members, by relevant authorities (capital market, banking, and others) on the current fiscal year (or statement confirming no imposition of administrative sanction exists). **Remark:** explanation shall be given in the event that the company, subsidiaries, or member of the Board of Commissioners and Board of Directors do not have any disputes.	755-759

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
25	Akses informasi dan data perusahaan. Access to information and corporate data.	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website* (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Description of the availability of company information and data to the public, such as through website (in Bahasa Indonesia and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, etc.	743-753
26	Bahasan mengenai kode etik. Discussion on code of ethics.	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Code of ethics basis; 2. Disclosure that the code of ethics applies to all levels of organization; 3. Dissemination of the code of ethics; 4. Sanctions on each type of violations that are regulated on the code of ethics (normative); and 5. Number of code of ethics violation with the sanctions given on current fiscal year. **Remark:** explanation shall be given in the event that there is no code of ethics violation in the current fiscal year.	689-701
27	Pengungkapan mengenai *whistleblowing system.* Disclosure on whistleblowing system.	Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing system* antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi *whistleblower*; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. **Catatan:** apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Consists of the description of whistleblowing system, i.e.: 1. Submission of violation reports; 2. Whistleblower protection; 3. Handling of complaints; 4. Parties handling the complaints; and 5. Number of complaints received and processed in the current fiscal year; and 6. Sanctions/follow up on the complaints when the process is finished on fiscal year. **Remark:** Explanation shall be given in the event that there are no complaints received and processed until finish on the current fiscal year.	719-782
28	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Diversity policy for the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors.	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. **Catatan:** apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. Description of Company's policy on composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors by education (field of study), work experience, age, and gender. **Remark:** explanation and consideration shall be given in the event that concerned policy is nonexistent.	557-562

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
VII	**Informasi Keuangan** **Financial Information**		
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Statements from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Accountability of Financial Statements.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with related regulations on the Accountability of Financial Statements.	845
2	Opini auditor independen atas laporan keuangan. Independent auditor's opinion on financial statements.		847
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini. Independent auditor's description of the opinion.	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor izin KAP dan nomor izin Akuntan Publik. The description consists of: 1. Names and signatures; 2. Dates of audit report; and 3. Public Accountants Firm's and Public Accountant's license numbers.	846-847
4	Laporan keuangan yang lengkap. Comprehensive Financial Statements.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Consists comprehensively of elements of financial statements: 1. Statements of financial position; 2. Statements of profit or loss and other comprehensive income; 3. Statements of changes in equity; 4. Statements of cash flows; 5. Notes on financial statements; 6. Comparative information regarding previous period; and 7. Statements of financial position at the beginning of comparative period presented when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes statements of post-financial statements, or when an entity reclarifies posts in the financial statements (if relevant).	848-961
5	Perbandingan tingkat profitabilitas. Comparison of profitability level.	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Comparison of performance/profit (loss) between current year and previous year.	850-851

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
6	Laporan Arus Kas. Statements of Cash Flow.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (*direct method*) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Fulfills the following regulations: 1. Classification in three categories of activity: operation, investment, and funding; 2. The use of direct method in cash flow reporting from operational activities; 3. Separation of presentation between cash receipts and/or cash expenses for the current year in operation, investment, and funding activities; and 4. Disclosure of non-cash transaction must be included in the notes to the financial statements.	853 913-959
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Accountancy Policy Highlights.	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. Consists at least: 1. Statement of compliance with Financial Accounting Standards (SAK); 2. Basis for the measurement and preparation of financial statements; 3. Income tax; 4. Employee benefits; and 5. Financial instruments.	856-890
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Disclosure of transactions with related parties.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. Matters to be disclosed are as follows: 1. Names of related parties and the nature of relationship with these parties; 2. Transactional value and its percentage against total revenue and relevant expenses; and 3. Total balance and its percentage against total assets or liabilities related.	908-910 936-940
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. Disclosure of matters relating to taxation.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2021; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Matters to be disclosed: 1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; 2. Explanation of relationship between tax expense (income) and accounting profit; 3. Statement acknowledging that Taxable Profits (LKP) from the reconciliation serves as the basis for Corporate Income Tax's Annual Tax Returns (SPT) year 2021; 4. Details of assets and deferred tax liabilities recognized in the financial position statement for each presenting period, and the amount of deferred tax (income) expenses recognized in the income statements if the amount is not visible in the total assets or liabilities of deferred tax recognized in the statements of financial position; and 5. Disclosure of any tax disputes.	920-925

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Disclosure of matters relating to fixed assets.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Matters to be disclosed: 1. Depreciation method used; 2. Description of accounting policy selected, either revaluation or cost model; 3. Methods and significant assumptions used to estimate fixed assets' fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets' fair value (for cost model); and 4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and the end of period by presenting: addition, reduction, and reclassification.	898-905
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. Disclosure of matters relating to operational segment.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Matters to be disclosed: 1. General information covering the factors used to identify unreported segment; 2. Information regarding profit and loss, assets, and liabilities of the reported segment; 3. Reconciliation of total revenue, profit and loss, assets, liabilities of the reported segment, and material elements of the other segments against relevant amount in the entity; and 4. Disclosure at the level of entity, covering information on products and/or services, geographical area, and main customer.	850 854 918
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. Disclosure related to financial instruments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Matters to be disclosed: 1. Details on financial instruments that are owned along with the classifications; 2. Fair value of each group of financial instruments; 3. Explanation on risks related to financial instruments; market risk, credit risk, and liquidity risk; 4. Risk management policy; and 5. Quantitative risk analysis relating to financial instruments.	949-957
13	Penerbitan laporan keuangan. Publication of financial statements.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Matters to be disclosed are as follows: 1. Authorization date of publication of the financial statements; and 2. Party responsible for authorizing financial statements.	845 961

2021 LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI (PJB)

Jl. Ketintang Baru No. 11
Surabaya (60231)
Jawa Timur, Indonesia

+62 31 8283 180
+62 31 8283 183
info@ptpjb.com

www.ptpjb.com